

Creating New Growth Landscape for Sustainable Profitability



Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Bank, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi Bank pada masa mendatang serta lingkungan bisnis di mana Bank menjalankan kegiatan usaha. Bank tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya ini akan memberikan hasil yang diharapkan.

Laporan tahunan ini memuat kata "Bank," "Bank Muamalat," dan "Bank Muamalat Indonesia (BMI)" yang didefinisikan sebagai PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perbankan syariah. Adakalanya kata "Perusahaan" dan "Perseroan" juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Bank Muamalat Indonesia Tbk secara umum.

Laporan ini disajikan dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Angka pada tabel dan grafik dalam laporan ini menggunakan notasi dalam bahasa Indonesia. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di situs resmi Bank Muamalat Indonesia yaitu www.bankmuamalat.co.id.

Disclaimer and Limitation of Liability

This annual report discloses the financial statements, results of operations, projections, plans, strategies, policies, and objectives of the Bank, which are classified as forward-looking statements in the implementation of the prevailing regulations, except for historical matters. These statements involve potential risks, uncertainties, and may materially differ in their actual developments from those reported here in.

The prospective statements in this annual report are prepared on the basis of various assumptions regarding the current and future conditions of the Bank as well as the business environment in which the Bank conducts its business. The Bank does not guarantee that these documents whose validity have been ascertained will bring expected results.

The annual report contains the words "the Bank," "Bank Muamalat," and "Bank Muamalat Indonesia (BMI)" which are defined as PT Bank Muamalat Indonesia Tbk engaged in sharia banking activities. Oftentimes, the word "Company" is also used for ease of reference to address PT Bank Muamalat Indonesia Tbk in general.

The report is presented in two languages, Bahasa Indonesia and English, using the easily readable font type and size and with good quality prints. Figures in tables and graphs in this report use Indonesian notation. The Annual Report is available and downloadable from Bank Muamalat Indonesia's official website www.bankmuamalat.co.id.

Keberlanjutan Tema

Theme Continuity



2021

Ketangguhan dan Sinergi Menuju Masa Depan yang Lebih Cerah

Resilience and Synergy towards a Brighter Future

Tahun 2021 merupakan tahun yang sangat penting bagi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Bank berhasil meningkatkan modalnya sebesar Rp1 triliun yang disuntik oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui mekanisme *right issue*. Pada tahun 2022, BPKH menyeter tambahan modal sebesar Rp2 triliun melalui penerbitan instrumen subordinasi.

Injeksi modal dari BPKH tersebut membuat permodalan Bank semakin kuat dan tangguh, seperti ditunjukkan melalui rasio kecukupan modal yang meninggi. Dana tersebut akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan yang akan dapat memperbaiki rentabilitas Bank.

Kehadiran BPKH sebagai pemegang saham mayoritas Bank sekaligus membuka peluang terciptanya sinergi yang positif. Dengan demikian, peluang Bank untuk berkembang ke depan akan semakin terbuka demi menatap masa depan yang lebih cerah.

2021 is a milestone year for PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. The Bank succeeded in strengthening its capital by a capital injection of Rp1 trillion from the Hajj Financial Management Agency (BPKH) through a rights issue mechanism. In early 2022, BPKH deposited additional capital of IDR2 trillion through the issuance of subordinated instruments.

The capital injection from BPKH made the Bank's capital stronger and more resilient, as indicated by the higher capital adequacy ratio. The funds will be used for disbursement of financing that expected to improve the profitability of the Bank.

The presence of BPKH as the majority shareholder of the Bank also opens up opportunities for the creation of positive synergies. Thus, going forward, the Bank will have more opportunities to grow and develop toward a brighter future.



2022

Memperkuat Kapabilitas dan Sinergi untuk Mendorong Ekspansi Bisnis

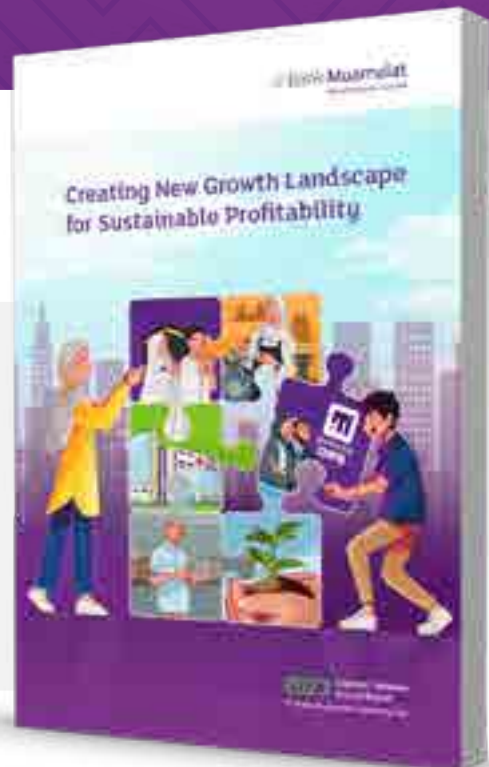
Strengthening Capabilities and Synergy to Accelerate Business Expansion

Pada tahun 2022, pertumbuhan bisnis Bank Muamalat mulai menemukan momentumnya kembali, menyusul rampungnya proses peningkatan modal melalui PMHMETD dan penerbitan sukuk. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemegang saham pengendali memperkuat permodalan Bank melalui *rights issue* dan penerbitan sukuk subordinasi, total senilai Rp3 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2022, Bank Muamalat terus memperkuat kapabilitas dan sinergi, memperluas ekspansi bisnis dengan menggencarkan layanan perbankan ke ekosistem haji dan umroh serta berbagai sektor di ekosistem halal/Syariah, dan berhasil membukukan peningkatan kinerja yang signifikan dari tahun sebelumnya.

In 2022, Bank Muamalat's business growth have begun to regain its momentum, following the completion of the capital increase process through PMHMETD and sukuk issuance. The Hajj Financial Management Agency (BPKH) as the controlling shareholder also strengthened the Bank's capital through a rights issue and issuance of subordinated sukuk, totaling Rp3 trillion. Until the end of 2022, Bank Muamalat continues to strengthen its capabilities and synergies, expanding its business by intensifying banking services to the Hajj and Umrah ecosystems as well as various sectors in the halal/Sharia ecosystem, and succeeded to book a significant improvement in performance from the previous year.

2023

Creating New Growth Landscape for Sustainable Profitability



Sepanjang tahun 2023, Bank Muamalat terus mendorong momentum pertumbuhan yang telah mulai bergulir dari tahun sebelumnya, melalui percepatan pertumbuhan bisnis yang sehat dan peningkatan produktivitas. Penerapan strategi *business refocusing* menempatkan fokus pada segmen ritel, terutama layanan perbankan konsumen untuk nasabah individu, melalui segmen *enterprise banking* (ekosistem haji, institusi Islam dan Syariah) sebagai *entry gate*. Selanjutnya, layanan perbankan konsumen juga didukung oleh pengembangan digital banking untuk meningkatkan keterikatan nasabah individu dengan Bank Muamalat.

Berbagai inisiatif strategis tersebut mencerminkan upaya-upaya Bank Muamalat dalam membuka cakrawala pertumbuhan baru guna memastikan pertumbuhan dan profitabilitas yang berkelanjutan ke depan.

Throughout 2023, Bank Muamalat continued to drive the growth momentum that has started rolling from the previous year, through accelerating healthy business growth and increasing productivity. The implementation of a business refocusing strategy places focus on the retail segment, especially consumer banking services for individuals, through the enterprise banking segment (hajj ecosystem, Islamic and Sharia institutions) as the entry gate. Furthermore, consumer banking services are also supported by digital banking development to increase individual customer engagement with Bank Muamalat.

These various strategic initiatives reflect Bank Muamalat's efforts to open new growth horizons to ensure sustainable growth and profitability in the future.

Daftar Isi

Table of Contents



6

Ikhtisar Kinerja 2023 2023 Performance Highlights



24

Laporan Manajemen Management Report



68

Profil Perusahaan Company Profile



172

Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis



226

Fungsi Penunjang Bisnis Business Support Function



338

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance



668

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility



672

Laporan Keuangan 2023 2023 Financial Statements

Keberlanjutan Tema
Theme Continuity

Daftar Isi
Table of Contents

Ikhtisar Kinerja 2023 2023 Performance Highlights

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

Ikhtisar Saham
Stock Highlights

Aksi Korporasi
Corporate Actions

Ikhtisar Obligasi dan Sukuk
Bond and Sukuk Overview

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

Peristiwa Penting
Event Highlights

Laporan Manajemen Management Report

Laporan Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Report

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioner's Report

Dewan Komisaris
Board of Commissioner's

Laporan Direksi
Board of Director's Report

Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior
Board of Directors and Senior
Executive Vice President

Surat Pernyataan Dewan Komisaris
tentang Tanggung Jawab atas
Laporan Tahunan 2023 PT Bank
Muamalat Indonesia Tbk
Statement of the Board of Commissioners
regarding Responsibility for the 2023
Annual Report of PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk

Surat Pernyataan Direksi
tentang Tanggung Jawab atas
Laporan Tahunan 2023 PT Bank
Muamalat Indonesia Tbk
Statement of the Board of Directors
regarding Responsibility for the 2023
Annual Report of PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk

Profil Perusahaan Company Profile

Identitas Perusahaan
Company Identity

Riwayat Singkat
Company Identity

Logo Perusahaan
The Company's Logo

Jejak Langkah
Milestones

Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Value

Bidang Usaha
Line of Business

Produk dan Layanan
Products and Services

2 Wilayah Operasional
Operational Area

4 Peta Jaringan Bisnis dan
Wilayah Operasi
Map of Business Network and
Operating Areas

Struktur Organisasi
Organization Structure

8 Komite Level Komisaris
Board of Commissioners
Level Committee

11 Komite Level Direksi
Board of Directors Level Committees

12 Profil Dewan Pengawas Syariah
Profile of the Sharia Supervisory Board

13 Profil Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioners

14 Profil Direksi dan Pejabat
Eksekutif Senior
Profile of the Board of Directors and
Senior Executive Officers

17 Profil Pejabat Eksekutif
Profile of Executive Officers

26 Statistik Karyawan
Employee Statistics

33 Informasi Pemegang Saham Utama
dan Pengendali
Information on Major and Controlling
Shareholders

34 Kronologi Pencatatan Saham
Share Listing Chronology

45 Kronologi Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Listing of
Other Securities

46 Struktur Grup Perusahaan
Company Group Structure

66 Profil Entitas Anak dan Entitas Asosiasi
Profile of Subsidiaries and Associates

Daftar Entitas Anak dan Asosiasi
List of Subsidiaries and Associates

Kantor Akuntan Publik
Public Accounting Office

167 Nama dan Alamat Lembaga serta
Profesi Penunjang Pasar Modal
Name and Address of Capital Market
Supporting Institutions and Professionals

Keanggotaan Asosiasi
Membership in Associations

Informasi pada Website Perusahaan
Information on the Company's Website

Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

70 Tinjauan Ekonomi
Economic Overview

72 Tinjauan Industri Perbankan
Banking Industry Overview

75 Tinjauan Posisi Bank Muamalat
Indonesia di Industri Perbankan
Overview of Bank Muamalat
Indonesia Position in the
Banking Industry

76 Tinjauan Kinerja per Segmen Usaha
Performance Overview by Business
Segment

78 Tinjauan Kinerja Keuangan
Financial Performance Overview

Fungsi Penunjang Bisnis

Business Support Function

Sumber Daya Manusia Human Capital	228
Teknologi Informasi Information Technology	248
Manajemen Risiko Risk Management	259

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	340
Komitmen dan Kebijakan Penerapan Implementation Commitment and Policy	342
Peningkatan Kualitas <i>Good Corporate Governance</i> Tahun 2024 Improvement of Good Corporate Governance Quality in 2024	349
Penilaian Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Assessment of Good Corporate Governance Implementation	351
Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies	357
Struktur dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Corporate Governance Structure and Mechanism	375
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	378
Informasi Pemegang Saham Utama/Pengendali Information on Majority/Controlling Shareholders	402
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	403
Dewan Komisaris Board of Commissioners	415
Komisaris Independen Independent Commissioners	431
Direksi Board of Directors	435
Hubungan Afiliasi antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Affiliated Relationships between Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Majority and/or Controlling Shareholders	454
Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Policy on Disclosure of Information on Share Ownership	456
Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi Diversity Policy of the Board of Commissioners and Directors	457
Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors	461

Nominasi dan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Nomination and Remuneration of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, and the Board of Directors	470
Rapat Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Meeting of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, and the Board of Directors	475
Komite Audit Audit Committee	502
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	515
Komite Pemantau Risiko Risk Oversight Committee	526
Komite Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Committee	536
Komite di Bawah Direksi Committees under the Board of Directors	543
Komite Pengarah Teknologi Informasi Information Technology Steering Committee	544
Asset & Liability Committee (ALCO) Asset & Liability Committee (ALCO)	549
Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	565
Komite Sumber Daya Manusia Human Capital Committee	572
Komite Kebijakan Pembiayaan Financing Policy Committee	577
Komite Bisnis Business Committee	581
Komite Pembiayaan Financing Committee	586
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	620
Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Internal Audit Work Unit (IAU)	624
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	631
Audit Eksternal External Audit	637
Sistem Manajemen Risiko Risk Management System	638
Satuan Kerja Kepatuhan Compliance Unit	639
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Anti Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML & CFT)	644
Perkara Penting Important Cases	646
Sanksi Administratif Administrative Sanction	648
Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Data and Information	648
Kode Etik Perusahaan Corporate Code of Conduct	652

Kebijakan Antikorupsi/ <i>Fraud</i> dan Sosialisasinya Anti-Corruption/ <i>Fraud</i> Policy and Its Socialization	654
Pengendalian Gratifikasi Gratuity Control	658
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Perusahaan Transparency of the Company's Financial and Non-Financial Conditions	661
Pembelian Kembali Saham dan Obligasi Bank Muamalat Indonesia Buy Back of Bank Muamalat Indonesia Shares and Bonds	662
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik Provision of Funds for Social and Political Activities	662
Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Legal Lending Limit (LLL)	662
Kebijakan Perlindungan Nasabah Customers' Protection Policy	663
Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	664
Kebijakan Pencegahan <i>Insider Trading</i> Insider Trading Prevention Policy	666
Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya Non-Halal Income and Its Use	666

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance Highlights	670
Laporan Keuangan 2023 2023 Financial Statements	672

Referensi Silang

Laporan Tahunan 2023

Annual Report Cross Reference 2023

Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Attachment Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Reports for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units	851
Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik SEOJK Reference No. 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Public Company	860



Ikhtisar Kinerja 2023

2023 Performance Highlights

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights	8
Ikhtisar Saham Stock Highlights	11
Aksi Korporasi Corporate Actions	12
Ikhtisar Obligasi dan Sukuk Bond and Sukuk Overview	13
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	14
Peristiwa Penting Event Highlights	17





Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

IKHTISAR POSISI KEUANGAN

Financial Position Highlights

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, except otherwise stated)

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019	Description
Total Aset	66.953	61.364	58.899	51.241	50.556	Total Assets
Investasi pada Surat Berharga	30.525	27.855	26.936	12.185	11.348	Investments in Marketable Securities
Pembiayaan	22.464	18.821	18.041	29.077	29.867	Financing
Giro	6.096	4.878	6.148	4.106	3.663	Demand Deposits
Tabungan	16.642	16.122	16.033	14.543	14.781	Savings
Deposito	24.822	25.143	24.689	22.776	21.913	Time Deposits
Dana Pihak Ketiga	47.559	46.143	46.871	41.425	40.357	Third-party Funds
Total Liabilitas	61.737	56.162	54.913	47.275	46.618	Total Liabilities
Total Ekuitas	5.216	5.202	3.986	3.967	3.937	Total Equity
Investasi pada Entitas Asosiasi-Neto	322	347	347	408	408	Investments in Associates-Net

IKHTISAR LABA-RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Summary of Comprehensive Profit-Loss and Income

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, except otherwise stated)

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019	Description
Jumlah Pendapatan Bank sebagai Mudharib	2.153	1.764	2.140	2.432	2.780	Revenue From Fund Management by Bank as Mudharib
Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(1.949)	(1.435)	(1.387)	(1.610)	(2.397)	Share on Return of Temporary Syirkah Funds
Hak Bagi Hasil Milik Bank	205	330	753	822	383	Bank's Share in Profit Sharing
Pendapatan Operasional Lainnya	905	1.098	584	575	647	Other Operating Revenue
Beban Operasional Lainnya	(1.208)	(1.230)	(1.326)	(1.345)	(1.550)	Other Operating Expenses
Pembalikan (Beban) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Non Produktif	94	(130)	(16)	(64)	507	Provision for (Reversal of) Impairment Losses of Earning and Non Earning Assets
Laba (Rugi) Usaha	18	98	19	16	20	Income (Loss) Operations
Pendapatan (Beban) Non Operasional-Neto	(4)	(46)	(7)	(1)	7	Non-Operating (Expense)- Net
Laba sebelum Beban Pajak	14	52	13	15	26	Income Before Income Tax
Laba Bersih	13	27	9	10	16	Net Income
Jumlah Laba Komprehensif Lain Bersih Setelah Pajak	6	0	10	19	-	Total Other Comprehensive Income Net of Tax
Total Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	19	27	20	30	16	Total Comprehensive Income for the Year
Laba (Rugi) Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:						Income (Loss) for the Year Attributable to
Pemilik Entitas Induk	19	27	9	10	16	Parent Entity Owner
Kepentingan Non Pengendali	-	-	-	-	-	Non-Controlling Interests



(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, except otherwise stated)

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019	Description
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:						Comprehensive Income (Loss) for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	19	27	19	10	16	Parent Entity Owner
Kepentingan Non Pengendali	-	-	-	-	-	Non-Controlling Interests
Laba per Saham Dasar (Rp dalam nilai penuh)	0,40	0,80	0,87	0,98	1,60	Basic Earnings per Share (Rp In full amount)

RASIO KEUANGAN PENTING

Important Financial Ratios

(dalam %, kecuali dinyatakan lain)

(in %, except otherwise stated)

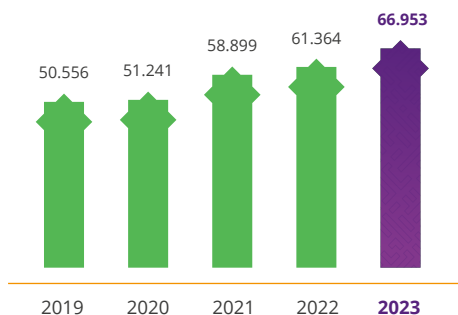
Uraian	2023	2022	2021	2020	2019	Description
Return on Assets (ROA)	0,02	0,09	0,02	0,03	0,05	Return on Assets (ROA)
Return on Equity (ROE)	0,28	0,53	0,20	0,29	0,45	Return on Equity (ROE)
Laba (Rugi) Usaha terhadap Pendapatan	0,44	0,94	0,35	0,33	0,48	Profit (Loss) toward Income
Laba (Rugi) terhadap Aset	0,02	0,04	0,02	0,02	0,03	Profit (Loss) to Assets
Laba (Rugi) terhadap Ekuitas	0,25	0,51	0,22	0,25	0,41	Profit (Loss) to Equity
Margin Pendapatan Bersih	0,37	0,66	1,59	1,94	0,83	Net Income Margin
Pembiayaan Bermasalah Bersih	0,66	0,86	0,08	3,95	4,30	Non Performing Financing Net
Rasio Kecukupan Modal	29,42	32,70	23,76	15,21	12,42	Capital Adequacy Ratio
Financing to Deposits Ratio	47,14	40,63	38,33	69,84	73,51	Financing to Deposits Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	1.183,51	1.079,63	1.377,52	1.191,79	1.184,05	Liabilities to Equity Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Aset	92,21	91,52	97,23	92,26	92,21	Liabilities to Assets Ratio
Rasio Lancar	13,26	17,31	15,67	8,97	8,25	Current Ratio
Aset Lancar terhadap Total Aset	10,75	13,78	12,99	7,93	7,22	Current Assets toward Total Assets
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	99,41	96,62	99,29	99,45	99,50	Operating Expenses to Operating Revenue
Cost to Income Ratio (CIR)	97,31	92,36	96,91	98,27	98,50	Cost to Income Ratio (CIR)
Giro Wajib Minimum (GWM)	7,50	7,50	3,00	3,24	4,82	Statutory Reserves
Posisi Devisa Netto	0,23	0,46	0,15	0,15	0,21	Net Open Position
Persentase Pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)						Percentage of Exceeding the Maximum Limit for Distribution of Funds (MLDF)
Pihak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Related Parties
Pihak Tidak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non-related Parties
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	29,42	32,70	23,76	15,21	12,42	Minimum Capital Adequacy Requirement (MCAR)



Total Aset

Total Assets

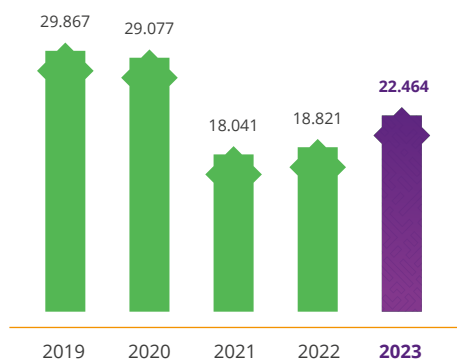
dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah



Pembiayaan

Financing

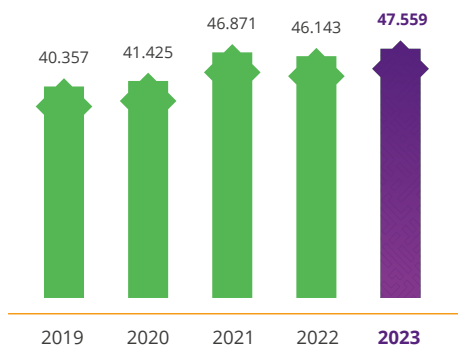
dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah



Total Dana Pihak Ketiga

Total Third-Party Funds

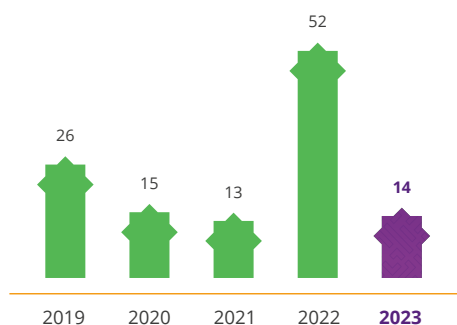
dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah



Laba Sebelum Beban Pajak

Profit/Income Before Tax

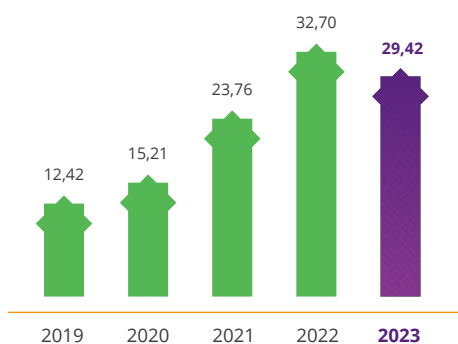
dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah



Rasio Kecukupan Modal

Capital Adequacy Ratio

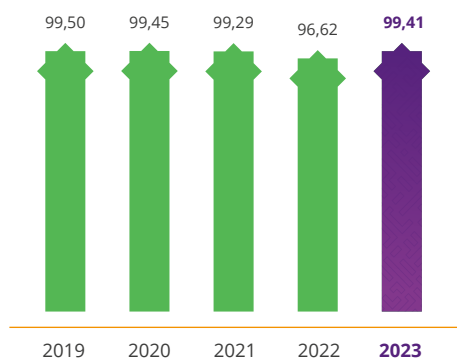
persentase (%) | percentage (%)



Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Operating Expenses to Operating Income

persentase (%) | percentage (%)





Ikhtisar Saham

Stock Highlights

Bank Muamalat Indonesia merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya hingga saat ini belum tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian, bukti kepemilikan saham Bank hingga saat ini masih dalam bentuk sertifikat saham atau warkat saham, yang disebut juga dengan Surat Kolektif Saham (SKS) yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom.

Hingga diterbitkannya laporan ini, struktur saham PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Bank Muamalat Indonesia is a publicly traded company whose shares are not yet listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) up to this point. Therefore, evidence of ownership of the bank's shares is still in the form of stock certificates or stock warrants, also known as Collective Share Certificates (SKS), issued by the Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom.

Until the publication of this report, the stock structure of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk is as follows:

Keterangan	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan Ownership		Description
		Jumlah Nominal Total Amount (Rp)	Persentase Percentage (%)	
Modal Dasar Authorized Capital				
Saham Seri A (nilai nominal Rp300)	551.099.450	165.329.835.000	1,0	A Series Shares (nominal value of Rp300)
Saham Seri B (nilai nominal Rp150)	28.231.134.434	4.234.670.165.100	50,9	B Series Shares (nominal value of Rp150)
Saham Seri C (nilai nominal Rp45)	26.666.666.667	1.200.000.000.015	48,1	C Series Shares (nominal value of Rp45)
Jumlah	55.448.900.551	5.600.000.000.115	100,0	Total
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-Up Capital				
Jumlah Saham Seri A	551.099.450	165.329.835.000	1,7	Total A Series Shares
Jumlah Saham Seri B	6.254.035.440	938.105.316.000	18,7	Total B Series Shares
Jumlah Saham Seri C	26.540.026.072	1.194.301.173.240	79,6	Total C Series Shares
Jumlah	33.345.160.962	2.297.736.324.240	100,0	Total
Saham dalam Portepel Shares in Portfolio				
Saham Seri A (nilai nominal Rp300)	-	-	-	A Series Shares (nominal value of Rp300)
Saham Seri B (nilai nominal Rp150)	21.977.098.994	3.296.564.849.100	99,4	B Series Shares (nominal value of Rp150)
Saham Seri C (nilai nominal Rp45)	126.640.595	5.698.826.775	0,6	C Series Shares (nominal value of Rp45)
Jumlah	22.103.739.589	3.302.263.675.875	100,0	Total

Bank telah melakukan upaya untuk memenuhi Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, terkait kewajiban pencatatan efek bersifat ekuitas di Bursa Efek, diantaranya dengan upaya pemenuhan syarat pencatatan saham sesuai dengan Peraturan Bursa I-A.

Hingga disampaikan laporan ini, Bank terus melanjutkan komitmen untuk pemenuhan syarat pencatatan saham tersebut dengan perkembangan yang senantiasa dikoordinasikan dengan regulator pengawas pasar modal serta pengawas perbankan.

The Bank has made efforts to comply with Article 63 of Financial Services Authority Regulation Number 3 of 2021 regarding the Conduct of Activities in the Capital Market Sector, related to the obligation to list equity securities on the Stock Exchange, including efforts to fulfill the requirements for listing shares in accordance with Exchange Regulation I-A.

As of the submission of this report, the bank continues its commitment to fulfilling the requirements for listing shares with developments that are constantly coordinated with the capital market supervisory regulator and banking supervisor.



Aksi Korporasi

Corporate Actions

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 13 November 2023, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham untuk melaksanakan penggabungan saham (*Reverse Stock Split*/RSS) dengan menggunakan rasio 3:2 atau 3 (tiga) saham lama menjadi 2 (dua) saham baru. Dalam menentukan rasio penggabungan saham tersebut, BMI telah mempertimbangkan hasil penilaian saham yang dilakukan oleh penilai independen. Dengan rasio tersebut, maka nilai nominal saham akan berubah sebagai berikut:

- Seri A dari Rp200 (dua ratus rupiah) per saham menjadi Rp300 (tiga ratus rupiah) per saham;
- Seri B dari Rp100 (seratus rupiah) per saham menjadi Rp150 (seratus lima puluh rupiah) per saham;
- Seri C dari Rp30 (tiga puluh rupiah) per saham menjadi Rp45 (empat puluh lima rupiah) per saham.

Aksi korporasi berupa penggabungan saham ini juga mengubah jumlah saham yang diterbitkan dan disetor, dari 50.017.741.442 (lima puluh miliar tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua) saham menjadi 33.345.160.962 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua) saham.

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on 13 November 2023, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) obtained the approval of the shareholders to conduct a Reverse Stock Split (RSS) by use of the 3:2 ratio, or 3 (three) previous shares into 2 (two) new shares. In determining the RSS ratio, BMI took into account the results of the share assessment conducted by an independent assessor. With this ratio, the nominal value of the shares will change as follows:

- A Series from Rp200 (two hundred rupiah) per share to Rp300 (three hundred rupiah) per share;
- B Series from Rp100 (one hundred rupiah) per share to Rp150 (one hundred and fifty rupiah) per share;
- C Series from Rp30 (thirty rupiah) per share to Rp45 (forty-five rupiah) per share.

This reverse stock split corporate action also changed the number of shares issued and paid-up from 50,017,741,442 (fifty billion seventeen million seven hundred forty-one thousand four hundred forty-two) shares to 33,345,160,962 (thirty-three billion three hundred forty-five million one hundred sixty thousand nine hundred sixty-two) shares.



Ikhtisar Obligasi dan Sukuk

Bond and Sukuk Overview

Hingga akhir tahun 2023, sukuk Bank Muamalat Indonesia yang belum jatuh tempo disampaikan dalam tabel di bawah ini:

Until the end of the year 2023, Bank Muamalat Indonesia's sukuk, which has not matured, is presented in the table below:

Nama Efek Name of Securities	Tahun Penerbitan Efek Year of Issuance	Nilai Pokok (Rp) Principal Value (Rp)	Nisbah Pemegang Efek (%) Shareholder Ratio (%)	Jatuh Tempo Maturity Date	Peringkat Efek Securities Rating
Sukuk Subordinasi Mudharabah 2022 Mudharabah Subordinated Sukuk 2022	2022	2.000.000.000.000	58,64	15 Maret 2032 March 15, 2032	Non-rated
Sukuk Mudharabah 2018 Sukuk Mudharabah 2018	2018	1.600.000.000.000	-	29 Juni 2038 June 29, 2038	Non-rated
Sukuk Mudharabah Bank Muamalat Indonesia 2021 Sukuk Mudharabah Bank Muamalat Indonesia 2021	2021	2.440.856.000.000	50,72	15 November 2041 November 15, 2041	idA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) idA+ from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)



Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

Penghargaan Awards

25 Januari | January 2023

Infobank 6th Satisfaction Loyalty Engagement 2023 Infobank



1



2



3

Predikat | Predicate

1. The Best Sharia Bank in Customer Loyalty
2. The Best Sharia Bank in Marketing Engagement
3. The Strongest Customer Engagement Sharia Bank

17 Februari | February 2023

The Economics 2023 The Economics



Predikat | Predicate Third Industry Sharia

21 Maret | March 2023

Baznas Award 2023 BAZNAS RI



Predikat | Predicate Bank Penyedia Layanan Pembayaran Zakat Terbaik BAZNAS RI BAZNAS RI Best Zakat Payment Service Provider Bank

5 April | April 2023

Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award VIII 2023

Economic Review



Predikat | Predicate 2nd The Best Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication

12 April | April 2023

Infobank & Isentia 12th Digital Brand Awards 2023 Infobank



1



2



3



4

Predikat | Predicate

1. The Best Deposito Sharia Bank (KBMI) 1 Asset Class >25T
2. The Best Mortgage Loan Sharia Bank (KBMI) 1 Asset Class 25T
3. The Best Saving Account Sharia Bank (KBMI) 1 Asset Class 25T
4. The Best Sharia Bank (KBMI) 1 Asset Class 25T



Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Function



Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan 2023
2023 Financial Statements

20 Juni | June 2023

Infobank & MRI 20th Banking Service Excellence Award 2023 Infobank & MRI



1



2



3



4



5



6

Predikat | Predicate

1. The 2nd Best Opening Account Via Mobil Application/ Mobile Browser Sharia Conventional Bank
2. The 2nd Best Chatbot Sharia Conventional Bank
3. The 2nd Best Live Chat Sharia Conventional Bank
4. The 2nd Best Social Media Sharia Conventional Bank
5. The 2nd Best Email Service Sharia Conventional Bank
6. The 2nd Best Mobile Banking Sharia Conventional Bank

7 Juli | July 2023

Kontan SPEX2 DX Award Executing Digital Transformation Kontan



Predikat | Predicate

The Best Company in Executing Business Turnaround

10 Oktober | October 2023

GRC & Performance Excellence Award 2023 Business News



Predikat | Predicate

The Best GRC for Corporate Governance & Compliance

19 Oktober | October 2023

Top Business Top Human Capital Awards 2023 Majalah Top Business & Lembaga Kajian Nawacita (LKN)



Predikat | Predicate

Top Human Capital Awards #Star 4



11 September | September 2023

Stellar Workplace Award 2023
Kontan & GML Performance Consulting



Predikat | Predicate
Stellar Workplace Recognition in Employee Satisfaction

29 November | November 2023

Indonesia Best Digital Finance Awards 2023
Warta Ekonomi



Predikat | Predicate
Best Digital Finance for Ease of Non-Cash Transaction Features

5 Desember | December 2023

Infobank Top 100 CEO & The Next Leader Forum 2023
Kontan & GML Performance Consulting



1



2

Predikat | Predicate
1. The Inspiration From Successful Leaders in Crisis "Indra Falatehan President Director Bank Muamalat"
2. The Inspiration From Successful Leader in Crisis "Suhendar Director of Finance and Strategy of Bank Muamalat"

14 Desember | December 2023

Investor Trust - Digital Banking Awards
Investor Trust



Predikat | Predicate
Dimensi Manajemen Risiko Bank Syariah
Risk Management Dimension of Sharia Bank

Sertifikasi
Certification

Nama Sertifikasi Name of Certification	Deskripsi Sertifikasi Description of Certification	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi Certification-Presenting Institution	Masa Berlaku Validity Period
ISO 37001 : 2016	Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System Certification	PT TUV SUD Indonesia	28 November 2026 November 28, 2026



Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Function



Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan 2023
2023 Financial Statements

Peristiwa Penting

Event Highlights

Februari February



1 Februari | February

Hajatan BPKH Pindah Rumah

Sebagai bentuk dukungan dan kolaborasi dengan BMI, BPKH resmi berpindah kantor ke Gedung Muamalat Tower.

BPKH New Office

As a form of support and collaboration with BMI, BPKH officially moved its office to the Muamalat Tower Building.



16 Februari | February

Sinergi BMI-BPKH

Ceremony penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sinergi Layanan Digital Banking.

BMI-BPKH Synergy

Signing Ceremony of the Cooperation Agreement on Digital Banking Services Synergy.

Maret March



20 Maret | March

Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas Insan Cerdas Tanpa Fraud

Seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi bersama dengan rekanan BMI menandatangani Pakta Integritas Anti-Fraud.

Declaration and Signing of the Integrity Pact of Smart People Without Fraud

All members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, together with BMI partners, signed the Anti-Fraud Integrity Pact.



April April



14 April | April

Safari Haji BPKH dan BMI

Jajaran Direksi bersama dengan BPKH dan DPR RI serta KBIHU mengadakan "Safari Haji" dalam rangka peningkatan layanan bagi pendaftar haji Indonesia di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

BMI-BPKH Synergy

Members of the Board of Directors, together with BPKH and the House of Representatives of the Republic of Indonesia, as well as KBIHU, conducted the "Haji Safari" as part of the efforts to improve services for Indonesian Hajj registrants in the City of Bukittinggi, West Sumatera.

Mei May



2 Mei | May

Halal bi Halal BPKH & BMI

Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh karyawan BMI bersama dengan BPKH mengadakan halal bi halal di Lobby Gedung Muamalat Tower.

Halal bi Halal BPKH & BMI

Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, together with all BMI employees and BPKH, held the Halal bi Halal gathering at the lobby of the Muamalat Tower Building.



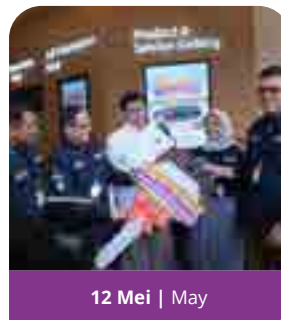
11 Mei | May

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Bank Muamalat mengadakan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Ballroom BJ Habibie, Gedung Muamalat Tower.

Annual General Meeting of Shareholders

Bank Muamalat held its Annual General Meeting of Shareholders at the BJ Habibie Ballroom, Muamalat Tower Building.



12 Mei | May

Peluncuran Berkah Seru

BMI mengadakan program "Berkah Seru Muamalat" bagi nasabah pengguna kartu Shar-e Debit Muamalat. Program ini merupakan wujud apresiasi BMI kepada nasabah yang selalu setia bertransaksi dengan Bank.

Launching of Exciting Blessing

BMI conducted the "Muamalat Exciting Blessing" program for Muamalat Shar-e Debit card-using customers. The program is a form of BMI's appreciation for customers who have been loyal in their transactions with the Bank.



24 Mei | May

Kunjungan Embarkasi Haji

Direktur Utama BMI mengunjungi embarkasi haji Bekasi, Kertajati, dan Surabaya.

Haji Embarkation Visit

BMI President Director visited the hajj embarkation sites in Bekasi, Kertajati, and Surabaya.



Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Function



Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan 2023
2023 Financial Statements

Juni June



8 Juni | June

Kajian Online Muamalat Prioritas

Jajaran Management Bank Muamalat bersama nasabah prioritas mengadakan kajian online dengan pemateri dari Ustadz Salim Fillah.

Muamalat Priority Online Learning

Management members of Bank Muamalat, together with its priority customers, held an online study session with speaker Ustadz Salim Fillah.



12 Juni | June

Penerima Pembayaran Sertifikat Halal

Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bank Muamalat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Kantor BPJPH. Bank Muamalat resmi ditunjuk oleh BPJPH sebagai bank penerima pembayaran sertifikasi halal.

Recipient of Halal Certification Payments

The signing of a cooperation agreement between Bank Muamalat and Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH) at the BPJPH Office. Bank Muamalat was officially appointed by BPJPH as the bank to receive payments for halal certification.

Juli July



13, 15 & 29 Juli | July

Safari Haji BPKH & BMI

Jajaran Direksi bersama dengan BPKH dan DPR RI serta KBIHU mengadakan safari haji dalam rangka peningkatan layanan bagi pendaftar haji Indonesia di Kota Banda Aceh, Bandar Lampung, dan Cianjur.

BPKH & BMI Hajj Safari

Members of the Board of Directors, together with BPKH and the House of Representatives of the Republic of Indonesia, as well as KBIHU, held the hajj safari event in an effort to improve services for Indonesian haj registrants in the cities of Banda Aceh, Bandar Lampung, and Cianjur.



Agustus August



3 Agustus | August

Peluncuran Program Customer Get Customer
Bank Muamalat meluncurkan program "Customer Get Customer" yang dihadiri oleh jajaran Direksi BMI. Penyampaian tausiah oleh Ustaz Maulana bersama *influencer* Ari K. Untung.

Launching of Customer Get Customer Program
Bank Muamalat launched the "Customer Get Customer" program, attended by members of the BMI Board of Directors. On this occasion, tausiah was delivered by Ustaz Maulana with *influencer* Ari K. Untung.



5 Agustus | August

Forum Silaturahmi Haji
Jajaran Management BMI bersama BPKH, KBIHU, dan Kemenag mengadakan Forum Silaturahmi Haji dengan tema "Kemudahan Pendaftaran Haji bagi Diaspora Indonesia", yang bertempat di Kuala Lumpur Malaysia.

Hajj Gathering Forum
Members of BMI Management, BPKH, KBIHU, and the Ministry of Religion held the Hajj Gathering Forum with the theme "Facility for the Convenience of Hajj Registration for the Indonesian Diaspora" in Kuala Lumpur, Malaysia.



14 Agustus | August

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
BMI menjalin kerja sama dengan PT Sharia Multifinance Astra (AMITRA) dalam rangka pemberian referensi fasilitas pembiayaan syariah.

Signing of Cooperation Agreement
BMI signed a cooperation agreement with PT Sharia Multifinance Astra (AMITRA) for the referral provision of the Sharia financing facility.



27 Agustus | August

Fun Walk Event
Seluruh karyawan BMI dan BPKH mengadakan event "Fun Walk" dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke-77.

Fun Walk Event
All employees of BMI and BPKH held the "Fun Walk" event in commemoration of the 77th Independence Day of the Republic of Indonesia.

September September



13 September | September

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

BMI melakukan kerja sama sindikasi syariah dengan PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) untuk menyalurkan pembiayaan sebesar USD50 Juta.

Signing of Cooperation Agreement

BMI entered into a sharia syndication cooperation agreement with PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) to disburse financing of a total of USD50 million.



Oktober October



26 Oktober | October

Bank Muamalat Ditunjuk sebagai Bank Penyalur Gaji

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ditunjuk oleh Kementerian Keuangan sebagai Bank Penyalur Gaji (BPG) atau payroll bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Acara penunjukan tersebut dihadiri oleh Ditjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan, Komisaris Utama Independen serta Direktur Utama Bank Muamalat.

Bank Muamalat Appointed as Salary Disbursement Bank

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk was appointed by the Ministry of Finance as the Salary or Payroll Disbursement Bank for State Civil Apparatus (ASN). The event was attended by officials from the Directorate General of State Treasury of the Ministry of Finance, the Independent President Commissioner, as well as the President Director of Bank Muamalat.

November November



6 November | November

Penandatanganan Pembiayaan Sindikasi

Bank Muamalat memimpin pembiayaan sindikasi untuk PT INKA (Persero) sebesar Rp2,5 triliun dalam rangka mendukung pembangunan nasional, khususnya di sektor transportasi massal.

Signing of Syndication Financing

Bank Muamalat led the syndication financing for PT INKA (Persero) in the amount of Rp2.5 trillion in the context of supporting national development, specifically for the mass transportation sector.



13 November | November

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Bank Muamalat menyelenggarakan RUPSLB di Ballroom BJ Habibie Gedung Muamalat Tower.

Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

Muamalat held its EGMS at the BJ Habibie Ballroom of the Muamalat Tower Building.



17 November | November

Penandatanganan Kerja Sama

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menjalin kerja sama dengan PT Pegadaian dalam lingkup pendaftaran porsi haji reguler. Dengan adanya kerja sama ini, masyarakat dapat melakukan pendaftaran porsi haji reguler melalui jaringan kantor Pegadaian di seluruh Indonesia.

Signing of Cooperation Agreement

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk signed a cooperation agreement with PT Pegadaian (Pawnshop) within the scope of registration for the regular hajj package portion. Under this cooperation, registration for the regular hajj package may be carried out through the Pegadaian office network throughout Indonesia.



23 November | November

Business Update

Bank Muamalat menyelenggarakan Business Update of Balance Sheet Sharia Financing Products: Salam and IMBT di Hotel JW Marriot Jakarta.

Business Update

Bank Muamalat held its Business Update of Balance Sheet Sharia Financing Products: Salam and IMBT at the JW Marriot Jakarta Hotel.



November November



27 November | November

Produk Anak Hebat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk meluncurkan produk tabungan haji Anak Hebat.

Produk Anak Hebat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk launched the Anak Hebat hajj savings product.

Desember December



14-15 Desember | December

Event BPKH HAJJ EXPO 2023

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menyelenggarakan event BPKH Hajj Expo 2023 yang bertempat di Gandaria City, Jakarta.

BPKH HAJJ EXPO 2023 Event

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk organized the BPKH Hajj Expo 2023 event at Gandaria City, Jakarta.



Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Function



Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan 2023
2023 Financial Statements

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.



Laporan Manajemen

Management Report

Laporan Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board Report	26
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	33
Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioner's Report	34
Dewan Komisaris Board of Commissioner's	45
Laporan Direksi Board of Director's Report	46
Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior Board of Directors and Senior Executive Vice President	64
Surat Pernyataan Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	66
Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	67





Ikhtisar Kinerja 2023
2023 Performance Highlights



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Laporan Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board Report



Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman, Sharia Supervisory Board



Dewan Pengawas Syariah menyampaikan apresiasi kepada manajemen serta seluruh pemangku kepentingan di Bank Muamalat atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik sepanjang tahun 2023. Dengan kerja sama dan dukungan tersebut, Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dalam pandangan kami, pada tahun 2023, manajemen Bank Muamalat telah berupaya dengan baik dalam mengoptimalkan kemampuan serta kekuatan Bank untuk menghasilkan kinerja yang optimal yang didukung dengan tata kelola perusahaan yang baik.

The Sharia Supervisory Board expresses its appreciation to the management and all stakeholders at Bank Muamalat for the positive cooperation that has been established throughout 2023. With this cooperation and support, the Sharia Supervisory Board was able to effectively carry out its duties and functions. We believe that in 2023, Bank Muamalat's management has made significant efforts to optimize the Bank's capabilities and strengths in order to produce optimal performance underpinned by good corporate governance.

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Bismillaahirrohmaanirrohiim*

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Wa Shalatu Wa Salamu 'Ala Nabiyyina Muhammad, Wa 'Ala Aalihi Wa Ashabihi. Amma Ba'du.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Selawat serta salam semoga tercurah untuk baginda Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga dan kerabatnya.

Dalam kesempatan ini, izinkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi untuk tahun buku 2023. Laporan ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atas pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat", "Bank") untuk tahun buku 2023.

Dear Valued Shareholders and Stakeholders,

We thank Allah Subhanahu Wa Ta'ala for His mercy and grace, which have been bestowed upon all of us. May peace and blessings be upon the Prophet Muhammad SAW, along with his family and relatives.

On this occasion, please allow the Sharia Supervisory Board (SSB) to submit a report on implementation of duties and functions for the financial year 2023. This report is part of the information disclosure carried out by the Sharia Supervisory Board regarding supervision of the implementation of sharia principles by PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat," "Bank") for the financial year 2023.



Pelaksanaan pengawasan DPS dibantu oleh Sharia Compliance Officer yang berada dalam Unit Kerja Kepatuhan. Sharia Compliance Officer berfungsi sebagai *liaison officer* dan bertugas secara administratif untuk mendokumentasikan rincian kegiatan kerja DPS dengan baik ke dalam kertas kerja pengawasan.

Kertas kerja tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan kepada Direksi Bank Muamalat Indonesia, DSN-MUI serta Otoritas Jasa Keuangan secara periodik setiap semesternya.

PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH

Bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada kegiatan bisnis dan operasional Bank Muamalat meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit internal syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. Dalam melakukan pengawasannya, Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh 1 (satu) orang *liaison officer* dari Unit Kepatuhan Syariah dengan berkoordinasi dengan fungsi terkait lainnya.

Rincian pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis dan operasional Bank Muamalat pada tahun 2023, antara lain mencakup:

- Pengawasan terhadap Tata Kelola

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah. Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat secara rutin juga menyelenggarakan rapat bersama Direksi dan rapat bersama Dewan Komisaris dalam rangka koordinasi serta melakukan pengawasan atau memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan Prinsip Syariah, termasuk jika ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang menyebabkan keadaan atau berpotensi menyebabkan keadaan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

The Sharia Compliance Officer, who works in the Compliance Work Unit, assists with the implementation of SSB supervision. The Sharia Compliance Officer serves as a liaison officer and has administrative duties, including properly documenting details of SSB work activities in supervisory working papers.

The working paper is then summarized in the Sharia Supervisory Board Supervision Report, which is submitted to the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia, DSN-MUI, and the Financial Services Authority periodically every semester.

SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF SHARIA PRINCIPLES

The Sharia Supervisory Board's supervision of Bank Muamalat's business and operations activities includes the implementation of Sharia Governance, such as sharia risk management, sharia compliance, and integrated sharia internal audit, as well as the Bank's strategic policies related to the implementation of Sharia Principles, in accordance with the provisions of statutory regulations, articles of association, and/or GMS resolutions. In carrying out its supervision, the Sharia Supervisory Board is assisted by 1 (one) liaison officer from the Sharia Compliance Unit, who works in collaboration with other related functions.

Details of the Sharia Supervisory Board's supervision of the implementation of Sharia principles in Bank Muamalat's business and operations activities in 2023 include, among other things:

- Supervision of Governance

The Sharia Supervisory Board has supervised the Board of Directors' follow-up on audit findings or examinations and recommendations from the Bank's internal audit work unit, external auditors, results of Financial Services Authority supervision, and/or results of supervision by other authorities and institutions regarding Sharia Principles implementation. The Sharia Supervisory Board of Bank Muamalat also holds regular meetings with the Board of Directors and the Board of Commissioners in the context of coordinating and carrying out supervision or providing guidance and/or direction to the Board of Directors and Board of Commissioners regarding the implementation of Sharia Principles, including if violations of Sharia Principles are found that cause or have the potential to cause conditions that could affect the continuity of the Bank's business.



- **Pengawasan terhadap Penghimpunan Dana**

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan atas produk penghimpunan dana Bank Muamalat Indonesia dan melakukan kajian atas kesesuaian produk Bank dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan terkait lainnya. Pengawasan tersebut meliputi kajian atas ketentuan, sistem dan prosedur produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh Bank telah sesuai dengan Prinsip Syariah. Dari pengawasan selama tahun 2023, tidak terdapat produk-produk penghimpunan dana Bank yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI.

- **Pengawasan terhadap Penyaluran Dana**

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan atas produk penyaluran dana Bank Muamalat Indonesia dan melakukan kajian atas kesesuaian produk penyaluran dana dengan fatwa DSN-MUI dan peraturan terkait lainnya. Pengawasan tersebut meliputi kajian atas ketentuan, sistem dan prosedur produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh Bank telah sesuai dengan Prinsip Syariah. Dari pengawasan selama tahun 2023, tidak terdapat produk-produk penyaluran dana yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI.

- **Pengawasan terhadap Layanan**

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan atas layanan Bank Muamalat Indonesia dan melakukan kajian atas kesesuaian layanan dengan fatwa DSN-MUI dan peraturan terkait lainnya. Pengawasan tersebut meliputi kajian atas ketentuan, sistem dan prosedur layanan Bank telah sesuai dengan Prinsip Syariah. Dari pengawasan selama tahun 2023, tidak terdapat layanan-layanan Bank yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI.

- **Pengawasan terhadap Usulan Produk/Aktivitas Baru**

Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh *Liasion Officer (Sharia Compliance Officer)* telah melakukan kajian dan pembahasan usulan produk/aktivitas baru sepanjang tahun 2023. Diantaranya adalah KPR dengan pilihan tenor 20 dan 25 tahun, penambahan fitur *paywave* pada Kartu Shar-E Debit, Layanan *Liveness biometric* pada MDIN, Penambahan Fitur *Term Deposit* Harian *Commodity* Murabaha Cabang Kuala Lumpur; dan pembiayaan dengan skema Salam Trade iB.

- **Supervision of Fund Collection**

The Sharia Supervisory Board supervised Bank Muamalat Indonesia's fund collection products and reviewed their compliance with the provisions of the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) and other relevant regulations. This supervision includes a review of the Bank's provisions, systems, and procedures for fund collection products that adhere to Sharia principles. In 2023, no fund collection products were found to be in conflict with the DSN-MUI fatwa.

- **Supervision of Fund Distribution**

The Sharia Supervisory Board supervised Bank Muamalat Indonesia's fund distribution products and reviewed their compliance with the DSN-MUI fatwa and other relevant regulations. This supervision includes a review of the provisions, systems, and procedures for the Bank's fund distribution products that adhere to Sharia principles. In 2023, no fund distribution products were found to be in conflict with the DSN-MUI fatwa.

- **Supervision of Services**

The Sharia Supervisory Board supervised Bank Muamalat Indonesia's services and assessed their compliance with the DSN-MUI fatwa and relevant regulations. This supervision includes an examination of the Bank's provisions, systems, and service procedures that adhere to Sharia principles. In 2023, no Bank services were found to be in conflict with the DSN-MUI fatwa.

- **Supervision of New Product/Activity Proposals**

The Sharia Supervisory Board, with the assistance of the Liaison Officer (Sharia Compliance Officer), has conducted studies and discussions on proposed new products/activities throughout 2023. Among them are Home Ownership Financing (KPR) with a choice of 20 and 25-year tenors, the addition of the paywave feature to Shar-E Debit Cards, biometric Liveness Services on MDIN, the addition of the Commodity Murabaha Kuala Lumpur Branch Daily Term Deposit Feature, and financing through the Salam Trade iB scheme.



Selain itu, sepanjang tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah juga telah melakukan *review* dan/atau *endorsement* terhadap kebijakan dan prosedur Bank Muamalat agar sesuai dengan prinsip syariah, fatwa DSN-MUI dan ketentuan terkait dengan berkoordinasi dengan fungsi Kepatuhan Syariah. Beberapa kebijakan *dan Standard Operational Procedure (SOP)* yang menjadi perhatian DPS, yakni: Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta beberapa prosedur standar Akad Pembiayaan dan *Refinancing*.

Dewan Pengawas Syariah juga menyelenggarakan kegiatan Training Dirasah Islamiyah selama 4 (empat) kali sepanjang tahun 2023. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan arahan dan pemahaman atas prinsip dan ketentuan syariah kepada seluruh jajaran karyawan Bank Muamalat dalam melaksanakan aktivitas kerja sesuai prinsip syariah dan berlandaskan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).

PELAKSANAAN UJI PETIK TAHUN 2023

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan bisnis dan operasional Bank, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan kegiatan Uji Petik. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara berkunjung, mengamati dan/atau melakukan *sharing session* dengan karyawan di beberapa Kantor Cabang Bank Muamalat Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah juga memeriksa dokumen-dokumen transaksi untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah telah terlaksana. Pemeriksaan dilakukan dengan metode uji petik yang dibantu oleh fungsi Kepatuhan Syariah sebagai *liaison officer* Dewan Pengawas Syariah. Melanjutkan metode uji petik tahun sebelumnya, pada tahun 2023, uji petik dilakukan dengan memadukan pemeriksaan secara fisik dan virtual dalam prosesnya.

In addition, in coordination with the Sharia Compliance Unit, the Sharia Supervisory Board reviewed and/or endorsed Bank Muamalat's policies and procedures throughout 2023 to ensure that they are in accordance with Sharia principles, DSN-MUI fatwas, and relevant provisions. SSB is concerned with several policies and Standard Operational Procedures (SOP), including those for implementing anti-money laundering programs, counter-terrorism financing, and counter-proliferation financing of weapons of mass destruction, as well as several standard procedures for Financing and Refinancing Agreements.

The Sharia Supervisory Board also conducted Dirasah Islamiyah Training activities 4 (four) times throughout 2023. This activity was held to provide guidance and understanding of Sharia principles and provisions to Bank Muamalat employees at all levels in carrying out work activities in accordance with Sharia principles and based on the Fatwa of the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (MUI).

IMPLEMENTATION OF SAMPLING TESTS IN 2023

The Sharia Supervisory Board conducted Sampling Test activities to carry out its supervisory function over the Bank's business and operations activities. This activity was carried out by visiting, observing, and/or conducting sharing sessions with employees at various Bank Muamalat Indonesia Branch Offices.

The Sharia Supervisory Board also reviews transaction documents to ensure that Sharia principles are followed. The inspection was carried out using a sample test method, with assistance from the Sharia Compliance function, the Sharia Supervisory Board's liaison officer. In 2023, sampling tests were conducted by combining physical and virtual inspections, following the sampling test method of the previous year.



Tanggal Date	Cabang/Unit Kerja	Branch/Work Unit
Semester I Tahun 2023 pada tanggal 19 Juni s.d. 23 Agustus 2023 Semester I 2023 on June 19 to August 23, 2023	Kantor Cabang Utama Samarinda	Samarinda Main Branch Office
	Kantor Cabang Utama Karawang	Karawang Main Branch Office
	Kantor Cabang Utama Cilegon	Cilegon Main Branch Office
	Kantor Cabang Pembantu Batu Malang	Batu Malang Sub-Branch Office
	Kantor Cabang Pembantu Ponorogo	Ponorogo Sub-Branch Office
	Kantor Cabang Utama Padang Sidempuan	Padang Sidempuan Main Branch Office
	Kantor Cabang Utama Gorontalo	Gorontalo Main Branch Office
	Kantor Cabang Utama Kramat Raya	Kramat Raya Main Branch Office
Semester II Tahun 2023 pada tanggal 6 November 2023 s.d. 16 Februari 2024 Semester II 2023 on November 6, 2023 to February 16, 2024	Unit Kerja Retail Funding & Transaction (KPNO)	Retail Funding & Transaction Work Unit (KPNO)
	Unit Kerja Global Market (KPNO)	Global Market Work Unit (KPNO)
	Unit Kerja Transactional Banking (KPNO)	Transactional Banking Work Unit (KPNO)

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sepanjang tahun buku 2023 tidak terdapat perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD.

The Sharia Supervisory Board's composition remain unchanged throughout the financial year 2023. Thus, the Sharia Supervisory Board is composed of the following:

Ketua	Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si	Chairman
Anggota	Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH	Member
Anggota	Dr. H. Agung Danarto, M.Ag	Member



APRESIASI

Dewan Pengawas Syariah menyampaikan apresiasi kepada manajemen serta seluruh pemangku kepentingan di Bank Muamalat atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik sepanjang tahun 2023. Dengan kerja sama dan dukungan tersebut, DPS dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Dalam pandangan DPS, pada tahun 2023, manajemen Bank Muamalat telah berupaya dengan baik dalam mengoptimalkan kemampuan serta kekuatan Bank untuk menghasilkan kinerja yang optimal yang didukung dengan tata kelola perusahaan yang baik. DPS berharap pencapaian tersebut dapat mendorong dan semakin mengukuhkan komitmen Bank dalam menjaga pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DPS berharap agar semua yang telah dilakukan maupun direncanakan dalam upaya memajukan Bank Muamalat diridai serta mendapat pertolongan Allah SWT. Semoga taufik dan hidayah serta inayah-Nya selalu menyertai kita semua untuk mencapai kesuksesan di dunia maupun di akhirat kelak.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

APPRECIATION

The Sharia Supervisory Board expresses its appreciation to the management and all stakeholders at Bank Muamalat for the positive cooperation that has been established throughout 2023. With this cooperation and support, SSB was able to effectively carry out its duties and functions.

SSB believes that in 2023, Bank Muamalat's management has made significant efforts to optimize the Bank's capabilities and strengths in order to produce optimal performance underpinned by good corporate governance. SSB hopes that this achievement will encourage and strengthen the Bank's commitment to maintaining compliance with Sharia principles as well as the applicable laws and regulations.

SSB hopes that everything done or planned to advance Bank Muamalat will be successful and receive the blessing of Allah SWT. May His help and guidance always be with us as we strive for success in this life and the next.

Wassalamualaikum, Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 30 April 2024 | April 30, 2024

Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of The Sharia Supervisory Board



Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Function



Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan 2023
2023 Financial Statements



Dr. H. Agung Danarto, M.Ag
Anggota
Member

Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si
Ketua
Chairman

Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH
Anggota
Member



Ikhtisar Kinerja 2023
2023 Performance Highlights



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioner's Report



Amin Said Husni

**Komisaris independen/Plt.
Komisaris Utama**

Independent Commissioner/Acting
President Commissioner



Dengan mempertimbangkan pencapaian finansial dan non-finansial, Dewan Komisaris berpandangan bahwa secara umum, kinerja Direksi pada tahun buku 2023 cukup baik yang terlihat dari berbagai pencapaian yang diperoleh Bank. Dari sisi finansial, Bank Muamalat berhasil mencatat total aset sebesar Rp66,95 triliun tumbuh sebesar 9,11% (year on year/yoy).

Based on financial and non-financial achievements, the Board of Commissioners views that, in general, the Board of Directors' performance in the financial year 2023 is quite good, as evidenced by the Bank's various achievements. Financially, Bank Muamalat successfully achieved total asset of Rp66.95 trillion, a 9.11% increase (year on year/yoy).

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Bismillaahirrohmaanirrohiim*

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Wa Shalatu Wa Salamu 'Ala Nabiyyina Muhammad, Wa 'Ala Aalihi Wa Ashabihi. Amma Ba'du.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas karunia-Nya, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat," "Bank") mampu melalui tahun 2023 dengan kinerja usaha yang cukup baik, di tengah dinamika perekonomian global yang masih bergerak dinamis.

Dalam kondisi perekonomian global yang belum stabil, Bank Sentral Amerika Serikat, yakni The Federal Reserve (The Fed) merespons dengan menaikkan suku bunga acuannya dari 4,50% di awal tahun menjadi 5,50% di akhir 2023.

Dear Valued Shareholders and Stakeholders,

Praise and gratitude to Allah Subhanahu Wa Ta'ala for His grace. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat," "Bank") was able to navigate through 2023 with a decent business performance, despite the dynamics of the global economy, which continues to move dynamically.

In response to volatile global economic conditions, the United States Central Bank, specifically the Federal Reserve (The Fed), raised its benchmark interest rate from 4.50% at the beginning of the year to 5.50% by the end of 2023.



Kebijakan tersebut ikut mendorong naiknya suku bunga acuan negara-negara lain, termasuk Indonesia. Sepanjang tahun 2023, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan di pasar, yaitu BI 7-day (Reverse) Repo Rate dari 5,75% menjadi 6,00% sebagai upaya meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi di dalam negeri. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pun turut meningkatkan suku bunga penjaminan simpanan dalam rupiah di bank umum menjadi 4,25% yang juga berdampak pada naiknya beban biaya dana secara umum.

This policy prompted other countries, including Indonesia, to raise their benchmark interest rates. Throughout 2023, Bank Indonesia raised the benchmark interest rate, the BI 7-day (Reverse) Repo Rate, from 5.75% to 6.00% in an effort to relieve pressure on the rupiah exchange rate and control inflation in the country. The Deposit Insurance Corporation (LPS) also raised the interest rate for guaranteeing rupiah deposits at commercial banks to 4.25%, which impacted overall funding costs.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI

Dasar Penilaian

Dalam memberikan penilaian kepada Direksi atas pengelolaan kegiatan usaha Bank, Dewan Komisaris mengacu pada pencapaian finansial dan non-finansial. Untuk pencapaian finansial, beberapa faktor yang menjadi perhatian, antara lain pemenuhan target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Misalnya, dari sisi pencapaian nilai aset, penyaluran pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), biaya operasional, dan pendapatan operasional.

Selain pencapaian finansial tersebut, Dewan Komisaris turut memberikan penilaian yang diukur dari rasio-rasio penting, seperti *Non-Performing Financing* (NPF), *Return on Asset* (ROA), maupun *Return on Equity* (ROE). Sementara untuk pencapaian non-finansial, beberapa hal yang menjadi pertimbangan penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Dewan Komisaris senantiasa memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank Muamalat pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris juga terus memantau pelaksanaan seluruh rencana dan strategi yang telah ditetapkan Bank, seperti tertuang dalam RBB.

Hasil Penilaian

Dengan mempertimbangkan pencapaian finansial dan non-finansial, Dewan Komisaris berpandangan bahwa secara umum, kinerja Direksi pada tahun buku 2023 cukup baik yang terlihat dari berbagai pencapaian yang diperoleh Bank. Dari sisi finansial, Bank Muamalat berhasil mencatat total aset sebesar Rp66,95 triliun tumbuh sebesar 9,11% (*year on year/yoy*) namun pencapaian tersebut masih berada di bawah target RBB 2023.

BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE ASSESSMENT

Basis of Assessment

The Board of Commissioners assessed the Board of Directors' performance in managing the Bank's business activities by referring to both financial and non-financial achievements. Several factors influence financial achievement, including meeting the targets set in the Bank Business Plan (RBB). Examples include achieving asset value, financing distribution, Third Party Funds (TPF), operational costs, and operational income.

Aside from these financial achievements, the Board of Commissioners provides assessments based on key ratios such as Non-Performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA), and Return on Equity (ROE). Meanwhile, several factors are considered when assessing non-financial achievements, including the implementation of good corporate governance (GCG).

The Board of Commissioners always ensures that GCG principles are applied to all Bank Muamalat business activities at all levels of the organization. The Board of Commissioners also continues to monitor the implementation of all plans and strategies established by the Bank, as stated in the RBB.

Assessment Results

Based on financial and non-financial achievements, the Board of Commissioners views that, in general, the Board of Directors' performance in the financial year 2023 is quite good, as evidenced by the Bank's various achievements. Financially, Bank Muamalat successfully achieved total asset of Rp66.95 trillion, a 9.11% increase (*year on year/yoy*), but this achievement fell short of the 2023 RBB target.



Penyaluran pembiayaan tercatat sebesar Rp22,46 triliun atau tumbuh 19,35% (yoy), penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Dana Pihak Kedua (DP2) mencapai Rp50,27 triliun, mengalami kenaikan 3,96% (yoy). Sementara dari sisi profitabilitas, hingga akhir tahun 2023 Bank berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp14,1 miliar, menurun 72,87% (yoy). Dewan Komisaris mengapresiasi pencapaian - pencapaian tersebut walaupun masih di bawah target yang diharapkan.

Hasil kinerja bisnis tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan beban bagi hasil yang disebabkan oleh kenaikan suku bunga BI7DRR dan LPS *rate*, serta belum optimalnya pendapatan penyaluran dana. Hal ini terjadi karena masih berprosesnya transformasi retail yang telah menunjukkan perbaikan hingga akhir tahun 2023.

Dalam hal inisiatif terkait *digital banking*, Bank terus melakukan pengembangan digital melalui Muamalat Digital Islamic Network (MDIN) sebagai respons terhadap perkembangan kebutuhan nasabah akan perbankan digital serta pesatnya pertumbuhan transaksi digital. Dengan demikian inisiatif ini, dapat menambah daya saing Bank di industri.

Sementara dari sisi manajemen *human capital*, Bank berhasil meraih 2 (dua) penghargaan dalam ajang "Stellar Workplace Award 2023." Pioneer bank syariah di Tanah Air ini meraih penghargaan bergengsi pada kategori "Stellar Workplace Recognition in Employee Commitment" dan "Stellar Workplace Recognition in Employee Satisfaction." Bank mampu meraih prestasi ini berkat komitmen yang tinggi dalam menciptakan tempat kerja yang baik bagi karyawan sehingga IDEAL (Islami, Modern dan Profesional) *Place to Work* dapat terwujud dalam keseharian Bank.

Penghargaan lainnya yang berhasil diperoleh Bank di tahun 2023 adalah "The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2023" (*banking industries*). Bank berkomitmen tinggi untuk menerapkan GRC di lingkup internal dan senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) termasuk aspek kebijakan dan prosedur, produk, proses dan sumber daya manusia. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam penerapan manajemen risiko yang lebih baik yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Dalam perumusan strategi Bank yang disusun oleh Direksi, Dewan Komisaris telah melakukan *review* sebelum strategi tersebut tertuang dalam Rencana Bisnis Bank. Perumusan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi eksternal maupun internal Bank yang berpotensi mempengaruhi kinerja Bank, serta prospek usaha yang perlu menjadi perhatian khusus oleh Direksi.

Financing distribution was recorded at Rp22.46 trillion, or a 19.35% increase (yoy), while Third Party Funds (TPF) and Second Party Funds (DP2) collection reached Rp50.27 trillion, an increase of 3.96% (yoy). Meanwhile, in terms of profitability, until the end of 2023, the Bank's income before tax was recorded at Rp14.1 billion, a 72.87% decrease (yoy). The Board of Commissioners recognizes this positive achievement, even though it fell short of the expected target.

This is the result of increased profit-sharing expenses due to increases in the BI7DRR interest rate and LPS rate, as well as suboptimal income from fund disbursement. This occurs because the retail transformation process is still ongoing, with improvements shown until the end of 2023.

In terms of digital banking initiatives, the Bank continues to conduct digital development through the Muamalat Digital Islamic Network (MDIN) in response to the growing customer needs for digital banking and the rapid growth of digital transactions. This can improve the Bank's competitiveness in the industry.

Meanwhile, in terms of human capital management, the Bank successfully won 2 (two) awards at the "Stellar Workplace Award 2023" event. This Islamic banking pioneer in Indonesia received prestigious awards in the categories "Stellar Workplace Recognition in Employee Commitment" and "Stellar Workplace Recognition in Employee Satisfaction." The Bank was able to achieve this success due to its strong commitment to providing a good workplace for employees, allowing the IDEAL (Islamic, Modern, and Professional) *Place to Work* to be realized in the Bank's daily operations.

Another award the Bank received in 2023 was "The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2023" (*banking industry*). The Bank is strongly committed to implementing GRC internally and making continuous improvements in policies and procedures, products, processes, and human resources aspects. This is an important step toward improved risk management, which includes the process of identifying, measuring, monitoring, and controlling risks.

The Board of Commissioners reviewed the Bank's strategy, which was developed by the Board of Directors, before it was incorporated into the Bank's Business Plan. Strategy formulation is carried out by considering the Bank's external and internal conditions that have the potential to influence its performance, as well as business prospects that require special attention from the Board of Directors.



Selain memberikan persetujuan pada RBB Bank Muamalat tahun 2023, Dewan Komisaris telah berupaya melakukan pemantauan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan strategi dan bisnis Bank telah berada di jalur yang benar. Dewan Komisaris berpandangan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank tetap mematuhi regulasi yang berlaku baik secara legal maupun dalam koridor syariah.

Untuk tahun 2023, Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi dalam pemenuhan target dari RBB dan menilai bahwa Direksi telah berupaya menjalankan kegiatan usaha perbankan sesuai dengan RBB yang telah ditetapkan termasuk perubahannya. Selain itu, Direksi juga telah menyampaikan kepada Dewan Komisaris terkait aspek kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepatuhan terhadap aspek syariah.

Pengawasan Terhadap Perumusan dan Implementasi Strategi

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah berupaya melakukan pemantauan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan strategi dan bisnis Bank telah berada di jalur yang benar dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku baik secara legal maupun dalam koridor syariah termasuk penerapan prinsip syariah.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah berupaya menjalankan kegiatan perbankan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah ditetapkan termasuk perubahannya. Direksi juga telah menyampaikan kepada Dewan Komisaris terkait aspek kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepatuhan terhadap aspek syariah. Oleh karena itu, Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi dalam pemenuhan target dari RBB tersebut.

Dewan Komisaris senantiasa memantau pelaksanaan strategi Bank khususnya implementasi *Turn Around Plan* dan tema strategis Rencana Bisnis Bank Muamalat Tahun 2023 yakni "Pertumbuhan Bisnis yang Sehat dan Profit yang Berkelanjutan." Direksi menyampaikan bahwa langkah-langkah strategis di tahun 2023 yang telah dilaksanakan dengan kerangka 3 (tiga) fokus utama, yaitu:

1. Business Refocusing

Dalam pilar *Business Refocusing*, Bank berfokus kepada perbaikan bisnis melalui akselerasi pembiayaan dan Pendanaan, peningkatan *customer base*, mengoptimalkan *pipeline enterprise* dan *Islamic Ecosystem* sebagai *entry gate* untuk nasabah individu. Bank juga membangun dan masuk ke dalam *Islamic & Hajj Ecosystem*, serta berupaya mengoptimalkan penyehatan Bank maupun *recovery*.

In addition to approving Bank Muamalat's 2023 RBB, the Board of Commissioners has made efforts to conduct monitoring to ensure that the Bank's strategy and business implementation are on the right track. The Board of Commissioners believes that in carrying out its business activities, the Bank continues to comply with applicable regulations, both legally and within the sharia corridor.

For 2023, the Board of Commissioners appreciates the Board of Directors' performance in meeting the RBB's targets and assesses that the Board of Directors has made efforts to carry out banking business activities in accordance with the RBB as determined, including its amendments. Aside from that, the Board of Directors has communicated to the Board of Commissioners about aspects of compliance with all applicable laws and regulations, including Sharia compliance.

Supervision of Strategy Formulation and Implementation

Throughout 2023, the Board of Commissioners attempted to conduct monitoring to ensure that the Bank's strategy and business are on the right track while remaining compliant with applicable regulations, both legally and within the sharia corridors including the application of sharia principles.

The Board of Commissioners determines that the Board of Directors attempted to carry out banking activities in accordance with the Bank Business Plan (RBB) that was established, including any amendments. The Board of Directors has also communicated with the Board of Commissioners about aspects of compliance with all applicable laws and regulations, including sharia aspects. Therefore, the Board of Commissioners appreciates the Board of Directors' performance in meeting the RBB targets.

The Board of Commissioners consistently monitors the Bank's strategy and implementation, particularly the Turnaround Plan and the strategic theme of the Bank Muamalat Business Plan for 2023, "Healthy Business Growth and Sustainable Profit." The Board of Directors stated that strategic steps in 2023 have been implemented within the framework of 3 (three) main focuses, which are:

1. Business Refocusing

In the Business Refocusing pillar, the Bank focuses on business improvement by accelerating financing and deposits, expanding the customer base, optimizing enterprise pipelines, and using the Islamic Ecosystem as an entry point for individual customers. The Bank is also developing and entering the Islamic and Hajj Ecosystem, as well as attempting to improve the Bank's health and recovery.



Dewan Komisaris menilai langkah strategis *Business Refocusing* berjalan dengan baik. Hal itu tercermin dari pertumbuhan *customer base* yang hingga Desember 2023 tumbuh sebesar 3,97% (yoy) atau 56.809 *customer*, dari 1,43 juta di Desember 22 menjadi 1,49 Juta *customer* di Desember 2023.

Bank juga menjalankan “Transformation Project,” khususnya transformasi retail yang menjadi basis pertumbuhan bisnis konsumen secara berkesinambungan dan peningkatan CASA. Bank telah meningkatkan akuisisi porsi haji tercermin dari peningkatan *market BMI* dibandingkan dengan nasional, dari posisi Desember 2022 sebesar 44,3% menjadi 53,8% di Desember 2023.

Selanjutnya, Bank telah meningkatkan layanan digital dengan melakukan kerja sama dalam hal penjualan paket umrah melalui *microsite* yang dapat diakses melalui Muamalat DIN. Manajemen terus berupaya mengoptimalkan penyehatan Bank dengan melaksanakan upaya perbaikan dan penyelesaian aset bermasalah untuk portofolio pembiayaan, Bank melakukan upaya optimalisasi *recovery* terhadap aset yang dikategorikan dalam *corporate action* dengan total porsi pendapatan yang diakui oleh Bank sebesar Rp568 miliar.

Dewan Komisaris juga akan senantiasa mendukung Langkah Direksi dalam merealisasikan rencana yang disampaikan dalam pilar 1 tersebut.

2. **Fixing The Fundamental**

Dalam pilar *Fixing The Fundamental*, Bank berfokus kepada peningkatan kapabilitas dan kapasitas dari sisi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kebijakan yang dapat mendukung akselerasi bisnis.

Dewan Komisaris menilai inisiatif *Fixing The Fundamental* telah berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana yang ditetapkan, hal tersebut tercermin dari Bank telah melakukan penyesuaian struktur organisasi Bank Muamalat. Penyesuaian ini bertujuan mempertajam perluasan bisnis dan efektivitas operasional. Secara berkesinambungan, Bank melakukan *review* dan penyesuaian organisasi sejalan dengan arah strategis dan akselerasi bisnis, melakukan peningkatan layanan digital melalui pengembangan teknologi informasi dan digital, serta melakukan pelaksanaan proyek transformasi telah dilakukan dengan aktivitas perbaikan SLA proses pembiayaan *consumer*.

The Board of Commissioners assesses that the strategic steps for Business Refocusing are progressing well. This is reflected in the customer base’s growth, which increased by 3.97% (yoy) or 56,809 customers from 1.43 million in December 2022 to 1.49 million in December 2023.

The Bank is also implementing the “Transformation Project,” specifically retail transformation, which is the foundation for sustainable consumer business growth and increased CASA. The Bank has increased its acquisition of the Hajj portion, resulting in an increase in market BMI compared to the national level, from 44.3% in December 2022 to 53.8% in December 2023.

Furthermore, the Bank has improved its digital services by collaborating to sell Umrah packages through a microsite accessible via Muamalat DIN. Management continues to strive to improve the Bank’s recovery by repairing and resolving problematic assets in the financing portfolio. The Bank is working to optimize recovery for assets classified as corporate action, with a portion of income recognized by the Bank of Rp568 billion.

The Board of Commissioners will always support the Board of Directors’ actions in realizing the plans presented in Pillar 1.

2. **Fixing the Fundamentals**

In the Fixing the Fundamentals pillar, the Bank focuses on increasing capabilities and capacity in human resources, information technology, and policies that can help businesses accelerate.

The Board of Commissioners assesses that the Fixing the Fundamental initiative has gone well in accordance with the plans laid out, as evidenced by the Bank’s adjustments to the organizational structure of Bank Muamalat. This change aims to improve business expansion and effectiveness in operation. On an ongoing basis, the Bank conducts organizational reviews and adjustments in line with strategic direction and business acceleration, improves digital services through the development of information and digital technology, and implements transformation projects that have been carried out with activities to improve the SLA of the consumer financing process.



Sesuai dengan pilar *Fixing The Fundamental*, Dewan Komisaris akan mendukung Direksi untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas dari sisi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kebijakan yang dapat mendukung akselerasi bisnis.

3. **Strengthen Enablers**

Dalam pilar *Strengthen Enablers*, Bank berfokus peningkatan sinergi bisnis dan penerapan konsep pengukuran berbasis profit (*Contribution Margin*) untuk mendorong produktivitas kantor cabang.

Dewan Komisaris menilai inisiatif *Strengthen Enablers* yang telah dilaksanakan Bank sangat baik. Hal tersebut tercermin dari konsep pengukuran berbasis profit (*Contribution Margin*) telah mendorong pencapaian PBT *Before* HOCA tercatat positif di seluruh cabang, dari sebelumnya ada 6 (enam) cabang yang negatif. Bank juga meningkatkan program sinergi BPKH & BMI dalam berbagai aktivitas BPKH sebagai pengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji.

Sesuai dengan pilar *Strengthen Enablers*, Dewan Komisaris akan mendukung Direksi untuk sinergi bisnis dan mendorong produktivitas kantor cabang melalui penerapan konsep pengukuran berbasis profit (*Contribution Margin*).

Mekanisme Dewan Komisaris dalam Melakukan Pengawasan

Dalam upaya mendorong kinerja Direksi untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Dewan Komisaris memberikan nasihat dan saran kepada Direksi yang disampaikan melalui mekanisme rapat secara rutin bersama Direksi dan rapat bersama Dewan Pengawas Syariah dalam rangka koordinasi serta melakukan pengawasan atau memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris mendapatkan laporan Direksi secara periodik maupun berkala mengenai perkembangan kinerja Bank dan realisasi Rencana Bisnis Bank.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melakukan 17 kali rapat gabungan bersama Direksi dan 4 kali rapat gabungan bersama Dewan Pengawas Syariah. Dalam rapat tersebut, Dewan Komisaris memberikan arahan serta nasihat kepada Direksi. Adapun arahan serta nasihat diberikan kepada Direksi setelah Dewan Komisaris memahami penjelasan atas suatu permasalahan yang disampaikan oleh Direksi.

In accordance with the *Fixing the Fundamentals* pillar, the Board of Commissioners will assist the Board of Directors in increasing capability and capacity in terms of human resources, information technology, and policies that can help businesses acceleration.

3. **Strengthening Enablers**

In the *Strengthen Enablers* pillar, the Bank focuses on improving business synergy and implementing profit-based measurement concept (*Contribution Margin*) to boost branch office productivity.

The Board of Commissioners assesses that the Bank's *Strengthen Enablers* initiative implemented is very good. This is reflected in the concept of profit-based measurement (*Contribution Margin*), which has encouraged the achievement of positive PBT *Before* HOCA in all branches, up from 6 (six) branches that were previously negative. The Bank is also expanding the BPKH & BMI synergy program in various BPKH activities as Hajj financial manager, which includes the receipt, development, and expenditure of Hajj funds.

In accordance with the *Strengthen Enablers* pillar, the Board of Commissioners will work with the Board of Directors to promote business synergy and increase branch office productivity by implementing profit-based measurement concept (*Contribution Margin*).

Mechanism for Supervision by the Board of Commissioners

In order to encourage the Board of Directors' performance in meeting the targets that have been established, the Board of Commissioners provides advice and suggestions to the Board of Directors, regular meetings with the Board of Directors and joint meetings with the Sharia Supervisory Board in order to coordinate with the Board of Directors. Furthermore, every month, quarter, and semester, the Board of Commissioners receives periodic reports from the Board of Directors on developments in the Bank's performance and realization of its Business Plan.

Throughout 2023, The Board of Commissioners held 17 joint meetings with the Board of Directors and 4 joint meetings with the Sharia Supervisory Board. In this meeting, the Board of Commissioners directed and advised the Board of Directors. After hearing the Board of Directors' explanation of a problem, the Board of Commissioners provides them with directions and advice.



PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Dewan Komisaris berpandangan bahwa tahun 2024 akan menjadi tahun yang penuh optimisme bagi Bank Muamalat. Berlandaskan dengan pencapaian Bank di tahun 2023, Dewan Komisaris meyakini bahwa Direksi telah melakukan upaya terbaik dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi, mengendalikan risiko, serta menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang tetap sesuai dengan regulator dan prinsip-prinsip syariah.

Dewan Komisaris menilai bahwa untuk ke depan, salah satu fokus utama Bank adalah melakukan perbaikan kualitas neraca yang diharapkan akan turut meningkatkan kualitas profitabilitas Bank. Dalam hal peningkatan kualitas neraca, Dewan Komisaris akan mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan kepada segmen retail yang memberi dampak positif terhadap perbaikan profitabilitas.

Selain itu, Bank juga akan fokus pada upaya perbaikan likuiditas Bank melalui peningkatan rasio CASA dan akan fokus pada target segmen yang telah ditetapkan. Peningkatan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan peran Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan tata kelola merupakan tanggung jawab moral Bank yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan Bank dan perbankan syariah di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Bank selalu berupaya untuk mengedepankan kesesuaian dengan prinsip tata kelola, di antaranya *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *professional*, dan *fairness*.

Dalam penerapan prinsip tata kelola, Dewan Komisaris tidak hanya bertanggung jawab pada hasil, namun juga turut bertanggung jawab dalam pemantauan proses penerapan prinsip tata kelola tersebut. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris menilai implementasi penerapan prinsip tata kelola di Bank Muamalat Indonesia telah berjalan dengan baik dan segala upaya yang dilakukan oleh manajemen Bank pada tahun buku tersebut telah memberikan pengaruh positif yang dicerminkan dalam pencapaian pertumbuhan bisnis.

VIEWS ON BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners views 2024 as a year full of optimism for Bank Muamalat. Based on the Bank's accomplishments in 2023, the Board of Commissioners believes that the Board of Directors has made the best efforts to develop and implement strategies, control risks, and implement corporate governance practices that are consistent with regulators and Sharia principles.

The Board of Commissioners believes that in the future, one of the Bank's primary focuses will be to improve the quality of its balance sheet, which is expected to help improve the Bank's profitability. In terms of improving balance sheet quality, the Board of Commissioners will encourage increased financing distribution to the retail segment, which will have a positive impact on profitability improvement.

Aside from that, the Bank will focus on efforts to improve liquidity by increasing the CASA ratio, as well as on the target segments that have been determined. This increase is expected to optimize the Bank's role as a financial intermediary institution.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Governance implementation is the Bank's moral responsibility, and it is expected to contribute to the Bank's and Indonesian sharia banking growth. In conducting its business activities, the Bank always strives to prioritize compliance with governance principles such as transparency, accountability, responsibility, professionalism, and fairness.

The Board of Commissioners is responsible not only for the outcomes of implementing governance principles, but also for monitoring the implementation process. Throughout 2023, the Board of Commissioners assesses that the implementation of governance principles at Bank Muamalat Indonesia has gone well, and all efforts made by the Bank's management in that financial year have had a positive influence, which is reflected in the achievement of business growth



Keterlibatan Dewan Komisaris pada Penerapan *Whistleblowing System*

Whistleblowing system merupakan sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal untuk dapat melaporkan kecurangan yang terjadi dalam proses bisnis Bank. Dalam sistem ini, pelapor dapat dilindungi identitasnya selama laporan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.

Dewan Komisaris turut berperan dalam mekanisme *whistleblowing system* dengan melakukan pemantauan dan memberikan wewenang untuk menindaklanjuti pelaporan yang masuk. Adapun pemantauan yang dilakukan Dewan Komisaris antara lain meliputi pelanggaran etika bisnis dan etika kerja serta pelanggaran rahasia Bank Muamalat Indonesia.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam melakukan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 4 (empat) organ penunjang: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Perusahaan. Seluruh komite tersebut telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Dewan Komisaris telah melakukan penilaian yang didasarkan pada realisasi Rencana Kerja yang disusun, peran aktif komite dalam menjalankan tugasnya, proses dokumentasi, serta rekomendasi yang diberikan. Berdasarkan penilaian tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh Komite tingkat Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik dan telah berkontribusi terhadap perkembangan Bank.

Board of Commissioners Involvement in the *Whistleblowing System* Implementation

The whistleblowing system is a violation reporting system that enables internal and external stakeholders to report fraud that occurs in the Bank's business processes. In this system, the whistleblower's identity can be protected as long as the report provided is credible.

The Board of Commissioners contributes to the whistleblowing system mechanism by monitoring and providing authority to follow up on incoming reports. The Board of Commissioners monitors, among other things, violations of business and work ethics, as well as violations of Bank Muamalat Indonesia's confidentiality.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is assisted in its supervisory function by 4 (four) supporting organs: The Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Corporate Governance Committee. All committees have made recommendations to the Board of Commissioners based on their respective functions.

The Board of Commissioners conducted an assessment based on realization of the Work Plan prepared, the active role of the committees in carrying out their duties, the documentation process, and the recommendations given. Based on this assessment, the Board of Commissioners considers that all Committees of the Board of Commissioners have performed their functions and responsibilities well and have contributed to the development of the Bank.



PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada awal tahun 2023, komposisi Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan susunan sejak penetapan terakhir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 29 November 2022, hingga dilaksanakannya RUPS Tahunan tanggal 11 Mei 2023.

Berikut komposisi Dewan Komisaris pasca RUPS Tahunan tanggal 11 Mei 2023:

Komisaris Utama Independen	Mardiasmo^{*)}	Independent President Commissioner
Komisaris Independen	Amin Said Husni	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Sartono	Independent Commissioner
Komisaris	Andre Mirza Hartawan	Commissioner

^{*)} Efektif setelah memperoleh penetapan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.
Effective after receiving a determination of passing the fit and proper test from the OJK.

Sehubungan dengan belum dapat disampaikannya dokumen permohonan penetapan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan kepada OJK, maka untuk melaksanakan tugas sebagai Komisaris Utama dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk menjalankan amanah sebagai Pemimpin Rapat pada RUPS Bank, telah ditunjuk Bapak Amin Said Husni selaku Pelaksana Tugas Komisaris Utama, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 14 April 2023.

Selanjutnya, susunan Dewan Komisaris yang telah mendapatkan penetapan efektif berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan OJK sejak tanggal 31 Desember 2023 hingga disampaikan laporan ini, adalah sebagai berikut:

Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama	Amin Said Husni	Independent Commissioner/Acting President Commissioner
Komisaris Independen	Sartono	Independent Commissioner
Komisaris	Andre Mirza Hartawan	Commissioner

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

At the beginning of 2023, the composition of the Board of Commissioners remained unchanged since the last appointment at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) on November 29, 2022, until the Annual General Meeting (AGM) held on May 11, 2023.

The following is the composition of the Board of Commissioners after the Annual GMS on May 11, 2023:

As the application document for the determination of passing the fit and proper test has not been submitted to OJK, for the implementation of duties as President Commissioner, in the context of implementing good corporate governance, including carrying out the mandate as Chairman of the Meeting at the Bank's GMS, the Company appointed Mr Amin Said Husni as Acting President Commissioner, based on the Decree of the Board of Commissioners dated 14 April 2023.

Furthermore, the composition of the Board of Commissioners that has received an effective determination based on OJK's fit and proper assessment since December 31, 2023 until the submission of this report, is as follows::



PENUTUP DAN APRESIASI

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi dan jajaran organisasi di bawahnya atas kinerja yang telah dipersembahkan pada tahun 2023. Dewan Komisaris meyakini bahwa pencapaian tersebut akan menjadi pijakan yang baik bagi Bank untuk berkembang ke depan.

Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungannya, sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Begitu juga dengan regulator, Dewan Komisaris berterima kasih atas bimbingannya dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

CLOSING AND APPRECIATION

The Board of Commissioners expresses its appreciation to the Board of Directors and the levels of the organizations under them for their performance in 2023. The Board of Commissioners believes that this achievement will provide a solid foundation for the Bank's future development.

The Board of Commissioners appreciates the Shareholders' trust and support, which allows the Board of Commissioners to carry out their duties and responsibilities effectively. The Board of Commissioners expresses its gratitude to the regulator for its guidance in complying with applicable laws and regulations.

Wassalamualaikum, Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 30 April 2024 | April 30, 2024

Amin Said Husni

Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama
Independent Commissioner/Acting President Commissioner



Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Function



Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan 2023
2023 Financial Statements

Dewan Komisaris

Board of Commissioner's



Andre Mirza Hartawan
Komisaris
Commissioner

Amin Said Husni
Komisaris Independen/Plt.
Komisaris Utama
Independent Commissioner/
Acting President Commissioner

Sartono
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Ikhtisar Kinerja 2023
2023 Performance Highlights



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Laporan Direksi

Board of Director's Report



Indra Falatehan
Direktur Utama
President Director



Pada tahun 2023, Bank telah melakukan transformasi ritel dengan fokus pada 6 (enam) segmen bisnis: Haji & Umrah, Aparatur Sipil Negara/Bank Penyalur Gaji (ASN/BPG), pensiunan, rumah sakit, pendidikan, dan segmen enterprise sebagai *entry gate* untuk segmen ritel dalam memperluas bisnis. Bank Muamalat memandang pasar ritel memiliki potensi yang sangat besar sejalan dengan semakin berkembangnya literasi ekonomi syariah serta perkembangan bisnis halal.

In 2023, the Bank completed a retail transformation with a focus on 6 (six) business segments: Hajj and Umrah, State Civil Apparatus/Salary Distributing Banks (ASN/BPG), pensioners, hospitals, education, and the enterprise segment, which serves as the entry point for the retail segment's expansion. Bank Muamalat sees enormous potential in the retail market as sharia economic literacy grows and halal businesses expand.

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Bismillaahirrohmaanirrohiim*

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Wa Shalatu Wa Salamu 'Ala Nabiyyina Muhammad, Wa 'Ala Aalihi Wa Ashabihi. Amma Ba'du.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia-Nya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat", "Bank") dapat melalui tahun 2023 dengan cukup baik di tengah kondisi perekonomian yang belum stabil.

Dalam situasi tersebut, Bank Muamalat mampu melaksanakan fungsi intermediasinya dengan baik, seperti ditunjukkan melalui pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang mencapai 19,35% (*year on year/yoy*), sehingga menjadi Rp22,46 triliun. Sementara Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Dana Pihak Kedua (DP2) tercatat sebesar Rp50,27 triliun atau tumbuh 3,96% (*yoy*). Hal tersebut mendorong pencapaian total Aset sebesar Rp66,95 triliun atau tumbuh 9,11% (*yoy*) dan merupakan pencapaian total Aset tertinggi sejak Bank Muamalat beroperasi.

Dear Valued Shareholders and Stakeholders,

Praise and gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for His grace, which enabled PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat", "Bank") to navigate safely through 2023 despite volatile economic conditions.

Under these conditions, Bank Muamalat was able to effectively perform its intermediation function, as evidenced by a 19.35% increase in financing distribution (*year on year/yoy*), totaling Rp22.46 trillion. Meanwhile, third-party fund collection (DPK) and Second Party Funds (DP2) was recorded at Rp50.27 trillion or increasing by 3.96% (*yoy*). This encouraged the achievement of total assets of Rp66.95 trillion or grew 9.11% (*yoy*) and was the highest total asset achievement since Bank Muamalat began operations.



Rp66,95 triliun
trillion

Jumlah aset pada tahun 2023
Total assets in 2023



Rp22,47 triliun
trillion

Penyaluran pembiayaan, tumbuh 19,35%
Financing disbursement, grew 19.35%



2,06%

Rasio NPF Gross, lebih rendah dari target sebesar 2,62%
Gross NPF ratio, lower than target of 2.62%

Pencapaian tersebut merupakan salah satu hasil dari implementasi strategi transformasi, di mana Bank fokus pada penguatan fondasi dan pertumbuhan bisnis ritel. Begitu juga dengan perbaikan fundamental Bank, serta memperkuat aspek pendukung bisnis Bank.

KONDISI PEREKONOMIAN

Sepanjang tahun 2023, perekonomian global masih berada dalam kondisi yang cukup menantang. Walaupun ekonomi global telah menunjukkan beberapa tanda pertumbuhan yang positif, namun masih belum kembali seperti pra-pandemi COVID-19.

Pertumbuhan ekonomi global yang tercatat sebesar 3%, lebih rendah jika dibandingkan realisasi tahun 2022, yakni 3,3%. Penurunan inflasi cenderung lambat, yaitu masih di posisi 6,8%. Sementara tahun sebelumnya, seperti dicatat Dana Moneter Internasional (IMF), mencapai 8,7%.

Dalam kondisi inflasi yang tinggi, bank-bank sentral diperkirakan masih mempertahankan suku bunga tinggi. Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed) misalnya, hingga saat ini masih bertahan dengan suku bunga di kisaran 5,50-5,75%. Kondisi yang sama juga terjadi di Eropa, dengan suku bunga European Central Bank (ECB) dan Bank of England (BoE) masing-masing 4,50% dan 5,25%.

Tingginya suku bunga The Fed berpotensi meningkatkan imbal hasil obligasi jangka panjang yang pada akhirnya mendorong investor global untuk melakukan realokasi dananya ke instrumen yang lebih likuid. Dolar Amerika Serikat cenderung menguat, sehingga menekan mata uang negara-negara lainnya.

Sementara itu, situasi geopolitik global menunjukkan risiko yang semakin tinggi, terlihat dari perang di Ukraina maupun di Timur Tengah, yang belum menyiratkan akan segera berakhir. Perkembangan ini menimbulkan *downside risk* terhadap prospek pertumbuhan ekonomi. Sentimen global juga akan dipengaruhi adanya volatilitas di sektor keuangan dan prospek dari perang yang belum berakhir, bahkan memungkinkan meluas dalam tekanan proteksionisme serta melemahkan perdagangan global.

This achievement is the result of the Bank's transformation strategy, which focuses on strengthening the foundations and expanding its retail business. Similarly, improving the Bank's fundamentals and strengthening supporting aspects of its business.

ECONOMIC CONDITIONS

Throughout 2023, the global economy remained in a challenging state. Despite some encouraging signs of growth, the global economy has yet to reach pre-COVID-19 pandemic levels.

The global economic growth rate of 3% is lower than the 3.3% recorded in 2022. Inflation typically declines slowly, staying at 6.8%. Meanwhile, the International Monetary Fund (IMF) reported an 8.7% increase from the previous year.

In times of high inflation, central banks are expected to maintain high interest rates. For instance, the Federal Reserve (the Fed), the United States Central Bank continues to maintain interest rates between 5.50 and 5.75%. The same situation exists in Europe, with European Central Bank (ECB) and Bank of England (BoE) interest rates of 4.50% and 5.25%, respectively.

The Fed's high interest rates have the potential to raise long-term bond yields, encouraging global investors to shift funds to more liquid assets. The US dollar tends to strengthen, putting pressure on the currencies of other countries.

Meanwhile, the global geopolitical situation poses increasing risks, as evidenced by the ongoing conflicts in Ukraine and the Middle East, which do not appear to be ending anytime soon. This development raises concerns about the outlook for economic growth. Financial sector volatility and the prospect of an ongoing war will also have an impact on global sentiment, potentially increasing pressure for protectionism and weakening global trade.



Di tengah belum stabilnya perekonomian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, yakni mencapai 5,05% pada tahun 2023, walaupun sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,31%. Kinerja ekonomi tahun 2023 antara lain disebabkan oleh tingkat permintaan domestik yang kuat, didorong oleh tingginya keyakinan konsumen, sehingga daya beli tetap terjaga seiring dengan tingkat inflasi yang rendah.

Pertumbuhan investasi juga baik, seiring dengan berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi non-bangunan. Sementara dari sisi eksternal, pada tahun 2023 pertumbuhan riil ekspor mengalami penurunan seiring dengan berkurangnya permintaan dari negara mitra dagang utama serta adanya penurunan harga komoditas. Sedangkan ekspor jasa mengalami pertumbuhan tinggi yang salah satunya didorong oleh peningkatan jumlah wisatawan mancanegara.

Secara keseluruhan, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia tetap terjaga yang salah satunya tidak terlepas dari peran bauran kebijakan ekonomi nasional. Stabilitas makroekonomi tersebut antara lain tercermin pada nilai tukar rupiah yang pada tahun 2023 ditutup Rp15.399 per dolar AS atau berhasil mengalami apresiasi 1,11%. Pencapaian tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan mata uang beberapa negara yang mengalami depresiasi.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, kinerja industri perbankan pada tahun 2023 turut memperlihatkan hasil yang positif. Pada akhir tahun 2023, penyaluran kredit baru terindikasi meningkat dengan pertumbuhan 10,38% (yoy).

Pertumbuhan tersebut didorong oleh permintaan positif dari sektor korporasi dan rumah tangga serta ditopang oleh *risk appetite* dan likuiditas perbankan yang baik. Adapun sektor ekonomi yang menjadi pendorong pertumbuhan kredit di antaranya sektor perantara keuangan, transportasi, serta pertambangan dan penggalan.

Di sisi lain, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan pada tahun 2023 tercatat hanya 3,8% (yoy), yang merupakan pencapaian pertumbuhan terendah selama 10 tahun terakhir. Penyebabnya, antara lain telah kembali normalnya pola konsumsi masyarakat serta pemulihan ekonomi, sehingga terjadi realokasi dana nasabah ke instrumen investasi yang memiliki *return* lebih tinggi. Sementara kinerja industri perbankan syariah juga tercatat positif, dengan pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebesar 15,8% (yoy).

Selain itu, kegiatan industri perbankan juga masih diwarnai oleh tingginya suku bunga acuan Bank Indonesia, yaitu BI7DRR Rate. Hingga akhir tahun 2023, Bank Indonesia telah beberapa kali menaikkan tingkat BI Rate hingga mencapai 6,00% pada bulan Desember 2023. Adapun suku bunga

Despite an unstable global economy, Indonesia's economic growth remains strong, reaching 5.05% in 2023, slightly lower than the 5.31% recorded in 2022. Economic performance in 2023 is due in part to strong domestic demand, which is fueled by high consumer confidence, allowing purchasing power to remain consistent with low inflation levels.

Investment growth is also positive, owing to the continued completion of National Strategic Projects (PSN) and non-building investments. Meanwhile, externally, real export growth contracted in 2023 due to lower demand from key trading partners and a drop in commodity prices. Meanwhile, service exports expanded rapidly, helped by an increase in the number of foreign tourists.

Overall, Indonesia's macroeconomic and financial system stability remains intact, which is inextricably linked to the role of the national economic policy mix. This macroeconomic stability is reflected, among other things, in the rupiah exchange rate, which closed at Rp15,399 per USD in 2023, representing a 1.11% increase. This accomplishment far outperforms the currencies of several countries that have depreciated.

In addition to relatively strong economic growth, the performance of banking industry in 2023 was positive. At the end of 2023, new loan distribution was estimated to have increased by 10.38% (yoy).

This growth was driven by strong corporate and household demand, as well as a favorable risk appetite and banking liquidity. On the other side, financial intermediaries, transportation, and mining and quarrying are among the economic sectors that drive loan growth.

On the other hand, growth in banking industry's Third Party Funds (DPK) in 2023 was only 3.8% (yoy), the lowest growth rate achieved in the last decade. The reasons include a return to normalcy in people's consumption habits and economic recovery, which has resulted in a reallocation of customer funds to higher-return investment instruments. Meanwhile, Sharia banking industry performance was also positive, with a 15.8% increase in financing distribution year on year.

Furthermore, the high Bank Indonesia benchmark interest rate (BI7DRR Rate) continues to have an impact on the banking industry. Bank Indonesia raised the BI rate several times until the end of 2023, eventually reaching 6.00% in December. The interest rate on the Deposit Facility is 5.25%,



Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 6,75%. Kenaikan suku bunga ini telah menyebabkan peningkatan *cost of fund* yang pada akhirnya mendorong kenaikan suku bunga kredit.

while the Lending Facility's rate is 6.75%. An increase in interest rates raised the cost of funds, which eventually led to an increase in loan interest rates.

PENCAPAIAN KINERJA USAHA 2023

Target Pasar

Pada tahun 2023, Bank telah melakukan transformasi ritel dengan fokus pada 6 (enam) segmen bisnis: Haji & Umrah, Aparatur Sipil Negara/Bank Penyalur Gaji (ASN/BPG), pensiunan, rumah sakit, pendidikan, dan segmen *enterprise* sebagai *entry gate* untuk segmen ritel dalam memperluas bisnis. Bank Muamalat memandang pasar ritel memiliki potensi yang sangat besar sejalan dengan semakin berkembangnya literasi ekonomi syariah serta perkembangan bisnis halal.

Pada tahun buku tersebut Bank berhasil meningkatkan upaya akuisisi nasabah ASN di satuan kerja kementerian untuk menggunakan Bank Muamalat sebagai Bank Penyalur Gaji. Melalui akuisisi tersebut, Bank juga berupaya menyalurkan pembiayaan *consumer fixed income* dengan risiko yang relatif rendah.

Untuk nasabah non-ASN, Bank turut melakukan upaya akuisisi rekening gaji, yaitu pada nasabah *existing* pembiayaan korporasi, nasabah *existing* pembiayaan SME, pegawai BUMN, sektor pendidikan dan kesehatan. Bank juga menyalurkan pembiayaan *consumer fixed income* dengan risiko yang relatif rendah.

Kendala dan Tantangan

Sepanjang tahun 2023, sejumlah tantangan yang dihadapi, antara lain terkait dengan struktur industri perbankan yang masih didominasi perbankan konvensional serta bank-bank kecil, membuat persaingan kian ketat. Bahkan, terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah yang mengatur sejumlah ketentuan bagi bank yang akan melakukan pemisahan atau *spin off* unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, memperbesar potensi kompetisi bagi industri perbankan.

BUSINESS PERFORMANCE ACHIEVEMENTS 2023

Target Market

In 2023, the Bank completed a retail transformation with a focus on six (six) business segments: Hajj and Umrah, State Civil Apparatus/Salary Distributing Banks (ASN/BPG), pensioners, hospitals, education, and the enterprise segment, which serves as the entry point for the retail segment's expansion. Bank Muamalat sees enormous potential in the retail market as sharia economic literacy grows and halal businesses expand.

During that fiscal year, the Bank was successful in increasing its efforts to encourage ASN customers in ministry work units to use Bank Muamalat as a salary distribution bank. The Bank hopes to channel relatively low-risk consumer fixed-income financing through this acquisition.

The Bank is also attempting to obtain salary accounts from non-ASN customers, specifically current SME and corporate financing customers, SOE employees, and the health and education sectors. Banks also provide relatively low-risk consumer fixed-income financing.

Obstacles and Challenges

Throughout 2023, a number of challenges were faced, including those related to the banking industry's structure, which is still dominated by conventional banking and small banks, making competition even tighter. In fact, the issuance of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 12 of 2023 concerning Sharia Business Units, which regulates a number of provisions for banks that will separate or spin off sharia business units into sharia commercial banks, raises the possibility of competition in the banking industry.



Secara makro, volatilitas pasar keuangan juga cukup tinggi akibat ketidakpastian perekonomian global. Untuk merespons kondisi tersebut, regulator menerbitkan sejumlah kebijakan, di antaranya menaikkan suku bunga acuan yang mempengaruhi biaya dana dan strategi penghimpunan DPK. Kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang meningkatkan suku bunga penjaminan simpanan dalam rupiah di bank umum, ikut berdampak pada beban biaya dana secara umum akibat meningkatnya persaingan dalam melakukan akuisisi dana.

Tantangan lainnya adalah persaingan akibat digitalisasi. Sejak COVID-19 hingga saat ini, ekspektasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lain terhadap akselerasi layanan digital semakin tinggi. Kemudian, untuk dapat meningkatkan transformasi digital di sektor perbankan, telah terbit POJK No. 21 tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum. Regulasi ini berpotensi membuat industri perbankan turut menghadapi potensi persaingan baru dengan perusahaan teknologi finansial.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Bank mengimplementasikan sejumlah strategi, antara lain *refocusing* pada nasabah individu untuk meningkatkan dana murah, optimalisasi ekosistem *enterprise* dan *Islamic Ecosystem* sebagai *entry gate* untuk nasabah ritel. Bank juga memperluas *pipeline* bisnis melalui penghimpunan dana dan pembiayaan kepada *targeted segment*. Selain itu, agar dapat mengakselerasi layanan digital, Bank melakukan penambahan fitur dan solusi untuk nasabah individual.

Strategi dan Kebijakan Strategis

Pada tahun 2023, fokus Bank Muallamat adalah mencapai pertumbuhan bisnis yang sehat secara lebih cepat melalui tema strategis: "Pertumbuhan Bisnis yang Sehat dan Profit yang Berkelanjutan."

Bank telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang ditargetkan melalui *refocusing* bisnis, pengembangan produk-produk serta layanan agar meningkatkan aksesibilitas nasabah, penguatan portofolio melalui penyaluran pembiayaan pada segmen yang telah ditargetkan, serta pengetatan manajemen risiko untuk perbaikan kualitas portofolio juga terus dilakukan. Secara rinci, strategi yang dijalankan di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

From a macroeconomic standpoint, financial market volatility is also quite high due to global economic uncertainty. To address these conditions, the regulator implemented a number of policies, including raising the benchmark interest rate, which affects the cost of funds, and TPF collection strategies. The Deposit Insurance Corporation's (LPS) policy of raising interest rates to guarantee rupiah deposits at commercial banks has also had an impact on overall funding costs due to increased competition for fund acquisition.

Another challenge is the competition posed by digitalization. Since COVID-19, the public and other stakeholders' expectations for the acceleration of digital services have increased. Afterwards, in order to accelerate digital transformation in the banking sector, POJK No. 21 of 2023 on Digital Services by Commercial Banks was issued. This regulation has the potential to expose the banking industry to new competition from financial technology companies.

To address these challenges, the Bank implemented a number of strategies, including refocusing on individual customers to increase low-cost funds, optimizing the enterprise ecosystem, and leveraging the Islamic Ecosystem as an entry point for retail customers. The Bank also expands its business pipeline by raising funds and providing financing to specific segments. Furthermore, in order to accelerate digital services, the Bank is developing features and solutions for individual customers.

Strategy and Strategic Policy

In 2023, Bank Muallamat focused on achieving healthy business growth more quickly through the strategic theme "Healthy Business Growth and Sustainable Profits."

The Bank has taken a variety of steps to achieve targeted business growth, including refocusing the business, developing products and services to increase customer accessibility, strengthening the portfolio by channeling financing to targeted segments, and consistently tightening risk management to improve portfolio quality. Specifically, the strategy implemented in 2023 is as follows:



Strategi Strategy	Uraian dan Realisasi	Description and Realization
Fokus 1: Business Refocusing Focus 1: Business Refocusing		
<i>Refocusing pada Nasabah Individu</i> Refocusing on Individual Customers	Bank telah melakukan upaya ritelisasi, yaitu memperkuat <i>customer base</i> , sehingga turut berpengaruh pada pertumbuhan DPK, dana murah, transaksi dan <i>fee based income</i> , serta penyaluran pembiayaan. Pada tahun 2023, Bank berhasil mencapai pertumbuhan segmen Consumer sebesar Rp44 miliar.	The Bank has made retailization efforts, specifically to strengthen its customer base, which has an impact on the growth of deposits, low-cost funds, transactions, fee-based income, and financing distribution. In 2023, the Bank successfully achieved Rp44 billion in consumer segment growth
<i>Enterprise as Entry Gate</i>	Bank telah menjalankan sejumlah proyek yang bertujuan optimalisasi kebun-kebun atau <i>payroll group enterprise</i> dan <i>Islamic Ecosystem</i> sehingga diharapkan dapat menjadi <i>entry gate</i> untuk nasabah individu.	The Bank has completed a number of projects aimed at optimizing plantations or payroll for enterprise groups and the Islamic Ecosystem, with the hope of becoming an entry point for individual customers.
<i>Low Cost Fund, Transaction and Fee Based Income</i>	Bank telah melakukan optimalisasi fitur serta layanan <i>digital banking</i> melalui MDIN maupun MADINA CMS agar dapat meningkatkan pertumbuhan <i>fee based income</i> .	To increase fee-based income growth, the Bank optimized digital banking features and services through MDIN and MADINA CMS.
<i>Islamic and Hajj Ecosystem</i>	Bank terus meningkatkan program akuisisi porsi haji melalui peningkatan secara organik, optimalisasi kerja sama dengan mitra, termasuk kampanye untuk diaspora di Kuala Lumpur. Bank melakukan optimalisasi akuisisi program haji khusus, tercermin dari peningkatan pangsa pasar BMI secara nasional dari 44,3% pada 2022 menjadi 53,8% di 2023.	The Bank continues to expand its Haj portion acquisition program organically, optimizing collaboration with partners, including diaspora campaigns in Kuala Lumpur. The Bank is optimizing the acquisition of special Hajj programs, as evidenced by the increase in BMI's market share nationally from 44.3% in 2022 to 53.8% in 2023.
<i>Collection and Recovery</i>	Bank terus berupaya untuk menjaga kualitas pembiayaan dan meningkatkan <i>recovery</i> untuk pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.	The Bank continues to strive to enhance financing quality and accelerate recovery in order to promote healthy and sustainable business growth.
Fokus 2: Fixing The Fundamentals Focus 2: Fixing The Fundamentals		
<i>People and Organization</i>	Bank telah melakukan upaya peningkatan pada pola pikir, kapasitas dan keahlian pegawai melalui pengembangan dan pelatihan yang mendukung tema strategis Bank tahun 2023.	The Bank has made efforts to improve employees' mindsets, capacity, and skills through development and training that align with the Bank's strategic theme for 2023.
<i>IT and Digital Banking</i>	Penguatan keandalan IT & layanan digital untuk menunjang pertumbuhan bisnis yang telah ditargetkan sebelumnya, serta peningkatan kapabilitas digital melalui fitur dalam MDIN.	Strengthening IT reliability and digital services to support previously targeted business growth, as well as expanding digital capabilities through MDIN features.
<i>Streamlined Business Process</i>	Untuk mewujudkan layanan bisnis yang lebih <i>streamlined</i> , Bank berhasil memperbaiki SLA proses pembiayaan <i>consumer</i> , peningkatan status kantor kas menjadi kantor cabang sehingga lebih banyak produk Bank yang dapat disalurkan, kerja sama dengan <i>developer</i> dan agen properti untuk optimalisasi pertumbuhan bisnis KPR, dan penambahan RM <i>consumer</i> , serta peningkatan fitur MDIN dari sebelumnya 80 fitur menjadi 151 fitur.	To create more streamlined business services, the Bank successfully improved the SLA for the consumer financing process, upgraded cash offices to branch offices so that more Bank products could be distributed, collaborated with developers and property agents to optimize mortgage business growth, added consumer RMs, and increased MDIN features from previously 80 to 151.
<i>Operational Efficiency</i>	Sejalan dengan tujuan Bank untuk mencapai profit yang berkelanjutan, efisiensi operasional merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian Bank. Saat ini Bank telah melakukan peningkatan efisiensi di segala aspek, perbaikan proses, dan juga melaksanakan kontrol biaya yang efektif berdampak pada peningkatan produktivitas.	In line with the Bank's goal of achieving sustainable incomes, operational efficiency is one of the issues that it is concerned about. Currently, the Bank has increased efficiency in all aspects, improved processes, and implemented effective cost control, all of which have contributed to increased productivity.
Fokus 3: Strengthen Enablers Focus 3: Strengthen Enablers		
<i>Union Strategy Enterprise and Retail</i>	Bank mengimplementasikan strategi yang terfokus pada ritelisasi melalui pertumbuhan pembiayaan <i>enterprise</i> pada segmen yang telah ditentukan, yaitu kesehatan, pendidikan, dan <i>enterprise</i> . Nasabah pembiayaan <i>enterprise</i> diharapkan dapat membawa nasabah individu, sehingga pada akhirnya turut meningkatkan pertumbuhan bisnis ritel.	The Bank is implementing a retailization strategy that includes expanding enterprise financing in specific segments such as health, education, and enterprise. It is hoped that enterprise financing customers will refer individual customers, thereby ultimately contributing to retail business growth.



Strategi Strategy	Uraian dan Realisasi	Description and Realization
<i>Contribution Margin</i>	Saat ini Bank mengimplementasikan "Profit-Based Performance" dengan menerapkan orientasi kepada <i>Contribution Margin</i> (CM) kepada seluruh pegawai.	The Bank is currently implementing "Profit-Based Performance" by introducing a Contribution Margin (CM) orientation to all employees.
<i>Distribution Channel Strategy</i>	Untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas <i>channel</i> distribusi, Bank telah melakukan perubahan status 27 kantor kas menjadi kantor cabang, perencanaan implementasi <i>cash recycle machine</i> , pemutakhiran fitur MDIN, MADINA CMS, <i>internet banking</i> , hingga perluasan kerja sama dengan pihak ketiga agar dapat menjangkau lebih banyak nasabah dan meningkatkan transaksi yang dapat mendukung pertumbuhan <i>fee based income</i> .	To increase the productivity and profitability of distribution channels, the Bank has converted the status of 27 cash offices to branch offices, plans to implement cash recycle machines, updated MDIN features, MADINA CMS, internet banking, and expanded cooperation with third parties to reach more customers and increase transactions, all of which can support fee-based income growth.
<i>Inorganic Strategy</i>	Bank tengah melakukan pengkajian terhadap peluang terlaksananya strategi anorganik.	The Bank is currently assessing opportunities to implement an inorganic strategy.
<i>BPKH Strategy</i>	Bank dan BPKH senantiasa bersinergi untuk mengoptimalkan potensi ekosistem haji dan umrah di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi fokus saat ini, antara lain penguatan layanan haji dan umrah, baik melalui kanal digital, <i>relationship manager</i> , maupun <i>alternative channels</i> .	The Bank and BPKH are always working together to maximize the potential of Indonesia's Hajj and Umrah ecosystem. Several initiatives are currently in focus, including improving Hajj and Umrah services through digital channels, relationship managers, and alternative channels.

Peran Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

Dalam merumuskan strategi Bank, Direksi memiliki peran penting, yakni menentukan arah dan prioritas strategi Bank serta memastikan kegiatan usaha selalu sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Direksi dibantu oleh unit kerja dan komite dalam menyiapkan strategi.

Pada tahun 2023, komite di bawah Direksi antara lain: Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Pembiayaan, Komite Bisnis, Komite Pengarah Teknologi Indonesia, Komite Aset dan Liabilitas, serta Komite Sumber Daya Manusia. Selain komite tersebut, Unit Kerja Strategi dan Transformasi turut mendukung Direksi dalam perumusan serta pemantauan realisasi rencana bisnis.

Proses Direksi untuk Memastikan implementasi Strategi

Evaluasi pelaksanaan strategi merupakan tahapan penting yang perlu dilakukan untuk memastikan suatu strategi telah diimplementasi dengan baik. Dalam menjalankan implementasi evaluasi pelaksanaan strategi dan kebijakan strategis, Direksi menerima laporan secara berkala dari komite terkait.

Selanjutnya, Direksi melakukan tindak lanjut dari temuan audit serta rekomendasi audit internal Bank. Termasuk dari auditor eksternal serta hasil pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun otoritas lainnya.

The Board of Directors' Role in Developing Strategy and Strategic Policies

The Board of Directors plays an important role in formulating the Bank's strategy, determining the direction and priorities of the strategy, and ensuring that business activities are always consistent with the established vision and mission. Work units and committees assist the Board of Directors with strategy development.

In 2023, the committees under the Board of Directors include: Risk Management Committee, Financing Policy Committee, Financing Committee, Business Committee, Information Technology Steering Committee, Assets and Liabilities Committee, and Human Resource Committee. Aside from these committees, the Strategy and Transformation Work Unit assists the Board of Directors in developing and monitoring the implementation of business plans.

Board of Directors Process for Ensuring Strategy Implementation

Evaluation of strategy implementation is an important stage that must be completed to ensure that a strategy has been effectively implemented. The Board of Directors receives regular reports from the relevant committees to evaluate strategy implementation and strategic policies.

Furthermore, the Board of Directors follows up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit, including those from external auditors, as well as the results of supervision by the Financial Services Authority (OJK) and other authorities.



Laporan berkala yang diterima menjadi dasar Direksi untuk melakukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dari audit internal Bank. Begitu pun rekomendasi dari auditor eksternal dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh OJK maupun otoritas lainnya.

Pencapaian Kinerja

Dalam situasi ekonomi yang baru pulih dari dampak pandemi COVID-19, Bank Muamalat tetap dapat mencatatkan kinerja yang positif pada tahun 2023. Hal ini tercermin dari peningkatan total aset Bank yang mencapai Rp66,95 triliun, tumbuh 9,11% (yoy). Jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), pencapaian total aset tersebut adalah sebesar 92,69%.

Total penyaluran pembiayaan mencapai Rp22,47 triliun, tumbuh 19,35% (yoy) dengan pencapaian sebesar 84,55% dari target. Hal itu karena *pipeline* pembiayaan yang belum terealisasi sesuai dengan target dan masih berprosesnya pelaksanaan transformasi ritel yang memerlukan waktu penyesuaian hingga dapat melakukan akselerasi bisnis ritel di masa yang akan datang.

Sementara penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Dana Pihak Kedua (DP2) mencapai Rp50,27 triliun, tumbuh 3,96% (yoy). Pencapaian tersebut di bawah target RBB dengan pencapaian sebesar 88,10%. Bank terus menerapkan strategi melakukan *reprofiling* DPK untuk meningkatkan dana murah (*low cost fund*). Hasilnya, CASA Bank tercatat sebesar Rp23,69 triliun, tumbuh 8,42%. Dengan demikian, rasio CASA pada bulan Desember 2023 sebesar 47,14%, meningkat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 45,20%.

Dari sisi profitabilitas, hingga akhir tahun 2023 Bank berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp14,1 miliar atau menurun 72,87% (yoy). Penurunan tersebut merupakan dampak dari peningkatan beban bagi hasil yang disebabkan oleh kenaikan suku bunga BI7DRR dan LPS, serta belum optimalnya pendapatan penyaluran dana lantaran masih berprosesnya transformasi ritel yang telah menunjukkan perbaikan hingga akhir tahun 2023.

Dari sisi permodalan Bank, jumlah ekuitas mencapai Rp5,22 triliun tumbuh 0,28% (yoy). Adapun rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank pada bulan Desember 2023 sebesar 29,42%, lebih tinggi dari target sebesar 26,96%. Rasio tersebut terdiri dari total modal sebesar Rp6,99 triliun dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebesar Rp23,76 triliun. Jika dibandingkan dengan posisi Desember 2022 yang tercatat 32,70%, KPMM Desember 2023 lebih rendah sebagai implikasi positif atas pertumbuhan bisnis.

The periodic reports received serve as the foundation for the Board of Directors' ongoing evaluation and development. The Board of Directors consistently follows up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit. Similarly, external auditor recommendations and the outcomes of OJK and other authorities' supervision.

Performance Achievement

Bank Muamalat can still achieve positive results in 2023, despite the fact that the economy has only recently recovered from the impact of the COVID-19 pandemic. This is reflected in the Bank's total assets, which have increased by 9.11% (yoy) to Rp66.95 trillion. When compared to the target set in the Bank Business Plan (RBB), total assets were achieved at 92.69%.

Total financing distribution reached Rp22.47 trillion, grew by 19.35% (yoy) and achieved 84.55% of the target. This is because the financing pipeline has not yet been realized in accordance with the target, and the retail transformation implementation process is still in progress, requiring time to align so that the retail business can be accelerated in the future.

Meanwhile, the collection of Third-Party Funds (DPK) and Second Party Funds (DP2) reached Rp50.27 trillion, growing by 3.96% (yoy). With an achievement of 88.10%, this performance falls short of the RBB target. The Bank continues to implement the TPF reprofiling strategy in order to increase low-cost funds. Therefore, Bank CASA was recorded at Rp23.69 trillion and grew by 8.42%. Thus, in December 2023, the CASA ratio is 47.14%, an increase from 45.20% in the same period last year.

In terms of profitability, the Bank's income before tax was recorded at Rp14.1 billion as of the end of 2023, a decrease of 72.87% (yoy). This decrease was the result of an increase in profit-sharing expenses caused by the increase in BI7DRR and LPS interest rates, as well as suboptimal income from fund disbursement due to the retail transformation process, which has shown improvement until the end of 2023.

In terms of Bank capital, total equity reached Rp5.22 trillion and grew by 0.28% (yoy). The Bank's Minimum Capital Requirement (KPMM) ratio in December 2023 was 29.42%, exceeding the target of 26.96%. This ratio is made up of total capital of Rp6.99 trillion and Risk Weighted Assets (RWA) of Rp23.76 trillion. When compared to the position in December 2022, which was 32.70%, the KPMM in December 2023 is lower, indicating a positive impact on business growth.



Sementara dari sisi kemampuan Bank dalam menghasilkan laba, tercatat rasio *Return on Equity* (ROE) sebesar 0,28% dan *Return on Asset* (ROA) 0,02%.

Pada tahun 2023, Bank juga telah berupaya meningkatkan efisiensi di segala aspek, perbaikan proses, dan juga melaksanakan kontrol biaya yang efektif sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas. Namun dengan adanya kenaikan beban dari sisi *margin expense*, sehingga secara keseluruhan, rasio Beban Operasional dibandingkan Pendapatan Operasional (Rasio BOPO) tercatat sebesar 99,41%. Posisi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 96,62%. Selanjutnya, Net Imbalan (NI) tercatat 0,37%, lebih tinggi dari yang ditargetkan, yaitu sebesar 0,29%.

Dalam hal kualitas pembiayaan, ditunjukkan oleh rasio *Non-Performing Financing* (NPF) yang sejalan dengan target. Rasio NPF Gross tercatat 2,06%, lebih rendah dari target sebesar 2,62%. Sedangkan NPF Nett sebesar 0,66%, lebih rendah dari target yang sebesar 0,96%. Rasio NPF Gross dan NPF Nett Bank terus mengalami perbaikan jika dibandingkan posisi akhir tahun 2022.

Pencapaian kinerja keuangan hingga akhir tahun 2023 secara umum tetap tumbuh positif, dengan mayoritas indikator keuangan dapat tumbuh positif. Kendati demikian, pencapaian tersebut belum sesuai dengan yang target dalam Rencana Bisnis Bank. Bank akan senantiasa terus meningkatkan pencapaian finansialnya agar sejalan dengan target.

Komitmen Penyaluran Kredit kepada UMKM

Bank Muamalat memiliki komitmen untuk turut serta mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal itu, terutama ditunjukkan melalui penyaluran pembiayaan untuk kelompok usaha tersebut.

Pada tahun 2023, realisasinya mencapai Rp2,29 triliun, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,64 triliun. Penurunan tersebut merupakan dampak dari penyaluran pembiayaan UMKM yang selektif. Fokus utama Bank ditujukan kepada segmen bisnis ekosistem Haji & Umrah, ASN/BPG, pensiun, rumah sakit, pendidikan, dan segmen *enterprise* sebagai *entry gate* untuk segmen ritel dalam memperluas peluang bisnis di lini usaha tersebut.

Meanwhile, the Bank's ability to generate income was measured by its Return on Equity (ROE) ratio of 0.28% and Return on Assets (ROA) of 0.02%.

In 2023, the Bank has also made efforts to increase efficiency in all aspects, improve processes, and implement effective cost control measures, all of which have an impact on productivity. However, due to an increase in margin expenses, the overall Operating Expenses to Operating Income (BOPO ratio) was recorded at 99.41%. This position increased from the previous year's 96.62%. Furthermore, Net Return (NI) was recorded at 0.37%, which exceeded the target of 0.29%.

In terms of financing quality, the Non-Performing Financing (NPF) ratio is consistent with the target. The gross NPF ratio was recorded at 2.06%, below the target of 2.62%. Meanwhile, net NPF was 0.66%, below the target of 0.96%. The Bank's gross and net NPF ratios have continued to improve compared to the position at the end of 2022.

Financial performance achievements until the end of 2023 generally continue to grow positively, with the majority of financial indicators improving. However, this achievement does not meet the Bank's Business Plan targets. The Bank will continue to improve its financial performance to meet targets.

Commitment to the Distribution of Loans to MSMEs

Bank Muamalat is committed to participating in the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This is primarily demonstrated by the distribution of funds to this business group.

In 2023, the realization reached Rp2.29 trillion, slightly lower than the previous year's figure of Rp2.64 trillion. This decline is the result of the selective distribution of MSME financing. The Bank's primary focus is on the Hajj and Umrah ecosystem business segments, ASN/BPG, pensions, hospitals, education, and the enterprise segment, which serves as an entry point for the retail segment to expand business opportunities in these business lines.



PROSPEK USAHA DAN HAL PENTING YANG BERPOTENSI TERJADI KE DEPAN

Perkembangan ekonomi syariah yang membaik di Indonesia turut membawa optimisme bagi pertumbuhan ekosistem halal. Untuk mendukung hal tersebut, saat ini pemerintah telah mengeluarkan bauran kebijakan pemberian stimulus bagi pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan ekosistem *halal value chain* pada sektor-sektor utama, seperti pertanian yang terintegrasi, kuliner halal, dan *fashion muslim*.

Stimulus tersebut diharapkan dapat mendukung Bank untuk mendalami sektor potensial lain, misalnya di bidang kesehatan, khususnya rumah sakit serta sektor pendidikan. Selain itu, potensi ekonomi syariah serta dukungan kebijakan dari pemerintah juga menjadi peluang bagi Bank untuk terus menggali potensi bisnis dari ekosistem haji yang dapat difokuskan pada bisnis transportasi, akomodasi, dan catering. Besarnya jumlah masyarakat muslim di Indonesia dapat memberikan banyak ruang bagi Bank untuk terus meningkatkan pangsa pasar.

Peluang lain bagi Bank adalah pertumbuhan literasi ekonomi syariah, pertumbuhan ekosistem halal serta potensi ekosistem haji. Peningkatan literasi dapat memberikan gambaran mengenai peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait ekonomi syariah, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Posisi Indonesia yang sedang menikmati bonus demografi berpeluang untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Karena itu, jumlah *middle class* akan terus bertambah, sehingga dapat menjadi modal yang kuat jika turut didukung dengan pengembangan sistem pendidikan dan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya.

Oleh karena itu, dengan melanjutkan tema strategis RBB tahun 2023 yaitu "Pertumbuhan Bisnis yang Sehat dan Profit yang Berkelanjutan", pada tahun 2024 Bank juga akan fokus pada percepatan pertumbuhan bisnis yang sehat, optimalisasi pemulihan serta peningkatan produktivitas di tengah dinamika geopolitik di Indonesia maupun di global. Tema strategis tersebut dituangkan dalam bentuk 3 (tiga) aspek utama, yaitu:

BUSINESS PROSPECTS AND IMPORTANT THINGS THAT HAVE THE POTENTIAL TO OCCUR IN THE FUTURE

The improving sharia economic development in Indonesia has raised hopes for the expansion of the halal ecosystem. To this end, the government recently issued a policy mix that encourages the growth of the sharia economy by strengthening the halal value chain ecosystem in key sectors such as integrated agriculture, halal culinary, and Muslim fashion.

It is hoped that this stimulus will allow the Bank to look into other potential sectors, such as healthcare, specifically hospitals, and education. Furthermore, the potential of the Sharia economy and government policy support allow the Bank to keep looking into the Hajj ecosystem's business potential, which can be focused on transportation, lodging, and catering businesses. The large number of Muslim communities in Indonesia presents numerous opportunities for the Bank to increase its market share.

Another opportunity for the Bank is the growth of Sharia economic literacy, the growth of the halal ecosystem, and the potential of the Hajj ecosystem. Increasing literacy can demonstrate an increase in public knowledge and understanding of sharia economics, and it is hoped that it will raise awareness of the importance of sharia principles in everyday life.

Indonesia's current demographic advantage has the potential to propel the country into the ranks of developed nations. Therefore, the number of middle-class people will continue to grow, and they will be able to become valuable assets if the education system and other Human Resources (HR) development programs improve.

Therefore, the Bank will continue to focus on accelerating healthy business growth, optimizing recovery, and increasing productivity in 2024 amidst geopolitical dynamics in Indonesia and worldwide, in line with the RBB strategic theme for 2023, which is "Healthy Business Growth and Sustainable Profits." The strategic theme is outlined in the form of 3 (three) primary aspects, as follows:



1. **Business Refocusing**

Pada pilar pertama, Bank akan melakukan *refocusing* pada nasabah individu untuk meningkatkan *Current Account Saving Account* (CASA) dan pembiayaan segmen ritel. Kemudian, menjadikan *enterprise banking* sebagai *entry gate* nasabah individu untuk memperluas jangkauan bisnis ke dalam ekosistem bisnis dan keuangan syariah, seperti lembaga negara, ASN dan BUMN, komunitas sekolah negeri dan/atau swasta, pesantren, serta universitas dengan penekanan kuat pada prinsip-prinsip Islam, dan ekosistem rumah sakit. Penetrasi pada ekosistem haji dan umrah juga terus dilakukan.

Selain itu, Bank fokus pada peningkatan layanan dan jasa yang dapat mendorong *low cost fund*, serta peningkatan transaksi & *fee based income*. Hal itu diwujudkan melalui pengembangan dan penambahan fitur dan layanan berbasis digital sesuai kebutuhan nasabah.

2. **Fixing The Fundamentals**

Pada pilar kedua, Bank secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dan teknologi informasi, maupun proses bisnis yang sesuai dengan perkembangan bisnis Bank. Strategi tersebut diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM, penyesuaian organisasi sesuai kebutuhan bisnis, peningkatan keandalan teknologi informasi & layanan digital, memperbaiki layanan dan bisnis proses pembiayaan yang lebih *streamline* dan terus menjaga program efisiensi yang efektif. Bank akan mengoptimalkan penyelesaian pembiayaan berkualitas rendah melalui langkah-langkah yang efektif, baik dilakukan oleh Bank atau bekerja sama dengan pihak lain.

3. **Strengthen Enablers**

Pada pilar ketiga, Bank akan memperkuat *enabler* kinerja melalui peningkatan sinergi *enterprise* dan ritel untuk memperoleh peluang bisnis yang lebih luas, menghasilkan, dan berkualitas. Bank terus melanjutkan pengukuran kinerja berbasis profit untuk jaringan dan kantor pusat, meningkatkan produktivitas & profitabilitas *channel* distribusi, serta mencermati peluang pengembangan bisnis secara nonnorganik, dan memperkuat *branding*.

1. **Business Refocusing**

In the first pillar, the Bank will refocus on individual customers in order to increase Current Account Savings Accounts (CASA) and retail segment financing. Afterward, make enterprise banking the entry point for individual customers to broaden their business reach into the Sharia business and financial ecosystem, which includes state institutions, ASN and SOE, public and/or private school communities, Islamic boarding schools, universities with a strong emphasis on Islamic principles, and the hospital ecosystem. Penetration into the Hajj and Umrah ecosystems also continues.

In addition, the Bank focuses on improving services and promoting low-cost funds, as well as increasing transaction and fee-based income. This is accomplished by developing and implementing digital-based features and services in response to customer needs.

2. **Fixing the Fundamentals**

In the second pillar, the Bank continuously improves the capacity and capability of human resources, information technology, and business processes in line with the Bank's business development. This strategy is realized by increasing HR capacity and capabilities, adjusting the organization to meet business needs, improving the reliability of information technology and digital services, streamlining services and business financing processes, and maintaining effective efficiency programs. The Bank will optimize the resolution of low-quality financing by taking effective steps, either on its own or in collaboration with third parties.

3. **Strengthening Enablers**

In the third pillar, the Bank will strengthen performance enablers by increasing enterprise and retail synergies to create more diverse, productive, and high-quality business opportunities. The Bank continues to measure profit-based performance for the network and head office, increase distribution channel productivity and profitability, explore non-organic business development opportunities, and strengthen branding.



PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu faktor fundamental penting dalam menjalankan pengelolaan usaha Bank. Melalui penerapan GCG, diharapkan dapat mendukung Bank mencapai pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan.

Bank memandang GCG sebagai prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta cerminan dunia usaha yang beretika. Untuk itu, Bank melakukan penilaian penerapan GCG secara berkala untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG yang antara lain tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Struktur organisasi Bank Muamalat telah memadai dan terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham telah sesuai dengan ketentuan. Seluruh anggota DPS dan Direksi telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Adapun dari 4 (empat) jumlah anggota Dewan Komisaris, terdapat 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari OJK.

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pengawasan, Bank telah memiliki 4 (empat) komite di bawah Dewan Komisaris: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Perusahaan.

Sedangkan komite di bawah Direksi ada 7 (tujuh): Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Pembiayaan, Komite Bisnis, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Aset dan Liabilitas, dan Komite Sumber Daya Manusia. Komite-komite ini untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Selain itu, juga terdapat Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk secara independen terhadap satuan kerja operasional Bank.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The application of good corporate governance (GCG) principles is an important fundamental factor in the Bank's business management. The Bank hopes that the implementation of GCG will help it achieve sustainable business growth.

The Bank sees GCG as the principle that underpins company management processes and mechanisms based on legal and regulatory compliance, as well as a reflection of an ethical business world. So, the Bank regularly checks how well GCG is being implemented to make it better. This is in line with Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 from December 7, 2009, which is about implementing good corporate governance for Sharia commercial banks and Sharia business units, as well as Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014, which is about checking the health level of Sharia.

Bank Muamalat has an adequate organizational structure, which includes the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board (SSB), Corporate Secretary, Internal Audit Work Unit, Risk Management Work Unit, and Compliance Work Unit. The number and composition of members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and SSB appointed by the General Meeting of Shareholders are consistent with the provisions. The OJK has approved all SSB members and the Board of Directors. The OJK has approved 3 (three) out of 4 (four) members of the Board of Commissioners.

The Bank has 4 (four) committees under the Board of Commissioners to assist with supervisory duties: the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Corporate Governance Committee.

Meanwhile, there are 7 (seven) committees under the Board of Directors: the Risk Management Committee, the Financing Policy Committee, the Financing Committee, the Business Committee, the Information Technology Steering Committee, the Assets and Liabilities Committee, and the Human Resources Committee. These committees are designed to help the Board of Directors carry out its duties and responsibilities effectively. The Internal Audit Work Unit, Risk Management Work Unit, Corporate Secretary, and Compliance Work Unit were established separately from the Bank's operational work units.



Pada Semester II- 2023, Bank melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) pelaksanaan GCG dengan hasil penilaian “Peringkat 2” yang mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai, maka secara umum, kelemahan penerapan prinsip GCG yang ada tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Pencapaian lainnya di bidang GCG, Bank telah berhasil meraih sertifikat ISO 37001:2016. Perolehan sertifikat tersebut merupakan komitmen dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Bank juga memperoleh pengakuan atas penerapan GCG dari pihak eksternal pada tahun 2023. Di antaranya, penghargaan di ajang “GRC Performance Excellence Award 2023”, “The Best GRC for Corporate Governance Compliance 2023” (*banking industries*). Selain itu, Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan dinobatkan sebagai “The Best CEO For GRC Excellence 2023”, dan Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Hayunaji sebagai “The Best Corporate Secretary 2023”.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Penerapan Teknologi Informasi (TI) pada tahun 2023 merupakan bagian dari upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bank. Pencapaiannya, antara lain:

1. Membangun struktur organisasi yang efektif, antara lain meliputi re-organisasi, pemenuhan kebutuhan SDM, yang bertujuan mengoptimalkan fungsi-fungsi dan unit kerja secara efektif dalam menunjang pertumbuhan bisnis Bank.
2. Meningkatkan dan memastikan bahwa infrastruktur TI Bank yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan telekomunikasi dan *data center* serta *Disaster Recovery Center* selalu dalam keadaan optimal agar dapat mendukung operasional Bank dan mengantisipasi pertumbuhan bisnis.
3. Membangun dan meningkatkan kemampuan sistem aplikasi Bank agar dapat mendukung pertumbuhan bisnis Bank yang dilakukan melalui pengembangan fitur-fitur baru yang lebih unggul, sehingga memberikan kenyamanan serta keamanan kepada nasabah dalam bertransaksi, sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bank.
4. Mengutamakan proses yang andal dan efisien, eksekusi tepat waktu dengan akurasi yang tinggi, berfokus pada *customer centric*, serta penyelenggaraan SLA yang efektif dan pelayanan yang prima, tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan proses operasional sehari-hari.

In Semester II-2023, the Bank conducted a self-assessment of GCG implementation and received a “Rank 2” rating, indicating that the Bank’s management has implemented GCG in a generally positive manner. This is reflected in the adequate implementation of GCG principles, so weaknesses in the implementation of existing GCG principles are minor and can be addressed through normal Bank management actions.

Another achievement in the field of GCG is that the Bank has successfully obtained the ISO 37001:2016 certification. Obtaining these certification represents a commitment to implementing the Anti-Bribery Management System (SMAP).

In addition, the Bank received external recognition in 2023. Among them were awards for “GRC Performance Excellence Award 2023” and “The Best GRC for Corporate Governance Compliance 2023” (*banking industries*). In addition, Bank Muamalat President Director Indra Falatehan was named “The Best CEO for GRC Excellence 2023,” and Bank Muamalat Corporate Secretary Hayunaji was named “The Best Corporate Secretary 2023.”

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT

The implementation of information technology (IT) in 2023 is part of an effort to support the achievement of the Bank’s vision and mission. These achievements include:

1. Building an effective organizational structure, which includes reorganization and meeting HR needs, with the goal of effectively optimizing functions and work units to support the Bank’s business growth.
2. Improve and ensure that the Bank’s IT infrastructure, which includes hardware, software, telecommunications networks, data centers, and the Disaster Recovery Center, is always in top condition to support the Bank’s operations and anticipate business growth.
3. Develop and improve the capabilities of the Bank’s application system so that it can support the growth of the Bank’s business. This is accomplished by developing new, superior features that provide customers with comfort and security in transactions while increasing the efficiency and effectiveness of bank operations.
4. Prioritize reliable and efficient processes, timely execution with high accuracy, customer centricity, and the implementation of effective SLAs and excellent service, all while adhering to the principle of prudence in daily operational processes.



5. Meningkatkan kemampuan semua karyawan agar selalu proaktif dalam melihat dan mengantisipasi peluang risiko yang mungkin terjadi, melakukan tindakan pencegahan yang tepat sasaran, serta memitigasi risiko yang teridentifikasi (*looking forward risk mitigation*)

Dalam rangka peningkatan layanan digital, Bank Muamalat telah melakukan pengembangan fitur MDIN dari 80 fitur menjadi 151 fitur, antara lain:

1. Implementasi fitur pembayaran tiket kereta api, operator penerbangan Lion Air, tagihan internet MyRepublic dan First Media melalui Muamalat DIN.
2. Implementasi fitur "Hijrah Tour" bekerja sama dengan GoHalalGo untuk pembelian paket umrah.
3. Implementasi fitur manajemen kartu debit/ATM pada Muamalat DIN.
4. Penambahan Mitra untuk *biller* pembayaran ziswaf pada Muamalat DIN.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bank Muamalat meyakini, pengembangan program pelatihan karyawan dan manajemen talenta yang efektif akan mendukung tercapainya prioritas strategi dan fokus Bank. Melalui program pengembangan, Bank menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi andal, berintegritas tinggi serta produktif.

SDM yang andal tersebut mengelola jalannya organisasi berbasis teknologi digital agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan siap menghadapi era revolusi digital 4.0. Maka dari itu, proses pengembangan dan transformasi SDM dengan menyelaraskan kurikulum pendidikan dan pelatihan serta manajemen talenta menuju kualitas kompetensi yang andal, merupakan hal utama dalam proses pengembangan SDM yang siap bersaing di era yang semakin menantang. Guna mendukung tercapainya tujuan dan fokus bisnis di tahun 2023, strategi pengembangan SDM diprioritaskan pada 7 (tujuh) inisiatif sebagai berikut:

1. Program pengembangan dan pelatihan yang mendukung visi dan misi Bank.
2. Peningkatan kompetensi *soft skill* dan *technical skill*, sehingga mendorong produktivitas

5. Improve all employees' ability to always be proactive in seeing and anticipating potential risk opportunities, taking appropriate preventive actions, and mitigating identified risks (*looking forward risk mitigation*).

In order to improve digital services, Bank Muamalat has developed the MDIN feature from 80 to 151 features, which include:

1. Implementation of payment features for train tickets, Lion Air flight operators, MyRepublic, and First Media internet bills using Muamalat DIN.
2. Implementation of the "Hijrah Tour" feature in collaboration with GoHalalGo for purchasing Umrah packages.
3. Implementation of debit/ATM card management features to Muamalat DIN.
4. The addition of partners as billers for ziswaf payments at Muamalat Din.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Bank Muamalat believes that developing employee training programs and effective talent management will help the bank achieve its strategic priorities and focus. The Bank's development programs prepare human resources with dependable competence, high integrity, and productivity.

These dependable human resources manage the operations of a digital technology-based organization, ensuring that it meets its objectives and is prepared to face the era of digital revolution 4.0. Therefore, the process of developing and transforming human resources by aligning education and training curricula as well as talent management toward reliable competency quality is the most important aspect of developing human resources capable of competing in an increasingly challenging era. In order to support the achievement of business goals and focus in 2023, the HR development strategy prioritizes the following 7 (seven) initiatives:

1. Development and training program to support the Bank's vision and mission.
2. Increasing soft and technical skill competencies to encourage productivity.



3. *Business Function* dan *key enabler function* dengan optimalisasi *blended learning*.
4. Peningkatan kompetensi digital, baik dari sisi *mindset* maupun *skill set*.
5. Peningkatan kapasitas/kemampuan manajerial, kepemimpinan dan manajemen talenta.
6. Membangun kemampuan organisasi bertransformasi dan bersaing di era teknologi finansial dan kebiasaan baru.
7. Meningkatkan keterlibatan & keterlekatan karyawan (*employee engagement*) bersama *Senior Management Team*, sehingga meningkatkan *employer branding* yang sesuai dengan budaya perusahaan dan *brand promise* "IDEAL Place to Work".
8. Menyelaraskan kurikulum pengembangan dan pelatihan.

Hingga akhir tahun 2023, dalam penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM, Bank Muamalat telah melakukan sejumlah aktivitas, di antaranya:

1. Penyesuaian struktur organisasi yang telah efektif sejak 1 November 2023 dengan tujuan mempertajam perluasan bisnis dan efektivitas operasional Bank. Bank terus melakukan *review* dan penyesuaian organisasi sejalan dengan arah strategis dan akselerasi bisnis.
2. Bank melakukan *employee engagement survey* dengan nilai 79% ("Highly Engage"). Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap karyawan terlibat dalam setiap aktivitas Bank, sehingga menjadi modal karyawan untuk terus meningkatkan produktivitas.
3. Menjalankan program kerja dalam perbaikan *mindset, capability & skill* pegawai. Untuk itu, Bank telah menjalankan berbagai program pendidikan dan pelatihan seperti *certified network defender, developing your growth mindset and grit for peak performance, excel to excellence program, embrace transformation to perform, excellent customer service in selling, problem solving & root cause analysis*, dan program konsultasi transformasi pengembangan bisnis serta pelatihan lainnya yang mendorong peningkatan bisnis dan *supporting*.
4. Melaksanakan *campaign* untuk meningkatkan keterlibatan seluruh karyawan pada transformasi perusahaan.

3. Business function and key enabler function through optimizing blended learning.
4. Improving digital competence, both in terms of mindset and skill set.
5. Enhanced managerial capacity/ability, leadership, and talent management.
6. Build the organization's ability to transform and compete in the era of financial technology and new habits.
7. Increase employee involvement and engagement with the Senior Management Team, resulting in increased employer branding in line with the company culture and brand promise, "IDEAL Place to Work".
8. Align the development and training curricula.

Until the end of 2023, Bank Muamalat has carried out a number of activities to strengthen HR capacity and capability, including:

1. Adjustment to the organizational structure, which have been in effect since November 1, 2023, with the goal of enhancing the Bank's business growth and operational effectiveness. The Bank continues to review and adjust its organization in accordance with strategic direction and business acceleration.
2. The Bank conducted an employee engagement survey with a score of 79% ("Highly Engage"). This demonstrates that every employee is involved in every bank activity, resulting in employee capital that can be used to increase productivity.
3. Implementing work programs to improve employee mindsets, capabilities, and skills. Consequently, the Bank has implemented a variety of education and training programs, including certified network defender, developing your growth mindset and grit for peak performance, excel to excellence program, embrace transformation to perform, excellent customer service in selling, problem solving and root cause analysis, business development transformation consulting program, and other training that promotes business improvement and support.
4. Launching a campaign to increase all employees' involvement in the company's transformation.



PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Bank Muamalat memandang bahwa penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen Bank membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama pemangku kepentingan, terutama masyarakat dan lingkungan sosial di mana bank beroperasi. Kegiatan itu dilakukan terpadu dengan aktivitas usaha Bank yang berbasis pada tujuan, visi dan misi perusahaan, sehingga meningkatkan reputasi Bank Muamalat sebagai bank syariah di Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan CSR Bank didukung oleh beberapa sumber pendanaan, antara lain dari dana internal Bank, dana Zakat ataupun dana lainnya seperti Infak dan Sedekah.

Pelaksanaan kegiatan CSR dilakukan bekerja sama dengan Baitulmal Muamalat (BMM). Realisasinya sepanjang tahun 2023, antara lain meliputi bidang Sosial Dakwah, Kemanusiaan, Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI DAN ALASANNYA

Sepanjang tahun 2023, komposisi Direksi tidak mengalami perubahan, masih sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 November 2022, sedangkan pada RUPS selanjutnya yaitu RUPS Tahunan tanggal 11 Mei 2023 tidak dilakukan perubahan pada susunan Direksi. Dengan demikian, susunan Direksi Bank hingga terbitnya Laporan Tahunan ini adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	Indra Falatehan	President Director
Direktur Kepatuhan	Karno	Compliance Director
Direktur	Hery Syafril	Director
Direktur	Wahyu Avianto	Director
Direktur	Suhendar	Director

IMPLEMENTATION OF SOCIAL AND COMMUNITY RESPONSIBILITY

Bank Muamalat views that implementing corporate social responsibility (CSR) demonstrates the bank's responsibility and commitment to improving the quality of life for its stakeholders, particularly the community and social environment in which it operates. This activity is carried out in conjunction with the Bank's business activities, which are based on the company's goals, vision, and mission, thereby strengthening Bank Muamalat's reputation as a sharia bank in Indonesia.

The implementation of the Bank's CSR activities is supported by several funding sources, including internal Bank funds, Zakat funds or other funds such as Infaq and Sadaqah.

The implementation of CSR activities is also carried out in partnership with Baitulmal Muamalat (BMM). The realization for 2023 among others include the fields of Social Da'wah, Humanity, Education, Health and Economy.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS, AND THE REASONS

The Board of Directors remains unchanged in 2023, as per the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on November 29, 2022. No changes were made to the composition of the Board of Directors at the next GMS, the Annual GMS on May 11, 2023. Thus, as of the publication of this Annual Report, the composition of the Bank's Board of Directors is the following:



APRESIASI DAN PENUTUP

Sebagai penutup, Direksi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, baik nasabah, mitra usaha, maupun pemegang saham dan regulator atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan dalam menjalankan kepengurusan bisnis Bank. Kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, Direksi memberikan apresiasi atas pengawasan, arahan, nasihat dan kerja sama yang terjalin demi kemajuan Bank.

Kepada seluruh karyawan, Direksi juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi yang diberikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di tengah beragam tantangan yang dihadapi. Direksi menyadari bahwa kontribusi dari seluruh karyawan sangat berperan dalam proses pencapaian target serta visi misi Bank ke depan.

Pencapaian kinerja Bank Muamalat tahun 2023 akan menjadi pemicu semangat optimalisasi kinerja pada tahun-tahun ke depan. Direksi meyakini Bank Muamalat memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

APPRECIATION AND CLOSING

In closing, the Board of Directors expressed its gratitude to all stakeholders, including customers, business partners, shareholders, and regulators, for their trust and support in managing the Bank's business. The Board of Directors expresses its appreciation to the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for their supervision, direction, advice, and cooperation in furthering the Bank's progress.

The Board of Directors also expressed its highest appreciation to all employees for their dedication to carrying out their duties and responsibilities in the face of various challenges. The Board of Directors recognizes that the contribution of all employees plays an important role in the process of achieving the Bank's targets, vision, and mission.

Bank Muamalat's performance achievements in 2023 will fuel the spirit of performance optimization in the coming years. The Board of Directors believes that Bank Muamalat is resilient in the face of various challenges.

Wassalamualaikum, Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 30 April 2024 | April 30, 2024

Indra Falatehan

Direktur Utama
President Director



Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior

Board of Directors and Senior Executive Vice President



1

2

3

4

1

Hery Syafril

Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan
Director of Financing Business Risk

2

Suhendar

Direktur Keuangan dan Strategi
Director of Finance and Strategy

3

Karno

Direktur Kepatuhan, Risiko, dan Hukum
Compliance, Risk, and Legal Director

4

Wahyu Avianto

Direktur Operasi dan Digital
Director of Operations and Digital



Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Function



Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan 2023
2023 Financial Statements



5

6

7

8

5

Indra Falatehan
Direktur Utama
President Director

6

Irvan Yulian Noor
SEVP Enterprise Banking
SEVP Enterprise Banking

7

Riksa Prakoso
SEVP Human Capital
SEVP Human Capital

8

Dedy Suryadi Dharmawan
SEVP Retail Banking
SEVP Retail Banking



Surat Pernyataan Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

**Statement of the Board of Commissioners
regarding Responsibility for the 2023 Annual Report of
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dimaksud.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 April 2024

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2023 Annual Report of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk has been fully disclosed and we are solely responsible upon the accuracy of all contents of the Annual Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, April, 30 2024

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Amin Said Husni

Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama
Independent Commissioner/Acting President Commissioner

Sartono

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Andre Mirza Hartawan

Komisaris
Commissioner



Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

**Statement of the Board of Directors
regarding Responsibility for the 2023 Annual Report of
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dimaksud.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2023 Annual Report of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk has been fully disclosed and we are solely responsible upon the accuracy of all contents of the Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 30 April 2024

Jakarta, April, 30 2024

Direksi

Board of Directors

Indra Falatehan

Direktur Utama
President Director

Hery Syafril

Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan
Financing Risk Business Director

Karno

Direktur Kepatuhan, Risiko, dan Hukum
Compliance, Risk, and Legal Director

Wahyu Avianto

Direktur Operasi dan Digital
Operation and Digital Director

Suhendar

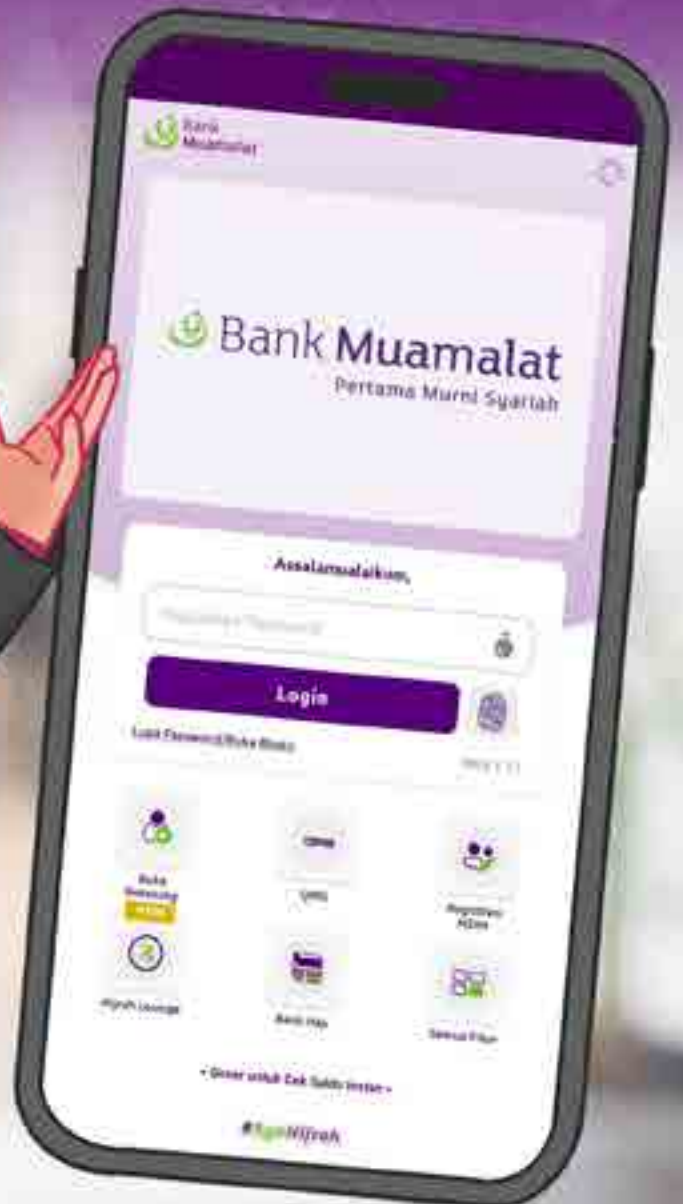
Direktur Keuangan dan Strategi
Finance and Strategy Director



Profil Perusahaan

Company Profile

Identitas Perusahaan Company Identity	70	Profil Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior Profile of the Board of Directors and Senior Executive Officers	128
Riwayat Singkat Company Identity	72	Profil Pejabat Eksekutif Profile of Executive Officers	141
Logo Perusahaan The Company's Logo	75	Statistik Karyawan Employee Statistics	146
Jejak Langkah Milestones	76	Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali Information on Major and Controlling Shareholders	157
Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Value	78	Kronologi Pencatatan Saham Share Listing Chronology	160
Bidang Usaha Line of Business	80	Kronologi Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Listing of Other Securities	161
Produk dan Layanan Products and Services	83	Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	162
Wilayah Operasional Operational Area	97	Profil Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Profile of Subsidiaries and Associates	163
Peta Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi Map of Business Network and Operating Areas	110	Daftar Entitas Anak dan Asosiasi List of Subsidiaries and Associates	166
Struktur Organisasi Organization Structure	112	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Office	167
Komite Level Komisaris Board of Commissioners Level Committees	114	Nama dan Alamat Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal Name and Address of Capital Market Supporting Institutions and Professionals	167
Komite Level Direksi Board of Directors Level Committees	115	Keanggotaan Asosiasi Membership in Associations	169
Profil Dewan Pengawas Syariah Profile of the Sharia Supervisory Board	116	Informasi pada Website Perusahaan Information on the Company's Website	170
Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners	122		





Identitas Perusahaan

Company Identity



Nama Name

PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk

Nama Panggilan Initial Name

Bank Muamalat
Indonesia (BMI)

Bidang Usaha Line of Business

Perbankan Syariah
Sharia Banking



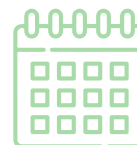
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment

Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 Tambahan No. 1919A.

Deed No. 1 dated November 1, 1991 AD or Rabiul Akhir 24, 1412 H, made in the presence of Mr. Yudo Paripurno, S.H., Notary, in Jakarta. The deed of establishment has obtained the approval of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with the Decree No. C2-2413.HT.01.01 Year 1992 dated March 21, 1992 and was registered at the Central Jakarta District Court office on March 30, 1992 under No. 970/1992 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 34 dated 28 April 1992 Supplement No. 1919A.

Dasar Hukum Pendirian Date of Establishment

1 November 1991/Resmi
beroperasi 1 Mei 1992
1 November 1991/Officially
operational on 1 May 1992



Dasar Hukum Pendirian Authorized Capital

Rp5.600.000.000.115

Modal Ditempatkan Issued Capital

Rp2.297.736.324.240



Kepemilikan Saham Share Ownership

• Badan Pengelola Keuangan Haji Haji Financial Management Agency	: 82,65%
• Ir. Andre Mirza Hartawan, MBA	: 5,19%
• Apliani	: 2,48%
• Reza Rhenaldi Syaiful	: 2,19%
• Dewi Monita	: 2,18%
• Islamic Development Bank	: 2,04%
• Masyarakat (masing-masing <5%) Public (each <5%)	: 3,26%
Total	: 100,00%

Jumlah Karyawan Number of Employees

2.597 orang | person





Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Function



Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan 2023
2023 Financial Statements



Anggaran Dasar Terkini Most Recent Articles of Association

Akta No. 21 tanggal 9 Desember 2022 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 14 Desember 2022 No. AHU-AH.01.03-0326274.

Deed No. 21 dated December 9, 2022 made before Notary Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, and notification of the amendment to its articles of association has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with his letter dated December 14, 2022 No. AHU-AH.01.03-0326274.



Entitas Asosiasi dan Afiliasi Associates and Affiliates

- PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF)
- Baitulmaal Muamalat (BMM)
- Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat
Muamalat Financial Institution Pension Fund
- PT Syarikat Takaful Indonesia



Jaringan Layanan Network of Services

235 Kantor Layanan, terdiri dari
Service Offices, consisting of:

- Kantor Cabang | Branch Offices : 80
- Kantor Cabang Pembantu
Sub-Branch Offices : 155

ATM	: 564
Mobile Branch	: 55
ATM Bersama	: ±77.000
ATM Prima Prima ATM	: ±90.000

Alamat Kantor Cabang Luar Negeri Address of Overseas Branch Office

Kantor Cabang Kuala Lumpur, Malaysia
Suite 1.03-1.05 Ground Floor No. 67
Wisma Goldhill Jalan Raja Chulan 50200
Kuala Lumpur Malaysia 50200
Tel. : +603 2711 0807/7427



Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

corporate.affairs@bankmuamalat.co.id

Kontak Alamat Contact Address

Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary
corporate.affairs@bankmuamalat.co.id

Hubungan Investor | Investor Relations
Email : investor.relations@bankmuamalat.co.id

Call Center SalaMuamalat
1500016

Alamat Kantor Pusat Head Office Address

Muamalat Tower
Jl. Prof Dr Satrio, Kav. 18, Kuningan
Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940
Tel. : (021) 8066 6000
Fax. : (021) 8066 6001
E-mail : info@bankmuamalat.co.id

Situs dan Media Sosial Website and Social Media

- BankMuamalatIndonesia
- @BankMuamalat
- @bank.muamalat
- Bank Muamalat
- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk



Riwayat Singkat

Company Identity

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat Indonesia," "BMI," "Bank") merupakan bank pertama di Indonesia yang beroperasi menggunakan konsep perbankan secara syariah. BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim di Indonesia, yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Secara legal, BMI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, yang dibuat di hadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A.

Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan. Untuk perubahan terakhir, dirumuskan pada Akta No. 06 tanggal 13 November 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 20 November 2023 No. AHU-AH.01.03-0143901.

Bank mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992 M/27 Syawal 1412 H. Tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir BMI. Bank memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada BMI untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

BMI merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara resmi beroperasi sebagai bank devisa sejak tanggal 27 Oktober

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat Indonesia," "BMI," "Bank") is the first bank in Indonesia to operate using Islamic banking principles. BMI was founded based on the ideas of the Indonesian Ulama Council (MUI), the Indonesian Muslim Intellectual Association (ICMI), and Muslim entrepreneurs in Indonesia, which later received support from the Government of the Republic of Indonesia.

Legally, BMI was established based on Deed No. 1 dated November 1, 1991 AD, or 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, executed before Yudo Paripurno, SH, a notary in Jakarta. The deed of establishment has been ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia (now called the Minister of Law and Human Rights) with Decree No. C2-2413.HT.01.01 dated March 21, 1992, and registered at the Central Jakarta District Court on March 30, 1992, under No. 970/1992, and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 34 dated April 28, 1992, additional No. 1919A.

The Bank's Articles of Association have undergone several amendments. For the latest amendment, it was formulated in Deed No. 06 dated November 13, 2023, executed before Notary Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, and the notification of its articles of association amendment has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as per their letter dated November 20, 2023, No. AHU-AH.01.03-0143901.

The Bank commenced operations on May 1, 1992 M (Shawwal 1412 H). That date was also designated as the birth date of BMI. The Bank obtained permission to operate as a commercial bank based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 1223/MK.013/1991 dated November 5, 1991, and the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 430/KMK.013/1992 regarding the Granting of Business Permits for Companies in Jakarta dated April 24, 1992, as amended by the Decree of the Minister of Finance No. 131/KMK.017/1995 concerning Changes to the Decree of the Minister of Finance No. 430/KMK.013/1992 regarding the Granting of Business Permits for Companies dated March 30, 1995, which in its decision granted permission to BMI to conduct business as a commercial bank based on sharia principles.

BMI is a public company whose shares are not listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and officially operates as a foreign exchange bank since October 27, 1994, based on the



1994, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank "Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tentang Penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia Menjadi Bank Devisa tanggal 27 Oktober 1994. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-79/MK.03/1995 tanggal 6 Februari 1995, BMI secara resmi ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-9383/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006, BMI memperoleh status Bank Persepsi yang mengizinkan Bank menerima setoran-setoran pajak. Kemudian, pada tanggal 25 Juli 2013, BMI telah menjadi peserta program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Penjamin Simpanan No. S.617/DPMR/VII/2013 perihal Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan. Selanjutnya, BMI ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 4/BPKH.00/2018 tanggal 28 Februari 2018.

BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah Muamalat (DPLK Syariah Muamalat) dan *multifinance* syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Shar-e yang diluncurkan pada 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 berhasil memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kartu debit syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*.

Seluruh produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya, tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri.

Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, BMI telah memiliki 235 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia.

Directorate General of Banking Bank "Indonesia No. 27/76 / KEP / DIR regarding the Appointment of PT Bank Muamalat Indonesia as a Foreign Exchange Bank dated October 27, 1994. Based on the Decree of the Minister of Finance No. S-79/MK.03/1995, dated February 6, 1995, BMI was officially designated as a Perception Foreign Exchange Bank of the State Treasury.

Based on the Decree of the Minister of Finance No. S-9383/ MK.5/2006 dated December 28, 2006, BMI obtained the status of a perception bank, which allows the Bank to receive tax deposits. Then, on July 25, 2013, BMI became a participant in the Deposit Insurance Corporation (LPS) program as stated in the Letter of the Deposit Insurance Corporation No. S.617/ DPMR/VII/2013 regarding the Membership of the Deposit Insurance Corporation. Furthermore, BMI was designated as the Bank Receiving the Hajj Operational Fee Deposit based on the Decree of the Hajj Financial Management Agency No. 4/BPKH.00/2018 dated February 28, 2018.

BMI continues to innovate by issuing Sharia financial products such as Mudharabah Subordinated Sukuk, Sharia Insurance (Takaful Insurance), Sharia Financial Institution Pension Fund (DPLK Sharia Muamalat), and Sharia Multifinance (Al-Ijarah Indonesia Finance), all of which are breakthroughs in Indonesia. In addition, the Shar-e product launched in 2004 was the first instant savings account in Indonesia.

The Shar-e Gold Visa Debit product launched in 2011 received an award from the Indonesian Record Museum (MURI) as the first Sharia debit card with chip technology in Indonesia, as well as e-channel services such as internet banking, mobile banking, ATMs, and cash management.

All of these products are pioneering Sharia products in Indonesia and are significant milestones in the history of Islamic banking. As the Bank's capacity grows and is recognized, BMI expands its wings by continually expanding its branch network, not only throughout Indonesia but also internationally.

In 2009, the Bank obtained permission to open a branch office in Kuala Lumpur, Malaysia, becoming the first bank in Indonesia and the only one to expand its business in Malaysia. To date, BMI has 235 service offices, including 1 (one) branch office in Malaysia. The Bank's operations are



Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 564 unit ATM Muamalat, 90.000 jaringan ATM Prima, 77.000 ATM Bersama, dan 55 unit Mobil Kas Keliling.

BMI telah melakukan *rebranding* pada logo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai “Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional.” Bank terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional.

Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas asosiasi dan afiliasi, yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Syariah Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

INFORMASI PERUBAHAN NAMA

Sesuai dengan akta pendirian, yakni Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta, BMI didirikan dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia. Kemudian, merujuk pada merujuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah yang menentukan kewajiban mencantumkan kata “Syariah” setelah kata “Bank” dan disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Juni 2000, Bank berganti nama menjadi PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk.

Setelah itu, pada 23 April 2008 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Bank kembali mengganti namanya, menggunakan nama sebelumnya yakni PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Hal ini dilakukan sesuai dengan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 5 ayat 4 di mana pencantuman kata “Syariah” setelah kata “Bank” hanya berlaku bagi bank yang mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008.

also supported by an extensive service network consisting of 564 Muamalat ATMs, 90,000 Prima ATM networks, 77,000 Bersama ATMs, and 55 Mobile Cash Vans.

BMI has rebranded its Bank logo to further enhance awareness of its image as an “Islamic, Modern, and Professional” Bank. The Bank continues to achieve various accomplishments and awards, both nationally and internationally.

Today, in providing its best services, BMI operates together with several associations and affiliate entities, namely Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF), which provides Sharia financing services; Sharia Pension Fund Muamalat (DPLK Sharia Muamalat), which provides pension fund services through the Financial Institution Pension Fund; and Baitulmaal Muamalat, which provides services for channeling Zakat, Infaq, and Sadaqah funds (ZIS).

NAME CHANGE INFORMATION

In accordance with the deed of establishment, namely Deed No. 1 dated November 1, 1991 AD or 24 Rabiul Akhir 1412 H, executed before Yudo Paripurno, SH, Notary, in Jakarta, BMI was established under the name PT Bank Muamalat Indonesia. Then, referring to Bank Indonesia Director Decree No. 32/34/KEP/DIR dated May 12, 1999, concerning Commercial Banks Based on Sharia Principles, which stipulates the obligation to include the word “Sharia” after the word “Bank” and was ratified at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 22, 2000, the Bank changed its name to PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk.

Subsequently, on April 23, 2008, based on the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, the Bank changed its name again, using its previous name, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. This was done in accordance with Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking, Article 5, Paragraph 4, where the inclusion of the word “Sharia” after the word “Bank” only applies to banks that obtain business permits after the enactment of Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking.



Logo Perusahaan

The Company's Logo



Bank
Muamalat
Pertama Murni Syariah

SIMBOL HURUF

Simbol huruf yang diambil dari alfabet arab (hijaiyah) “Dal-Yaa’- Nuun” memiliki makna ganda yaitu:

1. “Ad Diin” yang berarti agama (Islam).
2. “Madaniyah” yang mewakili niat-niat luhur Bank Muamalat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai konsep Islam.

LETTER SYMBOL

The letter symbol is taken from the Arabic alphabet (hijaiyah) “Dal-Yaa’- Nuun” has a dual meaning, namely:

1. “Ad Deen” means religion (Islam).
2. “Madaniyah” represents the noble intentions of Bank Muamalat Indonesia to create a just and prosperous society in accordance with the Islamic concept.

WARNA

Terdiri dari 2 warna Hijau dan Ungu yang keduanya juga memiliki makna sebagai berikut:

1. Hijau yang merepresentasikan nilai universal yang segar, memiliki kesesuaian dengan gambaran dunia Islam sehingga relevan menggambarkan nilai Islami.
2. Ungu pada huruf dan tulisan Bank Muamalat, memberikan makna kedewasaan dan kemapanan yang sesuai dengan nilai profesionalisme.

COLOR

Consists of two colors which are Green and Purple. Both have the following meanings:

1. Green represents a clear universal value, in accordance with the relevant description of the Islamic world to describe Islamic values.
2. Purple on the letters and writings of Bank Muamalat means maturity and stability in accordance with the professionalism value.

TULISAN

“Pertama Murni Syariah” merupakan simbolisasi bahwa Bank Muamalat Indonesia adalah Bank Syariah pertama di Indonesia.

TAGLINE

“First Pure Sharia” is a symbol that Bank Muamalat Indonesia is the first Sharia Bank in Indonesia.



Jejak Langkah

Milestones

1991

Pendirian Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabiul Akhir 1412 H.

The establishment of Bank Muamalat Indonesia as the first Islamic bank in Indonesia on November 1, 1991 or Rabiul Akhir 24, 1412 H.

1992

Mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H dan menjadi pelopor bisnis keuangan syariah lainnya.

Commenced operations on May 1, 1992 or Shawal 27, 1412 H and became a pioneer for other sharia financial businesses.

1993

Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat sahamnya di Bursa.

The Company became a Public Company whose shares are not listed on the Stock Exchange.

1994

Memperoleh izin sebagai Bank Devisa pada 27 Oktober 1994.

Obtained license as a Foreign Exchange Bank on October 27, 1994.

1998

- Penawaran Umum Terbatas I Seri Saham B dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
- Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat.
- Limited Public Offering I Series B Shares with Pre-emptive Rights
- Establishment of Muamalat Financial Institution Pension Fund (DPLK).

2000

Bank Muamalat Indonesia melakukan perubahan atau pergantian nama menjadi Bank Syariah Muamalat Indonesia yang disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Juni 2000.

Bank Muamalat Indonesia changed its name to Bank Syariah Muamalat Indonesia pursuant to the Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 22, 2000. November 1, 1991 or Rabiul Akhir 24, 1412 H.

2002

Penawaran Umum Terbatas II Seri Saham C dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Limited Public Offering II Series C Shares with Pre-emptive Rights.

2003

Menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah I sebesar Rp200 miliar sebagai sukuk pertama yang diterbitkan oleh lembaga perbankan di Indonesia.

Issued Mudharabah I Subordinated Sukuk in the amount of Rp200 billion as the first sukuk issued by banking institution in Indonesia.

2004

Peluncuran produk Shar-e yang merupakan tabungan instan pertama di Indonesia melalui ribuan jaringan online Kantor Pos di seluruh Indonesia, yakni System Online Payment Point (SOPP).

The launch of Shar-e product as the first instant savings in Indonesia through thousands of Post Office online networks throughout Indonesia called System Online Payment Point (SOPP).

2005

Penawaran Umum Terbatas III Seri Saham C dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Limited Public Offering III Series C Shares with Pre-emptive Rights.

2007

Pendirian Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) sebagai multifinance syariah pertama di Indonesia.

Establishment of Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) as the first sharia multifinance in Indonesia.

2008

- Penerbitan Sukuk Subordinasi Mudharabah II sebesar Rp314 miliar.
- Bank kembali menggunakan nama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2008 sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 April 2008.

- Issuance of Mudharabah II Subordinated Sukuk in the amount of Rp314 billion.
- The Bank changed its name back to PT Bank Muamalat Indonesia Tbk in accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated April 23, 2008. multifinance in Indonesia.

2009

Pembukaan kantor cabang internasional pertama di Kuala Lumpur, Malaysia.

The opening of the first international branch office in Kuala Lumpur, Malaysia.

2010

Penawaran Umum Terbatas IV Seri Saham C dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Limited Public Offering IV Series C Shares with Pre-emptive Rights.

2011

Peluncuran produk Shar-e Gold Debit Visa.

The launch of the Shar-e Gold Debit Visa Card.

2012

- Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding atau perubahan logo.
- Menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012 senilai Rp800 miliar.

- Bank Muamalat Indonesia engaged in a rebranding with a logo change.
- Issuance of Shelf-Registration Mudharabah Subordinated Sukuk I Tranche I 2012 in the amount of Rp800 billion.



2013

- Penawaran Umum Terbatas V Saham Seri B dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
- Menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II tahun 2013 senilai Rp700 miliar.
- Limited Public Offering V Series B Shares with Pre-emptive Rights
- Issuance of Shelf-Registration Mudharabah Subordinated Sukuk I Tranche II 2013 in the amount of Rp700 billion

2015

Peresmian Muamalat Tower sebagai Kantor Pusat Bank Muamalat Indonesia di mana Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan persetujuan atas pemindahan alamat kantor pusat Bank Muamalat berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-65/PB.1/2015 perihal Permohonan Izin Pemindahan Alamat Kantor Pusat Operasional dan Non Operasional PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Inauguration of Muamalat Tower as the Head Office of Bank Muamalat Indonesia where the Financial Services Authority has given the approval for the change of address of Bank Muamalat's head office based on the Financial Services Authority Letter No. S-65/PB.1/2015 on Application for Permit for Change of Address for Operational and Non-Operational Head Office of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

2016

Meluncurkan aplikasi Muamalat Mobile Banking.

Launch of Muamalat Mobile Banking application.

2017

Pada bulan Juli 2017, Bank Muamalat Indonesia menerbitkan Medium Term Notes Sharia (MTNS) dengan total nilai Rp200 miliar, yang terdiri dari Rp100 miliar MTNS subordinasi dengan tenor 5 tahun dan Rp100 miliar MTNS dengan tenor 3 tahun.

In July 2017, Bank Muamalat issued Medium Term Notes Sharia (MTNS) with a total of Rp200 billion, consisting of Rp100 billion subordinated MTNS with 5-year tenor and Rp100 billion MTNS with 3-year tenor.

2018

- Meluncurkan kampanye #AyoHijrah yang mengajak masyarakat untuk berhijrah dalam hal layanan syariah. Kampanye #AyoHijrah dilandasi oleh cita-cita Bank yang ingin menjadi pusat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia ingin turut membangun industri halal di dalam negeri yang diselaraskan dengan perkembangan teknologi digital.
- Menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah Trust Certificate senilai Rp1,6 triliun
- Launched the #AyoHijrah campaign inviting people to migrate to Islamic banking services. #AyoHijrah campaign is the embodiment of the Bank's ideals to be the center of the Islamic economic ecosystem in Indonesia. Bank Muamalat Indonesia wants to support domestic halal industries aligned with the development of digital technology.
- Issuance of Mudharabah Subordinated Sukuk Trust Certificate in the amount of Rp1.6 trillion.

2019

Meluncurkan aplikasi mobile banking terbaru yaitu Muamalat Digital Islamic Network (DIN) yang dilengkapi dengan berbagai fitur terbaru yang dirancang untuk melakukan transaksi finansial maupun non finansial secara real time dengan fitur yang lebih aman.

The launching of the latest mobile banking application, Muamalat Digital Islamic Network (DIN), which is equipped with various latest features designed to conduct financial and non-financial transactions in real time with more secure features.

2020

Menerima penghargaan sebagai Peringkat ke-1 Digital Brand Awards Bank Umum Syariah BUKU 2 dengan Aset Rp25 triliun ke Atas dari Infobank.

Awarded Rank 1st Digital Brand Awards Sharia Commercial Banks BUKU 2 with Assets Above Rp25 trillion from Infobank.

2021

- Bank Muamalat masuk Jajaran Bank Terbaik Dunia Versi Forbes
- Bank Muamalat menerbitkan Sukuk Mudharabah Bank Muamalat Indonesia Tahun 2021 pada tanggal 15 November 2021 tanpa Penawaran Umum dengan tanggal jatuh tempo pada 15 November 2041.
- Penawaran Umum Terbatas (Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) VI Saham Seri C.
- Bank Muamalat is ranked among the World's Best Banks according to Forbes.
- Bank Muamalat issued the Bank Muamalat Indonesia Sukuk Mudharabah Year 2021 on November 15, 2021 without a Public Offering with a maturity date on November 15, 2041.
- Limited Public Offering (Issuance of New Shares with Pre-emptive Right) VI Series C Shares.

2022

- Menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah Jangka Panjang yang dilakukan tanpa Penawaran Umum senilai Rp2 Triliun.
- Bank Muamalat mendapatkan peringkat (rating) idA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan prospek perusahaan 'stabil'. Peringkat ini juga berlaku untuk Sukuk Mudharabah Tahun 2021.
- Issued a Long-Term Mudharabah Subordinated Sukuk of Rp2 Trillion without Public Offering.
- Bank Muamalat received an idA+ rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) with 'stable' corporate prospects. This rating also applies to Sukuk Mudharabah Year 2021.

2023

- BMI dinobatkan sebagai Bank Penyedia Layanan Pembayaran Zakat Terbaik dari Badan Amil Zakat Nasional RI pada BAZNAS Award 2023.
- BMI ditunjuk Kementerian Keuangan sebagai Bank Penyalur Gaji (BPG) atau payroll bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
- BMI was named the Best Zakat Payment Service Provider Bank by the Indonesian National Amil Zakat Agency at the BAZNAS Award 2023.
- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk was appointed by the Ministry of Finance as the Salary Distributor Bank (BPG) or payroll for Civil Servants (ASN).



Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan

Vision, Mission, and Corporate Value

REVIEW TERHADAP VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Bank Muamalat Indonesia telah melakukan kajian dan *review* mengenai kesesuaian Visi dan Misi Perusahaan terhadap kondisi Bank saat ini serta tantangan usaha yang akan dihadapi ke depan. *Review* dan persetujuan bersama dari Dewan Komisaris dan Direksi, disimpulkan bahwa Visi dan Misi Perusahaan masih sesuai kondisi Bank Muamalat Indonesia saat ini. Oleh karenanya Surat Keputusan Direksi No. 238/DIR/KPTS/V/2016 masih dinyatakan berlaku dan tidak ada perubahan.

REVIEW OF COMPANY VISION AND MISSION

Bank Muamalat Indonesia has conducted a study and review regarding the suitability of the Company's Vision and Mission with the current condition of the Bank as well as the future business challenges to be faced. After a review and joint approval from the Board of Commissioners and the Board of Directors, it was concluded that the Company's Vision and Mission are still appropriate for the current condition of Bank Muamalat Indonesia. Therefore, Director's Decree No. 238/DIR/KPTS/V/2016 is still deemed valid and there are no changes.



VISI VISION

Menjadi Bank Syariah Terbaik dan termasuk dalam 10 Bank Terbesar di Indonesia dengan eksistensi penguasaan yang diakui di tingkat regional.

To be the Best Islamic and one of the Top 10 Banks in Indonesia with Strong Regional Presence.

MISI MISSION

Membangun Lembaga Keuangan Syariah yang Unggul dan Berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

To develop an excellent and sustainable Islamic financial institution with emphasis on entrepreneurial spirit based on prudent principles and excellent and professional human resources with strong adherence to Islamic values, and oriented towards innovative investment to optimize values which benefit all stakeholders.

NILAI-NILAI MUAMALAT

Nilai-nilai Bank Muamalat Indonesia sebagai cara kerja yang harus dilaksanakan oleh seluruh karyawan BMI, diyakini mampu mengantarkan Bank mencapai visi dan misinya. Nilai Utama Bank Muamalat Indonesia adalah Islami – Modern – Profesional, yang kemudian diturunkan menjadi 5 (lima) Perilaku Utama. Nilai “Islami” diturunkan menjadi Integritas, nilai “Modern” diturunkan menjadi Terbuka dan Tanggap, serta nilai “Profesional” diturunkan menjadi Kompeten dan Prima. Ke-5 (kelima) perilaku utama tersebut untuk selanjutnya diturunkan masing-masing memiliki 7 (tujuh) indikator perilaku dan 11 Do's and Don'ts sebagai panduan karyawan dalam penerapan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan kerja sehari-hari.

MUAMALAT VALUES

The values of Bank Muamalat Indonesia are a way of working that should be implemented by all employees and are believed to be capable of enabling Bank Muamalat Indonesia to achieve its vision and mission. The core values of Bank Muamalat Indonesia are Islami – Modern – Professional. These core values are expanded into five main behaviors. Islami value translates into Integrity, Modern value translates into Openness and Responsiveness, and Professional value translates into Competence and Excellence. Each of these five main behaviors becomes the basis for seven behavior indicators and 11 Do's and Don'ts that employees use as guidelines in performing their daily tasks.



Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Function



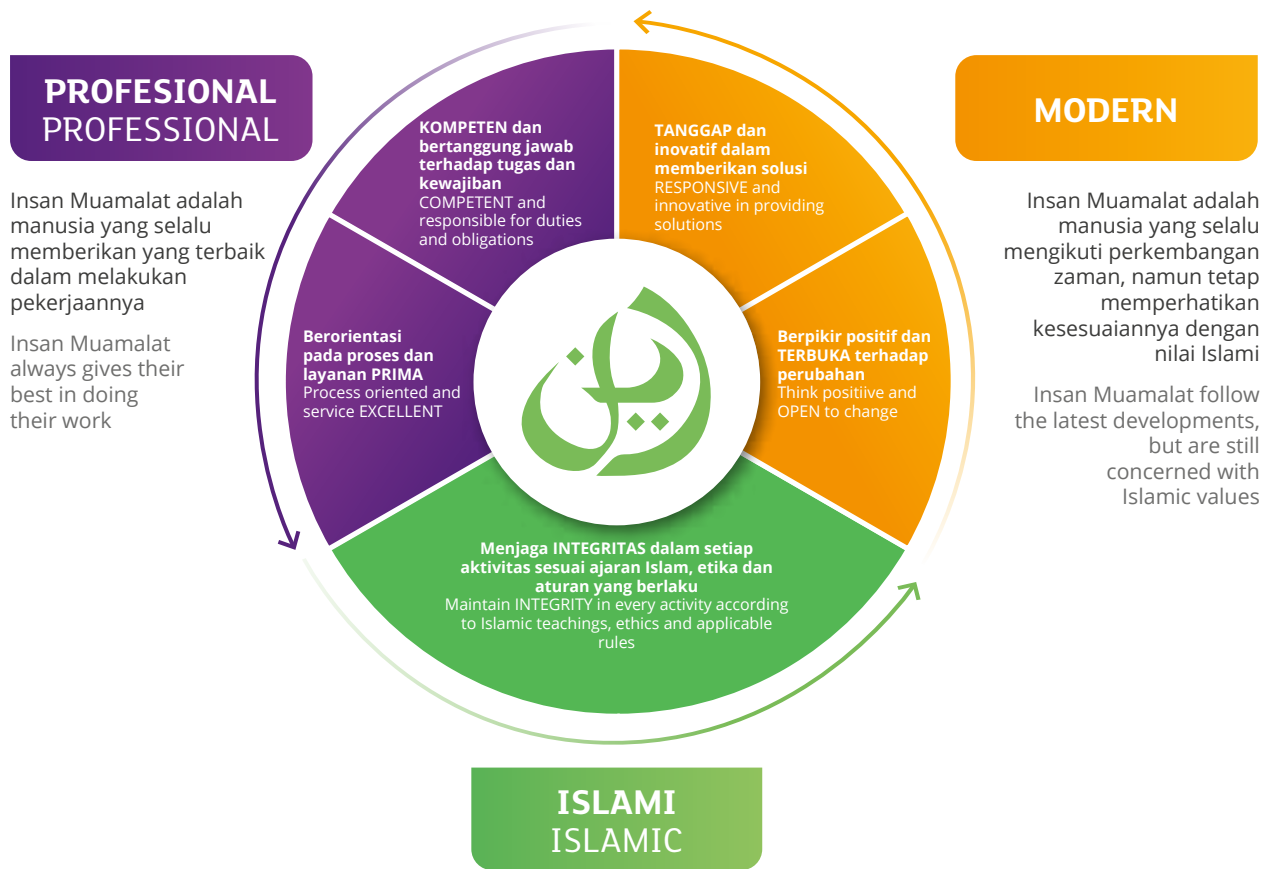
Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan 2023
2023 Financial Statements



Insan Muamalat adalah manusia yang memiliki integritas dan menunjukkan akhlakul karimah dalam perilakunya sehari-hari
Insan Muamalat constantly follows current development, but remains considerate towards Islamic values





Bidang Usaha

Line of Business

Bank Muamalat Indonesia menjalankan kegiatan usaha pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selain melakukan transaksi antar-bank berdasarkan prinsip syariah, Bank juga melakukan transaksi pembayaran dan perdagangan nasional dan internasional, yang mencakup jasa kiriman uang, inkaso/collection, transaksi valuta asing, dan pembiayaan ekspor-impor dalam bentuk letter of credit (L/C) yang memberikan pendapatan imbal jasa/komisi kepada Bank.

Bank Muamalat Indonesia's main business activities include raising funds from the public and channeling them back in the form of financing based on Sharia principles. In addition to conducting interbank transactions based on sharia principles, the Bank also carries out national and international payment and trade transactions, which include money transfer services, collections, foreign exchange transactions, and export-import financing in the form of letters of credit (L/C), which provide fee/commission income to the Bank.

BIDANG USAHA SESUAI ANGGARAN DASAR

Mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan yakni Akta No. 51 tanggal 30 Agustus 2021 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tertanggal 25 September 2021 No. AHU-0052441.AH.01.02. tahun 2021 serta pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 25 September 2021 No. AHU-AH.01.03-0453018 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 28 September 2021 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 030306., disebutkan bahwa maksud dan tujuan Bank Muamalat Indonesia adalah yaitu menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat meliputi:
 - a. Bentuk simpanan berupa:
 - i. giro berdasarkan akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - ii. tabungan berdasarkan akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; atau
 - iii. bentuk lain berdasarkan akad Wadi'ah atau atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b. Bentuk investasi berupa:
 - i. deposito berjangka berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

LINE OF BUSINESS PURSUANT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Referring to the Articles of Association of the Company, namely Deed No. 51 dated August 30, 2021, made before Notary Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, and having obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the Decree dated September 25, 2021, No. AHU-0052441.AH.01.02. Year 2021 and the notification of the amendment to the articles of association have been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the letter dated September 25, 2021 No. AHU-AH.01.03-0453018 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 78 dated September 28, 2021 Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 030306. It is stated that the purpose and objective of Bank Muamalat Indonesia are to conduct banking business based on sharia principles. To achieve these aims and objectives, the Bank applies sharia principles in conducting the following business activities:

1. Collecting funds from the community which include:
 - a. Deposits in the form of:
 - i. current Accounts based on the Wadi'ah contract or other contracts that do not conflict with Sharia principles;
 - ii. savings Accounts based on the Wadi'ah contract or other contracts that do not conflict with Sharia principles; or
 - iii. other forms, based on the Wadi'ah contract or other contracts that do not conflict with Sharia principles.
 - b. Types of investment:
 - i. time deposits based on Mudharabah contract or other contracts that do not conflict with Sharia principles;



- ii. tabungan berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; atau
 - iii. bentuk lainnya berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 2. Menyalurkan Pembiayaan
 - a. Untuk transaksi jual beli berdasarkan akad antara lain:
 - i. Murabahah.
 - ii. Istishna.
 - iii. Salam.
 - iv. Akad lain berdasarkan prinsip syariah.
 - b. Untuk transaksi bagi hasil berdasarkan akad antara lain:
 - i. Mudharabah.
 - ii. Musyarakah.
 - iii. Akad lain berdasarkan prinsip syariah.
 - c. Penyewaan barang benda bergerak atau tidak bergerak berdasarkan akad antara lain:
 - i. Ijarah.
 - ii. Ijarah muntahiya bittamlik.
 - iii. Akad lain berdasarkan prinsip syariah.
 - d. Untuk transaksi pinjam meminjam berdasarkan:
 - i. Akad Qardh.
 - ii. Akad lain berdasarkan prinsip syariah.
 3. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad prinsip syariah antara lain:
 - a. Wakalah.
 - b. Hawalah.
 - c. Kafalah.
 - d. Rahn.
 4. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah.
 5. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
 6. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
 7. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah.
 8. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- ii. savings Account based on Mudharabah contract or other contracts that do not conflict with Sharia principles; or
 - iii. other forms based on Mudharabah contract or other contracts that do not conflict with Sharia principles.
 2. Financing
 - a. For sale and purchase transactions based on contracts, such as:
 - i. Murabahah.
 - ii. Istishna.
 - iii. Salam.
 - iv. Other contracts are based on Sharia principles.
 - b. For profit sharing transactions based on contracts, such as:
 - i. Mudharabah.
 - ii. Musyarakah.
 - iii. Other contracts are based on Sharia principles.
 - c. Lease of movable or immovable property based on a contract including:
 - i. Ijarah.
 - ii. Ijarah muntahiya bittamlik.
 - iii. Other contracts are based on Sharia principles.
 - d. For lending and borrowing transactions based on:
 - i. Qardh contract.
 - ii. Other contracts are based on Sharia principles.
 3. Providing banking services based on sharia principles, including:
 - a. Wakalah.
 - b. Hawalah.
 - c. Kafalah.
 - d. Rahn.
 4. Purchasing, selling and/or guaranteeing on their own risk third party securities issued on the basis of underlying transactions based on Sharia principles.
 5. Purchasing securities based on Sharia principles issued by the Government and/or Bank of Indonesia.
 6. Receiving payments from bills for securities and performing calculations with third parties or between third parties based on Sharia principles.
 7. Transferring money for their own interests and/or customers based on Sharia principles.
 8. Receiving bill payments for securities issued and calculating with or between third parties based on Sharia principles.



9. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah.
10. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah;
11. Memberi fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah.
12. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah.
13. Melakukan kegiatan usaha kartu debit, *charge card* berdasarkan prinsip syariah.
14. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad Wakalah.
15. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Di samping itu, BMI juga menjalankan kegiatan usaha lain yakni:

1. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
5. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal.
6. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
7. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang.
8. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui pasar modal.
9. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

BIDANG USAHA YANG DIJALANKAN PADA TAHUN BUKU 2023

Kegiatan usaha Bank pada tahun 2023 masih sesuai dengan ketentuan pada Anggaran Dasar Bank.

9. Providing a place to store goods and securities based on the principles of Wadi'ah yad Amanah or other principles based on Sharia principles.
10. Conduct safekeeping activities including administration for the benefit of other parties based on a contract with the principle of wakalah;
11. Providing letter of credit (L/C) facilities based on Sharia principles.
12. Providing bank guarantee facilities based on Sharia principles.
13. Conducting debit card business activities, charge cards based on Sharia principles.
14. Conducting trustee activities based on Wakalah contract.
15. Carrying out other activities normally carried out by a Bank as long as they are approved by the Financial Services Authority and obtain the fatwa of the National Sharia Board.

Besides that, BMI also carries out other business activities, namely:

1. Conducting foreign exchange activities based on Sharia principles.
2. Conducting capital participation activities in Sharia public banks or financial institutions conducting business activities based on Sharia principles.
3. Conducting temporary capital participation activities to overcome the failure of financing based on Sharia principles provided that they must withdraw their investments.
4. Acting as founder and manager of pension funds based on Sharia principles.
5. Performing activities in the capital market as long as they do not conflict with Sharia principles and the rules and regulations in the capital market sector.
6. Organizing bank activities or products based on Sharia principles using electronic means.
7. Issuing, offering and trading short-term letters based on Sharia principles, either directly or indirectly, through the money market.
8. Issuing, offering and trading long-term securities based on Sharia principles, either directly or indirectly, through the capital market.
9. Providing products or conducting other Sharia Commercial Bank business activities based on Sharia principles.

LINE OF BUSINESS OPERATED IN THE FINANCIAL YEAR 2023

The Bank's business activities in 2023 are still in accordance with the provisions in the Bank's Articles of Association.



Produk dan Layanan

Products and Services

PRODUK

Bank Muamalat Indonesia membagi produk perbankan syariah ke dalam 2 (dua) kategori besar, yakni produk penghimpunan dana dan produk pembiayaan. Produk penghimpunan dana terdiri dari beragam produk yang disesuaikan dengan tujuan dan preferensi nasabah. Sementara produk pembiayaan merupakan sarana menyalurkan dana yang dihimpun oleh Bank dalam bentuk pembiayaan, baik untuk usaha produktif maupun keperluan konsumtif.

BMI juga melakukan penempatan dana bekerja sama dengan mitra strategis berupa pembiayaan *channelling* maupun *executing* melalui Lembaga Keuangan Mikro Kecil yaitu, BMT (Baitul Maal Wa-Tamwil), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan perusahaan pembiayaan.

Dalam rangka menjaga posisi likuiditas jangka pendek, BMI melakukan penempatan dana pada bank lain serta pembelian surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, Bank meningkatkan intensitas pembiayaan yang ditujukan pada pasar yang selama ini mempunyai kinerja pembiayaan yang baik dengan mengalokasikan porsi yang lebih besar kepada UMKM dalam realisasi portofolio pembiayaan. Adapun uraian dari produk penghimpunan dana dan produk pembiayaan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

PRODUCTS

Bank Muamalat Indonesia divides Sharia banking products into 2 (two) major categories, namely fund collection products and financing products. Fund collection products consist of various products tailored to the goals and preferences of customers. Meanwhile, financing products serve as a means of channeling funds collected by the Bank in the form of financing, both for productive activities and consumptive purposes.

BMI also places funds in cooperation with strategic partners through channeling financing and executing through micro-small financial institutions, namely, BMT (Baitul Maal Wa-Tamwil), Sharia People's Credit Banks (BPRS), and financing companies.

In order to maintain short-term liquidity positions, BMI places funds in other banks and purchases securities based on Sharia principles. Additionally, the Bank increases the intensity of financing aimed at markets that have traditionally shown strong financing performance by allocating a larger portion to MSMEs in financing portfolio realization. The description of fund collection products and financing products is outlined in the table below:



No.	Produk Penghimpunan Dana Fund Collection Products	Produk Pembiayaan Financing Products
1.	Tabungan iB Hijrah Tabungan dalam mata uang rupiah yang dapat digunakan untuk beragam jenis transaksi, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan iB Hijrah kini hadir dengan empat pilihan kartu ATM/Debit yaitu: Kartu Shar-E Reguler (GPN), Kartu Shar-E Classic (VISA), Kartu Shar-E 1HRAM (VISA) dan Kartu Shar-E Prioritas (VISA). iB Hijrah Savings Savings in rupiah that can be used for various types of transactions provide easy access, and broad benefits. iB Hijrah Savings now comes with four choices of ATM/Debit cards, namely: Regular Shar-E Card (GPN), Classic Shar-E Card (VISA), 1HRAM Shar-E Card (VISA) and Priority Shar-E Card (VISA).	KPR iB Muamalat Pembiayaan kepada perorangan dengan peruntukan pembelian rumah tinggal ready stock baik primary maupun secondary. Pembiayaan ini juga dapat digunakan untuk pengalihan (take over) KPR dari bank syariah maupun bank konvensional, renovasi, dan pembiayaan konsumtif beragam properti. Untuk Nasabah existing KPR di Bank Muamalat dapat mengajukan top up untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. KPR iB Muamalat Financing to individuals with the purpose of purchasing ready stock housing, both primary and secondary. This financing can also be used to take over mortgages from sharia and conventional banks, renovations, and property-backed consumer financing. Existing Bank Muamalat KPR customers can apply for a Top Up to meet consumptive needs.
2.	Tabungan iB Hijrah Valas Tabungan dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) bertujuan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam. iB Hijrah Valas Savings Savings denominated in foreign currencies US Dollar (USD) and Singapore Dollar (SGD), with the aim to serve the needs of more diverse transactions and investments.	iB Muamalat Multiguna Pembiayaan kepada perorangan untuk pembelian barang halal bersifat konsumtif (seperti kendaraan bermotor roda dua atau roda empat (mobil), perencanaan ibadah, bahan-bahan bangunan, barang elektronik, furniture/perabot rumah tangga) serta sewa jasa yang dibolehkan secara syariah seperti umrah, wisata dan lainnya. iB Muamalat Multiguna Financing for individuals for the purchase of consumptive halal goods (such as two-wheeled or four-wheeled vehicles (cars), worship plans, building materials, electronic goods, furniture/ household furniture) as well as rental of services that are permitted under sharia, such as umrah, tours and others.
3.	Tabungan iB Hijrah Haji Haji Tabungan haji dan umrah dalam mata uang rupiah dan valuta asing dolar AS yang dikhususkan bagi nasabah masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji dan Umrah. Dapat dilengkapi dengan standing instruction untuk setoran rutin maupun setoran insidental yang fleksibel sesuai kebutuhan nasabah untuk mewujudkan keinginan beribadah ke Tanah Suci. iB Hijrah Haji Haji savings and Umrah savings in Rupiah and US Dollar foreign currencies are reserved for customers of the Indonesian Moslem community who plan to perform Haji and Umrah services. Can be complemented with standing instructions for routine deposits and flexible incidental deposits according to customer needs to realize the desire to worship the Holy Land.	iB Muamalat Koperasi Karyawan Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi karyawan untuk disalurkan kepada para anggotanya (karyawan BUMN/PNS/ swasta) dengan tujuan pembelian barang halal. Diperuntukan bagi para anggota koperasi karyawan dan diajukan secara berkelompok. iB Muamalat Koperasi Karyawan A financing facility for employee cooperatives to channel to the members of the cooperative (SOE employees/civil servants/private employees) for purchase of halal products. The financing facility is for the members of a cooperative with the proposal submitted as a collective.
4.	Tabungan iB Hijrah Haji – Haji Anak Hebat Tabungan iB Hijrah Haji – Haji anak Hebat adalah tabungan iB Haji dikhususkan untuk anak- anak dibawah umur 17 tahun yang ingin menabung ibadah haji. iB Hijrah Haji Savings – Haji Anak Hebat The iB Hijrah Haji Savings – Haji Anak Hebat is a specialized iB Haji savings account for children under 17 years of age who wish to save for the Haji pilgrimage.	
5.	Tabungan iB Hijrah Rencana Tabungan iB Hijrah Rencana merupakan tabungan berjangka dalam mata uang rupiah, memiliki setoran rutin bulanan dan tidak bisa ditarik sebelum jangka waktu berakhir kecuali penutupan rekening serta pencairan dana hanya bisa dilakukan ke rekening sumber dana. Tabungan iB Muamalat Rencana dapat membantu mewujudkan berbagai rencana nasabah di masa yang akan datang. iB Hijrah Rencana Savings iB Hijrah Rencana Savings is a time deposit in rupiah, has a monthly routine deposit, and cannot be withdrawn before the expiration period unless the account closure and disbursement of funds can only be made to the fund source account. The Muamalat iB Savings Plan can help realize various customer plans in the future.	Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Via Multifinance) Pembiayaan yang diberikan kepada end user dengan tujuan pembelian kendaraan bermotor (mobil dan motor) melalui perusahaan multifinance yang bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia. Motor Vehicle Financing (Via Multifinance) Financing provided to end users for the purpose of purchasing motor vehicles (cars and motorcycles) through multi-finance companies in collaboration with Bank Muamalat Indonesia.



No.	Produk Penghimpunan Dana Fund Collection Products	Produk Pembiayaan Financing Products
6.	TabunganKu iB Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau bagi nasabah dari semua kalangan masyarakat. TabunganKu iB Sharia-based savings in rupiah that are very affordable for customers from all circles of society.	iB Modal Kerja Reguler Pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan atas aset lancar (persediaan). iB Modal Kerja Reguler Financing used to finance current assets (inventory).
7.	Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB Tabungan yang dikelola dengan akad Mudharabah dan dikhususkan untuk segmen pelajar. Tabungan SimPel iB dapat dibuka untuk siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (RA, MI, Mts, MA) atau sederajat tanpa batasan umur minimal, di mana batasan maksimal masih berstatus SMA/SMK dan belum memiliki KTP melalui kerja sama antara Bank Muamalat Indonesia dan sekolah. iB Simpanan Pelajar (SimPel) Savings Savings managed by Mudharabah contract and specifically for the student segment. SimPel iB savings can be opened for PAUD, Kindergarten, Elementary, Junior High, High School, Islamic School (RA, MI, Mts, MA)/equivalent students with no minimum age limit, where the maximum limit is still in the High School/ Vocational School status and does not have an ID card through collaboration between Bank Muamalat Indonesia and schools.	iB Modal Kerja Proyek Pembiayaan yang digunakan untuk pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak yang ada. iB Modal Kerja Proyek Financing used for the implementation of a project based on existing contracts.
8.	Tabungan iB Hijrah Prima Tabungan iB Hijrah Prima merupakan tabungan yang didesain bagi nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil maksimal dan kebebasan bertransaksi. Nasabah dapat memiliki empat pilihan kartu debit, yaitu Kartu Shar-E Reguler (GPN), Kartu Shar-E Classic (VISA), Kartu Shar-E 1HRAM (VISA), dan Kartu Shar-E Prioritas (VISA). iB Hijrah Prima Savings iB Hijrah Prima Savings is a savings account designed for customers wishing to acquire maximum profit sharing and freedom of transactions. Customers can have four choices of Debit cards, namely Regular Shar-E Card (GPN), Classic Shar-E Card (VISA), 1HRAM Shar-E Card (VISA) and Priority Shar-E Card (VISA).	iB Modal Kerja Konstruksi Developer Pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan proyek properti. iB Modal Kerja Konstruksi Developer Financing used for the construction of property projects.
9.	Tabungan iB Hijrah Bisnis Tabungan iB Hijrah Bisnis adalah produk tabungan yang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan bisnis nasabah non individu dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi yang didukung oleh fasilitas Cash Management System MADINA. iB Hijrah Bisnis Savings iB Hijrah Bisnis Savings is a savings product that is used to accommodate the business needs of non-individual customers by providing convenience and convenience in transactions supported by the MADINA Cash Management System facility.	iB Modal Kerja Lembaga Keuangan Syariah Pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan proyek properti. iB Modal Kerja Konstruksi Developer Financing used for the construction of property projects.
10.	Tabungan iB Hijrah Payroll Tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang merupakan karyawan dari suatu perusahaan / institusi tertentu di mana pendistribusian gaji (payroll) yang diterima, dilakukan melalui Bank Muamalat iB Hijrah Payroll Savings A savings account designed for individual customers who are employees of a particular company/institution, where the distribution of received salaries (payroll) is carried out through Bank Muamalat.	
11.	Tabungan Prima Berhadiah Tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan maupun non perorangan dengan pemberian hadiah di muka sesuai keinginan nasabah tanpa diundi, di mana nasabah bersedia mengendapkan dana dalam jangka waktu tertentu Prima Berhadiah Savings Account A savings account designed for individuals or non-individuals with upfront prizes according to the customer's wishes without lottery, where customers are willing to deposit funds for a certain period of time.	



No.	Produk Penghimpunan Dana Fund Collection Products	Produk Pembiayaan Financing Products
12.	Rekening Tabungan Jamaah Haji RTJH adalah tabungan dalam mata uang rupiah (IDR) dengan akad Wadiah bagi anda yang telah memiliki dana porsi haji dan dapat digunakan untuk kebutuhan transaksi dan berbelanja menggunakan Muamalat DIN dan kartu SharE Debit Hajj Pilgrim Savings Account RTJH is a savings account in Indonesian Rupiah (IDR) currency with a Wadiah contract for those who already have a portion of Hajj funds and can be used for transaction and shopping needs using Muamalat DIN and SharE Debit cards.	
13.	Deposito iB Hijrah Deposito syariah dengan akad mudharabah dalam mata uang rupiah dan dolar AS yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabah. Diperuntukkan bagi nasabah perorangan dan institusi yang memiliki legalitas badan. iB Hijrah Deposit Flexible sharia deposits with mudharabah contracts in Rupiah and USD that provide optimal investment returns for Customers. Intended for individual and institutional clients which are legal entities.	iB Investasi Non Properti Bisnis Pembiayaan untuk pembelian barang investasi penunjang usaha. iB Investasi Non Properti Bisnis Financing for the purchase of business support investment goods.
14.	Deposito Online iB Hijrah Deposito syariah dengan akad mudharabah yang dapat dibuka secara praktis kapan pun dan di mana pun melalui Muamalat DIN dengan bagi hasil yang optimal dalam mata uang rupiah. Diperuntukkan hanya untuk nasabah perorangan yang sebelumnya telah memiliki rekening tabungan/giro di Muamalat dan telah mengunduh dan terdaftar di aplikasi Muamalat DIN. iB Hijrah Online Deposit Sharia deposits with mudharabah contracts that can be opened anytime and anywhere through Muamalat DIN with optimal profit sharing in rupiah currency. Intended Only for Individual customers who previously have a savings/current account in Muamalat and had downloaded and registered in the Muamalat DIN application.	iB Properti Bisnis Pembiayaan investasi untuk pembangunan properti bisnis yang menunjang keberlangsungan usaha. iB Properti Bisnis Investment financing for business property development that supports business continuity



No.	Produk Penghimpunan Dana Fund Collection Products	Produk Pembiayaan Financing Products
15.	Deposito Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) iB Hijrah Deposito DHE SDA yang dikelola secara syariah dengan akad mudharabah dalam mata uang rupiah dan dolar AS yang dapat memberikan hasil investasi secara optimal dan barokah bagi Anda serta pajak bagi hasil yang lebih rendah Produk ini dibuat untuk mendukung kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2019 tentang penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), Bank Muamalat melayani pembukaan Rekening Khusus DHE SDA. Rekening Khusus (Reksus) Deposito Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) adalah Rekening Deposito yang digunakan khusus untuk penerimaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Reksus DHE SDA ini diperuntukkan khusus untuk nasabah non perorangan. iB Hijrah Foreign Exchange Deposits from Export of Natural Resources (DHE SDA) DHE SDA deposits that are managed according to sharia with mudharabah contracts in Rupiah and USD, which can provide optimal investment returns and blessings for you, as well as lower profit-sharing taxes. This product was created to support the government's policy as stated in Government Regulation (PP) No. 1/2019 on the receipt of Foreign Exchange Export Proceeds from Exports of Natural Resources (DHE SDA), Bank Muamalat facilitates the opening of a Special Account for DHE SDA. Special Account (Reksus) Deposits for Natural Resources Export Proceeds (DHE SDA) is a Time Deposit Account used specifically for receipt of Foreign Exchange Proceeds from Exports of Natural Resources (DHE SDA). Reksus DHE SDA is specifically intended for non-individual customers	iB Muamalat Usaha Mikro Pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi diberikan kepada pengusaha mikro baik untuk perorangan maupun badan usaha non-hukum. iB Muamalat Usaha Mikro Financing in the form of working capital and investment is provided to micro entrepreneurs, both for individuals and non-legal business entities.
16.	Giro iB Hijrah Giro syariah dengan akad wadiah dalam mata uang rupiah dan dolar AS yang memudahkan semua jenis kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi keuangan personal nasabah. Giro ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan dan institusi yang memiliki legalitas badan. Ib Hijrah Current Account A Shariah-compliant current account with a wadiah contract in Indonesian rupiah and US dollars, facilitating all types of business transactions as well as personal financial transactions for customers. This account is intended for individual customers and institutions with legal entities.	iB Rekening Koran Muamalat Pembiayaan yang disediakan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan akan pembelian Properti Bisnis sebagai investasi ataupun untuk peremajaan/renovasi dan pembangunan properti bisnis baru di atas lahan milik nasabah. iB Muamalat Current Account Financing provided to customers to meet the needs of purchasing Business Properties as an investment or for refurbishment/renovation and construction of new business properties on customer-owned land.
17.	Giro iB Hijrah Ultima Giro syariah dengan akad mudharabah dalam mata uang rupiah dan dolar AS yang memudahkan semua jenis kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi keuangan personal nasabah disertai bagi hasil yang kompetitif dan berbagai benefit transaksi lainnya. Giro ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan dan institusi yang memiliki legalitas badan. Giro iB Hijrah Ultima Islamic current account with mudharabah contract in rupiah and US dollar that facilitates all types of business transaction needs and personal financial transactions of customers accompanied by competitive profit sharing and various other transaction benefits. This current account is intended for individual and institutional customers who have legal entity.	



No.	Produk Penghimpunan Dana Fund Collection Products	Produk Pembiayaan Financing Products
18.	Giro Ultima USD Berhadiah Giro Ultima USD Berhadiah (GUUB) Program giro berjangka khusus di mana Bank memberikan hadiah (barang dan jasa sesuai ketentuan bank, mengacu pada katalog terbaru) dimuka atau dibelakang. Giro Ultima USD Berhadiah Giro Ultima USD Berhadiah (GUUB) A special term current account program where the Bank provides prizes (goods and services in accordance with bank regulations, referring to the latest catalog) in advance or on the back.	
19.	Giro iB Hijrah/iB Hijrah Ultima-Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) Rekening Khusus (Reksus) Giro Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) adalah Rekening Giro yang digunakan khusus untuk penerimaan Devisa Hasil Ekspor Sumber daya Alam (DHE SDA) bagi nasabah non perorangan. Giro ini dikelola secara syariah dengan dua pilihan akad, yaitu akad wadiah dan mudharabah dalam mata uang rupiah dan dolar AS. Untuk akad mudharabah, giro disertai dengan bagi hasil kompetitif serta pajak bagi hasil yang lebih rendah Produk ini dibuat untuk mendukung kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2019 tentang penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Giro iB Hijrah/iB Hijrah Ultima-Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) Special Account (Reksus) Giro Devisa Hasil Ekspor Daya Alam (DHE SDA) is a Giro Account that is used specifically for the receipt of Foreign Exchange Proceeds from Natural Resources Export (DHE SDA) for non-individual customers. This current account is managed in a sharia manner with two contract options, namely wadiah and mudharabah contracts in rupiah and US dollars. For the mudharabah contract, the current account comes with competitive profit sharing and lower profit sharing tax. This product was created to support the government's policy as stipulated in Government Regulation (PP) No. 1/2019 concerning the receipt of Foreign Exchange Proceeds from Natural Resources Exported Goods (DHE SDA).	



No.	Produk Penghimpunan Dana Fund Collection Products	Produk Pembiayaan Financing Products
20.	Giro iB Hijrah SAR Giro iB Hijrah SAR (Saudi Arabian Riyal) adalah produk pengembangan dari Giro iB Hijrah yang diperuntukkan untuk nasabah perorangan dan non perorangan dalam melakukan transaksi bisnis dengan menggunakan jenis mata uang Saudi Arabian Riyal (SAR) Giro iB Hijrah SAR Giro iB Hijrah SAR (Saudi Arabian Riyal) is a development product of Giro iB Hijrah which is intended for individual and non-individual customers in conducting business transactions using Saudi Arabian Riyal (SAR) currency.	
21.	Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat Merupakan satu-satunya DPLK syariah di Indonesia, menjadikan kami DPLK yang paling tepat bagi mereka yang ingin merencanakan dana pensiun yang amanah, berkah dan sesuai prinsip syariah. Dengan pelayanan prima dan pengembangan investasi yang kompetitif, menjadikan DPLK Syariah Muamalat sebagai pilihan terbaik untuk mempersiapkan kesejahteraan saat memasuki usia pensiun. Didukung jaringan Bank Muamalat yang luas di seluruh provinsi di Indonesia serta tim yang profesional, DPLK Syariah Muamalat siap membantu menginvestasikan dana secara aman dan optimal, memberikan layanan mudah dan transparan. Pastikan kesiapan dana pensiun Anda dan keluarga di DPLK Syariah Muamalat yang aman, nyaman, dan menguntungkan. Muamalat Financial Institution Pension Fund (DPLK) It is the only sharia DPLK in Indonesia, making us the most appropriate DPLK for those planning a trustworthy, blessed retirement fund that is in accordance with sharia principles. With excellent service and competitive investment development, making DPLK Syariah Muamalat is the best choice to prepare for welfare when entering retirement age. Supported by Bank Muamalat's extensive network in all provinces in Indonesia as well as a professional team, DPLK Syariah Muamalat is ready to help invest funds safely and optimally, providing easy and transparent services. Ensure that you and your family are prepared for a safe, comfortable, and profitable DPLK Syariah Muamalat pension fund.	



LAYANAN

BMI senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang maksimal. Upaya itu direalisasikan 4 (empat) layanan yang diberikan kepada para nasabah, yakni layanan perbankan internasional, layanan *trade finance*, layanan 24 jam dan Treasury.

1. Perbankan Internasional (Remitansi)

- a. *Incoming Muamalat Remittance iB*
Merupakan kiriman uang masuk dalam denominasi valuta asing yang ditujukan kepada penerima, baik untuk diterima tunai ataupun dimasukkan ke dalam kredit rekening penerima yang merupakan nasabah Bank.
- b. *Outgoing Muamalat Remittance iB*
Ialah kiriman uang keluar dalam denominasi valuta asing yang ditujukan kepada penerima, baik untuk diterima tunai ataupun dimasukkan dalam kredit rekening penerima pada bank lain, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan instruksi pengirim melalui Bank.

2. Trade Finance

- a. Ekspor
Produk dan layanan transaksi ekspor yang tersedia bagi nasabah/eksportir Bank meliputi:
 - i. *Advising L/C*
Layanan yang diberikan Bank untuk meneruskan/ menyampaikan L/C kepada *beneficiary* yang tercantum dalam L/C, baik secara langsung maupun melalui *second Advising Bank*.
 - ii. *Outward Bills*
Layanan yang diberikan Bank untuk menangani dokumen L/C Ekspor berupa: pengujian dokumen L/C Ekspor, pengiriman dokumen kepada Issuing Bank atau pihak yang ditunjuk, penerimaan pembayaran hasil ekspor dan kegiatan lainnya yang masih berkaitan dengan penanganan dokumen L/C Ekspor.
 - iii. *Negotiation*
Dana talangan yang diberikan oleh Bank kepada *beneficiary* atas presentasi dokumen L/C Ekspor (*post shipment financing*). Negosiasi dapat dilakukan baik menggunakan fasilitas ataupun tanpa fasilitas nasabah.
 - iv. *L/C Transfer*
Layanan yang diberikan oleh Bank untuk menerbitkan L/C transfer berdasarkan L/C yang diterima oleh Bank dari *Issuing Bank*.
- b. Impor
Produk dan layanan transaksi impor yang tersedia bagi nasabah/ Importir Bank meliputi:
 - i. *Letter of Credit (L/C)*
Bank Muamalat Indonesia memiliki layanan

SERVICES

BMI always strives to provide maximum service. This effort is realized through four services provided to customers, namely international banking services, trade finance services, 24-hour services, and Treasury.

1. International Banking (Remittances)

- a. Incoming Muamalat Remittance iB
Foreign currency remittances directed to recipients, either for cash receipt or credited to the recipient's account at the Bank.
- b. Outgoing Muamalat Remittance iB
Foreign currency remittances directed to recipients, either for cash receipt or credited to the recipient's account at another bank, both domestically and internationally, according to sender instructions through the Bank.

2. Trade Finance

- a. Export
Products and export transaction services available to customers/exporters of the Bank include:
 - i. *Advising L/C*
A service provided by the Bank to forward/ convey L/C to the beneficiary stated in the L/C, either directly or through a second Advising Bank.
 - ii. *Outward Bills*
A service provided by the Bank to handle export L/C documents including: examination of export L/C documents, sending documents to the Issuing Bank or designated parties, receiving export payment proceeds, and other activities related to handling export L/C documents.
 - ii. *Negotiation*
Advance funds provided by the Bank to the beneficiary upon presentation of export L/C documents (*post-shipment financing*). Negotiations can be conducted with or without customer facilities.
 - iv. *L/C Transfer*
A service provided by the Bank to issue L/C transfers based on the L/C received by the Bank from the Issuing Bank.
- b. Import
Products and import transaction services available to customers/Importers of the Bank include:
 - i. *Letter of Credit (L/C)*
Bank Muamalat Indonesia provides L/C



penerbitan L/C yaitu penerbitan pernyataan oleh Bank atas permintaan nasabah untuk keuntungan pihak lain (*beneficiary*), yang oleh karenanya Bank mengikatkan diri untuk membayar kepada *beneficiary* apabila *beneficiary* dapat memenuhi permintaan/persyaratan yang dinyatakan dalam L/C tersebut. Terdapat beberapa macam L/C berdasarkan jangka waktu pembayarannya yakni:

- *Sight L/C*
L/C yang mewajibkan *Issuing Bank* untuk melaksanakan pembayaran kepada *beneficiary*, segera setelah dokumen-dokumen yang disediakan *beneficiary* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam L/C.
- *Usance L/C*
L/C di mana pada saat dokumen-dokumen yang disediakan *beneficiary* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam L/C, *Issuing Bank* berkewajiban untuk memberikan akseptasi *draft* yang menyatakan bahwa *Issuing Bank* akan membayar kepada *beneficiary* dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- *Usance Payable at Sight (UPAS) L/C*
L/C yang mewajibkan *Issuing Bank* untuk melaksanakan pembayaran kepada *beneficiary* segera setelah dokumen-dokumen yang disediakan *beneficiary* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam L/C. Di sisi lain, *applicant* akan melakukan pembayaran kepada *Issuing Bank* dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- *Usance Payable at Usance (UPAU) L/C*
Usance L/C di mana *Issuing Bank* akan melakukan pembayaran kepada *beneficiary* atas *draft* (tagihan) yang sudah diterima sesuai akseptasi Bank kepada *beneficiary*. Di sisi lain, *applicant* akan melakukan pembayaran kepada *Issuing Bank* dalam jangka waktu tertentu yang akan datang yang sudah disepakati.

- ii. Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri (SKBDN)
Pada dasarnya produk dan layanan yang disediakan untuk eksportir dan importir dapat juga digunakan untuk mendukung perdagangan dalam negeri. Yang membedakannya adalah acuan *best practice* yang digunakan, di mana transaksi ekspor/impor menggunakan standar internasional

issuance services, which involve issuing a statement by the Bank at the request of the customer for the benefit of another party (*beneficiary*), whereby the Bank undertakes to pay the beneficiary if they can fulfill the requests/requirements stated in the L/C. There are several types of L/C based on the payment terms, namely:

- *Sight L/C*
L/C that obliges the Issuing Bank to make payment to the beneficiary immediately after the documents provided by the beneficiary meet the requirements stated in the L/C.
- *Usance L/C*
L/C where when the documents provided by the beneficiary meet the requirements stated in the L/C, the Issuing Bank is obliged to provide acceptance of the draft stating that the Issuing Bank will pay the beneficiary within a certain period in the future.
- *Usance Payable at Sight (UPAS) L/C*
L/C that obliges the Issuing Bank to make payment to the beneficiary immediately after the documents provided by the beneficiary meet the requirements stated in the L/C. On the other hand, the applicant will make payment to the Issuing Bank within a certain period in the future.
- *Usance Payable at Usance (UPAU) L/C*
Usance L/C where the Issuing Bank will make payment to the beneficiary for the draft (bill) received according to the Bank's acceptance to the beneficiary. On the other hand, the applicant will make payment to the Issuing Bank within an agreed-upon period in the future.

- ii. Domestic Documented Credit (SKBDN)
Basically, the products and services provided for exporters and importers can also be used to support domestic trade. What sets it apart is the best practice reference used, where export/import transactions follow international standards regulated by UCP DC (Uniform Custom Practice on Documentary Collection), while domestic transactions



yang diatur dalam UCP DC (*Uniform Custom Practice on Documentary Collection*), sementara untuk transaksi dalam negeri mengikuti Peraturan Bank Indonesia. Oleh karena itu SKBDN lazim juga disebut sebagai L/C Lokal.

iii. Bank Garansi

Bank Garansi adalah penerbitan pernyataan oleh Bank atas permintaan nasabah (pihak terjamin) untuk menjamin kewajiban nasabah karena ketidakmampuan nasabah untuk menjalankan kewajibannya dengan baik (wanprestasi) kepada pihak yang menerima jaminan berdasarkan suatu perjanjian yang telah dibuat antara nasabah dengan pihak yang menerima jaminan. Bank Garansi yang dapat diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia antara lain:

- *Bid Bond* (Jaminan Penawaran)
- *Performance Bond* (Jaminan Pelaksanaan)
- *Advance Payment Bond* (Jaminan Uang Muka)
- *Retention Bond* (Jaminan Pemeliharaan)
- *Payment Bond* (Jaminan Pembayaran)
- *Custom Bond*
- *Shipping Guarantee*
- *Counter Guarantee*

iv. Klaim Bank Garansi

Merupakan layanan yang diberikan oleh Bank atas permintaan *beneficiary* untuk melakukan penagihan kepada *Issuing Bank* ketika *applicant* tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik (wanprestasi) kepada pihak *beneficiary*.

v. Standby L/C

Standby L/C merupakan suatu bentuk penjaminan dari Bank Penerbit *Standby L/C* kepada *beneficiary* terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi/ default atas diri applicant (pihak yang dijamin/ pemohon *Standby L/C*).

vi. Deposito Plus

Program pemasaran deposito yang dikombinasikan dengan SKBDN. Melalui program ini, nasabah yang menempatkan deposito di Bank memiliki kemungkinan untuk memiliki kendaraan secara langsung.

vii. LC Murabahah

LC Murabahah adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada debitur importir untuk pembayaran atau pelunasan L/C atau SKBDN baik *sight* (atas unjuk) maupun *usance* (berjangka) yang diterbitkan melalui Bank Muamalat Indonesia.

viii. Buyer Financing

Merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan oleh Bank dalam rangka menjaga kemampuan nasabah dalam pembelian bahan

adhere to the regulations of Bank Indonesia. Therefore, SKBDN is commonly referred to as a Local L/C.

iii. Bank Guarantees

Bank Guarantees are the issuance of a statement by the Bank at the request of the customer (guaranteed party) to guarantee the obligations of the customer due to the inability of the customer to fulfill their obligations properly (default) to the party receiving the guarantee based on an agreement made between the customer and the party receiving the guarantee. Bank Guarantees that can be issued by Bank Muamalat Indonesia include:

- Bid Bond (Bid Guarantee)
- Performance Bond (Performance Guarantee)
- Advance Payment Bond (Advance Payment Guarantee)
- Retention Bond (Retention Guarantee)
- Payment Bond (Payment Guarantee)
- Custom Bond
- Shipping Guarantee
- Counter Guarantee

iv. Bank Guarantee Claims

Bank Guarantee Claims are services provided by the Bank at the request of the beneficiary to make claims to the Issuing Bank when the applicant fails to fulfill their obligations properly (default) to the beneficiary.

v. Standby L/C

Standby L/C is a form of guarantee from the *Standby L/C* Issuing Bank to the beneficiary against the possibility of default by the applicant (guaranteed party/applicant of *Standby L/C*).

vi. Deposito Plus

Deposito Plus is a deposit marketing program combined with SKBDN. Through this program, customers placing deposits in the Bank have the opportunity to directly own a vehicle.

vii. LC Murabahah

LC Murabahah is a working capital financing facility provided to importer debtors for payment or settlement of L/C or SKBDN, both sight (on presentation) and usance (deferred), issued through Bank Muamalat Indonesia.

viii. Buyer Financing

Buyer Financing is short-term financing provided by the Bank to ensure the ability of customers to purchase raw materials/



baku/barang dagangan secara tepat waktu kepada *supplier*/penjual sehingga kredibilitas nasabah di mata *supplier*/penjual terjaga.

ix. *AR Financing*

Produk pembiayaan jangka pendek dengan pemberian dana talangan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja berdasarkan piutang usaha perusahaan dari transaksi perdagangan atau penjualan barang dan jasa.

x. *Value Chain Financing*

Pembiayaan kepada nasabah melalui skema pembiayaan vendor maupun distributor.

3. Layanan 24 Jam

a. ATM Muamalat

ATM Muamalat dilengkapi dengan berbagai fitur untuk memudahkan nasabah dalam melakukan info saldo, cetak 5 (lima) transaksi terakhir, pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang, pembelian tiket, pembayaran premi asuransi, transfer antar bank, pembayaran uang sekolah dan pembayaran ZIS.

b. Muamalat Mobile/Digital Islamic Network (DIN)

Muamalat DIN merupakan aplikasi *mobile banking* yang meliputi fitur transaksional dan non transaksional untuk melengkapi gaya hidup syariah Nasabah. Fitur transaksional yang tersedia meliputi transfer (pemindahbukuan, online antar bank, BI-FAST, SKN dan RTGS), pembayaran (Telkom, Internet, PLN, PDAM, TV Kabel, Tiket, Asuransi, Samsat Digital, PBB, Pendidikan, E-Commerce, Donasi, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, DPLK, BPJS dan *Virtual account*) pembelian (pulsa isi ulang, Paket Data, Token Listrik, uang elektronik, Voucher Google Play, dan Spotify Premium, Hewan Qurban, Ziswaf dan Hijrah Tour), pembayaran menggunakan QRIS, pembukaan deposito, pembukaan rekening tambahan (ETB) serta rekening baru (NTB) fitur non transaksional berupa cek saldo, mutasi rekening, info produk, layanan Nasabah Digital, daily hadist, arah kiblat, jadwal shalat, kalkulator zakat, cek nilai manfaat haji dan informasi promo. Selain itu juga *Mobile banking* Muamalat (DIN) dilengkapi dengan layanan DPLK Muamalat yang terintegrasi serta layanan pengaduan yang seamless. Dalam Mobile Banking Muamalat (DIN) menawarkan juga kemudahan dalam bertransaksi secara *real time*, aman dan praktis menggunakan perangkat *smart phone* nasabah yang terdaftar di bank dan terkoneksi jaringan internet.

Muamalat DIN dapat digunakan pada sistem operasi Android, IOS dan Huawei. Untuk dapat menggunakan layanan Muamalat DIN, nasabah hanya perlu mengunduh aplikasi Muamalat DIN

commodities from suppliers/sellers in a timely manner, thereby maintaining the credibility of customers in the eyes of suppliers/sellers.

ix. *AR Financing*

Short-term financing products with advance funding to meet the working capital needs based on the business receivables of the company from trading transactions or sales of goods and services.

x. *Value Chain Financing*

Financing provided to customers through vendor or distributor financing schemes.

3. 24-Hour Services

a. Muamalat ATM

Muamalat ATMs are equipped with various features to facilitate customers in checking balances, printing the last 5 transactions, bill payments, prepaid top-ups, ticket purchases, insurance premium payments, interbank transfers, school fee payments, and Zakat payments.

b. Muamalat Mobile/Digital Islamic Network (DIN)

Muamalat DIN is a mobile banking application that includes both transactional and non-transactional features to complement the Sharia lifestyle of customers. Transactional features include transfers (inter-account, online interbank, BI-FAST, SKN, and RTGS), payments (Telkom, internet, electricity, PDAM, cable TV, tickets, insurance, digital Samsat, property tax, education, e-commerce, donations, health insurance, social security, pension funds, Hajj, and virtual accounts), purchases (prepaid top-ups, data packages, electricity tokens, electronic money, Google Play vouchers, Spotify Premium, Qurban animals, Ziswaf, and Hajj tours), QRIS payments, deposit opening, additional account opening (ETB), and new account opening (NTB). Non-transactional features include balance checks, account statements, product information, digital customer services, daily hadith, Qibla direction, prayer times, Zakat calculators, Hajj benefit checks, and promotional information. Additionally, Muamalat Mobile Banking (DIN) includes integrated DPLK Muamalat services and seamless complaint handling. Muamalat DIN offers real-time, secure, and convenient transactions using customers' registered smartphones connected to the internet.

Muamalat DIN is compatible with Android, iOS, and Huawei operating systems. To use Muamalat DIN, customers only need to download the Muamalat DIN app from the app store (Apple),



dari app store (Apple) play store (Android) dan App Gallery (Huawei) dengan kata kunci “Muamalat DIN” dan cukup melakukan pendaftaran melalui aplikasi.

c. *Internet Banking Muamalat*

Layanan ini bertujuan untuk memudahkan nasabah ritel (individu) dalam melakukan transaksi finansial berupa transfer (pemindahbukuan, antar bank, SKN dan RTGS), pembayaran (Telkom, Telko, PLN, TV Kabel, ZIS dan *Virtual Account*), pembelian (pulsa isi ulang, PLN, sukuk *online*) dan non transaksional berupa cek saldo, mutasi rekening, bahasa, dan informasi promo serta Internet Banking Muamalat juga memiliki fitur transaksi debit *online*, nasabah dapat berbelanja di mitra atau *merchant-merchant* yang sudah bekerja sama dengan Bank Muamalat dengan lebih mudah, praktis dan aman. Untuk dapat menggunakan layanan *Internet Banking* Muamalat, nasabah cukup mengunjungi ATM Muamalat terdekat dan melakukan registrasi *Internet Banking* Muamalat serta melakukan aktivasi transaksi finansial melalui cabang Muamalat terdekat.

d. *SalaMuamalat*

Layanan *Contact Center* 24 jam yang memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan di manapun nasabah berada, baik untuk layanan informasi, permintaan, maupun pengaduan produk perbankan. Untuk dapat terhubung dengan SalaMuamalat nasabah dapat mengakses melalui:

- Telepon dengan nomor 1500016, sementara nasabah yang berada di luar negeri melalui nomor +6221 8066 8000.
- E-mail dengan alamat e-mail salamuamalat@bankmuamalat.co.id.
- Chat melalui WebChat pada website Bank Muamalat WhatsApp dengan nomor 081280651800.

e. *Muamalat Digital Integrated Access (MADINA)*

Layanan Internet Banking untuk nasabah non Individual yang berbasis *website* dan memiliki pilihan menu yang beragam, proses transaksi yang *realtime*, pengaturan wewenang, limit transaksi yang mudah sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan MADINA, nasabah dapat memonitor maupun melakukan transaksi perbankan atas rekening nasabah di Bank tanpa terbatas waktu dan tempat.

f. *Muamalat Merchants Apps (MMA)*

QRIS Acquiring Muamalat adalah layanan Bank Muamalat yang ditawarkan kepada Nasabah yang memiliki usaha yang memenuhi syarat yang telah ditentukan sebagai Merchant QRIS untuk dapat memproses data uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain atau Bank Muamalat sendiri berupa aplikasi uang elektronik berbasis server.

play store (Android), or App Gallery (Huawei) using the keyword “Muamalat DIN” and complete the registration process through the app.

c. *Muamalat Internet Banking*

This service aims to facilitate retail customers (individuals) in conducting financial transactions such as transfers (inter-account, interbank, SKN, and RTGS), payments (Telkom, Telko, electricity, cable TV, Zakat, and virtual accounts), purchases (prepaid top-ups, electricity, online Sukuk), and non-transactional activities such as balance checks, account statements, language options, and promotional information. Muamalat Internet Banking also features online debit transactions, allowing customers to shop with Muamalat’s partner merchants more easily, conveniently, and securely. To use Muamalat Internet Banking, customers simply need to visit the nearest Muamalat ATM to register and activate financial transactions through the nearest Muamalat branch.

d. *SalaMuamalat*

SalaMuamalat is a 24-hour contact center service that provides convenience to customers for information, requests, or banking product complaints anytime and anywhere. Customers can connect with SalaMuamalat through:

- Telephone at 1500016, or for customers outside Indonesia, at +6221 8066 8000.
- Email at salamuamalat@bankmuamalat.co.id.
- Chat via WebChat on the Bank Muamalat website or WhatsApp at 081280651800.

e. *Muamalat Digital Integrated Access (MADINA)*

MADINA is an internet banking service for non-individual customers based on a website platform with various menu options, real-time transaction processes, customizable transaction limits according to customer needs, allowing monitoring and banking transactions on customer accounts with the bank without time or location restrictions.

f. *Muamalat Merchants Apps (MMA)*

QRIS Acquiring Muamalat is a Bank Muamalat service offered to customers who have a business that meets the requirements that have been determined as a QRIS Merchant to be able to process electronic money data issued by other parties or Bank Muamalat itself in the form of server-based electronic money applications. Mobile



Mobile Banking (mis. MDIN) atau Uang elektronik (mis. OVO, GoPay, LinkAja, Dana) memiliki fitur pembayaran menggunakan QR. Layanan tersebut menggunakan Muamalat Merchants App (MMA) yang dapat di unduh dari playstore yang digunakan oleh Merchant untuk mengelola transaksi pembayaran barang/jasa melalui QRIS Merchant. Fitur yang tersedia pada Muamalat Merchant Apps yaitu notifikasi transaksi, cek histori transaksi, refund transaksi, generate QR Statis dan Dinamis.

g. Gerai Muamalat

Gerai Muamalat adalah layanan atau fasilitas sistem pembelian dan pembayaran tagihan secara tunai oleh masyarakat pada Loker atau *Payment Point (PP)* yang sudah bekerjasama dengan Bank Muamalat

h. Virtual Account

Virtual Account (VA) merupakan layanan Bank Muamalat untuk memudahkan Nasabah/Mitra dalam penerimaan pembayaran tagihan dari *End User*, berupa nomor identifikasi khusus yang dibuat unit untuk digunakan sebagai nomor tujuan pembayaran serta identifikasi tagihan bagi setiap *End User*.

i. Standard Nasional Open API Pembayaran (SNAP)

Standard Nasional Open API Pembayaran adalah layanan bagi mitra Bank Muamalat agar dapat melakukan instruksi beberapa fitur transaksi perbankan dari rekening yang dimiliki oleh Mitra secara langsung baik untuk kebutuhan transaksi Mitra sendiri, nasabah dari Mitra maupun non Mitra. Mitra mendapatkan fleksibilitas dalam mengakses sistem perbankan melalui sistem *internal business process* milik nasabah sendiri.

4. Layanan Treasury

a. Money Market

Aktivitas transaksi *Money Market* (Pasar Uang) di Bank Muamalat Indonesia dalam rangka baik pemenuhan likuiditas maupun optimalisasi likuiditas, di mana aktivitas tersebut *treasury* mencatatkan pendapatan dan biaya berupa margin, bagi hasil, athaya dan ujroh atas penempatan maupun pinjaman di pasar uang.

b. Foreign Exchange

Aktivitas transaksi Foreign Exchange di Bank Muamalat Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan baik nasabah perorangan, nasabah korporasi dan antarbank untuk memperoleh *fee-based income* dan juga sebagai transaksi pemenuhan kebutuhan bank (*Banking Book*). Mata uang yang dilayani adalah USD, MYR, SGD, EUR, JPY, SAR, KWD dan MultiCurrency. Produk Forex adalah *Cash transaction: Today*, Tom (*tomorrow*) dan *Spot*. Hedging transaction: hedging sederhana (*forward/ Al-Tahawwuth al-Basith*) dan hedging kompleks (*Al-Tahawwuth al-Murakkab*)

Banking (e.g. MDIN) or Electronic money (e.g. OVO, GoPay, LinkAja, Dana) has a payment feature using QR. The service uses the Muamalat Merchants App (MMA) which can be downloaded from the playstore which is used by merchants to manage payment transactions for goods / services through QRIS Merchant. Features available on Muamalat Merchant Apps are transaction notifications, check transaction history, refund transactions, generate Static and Dynamic QR.

g. Muamalat Outlets

Muamalat Outlets are cash payment and bill payment facilities provided to the public at designated counters or payment points (PP) that collaborate with Bank Muamalat.

h. Virtual Account

Virtual Account (VA) is a Bank Muamalat service that facilitates customers/partners in receiving bill payments from end-users. It consists of a unique identification number created by the unit to be used as a payment destination number and bill identification for each end-user.

i. National Standard Open Payment API (SNAP)

Standard Nasional Open API Pembayaran is a service provided to Bank Muamalat's partners to execute several banking transaction features directly from the partner's account for the partner's own transactions, transactions of the partner's customers, or non-partner transactions. Partners gain flexibility in accessing banking systems through their internal business process systems.

4. Treasury Services

a. Money Market

Money Market transactions at Bank Muamalat Indonesia serve both liquidity fulfillment and liquidity optimization purposes. In these activities, the treasury records income and expenses in the form of margins, profit-sharing, fees, and returns on placements or loans in the money market.

b. Foreign Exchange

Foreign Exchange transactions at Bank Muamalat Indonesia cater to the needs of individual customers, corporate clients, and interbank transactions to generate fee-based income and fulfill the bank's requirements (*Banking Book*). Supported currencies include USD, MYR, SGD, EUR, JPY, SAR, KWD, and MultiCurrency. Forex products include Cash transactions: Today, Tomorrow (Tom), and Spot. Hedging transactions include simple hedging (*forward/Al-Tahawwuth al-Basith*) and complex hedging (*Al-Tahawwuth al-Murakkab*).



Selain itu, juga melayani *exotic currency* seperti Won Korea (KRW), Dinar Jordan (JOD), dan Thailand Bath (THB) dan lain-lain. Nasabah juga dapat melakukan jual beli banknote ke Bank Muamalat Indonesia untuk mata uang USD, SAR, dan SGD. Transaksi - transaksi diatas dapat dilakukan baik di Indonesia maupun di cabang Kuala Lumpur, Malaysia.

c. *Fixed Income* (Sukuk)

Aktivitas transaksi Sukuk di Bank Muamalat Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah dalam berinvestasi sukuk dan memenuhi kebutuhan bank (banking position) untuk mata uang IDR dan USD. Sukuk yang ditransaksikan adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi. Sukuk yang aktif ditransaksikan adalah SR (Sukuk Ritel), PBS (Project Based Sukuk) dan Indois (Sukuk pemerintah mata uang USD).

Transaksi dilakukan dengan nasabah individu, korporasi dan antarbank. Adapun tujuan transaksi sukuk adalah untuk memperoleh fee-based income dan pendapatan margin/ujroh atas kupon sukuk pada portofolio *banking book*. Dan melanjutkan pada tahun-tahun sebelumnya BMI sebagai mitra distribusi sukuk pemerintah, BMI ikut berpartisipasi dalam penjualan sukuk yang diterbitkan pemerintah.

Additionally, exotic currencies such as Korean Won (KRW), Jordanian Dinar (JOD), Thai Baht (THB), and others are also served. Customers can also buy and sell banknotes of USD, SAR, and SGD currencies at Bank Muamalat Indonesia. These transactions can be conducted in Indonesia or at the Kuala Lumpur, Malaysia branch.

c. *Fixed Income* (Sukuk)

Sukuk transactions at Bank Muamalat Indonesia aim to meet the investment needs of customers and the bank's requirements (banking position) in IDR and USD currencies. Tradable Sukuk includes those issued by governments and corporations. Active Sukuk transactions include Retail Sukuk (SR), Project-Based Sukuk (PBS), and Indois (USD-denominated government Sukuk).

Transactions are conducted with individual customers, corporations, and interbank entities. The purpose of Sukuk transactions is to generate fee-based income and margin/returns on Sukuk coupons in the banking book portfolio. As in previous years, Bank Muamalat Indonesia continues to participate as a government Sukuk distribution partner, contributing to the sale of government-issued Sukuk.

AKTIVITAS UTAMA DAN TARGET PASAR BANK

Aktivitas utama BMI pada tahun buku 2023 tidak mengalami perubahan. Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, aktivitas utama Bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Selain melakukan transaksi antarbank berdasarkan prinsip syariah, BMI juga memberikan jasa layanan transaksi pembayaran dan perdagangan nasional dan internasional. Layanan ini mencakup jasa kiriman uang, inkaso/*collection*, transaksi valuta asing, dan pembiayaan ekspor impor dalam bentuk *Letter of Credit* (L/C) yang memberikan pendapatan imbal jasa atau *fee-based income* kepada Bank.

MAIN ACTIVITIES AND TARGET MARKET OF THE BANK

BMI's main activities in the fiscal year 2023 remained unchanged. According to the Company's Articles of Association, the Bank's main activities are to collect funds from the public and channel them back in the form of financing based on Sharia principles.

In addition to conducting interbank transactions based on Sharia principles, BMI also provides services for national and international payment and trade transactions. These services include money transfers, collections, foreign exchange transactions, and export-import financing in the form of Letters of Credit (L/C) which generate fee-based income for the Bank.



Wilayah Operasional

Operational Area

JARINGAN KERJA DAN MITRA USAHA DI DALAM DAN/ATAU LUAR NEGERI

Bank Muamalat Indonesia memiliki jaringan kerja yang terbagi di wilayah Indonesia dan luar negeri yakni Malaysia. Sampai dengan berakhirnya tahun buku 2023, jaringan kerja Bank di dalam negeri sebanyak (234) yang terdiri dari kantor pusat, kantor cabang utama, dan kantor cabang pembantu tersebar di hampir seluruh provinsi tanah air.

Sementara itu, untuk jaringan kerja di luar negeri yaitu Malaysia terdapat 1 (satu) kantor luar negeri.

JUMLAH, JENIS, DAN LOKASI KANTOR

Hingga 31 Desember 2023, Bank Muamalat Indonesia memiliki (235) kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh (55) Mobile Branch ditambah jaringan layanan yang luas berupa (564) unit ATM Muamalat, jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

NETWORK AND BUSINESS PARTNERSHIPS DOMESTICALLY AND/OR INTERNATIONALLY

Bank Muamalat Indonesia has a network divided into domestic and international regions, namely Malaysia. As of the end of the fiscal year 2023, the Bank's domestic network consists of (234) offices including the head office, main branches, and sub-branches spread across almost all provinces in the country.

Meanwhile, the international network consists of 1 (one) overseas office in Malaysia.

NUMBER, TYPES, AND LOCATIONS OF OFFICES

As of December 31, 2023, Bank Muamalat Indonesia has (235) service offices including 1 (one) branch office in Malaysia. The Bank's operations are also supported by (55) Mobile Branches in addition to an extensive service network including (564) Muamalat ATMs, shared ATM networks such as ATM Bersama and ATM Prima, and ATM networks in Malaysia through the Malaysia Electronic Payment System (MEPS).

Jenis Kantor	2023	2022	2021	2020	2019	Office Type
Kantor Pusat	1	1	1	1	1	Head Office
Kantor Cabang Utama	80	80	80	81	83	Main Branch Office
Kantor Cabang Pembantu	155	128	131	135	150	Sub-Branch Office
Kantor Kas	0	27	28	33	43	Cash Office
Kantor Luar Negeri	1	1	1	1	1	Overseas Office
Jumlah^{*)}	235	235	239	249	276	Total^{*)}

*) Di Luar Kantor Pusat dan Kantor Luar Negeri
Outside the Head Office and Overseas Offices.



Bank beroperasi di seluruh wilayah Indonesia serta Kuala Lumpur, Malaysia. Berikut adalah sebaran kantor dari wilayah operasional BMI per 31 Desember 2023.

The Bank operates throughout Indonesia as well as Kuala Lumpur, Malaysia. The following is the office distribution of BMI's operational areas as of December 31, 2023.

Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/District	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
Kantor Pusat Operasional - Muamalat Tower Head Office - Muamalat Tower	Gedung Muamalat Tower Jl. Raya Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi	Jakarta Selatan South Jakarta	DKI Jakarta	021-80666000	Kantor Pusat Head Office
Kantor Cabang Bintaro Jaya Bintaro Jaya Branch Office	Ruko Emerald Avenue 2 Blok EB/B No. 16-18, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan	Tangerang Selatan South Tangerang	Banten	021-22211090	KCU
Kantor Cabang Bumi Serpong Damai Bumi Serpong Damai Branch Office	Jl. Pahlawan Seribu Sektor IV Kav.D7 Blok RD No.73 Ruko Perkantoran BSD Serpong Tangerang 15310	Tangerang Selatan South Tangerang	Banten	021-5371036-37	KCU
Kantor Cabang Cengkareng Cengkareng Branch Office	Komp. Ruko Mutiara Taman palem Blok A3 No. 32-33, Jl. Kamal Raya Outer Ring Road Cengkareng Timur, Jakarta Barat 11730	Jakarta Barat West Jakarta	DKI Jakarta	021-54350004	KCU
Kantor Cabang Cilegon Cilegon Branch Office	Jl. Ahmad Yani KM 36, link. Kalanganyar, RT 06/01, Kel. Kedaleman, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Banten	Cilegon	Banten	0254-7876988/ 394295	KCU
Kantor Cabang Kebon Jeruk Kebon Jeruk Branch Office	Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jl. Panjang No. 12, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Jakarta Barat West Jakarta	DKI Jakarta	021-22127144, 021-22127653	KCU
Kantor Cabang Puri Indah Puri Indah Branch Office	Sentra Niaga Puri Indah Blok T3, No. 12A-14	Jakarta Barat West Jakarta	DKI Jakarta	021- 5817259	KCU
Kantor Cabang Roxy Roxy Branch Office	Jl. KH. Hasyim Ashari, Ruko ITC Roxy Mas Blok D3 No.14 Jakarta Barat 10150	Jakarta Pusat Central Jakarta	DKI Jakarta	021-38793088	KCU
Kantor Cabang Sawangan Sawangan Branch Office	Ruko Felicity Town House, Kav No. A5, Kel.kedaung Kec. Sawangan Kota Depok, Jawa Barat 16516	Depok	Jawa Barat West Java	0251-8412244/ 0251-8412275	KCU
Kantor Cabang Serang Serang Branch Office	Jl. Ahmad Yani No. 91 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang, Banten	Serang	Banten	0254-229180	KCU
Kantor Cabang Tangerang City Tangerang City Branch Office	Tangerang City Business Park Blok F No. 56, Jl. Jend Sudirman No. 1 Kota Tangerang	Tangerang	Banten	021- 55782368/ 55782528	KCU
Kantor Cabang Bogor Bogor Branch Office	Jl. Pajajaran No. 165 RT 03 RW 05 Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara	Bogor	Jawa Barat West Java	0251 - 8320111	KCU
Kantor Cabang Ciledug Ciledug Branch Office	Ruko CBD Ciledug Blok D.2 No. 19-20 Karang Tengah, Tangerang 15157	Tangerang	Banten	021 - 7310230	KCU
Kantor Cabang Cipulir Cipulir Branch Office	Jl. Ciledug No. 23 dan 23 A Jakarta Selatan	Jakarta Selatan South Jakarta	DKI Jakarta	021-7228242	KCU
Kantor Cabang Depok Depok Branch Office	Jl. Margonda Raya No. 187 RT 002 RW 015 Kel. Kemirimuka Kec. Beji Kota Depok Jawa Barat	Depok	Jawa Barat West Java	021-77202588	KCU
Kantor Cabang Fatmawati Fatmawati Branch Office	Jl. RS. Fatmawati No. 15 B-D Jaksel 12420	Jakarta Selatan South Jakarta	DKI Jakarta	021-7662479-82	KCU
Kantor Cabang Melawai Melawai Branch Office	Jl. Melawai Raya No. 72, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Jakarta Selatan South Jakarta	DKI Jakarta	021-7223623	KCU



Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/District	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
Kantor Cabang Buaran Klender Buaran Klender Branch Office	Ruko Buaran Indah Blok C No. 9-11 Jl. Raden Inten Buaran Klender Jakarta Timur 13470	Jakarta Timur East Jakarta	DKI Jakarta	021 - 86609797	KCU
Kantor Cabang Jababeka Jababeka Branch Office	Ruko Roxy Pecenongan Square JABABEKA, Jl. Kasuari Raya S1 B No. 2-3, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi	Bekasi	Jawa Barat West Java	021-89261851	KCU
Kantor Cabang Kalimalang Kalimalang Branch Office	Ruko Duta Permai Plaza Blok B II No. 20-22 Jl. KH. Noer Ali (d/h Jl. Raya Kalimalang Jakasampurna - Bekasi Barat)	Bekasi	Jawa Barat West Java	021-8840867	KCU
Kantor Cabang Kalimas Bekasi Kalimas Bekasi Branch Office	Jl. Chairil Anwar Ruko Kalimas Blok C. 29-30 Margahayu Bekasi Timur	Bekasi	Jawa Barat West Java	021 - 8826566	KCU
Kantor Cabang Bandung Bandung Branch Office	Jl. Buah Batu No. 276 A Bandung 40265, Kel. Cijagra Kec. Lengkong	Bandung	Jawa Barat West Java	022-7305919/ 7309229	KCU
Kantor Cabang Kelapa Gading Kelapa Gading Branch Office	Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Blok LA/6 No. 34,35 Jakarta 14240	Jakarta Utara North Jakarta	DKI Jakarta	021 - 45856969	KCU
Kantor Cabang Kramat Raya Kramat Raya Branch Office	Gedung Dewan Dakwah Islamiyah, Jl. Kramat Raya No. 45, Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10450	Jakarta Timur East Jakarta	DKI Jakarta	021 - 85913534/ 85913552	KCU
Kantor Cabang Dewi Sartika Dewi Sartika Branch Office	Jl. Dewi Sartika No. 199A Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur 13630	Jakarta Timur East Jakarta	DKI Jakarta	021 - 21012400	KCU
Kantor Cabang Pancoran Pancoran Branch Office	Wisma Haroen, Jl Raya Pasar Minggu No. 2 B-C, Pancoran, Jakarta Selatan	Jakarta Selatan South Jakarta	DKI Jakarta	021-7973654	KCU
Kantor Cabang Rawamangun Rawamangun Branch Office	Jl. Paus No.83 B-C Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur 13220	Jakarta Timur East Jakarta	DKI Jakarta	021-47864444	KCU
Kantor Cabang Wolter Monginsidi Wolter Monginsidi Branch Office	Jl. Wolter Monginsidi No.123 D-E RT/RW 001/02, Kel. Rawa Barat, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12180	Jakarta Selatan South Jakarta	DKI Jakarta	021-7226767/ 7226868/ 7227272	KCU
Kantor Cabang Denpasar Denpasar Branch Office	Jl. Teuku Umar No. 82 Denpasar,Bali	Denpasar	Bali	0361-255474	KCU
Kantor Cabang Jember Jember Branch Office	Jl. PB. Sudirman No. 35 Pagah, Jemberlor, Kec. Patrang, Kab. Jember Jawa Timur	Jember	Jawa Timur East Java	0331-410433	KCU
Kantor Cabang Kediri Kediri Branch Office	Jl. Hasanuddin No. 26 Kel. Dandangan Kediri 64122	Kediri	Jawa Timur East Java	0354-671801-04	KCU
Kantor Cabang Surabaya Kh. Mas Mansyur Surabaya Branch Office Kh. Mas Mansyur	Jl. KH. Mas Mansyur 171 Surabaya	Surabaya	Jawa Timur East Java	0313-545250	KCU
Kantor Cabang Kupang Kupang Branch Office	Jl. Jend. Sudirman No. 88 E-F Kupang	Kupang	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara	0380-829556	KCU
Kantor Cabang Malang Malang Branch Office	Jl Kertanegara No 2 Malang	Malang	Jawa Timur East Java	0341-556020	KCU
Kantor Cabang Mataram Mataram Branch Office	Jl. Langko No. 01, Kel. Gomong Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat	Mataram	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	0370-646060	KCU



Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/District	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
Kantor Cabang Surabaya Darmo Surabaya Darmo Branch Office	Jl.Raya Darmo 81 Surabaya	Surabaya	Jawa Timur East Java	0315-611230	KCU
Kantor Cabang Surabaya Sungkono Surabaya Sungkono Branch Office	Jl. Mayjend Sungkono No. 107, Kel.Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya - 60224	Surabaya	Jawa Timur East Java	031-5666983	KCU
KCP Dago	Jl. Ir. H. Djuanda Nomor 185, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Bandung	Jawa Barat West Java	022-20467048	KCP
KCP Setiabudi	Jl. Dr. Setiabudi No. 192C, Rt. 004/05, Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung	Bandung	Jawa Barat West Java	022-20270305/ 081542500438	KCP
KCP Garut	Jl. Ciledug No. 247 Garut, Kel. Kota Kulon, Kec. Garut Kota, Kab.Garut	Garut	Jawa Barat West Java	0262-243399	KCP
KCP Cimahi	Jl. Amir Machmud No. 315 Ds. Cigugur Tengah, Kec. Cimahi, Kota Cimahi	Cimahi	Jawa Barat West Java	022-6643920	KCP
KCP Purwakarta	Jl. R E Martadinata No. 39, Kel. Nagritengah, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta 41114	Purwakarta	Jawa Barat West Java	0264-8222999	KCP
Kantor Cabang Kudus Kudus Branch Office	Jl.Ahmad Yani No. 19-20, Panjunan, Kudus, Jawa Tengah	Kudus	Jawa Tengah Central Java	0291-4251720	KCU
Kantor Cabang Pekalongan Pekalongan Branch Office	Jl. Hayam Wuruk No. 142 Pekalongan, RT 001/RW 011, Sampangan	Pekalongan	Jawa Tengah Central Java	0285-411222	KCU
Kantor Cabang Purwokerto Purwokerto Branch Office	Komp. Ruko Satria Plaza Blok A 4-5 Jl. Jend. Sudirman Purwokerto 53111	Banyumas	Jawa Tengah Central Java	0281-642345 / 642347	KCU
Kantor Cabang Semarang Semarang Branch Office	Jl. Sugiyopranoto No. 102 Semarang 50246	Semarang	Jawa Tengah Central Java	024-3564134	KCU
Kantor Cabang Solo Solo Branch Office	Jl. Slamet Riyadi No. 388 Solo, 57141	Surakarta	Jawa Tengah Central Java	0271-743457	KCU
Kantor Cabang Tegal Tegal Branch Office	Ruko Gajah Mada Town Square No. 3 - 4 Jl. Gajah Mada Tegal 52121	Tegal	Jawa Tengah Central Java	0283-354807	KCU
Kantor Cabang Yogyakarta Yogyakarta Branch Office	Jl. Margo Utomo (P. Mangkubumi) No. 50 Yogyakarta	Yogyakarta	DI Yogyakarta	0274-544416	KCU
Kantor Cabang Balikpapan Balikpapan Branch Office	Jl. Jend. Sudirman Komp. Klandasan Permai Blok A No. 6-7 Balikpapan Selatan 76112, Kaltim	Balikpapan	Kalimantan Timur East Kalimantan	0542-731881	KCU
KCP Ujung Berung	Ruko Tritan Point Blok B5-15 Jl. AH Nasution, RT003 RW 02 Kel. Cipadung Wetan, Kec. Panyileukan	Bandung	Jawa Barat West Java	022-63721824/ 7832086	KCP
KCP Cicadas	Jl. Ahmad Yani No. 778 Kel. Cicaheum, Kec. Kiaracondong,	Bandung	Jawa Barat West Java	022-7277839	KCP
KCP Kopo	Jl. Kopo Sayati No. 98A-2, Blok Bihbul, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung	Bandung	Jawa Barat West Java	81548804333	KCP
Kantor Cabang Samarinda Samarinda Branch Office	Jl. Pahlawan Blok F No. 3A-B Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Samarinda, 75123	Samarinda	Kalimantan Timur East Kalimantan	0541-745511/ 735697	KCU



Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/District	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
Kantor Cabang Ambon Ambon Branch Office	Jl. AM. Sangadji No. 45, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku	Ambon	Maluku	0911 - 314444	KCU
Kantor Cabang Gorontalo Gorontalo Branch Office	Jl. Nani Wartabone No. 26, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo	Gorontalo	Gorontalo	0435-831747	KCU
Kantor Cabang Jayapura Jayapura Branch Office	Ruko Pasific Permai Blok C no. 33 Dok II, Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua 99112	Jayapura	Papua	0967-551777	KCU
Kantor Cabang Kendari Kendari Branch Office	Jl.Dr. Sam Ratulangi No. 170 Kendari 93111	Kendari	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi	0401-3129903	KCU
Kantor Cabang Makassar Makassar Branch Office	Jl. DR. Ratulangi No. 12, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar	Makassar	Sulawesi Selatan South Sulawesi	0411-832777	KCU
Kantor Cabang Mamuju Mamuju Branch Office	Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Mamuju	Mamuju	Sulawesi Barat West Sulawesi	0426-22467	KCU
Kantor Cabang Manado Manado Branch Office	Jl. Samratulangi No. 11, Kelurahan Wenang, Kecamatan Wenang, Kota Manado	Manado	Sulawesi Utara North Sulawesi	0431-877778	KCU
Kantor Cabang Palu Palu Branch Office	Jl. Prof. Moh. Yamin Kompleks Perkantoran D'Vatulemo No. 2-3	Palu	Sulawesi Tengah Central Sulawesi	0451-457555/ 457671	KCU
Kantor Cabang Sorong Sorong Branch Office	Ruko H.Lasedi Jl.Jend Sudirman No.2a-2b Depan Pasar Bersama Sorong	Sorong	Papua Barat Daya Southwest Papua	0951-332777	KCU
Kantor Cabang Ternate Ternate Branch Office	Jl.Hasan Esa No.19,Kel. Takoma Ternate	Ternate	Maluku Utara North Maluku	0921-3124029	KCU
Kantor Cabang Bengkulu Bengkulu Branch Office	Jl. S.Parman No. 62 C-D Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu	Bengkulu	Bengkulu	0736-348100	KCU
Kantor Cabang Jambi Jambi Branch Office	Jl. Sultan Agung No. 01 Kel. Murni Kec. Danau Sipin, Kota Jambi	Jambi	Jambi	0741-7551241	KCU
Kantor Cabang Lampung Lampung Branch Office	Jl. Diponegoro 11 D-E, Kel. Enggal Kec. Tanjung Kramat Pusat bandar Lampung	Bandar Lampung	Lampung	0721-242123	KCU
Kantor Cabang Padang Padang Branch Office	Jl. Rasuna Said No. 107 Padang	Padang	Sumatera Barat West Sumatra	0751 - 7054106	KCU
Kantor Cabang Palembang Palembang Branch Office	Jl. Kapten A.Rivai Komplek Ruko Taman Mandiri - Palembang	Palembang	Sumatera Selatan South Sumatra	0711-351239	KCU
Kantor Cabang Pangkal Pinang Pangkal Pinang Branch Office	Jl. Ahmad Yani Dalam Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang	Pangkalpinang	Bangka Belitung	0717-422812/ 422783	KCU
Kantor Cabang Banda Aceh Banda Aceh Branch Office	Jl. Tgk H.M Daud Beureueh No. 174 A-B, Banda Aceh	Banda Aceh	Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	0651-635654/ 635655	KCU
Kantor Cabang Batam Batam Branch Office	Jl. Raja Haji Fisabilillah, Ruko Mahkota Raya Blok D No.. 11-12, Batam Center, Kota Batam - Kepulauan Riau	Batam	Kepulauan Riau Riau Islands	0778-467241	KCU
Kantor Cabang Langsa Langsa Branch Office	Jln. Ahmad Yani No.1-2 Kota Langsa	Langsa	Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	0641-426584	KCU
Kantor Cabang Medan Balaikota Medan Balaikota Branch Office	Jl. Balai Kota No. 10 D-E, Medan	Medan	Sumatera Utara North Sumatra	061-4535353	KCU



Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/District	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
Kantor Cabang Medan Baru Medan Baru Branch Office	Jl. Iskandar Muda No. 121 Medan, Sumatra Utara	Medan	Sumatera Utara North Sumatra	061-4579343	KCU
Kantor Cabang Padang Sidempuan Padang Sidempuan Branch Office	Jl. Baginda Oloan / Gatot Subroto No. 08 Padangsidempuan 22718	Padang Sidempuan	Sumatera Utara North Sumatra	0634-22999	KCU
Kantor Cabang Pekanbaru Pekanbaru Branch Office	Jl. Jend. Sudirman No. 411 Kota Pekanbaru, Propinsi Riau	Pekanbaru	Riau	0761-862915	KCU
Kantor Cabang Pematang Siantar Pematang Siantar Branch Office	Jl. Sangnawalu/Asahan Komp. Megaland Blok A No. 6 dan 7, Pematangsiantar	Pematang Siantar	Sumatera Utara North Sumatra	0622-26662	KCU
Kantor Cabang Tanjung Pinang Tanjung Pinang Branch Office	Jl. DI. Panjaitan Blok A No. 3/3A Km. 9 Tanjung Pinang - Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	Kepulauan Riau Riau Islands	0771-441999	KCU
Kantor Cabang Kuala Lumpur Kuala Lumpur Branch Office	Suite 1.03-1.05 Ground Floor No. 67, Wisma Goldhill Jalan Raja Chulan 50200 Kuala Lumpur	Malaysia	Malaysia	603-2711 0807/ 603-27117427	KCU
KCP Cikupa Tangerang	Jl. Boulevard Ruko Citra Raya Blok H-1 No. 17 R, Desa Cikupa, Kec. Cikupa, Tangerang	Tangerang	Banten	021-44622426	KCP
KCP Darunnajah	Komp. Pesantren Darunnajah Jl. Ululjami Raya Rt.001/004 no 86, Pesanggrahan Jakarta Selatan 12250	Jakarta Selatan South Jakarta	DKI Jakarta	021-7376085	KCP
KCP PB Sudirman	Komplek YYS Pendidikan PB Soedirman, Jl. Raya Bogor KM 24 Pasar Rebo Jaktim	Jakarta Timur East Jakarta	DKI Jakarta	021-8413728	KCP
KCP Amikom Yogyakarta	Kampus STMIK AMIKOM, Jl. Ring Road Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283	Sleman	DI Yogyakarta	0274-4477663	KCP
KCP Istiqomah Bandung	Jl. Citarum No. 1 Kel. Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kodya Bandung 40115	Bandung	Jawa Barat West Java	022-4234156	KCP
KCP Merdeka Tangerang	Jl. Merdeka Raya No. 101c Cimone Raya, Karawaci	Tangerang	Banten	021-5581052/ 5581067/ 5581015	KCP
KCP Pamulang	Jl. Raya Pamulang Blok SH 19/9 Tangerang Selatan 15417	Tangerang Selatan South Tangerang	Banten	021-7428865	KCP
KCP AL Azhar Serpong	Jl. Puspitaloka III / 2 BSD Serpong Tangerang Selatan	Tangerang Selatan South Tangerang	Banten	021-5381944	KCP
KCP Slipi	Jl. KS Tubun No. 146, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat	Jakarta Pusat Central Jakarta	DKI Jakarta	021-5326744-45	KCP
KCP Balaraja	Jl. Raya Serang Jakarta KM 22, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten	Tangerang	Banten	82818932088	KCP
KCP IPB Darmaga	Jl. Raya Dramaga RT 02 RW 01 Kel. Babakan, Kec. Dramaga	Kab. Bogor Regency of Bogor	Jawa Barat West Java	0251-8622856	KCP
KCP Cibinong	Cibinong City Center Blok A/22, Jl Tegar Beriman No. 01 RT 05 RW 12, Pakansari, Cibinong, Bogor	Kab. Bogor Regency of Bogor	Jawa Barat West Java	021-29231065	KCP
KCP Cikeas	Rukan Transyogi No. 11 Jl. Transyogi Cibubur, Kel. Nagrak Kec. Gn. Putri Bogor 16967	Bogor	Jawa Barat West Java	021-82481996	KCP



Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/District	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
KCP Cimanggis	Jl. Raya Bogor Km 29 No. 9B RT 004 RW 001 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok Jawa Barat	Depok	Jawa Barat West Java	021-87713174	KCP
KCP Kranggan	Jl. Transyogi Cibubur Komp. Ruko Kranggan Permai Blok XVI No.11 RT 002 RW 016 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat	Bekasi	Jawa Barat West Java	021-8444694	KCP
KCP Cinere	Jl. Cinere Raya Blok A No. 37, Depok, Jawa Barat	Depok	Jawa Barat West Java	021-7532201/ 7532195/ 7532196	KCP
KCP UIN Syarif Hidayatullah	Komp. Masjid Fatahillah UIN Syarif Hidayatullah Jl. Ir. H. Juanda Ciputat Tangerang	Tangerang Selatan South Tangerang	Banten	021-7442464/ 7442465	KCP
KCP AL Azhar Kebayoran	YPI Al Azhar Jl. Sisingamangaraja Kby Baru	Jakarta Selatan South Jakarta	DKI Jakarta	021-7253404 021- 7253403	KCP
KCP Pondok Kopi	Jalan Nusa Indah Raya Blok 40 No. 15 Rt 12 Rw 3 Duren Sawit, Jakarta Timur 13460	Jakarta Timur East Jakarta	DKI Jakarta	021-86610490	KCP
KCP Cikarang	Ruko Sentra Cikarang Blok A No. A7 Desa Sukaresmi, Cikarang Selatan Kab. Bekasi 17530	Bekasi	Jawa Barat West Java	021-89900638	KCP
KCP Pondok Gede	Jl Raya Pondok Gede No. 50B, Kav. NO.9, Kel. Jatirahayu, Kec. Melati, Bekasi	Bekasi	Jawa Barat West Java	021-84990375	KCP
KCP Juanda Bekasi	Jl. Ir. H. Juanda No. 60 Margajaya, Bekasi 17141	Bekasi	Jawa Barat West Java	021-8850966	KCP
KCP Kemang Pratama	Komplek YPI Al Azhar Kemang Pratama Bojong Rawalumbu, Bekasi 17116	Bekasi	Jawa Barat West Java	021-82400251	KCP
KCP Asrama Haji Pondok Gede	Jl. Raya pondok Gede Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jaktim 13560	Jakarta Timur East Jakarta	DKI Jakarta	021-8011233	KCP
KCP Bintara Bekasi	Jl. Bintara Raya Komplek Ruko Bintara Bisnis Center No. 8, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat	Bekasi	Jawa Barat West Java	021-88966129	KCP
KCP Grand Wisata	Jl. Celebration Boulevard Ruko Grand Wisata, Blok AA 12 No. 7, Tambun, Bekasi	Bekasi	Jawa Barat West Java	021- 82648115	KCP
KCP Kemenkeu	Gd. Auditorium Dhanapala Jl. Wahidin Raya No. 1, Komplek Kementrian Keuangan, Jakarta Pusat	Jakarta Pusat Central Jakarta	DKI Jakarta	021-42883774/ 42885956	KCP
KCP Condet	Ruko Mutiara Faza Jl. Raya Condet Kelurahan Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur	Jakarta Timur East Jakarta	DKI Jakarta	021-87798827	KCP
KCP Pasar Minggu	Ruko Royal Spring Business Park, Jl. Raya Ragunan No.29 A Unit 7, Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Jakarta Selatan South Jakarta	DKI Jakarta	021- 78848710	KCP
KCP Sunan Giri Rawamangun	Jl. Sunan Giri No. 1 Rawamangun Jaktim 13220	Jakarta Timur East Jakarta	DKI Jakarta	021- 4706725	KCP
KCP Genteng	Jl. Diponegoro No. 19 Genteng Kulon, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur	Banyuwangi	Jawa Timur East Java	0333-846997	KCP
KCP Situbondo	Jl. A. Yani No. 197 A Situbondo	Situbondo	Jawa Timur East Java	0338-670766	KCP
KCP Banyuwangi	Jl. Adi Sucipto No. 40 A, Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Timur East Java	0333-412136	KCP



Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/District	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
KCP Madiun	Jl. Kol Marhadi No. 62 Pangongangan Manguharjo Kota Madiun	Madiun	Jawa Timur East Java	0351-493400	KCP
KCP Ponorogo	Jl. Urip Sumoharjo No.55 Mangkujayan	Ponorogo	Jawa Timur East Java	0352-488400	KCP
KCP Nganjuk	Jl Gatot Subroto No 52 Nganjuk	Nganjuk	Jawa Timur East Java	0358-331901	KCP
KCP Blitar	Komplek Ruko Merdeka Timur Center Blok H Kel. Kepanjen Lor Ke. Kepanjen Kidul Blitar	Blitar	Jawa Timur East Java	0342-807867	KCP
KCP Tulung Agung	Ruko Panglima Sudirman Blok C No. 2, Jl. Hasanudin, Kenayan, Tulungagung, Jawa Timur	Tulungagung	Jawa Timur East Java	0355-328500	KCP
KCP Lamongan	Jl Lamongrejo No 115 Lamongan	Lamongan	Jawa Timur East Java	0322-316201 0322- 321086	KCP
KCP Sumenep	Komplek Ruko Graha Adi Poday Kav. Blok A, Jl. Trunojoyo No. 214, Sumenep, Madura.	Sumenep	Jawa Timur East Java	0328-6763228 0328-6763548	KCP
KCP Sepanjang	Jl. Raya Ngelom No. 83, Ngelom, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	Sidoarjo	Jawa Timur East Java	0317-880311	KCP
KCP Pasuruan	Jl. Panglima Sudirman No 40C, Kota Pasuruan	Pasuruan	Jawa Timur East Java	0343-416262	KCP
KCP Probolinggo	Jl. Sukarno Hatta No. 275 Kav 4 Kel. Tisnonegaran Probolinggo, Jawa Timur	Probolinggo	Jawa Timur East Java	0335-430016	KCP
KCP Kepanjen	Jl. Ahmad Yani No. 5, Ardirejo, Kepanjen kab. Malang	Malang	Jawa Timur East Java	0341-393801	KCP
KCP Batu	Jl KH Agus Salim Kav 100 No. 145, Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65315	Batu	Jawa Timur East Java	0341-592544	KCP
KCP Sumbawa	Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	0371-2621200	KCP
KCP Jombang	JL. Gus Dur No.18A, Kelurahan Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang	Jombang	Jawa Timur East Java	0321- 8490557/8490535	KCP
KCP Mojokerto	Jl. Gajah Mada No. 104 Mojokerto, Bolangsari, Megarsari Kota Mojokerto	Mojokerto	Jawa Timur East Java	0321-381638/ 381641	KCP
KCP Sidoarjo	Jl. Jenggolo No.20 Kel. Pucang, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur	Sidoarjo	Jawa Timur East Java	031-8959988	KCP
KCP Rungkut	Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 416 Ruko Raya Merr, Kedung Baruk Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur	Surabaya	Jawa Timur East Java	031-87856535	KCP
KCP Subang	Jl. Otista No. 94 Subang, Kel. Karang Anyar, Kec. Subang	Subang	Jawa Timur East Java	0260-421666	KCP
KCP Rancaekek	Jl. Raya Rancaekek No. 20, Rt. 01/02, Desa Bojongloa, kec. Rancaekek, Kabupaten Bandung	Bandung	Jawa Barat West Java	022-7799227/ 081542002840/ 081542002830	KCP
KCP Padalarang	Jl. Raya Cimareme No. 340 B, Ds. Cimareme, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat.	Bandung Barat West Bandung	Jawa Barat West Java	022-6867783	KCP



Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/District	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
Kantor Cabang Cirebon Cirebon Branch Office	Jl. Siliwangi No. 60 Cirebon 45121	Cirebon	Jawa Barat West Java	0231-200828 Fax 0231-206817	KCU
KCP Kuningan Cirebon	Jl. Siliwangi No. 124 Kuningan 45511	Kuningan	Jawa Barat West Java	0232-879664 Fax 0232 - 872418	KCP
KCP Indramayu	Jl. Jend. Sudirman No. 170 Rt. 003 Rw. 007, Kel. Karanganyar, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu	Indramayu	Jawa Barat West Java	0234-5278815 Fax 0234 - 5278816	KCP
KCP Majalengka	Jl. KH.Abdul Halim No. 81 RT/ RW 03/11 Kab. Majalengka	Majalengka	Jawa Barat West Java	0233-8286427 0233- 8286428	KCP
KCP Arjawinangun	Ruko 5, Jl. Palimanan - Jakarta KM 02 Ds. Junjang RT/RW 05/03 Kab. Cirebon /45162	Cirebon	Jawa Barat West Java	0231 - 357007 Fax 0231- 359227	KCP
KCP Sumber Cirebon	Jl. Dewi Sartika No. 10 A, Kel. Tukmudal, Kec. Sumber, Kab. Cirebon	Cirebon	Jawa Barat West Java	0231 - 322775 Fax 0231- 322765	KCP
Kantor Cabang Cianjur Cianjur Branch Office	Jl. Kh. Abdullah Bin Nuh No. 03 Pamoyanan Cianjur, Jawa Barat	Cianjur	Jawa Barat West Java	0263-280950	KCU
KCP Cipanas	Jl. Raya Cipanas (Depan Pasar Cipanas) No. 134 E Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur	Cianjur	Jawa Barat West Java	0263-520268	KCP
KCP Soreang	Soreang Square No.1 Jl. Raya Soreang, Ds. Cingcin, Kec. Soreang, Kab. Bandung	Bandung	Jawa Barat West Java	022-5893875	KCP
Kantor Cabang Tasikmalaya Tasikmalaya Branch Office	Jl. HZ. Mustofa No. 294 Kota Tasikmalaya	Tasikmalaya	Jawa Barat West Java	0265-326 900	KCU
KCP Ciamis	Jl MR. Iwakusumasumantri Ruko No 9 Kabupaten Ciamis 46211	Ciamis	Jawa Barat West Java	0265-777 998	KCP
Kantor Cabang Sukabumi Sukabumi Branch Office	Jl. Jend. Sudirman No. 77 Kota Sukabumi	Sukabumi	Jawa Barat West Java	0266-245888	KCU
KCP Cibadak	Jl. Siliwangi No. 132 RT 01/ RW 17, Kel. Cibadak, Kab. Sukabumi	Sukabumi	Jawa Barat West Java	0266-536257	KCP
Kantor Cabang Karawang Karawang Branch Office	Jl. Tuparev No. 297, Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat	Karawang	Jawa Barat West Java	0267-8452333	KCU
Kantor Cabang Banjarmasin Banjarmasin Branch Office	Jl. Ahmad Yani Km. 6 No.3, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Kalimantan Selatan South Kalimantan	0511-3264050	KCU
KCP Banjarbaru	Jl. Ahmad Yani Km.36 Banjarbaru - Kalimantan Selatan	Banjarbaru	Kalimantan Selatan South Kalimantan	0511-4773199	KCP
KCP Barabai	Jl. Brigjend H. Hasan Basri Kemasan Luar, Rt. 03 Rw. 01, Kel. Barabai Tengah, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah	Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan South Kalimantan	0517-43681	KCP
KCP Pati	Jl. Kol Sunandar Komplek Puri Plaza No. 15, Kelurahan Puri, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati	Pati	Jawa Tengah Central Java	0295-387796	KCP
KCP Pemalang	Jl. Jend. Sudirman Timur, No. 32 Pemalang	Pemalang	Jawa Tengah Central Java	0284-324767	KCP



Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/District	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
KCP Batang	Jl. Pangeran Diponegoro Ruko Srikandi Blok.A Nomor 3 Batang	Batang	Jawa Tengah Central Java	0285-392622	KCP
KCP Cilacap	Jl. Gatot Soebroto No. 104 A - RT 05 RW 09 Kel. Sidanegara Kec Cilacap Tengah, Kab Cilacap 53223	Cilacap	Jawa Tengah Central Java	0282-5253195	KCP
KCP Purbalingga	Jl. Jend. Sudirman No. 189, Purbalingga, RT 01 RW 01 Kel. Bancar, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah	Purbalingga	Jawa Tengah Central Java	0281-895415	KCP
KCP Magelang	Jl. Tentara Pelajar No. 12 Ruko C, Kel. Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah	Magelang	Jawa Tengah Central Java	0293-313358	KCP
KCP Kendal	Jl. Soekarno Hatta No. 244, Pekauman, Kendal	Kendal	Jawa Tengah Central Java	0294-382700	KCP
KCP Salatiga	Jl. Sukowati No 19 C Salatiga	Salatiga	Jawa Tengah Central Java	0298-315937	KCP
KCP Wonosobo	Jl. RSU No. 10 Wonosobo	Wonosobo	Jawa Tengah Central Java	0286-325197	KCP
KCP Kartasura	Jl. A. Yani No. 54 B Kartasura Sukoharjo	Sukoharjo	Jawa Tengah Central Java	0271-780962	KCP
KCP Boyolali	Jl. Pandanaran Dk Karangturi RT 02 RW 02 Kiringan Boyolali (Barat Pasar Sunggingan)	Boyolali	Jawa Tengah Central Java	0276-323484	KCP
KCP Wonogiri	Jl. Achmad Yani No. 119 B, Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah	Wonogiri	Jawa Tengah Central Java	0274-324021	KCP
KCP Klaten	Jl. Pemuda Utara No. 80 Rt. 03/01, Bareng, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten	Klaten	Jawa Tengah Central Java	0272-323244	KCP
KCP Sragen	Jl. Raya Sukowati 133 Sragen	Sragen	Jawa Tengah Central Java	0271-8823199	KCP
KCP Karanganyar	Jl. Lawu 356 Karanganyar	Karanganyar	Jawa Tengah Central Java	0271-6497033	KCP
KCP Wirobrajan	Jl. Mayjen Sutoyo No. 71 B Mantrijeron, Yogyakarta	Yogyakarta	DI Yogyakarta	0274-414666	KCP
KCP Bantul	Jl. Jend. Sudirman No. 40, Bantul, Yogyakarta	Bantul	DI Yogyakarta	0274-367121/ 367183	KCP
KCP Tanah Grogot	Jl. Jendral Sudirman No. 86, Rt. 05/03, Kel. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur	Paser	Kalimantan Timur East Kalimantan	0543-23434	KCP
KCP Kilo	Jl. Soekarno Hatta Km 2,5 Rt. 15 No. 23 Kel. Gn. Samarinda, Balikpapan 76125, Kaltim	Balikpapan	Kalimantan Timur East Kalimantan	0543-417682	KCP
Kantor Cabang Pontianak Pontianak Branch Office	Jl. Sultan Syarif Abdurrahman no.62 A, Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, 78121, Prop. Kalimantan Barat	Pontianak	Kalimantan Barat West Kalimantan	0561-731756	KCU
Kantor Cabang Palangkaraya Palangkaraya Branch Office	Jl. Diponegoro No. 17 Palangkaraya 73111, Palangka Raya, Kalimantan Tengah	Palangka Raya	Kalimantan Tengah Central Kalimantan	0536-3224509	KCU
KCP Sampit	Jl. Ais Nasution No. 8 Sampit Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah Central Kalimantan	0531-30954	KCP
KCP Pangkalan Bun	Jl. Iskandar RT.09 RW.02, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan Pangkalan Bun - Kota Waringin Barat/ 74112	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah Central Kalimantan	0532-22234	KCP



Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/District	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
KCP Bontang	Jl. MT Haryono No.15 RT.29 RW.09 Kel. Api-Api Kec. Bontang Utara, Bontang 75311	Bontang	Kalimantan Timur East Kalimantan	0548-26601	KCP
KCP Sangatta	Jl. Yos Sudarso II No. 27 Rt. 22 Kec. Sangatta Utara , Kab. Kutai Timur 75683	Kutai Timur	Kalimantan Timur East Kalimantan	0549-22574/25391	KCP
KCP Tarakan	Jl. Jendral Sudirman Rt. 04, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara	Tarakan	Kalimantan Utara North Kalimantan	0551-37001	KCP
KCP Berau	Jl. Aminuddin Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau	Berau	Kalimantan Timur East Kalimantan	0554-2027043	KCP
KCP Limboto	Jl. AA Wahab Lingkungan Durian Kel. Hepuhulawa, Kec. Limboto Kab. Gorontalo	Limboto	Gorontalo	0435-881477	KCP
KCP Boalemo	Jl.Husin Dj. Rahman Desa Limbato Kec. Tilamuta Kab. Boalemo	Boalemo	Gorontalo	0443-211110	KCP
KCP Timika	Jl. Poros Cendrawasih Kel. Kwamki, Distrik Mimika Baru, Timika - Papua	Timika	Papua	0901-323999	KCP
KCP Merauke	Jl. Raya Mandala Bampel Distrik Merauke Kab. Merauke	Merauke	Papua	0971-324995	KCP
KCP Kolaka	Jl. Chairil Anwar No. 28 Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara	Kolaka	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi	0405-2323947	KCP
KCP Bau - Bau	Jl. Betoambari No. 50A, Kel. Lanto, Kec. Batu Poaro, Kota Baubau	Bau-Bau	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi	0402-2822577	KCP
KCP Bombana	Jl Yos Sudarso Kelurahan Lantawonua Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana	Bombana	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi	0816-248049	KCP
KCP Unaha Konawe	Jl. Sapati Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab Konawe Sultra	Konawe	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi	0408-2422444	KCP
KCP Palopo	Jl. Jend. Sudirman No. 43 Kel Amassangan, Kec Wara, Kota Palopo	Palopo	Sulawesi Selatan South Sulawesi	0471-326623	KCP
KCP Pare - Pare	Jl. Sultan Hasanuddin No. 3 Kel. Ujung, Kec. Ujung Sabbang, Kota Pare-pare	Parepare	Sulawesi Selatan South Sulawesi	0421-28061	KCP
KCP Bone	Jl. Ahmad Yani No. 169 Kab. Bone	Bone	Sulawesi Selatan South Sulawesi	0481-27555	KCP
KCP Gowa	Jl. KH. Wahid Hasyim, Ruko Balla Lompaa Plaza Blok B2, Gowa, Sulawesi Selatan	Gowa	Sulawesi Selatan South Sulawesi	0411-8220375	KCP
KCP Maros	Jl. Jend. Sudirman No.18-20 Kel. Alliritengae Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan	Maros	Sulawesi Selatan South Sulawesi	0411-373888	KCP
KCP Pettarani	Jl. AP. Pettarani Ruko No. 10 D, Makassar, Sulawesi Selatan	Makassar	Sulawesi Selatan South Sulawesi	0411-432422	KCP
KCP Wonomulyo Mamuju	Jl. Jend. Sudirman No. 91, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar	Mamuju	Sulawesi Barat West Sulawesi	0428-52393	KCP
KCP Palu Barat	Jl. Sis Aljufri No. 48, Kel. Siranindi, Kec. Palu Barat,Kota Palu Sulawesi Tengah	Palu Barat	Sulawesi Tengah Central Sulawesi	0451-424444	KCP



Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/District	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
KCP Luwuk	Jl. Urip Sumoharjo No. 30 C, Kec Luwuk, Kab Banggai, Prof Sulawesi Tengah	Luwuk	Sulawesi Tengah Central Sulawesi	0461-21666	KCP
KCP Aimas	Jl. Klamono Km.19 Depan Alun-Alun Aimas Kab. Sorong	Aimas	Papua Barat Daya Southwest Papua	0951-3123593	KCP
KCP Manokwari	Jl. Trikora Wosi, Depan Transito Kab. Monokwari, Prov. Papua Barat	Manokwari	Papua Barat West Papua	0986-212555	KCP
KCP Labuha Bacan	Jl. Raya Mandaong, Kel. Tomori, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara	Halmahera	Maluku Utara North Maluku	0927-2321053	KCP
KCP Tidore	Jl Nusantara, Kelurahan Indonesiana, Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara	Tidore	Maluku Utara North Maluku	0921-3161734	KCP
KCP Curup	Jl. Merdeka No. 732 Pasar Baru Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong	Rejang Lebong	Bengkulu	0732-22290	KCP
KCP Manna Bengkulu	Jl. Jendral Sudirman No. 81 Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan	Bengkulu Selatan South Bengkulu	Bengkulu	0739-21289	KCP
KCP Arga Makmur	Jl. Sutan Syahrir No. 10 Pasar Purwodadi Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara	Bengkulu Utara	Bengkulu	0737-521682	KCP
KCP Muara Bungo	Jl.M. YAMIN NO. 14, Kec. Pasar Muara Bungo, Kab. Muara Bungo,Jambi	Bungo	Jambi	0747-321778	KCP
KCP Bandar Jaya	Jl. Proklamator No. 138 A Bandar Jaya, Lampung Tengah	Lampung Tengah Central Lampung	Lampung	0725-527400	KCP
KCP Metro Lampung	Jl. Jend. Sudirman No. 282 B Metro	Metro	Lampung	0725-7850047	KCP
KCP ZA Pagar Alam Lampung	Jl. ZA Pagar Alam No. 12 Bandar Lampung	Bandar Lampung	Lampung	0721-785535	KCP
KCP Kotabumi Lampung	Jl. Jend. Sudirman Lingkungan 6 Rt. 001, Rw. 006, Kotabumi	Lampung Utara North Lampung	Lampung	0724-22510	KCP
KCP Antasari Lampung	Jl. P. Antasari No. 134, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung	Bandar Lampung	Lampung	0721-709030	KCP
KCP Bukittinggi	Jl. A. Yani No 99 D RT 02 RW 03, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kec. Guguk Pajang, Kota Bukittinggi, Prov. Sumatera Barat, 26113	Bukittinggi	Sumatera Barat West Sumatra	0752 - 302006	KCP
KCP Payakumbuh	Jl. Soekarno Hatta No. 87 Payakumbuh	Payakumbuh	Sumatera Barat West Sumatra	0752 - 796757	KCP
KCP Solok	Jl. M.Yamin No. 87 Kel. Pasar Pandan Air Mati, Kec. Tanjung Harapan Kota Solok	Solok	Sumatera Barat West Sumatra	0755 - 20011	KCP
KCP Plaju	Komp. RS Muhammadiyah Palembang Jl. Jenderal A.Yani 13 Ulu Palembang	Palembang	Sumatera Selatan South Sumatra	0711-511107	KCP
KCP Baturaja	Jl. Jendral A.Yani No.324 Kel. Kemalaraja Kec.Baturaja Timur Kab.OKU	Ogan Komering Ulu	Sumatera Selatan South Sumatra	0735-321811	KCP
KCP Enim	Jl. Jend. Sudirman Talang Jawa Atas, Muara Enim 31315	Muara Enim	Sumatera Selatan South Sumatra	0734-421848	KCP
KCP Tanjung Pandan	Jl. Jend.Sudirman No.28, Pangkal Lalang, Kota Tanjungpandan - Kab. Belitung, Prov. Kepulauan Bangka Belitung 33412	Belitung	Bangka Belitung	0719-21513	KCP



Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/District	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
KCP Sungailiat	Komp. Ruko Permata Indah Blok B No.6-7 Jl. Jend. Sudirman No. 30, Kota Sungailiat, Kab. Bangka, Prov. Kepulauan Bangka Belitung 33215	Bangka	Bangka Belitung	0717-95912	KCP
KCP Koba	Jl. Soekarno Hatta II, Simpang Perlang, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah	Bangka Tengah Central Bangka	Bangka Belitung	0718-4222222	KCP
KCP Lhokseumawe	Jln. Merdeka No. 2-3 Kel. Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe	Lhokseumawe	Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	0645-631537	KCP
KCP Sukaramai	Jl. A.R. Hakim No. 70A-70B, Kel. Sukaramai I, Kec. Medan Area, Kota Medan	Medan	Sumatera Utara North Sumatra	061-7367476	KCP
KCP Serdang	Jl. Prof. H. M. Yamin, SH No. 225, Medan	Medan	Sumatera Utara North Sumatra	061-4144343	KCP
KCP Binjai	Jl. Jend. Sudirman No.202 Binjai Sumatera Utara.	Binjai	Sumatera Utara North Sumatra	061-8823434	KCP
KCP Stabat	Jl. KH. Zainul Arifin No. 52 B-C, Stabat	Langkat	Sumatera Utara North Sumatra	061-8912323	KCP
KCP Panyabungan	Jl. Willem Iskandar No. 173 Panyabungan 22912	Mandailing Natal	Sumatera Utara North Sumatra	0636-321234	KCP
KCP Kampar	Jl. Jend. Sudirman No. 8 Bangkinang, kab. Kampar	Kampar	Riau	0762-20908	KCP
KCP Kisaran	Jl. Cokroaminoto No. 245 Kisaran	Asahan	Sumatera Utara North Sumatra	0623-43558	KCP
KCP Masjid Baiturrahman Semarang	Jl. Pandanaran No. 126 Semarang 50134	Semarang	Jawa Tengah Central Java	024-8445285	KCP
KCP Bondowoso	JL. AHMAD YANI NO. 82 BONDOWOSO	Bondowoso	Jawa Timur East Java	0332-431450	KCP
KCP Masbagik	KOMPLEK MASJID JAMI' AL-AKBAR MASBAGIK (83661)	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	0376-631898	KCP
KCP Gresik	Jl. Dr. Soetomo No.86, Gresik	Gresik	Jawa Timur East Java	031-3988233	KCP
KCP Pekajangan	Jl Raya Pekajangan No 74 Pekajangan Kab Pekalongan	Pekalongan	Jawa Tengah Central Java	0285-785787	KCP
KCP PKU Bantul	RSU PKU MUHAMMADIYAH BANTUL, JL. JEND. SUDIRMAN 124 BANTUL, YOGYAKARTA	Bantul	DI Yogyakarta	0274-368801	KCP
KCP UII Yogyakarta	Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM 14,5 Sleman, Yogyakarta 55584	Sleman	DI Yogyakarta	0274-898505	KCP
KCP UGM Yogyakarta	Masjid Kampus UGM, Jl. Tevisia 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281	Sleman	DI Yogyakarta	0274-548777	KCP
KCP Athirah Makassar	Jl. Kajaolalido No. 22, Makassar	Makassar	Sulawesi Selatan South Sulawesi	0411-3690499	KCP
KCP Pengayoman Makasar	Jl. Pengayoman Ruko Jasper III NO 17 Makassar	Makassar	Sulawesi Selatan South Sulawesi	0411-441100	KCP
KCP Daya Makasar	Jl. Perintis Kemerdekaan Km 12 Daya, Komp. Bukit Katulistiwa Ruko Blok A No. 7, Kodya Makassar	Makassar	Sulawesi Selatan South Sulawesi	0411-4772200	KCP

Keterangan | Description:

KCU : Kantor Cabang Utama | Main Branch Office
KCP : Kantor Cabang Pembantu | Sub-Branch Office



Peta Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi

Map of Business Network and Operating Areas





Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Function



Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



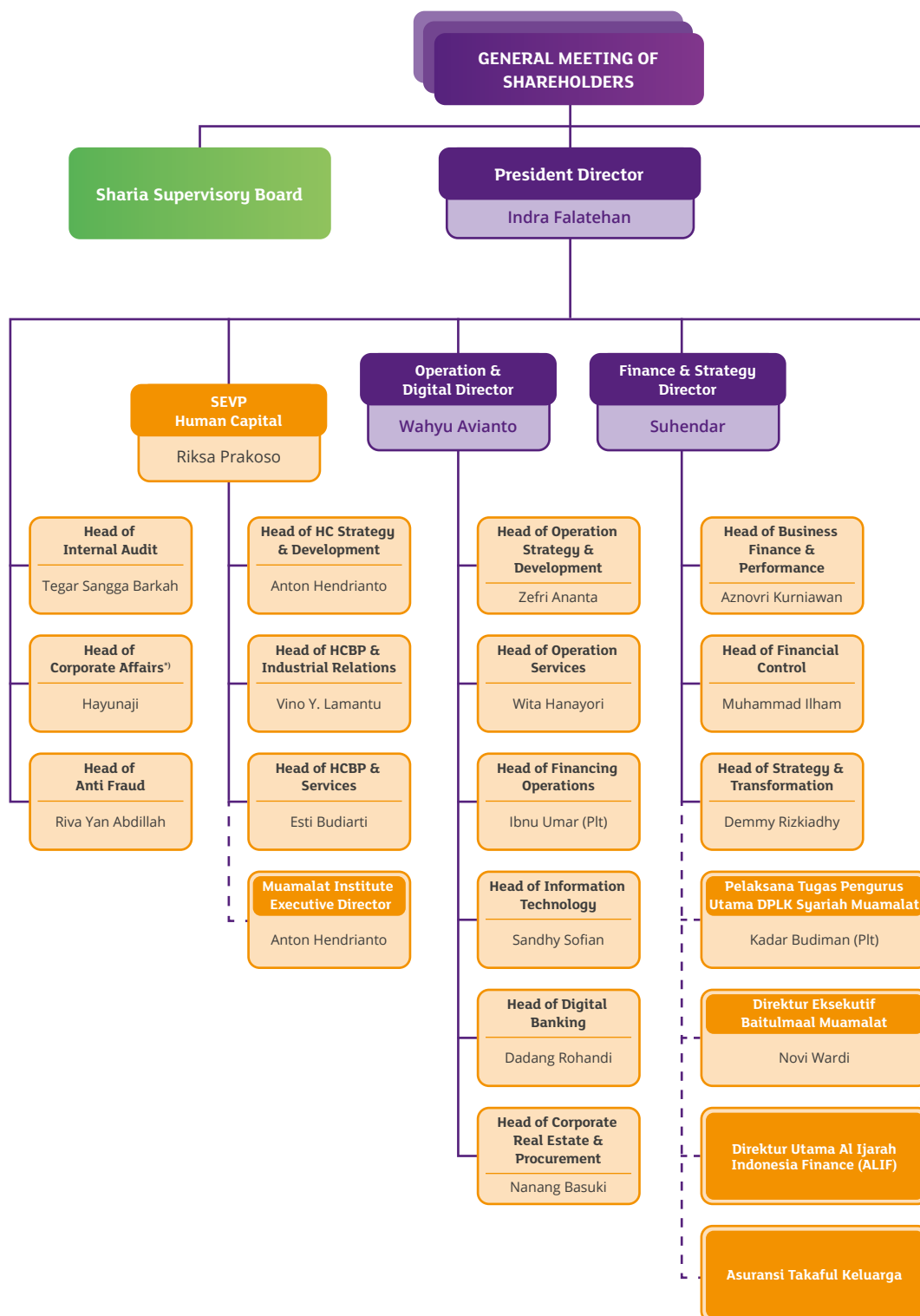
Laporan Keuangan 2023
2023 Financial Statements





Struktur Organisasi

Organization Structure



*) Merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan.
Concurrently as Corporate Secretary.



Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Function



Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan 2023
2023 Financial Statements

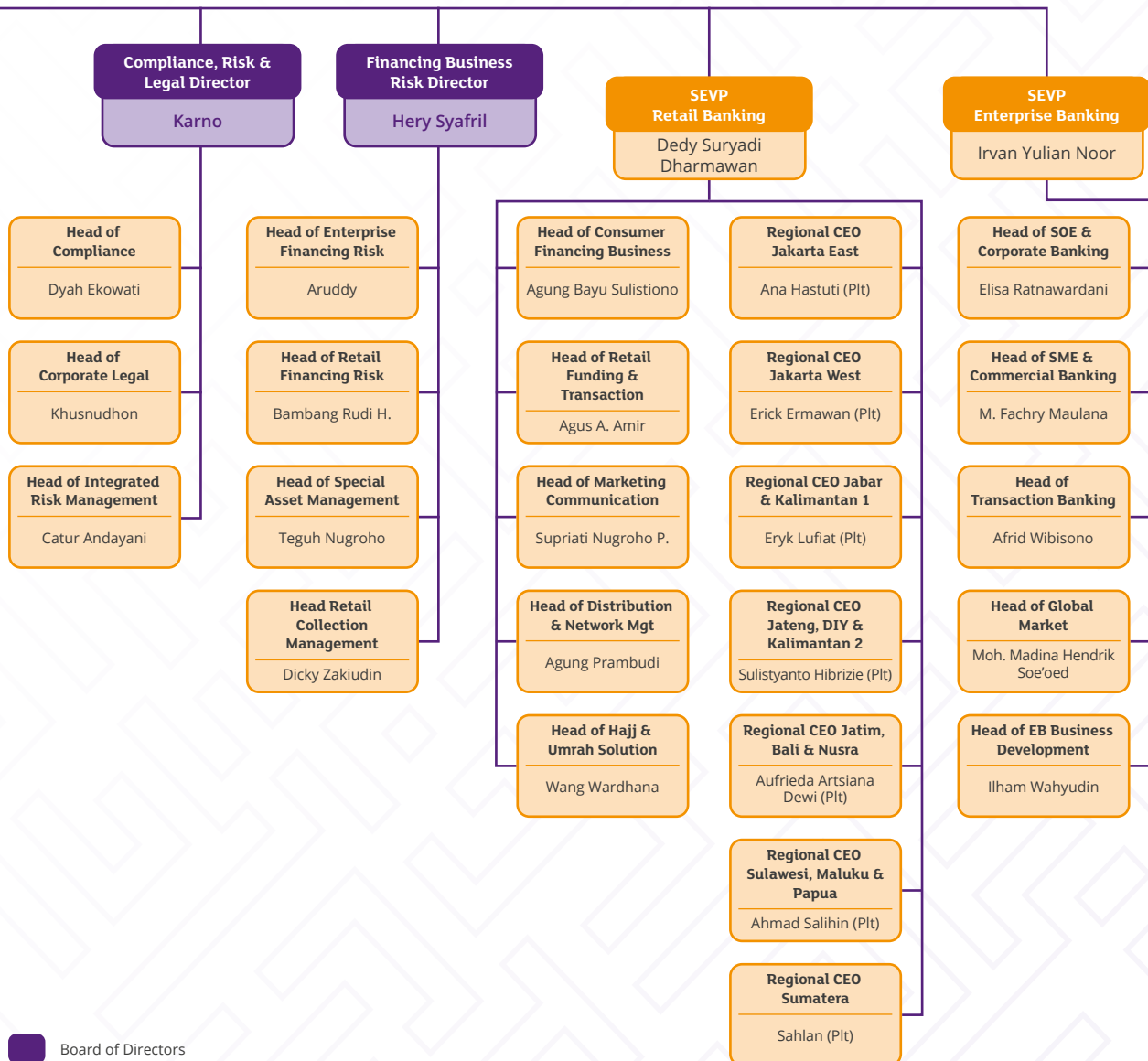
Board of Commissioners

BoC Committee:

1. Audit Committee
2. Risk Oversight Committee
3. Nomination & Remuneration Committee
4. Good Corporate Governance Committee

BoD Committee:

1. Risk Management Committee
2. Financing Policy Committee
3. IT Steering Committee
4. ALCO
5. Business Committee
6. Human Capital Committee
7. Financing Committee

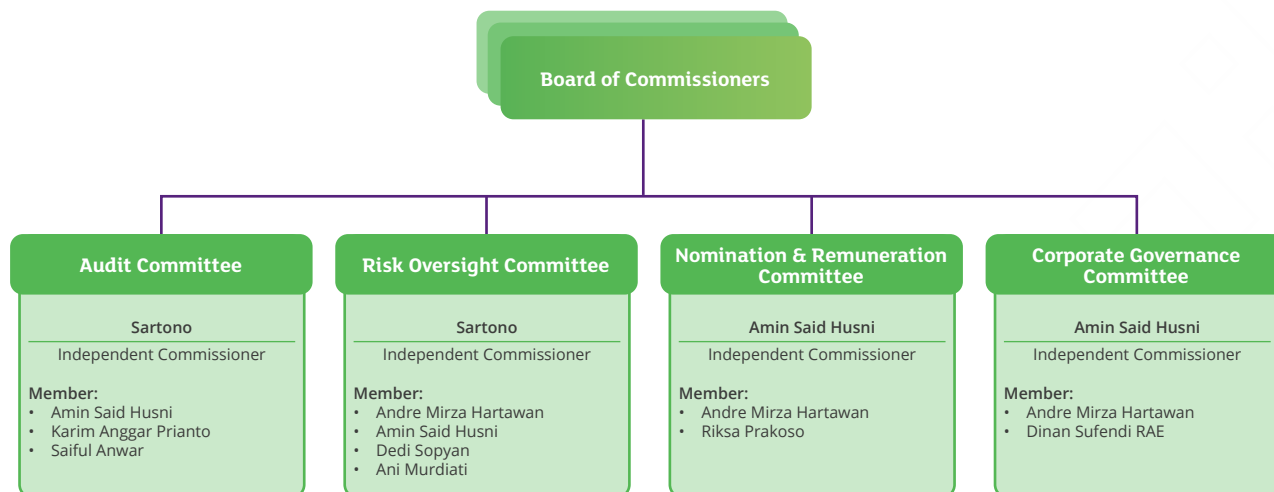


- Board of Directors
- Board of Management
- Senior Management



Komite Level Komisaris

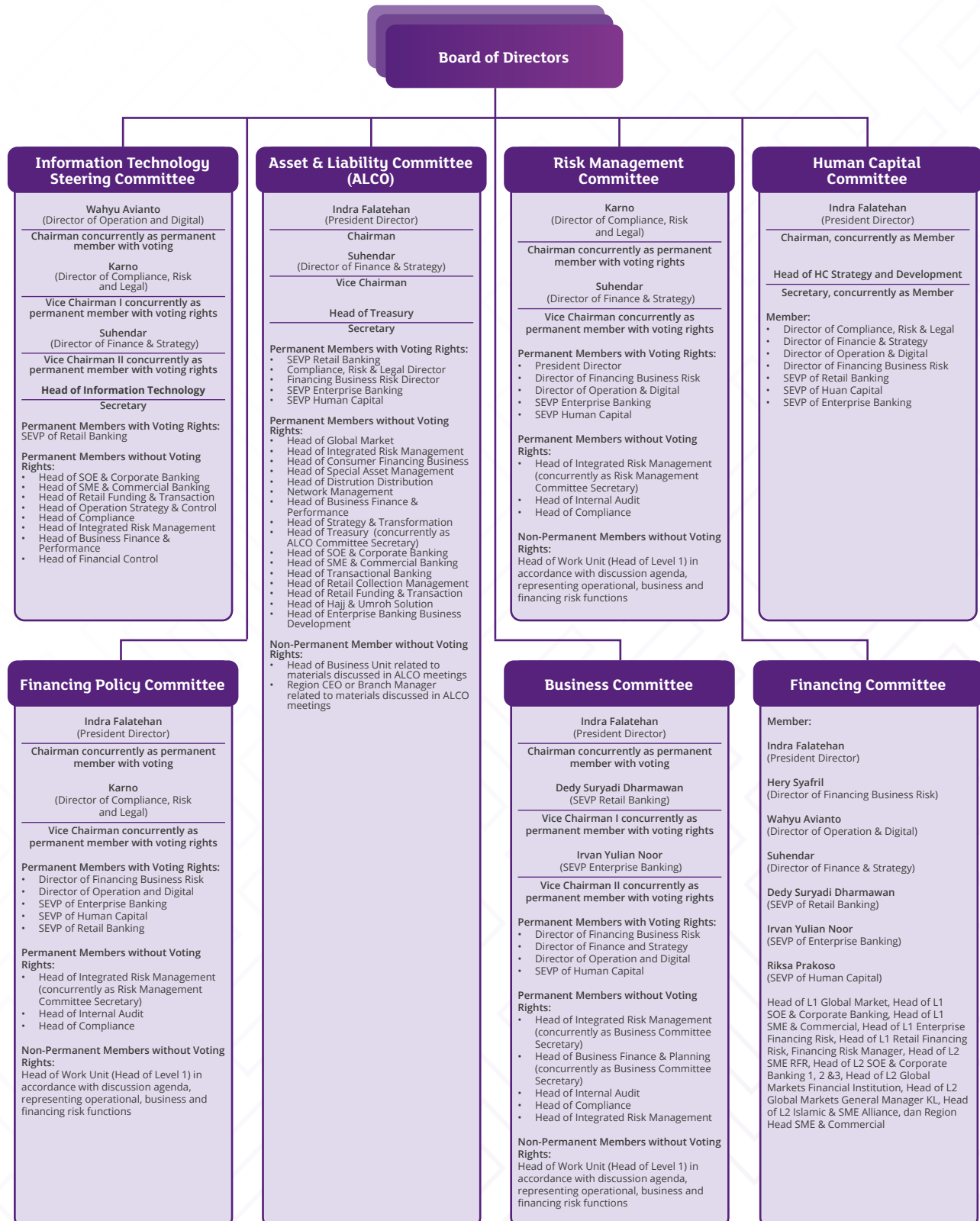
Board of Commissioners Level Committees





Komite Level Direksi

Board of Directors Level Committees





Profil Dewan Pengawas Syariah

Profile of the Sharia Supervisory Board



Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Chairman of the Sharia Supervisory Board

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	49 tahun pada akhir Tahun Buku 2023	49 years old at the end of Financial Year 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Juni 2016 dan telah mendapat persetujuan dari OJK pada tanggal 2 Februari 2017	Annual General Meeting of Shareholders dated June 29, 2016 and approved by OJK on February 2, 2017
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Recent Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Desember 2019	Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 16, 2019
Periode Jabatan Period of Service	Kedua	Second
Riwayat Pendidikan Education History	- Magister Ekonomi dan Keuangan Syariah dari Universitas Indonesia (2007) - Sarjana Tarbiyah dari Institute Agama Islam Al-Aqidah (IAIA) (2003)	- Master in Sharia Economics and Finance from University of Indonesia (2007) - Bachelor of Tarbiyah from Al-Aqidah Islamic Institute (IAIA) (2003)
Sertifikasi Certification	Sertifikasi Pengawas Syariah	Sharia Supervisor Certification



Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Anggota Dewan Pengawas Syariah Indo Mobil Finance Indonesia Syariah (2013-sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Reasuransi Syariah Indonesia (ReINDO Syariah) (2016-sekarang) • Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Aladin Syariah (2020-sekarang) • Anggota Dewan Penasehat Syariah BP TAPERA (2022-sekarang) • Ketua MUI bidang Ekonomi Syariah (2015-sekarang) • Wakil Sekretaris BPH DSN MUI (2020-sekarang) • Katib Syuriah di PBNU (2015-sekarang)	• Member of Sharia Supervisory Board of Indo Mobil Finance Indonesia Syariah (2013-present) • Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Reasuransi Syariah Indonesia (ReINDO Syariah) (2016-present) • Member of Sharia Supervisory Board of Bank Aladin Syariah (2020-present) • Member of Sharia Advisory Board of BP TAPERA (2022-present) • Chairman of MUI in the field of Sharia Economics (2015-present) • Deputy Secretary of BPH DSN MUI (2020-present) • Katib Syuriah in PBNU (2015-present)
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan	Does not own shares of the Company
Pengalaman Kerja Work Experience	• Wakil Ketua Badan Pengurus Harian DSN-MUI (2020-2025) • Ketua MUI bidang Ekonomi Syariah (2020-2025) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2019-sekarang) • Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2017-2019) • Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Fatwa dan Bidang Pengkajian Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2015-2020) • Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (DSN) (2015-2020) • Ketua Dewan Pengawas Syariah Suzuki Finance Indonesia Syariah (2013-2017) • Katib Syuriah Bidang Bahtsul Masail PBNU (2010-2020)	• Deputy Chairman of the Executive Board of DSN-MUI (2020-2025) • Chairman of MUI in the field of Sharia Economics (2020-2025) • Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2019-present) • Member of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2017-2019) • Deputy Secretary General for Fatwa and Assessment of the Indonesian Ulema Council (MUI) (2015-2020) • Deputy Secretary of the Daily Executive Board of the National Sharia Council (DSN) (2015-2020) • Chairman of the Sharia Supervisory Board of Suzuki Finance Indonesia Syariah (2013-2017) • Katib Syuriah of Bahtsul Masail PBNU (2010-2020)
Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung	Has no affiliation in terms of financial or familial relationships with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders, either directly or indirectly



Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of the Sharia Supervisory Board

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	39 tahun pada akhir Tahun Buku 2023	39 years old at the end of Financial Year 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Desember 2019 dan telah mendapat persetujuan dari OJK pada tanggal 22 Januari 2021	Extraordinary General Meeting of Shareholders dated December 16, 2019 and approved by OJK on January 22, 2021
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Recent Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Desember 2019	Extraordinary General Meeting of Shareholders dated December 16, 2019
Periode Jabatan Period of Service	Pertama	First
Riwayat Pendidikan Education History	• Magister Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (2015) • Bachelor of Laws dari Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws International Islamic University Malaysia (2010)	• Master of Laws from University of Indonesia (2015) • Bachelor of Laws from Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws International Islamic University Malaysia (2010)
Sertifikasi Certification	• Sertifikasi Pengawas Syariah • CRGP (Certified Risk Governance Professional) • Sertifikasi Asesor Kompetensi LSP MUI	• Sharia Supervisor Certification • CRGP (Certified Risk Governance Professional) • LSP MUI Competency Assessor Certification



Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BNI Life Insurance (2020-sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Jasindo Syariah (2016-sekarang) • Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi BRI Life (2016-sekarang) • Anggota Dewan Pengawas Syariah DPLK Syariah Muamalat (2017 - sekarang)	• Member of Sharia Supervisory Board of PT BNI Life Insurance (2020-present) • Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Asuransi Jasindo Syariah (2016-present) • Member of Sharia Supervisory Board of PT Asuransi BRI Life (2016-present) • Member of Sharia Supervisory Board of DPLK Syariah Muamalat (2017 - present)
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan	Does not own shares of the Company
Pengalaman Kerja Work Experience	• Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2019-sekarang) • Anggota DPS BNI Life Insurance (2020-sekarang) • Anggota DPS Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat (2017-sekarang) • Anggota DPS PT BRILife (2016-sekarang) • Ketua DPS PT Asuransi Jasindo Syariah (2016-sekarang) • Dosen dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih (STIF) Syeikh Nawawi Tanara (SYENTRA), Serang, Banten (2016-sekarang) • Anggota DPS PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (AJSB) (2016-2020)	• Member of Sharia Supervisory Board of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2019-present) • Member of DPS BNI Life Insurance (2020-present) • DPS Member of Muamalat Syariah Financial Institution Pension Fund (DPLK) (2017-present) • Member of DPS PT BRILife (2016-present) • Chairman of DPS PT Asuransi Jasindo Syariah (2016-present) • Lecturer and Chairman of Sheikh Nawawi Tanara College of Fiqh (SYENTRA), Serang, Banten (2016-present) • DPS Member of PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (AJSB) (2016-2020)
Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung	Has no affiliation in terms of financial or familial relationships with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders, either directly or indirectly



Dr. H. Agung Danarto, M. Ag

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of the Sharia Supervisory Board

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	55 tahun pada akhir Tahun Buku 2023	55 years old at the end of Financial Year 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Agustus 2021 dan telah mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 7 Juli 2022	Extraordinary General Meeting of Shareholders on August 30, 2021 and has obtained an effective decision from OJK on July 7, 2022
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Recent Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Agustus 2021	Extraordinary General Meeting of Shareholders on August 30, 2021
Periode Jabatan Period of Service	Pertama	First
Riwayat Pendidikan Education History	- Doktor Studi Islam dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006) - Magister Agama Studi Islam dari IAIN Alauddin Makassar (1996) - Sarjana Tafsir Hadis dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1993)	- Doctor of Islamic Studies from IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006) - Master of Islamic Studies from IAIN Alauddin Makassar (1996) - Bachelor of Hadith Interpretation from IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1993)
Sertifikasi Certification	Sertifikasi Pengawas Syariah	Sharia Supervisor Certification



Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan	Has no concurrent positions
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan	Does not own shares of the Company
Pengalaman Kerja Work Experience	• Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2021-sekarang) • Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015-sekarang) • Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2010-2015) • Dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1994-sekarang)	• Member of Sharia Supervisory Board of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2021-present) • Secretary of Muhammadiyah Central Leadership (2015-present) • General Secretary of Muhammadiyah Central Leadership (2010-2015) • Lecturer at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1994-present)
Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung	Has no affiliation in terms of financial or familial relationships with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders, either directly or indirectly



Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners



Amin Said Husni

Komisaris Independen/Plt Komisaris Utama
Independent Commissioner/Acting President
Commissioner

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	57 tahun pada akhir Tahun Buku 2023	57 years old at the end of Financial Year 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Juni 2022 dan telah mendapat keputusan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 16 Januari 2023	Annual General Meeting of Shareholders dated June 24, 2022 and has received an effective decision from the Financial Services Authority (OJK) dated January 16, 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Recent Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Juni 2022 dan telah mendapat keputusan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 16 Januari 2023	Annual General Meeting of Shareholders dated June 24, 2022 and has received an effective decision from the Financial Services Authority (OJK) dated January 16, 2023
Periode Jabatan Period of Service	Pertama	First
Riwayat Pendidikan Education History	- Magister Antropologi Budaya dari Universitas Indonesia (1993) - Sarjana Syariah di Fakultas Syari'ah IKAHA, Pesantren Tebuireng Jombang (1990)	- Master of Cultural Anthropology from the University of Indonesia (1993) - Bachelor of Sharia at the Faculty of Shari'ah IKAHA, Tebuireng Islamic Boarding School Jombang (1990)
Sertifikasi Certification	Risk Management Certification Level 1-2 for Commissioner	Risk Management Certification Level 1-2 for Commissioner



Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2022-Sekarang) - Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2023-sekarang) - Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Januari 2024-sekarang) - Anggota Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Januari 2024-sekarang) - Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Januari 2024-sekarang)	- Chairman of the Executive Board of Nahdlatul Ulama (2022-Present) - Chairman of the Nomination and Remuneration Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2023 - present) - Chairman of the Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (January 2024 - present) - Member of Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (January 2024 - present) - Member of Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (January 2024 - present)
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan	Does not own shares of the Company
Pengalaman Kerja Work Experience	- Komisaris Independen PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2022-sekarang) - Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2022-Sekarang) - Bupati Pemerintah Kabupaten Bondowoso (2008-2018) - Anggota Komisi X DPR RI (2007-2008) - Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (2004-2007) - Wakil Ketua Komisi IV dan XI DPR RI (1999 – 2008)	- Independent Commissioner of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2022-present) - Vice Chairman of the Executive Board of Nahdlatul Ulama (2022-Present) - Regent of Bondowoso Regency Government (2008-2018) - Member of Commission X DPR RI (2007-2008) - Vice Chairman of the Budget Committee of the House of Representatives (DPR) of the Republic of Indonesia (2004-2007) - Vice Chairman of Commission IV and XI of the House of Representatives (1999-2008)
Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung	Has no affiliation in terms of financial or familial relationships with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders, either directly or indirectly



Sartono

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	62 tahun pada akhir Tahun Buku 2023	62 years old at the end of Financial Year 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Juni 2022 dan telah mendapat keputusan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 16 Januari 2023	Annual General Meeting of Shareholders dated June 24, 2022 and has received an effective decision from the Financial Services Authority (OJK) dated January 16, 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Recent Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Juni 2022 dan telah mendapat keputusan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 16 Januari 2023	Annual General Meeting of Shareholders on June 24, 2022 and has received an effective decision from the Financial Services Authority (OJK) on January 16, 2023
Periode Jabatan Period of Service	Pertama	First
Riwayat Pendidikan Education History	Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung (1987)	Bachelor of Law from Padjadjaran University Bandung (1987)
Sertifikasi Certification	Training Risk Management Certification Level 1 dan Level 2 for Commissioner	Risk Management Certification Level 1 and Level 2 Training for Commissioner



Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2023-Januari 2024) - Ketua Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Januari 2024-sekarang) - Ketua Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Januari 2024-sekarang)	- Chairman of the Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2023-January 2024) - Chairman of the Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (January 2024-present) - Chairman of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (January 2024-present)
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan	Does not own shares of the Company
Pengalaman Kerja Work Experience	- Komisaris Independen PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2022-sekarang) - Jaksa Fungsional Kejaksaan Agung (September 2021-2022) - Sekretaris JAM Pembinaan Kejaksaan Agung (Desember 2019-September 2021) - Inspektur Keuangan pada Jamwas Kejaksaan Agung (September 2019-Desember 2019) - Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung (Maret 2019-September 2019) - Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung (Februari 2016-Maret 2019) - Koordinator JAM Intel Kejaksaan Agung (Mei 2014-Februari 2016) - Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Februari 2012-Mei 2014) - Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Februari 2010-Februari 2012) - Kabag Pendapatan dan BRN Kejaksaan Agung (Agustus 2008-Februari 2010) - Kabag Anggaran Kejaksaan Agung (Mei 2006-Agustus 2008) - Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang (Oktober 2004-Mei 2006) - Pengkaji kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Maret 2004-Oktober 2004)	- Independent Commissioner of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2022-present) - Functional Prosecutor of the Attorney General's Office (September 2021-2022) - Secretary of JAM Development of the Attorney General's Office (December 2019-September 2021) - Financial Inspector at the Attorney General's Office (September 2019-December 2019) - Head of Lampung High Prosecutor's Office (March 2019-September 2019) - Head of the Finance Bureau of the Attorney General's Office (February 2016-March 2019) - Coordinator of JAM Intel of the Attorney General's Office (May 2014-February 2016) - Development Assistant of the East Java High Prosecutor's Office (February 2012-May 2014) - Head of the East Jakarta District Attorney's Office (February 2010-February 2012) - Head of Revenue and BRN at the Attorney General's Office (August 2008-February 2010) - Head of Budget at the Attorney General's Office (May 2006-August 2008) - Head of the Bengkayang District Attorney's Office (October 2004-May 2006) - Reviewer of the West Java High Prosecutor's Office (March 2004-October 2004)
Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung	Has no affiliation in terms of financial or familial relationships with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders, either directly or indirectly



Andre Mirza Hartawan

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	54 tahun pada akhir Tahun Buku 2023	54 years old at the end of Financial Year 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 April 2009	Annual General Meeting of Shareholders on April 23, 2009
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Recent Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Februari 2022 dan telah mendapat keputusan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 19 Juli 2022	Extraordinary General Meeting of Shareholders on February 28, 2022 and has received an effective decision from the Financial Services Authority (OJK) on July 19, 2022
Periode Jabatan Period of Service	Kedua	Second
Riwayat Pendidikan Education History	- Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Trisakti (2020) - Master of Business Administration dari Graduate School of Business, Curtin University Perth Australia (1996) - Sarjana Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (1993)	- Doctor of Economics from Trisakti University (2020) - Master of Business Administration from Graduate School of Business, Curtin University Perth Australia (1996) - Bachelor of Industrial Engineering at Bandung Institute of Technology (1993)



Sertifikasi Certification	Risk Management Certification Level 2 for Commissioneer	Risk Management Certification Level 2 for Commissioneer
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2023 – sekarang) • Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2023 – sekarang) • Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2023 – sekarang) • Komisaris Utama PT Wisma Seratus Sejahtera (2016-sekarang)	• Member of Nomination and Remuneration Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2023 - present) • Member of Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2023 - present) • Member of Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2023 - present) • President Commissioner of PT Wisma Seratus Sejahtera (2016-present)
Kepemilikan Saham Share Ownership	Memiliki saham perusahaan sebanyak 5,19%	Owns 5.19% of the company's shares
Pengalaman Kerja Work Experience	• Komisaris PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2022-sekarang) • Komisaris Independen PT Bank Oke Indonesia Tbk (2019-2022) • Komisaris Utama PT Wisma Seratus Sejahtera (2016-sekarang) • Komisaris Utama PT Syres Power Energy (2014-2019) • Komisaris Utama PT Auto Daya Amara (2014- 2019) • Komisaris PT Panca Amara Utama (2008-2019) • Komisaris Utama di PT Auto Daya Keisindo (2014-2019) • Komisaris PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2009-2014)	• Commissioner of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2022-present) • Independent Commissioner of PT Bank Oke Indonesia Tbk (2019-2022) • President Commissioner of PT Wisma Seratus Sejahtera (2016-present) • President Commissioner of PT Syres Power Energy (2014-2019) • President Commissioner of PT Auto Daya Amara (2014-2019) • Commissioner of PT Panca Amara Utama (2008-2019) • President Commissioner of PT Auto Daya Keisindo (2014-2019) • Commissioner of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2009-2014)
Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung	Has no affiliation in terms of financial or familial relationships with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders, either directly or indirectly



Profil Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior

Profile of the Board of Directors and Senior Executive Officers



Indra Falatehan

Direktur Utama
President Director

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	45 tahun pada akhir Tahun Buku 2023	45 years old at the end of Financial Year 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 November 2022 dan telah mendapatkan persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan pada tanggal 18 April 2023	Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 29, 2022 and has obtained OJK approval for the fit and proper test on April 18, 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Recent Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 November 2022 dan telah mendapatkan persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan pada tanggal 18 April 2023	Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 29, 2022 and has obtained OJK approval for the fit and proper test on April 18, 2023
Periode Jabatan Period of Service	Pertama	First



Riwayat Pendidikan Education History	• Magister Manajemen Bisnis dari Universitas Indonesia (2012) • Sarjana Gas & Petrochemical Engineering dari Universitas Indonesia (2002)	• Master of Business Management from University of Indonesia (2012) • Bachelor of Gas & Petrochemical Engineering from University of Indonesia (2002)
Sertifikasi Certification	• Risk Management Certification Level 5 • Treasury Certification Advance Level	• Risk Management Certification Level 5 • Treasury Certification Advance Level
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan	Does not have concurrent positions
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan	Does not own shares of the Company
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur Utama PT KB Bukopin Syariah (Oktober 2022 - Januari 2023) • Direktur Utama PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (Bank BJBS) Syariah Tbk (2018-2022) • Direktur Pembiayaan PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Syariah Tbk (BJBS) (2017-2018) • Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Syariah Tbk (BJBS) (2016) • Group Head of Corporate Banking 2 Bank Syariah Mandiri (2015-2016) • Kepala Divisi Special Financing & Syndication PT Bank Syariah Mandiri (2012-2015) • Department Head of Desk of Structured Finance & Syndication PT Bank Syariah Mandiri (2007-2012)	• President Director of PT KB Bukopin Syariah (October 2022 - January 2023) • President Director of PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (Bank BJBS) Syariah Tbk (2018-2022) • Financing Director of PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Syariah Tbk (BJBS) (2017-2018) • Finance Director of PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Syariah Tbk (BJBS) (2016) • Group Head of Corporate Banking 2 Bank Syariah Mandiri (2015-2016) • Head of Special Financing & Syndication Division of PT Bank Syariah Mandiri (2012-2015) • Department Head of Desk of Structured Finance & Syndication PT Bank Syariah Mandiri (2007-2012)
Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung	Has no affiliation in terms of financial or familial relationships with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders, either directly or indirectly



Karno

Direktur Kepatuhan, Risiko dan Hukum
Compliance, Risk and Legal Director

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	51 tahun pada akhir Tahun Buku 2023	51 years old at the end of Financial Year 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 Juni 2022 dan telah mendapatkan persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan keputusan pada tanggal 3 Oktober 2022	Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 24, 2022 and has obtained OJK approval for fit and proper assessment on October 3, 2022
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Recent Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 Juni 2022 dan telah mendapatkan persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan keputusan pada tanggal 3 Oktober 2022	Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 24, 2022 and has obtained OJK approval for fit and proper assessment on October 3, 2022
Periode Jabatan Period of Service	Pertama	First



Riwayat Pendidikan Education History	- Magister Manajemen dari Institut Pertanian Bogor (2012) - Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (2000)	- Master of Management from Bogor Agricultural University (2012) - Bachelor of Economics from University of Indonesia (2000)
Sertifikasi Certification	Risk Management Certification Level 5	Risk Management Certification Level 5
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan	Does not have concurrent positions
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan	Does not own shares of the Company
Pengalaman Kerja Work Experience	- Deputi Manajemen Risiko di Badan Pengelola Keuangan Haji (2018-2022) - Head of Risk Management PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (2016-2018) - Kepala Departemen Manajemen Risiko PT Bank BCA Syariah (2013-2016) - Kepala Cabang Mataram dan Purwokerto PT Bank Bukopin Tbk (2011-2013) - Manajer Kepatuhan PT Bank Bukopin Tbk (2002-2011)	- Deputy of Risk Management at the Hajj Financial Management Agency (2018-2022) - Head of Risk Management PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (2016-2018) - Head of Risk Management Department of PT Bank BCA Syariah (2013-2016) - Head of Mataram and Purwokerto Branch of PT Bank Bukopin Tbk (2011-2013) - Compliance Manager of PT Bank Bukopin Tbk (2002-2011)
Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung	Has no affiliation in terms of financial or familial relationships with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders, either directly or indirectly



Hery Syafril

Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan
Director of Financing Business Risk

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	54 tahun pada akhir Tahun Buku 2023	54 years old at the end of Financial Year 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 September 2015 dan telah mendapatkan persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan pada tanggal 21 Maret 2016	Extraordinary General Meeting of Shareholders on September 7, 2015 and has obtained OJK approval for fit and proper assessment on March 21, 2016
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Recent Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 November 2022	Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 29, 2022
Periode Jabatan Period of Service	Kedua	Second



Riwayat Pendidikan Education History	• Master of Business Administration dari IPMI International Business School (2020) • Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia (1996)	• Master of Business Administration from IPMI International Business School (2020) • Bachelor of Accounting from University of Indonesia (1996)
Sertifikasi Certification	Risk Management Certification Level 5	Risk Management Certification Level 5
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan	Does not have concurrent positions
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan	Does not own shares of the Company
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2022 – sekarang) • Direktur Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2015-2022) • CFO & Finance Director di PT Bank QNB Indonesia Tbk (2012-2015) • Controller PT Bank Rabobank International Indonesia (2009-2012) • Chief Financial Officer & Legal Entity Controller JP Morgan Indonesia (JP Morgan Chase Bank Jakarta Branch & PT JP Morgan Securities Indonesia) (2003-2009) • Audit Manager Ernst & Young Indonesia (2001-2003) • Audit Manager Ernst & Young LLP, New York Metro Office USA (1999-2001) • Assistant Manager Ernst & Young LLP Indonesia (1998-1999) • Senior Internal Auditor Bank Credit Lyonnais Indonesia (1997-1998) • Senior Auditor Ernst & Young Indonesia (1993-1997)	• Director of Financing Business Risk of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2022 - present) • Finance Director of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2015-2022) • CFO & Finance Director at PT Bank QNB Indonesia Tbk (2012-2015) • Controller of PT Bank Rabobank International Indonesia (2009-2012) • Chief Financial Officer & Legal Entity Controller of JP Morgan Indonesia (JP Morgan Chase Bank Jakarta Branch & PT JP Morgan Securities Indonesia) (2003-2009) • Audit Manager Ernst & Young Indonesia (2001-2003) • Audit Manager Ernst & Young LLP, New York Metro Office USA (1999-2001) • Assistant Manager Ernst & Young LLP Indonesia (1998-1999) • Senior Internal Auditor Bank Credit Lyonnais Indonesia (1997-1998) • Senior Auditor Ernst & Young Indonesia (1993-1997)
Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung	Has no affiliation in terms of financial or familial relationships with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders, either directly or indirectly



Wahyu Avianto

Direktur Operasi dan Digital
Director of Operations and Digital

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	51 tahun pada akhir Tahun Buku 2023	51 years old at the end of Financial Year 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 November 2022 dan telah mendapatkan persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan pada tanggal 3 Oktober 2022	Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 29, 2022 and has obtained OJK approval for fit and proper assessment on October 3, 2022
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Recent Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 November 2022 dan telah mendapatkan persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan pada tanggal 3 Oktober 2022	Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 29, 2022 and has obtained OJK approval for the fit and proper test on October 3, 2022
Periode Jabatan Period of Service	Pertama	First



Riwayat Pendidikan Education History	• Kandidat Doktor Program Manajemen dan Bisnis dari IPB University (2023) • Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia (2004) • Sarjana Teknik Planologi dari Institut Teknologi Bandung (1996)	• Doctoral Candidate in Management and Business Program from IPB University (2023) • Master of Financial Management from University of Indonesia (2004) • Bachelor of Engineering in Planology from Bandung Institute of Technology (1996)
Sertifikasi Certification	Risk Management Certification Level 5	Risk Management Certification Level 5
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan	Does not have concurrent positions
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan	Does not own shares of the Company
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur Operasi dan Teknologi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2022 – sekarang) • Senior Executive Vice President Operations PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021 - 2022) • Anggota Tim Percepatan Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN (2020-2021) • Direktur Keuangan & Operasional PT Bank BNI Syariah (2018-2021) • Kepala Divisi Keuangan/Koordinator Keuangan dan Jaringan PT Bank BNI Syariah (2016-2018) • Kepala Divisi Strategi dan Keuangan PT Bank BNI Syariah (2013-2016) • Kepala Divisi Perencanaan dan Kinerja Strategis PT Bank BNI Syariah (2010-2013) • AVP Perencanaan & Pengembangan/Manager Produk Syariah PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (2004-2010) • Manager/Officer Project Management Unit, Strategic Planning Division PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (1996-2004)	• Director of Operations and Technology PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2022 - present) • Senior Executive Vice President Operations of PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021 - 2022) • Member of the Team for Acceleration of Integration and Value Enhancement of State-Owned Islamic Banks (2020-2021) • Director of Finance & Operations of PT Bank BNI Syariah (2018-2021) • Head of Finance Division/Finance and Network Coordinator of PT Bank BNI Syariah (2016-2018) • Head of Strategy and Finance Division of PT Bank BNI Syariah (2013-2016) • Head of Strategic Planning and Performance Division of PT Bank BNI Syariah (2010-2013) • AVP Planning & Development / Sharia Product Manager PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2004-2010) • Manager/Officer Project Management Unit, Strategic Planning Division PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (1996-2004)
Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung	Has no affiliation in terms of financial or familial relationships with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders, either directly or indirectly



Suhendar

Direktur Keuangan & Strategi
Director of Finance & Strategy

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	47 tahun pada akhir Tahun Buku 2023	47 years old at the end of Financial Year 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 November 2022 dan telah mendapatkan persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan pada tanggal 18 April 2023	Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 29, 2022 and has obtained OJK approval for fit and proper test on April 18, 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Recent Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 November 2022 dan telah mendapatkan persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan pada tanggal 18 April 2023	Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 29, 2022 and has obtained OJK approval for fit and proper test on April 18, 2023
Periode Jabatan Period of Service	Pertama	First



Riwayat Pendidikan Education History	• Magister Economi, Islamic Banking and Finance dari Universitas Indonesia (2009) • Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (2002)	• Master of Economi, Islamic Banking and Finance from University of Indonesia (2009) • Bachelor of Economics from University of Indonesia (2002)
Sertifikasi Certification	Risk Management Certification Level 5	Risk Management Certification Level 5
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan	Does not have concurrent positions
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan	Does not own shares of the Company
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur Keuangan dan Strategi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2022-sekarang) • Senior Vice President/Group Head Corporate Transformation Office PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-2022) • Group Head/Senior Vice President Corporate Transformation PT Bank Syariah Mandiri (2019-2021) • Group Head/Senior Vice President, Accounting Group PT Bank Syariah Mandiri (2014-2019) • Department Head/Assistant Vice President, Financial Report Analyst Management, Operation and Accounting Group (OAG) PT Bank Syariah Mandiri (2006-2014) • Section Head, Consolidation and Analysis Operatin and Accounting Group, PT Bank Mandiri Syariah (2004-2006) • Auditor, Ernst and Young (2002-2004) • Auditor, Arthur and Andersen (AA) (2001-2002)	• Director of Finance and Strategy PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2022-present) • Senior Vice President/Group Head Corporate Transformation Office PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-2022) • Group Head/Senior Vice President Corporate Transformation PT Bank Syariah Mandiri (2019-2021) • Group Head/Senior Vice President, Accounting Group PT Bank Syariah Mandiri (2014-2019) • Department Head/Assistant Vice President, Financial Report Analyst Management, Operation and Accounting Group (OAG) PT Bank Syariah Mandiri (2006-2014) • Section Head, Consolidation and Analysis Operatin and Accounting Group, PT Bank Mandiri Syariah (2004-2006) • Auditor, Ernst and Young (2002-2004) • Auditor, Arthur and Andersen (AA) (2001-2002)
Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung	Has no affiliation in terms of financial or familial relationships with members of the Syariah Supervisory Board, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders, either directly or indirectly



Irvan Yulian Noor

SEVP Enterprise Banking
SEVP Enterprise Banking

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	50 tahun pada akhir Tahun Buku 2023	50 years old at the end of Financial Year 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	Surat Keputusan Direksi No. 0024/HCE/TAP/REORG/I/2023 tanggal 30 Januari 2023	Decision Letter of the Board of Directors No. 0024/HCE/TAP/REORG/I/2023 dated January 30, 2023
Riwayat Pendidikan Education History	Sarjana Ekonomi Jurusan Keuangan dari Universitas Airlangga (1995)	Bachelor of Economics in Finance from Airlangga University (1995)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Chief Whosale Banking Officer PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2018-2023) • Executive Director dan Country Head – Commercial Banking Standard Chartered Bank Indonesia (2014-2018) • Country Head of Emerging Corporate Banking PT Bank ANZ Indonesia (2011-2014) • Senior VP, Deputy Group Head Corporate Banking 2 Group (Local Corporate) PT Bank ICBC Indonesia Tbk (2010-2011) • Assistant Vice President (Senior Relationship Manager) Global Commercial Bank, Citibank NA (2007-2010) • Assistant Vice President Commercial Banking (Team Leader) PT Bank Mandiri Tbk (2004-2007) • Executive Development Training (Program Pendidikan Executive – PPE) & Assistant Managerial Commercial Banking PT Bank Niaga Tbk (1996)	• Chief Wholesale Banking Officer at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2018-2023) • Executive Director and Country Head – Commercial Banking at Standard Chartered Bank Indonesia (2014-2018) • Country Head of Emerging Corporate Banking at PT Bank ANZ Indonesia (2011-2014) • Senior VP, Deputy Group Head Corporate Banking 2 Group (Local Corporate) at PT Bank ICBC Indonesia Tbk (2010-2011) • Assistant Vice President (Senior Relationship Manager) at Global Commercial Bank, Citibank NA (2007-2010) • Assistant Vice President Commercial Banking (Team Leader) at PT Bank Mandiri Tbk (2004-2007) • Executive Development Training (Program Pendidikan Executive – PPE) & Assistant Managerial Commercial Banking at PT Bank Niaga Tbk (1996)



Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Function



Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan 2023
2023 Financial Statements



Riksa Prakoso

SEVP Human Capital
SEVP Human Capital

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	52 tahun pada akhir Tahun Buku 2023	52 years old at the end of Financial Year 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	Surat Keputusan Direksi No. 0023/HCE/TAP/REORG/I/2023 tanggal 30 Januari 2023	Board of Directors Decree No. 0023/HCE/TAP/REORG/I/2023 dated January 30, 2023
Riwayat Pendidikan Education History	- Magister Ekonomi & Keuangan Islam dari Universitas Trisakti (2022) - Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran (1995)	- Master in Islamic Economics & Finance from Trisakti University (2022) - Bachelor of International Relations from Padjadjaran University (1995)
Pengalaman Kerja Work Experience	- Chief Human Capital Officer PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2018-2023) - SVP, Head of Human Capital Strategy Bank Muamalat Indonesia (2015-2018) - SVP, Human Capital Division Head PT Bank Mega Syariah Tbk (2012-2015) - SVP, Senior HC Business Partner PT Bank BII Mayabank Tbk (2010-2012) - VP, Head Organisation Learning, Senior HCBP, Head Reward PT Bank Permata Tbk (2006- 2010) - Senior Manager, HR Division Head PT Bank Niaga (1996-2006) - Management Development Program Trainee PT Bank Niaga Tbk (1996)	- Chief Human Capital Officer of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2018-2023) - SVP, Head of Human Capital Strategy Bank Muamalat Indonesia (2015-2018) - SVP, Human Capital Division Head of PT Bank Mega Syariah Tbk (2012-2015) - SVP, Senior HC Business Partner PT Bank BII Mayabank Tbk (2010-2012) - VP, Head Organization Learning, Senior HCBP, Head Reward PT Bank Permata Tbk (2006-2010) - Senior Manager, HR Division Head PT Bank Niaga (1996-2006) - Management Development Program Trainee PT Bank Niaga Tbk (1996)



Dedy Suryadi Dharmawan

SEVP Retail Banking
SEVP Retail Banking

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Tangerang	Tangerang
Usia Age	44 tahun pada akhir Tahun Buku 2023	44 years old at the end of Financial Year 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	Surat Keputusan Direksi No. 0236/HSE/TAP/LMP/XII/2023 tanggal 3 November 2023	Decision Letter of the Board of Directors No. 0236/HSE/TAP/LMP/XII/2023 dated November 3, 2023
Riwayat Pendidikan Education History	- Magister Manajemen dari Universitas Padjadjaran - Sarjana Regional City Planning dari Institut Teknologi Bandung	- Master of Management from Universitas Padjadjaran - Bachelor of Regional City Planning from Bandung Institute of Technology
Pengalaman Kerja Work Experience	- SEVP Retail Banking PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2023) - Group Head, SME Business Group (2021-2023) - Regional CEO, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2021-2019) - Area Manager, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2016-2019) - Departement Head, Corporate Banking Group 1 PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2015-2016) - Branch Manager, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2009-2015) - Marketing Manager, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2007-2009) - Operation Manager, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2005-2007) - Account Officer, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2003-2005) - Officer Development Program PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2002-2003)	- SEVP Retail Banking PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2023) - Group Head, SME Business Group (2021-2023) - Regional CEO, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2021-2019) - Area Manager, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2016-2019) - Department Head, Corporate Banking Group 1 PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2015-2016) - Branch Manager, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2009-2015) - Marketing Manager, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2007-2009) - Operation Manager, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2005-2007) - Account Officer, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2003-2005) - Officer Development Program, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2002-2003)



Profil Pejabat Eksekutif

Profile of Executive Officers

Nama Name	Tanggal Bergabung Date Joined	Jabatan Position	Usia (tahun) Age (years)	Pendidikan Terakhir Last Education	Institusi Pendidikan Educational Institution
Afrid Wibisono	28 April 2008 April 28, 2008	Head of Transaction Banking	54	S2	STIE Perbanas
Agung Bayu Sulistiono	14 April 2023 April 14, 2023	Head of Consumer Financing Business	43	S1	Universitas Indonesia
Agung Prambudi	20 Februari 2017 February 20, 2017	Head of Distribution & Network Management	53	S1	Universitas Brawijaya
Agus Andipratama Amir	19 Mei 2016 Mei 19, 2016	Head of Retail Funding & Transaction	47	S1	University of South Australia
Anton Hendrianto	3 Juli 2017 Juli 3, 2017	Head of HC Strategy and Development	44	S2	Universitas Bina Nusantara
Aruddy	11 Mei 2012 Mei 11, 2012	Head of Enterprise Financing Risk	53	S2	Institut Pertanian Bogor
Aznovri Kurniawan	2 Januari 2017 Januari 2, 2017	Head of Business Finance & Performance	48	S2	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
Bambang Rudi Hariyanto	14 Mei 2018 Mei 14, 2018	Head of Retail Financing Risk	50	S1	Institut Pertanian Bogor
Catur Andayani	1 Oktober 2012 October 1, 2012	Head of Integrated Risk Management	54	S2	Universitas Indonesia
Dadang Rohandi	5 Juni 2023 June 5, 2023	Head of Digital Banking	48	S2	Universitas Indonesia
Demmy Rizkiadhy	15 Oktober 2015 October 15, 2015	Head of Strategy & Transformation	41	S1	Universitas Trisakti
Dicky Zakiudin	16 April 2018 April 16, 2018	Head of Retail Collection Management	53	S1	Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Dyah Ekowati	7 Mei 1997 May 7, 1997	Head of Compliance	52	S1	Institut Pertanian Bogor
Elisa Ratnawardani	13 Januari 2022 January 13, 2022	Head of SOE & Corporate Banking	53	S2	Monash University
Esti Budiarti	18 Juli 2016 Juli 18, 2016	Head of HCBP and Services	43	S1	Universitas Indonesia
Hayunaji	17 Desember 2018 Desember 17, 2018	Head of Corporate Affairs	52	S1	Universitas Indonesia
Ibnu Umar	4 Maret 2019 March 4, 2019	Head of Financing Operations – Plt.	51	S1	Universitas Pancasila
Ilham Wahyudin	9 April 2018 April 9, 2018	Head of Enterprise Banking Business Development	48	S1	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen
Khusnudhon	12 Januari 2022 January 12, 2022	Head of Corporate Legal	48	S2	Universitas Gadjah Mada
Moh. Madina Hendrik Soe'oad	12 April 2019 April 12, 2019	Head of Global Market	48	S2	Melbourne Unix Monash
Muhammad Fachry Maulana	12 Juni 2023 Juni 12, 2023	Head of SME & Commercial Banking	42	S1	Institut Teknologi Bandung
Muhammad Ilham	1 September 2016 September 1, 2016	Head of Financial Control	51	S1	Universitas Andalas
Nanang Basuki	22 Juni 1993 June 22, 1993	Head of Corporate Real Estate & Procurement	52	S2	Institut Teknologi Bandung
Riva Yan Abdillah	28 Januari 2021 January 28, 2021	Head of Anti Fraud	51	S1	STEKPI



Nama Name	Tanggal Bergabung Date Joined	Jabatan Position	Usia (tahun) Age (years)	Pendidikan Terakhir Last Education	Institusi Pendidikan Educational Institution
Sandhy Sofian	14 Februari 2022 February 14, 2022	Head of Information Technology	50	S1	Universitas Gunadarma
Supriati Nugroho Pernamawati	22 Juli 2015 July 22, 2015	Head of Marketing Communication	48	S1	Universitas Sebelas Maret
Tegar Sangga Barkah	1 September 2023 September 1, 2023	Head of Internal Audit	46	S1	Indonesian University
Teguh Nugroho	1 Oktober 2012 October 1, 2012	Head of Special Asset Management	41	S1	Institut Pertanian Bogor
Vino Yudessa Lamantu	9 Mei 2016 May 9, 2016	Head of HCBP & Industrial Relations	45	S1	Universitas Islam Indonesia
Wang Wardhana	4 Juni 2018 June 4, 2018	Head of Hajj & Umrah Solution	50	S2	La Trobe University
Wita Hanayori	13 Juni 2016 June 13, 2016	Head of Operation Services	49	S2	Sekolah Tinggi Manajemen IPMI
Zefri Ananta	23 Februari 2023 February 23, 2023	Head of Operation Strategy & Development	54	S2	Institut Pertanian Bogor
Ahmad Salihin	8 September 1997 September 8, 1997	Regional CEO - Plt. Sulawesi, Maluku & Papua	49	S1	Universitas Hasanuddin Makassar
Ana Hastuti	18 September 1996 September 18, 1996	Regional CEO - Plt. Jakarta East	47	S1	STIE Adhy Niaga
Aufrieda Artsiana Dewi	1 Agustus 2017 August 1, 2017	Regional CEO - Plt. Jatim, Bali & Nusa	54	S1	Universitas Airlangga
Erick Ermawan	1 Mei 2013 May 1, 2013	Regional CEO - Plt. Regional Jakarta West	52	S1	Institut Pertanian Bogor
Eryk Lufiat	19 September 2016 September 19, 2016	Regional CEO - Plt. Jabar & Kalimantan 1	45	S1	Universitas Gadjah Mada
Sahlan	1 Mei 2001 May 1, 2001	Regional CEO - Plt. Sumatera	46	S1	Universitas Sumatera Utara
Sulistyanto Hibrizie	3 Oktober 2016 October 3, 2016	Regional CEO - Plt. Jateng, DIY & Kalimantan 2	54	S1	Universitas Gadjah Mada
Mahmud Abu Bakar	15 April 2019 April 15, 2019	General Manager - Kuala Lumpur Branch	58	S2	University of Leicester, UK
Abdul Kadir Jailani	1 Maret 2019 March 1, 2019	Branch Manager - Pangkal Pinang Branch	39	S1	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Additya Dian Eko Putra	8 Mei 2014 May 8, 2014	Branch Manager - Tanjung Pinang Branch	32	S1	Universitas Sriwijaya
Adi Tri Wibowo	22 Oktober 2010 October 22, 2010	Branch Manager - Jember Branch	38	S1	Universitas Muhammadiyah Malang
Aditya Nugroho	9 Mei 2022 May 9, 2022	Branch Manager - Jababeka Branch	35	S1	STMIK Cikarang
Affan Syu'aidi	3 Juni 2010 June 3, 2010	Branch Manager - Langsa Branch	37	S1	Universitas Islam Sumatera Utara
Agus Rian Kusumadika	11 Juli 2011 July 11, 2011	Branch Manager - Tegal Branch	38	S1	Universitas Sebelas Maret Surakarta
Ahmad Azwar	1 April 2014 April 1, 2014	Branch Manager - Lampung Branch	41	S1	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Akbar Sulaiman Karib	31 Desember 2004 December 31, 2004	Branch Manager - Ambon Branch	44	S1	Universitas Hasanuddin Makassar
Anike Defriana	27 Februari 2017 February 27, 2017	Branch Manager - Kelapa Gading Branch	49	S1	Universitas Tanjungpura
Anshar	12 Juni 1999 June 12, 1999	Branch Manager - Samarinda Branch	51	S1	Universitas Hasanuddin Makassar
Arie Boentaram	17 Mei 2001 May 17, 2001	Branch Manager - Pontianak Branch	44	S1	UPI YAI Jakarta



Nama Name	Tanggal Bergabung Date Joined	Jabatan Position	Usia (tahun) Age (years)	Pendidikan Terakhir Last Education	Institusi Pendidikan Educational Institution
Arief Nur Yusuf	1 Oktober 2016 October 1, 2016	Branch Manager - Kalimas Bekasi Branch	53	S1	Universitas Merdeka Malang
Aris Haryanto Budiman	16 Januari 2013 January 16, 2013	Branch Manager - Mamuju Branch	39	S1	Universitas Padjadjaran
Bambang Haryo Nugroho	1 Agustus 2006 August 1, 2006	Branch Manager - Purwokerto Branch	39	S1	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Betha Muhammad Zaky	1 Februari 2007 February 1, 2007	Branch Manager - Banjarmasin Branch	42	S1	Institut Pertanian Bogor
Bimo Setyawan	6 April 2017 April 6, 2017	Branch Manager - BSD Branch	44	S2	Universitas Atma Jaya
Budi Santoso	1 Maret 1996 March 1, 1996	Branch Manager - Semarang Branch	50	S1	Universitas Stikubank
Budi Sulaksana	21 April 2001 April 21, 2001	Branch Manager - Plt. Pekalongan Branch	47	S1	Universitas Muhammadiyah Surakarta
Cahya Adi	2 Januari 2017 January 2, 2017	Branch Manager - Tangerang City Branch	44	S1	Institut Perbanas
Christin Widyaningrum	26 April 2017 April 26, 2017	Branch Manager - Kalimalang Branch	43	S1	Universitas Gadjah Mada
Christinawulansari Elok Jatiwaluyaningtias	1 September 2006 September 1, 2006	Branch Manager - Jayapura Branch	42	S1	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
Danang Rokhmad Sulendra	15 Juni 2009 June, 15 2009	Branch Manager - Surabaya Darmo Branch	38	S1	Universitas Negeri Surabaya
Deny Hindarto	1 Agustus 2016 August 1, 2016	Branch Manager - Bogor Branch	53	S2	The IPMI Business School
Devi Septiana	26 Juni 2023 June 26, 2023	Branch Manager - Depok Branch	44	S2	Indonesia Banking School
Dewi Fathia	1 Desember 2016 December 1, 2016	Branch Manager - Fatmawati Branch	49	S1	STIE Kampus Ungu
Dony Wicaksono	10 Maret 2023 March 10, 2023	Branch Manager - Roxy Branch	41	S1	Universitas Islam Indonesia
Dwi Poedji Widodo	3 Januari 2017 January 3, 2017	Branch Manager - Makassar Branch	51	S2	STIE Malangkececwara Malang
Dwi Rahayu Warnaningsih	9 Mei 2022 May 9, 2022	Branch Manager - Mataram Branch	42	S1	Universitas Udayana Bali
Dyanne Poespa Sari	16 Maret 2020 March 16, 2020	Branch Manager - KPO Muamalat Tower	44	S2	Universitas Gadjah Mada
Efrida Yanti Siregar	18 Maret 2003 March 18, 2003	Branch Manager - Padang Sidimpunan Branch	44	S1	Universitas Sumatera Utara
Erine Widya Kusumawati	10 Juni 2019 June 10, 2019	Branch Manager - Surabaya Sungkono Branch	44	S1	Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya
Eris Fahrulroji	2 Oktober 2023 October 2, 2023	Branch Manager - Tasikmalaya Branch	43	S1	Universitas Galuh
Erwin Hatta	11 September 2017 September 11, 2017	Branch Manager - Sorong Branch	52	S1	Universitas Sawerigading Makassar
Evia Lutvita Sarie	5 Januari 2006 January 5, 2006	Branch Manager - Yogyakarta Branch	42	S1	Universitas Islam Indonesia
Fahmi Arham	1 Agustus 2023 August 1, 2023	Branch Manager - Puri Indah Branch	42	S1	Universitas Pancasila
Feri Ferdian	1 September 2006 September 1, 2006	Branch Manager - Ternate Branch	41	S1	Universitas Cenderawasih
Firmansyah Safari	3 Januari 2012 January 3, 2012	Branch Manager - Cengkareng Branch	42	S1	Universitas Islam Bandung



Nama Name	Tanggal Bergabung Date Joined	Jabatan Position	Usia (tahun) Age (years)	Pendidikan Terakhir Last Education	Institusi Pendidikan Educational Institution
Fitra Nirwan	28 April 2008 April 28, 2008	Branch Manager – Pekanbaru Branch	39	S1	STAIN Batusangkar
Fitrawan	7 Januari 2004 January 7, 2004	Branch Manager - Kendari Branch	42	S2	Universitas Haluoleo
Giat Waluyo	7 Januari 2004 January 7, 2004	Branch Manager - Solo Branch	46	S1	Universitas Jendral Soedirman
Hyang Pramesti Kesumawijaya	24 November 2014 November 24, 2014	Branch Manager - Cianjur Branch	43	S1	Universitas Jenderal Achmad Yani
Imam Pudji Rahardjo	3 Juli 1995 July 3, 1995	Branch Manager - Cirebon Branch	52	D3	Politeknik Negeri Bandung
Ismupdalifah	2 September 1993 September 2, 1993	Branch Manager - Ciledug Branch	54	S1	Universitas Indonesia
Januar Fadlillah	26 September 2016 September 26, 2016	Branch Manager – Palembang Branch	36	S1	Universitas Lampung
Lindawati	16 Juli 2018 July 16, 2018	Branch Manager – Kebon Jeruk Branch	33	S1	STIE Internasional Golden Institute (IGI)
M. Asrul	31 Oktober 2008 October 31, 2008	Branch Manager - Gorontalo Branch	38	S1	Universitas Negeri Makassar
M. Helmi	24 Januari 2005 January 24, 2005	Branch Manager - Jambi Branch	47	S1	Universitas Andalas
M. Nahdhudin Al Asady	2 Januari 2004 January 2, 2004	Branch Manager - Serang Branch	46	S1	IAIN Walisongo
Madiyah Insaniyah	1 Oktober 2013 October 1, 2013	Branch Manager - Buaran Klender Branch	33	S1	Universitas Padjadjaran
Maghfiroh	27 Juni 2016 June 27, 2016	Branch Manager – Cipulir Branch	41	S1	Universitas Jayabaya
Mahmud K Diko	20 Juni 2007 June 20, 2007	Branch Manager - Plt. Manado Branch	40	S1	Universitas Muslim Indonesia
Melinawati Amran	1 Desember 2016 December 1, 2016	Branch Manager - Bintaro Jaya Branch	50	S2	Universitas Persada Indonesia (YAI)
Mhd Taufik	3 April 2011 April 3, 2011	Branch Manager - Padang Branch	38	S1	Universitas Komputer Indonesia
Miky Mardiansyah Pino	25 Agustus 2016 August 25, 2016	Branch Manager - Medan Baru Branch	47	S1	Universitas Sumatera Utara
Mohamad Haerudin	23 Maret 2007 March 23, 2007	Branch Manager - Kediri Branch	38	S1	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Muchtar	11 Maret 2013 March 11, 2013	Branch Manager – Palu Branch	45	S1	Universitas Tadulaku
Muhammad Amin	18 April 2005 April 18, 2005	Branch Manager - Medan Branch	44	S1	Universitas Islam Bandung
Muhammad Husein Sucipto	1 Maret 2008 March 1, 2008	Branch Manager - Denpasar Branch	39	S1	Universitas Sriwijaya
Muhammad Rajab Lubis	2 Juli 2018 July 2, 2018	Branch Manager – Pematangsiantar Branch	45	S2	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Nasrulloh	1 Maret 2004 March 1, 2004	Branch Manager - Cilegon Branch	42	S2	Universitas Negeri Jember
Neneng Siti Rahmah Niar	15 September 2017 September 15, 2017	Branch Manager - Melawai Branch	50	S1	STIE Adhy Niaga
Pandu Angga Ikhsana	1 September 2015 September 1, 2015	Branch Manager – Wolter Monginsidi Branch	41	S1	Institut Teknologi Bandung
Rani Savitri Azhari	1 Juni 2021 June 1, 2021	Branch Manager - Kupang Branch	45	S1	Universitas Nusa Cendana
Retno Ferna Astuti	9 Mei 2022 May 9, 2022	Branch Manager - Otista Branch	48	S1	STMI Depperindag RI



Nama Name	Tanggal Bergabung Date Joined	Jabatan Position	Usia (tahun) Age (years)	Pendidikan Terakhir Last Education	Institusi Pendidikan Educational Institution
Ribut Budi Putro Utomo	10 Agustus 2003 August 10, 2003	Branch Manager - Palangkaraya Branch	44	S1	Universitas Muhammadiyah Surakarta
Rifyal Fajri	18 Desember 2006 Desember 18, 2006	Branch Manager - Bengkulu Branch	40	S1	STT Telkom
Rizma	13 Maret 1995 March 13, 1995	Branch Manager - Surabaya KH Mas Mansyur Branch	52	S1	Universitas Muhammadiyah Malang
Siti Herlina	17 September 2018 September 17, 2018	Branch Manager - Sawangan Bojongsari Branch	40	S1	Universitas Sriwijaya
Sopian	25 April 2011 April 25, 2011	Branch Manager - Batam Branch	35	S1	Universitas Riau
Suriyansyah	1 April 2001 April 1, 2001	Branch Manager - Balikpapan Branch	49	S1	Universitas Lambung Mangkurat
Syahrl Effendi	5 Desember 2016 December 5, 2016	Branch Manager - Aceh Branch	45	S1	Universitas Syiah Kuala
Syaskowar Yuldiansyah	26 April 2006 April 26, 2006	Branch Manager - Plt. Karawang Branch	40	S1	Universitas Lampung
T. Abdullah Suherman	23 April 2004 April 23, 2004	Branch Manager - Sukabumi Branch	43	S1	Universitas Padjadjaran
Widyanti Hidayat	23 Desember 2019 December 23, 2019	Branch Manager - Bandung Branch	42	S1	Universitas Padjadjaran
Wisnu Satria Bharata	13 September 2008 September 13, 2008	Branch Manager - Malang Branch	38	S2	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Wisnu Zul Hilmy	1 Juni 2010 June 1, 2010	Branch Manager - Kudus Branch	37	S1	Universitas Islam Indonesia
Yeyen Djannati	26 Agustus 2006 August 26, 2006	Branch Manager - Pancoran Branch	42	S1	Universitas Muslim Indonesia



Statistik Karyawan

Employee Statistics

Hingga 31 Desember 2023, jumlah karyawan Bank Muamalat Indonesia tercatat sebanyak 2.597, dengan rincian sebagai berikut:

As of December 31, 2023, the number of employees of Bank Muamalat Indonesia was recorded at 2,597, with the following details:

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA

Number of Employees by Length of Service

Masa Kerja	Jumlah Karyawan per 31 Desember Number of Employees as of December 31						Length of Service
	2023	%	2022	%	2021	%	
<1 tahun	368	14%	283	11%	134	5%	<1 year
1-2 tahun	283	11%	161	6%	208	8%	1-2 years
3-5 tahun	254	10%	371	15%	490	18%	3-5 years
6-10 tahun	436	17%	574	23%	936	35%	6-10 years
>10 tahun	1.256	48%	1.091	44%	932	35%	>10 years
Jumlah	2.597	100%	2.480	100%	2.700	100%	Total

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN GENDER

Number of Employees by Gender

Gender	Jumlah Karyawan per 31 Desember Number of Employees as of December 31						Gender
	2023	%	2022	%	2021	%	
Laki-laki	1.574	61%	1.523	61%	1.640	61%	Male
Perempuan	1.023	39%	957	39%	1.060	39%	Female
Jumlah	2.597	100%	2.480	100%	2.700	100%	Total

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN LOKASI KERJA

Number of Employees by Work Location

Lokasi Kerja	Jumlah Karyawan per 31 Desember Number of Employees as of December 31						Work Location
	2023	%	2022	%	2021	%	
Sumatera	317	12%	316	13%	382	14%	Sumatera
Jawa	1.888	73%	1.766	71%	1.882	70%	Jawa
Kalimantan	101	4%	104	4%	115	4%	Kalimantan
Bali	11	0%	11	0%	12	0%	Bali
Nusa Tenggara	21	1%	20	1%	23	1%	Nusa Tenggara
Maluku	24	1%	25	1%	27	1%	Maluku
Sulawesi	179	7%	180	7%	199	7%	Sulawesi
Papua	30	1%	32	1%	34	1%	Papua
Malaysia	26	1%	26	1%	26	1%	Malaysia
Jumlah	2.597	100%	2.480	100%	2.700	100%	Total



JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KARYAWAN

Number of Employees by Employment Status

Status Karyawan	Jumlah Karyawan per 31 Desember Number of Employees as of December 31						Employment Status
	2023	%	2022	%	2021	%	
Permanen	2.487	96%	2.426	98%	2.644	98%	Permanent
Kontrak	110	4%	54	2%	56	2%	Contract
Jumlah	2.597	100%	2.480	100%	2.700	100%	Total

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN USIA

Number of Employees by Age

Usia	Jumlah Karyawan per 31 Desember Number of Employees as of December 31						Age
	2023	%	2022	%	2021	%	
Sampai dengan 30 tahun	340	13%	237	10%	234	9%	Up to 30 years
31-40 tahun	1.403	54%	1.500	60%	1.731	64%	31-40 years
di atas 40 tahun	854	33%	743	30%	735	27%	above 40 years
Jumlah	2.597	100%	2.480	100%	2.700	100%	Total

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI

Number of Employees by Organization Level

Level Organisasi	Jumlah Karyawan per 31 Desember Number of Employees as of December 31						Organization Level
	2023	%	2022	%	2021	%	
Dewan Komisaris	4	0%	5	0%	5	0%	Board of Commissioners
Dewan Pengawas Syariah	3	0%	3	0%	3	0%	Sharia Supervisory Board
Direksi	5	0%	4	0%	6	0%	Board of Directors
SEVP	3	0%	2	0%	2	0%	SEVP
Head of L1	32	1%	28	1%	25	1%	Head of L1
Regional CEO	7	0%	-	0%	-	0%	Regional CEO
Head of Subsidiaries	2	0%	1	0%	3	0%	Head of Subsidiaries
Head of L2	112	4%	108	4%	107	4%	Head of L2
L2 Specialist	15	1%	7	0%	6	0%	L2 Specialist
Region Head	-	0%	8	0%	9	0%	Region Head
Regional Units Managers	41	2%	15	1%	17	1%	Regional Units Managers
Branch Manager	79	3%	77	3%	76	3%	Branch Manager
Branch Operation Service Manager	83	3%	81	3%	82	3%	Branch Operation Service Manager
Head of L3	8	0%	9	0%	10	0%	Head of L3
Team Leader	80	3%	108	4%	98	4%	Team Leader
Sub Branch Manager	140	5%	120	5%	122	5%	Sub Branch Manager
Operation Supervisor	155	6%	152	6%	148	5%	Operation Supervisor
Other Officer	816	31%	747	30%	776	29%	Other Officer
Clerical	1.009	39%	1.000	40%	1.197	44%	Clerical
NBS	3	0%	5	0%	8	0%	NBS
Jumlah	2.597	100%	2.480	100%	2.700	100%	Total



JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Number of Employees by Education Level

Tingkat Pendidikan	Jumlah Karyawan per 31 Desember Number of Employees as of December 31						Education Level
	2023	%	2022	%	2021	%	
Pasca Sarjana	143	6%	137	6%	150	6%	Postgraduate
Sarjana	2.200	85%	2.141	86%	2.335	86%	Undergraduate
Diploma	233	9%	189	8%	204	8%	Diploma
Di Bawah Diploma	21	1%	13	1%	11	0%	Below Diploma
Jumlah	2.597	100%	2.480	100%	2.700	100%	Total

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Biaya Pengembangan Kompetensi

Alokasi anggaran pengembangan kompetensi karyawan pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp15,38 miliar. Dibandingkan tahun 2022 yang Rp29,93 miliar, terjadi penurunan 49%.

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

Competency Development Costs

The budget allocation for employee competency development in 2023 was realized at Rp15.38 billion. Compared to Rp29.93 billion in 2022, there was a 49% decrease.

REALISASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Realization of Employee Competency Development

No.	Level Jabatan Level of Position	Jumlah Peserta Number of Participants	Jenis Pelatihan Type of Training	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Penyelenggara Organizer
1	Board	12	<i>Business Core, Management, Leadership, Operation, Support, Soft Skill</i>	Mengembangkan kompetensi SDM yang dibutuhkan melalui pendekatan terintegrasi yang dirancang dengan memperhatikan kebutuhan individu karyawan, organisasi, perencanaan suskesi karyawan, dan sasaran bisnis dalam jangka pendek maupun jangka panjang.	Bank Muamalat Indonesia, Muamalat Institute, dan pihak eksternal lainnya
2	Senior Management	38			
3	Middle Management	195			
4	Junior Management	1.132	Business Core, Management, Leadership, Operation, Support, Soft Skill	Developing HR competencies in an integrated manner, taking into account the needs of individual employees, organizations, employee success planning, and short and long-term company goals.	Bank Muamalat Indonesia, Muamalat Institute, and other external parties
5	Staff	1.813			

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Competency Development

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Waktu dan Tempat Penyelenggara Time and Place	Penyelenggara Organizer
1	Mardiasmo ⁹⁾	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	Sharia Banking for Executive	25 Januari 2023 di Jakarta January 25, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
			Penerapan GCG, GRC, dan ESG Pada Perbankan Implementation of GCG, GRC, and ESG in Banking	12 Desember 2023 di Jakarta December 12, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
2	Amin Said Husni	Komisaris Independen Independent Commissioner	Fraud Awareness & Pakta Integritas Fraud Awareness & Integrity Pact	20 Maret 2023 di Jakarta March 20, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Penerapan GCG, GRC, dan ESG Pada Perbankan Implementation of GCG, GRC, and ESG in Banking	12 Desember 2023 di Jakarta December 12, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute



No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Waktu dan Tempat Penyelenggara Time and Place	Penyelenggara Organizer
3	Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	Penerapan GCG, GRC, dan ESG Pada Perbankan Implementation of GCG, GRC, and ESG in Banking	12 Desember 2023 di Jakarta December 12, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
4	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Commissioner	Fraud Awareness & Pakta Integritas Fraud Awareness & Integrity Pact	20 Maret 2023 di Jakarta March 20, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Risk Management - Refreshment	29 Agustus 2023 di Jakarta August 29, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Penerapan GCG, GRC, dan ESG pada Perbankan Implementation of GCG, GRC, and ESG in Banking	12 Desember 2023 di Jakarta December 12, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute

*) Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.
Effective after receiving confirmation from OJK on having passed the Fit and Proper Test.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Competency Development of Sharia Supervisory Board

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Waktu dan Tempat Penyelenggara Time and Place	Penyelenggara Organizer
1	Sholahudin Al Aiyub	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of the Sharia Supervisory Board	Pra Ijtima' Sanawi	4 September 2023 di Jakarta September 4, 2023 in Jakarta	DSN-MUI
			Ijtima' Sanawi	13-14 Oktober 2023 di Jakarta October 13-14, 2023 in Jakarta	DSN-MUI
2	Siti Haniatunnisa	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of Sharia Supervisory Board	Pra Ijtima' Sanawi	4 September 2023 di Jakarta September 4, 2023 in Jakarta	DSN-MUI
			Ijtima' Sanawi	13-14 Oktober 2023 di Jakarta October 13-14, 2023 in Jakarta	DSN-MUI
3	Agung Danarto	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of Sharia Supervisory Board	Pra Ijtima' Sanawi	4 September 2023 di Jakarta September 4, 2023 in Jakarta	DSN-MUI
			Ijtima' Sanawi	13-14 Oktober 2023 di Jakarta October 13-14, 2023 in Jakarta	DSN-MUI

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI DAN PEJABAT EKSEKUTIF SENIOR

Competency Development of Directors and Senior Executive Officers

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Waktu dan Tempat Penyelenggara Time and Place	Penyelenggara Organizer
1	Indra Falatehan	Direktur Utama President Director	Senior Management Forum	7 Februari 2023 di Jakarta February 7, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			System Management Anti Penyuapan Anti-bribery Management System	8 Mei 2023 di Jakarta May 8, 2023 in Jakarta	Proxis Consulting
			Risk Management - Refreshment	29 Agustus 2023 di Jakarta August 29, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia



No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Waktu dan Tempat Penyelenggara Time and Place	Penyelenggara Organizer
2	Karno	Direktur Kepatuhan, Risiko, dan Hukum Director of Compliance, Risk and Legal Affairs	Senior Management Forum	7 Februari 2023 di Jakarta February 7, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			System Management Anti Penyuapan Anti-bribery Management System	8 Mei 2023 di Jakarta May 8, 2023 in Jakarta	Proxis Consulting
			Upgrading Asesor Kompetensi Manajemen Risiko Upgrading Risk Management Competency Assessor	10 Juni 2023 di Jakarta June 10, 2023 in Jakarta	LSPKS
			Risk Governance Master Class to Transform Your Risk Governance Strategy	6 Desember 2023 di Jakarta December 6, 2023 in Jakarta	ERMA
3	Hery Syafril	Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan Director of Financing Business Risk	Senior Management Forum	7 Februari 2023 di Jakarta February 7, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Fraud Awareness & Pakta Integritas Fraud Awareness & Integrity Pact	20 Maret 2023 di Jakarta March 20, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
4	Wahyu Avianto	Direktur Operasi dan Digital Director of Operations and Digital	Senior Management Forum	7 Februari 2023 di Jakarta February 7, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Fraud Awareness & Pakta Integritas Fraud Awareness & Integrity Pact	20 Maret 2023 di Jakarta March 20, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Upgrading Asesor Kompetensi Manajemen Risiko Upgrading Risk Management Competency Assessor	10 Juni 2023 di Jakarta June 10, 2023 in Jakarta	LSPKS
			CGEIT Exam Preparation	3 Juli 2023 July 3, 2023	Proxis Consulting
5	Suhendar	Direktur Keuangan dan Strategi Director of Finance and Strategy	Senior Management Forum	7 Februari 2023 di Jakarta February 7, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Fraud Awareness & Pakta Integritas Fraud Awareness & Integrity Pact	20 Maret 2023 di Jakarta March 20, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
6	Irvan Yulian Noor	Senior Executive Vice President Enterprise Banking	Senior Management Forum	7 Februari 2023 di Jakarta February 7, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
7	Riksa Prakoso	Senior Executive Vice President Human Capital	Senior Management Forum	7 Februari 2023 di Jakarta February 7, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Fraud Awareness & Pakta Integritas Fraud Awareness & Integrity Pact	20 Maret 2023 di Jakarta March 20, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Risk Management Certification Level 5	28 Desember 2023 di Jakarta December 28, 2023 in Jakarta	LSPKS
8	Dedy Suryadi Dharmawan	Senior Executive Vice President Retail Banking	Risk Management Certification Level 5	28 Desember 2023 di Jakarta December 28, 2023 in Jakarta	LSPKS



PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Audit Committee Competency Development

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Waktu dan Tempat Penyelenggara Time and Place	Penyelenggara Organizer
1	Sartono	Ketua Chairman	Penerapan GCG, GRC, dan ESG pada Perbankan Implementation of GCG, GRC, and ESG in Banking	12 Desember 2023 di Jakarta December 12, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
2	Amin Said Husni	Anggota Member	Fraud Awareness & Pakta Integritas Fraud Awareness & Integrity Pact	20 Maret 2023 di Jakarta March 20, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Penerapan GCG, GRC, dan ESG pada Perbankan Implementation of GCG, GRC, and ESG in Banking	12 Desember 2023 di Jakarta December 12, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
3	Karim Anggar Prianto	Anggota Member	Penerapan GCG, GRC, dan ESG pada Perbankan Implementation of GCG, GRC, and ESG in Banking	12 Desember 2023 di Jakarta December 12, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
4	Saiful Anwar	Anggota Member	-	-	-

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Competency Development of Nomination and Remuneration Committee

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Waktu dan Tempat Penyelenggara Time and Place	Penyelenggara Organizer
1	Amin Said Husni	Ketua Chairman	Fraud Awareness & Pakta Integritas Fraud Awareness & Integrity Pact	20 Maret 2023 di Jakarta March 20, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Penerapan GCG, GRC, dan ESG pada Perbankan Implementation of GCG, GRC, and ESG in Banking	12 Desember 2023 di Jakarta December 12, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
2	Andre Mirza Hartawan	Anggota Member	Fraud Awareness & Pakta Integritas Fraud Awareness & Integrity Pact	20 Maret 2023 di Jakarta March 20, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Risk Management - Refreshment	29 Agustus 2023 di Jakarta August 29, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Penerapan GCG, GRC, dan ESG pada Perbankan Implementation of GCG, GRC, and ESG in Banking	12 Desember 2023 di Jakarta December 12, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
3	Riksa Prakoso	Anggota Member	Senior Management Forum	7 Februari 2023 di Jakarta February 7, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Fraud Awareness & Pakta Integritas Fraud Awareness & Integrity Pact	20 Maret 2023 di Jakarta March 20, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Risk Management Certification Level 5	28 Desember 2023 di Jakarta December 28, 2023 in Jakarta	LSPKS



PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Competency Development of Risk Monitoring Committee

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Waktu dan Tempat Penyelenggara Time and Place	Penyelenggara Organizer
1	Sartono	Ketua Chairman	Penerapan GCG, GRC, dan ESG pada Perbankan Implementation of GCG, GRC, and ESG in Banking	12 Desember 2023 di Jakarta December 12, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
2	Andre Mirza Hartawan	Anggota Member	Fraud Awareness & Pakta Integritas Fraud Awareness & Integrity Pact	20 Maret 2023 di Jakarta March 20, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Risk Management - Refreshment	29 Agustus 2023 di Jakarta August 29, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Penerapan GCG, GRC, dan ESG pada Perbankan Implementation of GCG, GRC, and ESG in Banking	12 Desember 2023 di Jakarta December 12, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
3	Amin Said Husni	Anggota Member	Fraud Awareness & Pakta Integritas Fraud Awareness & Integrity Pact	20 Maret 2023 di Jakarta March 20, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Penerapan GCG, GRC, dan ESG pada Perbankan Implementation of GCG, GRC, and ESG in Banking	12 Desember 2023 di Jakarta December 12, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
4	Dedi Sopyan	Anggota Member	Penerapan GCG, GRC, dan ESG pada Perbankan Implementation of GCG, GRC, and ESG in Banking	12 Desember 2023 di Jakarta December 12, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
5	Ani Murdiati	Anggota Member	Penerapan GCG, GRC, dan ESG pada Perbankan Implementation of GCG, GRC, and ESG in Banking	12 Desember 2023 di Jakarta December 12, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Competency Development of Corporate Governance Committee

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Waktu dan Tempat Penyelenggara Time and Place	Penyelenggara Organizer
1	Amin Said Husni	Anggota Member	Fraud Awareness & Pakta Integritas Fraud Awareness & Integrity Pact	20 Maret 2023 di Jakarta March 20, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Penerapan GCG, GRC, dan ESG pada Perbankan Implementation of GCG, GRC, and ESG in Banking	12 Desember 2023 di Jakarta December 12, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
2	Andre Mirza Hartawan	Anggota Member	Fraud Awareness & Pakta Integritas Fraud Awareness & Integrity Pact	20 Maret 2023 di Jakarta March 20, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Risk Management - Refreshment	29 Agustus 2023 di Jakarta August 29, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Penerapan GCG, GRC, dan ESG pada Perbankan Implementation of GCG, GRC, and ESG in Banking	12 Desember 2023 di Jakarta December 12, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
3	Dinan Sufendi RAE	Anggota Member	Penerapan GCG, GRC, dan ESG pada Perbankan Implementation of GCG, GRC, and ESG in Banking	12 Desember 2023 di Jakarta December 12, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute



PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary Competency Development

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Waktu dan Tempat Penyelenggara Time and Place	Penyelenggara Organizer
1	Hayunaji	Head of Corporate Affairs/Corporate Secretary	Pendalaman POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Publik Deepening POJK Number 14 / POJK.04 / 2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public	12 Januari 2023 di Jakarta January 12, 2023 in Jakarta	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)
			Senior Management Forum Senior Management Forum	7 Februari 2023 di Jakarta February 7, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Milenial Cuan Melek Keuangan Millennial Cuan Financial Literacy	28 Februari 2023 di Jakarta February 28, 2023 in Jakarta	Infobank
			Fraud Awareness & Pakta Integritas Fraud Awareness & Integrity Pact	20 Maret 2023 di Jakarta March 20, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Mengatasi Tantangan dan Menghadapi Perubahan dalam Sektor Jasa Keuangan Overcoming Challenges and Facing Changes in the Financial Services Sector	13 April 2023 di Jakarta April 13, 2023 in Jakarta	OJK Institute
			Senior Management Forum	11 Mei 2023 May 11, 2023	Bank Muamalat Indonesia
			Sosialisasi Soft Launching Baitul Ilmi Muamalat Socialization of Baitul Ilmi Muamalat Soft Launching	16 Juni 2023 June 16, 2023	Bank Muamalat Indonesia
			Transformation in Harmony	5 Juli 2023 July 5, 2023	Bank Muamalat Indonesia
			Motivation & Spiritual Program	27 Agustus 2023 August 27, 2023	Bank Muamalat Indonesia
			Mastering Yourself: Optimalkan Potensi dan Tingkatkan Kinerja di Era Digital Mastering Yourself: Optimize Potential and Improve Performance in the Digital Age	14 Desember 2023 di Jakarta December 14, 2023 in Jakarta	OJK Institute

PENGEMBANGAN KOMPETENSI UNIT AUDIT INTERNAL

Competency Development of Internal Audit Unit

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Waktu dan Tempat Penyelenggara Time and Place	Penyelenggara Organizer
1	Tegar Sangga Barkah	Head of Internal Audit	Introduction Training Program For Leaders	8 September 2023 di Jakarta September 8, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			It Takes Versatility to Lead in Volatile World	21 November 2023 di Jakarta November 21, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
			ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	Online Online	Robere Associates
			Fraud Investigator Professional Training Certification	Online Online	Revolution Mind
			Data Analytics: Teknik, Implementasi, dan Machine Learning	Online Online	Ikatan Auditor Intern Bank
			Certified Information Technology Auditor Professional (CITAP)	Online Online	Motekar Edukasi Indonesia
			Design & Implementation Continuous Auditing based on data analytics	Bandung	Bank BJB Syariah



No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Waktu dan Tempat Penyelenggara Time and Place	Penyelenggara Organizer
			Treasury Audit Training : Transaction and Risk Mitigation	Online Online	Bank BJB Syariah
			Cyber Crime & Cyber Security	Online Online	Bank BJB Syariah
			Executive Education On Digital Transformation	Online Online	Bank BJB Syariah
			Seminar Blockchain Dan Perbankan Digital	Online Online	Leadership Nasional
			Pelatihan Analisa Emas & Gadai Khusus Divisi Audit Internal	Bandung	Bank BJB Syariah
			Training Awareness ISO 370001:2016 Sistem Management Anti Penyuapan ISO 370001:2016 Anti-Bribery Management System Awareness Training	Online Online	Robere
			Pelatihan Aspek Syariah Compliance Sharia Compliance Training	Bandung	Bank BJB Syariah
			Workshop Internalisasi Budaya Perusahaan & Leader Rules In Culture Transformation Workshop on Corporate Culture Internalization & Leader Rules in Culture Transformation	Bandung	Act Consulting

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEPARTEMEN MANAJEMEN RISIKO

Competency Development of Risk Management Department

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Waktu dan Tempat Penyelenggara Time and Place	Penyelenggara Organizer
1	Catur Andayani	Head of Integrated Risk Management	Workshop Consumer Payroll, Multiguna for ASN & Pensiun	9 Januari 2023 di Jakarta January 9, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
			The Role of Governance Risk & Compliance (GRC) in Supporting Financial Sector Performance	23 Februari 2023 di Jakarta February 23, 2023 in Jakarta	OJK Institute
			Workshop & FGD Pengembangan Produk Kepemilikan Emas Workshop & FGD on Gold Ownership Product Development	22 Februari 2023 di Jakarta February 22, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
			Workshop & FGD Pengembangan Produk Kepemilikan Emas Workshop & FGD on Gold Ownership Product Development	15 Februari 2023 di Jakarta February 15, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
			Risk Management Certification Level 4	14 Februari 2023 di Jakarta February 14, 2023 in Jakarta	LSPKS
			Workshop & FGD Pengembangan Produk Kepemilikan Emas Workshop & FGD on Gold Ownership Product Development	13 Februari 2023 di Jakarta February 13, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
			Workshop Pembiayaan Pensiun ASN ASN Pension Financing Workshop	10 Februari 2023 di Jakarta February 10, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
			Senior Management Forum	7 Februari 2023 di Jakarta February 7, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Workshop & FGD Pengembangan Produk Kepemilikan Emas Workshop & FGD on Gold Ownership Product Development	6 Februari 2023 di Jakarta February 6, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute



No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Waktu dan Tempat Penyelenggara Time and Place	Penyelenggara Organizer
			Workshop & FGD Pengembangan Produk Kepemilikan Emas Workshop & FGD on Gold Ownership Product Development	1 Februari 2023 di Jakarta February 1, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
			Fraud Awareness & Pakta Integritas Fraud Awareness & Integrity Pact	20 Maret 2023 di Jakarta March 20, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Membangun Keyakinan Nasabah Aset Digital dari Risiko Siber Building Customer Confidence in Digital Assets from Cyber Risks	30 Mei 2023 May 30, 2023	OJK Institute
			Dirasah Islamiyah - Implementasi Pembiayaan Musyarakah Sesuai Fatwa DSN MUI Dirasah Islamiyah - Implementation of Musyarakah Financing in accordance with Fatwa DSN MUI	31 Mei 2023 di Jakarta May 31, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			System Management Anti Penyuapan Anti-bribery Management System	8 Mei 2023 di Jakarta May 8, 2023 in Jakarta	Proxis Consulting
			Penerapan Cloud Computing di Industri Jasa Keuangan Application of Cloud Computing in the Financial Services Industry	8 Juni 2023 di Jakarta June 8, 2023 in Jakarta	OJK Institute
			Dirasah Islamiyah - Implementasi Pembiayaan Murabahah Dirasah Islamiyah - Implementation of Murabahah Financing	19 Juni 2023 di Jakarta June 19, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Upgrading Assesor Kompetensi Manajemen Risiko Upgrading Risk Management Competency Assessor	17 Juni 2023 di Jakarta June 17, 2023 in Jakarta	LSPKS
			Enterprise Risk Management – Analisa Sistem Informasi dan Infrastruktur Manajemen Risiko Enterprise Risk Management - Analysis of Information Systems and Risk Management Infrastructure	21 Juli 2023 di Jakarta July 21, 2023 in Jakarta	MES - LSPKS
			Introduction To 4 Discipline of Execution (4DX)	15 Agustus 2023 di Jakarta August 15, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute, Bank Muamalat Indonesia
			Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Implementation of the Personal Data Protection Law	4 Agustus 2023 di Jakarta August 4, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Combined Assurance dalam Penerapan GRC di Industri Perbankan Combined Assurance in the Implementation of GRC in the Banking Industry	13 September 2023 di Jakarta September 13, 2023 in Jakarta	MES - LSPKS
			Menyusun Risk Appetite Framework Developing Risk Appetite Framework	16 Oktober 2023 October 16, 2023	LSPKS
			Merespon Risiko Responding to Risk	23 Oktober 2023 October 23, 2023	LSPKS
			It Takes Versatility to Lead in Volatile World	21 November 2023 di Jakarta November 21, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
			Pengelolaan e-Dapem dan System e-Dapem and System Management	11 November 2023 di Jakarta November 11, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia



No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Waktu dan Tempat Penyelenggara Time and Place	Penyelenggara Organizer
			Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Implementation of Personal Data Protection Law	5 Desember 2023 di Jakarta Desember 5, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN KERJA KEPATUHAN

Competency Development of Compliance Work Unit

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Waktu dan Tempat Penyelenggara Time and Place	Penyelenggara Organizer
1	Dyah Ekowati	Head of Compliance	Workshop Consumer Payroll, Multiguna for ASN & Pensiun Workshop Consumer Payroll, Multipurpose for ASN & Pension	9 Januari 2023 di Jakarta January 9, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
			Workshop Pembiayaan Pensiun ASN ASN Pension Financing Workshop	10 Februari 2023 di Jakarta February 10, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
			Senior Management Forum	7 Februari 2023 di Jakarta February 7, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Fraud Awareness & Pakta Integritas Fraud Awareness & Integrity Pact	20 Maret 2023 di Jakarta March 20, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
			Anti Money Laundering in Digital Era: Lesson Learned from Selected Countries	6 April 2023 April 6, 2023	Otoritas Jasa Keuangan Institute
			System Management Anti Penyuapan Anti-bribery Management System	8 Mei 2023 di Jakarta May 8, 2023 in Jakarta	Proxis Consulting
			How to Manage Climate Related Risk in Banking Industry	22 Juni 2023 June 22, 2023	Otoritas Jasa Keuangan Institute
			Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Sektor Perbankan Get to Know More about the P2SK Law Arrangements in the Context of Strengthening the Banking Sector	22 Juni 2023 June 22, 2023	Otoritas Jasa Keuangan Institute
			It Takes Versatility to Lead in Volatile World	21 November 2023 di Jakarta November 21, 2023 in Jakarta	Muamalat Institute
			Pengelolaan e-Dapem dan System e-Dapem and System Management	11 November 2023 di Jakarta November 11, 2023 in Jakarta	Bank Muamalat Indonesia



Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Information on Major and Controlling Shareholders

Pemegang saham utama sekaligus pengendali Bank Muamalat Indonesia adalah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dengan kepemilikan saham pada tahun 2023 mencapai 82,7%.

The main and controlling shareholder of Bank Muamalat Indonesia is the Hajj Financial Management Agency (BPKH), with share ownership in 2023 reaching 82.7%.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)

Hajj Financial Management Agency (BPKH)

Nama Name	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	Hajj Financial Management Agency (BPKH)
Tahun Pendirian Year of Establishment	2017	
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis for Establishment	- Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji - Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji - Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	- Law of the Republic of Indonesia No. 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management - Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 110 of 2017 on the Hajj Financial Management Agency - Government Regulation No. 5 of 2018 on the Implementation of Law No. 34 of 2014 on Hajj Financial Management
Bidang Usaha Line of Business	Pengelolaan Keuangan Haji	Hajj Financial Management
Alamat Address	Muamalat Tower, Jl. Prof Dr Satrio, Kav. 18, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940	
Visi dan Misi Vision and Mission		
Visi Vision	BPKH berkomitmen menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat	BPKH is committed to becoming a trusted financial management institution that provides optimal benefit value for pilgrims and the benefit of the people.
Misi Mission	- Membangun kepercayaan melalui pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan modern - Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPIH melalui kerja sama strategis - Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas - Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintegritas dan profesional - Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat	- Building trust through the management of transparent and modern financial system - Improve efficiency and rationality of BPIH through strategic cooperation - Investing in optimal returns with sharia principles and considering aspects of security, prudence and professionalism. - Creating a comprehensive and accountable governance and work system by developing human resources with integrity and professionalism. - Providing benefits to improve the welfare of the people
Struktur Organisasi Organizational Structure	Berdasarkan Perpres No. 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, organ BPKH terdiri atas Badan Pelaksana yang paling sedikit terdiri atas lima orang anggota yang berasal dari unsur profesional dan Dewan Pengawas yang terdiri atas tujuh orang anggota yang berasal dari unsur profesional dan pemerintah.	Based on Presidential Regulation No. 110/2017 on the Hajj Financial Management Agency, the BPKH organ consists of a Governing Board consisting of at least five members from professional elements and a Supervisory Board consisting of seven members from professional and government elements.



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Hingga diterbitkannya laporan ini, komposisi kepemilikan saham PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham Shareholder Name	Status	Jumlah Saham (Lembar) Number of Shares (pages)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)
Badan Pengelola Keuangan Haji Hajj Financial Management Agency	Lokal Local	27.561.372.896	82,65
Ir. Andre Mirza Hartawan, MBA	Lokal Local	1.731.033.333	5,19
Apliani	Lokal Local	826.850.464	2,48
Reza Rhenaldi Syaiful	Lokal Local	729.056.793	2,19
Dewi Monita	Lokal Local	728.150.000	2,18
Islamic Development Bank	Asing Foreign	680.513.489	2,04
Masyarakat lainnya (masing-masing <2%) Other public (<2% each)	Lokal Local	1.088.183.987	3,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Total Issued and Fully Paid-up Capital		33.345.160.962	100,00
Saham dalam Portepel Shares in Portepel		22.103.739.589	
Total		55.448.900.551	

KELOMPOK PEMEGANG SAHAM 5% DAN/ATAU LEBIH

Shareholder Group Owning 5% and/or More

Nama Pemegang Saham Shareholder Name	Jumlah Kepemilikan Number of Ownership	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)
Badan Pengelola Keuangan Haji Hajj Financial Management Agency	27.561.372.896	82,65
Ir. Andre Mirza Hartawan, MBA	1.731.033.333	5,19

KELOMPOK PEMEGANG SAHAM KURANG DARI 5%

Group of Less than 5% Share Ownersip

Nama Pemegang Saham Shareholder Name	Status	Jumlah Saham (Lembar) Number of Shares (pages)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)
Apliani	Lokal Local	826.850.464	2,48
Reza Rhenaldi Syaiful	Lokal Local	729.056.793	2,19
Dewi Monita	Lokal Local	728.150.000	2,18
Islamic Development Bank	Asing Foreign	680.513.489	2,04
Masyarakat lainnya (masing-masing <2%) Other public (<2% each)	Lokal Local	1.088.183.987	3,26

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SECARA LANGSUNG

Direct Ownership of Shares of the Board of Commissioners and Directors

Pemegang Saham Shareholders	Jabatan Position	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Mardiasmo ⁹⁾	Komisaris Utama Independen Independent President Commissioner	-	-
Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-



Pemegang Saham Shareholders	Jabatan Position	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Amin Said Husni	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Ir. Andre Mirza Hartawan, MBA	Komisaris Commissioner	1.731.033.333	5,19
Direksi Board of Directors			
Indra Falatehan	Direktur Utama President Director	-	-
Karno	Direktur Kepatuhan, Risiko, dan Hukum Director of Compliance, Risk and Legal Affairs	-	-
Hery Syafril	Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan Director of Financing Business Risk	-	-
Wahyu Avianto	Direktur Operasi dan Digital Director of Operations and Digital	-	-
Suhendar	Direktur Keuangan dan Strategi Director of Finance and Strategy	-	-

*) Tidak menjabat sejak Desember 2023.
No longer serving effective since December 2023.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Secara Tidak Langsung

Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak ada yang memiliki saham BMI secara tidak langsung.

Indirect Share Ownership of Board of Commissioners and Directors

None of the Bank's Board of Commissioners and Directors own BMI shares indirectly.

PEMEGANG SAHAM BERDASARKAN KLASIFIKASI (DATA PER 31 DESEMBER 2023)

Shareholders by Classification (Data as of December 31, 2023)

Kelompok	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Kepemilikan (Lembar) Total Ownership (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Group
Individu dan Institusi Lokal		Individuals and Local Institutions		
Individu	338.123	4.850.945.513	14,55	Individuals
Institusi				Institutions
Pemerintah Daerah	492	3.040.410	0,00	Local Government
Koperasi	769	98.814.764	0,29	Cooperatives
Yayasan	110	57.396.961	0,17	Foundation
Dana Pensiun	15	57.035.037	0,17	Pension Fund
Asuransi	6	7.459.870	0,02	Insurance
Bank	14	17.387.106	0,04	Bank
Perseroan Terbatas	220	9.931.005	0,03	Limited Liability Company
Badan Usaha Lainnya	114	27.562.636.807	82,65	Other Business Entities
Jumlah Saham	339.863	32.664.647.473	97,96	Total Shares
Individu dan Institusi Asing		Foreign Individuals and Institutions		
Individu	-	-	-	Individual
Institusi	1	680.513.489	2,04	Institutions
Jumlah Saham	1	680.513.489	2,04	Total Shares
JUMLAH	338.876	33.345.160.962	100	TOTAL



Kronologi Pencatatan Saham

Share Listing Chronology

Berikut adalah kronologi penerbitan/pencatatan saham PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

The following is the chronology of the issuance / listing of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk shares.

Tahun Year	Aksi Korporasi Corporate Action	Jumlah Saham Baru Number of New Shares	Nilai Nominal Saham (Rp) Nominal Value of Shares (Rp)	Tanggal Efektif Effective Date	Bursa Efek Stock Exchange
1993	Penawaran Umum Saham Perdana Initial Public Offering	2.489.090	1.000	28 Oktober 1993 October 28, 1993	<i>Non Listed</i>
1998	Penawaran Umum Terbatas I Seri Saham B dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Limited Public Offering I Series B Shares with Pre-emptive Rights	172.504.936	1.000	19 Juni 1998 June 19, 1998	<i>Non Listed</i>
2002	Penawaran Umum Terbatas II Seri Saham C dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Limited Public Offering II Series C Shares with Pre-emptive Rights	208.727.863	500	15 November 2002 November 15, 2002	<i>Non Listed</i>
2005	Penawaran Umum Terbatas III Seri Saham C dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Limited Public Offering III Series C Shares with Pre-emptive Rights	446.194.051	500	26 April 2005 April 26, 2005	<i>Non Listed</i>
2010	Penawaran Umum Terbatas IV Seri Saham C dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Limited Public Offering IV Series C Shares with Pre-emptive Rights	820.251.749	500	28 Juni 2010 June 28, 2010	<i>Non Listed</i>
2011	Pembagian Saham Bonus (Rasio 15 :1) Bonus Share Distribution (15:1 Ratio)	78.352.338	500	26 Mei 2011 May 26, 2011	<i>Non Listed</i>
2012	Pemecahan Nilai Saham/ <i>Stock Split</i> • Saham Seri A dan B (Rp1.000) menjadi Saham Seri A (Rp200) • Saham Seri C (Rp500) menjadi Saham Seri B (Rp100) <i>Stock Split</i> • Series A and B Shares (Rp1,000) into Series A Shares (Rp200) • Series C Shares (Rp500) into Series B Shares (Rp100)	7.391.784.490	Saham Seri A Rp200 Saham Seri B Rp100 Series A Shares Rp200 Series B Shares Rp100	21 November 2012 November 21, 2012	<i>Non Listed</i>
2013	Penawaran Umum Terbatas V Saham Seri B dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Limited Public Offering V Series B Shares with Pre-emptive Rights	2.815.917.885	100	7 November 2013 November 7, 2013	<i>Non Listed</i>
2021	Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI (PMHMETD VI) Limited Public Offering in the context of Capital Increase with Pre-emptive Rights VI (PMHMETD VI)	39.810.039.107	30	16 Desember 2021 December 16, 2021	<i>Non Listed</i>
2023	Penggabungan Nilai Saham/ <i>Reverse Stock Split</i> • Saham Seri A (Rp200) menjadi (Rp300) • Saham Seri B (Rp100) menjadi (Rp150) • Saham Seri C (Rp30) menjadi (Rp45) <i>Reverse Stock Split</i> • Series A shares (Rp200) to (Rp300) • Series B shares (Rp100) to (Rp150) • Series C shares (Rp30) to (Rp45)	33.345.160.962	Saham Seri A Rp300 Saham Seri B Rp150 Saham Seri C Rp45 Series A Shares Rp300 Series B Shares Rp150 Series C Shares Rp45	20 November 2023 November 20, 2023	<i>Non Listed</i>



Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

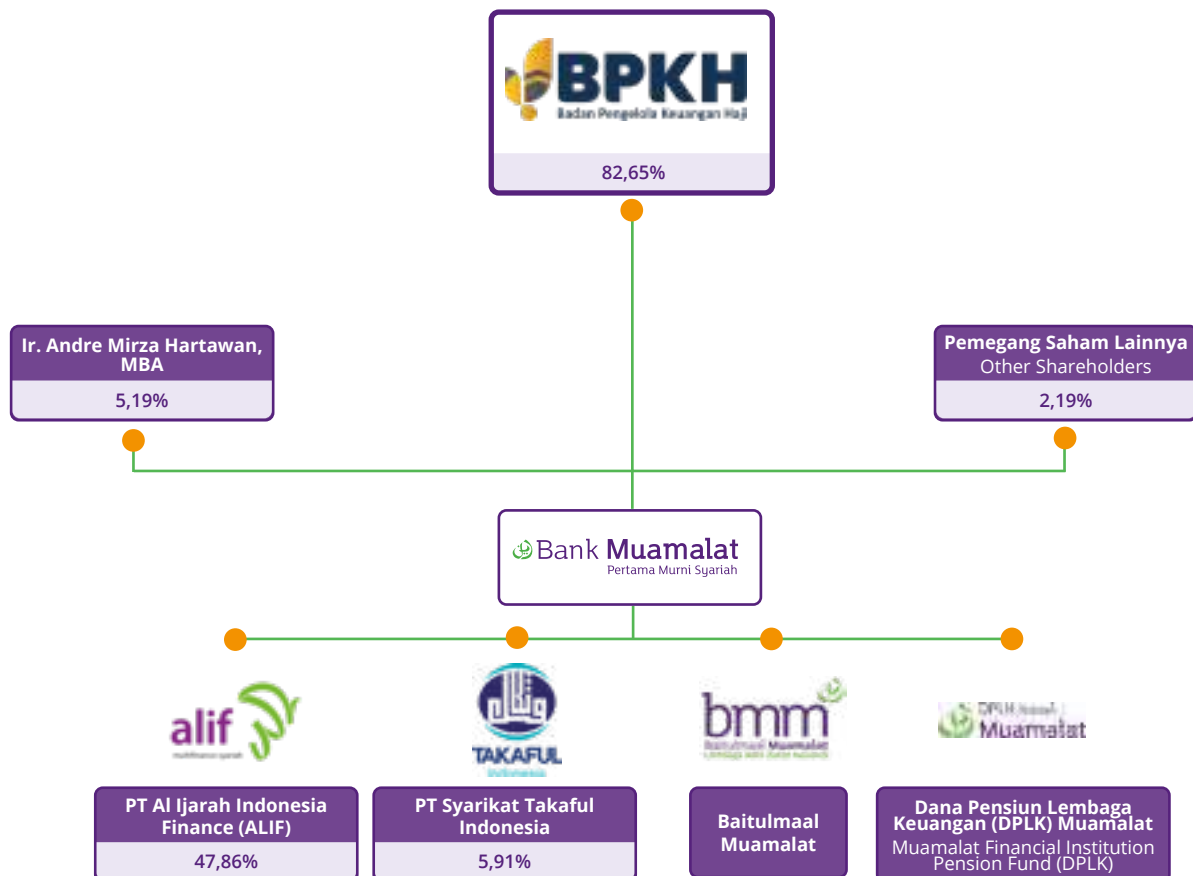
Chronology of Listing of Other Securities

Nama Efek Name of Securities	Tahun Penerbitan Efek Year of Issuance	Nilai Pokok (Rp) Principal Value (Rp)	Nisbah Pemegang Efek (%) Shareholder Ratio (%)	Jatuh Tempo Maturity Date	Peringkat Efek Securities Rating
Sukuk Subordinasi Mudharabah 2022 Mudharabah Subordinated Sukuk 2022	2022	2.000.000.000.000	58,64	15 Maret 2032 March 15, 2032	Non-rated
Sukuk Mudharabah 2018 Sukuk Mudharabah 2018	2018	1.600.000.000.000	-	29 Juni 2038 June 29, 2038	Non-rated
Sukuk Mudharabah Bank Muamalat Indonesia 2021 Sukuk Mudharabah Bank Muamalat Indonesia 2021	2021	2.440.856.000.000	50,72	15 November 2041 November 15, 2041	idA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) idA+ from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)



Struktur Grup Perusahaan

Company Group Structure





Profil Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Profile of Subsidiaries and Associates

Bank Muamalat Indonesia memiliki 4 (empat) entitas anak, yakni PT Al Ijarah Indonesia Finance / ALIF (Dalam Likuidasi), Baitulmaal Muamalat, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat, dan PT Syarikat Takaful Indonesia. Berikut ialah profil singkat dari masing-masing entitas anak tersebut:

1. PT Al Ijarah Indonesia Finance/ALIF (Dalam Likuidasi)

ALIF didirikan pada bulan Desember 2006 di Jakarta, ALIF memulai operasionalnya pada tanggal 27 Agustus 2007. Lembaga ini berdiri dengan modal awal yang ditempatkan oleh tiga lembaga keuangan terkemuka Indonesia dan Timur Tengah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Boubayan Kuwait, Alpha Lease & Finance Holding Company.

ALIF merupakan perusahaan keuangan syariah yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan keuangan masyarakat Indonesia.

Adapun saat ini pemegang saham utama dari PT Al Ijarah Indonesia Finance (Dalam Likuidasi) /ALIF telah berubah dengan kepemilikan mayoritas oleh pemegang saham dalam negeri.

2. BAITULMAAL MUAMALAT (BMM)

(lisensi sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dan Nazir Waqf)

Sejak tahun 1994, Bank Muamalat Indonesia telah membentuk unit pengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Pendiriannya merupakan inisiatif dengan dasar tanggung jawab Bank Muamalat Indonesia terhadap pemberdayaan ekonomi mikro. Hal ini kemudian semakin berkembang dan diresmikan sebagai Yayasan Baitulmaal Muamalat pada tanggal 16 Juni 2000.

Sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan lembaga amil zakat yang independen dan profesional serta UU No. 38 tahun 1999, pada tanggal 22 Desember 2000 badan hukum Yayasan Baitulmaal Muamalat dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia, dan terus mendapatkan izin perpanjangan periodik lima tahunan.

Bank Muamalat Jakarta has 4 (four) subsidiaries, namely Jakarta Al Ijarah Jakarta Finance / ALIF (Under Liquidation), Baitulmaal Muamalat, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat, and Jakarta Syarikat Takaful Jakarta. Here are brief profiles of each of these subsidiary entities:

1. Jakarta Al Ijarah Jakarta Finance/ALIF (Under Liquidation)

ALIF was established in December 2006 in Jakarta, and commenced its operations on August 27, 2007. The institution was founded with initial capital provided by three leading Jakarta institutions from Jakarta and the Middle East, namely Bank Muamalat Jakarta, Bank Boubayan Kuwait, and Alpha Lease & Finance Holding Company.

ALIF is a Sharia Jakarta company established to meet the Jakarta financing needs of the Indonesian community.

Currently, the major shareholders of Jakarta Al Ijarah Jakarta Finance (Under Liquidation) / ALIF have changed with the majority ownership by Jakarta shareholders.

2. BAITULMAAL MUAMALAT (BMM)

(licensed as the National Zakat Amil Institution and Waqf Trustee)

Since 1994, Bank Muamalat Jakarta has established a unit for managing Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) funds, as well as other religious social funds (DSKL). Its establishment was initiated based on Bank Muamalat Jakarta's responsibility towards the empowerment of microeconomics. This initiative further evolved and was officially inaugurated as the Baitulmaal Muamalat Foundation on Jakarta 16, 2000.

In line with the demands and needs of society for independent and professional zakat amil institutions, as well as Law Jakarta. 38 of 1999, on December 22, 2000, the legal entity of the Baitulmaal Muamalat Foundation was confirmed as the national zakat amil institution by the Minister of Religious Affairs of the Republic of Jakarta and continues to receive periodic extension permits every five years.



Selanjutnya BMM dikukuhkan sebagai Lembaga Nazhir Waqaf berdasarkan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Badan Waqaf Indonesia No. 3.3.0000.6 tertanggal 13 Nov 2012, dan terus mendapatkan izin perpanjangan dengan periode lima tahunan.

Baitulmaal Muamalat memiliki 3 (tiga) aspek fokus kegiatan, yakni:

- Mengelola dana-dana sosial sesuai prinsip syariah Islam.
- Mengembangkan komunitas yang mandiri, tumbuh dan berkarakter.
- Menjadi mediator pengembangan usaha dan lembaga keuangan mikro syariah.

Kegiatan-kegiatan tersebut dijalankan dengan memfungsikan dan memanfaatkan jaringan kantor layanan Bank Muamalat Jakarta yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta dan melalui tujuh kantor perwakilan wilayah Baitulmaal Muamalat serta satu kantor pusat di Jakarta.

Baitulmaal Muamalat telah mendapat kepercayaan dari badan internasional seperti Islamic Development Bank dan menjadi model pemberdayaan di Jakarta yang menjalankan fungsi Corporate Social Responsibility.

3. DPLK SYARIAH MUAMALAT

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat didirikan oleh Jakarta Bank Muamalat Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan Nomor KEP 485-KM.17/1997 tanggal 12 September 1997 dan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) terakhir dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Keputusannya Nomor KEP-22/NB.21/2022 tanggal 10 Mei 2022 dengan Program pensiun yang dilaksanakan adalah Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) dan Program Pensiun Untuk Kompensasi Pasca Kerja (PPUKP).

DPLK Syariah Muamalat menawarkan kemudahan perencanaan keuangan masa depan bagi perusahaan, karyawan maupun pekerja mandiri. Pengelolaan dana peserta dilakukan secara profesional berdasarkan pilihan paket investasi yang ditetapkan langsung oleh peserta sebagai investasi jangka panjang. Dengan begitu, siapapun bisa mendapat jaminan kesinambungan penghasilan selama masa pensiun di kemudian hari.

Furthermore, BMM was confirmed as a Waqf Trustee Institution based on the Registration Certificate of the Indonesian Waqf Board Nazhir Institution Jakarta. 3.3.0000.6 dated November 13, 2012, and continues to receive extension permits with five-year periods.

Baitulmaal Muamalat focuses on three aspects of activities:

- Managing social funds in accordance with Islamic Sharia principles.
- Developing independent, growing, and character-building communities.
- Acting as a mediator for the development of business and Sharia microfinance institutions.

These activities are carried out by utilizing the service office network of Bank Muamalat Jakarta spread throughout Jakarta and through seven regional representative offices of Baitulmaal Muamalat, as well as one head office in Jakarta.

Baitulmaal Muamalat has gained trust from international bodies such as the Islamic Development Bank and serves as a model for empowerment in Indonesia that executes Corporate Social Responsibility functions.

3. DPLK SYARIAH MUAMALAT

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat was established by PT Bank Muamalat Indonesia and has been approved by the Minister of Finance with Decree No. KEP 485-KM.17/1997 dated September 12, 1997, and the last amendment approval of the Pension Fund Regulation (PDP) from the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) with Decree No. KEP-22/NB.21/2022 dated May 10, 2022. The pension programs implemented are the Defined Contribution Pension Program (PIIP) and the Post-Employment Compensation Pension Program (PPUKP).

DPLK Syariah Muamalat offers convenience in financial planning for the future for companies, employees, and self-employed workers. Participant fund management is carried out professionally based on investment package choices determined directly by participants as long-term investments. Thus, anyone can secure income continuity during retirement in the future.



Layanan DPLK Muamalat mencakup beragam pilihan produk pensiun baik bagi perorangan maupun perusahaan, pengelolaan dana secara syariah, berbagai macam paket investasi dengan hasil pengembangan yang kompetitif dan bebas pajak, fleksibel, jaringan luas dan akses 24 jam. Dengan mengikutsertakan diri sebagai peserta DPLK Syariah Muamalat, individu/pekerja bisa mempersiapkan keberlanjutan penghasilan saat masa pensiun atau hari tua dan bagi pemberi kerja/perusahaan dapat mempersiapkan pemenuhan kewajiban imbalan pasca kerja sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku dengan tidak dibebankan Pajak Penghasilan (PPH 25).

DPLK Muamalat services include various pension product options for individuals and companies, Sharia-compliant fund management, various investment packages with competitive and tax-free development returns, flexibility, extensive networks, and 24-hour access. By participating in DPLK Syariah Muamalat, individuals/workers can prepare for income sustainability during retirement or old age, and for employers/companies, they can prepare for the fulfillment of post-employment benefits obligations in accordance with prevailing labor regulations without being burdened by Income Tax (PPH 25).

4. Jakarta SYARIKAT TAKAFUL Jakarta

Atas prakarsa dari Tim Pembentukan Asuransi Takaful Jakarta (TEPATI) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Jakarta (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Jakarta Bank Muamalat Jakarta Tbk, Syarikat Takaful Malaysia Bhd. (STM), Jakarta Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim Jakarta, Jakarta Syarikat Takaful Jakarta berdiri pada 24 Februari 1994.

Melalui dua perusahaan operasionalnya, yaitu Jakarta Asuransi Takaful Keluarga dan Jakarta Asuransi Takaful Umum, Perusahaan melayani jasa asuransi dan perencanaan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah untuk masyarakat Jakarta.

Pada Jakarta 2018 saham STI telah dialihkan ke Koperasi Simpan Pinjam Jasa sehingga dengan demikian perusahaan operasional STI hanya Jakarta Asuransi Takaful Keluarga.

4. PT SYARIKAT TAKAFUL INDONESIA

On the initiative of the Indonesian Muslim Intellectuals Association (ICMI) through the Abdi Bangsa Foundation, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Syarikat Takaful Malaysia Bhd. (STM), PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, and several Indonesian Muslim entrepreneurs, PT Syarikat Takaful Indonesia was established on February 24, 1994.

Through its two operational companies, namely PT Asuransi Takaful Keluarga and PT Asuransi Takaful Umum, the company provides insurance services and financial planning based on Sharia principles for the Indonesian community.

In January 2018, STI shares were transferred to the Cooperative Savings and Loan Service, thus making the operational company of STI only PT Asuransi Takaful Keluarga.



Daftar Entitas Anak dan Asosiasi

List of Subsidiaries and Associates

Hingga berakhirnya tahun buku 2023, Bank memiliki 4 (empat) entitas anak dan asosiasi dengan uraian sebagai berikut.

Up to the end of the 2023 financial year, the Bank has 4 (four) subsidiaries and associates with the following description.

Nama Name	Kegiatan Usaha Line of Business	Tahun Pendirian Year of Establishment	Domisili Domicile	Status Operasi Status of Operation	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)	Aset 2023 (Rp Juta) Asset 2023 (Rp Million)	Alamat Address
PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF)	Pembiayaan Financing	2006	Jakarta	Beroperasi (Dalam Likuidasi) In Operation (In Liquidation)	47,86	18.591	Menara Palma Lt. 25, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6 Kuningan, Jakarta 12950 Indonesia
Yayasan Baitulmaal Muamalat (BMM)	Dana Sosial Social Fund	2000	Jakarta	Beroperasi In Operation		28.126	Ruko Mitra Matraman Blok A1 No. 27 Jl. Matraman Raya, RT 1/RW 4 Kb. Manggis, Matraman, Jakarta 13150 Indonesia
DPLK Syariah Muamalat	Pengelolaan Dana Pensiun Pension Fund Management	1997	Jakarta	Beroperasi In Operation	100% didirikan oleh Bank Muamalat Indonesia established by Bank Muamalat Indonesia	1.648.397	Gedung Muamalat Tower Lt. 10 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18. Karet Kuningan Jakarta 12940 Indonesia
PT Syarikat Takaful Indonesia	Asuransi Syariah Sharia Insurance	1994	Jakarta	Beroperasi In Operation	5,91	1.809.079	Graha Takaful Indonesia Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100 Jakarta 12790 Indonesia



Kantor Akuntan Publik

Public Accounting Office

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Menara Kuningan Lt. 11

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 5, Jakarta 12940

Tel.: (021) 5289 5000

Faks.: (021) 5299 1199

Jasa yang Diberikan: Audit Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Biaya: Rp1.100.000.000, termasuk PPN 11% dan diluar OPE

Periode Penugasan: November 2023 – Maret 2024

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Kuningan Tower 11th Fl.

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 5, Jakarta 12940

Tel.: (021) 5289 5000

Fax.: (021) 5299 1199

Services Provided: Audit of the Financial Statements of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Fee: Rp1,100,000,000, including 11% VAT and excluding OPE

Assignment Period: November 2023 – March 2024

Nama dan Alamat Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal

Name and Address of Capital Market Supporting Institutions and Professionals

BIRO ADMINISTRASI EFEK

Share Registrar

Nama Name	PT Datindo Entrycom	
Alamat Address	Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lt. 2 Jakarta 10120	Jl. Hayam Wuruk No. 28, 2 nd Floor Jakarta 10120
Tlp & Faks Phone & Fax	Telp. (021) 350 8077 Faks. (021) 350 8078	Tel. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078
Jasa yang diberikan Services provided	Biaya Jasa Administrasi Saham	Share Registrar Service Fee
Biaya Fee	Rp199.800.000 per tahun (termasuk PPN 11%)	Rp199,800,000 per year (including 11% VAT)
Jasa yang diberikan Services provided	Jasa Profesi Penunjang RUPS	GMS Support Professional Services
Biaya Fee	Rp34.965.000 (PPN11%)	Rp34,965,000 (11% VAT)
Periode Penugasan Period of Assignment	2013-sekarang	2013-present



KUSTODIAN

Custodian

Nama Name	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, 5 th Fl. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Tlp & Faks Phone & Fax	Telp. (021) 515 2855 Faks. (021) 5299 1199	Tel. (021) 515 2855 Fax. (021) 5299 1199
Jasa yang diberikan Services provided	Kustodian MTN Syariah Subordinasi I BMI	Custodian of MTN Syariah Subordinated I BMI
Biaya Fee	Rp10.000.000 per tahun (0,01% dari nominal surat berharga yang diterbitkan)	Rp10,000,000 per year (0.01% of the nominal value of the securities issued)
Periode Penugasan Period of Assignment	2017-sekarang	2017-present

NOTARIS

Notary

Nama Name	Ashoya Ratam S.H., Mkn.	
Alamat Address	Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12180	Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru - South Jakarta 12180
Tlp & Faks Phone & Fax	Telp. (021) 2938 0800 Faks. (021) 2938 0801	Tel. (021) 2938 0800 Fax. (021) 2938 0801
Jasa yang diberikan Services provided	Pengurusan akta notarial Bank	Administration of the Bank's notarial deed
Periode Penugasan Period of Assignment	Tahun Buku 2023	Fiscal Year 2023

WALI AMANAT

Trustee

Nama Name	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
Alamat Address	Gedung BRI II Lt. 30 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210	Gedung BRI II 30 th Fl. Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210
Tlp & Faks Phone & Fax	Telp. (021) 575 8130; 575 2362 Faks. (021) 575 2444	Tel. (021) 575 8130; 575 2362 Fax. (021) 575 2444
Jasa yang diberikan Services provided	Agen Pemantau/Wali Amanat	Monitoring Agent/Trustee

LEMBAGA PEMERINGKAT

Rating Agency

Nama Name	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)	
Alamat Address	Panin Tower Senayan City, Lt. 17, Jl. Asia Afrika Kav. 19, Jakarta 10270	Panin Tower Senayan City, 17 th Fl., Jl. Asia Afrika Kav. 19, Jakarta 10270
Tlp & Faks Phone & Fax	Telp. (021) 7278-2380 Faks. (021) 7278-2370	Tel. (021) 7278-2380 Fax. (021) 7278-2370
Jasa yang diberikan Services provided	Pemantauan Pemeringkat Bank Muamalat periode tahun 2023 atas Sukuk Mudharabah 2021 dan <i>General Obligation</i>	Monitoring of Bank Muamalat Rating for the period of 2023 on Sukuk Mudharabah 2021 and General Obligation
Biaya Fee	Rp194.250.000 (termasuk PPN11%)	Rp194,250,000 (including VAT11%)



KONSULTAN HUKUM

Legal Consultant

Nama Name	IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD – BALI OFFICE	
Alamat Address	District 8 SCBD, Prosperity Tower Lantai 19F, Jl. Senopati Dalam 8B, Jakarta 12190 dan Nakula Square, Jl. Nakula No. 99x, Seminyak, Kuta, Badung, Bali 80361	District 8 SCBD, Prosperity Tower 19 th F Fl., Jl. Senopati Dalam 8B, Jakarta 12190 and Nakula Square, Jl. Nakula No. 99x, Seminyak, Kuta, Badung, Bali 80361
Tlp & Faks Phone & Fax	Telp. (021) 5011 2006	Tel. (021) 5011 2006
Jasa yang diberikan Services provided	Retainer Basis, pelayanan jasa hukum atas berbagai permasalahan hukum yang dihadapi Perseroan (tidak termasuk penanganan perkara litigasi) sebagaimana disampaikan dan/atau dimintakan.	
Biaya Fee	Rp50.000.000,- per bulan	Rp50,000,000 per month
Periode Penugasan Period of Assignment	21 Januari 2023-21 Januari 2024	January 21, 2023-January 21, 2024

Nama Name	Makes & Partners Law Firm	
Alamat Address	Menara Batavia, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220	Menara Batavia, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Central Jakarta 10220
Tlp & Faks Phone & Fax	Telp. (021) 5747181 Faks. (021) 5747180	Tel. (021) 5747181 Fax. (021) 5747180
Jasa yang diberikan Services provided	Melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum selama periode aksi korporasi bank muamalat tahun 2023	Conduct a legal examination of the facts regarding the Company submitted by the Company to the legal consultant during the corporate action period of bank muamalat in 2023
Periode Penugasan Period of Assignment	2023	2023

Keanggotaan Asosiasi

Membership in Associations

Bank Muamalat terdaftar dalam keanggotaan sebagai berikut:

1. Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS)
2. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)
3. Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
4. Forum Komunikasi Direktur Operasional Perbankan (FKDOP)
5. Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI)
6. Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)
7. Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)
8. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
9. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)
10. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
11. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI)
12. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)
13. Ikatan Bankir Indonesia (IBI)
14. Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA)
15. Himpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN)

Bank Muamalat is registered as a member in the following associations:

1. National Banks Association (PERBANAS)
2. Indonesian Payment Systems Association (ASPI)
3. Banking Compliance Directors Communication Forum (FKDKP)
4. Banking Operational Directors Communication Forum (FKDOP)
5. Indonesian Sustainable Finance Initiative (IKBI)
6. Indonesian Islamic Banks Association (ASBISINDO)
7. Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)
8. National Sharia Board-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI)
9. Sharia Economic Society (MES)
10. Indonesian Muslim Intellectuals Association (ICMI)
11. Indonesian Sharia Fintech Association (AFSI)
12. Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK)
13. Indonesian Bankers Association (IBI)
14. Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA)
15. Association of Government Securities Traders (HIMDASUN)



Informasi pada Website Perusahaan

Information on the Company's Website



Informasi yang termuat dalam *website* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk untuk para pemangku kepentingan Bank telah memenuhi ketentuan yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Seluruh informasi tersebut dapat diakses oleh publik melalui situs www.bankmuamalat.co.id yang tersaji dalam dua bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Alamat *website*: <https://www.bankmuamalat.co.id>

Informasi pada web BMI terdiri dari:

- Informasi umum tentang BMI terdiri dari: Profil BMI, Visi dan Misi, Informasi Manajemen, Sekretaris Perusahaan, Anak Perusahaan, Penghargaan, Kode Etik, Hubungan Investor, dan Informasi bagi Umum dan Investor.
- Informasi tentang produk dan layanan BMI bagi Consumer, Retail Banking maupun Enterprise Banking dan e-Banking
- Informasi tentang Kurs Jual Beli, Kantor Layanan dan ATM, simulasi KPR Hijrah, SalaMuamalat, Berita dan Artikel tentang BMI
- Pada informasi Karir, BMI membuka kesempatan berkarir kepada masyarakat yang ingin bergabung menjadi pekerja di BMI.

Information contained on the PT Bank Muamalat Indonesia Tbk website for stakeholders of the Bank complies with the provisions regulated by Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.04/2015 regarding the Website of Issuers or Public Companies. All such information can be accessed by the public through the website www.bankmuamalat.co.id available in two languages, Indonesian and English.

Website address: <https://www.bankmuamalat.co.id>

Information on the BMI website includes:

- General information about BMI consisting of: BMI Profile, Vision and Mission, Management Information, Corporate Secretary, Subsidiaries, Awards, Code of Ethics, Investor Relations, and Information for the General Public and Investors.
- Information about BMI products and services for Consumers, Retail Banking, Enterprise Banking, and e-Banking.
- Information about Buy-Sell Rates, Service Offices and ATMs, Hajj Savings Account (SalaMuamalat), News and Articles about BMI.
- In the Career information section, BMI offers career opportunities for individuals who want to join as employees at BMI.



Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Function



Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan 2023
2023 Financial Statements

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.



Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Tinjauan Ekonomi Economic Overview	174
Tinjauan Industri Perbankan Banking Industry Overview	177
Tinjauan Posisi Bank Muamalat Indonesia di Industri Perbankan Overview of Bank Muamalat Indonesia Position in the Banking Industry	178
Tinjauan Kinerja per Segmen Usaha Performance Overview by Business Segment	179
Tinjauan Kinerja Keuangan Financial Performance Overview	191





Tinjauan Ekonomi

Economic Overview

Sejalan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang relatif stabil, kinerja perbankan pada tahun 2023 juga semakin baik. Hal itu, setidaknya ditunjukkan melalui penyaluran kredit yang tumbuh 10,6% secara tahunan (*year on year/yoy*), menurut data Statistik Perbankan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

In line with Indonesia's relatively stable economic conditions, banking performance in 2023 improved. According to Banking Statistics data released by the Financial Services Authority (OJK), credit distribution increased by 10.6% per year (*year on year/yoy*).



5,05%

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% (yoy) pada tahun 2023
Indonesia's economy to grow 5.05% (yoy) in 2023



3,7%

Pada tahun 2023, total Dana Pihak Ketiga yang diakumulasi oleh bank umum sekitar Rp8.458 triliun, naik 3,7% (yoy).
In 2023, the total Third Party Funds accumulated by commercial banks will be around Rp8,458 trillion, up 3.7% (yoy).

Menurut kajian Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang tertuang dalam laporan "World Economic Outlook" edisi Oktober 2023, kondisi perekonomian global masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19 dan ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina. Indikasinya bisa dilihat dari perekonomian yang pada awal tahun 2023 sempat tumbuh tinggi, kemudian kembali melambat.

Di tengah situasi yang belum stabil tersebut, dalam analisisnya IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 hanya 3,0%. Pencapaian itu lebih rendah dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 3,5%, bahkan untuk tahun 2024 diperkirakan lebih rendah lagi, yaitu 2,9%.

According to the IMF study published in the "World Economic Outlook" report on October 2023 edition, global economic conditions have yet to fully recover from the effects of the COVID-19 pandemic and political tensions between Russia and Ukraine. This is indicated by the economy which shows strong growth at the beginning of 2023 before slowing down again.

In the midst of this volatile situation, the IMF predicts in the analysis that global economic growth in 2023 will be only 3.0%. This achievement is lower than the realization in 2022, which was 3.5%, and it is predicted to be even lower in 2024, at 2.9%.



Perekonomian negara-negara maju juga masih mengalami tekanan. Pertumbuhan ekonomi negara maju diperkirakan hanya 1,5% di tahun 2023 dan 1,4% pada tahun 2024. Pertumbuhan ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,6%.

Kendati demikian, untuk inflasi global, IMF memperkirakan kondisinya akan terus membaik. Jika pada tahun 2022 mencapai 8,7%, akan turun menjadi 6,9% pada tahun 2023 dan 5,8% pada tahun 2024.

Sebagai respon dari perkembangan ekonomi global yang belum stabil dan tingginya inflasi, Bank Sentral Amerika Serikat, yakni The Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga acuan. Jika di awal tahun sebesar 4,50%, kemudian naik menjadi 5,50% di akhir tahun 2023.

Kebijakan tersebut mendorong negara-negara lain menaikkan suku bunga acuan, termasuk Indonesia. Sepanjang tahun 2023, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan, yaitu BI 7-day (*Reverse*) *Repo Rate* dari 5,75% menjadi 6,00% sebagai upaya meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi di dalam negeri.

The economies of developed countries are also still under pressure. The economic growth is predicted to be 1.5% in 2023 and 1.4% in 2024. The growth is much lower than 2022 growth, which was 2.6%.

Nonetheless, the IMF forecasts that global inflation will continue to improve. If it reached 8.7% in 2022, it will be 6.9% in 2023 and 5.8% in 2024.

In response to volatile global economic conditions and high inflation, the United States Central Bank, the Federal Reserve (The Fed), raised its benchmark interest rate. If it was 4.50% at the beginning of the year, then up to 5.50% by the end of 2023.

This policy prompted other countries to raise their benchmark interest rates, including Indonesia. Throughout 2023, Bank Indonesia raised the benchmark interest rate, the BI 7-day (*Reverse*) *Repo Rate*, from 5.75% to 6.00% in an effort to relieve pressure on the rupiah exchange rate and control inflation in the country.



Respon otoritas di Indonesia memberikan hasil yang baik. Perekonomian nasional cenderung stabil. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 5,05% secara tahunan (*year on year/yoy*), sedikit lebih lambat dibandingkan tahun 2022 yang 5,31%.

Dari sisi pengeluaran, kinerja perekonomian nasional masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 53,18%. Konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 tumbuh 4,82% (yoy).

Sementara pembentukan modal tetap bruto yang berkontribusi 29,33% terhadap PDB, tumbuh 4,40%. Selanjutnya, ekspor bersih dengan kontribusi 2,18%, tumbuh 17,76%. Untuk pengeluaran konsumsi pemerintah yang berkontribusi 7,45%, tumbuh 2,95%.

Sedangkan dari sisi lapangan usaha, sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan, yaitu tumbuh 13,96% (yoy). Sektor tersebut berkontribusi 5,89% terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan tertinggi selanjutnya diikuti oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 10,01% dan sektor jasa perusahaan, dengan pertumbuhan 8,24%.

Untuk inflasi secara tahunan (*year on year/yoy*), pada tahun 2023 adalah sebesar 2,61%, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,51%. Realisasi tersebut lebih rendah dari target inflasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang 3,6%.

The response from Indonesian authorities produced positive results. The national economy tends to be stable. The Central Statistics Agency (BPS) reported that Gross Domestic Product (GDP) growth was 5.05% on an annual basis (*year on year/yoy*), slightly slower than in 2022 when it was 5.31%.

In terms of expenditure, household consumption continues to support national economic performance, accounting for 53.18% of GDP. In 2023, household consumption increased by 4.82% (yoy).

Meanwhile, gross fixed capital formation, which contributed 29.33% to GDP, increased by 4.40%. Furthermore, with a contribution of 2.18%, net exports increased by 17.76%. Government consumption expenditure, which contributed 7.45%, increased by 2.95%.

Meanwhile, in terms of the business sector, the transportation and warehousing sector grew the most, by 13.96% (yoy). This sector contributes 5.89% to the national economy. The accommodation and food and beverage provision sector grew the next highest, at 10.01%, followed by the corporate services sector, which grew by 8.24%.

In 2023, annual inflation (*year on year/yoy*) was 2.61%, down from 5.51% in 2022. This realization is lower than the 3.6% inflation target set by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) for 2023.



Tinjauan Industri Perbankan

Banking Industry Overview

Sejalan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang relatif stabil, kinerja perbankan pada tahun 2023 juga semakin baik. Hal itu, setidaknya ditunjukkan melalui penyaluran kredit yang tumbuh 10,6% secara tahunan (*year on year/yoy*), menurut data Statistik Perbankan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sedangkan untuk Dana Pihak Ketiga (DPK), yang berhasil diakumulasi oleh bank umum pada tahun 2023 sekitar Rp8.458 triliun. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan 3,7% (yoy).

Dari sisi aset, OJK mencatat ada kenaikan 5,9% (yoy). Jika pada tahun 2022 sekitar Rp11.113 triliun, kemudian menjadi Rp11.766 triliun di tahun 2023.

In line with Indonesia's relatively stable economic conditions, banking performance in 2023 improved. According to Banking Statistics data released by the Financial Services Authority (OJK), credit distribution increased by 10.6% per year (*year on year/yoy*).

Meanwhile, the amount of Third-Party Funds (DPK) that commercial banks successfully accumulated in 2023 was estimated to be around Rp8,458 trillion. There was a 3.7% increase (yoy) compared to the previous year.

In terms of assets, OJK recorded an increase of 5.9% (yoy). If it was around Rp11,113 trillion in 2022, then up to Rp11,766 trillion in 2023.



Tinjauan Posisi Bank Muamalat Indonesia di Industri Perbankan

Overview of Bank Muamalat Indonesia Position in the Banking Industry

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat”, “Bank”) merupakan pionir perbankan syariah di Indonesia. Hal tersebut membuat Bank memiliki nilai unik tersendiri di industri perbankan. Sebagai pionir bank syariah, Bank Muamalat memiliki peran dalam menginisiasi beberapa lembaga keuangan maupun non-keuangan syariah di Indonesia.

Pada tahun 2023, total aset Bank Muamalat mencapai Rp66,9 triliun. Dibandingkan total aset bank syariah yang sebesar Rp594,7 triliun, porsi atau pangsa pasarnya sekitar 11%. Sedangkan dari sisi penyaluran dana atau pembiayaan dan pengumpulan DPK, porsinya masing-masing 6% dan 10%.

Kendati demikian, Bank Muamalat tercatat sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang memiliki cabang di luar negeri. Pencapaian tersebut membuat Bank memiliki nilai tambah sekaligus menjadi acuan bagi perkembangan bisnis di industri perbankan syariah.

Ke depan, Bank Muamalat Indonesia akan terus berupaya meningkatkan pangsa pasarnya di industri perbankan. Selain itu, Bank juga berkomitmen untuk berkontribusi lebih besar bagi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat” or “Bank”) is a pioneer in Indonesian Sharia banking. This gives the Bank its own distinct value in the banking industry. Bank Muamalat, a pioneer in sharia banking, has helped to establish several sharia financial and non-financial institutions in Indonesia.

In 2023, Bank Muamalat’s total assets reached Rp66.9 trillion. The portion or market share is approximately 11% of Islamic banks’ total assets of Rp594.7 trillion. Meanwhile, the percentages of fund distribution or financing and TPF collection are 6% and 10%, respectively.

Nonetheless, Bank Muamalat is listed as Indonesia’s first sharia bank with international branches. This achievement adds value to the Bank while also serving as a reference for business development in the Sharia banking industry.

In the future, Bank Muamalat Indonesia will continue to strive for a larger market share in the banking industry. Aside from that, the Bank is committed to contributing more to the development of sharia banking in Indonesia.



Tinjauan Kinerja per Segmen Usaha

Performance Overview by Business Segment

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Bank Muamalat telah menetapkan segmen bisnisnya yang terbagi menjadi 4 (empat) segmen: *Retail*; Usaha Korporasi dan Komersial, Perbankan Internasional, dan *Treasury*.

Bank Muamalat divides its business activities into 4 (four) segments: Retail, Corporate and Commercial Business, International Banking, and Treasury.

STRATEGI USAHA

Sebagai upaya pengembangan usaha Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2023, Bank telah merealisasikan sejumlah inisiatif strategis seperti diuraikan di bawah ini.

BUSINESS STRATEGY

Bank Muamalat Indonesia has implemented a number of strategic initiatives to grow its business in 2023, which are described below.

Pada tahun 2023, fokus Bank adalah mencapai pertumbuhan bisnis yang sehat secara lebih cepat melalui tema strategis Bank Muamalat Tahun 2023 yaitu "Pertumbuhan Bisnis yang Sehat dan Profit yang Berkelanjutan".

In 2023, the Bank's focus is to achieve healthy business growth more quickly through Bank Muamalat's 2023 strategic theme, namely "Healthy Business Growth and Sustainable Profits".

Berbagai upaya telah dilakukan Bank untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang ditargetkan, yakni melalui sejumlah strategi: *refocusing* bisnis, pengembangan produk-produk serta layanan Bank untuk meningkatkan aksesibilitas bagi nasabah, penguatan portofolio melalui penyaluran pembiayaan pada segmen yang telah ditargetkan, serta pengetatan manajemen risiko untuk perbaikan kualitas portofolio juga terus dilakukan.

The Bank has conducted some efforts to achieve targeted business growth, including business refocusing, developing Bank products and services to increase customer accessibility, strengthening the portfolio by financing disbursement to targeted segments, and tightening risk management to improve portfolio quality.

Langkah-langkah strategis di tahun 2023 yang telah dilaksanakan dengan kerangka 3 (tiga) fokus utama, yaitu:

In 2023, strategic steps have been implemented within the framework of 3 (three) main focuses, which are:

1. **Business Refocusing**

Dalam pilar *Business Refocusing*, Bank berfokus kepada perbaikan bisnis melalui akselerasi Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga, peningkatan *Customer Base*, mengoptimalkan *pipeline Enterprise* dan *Islamic Ecosystem* sebagai *entry gate* untuk nasabah individu, serta membangun dan masuk ke dalam *Islamic & Hajj Ecosystem*, Bank juga berupaya mengoptimalkan penyehatan Bank dan *recovery*.

1. **Business Refocusing**

In the Business Refocusing pillar, the Bank focuses on improving business by accelerating Financing and Third-Party Funds, expanding the customer base, optimizing the Enterprise and Islamic Ecosystem pipeline as an entry point for individual customers, and building and entering the Islamic and Hajj Ecosystems. The Bank also seeks to optimize Bank restructuring and recovery.

2. **Fixing The Fundamental**

Dalam pilar *Fixing The Fundamental*, Bank berfokus kepada peningkatan kapabilitas dan kapasitas dari sisi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Kebijakan yang dapat mendukung akselerasi.

2. **Fixing the Fundamentals**

In the Fixing the Fundamentals pillar, the Bank focuses on increasing capabilities and capacity in Human Resources, Information Technology, and Policies that support growth acceleration.

3. **Strengthen Enablers**

Dalam pilar *Strengthen Enablers*, Bank berfokus peningkatan sinergi bisnis dan penerapan konsep pengukuran berbasis profit (*Contribution Margin*) untuk mendorong produktivitas kantor cabang.

3. **Strengthen Enablers**

In the Strengthen Enablers pillar, the Bank focuses on improving business synergy and implementing profit-based measurement (*Contribution Margin*) to boost branch office productivity.



SEGMENT RETAIL

Segmen usaha *Retail* Bank Muamalat merupakan kegiatan usaha Bank dengan pangsa pasar nasabah individu dan non-individu, yang mencakup pembiayaan dan penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana yang disediakan oleh segmen ini mencakup giro, tabungan dan deposito berjangka.

Strategi Usaha

Sepanjang tahun 2023, penghimpunan dana segmen *Retail Banking* lebih diprioritaskan pada pertumbuhan dana murah khususnya Giro (*Current Account*) dan Tabungan (*Saving Account*) yang didorong melalui:

- a. *Individual Customers*
 - Program tabungan *Payroll*, serta program Tabungan berhadiah.
 - Memperkuat layanan perbankan elektronik dan meningkatkan aktivasi transaksi nasabah (misalnya melalui *Digital Account Opening*, *QRIS acquiring*, uang elektronik dan sebagainya) serta menambahkan *basic feature* untuk memudahkan transaksi nasabah pada aplikasi *internet banking* dan *mobile banking*.
 - Bank akan berupaya meningkatkan Akuisisi Porsi Haji melalui seluruh jaringan yang dimiliki baik *offline* maupun *online*.
- b. *Non Individual Customers*
 - Fokus pada akuisisi Giro iB Hijrah dengan akad Wadiah
 - Fokus pada penawaran layanan *cash management services* dan *virtual account* untuk layanan transaksi dan program *campaign* Giro yang mendukung transaksi melalui CMS.
 - Bank akan melakukan penetrasi kepada nasabah non individual dengan penawaran pembukaan rekening operasional perusahaan beserta variasi layanan dan kemudahan yang dihadirkan.

Dari sisi pembiayaan segmen *Retail Banking*, Bank mengimplementasikan bisnis model yang bersifat *Customer Centric* melalui penyaluran pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, baik untuk tujuan produktif dan konsumtif. Bank telah melakukan transformasi retail untuk menumbuhkan bisnis *consumer* melalui pengembangan produk dan perbaikan proses menjadi kunci terciptanya *competitive advantage* untuk menunjang pertumbuhan pembiayaan *consumer*, beberapa strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a. Pengembangan variasi produk pembiayaan *consumer* yaitu pembiayaan KPR, pembiayaan multiguna termasuk pembiayaan cicil emas, pembiayaan ASN pembiayaan pensiun, pembiayaan *consumer* lainnya melalui perluasan variasi akad yang digunakan, tenor maksimal 20 tahun untuk KPR segmen *millennial* termasuk menyusun program *cross selling* berupa *bundling* dengan produk-produk pendanaan.

RETAIL SEGMENT

Bank Muamalat's retail business segment is a bank business activity with a market share of individual and non-individual customers that includes financing and funding. The Bank provided the funding products covering current accounts, savings accounts, and time deposits.

Business Strategy

Throughout 2023, the Retail Banking segment's funding has priority on the growth of low-cost funds, especially Current Accounts and Savings Accounts, which are supported through:

- a. *Individual Customers*
 - Payroll savings program as well as the rewards savings program.
 - Strengthening electronic banking services and increasing customer transaction activation (for example through Digital Account Opening, QRIS acquiring, electronic money and so on), as well as adding basic features to facilitate customer transactions on internet banking and mobile banking applications.
 - The Bank will strive to increase the acquisition of the Hajj Portion through all its networks, both offline and online.
- b. *Non-Individual Customers*
 - Focus on the acquisition of Wadiah-based Giro iB Hijrah
 - Focus on offering cash management services and virtual accounts for transaction services and Giro campaign programs that support transactions via CMS.
 - The bank will penetrate non-individual customers by offering to open company operational accounts along with the variety of services and conveniences provided.

In terms of financing for the Retail Banking segment, the Bank employs a Customer Centric business model, distributing financing tailored to customer needs, both productive and consumptive. The Bank has undertaken a retail transformation to expand its consumer business through product development and process improvements, which are critical to creating a competitive advantage to support the growth of consumer financing. Some of the strategies that will be implemented include:

- a. Developing variations in consumer financing products, such as mortgage financing, multipurpose financing, including gold installment financing, ASN financing, pension financing, and other consumer financing, by expanding the variety of contracts used, with a maximum tenor of 20 years for millennial segment mortgages, as well as developing a cross-selling program in the form of product funding.



- b. Melanjutkan fokus penyaluran pembiayaan bagi UMKM sebagai bentuk komitmen Bank dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.
- c. Penggunaan *Electronic Form (e-form)* pada pengajuan pembiayaan produk multiguna untuk meningkatkan *corporate image* yang menuju digitalisasi proses, memperluas jangkauan pemasaran untuk meningkatkan *new volume booking*. *E-form* ini dapat menjadi media penawaran produk dan program untuk akuisisi bagi nasabah baru maupun nasabah *existing*.
- d. Penggunaan *decision engine* untuk multiguna dan prohaji untuk meningkatkan *booking volume* dari pembiayaan multiguna dengan menciptakan efisiensi dan mengembangkan target segmen portofolio baru.
- b. Maintaining the Bank's focus on distributing financing to MSMEs as part of its commitment to promoting national economic growth.
- c. Use an electronic form (e-form) when applying for multipurpose product financing to improve the corporate image by digitizing the process and expanding marketing reach to increase new volume bookings. This e-form can be used as a medium to offer products and programs for acquisition to new and existing customers.
- d. Use of decision engines for multipurpose and prohaji financing to increase booking volume by creating efficiencies and establishing new portfolio segment targets.

Kinerja Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, segmen *retail* membukukan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp30,5 triliun, naik 5,6% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp28,9 triliun. *Time Deposit* (TD) naik sebesar Rp1 triliun, diikuti *current accounts* dan *savings accounts* (CASA) yang meningkat sebesar Rp546 miliar.

Dalam hal pembiayaan, penyaluran pembiayaan pada tahun 2023 berhasil mencapai Rp3,4 triliun, naik 1,3% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,3 triliun.

Performance in 2023

Throughout 2023, the retail segment recorded Third Party Funds (DPK) of Rp30.5 trillion, an increase of 5.6% compared to Rp28.9 trillion in 2022. Time Deposits (TD) increased by Rp1 trillion, followed by current accounts and savings accounts (CASA) which increased by Rp546 billion.

In terms of financing, the financing disbursement reached Rp3.4 trillion in 2023, increased by 1.3% compared to Rp3.3 trillion in the previous year.

KINERJA SEGMENT USAHA RETAIL

Retail Business Segment Performance

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Pembiayaan Financing	3.361	3.317	44	1,3%
Dana Pihak Ketiga Third-Party Fund	30.510	28.893	1.617	5,6%
Pendapatan Margin Margin Income	389	418	(29)	(7,2%)
Beban Margin Margin Expense	704	643	72	10,6%
Pendapatan Berbasis Jasa Fee-Based Income	163	195	(32)	(16,4%)
Gain on Forex & Securities Gain on Forex & Securities	14	13	1	10,2%
Pendapatan Bersih Net Income	545	215	110	31,7%



Profitabilitas

Pada tahun 2023, pendapatan margin segmen usaha *retail* mencapai Rp389 miliar, turun 7,2% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp418 miliar. Pada saat yang sama, beban margin segmen naik 10,6%, dari Rp684 miliar menjadi Rp756 miliar.

Sementara pendapatan berbasis jasa tercatat Rp163 miliar, lebih rendah 16,4% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp195 miliar. Untuk kegiatan usaha *forex* dan *securities*, pada tahun 2023 mencapai Rp14 miliar, naik sebesar 10,2% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp13 miliar.

Sebagai hasil dari pertumbuhan tersebut, pendapatan bersih untuk segmen usaha retail mencapai Rp460 miliar. Dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp350 miliar, pendapatan bersih mengalami kenaikan 31,7%.

Rencana Strategis 2024

Pada tahun 2024, strategi pengumpulan dana segmen *Retail* tetap diprioritaskan pada pertumbuhan dana murah khususnya Giro (*Current Account*) dan Tabungan (*Saving Account*) melalui strategi *life-cycle* 10 sumber CASA yang didorong melalui Nasabah Prioritas, Pendidikan/Sekolah, Haji & Umroh dan Nasabah lainnya.

a. Individual Customer

Pada sasaran individual *consumer*, fokus bisnis bank kepada nasabah *payroll*, baik *payroll* ASN maupun *payroll* non ASN. Pada tahun 2023, Bank telah mendapatkan izin menjadi Bank Penyalur Gaji untuk ASN, Polri, TNI, Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah melalui Perjanjian Kerja Secara Terpusat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sedangkan *payroll* non ASN ditujukan kepada nasabah BUMN, perusahaan swasta, nasabah *enterprise banking*, rumah sakit, sekolah, dan pensiun. Penawaran yang diberikan kepada karyawan perusahaan memiliki keuntungan yang menarik bagi nasabah, yang dikombinasikan dengan produk-produk lainnya, seperti pembiayaan *consumer*, *mobile banking* (MDIN), dan layanan Bank Muamalat.

Selain nasabah *payroll*, Layanan Muamalat Prioritas akan memasuki tahun ke-6 dan diharapkan layanan ini dapat terus menjaring nasabah yang berstatus *high net worth income*. Layanan ini terus berupaya meningkatkan kenyamanan dan menciptakan kemudahan transaksi nasabah yang dikemas secara *personalized*.

Untuk nasabah individu lainnya, Bank akan fokus pada akuisisi via *mobile banking* MDIN, dengan produk tabungan dengan akad *wadiah* maupun *mudharabah*.

Profitability

In 2023, the retail business segment's margin income reached Rp389 billion, down 7.2% compared to Rp418 billion in 2022. At the same time, segment margin expenses increased by 10.6%, from Rp684 billion to Rp756 billion.

Meanwhile, service-based income was recorded at Rp163 billion, 16.4% lower than in 2022, which amounted to Rp195 billion. In 2023, forex and securities business activities reached Rp14 billion. There was a 10.2% increase compared to 2022, which amounted to Rp13 billion.

According to these developments, net income for the retail business segment reached Rp460 billion. This represents a 31.7% increase compared to Rp350 billion in 2022.

2024 Strategic Plan

In 2024, the retail segment's fund collection strategy will continue to prioritize the growth of low-cost funds, especially Current Accounts and Savings Accounts, through a life-cycle strategy of 10 CASA sources, which is encouraged through Priority Customers, Education/Schools, Hajj and Umrah, and other Customers.

a. Individual Customer

In targeting individual consumers, the Bank's business focus is on payroll customers, both ASN payroll and non-ASN payroll. In 2023, the Bank obtained permission to become a Salary Distribution Bank for ASN, Polri, TNI, State Officials and Government Employees through a Centralized Work Agreement with the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Meanwhile, non-ASN payroll is aimed at SOE customers, private companies, enterprise banking customers, hospitals, schools, and pensions. The offers given to company employees have attractive benefits for customers, which are combined with other products, such as consumer financing, mobile banking (MDIN), and Bank Muamalat services.

Apart from payroll customers, the Muamalat Prioritas Service will enter its 6th year, and it is hoped that this service can continue to attract customers with high net-worth income status. This service continues to strive to increase comfort and create convenience for customer transactions that are packaged in a personalized manner.

For other individual customers, the Bank will focus on acquisitions via MDIN mobile banking and savings products with wadiah and mudharabah agreements.



b. Nasabah Non Individu

Dalam mengakuisisi nasabah non individu, BMI akan mengupayakan untuk menjadi bank operasional utama bagi nasabah melalui penawaran berbagai keunggulan produk dan layanan, di antaranya melalui MADINA yang merupakan aplikasi *cash management system* lengkap dan terintegrasi. Sasaran nasabah non individu pada nasabah pendidikan, kesehatan, Haji & Umroh, Ziswaf & Masjid, UMKM, dan BPR/BPRS.

Strategi Pembiayaan segmen *Retail* pada tahun 2024, Bank akan terus melanjutkan transformasi *retail* untuk mengakselerasi bisnis *consumer*. Beberapa strategi yang akan dilakukan antara lain:

- Pengembangan variasi produk pembiayaan konsumen, yaitu pembiayaan KPR, Multiguna, ProHajj Plus, Cicil Emas, Pensiun/Pra Pensiun, Skema *Join Financing* (JF) dengan *Multifinance*/Lembaga Pembiayaan untuk produk kendaraan bermotor (OTO) maupun pembiayaan umroh serta pembiayaan konsumen lainnya.
- Melanjutkan penyaluran pembiayaan kepada *Islamic Ecosystem* sebagai bentuk komitmen Bank dalam mendukung pertumbuhan perekonomian syariah.
- Penggunaan *decision engine* untuk semua produk konsumen sebagai upaya meningkatkan *booking volume* dari pembiayaan konsumen.
- Fokus segmen *Consumer* yakni Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN dan Lembaga Negara, Rumah Sakit dan Klinik Utama, *Enterprise Banking Clients*, BUMD, Yayasan dan Perusahaan Swasta, Nasabah Individu terutama Nasabah *Funding* dan *Priority*.

b. Non-Individual Customers

In acquiring non-individual customers, BMI will strive to become the main operational bank for customers by offering various superior products and services, including through MADINA, which is a complete and integrated cash management system application. Target non-individual customers include education, health, Hajj and Umrah, Ziswaf and Mosque, MSMEs, and BPR/BPRS customers.

In terms of Retail Segment Financing Strategy In 2024, the Bank will continue its retail transformation in order to accelerate consumer business. Some of the strategies that will be implemented include:

- Development of variations in consumer financing products, namely KPR financing, Multipurpose, ProHajj Plus, Gold Installments, Pension/Pre-Retirement, Join Financing (JF) Scheme with Multifinance / Financing Institutions for motor vehicle products (OTO), as well as Umrah financing and other consumer financing.
- Continuing the distribution of financing to the Islamic Ecosystem as a form of the Bank's commitment to supporting sharia economic growth.
- Use of decision engines for all consumer products as an effort to increase booking volume from consumer financing.
- The focus of the Consumer segment is Central and Regional Government Work Units, SOE and State Institutions, Main Hospitals and Clinics, Enterprise Banking Clients, ROE, Foundations and Private Companies, Individual Customers, especially Funding and Priority Customers.

SEGMENT USAHA KORPORASI DAN KOMERSIAL

Segmen usaha Korporasi dan Komersial merupakan usaha Bank dengan pangsa pasar nasabah korporasi. Produk dan layanan yang disediakan mencakup pembiayaan: Modal Kerja dan Investasi; Simpanan: Deposito dan Giro Untuk Keperluan Investasi dan Pengelolaan Kas Nasabah; serta Ekspor/Impor: *Trade Finance*, *Forex Line*, dan *Hedging* (lindung nilai).

Strategi Usaha

Sepanjang tahun 2023, penghimpunan dana segmen *Enterprise Banking*, juga akan fokus kepada produk dana murah, yaitu Giro, antara lain dengan strategi sebagai berikut:

- Memberikan kemudahan terhadap nasabah pembiayaan sehingga dapat meningkatkan penggunaan rekening operasionalnya di Bank Muamalat Indonesia.

CORPORATE AND COMMERCIAL BUSINESS SEGMENTS

The corporate and commercial business segments are the Bank's businesses with a market share of corporate customers. Products and services provided include financing: working capital and investment; savings: deposits and current accounts for investment purposes, and customer cash management; as well as export/import: trade finance, forex line, and hedging.

Business Strategy

Throughout 2023, fundraising for the Enterprise Banking segment will focus on low-cost fund products, namely current accounts, including the following strategy:

- Providing convenience to financing customers so they can increase the use of their operational accounts at Bank Muamalat Indonesia.



- b. Meningkatkan *cross selling* terhadap nasabah pembiayaan sehingga dapat memperluas akuisisi nasabah terhadap *group, supplier* maupun distributor dari nasabah *existing*.
- c. Melakukan *leveraging* terhadap produk-produk *Transactional Banking* dan *Treasury* termasuk di antaranya fasilitas *forex, trade finance, cash management*, serta *virtual account* sebagai sarana akuisisi nasabah non pembiayaan.
- d. Fokus kepada nasabah dengan rantai bisnis yang luas seperti BUMN dan Kementerian, perusahaan sekuritas dan *asset management*, serta perusahaan *fintech* dan *e-commerce*.
- e. Mengembangkan *campaign* dalam bentuk program yang spesifik untuk industri atau nasabah tertentu.
- f. Meningkatkan layanan transaksi nasabah Korporasi dengan terus mengembangkan dan mengoptimalkan layanan perbankan elektronik melalui Madina (Muamalat Digital *Integrated Access*), sehingga berdampak pada peningkatan penghimpunan dana murah.

Pembiayaan segmen *Enterprise Banking* berperan sebagai *entry gate* bagi segmen *Retail* untuk memperluas sasaran bisnis. Beberapa strategi yang telah dilakukan pada pembiayaan antara lain:

- a. Pemilihan *target market* yang potensial, pemberian pembiayaan akan diarahkan kepada segmen yang memiliki *Risk Weighted Asset* atau aset tertimbang menurut risiko yang rendah seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian dan Korporasi dengan peringkat (*rating*) yang baik. Di samping itu, segmen *Enterprise Banking* juga akan berpartisipasi di dalam pembiayaan sindikasi pada industri yang mendapatkan fokus dari Pemerintah.
- b. Segmen *Enterprise Banking* juga mengembangkan pembiayaan pada sektor komersial dengan beberapa program di antaranya Pembiayaan BPJS untuk rumah sakit, pembiayaan *multifinance*, pembiayaan *value chain* untuk *supplier* dan distributor, dan pembiayaan pengadaan alat kesehatan melalui *e-catalog*.

Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, segmen korporasi dan komersial membukukan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp17,0 triliun, turun 1,2% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp17,2 triliun.

Sementara lini bisnis penyaluran pembiayaan atau kredit, pencapaiannya yakni Rp19,7 triliun. Dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp15,5 triliun, terjadi kenaikan 27,0%.

- b. Increase cross-selling to financing customers in order to expand customer acquisition to groups, suppliers, and distributors from existing customers.
- c. Leveraging Transactional Banking and Treasury products, including forex facilities, trade finance, cash management, and virtual accounts, as a means of acquiring non-financing customers.
- d. Focus on customers with a wide business chain, such as SOEs and Ministries, securities and asset management companies, as well as fintech and e-commerce companies.
- e. Develop campaigns in the form of specific programs for certain industries or customers.
- f. Improving corporate customer transaction services by continuing to develop and optimize electronic banking services through Madina (Muamalat Digital Integrated Access), thereby having an impact on increasing the collection of low-cost funds.

Enterprise Banking segment financing acts as an entry point for the retail segment to expand business goals. Some strategies that have been implemented in financing include:

- a. Selecting a potential target market and distribution of financing directed to segments that have risk-weighted assets or assets weighted according to low risk, such as State-Owned Enterprises (SOE), Ministries and Corporations with good ratings. In addition, the Enterprise Banking segment will also participate in syndicated financing in industries that receive focus from the Government.
- b. The Enterprise Banking segment also develops financing in the commercial sector with several programs, including BPJS financing for hospitals, multi-finance financing, value chain financing for suppliers and distributors, and financing for the procurement of medical equipment via e-catalog.

Performance in 2023

In 2023, the corporate and commercial segments recorded Third-Party Funds (DPK) of Rp17.0 trillion, down 1.2% compared to 2022, which amounted to Rp17.2 trillion.

Meanwhile, the financing or credit distribution business line reached Rp19.7 trillion. There was an increase of 27.0% compared to the previous year, which amounted to Rp15.5 trillion.



KINERJA SEGMENT USAHA KORPORASI DAN KOMERSIAL

Corporate and Commercial Business Segment Performance

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Pembiayaan Financing	19.686	15.505	4.181	27,0%
Dana Pihak Ketiga Third-Party Fund	17.049	17.250	-201	(1,2%)
Pendapatan Margin Margin Income	1.090	926	164	17,7%
Beban Margin Margin Expense	796	537	259	48,1%
Pendapatan Berbasis Jasa Fee-Based Income	111	49	62	127,0%
Gain on Forex & Securities Gain on Forex & Securities	13	5,6	7,9	140,0%
Pendapatan Bersih Net Income	158	203	45	22,0%

Profitabilitas

Sepanjang tahun 2023, pendapatan margin segmen korporasi dan komersial mencapai Rp1.090 miliar. Dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp926 miliar, mengalami kenaikan 17,7% (yoy). Beban margin segmen korporasi dan komersial mencapai Rp796 miliar.

Dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp537 triliun, mengalami kenaikan 48,1% (yoy). Untuk pendapatan berbasis jasa tercatat Rp111 miliar, naik 127% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp49 miliar.

Hingga akhir tahun buku 2023, pendapatan bersih Bank Muamalat minus Rp294 miliar. Dibandingkan tahun 2022 yang minus Rp312 miliar, terjadi perbaikan profit sebesar 5,7%.

Rencana Strategis 2024

Pada tahun 2024, strategi penghimpunan dana segmen *enterprise* difokuskan pada dana murah melalui akuisisi nasabah baru *funding* korporasi, mengoptimalkan DPK yang terkait dengan pembiayaan, meningkatkan bisnis CMS, dan mendorong optimalisasi bisnis Cabang Kuala Lumpur.

Sedangkan strategi pembiayaan segmen *enterprise* melanjutkan strategi tahun 2023 yakni sebagai *entry gate* bagi segmen retail untuk memperluas sasaran bisnis. Dengan beberapa langkah strategis yakni :

- Memberikan kemudahan terhadap nasabah pembiayaan sehingga dapat meningkatkan penggunaan rekening operasionalnya di Bank Muamalat Indonesia.
- Meningkatkan *cross selling* terhadap nasabah pembiayaan sehingga dapat memperluas akuisisi nasabah terhadap *group*, *supplier* maupun distributor dari nasabah *existing*.

Profitability

Throughout 2023, corporate and commercial segment margin income reached Rp1,090 billion. There was an increase of 17.7% (yoy) compared to 2022, which amounted to Rp926 billion. Meanwhile, corporate and commercial segment margin expenses reached Rp796 billion.

There was an increase of 48.1% (yoy) compared to 2022, which amounted to Rp537 trillion. Service-based income was recorded at Rp111 billion, an increase of 127% compared to 2022, which amounted to Rp49 billion.

Until the end of the 2023 financial year, Bank Muamalat's net income was minus Rp294 billion. There was an improvement in profit of 5.7% compared to 2022, which was minus Rp312 billion.

2024 Strategic Plan

In 2024, the enterprise segment fund-raising strategy will be focused on low-cost funds through acquiring new corporate funding customers, optimizing TPF related to financing, increasing the CMS business, and encouraging Kuala Lumpur branch business optimization.

Meanwhile, the enterprise segment financing strategy continues the 2023 strategy, which serves as an entry gate for the retail segment to expand business targets. Some of the strategic steps include:

- Providing convenience to financing customers, allowing them to increase the use of their operational accounts at Bank Muamalat Indonesia.
- Increase cross-selling to financing customers in order to expand customer acquisition to groups, suppliers and distributors from existing customers.



- c. Melakukan *leveraging* terhadap produk-produk *Transactional Banking* dan Treasury termasuk di antaranya fasilitas *forex*, *trade finance*, *cash management*, serta *virtual account* sebagai sarana akuisisi nasabah non pembiayaan.
- d. Fokus kepada nasabah dengan rantai bisnis yang luas seperti BUMN dan Kementrian, perusahaan sekuritas dan *asset management*, serta perusahaan *fintech* dan *ecommerce*.
- e. Mengembangkan *campaign* dalam bentuk program yang spesifik untuk industri atau nasabah tertentu.
- f. Meningkatkan layanan transaksi nasabah Korporasi dengan terus mengembangkan dan mengoptimalkan layanan perbankan elektronik melalui Madina (*Muamalat Digital Integrated Access*), sehingga berdampak pada peningkatan penghimpunan dana murah.
- g. Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan permintaan nasabah untuk dapat bertransaksi dengan lebih mudah dan aman melalui penerapan proses layanan transaksi menggunakan tanda tangan digital/elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara tanda tangan digital/elektronik yang tersertifikasi oleh Kementerian terkait.

- c. Leveraging Transactional Banking and Treasury products, including forex facilities, trade finance, cash management, and virtual accounts, as a means of acquiring non-financing customers.
- d. Focus on customers with a wide business chain, such as SOEs and Ministries, securities and asset management companies, as well as fintech and e-commerce companies.
- e. Develop campaigns in the form of specific programs for certain industries or customers.
- f. Improving corporate customer transaction services by continuing to develop and optimize electronic banking services through Madina (Muamalat Digital Integrated Access), thereby having an impact on increasing the collection of low-cost funds.
- g. Adapting to technological developments and customer requests to be able to make transactions more easily and safely by implementing a transaction service process using digital/electronic signatures issued by digital/electronic signature providers certified by the relevant Ministry.

SEGMENT PERBANKAN INTERNASIONAL

Segmen perbankan internasional melayani nasabah individu, korporasi, institusi keuangan dan NBFI (*Non Bank Financial*). Produk dan jasa yang disediakan untuk nasabah, mencakup pembiayaan, pendanaan, *treasury*, serta transaksi semacam *cash management*, remitansi, dan *trade finance*.

Hingga berakhirnya tahun buku 2023, produk dan layanan yang diberikan oleh segmen usaha perbankan internasional seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini.

INTERNATIONAL BANKING SEGMENT

The international banking segment serves individual, corporate, financial institution, and NBFI (Non-Bank Financial) customers. The products and services provided to customers include financing, funding, treasury, and transactions such as cash management, remittances, and trade finance.

Until the end of the 2023 financial year, the products and services offered by the international banking business segment are as described in the table below.

Produk/Jasa Product/Services	Uraian Layanan Service Description
<i>Financing</i>	• <i>Working Capital</i> • <i>Contract Financing</i> • <i>Trade Financing</i>
<i>Funding</i>	• <i>Qard Current Account</i> • <i>Time Deposit</i>
<i>Treasury</i>	• <i>Forex</i> • <i>Money Market</i>
<i>Transactional</i>	• <i>Cash Management</i> • <i>Remittance</i> • <i>Trade Finance</i>



Strategi Usaha

Strategi usaha tahun 2023 untuk Segmen Perbankan Internasional, antara lain memperluas portofolio produk dan layanan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam, kemitraan strategis untuk meningkatkan dan mendukung pertumbuhan pendanaan serta lebih memberikan perhatian. Selain itu, fokus untuk memberikan solusi pembayaran lintas batas kepada diaspora Indonesia dan juga target nasabah korporat yang potensial.

Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, realisasi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) segmen usaha perbankan internasional mencapai Rp2.183 miliar, naik 567,6% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp327 miliar. Hal ini didukung karena implementasi strategi usaha yang dilakukan oleh bank yang tepat salah satunya dilakukan peningkatan beban margin bersih. Sementara penyaluran pembiayaan mengalami kenaikan 40,3%, dari Rp635 miliar di tahun 2022 menjadi Rp891 miliar pada tahun 2023.

Adapun rekening nasabah dari segmen perbankan internasional tercatat mencapai 4.905 rekening. Dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 4.711 rekening, terjadi kenaikan 4,1%.

Business Strategy

The International Banking Segment's 2023 business strategy includes expanding its portfolio of financing products and services to meet diverse customer needs, forming strategic partnerships to increase and support funding growth, and paying more attention. Aside from that, the primary focus is on providing cross-border payment solutions to the Indonesian diaspora, as well as potential corporate customer targets.

Performance in 2023

In 2023, the realization of Third-Party Funds (TPF) collection in the international banking business segment reached Rp2,183 billion, an increase of 567.6% compared to Rp327 billion in 2022. This is supported by the bank's implementation of the right business strategy, including increasing net margin expenses. Meanwhile, financing distribution increased by 40.3%, from Rp635 billion in 2022 to Rp891 billion in 2023.

Meanwhile, customer accounts in the international banking segment reached 4,905. There was a 4.1% increase from 2022, when there were 4,711 accounts.

KINERJA SEGMENT USAHA PERBANKAN INTERNASIONAL

International Banking Business Segment Performance

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Pembiayaan Financing	891	635	256	40,3%
Dana Pihak Ketiga Third-Party Fund	2.183	327	1.856	567,6%
Rekening Nasabah (satuan penuh) Customer Account (full unit)	4.905	4.711	194	4,1%
Pendapatan Margin Bersih - Pembiayaan Net Margin Income - Financing	24,98	31,37	(6,39)	(20,4%)
Beban Margin Bersih - Pendanaan Net Margin Expense - Funding	35,77	13,52	22,25	164,6%
Pendapatan Berbasis Jasa Fee-Based Income	13,64	11,38	2,26	19,9%
Gain on Forex & Securities Gain on Forex & Securities	13,49	11,60	1,89	16,3%
Pendapatan Bersih (PBT) Net Income (PBT)	18,63	45,42	(26,79)	(59,0%)



Profitabilitas

Profitabilitas segmen usaha perbankan internasional - Cabang Kuala Lumpur, masih memberikan kontribusi yang positif bagi Bank. Pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga tercatat meningkat sebesar 40,3% dan 567,6% dibandingkan dengan tahun 2022. Pendapatan berbasis jasa juga tercatat meningkat sebesar 19,9% dibandingkan dengan posisi tahun 2022.

Pertumbuhan dana pihak ketiga yang bertumbuh signifikan di tahun 2023 diiringi dengan peningkatan beban margin bersih - pendanaan sebesar 164,6%. Di sisi lainnya, pendapatan margin bersih pembiayaan mengalami penurunan sebesar 20,4%.

Peningkatan pendapatan berbasis jasa tahun 2023 ini, didukung oleh peningkatan kinerja bisnis *treasury* yang menyumbang pertumbuhan 16,3% dibandingkan tahun 2022.

Hingga tahun 2023, pendapatan margin bersih dari pembiayaan mencapai Rp25 miliar, turun 20,4% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp31 miliar. Pada periode yang sama, beban bersih dari pendanaan adalah Rp36 miliar. Dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp14 miliar, terjadi kenaikan 164,6%.

Pendapatan jasa *forex* - *gain on forex*, yang berhasil dibukukan Bank pada tahun 2023 mencapai Rp13 miliar. Dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp12 miliar, terjadi kenaikan 16,3%. Secara total pendapatan bersih Cabang Kuala Lumpur tercatat sebesar Rp19 miliar.

Rencana Strategis 2024

Di tahun 2024 ini, Perbankan International, melalui Kantor Cabang Kuala Lumpur terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi pencapaian Bank Muamalat Indonesia secara keseluruhan. Beberapa fokus perbaikan dan aktivitas yang akan menjadi aktivitas utama adalah:

1. Menjaga kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan aset, penghimpunan dan pihak ketiga dan peningkatan *fee base income*;
2. Peningkatan dana pihak ketiga dan peningkatan *fee base income* akan didukung dengan penambahan variasi segmentasi nasabah khususnya ekosistem haji;
3. Peningkatan nasabah pembiayaan akan didukung dengan perbaikan target *market* dan *Risk Acceptance Criteria* dan yang berbasis *localization risk appetite and framework*.

SEGMENT TREASURY

Hingga berakhirnya tahun buku 2023, produk dan layanan yang diberikan oleh segmen usaha *treasury* seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Profitability

The profitability of the international banking business segment - Kuala Lumpur Branch remains positive for the Bank. Financing and third-party fund growth were recorded to increase by 40.3% and 567.6%, respectively, compared to 2022. Compared to the position in 2022, service-based income was also recorded to increase by 19.9%.

In 2023, third-party funds grew significantly, accompanied by a 164.6% increase in net margin expenses from funding. On the other hand, net margin income from financing decreased by 20.4%.

The increase in service-based income in 2023 is supported by improved treasury business performance, which contributed to 16.3% growth compared to 2022.

Net margin income from financing reached Rp25 billion by 2023, a 20.4% decrease compared to Rp31 billion in 2022. In the same period, the net cost of funding was Rp36 billion. There was a 164.6% increase compared to the previous year's total of Rp14 billion.

In 2023, the Bank managed to record a gain on forex that amounted to Rp13 billion. There was a 16.3% increase compared to 2022, which amounted to Rp12 billion. In total, the Kuala Lumpur Branch's net income was recorded at Rp19 billion.

2024 Strategic Plan

In 2024, International Banking, through the Kuala Lumpur Branch Office, will continue to be committed to making a positive contribution to the overall achievements of Bank Muamalat Indonesia. Some of the improvement focuses and activities that will be the main activities are:

1. Maintain the quality and sustainability of asset growth, collections, and third parties, and increase fee-based income;
2. Third-party funds and fee-based income improvement will be supported by adding variations in customer segmentation, especially in the Hajj ecosystem;
3. Financing customer improvement will be supported by refining target markets and Risk Acceptance Criteria based on localization of risk appetite and framework.

TREASURY SEGMENT

Until the end of the 2023 financial year, the products and services provided by the Treasury business segment are as described in the table below.



Produk Product	Uraian	Description
<i>Money Market</i>	Aktivitas transaksi <i>Money Market</i> (Pasar Uang) di Bank Muamalat dalam rangka baik pemenuhan likuiditas maupun optimalisasi likuiditas. Dalam aktivitas tersebut, <i>treasury</i> mencatatkan pendapatan dan biaya berupa margin, bagi hasil, athaya dan ujah atas penempatan maupun pinjaman di pasar uang. Di antara transaksinya sebagai berikut: • Transaksi dengan Bank Indonesia: Operasi pasar terbuka seperti SUKBI, SBIS, TD valas, PASBI dan standing facilities seperti FASBI dan FLISBI • Pengelolaan RIM, PLN dan PLM • Transaksi Antarbank: SIMA dan SIPA (Indonesia), DP2 (Deposito Pihak ke-2), dan Commodity Murabahah (Cabang Kuala Lumpur)	Money Market transaction activities at Bank Muamalat are in order to both fulfill and optimize liquidity. In these activities, the Treasury records income and expenses in the form of margin, profit sharing, athaya, and ujah for money market placements and loans. Among the transactions are as follows: • Transactions with Bank Indonesia: open market operations such as SUKBI, SBIS, foreign exchange TD, PASBI, and standing facilities such as FASBI and FLISBI • Management of RIM, PLN, and PLM • Interbank Transactions: SIMA and SIPA (Indonesia), DP2 (2nd Party Deposits), and Commodity Murabahah (Kuala Lumpur Branch)
<i>Foreign Exchange</i>	Aktivitas transaksi <i>Foreign Exchange</i> di Bank Muamalat dalam rangka memenuhi kebutuhan baik nasabah perorangan, nasabah korporasi dan antarbank untuk memperoleh <i>fee-based income</i> dan juga sebagai transaksi pemenuhan kebutuhan bank (<i>Banking Book</i>). Mata uang yang dilayani adalah USD, MYR, SGD, EUR, JPY, SAR, KWD dan <i>MultiCurrency</i>. Produk Forex sebagai berikut: • <i>Cash transaction: Today, Tom (tomorrow) dan Spot</i> • <i>Hedging transaction: hedging sederhana (forward/ Al-Tahawwuth al-Basith) dan hedging kompleks (Al-Tahawwuth al-Murakkab)</i> Selain itu, Bank juga melayani <i>exotic currency</i> seperti Won Korea (KRW), Dinar Jordan (JOD), dan Thailand Bath (THB) dan lain-lain. Nasabah juga dapat melakukan jual beli <i>banknote</i> ke Bank Muamalat untuk mata uang USD, SAR, dan SGD. Transaksi-transaksi di atas dapat dilakukan baik di Indonesia maupun di cabang Kuala Lumpur, Malaysia.	Foreign Exchange transaction activities at Bank Muamalat are in order to meet the needs of individual customers, corporate, and interbank customers to obtain fee-based income and also as transactions to fulfill Bank needs (<i>Banking Book</i>). The currencies served are USD, MYR, SGD, EUR, JPY, SAR, KWD, and MultiCurrency. Forex products are as follows: • Cash transactions: Tod (today), Tom (tomorrow), and Spot • Hedging transactions: simple hedging (forward/ Al-Tahawwuth al-Basith) and complex hedging (Al-Tahawwuth al-Murakkab) In addition, the Bank also serves exotic currencies such as Korean Won (KRW), Jordan Dinar (JOD), Thai Bath (THB), and others. Customers can also buy and sell banknotes to Bank Muamalat in USD, SAR, and SGD currencies. The above transactions can be carried out both in Indonesia and at the Kuala Lumpur, Malaysia, branch.
<i>Fixed income (sukuk)</i>	Aktivitas transaksi Sukuk di Bank Muamalat Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah dalam berinvestasi sukuk dan memenuhi kebutuhan bank (<i>banking position</i>) untuk mata uang IDR dan USD. Sukuk yang ditransaksikan adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi. Sukuk yang aktif ditransaksikan adalah SR (Sukuk Ritel), PBS (<i>Project Based Sukuk</i>) dan Indois (Sukuk pemerintah mata uang USD). Transaksi dilakukan dengan nasabah individu, korporasi dan antarbank. Adapun tujuan transaksi sukuk adalah untuk memperoleh <i>fee-based income</i> dan pendapatan margin/ujroh atas kupon sukuk pada portofolio <i>banking book</i>. Melanjutkan pada tahun-tahun sebelumnya, BMI sebagai mitra distribusi sukuk pemerintah, ikut berpartisipasi dalam penjualan sukuk yang diterbitkan tahun ini, yaitu SR016, SR017 dan ST009.	Sukuk transaction activities at Bank Muamalat Indonesia are in order to meet customer needs for investment in sukuk and fulfill the bank's needs (<i>banking position</i>) for IDR and USD currencies. The sukuk transacted are sukuk issued by the Government and corporations. The sukuk that actively transacted are SR (Retail Sukuk), PBS (Project Based Sukuk) and Indois (USD-denominated Government Sukuk). Transactions are carried out with individual, corporate, and interbank customers. The purpose of sukuk transactions is to obtain fee-based income and margin/ ujah income on sukuk coupons in the banking book portfolio. Continuing from the previous years, BMI, as the government's sukuk distribution partner, participated in the sale of sukuk issued this year, namely SR016, SR017, and ST009.

Strategi Usaha

Pada tahun 2023, Bank Muamalat mengimplementasikan sejumlah strategi untuk mendorong kinerja segmen *treasury*. Di antaranya adalah:

1. Melayani nasabah individu dan korporasi dalam melakukan transaksi jual dan beli sukuk pemerintah baik mata uang IDR maupun USD sebagai pilihan investasi.
2. Melayani transaksi *foreign exchange* baik tod, tom, spot, dan *hedging* dalam berbagai mata uang dan transaksi bank notes untuk mata uang USD, SGD, SAR, EUR, JPY, AUD, NZD, GBP.
3. Meningkatkan kerja sama *cross selling* dengan produk bank BMI lainnya, baik *wholesale* maupun ritel.

Business Strategy

In 2023, Bank Muamalat implemented a number of strategies to boost the performance of the treasury segment. Among others are:

1. Serving individual and corporate customers in carrying out buying and selling transactions of government sukuk in both IDR and USD currencies as investment options.
2. Serving foreign exchange transactions, including tod, tom, spot, and hedging in various currencies and banknotes transactions for USD, SGD, SAR, EUR, JPY, AUD, NZD, and GBP.
3. Increase cross-selling cooperation with other BMI bank products, both wholesale and retail.



- Melakukan pembelian sukuk untuk portofolio *trading* maupun *banking* yang memberikan imbal hasil yang optimal.
- Mengoptimalkan cabang Kuala Lumpur dalam memberikan layanan transaksi *foreign exchange* untuk nasabah di kuala-lumpur sendiri maupun nasabah yang terafiliasi ke Indonesia.

- Purchase sukuk for trading and banking portfolios that provide optimal returns.
- Optimizing the Kuala Lumpur branch to provide foreign exchange transaction services for customers in Kuala Lumpur itself and customers affiliated with Indonesia.

KINERJA PROFITABILITAS USAHA *TREASURY*

Treasury Business Profitability Performance

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
<i>Gain on Forex</i> (Rp Miliar) Gain on Forex (Rp Billion)	17	11	6	54,5
<i>Gain on Security</i> (Rp Miliar) Gain on Security (Rp Billion)	43	26	17	65,4
<i>Margin Income</i> (Rp Miliar) Margin Income (Rp Billion)	678	546	132	24,2
<i>Margin Expense</i> (Rp Miliar) Margin Expense (Rp Billion)	(326)	(160)	166	103,8
<i>Net NIM</i> Net NIM	352	386	-34	(8,8)

Profitabilitas

Fee-Based Income (FBI) *forex* pada tahun 2023 mengalami peningkatan 54,5%, dari Rp11 miliar di tahun 2022 menjadi Rp17 miliar. Sedangkan FBI untuk sukuk mencapai Rp43 miliar, naik 65,4% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp26 miliar.

Untuk pendapatan margin di tahun 2023 mencapai Rp678 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp546 miliar, terjadi kenaikan 24,2%.

Rencana Strategis Tahun 2024

Bank Muamalat telah menyiapkan kebijakan strategis tahun 2024 untuk Segmen *Treasury*, di antaranya adalah:

- Memperluas transaksi bank notes mata uang asing untuk melayani nasabah *travel* haji dan umrah
- Memperluas jangkauan pemasaran kepada nasabah korporasi untuk bertransaksi sukuk.
- Pemasaran *foreign exchange* yang lebih intens, baik *cash* maupun *hedging* yang sesuai dengan prinsip syariah.
- Mengembangkan pasar uang antarbank untuk produk syariah dalam tujuan pendalaman pasar keuangan syariah melalui transaksi sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antar bank (SiPA), wakalah Bil Istismar (WKBI) dan Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah antar Bank (SIKA)
- Memperkuat rasio PLM, alat likuid, RIM, RPIM dan rasio lainnya dengan melakukan investasi yang optimal pada sukuk, reksa dana, dan produk pasar keuangan syariah lainnya.

Profitability

In 2023, Forex Fee-Based Income (FBI) increased by 54.5%, from Rp11 billion in 2022 to Rp17 billion. Meanwhile, the FBI for Sukuk reached Rp43 billion, an increase of 65.4% compared to 2022, which amounted to Rp26 billion.

Margin income reached Rp678 billion in 2023. There was an increase of 24.2% compared to 2022, which amounted to Rp546 billion.

Strategic Plan for 2024

Bank Muamalat has prepared a strategic policy for the Treasury Segment for 2024. Among others are:

- Expand foreign currency banknote transactions to serve Hajj and Umrah travel customers.
- Expand marketing reach to corporate customers for sukuk transactions.
- More intense foreign exchange marketing, both cash and hedging, in accordance with sharia principles.
- Developing the interbank money market for sharia products with the aim of deepening the sharia financial market through fund management certificate transactions based on interbank sharia principles (SiPA), wakalah Bil Istismar (WKBI) and Commodity Trading Certificates Based on Interbank Sharia Principles (SIKA)
- Strengthen the PLM ratio, liquid assets, RIM, RPIM, and other ratios by making optimal investments in sukuk, mutual funds, and other sharia financial market products.



Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Overview

Tinjauan kinerja keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat," "BMI," "Bank") disusun berdasarkan Laporan Keuangan Bank yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A) dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

A review of the financial performance of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat," "The Bank") is prepared based on the Bank's Financial Statements presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), which includes Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") ending December 31, 2023. The Financial Statements were audited by the Public Accounting Firm (KAP) of Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, and Ali (DBSD&A) with the opinion fair in all material respects.

ASET

Pada tahun buku 2023, Bank Muamalat mencatat total aset mencapai Rp67,0 triliun, lebih tinggi 9,11% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp61,4 triliun. Peningkatan dikontribusi dari pembiayaan Musyarakah sejalan dengan aktivitas penyaluran dana pada beberapa *selective* segmen bisnis yang prospektif yaitu sektor-sektor yang bersifat *low-risk* namun mampu memberikan hasil yang maksimal (*high yield*), serta fokus untuk mengembangkan segmen Islamic sebagai bentuk komitmen Bank dalam membangun ekonomi syariah di Indonesia.

ASSETS

In the 2023 financial year, Bank Muamalat recorded total assets reaching Rp67.0 trillion, 9.11% higher than in 2022, which amounted to Rp61.4 trillion. The increase in contribution from Musyarakah financing is in line with fund distribution activities in several selective prospective business segments, namely sectors that are low-risk but capable of providing maximum results (high yield), as well as a focus on developing the Islamic segment as a form of the Bank's commitment to developing the sharia economy in Indonesia.

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian	2023	2022	2021	Description
Aset Lancar	37.723	36.313	34.585	Current Assets
Kas	720	702	745	Cash
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	5.010	7.191	6.502	Current Account and Placement at Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	1.464	521	398	Current Accounts with Other Banks
Penempatan pada Bank Lain	4	43	4	Placement with Other Banks
Investasi pada Surat Berharga	30.525	27.855	26.936	Investment in Securities
Aset Tidak Lancar	29.230	25.051	24.313	Non Current Assets
Piutang	6.488	6.698	7.703	Receivables
Piutang Murabahah	5.852	6.695	7.7	Muharabah Receivables
Piutang Istishna	1	1	2	Istishna Receivables
Piutang Ijarah	1	1	1	Ijarah Receivables
Pinjaman Qardh	634	865	689	Qardh Loans
Pembiayaan Mudharabah	594	564	526	Mudharabah Financing
Pembiayaan Musyarakah	15.382	10.695	9.122	Musyarakah Financing
Penyertaan Saham	408	408	408	Investment in Shares
Tagihan Akseptasi	154	46	127	Acceptance Receivables
Aset yang Diperoleh untuk Ijarah	2	1	0,3	Assets Received for Ijarah
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(680)	(690)	(675)	Allowance for Impairment Losses
Aset Tetap	2.791	2.709	2.844	Fixed Assets
Aset Pajak Tangguhan	138	140	140	Differed Tax Assets
Aset Lain-lain-Neto	3.954	3.615	3.429	Other Assets-Net
Total Aset	66.953	61.364	58.899	Total Assets



Aset Lancar

Total aset lancar Bank Muamalat pada tahun 2023 mencapai Rp37,7 triliun. Dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp36,3 triliun, terjadi kenaikan 3,88%. Kontribusi peningkatan aset lancar adalah investasi surat berharga.

Aset Tidak Lancar

Bank Muamalat memiliki aset tidak lancar di tahun 2023 mencapai Rp29,2 triliun, meningkat 16,68% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp25,1 triliun. Peningkatan aset tidak lancar dikontribusi dari peningkatan pembiayaan musyarakah.

LIABILITAS

Total liabilitas Bank Muamalat hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp15 triliun, lebih tinggi 42,43% dibandingkan akhir tahun 2022 yang sebesar Rp10,6 triliun. Peningkatan dikontribusi dari simpanan wadiah, pinjaman yang diterima dan kewajiban pada Bank Indonesia.

TABEL POSISI LIABILITAS

Liabilities Position Table

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian	2023	2022	2021	Description
Liabilitas Jangka Pendek	11.289	9.433	10.821	Short-term Liabilities
Liabilitas Segera	164	116	1.083	Immediate Payables
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	83	68	40	Undistributed Profit Sharing
Simpanan	11.022	9.227	9.676	Deposits
Giro Wadiah	3.965	3.170	4.096	Wadiah Current Account
Tabungan Wadiah	7.058	6.057	5.581	Wadiah Savings Account
Utang Pajak	20	22	22	Tax Payable
Liabilitas Jangka Panjang	3.759	1.131	733,8	Long-term Liabilities
Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja	127	125	154	Estimated Liabilities for Employee Benefits
Liabilitas kepada Bank Indonesia	2.170	-	-	Liabilities to Bank Indonesia
Simpanan dari Bank Lain	46	59	79	Deposits on Other Banks
Liabilitas Akseptasi	8	14	25	Acceptance Payable
Pinjaman yang Diterima	1.000	500	100	Borrowing
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	1	1	0,8	Estimated Losses on Commitments and Contingencies
Liabilitas Lain-lain	407	431	375	Other Liabilities
Total Liabilitas	15.048	10.565	11.555	Total Liabilities

Liabilitas Jangka Pendek

Hingga berakhirnya tahun buku 2023, liabilitas jangka pendek Bank tercatat senilai Rp11,2 triliun, bertambah 19,68% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp9,4 triliun. Peningkatan dikontribusi dari peningkatan simpanan wadiah baik tabungan maupun giro.

Current Assets

In 2023, Bank Muamalat's total current assets reached Rp37.7 trillion. There is a 3.88% increase compared to 2022, which amounted to Rp36.3 trillion. Investments in securities contribute to increasing current assets.

Non-Current Assets

Bank Muamalat's non-current assets reached Rp29.2 trillion in 2023, an increase of 16.68% compared to Rp25.1 trillion in 2022. The increase in non-current assets was driven by an increase in musyarakah financing.

LIABILITIES

Bank Muamalat's total liabilities as of December 31, 2023, reached Rp15 trillion, 42.43% higher compared to Rp10.6 trillion at the end of 2022. The increase was driven by wadiah savings, loans received, and obligations to Bank Indonesia.

Current Liabilities

The Bank's current liabilities were recorded at Rp11.2 trillion as of the end of the financial year 2023, an increase of 19.68% compared to Rp9.4 trillion in 2022. The increase was driven by an increase in wadiah deposits in both savings and current accounts.



Liabilitas Jangka Panjang

Bank mencatatkan liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2023 mencapai Rp3,7 triliun. Dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp1,1 triliun, terjadi kenaikan 232,36%. Peningkatan dikontribusi dari kewajiban pada Bank Indonesia.

Dana Syirkah Temporer

Bank mencatatkan dana syirkah temporer mencapai Rp46,6 triliun, naik 2,39% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp45,6 triliun. Kontribusi peningkatan terjadi pada Giro Mudharabah dan adanya pinjaman antar Bank dalam bentuk SIMA dan SIPA untuk men-*support* kebutuhan likuiditas bank.

TABEL PERKEMBANGAN DANA SYIRKAH TEMPORER

Temporary Syirkah Fund Development Table

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian	2023	2022	2021	Description
Giro Mudharabah	2.297	1.862	2.147	Mudharabah Current Account
Tabungan Mudharabah	10.332	10.710	11.038	Mudharabah Deposit
Deposito Mudharabah	26.577	26.501	25.648	Mudharabah Deposit
Surat Berharga yang Diterbitkan	7.483	6.525	4.525	Marketable Securities Issued
Total Dana Syirkah Temporer	46.688	45.597	43.358	Total temporary Syirkah Fund

Dana Pihak Ketiga

Total dana pihak ketiga Bank Muamalat pada tahun 2023 mencapai Rp47,5 triliun. Sedangkan pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp46,1 triliun, sehingga ada peningkatan 3,07%. Peningkatan dana pihak ketiga sebesar Rp1,4 triliun dikontribusi dari segment *Retail*.

TABEL POSISI DANA PIHAK KETIGA

Third-Party Fund Position Table

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian	2023	2022	2021	Description
Giro	6.096	4.878	6.148	Current Account
Tabungan	16.642	16.122	16.033	Saving
Deposito	24.822	25.143	24.689	Deposit
Total Dana Pihak Ketiga	47.559	46.143	46.871	Total Third-Party Fund

Penyaluran Dana terhadap UMKM

Penyaluran dana kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp2,3 triliun, mengalami penurunan 13,28% dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp2,6 triliun. Penurunan tersebut merupakan dampak dari penyaluran pembiayaan UMKM yang selektif sesuai dengan arahan regulator, fokus utama Bank ditujukan kepada segmen bisnis ekosistem haji & umrah, ASN/BPG, Pensiun, Rumah Sakit, Pendidikan, dan Segmen *Enterprise* sebagai *entry gate* untuk segmen retail dalam memperluas peluang bisnis retail.

Non-Current Liabilities

The Bank's non-current liabilities as of December 31, 2023, reached Rp3.7 trillion. There was a 232.36% increase compared to 2022, when Rp1.1 trillion was recorded. The increase was contributed by liabilities owed to Bank Indonesia.

Temporary Syirkah Fund

The Bank recorded temporary syirkah funds of Rp46.6 trillion, an increase of 2.39% compared to Rp45.6 trillion in 2022. Increased contributions were made to Giro Mudharabah, as well as interbank loans in the form of SIMA and SIPA to support bank liquidity needs.

Third-Party Funds

Bank Muamalat's total third-party funds in 2023 reached Rp47.5 trillion. Meanwhile, in 2022, it was recorded at Rp46.1 trillion, representing a 3.07% increase. The Retail segment contributed Rp1.4 trillion to the increase in third-party funds.

Distribution of Funds to MSMEs

The distribution of funds to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) until the end of 2023 reached Rp2.3 trillion, a 13.28% decrease compared to Rp2.6 trillion in 2022. This decrease is due to the selective distribution of MSME financing in accordance with the regulator's instructions. The Bank's primary focus is on the Hajj and Umrah ecosystem business segments, as well as the ASN/BPG, Pension, Hospital, Education, and Enterprise segments, which serve as entry points for the retail segment in expanding retail opportunities.



Dari sisi kualitas dana penyaluran yang ditunjukkan melalui pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF), pada tahun 2023 terjaga pada level 0,99%. Kondisi tersebut lebih baik jika dibandingkan NPF UMKM Perbankan Syariah Nasional yang tercatat lebih tinggi sebesar 3,89%.

The quality of distributed funds, as measured by non-performing financing (NPF), remained at 0.99% in 2023. This condition is better compared to the National Sharia Banking MSME NPF, which was recorded to be higher at 3.89%.

EKUITAS

Hingga akhir tahun buku 2023, ekuitas Bank mencapai Rp5.216 miliar, naik 0,28% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp5.202 miliar. Peningkatan dikontribusi dari peningkatan laba.

EQUITY

The Bank's equity reached Rp5,216 billion at the end of the financial year 2023, a 0.28% increase compared to Rp5,202 billion in 2022. Profit growth helped drive the increase.

TABEL POSISI EKUITAS

Equity Position Table

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian	2023	2022	2021	Description
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.298	2.298	1.103	Issued and Fully Paid-up Capital
Tambahan Modal Disetor – Bersih	1.571	1.571	1.579	Additional Paid-in Capital – Net
Keuntungan Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti – Setelah Pajak	86	82	78	Profit Remeasurement of post-employment benefits - After tax
Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi dari Perubahan Harga Pasar Efek Tersedia untuk Dijual	-	(1)	2	Unrealized Gain (Loss) from Changes in Market Price of Available-for-Sale Marketable Securities.
Surplus Revaluasi atas Aset Tetap – Setelah Pajak	559	564	577	Revaluation Surplus of Fixed Assets – After Tax
Saldo Laba	703	689	646	Retained Earnings
Total Ekuitas	5.216	5.202	3.986	Total Equity

KINERJA LABA RUGI

Pada tahun 2023, Bank Muamalat berhasil membukukan laba sebesar Rp13 miliar, lebih rendah 50,76% dibandingkan tahun 2022 yang Rp27 miliar. Meski terjadi peningkatan pendapatan dari pembiayaan, laba bersih tertekan akibat peningkatan bagihasil untuk dana syirkah temporer, diikuti dengan penurunan pendapatan operasional lainnya dari aktivitas *recovery* aset sales.

INCOME STATEMENT

In 2023, Bank Muamalat managed to record an income of Rp13 billion, a 50.76% decrease compared to Rp27 billion in 2022. Despite an increase in financing income, net income was lower due to an increase in profit sharing for temporary syirkah funds, followed by a decrease in other operating income from sales and asset recovery activities.

TABEL LABA RUGI

Equity Position Table

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian	2023	2022	2021	Description
Jumlah Pendapatan Bank sebagai Mudharib	2.153	1.764	2.140	Total Bank Income as Mudharib
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil dana Syirkah Temporer	(1.949)	(1.435)	(1.375)	Third Parties Share on the Returns of Temporary Syirkah Funds
Hak Bagi Hasil Milik Bank	205	330	765	The Right of Bank's Share in Revenue Sharing
Pendapatan Operasional Lainnya	905	1.098	584	Other Operational income



(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian	2023	2022	2021	Description
Beban Operasional	(1.208)	(1.230)	(1.338)	Operational Expenses
Pembalikan (Beban) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Non Produktif	94	(130)	(16)	Reversal (Expenses) Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets
Keuntungan Selisih Kurs	23	30	24	Gain on Foreign Exchange
Laba (Rugi) Usaha	18	98	19	Income (Loss) from Operations
Pendapatan (Beban) Non Operasional-Neto	(4)	(46)	(7)	Non-Operating (Expense) - Net
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	14	52	13	Income (Loss) before Tax
Manfaat (Beban) Pajak	(1)	(25)	(4)	IncomeTax (Tax Expense)
Laba Bersih	13	27	9	Net Profit
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	19	27	20	Comprehensive Income for the Current Year
Laba Tahun Berjalan per Saham (Rupiah)	0,40	0,80	0,87	Income for the Current Year per Share (Rupiah)

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha Bank pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 mencapai Rp2,1 triliun, lebih tinggi 22,05% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp1,8 triliun. Peningkatan terjadi seiring dengan fokus penyaluran dana pada selective segment bisnis korporasi, BUMN dan pembiayaan *consumer*.

Sedangkan untuk pendapatan operasional lainnya, yang berhasil dibukukan mencapai Rp905 miliar. Dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp1,1 triliun, terjadi penurunan 17,62%.

Kontributor penurunan pendapatan operasional yaitu pendapatan dari aktivitas *recovery asset sale* yang mengalami penurunan disebabkan beberapa *pipeline recovery* yang tidak dapat direalisasikan pada tahun 2023.

Beban Usaha

Total beban bagi hasil dana syirkah temporer pada tahun 2023 mencapai Rp1,9 triliun. Dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp1,4 triliun, terjadi peningkatan 35,79%. Peningkatan terjadi seiring dengan peningkatan BI Rate sejak akhir Desember 2022 dan berlanjut perubahan kedua pada Oktober 2023 serta peningkatan *Fed Rate* selama tahun 2023.

Sementara untuk beban operasional lainnya, mengalami penurunan 1,79%, yaitu dari Rp1,23 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp1,20 triliun di tahun 2023. Penurunan terjadi dari beban umum & administrasi, beban karyawan dan bonus giro wadiah.

Operating Income

The Bank's operating income for the financial year ending December 31, 2023, reached Rp2.1 trillion, a 22.05% increase compared to Rp1.8 trillion in 2022. The increase was consistent with the focus on channeling funds to select corporate, SOE, and consumer financing business segments.

Meanwhile, other operational income amounted to Rp905 billion. There was a 17.62% decrease from 2022, which amounted to Rp1.1 trillion.

Income from asset sale recovery activities contributed to the decrease in operational income, as several recovery pipelines were unable to be realized in 2023.

Operating Expenses

The total expense of profit-sharing from temporary syirkah funds in 2023 reached Rp1.9 trillion. There was a 35.79% increase compared to 2022, when Rp1.4 trillion was recorded. The increase corresponded to the increase in the BI Rate since the end of December 2022, and it continued with the second change in October 2023, as well as the Fed Rate increase in 2023.

Meanwhile, other operating expenses fell by 1.79%, from Rp1.23 trillion in 2022 to Rp1.20 trillion in 2023. General and administrative expenses, employee expenses, and wadiah current account bonuses have all decreased.



Penghasilan Komprehensif Lain

Bank menutup tahun buku 2023 dengan laba komprehensif mencapai Rp19,4 miliar, lebih rendah 28% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp26,7 miliar. Penurunan laba komprehensif diikuti sebelumnya penurunan laba bersih

ARUS KAS

Bank membukukan kas dan setara kas pada akhir tahun buku 2023 mencapai Rp7,1 triliun, menurun 15% dibandingkan posisi tahun 2022 yang sebesar Rp8,4 triliun. Arus kas dari aktivitas pendanaan meningkat 1,1 triliun (52%) menjadi 3,4 triliun, arus kas dari aktivitas investasi berkurang 1,1 triliun, namun arus kas dari aktivitas operasi mengalami penurunan menjadi sebesar 3,4 triliun.

TABEL ARUS KAS

Cash Flow Table

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian	2023	2022	2021	Description
Arus kas dari Aktivitas Operasi	(3.588)	1.112	17.888	Cash Flow from Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(1.161)	(2.604)	(15.443)	Cash Flow from Investing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	3.489	2.300	1.139	Cash Flow from Financing Activities
Kenaikan/(Penurunan) kas dan setara kas Bersih	(1.259)	809	3.584	Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalent
Kas dan setara kas awal tahun	8.458	7.649	4.065	Cash and Cash Equivalent at the Beginning of the Year
Kas dan setara kas akhir tahun	7.198	8.458	7.649	Cash and Cash Equivalent at the End of the Year

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun buku 2023 minus Rp3,5 triliun, mengalami penurunan 422,66% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp1,1 triliun. Penurunan disebabkan aktivitas penyaluran dana terbesar pada pembiayaan musyarakah, sementara zero nett off aktivitas penghimpunan dana simpanan dan liabilitas lain-lain.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan hingga 31 Desember 2023 adalah Rp3,4 triliun, lebih tinggi 51,70% dibandingkan tahun 2022 yang negatif Rp2,3 triliun. Peningkatan disebabkan penerimaan liabilitas pada Bank Indonesia, penempatan pada sertifikat investasi mudharabah antar bank (SIMA) dan pinjaman yang diterima.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi hingga 31 Desember 2023 mencapai minus Rp1,1 triliun, menurun 55,41% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar minus Rp2,6 triliun. Aktivitas perolehan surat berharga relatif stabil, sementara terdapat hasil penjualan surat berharga dimiliki sehingga memperkecil arus kas bersih aktivitas investasi.

Other Comprehensive Income.

The bank ended the financial year 2023 with a comprehensive income of Rp19.4 billion, 28% lower than in 2022, when it was recorded at Rp26.7 billion. The decline in comprehensive income followed a previous decrease in net income.

CASH FLOW

The Bank's cash and cash equivalents at the end of the financial year 2023 reached Rp7.1 trillion, a 15% decrease compared to Rp8.4 trillion in 2022. Cash flow from financing activities increased by Rp1.1 trillion (52%) to Rp3.4 trillion, while cash flow from investing activities decreased by 1.1 trillion. However, cash flow from operating activities decreased to Rp3.4 trillion.

Cash Flow from Operating Activities

Net cash from operating activities in the financial year 2023 was minus Rp3.5 trillion, a 422.66% decrease compared to Rp1.1 trillion in 2022. The decrease was due to the highest fund distribution activity in musyarakah financing, while there was zero net-off activity in collecting savings funds or other liabilities.

Cash Flow from Financing Activities

Net cash from operating activities in the financial year 2023 was minus Rp3.5 trillion, a 422.66% decrease compared to Rp1.1 trillion in 2022. The decrease was due to the highest fund distribution activity in musyarakah financing, while there was zero net-off activity in collecting savings funds or other liabilities.

Cash Flows from Investing Activities

Net cash used for investing activities until December 31, 2023, reached minus Rp1.1 trillion, a 55.41% decrease compared to the previous year's minus Rp2.6 trillion. Securities acquisition activity is relatively stable, while there are proceeds from the sale of owned securities, which decreases the net cash flow of investment activities.



Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

Hingga berakhirnya 31 Desember 2023, posisi kas dan setara kas Bank tercatat menurun 14,90%, dari Rp8,4 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp7,2 triliun di tahun 2023. Penurunan ini disebabkan pada penurunan penempatan pada Bank Indonesia dan Giro Bank Indonesia.

RASIO KINERJA

Pengukuran dan penyampaian rasio kinerja sesuai selaras dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Rasio yang disampaikan melalui tabel di bawah adalah rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas Bank. Rasio tersebut mengindikasikan keberhasilan dan kemampuan Bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang ada.

Secara umum, rasio kinerja utama Bank Muamalat di tahun 2023 mengalami peningkatan, seperti dibuktikan dengan membaiknya beberapa rasio inti keuangan. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencapai 29,42%, sementara pada tahun sebelumnya sebesar 32,70%.

Untuk rasio rentabilitas, Bank mencatatkan *Return on Equity* (ROE) pada tahun 2023 mencapai 0,28%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,53%. Kemudian, *Return on Asset* (ROA) sebesar 0,02%, sedangkan tahun sebelumnya 0,09%. Untuk tingkat efisiensi yang tercermin dari Rasio BOPO, yakni sebesar 99,41%, sedikit lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang 96,62%.

Rasio kualitas aset yang ditunjukkan melalui rasio *Non- Performing Financing* (NPF) *Gross* mencapai 2,06%, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,78%. Sementara NPF *Nett* terealisasi 0,66%, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,86%.

TABEL RASIO KINERJA

Performance Ratio Table

(dalam %)

(in %)

Uraian	2023	2022	2021	Description
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	29,42	32,70	23,76	Capital Adequacy Ratio Requirement (CAR)
Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif	1,73	2,11	1,27	Non-Performing Earning Assets and Non-Performing Non-Earning Assets to Total Earning Assets and Non-Earning Assets
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif	1,75	2,15	1,34	Non-Performing Earning Assets to Total Earning Assets
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif	1,24	1,60	1,47	Allowance for impairment in value of financial assets to Earning Assets

Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents

Until the end of December 31, 2023, the Bank's cash and cash equivalents position had decreased by 14.90%, from Rp8.4 trillion in 2022 to Rp7.2 trillion in 2023. This decrease was caused by a reduction in placements with Bank Indonesia and Bank Indonesia Current Accounts.

PERFORMANCE RATIO

The measurement and delivery of performance ratios are in line with Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Reports of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The ratios presented in the table below are the Bank's liquidity, solvency, and profitability ratios. This ratio indicates the Bank's success and ability to generate income using existing resources.

In general, Bank Muamalat's main performance ratios increased in 2023, as evidenced by the improvement in several core financial ratios. The Minimum Capital Requirement Ratio (CAR) reached 29.42%, while in the previous year it was 32.70%.

In terms of profitability, the Bank recorded a Return on Equity (ROE) of 0.28% in 2023, down from 0.53% the previous year. The previous year's Return on Assets (ROA) was 0.09%, compared to 0.02% this year. The BOPO Ratio, which shows an efficiency level of 99.41%, is marginally higher than the previous year's 96.62%.

The asset quality ratio, as measured by the Gross Non-Performing Financing (NPF) ratio, decreased to 2.06% from 2.78% the previous year. Meanwhile, net NPF was realized at 0.66%, lower compared to the previous year's figure of 0.86%.



(dalam %)

(in %)

Uraian	2023	2022	2021	Description
NPF Gross	2,06	2,78	0,67	NPF Gross
NPF Net	0,66	0,86	0,08	NPF Net
Return on Assets (ROA)	0,02	0,09	0,02	Return on Assets (ROA)
Return on Equity (ROE)	0,28	0,53	0,20	Return on Equity (ROE)
Net Imbalan (NI)	0,37	0,66	1,59	Net Income
Net Operating Margin (NOM)	0,03	0,20	0,04	Net Operating Margin (NOM)
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	99,41	96,62	99,29	Operating Expenses to Operating Income (BOPO)
Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan	71,11	59,82	53,48	Profit Sharing Financing to Total Financing
Financing to Deposit Ratio (FDR)	47,14	40,63	38,33	Financing to Deposit Ratio (FDR)

RASIO KEPATUHAN

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/ SEOJK.032020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Rasio kepatuhan meliputi: Perhitungan pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); Perhitungan persentase Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing pada posisi laporan; serta Perhitungan persentase Posisi Devisa Neto (PDN) pada posisi laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPK, GWM rupiah dan valas serta PDN bagi Bank Umum Syariah.

TABEL RASIO KEPATUHAN

Compliance Ratio Table

(dalam %)

(in %)

Uraian	2023	2022	2021	Description
Kepatuhan				Compliance
Persentase Pelanggaran BMPD				Percentage of BMPD Violations
Pihak Terkait	0,00	0,00	0,00	Related Parties
Pihak Tidak Terkait	0,00	0,00	0,00	Non-related parties
Persentase Pelampauan BMPD				Percentage of BMPD Exceedance
Pihak Terkait	0,00	0,00	0,00	Related Parties
Pihak Tidak Terkait	0,00	0,00	0,00	Non-related parties
GWM				GWM
GWM Rupiah				GWM in Rupiah
Harian	4,59	13,87	7,98	Daily
Rata-rata	7,50	7,50	3,00	Average
GWM Valuta Asing	1,18	1,84	1,15	GWM in Foreign Exchange
Posisi Devisa Neto (PDN) secara Keseluruhan	0,23	0,46	0,15	Overall Net Open Position (NOP)



KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Hingga berakhirnya tahun buku 2023, Bank memiliki tagihan komitmen mencapai Rp177 miliar, lebih rendah 23,04% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp230 miliar. Penurunan ini disebabkan turunnya fasilitas pembiayaan belum ditarik dan posisi valas yang akan diterima dari transaksi *spot & forward*.

Sementara tagihan kontinjensi sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp35 miliar, turun 25,53% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp47 miliar. Turunnya pendapatan dalam penyelesaian menjadi penyebab turunnya tagihan kontinjensi.

Untuk kewajiban komitmen Bank hingga 31 Desember 2023 tercatat mencapai Rp532 miliar, mengalami penurunan 33,50% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp800 miliar. Penurunan ini disebabkan turunnya fasilitas pembiayaan kepada nasabah belum ditarik dan posisi penjualan *spot & forward* yang masih berjalan.

Sedangkan kewajiban kontinjensi mencapai Rp49 miliar, turun 42,35% dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp85 miliar. Turunnya garansi yang diberikan menjadi penyebab turunnya kewajiban kontinjensi.

TABEL PERKEMBANGAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Commitment and Contingency Development Table

(Rp miliar)

(Rp billion)

Uraian	2023	2022	2021	Description
Tagihan Komitmen	177	230	860	Commitment Receivable
Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	-	-	-	Unused Financing Facilities
Posisi valas yang akan diterima dari transaksi <i>spot & forward</i>	177	230	860	Forex positions to be received from spot and forward transactions
Kewajiban Komitmen	532	800	832	Commitment Liabilities
Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah yang Belum Ditarik	240	323	104	Unused Financing Facilities to Customers
Fasilitas Pembiayaan kepada Bank yang Belum Ditarik	0	0	-	Unused Financing Facilities for Banks
<i>Irrevocable</i> L/C yang Masih Berjalan	55	120	17	Outstanding Irrevocable L/C
Posisi Penjualan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> yang Masih Berjalan	237	357	832	Outstanding Spot and Forward Sales Position
Tagihan Kontinjensi	35	47	46	Contingent Receivables
Garansi yang Diterima	-	-	-	Guarantees Received
Pendapatan dalam Penyelesaian	35	47	46	Income in Progress
Kewajiban Kontinjensi	49	85	80	Contingent Liabilities
Garansi yang Diberikan	49	85	80	Warranty Issued

COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Until the end of the 2023 financial year, the Bank has commitment receivables of Rp177 billion, 23.04% lower than in 2022, which amounted to Rp230 billion. This decline was due to a decrease in unused financing facilities and foreign exchange positions to be received from spot & forward transactions.

Meanwhile, contingent receivables until the end of 2023 reached Rp35 billion, down 25.53% compared to 2022, which amounted to Rp47 billion. The decline in contingent receivables was due to a decrease in settlement income.

The Bank's commitment liabilities until December 31, 2023 were recorded at Rp532 billion, a decrease of 33.50% compared to 2022, which amounted to Rp800 billion. This decline was due to a decrease in unused financing facilities for customers and spot & forward sales positions that were still ongoing.

Meanwhile, contingent liabilities reached Rp49 billion, down 42.35% compared to last year's Rp85 billion. The decline in contingent liabilities was due to the decrease in guarantees issued.



INFORMASI KINERJA KEUANGAN LAIN

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Bank selalu berupaya menjaga rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) agar sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh regulator. Beragam upaya penguatan modal juga terus dilakukan guna menjaga rasio KPMM.

Pada tahun 2023, rasio KPMM bank mencapai 29,42%, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 32,70%. Pertumbuhan pembiayaan menjadi penyebab meningkatnya ATMR, sementara total modal (inti + pelengkap) relatif stabil.

TABEL KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Table of Capital Adequacy Requirements

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	2021	Description
Modal Inti (<i>Tier 1</i>)	4.802	4.796	4.839	Core Capital (<i>Tier 1</i>)
Modal Inti Utama (CET 1)	4.802	4.796	4.839	Main Core Capital (CET 1)
Modal Inti Tambahan (AT 1)	-	-	-	Additional Core Capital (AT 1)
Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>)	2.189	2.176	347	Complementary Capital (<i>Tier 2</i>)
Total Modal	6.990	6.972	5.186	Total Capital
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	23.762	21.323	21.827	Risk Weighted Assets (RWA)
Rasio KPMM (Aktual) (%)				Capital Adequacy Ratio (KPMM) (Actual) (%)
Rasio CET 1 (%)	20,21	22,49	22,17	CET 1 Ratio
Rasio AT 1 (%)	0,00	0,00	0,00	AT 1 Ratio
Rasio <i>Tier 1</i> (%)	20,21	22,49	22,17	<i>Tier 1</i> Ratio
Rasio <i>Tier 2</i> ($\geq$ <i>Tier 1</i>) (%)	9,21	10,21	1,59	<i>Tier 2</i> Ratio (highest is equal to <i>Tier 1</i>)
Rasio Total KPMM (%)	29,42	32,70	23,76	KPMM Total Ratio (%)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Sebagai salah satu upaya mitigasi risiko di masa yang akan datang, Bank Muamalat membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan penyisihan kerugian terhadap portofolio piutang serta pembiayaan yang dimiliki oleh Bank. Pada tahun 2023, jumlah CKPN dan Penyisihan Kerugian yang dibentuk oleh Bank telah sesuai dengan peraturan, seperti ditampilkan melalui tabel di bawah.

OTHER FINANCIAL PERFORMANCE INFORMATION

Capital Adequacy Requirement (CAR)

The Bank always strives to maintain the Capital Adequacy Requirement (CAR) ratio in accordance with the regulations determined by the regulator. Various efforts to strengthen capital are also being carried out to maintain the CAR ratio.

In 2023, the Bank's CAR ratio reached 29.42%, lower than in 2022, which was 32.70%. The increase in RWA was due to the growth in financing, while total capital (core + supplementary) is relatively stable.

Allowance for Impairment Losses

As an effort to mitigate risks in the future, Bank Muamalat has established an Allowance for Impairment Losses (CKPN) and an allowance for losses on receivables and financing portfolios owned by the Bank. In 2023, the amount of CKPN and allowance for losses established by the Bank were in accordance with regulations, as shown in the table below.



TABEL PERHITUNGAN CKPN DAN PENYISIHAN KERUGIAN

Calculation of CKPN and Allowance for Losses Table

(Rp miliar)

(Rp billion)

Uraian Description	2023				2022			
	CKPN		PPA Wajib Dibentuk PPA must be Established		CKPN		PPA Wajib Dibentuk PPA must be Established	
	Individual	Kolektif Collective	Umum General	Khusus Special	Individual	Kolektif Collective	Umum General	Khusus Special
Penempatan pada Bank Lain Placements with Other Banks	-	-	14,68	-	-	0,42	5,64	0,42
Tagihan Spot dan Forward Spot and Forward Claims	-	-	0,03	-	-	-	0,01	-
Surat Berharga yang Dimiliki Securities	-	-	82,30	-	-	-	81,30	-
Tagihan Akseptasi Acceptance Receivables	-	71,87	0,49	70,26	-	73,06	0,16	71,38
Piutang Murabahah Murabahah Receivables	137,59	88,46	37,90	109,83	167,80	143,18	48,59	75,62
Piutang Istishna' Istishna' Receivables	-	0,01	0,01	-	-	0,02	0,01	-
Piutang Qardh Qardh Receivables	-	62,11	4,92	46,46	-	31,73	7,24	3,49
Piutang Sewa Lease Receivables	-	1,05	-	1,07	-	1,07	-	1,07
Pembiayaan Mudharabah Mudharabah Financing	-	8,12	5,92	2,20	-	7,02	5,61	0,46
Pembiayaan Musyarakah Musharaka Financing	-	225,32	135,80	93,19	-	278,73	94,86	121,47
Pembiayaan Lainnya Other Financing	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Investments	-	85,24	0,06	60,24	-	60,24	0,06	60,24
Komitmen dan Kontinjensi Commitments and Contingencies	-	-	-	-	-	-	-	-

Transaksi Spot dan Forward

Transaksi *spot* dan *forward* yang dilakukan oleh Bank Muamalat merupakan transaksi yang terkait dengan valuta asing pada bank syariah (di luar jual beli *bank notes*) yang hanya dapat dilakukan untuk kepentingan nasabah dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulasi. Bank melakukan transaksi lindung nilai syariah, baik transaksi lindung nilai syariah sederhana (*'Aqd al Tahawwuth al-Basith*) yaitu transaksi lindung nilai dengan skema *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi *spot* pada saat jatuh tempo.

Begitu juga dengan transaksi lindung nilai kompleks (*'Aqd al Tahawwuth al-Murakkab*), yakni transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi *spot* dan *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi *spot* pada saat jatuh tempo. Rincian realisasi pada tahun 2023 diuraikan dalam tabel di bawah.

Spot and Forward Transactions

Spot and forward transactions carried out by Bank Muamalat are those related to foreign exchange at sharia banks (excluding buying and selling bank notes), which can only be carried out for the benefit of customers and are not permitted for speculative purposes. The Bank carries out sharia hedging transactions, both simple sharia hedging transactions (*'Aqd al Tahawwuth al-Basith*), namely hedging transactions with a forward agreement scheme followed by spot transactions at maturity.

Similarly, complex hedging transactions (*'Aqd al Tahawwuth al-Murakkab*), namely hedging transactions with a scheme in the form of a series of spot transactions and forward agreements followed by spot transactions at maturity. Details of the realization in 2023 are outlined in the table below.



TABEL SPOT DAN FORWARD

Spot and Forward Table

(Rp miliar)

(Rp billion)

Transaksi	Nilai Notional Notional Value	Tujuan Purpose		Tagihan dan Liabilitas Receivables and Liabilities		Transaction
		Bukan Hedging Not Hedging	Hedging Hedging	Tagihan Receivables	Liabilitas Liabilities	
Terkait dengan Nilai Tukar	267,3	91,5	175,7	3,3	0,6	Related to Exchange Rates
Spot	175,7	0,0	175,7	0,4	0,2	Spot
Forward	91,5	91,5	0,0	2,9	0,3	Forward
Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Other
Lainnya	-	-	-	-	-	Other

Laporan Distribusi Bagi Hasil

Pada tahun 2023, bank mendistribusikan bagi hasil mengalami kenaikan 35,42%, dari Rp1,44 triliun menjadi Rp1,95 triliun. Peningkatan disebabkan peningkatan bagi hasil mudharabah dari produk deposito dan giro mudharabah serta meningkatnya beban sukuk mudharabah & MTN subordinasi dan bagihasil pinjaman yang diterima.

Profit Sharing Distribution Report

In 2023, the Bank's profit sharing distribution increased by 35.42%, from Rp1.44 trillion to Rp1.95 trillion. The increase was due to an increase in mudharabah profit sharing from deposit products and the mudharabah current account, as well as an increase in the expense of subordinated mudharabah sukuk & MTN and profit sharing on loans received.

Laporan Sumber dan Peyaluran Dana Zakat

Bank menerima penyetoran zakat yang berasal dari pihak internal maupun eksternal, seperti nasabah maupun amil zakat lainnya. Namun begitu, Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, melainkan menyalurkan dana zakat tersebut melalui entitas pengelola zakat.

Report on Sources and Distribution of Zakat Funds

The Bank accepts zakat deposits from internal and external parties, such as customers and other zakat recipients. However, the Bank does not directly carry out the function of managing zakat funds but rather channels the zakat funds through the zakat management entity.

Pada tahun 2023, realisasi penerimaan dana zakat dari pihak internal maupun eksternal mencapai Rp6,11 miliar turun 16,30% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp7,3 miliar. Dana tersebut disalurkan seluruhnya melalui Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat masing-masing sebesar Rp2 miliar dan Rp4,48 miliar.

In 2023, the realization of zakat fund acceptance from internal and external parties reached Rp6.11 billion, down 16.30% compared to 2022, which was Rp7.3 billion. These funds were channeled entirely through the Amil Zakat Institution and the Amil Zakat Agency, in the amounts of Rp2 billion and Rp4.48 billion, respectively

TABEL PERKEMBANGAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT & WAQAF

Table of Development of Sources and Distribution of Zakat & Waqaf Funds

(Rp miliar)

(Rp billion)

Uraian	2023	2022	2021	Description
Saldo Awal Dana Zakat	0,40	-	-	Beginning Balance of Zakat Funds
Dana Zakat yang Berasal dari:	5,77	7,35		Zakat Funds from:
Internal BUS	0,66	0,22	0,25	Internal BUS
Eksternal BUS	5,11	7,12	7,95	External BUS
Penyaluran Dana Zakat kepada Entitas Pengelola Zakat	6,17	6,94		Disbursement of Zakat to Zakat Management Organizations
Lembaga Amil Zakat	1,69	2,48	8,20	Lembaga Amil Zakat
Badan Amil Zakat	4,48	4,47	-	Badan Amil Zakat
Kenaikan (Penurunan) Dana Zakat	(0,40)	0,40	-	Increase (Decrease) in Zakat Funds
Saldo Akhir Dana Zakat	(0,00)	0,40	-	Ending Balance of Zakat Fund



Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Bank Muamalat menerima dana kebajikan, baik berupa infaq, sedekah, denda, maupun penerimaan non-halal. Pada tahun 2023, penerimaan dana kebijakan berasal dari penerimaan non-halal mencapai Rp1,36 miliar dan denda Rp1,02 miliar. Dengan demikian, total dana kebajikan sebesar Rp4,90 miliar. Dana tersebut digunakan untuk dana kebajikan berupa sumbangan yang disalurkan melalui lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah sebesar Rp4,73 miliar, dana kebajikan tersisa Rp171 juta.

Report on Sources and Use of Benevolent Funds

Bank Muamalat receives charitable contributions, including infaq, alms, fines, and non-halal acceptance. In 2023, benevolent funds received from non-halal and fines acceptance reached Rp1.36 billion and Rp1.02 billion, respectively. Thus, the total benevolent funds amounted to Rp4.90 billion. These funds were used for benevolent funds in the form of donations channeled through zakat, infaq, and shadaqah management institutions in the amount of Rp4.73 billion, while the remaining benevolent funds were Rp171 million.

TABEL SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Table of Sources and Use of Benevolent Funds

(Rp miliar)

(Rp billion)

Uraian	2023	2022	2021	Description
Sumber Dana Kebajikan pada Awal Periode	-	-	-	Sources of Qardhul Hasan Funds at the Beginning of the Period
Penerimaan Dana Kebajikan				Receiving of Qardhul Hasan Funds
Infak	2,35	-	-	Infaq
Sedekah	-	-	-	Sodaqoh
Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-	-	-	Return of a Productive Qardhul Hasan Funds
Denda	1,02	0,33	-	Penalty
Penerimaan Non Halal	1,36	1,28	0,64	Non-Halal fund
Lainnya	0,02	-	-	Other
Total Penerimaan	4,90	1,60	0,64	Total Qhardul Hasan Received
Penggunaan Dana Kebajikan				Use of Benevolent Funds
Dana Kebajikan Produktif	-	-	-	Productive Qhardul Hassan Fund
Sumbangan	4,73	1,60	0,64	Donation
Penggunaan Lainnya untuk kepentingan Umum	-	-	-	Other uses for Public Interest
Total Penggunaan	4,73	1,60	0,64	Total Fund Allocated
Kenaikan (Penurunan) Sumber Dana Kebajikan	0,17	-	-	Increase (Decrease) in Sources of Qardhul Hasan funds
Sumber Dana Kebajikan pada Akhir Periode	0,17	-	-	Sources of Qardhul Hasan Funds at the End of the Period

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Bank dalam memenuhi seluruh kewajiban, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, diukur melalui sejumlah rasio. Di antaranya, rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rentabilitas. Kemampuan membayar utang juga tercermin dari telah ikutnya Bank sebagai peserta program penjaminan pada Lembaga Penjaminan Simpanan. Rincian penjelasan tentang kemampuan membayar utang diuraikan sebagai berikut.

ABILITY TO PAY DEBT

The Bank's ability to fulfill all obligations, both short- and long-term, is measured through a number of ratios. These include liquidity ratios, solvency ratios, and profitability. The ability to pay debts is also reflected in the Bank's participation as a guarantee program participant at the Deposit Insurance Corporation. A detailed explanation of the ability to pay debts is described as follows.



Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Kemampuan Bank dalam membayar utang jangka pendek dapat dilihat dari rasio likuiditas, yang dapat diukur melalui rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR). Pada tahun 2023, posisi FDR Bank mencapai 47,1%, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 40,63%. Pertumbuhan aset *financing* lebih besar daripada pertumbuhan funding DPK YoY 2023.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Bank Muamalat mengukur rasio solvabilitas dengan memastikan kecukupan modal Bank agar dapat memenuhi risiko pembiayaan, pasar dan operasional yang tercermin dari Rasio Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko atau *Risk-Weighted Assets* (RWA).

Pada tahun 2023, CAR Bank mencapai 29,42%. Posisi tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 32,70%. Periode 2023 terjadi peningkatan aset tertimbang menurut risiko, sementara total modal (inti + pelengkap) relatif stabil.

Kolektibilitas Piutang

Pada tahun 2023, tingkat kolektibilitas piutang dan pembiayaan yang dimiliki oleh Bank mengalami penurunan. Hal tersebut diindikasikan oleh penurunan pembiayaan bermasalah yang merupakan pembiayaan dengan kolektibilitas 3 (kurang lancar), 4 (diragukan), dan 5 (macet).

Rasio pembiayaan bermasalah kotor (NPF-gross) Bank pada tahun 2023 tercatat mencapai 2,06%, lebih rendah 7 bps dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,78%.

TABEL PERKEMBANGAN KOLEKTIBILITAS

Collectibility Development Table

(Rp miliar)

(Rp billion)

Uraian	2023	2022	2021	Description
Total Pembiayaan Bermasalah – Bukan Bank (Rp miliar)	463	521	120	Total Non-performing Financing - Non-Bank (Rp billion)
Total Pembiayaan yang Diberikan (Gross)–Bukan Bank (Rp miliar)	22.419	18.748	17.967	Total Financing Disbursement (Gross) - Non-Bank (Rp billion)
% Pembiayaan Bermasalah (NPF-Bruto)	2,06	2,78	0,67	% of Non-performing Financing (Gross-NPF)
% Pembiayaan Bermasalah (NPF-Netto)	0,95	0,86	0,08	% of Non-performing Financing (Net-NPF)

Ability to Pay Short-Term Debt

The Bank's ability to pay short-term debt can be seen from the liquidity ratio, which can be measured through the ratio of financing to third-party funds (FDR). In 2023, the Bank's FDR position reached 47.1%, an increase compared to 2022, which was 40.63%. The growth in financing assets is greater than the growth in TPF funding (yoy) in 2023.

Ability to Pay Long-Term Debt

Bank Muamalat measures the solvency ratio by ensuring the Bank's capital is sufficient to meet financing, market, and operational risks, as reflected in the Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR is the ratio of capital to risk-weighted assets, or Risk-Weighted Assets (RWA).

In 2023, the Bank's CAR reached 29.42%. This position is lower than in 2022, which was 32.70%. There was an increase in risk-weighted assets in 2023, while total capital (core + supplementary) is relatively stable.

Collectability of Receivables

In 2023, the level of collectability of receivables and financing owned by the Bank had decreased. This is indicated by a decrease in non-performing financing, which is financing with a collectibility of 3 (substandard), 4 (doubtful), and 5 (Non-Performing).

The Bank's gross non-performing financing ratio (NPF-gross) in 2023 was recorded at 2.06%, 7 bps lower than the previous year, which was 2.78%.



STRUKTUR MODAL

Kebijakan Modal

Kebijakan permodalan Bank pada prinsipnya untuk melindungi kemampuan Bank Muamalat dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Dengan demikian, Bank dapat memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan sebagai upaya mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk pemenuhan likuiditas Bank yang ditentukan oleh regulator. Kebijakan permodalan merupakan bagian dari Rencana Bisnis Bank yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Manajemen permodalan yang dilakukan oleh Bank difokuskan kepada pengelolaan struktur permodalan yang sehat. Tujuannya adalah untuk menyerap risiko serta memenuhi ketentuan permodalan dari regulator, serta untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

Rincian Struktur Modal

Rincian struktur modal Bank diuraikan melalui tabel di bawah.

TABEL PERKEMBANGAN STRUKTUR MODAL

Capital Structure Development Table

(Rp miliar)

(Rp billion)

Uraian	2023	2022	2021	Description
Modal Dasar	5.600.000.000.115	5.600.000.00.000	5.600.000.000.000	Authorized Capital
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.297.736.324.240	2.297.736.324.210	1.103.435.151.000	Issued and Fully Paid-In Capital

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Sepanjang tahun 2023, Bank tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Hingga 31 Desember 2023, realisasi investasi barang modal Bank sebesar Rp4,13 triliun. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang sebesar Rp4,44 triliun, realisasi tersebut lebih rendah 6,98%. Penurunan realisasi investasi barang modal merupakan salah satu strategi bank untuk bisa melakukan optimalisasi dari barang-barang yang dimiliki oleh Bank. Ke depannya Bank akan terus melanjutkan proses optimasi barang modal agar seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Bank menjadi lebih terukur dan efisien. Adapun rincian realisasi investasi barang modal tahun buku adalah sebagai berikut:

CAPITAL STRUCTURE

Capital Policy

In principle, the Bank's capital policy is to protect Bank Muamalat's ability to maintain business continuity. Accordingly, the Bank can provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders. In addition, this policy also aims to maintain an optimal capital structure to fulfill the Bank's liquidity as determined by the regulator. Capital policy is part of the Bank's Business Plan prepared by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners.

Capital management carried out by the Bank is focused on managing a healthy capital structure. The aim is to absorb risk and meet regulatory capital requirements, as well as to support business growth.

Capital Structure Details

Details of the Bank's capital structure are outlined in the table below.

MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

Throughout 2023, the Bank had no material commitments for investment in capital goods.

REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

As of December 31, 2023, the Bank's capital goods investment realization was Rp4.13 trillion. This realization is 6.98% lower compared to the achievement in 2022 of Rp4.44 trillion. One of the Bank's strategies to optimize the goods it owns is to reduce the realization of investment in capital goods. In the future, the Bank will continue the process of optimizing capital goods so that all activities carried out by the Bank become more measurable and efficient. The details of the realization of investment in capital goods for the financial year are as follows:



TABEL REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Table of Realization of Capital Goods Investment

(Rp miliar)

(Rp billion)

Jenis Investasi	Tujuan Investasi	Nilai Investasi Investment Value	Objectives	Type of Investment
Tanah	Pelayanan Bank	2.010	Bank Service	Land
Bangunan	Pelayanan Bank	767	Building	Bank Service
Kendaraan Bermotor	Akomodasi Aktivitas Operasional	19	Operational Activities Accomodation	Motor Vehicles
Inventaris Kantor	Akomodasi Aktivitas Operasional	420	Operational Activities Accomodation	Inventory
Komputer	Akomodasi Aktivitas Operasional	750	Operational Activities Accomodation	Computer
Perbaikan Sarana dan Prasarana	Pelayanan Bank	168	Bank Service	Improvement of facilities and infrastructure
Aset Sewa Pembiayaan Kendaraan Bermotor	Akomodasi Aktivitas Operasional	3	Operational Activities Accomodation	Motor vehicle finance lease assets
Total		4.137		Total

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTANSI

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan setelah tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen yang perlu diungkapkan dalam laporan tahunan ini.

INFORMATION AND MATERIAL FACTS THAT OCCUR AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTING REPORT

There are no material or relevant important events after December 31, 2023, until the date of the Independent Auditor's Report that need to be disclosed in this annual report.

PROSPEK USAHA

Ditengah tantangan perkembangan ekonomi Global dan Domestik, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi dunia diperkirakan akan membaik dari proyeksi sebelumnya ditengah ketidakpastian pasar keuangan yang masih tinggi. Ekonomi global diperkirakan tumbuh sebesar 3,1% pada tahun 2023 dan 3,0% pada tahun 2024. Faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi global di antaranya geopolitik dan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan otomatisasi diprediksi akan terus mengubah pasar tenaga kerja dan bisnis di seluruh dunia. Hal tersebut berpotensi mempengaruhi kebijakan suku bunga Fed Funds Rate (FFR), yang diperkirakan mulai menurun pada semester II-2024, sejalan dengan inflasi AS yang masih tinggi.

Sedangkan prospek ekonomi Indonesia, Bank Indonesia optimis dapat tumbuh lebih baik dari prakiraan. Pada triwulan IV 2023 pertumbuhan tercatat sebesar 5,05% (yoy) dengan proyeksi ekonomi tahun 2024 akan meningkat dalam kisaran 4,7-5,5% dan inflasi akan tetap rendah serta terkendali dalam kisaran 2,5±1%.

BUSINESS PROSPECT

Despite the challenges of global and domestic economic developments, Bank Indonesia estimates that the world economy is expected to improve from previous projections amidst the high financial market uncertainty. The global economy is expected to grow by 3.1% in 2023 and 3.0% in 2024. Factors influencing global economic development include geopolitics and new technologies such as artificial intelligence and automation, which are predicted to continue to change labor markets and businesses around the world. This has the potential to influence the Fed Funds Rate (FFR) interest rate policy, which is expected to start decreasing in semester II-2024, in line with US inflation, which remains high.

Meanwhile, Bank Indonesia is optimistic that Indonesia's economic prospects will grow better than forecast. In the fourth quarter of 2023, growth was recorded at 5.05% (yoy), with projections that the economy in 2024 will increase in the range of 4.7–5.5% and inflation will remain low and controlled in the range of 2.5 ± 1%.



Membaiknya ekonomi Indonesia didorong oleh ekspor, sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia, konsumsi rumah tangga, dan investasi khususnya nonbangunan.

Selain itu, Bank Indonesia juga akan menjaga kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha. Hal itu dilakukan untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023.

Di lain sisi, semakin bertumbuhnya ekonomi syariah di Indonesia turut membawa optimisme bagi pertumbuhan ekosistem halal. Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, saat ini pemerintah telah mengeluarkan bauran kebijakan pemberian stimulus bagi pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan ekosistem halal *value chain* pada sektor-sektor utama, seperti sektor pertanian yang terintegrasi, kuliner halal, dan *fashion muslim*.

Pada tahun 2024 dan seterusnya, stimulus tersebut diharapkan dapat mendukung Bank untuk mendalami sektor potensial lain, seperti sektor kesehatan khususnya rumah sakit dan sektor pendidikan. Selain itu, potensi ekonomi syariah serta dukungan kebijakan dari pemerintah juga menjadi peluang bagi Bank untuk terus menggali potensi bisnis dari ekosistem haji yang dapat difokuskan pada bisnis transportasi, akomodasi, dan catering. Besarnya jumlah masyarakat muslim di Indonesia dapat memberikan banyak ruang bagi Bank untuk terus meningkatkan pangsa pasar.

Peluang lain bagi Bank adalah pertumbuhan literasi ekonomi syariah, pertumbuhan ekosistem halal serta potensi ekosistem haji. Peningkatan literasi ekonomi syariah dapat memberikan gambaran mengenai peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan ekonomi syariah sehingga diharapkan akan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, dengan melanjutkan tema strategis RBB tahun 2023, yaitu "Pertumbuhan Bisnis yang Sehat dan Profit yang Berkelanjutan", pada tahun 2024 Bank akan berfokus pada percepatan pertumbuhan bisnis yang sehat, optimalisasi *recovery* serta peningkatan produktivitas di tengah dinamika geopolitik yang terjadi di Indonesia maupun di global.

The improvement in the Indonesian economy is driven by exports, in line with increasing world economic growth and household consumption, and investment, especially non-building.

In addition, Bank Indonesia will also maintain the rupiah exchange rate stability policy and strengthen coordination with the government, banking, and business worlds. This was done to support the implementation of the foreign exchange placement instrument from Natural Resources Exports (DHE SDA) in line with Government Regulation (PP) Number 36 of 2023.

On the other hand, the growing sharia economy in Indonesia also brings optimism for the growth of the halal ecosystem. To support this growth, the government has currently issued a policy mix that provides stimulus for sharia economic development by strengthening the halal value chain ecosystem in key sectors, such as the integrated agricultural sector, halal culinary, and Muslim fashion.

In 2024 and beyond, this stimulus is expected to support the Bank in exploring other potential sectors, such as the health sector, especially hospitals, and the education sector. Apart from that, the potential of the sharia economy and policy support from the government are also an opportunity for the Bank to continue to explore the business potential of the Hajj ecosystem, which can be focused on transportation, accommodation, and catering businesses. The large number of Muslim communities in Indonesia can provide a lot of room for the Bank to continue to increase market share.

Another opportunity for the Bank is the growth of sharia economic literacy, the growth of the halal ecosystem, and the potential of the Hajj ecosystem. Increasing sharia economic literacy can provide an illustration of increasing public knowledge and understanding of sharia economics, so it is hoped that it will increase public awareness of the importance of sharia principles in everyday life.

Therefore, by continuing the RBB strategic theme for 2023, namely "Healthy Business Growth and Sustainable Profits," in 2024, the Bank will focus on accelerating healthy business growth, optimizing recovery, and increasing productivity amidst the geopolitical dynamics occurring in Indonesia as well as globally.



PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI PROYEKSI 1 (SATU) TAHUN MENDATANG

Target dan Realisasi

Bank Muamalat menetapkan target keuangan yang akan dicapai tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2023. Secara umum, kinerja Bank dinilai baik, Bank dapat mempertahankan pertumbuhan bisnis yang positif dari sisi aset, DPK dan pembiayaan, serta pemupukan profitabilitas.

Total aset Bank yang pada tahun 2023 tercatat mencapai Rp66,99 triliun, merupakan 92,75% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK), yaitu Rp47,56 triliun, setara dengan 85,45% dari target dan pembiayaan Rp23,00 triliun atau setara 84,55% dari target (tidak termasuk pembiayaan Salam).

Pencapaian dari penghimpunan DPK tersebut terjadi pada dana retail, di mana Bank fokus pada perbaikan fondasi *funding* dengan melakukan *reprofiling* pendanaan melalui peningkatan CASA rasio, sehingga dalam rangka optimalisasi profitabilitas bank. Pencapaian pembiayaan terjadi karena fokus pada *selective* penyaluran dana pada segment korporasi tertentu dan BUMN dan memulai pertumbuhan bulan positif pada pembiayaan Retail. Bank juga terus berkomitmen dalam penguatan posisi bank melalui perbaikan penyelesaian aset bermasalah dimana rasio NPF mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu.

Untuk laba, sepanjang tahun 2023 yang berhasil dibukukan oleh Bank mencapai Rp18,9 miliar atau menurun 63,63% dibandingkan tahun lalu. Laba bersih tertekan karena peningkatan beban bagihasil dana syirkah temporer seiring dengan peningkatan BI Rate dan Fed Rate ditahun 2023, meskipun pendapatan dari penyaluran dana (pembiayaan) juga meningkat, namun peningkatan beban bagihasil dana syirkah temporer lebih besar dari pada peningkatan pendapatan pembiayaan.

COMPARISON BETWEEN TARGET AND PROJECTED REALIZATION FOR THE NEXT 1 (ONE) YEAR

Target and Realization

Bank Muamalat has set financial targets to be achieved as stated in the Bank Business Plan (RBB) for 2023. In general, the Bank's performance is considered good. The Bank can maintain positive business growth in terms of assets, TPF, and financing, as well as increasing profitability.

The Bank's total assets, which in 2023 were recorded at Rp66.99 trillion, are 92.75% of the target that has been set. Meanwhile, Third Party Funds (TPF), which was Rp47.55 trillion, equivalent to 85.45% of the target, and financing, which was Rp23.04 trillion, equivalent to 84.55% of the target (excluding Salam financing).

The achievement of third-party fund collection occurred in retail funds, where the Bank focused on improving the funding foundation by reprofiling funding through increasing the CASA ratio in order to optimize Bank profitability. The financing achievement occurred due to a focus on selective distribution of funds to certain corporate and SOE segments and the start of a month of positive growth in retail financing. The Bank also continues to be committed to strengthening the Bank's position through improving the resolution of non-performing assets, where the NPF ratio has decreased compared to last year.

In terms of income, throughout 2023, the Bank managed to record Rp18.9 billion, or a decrease of 63.63% compared to last year. Net income was depressed due to the increase in profit sharing expenses from temporary syirkah funds in line with the increase in the BI Rate and Fed Rate in 2023. Although income from the distribution of funds (financing) also increased, the increase in profit sharing expenses from temporary syirkah funds was greater than the increase in financing income.



Rincian pencapaian dibandingkan dengan target lainnya diuraikan melalui tabel di bawah.

Details of achievements compared to other targets are outlined in the table below.

TABEL PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

Target and Realization Comparison Table

(Rp miliar)

(Rp billion)

Uraian	Target 2023 2023 Projection	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian Achievement (%)	Description
Total Aset	72.230	66.995	92,75%	Total Assets
Dana Pihak Ketiga	55.656	47.559	85,45%	Third-Party Funds
Pembiayaan ^{*)}	26.569	22.465	84,55%	Financing ^{*)}
Pendapatan Operasional	1.465	905	61,74%	Operating Income
Beban Operasional	1.250	1.208	96,66%	Operating Expenses
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	100	18,9	18,90%	Profit (Loss) Before Tax
Struktur Modal	5.263	5.205	98,89%	Capital Structure

^{*)} Exclude pembiayaan Salam.
Exclude Salam financing.

Proyeksi Tahun 2024

Bank Muamalat telah menyusun target untuk tahun buku 2023, seperti tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Penyusunan RBB tersebut telah mempertimbangkan potensi eksternal yang akan terjadi dan berpengaruh pada Bank, serta kemampuan Bank dalam merealisasikan target. Rinciannya disampaikan dalam tabel di bawah.

2024 Projections

Bank Muamalat has prepared targets for the 2024 financial year, as stated in the Bank Business Plan (RBB). The preparation of the RBB has considered external potential that will occur and influence the Bank, as well as the Bank's ability to realize targets. The details are provided in the table below.

TABEL PROYEKSI, REALISASI, DAN PERUBAHAN

Projection, Realization, and Change Table

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian	Target 2024 2024 Projection	Realisasi 2023 2023 Realization	Perubahan Change (%)	Description
Total Aset	80.535	66.995	83,19%	Total Assets
Dana Pihak Ketiga	63.783	47.559	74,56%	Third-Party Funds
Pembiayaan	34.045	22.465	65,99%	Financing
Pendapatan Operasional	1.596	905	56,68%	Operating Income
Beban Operasional	1.190	1.208	101,50%	Operating Expenses
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	150	18,9	12,60%	Profit (Loss) Before Tax
Struktur Modal	5.357	5.205	97,16%	Capital Structure
Kebijakan Dividen	10-20%	10-20%	0	Dividend Policy



ASPEK PEMASARAN

Kebijakan

Bank Muamalat Indonesia menyusun kebijakan pemasaran berdasarkan perkembangan industri perbankan dan kebutuhan nasabah serta fokus dalam strategi bank terhadap sasaran bisnis yang dituju, Bank berusaha menyelaraskan kebijakan pemasaran dengan posisi Bank yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia.

Kondisi tersebut menjadikan Bank Muamalat memiliki posisi yang unik, sekaligus menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi pengembangan bisnis. Sementara sebagai pionir, Bank memiliki peran penting dalam kemajuan perbankan syariah di Indonesia.

Bank juga melihat perkembangan digitalisasi yang pesat dan tumbuhnya industri halal serta semakin besar kesadaran masyarakat terhadap literasi keuangan syariah. Dalam menghadapi digitalisasi tersebut, Bank telah mempersiapkan beragam strategi, antara lain mengembangkan produk berdaya saing tinggi menggunakan sistem digital seperti mengembangkan layanan Digital Banking seperti mobile banking atau disebut Muamalat DIN (*Digital Islamic Network*), Internet Banking atau yang disebut *Muamalat Digital Integrated Access* (MADINA), Muamalat QRIS, dan ATM yang terus dilakukan penambahan fitur dan layanan, termasuk menjalin kerja sama melalui *strategic partnership* dengan pihak ketiga. Selain itu, Bank memiliki 235 jaringan kantor Bank yang terdiri dari 1 kantor cabangluar negeri (Kuala Lumpur) dan 234 jaringan kantor di dalam negeri yang mencakup kantor pusat, kantor cabang utama, dan kantor cabang pembantu, serta Bank memiliki 635 kegiatan pelayanan kas yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia sehingga dapat memperkuat Branding Bank Muamalat.

Bank berfokus pada segment retail individual dengan segment enterprise sebagai entry gate sebagai target bisnis yang akan saling berkolaborasi. Pemenuhan variasi produk konsumen dan *risk acceptance* kriteria khusus untuk segmen *enterprise* akan menjadi langkah awal untuk memenuhi kebutuhan nasabah (*customer centric*).

Distribusi dan jangkauan Bank kepada nasabah akan diperluas melalui sejumlah alternatif *channel*, yaitu mitra yang akan membantu Bank dalam melayani kebutuhan nasabah selain jaringan kantor cabang yang telah ditingkatkan statusnya. Program pemasaran kepada komunitas dan sinergi dengan BPKH tetap menjadi sarana penyampaian produk dan program Bank agar nasabah memahami dan mengerti produk bank selain itu *engagement activity* seperti *customer gathering* dan *co-creation* lain terhadap *branding* haji akan memperkuat rencana pemasaran produk dan program yang dimiliki bank, baik secara *soft sell* dan *hard sell*.

MARKETING ASPECTS

Policy

Bank Muamalat Indonesia prepares marketing policies based on developments in the banking industry and customer needs, as well as focusing on the Bank's strategy towards the intended business targets. The Bank tries to align its marketing policies with the Bank's position as the first sharia bank in Indonesia.

These conditions make Bank Muamalat have a unique position as well as a challenge in itself, especially for business development. Meanwhile, as a pioneer, the Bank has played an important role in the progress of sharia banking in Indonesia.

The Bank also sees the rapid development of digitalization and the growth of the halal industry, as well as greater public awareness of sharia financial literacy. In facing digitalization, the Bank has prepared various strategies, including developing highly competitive products using digital systems such as digital banking services, which include mobile banking, or what is called Muamalat DIN (Digital Islamic Network), Internet Banking, or what is called Muamalat Digital Integrated Access (MADINA), Muamalat QRIS, and ATM, which continue to add features and services, including collaborating through strategic partnerships with third parties. In addition, the Bank has a network of 235 Bank offices, consisting of 1 overseas branch office (Kuala Lumpur) and 234 domestic office networks, which include the head office, main branch office, and sub-branch offices, and 635 cash service activities spread across almost all provinces in Indonesia, in order to strengthen Bank Muamalat's branding.

The bank focuses on the individual retail segment, with the enterprise segment as the entry gate and business targets that will collaborate with each other. Fulfilling consumer product variants and risk acceptance criteria specifically for the enterprise segment will be the first step to meeting customer needs (customer-centric).

The Bank's distribution and reach to customers will be expanded through a number of alternative channels, namely partners who will assist the Bank in serving customer needs in addition to the branch office network whose status has been upgraded. Marketing programs to the community and synergy with BPKH remain a means of delivering the Bank's products and programs so that customers understand the Bank's products. In addition, engagement activities such as customer gatherings and other co-creation of Hajj branding will strengthen the Bank's product and program marketing plans, both in soft sell and hard sell.



Strategi

Di tengah Pemulihan Ekonomi Indonesia namun masih dibayangi ketidakpastian serta perkembangan perbankan nasional yang mencatatkan pertumbuhan positif, Bank Muamalat melihat adanya peluang terhadap porsi perbankan syariah cukup besar. Hal itu, terutama terlihat pada ekosistem ekonomi syariah seperti sektor Haji & Umrah, ASN/BPG, Pensiun, Pendidikan, Kesehatan, Lembaga Keuangan Syariah, Industri Halal serta Masjid dan Lembaga ZISWAF. Bank Muamalat juga memiliki *brand value* yang kuat sebagai pionir Bank Syariah di Indonesia yang dipelopori oleh Umat, melalui MUI, ICMI, serta Jemaah Haji, memberikan nilai historis yang sangat melekat pada brand Muamalat.

Sebagai upaya untuk menarik lebih banyak nasabah baru, Bank sangat memperhatikan materi pemasaran yang relevan dengan perkembangan digital dan perkembangan ekonomi syariah terkini. Mulai dari konten, *experience*, *storytelling*, dan kegiatan *sharing*. Bank juga merealisasikan sejumlah produk baru dan pengembangan produk yang mengarah kepada *Customer Centric* sehingga dapat menarik minat dan membantu masyarakat, di antaranya pembiayaan kepemilikan emas (Cicil Emas), Tabungan iB Hijrah Rencana, dan pengembangan pada Muamalat DIN (Penambahan biller pembayaran, Penambahan Fitur Verifikasi Liveness Biometric pada *Customer on Boarding*, Fitur *Top Up* Uang Elektronik Tap Cash BNI, dan fitur pendaftaran DPLK Syariah Muamalat

BMI juga senantiasa menjalin komunikasi dengan nasabah secara virtual untuk menginformasikan dan menjawab keluhan nasabah. Kegiatan tersebut dilakukan melalui beragam saluran informasi, dari *e-mail*, *website*, media sosial, *push notification*, maupun pesan melalui aplikasi MDIN.

Pangsa Pasar

Mengacu pada Statistik Perbankan Syariah Posisi Desember 2023 yang dikeluarkan oleh OJK, terdapat 13 bank umum syariah dan 20-unit usaha syariah. Dari 13 bank tersebut, BMI menduduki posisi kedua dalam jumlah jaringan kantor dengan 80 kantor pusat dan 155 kantor cabang pembantu.

Sedangkan pangsa pasar jika dilihat dari sisi aset, pangsa BMI mencapai 11,3% dengan aset per Desember 2023 sebesar Rp66,9 triliun. Sementara total aset BUS di Indonesia mencapai Rp594,7 triliun posisi Desember 2023.

Dari sisi total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah secara nasional mencapai Rp368,4 triliun posisi Desember 2023, kontribusi pembiayaan Bank Muamalat Indonesiasebesar Rp22,5 triliun sehingga kontribusi BMI terhadap pembiayaan nasional sebesar 6,1%. Sementara itu nilai DPK Bank Muamalat yang tercatat sebesar Rp50,2 triliun, dari total DPKBank Syariah yang mencapai Rp465,9 triliun atau kontribusi BIM terhadap DPK nasional sebesar 10,8%.

Strategy

In the midst of Indonesia's economic recovery, which is still overshadowed by uncertainty, and the development of national banking, which has recorded positive growth, Bank Muamalat sees opportunities for a fairly large share of sharia banking. This is especially seen in the sharia economic ecosystem, such as the Hajj & Umrah sectors, ASN/BPG, Pension, Education, Health, Sharia Financial Institutions, Halal Industry and Mosques and ZISWAF Institutions. Bank Muamalat also has a strong brand value as a pioneer of Sharia Banking in Indonesia, which was pioneered by the Ummah through the MUI, ICMI, and Jemaah Haji, providing a historical value that is very attached to the Muamalat brand.

In an effort to attract more new customers, the Bank pays close attention to marketing materials that are relevant to digital developments and the latest sharia economic developments, starting with content, experience, storytelling, and sharing activities. The Bank has also implemented a number of new products and product developments aimed at customer centricity to attract interest and help the public, such as financing gold ownership (Gold Installments), the iB Hijrah Savings Plan, and the development of Muamalat DIN (the addition of a payment biller, the addition of a biometric liveness verification feature for customers on board, the BNI Tap Cash Electronic Money Top Up feature, and the Muamalat Syariah DPLK registration feature).

BMI also continues to communicate with customers virtually to inform and answer customer complaints. This activity is carried out through various information channels, including e-mail, websites, social media, push notifications, and messages via the MDIN application.

Market Share

Referring to the Sharia Banking Statistics for December 2023 issued by the OJK, there are 13 sharia commercial banks and 20 sharia business units. Of the 13 banks, BMI is in second place in terms of the number of office networks, with 80 head offices and 155 sub-branch offices.

Meanwhile, when viewed from the asset side, BMI's share reached 11.3% with assets as of December 2023 of Rp66.9 trillion. Meanwhile, total BUS assets in Indonesia reached Rp594.7 trillion in December 2023.

In terms of total financing distributed by sharia banks nationally, it reached Rp368.4 trillion as of December 2023. Bank Muamalat Indonesia's financing contribution amounted to Rp22.5 trillion, representing BMI's contribution to national financing of 6.1%. Meanwhile, Bank Muamalat's TPF value was recorded at Rp50.2 trillion, out of the total Sharia Bank TPF, which reached Rp465.9 trillion, or representing BIM's contribution to national TPF of 10.8%.



DIVIDEN

Kebijakan

Kebijakan Bank Muamalat untuk dividen mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Bank. Keputusan pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan.

Pembahasannya diawali oleh rekomendasi dari Direksi, setelah mempertimbangkan beragam faktor yang mendukungnya.

Faktor-faktor tersebut, yakni kondisi keuangan Bank, tingkat kesehatan, posisi permodalan, target dan proyeksi kecukupan modal di masa depan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, rencana dan prospek usaha Bank di masa depan. Selain itu, Direksi juga mempertimbangkan -hal lain yang dipandang relevan.

Kendati demikian, tidak ada jaminan bahwa Bank memiliki kemampuan atau membayar dividen atau keduanya pada masa yang akan datang. Demikian pula apabila ditentukan oleh regulator, Bank dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham BMI, seperti dalam hal Bank membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha atau pemenuhan kecukupan modal yang ditentukan oleh regulator.

Dengan demikian, Bank hanya akan membayar dividen dari laba bersih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran secara tunai, penerbitan saham dividen atau kombinasi dari keduanya.

Dividen yang Dibagikan

Pada tahun 2023, Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BMI, menyetujui untuk pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar 18,80% dari Laba Perseroan Tahun Buku 2022 atau sebesar Rp5.001.774.144 (lima miliar satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah).

REALISASI PEMBAYARAN DIVIDEN

Realization of Dividend Payments

Tahun Buku Financial Year	Tahun Dividen Dividend Year	Tanggal Pembayaran Payment Date	Dividen yang Dibagikan (Rp juta) Dividends Distributed (Rp million)	Dividen per Lembar Saham (Rp) Dividends per Share (Rp)	Rasio Dividen terhadap Laba Bersih (%) Dividend to Net Income Ratio (%)
2022	2023	8 Juni 2023 June 8, 2023	Rp5.001	Rp0,1	18,80%
2021	2022	-	-	-	-

DIVIDEND

Policy

Bank Muamalat's policy for dividends refers to applicable laws and regulations and the Bank's Articles of Association. The decision to distribute dividends is determined through shareholder approval at the annual General Meeting of Shareholders (GMS).

The discussion begins with a recommendation from the Board of Directors after considering various factors that support it.

These factors are the Bank's financial condition, level of soundness, capital position, targets and projections of future capital adequacy, compliance with applicable regulations, plans, and prospects for the Bank's future business. Apart from that, the Board of Directors also considers other matters deemed relevant.

However, there is no guarantee that the Bank will have the ability to pay dividends in the future. Likewise, if determined by the regulator, the Bank may not distribute dividends to BMI Shareholders, such as if the Bank needs funds to develop its business or fulfill capital adequacy as determined by the regulator.

Thus, the Bank will only pay dividends from net income based on the applicable laws and regulations in Indonesia. Dividend payments can be made in the form of cash payments, issuing dividend shares, or a combination of both.

Dividends Distribution

In 2023, according to the decision of the BMI Annual General Meeting of Shareholders, it has been approved to distribute dividends to shareholders amounting to 18.80% of the Company's Income for the 2022 Financial Year, or Rp5,001,774,144 (five billion one million seven hundred seventy-four thousand one hundred forty-four rupiah).



KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK

Kontribusi Bank Muamalat kepada negara, antara lain diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban Bank sebagai wajib pajak dan sebagai pemotong/pemungut pajak. Pada tahun 2023, total pajak yang dibayarkan mencapai Rp262,6 lebih tinggi 8,9% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp241,2 miliar.

TABEL KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK

Tax Payment Compliance Table

(Rp miliar)

(Rp billion)

Uraian	2023	2022	Description
Pajak Penghasilan	-	-	Income Tax
Pasal 4 (2)	11	12	Article 4 (2)
Pasal 21	8	5	Article 21
Pasal 23	0,30	0,14	Article 23
Pasal 26	0,07	0,09	Article 26
Pasal 29	0,08	2	Article 29
Pajak Pertambahan Nilai	2	2	Value Added Tax
Total	22	22	Total

KOMPENSASI JANGKA PANJANG: PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Hingga 31 Desember 2023, Bank tidak mengeluarkan program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP).

LONG TERM COMPENSATION: EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

Until December 31, 2023, the Bank did not issue a Share Ownership program for Employees and/or Management (ESOP/MSOP).

INFORMASI MATERIAL TERKAIT DENGAN INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI

Investasi

Bank Muamalat Indonesia tidak melakukan kegiatan investasi di tahun 2023 sehingga informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan investasi tidak disajikan oleh Bank Muamalat Indonesia.

Investment

Bank Muamalat Indonesia did not carry out investment activities in 2023, so information regarding the objectives, transaction value, and source of funds for investment activities is not presented by Bank Muamalat Indonesia.

Ekspansi

Bank Muamalat Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspansi di tahun 2023 sehingga informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan ekspansi tidak disajikan oleh Bank Muamalat Indonesia.

Expansion

Bank Muamalat Indonesia did not carry out expansion activities in 2023, so information regarding the objectives, transaction value, and sources of funds for expansion activities is not presented by Bank Muamalat Indonesia.

Divestasi

Bank Muamalat Indonesia tidak melakukan transaksi kegiatan divestasi yang material di tahun 2023.

Divestment

Bank Muamalat Indonesia did not carry out material divestment activity transactions in 2023.



Akuisisi

Tahun 2022, Bank Muamalat Indonesia tidak melakukan kegiatan akuisisi sehingga informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan akuisisi tidak disajikan.

Restrukturisasi Utang/Modal

Jumlah pembiayaan yang telah direstrukturisasi Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp6,96 triliun dan Rp7,48 triliun. Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan piutang dan penjadwalan kembali pembayaran yang tertunggak.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AGILIASI/BERELASI

Bank mendefinisikan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai dengan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2010) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi." Mengacu pada ketentuan tersebut, suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

1. Langsung atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak:
 - i. Mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank;
 - ii. Memiliki kepentingan dalam Bank yang memberikan pengaruh signifikan atas Bank; atau
 - iii. Memiliki pengendalian bersama atas Bank;
2. Suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
3. Suatu pihak adalah ventura bersama di mana Bank sebagai *venture*;
4. Suatu pihak adalah anggota dari personel dari manajemen kunci Bank;
5. Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
6. Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
7. Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.

Acquisition

In 2022, Bank Muamalat Indonesia did not carry out acquisition activities, so information regarding the objectives, transaction value, and source of funds for acquisition activities is not presented.

Debt/Capital Restructuring

The amount of financing that has been restructured by the Bank as of December 31, 2023, and 2022 reached Rp6.96 trillion and Rp7.48 trillion respectively. Restructuring schemes are generally carried out by extending the repayment period for receivables and rescheduling outstanding payments.

MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED/RELATED PARTIES

The Bank defines transactions with related parties in accordance with PSAK No. 7 (2010 Adjustment) on "Related Party Disclosures." Referring to these provisions, a party is considered a related party to the Bank if:

1. Directly or indirectly through one or more intermediaries, a party:
 - i. Controls, or is controlled by, or is under common control with, the Bank;
 - ii. Has an interest in the Bank that provides significant influence over the Bank; or
 - iii. Has joint control over the Bank;
2. A party that is in the same business group as the Bank;
3. A party is a joint venture in which the Bank is the venturer;
4. A party is a member of the Bank's key management personnel;
5. A party is a close family member of the individual described in points (1) or (4);
6. A party is an entity that is controlled, jointly controlled, or significantly influenced by or for a party that has significant voting rights in several entities, directly or indirectly, namely individuals as described in points (4) or (5); and
7. A party is a post-employment benefit program for employee benefits from the Bank or an entity related to the Bank



Transaksi dengan Pihak Afiliasi atau Berelasi

Dari definisi PSAK No. 7 (Revisi 2010) mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”, Bank Muamalat mengelompokkan pihak-pihak berelasi: Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan kunci, pemegang saham, komisaris PT Syarikat Takaful Indonesia, Pengurus utama Baitul Maal Muamalat dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat, PT Al Ijarah Indonesia Finance.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam laporan keuangan.

Kewajaran Transaksi

Transaksi benturan kepentingan atau dengan pihak afiliasi yang dilakukan oleh Bank, didasari pada persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

Bank memiliki kebijakan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi material diputuskan oleh Dewan Komisaris dan senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, transaksi material juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara Independen. Selama tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi serta tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan

Transaksi benturan kepentingan atau dengan pihak afiliasi yang dilakukan oleh Bank berlandaskan pada syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan POJK No. 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan.

Transactions with Affiliated or Related Parties

From the definition of PSAK No. 7 (Revised 2010) regarding “Related Party Disclosures”, Bank Muamalat classifies related parties as follows: The Board of Commissioners, the Board of Directors and key employees, shareholders, commissioners of PT Syarikat Takaful Indonesia, the main board of Baitul Maal Muamalat, and the Pension Fund of Muamalat Financial Institution, PT Al Ijarah Indonesia Finance.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the relevant financial statements, and the details are presented in the financial statements.

Fairness of Transaction

Transactions with conflicts of interest or with affiliated parties carried out by the Bank are based on terms agreed upon by both parties. Transactions with related parties are carried out with the same terms and conditions as transactions with third parties.

The Bank has a policy regarding transactions that contain conflicts of interest and/or transactions with related parties. Material transactions are decided by the Board of Commissioners and are always carried out with due regard to the principle of prudence and in compliance with applicable laws and regulations.

In addition, material transactions must also be decided independently by the Board of Commissioners. In 2023, there were no violations of laws and regulations related to transactions with related parties, and there were no transactions containing conflicts of interest.

Compliance with Rules and Regulations

Transactions with conflicts of interest or with affiliated parties carried out by the Bank are based on the same terms and conditions as transactions with third parties. Transactions carried out by the Bank have complied with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, and POJK No. 42/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions, when these transactions are carried out.



Pernyataan Direksi

Direksi selalu memastikan bahwa transaksi afiliasi yang berlangsung di Bank sesuai dengan definisi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transaksi juga telah melalui prosedur yang memadai serta sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit

Untuk transaksi material yang mengandung benturan kepentingan, Dewan Komisaris dan Komite Audit memiliki peran untuk memastikan transaksi yang dilakukan melalui prosedur yang memadai. Transaksi juga harus dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum serta memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

Rujukan dalam Laporan Keuangan

Informasi terkait dengan transaksi afiliasi diuraikan lebih rinci pada Laporan Keuangan yang telah diaudit, yang terdapat pada bagian "Lampiran Laporan Tahunan".

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Bank Muamalat telah merealisasikan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PM HMETD) pada tahun 2021, dana tersebut digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Bank dalam rangka kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Bank serta peruntukan lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis Bank Muamalat pada tahun 2023.

Statement of the Board of Directors

The Board of Directors always ensures that affiliated transactions taking place at the Bank comply with the definitions of applicable laws and regulations. Transactions have also gone through adequate procedures and are in accordance with generally accepted business practices, including being carried out by complying with the arm's-length principle.

Role of the Board of Commissioners and Audit Committee

For material transactions that contain a conflict of interest, the Board of Commissioners and the Audit Committee have a role in ensuring that transactions are carried out using adequate procedures. Transactions must also be carried out in accordance with generally accepted business practices and comply with the arm's-length principle.

References in Financial Statements

Information related to affiliate transactions is described in more detail in the audited Financial Statement, which is contained in the "Attachments to the Annual Report" section.

REALIZATION OF THE USE OF PUBLIC OFFERING PROCEEDS

Bank Muamalat has realized additional capital by providing Pre-emptive Rights (PM HMETD) in 2021. These funds are used to strengthen the Bank's capital structure in the context of sharia financing activities, which are part of the Bank's main business activities, as well as for other purposes that can support Bank Muamalat business growth in 2023.



PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP BANK

Berikut adalah perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap Bank beserta dampak Perubahan dan Informasi penyesuaian yang dilakukan Bank Muamalat terhadap perubahan tersebut selama tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

AMENDMENTS IN LEGISLATION AND REGULATIONS AFFECTING THE BANK

The following are amendments to statutory regulations that affect the Bank, including the impact of the amendments and information on adjustments made by Bank Muamalat to these amendments during the 2023 financial year as follows:

No.	Peraturan Regulation	Pokok Peraturan Principal Regulation	Dampak Terhadap Bank Impact on Banks
1	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of Financial Sector	Undang-Undang ini mereformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan Stabilitas Sistem Keuangan dan pengembangan dan penguatan industri. Oleh sebab itu, Undang-Undang ini mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan dalam hal ini antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Salah satunya melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mekanisme pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dalam jaringan sistem keuangan. Selanjutnya, penguatan lembaga yang berwenang sebagai pengatur dan pengawas sektor keuangan dilakukan untuk menjaga kestabilan industri sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat. This law reforms the financial sector by regulating institutions, ensuring financial system stability, and developing and strengthening the industry. Therefore, this Law regulates the strengthening of supervisory and regulatory relations between institutions in the financial sector in order to realize Financial System Stability, in this case between the Financial Services Authority, Bank Indonesia, the Deposit Insurance Corporation, and the Ministry of Finance. One of them is through the Financial System Stability Committee as a macroprudential and microprudential supervision mechanism in the financial system safety net. Furthermore, strengthening the authorized institutions as regulators and supervisors of the financial sector is carried out to maintain the stability of the financial sector industry and increase public trust.	1. Bank Muamalat akan menyesuaikan seluruh ketentuan internal Bank agar selaras dengan ketentuan ini, terutama ketentuan mengenai Rahasia Bank. 2. Mengingat terdapat pengaturan-pengaturan yang akan diperjelas dalam peraturan turunan, maka dalam melakukan penyesuaian/ menerapkan ketentuan UU P2SK, Bank Muamalat akan memerhatikan peraturan turunan UU P2SK yang akan diterbitkan regulator (OJK, BI, Kemenkeu, dan sebagainya) terlebih dahulu. 1. Bank Muamalat will adjust all internal Bank regulations to be in line with these provisions, especially those regarding Bank Secrecy. 2. Considering that there are regulations that will be clarified in derivative regulations, in making adjustments/implementing the provisions of the P2SK Law, Bank Muamalat will firstly pay attention to the derivative regulations of the P2SK Law that will be issued by regulators (OJK, BI, Ministry of Finance, and so on).



No.	Peraturan Regulation	Pokok Peraturan Principal Regulation	Dampak Terhadap Bank Impact on Banks
2	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2022 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum. Financial Services Authority Circular Letter Number 28/SEOJK.03/2022 concerning Risk Management Certification for Human Resources of Commercial Bank.	1. Sertifikat Manajemen Risiko wajib dimiliki oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan Pejabat selain Pejabat Eksekutif pada SKMR, SKK dan SKAI. 2. Sertifikasi Manajemen Risiko diselenggarakan oleh LSP sektor perbankan yang terdaftar di OJK dan terdapatnya penyesuaian level pada sertifikasi Manajemen Risiko yang baru. 3. Masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko yaitu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang. 4. Pengaturan mengenai kriteria program pemeliharaan (<i>refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko. 1. Risk Management Certificates must be possessed by members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Executive Officers, and Officials other than Executive Officers at SKMR, SKK, and SKAI. 2. Risk Management Certification is carried out by banking sector LSPs registered with the OJK, and there is a level adjustment in the new Risk Management certification. 3. The validity period of the Risk Management Certificate is 3 (three) years from the date of issuance and can be extended. 4. Setting the criteria for the Risk Management Certification maintenance (refreshment) program.	Bank Muamalat telah berkoordinasi dengan LSP sektor perbankan yang terdaftar di OJK untuk pemenuhan kriteria pemeliharaan dan penyesuaian tingkat kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko untuk anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan Pejabat selain Pejabat Eksekutif pada SKMR, SKK dan SKAI. Bank Muamalat has coordinated with banking sector LSPs registered with the OJK to fulfill the criteria for maintaining and adjusting the level of ownership of Risk Management Certificates for members of the Board of Directors, members of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, Executive Officers, and Officials other than Executive Officers at SKMR, SKK, and SKAI.
3	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.03/2022 Tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum. Financial Services Authority Circular Letter Number 29/SEOJK.03/2022 concerning Resilience and Cyber Security for Commercial Banks.	1. Pengaturan terkait faktor penilaian risiko inheren yaitu teknologi, produk bank, karakteristik organisasi, dan rekam jejak insiden siber. 2. Pengaturan tingkat risiko keamanan siber berdasarkan penilaian risiko inheren dan tingkat maturitas keamanan siber. 3. Pengaturan terkait penilaian tingkat maturitas keamanan siber dilakukan secara tahunan untuk posisi akhir bulan Desember, pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan Desember 2022 dan disampaikan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan Juni 2023. Laporan tersebut sebagai bagian dari Laporan Kondisi Terkini Penyelenggaraan TI Bank. 4. Pengaturan mengenai cakupan penilaian tingkat maturitas keamanan siber. 1. Regulations related to inherent risk assessment factors, namely technology, bank products, organizational characteristics, and tracking records of cyber incidents. 2. Setting the cyber security risk level based on the inherent risk assessment and cyber security maturity level. 3. Arrangements related to the assessment of cyber security maturity levels are carried out annually for the position at the end of December, first carried out for the position at the end of December 2022, and submitted to the OJK no later than the end of June 2023. The report is part of the Current Condition Report on Bank IT Implementation. 4. Regulations regarding the scope of cyber security maturity level assessment.	1. Bank Muamalat telah memenuhi kewajiban Laporan Kondisi Terkini Penyelenggaraan TI Bank. 2. Bank Muamalat harus melakukan penilaian risiko inheren terkait keamanan siber dan penilaian tingkat maturitas keamanan siber. 1. Bank Muamalat has fulfilled its obligation to report the current condition of the Bank's IT operations. 2. Bank Muamalat must assess inherent risks related to cyber security and an assessment of cyber security maturity levels.



No.	Peraturan Regulation	Pokok Peraturan Principal Regulation	Dampak Terhadap Bank Impact on Banks
4.	POJK 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum.	- Secara umum, POJK Tata Kelola ini mengatur mengenai kewajiban Bank untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha yang diwujudkan dalam beberapa aspek antara lain yaitu: pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi serta Dewan Komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, penanganan benturan kepentingan, dan penerapan fungsi kepatuhan. - POJK ini juga mengatur audit internal, audit eksternal, penerapan manajemen risiko, remunerasi, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, integritas pelaporan serta sistem teknologi informasi, rencana strategis Bank, aspek pemegang saham termasuk kebijakan dividen, penerapan strategi antifraud, penerapan keuangan berkelanjutan, dan penerapan tata kelola dalam kelompok usaha Bank.	- Bank Muamalat wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dan ketentuan internal Bank agar selaras dengan POJK 17 Tahun 2023. - Bank Muamalat telah menerapkan tata Kelola yang baik paling sedikit mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran. - Bank Muamalat telah melakukan penyesuaian ketentuan internal pada piagam dan keanggotaan Komite Tingkat Dewan Komisaris dan Komite Tingkat Direksi sesuai dengan POJK 17 Tahun 2023. - Bank Muamalat telah memperhatikan ketentuan-ketentuan baru terkait Penggantian, pemberhentian, dan/atau pengangkatan Direksi/ Dekom sesuai POJK 17 Tahun 2023. - Bank Muamalat telah menerapkan ketentuan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam melaksanakan kegiatan Usaha
	POJK 17 of 2023 concerning Governance for Commercial Banks.	- In general, this POJK Governance regulates the Bank's obligations to implement good governance in carrying out business activities, which are manifested in several aspects, including the implementation of duties, the responsibilities and authority of the Board of Directors and Board of Commissioners, the completeness and implementation of committee duties, handling conflicts of interest, and implementing compliance functions. - This POJK also regulates internal audits, external audits, implementation of risk management, remuneration, provision of funds to related parties and provision of large funds, integrity of reporting and information technology systems, Bank strategic plans, shareholder aspects including dividend policy, implementation of antifraud strategies, implementation of sustainable finance, and implementation of governance within the Bank's business group.	- Bank Muamalat is required to adjust the Bank's Articles of Association and internal regulations in order to be in line with POJK 17 of 2023. - Bank Muamalat has implemented good governance, which at least includes the principles of openness, accountability, responsibility, independence, and fairness. - Bank Muamalat has adjusted the internal provisions in the charter and membership of the Board of Commissioners Level Committees and the Board of Directors Level Committees in accordance with POJK 17 of 2023. - Bank Muamalat has considered the new provisions regarding the replacement, dismissal, and/or appointment of the Board of Directors/ Board of Commissioners in accordance with POJK 17 of 2023. - Bank Muamalat has implemented anti-money laundering provisions, counter-terrorism financing, and counter-proliferation financing of weapons of mass destruction in carrying out business activities.



No.	Peraturan Regulation	Pokok Peraturan Principal Regulation	Dampak Terhadap Bank Impact on Banks
5.	PBI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. PBI Number 3 of 2023 concerning Bank Indonesia Consumer Protection.	- Ketentuan ini mengatur mengenai perlindungan data dan mengikuti G20/OECD High Level Principles on Financial Consumer Protection, dimana terdapat penyesuaian dan pengaturan kembali ketentuan mengenai aspek-aspek perlindungan konsumen yang berada dalam cakupan kewenangan Bank Indonesia. - PBI ini mengatur di antaranya ketentuan- ketentuan sebagai berikut: Prinsip Perlindungan Konsumen, Penanganan Pengaduan Konsumen oleh Bank Indonesia, dan Kegiatan Pengawasan oleh BI. - This provision regulates data protection and follows the G20/ OECD High Level Principles on Financial Consumer Protection, where there are adjustments and re-regulation of provisions regarding aspects of consumer protection that are within the scope of Bank Indonesia's authority. - This PBI regulates, among other things, the following provisions: Principles of Consumer Protection, Handling of Consumer Complaints by Bank Indonesia, and Supervision Activities by BI.	Bank Muamalat telah melakukan penyesuaian ketentuan internal dan ketentuan produk/layanan dengan mengacu pada PBI Pelindungan Konsumen khususnya produk-produk yang berkaitan dengan Sistem Pembayaran. Bank Muamalat has adjusted internal regulations and product/service provisions by referring to PBI Consumer Protection, especially products related to Payment Systems.
6	Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan. LPS Regulation Number 1 of 2023 concerning the Deposit Guarantee Program.	Pokok pengaturan dalam PLPS 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut: - Pengaturan Kepesertaan - Pengaturan Premi Penjaminan - Pengaturan Penjaminan Simpanan - Pengaturan Penanganan Keberatan - Pengaturan Sanksi Administratif dan Pidana The main regulations in PLPS 1 of 2023 are as follows: - Membership Arrangements - Guarantee Premium Settings - Deposit Insurance Arrangements - Complaint Handling Arrangements - Regulation of Administrative and Criminal Sanctions	- Bank Muamalat akan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur oleh PLPS Nomor 1 Tahun 2023 yaitu: - Melakukan Penilaian Sendiri atas Kewajiban Bank - Perubahan Ketentuan Surat Pernyataan Bank - Bank Muamalat akan menyesuaikan perhitungan premi LPS dimana terdapat penyesuaian jenis simpanan yang dijamin oleh LPS. - Bank Muamalat akan menunaikan kewajiban pembayaran premi yang dibayarkan kepada LPS sesuai dengan ketentuan. - Bank Muamalat will carry out the obligations regulated by PLPS Number 1 of 2023, namely: - Carry out self-assessment of the Bank's obligations - Changes to Bank Statement Provisions - Bank Muamalat will adjust the LPS premium calculation where there are adjustments to the types of deposits guaranteed by LPS. - Bank Muamalat will fulfill its premium payment obligations to LPS in accordance with the provisions.



No.	Peraturan Regulation	Pokok Peraturan Principal Regulation	Dampak Terhadap Bank Impact on Banks
7	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2023 Tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum. Financial Services Authority Circular Number 24/SEOJK.03/2023 concerning the Assessment of Digital Maturity Levels of Commercial Banks.	- Bank dapat melakukan penilaian tingkat maturitas digital Bank secara mandiri dan/atau menggunakan pihak ketiga. - Bank memiliki kebijakan dan prosedur intern dalam melakukan penilaian yang memuat paling sedikit mengenai pihak yang melakukan penilaian dan pihak yang melakukan review atas penilaian yang disesuaikan dengan organisasi dan kompleksitas Bank. - Bank melakukan penilaian sendiri atas tingkat maturitas digital Bank secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sebagai bagian dari laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI Bank. - Penilaian tingkat maturitas digital Bank pertama kali dilakukan oleh Bank untuk posisi akhir bulan Desember 2023 dan hasil penilaian dimaksud disampaikan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan Juni 2024	- Bank Muamlat telah memenuhi kewajiban Laporan Kondisi Terkini Penyelenggaraan TI Bank. - Bank Muamlat harus melakukan Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum.
8	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Bank Indonesia Regulations No 11 of 2023 concerning Liquidity Incentives Macroprudential (KLM) Policy.	Bank Indonesia memberikan KLM bagi Bank yang menyalurkan: - Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia - Pembiayaan Inklusif berdasarkan pencapaian Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) - Pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro (UMi) - Pembiayaan berwawasan lingkungan; dan/ atau Pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.	Bank Muamalat harus menyampaikan laporan secara berkala terkait pemberian kredit atau pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro (UMi) kepada Bank Indonesia sebagai dasar Bank Indonesia untuk memberikan KLM, dimana KLM diberikan dalam bentuk pengurangan giro Bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan GWM yang wajib dipenuhi secara rata-rata.



No.	Peraturan Regulation	Pokok Peraturan Principal Regulation	Dampak Terhadap Bank Impact on Banks
9	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.	- Pihak (Bank Umum, emiten dan Perusahaan Publik) dapat menggunakan kembali jasa audit setelah melewati masa jeda : - AP bertindak sebagai Rekan perikatan, masa jeda 5 (lima) tahun tahun buku pelaporan secara berturut-turut. - AP bertindak sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan, masa jeda 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut. - Rekan perikatan lainnya, masa jeda 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut. - Pihak selain diatas wajib membatasi penggunaan jasa audit dari AP yang sama paling lama untuk periode selama audit 5 (lima) tahun berturut-turut, juga berlaku bagi AP yang merupakan pihak terasosiasi dan personil KAP dengan jabatan 1 (satu) level di bawah AP yang terlibat dalam pemberian jasa audit. Selain itu juga hanya dapat menggunakan kembali jasa audit setelah melewati masa jeda selama 2 (dua) tahun berturut-turut. - Pihak wajib menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada OJK mengenai : - Penunjukan AP dan KAP paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian kerja. - Realisasi penggunaan jasa AP dan KAP paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. - Parties (Commercial Banks, Issuers, and Public Companies) can use audit services again after passing the cooling-off period: - PA acts as an engagement partner, with a cooling-off period of 5 (five) consecutive reporting financial years. - PA acts as the person responsible for reviewing engagement quality control, with a cooling-off period of 3 (three) consecutive reporting financial years. - Other engagement partners, with a cooling off period of 2 (two) consecutive reporting financial years. - Parties other than the above are required to limit the use of audit services from the same PA for a maximum period of 5 (five) consecutive audit years. This also applies to PAs who are associated parties and PAF personnel with a position 1 (one) level below the PA involved in providing audit services. Apart from that, audit services can only be used again after passing a cooling-off period of 2 (two) consecutive years. - Parties are required to submit periodic reports every year to OJK regarding: - Appointment of PA and PAF no later than 10 (ten) working days after the work agreement. - Realization of the use of PA and PAF services no later than 6 (six) months after the financial year ends.	- Bank Muamalat telah melakukan penyesuaian pada ketentuan internal tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. - Bank Muamalat harus menyampaikan laporan berkala setiap tahun ke OJK mengenai penunjukan AP dan KAP dan realisasi penggunaan jasa AP dan KAP. - Bank Muamalat has adjusted the internal regulations regarding the use of public accounting services and public accounting firms in financial services activities. - Bank Muamalat must submit periodic reports every year to the OJK regarding the appointment of PA and PAF and the realization of the use of PA and PAF services.



No.	Peraturan Regulation	Pokok Peraturan Principal Regulation	Dampak Terhadap Bank Impact on Banks
10	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme Center for Financial Transaction Reports and Analysis Circular Letter Number 05 of 2023 concerning Indicators of Suspicious Financial Transactions Related to Terrorism Financing	Pokok pengaturan dalam ketentuan ini adalah sebagai berikut: 1. Orang/entitas melakukan transaksi untuk penjualan/pembelian mata uang virtual secara langsung atau melalui perantara mata uang virtual (<i>peer-to-peer</i>) secara <i>over the counter</i> (OTC) yang memungkinkan peningkatan anonimitas. 2. Terdapat aliran dana dari kantor utama organisasi nirlaba asing yang berada di negara berisiko tinggi kasus terorisme, kepada cabang organisasi nirlaba asing yang berada di Indonesia kemudian dana tersebut mengalir kembali ke organisasi nirlaba lokal yang berlokasi di daerah berisiko tinggi terhadap aksi terorisme dan/ atau aktivitas organisasi terorisme di Indonesia. 3. Transaksi yang dilakukan oleh orang/ entitas yang termasuk dalam daftar pantau yang disampaikan dalam sistem informasi terduga pendanaan terorisme (SIPENDAR) setelah dilakukan analisis transaksi keuangan terindikasi terkait pendanaan terorisme. 4. Pengguna jasa merupakan orang atau entitas yang terlibat dalam transaksi (keuangan maupun nonkeuangan) yang terkait dengan teroris atau kelompok teroris yang dilarang berdasarkan daftar terduga teroris dan terduga teroris yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1267. The main regulations in this provision are as follows: 1. Persons/entities carry out transactions for the sale/purchase of virtual currency directly or through virtual currency intermediaries (peer-to-peer) over the counter (OTC), which allows increased anonymity. 2. There is a flow of funds from the main office of a foreign non-profit organization located in a country with a high risk of terrorism cases to the branch of a foreign non-profit organization located in Indonesia, and then these funds flow back to local non-profit organizations located in an area with a high risk of acts of terrorism and/or activities of terrorist organizations in Indonesia. 3. Transactions carried out by persons/entities included in the monitoring list submitted to the suspected terrorism financing information system (SIPENDAR) after analyzing financial transactions indicated to be related to terrorism financing. 4. Service users are persons or entities involved in transactions (financial or non-financial) related to terrorists or terrorist groups that are prohibited based on the list of suspected terrorists and suspected terrorists issued by the United Nations Security Council 1267.	Bank Muamalat telah melakukan penyesuaian pada ketentuan internal Bank dengan berpedoman pada ketentuan ini. Bank Muamalat has adjusted the Bank's internal regulations based on these provisions.



No.	Peraturan Regulation	Pokok Peraturan Principal Regulation	Dampak Terhadap Bank Impact on Banks
11	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat. Financial Services Authority Regulation Number 3 of 2023 concerning Increasing Literacy and Financial Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the Community.	- PUJK wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat sebagai program tahunan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. - Kewajiban PUJK dalam melaksanakan kegiatan Literasi Keuangan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali untuk kegiatan Edukasi Keuangan. - PUJK wajib menyusun dan menyampaikan: - Laporan Literasi Keuangan (Laporan rencana dan realisasi); dan - Laporan Inklusi Keuangan (Laporan rencana dan realisasi), kepada Otoritas Jasa Keuangan. - PUJK is obliged to carry out activities to increase Financial Literacy and Inclusion for Consumers and/or the public as an annual program, at least once per semester. - PUJK's obligation to carry out Financial Literacy activities is to carry out Financial Education activities at least 1 (one) time. - PUJK is obliged to prepare and submit: - Financial literacy report (plan and realization report); and - Financial Inclusion report (plan and realization report) to the Financial Services Authority.	- Bank Muamalat harus menyesuaikan ketentuan mengenai Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. - Bank Muamalat telah menyusun laporan Literasi Keuangan (Laporan rencana dan realisasi) dan laporan Inklusi Keuangan (Laporan rencana dan realisasi) serta menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan. - Bank Muamalat must adjust the provisions regarding Financial Literacy and Financial Inclusion. - Bank Muamalat has prepared a Financial Literacy report (plan and realization report) and a Financial Inclusion report (plan and realization report) and submitted them to the Financial Services Authority.
12	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/20/PADG/2022 Tentang Laporan Penerapan Kode Etik Pasar dan Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri. Regulation of Members of the Board of Governors Number 24/20/PADG/2022 Concerning Report on the Implementation of the Market Code of Ethics and Implementation of Treasury Certification.	- Pelaku Transaksi di Pasar Uang dan LSP (Pelapor) wajib menyusun dan menyampaikan laporan ke Bank Indonesia (BI) mengenai kepemilikan dan pemenuhan sertifikat tresuri dan laporan mengenai penerapan kode etik pasar. - Laporan yang disampaikan berupa : - Daftar Direksi dan Pegawai serta Kepemilikan Sertifikat Tresuri (bagi pelaku transaksi di Pasar Uang); dan - Daftar Pemilik Sertifikat Tresuri (bagi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)) - Money Market Transaction Actors and LSPs (Reporters) are required to prepare and submit reports to Bank Indonesia (BI) regarding ownership and compliance with treasury certificates and reports regarding the implementation of the market code of ethics. - The report submitted is in the form of: - List of the Board of Directors and Employees and Ownership of Treasury Certificates (for transaction actors in the Money Market); and - List of Treasury Certificate Owners (for Professional Certification Institutions (LSP))	- Bank Muamalat wajib menyampaikan laporan mengenai kepemilikan dan pemenuhan sertifikat tresuri dan laporan mengenai penerapan kode etik pasar kepada Bank Indonesia. - Bank Muamalat wajib memenuhi ketentuan mengenai kepemilikan sertifikat tresuri bagi para pihak yang melakukan transaksi di Pasar Uang. - Bank Muamalat is required to submit a report regarding ownership and fulfillment of treasury certificates and a report regarding the implementation of the market code of ethics to Bank Indonesia. - Bank Muamalat is obliged to fulfill the provisions regarding ownership of treasury certificates for parties carrying out transactions on the Money Market.



PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 yang berdampak terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian laporan keuangan";
- Amendemen PSAK 16: "Aset Tetap";
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan akuntansi, Perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan"; dan
- Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan".
- Revisi PSAK 107: "Akuntansi Ijarah"

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi dan tidak memiliki dampak terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Beberapa standar akuntansi baru dan interpretasi dari standar akuntansi telah diterbitkan dan belum berlaku efektif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan belum diterapkan pada penyusunan laporan keuangan ini.

PSAK dibawah ini akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 dan penerapan dini diperbolehkan:

- Amendemen PSAK 73: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa balik.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

New standards, revisions, and interpretations that have been issued and are effective for financial years beginning on or after January 1, 2023 and that have an impact on financial statements are as follows:

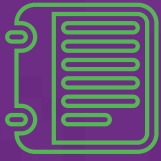
- Amendment to PSAK 1: "Presentation of financial statements";
- Amendment to PSAK 16: "Fixed Assets";
- Amendment to PSAK 25: "Accounting policies, changes in accounting estimates, and errors"; and
- Amendment to PSAK 46: "Income Tax".
- Revised PSAK 107: "Ijarah Accounting"

The implementation of these standards does not result in changes to accounting policies and has no impact on the amounts reported in the current period or previous years.

Several new accounting standards and interpretations of accounting standards have been issued, have not yet become effective for the financial year ending December 31, 2023, and have not been applied to the preparation of these financial statements.

The PSAK below will be effective January 1, 2024, and early implementation is permitted:

- Amendment to PSAK 73: "Lease" regarding rental liabilities in sale and leaseback transactions.



Fungsi Penunjang Bisnis

Business Support Function

Sumber Daya Manusia Human Capital	228
Teknologi Informasi Information Technology	248
Manajemen Risiko Risk Management	259





Sumber Daya Manusia

Human Capital

Program keterlibatan karyawan merupakan sarana BMI untuk melibatkan peran aktif karyawan dalam mengikuti beragam kegiatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas, kedisiplinan, loyalitas karyawan, profitabilitas perusahaan, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen.

The employee engagement program allows BMI to engage employees in various activities aimed at increasing productivity, discipline, employee loyalty, company profitability, and customer satisfaction and loyalty.



82 jam
hour

**Rata-rata jam
pelatihan karyawan**
Average hours of
employee training



55,4%

**Porsi karyawan
Generasi Y dan
Generasi Z masing-
masing 55,4% dan
41,9% terhadap total
karyawan. Sedangkan
Generasi X 2,3%.**
Generation Y and
Generation Z employees
account for 55.4%
and 41.9% of total
employees, respectively.
Meanwhile, Generation
X is 2.3%.

Secara regulasi, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("BMI", "Bank") mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa Bank wajib melakukan pengelolaan dan pengembangan SDM. Begitu juga dengan anggarannya yang harus dialokasikan setiap tahun.

Seperti halnya regulasi tersebut, BMI juga memandang keberadaan SDM sangat penting untuk mendukung pencapaian target, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Karena itulah, pengelolaan dan pengembangan SDM termasuk salah satu fokus utama Bank.

By regulation, Human Capital (HC) management at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("BMI", "Bank") refers to Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 24 of Year 2022 regarding Development of the Quality of Human Resources for Commercial Banks. This regulation mandates that banks are obligated to manage and develop human resources. Its budget as well must be allocated every year.

As is the case with these regulations, BMI also views the presence of human resources as very important to support target achievement, for the short, medium and long terms. Thus, HC management and development are one of the Bank's main focuses.



BMI secara konsisten terus memperhatikan pengelolaan dan pengembangan SDM melalui peningkatan produktivitas dan *engagement* terhadap Bank. Hal ini dilakukan melalui program yang lebih terstruktur, optimalisasi efektivitas biaya tenaga kerja, peningkatan skema *reward* dan *recognition* yang lebih terarah, serta peningkatan infrastruktur SDM yang juga mendukung penguatan nilai-nilai budaya Bank.

Dalam rangka percepatan pemenuhan Karyawan di sektor bisnis, Bank telah menyelenggarakan Program Muamalat Associate Program yaitu program pengembangan yang bertujuan untuk membekali Peserta dengan pengetahuan tentang berbagai aspek produk dan layanan perbankan syariah, memahami konsep pembiayaan dan/ atau produk/ layanan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh Nasabah serta kemampuan untuk memberikan solusi finansial khususnya di bidang *consumer banking*, *wholesale banking*, *digital banking* dan *small medium enterprise banking* (SME).

BMI consistently continues to pay attention to HC management and development through increasing productivity and engagement with the Bank. This is carried out through more structured programs, optimizing labor cost effectiveness, increasing more targeted reward and recognition schemes, as well as improving HR infrastructure which also supports the strengthening of the Bank's cultural values.

To accelerate Employee fulfillment in the business sector, the Bank carried out the Muamalat Associate Program, a development program which aims to equip Participants with knowledge on various aspects of sharia banking products and services, understand the concept of financing and/or other products/services that can be utilized by customers as well as the ability to provide financial solutions, especially in areas of consumer banking, wholesale banking, digital banking and small medium enterprise banking (SME).



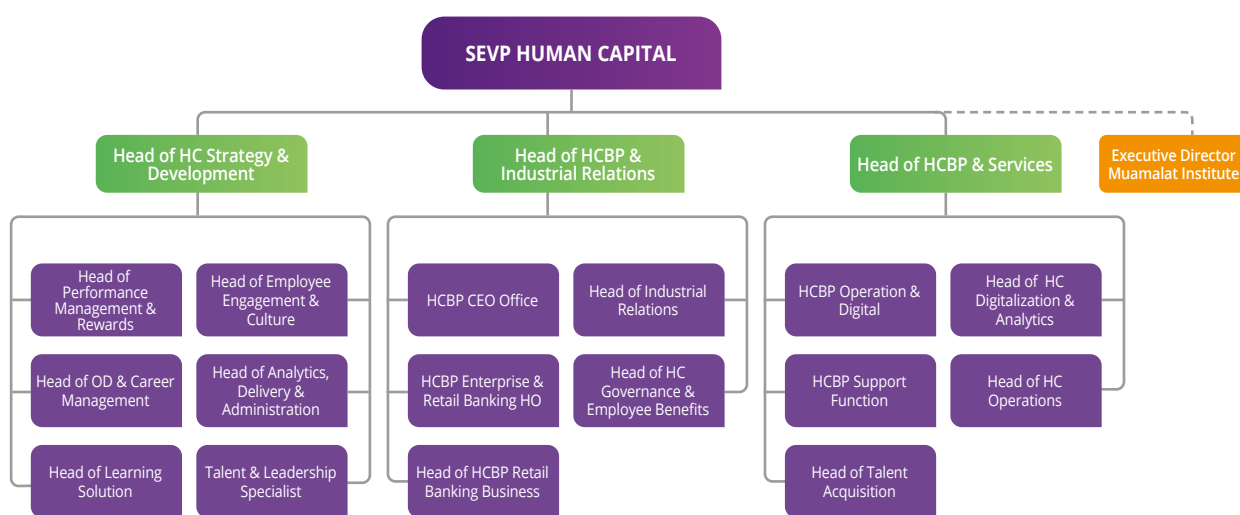
PENGELOLA SDM

Pengelolaan SDM di lingkungan Bank dilaksanakan oleh Direktorat Human Capital. Direktorat ini dipimpin oleh Senior Executive Vice President (SEVP) Human Capital dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan karyawan.

HC MANAGEMENT

The Directorate of Human Capital is in charge of human capital management at the bank. This directorate is in charge of employee management and development and is led by the Senior Executive Vice President (SEVP) Human Capital.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA SDM HC Management Organizational Structure



Direktorat Human Capital memiliki 4 (empat) unit kerja, yang 1 (satu) di antaranya merupakan *subsidiary*, yaitu Muamalat Institute - Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Perbankan Syariah (LPPBS). Penjelasan mengenai masing-masing unit kerja tersebut adalah:

The Human Capital Directorate comprises 4 (four) work units, one of which is a subsidiary, the Islamic Banking Education and Development Institute (LPPBS), namely the Muamalat Institute. Each work unit is described as follows:

No.	Unit Kerja Work Unit	Peran dan Fungsi	Role and Function
1	Human Capital Strategy & Development	Menerjemahkan strategi bisnis ke dalam prioritas Human Capital. Mencakup pengembangan organisasi, perencanaan tenaga kerja dan penganggaran biaya tenaga kerja, manajemen kinerja, kerangka kerja remunerasi dan kompensasi, serta bertanggung jawab untuk menyusun strategi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan pengembangan SDM. Mengelola seluruh aktivitas dalam pelaksanaan program pembelajaran dan pembinaan talenta di BMI untuk menciptakan kualitas program pembelajaran dan pembinaan talenta sesuai dengan strategi pengembangan SDM guna mendukung peningkatan kualitas SDM dalam mendukung strategi bisnis Bank. Peran lainnya adalah mengelola komunikasi karyawan (<i>Employee Engagement</i>) dan <i>Employer Branding</i> .	Transform business strategy into priorities for Human Capital. This includes organizational development, workforce planning, labor cost budgeting, performance management, remuneration and compensation frameworks, and responsible for developing effective and efficient strategies in managing HR development. Manage all activities in the implementation of learning and talent development programs at BMI to create quality learning and talent development programs in accordance with the HR development strategy to support the improvement of HR quality in supporting the Bank's business strategy. Another role is to manage employee communication (<i>Employee Engagement</i>) and <i>Employer Branding</i> .



No.	Unit Kerja Work Unit	Peran dan Fungsi	Role and Function
2	Human Capital Business Partner (HCBP) & Industrial Relations	Memberikan rekomendasi, konsultasi, solusi-solusi strategis yang implementatif terkait dengan SDM serta organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan (Direksi, Pejabat Eksekutif, dan seluruh <i>line manager</i>) di Direktorat <i>Retail Banking</i>, <i>Wholesale Banking</i> dan <i>CEO Directorate</i>. Unit ini juga membuat penyesuaian (<i>customization</i>) produk dan program-program SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi di seluruh Direktorat tersebut, agar tercipta ketersediaan organisasi dan SDM yang mumpuni guna mendukung pencapaian dan produktivitas organisasi. Dalam hal Industrial Relations berperan dalam menciptakan hubungan industrial yang kondusif dan harmonis antara Karyawan, Serikat Pekerja, dan Perusahaan dengan memastikan bahwa proses yang terkait dengan hubungan kerja, syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, penanganan keluhan karyawan, serta penanganan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan dengan cara yang tepat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk menghindari/meminimalisir risiko reputasi Bank.	Provide HC and organizational recommendations and consultations, as well as implement strategic solutions to all stakeholders (Directors, Executive Officers, and all line managers) in the Retail Banking, Wholesale Banking, and CEO Directorates. This unit also customizes SD products and programs to meet the needs of all of these Directorates in order to ensure the availability of qualified organizations and human capital to support organizational achievement and productivity. In terms of Industrial Relations, the role is to create conducive and harmonious industrial relations between Employees, Labor Unions, and the Company by ensuring that processes related to employment relations, working conditions, rights and obligations of the parties, handling employee complaints, and handling and resolving industrial relations disputes are carried out in an appropriate manner and in accordance with the applicable laws and regulations to avoid/minimize the Bank's reputation risk.
3	Human Capital Business Partner (HCBP) & Services	Memberikan rekomendasi, konsultasi dan solusi-solusi strategis yang implementatif terkait dengan SDM serta organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan (Direksi, Pejabat Eksekutif, dan seluruh manajer lini) di Direktorat <i>Operation</i>, <i>Compliance</i>, <i>Risk & Legal</i>, <i>Financing</i> dan <i>Finance</i>. Unit ini juga membuat penyesuaian (<i>customization</i>) produk dan program-program SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi di seluruh Direktorat <i>Operation</i>, <i>Compliance</i>, <i>Risk & Legal</i>, <i>Financing</i> dan <i>Finance</i>, agar tercipta ketersediaan organisasi dan SDM yang mumpuni guna mendukung pencapaian dan produktivitas organisasi. Unit ini juga bertanggung jawab dalam mengelola dan mengimplementasikan strategi <i>talent acquisition</i>, manajemen sistem SDM (<i>database</i>), serta memastikan eksekusi transaksi operasional SDM telah sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku dan sesuai dengan rencana, program dan inisiatif HC dan Bank.	Provide HC and organizational recommendations and consultations, as well as implement strategic solutions to all stakeholders (Directors, Executive Officers, and all line managers) in the Operations, Compliance, Risk & Legal, Financing, and Finance Directorates. This unit also customizes HC products and programs to meet organizational needs across the Operations, Compliance, Risk & Legal, Financing, and Finance Directorates, in order to ensure the availability of qualified organizations and human capital to support organizational achievements and productivity. This unit is also in charge of managing and executing the talent acquisition strategy, HR system management (<i>database</i>), as well as ensuring the execution of HR operational transactions is in accordance with applicable regulations and policies and in accordance with HC and Bank plans, programs and initiatives.
4	Muamalat Institute	Lembaga dengan fungsi pelatihan dan pengembangan yang berperan mewujudkan edukasi dan literasi keuangan syariah terbaik di Tanah Air.	An institution with a training and development function that contributes to the country's best Islamic financial education and literacy.



REALISASI PENGEMBANGAN SDM 2023

Selama periode Tahun 2023, Direktorat Human Capital telah melaksanakan sejumlah inisiatif dan program kerja sesuai dengan target atau rencana pengembangan SDM yang telah ditetapkan oleh BMI, yakni:

1. Memberikan solusi pembelajaran yang tepat dan terintegrasi untuk peningkatan produktivitas dan peningkatan kinerja di *front office*, *middle office*, dan *back office*.
2. Membangun akselerasi, memastikan konversi, dan mengatur *Fast Track Program* untuk mendukung optimalisasi organisasi.
3. Meningkatkan kemampuan *Talent* yang ada dengan manajemen talenta yang baik dan kepemimpinan untuk mendukung kualifikasi tinggi Perusahaan.
4. Membuat anggaran yang efektif dan pengendalian risiko untuk mendukung efisiensi dan kesadaran risiko Bank di era digital.
5. Membangun Transformasi Human Capital untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

Secara keseluruhan pengembangan yang meliputi pendidikan dan pelatihan yang telah diberikan Bank mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	2023	2022	Description
Rata-rata Jam Pelatihan per Tahun per Karyawan	82	71,3	Average Training Hours per Year per Employee

Realisasi Program pelatihan dan pembelajaran di Bank pada tahun 2023 yang telah berjalan dibagi dalam beberapa kategori, di antaranya adalah:

1. *Learning Program*
Kategori *Learning Program* terbagi menjadi 5 (lima) program utama, yaitu:
 - a. *Core Training Program*
Training yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan Bank. Bentuk pelatihan ini terdiri dari program inti, yaitu:
 - i. *Induction Program* yang berisi Modul *Basic*.
 - ii. *Sharia Banking dan Product Knowledge*.
 - iii. *Basic Risk Awareness Program* yang berisi *Financing and Operation Risk Modul*. *General Compliance* dan *Introduction to Audit Process*.
 - b. Program Sertifikasi *Regulatory* dan Internal
Program sertifikasi wajib yang harus diikuti oleh karyawan guna memenuhi peraturan yang diterbitkan oleh regulator atau internal perusahaan dan juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam bidang dan jabatan tertentu. Berikut adalah contoh sertifikasi yang dibagi dalam jenis sertifikasi:

REALIZATION OF HC DEVELOPMENT 2023

In 2023, the Human Capital Directorate implemented the following initiatives and work programs in accordance with BMI's HC development targets or plans for 2023:

1. Providing appropriate and integrated learning solutions to increase productivity and improve front, middle, and back office performance.
2. Building acceleration, ensuring conversion, and managing the Fast Track Program to support organizational optimization.
3. Improving the capabilities of the existing talent with good talent management and leadership to support the Company's high qualifications.
4. Create an effective budget and risk control to support the Bank's efficiency and risk awareness in the digital era.
5. Building Human Capital Transformation to create superior human capital.

Overall, the development provided by the Bank, which covers education and training, has increased from the previous year, as shown in the table below.

The realization of training and learning programs at the Bank in 2023 is divided into several categories, including:

1. *Learning Program*
The Learning Program category is divided into 5 (five) main programs, namely:
 - a. *Core Training Program*
Mandatory training for all Bank employees. This form of training consists of the following core program:
 - i. An induction program comprised of Basic Modules
 - ii. Sharia Banking and Product Knowledge.
 - iii. The Basic Risk Awareness Program, which includes the Financing and Operation Risk Module, General Compliance, and Introduction to Audit Process.
 - b. Regulatory and Internal Certification Program
Mandatory certification program that must be followed by employees in order to comply with regulations issued by regulators or internal companies that also aims to improve employee competency in certain fields and positions. The certifications are classified into the following types:



- | | |
|--|--|
| <p>i. Sertifikasi <i>Regulatory</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Manajemen Risiko • Sertifikasi Treasuri • Sertifikasi WPPE • Sertifikasi AASI <p>ii. Sertifikasi Internal (Via <i>Digital Learning</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Basic Sharia Banking</i> • <i>Intermediate Sharia Banking</i> • <i>Basic Risk Awareness</i> • <i>AntiFraud Awareness</i> • APU-PPT • <i>Code of Conduct</i> • <i>Corporate Values</i> <p>c. <i>Functional/Matrix Training Program</i>
Program <i>training</i> yang didesain untuk karyawan Bank berdasarkan fungsi kerjanya. Bentuk pelatihan ini terbagi dalam 3 (tiga) akademi, sesuai dengan fungsi pekerjaan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Retail Banking Academy</i> ii. <i>Operation and Support Academy</i> iii. <i>Wholesale Banking Academy</i> <p>d. <i>Departmental Training Program</i>
Program pelatihan ini diadakan berdasarkan usulan atau permintaan dari masing-masing unit kerja dalam rangka pengembangan kompetensi karyawan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara <i>in-house</i> maupun dengan mengirimkan karyawan untuk mengikuti seminar atau pelatihan di luar Bank.</p> <p>e. <i>Creative Learning</i>
<i>Creative Learning Program</i> merupakan program pembelajaran di luar program formal di atas yang bertujuan untuk menumbuhkan <i>Learning Culture</i> setiap karyawan Bank Muamalat Indonesia dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensinya.</p> <p>2. <i>Non-Class Room Learning Program</i>
Program ini menggunakan <i>platform</i> berbasis teknologi yang dapat diakses oleh seluruh karyawan Bank Muamalat Indonesia. Tahun 2023 Bank berkomitmen untuk terus menumbuhkan <i>learning culture</i> dengan memperkuat program-program pengelolaan pengetahuan (<i>knowledge management</i>). Program-program yang dikembangkan pada tahun 2023 adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Muamalat Knowledge One</i> (MK One), adalah suatu media di mana modul-modul pembelajaran bisa di akses oleh seluruh karyawan pada aplikasi <i>Human Capital Information System</i> (Muamalat Human Power-MHP). c. <i>M-Coach</i>, yaitu sebuah sistem yang diperuntukan bagi <i>leaders</i> untuk melakukan <i>coaching</i> terhadap karyawan di bawah supervisinya dengan standar acuan <i>coaching</i> yang ditentukan oleh manajemen. | <p>i. Regulatory Certification</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risk Management Certification • Treasury Certification • WPPE Certification • AASI Certification <p>ii. Internal Certification (Via Digital Learning)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basic Sharia Banking • Intermediate Sharia Banking • Basic Risk Awareness • Anti-Fraud Awareness • APU-PPT • Code of Conduct • Corporate Values <p>c. Functional/Matrix Training Program
A training program tailored to Bank employees based on the description of their job. According to job description, the training is divided into three (three) academies:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Retail Banking Academy ii. Operation and Support Academy iii. Wholesale Banking Academy <p>d. Departmental Training Program
This training program is held based on suggestions or requests from each work unit in the context of developing employee competencies. The implementation can be done in-house or by sending employees to attend seminars or training outside the Bank.</p> <p>e. Creative Learning
The Creative Learning Program is a learning program outside the formal program above that aims to foster a Learning Culture for every employee of Bank Muamalat Indonesia in order to increase their knowledge, skills, and competencies.</p> <p>2. Non-Class Room Learning Program
This program uses a technology-based platform that can be accessed by all employees of Bank Muamalat Indonesia. In 2023, the Bank pledged to continue to cultivate a learning culture by strengthening knowledge management programs. The following programs were developed in 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Muamalat Knowledge One (MK One) is a medium where learning modules can be accessed by all employees on the Human Capital Information System (Muamalat Human Power-MHP) application. c. M-Coach is a system designed for leaders to coach employees under their supervision using management-determined coaching reference standards. |
|--|--|



Selain program pembelajaran di atas, pada tahun 2023 Bank Muamalat Indonesia juga telah meluncurkan program-program khusus berikut:

- a. **MAP Wholesale Banking**
Program *MAP Wholesale Banking* dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang semakin mendesak untuk mendukung strategi bank dalam mengembangkan bisnis *wholesale segment* yang berkelanjutan, MAP merupakan salah satu program lulusan BMI dalam mengembangkan talenta untuk menjadi spesialis di segmen *Wholesale Banking* dengan kompetensi standar dan memadai sebagai *Relationship Manager* di masa depan untuk mendukung kinerja bisnis perusahaan.
- b. **MAP SME Banking**
Program *MAP SME Banking* dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang semakin mendesak untuk mendukung strategi bank dalam mengembangkan bisnis *financing commercial* yang berkelanjutan, MAP merupakan salah satu program lulusan BMI dalam mengembangkan talenta untuk menjadi spesialis di segmen *SME Banking* dengan kompetensi standar dan memadai sebagai *Relationship Manager* di masa depan untuk mendukung kinerja bisnis perusahaan.
- c. **MAP Consumer Banking**
MAP Consumer Banking dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang semakin mendesak untuk membina spesialis yang menjanjikan yang menjanjikan di bidang Pembiayaan untuk bisnis komersial yang selaras dengan budaya perusahaan, nilai-nilai, karakter dan kompetensi yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia.
- d. **Relationship Manager Acceleration - (RM Acceleration)**
Program untuk para karyawan pemasaran di tingkat pemula, yang dilaksanakan untuk menghasilkan *Relationship Manager* berkualitas pada segmen Retail. Program yang berlangsung selama 6 (enam) bulan ini berisi pembekalan dan pelatihan *soft skills* dan *hard skills* terkait akad dan produk syariah.
- e. **Muamalat Indonesia Apprentice (MULIA)**
Program pendidikan yang ditunjukan bagi lulusan SMA dan sederajat untuk ditempatkan sebagai *frontliner (Teller dan Customer Service)* di Bank Muamalat Indonesia seluruh Indonesia. Melalui program ini, peserta program yang memiliki kinerja baik dan telah mencapai masa program yang ditentukan akan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya.
- f. **Individual Learning Development Program (ILDP)**
Dalam rangka mendukung *Key Strategic initiatives* tahun 2023 dan sama-sama menuju Bank Muamalat

In addition to the learning programs mentioned above, Bank Muamalat Indonesia has launched the following special programs in 2023:

- a. **MAP Wholesale Banking**
The MAP Wholesale Banking program is designed to address the bank's increasingly urgent need to support its strategy for developing a sustainable wholesale segment business. MAP is one of the BMI graduate programs that focuses on developing talent to become specialists in the Wholesale Banking segment with standard and adequate competencies as a Relationship Manager in the future to support the company's business performance.
- b. **MAP SME Banking**
The MAP SME Banking program is designed to address the bank's increasingly urgent need to support its strategy for developing a sustainable commercial financing business. MAP is one of the BMI graduate programs for developing talents to become specialists in the SME Banking segment with standard and adequate competencies as Relationship Managers in the future to support the company's business performance.
- c. **MAP Consumer Banking**
MAP Consumer Banking is designed to meet the increasingly urgent need to nurture promising specialists in the field of Financing for commercial businesses that are aligned with the corporate culture, values, character and competencies of Bank Muamalat Indonesia.
- d. **Relationship Manager Acceleration - (RM Acceleration)**
A program for marketing employees at the entry-level, which is implemented to produce quality Relationship Managers in the Retail segment. The program lasts for 6 (six) months and contains debriefing and training on soft skills and hard skills related to Sharia contracts and products.
- e. **Muamalat Indonesia Apprentice (MULIA)**
An educational program aimed at high school graduates and equivalents to be placed as frontliners (Tellers and Customer Service) at Bank Muamalat Indonesia throughout Indonesia. Through this program, participants who perform well and have reached the specified program period will receive a scholarship to continue their education.
- f. **Individual Learning Development Program (ILDP)**
In order to support Key Strategic initiatives in 2023 and unify towards a better Bank Muamalat



Indonesia yang lebih baik, Bank mempersiapkan pelatihan-pelatihan yang dapat diikuti oleh seluruh sumber daya insani guna menunjang aktivitas pekerjaan maupun untuk meningkatkan kemampuan sisi *Leadership, Communication, Productivity, dan Business Ethics*.

- g. *Retail Collection Training*
Diadakannya *training* ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi bagi para *Tim Collection*, dan juga agar tercapainya standarisasi *basic knowledge* dari *Tim Collection* sehingga bisa dilakukan percepatan penyelesaian *Bad Bank* segmen retail.
- h. *Trilogy Financing Training*
Program *training* yang di desain untuk menstandarisasi pemahaman terhadap proses pembiayaan. Program ini diberikan kepada *team Sales* (*RM Retail Financing*) dengan tema *Financing Risk Analyst, Financing Operation Process, dan Account Maintenance Collection*.

Indonesia, the Bank prepared training that can be attended by all human capital to support work activities and to improve the capabilities of *Leadership, Communication, Productivity, and Business Ethics*.

- g. *Retail Collection Training*
The purpose of this training is to increase the capability and competence of the *Collection Team* and also to standardize the basic knowledge of the *Collection Team*, allowing them to accelerate the settlement of *Bad Bank* in the retail segment.
- h. *Trilogy Financing Training*
A training program designed to standardize understanding of the financing process. This program is intended for the *Sales team* (*RM Retail Financing*) with the theme of *Financing Risk Analyst, Financing Operation Process, and Account Maintenance Collection*.

REKRUTMEN

Seiring perkembangan bisnis BMI, layanan yang diberikan Bank pun terus meningkat. Karena itu, Bank melakukan rekrutmen karyawan baru sebagai bagian dari proses penting dalam mengidentifikasi, mencari, dan menarik calon karyawan untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

RECRUITMENT

As BMI's business develops, the services provided by the Bank continue to expand. Therefore, the Bank recruits new employees as part of an important process in identifying, seeking, and attracting prospective employees to meet organizational needs.

RINGKASAN REKRUTMEN SDM TAHUN 2023

Summary of HC Recruitment in 2023

Uraian Description	Full Time Equivalent (FTE) Full Time Equivalent (FTE)	
	Jumlah Quantity	Persentase dari Total Rekrutmen (%) Percentage from Total Recruitment (%)
Level Pekerjaan Level of Work		
Corporate Leadership	2	0,5%
Senior Management	5	1,2%
Junior Management/Professional	197	46,1%
Middle Management/Professional	25	5,9%
Staff	198	46,4%
Total	427	100,0%
Generasi Generation		
Generasi X X Generation	10	2,3%
Generasi Y (Milenial) Y Generation (Milenial)	238	55,7%
Generasi Z (Centennials) Z Generation (Centennials)	179	41,9%
Total	427	100,0%



SISTEM PENILAIAN KINERJA

BMI menggunakan *Performance Management System* (PMS) untuk menilai kinerja karyawan. Penilaian tersebut dilaksanakan berdasarkan *Most Important Goals* (MIG) yang telah ditentukan pada awal tahun, selanjutnya ditelaah pada pertengahan dan akhir tahun melalui *Human Capital Information System* (Muamalat Human Power/MHP).

Proses penilaian kinerja tersebut dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari penilaian mandiri (*self-assessment*) oleh karyawan dan evaluasi atasan langsung (*manager assessment*) kemudian dikaji dan dievaluasi oleh pimpinan unit kerja yang lebih tinggi sampai dengan Direksi. Sistem ini dibentuk dengan tujuan untuk memastikan kinerja karyawan selaras dengan kinerja Bank. Sekaligus, mendorong, memotivasi, dan mengarahkan karyawan untuk selalu meningkatkan kinerjanya, serta mewujudkan hubungan yang jelas antara pencapaian rencana karyawan dengan pengembangan karier karyawan (promosi jabatan).

PENGEMBANGAN KARIER

Manajemen pengembangan karier di lingkungan BMI bertujuan untuk memastikan ketersediaan karyawan dengan kualifikasi dan pengalaman yang tepat. Kemudian, meningkatkan kepuasan kerja karyawan serta membantu karyawan dalam memahami peluang karier dan menentukan jalur karier yang dipilih.

Pengembangan karier tersebut secara konsisten membantu karyawan dalam memahami potensi dan keahlian karyawan. Dengan demikian, akan membantu pencapaian tujuan individu dan Bank sebagai hubungan timbal balik yang bermanfaat bagi kesejahteraan karyawan dan tujuan perusahaan. Terlaksananya manajemen pengembangan karier yang baik dapat menurunkan tingkat *turnover*, dan menurunkan biaya tenaga kerja, khususnya anggaran untuk mendidik karyawan baru.

BMI juga menerbitkan dan menerapkan kebijakan mutasi, promosi, dan demosi. Hal ini dilakukan agar seluruh karyawan mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai mekanisme pengembangan karier secara terperinci.

Dalam penerapannya, pengembangan karier karyawan telah didukung dengan sistem berbasis teknologi yang dimiliki oleh BMI, yaitu Muamalat Human Power (MHP). Salah satunya adalah menu *e-movement* yang dapat diakses manajer lini setiap karyawan.

PERFORMANCE APPRAISAL SYSTEM

BMI employs a Performance Management System to implement an employee performance appraisal system (PMS). The assessment is based on the Most Important Goals (MIG) determined at the start of the year and then reviewed in the middle and end of the year via the Human Capital Information System (Muamalat Human Power/MHP).

Employee performance is also assessed in stages, beginning with employee self-assessment and evaluation of direct superiors (manager assessment) and progressing to review and evaluation by heads of higher work units up to the Board of Directors. This system was developed with the goal of ensuring that employee performance is aligned with the Company's performance, encouraging, motivating, and directing employees to always improve their performance, and establishing a clear relationship between achieving employee goals and employee career development (position promotion).

CAREER DEVELOPMENT

BMI's career development management aims to ensure the availability of qualified and experienced employees. Furthermore, increasing employee job satisfaction and assisting employees in understanding career opportunities and deciding on a career path.

This career development consistently helps employees understand their potential and expertise, assisting in achieving individual and Bank goals in a mutually beneficial relationship for employee welfare and corporate goals. Implementing good career development management practices can reduce turnover rates and labor costs, particularly the budget for training new employees.

BMI also publishes and implements policies on transfer, promotion, and demotion. This is done so that all employees receive clear and transparent information about the detailed career development mechanism.

In practice, employee career development has been aided by Muamalat Human Power (MHP), a technology-based HC system owned by BMI. One of them is the *e-movement* menu, which line managers can access for each employee.



Dengan demikian, pengajuan mutasi dapat diproses dengan lebih efisien dan efektif karena berbasis digital. Adapun proses promosi dan demosi karyawan dilakukan melalui pengajuan dari pimpinan unit kerja terkait untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan/atau asesmen dengan mempertimbangkan kinerja dan kompetensi karyawan.

As a result of their digital nature, mutation applications can be processed more efficiently and effectively. Employees are promoted and demoted based on submissions from the heads of related work units for further evaluation and/or assessment, considering employee performance and competence.

SERIKAT PEKERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan, BMI senantiasa menjunjung kebebasan karyawan untuk berkumpul, berserikat, dan mengemukakan pendapatnya. Pekerja dapat secara mudah mendaftarkan diri dan bergabung dalam keanggotaan Serikat Pekerja. Serikat pekerja Bank bernama Syarikat Pejuang Muamalat (SP Muamalat), yang telah tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan No. 804/SP/JS/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.

Keberadaan Serikat Pekerja tersebut merupakan mitra strategis Bank dalam menciptakan hubungan industrial yang berkualitas dan harmonis. Serikat Pekerja dapat menjadi saluran komunikasi terbaik untuk menjaga dan memperhatikan hak-hak karyawan Bank serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis, selaras dan berkeadilan di lingkungan Bank, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan *engagement*. Bank selalu memberikan dukungan baik atas setiap kegiatan-kegiatan Serikat Pekerja.

Bank mendasarkan pelaksanaan hubungan industrial pada prinsip kesetaraan, kewajaran, rasa keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam suatu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau yang disebut sebagai Ittifaq Muamalat yang disepakati bersama antara manajemen dan pihak karyawan yang diwakili oleh Serikat Pejuang Muamalat (Serikat Pekerja).

Jika terjadi perselisihan hubungan industrial terkait dengan ketenagakerjaan, penanganan kasusnya dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyelesaiannya diutamakan secara bipartit/internal tanpa melibatkan pihak ketiga.

Pada tahun 2023, BMI menghadapi sejumlah kasus perselisihan dan sudah diselesaikan secara bipartit, dan terdapat (2) dua kasus telah diselesaikan secara tripartit melalui proses mediasi di Disnaker.

LABOR UNIONS AND INDUSTRIAL RELATIONS

In line with laws and regulations, BMI always upholds the freedom of employees to assemble, associate, and express their opinions. Workers can easily register and join the membership of Trade Union. The Bank's labor union is Syarikat Pejuang Muamalat (SP Muamalat), registered with the South Jakarta Municipal Manpower Office with record number No. 804/SP/JS/II/2018 dated February 28, 2018.

The existence of Labor Union is a strategic partner of the Bank in establishing a quality and harmonious industrial relations. Labor unions can be the best communication channel for maintaining and paying attention to bank employees' rights, as well as creating harmonious and fair working relationships within the Bank to increase productivity and engagement. The Bank has consistently provided strong support for all Labor Union activities.

The Bank bases the implementation of industrial relations on the principles of equality, fairness, a sense of justice, and human values. These principles are embodied in a Collective Labor Agreement (PKB) or what is known as Ittifaq Muamalat, which is mutually agreed upon between management and employees represented by the Muamalat Fighters Union (Labor Union).

If there is an industrial relations dispute involving labor, the case is handled in accordance with statutory provisions. The resolution is prioritized bipartite/internally within the company without the involvement of third parties.

In 2023, BMI faced several dispute cases and resolved bipartitely, and there were (2) two dispute cases were resolved tripartitely through a mediation process at the Manpower Office.



PROGRAM KETERLIBATAN KARYAWAN

Program keterlibatan karyawan atau *employee engagement* merupakan sarana BMI untuk melibatkan peran aktif karyawan dalam mengikuti beragam kegiatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas, kedisiplinan, loyalitas karyawan, profitabilitas perusahaan, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Program ini direalisasikan dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga keterlibatan karyawan menjadi sangat luas di seluruh kantor perwakilan Bank.

Keterlibatan seluruh karyawan dan jajaran Direksi dalam semua program *employee engagement* menjadi hal yang sangat penting. Karena itulah, setiap kegiatan dikomunikasikan kepada karyawan melalui semua kanal komunikasi. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan partisipasi karyawan.

Dalam pelaksanaannya, program keterlibatan karyawan untuk mendukung tujuan utama dari *employee engagement*, kemudian dibagi menjadi beberapa bagian: *Spiritual Engagement*, *Emotional Engagement*, dan *Rational Engagement*, yang rinciannya dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

EMPLOYEE ENGAGEMENT PROGRAM

The employee engagement program allows BMI to engage employees in various activities aimed at increasing productivity, discipline, employee loyalty, company profitability, and customer satisfaction and loyalty. This program is implemented through digital technology, resulting in widespread employee participation in all Bank representative offices.

Employees and members of the Board of Directors must participate in all employee engagement programs. For this reason, all activities are communicated to employees via all communication channels. These initiatives were undertaken in order to increase employee participation.

In practice, the employee engagement program is divided into three sections to support the main goal of employee engagement: spiritual engagement, emotional engagement, and rational engagement, as shown in the table below.

Program	Penjelasan	Description
<i>Spiritual Engagement</i>	Keikutsertaan atau keterlibatan karyawan secara spiritual. Program <i>spiritual engagement</i> , antara lain melalui kajian masjid Al-Muamalah dan pengajian Al-Wiqoyah yang dilaksanakan secara berkala. Kegiatan ini melibatkan seluruh karyawan, keluarga karyawan, nasabah, alumni, dan anak perusahaan Bank melalui virtual. Masyarakat umum juga dapat menyaksikan video kajian tersebut melalui <i>channel Youtube</i> Bank: Kajian Muamalat. <i>Channel Youtube</i> kajian Muamalat juga berisi video <i>My Hijrah My Adventure</i> (MHMA) yang merupakan perjalanan hijrah nasabah atau seseorang yang dapat memberikan inspirasi untuk berhijrah bagi masyarakat yang melihat tayangan video tersebut. Aktivitas spiritual lain adalah <i>tahajud on call</i> yang dilaksanakan secara berkala untuk seluruh karyawan dan keluarga karyawan.	Engagement or spiritual engagement of employees. The spiritual engagement program includes a study of the Al-Muamalah mosque and Al-Wiqoyah recitations, which are held regularly. This activity involves all employees, employees' families, customers, alumni, and Bank subsidiaries via virtual. The public can also view the review video on the Bank's YouTube channel, Kajian Muamalat. The Kajian Muamalat YouTube channel also includes the My Hijrah My Adventure (MHMA) video, which depicts a customer's migration journey or someone who can inspire people who watch the video to emigrate. Another spiritual activity is tahajud on call, which is held regularly for all employees and their families.
<i>Emotional Engagement</i>	Bertujuan menumbuhkan antusiasme untuk bekerja dan antusiasme terhadap organisasi. Kegiatan emotional engagement antara lain CERIA (Cerita Apa Aja) yang merupakan <i>Employee Assistancy Program</i> (EAP), memberikan kesempatan kepada karyawan yang mempunyai masalah untuk berkonsultasi dengan psikolog, harapannya agar masalahnya dapat teratasi dan tidak mempengaruhi kinerjanya. Di samping itu, terdapat program <i>financial planning</i> yang merupakan pelatihan perencanaan keuangan agar dapat memahami dan mengerti dalam mengatur arus kas keuangan karyawan. Kegiatan lainnya adalah "CEO Menyapa" yang merupakan <i>non-monetary</i> program yang diberikan kepada karyawan atas kontribusi optimal yang diberikan bagi Bank.	Aiming to foster enthusiasm for work as well as enthusiasm for the organization. CERIA (Cerita Apa Aja) is an Employee Assistance Program (EAP) that allows employees with problems to consult with a psychologist to resolve the problem without affecting their performance. Furthermore, a financial planning program provides financial planning training to grasp and understand how to manage employee financial cash flow. Another activity is "CEO Greeting," a non-monetary program provided to employees to maximize their contribution to the bank.



<i>Rational Engagement</i>	Ditujukan agar karyawan memahami dengan baik peran dan tanggung jawab mereka. Kegiatan <i>rational engagement</i> merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Muamalat Club baik yang berada di kantor pusat maupun di seluruh cabang Bank Muamalat. Kegiatan Muamalat Club antara lain <i>Muamalat Virtual Ride</i> (MVR) dan <i>Virtual Charity Concert</i> Harmoni Muamalat, yang bertujuan mengumpulkan donasi untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Kegiatan lainnya adalah <i>basketball virtual coaching clinic</i>. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kebugaran karyawan di masa <i>new normal</i>. Bank melakukan <i>rational engagement</i> kepada para alumni dan keluarga karyawan dengan menciptakan <i>M-Shop Muamalahplace</i> untuk mendukung UMKM, khususnya bagi alumni karyawan dan keluarga karyawan agar meningkatkan bisnis mereka. Dengan memberikan dukungan ini, selain dapat menjaga silaturahmi, Bank juga akan memperoleh pertumbuhan rasa dan positif <i>branding</i> dari para alumni dan keluarga karyawan.	It is intended to help employees understand their roles and responsibilities. The Muamalat Club conducts rational engagement activities at the headquarters and in all Bank Muamalat branches. The Muamalat Virtual Ride (MVR) and the Harmoni Muamalat Virtual Charity Concert are two Muamalat Club activities that aim to collect donations to be distributed to those in need. A virtual basketball coaching clinic is another activity. The program's goal is to improve employee fitness during the transition period. The Bank engages in rational engagement with alumni and employees' families by establishing the M-Shop Muamalahplace to assist MSMEs, particularly alumni employees and employees' families, grow their businesses. Apart from maintaining friendly relations, the Bank will gain a sense of growth and positive branding from alumni and employees' families by providing this assistance.
----------------------------	--	--

PROGRAM PENSIUN

Program Masa Persiapan Purna Karya (MPPK) yang diterapkan sejak 2017 merupakan upaya untuk memfasilitasi karyawan yang akan memasuki masa pensiun. Program ini bertujuan menyiapkan program pemberian benefit setelah berakhirnya hubungan kerja atau masa pensiun. MPPK diharapkan dapat meningkatkan kesiapan mental karyawan dalam menghadapi perubahan yang terjadi saat pensiun serta memberikan motivasi untuk tetap optimis, memiliki paradigma yang positif sebagai pensiunan serta dapat mengelola waktu yang tersedia untuk tetap hidup dengan semangat.

Karyawan yang mengambil program MPPK tidak diwajibkan berada di lingkungan kerja, namun tetap mendapatkan upah dan benefit sebagai karyawan. Program MPPK berjalan selama minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan sebelum usia pensiun. Karyawan peserta program tersebut mendapatkan pelatihan dan dibekali ilmu terkait perencanaan dan aktivitas bermanfaat yang dapat dijalankan pada masa pensiun.

Selain itu, BMI memberikan apresiasi *Long Service Award* dalam bentuk logam mulia bagi karyawan Bank yang pensiun di BMI dengan masa kerja di atas 20 tahun. Selama tahun 2023, terdapat 14 karyawan yang memasuki masa pensiun.

PENSION PROGRAM

BMI has had a Retirement Preparation Period Program (MPPK) since 2017 to help employees who are about to retire. This program aims to develop a strategy for providing benefits following the termination of a working relationship or retirement. MPPK is expected to improve employees' mental preparedness for the changes during retirement, provide motivation to remain optimistic, have a positive paradigm as a retiree, and manage the time available to live with enthusiasm.

Employees enrolled in the MPPK program are not required to work, but they do receive wages and benefits as employees. The MPPK program lasts a minimum of 3 (three) months and a maximum of 6 (six) months before retirement age. Employees participating in the program are trained and equipped with knowledge about retirement planning and useful activities.

Furthermore, BMI provides Long Service Award recognition in the form of precious metals to bank employees who retire with more than 20 years of service at BMI. In 2023, there were 14 employees entering retirement age.



LINGKUNGAN KERJA YANG KONDISIF

Lingkungan kerja yang kondusif di BMI diciptakan sesuai dengan values Bank Muamalat, yaitu IDEAL: Islami, Modern, dan Profesional serta sesuai dengan *brand promise* "IDEAL Place to Work". Untuk menciptakan itu, Bank sangat perhatian dengan *worklife balance* yang dilakukan melalui *employee engagement* program baik spiritual, emosional, dan rasional.

Spiritual Program yang dilaksanakan bertujuan untuk menyeimbangkan kehidupan karyawan. Tidak hanya bekerja, tetapi juga bisa beribadah yang dapat meningkatkan keimanan dan ketawaan terhadap Allah SWT sesuai dengan values Islami. Program spiritual tersebut, antara lain: Kajian Rutin, Qiyamul Lail: Kuketuk Pintu LangitMu, Pengajian Al Wiqoyah, dan kelas tahsin.

Rational Program dilakukan melalui wadah Muamalat Club. Tujuannya untuk memberikan keseimbangan antara kehidupan profesional dengan kesempatan untuk tetap menyeimbangkan - pola hidup sehat. Adapun kegiatan yang dilakukan, seperti: Muamalat Merdeka Fun Walk, Muamalat Adventure Club, Turnamen Futsal Merdeka, Turnamen Pingpong Merdeka, Turnamen Badminton Merdeka, dll.

Selain itu untuk mendukung kesehatan mental karyawan, Bank memberikan fasilitas konseling dengan psikolog profesional melalui program DigiCeria (Digital Cerita Apa Aja).

Emotional Program dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada karyawan untuk dapat berbagi pengetahuan atau melakukan kegiatan sosial yang dapat membantu sesama. Adapun kegiatannya, seperti: *CSR for Employee*, yang terdiri dari *Principal*, *Planet*, dan *People*. *Principal* dilakukan melalui program CSR Geulis - Gerakan Literasi Syariah, *Planet* seperti Gerakan Bersih Masjid, dan *People* seperti gerakan donor darah.

Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas, Bank memanfaatkan penggunaan media atau sarana komunikasi yang dimiliki dengan rincian sebagai berikut:

1. Aplikasi *chat group* yang memungkinkan karyawan untuk mendapatkan informasi, instruksi, berita secara cepat dan lengkap.
2. *E-mail Blast* yang mengirimkan informasi-informasi terkini kepada seluruh karyawan melalui fasilitas email kantor.
3. Muamalat Human Power (MHP) untuk mengakses pengumuman-pengumuman penting dan peraturan-peraturan terbaru, yang juga tersedia dalam versi *mobile*.

CONDUCTIVE WORK ENVIRONMENT

A conducive work environment at BMI was created in accordance with Bank Muamalat's values, namely IDEAL: Islamic, Modern, and Professional, and in accordance with the brand promise "IDEAL Place to Work." To achieve this, the Bank is very concerned with work-life balance, which is achieved through spiritual, emotional, and rational employee engagement programs.

The Spiritual Program implemented aims to bring balance to the employees' lives. Following Islamic values, not only work but also worship can increase faith and laughter toward Allah SWT. Kajian Rutin, Qiyamul Lail: Kuketuk Pintu LangitMu, Al Wiqoyah Recitation, and Tahsin classes are among the spiritual programs offered.

The Rational Program is carried out through the Muamalat Club. The aim is to provide a balance between professional life and the opportunity to maintain a healthy lifestyle. The activities included the Muamalat Merdeka Fun Walk, the Muamalat Adventure Club, the Merdeka Futsal Tournament, the Merdeka Pingpong Tournament, the Merdeka Badminton Tournament, etc.

In addition to supporting employees' mental health, the Bank provides counseling facilities with professional psychologists through the DigiCeria program (Digital Stories Anything).

The Emotional Program is implemented to allow employees to share knowledge or participate in social activities that benefit others. In terms of activities, CSR for Employees includes the Principal, Planet, and People. The principal is carried out through the Geulis CSR program - Sharia Literacy Movement, Planet, such as the Clean Mosque Movement, and People, such as the blood donation movement.

In order to create a conducive work environment and increase productivity, the Bank utilizes the use of media or communication facilities with the following details:

1. Group chat application that allows employees to get information, instructions, and news quickly and completely.
2. E-mail Blast, which sends up-to-date information to all employees via work email facilities.
3. Muamalat Human Power (MHP) to gain access to important announcements and the most recent regulations, which are also available in a mobile version.



4. *M-Channel* pada televisi di setiap ruang *breakout* Muamalat Tower, yang memungkinkan karyawan mendapatkan informasi terkait program, produk dan pengetahuan-pengetahuan terbaru yang berkaitan dengan pengembangan karyawan.
5. Buletin digital yang menampilkan berita-berita dari unit-unit tertentu juga diterbitkan secara reguler, seperti misalnya *HC news*, *Operation Splash*, dan *Fraud Awareness*.
6. *CEO Message* adalah informasi yang disampaikan dalam kesempatan-kesempatan khusus yang memerlukan penjelasan langsung dari CEO.
7. Untuk informasi-informasi terkait strategi Bank yang lebih formal, dilakukan melalui acara *sharing session* antara manajemen dan karyawan di seluruh unit kerja dan dikemas dalam bentuk *town hall meeting* dan *BOD road show* yang diikuti oleh karyawan di unit kerja yang dikunjungi.

4. M-Channel on television in each breakout room of Muamalat Tower, which allows employees to get information regarding the latest programs, products, and knowledge related to employee development.
5. Digital bulletins featuring news from certain units are also published regularly, such as HC news, Operation Splash, and Fraud Awareness.
6. The CEO Message is information conveyed on specific occasions that necessitate direct explanation from the CEO.
7. For more formal information related to the Bank's strategy, it is carried out through sharing sessions between management and employees in all work units and packaged in the form of town hall meetings and BOD roadshows attended by employees in the work units visited.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Untuk memiliki keunggulan kompetitif, BMI meyakini bahwa SDM harus memiliki keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan oleh Bank, baik dalam rangka mendukung strategi dan sasaran bisnis saat ini maupun masa yang akan datang. Untuk itu, Bank mengembangkan kompetensi SDM yang dibutuhkan melalui pendekatan terintegrasi yang dirancang dengan memperhatikan kebutuhan individu karyawan, organisasi, perencanaan suksesi karyawan, dan sasaran bisnis dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pengembangan karyawan berbasis kompetensi ini ditujukan untuk mendukung karyawan menjalankan pekerjaannya secara optimal yang pada akhirnya dapat membantu Bank dalam mewujudkan tujuannya. Bank berkomitmen memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi, keahlian, dan kesempatan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Bank selalu memperhatikan kesetaraan gender dan persamaan kesempatan bagi seluruh jenjang jabatan karyawan Bank, termasuk bagi karyawan yang baru direkrut baik staf maupun *officer*.

Bank menerjemahkan berbagai tantangan yang dihadapi dan dibutuhkan industri perbankan ke dalam materi program pengembangan kompetensi SDM. Pelaksanaannya direalisasikan menggunakan kanal pembelajaran dengan pihak internal dan eksternal guna mendorong pencapaian tujuan proses pembelajaran yang optimal.

Bank juga telah menyiapkan infrastruktur dan program yang memadai untuk beradaptasi dengan perubahan, terutama di sektor digital. Hal itu dilakukan dengan mengoptimalkan

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

BMI believes that in order to maintain a competitive advantage, human capital must possess the skills and competencies required by the Bank, to support current and future business strategies and goals. To that end, the Bank develops the necessary HC competencies through an integrated approach that reflects the needs of individual employees, the organization, employee succession planning, and short and long-term business goals.

This competency-based employee development is intended to help employees perform their jobs optimally, which can help the Bank meet its objectives. The Bank is committed to giving all employees equal opportunities to advance and develop based on their potential, skills, and available opportunities as needed. The Bank also always concerned with gender equality and equal opportunity for all employee positions, including newly hired staff and officers.

The Bank translates various banking industry challenges and requirements into HC competency development program materials. To encourage the achievement of optimal learning process objectives, implementation is realized through learning channels with internal and external parties.

The Bank has prepared adequate infrastructure and programs to adapt to the changes that have occurred in order to face the challenges of the industrial revolution



penggunaan sarana komunikasi *digital platform* yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja, sehingga proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien.

era. This is accomplished by optimizing digital platform communication facilities that can be accessed anywhere at any time, resulting in a more effective and efficient learning process.

INVESTASI PENGEMBANGAN SDM

BMI mengalokasikan investasi pengembangan SDM sebesar 3,5% dari total biaya *gross salary*, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Anggaran tersebut disalurkan untuk program pelatihan dan pengembangan. Pada tahun 2023, total biaya pendidikan dan pelatihan mencapai Rp15.384.469.677.

Fokus pembelajaran selama tahun 2023 diarahkan pada program diarahkan pada program sertifikasi wajib, pengembangan, akselerasi dan *online learning*. Program tersebut disusun dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dampak, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Total *man days learning* pada tahun 2023 (karyawan aktif dan *resign*) mencapai 10,2 meningkat 0,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Metode pembelajaran terbagi menjadi 2 yaitu 63% dilakukan dalam metode tatap muka dan 37% melalui metode pembelajaran digital atau *e-learning*.

Penyerapan biaya pelatihan dan *man days learning* menunjukkan komitmen Bank dalam pengembangan SDM melalui media atau fasilitas yang tersedia di perusahaan. Rincian *man days learning* Bank pada tahun 2023 berdasarkan direktorat, level organisasi dan lokasi kerja untuk karyawan aktif disampaikan dalam tabel di bawah ini.

MAN DAYS LEARNING BERDASARKAN DIREKTORAT

Man Days Learning based on Directorate

Direktorat	Rata-rata <i>Man Days</i> Average Man Days	Directorate
Board	3,4	Board
CEO	4,8	CEO
Compliance, Risk & Legal	6,4	Compliance, Risk & Legal
Enterprise Banking	6,9	Enterprise Banking
Finance & Strategy	9,8	Finance & Strategy
Financing Business Risk	4,1	Financing Business Risk
Human Capital	8,5	Human Capital
Operation & Digital	9,5	Operation & Digital
Retail Banking	10,9	Retail Banking
Class Program	39,1	Class Program
Jumlah	9,4	Total

INVESTMENT IN HC DEVELOPMENT

BMI allocated an investment of 3.5% of total gross salary costs for HC development, in accordance with the Financial Services Authority (OJK) regulations. The budget was distributed to training and development programs. In 2023, the total cost of education and training reached Rp. 15,384,469,677.00

The learning focus during the year 2023 was directed on mandatory certification programs, development, acceleration and online learning. These programs were prepared by taking into account the learning effectiveness, efficiency, impact and objectives to achieve.

Total man days learning in 2023 (active and resigned employees) reached 10.2, increased by 0.2% compared to the previous year. Learning methods were divided into 2, namely 63% were conducted face-to-face and 37% through digital learning methods or e-learning.

Absorption of the training and man days learning costs shows the Bank's commitment in developing human capital through the media or facilities available at the company. Details of the Bank's man days learning in 2023 based on directorate, organizational level and work location for active employees are presented in the table below.



MAN DAYS LEARNING BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI

Man Days Learning based on Organization Level

Level Organisasi	Rata-rata <i>Man Days</i> Average Man Days	Organization Level
Corporate Leadership	3,4	Corporate Leadership
Senior Management	15,3	Senior Management
Middle Management	9,9	Middle Management
Junior Management	8,7	Junior Management
Staff	9,7	Staff
Jumlah	9,4	Total

MAN DAYS LEARNING BERDASARKAN LOKASI KERJA

Man Days Learning based on Work Location

Lokasi Kerja	Rata-rata <i>Man Days</i> Average Man Days	Work Location
Kantor Pusat	7,4	Head Office
Cabang Luar Negeri	2,3	Foreign Branches
Jawa Barat & Kalimantan 1	9,9	West Java & Kalimantan 1
Jakarta Timur	11,0	East Jakarta
Jakarta Barat	10,1	West Jakarta
Jawa Tengah, DI Yogyakarta & Kalimantan 2	10,3	Central Java, DI Yogyakarta & Kalimantan 2
Jawa Timur, Bali & Nusa Tenggara	10,0	East Java, Bali & Nusa Tenggara
Sulawesi, Maluku & Papua	10,2	Sulawesi, Maluku & Papua
Sumatera	10,4	Sumatera
Jumlah	9,4	Total

SISTEM DAN MEKANISME REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA KARYAWAN

BMI senantiasa menelaah penerapan *reward and punishment* secara berkelanjutan agar setiap kebijakan yang dilakukan bukan hanya konsistensi terhadap penerapan sanksi atas kasus-kasus pelanggaran, namun mampu mendorong pertumbuhan kinerja Bank. BMI akan memberikan apresiasi kepada karyawan dengan kinerja sangat baik dan melebihi target yang ditentukan.

Selain *reward* yang sifatnya berupa remunerasi finansial, tetapi juga berupa benefit dan pengembangan karier bagi karyawan yang memberikan kontribusi kepada Bank. Pada sisi lain, Bank juga mempunyai *Performance Improvement Plan* (PIP) bagi para karyawan yang tidak mencapai target yang telah disepakati dan ditentukan sebelumnya. Melalui program ini, diharapkan setelah dilakukan pembinaan, *monitoring* dan evaluasi secara berkala karyawan dapat kembali mencapai target yang telah ditentukan.

EMPLOYEE REWARD AND PUNISHMENT SYSTEM AND MECHANISMS

BMI constantly reviews the implementation of rewards and punishments to ensure that each policy implemented is consistent with the application of sanctions in cases of violations and capable of encouraging the Bank's performance to grow. BMI will appreciate employees who have excellent performance and exceed their goals.

In addition to rewards, there are benefits and career development opportunities for employees who contribute to the Bank. On the other hand, the Bank has a Performance Improvement Plan (PIP) Program for employees who fail to meet agreed-upon and predetermined targets. Employees should be able to return to achieving predetermined targets after regular training, monitoring, and evaluation under this program.



ASESMEN KARYAWAN

Bank telah memiliki kebijakan asesmen untuk karyawan. Kegiatan tersebut dilakukan secara berkala setiap tahun demi kepentingan pemenuhan manajemen talenta dan suksesor dari posisi kunci untuk setiap unit kerja. Asesmen terdiri atas 2 (dua) besaran area, yakni penilaian kinerja (*performance*) yang dilakukan secara berkala setiap semester dan penilaian potensi yang berfokus kepada LEAD3A: *Leadership, Ability, Agility & Ambition* yang dilakukan oleh pimpinan dengan persetujuan berjenjang sesuai tingkatan organisasi.

Pelaksanaan proses asesmen karyawan untuk memastikan kompetensi dan kapabilitasnya sesuai kebutuhan Bank. BMI melakukan asesmen karyawan dengan pendekatan *Key Performance Indicators* (KPI), yang disusun berdasarkan target kinerja Bank, target kinerja unit terkait maupun individu yang diselaraskan dengan tujuan dan strategi Bank serta mempertimbangkan aspek risiko dan kepatuhan.

Asesmen karyawan dilakukan dalam beberapa siklus *human capital*, di antaranya dalam proses pengembangan karier dan identifikasi talenta. Dalam pengembangan karier, terdapat beberapa aspek yang digunakan sebagai acuan, antara lain *job grade*, histori kinerja karyawan, kompetensi, catatan kedisiplinan karyawan serta hasil evaluasi dari pimpinan kerja terkait.

Dalam proses identifikasi talenta, acuan yang digunakan adalah hasil penilaian kinerja akhir tahun dan evaluasi potensi yang dimiliki oleh karyawan. Identifikasi talenta dilakukan secara periodik 1 (satu) tahun sekali oleh seluruh pimpinan unit kerja terhadap subordinatnya masing-masing. Seluruh proses ini mengacu pada kebijakan promosi, demosi dan manajemen talenta yang berlaku di Bank.

FASILITAS KESEJAHTERAAN

Penentuan kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas bagi karyawan Bank, antara lain mengacu kepada Undang-Undang No. 13 tahun 2003, Undang-Undang No. 11 tahun 2020 dan seluruh aturan pelaksanaannya, termasuk pemenuhan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Provinsi. Bank secara berkala melakukan kajian terhadap program-program benefit dengan tetap menyesuaikan keadaan pasar, kondisi mendatang dan tetap memperhatikan kinerja keuangan Bank serta strategi jangka panjang.

EMPLOYEE ASSESSMENT

The Bank has an employee assessment policy that is followed on a yearly basis to fulfill talent management and succession for key positions in each work unit. The assessment consists of 2 (two) area sizes: performance assessment, which is periodically carried out on a semesterly basis, and potential assessment, which focuses on LEAD3A: Leadership, Ability, Agility, & Ambition and is carried out by the leadership with tiers of approval based on the organization's level.

The employee assessment process is carried out to ensure competence and capabilities in accordance with the Bank's needs. BMI conducts employee assessments using the Key Performance Indicators (KPI) approach, which is based on the Bank's performance targets and related unit and individual performance targets aligned with the Bank's goals and strategy and takes the risk and compliance aspects into account.

Employee assessment occurs throughout several human capital cycles, including career development and talent identification. Job grade, employee performance history, competency, employee disciplinary records, and assessment results from related work leaders are all used as references in terms of career development.

The results of year-end performance appraisals and evaluations of employee potential are used as a reference in the talent identification process. All heads of work units conduct talent identification for their subordinates once a year. This process refers to the company's promotion, demotion, and talent management policies.

FACILITIES AND WELFARE

Determination of compensation, welfare programs, and facilities for bank employees, among other things, refers to Law No. 13 of 2003, Law No. 11 of 2020, and all implementing regulations, including compliance with District/City Minimum Wage and Provincial Minimum Wage provisions. The Bank reviews benefit programs regularly while adjusting to market conditions and future conditions and taking the Bank's financial performance and long-term strategy into account.



Selain fasilitas kesejahteraan yang bersifat wajib seperti BPJS, Bank juga memberikan menerapkan program kesejahteraan lain, seperti *flexible working hour*, *flexible benefit* untuk *medical insurance* dan *life insurance*, pemberian tunjangan Hari Raya Idul Adha, uang saku ibadah haji/umrah, hadiah kelahiran, hadiah pernikahan, santunan duka, bantuan biaya pendidikan anak, fasilitas olahraga, *car ownership program*, dan tunjangan lainnya.

Bank secara rutin juga mengadakan *event* dan seminar untuk mendukung *worklife balance* pekerja serta peningkatan *health and well-being* pekerja. Kegiatan tersebut mendatangkan pembicara dari kalangan praktisi, motivator, psikolog, maupun *influencer* yang sudah dikenal luas seperti program M-Fit, yaitu kompetisi karyawan sehat, kompetisi cabang sehat, *reward* keluarga sehat, dan konsultasi dokter secara *online (telemedicine)*.

Melalui program DIGICERIA, Bank memberikan wadah bagi karyawan untuk melakukan konseling, yaitu kegiatan konsultasi/bantuan yang dilakukan untuk membantu mengatasi permasalahan pribadi pekerja yang berdampak kepada kinerja. Bank juga mewajibkan *block leave* bagi pekerja, yaitu kebijakan untuk mengambil cuti selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut dalam 1 (satu) tahun dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi karyawan. *Maternity leave* juga diberikan kepada karyawan wanita sesuai undang-undang yang berlaku serta *paternity leave* untuk karyawan laki-laki yang istrinya melahirkan.

Bank melengkapi kebijakan tersebut dengan memberikan fasilitas khusus berupa ruang laktasi yang berada di Muamalat Tower bagi karyawan wanita sebagai prasarana pemerah ASI. Keberadaan ruang laktasi ini penting untuk mendukung pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Selain itu, Bank menyediakan *childcare facilities* berupa *Day Care* yang diadakan saat menjelang Hari Raya Idul Fitri di lingkungan kantor untuk memberikan rasa tenang dan aman bagi karyawan wanita yang mempunyai balita.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan terendah sesuai *grade* maksimum masing-masing karyawan di Bank adalah sebagai berikut:

Rasio Gaji Tertinggi : Terendah	24,4	Highest Employee Salary Ratio : Lowest
Rasio Gaji Direksi Tertinggi : Terendah	1,7	Highest Salary Ratio of Directors : Lowest
Rasio Gaji Komisaris Tertinggi : Terendah	1,1	Highest Commissioner Salary Ratio : Lowest
Rasio Gaji Direksi Tertinggi : Karyawan Tertinggi	2,3	Highest Salary Ratio of Directors : Highest Employee

In addition to mandatory welfare programs such as BPJS, the Bank also implements other welfare programs such as flexible working hours, flexible benefits for medical insurance and life insurance, Eid al-Adha allowance, Hajj/Umrah pilgrimage allowance, birth gifts, wedding gifts, bereavement compensation, assistance with children's education costs, sports facilities, a car ownership program, and other benefits.

The Bank regularly holds events and seminars to support workers' work-life balance and to improve their health and well-being. This activity featured speakers from practitioners, motivators, psychologists, and well-known influencers such as the M-Fit program, which specializes in healthy employee competitions, healthy branch competitions, healthy family rewards, and online doctor consultations (telemedicine).

The Bank provides a location for employee counseling through the DIGICERIA program, which consists of consultation/assistance activities to assist workers in overcoming personal problems that impact performance. The Bank also requires block leave for employees, a policy of taking five consecutive working days off in a year to improve employees' health and well-being. In accordance with applicable laws, female employees are given maternity leave, and male employees whose wives have given birth are given paternity leave.

The Bank supplements this policy by providing special facilities for female employees, such as a lactation room at Muamalat Tower as an infrastructure for expressing breast milk. The presence of this lactation room is critical to promoting exclusive breastfeeding. Furthermore, the Bank provides childcare facilities in the form of Day Care, held in the office environment just before Idul Fitri, to provide a sense of calm and security for female employees with toddlers.

HIGHEST AND LOWEST SALARY RATIO

The following is the ratio of the highest and lowest salaries according to the maximum grade of each employee at the bank:



DEMOGRAFI SDM

Informasi lengkap mengenai hal ini disajikan dalam Bab “Profil Perusahaan”.

STRATEGI DAN PROGRAM 2024

Pengembangan organisasi dan pencapaian kinerja melalui program pelatihan karyawan dan manajemen talenta yang efektif akan mendukung tercapainya prioritas strategi dan fokus Bank di tahun 2024. Pengembangan tersebut dimaksudkan untuk menyiapkan SDM yang andal, berintegritas tinggi, serta produktif.

Ketersediaan karyawan dengan kualifikasi tersebut seiring dengan jalannya pengelolaan organisasi berbasis teknologi digital agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan siap menghadapi era revolusi digital 4.0. Karena itu, proses pengembangan dan transformasi SDM dengan menyelaraskan kurikulum pendidikan dan pelatihan serta manajemen talenta menuju kualitas kompetensi yang andal merupakan hal utama dalam proses pengembangan SDM yang siap bersaing dalam era yang semakin menantang.

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan fokus bisnis Bank di tahun 2024: *Margin Income*, *Cost of Fund*, *Aggressive Fee Based Income* dan *Financing Growth*, strategi pengembangan SDM akan memprioritaskan 7 (tujuh) inisiatif sebagai berikut:

1. Program pengembangan dan pelatihan yang mendukung penerapan visi dan misi Bank.
2. Peningkatan kompetensi *soft skill* dan *technical skill*, sehingga mendorong produktivitas *business function* dan *key enabler function* dengan optimalisasi digital *blended learning platform*.
3. Peningkatan kompetensi digital, baik dari sisi *mindset* maupun *skill set* agar organisasi dapat bertransformasi dan bersaing dalam era teknologi finansial dan kebiasaan baru.
4. Peningkatan kapasitas/kemampuan manajerial, kepemimpinan dan manajemen talenta.
5. Membangun kemampuan organisasi yang *agile*, bertransformasi dan bersaing dalam era teknologi finansial yang semakin pesat.

HC DEMOGRAPHY

Detailed information regarding this subject is presented in the “Company Profile” Chapter.

2024 STRATEGIES AND PROGRAMS

Organizational development and performance achievement will support the Bank’s strategic priorities and focus in 2024 through employee training programs and effective talent management. This development aims to produce dependable, trustworthy, and productive human capital.

The availability of employees with these qualifications is consistent with the management of digital technology-based organizations in order to meet set goals and prepare for the digital revolution era 4.0. Therefore, the primary issue in developing human capital who are ready to compete in an increasingly challenging era is developing and transforming human capital by aligning education and training curricula and talent management towards reliable quality competencies.

The HC development strategy will prioritize the following 7 (seven) initiatives to support the achievement of the Bank’s business objectives and focus in 2024, which include Margin Income, Cost of Funds, Aggressive Fee Based Income, and Financing Growth:

1. Development and training programs that help the Bank’s vision and mission to be realized.
2. Improving soft skill and technical skill competence, thereby increasing the productivity of business functions and key enabler functions by optimizing the digital blended learning platform.
3. Improving digital competency, both in terms of mindset and skill set, to enable organizations to transform and compete in the age of financial technology and the new normal.
4. Enhanced managerial capacity/ability, leadership, and talent management.
5. Develop agile, transformative, and competitive organizational capabilities in an era of increasingly rapid financial technology.



6. Meningkatkan keterlibatan dan keterlekatan karyawan (*employee engagement*) dan *wellbeing*, bersama *Senior Management Team (SMT)*, sehingga meningkatkan *employer branding* yang sesuai dengan budaya perusahaan dan *brand promise* "IDEAL Place to Work".
 7. Menyelaraskan kurikulum pengembangan dan pelatihan dengan butir 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.
6. Increasing employee engagement and wellbeing, with the Senior Management Team (SMT), thereby increasing employer branding that is in line with corporate culture and the brand promise "IDEAL Place to Work".
 7. Align the curricula for development and training with points 1, 2, 3, 4, 5, and 6.



Teknologi Informasi

Information Technology

Kebijakan, pengelolaan dan perencanaan strategi pengembangan TI akan sejalan dengan strategi dan tujuan bisnis yang akan dicapai oleh Bank. Melalui penerapan tata kelola TI yang baik dan sesuai aturan yang berlaku, hingga saat ini telah terbukti mampu mendukung keberhasilan transformasi digital Bank.

Policy, management, and planning of IT development strategies will be aligned with business strategies and goals to be achieved by the Bank. Through the implementation of good IT governance and in accordance with applicable provisions, it has been proven capable of supporting the Bank's digital transformation success to date.



Rp30,3 miliar
billion

Investasi di bidang
teknologi informasi
pada tahun 2023
Investment in
information technology
in 2023



8 penghargaan
awards

Di bidang teknologi
informasi pada tahun
2023
In the area of
information technology
by 2023

PT Bank Muamalat Indonesia ("BMI," "Bank") berkeyakinan bahwa keberadaan Teknologi Informasi (TI) yang andal, baik dari sisi infrastruktur maupun aplikasi akan berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional Bank serta layanan kepada nasabah. Karena itu, Bank terus mengikuti perkembangannya serta berupaya meningkatkan kapasitas TI.

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis, Bank telah mencanangkan rencana dan strategi yang komprehensif di bidang TI, yaitu mencakup:

1. Pengembangan infrastruktur dan aplikasi yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan telekomunikasi dan data center (serta *disaster recovery center*) yang selalu dalam keadaan optimal dalam mendukung operasional Bank serta mampu mengantisipasi pertumbuhan bisnis.
2. Menjamin ketersediaan sistem TI yang andal untuk memberikan layanan yang cepat, efisien dan aman dalam mencapai proses operasional dan Bisnis Bank sesuai dengan target dan Services Level Agreement (SLA) yang ditetapkan.
3. Melakukan pengelolaan dan pengendalian risiko operasional sistem TI.

PT Bank Muamalat Indonesia ("BMI," "Bank") believes that the presence of reliable information technology, both in terms of infrastructure and application, will have an important role in supporting the Bank's operations and services to customers. For this reason, the Bank continues to keep track of developments as well as improvements in IT capacity.

To support business growth, the Bank has set IT comprehensive plans and strategies, namely as follows:

1. Infrastructure and application development, which includes hardware, software, telecommunication network, and data center (as well as disaster recovery center) that are always in optimum condition in supporting the Bank's operations as well as capable of anticipating business growth.
2. Guarantees the availability of an IT system that is reliable to providing quick, efficient, and safe services in achieving the Bank's operational and business process in line with the targets and Services Level Agreement (SLA) as determined.
3. Manage and control IT system operational risks.



Pada tahun 2023, fokus pengelolaan dan pengembangan TI diarahkan pada:

In the year 2023, the focus of IT management and development was directed at the following:

Improved IT Service Excellent for Supporting Business Growth and Regulatory Requirement Y2023-Y2024

Strengthen IT Security Infrastructure and Operation Y2023-Y2024

Strengthen IT Digital Smart Banking Platform Y2023-Y2024

1. Peningkatan penyediaan layanan IT dengan mengikuti perkembangan dan *best practice* untuk mendukung permintaan bisnis dan regulator.
 2. Penguatan infrastruktur keamanan dan jaringan komunikasi serta *backup system* Data Center DC dan DRC.
 3. Percepat transformasi digital dan ekosistem perbankan cerdas, bangun teknologi yang mumpuni dan aman.
1. Improvement in providing IT services by keeping track of developments and best practices to support business and regulators' demands.
 2. Strengthening security infrastructure and communication network as well as DC and DRC Data Center backup system.
 3. Accelerate smart banking digital and ecosystem transformation and build qualified and safe technology.



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Kebijakan, pengelolaan dan perencanaan strategi pengembangan TI akan sejalan dengan strategi dan tujuan bisnis yang akan dicapai oleh Bank. Melalui penerapan tata kelola TI yang baik dan sesuai aturan yang berlaku, hingga saat ini telah terbukti mampu mendukung keberhasilan transformasi digital Bank.

Proses transformasi digital masih terus dikembangkan hingga sekarang. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital syariah yang lebih optimal dengan menciptakan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi melalui digital banking.

Pengelolaan TI di BMI dilaksanakan oleh Divisi Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi, dalam hal ini Head Information Technology (IT). Kepala Divisi bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasi. Hingga akhir tahun buku 2023, Divisi Teknologi Informasi BMI didukung oleh 66 karyawan.

Divisi Teknologi Informasi BMI memiliki 5 (lima) sub-unit: IT Operation, IT Governance, IT Security, IT Solution Delivery, dan IT Enterprise Data Management. Berikut adalah struktur organisasinya.

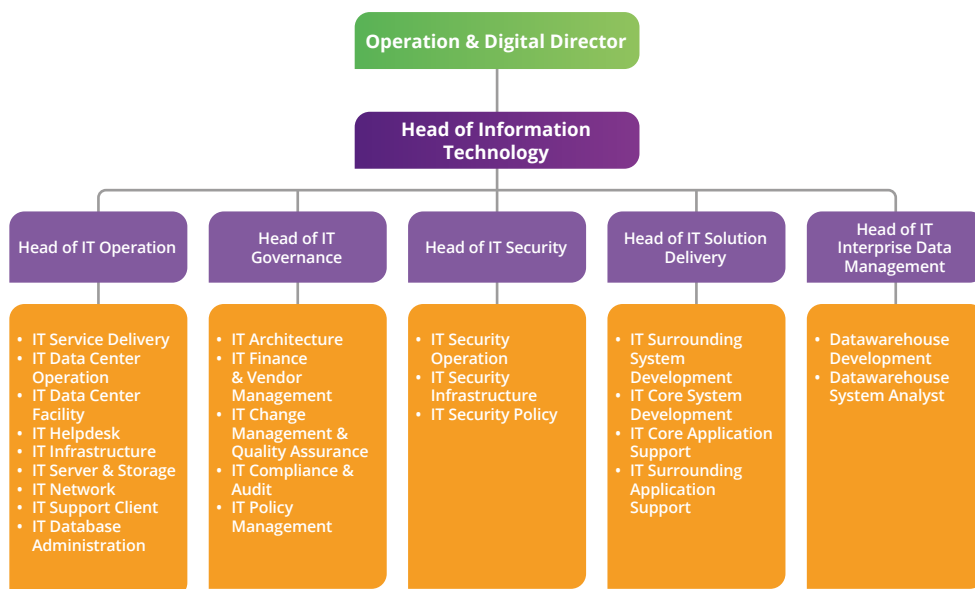
INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

Policy, management, and planning of IT development strategies will be aligned with business strategies and goals to be achieved by the Bank. Through the implementation of good IT governance and in accordance with applicable provisions, it has been proven capable of supporting the Bank's digital transformation success to date.

The digital transformation process continues to develop to the present. Such efforts aim to create a more optimal Shariah digital ecosystem by creating ease and comfort in transactions via digital banking.

IT management in BMI is carried out by the Information Technology Division, led by a Division Head; in this case, the Head of Information Technology (IT) directly reports to the Director of Operation. Until the end of the year 2023, BMI's Information Technology Division is supported by 66 employees.

BMI's Information Technology Division consists of 5 (five) sub-units: IT Operation, IT Governance, IT Security, IT Solution Delivery, and IT Enterprise Data Management. Following is the IT organizational structure:





Masing-masing sub-unit tersebut dipimpin oleh seorang Kepala dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Each sub-unit is led by a Head with the tasks and responsibilities as follows:

No.	Job Title (PIC)	Tugas dan Tanggung Jawab	Duties and Responsibilities
1.	Kepala Divisi Teknologi Informasi Head of Information Technology	- Mengelola dan mengarahkan sumber daya manusia dan layanan teknologi informasi di Divisi Teknologi Informasi - Laporan langsung kepada Direktur Operasional	- Manage and direct human resources and information technology services in the Information Technology Division - Directly report to the Director of Operations
1.1	Kepala Operasional Teknologi Informasi Head of IT Operation	- Mengelola Operasi Pusat data - Mengelola aplikasi layanan dan helpdesk - Mengelola server dan jaringan infrastruktur	- Manage data Operation Center - Manage service application and helpdesk - Manage server and infrastructure network
1.2	Kepala Tata Kelola Teknologi Informasi Head of IT Governance	- Mengelola anggaran dan vendor - Mengelola mekanisme TI - Mengelola <i>governance</i> terkait tata kelola IT	- Manage budget and vendor - Manage IT mechanism - Manage governance related to IT governance
1.3	Kepala Pengembangan Sistem TI Head of Information Technology Solution Delivery	- Mengelola <i>system core banking</i> - Mengelola <i>trade, treasury</i>, transaksi perbankan, dan <i>developer</i>	- Manage core banking system - Manage trade, treasury, banking transaction, and developer
1.4	Kepala Manajemen Data Perusahaan Teknologi Informasi Head of IT Enterprise Data Management	- Mengelola MIS dan DWH - Mengelola Pelaporan Peraturan - Mengelola Analisis Data - Mengelola <i>e-channel</i> - Mengelola sistem integrasi	- Manage MIS and DWH - Manage Regulation Reporting - Manage Data Analysis - Manage e-channel - Manage integration system
1.5	Kepala Keamanan Teknologi Informasi Head of IT Security	- Mengelola keamanan TI - Mengelola keamanan infrastruktur & jaringan	- Manage IT security - Manage infrastructure & network security

Sebagai bagian dari tata kelola di bidang teknologi informasi, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki prosedur untuk mengatasi beragam gangguan TI, pemulihan bencana, hingga sistem pelaporan. Uraianya adalah sebagai berikut:

As part of governance in information technology, Bank Muamalat Indonesia retains the procedures to overcome various IT disruptions, disaster recovery, and reporting systems. A description of this is provided below:

Mekanisme Identifikasi Disrupsi (Gangguan)

- Laporan gangguan yang telah diterima baik tim IT Helpdesk dan/ atau tim IT Data Center Operator dikelompokkan berdasarkan kategori:
 - Kategori aplikasi (Aplikasi surrounding & support)
 - Kategori *Core Banking* (Muamalat Core Banking (MCB))
 - Kategori Data Center Operation
 - Kategori *E-channel*
 - Kategori Infrastruktur
 - Kategori IT Security Administrator
- Alur Identifikasi dan Penanganan Gangguan Level-1
 - IT Helpdesk menerima dan menganalisis laporan permasalahan dari *requestor (bankwide)* yang diinput melalui aplikasi IT Helpdesk portal,
 - IT Helpdesk menindaklanjuti laporan permasalahan dengan memberikan solusi terkait permasalahan yang disampaikan oleh *requestor*,
 - IT Helpdesk dapat mengatasi permasalahan, maka permasalahan tersebut dinyatakan selesai.

Disruption Identification Mechanism

- Reports on disruptions received by IT Helpdesk team and/or IT Data Center Operator team are grouped based on categories as follows:
 - Surrounding & Support Application
 - Muamalat Core Banking (MCB)
 - Data Center Operation
 - E-Channel
 - Infrastructure
 - IT Security Administrator
- Flow of Identification and Disruption Handling Level-1
 - IT Helpdesk receives and analyze problems report from requestor (bankwide) inputted through the IT Helpdesk portal application,
 - IT Helpdesk follows-up on problems reports by providing solutions related to the problems submitted by requestor,
 - IT Helpdesk resolved the problems, thus the problems are stated as completed.



Level-2

- a. Apabila IT Helpdesk tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka IT Helpdesk dapat melakukan eskalasi permasalahan kepada *Support Group* terkait untuk dapat diselidiki dan analisa untuk mencari solusi atas permasalahannya.
- b. Permasalahan dapat terselesaikan, maka *Support Group* terkait dapat langsung melakukan update penyelesaian pada aplikasi IT Helpdesk portal mengenai penyelesaian masalahnya, maka permasalahan tersebut dinyatakan selesai.

Level-3

- a. Jika penyelesaian masalah tidak dapat diselesaikan secara langsung sesuai penyelidikan dan analisis *Support Group*, dan harus melalui Prosedur Pengembangan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi dengan pengajuan *Change Request* (CR) yang dibuat oleh unit bisnis pemilik aplikasi.
- b. Dengan pengajuan *Change Request* (CR) dan melalui Proses Prosedur Pengembangan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi, maka penyelesaian permasalahan harus dipantau oleh *Support Group* dan unit bisnis pemilik aplikasi sampai permasalahan dinyatakan selesai.

Level-2

- a. In the event the IT Helpdesk cannot resolve the problems, then IT Helpdesk may level up the problems to the related Support Group for further investigation and analysis in search of solutions.
- b. Problems are resolved, then the related Support Group may directly update the resolved problems on the IT Helpdesk application portal concerning the resolved problems, thus the problems are stated as completed.

Level-3

- a. In the event a problem cannot be directly resolved according to the investigation and analysis of the Support Group, and thus must go through the Development, Procurement and Maintenance Application System Procedure by submitting a Change Request (CR) by the application owner business unit.
- b. With the submitted Change Request (CR) and through the process of the Development, Procurement and Maintenance Application System Procedure, then problem resolving must be monitored by the Support Group and business unit as owner of the application until the problem is said to be resolved.

Strategi Keamanan Sistem Siber (Cyber Security)

1. Penerapan Manajemen Risiko Siber
Dalam menjaga keamanan Sistem Siber dilakukan dengan Penerapan Manajemen Risiko Siber mencakup 4 (empat) aspek berikut:
 - a. Tata kelola risiko terkait keamanan siber, meliputi perumusan tingkat risiko terkait keamanan siber yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko terkait keamanan siber (risk tolerance), serta budaya dan kesadaran risiko terkait keamanan siber,
 - b. Kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber, yang meliputi strategi manajemen risiko, cakupan perangkat organisasi, serta kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko terkait keamanan siber,
 - c. Proses manajemen risiko, kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM) serta kecukupan system informasi manajemen risiko terkait keamanan siber, dan
 - d. Sistem pengendalian risiko terkait keamanan siber, yang meliputi kecukupan sistem pengendalian *intern* dan kecukupan kaji ulang.
2. Implementasi *Security Information and Event Management* (SIEM)
3. Implementasi *Web Application Firewall* (WAF)

Cyber System Security Strategy

1. Implementation of Cyber Risk Management
Maintaining the Cyber System security is carried out by the Implementation of Cyber Risk Management which includes 4 (four) aspects as follows:
 - a. Risk governance related to cyber security encompasses the formulation of risk level concerning cyber security to take (risk appetite) and risk tolerance, as well as risk culture and awareness related to cyber security,
 - b. Risk management framework related to cyber security which encompasses risk management strategy, adequacy of organizational instruments, as well as the adequacy of policy, procedures, and determining risk limit related to cyber security,
 - c. Risk management process, adequacy of Human Resources (HR) as well as adequacy of risk management information system related to cyber security, and
 - d. Risk control system related to cyber security that encompasses the adequacy of internal control system and the adequacy of reviews.
2. Implementation of Security Information and Even Management (SEM)
3. Implementation of Web Application Firewall (WAF)



4. Tim *Security Operation Center* (SOC), melakukan pemantauan jaringan melalui SIEM, WAF secara terus menerus selama 24 jam dan melakukan Analisa & tindakan terhadap keadaan anomali yang ditemukan
5. Melakukan *Penetration Test* terhadap *Jaringan*, *Web* dan kritikal aplikasi untuk memastikan tidak ada kerentanan
6. Melakukan uji coba berkala terkait penanganan dan keamanan siber sesuai yang telah ditetapkan oleh OJK

Strategi Atau pun Proses Pemulihan Bencana (Disaster Recovery)

1. Karyawan yang pertama mengetahui insiden TI, melaporkan kepada unit kerja Teknologi Informasi, melalui IT Helpdesk dan atau dapat langsung menghubungi PIC IT Support (level 1) terkait, IT Support (level 1) memiliki waktu tidak melebihi 30 menit untuk menyelesaikan insiden tersebut. Bila dalam waktu maksimal 30 menit insiden tidak dapat diselesaikan, maka dieskalasi kepada Head IT Operations (L2). Head IT Operations (L2) berkewajiban untuk segera melakukan analisis dan berkoordinasi dengan pihak terkait lain termasuk vendor yang dapat menyelesaikan insiden tersebut.
2. Unit kerja yang terkena dampak dari insiden, wajib mengetahui proses yang sedang berjalan agar dapat menjalankan *workaround* yang sudah ditentukan. Maksimal 60 menit, jika insiden tersebut belum dapat diselesaikan, maka wajib dieskalasi kepada Kepala Divisi IT (L1). Kepala Divisi IT (L1) berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
3. Segera setelah menerima informasi tersebut, Kepala Divisi IT sebagai Ketua Tim DRC mengaktifkan *call tree* dengan kata kunci "*Recovery*."
4. Seluruh anggota tim harus segera berkumpul di lokasi *command center* dan memberikan masukan mengenai kondisi terakhir, perbaikan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan penyebab bencana TI, dan kesiapan masing-masing proses untuk kembali kepada sistem DC.
5. Ketua Tim DRC menginformasikan kepada tim DRC mengenai hasil pertemuan pemulihan DRC. Berdasarkan informasi tersebut, Ketua Tim DRC memutuskan untuk kembali kepada operasional DC dan menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
6. Ketua Tim DRC menginstruksi kepada seluruh Anggota Tim DRC.
7. Tim Komunikasi Cabang menginformasikan kepada seluruh cabang dan unit kerja bahwa operasional akan dikembalikan ke mesin DC.
8. PIC Information Security memberikan akses yang diperlukan kepada PIC Jaringan.
9. PIC Jaringan mengembalikan akses cabang dari mesin DRC ke mesin DC sekaligus melakukan uji coba koneksi.

4. Security Operation Center (SOC) team conducts monitoring of the network through SEM, WAF continuously for 24 hours and carries out analysis and action on the anomaly conditions found
5. Conduct Penetration Test on the Network, Web and critical applications to ensure there are no vulnerabilities
6. Conduct trial run tests periodically related to cyber handling and security in accordance with the provisions set forth by OJK

Strategy or Process of Disaster Recovery

1. Employees who are first aware of an IT incident report it to the Information Technology work unit via the IT Helpdesk and/or may directly contact the relevant IT Support PIC (level 1). IT Support (level 1) has a time limit of not more than 30 minutes to resolve such an incident. If, within a maximum of 30 minutes, the incident is not resolved, then it is escalated to the Head of IT Operations (L2). The Head of IT Operations (L2) is obligated to immediately conduct analysis and coordinate with other related parties, including vendors, that may assist in resolving the incident.
2. The work unit impacted by the incident is obligated to know the ongoing process so as to carry out the workaround as determined. In a maximum of 60 minutes, if the incident is still not resolved, it must be escalated to the Head of IT Division (L1). The Head of IT Division (L1) is obligated to take the steps necessary to resolve the incident.
3. Immediately after receiving the information, the Head of the IT Division, as Head of the DRC Team, activates a call tree with the key work "*Recovery*."
4. All team members must immediately gather at the command center and provide feedback on the latest condition, repairs carried out to resolve the cause of the IT disaster, and the readiness of each process to return to the DC system.
5. The Head of the DRC Team informs the DRC Team of the results of the DRC recovery meeting. Based on this information, the Head of the DRC Team decides to return to DC operations and instructs them to take the necessary steps.
6. The Head of the DRC Team instructs all members of the DRC Team.
7. The Branch Communication Team informs all branch offices and work units that operations will return to the DC mechanism.
8. The PIC of Information Security provides access needed to the Network PIC.
9. The Network PIC returns the branch offices' access from the DRC mechanism to the DC mechanism while at the same time running a connection trial test.



10. Bila uji coba berhasil, PIC Jaringan membuka koneksi mesin DC agar dapat diakses oleh cabang.
11. Tim Komunikasi Cabang menginformasikan kepada seluruh cabang dan unit kerja bahwa operasional dapat kembali dilakukan seperti semula dan mencatat masalah yang dilaporkan oleh cabang untuk ditindak-lanjuti (email, telepon/media komunikasi).
12. PIC Jaringan mengembalikan akses kepada PIC Information Security.
13. Ketua Tim DRC menginformasikan bahwa proses pemulihan DRC telah berhasil dilakukan.

Sistem/Mekanisme Pelaporan Kepada Direksi

Jika insiden TI yang terjadi merupakan masuk dalam kategori level 3 yaitu:

1. Kejadian perlu adanya intervensi dari pihak ketiga diluar perusahaan.
2. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah melebihi RTO masing-masing aplikasi.
3. Hal ini hanya dapat dipecahkan dengan melakukan *set up* ulang infrastruktur IT.
4. Teknologi informasi atau proses operasional/bisnis tidak dapat berjalan.
5. Dan/atau merupakan insiden keamanan siber.

Maka insiden harus dilaporkan kepada Incident *Management Team* (IMT) dimana selanjutnya ketua IMT akan menghubungi Direksi untuk meminta arahan atau keputusan terkait tindakan selanjutnya yang akan dilaksanakan.

10. If the trial test succeeds, the Network PIC opens the DC mechanism connection so it can be accessed by the branch offices.
11. The Branch Communication Team informs all branch offices and work units that operation returns to normal and records the problems reported by the branch offices for further follow-up (email, telephone/communication media)
12. The Network PIC returns access to the Information Security PIC.
13. The Head of the DRC Team informs that the DRC recovery process had succeeded.

System/Mechanism of Reporting to the Board of Directors

In the event an IT incident that occurs is at level category namely as follows:

1. an incident that requires intervention from a third-party outside of the company.
2. time required to resolve the problem exceeds RTO of each application.
3. the matter can only be resolved by conducting a resetting of the IT infrastructure.
4. information technology or operational/business process is not working.
5. and/or if it is a cyber security incident.

Therefore, the incident must be reported to the Incident Management Team (IMT), whereby subsequently, the Head of IMT will contact the Board of Directors to request directives or decisions related to the next actions to take.

ROADMAP TEKNOLOGI INFORMASI

BMI telah memiliki rancangan strategis dalam pengembangan TI ke depan, seperti tertuang dalam “*Roadmap* Teknologi Informasi 2024” yang mencakup IT Governance & IT information *Enhancement* dengan rinciannya sebagai berikut:

INFORMATION TECHNOLOGY ROADMAP

BMI retains the strategic design for developing IT in the future, as contained in the “Information Technology Roadmap 2024,” which encompasses IT Governance & IT Information Enhancement with details as follows:

No.	Materi Pengembangan Development Material	Uraian	Description
1	<i>Data Warehouse Improvement</i>	Melakukan <i>assessment</i> terkait penggunaan <i>Data Warehouse</i> untuk mendapatkan solusi yang lebih efektif, efisien, dan relevan sebelum dilakukan pengembangan <i>Data Warehouse</i> sampai dengan target tahun 2025	Conduct assessments on the use of data warehouses to obtain a more effective, efficient, and relevant solution before developing the data warehouse up to the targets of the year 2025
2	<i>Service Management</i>	Peningkatan penyediaan layanan IT dengan mengikuti perkembangan dan <i>best practice</i> untuk mendukung permintaan bisnis dan regulator	Enhancement in providing IT services by keeping track of developments and best practices to support businesses and regulators' demands
3	Implementasi ISO 20022 – SWIFT Implementation of ISO 20022 - SWIFT	Perubahan standard format SWIFT untuk layanan <i>remittance</i> (MT.103 to MX Pacs.008), (MT.202 to MX Pacs.009), (MT.940/950 to MX CAMT.053) sesuai dengan format ISO20022 (MX) agar transaksi <i>remittance</i> nasabah dan interbank dapat diproses	Changes in the SWIFT standard format for remittance services (MT.103 to MX Pacs.008), (MT.202 to MX Pacs.009), (MT.940/950 to MX CAMT.053) in line with the ISO20022 (MX) format so that customer and interbank remittance transactions can be processed



No.	Materi Pengembangan Development Material	Uraian	Description
4	Implementasi arsitektur <i>microservice</i> untuk <i>Surrounding System</i> Implementation of microservice architecture for Surrounding System	Mengimplementasikan <i>platform microservice</i> untuk sistem <i>surrounding</i>	Implement microservice platform for surrounding systems
5	Implementasi DLP untuk e-mail dan perangkat <i>user</i> Implementation of DLP for e-mail and user device	Pengadaan <i>hardware</i> penunjang <i>Data Leak Prevention</i> untuk Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi	Procurement of Data Leak Prevention support hardware for the implementation of the Personal Data Protection Law

INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI

Pada tahun 2023, total realisasi belanja modal yang dikeluarkan Bank untuk pengembangan TI mencapai Rp30,3 miliar. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp24,5 miliar.

INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENT

In 2023, the total realization of capital expenditure spent by the Bank for IT development reached Rp30.3 billion. This realization is higher than the Rp24.5 billion spent in 2022.

STRATEGI PENGEMBANGAN TI

Sepanjang tahun 2023, strategi pengembangan TI yang telah direalisasikan oleh BMI antara lain meliputi:

- Pengembangan TI secara berkelanjutan fokus kepada pengembangan Infrastruktur IT Security hal ini dilakukan untuk memperkuat sistem keamanan Bank dari ancaman kejahatan siber. BMI telah melakukan penguatan pada infrastruktur dan sistem keamanan diantaranya:
 - Implementasi Web Application Firewall (WAF).
 - Implementasi Privilege Access Management (PAM).
 - Implementasi Intrusion Detection and Prevention System (IDPS).
 - Implementasi Endpoint Detection and Response (EDR).
 - Implementasi SD WAN di seluruh kantor cabang.
- Guna mempersiapkan pengembangan TI dari segi infrastruktur Data Center (DC & DRC), BMI telah mengundang konsultan (Vedapraxis) untuk melakukan assessment dan analisis fasilitas dan Infrastruktur pada DC dan DRC *existing*, sehingga didapatkan skema prioritas dan rekomendasi teknis dalam menentukan strategi pengembangan TI.
- Pengembangan TI terkait Digital meliputi pengembangan Open API & Middleware Microservices, pengembangan server *Hard* token CMS, dengan pengembangan layanan/fitur pada MDIN terdiri:
 - Pembelian Voucher Spotify.
 - Pembelian Voucher Google Play.
 - Pembayaran BPJPH.
 - Pembayaran SIGNAL.
 - Nilai Manfaat Virtual Account.
 - COB Biometric Liveness Verification.
 - Daftar DPLK.
 - Pembayaran Lion Air.
 - Pembayaran Tiket KAL.

IT DEVELOPMENT STRATEGY

Throughout the year 2023, the strategy on IT development actualized by BMI, among others, includes the following:

- Continuous IT development focuses on the development of IT security infrastructure, carried out to strengthen the Bank's security system from cyber crime threats. BMI has strengthened the security infrastructure and system, including the following:
 - Implementation of Web Application Firewall (WAF).
 - Implementation of Privilege Access Management (PAM).
 - Implementation of Intrusion Detection and Prevention System (IDPS).
 - Implementation of Endpoint Detection and Response (EDR).
 - Implementation of SD WAN in all branch offices.
- In order to prepare IT development in the context of Data Center infrastructure (DC & DRC), BMI invited a consultant (Vedapraxis) to assess and analyze the facilities and infrastructure on existing DC and DRC so as to obtain the priority scheme and technical recommendations for determining IT development strategies.
- IT development related to digital encompasses the hard-token CMS server, with development in services/features on the MDIN, consisting of the following:
 - Purchase of Voucher Spotify.
 - Purchase of Voucher Google Play.
 - Payment of BPJPH.
 - Payment of SIGNAL.
 - Value of Virtual Account Benefits.
 - COB Biometric Liveness Verification.
 - DPLK List.
 - Payment to Lion Air.
 - Payment for KAI Ticket.



- j. Pembayaran Tagihan My Republic.
- k. Pembayaran Tagihan First Media.
- l. Portofolio Pembiayaan.
- m. Pembayaran Zakat Assyifa.
- n. Pembayaran Infaq/Shadaqah Assyifa.
- o. Pembayaran Wakaf Assyifa.
- p. Pembelian Hewan Qurban.
- q. Tarik Tunai Teller.
- r. Setor Tunai Teller.
- s. Pembelian Paket Umrah (Hijrah Tour).

- t. Digital Customer Care.
- u. Tabungan iB Hijrah Dana Impian.
- v. Top Up BNI TapCash.
- w. Portofolio DPLK Syariah Muamalat.
- x. COB RTJH.
- y. Ajak Teman QR.
- z. Manajemen Kartu.
- aa. Sedekah Shubuh.
- bb. Download Mutasi Rekening.

- j. Payment for My Republic Billing.
- k. Payment for First Media Billing.
- l. Financing Portfolio.
- m. Payment for Zakat Assyifa.
- n. Payment for Infaq/Shadaqah Assyifa.
- o. Payment for Wakaf Assyifa.
- p. Payment for Qurban Animals.
- q. Teller Cash Withdrawal.
- r. Teller Cash Deposit.
- s. Paymet for Umrah (Hijrah Tour) Promotion Package.
- t. Digital Customer Care.
- u. iB Hijrah Dream Fund Savings.
- v. BNI Tap Cash Top Up.
- w. DPLK Sharia Muamalat Portfolio.
- x. COB RTJH.
- y. Ask A Friend to Join QR.
- z. Card Management.
- aa. Shubuh Donation.
- bb. Download Account Mutation.

PENGHARGAAN

Sepanjang tahun 2023, pengelolaan TI di lingkungan BMI mendapatkan sejumlah apresiasi dari pihak eksternal, yaitu berupa penghargaan. Di antaranya, disampaikan melalui tabel di bawah ini.

No.	Nama Penghargaan Name of Award	Kategori Category	Pemberi Penghargaan Award Issuer	Tanggal Diberikan Date
1	The 2 nd Best Opening Account Via Mobile Application/Mobile Browser	Sharia Conventional Bank	Infobank MRI 20 th Banking Service Excellence Award	20 Juni 2023 June 20, 2023
2	The 2 nd Best - Chatbot	Sharia Conventional Bank	Infobank MRI 20 th Banking Service Excellence Award	20 Juni 2023 June 20, 2023
3	The 2 nd Best - Live Chat	Sharia Conventional Bank	Infobank MRI 20 th Banking Service Excellence Award	20 Juni 2023 June 20, 2023
4	The 2 nd Best - Social Media	Sharia Conventional Bank	Infobank MRI 20 th Banking Service Excellence Award	20 Juni 2023 June 20, 2023
5	The 2 nd Best - Email Service	Sharia Conventional Bank	Infobank MRI 20 th Banking Service Excellence Award	20 Juni 2023 June 20, 2023
6	The 2 nd Best - Mobile Banking	Sharia Conventional Bank	Infobank MRI 20 th Banking Service Excellence Award	20 Juni 2023 June 20, 2023
7	The 3 rd Best in Service Excellence	Sharia Conventional Bank	Infobank MRI 20 th Banking Service Excellence Award	20 Juni 2023 June 20, 2023
8	The 3 rd Best in Walk In Channel	Sharia Conventional Bank	Infobank MRI 20 th Banking Service Excellence Award	20 Juni 2023 June 20, 2023

KINERJA 2023

Realisasi pencapaian di TI selama 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Improve IT Service Excellent
Peningkatan penyediaan layanan IT dengan mengikuti perkembangan dan best practice untuk mendukung permintaan bisnis dan regulator diantaranya:

AWARDS

Throughout the year 2023, IT management within BMI received several appreciations from external parties, namely in the form of awards. Among these awards are those presented below.

2023 PEFORMANCE

Realization of IT achievements during the year 2023 are described below:

1. Improve IT Service Excellence
Improvement in providing IT services by keeping track on developments and best practices to support business and regulatory demands, including the following:



- a. Implementasi ISO 27001 for DUKCAPIL
 - b. Uji coba berkala (switch over) dan menjalankan operasional 11 (sebelas) kritikal aplikasi dengan menggunakan infrastruktur backup pada lokasi Data Recovery Center (DRC)
 2. Strengthen IT Security Infrastructure & Operation
Penguatan infrastruktur security dan jaringan komunikasi serta backup system Data Center DC dan DRC. BMI telah melakukan penguatan pada infrastruktur dan sistem keamanan diantaranya:
 - a. Implementasi Web Application Firewall (WAF).
 - b. Implementasi Privilege Access Management (PAM).
 - c. Implementasi Intrusion Detection and Prevention System (IDPS).
 - d. Implementasi Endpoint Detection and Response (EDR).
 - e. Implementasi SD WAN di seluruh kantor cabang.
 - f. Melakukan penetration test (pentest) kritikal aplikasi dan jaringan.
 - g. Pengujian kesiapan Bank dalam keamanan siber, dalam bentuk uji coba DRP cyber security dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 3. IT Digital Infrastructure & Smart Banking Platform
Strengthen IT Digital & Smart Banking Platform untuk mendukung percepatan transformasi digital dan ekosistem perbankan cerdas, membangun teknologi yang mumpuni dan aman yang meliputi pengembangan Open API & Middleware Microservices, pengembangan server Hard token CMS, dengan pengembangan layanan/fitur pada MDIN terdiri:
 - a. Pembelian Voucher Spotify
 - b. Pembelian Voucher Google Play
 - c. Pembayaran BPJPH
 - d. Pembayaran SIGNAL
 - e. Nilai Manfaat Virtual Account
 - f. COB Biometric Liveness Verification
 - g. Daftar DPLK
 - h. Pembayaran Lion Air
 - i. Pembayaran Tiket KAI
 - j. Pembayaran Tagihan My Republic
 - k. Pembayaran Tagihan First Media
 - l. Portofolio Pembiayaan
 - m. Pembayaran Zakat Assyifa
 - n. Pembayaran Infaq/Shadaqah Assyifa
 - o. Pembayaran Wakaf Assyifa
 - p. Pembelian Hewan Qurban
 - q. Tarik Tunai Teller
 - r. Setor Tunai Teller
 - s. Pembelian Paket Umrah (Hijrah Tour)
 - t. Digital Customer Care
 - u. Tabungan iB Hijrah Dana Impian
- a. Implementation of ISO 27001 for DUKCAPIL (Population and Civil Registration).
 - b. Conduct periodic trial runs (switch over) and operation of 11 (eleven) critical applications by use of backup infrastructure in Data Recovery Center (DRC) locations.
 2. Strengthen IT Security Infrastructure & Operation
Strengthen security and communication network infrastructure as well as DC and DRC Data Center backup system. BMI has carried out strengthening of security infrastructure and system, among others on the following:
 - a. Implementation of Web Application Firewall (WAF).
 - b. Implementation of Privilege Access Management (PAM).
 - c. Implementation of Intrusion Detection and Prevention System (IDPS).
 - d. Implementation Endpoint Detection and Response (EDR).
 - e. Implementation of SD WAN in all branch offices.
 - f. Conduct penetration test (pentest) on critical applications and networks.
 - g. Testing on readiness of the Bank in cyber security, in the form of trial run of DRP cyber security as reported to the Financial Services Authority (OJK).
 3. IT Digital Infrastructure & Smart Banking Platform
Strengthening the IT Digital & Smart Banking Platform to support the acceleration of digital transformation and the smart banking ecosystem, building qualified and safe technology that covers the development of Open API & Middleware Microservices, the development of Hard token CMS servers, and the development of services/features on the MDIN, which consists of the following:
 - a. Purchase of Spotify Voucher
 - b. Purchase of Google Play Voucher
 - c. Payment of BPJPH
 - d. Payment of SIGNAL
 - e. Value of Virtual Account Benefits
 - f. COB Biometric Liveness Verification
 - g. DPLK Registration
 - h. Payment for Lion Air
 - i. Payment for KAI Ticket
 - j. Payment for My Republic Billing
 - k. Payment for First Media Billing
 - l. Financing Portfolio
 - m. Payment for Zakat Assyifa
 - n. Payment for Infaq/Shadaqah Assyifa
 - o. Payment for Wakaf Assyifa
 - p. Purchase of Qurban Animals
 - q. Teller Cash Withdrawal
 - r. Teller Cash Deposit
 - s. Purchase of Umrah (Hijrah Tour) Tour Package
 - t. Digital Customer Care
 - u. iB Hijrah Dream Fund Savings



- v. Top Up BNI TapCash
- w. Portofolio DPLK Syariah Muamalat
- x. COB RTJH
- y. Ajak Teman QR
- z. Manajemen Kartu
- aa. Sedekah Shubuh
- bb. Download Mutasi Rekening

- v. Top Up BNI TapCash
- w. DPLK Portfolio of Sharia Muamalat
- x. COB RTJH
- y. Ask Friends to Join QR
- z. Card Management
- aa. Subh Donation
- bb. Download Account Mutation

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024

Tahun 2024, BMI mengupayakan peningkatan keandalan dan keamanan sistem TI melalui pengembangan pada *infrastruktur DC, Infrastructure IT Security* dan *Operation Excellent* dengan cakupan:

1. Melakukan kajian infrastruktur *Core Banking* (MCB) dan *Data Warehouse* (DWH)
2. Penguatan *IT Security* meliputi:
 - a. Penguatan *security TI*, berkelanjutan
 - Penguatan *Infrastructure security*
 - Penguatan *Network security*
 - Penguatan *Endpoint security*
 - Penguatan *Application security*
 - b. *Security Awareness & Risk Prevention*, berkelanjutan
 - Sosialisasi *security awareness* melalui *e-mail (e-mail blasting)*
 - Sosialisasi *security awareness* melalui notifikasi MHP saat *login*
 - *Induction Training cyber awareness* untuk seluruh karyawan baru
 - *Awareness* keamanan informasi/ siber – materi MIC
 - Simulasi *e-mail phishing/fake* ke karyawan
 - c. *Data Management system*, Implementasi *Data Loss Prevention* (IDLP)
3. Pemenuhan ketentuan Regulator POJK 11/POJK.03/2022
 - a. Melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas tingkat maturitas siber
 - b. Pengujian kesiapan Bank dalam keamanan siber, dalam bentuk uji coba *DRP cyber security* dan atau *table top exercise* minimal 1 (satu) kali dalam setahun sesuai ketentuan regulator
4. Penguatan *Infrastructure Digital Banking* diantaranya meliputi:
 - a. *Fill-in the gaps-IT Datawarehouse & Digital Banking Platform*.
 - b. *Implement ISO 20022 for SWIFT*.
 - c. *Surveillance ISO 270001 for Dukcapil*.
 - d. *Revamp Middleware API Micro Service*.
 - e. *Upgrade WAY4 & Replacement Obsolete HSM*.

STRATEGIC PLAN IN 2024

For the year 2024, BMI strives to improve the reliability and security of the IT system through the development of DC infrastructure, IT security, and Operation Excellence Infrastructure, which encompasses the following:

1. Conduct review of the *Care Banking* infrastructure (MCB) and *Data Warehouse* (DWH)
2. Strengthen *IT Security* consisting of the following:
 - a. Continuous strengthening of *IT security*:
 - Strengthening of *Security infrastructure*
 - Strengthening of *Network security*
 - Strengthening of *Endpoint security*
 - Strengthening of *Application security*
 - b. Continuous *Security Awareness & Risk Prevention*
 - Socialization on *security awareness* through email blast
 - Socialization of *security awareness* through MHP notification at login
 - *Induction Training* on *cyber awareness* for all new employees
 - *Awareness* of information/ *cyber security* – MIC material
 - Simulation on email *phishing/fake* to employees
 - c. *Data Management System*, Implementation of *Data Loss Prevention* (IDLP)
3. Fulfilment of regulatory provision POJK 11/POJK.03/2022
 - a. Conduct self-assessment on the *cyber maturity level*
 - b. Test on the readiness of the Bank in *cyber security*, in the form of a trial run on *DRP cyber security* and/ or *table-top exercise* at least 1 (one) time in a year in accordance with regulatory provisions
4. Strengthening of *Digital Banking Infrastructure* including the following:
 - a. Fill in the gaps – *IT Datawarehouse & Digital Banking Platform*
 - b. Implement *ISO 20022 for SWIFT*
 - c. Surveillance of *ISO 270001 for Dukcapil* (Population and Civil Registration)
 - d. Revamp *Middleware API Micro Service*
 - e. Upgrade *WAY4 & Replacement of Obsolete HSM*.



Manajemen Risiko

Risk Management

Seiring dengan perkembangan bisnis PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("BMI", "Bank"), serta dinamika di industri perbankan, risiko yang dihadapi oleh Bank semakin kompleks. BMI dituntut agar mampu menerapkan manajemen risiko yang andal agar dapat tetap menjaga pencapaian kinerja keuangan yang positif dan berkelanjutan, serta selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. BMI berkomitmen untuk menerapkan manajemen risiko dalam segala aspek pengelolaan operasional bank secara independen dan objektif.

In line with the business development of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("BMI", "Bank"), as well as the dynamics in the banking industry, the risks faced by the Bank are becoming more complex. BMI is required to be able to implement competent risk management in order to maintain positive and sustainable financial performance, and also to be in line with the principles of good corporate governance. BMI is committed to implementing risk management in every aspects of the bank's operational management independently and objectively.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

BMI menghadapi tantangan yang dinamis dan dapat mempengaruhi kegiatan bisnis, antara lain:

1. Bank mengalami tekanan *Net Income Margin* akibat tren peningkatan BI 7 *days repo rate* dan *LPS rate*;
2. Terdapat tren penurunan *recovery asset sale*;
3. Peningkatan beban terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah;
4. Belum optimalnya produktivitas Bank;
5. Belum optimalnya *contribution margin* dari tiap *region*;
6. Meningkatnya risiko konsentrasi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bank menerapkan manajemen risiko dalam kerangka *Governance, Risk & Compliance* (GRC). Pelaksanaan manajemen risiko bersamaan dengan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta terpenuhinya aspek kepatuhan dan hukum dalam kerangka GRC, menjadi *enabler* dalam pencapaian target bisnis Bank. Pelaksanaan target tersebut didukung oleh sumber daya manusia, teknologi informasi dan proses bisnis Bank.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

BMI faced dynamic challenges and can influence business activities which among others are as follows:

1. The Bank experience pressures on the Net Income Margin due to increasing trend in the BI 7-days repo rate and LPS rate;
2. The condition of a downward trend in recovery assets sale;
3. Increase in expenses due to settlement of non-performing financing;
4. The Bank's productivity is not yet optimized;
5. The contribution margin from each region is not yet optimized;
6. Increasing risk concentration.

To face these challenges, the Bank implements risk management within the Governance, Risk & Compliance (GRC) framework. The implementation of risk management, good corporate governance (GCG) practices, and the fulfillment of compliance and legal aspects within the GRC framework have become an enabler in achieving the Bank's business targets. This implementation is supported by human resources, information technology, and the Bank's business processes.

PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Prinsip umum manajemen risiko di BMI, antara lain meliputi:

1. Pengelolaan risiko dilakukan pada setiap aktivitas bisnis atau operasional Bank yang diterapkan berdasarkan prinsip kehati-hatian;

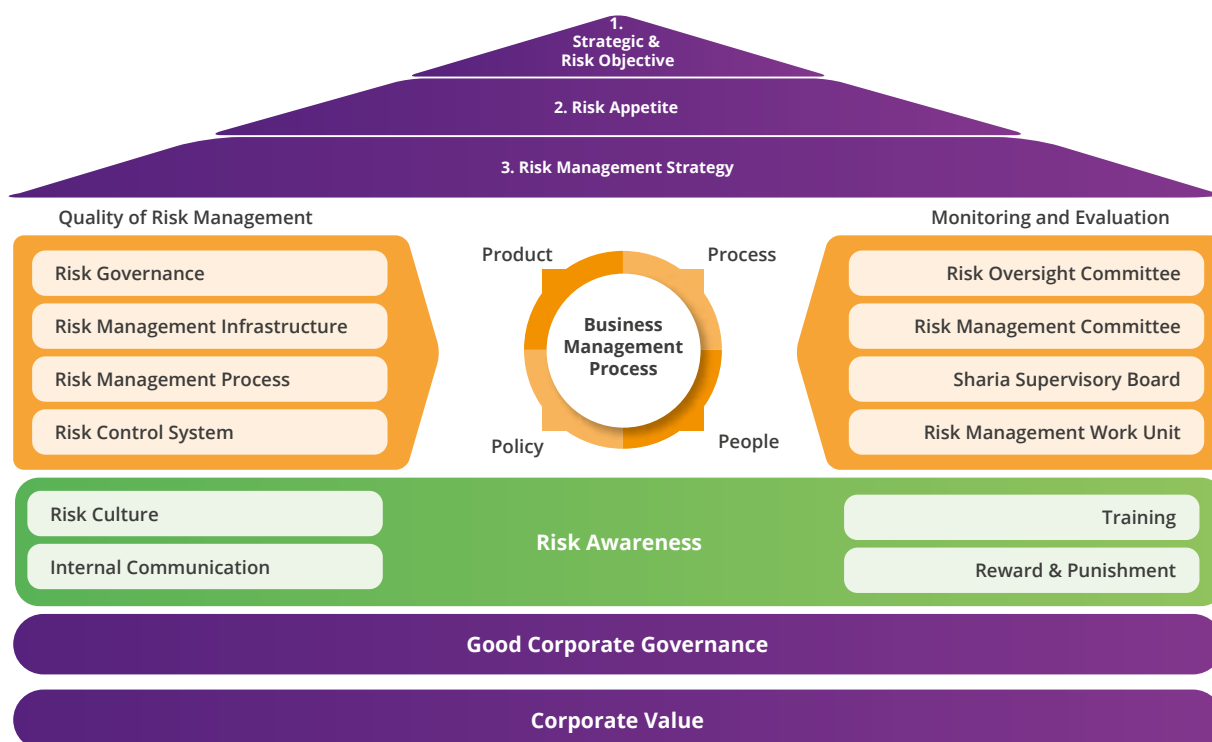
RISK MANAGEMENT PRINCIPLES

The general principles of risk management at BMI, among others are as follows:

1. Risk management is executed in each of the Bank's business or operational activity based on prudent principle;



2. Dalam pengelolaan risiko, BMI menerapkan kebijakan internal berdasarkan asas GCG dan mengelola risiko dengan mekanisme yang sejalan dengan ketentuan regulator;
 3. Prinsip utama manajemen risiko Bank adalah kecukupan modal (*capital adequacy*), keterbukaan (*transparency*) dan independensi (*independency*) dalam proses manajemen risiko;
 4. Bank mengimplementasikan kerangka kerja manajemen risiko.
2. In managing risks, BMI implements internal policies based on GCG principles and manages risks with mechanisms that are in line with regulatory provisions;
 3. The main principles of the Bank's risk management are capital adequacy, transparency and independency within the process of risk management;
 4. The Bank Implement the risk management framework.



Manajemen risiko Bank diterapkan berlandaskan pada kerangka manajemen risiko di atas. Kerangka ini dibangun dengan mengedepankan nilai-nilai GCG dan *corporate value* serta penguatan *risk awareness* di seluruh unit kerja Bank.

The Bank implements risk management based on the above mentioned risk management framework. This framework is built by prioritizing GCG and corporate values, as well as risk awareness strengthening in all work units of the Bank.

Proses bisnis yang dijalankan Bank ditopang oleh adanya ketentuan yang mengatur setiap aktivitas, produk yang ditawarkan, proses yang dijalankan, serta penguatan sumber daya manusia. Pelaksanaan proses bisnis dilakukan dengan senantiasa memperhatikan 2 (dua) pilar manajemen risiko, yaitu:

The Bank's business processes are supported by provisions regulating each activity, offered products, processes, and strengthening human resources. The implementation of business processes is carried out by considering 2 (two) pillars of risk management, namely:



DUA PILAR MANAJEMEN RISIKO

Two Pillars of Risk Management

Pilar 1 Pillar 1	Pilar kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai sesuai dengan jenis risiko inheren yang dapat diidentifikasi, dalam bentuk tata kelola, infrastruktur, proses manajemen risiko, dan sistem pengendalian risiko.	The pillar of adequate quality of risk management implementation aligns with the type of inherent risks identified in governance, infrastructure, risk management processes, and risk control systems.
Pilar 2 Pillar 2	Pilar pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan atas proses bisnis yang dilakukan antara lain melalui: a. <i>Risk Oversight Committee</i> (ROC), <i>Audit Committee</i> , <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) <i>Committee</i> dan <i>Nomination & Remuneration Committee</i> di level Dewan Komisaris; b. <i>IT Steering Committee</i> (ITSC), <i>Asset and Liability Committee</i> (ALCO) dan <i>Human Capital Committee</i> , <i>Risk Management Committee</i> (RMC) di level Direksi; c. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan d. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).	The pillars of continuous monitoring and evaluation of business processes, which are carried out through: a. Risk Oversight Committee (ROC), Audit Committee, Good Corporate Governance (GCG) Committee, and Nomination & Remuneration Committee at the Board of Commissioners' level; b. IT Steering Committee (ITSC), Asset and Liability Committee (ALCO) and Human Capital Committee, as well as Risk Management Committee (RMC) at the Board of Directors' level; c. Sharia Supervisory Board (SSB) and d. Risk Management Working Unit (RMWU).

BMI senantiasa berupaya mencapai dan melaksanakan *corporate strategy* dan *risk objective*, baik jangka panjang, menengah, maupun pendek. Bank juga menjaga eksposur risiko sesuai *risk appetite* yang ditopang landasan dan pilar yang kuat.

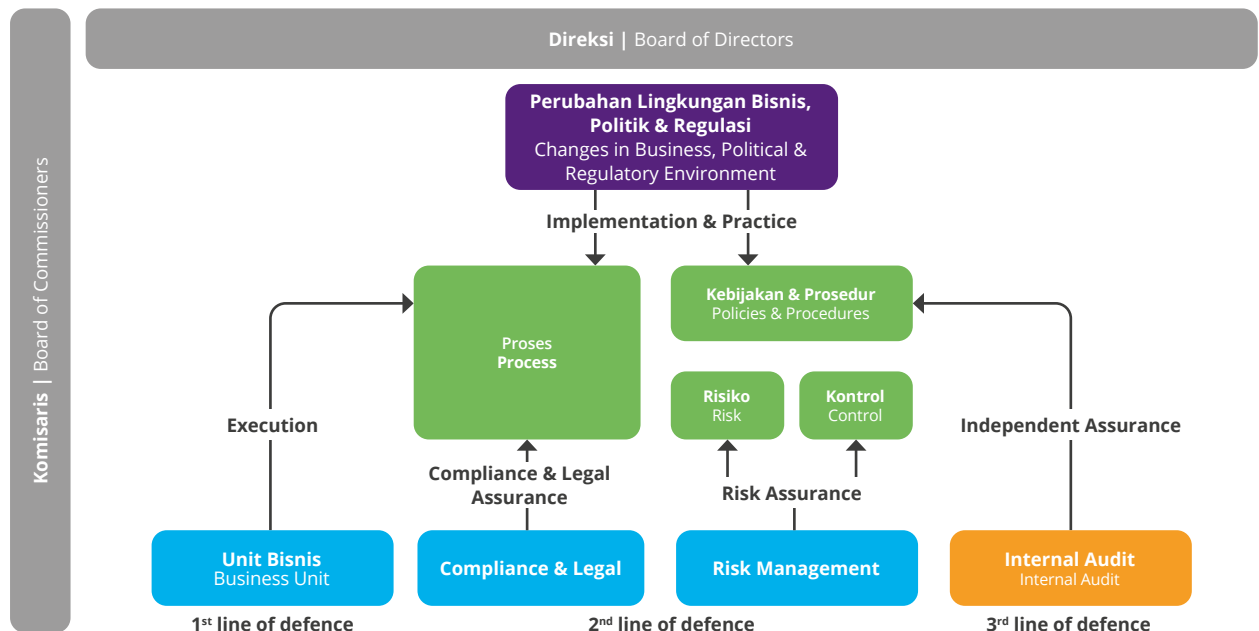
BMI always strives to achieve and implement corporate strategy and risk objectives, whether for the long, medium, or short term. The Bank also maintains risk exposure according to risk appetite, supported by strong foundations and pillars.

Dalam mengimplementasikan manajemen risiko di Bank, GRC diimplementasikan melalui konsep 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defence*) manajemen risiko. Pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Direksi dan diawasi oleh Dewan Komisaris.

In implementing risk management, the Bank implements GRC through the concept of 3 (three) lines of defence of risk management. Its implementation is the responsibility of the Board of Directors and is supervised by the Board of Commissioners.

TIGA LINI PERTAHANAN

Three Lines of Defence





Lini 1: Lini Pertahanan Pertama (*First Line of Defense*)

First line of defense atau lini pertahanan pertama terdiri dari unit bisnis dan unit kerja lainnya yang melaksanakan kegiatan bisnis dan operasional Bank secara langsung dan harian. Unit-unit kerja ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko pada setiap produk, proses, kegiatan, dan sistem yang dijalankan

Lini 2: Lini Pertahanan Kedua (*Second Line of Defense*)

Second line of defense atau lini pertahanan kedua terdiri dari SKMR, unit kepatuhan dan unit hukum. SKMR bertanggung jawab memastikan kecukupan kontrol atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis dan operasional Bank, yang dituangkan dalam ketentuan internal dan kerangka manajemen risiko. Unit kepatuhan dan hukum bertanggung jawab memastikan bahwa aspek kepatuhan dan hukum telah terpenuhi dalam produk dan proses yang dilakukan oleh Bank.

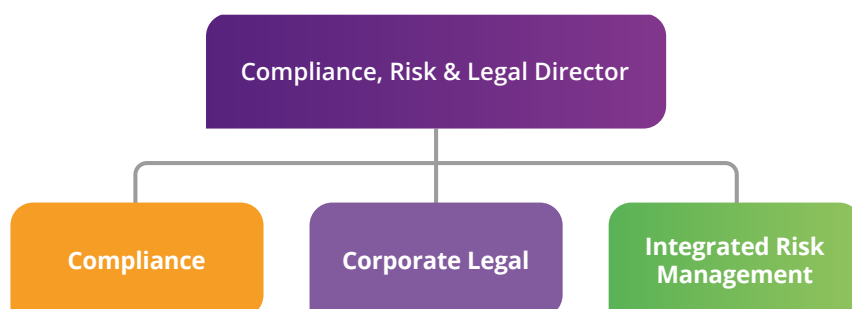
Lini 3: Lini Pertahanan Ketiga (*Third Line of Defense*)

Third line of defense atau lini pertahanan ketiga dilaksanakan fungsinya oleh unit audit internal sebagai unit independen yang memastikan bahwa lini pertahanan pertama dan kedua telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik.

ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Unit kerja manajemen risiko sebagai *second line of defense* berada di bawah Compliance, Risk & Legal Director. *Second line of defense* berfungsi untuk memastikan pelaksanaan tata kelola manajemen risiko, menyediakan dan memperbaharui kerangka manajemen risiko, memastikan terlaksananya proses manajemen risiko, sistem informasi dan sumber daya manusia serta pelaksanaan sistem pengendalian risiko.

Unit kerja manajemen risiko bersifat independen dari unit bisnis dan operasional Bank serta memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan proses penerapan manajemen risiko telah berjalan efektif di Bank. Struktur organisasi di bawah *Compliance, Risk & Legal Director* adalah sebagai berikut:



Line 1: First Line of Defence

The first line of defence consists of business and other working units that carry out the Bank's daily business and operational activities. These working units are responsible for identifying and managing risks in every product, process, activity, and running system.

Line 2: Second Line of Defence

The second line of defence consists of Risk Management Working Unit (RMWU), compliance, and legal units. SKMR ensures adequate control over risks inherent in the Bank's business and operational activities, as outlined in internal regulations and risk management framework. The compliance and legal unit are responsible for ensuring that compliance and legal aspects are fulfilled in products and processes carried out by the Bank.

Line 3: Third Line of Defence

The third line of defence is carried out by the internal audit unit as an independent unit, ensuring that the first and second lines of defence have properly implemented their functions and responsibilities.

RISK MANAGEMENT ORGANIZATION

The risk management working unit as the second line of defence is supervised by the Compliance, Risk & Legal Director. The second line of defence functions to ensure the implementation of risk management governance, provide and renew the risk management framework, ensure the implementation of risk management process, information and human capital systems as well as the implementation of the risk control system.

The risk management working unit is independent from the Bank's business and operational units and has the main responsibility to ensure that the risk management implementation process is working effectively in the Bank. The organizational structure under the Compliance, Risk & Legal Director is as follows:



FOKUS MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023

Fokus penerapan manajemen risiko yang dilakukan pada tahun 2023 sejalan dengan *bankwide strategy* tahun 2023, sebagai berikut:

1. **Business Refocusing**, dengan inisiatif prioritas sebagai berikut:
 - a. *First Core: Retail Individual*
 - b. *Second Core: Enterprise as Entry Gate*
 - c. *Low Cost Fund, Transaction & Fee Based Income*
 - d. *Islamic & Hajj Ecosystem*
 - e. *Collection & Recovery*
2. **Fixing the Fundamental**, dengan inisiatif prioritas sebagai berikut:
 - a. *People & Organization*
 - b. *IT & Digital Banking*
 - c. *Streamlined Business Process*
 - d. *Operational Efficiency*
3. **Strengthen Enablers**, dengan inisiatif prioritas sebagai berikut:
 - a. *Union Strategy Enterprise & Retail*
 - b. *Contribution Margin*
 - c. *Distribution Channel Strategy*
 - d. *Inorganic Strategy*
 - e. *BPKH Synergy*

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DPS

Direksi, Dewan Komisaris, komite yang dibentuk pada level Direksi dan Dewan Komisaris, serta DPS menjalankan peran aktif dalam memperkuat tata kelola manajemen risiko melalui rapat dan diskusi yang dilakukan berkala. Hal-hal yang dibahas dalam rapat adalah terkait dengan perkembangan kinerja Bank, termasuk pengelolaan risiko yang dihadapi Bank, perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.

Pada tingkat Direksi, terdapat komite yang mendukung pengawasan implementasi manajemen risiko, antara lain: *Risk Management Committee* (RMC), *IT Steering Committee* (ITSC), *Asset & Liability Committee* (ALCO), Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Bisnis dan *Human Capital Committee* yang melaksanakan rapat sesuai dengan piagam masing-masing komite.

Dewan Komisaris juga telah memiliki komite yang lengkap, yaitu: *Audit Committee*, *Risk Oversight Committee* (ROC), *Good Corporate Governance Committee* dan *Nomination & Remuneration Committee*.

Selama tahun 2023, terkait dengan manajemen risiko, pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan antara lain dalam bentuk pelaksanaan rapat ROC, RMC dan DPS:

RISK MANAGEMENT FOCUS IN 2023

The focus of risk management implementation in 2023 was in line with the bankwide strategy for 2023 as follows:

1. **Business Refocusing**, with the following priority initiatives:
 - a. *First Core: Retail Individual*
 - b. *Second Core: Enterprise as Entry Gate*
 - c. *Low Cost Fund, Transaction & Fee Based Income*
 - d. *Islamic & Hajj Ecosystem*
 - e. *Collection & Recovery*
2. **Fixing the Fundamentals**, with the following priority initiatives:
 - a. *People & Organization*
 - b. *IT & Digital Banking*
 - c. *Streamlined Business Process*
 - d. *Operational Efficiency*
3. **Strengthen Enablers**, with the following priority initiatives:
 - a. *Union Strategy Enterprise & Retail*
 - b. *Contribution Margin*
 - c. *Distribution Channel Strategy*
 - d. *Inorganic Strategy*
 - e. *BPKH Synergy*

ACTIVE SUPERVISION OF BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND SHARIA SUPERVISORY BOARD (SSB)

The Board of Directors, the Board of Commissioners, committees under the Board of Directors and Board of Commissioners, and SSB actively strengthen risk management governance through regular meetings and discussions. Topics of discussion in the meeting are related to the progress of the Bank's performance, including the Bank's risk management, the formulation of risk appetite, and risk tolerance.

The Board of Directors is assisted by several committees that support the monitoring of risk management implementation, such as *Risk Management Committee* (RMC), *IT Steering Committee* (ITSC), *Asset & Liability Committee* (ALCO), *Financing Policy Committee*, *Business Committee* and *Human Capital Committee*, which hold meetings according to each committee's charter.

The Board of Commissioners is assisted by several committees such as *Audit Committee*, *Risk Oversight Committee* (ROC), *GCG Committee*, and *Nomination & Remuneration Committee*.

During 2023, with regard to risk management, active supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors was performed, through ROC, RMC, and SSB meetings:



No.	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Pelaksanaan Pengawasan Aktif Implementation of Active Monitoring
A	Risk Oversight Committee	Risk Oversight Committee
1	Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen dan kesesuaian pelaksanaan kebijakan tersebut. Conduct evaluation of the risk management policies and strategies prepared by the Management and the suitability of the implementation of the policies.	Memberikan evaluasi dan persetujuan atas kebijakan dan strategi Bank. To evaluation and approval of Bank policies and strategies.
2	Melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko. Provide evaluation of the policies taken by the Board of Directors in order to comply with Bank Indonesia/Financial Services Authority regulations and other applicable laws and regulations in the context of implementing the prudent principle, especially related to risk management.	Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan umum manajemen risiko melalui rapat ROC, yang telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali di tahun 2023, dengan agenda, antara lain: a. Piagam ROC; b. Laporan profil risiko September 2022; c. <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) per Desember 2022; d. Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2023 dan realisasi RBB 2022; e. Informasi <i>pipeline</i> dan pembiayaan yang dicairkan sampai dengan Februari 2023; f. Kajian atas pemberian pemutus pembiayaan kepada <i>region/cabang</i>; g. Kebijakan Umum Pembiayaan; h. <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) per Juni 2023; i. Risiko konsentrasi dan kinerja pembiayaan 25 debitur inti; j. Analisis portofolio pembiayaan <i>good bank</i> (termasuk <i>pipeline</i>) dan <i>bad bank</i>; k. Kinerja portofolio pembiayaan sampai dengan Agustus 2023; l. Nasabah Enterprise Banking: <i>new to Bank</i> dan <i>pipeline</i> sampai dengan Desember 2023; m. Profil risiko Bank per September 2023; n. Pembahasan RBB 2024; o. Laporan penyampaian hasil rapat ALCO; p. Perkembangan realisasi dan rencana <i>dropping</i> pembiayaan Enterprise Banking; q. Perkembangan penyelesaian <i>bad bank</i> dan rencana sampai Desember 2023. To evaluate the implementation of general risk management policies through ROC meetings, which were held 7 (seven) times in 2023, with the following agenda: a. ROC Charter; b. September 2022 risk profile report; c. Risk Based Bank Rating (RBBR) as of December 2022; d. The Bank's 2023 Business Plan (BBP) and 2022 BBP realization; e. Pipeline information and financing disbursed as of February 2023; f. Review on financing approval limit to regions/branches; g. General Policy for Financing; h. Risk Based Bank Rating (RBBR) as of June 2023; i. Concentration risk and financing performance of 25 biggest customer; j. Good bank (including pipeline) and bad bank financing portfolio analysis; k. Financing portfolio performance as of August 2023; l. Enterprise Banking customers: new to Bank and pipeline until December 2023; m. The Bank's Risk profile as of September 2023; n. Discussion of 2024 BBP; o. Report of ALCO meeting result; p. Progress of Enterprise Banking financing realization and dropping plan; q. Progress on the settlement of bad banks and plans until December 2023.



No.	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Pelaksanaan Pengawasan Aktif Implementation of Active Monitoring
3	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko serta memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik. Provides recommendations to the Board of Commissioners in the effort to increase the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities in risk management and to ensure that risk management policies are executed properly.	Mengevaluasi implementasi manajemen risiko secara berkala yang dilakukan antara lain melalui: - Pembahasan RBB sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK); - Strategi manajemen risiko terkait <i>progress</i> penyelesaian pembiayaan bermasalah, penetapan <i>target market</i>, pemantauan risiko konsentrasi pembiayaan; - Analisis dan kinerja finansial dan non finansial. Evaluating the implementation of risk management periodically, among others through the following: - BBP discussion prior to submission to the Financial Services Authority (OJK); - Risk management strategies related to progress in resolving non-performing financing, determining target markets, monitoring financing concentration risks; - Analysis and financial and non-financial performance.
4	- Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan. - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap struktur organisasi manajemen risiko, pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko. - Melakukan evaluasi terhadap laporan profil risiko dan laporan Bank baik internal maupun eksternal agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Memastikan bahwa Unit Kerja Manajemen Risiko memenuhi kriteria independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. - Evaluate requests from the Board of Directors related to transactions or business activities that exceed the Directors' authority, in which evaluation can be used by the Board of Commissioners to make decisions. - Conduct monitoring and evaluation of the risk management organizational structure, implementation of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit. - Conduct evaluation of the risk profile and Bank reports both internally and externally to comply with the applicable regulations with applicable regulations. - Ensure that the Risk Management Work Unit meets the principle of independence in carrying out its duties and responsibilities.	Memberikan arahan dan masukan yang terkait dengan aktivitas Bank melalui rapat Dewan Komisaris-Direksi dan rapat ROC, yang terkait dengan, antara lain: - Penilaian atas laporan profil risiko dan tingkat kesehatan Bank; - Pencapaian target Bank; - Isu atas dan beberapa proyek inisiatif yang telah dilakukan; dan - Kajian atas pembiayaan dengan limit tertentu yang perlu dikoordinasikan kepada Dewan Komisaris baik melalui proses pelaporan maupun permintaan rekomendasi. Provide directives and advice related to the Bank's activities through the Board of Commissioners-Director and ROC meetings, in connection, with the following: - Evaluation of the Bank's risk profile and soundness rate; - The Bank's target achievement; - Issues and several implemented project initiatives; and - Review of financing with certain limits that needs to be coordinated with the Board of Commissioners either through a reporting process or request for recommendations.
B Risk Management Committee		Risk Management Committee
1	Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. Develop a comprehensive risk management policy and strategy.	Ketentuan dan strategi manajemen risiko telah dimiliki oleh Bank, diperbaharui secara berkala. The Bank has established risk management policy and strategy, that is updated on a regular basis.



No.	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Pelaksanaan Pengawasan Aktif Implementation of Active Monitoring
2	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan umum manajemen risiko Bank Muamalat dan eksposur risiko yang diambil secara keseluruhan. Responsible for the implementation of Bank Muamalat's risk management policies and overall risk exposure.	RMC telah melakukan hal-hal sebagai berikut : - Menetapkan strategi manajemen risiko, identifikasi risiko yang melekat pada produk dan aktivitas Bank, penetapan limit risiko, pemantauan risiko, kajian <i>stress test</i> dan risiko. - Menetapkan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> untuk risiko operasional; - Memastikan bahwa proses manajemen risiko yang dilakukan telah didokumentasikan dengan baik. - Melakukan pengujian beberapa ketentuan internal sesuai dengan hierarki ketentuan internal Bank, yaitu dalam bentuk Kebijakan, Prosedur, Manual Produk, SE Direksi, maupun Petunjuk Teknis. Rapat RMC dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali dengan agenda sebagai berikut: - Penilaian <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBRR) dan Profil Risiko; <i>Target Market Risk Acceptance Criteria</i> (TMRAC) segmen <i>State Owned Enterprise</i> (SOE), Corporate, dan Commercial; <i>Action plan</i> penyelesaian dokumen TBO dan ER – Plasma Sawit; - Komite Pembiayaan selama masa transisi; - Giro Wajib Minimum (GWM) insentif; - Usulan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> risiko operasional tahun 2023; - Hasil <i>testing email phishing</i>; - Risiko konsentrasi 50 deposan inti dan 25 debitur inti; - Hasil <i>assessment</i> penilaian risiko keamanan siber; - Usulan pengujian <i>key risk indicator</i> (KRI)/parameter profil risiko operasional; - Proyeksi pembiayaan Enterprise Banking dan rasio debitur inti posisi Desember 2023; - Kejadian risiko operasional – denda regulator; - Kinerja dan penilaian profil risiko Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat. The RMC has carried out the following: - Established risk management strategies, identified risks inherent in Bank Muamalat's products and services, determined risk limits, monitored risks, and conducted stress tests and risk studies. - Established the risk appetite and risk tolerance for operational risks. - Ensured that the risk management process has been documented properly. - Updated several internal provisions according to Bank Muamalat's internal regulatory hierarchy, which are in the form of Policies, Procedures, Product Manuals, Circular Letters of the Board of Directors, and Technical Instructions. RMC meetings were held 8 (eight) times with the following agenda: - Risk Based Bank Rating (RBRR) and risk profile evaluation; - Target Market Risk Acceptance Criteria (TMRAC) of State-Owned Enterprise (SOE), Corporate, and Commercial segments; - Action plan for completion of TBO and ER documents – Palm Plasma; - Finance Committee during the transition period; - Minimum Compulsory Reserve (GWM) incentives; - Risks appetite and tolerance proposal for operational risks in 2023; - Email phishing testing results; - Concentration risk of 50 major depositors and 25 major debtors; - Cyber security risk assessment results; - Proposed initiation of key risk indicators (KRI)/operational risk profile parameters; - Enterprise banking funding projection and major debtor ratio as of December 2023; - Operational risk incidents – regulatory fines; - Performance and risk profile assessment of the Muamalat Sharia Financial Institution Pension Fund (DPLK).



No.	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Pelaksanaan Pengawasan Aktif Implementation of Active Monitoring
3	Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat satu tingkat di bawah level Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi sesuai ketentuan internal yang berlaku. Evaluates and makes decisions on transactions that exceed the authority of officials whose positions are one below the Board of Directors or transactions that require the Board of Directors' approval, in accordance with applicable internal regulations.	Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi sesuai dengan limit kewenangan yang ditetapkan berjenjang dan dikaji secara berkala. Evaluates and makes decisions on transactions that require the Board of Directors' approval based on the limits of authority that are established in stages and reviewed periodically.
4	Meminta opini/rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan kegiatan transaksi/pembiayaan/ operasional atau aktivitas tertentu yang memerlukan opini/ rekomendasi dari Dewan Komisaris. Requests opinions/recommendations from the Board of Commissioners regarding several activities, such as transactions/ financing/operational or certain activities that require opinions/ recommendations from the Board of Commissioners.	Melakukan komunikasi dan atau diskusi dengan Dewan Komisaris terkait dengan aktivitas yang memerlukan opini/rekomendasi Dewan Komisaris. Hal ini dilakukan secara tertulis atau pun melalui rapat Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala. Communicates and/or holds discussions with the Board of Commissioners regarding activities that require the Board of Commissioners' opinions/recommendations. This is done in writing or through periodic meetings.
5	Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Establishes risk management culture at all levels of the organization.	Mengembangkan dan mendorong penerapan budaya risiko di seluruh level karyawan, dengan melaksanakan program <i>risk awareness</i> melalui video, <i>email blast</i>, dan pelatihan/ <i>training</i> terkait manajemen risiko. Develops and encourages the implementation of risk culture at all levels of the organization, by carrying out risk awareness programs through videos, e-mail blasts, and training related to risk management.
6	Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko. Ensures competency improvement of human resources related to risk management.	Memastikan dilaksanakannya program untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terkait manajemen risiko, antara lain: - Pelaksanaan <i>Muamalat Internal Certification</i> (MIC) dan program <i>refreshment</i> melalui MHP <i>desktop</i> dan MHP <i>mobile</i>. - Sosialisasi <i>operational risk awareness</i> secara langsung di cabang. Ensures the implementation of online programs to improve human resources' competencies related to risk management by: - Carrying out <i>Muamalat Internal Certification</i> (MIC) and refreshment programs through MHP desktop and MHP mobile. - Socialization of operational risk awareness at branch offices
7	Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen. Ensures that the risk management function operates independently.	Menetapkan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada lini pertahanan kedua berada di bawah supervisi Compliance, Risk & Legal Director yang terpisah dari unit kerja di lini pertahanan pertama dan lini pertahanan kedua. Establishes Risk Management Working Unit (RMWU) on the second line of defence, which is under supervision of the Compliance, Risk & Legal Director and separated from the work units on the first line of defence and the second line of defence.
8	Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: - Keakuratan metodologi penilaian risiko; - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; - Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. - Menetapkan kebijakan untuk menindaklanjuti temuan audit eksternal dan/atau internal; dan - Membentuk komite yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi pengelolaan risiko. Carry out periodic reviews to ensure: - The accuracy of the risk assessment methodology; - The adequacy of the implementation of risk management information systems; - The accuracy of policies, procedures and the determination of risk limits. - Establish policies to follow up on external and / or internal audit findings; and - Establish a committee responsible for implementing risk management strategies.	Secara berkelanjutan, mengembangkan seluruh perangkat manajemen risiko, baik terhadap ketersediaan ketentuan internal, <i>tools</i> proses manajemen risiko, aktivitas bisnis maupun operasional yang dijalankan oleh seluruh lini perusahaan. Continuously develops all risk management tools, whether they are regarding the availability of internal provisions, risk management process, and business and operational activities carried out by all levels of the Company.
9	Menyetujui perhitungan internal kecukupan modal sesuai dengan profil risiko (Internal Capital Adequacy Assessment Process/ICAAP). Approves internal calculation of capital adequacy according to the risk profile.	Memastikan pemenuhan kewajiban atas tingkat pengelolaan modal minimum Bank sesuai profil risikonya, serta penyampaian atas laporan ICAAP Bank kepada OJK telah sesuai dengan ketentuan. Ensure that the Bank's minimum capital management level is adequate in accordance with its risk profile, as well as the submission of the Bank's ICAAP report to OJK is in accordance with the provisions.



No.	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Pelaksanaan Pengawasan Aktif Implementation of Active Monitoring
C	Dewan Pengawas Syariah	The Sharia Supervisory Board
1	Melakukan evaluasi (<i>review</i>) atas kebijakan umum manajemen risiko Bank Muamalat yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Conducts an evaluation (<i>review</i>) of Bank Muamalat's general risk management policies that are related to compliance with sharia principles.	DPS telah memberikan masukan atas produk atau aktivitas yang membutuhkan opini syariah yang dilakukan baik secara tertulis maupun melalui rapat DPS yang dilaksanakan sebulan sekali, dengan agenda sebagai berikut: a. Permohonan opini atas produk dan aktivitas Bank; b. Laporan pengawasan DPS semester II 2022; c. Permohonan opini atas nasabah pailit; d. Laporan triwulan opini <i>sharia compliance</i>; e. Laporan uji petik semester I dan II 2023; f. <i>Update</i> terkait <i>sharing session Dirasah Islamiyah</i>; g. Laporan <i>income smooting</i>; h. Laporan konsultasi syariah triwulanan; i. Laporan Internal Audit. SSB has provided feedback on products or activities that require sharia opinion, both in writing and through SSB meetings held once a month, with the following agenda: a. Request for opinion on Bank products and activities; b. SSB Supervisory Report of second semester of 2022; c. Request for opinion bankrupt clients; d. Quarterly report on sharia compliance opinion; e. Trial test report of first and second semesters; f. Update related to Dirasah Islamiyah sharing session; g. Income smooting report; h. Quarterly report on sharia consultation; i. Internal Audit Report.
2	Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan pelaksanaan kebijakan umum manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Evaluates the Board of Directors' accountability for the implementation of general risk management policies that are related to compliance with sharia principles.	DPS mengevaluasi pelaksanaan kebijakan umum manajemen risiko yang terkait dengan prinsip syariah antara lain melalui rapat DPS yang dilakukan sebulan sekali, laporan berkala atas uji petik DPS serta memberikan saran perbaikan dan masukan kepada Direksi. DPS evaluates the implementation of general risk management policies that are related to sharia principles, which is carried out through DPS monthly meetings, periodic reports on DPS tests, and as well as suggestions for improvement and inputs to the Board of Directors.
3	Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan manajemen bisnis syariah mengenai hal-hal terkait dengan prinsip syariah. Provides advice and suggestions to the Board of Directors and sharia business management regarding matters related to sharia principles.	Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan manajemen bisnis syariah terkait prinsip syariah yang dijalankan oleh Bank yang disampaikan antara lain melalui rapat DPS. Provides advice and suggestions to the Board of Directors and sharia business management regarding sharia principles carried out by Bank Muamalat, which are conveyed, at DPS meetings.

KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO

Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang memadai, Bank telah memiliki struktur organisasi yang layak, antara lain melalui pembentukan unit kerja Internal Audit dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Bank memastikan bahwa kebijakan dan prosedur terkait manajemen risiko serta penetapan limit risiko telah memadai, sebagaimana penjelasan di bawah ini.

Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko di BMI berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penerapan manajemen risiko di internal Bank mengacu pada:

ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT POLICIES AND PROCEDURES AND RISK LIMIT SETTING

In order to support the implementation of adequate risk management and internal control, the Bank has an appropriate organizational structure, such as establishing an Internal Audit and Risk Management Work Unit (RMWU). The Bank ensures that policies and procedures related to risk management and risk limit setting are adequate, as explained below.

Risk Management Policies and Procedures

The implementation of risk management at BMI refers to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.65/POJK.03/2016, dated December 28, 2016, concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The implementation of risk management within the Bank refers to the following:

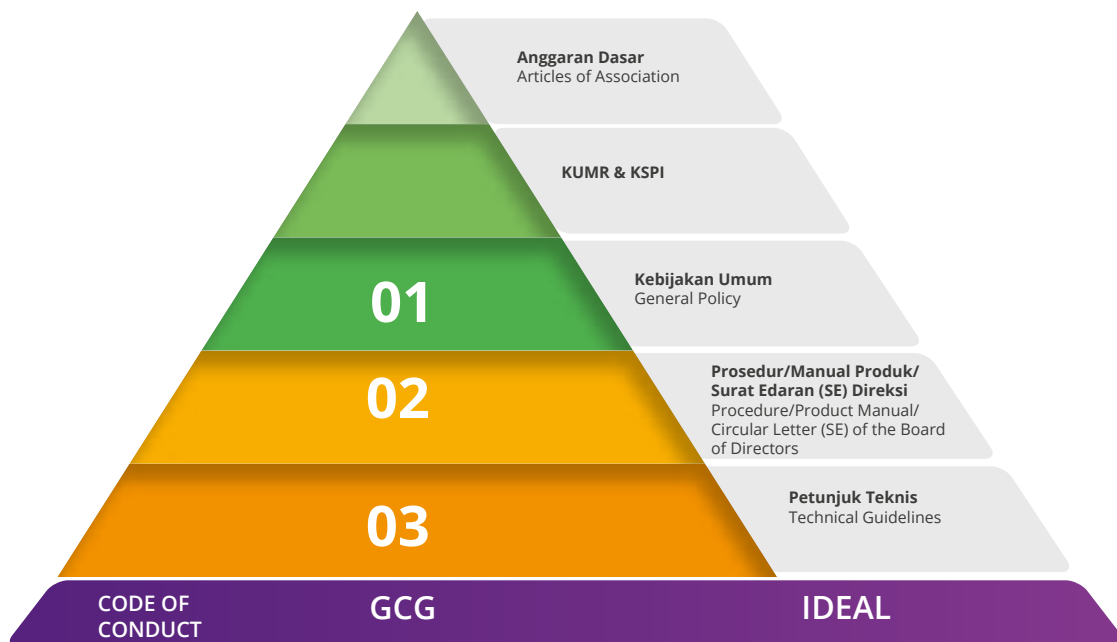


1. Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR), yang menjadi pilar dan acuan dasar dalam penyusunan seluruh ketentuan internal Bank;
2. Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Internal;
3. *Good Corporate Governance* (GCG);
4. *Code of Conduct* (Kode Etik);
5. Budaya Perusahaan, yaitu Islami, Modern dan Profesional (IDEAL).

Hierarki atas ketentuan terkait manajemen risiko di BMI mengikuti hierarki ketentuan internal yang berlaku di Bank, dengan urutan sebagai berikut:

1. General Risk Management Policy (GRMP), which is a pillar and basic reference in drafting all of the Bank's internal regulations;
2. General Policy of Internal Control System;
3. Good Corporate Governance (GCG);
4. Code of Conduct;
5. Corporate Culture, namely Islamic, Modern, and Professional (IDEAL).

The hierarchy of provisions related to risk management at BMI follows the hierarchy of internal regulations applicable at the Bank, in the following order:



1. Level 1 – Kebijakan Umum

Merupakan kebijakan tertinggi yang bersifat *high level*, strategis dan jangka panjang (tidak cepat berubah), serta berisikan filosofi dan prinsip-prinsip dasar yang berlaku secara menyeluruh (*bank wide*) dan menjadi landasan bagi ketentuan di bawahnya.

2. Level 2 – terdiri dari:

- a. **Prosedur** adalah ketentuan khusus dan alur proses dari awal hingga akhir (*end to end*) dari suatu aktivitas, kegiatan operasional, bisnis, maupun pengendalian sebagai bentuk penerapan kebijakan yang dijadikan acuan.
- b. **Manual Produk** adalah ketentuan yang mengatur fitur, syarat dan ketentuan atas suatu produk dan jasa.
- c. **Surat Edaran (SE) Direksi** merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan program bisnis atau ketentuan internal yang bersifat mendesak untuk diberlakukan dari sisi waktu maupun urgensinya, di mana belum ada Prosedur atau Manual Produk yang mengatur.

1. Level 1 – General Policy

It is the highest policy, which is high level, strategic, and long term (cannot be amended quickly), and contains basic philosophy and principles that apply to the Bank as a whole (bank wide) and form the basis for provisions under it.

2. Level 2 – consists of:

- a. **Procedure** is specific provisions and the process from from beginning to end (end to end) of an activity, operational activity, business, or control, as a form of implementation of the policy that is used as a reference.
- b. **Product Manual** is a provision that regulates features and terms and conditions of products or services.
- c. **Circular Letter (SE) of the Board of Directors** is the media used to deliver urgent business programs or internal provisions to be enforced immediately, since there are no specific Procedures or Product Manual.



3. Level 3 – Petunjuk Teknis

Merupakan ketentuan yang dapat disusun apabila diperlukan oleh unit pemilik ketentuan. Dalam petunjuk teknis dijelaskan secara teknis tata cara penggunaan suatu media, aplikasi, sistem dan atau *tools* lainnya untuk mempermudah unit unit kerja terkait melakukan suatu *proses* atau kegiatan atau penggunaan suatu *tools*. Ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis bersifat *risk-free*, artinya tidak diperkenankan mengandung risiko tambahan dari Ketentuan Internal yang telah diatur dalam Prosedur yang menjadi acuan.

Kebijakan dan Prosedur

BMI melakukan *review* efektivitas terhadap kebijakan dan prosedur secara berkala oleh pemilik ketentuan internal yang berkoordinasi dengan unit kerja terkait. Dalam pelaksanaannya, memperhatikan masukan dari hasil pemeriksaan unit internal audit dan auditor eksternal dalam rangka perbaikan proses dan prosedur internal.

Salah satu metode lainnya untuk melihat efektivitas atas kebijakan dan prosedur adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh *resident audit* yang secara berkala melakukan pemeriksaan secara sampling atas kantor cabang atau kantor cabang pembantu, maupun audit tematik di kantor pusat. Atas kebijakan dan prosedur yang dipandang tidak efektif dan atau tidak relevan lagi berdasarkan *review* berkala, dilakukan penyempurnaan lebih lanjut yang dilakukan oleh pemilik ketentuan.

3. Level 3 – Technical Instructions

It is a provision that can be compiled by the unit that owns the provision, if necessary. Technical instructions contain technical explanations of procedures for using a media, application, system, and/or other tools to make it easier for related work units to carry out a process or activity. The provisions regulated in Technical Instructions are risk-free, meaning that they are not allowed to carry additional risks from Internal Provisions that have been regulated in the Procedure that becomes the reference.

Policies and Procedures

BMI periodically reviews the effectiveness of policies and procedures of owners of internal policies in coordination with related work units. In its implementation, it takes into account the results from inspection outcome by the internal audit unit and external auditors in order to improve internal processes and procedures.

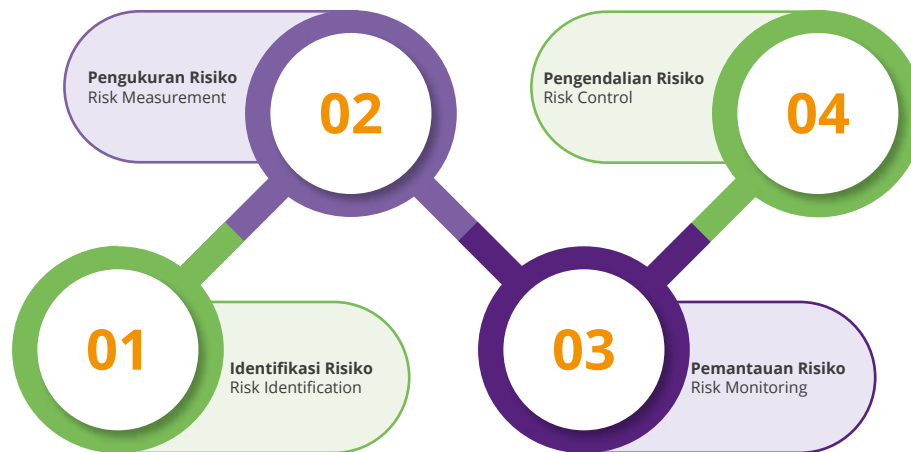
Another method to see the effectiveness of policies and procedures is by inspection carried out by a resident audit who periodically carries out sampling inspections at branch offices or sub-branch offices, as well as thematic audits at the head office. For policies and procedures that are deemed to be ineffective and/or no longer relevant based on periodic reviews, further improvements are made by the policy owner.



KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko yang melekat pada aktivitas perusahaan dengan maksud memberikan nilai tambah yang berkelanjutan secara maksimal terhadap keseluruhan aktivitas. Proses manajemen risiko BMI digambarkan sebagai berikut:



1. Identifikasi Risiko

Bertujuan untuk mengetahui seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap produk, aktivitas layanan dan aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank.

2. Pengukuran Risiko

Bertujuan untuk mengetahui besaran risiko yang melekat pada aktivitas Bank untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Bank sehingga Bank dapat mengambil tindakan mitigasi risiko, dan menentukan modal untuk meng-cover residual risiko.

3. Pemantauan Risiko

Dilakukan dengan membandingkan limit risiko dengan eksposur risiko yang dihadapi.

4. Pengendalian Risiko

Bentuk pelaksanaan mitigasi atas potensi risiko yang ada.

ADEQUACY OF RISK IDENTIFICATION, MEASUREMENT, MONITORING, AND CONTROL PROCESS, AS WELL AS RISK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

Risk Management Process

A good risk management process aims to manage inherent risks in the company's activities with the purpose of providing a maximum and sustainable added value to all activities. The BMI risk management process is described as follows:

1. Risk Identification

Finding out all types of risks inherent in each product, service, and functional activity that could create potential loss for the Bank.

2. Risk Measurement

Determining the amount of risk inherent in the Bank's activities and compare it with the Bank's risk appetite so the Bank can take risk mitigation measures and set up capital to cover residual risks.

3. Risk Monitoring

Comparing risk limits with current risk exposures.

4. Risk Control

A form of mitigation of potential risks.



Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, Bank mengembangkan sistem informasi manajemen risiko secara berkesinambungan sesuai dengan meningkatnya perkembangan dan kompleksitas bisnis Bank.

Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki oleh BMI, diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Laporan internal Bank;
2. Laporan Profil Risiko;
3. Laporan *Risk Based Bank Rating* (RBBR);
4. Laporan Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko;
5. Laporan Portofolio Pembiayaan secara *bankwide* dan per segmen bisnis;
6. Laporan Risiko Operasional;
7. *Liquidity Key Risk Indicator* (LKRI) untuk risiko likuiditas, dan laporan-laporan lainnya.

Laporan-laporan tersebut dapat dijadikan sebagai sumber yang mendukung untuk pengambilan keputusan oleh manajemen.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL YANG MENYELURUH

Implementasi sistem pengendalian internal dilakukan melekat pada masing-masing unit kerja yang merupakan lini pertahanan pertama manajemen risiko. Pelaksanaan sistem pengendalian internal didukung oleh ketentuan dan kerangka yang dikembangkan oleh fungsi lini pertahanan kedua manajemen risiko. Kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal dikaji ulang secara berkala oleh unit kerja audit internal yang merupakan lini pertahanan ketiga manajemen risiko.

Selama tahun 2023, peran dan efektivitas unit kerja audit internal untuk memberikan nilai tambah bagi proses bisnis dan operasional sebagai berikut :

1. Merencanakan audit berbasis risiko yang selaras dengan strategi, tujuan, dan fokus risiko Bank;
2. Menerapkan pendekatan *thematic audit* untuk mendorong peningkatan efektivitas terhadap identifikasi kebutuhan perbaikan pengelolaan risiko dan kontrol;
3. Melakukan diskusi dan pembahasan dalam rangka upaya perbaikan kecukupan dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian, berkoordinasi dengan SKMR dan Kepatuhan *Compliance* (CPL);
4. Pada tahun 2023, dilakukan penggabungan fungsi *Operation Control* (OPC) yang semula berada di bawah unit *Operation Strategy & Control* (OSR) menjadi di bawah fungsi internal audit. dengan bergabungnya fungsi OPC ke dalam fungsi internal audit dengan lokasi yang

Risk Management Information System

In order to support the process of identifying, measuring, monitoring, and controlling risks, the Bank continuously develops risk management information systems in line with the increasing development and complexity of the Bank's business.

The risk management information system owned by BMI is embodied in the following form:

1. Internal Bank reports;
2. Risk Profile Reports;
3. Risk Based Bank Rating (RBBR) Reports;
4. Minimum Capital Adequacy Reports according to Risk Profiles;
5. Financing Portfolio Reports at the bankwide level, and per business segment;
6. Operational Risk Reports;
7. Liquidity Key Risk Indicator (LKRI) for liquidity risk, and other reports.

These reports also serve as a source to support the management's decision-making process.

COMPREHENSIVE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The implementation of internal control system attached to each work unit is the first line of defense in risk management. The implementation of an internal control system is supported by provisions and a framework developed by the second line of defense in risk management. The adequacy and effectiveness of the internal control system are reviewed periodically by the internal audit work unit, which is the third line of defense in risk management.

Throughout 2023, the role and effectiveness of the internal audit working unit in providing added value to business processes and operations include:

1. Planning a risk-based audit that aligns with the Bank's strategy, objectives, and risk focus;
2. Carrying out a thematic audit approach to encourage better effectiveness in identifying the need for improvement in risk management and control;
3. Conduct discussions and studies as efforts to improve the adequacy and effectiveness of governance, risk management and control, coordination with SKMR and Conformity to Compliance (CPL);
4. In 2023, the Operation Control (OPC) function, previously under the Operation Strategy & Control (OSR) unit, was transferred to the internal audit function. This shift of the OPC function to the internal audit function, with locations spread across several branches throughout



tersebar di beberapa cabang di seluruh Indonesia, maka ruang lingkup audit tidak hanya dilakukan berdasarkan tematik audit (*systemic risk*) namun juga berdasarkan unit-based audit (*non-systemic risk*);

5. Secara umum *unit-based* audit dilakukan oleh tim Resident Audit (RA) dengan siklus pemeriksaan 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sekali atas setiap unit kerja cabang atau Kantor Cabang Pembantu (KCP) (*non-systemic risk*).

Indonesia, expanded the audit scope to include not only thematic audits (*systemic risk*) but also unit-based audits (*non-systemic risk*);

5. In general, unit-based audits are carried out by the Resident Audit (RA) team with an inspection cycle of 1 (one) or 2 (two) months for each branch work unit or Sub-Branch Office (KCP) (*non-systemic risk*).

PENERAPAN BUDAYA MANAJEMEN RISIKO

Internalisasi budaya manajemen risiko sangat penting bagi BMI. Berikut adalah rangkaian penerapan budaya manajemen risiko yang dijalankan oleh Bank.

1. Prinsip

Landasan inti yang kuat diperlukan dalam penerapan manajemen risiko yang efektif pada semua lini guna menanamkan prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai penting suatu risiko kepada seluruh sumber daya manusia yang dimiliki. Kesadaran pentingnya penerapan risiko diharapkan dapat menjadi panduan dalam menjalankan setiap aktivitas, baik terhadap risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko lainnya.

2. Sosialisasi

Pada tahun 2023, BMI telah menjalankan berbagai program dan inisiasi secara berkelanjutan, yang bertujuan untuk mengembangkan budaya risiko di lingkungan kerja, beberapa program dan insiatif yang dijalankan antara lain mencakup:

- a. Menyampaikan materi *awareness* melalui media video, *podcast* dan *e-mail blast* kepada seluruh karyawan;
- b. Pelaksanaan dan pemberdayaan *Operational Risk Champion* (ORION) untuk mendorong unit kerja melakukan proses identifikasi risiko yang melekat pada semua aktivitas unit kerja dan memastikan bahwa tindak lanjut perbaikan dilakukan;
- c. Penyampaian sosialisasi atas ketentuan yang berlaku untuk memastikan bahwa ketentuan dipahami oleh seluruh unit kerja terkait;
- d. Pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko yang dilakukan berdasarkan prioritas yang ditetapkan dan mengacu pada ketentuan regulator yang berlaku;
- e. Pelaksanaan *sharing session* terkait dengan manajemen risiko;
- f. Pelaksanaan *Muamalat Internal Certification* (MIC) dengan topik antara lain mengenai manajemen risiko;
- g. Penyampaian *anti-fraud campaign* melalui *email blast* dan sosialisasi.

THE IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT CULTURE

Internalization of risk management culture is very important for BMI. The following is a series of risk management culture implementation carried out by the Bank.

1. Principles

A strong core foundation is required in the implementation of effective risk management at all levels in order to instill the precautionary principles and important values of risk in all human resources. Awareness of the importance of risk implementation is expected to be a guidance in carrying out every activity, whether it is operational risk, compliance risk, and other risks.

2. Socialization

In 2023, BMI has continued to carry out various programs and initiatives aimed at developing risk culture in the work environment. Some of the programs and initiatives that are carried out include:

- a. Delivered awareness material through video, podcasts, and e-mail blasts to all employees;
- b. Implemented and empowerment of *Operational Risk Champion* (ORION) to encourage work units to carry out the risk identification process inherent in all activities of work units and ensure that follow-up actions for improvements are carried out;
- c. Socialization of applicable provisions to ensure that the provisions are understood by all relevant work units;
- d. Implemented of risk management certification, which is carried out based on the established priorities and refers to applicable provisions issued by regulators;
- e. Conducted sharing sessions related to risk management;
- f. Implemented of *Muamalat Internal Certification* (MIC) with topics related to risk management;
- g. Submission of anti-fraud campaign via email blasts and outreach.



3. Pengembangan

Pengembangan budaya risiko di Bank dilakukan dengan, antara lain:

- Pelaksanaan *risk forum* di unit kerja secara rutin untuk membahas *risk issue* yang muncul dan bentuk perbaikan yang telah dan akan dilakukan;
- Pengembangan *operational risk tools* seperti melakukan kajian pada *Key Risk Indicator* (KRI), *Risk & Control Self Assessment* (RCSA) dan parameter pengukuran risiko operasional;
- Penginian ketentuan internal terkait risiko kredit, risiko pasar dan kejadian risiko operasional;
- Pelaksanaan proses Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di bulan November 2023 dan dinyatakan berhak untuk mendapatkan Sertifikat ISO 37001:2016 SMAP;
- Implementasi *Fraud Detection System* (FDS) untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan menggunakan *tools* yang dikembangkan oleh internal Bank.

3. Development

The development of the Bank's risk culture is carried out through:

- Holding risk forums in work units on a regular basis to discuss emerging risk issues and improvements that have been and will be carried out;
- Developing operational risk tools such as conducting studies on Key Risk Indicators (KRI), Risk & Control Self Assessment (RCSA), and operational risk measurement parameters;
- Updating internal provisions related to events such as credit risk, market risk, and operational risk;
- Implemented the ISO 37001 Anti-Bribery Management System (SMAP) Certification process in November 2023 and therefore is entitled to obtain the ISO 37001:2016 SMAP Certificate;
- Implementation of a Fraud Detection System (FDS) to detect suspicious transactions using tools developed internally by the Bank.

EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Penerapan sistem manajemen risiko di BMI telah berjalan efektif. Dewan Komisaris dan Direksi dibantu oleh komite di bawahnya serta DPS telah menjalankan perannya secara aktif. Secara berkala, seluruh organ tersebut melaksanakan pertemuan untuk membahas dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Efektivitas sistem manajemen risiko di Bank dikaji berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko telah dimiliki oleh Bank. Kebijakan dan prosedur diatur dalam hierarki ketentuan internal Bank di atas. Limit risiko telah diimplementasikan oleh Bank antara lain dalam bentuk limit risiko kewenangan memutus pembiayaan, limit alokasi pembiayaan untuk meminimalkan terjadinya risiko konsentrasi pembiayaan, limit dealer untuk melakukan transaksi treasury, dan limit lain terkait operasional Bank;
- Perkembangan eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank dipantau secara berkala dan dilaporkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam bentuk laporan dan atau presentasi di rapat Direksi atau Dewan Komisaris, atau rapat komite level Direksi dan Dewan Komisaris;
- Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko telah dilakukan oleh unit-unit kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;

THE EFFECTIVENESS OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

The risk management system at BMI has been implemented effectively. The Board of Commissioners and the Board of Directors are assisted by several committees, and the DPS has actively carried out its roles. Periodically, these part or function hold meetings to discuss and provide recommendations to the Board of Commissioners and Directors. The effectiveness of the Bank's risk management system is assessed based on the following matters:

- The Bank has policies, procedures, and risk limit setting. The policies and procedures are regulated in the hierarchy of the Bank's internal provisions, as shown above. The Bank has applied risk limits, some of them in the form of risk limits on the authority for financing decisions, limits on financing allocation to minimize the risk of financing concentration, limits on dealers in treasury transactions, and other limits related to the Bank's operations;
- The development of risk exposure faced by the Bank is regularly monitored and reported to the Board of Directors or the Board of Commissioners in the form of reports and/or presentations at meetings of the Board of Directors or Board of Commissioners, or meetings by committees under the Board of Directors and Board of Commissioners;
- The processes of identifying, measuring, monitoring, and controlling risk have been carried out by work units, in line with their respective duties and responsibilities;



4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh telah dilaksanakan oleh unit Internal Audit dalam bentuk pelaksanaan audit berkala maupun audit tematik dan dilaksanakan juga dalam bentuk kajian independen yang dilakukan oleh SKMR atas produk, program, proses dan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja pemilik produk, proses, program dan aktivitas.

Evaluasi atas efektivitas manajemen risiko juga dilakukan melalui laporan berkala yang dikirimkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan DPS dalam Laporan Profil Risiko dan Laporan *Risk Based Bank Rating* (RBBR).

Risk Appetite

Penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance* dapat membantu Bank untuk mencapai target bisnis yang ingin dicapai. Dalam implementasinya, bisa dilakukan secara dua arah, yakni *bottom up* dan *top down*. *Risk appetite* dan *risk tolerance* Bank dituangkan dalam bentuk antara lain *target market*, *risk acceptance criteria* dan limit-limit risiko serta *threshold*.

Dalam menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance*, Bank mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis serta kemampuan dalam mengambil risiko (*risk bearing capacity*). Apabila terjadi perubahan atas kondisi Bank Muamalat dan atau kondisi eksternal, limit dapat disesuaikan lebih cepat sehingga selalu terbaru dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Stress Test

Stress test atas risiko kredit, likuiditas, pasar dan operasional dilakukan secara berkala oleh SKMR. *Stress test* dimaksud dilakukan untuk melihat kerentanan kondisi permodalan Bank terhadap kondisi *stress* yang mungkin dihadapi. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan *stress test* tahun buku 2023 antara lain:

1. *Stress test* atas risiko likuiditas dengan menggunakan asumsi adanya kebutuhan penyaluran pembiayaan, kemungkinan penarikan dana oleh nasabah dilihat dari *behaviour* maupun kontraknya.
2. *Stress test* atas risiko pasar antara lain dengan menggunakan asumsi perubahan nilai tukar tertentu terhadap Posisi Devisa Neto (PDN) Bank.
3. *Stress test* atas risiko kredit menggunakan asumsi:
 - a. Tambahan biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dibentuk berdasarkan tarif penyisihan penilaian kualitas aset (PPKA) berdasarkan kolektibilitas,
 - b. Kriteria sektor yang rentan dan berpotensi memburuk berdasarkan parameter rasio NPF sektor ekonomi berada di atas rasio NPF industri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan
 - c. Data Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sektor ekonomi lebih rendah dari data PDB nasional selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

4. A comprehensive internal control system has been carried out by the Internal Audit unit through periodic auditing or thematic auditing and also in the form of independent reviews conducted by SKMR on products, programs, processes, and activities of the work units that own the products, processes, programs, and activities.

The effectiveness of risk management is evaluated by submitting periodic reports to the Board of Commissioners, Directors, and DPS in Risk Profile Reports and Risk Based Bank Rating (RBBR) Reports.

Risk Appetite

Determining risk appetite and risk tolerance can help the Bank achieve its business targets. The implementation of risk appetite and risk tolerance can be done in two directions: bottom-up and top-down. The Bank's risk appetite and risk tolerance are conveyed in the form of, among others, target market, risk acceptance criteria, and risk limits and thresholds.

In determining risk appetite and risk tolerance, the Bank takes into account business strategies and objectives, as well as the ability to take risks (*risk-bearing capacity*). If there is a change in Bank Muamalat's conditions and/or external conditions, the limit can be adjusted swiftly so that it is always updated and in accordance with current conditions.

Stress Test

Stress tests on credit, liquidity, market, and operational risks are conducted regularly by SKMR. The stress test is carried out to see the vulnerability of Bank capital conditions to the stress conditions that the Bank may encounter. The assumptions used in calculating stress test for the 2023 financial year include:

1. Stress test on liquidity risk with an assumption that there is a need to distribute finance, a possibility of customers withdrawing funds from the Bank, which is seen from the behavior and contracts.
2. Stress tests on market risk, by using the assumption of changes in certain exchange rates on Bank Net Open Position (NOP).
3. Stress test for credit risks using assumptions as follows:
 - a. Additional costs for Allowance for Impairment Losses (AIL) are determined based on allowance rates in asset quality assessment (PPKA) based on collectability,
 - b. Criteria of a vulnerable and potentially deteriorating sectors based on the NPF ratio parameter of the economic sector are above the industry NPF ratio for 2 (two) consecutive years and
 - c. The economic sector's Gross Domestic Income (GDP) data is lower than the national GDP data for 2 (two) consecutive years.



4. *Stress test* risiko operasional dengan melakukan:
 - a. Tes *Business Continuity Plan* (BCP),
 - b. Simulasi tanggap darurat kebakaran (*fire drill*) di kantor pusat,
 - c. Diskusi unit kerja terkait tugas dan tanggung jawab masing-masing jika terjadi insiden keamanan siber,
 - d. Uji koordinasi *Incident Management Team* (IMT) menggunakan *call tree*,
 - e. Uji keamanan siber menggunakan skenario *cyber range exercise*.

Limit Risiko

Dalam menetapkan limit risiko, Bank menyesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi Bank secara keseluruhan. Hal tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, histori kerugian di masa lalu, kemampuan sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Limit tersebut dikomunikasikan dengan baik kepada setiap pihak yang terkait agar dapat dipahami secara bersama-sama. Penetapan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per risiko, dan limit per aktivitas bisnis Bank yang memiliki eksposur risiko.

Limit risiko yang ditetapkan oleh Direksi diimplementasikan sebagai bagian dari pemantauan dan pengendalian risiko Bank. Untuk memastikan bahwa limit risiko yang diterapkan masih sesuai dengan risk appetite Bank dan perubahan lingkungan bisnis, maka Bank memastikan dilakukannya proses kaji ulang atas limit risiko secara berkala, sesuai dengan prosedur Bank yang berlaku.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

BMI menerapkan sistem manajemen risiko untuk semua jenis risiko yang dihadapi Bank agar tingkat risikonya dapat dikelola dan diukur. Pada tahun 2023, Bank telah berupaya maksimal dalam memastikan kecukupan sistem manajemen risiko, antara lain melalui penerapan tata kelola manajemen risiko, hasil kajian, kerangka manajemen risiko, ketentuan internal, limit risiko yang dikaji secara berkala dan pelaksanaan pengendalian internal, yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.

4. *Stress test* operational risks by carrying out:
 - a. Business Continuity Plan (BCP) Test,
 - b. Fire emergency response simulation (fire drill) at the head office,
 - c. Discussion of work units regarding their duties and responsibilities if a cyber security incident occurs,
 - d. Test the coordination of the Incident Management Team (IMT) using a call tree,
 - e. Cyber security test using a cyber range exercise scenario.

Risk Limits

In setting risk limits, the Bank adjusts them to the level of risk to be taken, risk tolerance, and the Bank's overall strategy. This is carried out by taking into account the Bank's capital ability to absorb risk exposure or losses that arise, previous loss experience, human capital capabilities, and compliance with applicable internal and external regulations.

These limits are clearly communicated to each party involved so that it is mutually understood. Limits are set comprehensively for all aspects related to risk, which include overall limits, limits per risk, and limits per Bank business activity with risk exposure.

Risk limits set by the Board of Directors are implemented as part of the Bank's risk monitoring and control. To ensure that the risk limits applied are still in line with the Bank's risk appetite and changes in the business environment, the Bank ensures that a review process of risk limits is carried out periodically, in accordance with applicable Bank procedures.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR THE BOARD OF COMMISSIONERS OR THE AUDIT COMMITTEE ON THE ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

BMI implements a risk management system for all types of risks faced by the Bank so the level of risk can be managed and measured. In 2023, the Bank made maximum efforts to ensure the adequacy of the risk management system, such as through the implementation of risk management governance, review results, risk management framework, internal provisions, and risk limits that are reviewed periodically, as well as the implementation of internal controls, supported by well-developed infrastructure.



Penyampaian hasil pengelolaan manajemen risiko Bank kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS telah dilakukan melalui media yang tersedia secara konsisten dan tepat waktu sebagai sarana pengambilan keputusan.

Penerapan manajemen risiko di seluruh lini Bank dilaksanakan secara aktif dalam bentuk mengidentifikasi risiko inheren dan memastikan kecukupan kontrol telah dilakukan. Hal ini diperkuat dengan adanya budaya risiko yang secara berkelanjutan ditekankan, baik dalam aktivitas bisnis maupun operasional.

Dengan berbagai pertimbangan itu, Direksi, Dewan Komisaris, maupun DPS serta organ lain yang dalam organisasi manajemen risiko Bank, meyakini bahwa sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh BMI telah memadai. Kendati demikian, Bank akan terus mengevaluasi penerapannya seiring dengan perkembangan usaha Bank serta industri.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Sesuai Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan, struktur konglomerasi keuangan antara BMI sebagai entitas utama dengan PT Al-Ijarah Finance (ALIF) sebagai anggota konglomerasi tidak berlaku lagi mengingat struktur konglomerasi keuangan yang terjalih tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh OJK sebagai konglomerasi keuangan.

Penghapusan kewajiban Bank dalam struktur konglomerasi keuangan bersama dengan ALIF disampaikan melalui surat Bank kepada OJK dengan Nomor 175/B/CPD-SRT/XII/2020 terkait Pemberitahuan Pembubaran Konglomerasi Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Meskipun demikian, pemantauan perkembangan grup keuangan BMI tetap dilakukan melalui penyampaian tertulis melalui Laporan Data Grup Keuangan kepada OJK hingga periode Juni 2023.

BMI merealisasikan rencana perbaikan strategis atas ALIF, berupa pencabutan ijin usaha, sebagaimana arahan yang diberikan oleh OJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-20/D.06/2023 tanggal 24 Oktober 2023. Dengan dicabutnya ijin usaha ALIF ini maka BMI terhitung sejak Desember 2023 sudah tidak lagi menyampaikan laporan Data Grup Keuangan kepada OJK.

Results of the Bank's risk management are submitted to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and DPS through media that are available consistently and promptly as a means of decision-making.

The implementation of risk management across all of the Bank's business lines is actively carried out by identifying inherent risks and ensuring adequate controls have been applied. This is reinforced by a risk culture that is continuously emphasized, both in business and operational activities.

With these various considerations, the Board of Directors, the Board of Commissioners, DPS, and other organs within the Bank's risk management organization believe that BMI has implemented an adequate risk management system. Nevertheless, the Bank will continue to evaluate its implementation in line with the development of the Bank's business and industry.

THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED RISK MANAGEMENT

Based on OJK Regulation No. 45/POJK.03/2020 concerning Financial Conglomerates, the financial conglomerate structure between BMI as the main entity and PT Al-Ijarah Finance (ALIF) as a conglomerate member was declared disbanded because the Muamalat Financial Conglomerate no longer met the criteria of a Financial Conglomerate.

The elimination of the Bank's obligations in the financial conglomeration structure together with ALIF was conveyed through the Bank's letter to OJK No. 175/B/CPD-SRT/XII/2020 concerning with the Notification of Dissolution of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Financial Conglomerate. Nevertheless, monitoring of the development of the BMI financial group was still carried out through written submission via the Financial Group Data Report to OJK until the period of June 2023.

BMI realized a strategic improvement plan for ALIF, in the form of revoking its business permit, as directed by OJK through the Decree of the OJK Board of Commissioners No. KEP-20/D.06/2023 dated 24 October 2023. With the revocation of ALIF's business permit, as of December 2023 BMI no longer submits the Financial Group Data reports to OJK.



PENGELOLAAN RISIKO UTAMA BANK

Risiko Kredit

Pengungkapan Eksposur dan Penerapan Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank, terutama dari penyaluran pembiayaan. Bank juga menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antarbank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar serta kewajiban komitmen dan kontinjensi.

Kerangka Manajemen Risiko Kredit

1. Bank telah memiliki ketentuan pembiayaan, mulai dari level Kebijakan, Prosedur/Manual Produk dan Petunjuk Teknis terkait pembiayaan yang dikaji secara berkala.
2. Menetapkan organisasi terkait risiko kredit dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terkait dengan pembiayaan;
3. Limit kewenangan memutus pembiayaan ditetapkan dan dikaji secara berkala sesuai dengan perkembangan organisasi dan ditetapkan berjenjang sesuai segmen pembiayaan.
4. Ketentuan *Target Market* dan *Financing Allocation Limit* (FAL) serta *Target Market* dan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) sebagai panduan dalam melakukan pembiayaan telah diperbaharui secara berkala dan diimplementasikan, terutama untuk segmen pembiayaan produktif.
5. Ketentuan pembiayaan, terkait produk, program dan proses pembiayaan diperbaharui dan diimplementasikan, termasuk ketentuan RAC untuk segmen *Consumer*.
6. Mengimplementasikan BMPD internal sebagai *soft limit* untuk memastikan bahwa Bank mematuhi ketentuan mengenai BMPD yang berlaku.

Organisasi Manajemen Risiko Kredit

Dalam rangka mengelola aktivitas pembiayaan Bank untuk meminimalkan risiko kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan BMI telah memiliki organisasi manajemen risiko kredit sebagai berikut:

MANAGEMENT OF THE BANK'S MAJOR RISKS

Credit Risk

Exposure and Implementation of Credit Risk Management

Credit risk is the risk resulting from the default of a customer or other party to fulfill obligations to the Bank, in accordance with the agreement, including credit risk due to debtor default, credit concentration risk, counterparty credit risk, and settlement risk.

Credit risk arises from the Bank's various business activities, particularly financing. The Bank also deals with credit risk from various financial instruments, such as securities, acceptances, interbank transactions, trade financing transactions, exchange rate transactions, as well as commitments and contingencies.

Credit Risk Management Framework

1. The Bank has financing provisions, from the level of Policy, Procedures/Product Manual and Technical Instruction related to financing that are periodically reviewed;
2. Established the credit risk management organization with the duties and responsibilities of each respective party in connection with financing;
3. Limit of authority to decide on the financing is set and reviewed periodically in accordance with the development of the organization and determined in tiers according to financing segments.
4. The provision on the Target Market and Financing Allocation Limit (FAL) as well as the Target Market and Risk Acceptance Criteria (RAC) as guidelines for financing has been updated periodically and implemented, especially for productive financing segment.
5. The provisions on financing, related to product, program and financing process are updated and implemented, including the provision on RAC for the Consumer segment.
6. Implement internal LLL as soft limit to ensure that the Bank complies with applicable provisions on LLL.

Credit Risk Management Organization

In order to manage the Bank's financing activities to minimize credit risks, in accordance with banking prudential principles, BMI already has credit risk management organization as follows:



Organisasi Organization	Tanggung Jawab	Responsibilities
Dewan Komisaris The Board of Commissioners	1. Menyetujui rencana pembiayaan tahunan, termasuk pembiayaan kepada pihak terkait Bank dan pembiayaan kepada nasabah besar tertentu; 2. Mengawasi pelaksanaan rencana pembiayaan dan melakukan fungsi pengawasan terhadap Direksi terkait langkah perbaikan apabila pelaksanaan pembiayaan menyimpang dari rencana yang telah dibuat; 3. Melakukan kajian atas pembiayaan dengan limit tertentu yang perlu dikoordinasikan kepada Dewan Komisaris baik melalui proses pelaporan maupun permintaan rekomendasi; 4. Menjalankan fungsi pengawasan risiko kredit melalui ROC, <i>Audit Committee</i> dan GCG <i>Committee</i>.	1. Approve the annual financing plan, including financing to related parties of the Bank and financing to certain priority customers; 2. Monitor the implementation of the financing plan and carry out the oversight function of the Board of Directors regarding corrective measures if the financing plan deviate from the established plan; 3. Conduct review of financing with certain limit that requires coordination with the Board of Commissioners, both through the reporting as well as the request for recommendation processes; 4. Carry out the credit risk monitoring function through the ROC, Audit Committee, and GCG Committee.
Direksi The Board of Directors	1. Menyusun dan melaksanakan rencana pembiayaan yang dituangkan dalam rencana bisnis Bank serta memastikan pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana; 2. Memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait pembiayaan. Tanggung jawab ini juga dijalankan oleh Direksi melalui Risk Management Committee dan Komite Kebijakan Pembiayaan. 3. Memastikan bahwa keputusan pembiayaan dilakukan dengan berdasarkan pada <i>four-eye principle</i> sesuai limit kewenangan memutuskan pembiayaan yang ditetapkan berjenjang dan dilaksanakan oleh Komite Pembiayaan.	1. Formulate and carry out the financing plan outlined in the Bank's business plan and ensure the implementation is in line with the plan; 2. Ensure the Bank's compliance with applicable laws and regulations related to financing. This responsibility is also carried out by the Board of Directors through the Risk Management Committee and Financing Policy Committee; 3. Ensure that financing decisions are made based on the four-eye principle, according to the scope of authority to decide on financing that is set in stages and is carried out by the Financing Committee.
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	1. Memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam kebijakan pembiayaan Bank 2. Memberikan nasihat serta saran kepada Direksi agar sesuai dengan prinsip syariah.	1. Ensure the implementation of sharia principles in the Bank's financing policies; 2. Give advice and suggestions to the Board of Directors, in line with sharia principles.
Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) Financing Policy Committee (KKP)	1. Memberikan saran dan langkah perbaikan kepada Direksi mengenai hal terkait penerapan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan serta hasil pemantauan; 2. Evaluasi atas perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan dan kebenaran pelaksanaan kewenangan memutuskan pembiayaan.	1. Provide suggestions and corrective measures to the Board of Directors regarding the implementation of financing policies and monitoring results; 2. Evaluate the development and quality of financing portfolios and the regularity in exercising authority to make financing decisions.
Komite Bisnis Business Committee	1. Memberikan dukungan kepada Direksi dalam pengelolaan dan pengembangan produk/aktivitas/ layanan pembiayaan Bank, khususnya rekomendasi dan persetujuan terkait pengajuan produk pembiayaan baru maupun pengembangannya; 2. Memastikan pengembangan produk/aktivitas pembiayaan sesuai dengan strategi bisnis yang ditetapkan; 3. Melakukan pemantauan kinerja keberlangsungan suatu produk/aktivitas.	1. Provide support to the Board of Directors in managing and developing the Bank's financing products/activities/ services, specifically on recommendations and approvals related to the submission of new financing products and their development; 2. Ensure that financing product/activity development aligns with the set business strategies; 3. Monitor performance continuity of products/ activities.
Komite Pembiayaan Financing Committee	1. Memastikan bahwa pembiayaan diberikan berdasarkan analisis yang jujur, objektif dan seksama serta bebas dari benturan kepentingan; 2. Memastikan pembiayaan yang diberikan telah memenuhi norma umum perbankan dan telah sesuai dengan prinsip pembiayaan yang sehat.	1. Ensure that financing decision is made based on honest, objective, and thorough analysis, and free from conflict of interest; 2. Ensure that the provided financing fulfills general norms in the banking industry and is in accordance with sound financing principles.



Organisasi Organization	Tanggung Jawab	Responsibilities
<i>Asset and Liabilities Committee</i> Asset and Liabilities Committee	1. Melakukan <i>review</i> atas ketersediaan dana untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan; 2. Melakukan <i>review</i> dan mengusulkan margin/ujrah/bagi hasil/nisbah bagi hasil pembiayaan secara berkala.	1. Review the availability of funds to be disbursed in the form of financing; 2. Review and propose margin/ujrah/profit sharing/profit sharing ratios of financing periodically.
Unit Kerja terkait Pembiayaan Work Units related to Financing	1. Lini pertahanan pertama manajemen risiko kredit adalah unit bisnis terkait pembiayaan (termasuk unit kerja pengelola pembiayaan bermasalah), unit kerja risiko pembiayaan dan unit kerja operasional pembiayaan, yang langsung berhadapan dengan risiko dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kesadaran untuk meminimalkan risiko kredit. 2. Lini pertahanan kedua manajemen risiko kredit adalah SKMR, unit kepatuhan dan unit legal, yang bertanggung jawab melakukan pengembangan strategi manajemen risiko kredit, pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan dari kerangka pengelolaan risiko kredit dan memberikan masukan serta arahan kepada unit kerja terkait pembiayaan mengenai proses pengelolaan risiko kredit, pengukuran risiko kredit dan pelaporan pembiayaan pada sistem Bank 3. Lini pertahanan ketiga manajemen risiko kredit adalah unit internal audit yang bertanggung jawab melakukan <i>risk-based audit</i> yang memberikan <i>added value</i> kepada lini pertahanan pertama dan kedua, untuk memastikan bahwa seluruh elemen Bank telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik termasuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan manajemen BMI dan regulasi yang berlaku.	1. The first line of defense in credit risk management is business units related to financing (including the non-performing financing work unit), the financing risk work unit, and the financing operational work unit, which deal directly with risks and are responsible for increasing awareness to minimize credit risks; 2. The second line of defense in credit risk management is the SKMR, the compliance unit, and the legal unit, which are responsible for developing credit risk management strategies, maintaining and sustaining the credit risk management framework, and providing inputs and direction to work units related to financing regarding the credit risk management process, credit risk measurement, and financing reporting on the Bank's system. 3. The third line of defense in credit risk management is the internal audit unit, which is responsible for conducting risk-based audits that provide added value to the first and the second lines of defense, ensuring that all elements of the Bank have carried out their respective functions and responsibilities properly, as well as ensuring compliance with BMI's management policies and applicable regulations.

Strategi Manajemen Risiko Kredit

1. Menetapkan arah pembiayaan dengan target dan ukuran yang jelas, meliputi pembiayaan *good bank* dan *new bank* yang berkualitas, dengan target nasabah pembiayaan yang berisiko rendah;
2. Mengimplementasikan proses pembiayaan yang sehat secara *end to end* antara lain dengan menetapkan dan atau memperbaiki Risk Acceptance Criteria (RAC), melaksanakan proses inisiasi, analisis, pemutusan pembiayaan, pencairan pembiayaan dan pemantauan pembiayaan secara berkualitas;
3. Mengimplementasikan strategi untuk meminimalkan risiko konsentrasi pembiayaan dan fokus pada sektor industri yang baik;
4. Menjaga kualitas pembiayaan dan melakukan pengelolaan risiko konsentrasi pembiayaan, melalui pemantauan pembiayaan secara individual atau portfolio, melakukan penetapan limit pembiayaan antara lain atas sektor ekonomi tertentu, dan eksposur pembiayaan pada nasabah dan atau grup nasabah;
5. Mengimplementasikan *Global Account Management* (GAM) dalam pembiayaan dan melaksanakan pembiayaan yang terkoordinasi antar segmen pembiayaan, yang dilaksanakan dengan konsep Kebun.
6. Mempercepat penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menetapkan strategi penyelesaian, didukung oleh infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai;

Credit Risk Management Strategy

1. Establish financing direction with clear targets and measures, including financing for good banks and new banks of quality, by targeting low-risk financing customers;
2. Implement sound end-to-end financing process, among others, by determining and/or fixing the Risk Acceptance Criteria (RAC), carry out the processes of initiation, analysis, termination of financing, disbursement and quality monitoring of financing;
3. Implement a strategy to minimize financing risk concentration and focus on sound industrial sector;
4. Maintain the financing quality and manage the financing risk concentration, through monitoring individual or portfolio financing, set financing limits, among others, for certain economic sectors, and financing exposure for customers and/or groups of customers;
5. Implement Global Account Management (GAM) in financing and conduct a coordinated financing between financing segments, which is implemented with the Garden concept.
6. Accelerate the settlement of non-performing financing by implementing a formulated solution, supported by adequate infrastructure and human capital;



7. Melakukan inisiasi untuk mengembangkan sistem untuk otomatisasi atas proses pembiayaan sehingga dapat meminimalkan risiko operasional.

Kebijakan Pengelolaan Risiko Konsentrasi Pembiayaan

Bank melakukan pengelolaan risiko konsentrasi pembiayaan melalui penetapan limit antara lain atas sektor ekonomi tertentu dan eksposur pembiayaan pada nasabah dan atau group nasabah.

Beberapa data yang digunakan untuk pengelolaan risiko konsentrasi antara lain:

- a. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang merupakan persentase maksimum penyaluran dana yang ditetapkan terhadap modal Bank bagi penyaluran dana kepada pihak terkait atau modal inti (*tier 1*) Bank bagi penyaluran dana kepada selain pihak terkait. Untuk kehati-hatian, Bank mengimplementasikan juga limit BMPD internal yang diterapkan pada persentase tertentu dari limit BMPD yang ditetapkan oleh regulator.
- b. *Target Market* dan Financing Allocation Limit (FAL) yang merupakan batasan maksimum pembiayaan pada suatu sektor/sub sektor ekonomi tertentu dengan mempertimbangkan *risk appetite* Bank dan potensi serta risiko sektor/sub sektor ekonomi tersebut. *Tools* ini diimplementasikan oleh unit bisnis terkait pembiayaan dalam bentuk *target market* dan *risk acceptance criteria* (RAC) yang ditetapkan berdasarkan segmen pembiayaan atau sektor/sub sektor ekonomi tertentu.

Pengukuran Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Bank melakukan perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan mengacu pada POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dan juga SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum yang diubah dengan SE OJK No. 13/ SEOJK.03/2018 tentang Perubahan atas SE OJK No. 34/ SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah.

7. Initiate to develop a system to automate the financing process so as to minimize operational risks.

Financing Concentration Risk Management Policy

The Bank manages the risk of financing concentration by setting up limits on certain economic sectors and on financing exposure to customers and/or groups of customers.

Some of the data used for concentration risk management include:

- a. Legal Lending Limit (LLL), which is the maximum percentage of fund disbursement to the Bank's capital in distributing funds to related parties or the Bank's core capital (tier 1) for fund disbursement to other than related parties. As a precautionary measure, the Bank also implements internal LLL limit, which is applied to a certain percentage of the LLL limit set by the regulator.
- b. Target Market and Financing Allocation Limit (FAL), which are the maximum financing limits in a particular economic sector or sub-sector by considering the Bank's risk appetite and the potential and risks of that economic sector/sub-sector. These tools are implemented by business units related to financing in the form of target markets and risk acceptance criteria (RAC), which are determined based on financing segments or certain economic sectors/sub-sectors.

Measurement of Credit Risk with Standard Approach

The Bank calculates Risk Weighted Assets (RWA) for credit risk by referring to POJK No. 21/POJK.03/2014 concerning Minimum Capital Adequacy Requirements for Sharia Commercial Banks and also OJK Circular Letter (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2015 concerning Calculation of Risk-Weighted Assets for Credit Risk by Using a Standard Approach for Commercial Banks, which was later amended by SEOJK No. 13/SEOJK.03/2018 concerning Amendments to SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 concerning Calculation of Risk-Weighted Assets for Credit Risk by Using a Standard Approach for Sharia Commercial Banks.



Pengukuran risiko kredit dilakukan melalui:

Credit risk measurement is carried out through:

Parameter	Uraian	Description
Kebijakan Penggunaan Peringkat dalam Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit Policy on the Use of Ratings in the Calculation of RWA for Credit Risk	Sesuai dengan metodologi pengukuran risiko kredit pendekatan standar, perhitungan ATMR secara umum dilakukan berdasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat eksternal yang diakui oleh OJK.	According to the standard approach of credit risk measurement methodology, the RWA calculation is generally conducted based on ratings issued by external ratings agencies that are acknowledged by OJK.
Kategori Portofolio yang Menggunakan Peringkat Portfolio Categories based on Ratings	Berdasarkan pendekatan standar, perhitungan ATMR risiko kredit untuk beberapa kategori portofolio didasarkan pada peringkat eksternal dan sebagian lagi sudah ditentukan langsung bobot risikonya sesuai ketentuan OJK.	Based on the standard approach, the calculation of credit risk RWA for several portfolio categories is based on external ratings, while for other categories, the risk weight are directly determined in accordance with OJK provisions.
Lembaga Pemeringkat Ratings Agencies	Bank menggunakan peringkat terkini yang diterbitkan dari lembaga pemeringkat eksternal yang telah diakui oleh OJK berdasarkan SEOJK No.37/SEOJK.03/2016, tanggal 8 September 2016 perihal Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui OJK.	The Bank uses the latest ratings issued by external rating agencies that have been recognized by OJK, based on SEOJK No.37/SEOJK.03/2016 dated September 8, 2016 regarding Rating Agencies and Ratings recognized by OJK.
Risiko Kredit Pihak Lawan Counterparty Credit Risk	Kegiatan transaksi Bank yang meliputi pertukaran mata uang asing, <i>repo</i> dan <i>reverse repo</i> dapat membuat Bank terekspos risiko kredit pihak lawan. Limit kredit pihak lawan ditetapkan untuk setiap pihak lawan berdasarkan penilaian atas kapasitas pihak lawan dan BMPD sesuai dengan kebijakan internal Bank. Perhitungan risiko kredit dalam rangka perhitungan kecukupan modal untuk eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan dilakukan menggunakan pendekatan standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku	The Bank's transaction activities, which include foreign currency exchange, repo, and reverse repo, can expose the Bank to counterparty credit risk. The counterparty credit limit is set for each counterparty based on an assessment of the capacity of each counterparty and LLL, in accordance with the Bank's internal policy. Calculation of credit risk, in terms of calculating capital adequacy for exposures that could create credit risk due to counterparty failure, is carried out by using a standard approach in accordance with applicable regulations.

Pengendalian Risiko Kredit

Pengendalian risiko kredit dilakukan antara lain melalui:

1. Penguatan sistem pengendalian internal, dilakukan antara lain dalam bentuk pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala dan melaksanakan budaya pengendalian risiko yang melibatkan seluruh unit kerja terkait pembiayaan, dan pemeriksaan internal secara berkala dilakukan oleh unit internal audit yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait;
2. Menetapkan mitigasi risiko, termasuk penetapan agunan dengan bentuk dan rasio yang dapat diterima Bank;
3. Melakukan penutupan asuransi atas agunan, pembiayaan dan atau jiwa nasabah untuk menutup risiko kredit yang mungkin terjadi.
4. Melakukan pembiayaan secara sindikasi dengan bank lain untuk menurunkan potensi risiko kredit pada suatu pembiayaan.
5. Memastikan bahwa ketentuan internal terkait dengan pembiayaan selalu terbaru dan sesuai dengan dinamika perusahaan.

Credit Risk Control

Credit risk control is conducted through the following:

1. Strengthening the internal control system, carried out, among others in the form of supervision by the Board of Commissioners and Directors periodically and implementing a risk control culture involving all work units related to financing, and regular internal audits carried out by the internal audit unit and followed up by the relevant work units;
2. Determining risk mitigation, including determining the collateral in the form and ratio acceptable to the Bank;
3. Buying insurance coverage for the collateral, financing and/or the customer's life to cover credit risks that may occur;
4. Establishing a syndication with other banks to reduce potential credit risk in financing;
5. Making sure that internal provisions related to financing are always updated and in accordance with company dynamics.



Definisi Tagihan Jatuh Tempo dan Tagihan Mengalami Penurunan Nilai

Bank mendefinisikan tagihan yang telah jatuh tempo sebagaimana diatur pada SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah yang diubah dengan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan atas SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah, yakni tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bagi hasil atau margin atau *ujrah*.

Pendekatan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Individual dan Kolektif

Perhitungan CKPN yang dilakukan oleh Bank hanya untuk eksposur dengan akad murabahah saja, sesuai dengan penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) sementara PSAK Syariah tidak mengatur secara detail. Perhitungan CKPN dilakukan dalam 2 (dua) pendekatan, yaitu:

1. CKPN Individual dihitung berdasarkan jumlah ekspektasi arus kas yang diterima di masa akan datang, dikurangi jumlah tercatat.
2. CKPN Kolektif dihitung dengan mempertimbangkan *Probability of Default* dan *Loss Given Default* dengan menggunakan data historis 3 (tiga) tahun terakhir.

Metode Statistik dalam Perhitungan CKPN

Penggunaan metode statistik dalam perhitungan CKPN sebagaimana dijelaskan pada butir sebelumnya hanya diperuntukkan pada perhitungan CKPN Kolektif. Metode statistik yang digunakan oleh Bank adalah:

1. *Probability of Default*, yakni tingkat kemungkinan kegagalan nasabah memenuhi kewajiban, yang diukur menggunakan metode *Migration* untuk segmen *Enterprise* dan SME, sedangkan untuk segmen *Consumer* menggunakan metode *Net Flow Rate*.
2. *Loss Given Default*, yaitu tingkat kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan nasabah memenuhi kewajibannya. Perhitungan dilakukan menggunakan metode *Collateral Short Fall*.

Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Mengacu pada Peraturan OJK terkait perhitungan ATMR untuk risiko kredit yang disebutkan sebelumnya, Bank juga mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit sebagai teknik mitigasi risiko kredit (MRK). Bank menggunakan Teknik MRK-Agunan dengan pendekatan sederhana untuk sebagian besar portofolionya, di mana jenis agunan keuangan yang diakui dalam Teknik MRK Agunan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Definition of Accounts Due and Impaired Bills

The Bank's definition of maturing receivables is stipulated in SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 concerning the Calculation of Risk-Weighted Assets for Credit Risk Using a Standard Approach for Sharia Commercial Banks, which is amended by SEOJK No. 13/SEOJK.03/2018 concerning Amendments to SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 concerning Calculation of Risk-Weighted Assets for Credit Risk Using the Standard Approach for Sharia Commercial Banks. Maturing receivables are bills that are overdue for more than 90 (ninety) days, both in principal payments and/or profit-sharing payments or margin or *ujrah*.

Approach to Establishing Allowance for Impairment Losses (AIL), for Bank Only and Consolidated

The Bank calculates AIL only for exposures under murabahah contracts, in accordance with the adoption of Accounting Standard (PSAK) 50/55 (2006 Revision). Meanwhile, Sharia PSAK does not have detailed provisions. The AIL calculation is performed in 2 (two) approaches, namely:

1. Allowance for Impairment Losses (AIL) – Bank Only, which is calculated based on expected amount of cash flows received in the future, less the carrying amount.
2. AIL – Consolidated, which is calculated by considering the Probability of Default and Loss Given Default using historical data for the last 3 (three) years.

Statistical Methods in AIL Calculation

The use of statistical methods in calculating AIL, as explained in the previous point, is only intended for calculating consolidated AIL. The statistical methods used by the Bank are:

1. Probability of Default, which is the level of probability of customers' failure to fulfill their liabilities. It is measured by using Migration method for wholesale and SME segments and Net Flow Rate method for Consumer segment.
2. Loss Given Default, which is the level of loss caused by the customers' failure to fulfill their liabilities. The calculation is performed by using the Collateral Short Fall method.

Disclosure of Credit Risk Mitigation by Using Standard Approach

Referring to the POJK regarding the RWA calculation for credit risk, as mentioned above, the Bank also recognizes the existence of collateral, guarantees, or credit insurance as credit risk mitigation techniques (MRK). The Bank uses the MRK-Collateral Technique with a simple approach for most of its portfolios, in which the types of financial collateral recognized in the MRK-Collateral Technique refer to applicable provisions.



Meskipun tidak diikutsertakan dalam perhitungan MRK, Bank juga menerima jenis agunan lainnya seperti tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, mesin dan agunan/jaminan lainnya yang telah diatur dalam kebijakan Bank.

Dalam ketentuan internal, juga diatur mengenai kecukupan agunan yang harus dipenuhi oleh nasabah, pihak yang melaksanakan penilaian dan pemeriksaan agunan, aturan dan prosedur penilaian baik internal maupun eksternal, serta frekuensi penilaian berdasarkan jenis agunan.

Pengungkapan Sekuritisasi Aset

Penjelasan mengenai sekuritisasi aset dijelaskan lebih lanjut pada tabel eksposur risiko.

Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit

Proses manajemen risiko pada aktivitas pembiayaan Bank telah diterapkan secara berkala dan berkelanjutan, yang pada perkembangannya memberikan informasi-informasi yang signifikan bagi Bank dalam perbaikan bisnis ke depannya.

Adapun beberapa hasil dari proses manajemen risiko kredit yang dijalankan oleh Bank dilaporkan melalui beberapa laporan berkala baik internal maupun eksternal, seperti:

1. Laporan *Watchlist* atas pembiayaan,
2. Laporan utilisasi Batas Minimum Penyaluran Dana (BMPD) termasuk BMPD internal yang disampaikan kepada unit kerja dan manajemen,
3. Laporan Portfolio Pembiayaan,
4. Laporan *Stress Test* Pembiayaan,
5. Laporan Konsentrasi Pembiayaan (25 Debitur Inti),
6. Laporan kinerja dan utilisasi *Target Market & Financing Allocation Limit*,
7. Laporan Nasabah Restrukturisasi COVID19,
8. Laporan *Uniform Classification System* (Penyeragaman Kolektibilitas dengan Bank lain).

Risiko Pasar

Pengungkapan Eksposur dan Penerapan Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Sebagai bank devisa, BMI memiliki portfolio valuta asing di mana nilai dari aset dan kewajiban tersebut selalu terkait dengan perubahan nilai tukar valuta asing terhadap rupiah.

Selain itu, Bank juga menghadapi risiko pasar terkait dengan portfolio surat-surat berharga jenis *trading* yang dimiliki. Dampak terhadap kegiatan usaha Bank akibat perubahan nilai tukar valuta asing terhadap rupiah dan perubahan

Even though they are excluded from the Credit Risk Mitigation (MRK) calculation, the Bank also accepts other types of collateral, such as land and buildings, vehicles, machinery, and other collaterals stipulated in the Bank's policy.

The Bank's internal provisions also regulate the adequacy of collateral that must be fulfilled by customers, the parties who perform assessment and inspection of the collateral, internal and external valuation procedures, as well as the frequency of valuation based on the type of collateral.

Disclosure of Asset Securitization

Details on asset securitization are further explained in the risk exposure table.

Credit Risk Management Information System

The risk management process in the Bank's financing activities has been implemented periodically and continuously, which in its development provides significant information for the Bank to improve its business in the future.

Several results from the credit risk management process carried out by the Bank are reported through several periodic reports, both internal and external, such as the following:

1. Watchlist Report on financing,
2. Report on the utilization of the Legal Lending Limit (LLL) including internal LLL disbursed to work units and management,
3. Financing Portfolio Report,
4. Financing Stress Test Report,
5. Financing Concentration Report (25 main Debtors),
6. Performance and utilization on Target Market & Financing Allocation Limit
7. COVID 19 Restructuring Customer Report
8. Uniform Classification System Report (Uniformity in Collectability with other Banks).

Market Risk

Disclosure of Market Risk Exposure and Implementaion of Market Risk Management

Market risk is the risk on the balance sheet and administrative account positions due to changes in market prices, including risks triggered by changes in the value of assets that can be traded or leased. As a foreign exchange bank, BMI has foreign currency portfolios where the value of these assets and liabilities is always related to the movement of foreign currency exchange rates against the rupiah.

In addition, the Bank also deals with market risk related to its tradable securities portfolios. The impact on the Bank's business activities due to the movement of the foreign currency exchange rate against the rupiah and changes in the



harga surat-surat berharga akibat adanya perubahan imbal hasil di pasar dapat berdampak pada kinerja Bank baik dalam hal tingkat profitabilitas atau kecukupan permodalan yang dimiliki oleh Bank.

Kerangka Manajemen Risiko Pasar

Kerangka manajemen risiko pasar yang telah dimiliki oleh Bank, antara lain :

1. Ketentuan terkait risiko pasar, mulai dari level kebijakan, prosedur dan petunjuk teknis. Secara berkelanjutan, Bank telah melakukan pembaharuan atas ketentuan internal risiko pasar;
2. Menetapkan organisasi terkait risiko pasar dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang berkepentingan;
3. Mengimplementasikan limit *dealer* yang ditetapkan secara berjenjang dan melakukan proses pemantauan serta pengukuran risiko pasar, termasuk penggunaan atas limit kewenangan *dealer* beserta dengan tingkat limit *cut loss* per masing-masing *dealer*;
4. Implementasi rasio Posisi Devisa Neto (PDN) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) secara internal sebagai *soft limit* untuk memastikan rasio PDN dan PLN sesuai dengan ketentuan regulator.

Organisasi Manajemen Risiko Pasar

Organisasi manajemen risiko pasar untuk memastikan bahwa DPS, Dewan Komisaris dan Direksi beserta komite di bawahnya melaksanakan fungsinya dengan baik. Termasuk dalam organisasi manajemen risiko adalah dibentuknya unit kerja terkait dengan risiko pasar yang terdiri dari tiga lini pertahanan manajemen risiko dengan fungsinya masing-masing.

Untuk meminimalkan risiko pasar sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan, Bank telah memiliki organisasi manajemen risiko pasar yang mencakup:

price of securities following yield movement in the market can affect the Bank's performance, both in profitability and the Bank's capital adequacy.

Market Risk Management Framework

The Bank's market risk management framework, covers the following:

1. Provisions related to market risk, starting from policy, procedure and technical instruction levels. The Bank has continually updated its internal market risk provisions;
2. Establish an organization related to market risk with the respective duties and responsibilities of each interested party;
3. Implement Dealer Concentration Limit and carry out the process of monitoring and measuring market risks, including the use of dealer authority limits along with cut loss limit levels for each dealer;
4. Implementation of Net Open Position (NOP) and Foreign Loan (FL) ratios internally as soft limits to ensure NPO and FL ratios are in accordance to the regulatory provisions.

Market Risk Management Organization

The organization of market risk management ensures that the DPS, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and their committees carry out their functions properly. The organization of risk management includes the formation of work units related to market risks, which consist of three lines of defense in risk management with their respective functions.

To minimize market risk based on prudential principles in the banking sector, the Bank has market risk management organizations that include:

Organisasi Organization	Tanggung Jawab	Responsibilities
Dewan Komisaris The Board of Commissioners	Menjalankan fungsi pengawasan risiko pasar melalui ROC, <i>Audit Committee</i> dan GCG <i>Committee</i> .	Perform market risk monitoring through ROC, Audit Committee, and GCG Committee.
Dewan Pengawas Syariah (DPS) Sharia Supervisory Board (SSB)	Memastikan pengawasan atas aktivitas transaksi bisnis Bank, khususnya produk-produk treasury agar tetap terjaga sesuai dengan aspek syariah.	To ensure sure that the supervision of the Bank's business transaction activities, specifically on treasury products, to be maintained in accordance with sharia aspect.
Direksi dengan tanggung jawab yang sama dilaksanakan juga melalui ALCO yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan strategi terkait risiko pasar The Board of Directors with same responsibilities are carried out through ALCO, which is responsible for establishing policies and strategies related to market risk	1. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko pasar sesuai tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis dan profil risiko pasar 2. Memastikan adanya integrasi penerapan manajemen risiko pasar dengan risiko lainnya yang dapat berdampak bagi Bank.	1. Ensure that the market risk management function is in line with the strategic objectives, scale, business characteristics, and market risk profile; 2. Ensure the integration of market risk management implementation with other risks that may affect the Bank.



Organisasi Organization	Tanggung Jawab	Responsibilities
Unit kerja terkait risiko pasar, terdiri dari unit kerja yang berdasarkan tiga lini pertahanan manajemen risiko Work units related to market risks, which consist of work units based on three lines of defense in risk management	1. Lini pertahanan pertama manajemen risiko pasar adalah unit treasury yang bertanggung jawab mengelola transaksi terkait risiko pasar dan memelihara Posisi Devisa Netto (PDN) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) terjaga pada level yang aman bagi Bank. 2. Lini pertahanan kedua manajemen risiko pasar adalah SKMR yang mendukung ALCO dalam pemantauan dan pengukuran risiko pasar, serta unit kepatuhan yang memastikan kepatuhan Bank atas rasio pasar yang harus dijaga. 3. Lini pertahanan ketiga manajemen risiko pasar adalah unit internal audit yang bertanggung jawab melakukan <i>risk-based audit</i> yang memberikan <i>added value</i> kepada lini pertahanan pertama dan kedua, untuk memastikan bahwa seluruh elemen Bank telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik termasuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan manajemen Bank dan regulasi yang berlaku.	1. The first line of defense in market risk management is the treasury unit, which is responsible for managing transactions related to market risks and maintaining the Net Open Position (NOP) and Foreign Loan (PLN) at a safe level for the Bank. 2. The second line of defense in market risk management is SKMR, which supports ALCO in monitoring and measuring market risks, as well as the compliance unit, which ensures the Bank's compliance with market ratios that must be maintained. 3. The third line of defense in market risk management is the internal audit unit, which is responsible for conducting risk-based audits that provide added value to the first and second line of defense and ensure that all elements of the Bank have carried out their functions and responsibilities properly, including ensuring compliance with the Bank's management policies and applicable regulations.

Strategi Manajemen Risiko Pasar

1. Menjaga tingkat PDN pada level maksimal 5% atau lebih rendah daripada yang ditetapkan regulator;
2. Memantau penggunaan limit *dealer* untuk transaksi *foreign exchange*, *money market*, dan *fixed income*, baik terhadap limit utilisasi maupun kerugian;
3. Memantau rasio PLN Bank agar tidak melanggar ketentuan regulator;
4. Mengupayakan dan mengelola fasilitas pinjaman antar Bank melalui transaksi di pasar uang, baik melalui akad SIPA maupun SIMA;
5. Mengelola ketersediaan aset treasury Bank terjaga secara optimal, baik dalam hal likuiditas transaksi maupun valuasinya di pasar, yang ditunjukkan oleh analisis komprehensif atas rencana pemanfaatannya di masa depan.

Market Risk Management Strategy

1. Maintain the PDN level at maximum 5% or lower than stipulated by regulator;
2. Monitor the use of dealer limits for foreign exchange, money market and fixed income transactions, both in respect of utilization and loss limits;
3. Monitor the Bank's PLN ratio so as to not violate regulatory provisions;
4. Strive and manage inter-bank loan facilities through money market transactions, both SIPA and SIMA contracts;
5. reword to Maintain optimally the availability of the Bank's treasury assets, both in terms of transaction liquidity and market valuation, as shown in the comprehensive analysis of future utilization plans.

Pengelolaan Portofolio Trading Book dan Banking Book Serta Metodologi Evaluasi

Risiko pasar *trading book* adalah risiko yang muncul dari potensi kerugian akibat aktivitas *trading book*, antara lain perubahan suku bunga dan nilai tukar. Pengelolaan risiko pasar Bank dilakukan dengan menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu memisahkan fungsi dan tanggung jawab secara independen atas transaksi treasury, yang terdiri dari:

- a. *Front office*: unit treasury sebagai unit pelaksana transaksi treasury dan investasi.
- b. *Middle office*: unit SKMR sebagai unit yang melakukan pemantauan, menilai serta menginformasikan risiko yang timbul dari kegiatan *trading* yang dilakukan oleh unit front office.
- c. *Back office*: unit operasional treasury sebagai unit yang melakukan pencatatan dan valuasi terhadap seluruh eksposur pada aktivitas *trading* secara harian dengan menggunakan harga pasar dari sumber yang independen.

Trading Book and Banking Book Portfolio Management and Evaluation Methodology

Market risk in the trading book is the risk that arises from potential losses due to trading book activities, such as changes in interest rates and exchange rates. The Bank's market risk management is carried out by implementing the principle called segregation of duties, which separates functions and responsibilities in treasury transactions independently and consists of:

- a. Front office: the treasury unit as the managing unit for treasury and investment transactions.
- b. Middle office: SKMR unit as the unit that monitors, assesses, and informs risks that may rise from trading activities by the front office unit.
- c. Back office: the treasury operational unit as the unit that records and evaluates all exposures to trading activities on a daily basis, by using market prices from independent sources.



Risiko pasar *banking book* muncul akibat adanya perubahan suku bunga dan nilai tukar atas aktivitas *banking book* yang dapat berpengaruh pada profitabilitas Bank (*earning perspective*). Pengelolaan risiko pasar *banking book* Bank dilakukan dengan mengoptimalkan struktur neraca agar mendapatkan imbal hasil yang maksimal dengan tingkat risiko yang dapat diterima.

Dalam menghitung ATMR untuk Risiko Pasar, Bank mengacu pada POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dan SEOJK No. 35/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan menggunakan Metode Standar bagi Bank Umum Syariah. Risiko pasar yang wajib diperhitungkan dalam beban modal untuk pendekatan standar adalah:

- a. Posisi instrumen keuangan dalam *trading book* yang terekspos risiko suku bunga.
- b. Posisi valuta asing dalam *trading book dan banking book* yang terekspos risiko nilai tukar.

Untuk keperluan perhitungan modal minimum menggunakan metode standar, Bank menghitung semua posisi instrumen keuangan dalam *trading book* yang terekspos risiko suku bunga seperti pada portofolio surat berharga, serta derivatif lainnya seperti *FX Forward* dan *FX Swap*. Untuk risiko nilai tukar, Bank menghitung seluruh posisi *on* dan *off balance sheet*, baik dalam *portfolio trading book dan banking book*.

Setiap harinya, SKMR melakukan pemantauan terhadap pelampauan *trading limit*. Penetapan limit berfungsi untuk membatasi konsentrasi eksposur risiko pada suatu posisi, jenis risiko, tipe instrumen dan/atau pasar tertentu. Penetapan limit ini mengacu kepada *risk tolerance* Bank dengan mempertimbangkan *target profit* dan risiko dari aktivitas perdagangan.

Sistem Informasi Manajemen Risiko Pasar

Proses manajemen risiko pasar, khususnya pada aktivitas bisnis treasuri terus dikembangkan guna mendukung kompleksitas bisnis dan juga mengakomodasi kebutuhan nasabah yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Secara internal maupun eksternal, Bank telah menerapkan system pelaporan secara berkala dan berkelanjutan, yang memberikan informasi-informasi yang signifikan bagi Bank dalam memitigasi risiko akibat perubahan kondisi lingkungan bisnis, khususnya pada aspek makro ekonomi dan kebijakan moneter.

Adapun beberapa hasil pemantauan dari proses manajemen risiko pasar yang dijalankan oleh Bank, adalah sebagai berikut:

1. Laporan Pemantauan atas Penggunaan Limit *Dealer Treasury*.

Banking book market risk arises due to changes in interest rates and exchange rates on banking book activities that can affect the Bank's profitability (earnings perspective). Market risk management in the Bank's banking book is carried out by optimizing the balance sheet structure to obtain maximum returns at an acceptable level of risk.

In calculating RWA for Market Risk, the Bank refers to POJK No. 21/POJK.03/2014 concerning Minimum Capital Adequacy Requirements for Sharia Commercial Banks and SEOJK No. 35/SEOJK.03/2015 concerning Calculation of Risk Weighted Assets for Market Risk using the Standard Method for Sharia Commercial Banks. Market risks that must be considered in the capital expense for the standard approach are:

- a. The position of financial instruments in the trading book that are exposed to interest rate risk.
- b. Foreign exchange positions in trading book and banking book that are exposed to exchange rate risk.

To calculate the minimum capital by using the standard approach, the Bank calculates positions of all financial instruments in trading book that are exposed to interest rate risk, such as securities portfolios and other derivatives like FX Forward and FX Swap. As for the exchange rate risk, the Bank calculates on and off balance sheet positions in the trading book and banking book portfolios.

SKMR monitors any excess on trading limits on a daily basis. Setting up the trading limits will curb the concentration of risk exposure in a particular position, the type of risk, and the type of instrument and/or market. The determination of this limit refers to the Bank's risk tolerance by considering the targeted profit and risks from trading activities.

Market Risk Information Management System

The market risk management process, especially on treasury business activities, continues to be developed in order to support business complexity and also to accommodate the increasing customers' needs.

Internally as well as externally, the Bank has implemented a periodic and continuous reporting system, which provides significant information for the Bank to mitigate risks due to changes in business environment conditions, especially in macroeconomic aspects and monetary policy.

Several monitoring results from the market risk management process carried out by the Bank are as following:

1. Monitoring Report of the Use of Treasury Dealer Limits.



2. Laporan Pemantauan atas Stop Loss Limit *Dealer Treasury*.
3. Laporan Posisi Devisa Netto (PDN).
4. Laporan Batas Pinjaman Luar Negeri (PLN).
5. Laporan *Mark to Market* atas Transaksi *Treasury*.
6. Laporan *Stress Test* atas Risiko Pasar.
7. Laporan *Risk Factor* terhadap Transaksi Forex dan Volatilitas Perubahan Harga Emas.

Risiko Likuiditas

Pengungkapan Eksposur dan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dilikuidasi segera dan/atau diagunkan tanpa mengganggu aktivitas keuangan bank.

Kerangka Manajemen Risiko Likuiditas

Bank mengimplementasikan ketentuan mengenai risiko likuiditas yang meliputi:

1. Ketentuan dalam bentuk kebijakan, prosedur dan petunjuk teknis terkait strategi, proses, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko likuiditas;
2. Menetapkan organisasi terkait risiko likuiditas dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang berkepentingan;
3. Mengimplementasikan limit atas rasio likuiditas dan dipantau secara harian untuk melihat kondisi likuiditas Bank.

Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas

Organisasi manajemen risiko likuiditas diperlukan untuk memastikan bahwa DPS, Dewan Komisaris dan Direksi beserta komite di bawahnya melaksanakan fungsinya dengan baik. Termasuk dalam organisasi manajemen risiko adalah dibentuknya unit kerja terkait dengan likuiditas yang terdiri dari tiga lini pertahanan manajemen risiko dengan fungsinya masing-masing.

Untuk meminimalkan risiko likuiditas sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan, Bank telah memiliki manajemen risiko likuiditas sebagai berikut:

2. Monitoring Report on Treasury Dealer Stop Loss Limit.
3. Net Open Position (NOP) Report.
4. Foreign Loan Limit (FLL) Report.
5. Mark to Market Report on Treasury Transactions.
6. Stress Test Report on Market Risk.
7. Risk Factor Report on Forex Transactions and Volatility of Gold Price Changes.

Liquidity Risk

Disclosure on Exposure and the Implementation of Liquidity Risk Management

Liquidity risk arises from the Bank's inability to meet its maturing liabilities from funding sources such as cash flow and/or high-quality liquid assets that can be liquidated immediately and/or used as collateral without disrupting the Bank's financial activities.

Liquidity Risk Management Framework

The Bank implements provisions referring to liquidity risks which include the following:

1. Provisions in the form of policies, procedures and technical instructions related to liquidity risk management strategy, process, control and liquidity risk management information system;
2. Establish an organization related to liquidity risk with the duties and responsibilities of each interested party;
3. Implement limits on liquidity ratios and monitor daily to see the Bank's liquidity conditions.

Liquidity Risk Management Organization

The objective of a liquidity risk management organization is to ensure that DPS, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the committees carry out their functions properly. The risk management organization includes establishing work units related to liquidity, which consist of three lines of defence in risk management with their respective functions.

To minimize liquidity risk based on prudential principles in the Banking sector, the Bank has liquidity risk management as follows:



Organisasi Organization	Tanggung Jawab	Responsibilities
Dewan Komisaris The Board of Commissioners	Menjalankan fungsi pengawasan risiko likuiditas melalui ROC.	Carry out the liquidity risk monitoring function through ROC.
Dewan Pengawas Syariah (DPS) Sharia Supervisory Board (SSB)	Memastikan pengawasan atas aktivitas pengelolaan likuiditas Bank, khususnya yang terkait dengan kebijakan pendanaan dan bagi hasil kepada nasabah, agar tetap terjaga sesuai dengan aspek syariah.	To ensure that the supervision of the Bank's liquidity management activities, especially those related to funding policies and profit sharing to customers, so that they are maintained in accordance with sharia aspect.
Direksi dimana tanggung jawab ini dilaksanakan juga melalui ALCO yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan strategi terkait risiko likuiditas The Board of Directors where this responsibilities are also carried out through ALCO, which is responsible for setting up policies and strategies related to liquidity risks	- Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko likuiditas sesuai tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis dan profil risiko likuiditas; - Memastikan adanya integrasi penerapan manajemen risiko likuiditas dengan risiko lainnya yang dapat berdampak bagi Bank; - Menerapkan rencana pendanaan darurat apabila status kondisi likuiditas Bank memburuk.	- Ensure that the function of liquidity risk management is line with strategic objectives, scale, business characteristics, and liquidity risk profile; - Ensure the integration of liquidity risk management implementation with other risks that may affect the Bank; - Implement an emergency funding plan if the Bank's liquidity conditions worsen.
Unit kerja terkait risiko likuiditas, terdiri dari unit kerja yang berdasarkan tiga lini pertahanan manajemen risiko Work units related to liquidity risks, which consist of work units based on three lines of defense in risk management	- Lini pertahanan pertama manajemen risiko likuiditas adalah unit treasury yang bertanggung jawab mengelola transaksi arus dana masuk dan keluar terjaga pada level yang aman bagi Bank; - Lini pertahanan kedua manajemen risiko likuiditas adalah SKMR yang mendukung ALCO dalam pemantauan dan pengukuran indikator-indikator risiko likuiditas, serta unit kepatuhan yang memastikan rasio likuiditas Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator; - Lini pertahanan ketiga manajemen risiko pasar adalah unit internal audit yang bertanggung jawab melakukan <i>risk-based</i> audit yang memberikan <i>added value</i> kepada lini pertahanan pertama dan kedua, untuk memastikan bahwa seluruh elemen Bank telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik termasuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan manajemen Bank dan regulasi yang berlaku.	- The first line of defence in liquidity risk management is the treasury unit, which is responsible for managing incoming and outgoing fund transactions at a safe level for the Bank; - The second line of defense in liquidity risk management is the SKMR, which supports ALCO in monitoring and measuring liquidity risk indicators, as well as the compliance unit, which ensures that the Bank's liquidity ratio complies with regulatory provisions. - The third line of defense in market risk management is the internal audit unit, which is responsible for conducting risk-based audits that provide added value to the first and second line of defense, as well as making sure that all elements of the Bank have carried out their functions and responsibilities properly, including ensuring compliance with the Bank's management policies and applicable regulations.

Strategi Manajemen Risiko Likuiditas

- Memastikan dan menjaga kondisi likuiditas Bank tetap sehat melalui pemantauan risiko likuiditas secara harian;
- Menetapkan strategi peningkatan likuiditas dengan fokus pada pertumbuhan dana murah dan mengoptimalkan pendapatan berbasis jasa;
- Meningkatkan *funding* dan transaksi di segmen Retail melalui implementasi Bank Penyalur Gaji (BPG) untuk ASN, meningkatkan akuisisi porsi haji dan promosi.
- Meningkatkan *funding* dan transaksi di segmen Enterprise antara lain dengan mengoptimalkan transaksi melalui *cash management system*, meningkatkan penggunaan *virtual account* dan transaksi *remittance*.
- Memperkuat layanan perbankan elektronik dan meningkatkan aktivasi transaksi nasabah, melalui antara lain optimalisasi *mobile banking* dan promo untuk transaksi di *merchant* tertentu.

Liquidity Risk Management Strategy

- To ensure and maintain the Bank's liquidity conditions to remain sound through daily liquidity risk monitoring;
- To establish liquidity strategy with focus on growth of low-cost funds and optimizing service-based income;
- To increase funding and transactions in the Retail segment through the implementation of a Salary Distribution Bank (BPG) for the State Civil Apparatus (ASN), increase the acquisition of Hajj portions and promotions.
- To increase funding and transactions in the Enterprise segment, among others by optimizing transactions through the cash management system, increase in the use of virtual accounts and remittance transactions.
- To strengthen electronic banking services and increase customer transaction activation, among others, through optimizing mobile banking and promotions on transactions at certain merchants.



Teknik Mitigasi Risiko Likuiditas termasuk Indikator Peringatan Dini Permasalahan

Setiap harinya, Bank melakukan pemantauan atas risiko likuiditas melalui pelaporan atas pencapaian rasio-rasio likuiditas yang terangkum dalam *Liquidity Key Risk Indicator* (LKRI). Indikator-indikator yang masuk dalam laporan tersebut ialah parameter likuiditas yang menggambarkan fungsinya masing-masing, baik sebagai penyangga likuiditas, tingkat konsentrasi, ketergantungan pendanaan dan tingkat ekspansi bisnis Bank.

Penilaian atas kondisi likuiditas Bank diperoleh melalui hasil pemeringkatan secara komposit atas seluruh parameter, sehingga sebagai *output* penilaiannya akan diketahui tingkat risiko dari kondisi likuiditas Bank. Hasil penilaian atas kondisi likuiditas ini diinformasikan kepada Direksi secara harian sehingga ketika kondisi likuiditas terlihat menurun dapat diberikan arahan atas langkah-langkah pemulihan likuiditas yang harus dilakukan.

Likuiditas dan Rencana Pendanaan Darurat

Dalam hal pemantauan dan pengelolaan risiko likuiditas saat kondisi krisis, BMI telah mempunyai kebijakan yaitu *Contingency Funding Plan* (CFP), yang pelaksanaannya direpresentasikan melalui pelaksanaan rapat *Liquidity Crisis Mitigation Team* (LCMT) yang lebih intensif.

Pelaksanaan rapat LCMT dijalankan dengan mempertimbangkan hasil pemantauan status kondisi likuiditas Bank yang tercantum pada laporan LKRI dengan kondisi tertentu. Rapat LCMT ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan atas kondisi likuiditas Bank, terutama melalui perbaikan atas kinerja pendanaan dari sisi nasabah, maupun alternatif sumber pendanaan yang dapat diupayakan dari pasar uang.

Mekanisme Pengukuran dan Stress Test serta Pengendalian Risiko Likuiditas

Stress test likuiditas dilakukan oleh Bank sebagai salah satu metode manajemen risiko untuk mengevaluasi ketahanan modal, likuiditas dan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian pada suatu kejadian krisis yang *exceptional but plausible*, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko dan menjaga modal.

Ruang lingkup pelaksanaan *stress test* likuiditas mencakup *regular issue* dan juga *forward looking scenario* yang mengacu pada kondisi terkini seperti kondisi pasar dan lingkungan bisnis dan dampaknya terhadap bisnis Bank.

Dalam perhitungan *stress test* likuiditas, Bank mengidentifikasi potensi tekanan yang mungkin terjadi untuk menilai kecukupan likuiditas dan cadangan aktiva likuid yang dimiliki dalam menyerap tekanan yang timbul serta langkah pencegahan dan penanggulangan yang tercantum dalam CFP.

Liquidity Risk Mitigation Techniques, including Early Warning Indicator on Problem

The Bank monitors liquidity risks on a daily basis through reports of liquidity ratio achievements, which are summarized in the Liquidity Key Risk Indicator (LKRI). Indicators included in the report are liquidity parameters, which describe their respective functions as a liquidity buffer, concentration level, funding dependence, and the Bank's level of business expansion.

The assessment of the Bank's liquidity condition is obtained through the results of a composite rating of all parameters, so the output of the assessment will determine the risk level of the Bank's liquidity condition. Results of the liquidity assessment are informed to the Board of Directors on a daily basis. Therefore, when liquidity conditions when liquidity conditions decline, the Board of Directors can give directions on measures that need to be taken to restore liquidity.

Liquidity and Contingency Funding Plan

The Bank has a policy to monitor and manage liquidity risks during a crisis, called the Contingency Funding Plan (CFP), which is implemented through more intensive meetings of the Liquidity Crisis Mitigation Team (LCMT).

The LCMT meeting is held based on the monitoring results of the Bank's liquidity conditions listed in the Liquidity Key Risk Indicator (LKRI) report under certain conditions. The LCMT meeting is expected to expedite the recovery process of the Bank's liquidity conditions, particularly through improvements in funding performance from customers and alternative sources of funding obtained from the money market.

Measurement and Stress Test Mechanism and Liquidity Risk Control

The Bank carries out liquidity stress tests as one of the risk management methods to evaluate capital resilience, liquidity, and the Bank's ability to absorb losses in an exceptional but plausible crisis event, as well as identify necessary measures to mitigate risks and maintain capital.

The scope of liquidity stress test implementation covers regular issues and forward-looking scenarios based on current conditions, such as market conditions, business environment, and their impacts on the Bank's business.

In calculating the liquidity stress test, the Bank identifies potential pressures that may occur to assess the adequacy of liquidity and liquid asset reserves to absorb pressures that arise and take preventive actions and countermeasures listed in the CFP.



Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas

Proses manajemen risiko likuiditas berperan penting dalam memantau kemampuan Bank dalam mengatasi kewajibannya kepada para *stakeholder*, maupun dalam mengantisipasi kebutuhan yang timbul dari lingkungan bisnis dan perilaku nasabah di masa mendatang.

Bank telah menerapkan proses pemantauan secara berkala dan responsif terhadap hasil penilaian atas kondisi likuiditas Bank secara harian, termasuk didalamnya mengantisipasi potensi-potensi tekanan yang mungkin terjadi pada bisnis Bank.

Adapun beberapa hasil dari proses manajemen risiko likuiditas yang dijalankan oleh Bank dilaporkan melalui beberapa laporan berkala baik internal maupun eksternal, seperti:

1. Laporan *Key Risk Indicators* (LKRI),
2. Laporan *Stress Test* Likuiditas,
3. Informasi terkait *Update* Risiko Likuiditas yang disampaikan di rapat ALCO,
4. Informasi terkait Penarikan berdasarkan Perilaku Nasabah,
5. Informasi terkait Tingkat Konsentrasi Pendanaan (50 Deposan Inti).

Risiko Operasional

Pengungkapan Eksposur dan Penerapan Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai kerugian akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau isu eksternal yang dapat mempengaruhi operasional Bank. Kerugian dari dampak risiko operasional dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan mengganggu pencapaian visi dan misi bank.

Lemahnya pengendalian risiko operasional dapat menyebabkan dampak terhadap kegiatan usaha Bank yaitu meningkatnya biaya operasional dan pada akhirnya mengurangi laba usaha serta modal Bank. Selain itu, secara umum kelemahan ini akan mengakibatkan kelancaran operasional dan mutu pelayanan menjadi terganggu dan menurunkan kinerja dan daya saing BMI.

Kerangka Manajemen Risiko Operasional

1. Ketentuan dalam bentuk kebijakan, prosedur dan petunjuk teknis terkait strategi, proses, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko operasional;
2. Pembentukan organisasi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang berkepentingan;
3. Memastikan bahwa organisasi Bank telah mendukung pelaksanaan *dual control* dan *segregation of duties* dalam kegiatan operasional Bank.

Liquidity Risk Management Information System

The liquidity risk management process plays an important role in monitoring the Bank's ability to meet its obligations to stakeholders, as well as in anticipating needs arising from the business environment and customers' behavior in the future.

The Bank has implemented a regular monitoring process and is responsive towards the results of daily assessments of the Bank's liquidity conditions, including in anticipating potential pressures that may occur on the Bank's business.

Some of the results of the liquidity risk management process carried out by the Bank are reported through several periodic reports, both internal and external, such as:

1. Key Risk Indicators Report (LKRI),
2. Liquidity Stress Test Report,
3. Information related to Liquidity Risk Updates presented at the ALCO meeting,
4. Information regarding Withdrawals based on Customers' Behaviour,
5. Information regarding Funding Concentration Level (50 main Depositors).

Operational Risk

Disclosure of Exposure and the Implementation of Operational Risk Management

Operational risk represents or is defined as loss due to inadequate or non-functioning internal processes, human errors, system failures, or external issues that may affect the Bank's operations. Losses from the impact of operational risks can affect financial performance and disrupt the Bank's vision and mission achievements.

Weak operational risk control can affect the Bank's business activities, as it may increase operational costs, ultimately reducing the Bank's operating profit and capital. In addition, these weaknesses, in general, will disrupt smooth operations and service quality, as well as lower the Bank's performance and competitiveness.

Operational Risk Management Framework

1. Provisions in the form of policies, procedures and technical instructions related to strategy, process, control and operational risk management information system;
2. Establishment of an organization with respective duties and responsibilities of each interested party;
3. Ensuring the Bank's organization support on the implementation of dual control and segregation of duties in the Bank's operational activities.



4. Limit operasional telah ditetapkan secara berjenjang dan dikaji berkala sesuai dengan dinamika bisnis Bank.
5. *Risk appetite* dan *risk tolerance* atas risiko operasional yang dikaji berkala dan dipantau.

4. Operational limits are determined in stages and reviewed periodically in accordance with the Bank's business dynamics.
5. Risk appetite and risk tolerance for operational risks are periodically reviewed and monitored.

Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Organisasi Manajemen Risiko Operasional Organisasi manajemen risiko operasional yang memastikan bahwa DPS, Dewan Komisaris dan Direksi serta komite di bawahnya melaksanakan fungsinya dengan baik. Termasuk dalam organisasi manajemen risiko adalah dibentuknya unit kerja terkait dengan operasional yang terdiri dari 3 (tiga) lini pertahanan manajemen risiko dengan fungsinya masing-masing, sebagai berikut:

Operational Risk Management Organization

Organization of operational risk management ensures that the DPS, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the committees carry out their functions properly. The risk management organization includes the establishment of work units related to operations, which consist of 3 (three) lines of defence in risk management with their respective functions, as follows:

Organisasi Organization	Tanggung Jawab	Responsibilities
Dewan Komisaris The Board of Commissioners	Menjalankan fungsi pengawasan risiko operasional melalui ROC, Audit Committee dan GCG Committee.	Perform operational risk monitoring function through ROC, the Audit Committee, and the GCG Committee.
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	Memastikan pengawasan atas bisnis Bank, khususnya dalam hal penerbitan produk maupun program bisnis baru, agar tetap terjaga sesuai dengan aspek syariah, dalam hal ini meliputi produk dan program, proses bisnis yang terlibat dan juga pemanfaatan teknologi dalam aktivitas bisnis Bank.	To ensure supervision of the Bank's business, especially in terms of the issuance of new products and business programs, so that it is maintained in accordance with sharia aspects, in this case including products and programs, business processes involved and also the use of technology in the Bank's business activities.
Direksi The Board of Directors	1. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko operasional telah memadai sesuai dengan karakteristik kompleksitas dan profil risiko Bank serta memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank; 2. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Direksi membentuk Risk Management Committee yang memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko operasional telah memberikan perlindungan memadai bagi Bank.	1. Ensure adequate function of operational risk management, in line with the Bank's complexity characteristics and risk profile, as well as fully understand the type and level of risk inherent in the Bank's business activities; 2. In carrying out its responsibilities, the Board of Directors established a Risk Management Committee, which ensures that the operational risk management framework provides adequate protection for the Bank.
Unit kerja terkait risiko operasional, terdiri dari unit kerja yang berdasarkan tiga lini pertahanan manajemen risiko Work units related to operational risks, which consist of work units based on three lines of defense in risk management	1. Lini pertahanan pertama manajemen risiko operasional adalah seluruh unit kerja di Bank yang dalam fungsinya memiliki risiko inheren masing-masing dan bertanggung jawab atas pengelolaan risiko operasionalnya sehari-hari, dan melaporkan permasalahan dan kejadian risiko operasional kepada SKMR. 2. Lini pertahanan kedua manajemen risiko operasional adalah SKMR yang berfungsi untuk meyakini bahwa risiko yang dihadapi Bank dalam diidentifikasi, diukur dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar, serta unit kepatuhan yang memastikan kepatuhan Bank atas rasio operasional yang harus dijaga. SKMR juga berperan dalam penyusunan kebijakan dan perangkat manajemen risiko operasional. 3. Lini pertahanan ketiga manajemen risiko operasional adalah unit internal audit yang bertanggung jawab melakukan <i>risk-based audit</i> yang memberikan <i>added value</i> kepada lini pertahanan pertama dan kedua, untuk memastikan bahwa seluruh elemen Bank telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik termasuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan manajemen Bank dan regulasi yang berlaku.	1. The first line of defence in operational risk management is all of the Bank's work units, which in their respective functions, have inherent risks and are responsible for managing their daily operational risks and reporting issues and incidents in operational risk to SKMR. 2. The second line of defence in operational risk management is SKMR, which ensures that the risks faced by the Bank are identified, measured, monitored, controlled, and reported correctly, and the compliance unit, which ensures the Bank's compliance in maintaining operational ratios. SKMR also plays a role in formulating policies and tools in operational risk management. 3. The third line of defence in operational risk management is the internal audit unit, which is responsible for conducting risk-based audits that provide added value to the first and second line of defence, making sure that all elements of the Bank have carried out their functions and responsibilities properly, including ensuring compliance with the Bank's management policies applicable regulations.



Strategi Manajemen Risiko Operasional

1. Meningkatkan efektivitas penerapan dan pemantauan risiko operasional melalui program *Operational Risk Champion* (ORION) yang memfasilitasi proses manajemen risiko operasional di unit kerja masing-masing;
2. Memastikan kinerja pencapaian atas *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank atas risiko operasional;
3. Melaksanakan program budaya risiko melalui penyampaian *operational risk awareness* kepada seluruh karyawan, pelatihan *basic risk awareness* secara berkala, penyampaian *risk awareness* melalui video, pelaksanaan *Muamalat Internal Certification* (MIC), dan *anti-fraud campaign*;
4. Menjaga agar kerugian risiko operasional Bank berada di bawah *risk tolerance* untuk risiko operasional;
5. Melakukan pemantauan atas proyek perbaikan terkait dengan risiko operasional yang menjadi perhatian Bank, antara lain terkait dengan kualitas data dan dokumentasi pembiayaan;
6. Memastikan bahwa setiap aktivitas yang dijalankan wajib dilengkapi dengan prosedur yang digunakan sebagai panduan standar dan dilakukan kaji ulang secara berkala;
7. Memisahkan tugas dan fungsi berdasarkan konsep *four eyes principles* yang jelas untuk memastikan objektivitas dan menghindari benturan kepentingan;
8. Melakukan kajian risiko terhadap proses/produk Bank;
9. Melakukan penguatan sistem keamanan TI, stabilitas sistem dan penguatan infrastruktur TI, termasuk mengimplementasikan ISO27001 terkait Sistem Keamanan Manajemen Informasi;
10. Menyelesaikan proses Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di bulan November 2023 dan dinyatakan berhak untuk mendapatkan Sertifikat ISO 37001:2016 SMAP;
11. Melakukan perbaikan risiko keamanan dan ketahanan siber untuk mengantisipasi serangan siber;
12. Mengimplementasikan perangkat risiko operasional dalam pengelolaan risiko operasional Bank;
13. Mengimplementasikan *Business Continuity Management* (BCM) untuk mengendalikan risiko akibat kejadian eksternal.

Operational Risk Management Strategy

1. To increase the effectiveness of implementing and monitoring operational risk through the Operational Risk Champion (ORION) program which facilitates the operational risk management process in each work unit;
2. To ensure the performance of the Bank's risk appetite and risk tolerance on operational risks;
3. To implement a risk culture program by delivering operational risk awareness to all employees, regular basic risk awareness training, delivering risk awareness via video, implementing Muamalat Internal Certification (MIC), and anti-fraud campaigns;
4. To maintain the Bank's operational risk losses are below the risk tolerance for operational risks;
5. To monitor improvement projects related to operational risks that are of concern to the Bank, including those related to the quality of financing data and documentation;
6. To ensure that every activity carried out must be equipped with procedures that are used as standard guidelines and are reviewed periodically.
7. To separate tasks and functions based on a clear four-eyes principles concept to ensure objectivity and avoid conflicts of interest.
8. To conduct risk analysis of the Bank's processes/products;
9. To strengthen IT security systems, system stability and strengthen IT infrastructure, including implementing ISO27001 regarding Information Management Security Systems;
10. To complete the ISO 37001 Anti-Bribery Management System (SMAP) Certification process in November 2023 and declared entitled to obtain the ISO 37001:2016 SMAP Certificate
11. To improve security risks and cyber resilience to prevent cyber attacks;
12. To implement operational risk tools in managing the Bank's operational risk.
13. To implement Business Continuity Management (BCM) to manage risks due to external events.



Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional

Proses penerapan manajemen risiko operasional Bank semakin berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan semakin berkembangnya bentuk produk bisnis Bank yang ditawarkan kepada nasabah. Selain itu perkembangan teknologi informasi digital yang telah terintegrasi dalam platform bisnis Bank turut pula menuntut pengawasan intensif atas setiap potensi risiko yang muncul, yang dapat menimbulkan kerugian dari sisi nasabah namun juga bagi Bank dalam hal penjagaan reputasinya dalam menyediakan layanan perbankan kepada nasabah.

Bank secara berkelanjutan terus berupaya meningkatkan kualitas atas proses pemantauan secara berkala dari sisi bisnis proses yang dijalankannya, di mana beberapa hasil dari proses manajemen risiko operasional yang dijalankan oleh Bank dilaporkan melalui beberapa laporan berkala, seperti:

1. Laporan *Key Risk Indicator* Risiko Operasional,
2. Laporan pemantauan Kejadian Risiko Operasional sesuai *Risk Appetite*,
3. Laporan Hasil Kajian atas LED dan RCSA dari seluruh unit kerja terkait.

Risiko Lainnya

Bank juga melakukan pengelolaan risiko lainnya yang mencakup risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Organisasi Manajemen Risiko Lainnya

Bank memisahkan unit kerja yang berperan mengelola risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi dengan satuan kerja operasional lainnya sesuai dengan prinsip *three lines of defense* dan memastikan bahwa proses *dual control* dan *segregation of duties* dilaksanakan dengan baik.

Kerangka Manajemen Risiko Lainnya

Bank memiliki ketentuan internal terkait pengelolaan risiko tersebut di atas, antara lain:

1. Ketentuan terkait dengan Standar Akad Pembiayaan;
2. Prosedur Komunikasi Bank Muamalat;
3. Ketentuan mengenai Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
4. Prosedur Penanganan Kejahatan *E-Channel*;
5. Prosedur *Business Continuity Management* (BCM); dan
6. Prosedur Penanganan dan Pengamanan Siber.

Operational Risk Management Information System

The process of implementing the Bank's operational risk management continues to develop over time in line with the development of the Bank's business products offered to customers. Apart from that, the development of digital information technology which has been integrated into the Bank's business platform also requires intensive monitoring of any potential risks that arise, which may cause losses for the customers as well as for the Bank in terms of maintaining its reputation in providing banking services to customers.

The Bank continuously strives to improve the quality of its regular monitoring processes from the business aspect of the processes carried out, where several results of the operational risk management processes applied by the Bank are reported through periodic reports as follows:

1. Key Risk Indicator Report of Operational Risks,
2. Operational Risk Incident Monitoring Report in accordance with Risk Appetite,
3. Report on Analysis Results on LED and RCSA from all related work units.

Other Risks

The Bank also manages other risks including legal risk, reputation all risk, strategic risk, compliance risk, return risk and investment risk.

Other Risk Management Organizations

The Bank separates work units whose roles are to manage legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk, return risk and investment risk from other operational work units in accordance with the three lines of defence principle and ensures that the dual control and segregation of duties processes are well implemented.

Other Risk Management Frameworks

The Bank maintains internal provisions regarding the management of the risks mentioned above, including the following:

1. Provisions related to Financing Contract Standards;
2. Bank Muamalat Communication Procedures;
3. Provisions regarding Anti-Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction;
4. E-Channel Crime Handling Procedures;
5. Business Continuity Management (BCM) procedures; and
6. Cyber Handling and Security Procedures.



Strategi Manajemen Risiko Lainnya

1. Melakukan penyesuaian organisasi Bank sesuai dengan dinamika perkembangan bisnis Bank.
2. Memastikan pencapaian bisnis Bank sesuai target yang telah ditetapkan dengan melalui koordinasi antar unit kerja;
3. Memaksimalkan potensi bisnis Bank dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH);
4. Memastikan bahwa Bank mematuhi ketentuan regulator dengan melakukan *reminder* dan evaluasi secara berkala oleh unit kerja Compliance;
5. Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dari sisi kepatuhan melalui sosialisasi regulasi, *sharing* informasi, materi pelatihan, dan *compliance awareness*;
6. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui *website* Bank dan surat kabar dengan berkoordinasi bersama antar unit kerja dan meningkatkan pemberitaan positif mengenai Bank.

Sistem Informasi Manajemen Risiko Lainnya

1. Laporan berkala kepada Direksi mengenai eksposur risiko dan mitigasinya;
2. Laporan pemantauan aspek *prudential banking*;
3. Laporan kajian secara independen antara lain atas rasio regulatori dan ketentuan regulator yang baru diterapkan.

Other Risk Management Strategies

1. Make adjustments to the Bank's organization in accordance with the dynamics of the Bank's business development.
2. Ensure that the achievement of the Bank's business is in accordance with the set targets through coordination between work units;
3. Maximize the Bank's business potentials with the Hajj Fund Management Agency (BPKH);
4. Ensure that the Bank complies with regulatory requirements by conducting regular reminders and evaluations by the Compliance work unit;
5. Improve the quality of the human capital in terms of compliance through socialization of regulations, sharing information, training and compliance awareness;
6. Disclose information to the public through the Bank's website and newspapers by coordinating with work units and increase positive news about the Bank.

Other Risk Management Information Systems

1. Periodic reports to the Board of Directors regarding risk exposure and its mitigation;
2. Monitoring reports on prudential banking aspects;
3. Independent review report on, regulatory ratios and newly implemented regulatory requirements.



LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN DISCLOSURE OF RISK EXPOSURE REPORT

A. Risiko Kredit Credit Risk

1. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah Individual Disclosure of Net Claims by Region

No.	Kategori Portofolio Portfolio Categories	31 Desember 2023 December 31, 2023						
		Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah Net Claim by Region						
		Jabodetabek Greater Jakarta	Jawa Java	Sumatera Sumatra	Kalimantan Kalimantan	Lainnya Others	Total Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to The Government	27.282.719,0	-	-	-	-	27.282.719	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	3.537.637,0	8.985	98.401	-	-	3.645.023	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank Claim to The Bank	1.610.662,0	19.823	25.999	-	62.355	1.718.839	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	1.305.342,0	646.932	263.164	151.196	188.786	2.555.420	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	4.298,0	7.562	5.167	2.831	6.448	26.306	
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan Retired Employee Credit	19.639,0	22.306	23.430	4.647	4.297	74.319	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small and Retail Portfolio	1.583.285,0	1.771.956	356.375	172.249	375.072	4.258.937	
9	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	17.182.688,0	1.668.732	41.029	73.424	893.867	19.859.740	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due	33.548,0	-	-	-	-	33.548	
11	Aset Lainnya Others Asset	5.808.050,0	760.894	222.436	62.721	191.041	7.045.142	
Total		58.367.868	4.907.190	1.036.001	467.068	1.721.866	66.499.993	



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2022 December 31, 2022					
Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah Net Claim by Region					
Jabodetabek Greater Jakarta	Jawa Java	Sumatera Sumatra	Kalimantan Kalimantan	Lainnya Others	Total Total
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
27.008.350	-	-	-	-	27.008.350
1.091.331	848	113.399	-	-	1.205.578
-	-	-	-	-	-
404.761	37.048	4.856	-	153.404	600.069
1.356.663	655.752	324.208	189.743	240.788	2.767.154
25.441	6.230	27.442	3.336	51.753	114.202
24.806	16.699	9.980	2.736	7.670	61.891
1.667.109	1.853.845	363.200	168.414	282.090	4.334.658
16.239.673	1.213.229	21.211	76.288	644.290	18.194.691
-	-	-	-	-	-
6.493.174	369.596	107.109	24.514	82.598	7.076.991
54.311.308	4.153.247	971.405	465.031	1.462.593	61.363.584



2. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Disclosure of Net Claims based on Remaining Contract Term

No. Kategori Portofolio Portfolio Categories		31 Desember 2023 December 31, 2023					
		Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Net Claims based Remaining Contract Term					
		< 1 Tahun < 1 Year	>1-3 Tahun > 1-3 Years	>3-5 Tahun > 3-5 Years	Non- Kontraktual Non-Contractual	Total Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	5.808.154	259.801	21.214.764	-	27.282.719	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	642.713	328.756	2.673.554	-	3.645.023	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	219.320	19.423	9.177	1.470.919	1.718.839	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	56.221	356.408	2.142.791	-	2.555.420	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	1.159	3.315	21.832	-	26.306	
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Retired Employee Credit	3.786	19.147	51.386	-	74.319	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	524.351	847.098	2.887.488	-	4.258.937	
9	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	3.742.431	2.032.064	14.035.837	49.408	19.859.740	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due	-	-	-	33.548	33.548	
11	Aset Lainnya Others Asset	442.272	-	-	6.602.870	7.045.142	
Total		11.440.407	3.866.012	43.036.829	8.156.745	66.499.993	



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2021 December 31, 2022				
Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Net Claims based Remaining Contract Term				
< 1 Tahun < 1 Year	>1-3 Tahun > 1-3 Years	>3-5 Tahun > 3-5 Years	Non-Kontraktual Non-Contractual	Total Total
(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
8.046.869	171.805	18.789.676	-	27.008.350
1.195.739	4.851	4.988	-	1.205.578
-	-	-	-	-
8.434	18.051	26.130	547.454	600.069
63.756	210.616	2.492.782	-	2.767.154
2.314	8.998	102.890	-	114.202
3.037	14.340	44.514	-	61.891
579.873	954.166	2.800.619	-	4.334.658
3.562.202	1.758.056	12.824.496	49.937	18.194.691
-	-	-	-	-
-	-	-	7.076.991	7.076.991
13.462.224	3.140.883	37.086.095	7.674.382	61.363.584



3. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sektor Ekonomi Disclosure of Net Claims by Economic Sector

No.	Sektor Ekonomi Economic Sector	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31 Desember 2023 December 31, 2023					
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan Agriculture, Hunting, and Forestry	-	-	-	-
2	Perikanan Fisheries	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian Mining and Quarrying	-	-	-	-
4	Industri pengolahan Manufacturing Industry	-	538.099	-	-
5	Listrik, Gas, dan Air Electricity, Gas, and Water	-	1.192.758	-	-
6	Konstruksi Construction	-	8.985	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran Wholesale and Retail Trade	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan minum Accommodation Providers and Food and Beverage Providers	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi Transportation, Storage, and Communication	-	1.512.982	-	-
10	Perantara Keuangan Financial Brokers	-	313.078	-	43.383
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Real Estate, Rental Business, and Corporate Services	-	66.216	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Public Administration, Defense and Compulsory Social Security	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan Education Services	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Health Services and Social Activities	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya Social Services, Socio-Cultural, Entertainment and Other Individual	-	-	-	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Households Personal Services	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya International and Extra International Agencies	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya Undefined Activities	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha Not a Business Field	-	-	-	-
20	Lainnya Others	27.282.719	12.905	-	1.675.456
Total		27.282.719	3.645.023	-	1.718.839



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan Retired Employee Credit	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small and Retail Portfolio	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on past due	Aset Lainnya Others Asset
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	-	-	-	237.232	191.455	-	-
	-	-	-	3.250	-	-	-
	-	-	-	2.452	1.343.543	-	-
	-	-	-	304.730	2.174.656	-	-
	-	-	-	449	888.946	-	-
	-	102	-	77.051	872.957	-	-
	130	-	-	208.213	2.157.177	-	-
	-	-	-	33.001	10.172	-	-
	105	-	-	90.065	1.523.608	-	-
	-	-	773	402.066	869.494	-	-
	456	-	-	92.983	1.277.896	-	-
	-	-	-	18	-	-	-
	-	642	-	1.573.569	241.837	-	-
	-	-	-	291.545	40.534	-	-
	61	-	-	126.017	1.470	-	-
	-	-	-	6.412	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	2.537.471	25.431	73.165	735.735	-	-	-
	17.197	131	381	74.149	8.265.995	33.548	7.045.142
	2.555.420	26.306	74.319	4.258.937	19.859.740	33.548	7.045.142



No.	Sektor Ekonomi Economic Sector	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
31 Desember 2022 December 31, 2022						
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan Agriculture, Hunting, and Forestry	-	-	-	-	
2	Perikanan Fisheries	-	-	-	-	
3	Pertambangan dan Penggalian Mining and Quarrying	-	-	-	-	
4	Industri pengolahan Manufacturing Industry	-	-	-	-	
5	Listrik, Gas, dan Air Electricity, Gas, and Water	-	102.992	-	-	
6	Konstruksi Construction	-	-	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran Wholesale and Retail Trade	-	-	-	2.152	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan minum Accommodation Providers and Food and Beverage Providers	-	335	-	130	
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi Transportation, Storage, and Communication	-	-	-	-	
10	Perantara Keuangan Financial Brokers	-	150.000	-	34.333	
11	<i>Real Estate</i> , Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Real Estate, Rental Business, and Corporate Services	-	-	-	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Public Administration, Defense and Compulsory Social Security	-	-	-	-	
13	Jasa Pendidikan Education Services	-	5.869	-	16.000	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Health Services and Social Activities	-	5.051	-	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya Social Services, Socio-Cultural, Entertainment and Other Individual	-	-	-	-	
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Households Personal Services	-	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya International and Extra International Agencies	-	-	-	-	
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya Undefined Activities	-	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha Not a Business Field	-	-	-	-	
20	Lainnya Others	27.008.350	941.331	-	547.454	
Total		27.008.350	1.205.578	-	600.069	



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan Retired Employee Credit	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small and Retail Portfolio	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on past due	Aset Lainnya Others Asset
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	-	405	-	289.205	185.482	-	-
	-	-	-	968	-	-	-
	383	-	-	13.544	612.117	-	-
	60	2.941	-	244.848	2.301.514	-	-
	-	-	-	50	1.314.116	-	-
	-	-	-	69.353	787.888	-	-
	1.170	1.746	103	244.972	1.908.101	-	-
	838	-	-	38.603	14.418	-	-
	20.656	2.266	-	123.190	1.061.450	-	-
	-	-	5.401	490.961	1.241.313	-	-
	-	-	-	85.360	1.235.940	-	-
	-	-	-	1.049	-	-	-
	1.860	76.088	-	1.395.619	126.034	-	-
	-	3.150	95	282.117	54.257	-	-
	372	-	-	254.194	25.900	-	-
	-	-	-	4.615	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	2.724.606	27.213	55.918	535.731	-	-	-
	17.209	393	374	260.279	7.326.161	-	7.076.991
	2.767.154	114.202	61.891	4.334.658	18.194.691	-	7.076.991



4. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Wilayah Disclosure of Bills and Allowance by Region

No	Kategori Portofolio Portfolio Categories	31 Desember 2023 December 31, 2023						
		Wilayah Region						
		Jabodetabek Greater Jakarta	Jawa Java	Sumatera Sumatra	Kalimantan	Lainnya Others	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Tagihan Claims	47.632.766	4.146.297	813.564	404.346	1.530.825	54.527.798	
2	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (<i>Impaired</i>) Impaired Claims						-	
	a. Belum Jatuh Tempo Not Past Due Yet	44.574.883	3.773.356	660.095	363.327	1.136.063	50.507.724	
	b. Telah Jatuh Tempo Past Due	3.057.883	372.941	153.468	41.019	394.762	4.020.073	
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) – Individual Allowance for Impairment Losses – Individual	137.691	-	-	-	-	137.691	
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) – Kolektif Allowance for Impairment Losses – Collective	390.159	106.693	14.443	9.228	21.550	542.073	
5	Tagihan yang Dihapus Buku Written-Off Claims	1.169.290	139.803	152.543	25.607	54.762	1.542.005	



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2022 December 31, 2022					
Wilayah Region					
Jabodetabek Greater Jakarta	Jawa Java	Sumatera Sumatra	Kalimantan	Lainnya Others	Total
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
41.235.550	3.801.241	903.408	448.968	1.384.454	47.773.621
-	-	-	-	-	-
4.731.644	3.486.325	680.399	911.858	868.683	10.678.909
2.859.518	2.498.620	796.402	531.998	1.456.855	8.143.393
167.799	-	-	-	-	167.799
454.163	59.556	49.069	13.499	16.305	592.592
1.173.401	142.049	165.616	25.639	59.200	1.565.905



5. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Sektor Ekonomi

Disclosure of Claims and Allowance by Economic Sector

No	Sektor Ekonomi Economic Sector	31 Desember 2023 December 31, 2023					
		Tagihan Claim	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Claims		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual Allowance for Impairment Losses - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif Allowance for Impairment Losses - Collective	Tagihan yang Hapus Buku Written-Off Claims
			Belum Jatuh Tempo Not Past Due Yet	Telah Jatuh Tempo Past Due			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan Agriculture, Hunting, and Forestry	428.687	412.550	16.137	-	4.653	-
2	Perikanan Fisheries	3.250	3.250	-	-	33	-
3	Pertambangan dan Penggalian Mining and Quarrying	1.345.995	1.213.785	132.210	-	13.184	-
4	Industri Pengolahan Manufacturing Industry	3.017.485	1.662.174	1.355.311	-	69.448	-
5	Listrik, Gas, dan Air Electricity, Gas, and Water	2.082.153	1.692.767	389.386	-	19.268	-
6	Konstruksi Construction	959.095	949.312	9.783	-	12.865	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran Wholesale and Retail Trade	2.365.520	1.997.934	367.586	-	80.098	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Accommodation Providers and Food & Beverage Providers	43.174	32.630	10.544	-	389	-
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi Transportation, Storage, and Communication	3.126.760	2.853.649	273.111	137.691	30.216	-
10	Perantara Keuangan Financial Brokers	1.628.793	1.629.473	(680)	-	20.927	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Real Estate, Rental Business, and Corporate Services	1.437.551	650.185	787.366	-	29.689	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Public Administration, Defense, and Compulsory Social Security	18	-	18	-	3	-
13	Jasa Pendidikan Education Services	1.816.049	1.767.389	48.660	-	17.930	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Health Services and Social Activities	332.079	330.930	1.149	-	3.313	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya Social Services, Socio-Cultural, Entertainment and Other Individual	127.548	110.608	16.940	-	9.791	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Households Personal Services	6.412	4.383	2.029	-	56	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya International and Extra International Agencies	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya Undefined Activities	-	-	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha Not a Business Field	3.371.801	3.115.920	255.882	-	71.902	-
20	Lainnya Others	32.435.428	32.080.785	354.641	-	158.308	1.542.005
Total		54.527.798	50.507.724	4.020.073	137.691	542.073	1.542.005



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2022 December 31, 2022					
Tagihan Claim	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Claims		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual Allowance for Impairment Losses - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif Allowance for Impairment Losses - Collective	Tagihan yang Hapus Buku Written-Off Claims
	Belum Jatuh Tempo Not Past Due Yet	Telah Jatuh Tempo Past Due			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
502.358	312.489	189.870	-	33.239	-
968	968	-	-	12	-
626.541	5.310	621.231	-	8.087	-
2.624.858	1.092.709	1.532.149	-	94.308	-
1.420.851	328.099	1.092.752	-	15.327	-
857.585	355.836	501.749	384	10.538	-
2.174.990	610.108	1.564.881	-	37.737	-
54.330	10.212	44.118	-	669	-
1.427.591	760.812	666.779	167.415	66.509	-
1.922.767	1.879.716	43.051	-	24.155	-
1.353.904	557.196	796.709	-	47.956	-
1.073	1.035	39	-	37	-
1.623.787	1.393.116	230.671	-	21.877	-
344.807	314.324	30.483	-	4.356	-
283.394	188.101	95.293	-	5.774	-
4.615	2.377	2.238	-	57	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3.391.893	2.758.467	633.426	-	86.053	-
29.157.309	108.034	97.954	-	135.901	1.565.905
47.773.621	10.678.909	8.143.393	167.799	592.592	1.565.905



6. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Disclosure of Mutation Details of Allowance for Impairment Losses

(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

No.	Keterangan Information	31 Desember 2023 December 31, 2023		31 Desember 2022 December 31, 2022	
		CKPN Individual Allowance of Possible Losses- Individual	CKPN Kolektif Allowance for Impairment Losses-Collective	CKPN Individual Allowance for Impairment Losses-Individual	CKPN Kolektif Allowance for Impairment Losses-Collective
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Saldo Awal CKPN Allowance for Impairment Losses Beginning Balance	144.560	535.204	213.954	382.307
2	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada Periode Berjalan (Net) Provisions (Reversal of Provisions) of Possible Losses in Current Year				
a.	Pembentukan CKPN pada Periode Berjalan Provisions of AIL in Current Year	-	56.958	78.856	149.370
b.	Pemulihan CKPN pada Periode Berjalan Reversal of AIL in Current Year	(8.090)	(150.886)	-	(30.687)
3	CKPN yang Digunakan untuk Melakukan Hapus Buku atas Tagihan pada Periode Berjalan Allowance for Impairment Losses that used for Write-off in Current Year	-	-	-	-
4	Pembentukan (Pemulihan) Lainnya pada Periode Berjalan Other Provisions (Other Reversal of Provisions) in Current Year	1.221	100.797	(125.011)	91.602
	Saldo Akhir CKPN Allowance for Impairment Losses Ending Balance	137.691	542.073	167.799	592.592



Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Function



Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan 2023
2023 Financial Statements

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.



7. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

Disclosure of Net Claims by Portfolio Category and Rating Scale

No.	Kategori Portofolio Portfolio Categories	31 Desember 2023					
		Net Claims					
		Lembaga Pemeringkat Rating Agencies	Peringkat Jangka Panjang Long-term Rating				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ - AA-	A+ - A-	BBB+ - BBB-	
		Fitch Rating	AAA	AA+ - AA-	A+ - A-	BBB+ - BBB-	
		Moody's	Aaa	Aa1 - Aa3	A1 - A3	Baa1 - Baa3	
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) - AA-(idn)	A+(idn) - A-(idn)	BBB+(idn) - BBB-(idn)	
PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ - [Idr]AA-	[Idr]A+ - [Idr]A-	[Idr]BBB+ - [Idr]BBB-			
PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ - idAA-	idA+ - id A-	id BBB+ - id BBB-			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government		-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities		2.607.339	329.685	66.216	521.492	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions		-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank		109.018	220.743	6.286	101	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans						
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans						
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Retired Employee Credit						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio						
9	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate		1.510.901	264.178	315.417	52.578	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due						
11	Aset Lainnya Others Asset						
TOTAL			4.227.258	814.606	387.919	574.171	



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

	December 31, 2023									
	Net Claims									
		Peringkat Jangka Pendek Short-term Rating						Tanpa Peringkat Non Rated	Total	
	BB+ - BB-	B+ - B-	Kurang dari B- Less than B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3 Less than A3			
	BB+ - BB-	B+ - B-	Kurang dari B- Less than B-	F1+ - F1	F2	F3	Kurang dari F3 Less than F3			
	Ba1 - Ba3	B1 - B3	Kurang dari B3 Less than B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3 Less than P-3			
	BB+(idn) - BB-(idn)	B+(idn) - B-(idn)	Kurang dari B-(idn) Less than B-(idn)	F1+(idn) - F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn) Less than F3(idn)			
	[Idr]BB+ - [Idr]BB-	[Idr]B+ - [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B- Less than [Idr]B-	[Idr]A1+ - [Idr]A1	[Idr]A2+ - [Idr]A2	[Idr]A3+ - [Idr]A3	Kurang dari [Idr]A3 Less than [Idr]A3			
	id BB+ - id BB-	id B+ - id B-	Kurang dari idB- Less than idB-							
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	27.282.719	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	120.291	3.524.732
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	1.382.691	336.148
	590.044	-	-	-	-	-	-	-	17.126.622	2.733.118
	590.044	-	-	-	-	-	-	-	45.912.323	6.593.998



No.	Kategori Portofolio Portfolio Categories	31 Desember 2022					
		Net Claims					
		Lembaga Pemeringkat Rating Agencies	Peringkat Jangka Panjang Long-term Rating				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ - AA-	A+ - A-	BBB+ - BBB-	
		Fitch Rating	AAA	AA+ - AA-	A+ - A-	BBB+ - BBB-	
		Moody's	Aaa	Aa1 - Aa3	A1 - A3	Baa1 - Baa3	
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) - AA-(idn)	A+(idn) - A-(idn)	BBB+(idn) - BBB-(idn)	
PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ - [Idr]AA-	[Idr]A+ - [Idr]A-	[Idr]BBB+ - [Idr]BBB-			
PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ - idAA-	idA+ - id A-	id BBB+ - id BBB-			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government		-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities		150.000	882.251	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions		-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank		77.940	12.666	2.388	101	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans						
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans						
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Retired Employee Credit						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio						
9	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate		10.000	418.417	480.417	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due						
11	Aset Lainnya Others Asset						
TOTAL			237.940	1.313.334	482.805	101	



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

December 31, 2022									
Net Claims									
		Peringkat Jangka Pendek Short-term Rating						Tanpa Peringkat Non Rated	Total
	BB+ - BB-	B+ - B-	Kurang dari B- Less than B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3 Less than A3		
	BB+ - BB-	B+ - B-	Kurang dari B- Less than B-	F1+ - F1	F2	F3	Kurang dari F3 Less than F3		
	Ba1 - Ba3	B1 - B3	Kurang dari B3 Less than B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3 Less than P-3		
	BB+(idn) - BB-(idn)	B+(idn) - B-(idn)	Kurang dari B-(idn) Less than B-(idn)	F1+(idn) - F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn) Less than F3(idn)		
	[Idr]BB+ - [Idr]BB-	[Idr]B+ - [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B- Less than [Idr]B-	[Idr]A1+ - [Idr]A1	[Idr]A2+ - [Idr]A2	[Idr]A3+ - [Idr] A3	Kurang dari [Idr]A3 Less than [Idr]A3		
	id BB+ - id BB-	id B+ - id B-	Kurang dari idB- Less than idB-						
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	-	27.008.350	-
	-	-	-	-	-	-	-	173.327	1.032.251
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	506.974	93.095
	-	-	-	-	-	-	-	17.285.857	908.834
	-	-	-	-	-	-	-	44.974.508	2.034.180



8. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan Disclosure of Counterparty Credit Risk

a. Transaksi Derivatif | Derivative Transactions

No	Variabel yang Mendasari Underlying Variable	31 Desember 2023 December 31, 2023								
		Notional Amount			Tagihan Derivatif Derivative Claim	Kewajiban Derivatif Derivative Liabilities	Tagihan Bersih sebelum MRK Net Claim before CRM	MRK CRM		Tagihan Bersih setelah MRK Net Claim after CRM
		≤ 1 Tahun ≤ 1 Year	> 1 Tahun- < 5 Tahun > 1 Year- < 5 Years	> 5 Tahun > 5 Years						
1	Shariah Compliant Profit Rate Swap	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Shariah Compliant Foreign Currency Swap	209.079	61.588	-	3.337	-	8.507	-	8.507	
3	Lainnya Others	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total		209.079	61.588	-	3.337	-	8.507	-	8.507	

b. Transaksi Repo | Repo Transactions

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2023 December 31, 2023			
		Nilai Wajar SSB Repo Fair Value of SSB Repo	Kewajiban Repo Obligatory Repo	Tagihan Bersih Net Charges	ATMR
1	Tagihan kepada Pemerintah Claims to Government	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Publik Bill on Public Entity	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Bill on Development Bank Multilateral and International Institutions	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Bill to the Bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Bill on Micro Business, Enterprises Small, and Retail Portfolio	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi Corporate Bill	-	-	-	-
Total		-	-	-	-

c. Transaksi Reverse Repo | Reverse Repo Transactions

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2023 December 31, 2023			
		Tagihan Bersih Net Charges	Nilai MRK MRK Value	Tagihan Bersih Setelah MRK Net Charges after MRK	ATMR Setelah MRK ATMR after MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah Claims to Government	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Publik Bill on Public Entity	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Bill on Development Bank Multilateral and International Institutions	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Bill to the Bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Bill on Micro Business, Enterprises Small, and Retail Portfolio	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi Corporate Bill	-	-	-	-
Total		-	-	-	-



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2022 December 31, 2022							
Notional Amount			Tagihan Derivatif Derivative Claim	Kewajiban Derivatif Derivative Liabilities	Tagihan Bersih sebelum MRK Net Claim before CRM	MRK CRM	Tagihan Bersih setelah (MRK Net Claim after CRM
≤ 1 Tahun ≤ 1 Year	> 1 Tahun- < 5 Tahun > 1 Year- < 5 Years	> 5 Tahun > 5 Years					
-	-	-	-	-	-	-	-
352.594	-	-	6.566	-	4.382	-	4.382
-	-	-	-	-	-	-	-
352.594	-	-	6.566	-	4.382	-	4.382

31 Desember 2022 31 December 2022			
Nilai Wajar SSB Repo Fair Value of SSB Repo	Kewajiban Repo Obligatory Repo	Tagihan Bersih Net Charges	ATMR
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

31 Desember 2022 31 December 2022			
Tagihan Bersih Net Charges	Nilai MRK MRK Value	Tagihan Bersih Setelah MRK Net Charges after MRK	ATMR Setelah MRK ATMR after MRK
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



9. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

Disclosure of Net Claims based on Risk Weighted After Impact Calculation of Credit Risk Mitigation

No	Kategori Portofolio Portfolio Categories	31 Desember 2023			
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit			
		0%	20%	35%	40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Eksposur Neraca Exposure on Balance Sheet					
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	27.282.719	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	-	2.949.052	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	38.283	1.668.374	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	6.815	1.314.786	1.233.819	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	3.514	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Retired Employee Credit	30.557	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	619.088	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	8.174.070	1.776.316	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due	-	-	-	-
11	Aset Lainnya Others Asset	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca Total Exposure on Balance Sheet	36.155.046	7.708.528	1.233.819	-
B Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi Commitments and Contingencies Report Exposure					
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Retired Employee Credit	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA Total Exposure on Off Balance Transactions	-	-	-	-
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) Exposure on Counterparty Credit Risk					
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	-	2.107	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk Total Exposure on Counterparty Credit Risk	-	2.107	-	-



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

December 31, 2023						ATMR	Beban Modal Capital Charge
Net Claims Based on Risk Weighted After Impact Calculation of Credit Risk Mitigation							
45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya Others		
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	-	-	-		-	-
-	695.971	-	-	-		937.796	93.780
-	-	-	-	-		-	-
-	4.392	-	-	-		335.871	33.587
-	-	-	-	-		694.794	69.479
-	-	-	22.792	-		22.792	2.279
-	43.762	-	-	-		21.881	2.188
-	-	3.639.849	-	-		2.729.887	272.989
-	315.735	-	9.550.543	-		10.063.674	1.006.367
-	-	-	33.548	-		33.548	3.355
-	-	-	7.045.142	-		7.045.142	704.514
-	1.059.860	3.639.849	16.652.025	-	-	21.885.384	2.188.538
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	42.358	-		42.358	4.236
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	42.358	-	-	42.358	4.236
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	5.682	-	-	-		3.263	326
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	718	-		718	72
-	5.682	-	718	-	-	3.980	398



No	Kategori Portofolio Portfolio Categories	31 Desember 2022			
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit			
		0%	20%	35%	40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Eksposur Neraca Exposure on Balance Sheet					
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	27.008.350	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	-	1.034.978	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	10.749	526.215	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	13.583	1.497.449	1.256.122	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	9.724	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Retired Employee Credit	55.762	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	752.764	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	8.403.725	428.417	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due	-	-	-	-
11	Aset Lainnya Others Asset	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca Total Exposure on Balance Sheet	36.254.657	3.487.059	1.256.122	-
B Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi Commitments and Contingencies Report Exposure					
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Retired Employee Credit	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA Total Exposure on Off Balance Transactions	-	-	-	-
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) Exposure on Counterparty Credit Risk					
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	-	2.670	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk Total Exposure on Counterparty Credit Risk	-	2.670	-	-



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

December 31, 2022						ATMR	Beban Modal Capital Charge
Net Claims Based on Risk Weighted After Impact Calculation of Credit Risk Mitigation							
45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya Others		
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	-	-	-		-	-
-	170.600	-	-	-		292.296	29.230
-	-	-	-	-		-	-
-	58.723	-	-	-		134.605	13.460
-	-	-	-	-		739.133	73.913
-	-	-	104.478	-		104.478	10.448
-	6.129	-	-	-		3.065	306
-	-	3.581.694	-	-		2.686.271	268.627
-	480.416	-	8.792.203	-		9.118.094	911.809
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	6.807.677	-		6.807.677	680.768
-	715.868	3.581.694	15.704.358	-	-	19.885.617	1.988.562
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-						



10. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

Disclosure of Net Claims and Credit Risk Mitigation Techniques

(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

No	Kategori Portofolio Portfolio Categories	31 Desember 2023 December 31, 2023					
		Tagihan Bersih Net Claim	Bagian yang Dijamin dengan Portion Secured by				Bagian yang Tidak Dijamin Portion not Secured
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Credit Insurance	Lainnya Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]
A Eksposur Neraca Exposure on Balance Sheet							
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	27.282.719	-	-	-		27.282.719
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	3.645.023	-	-	-		3.645.023
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	1.711.049	38.283	-	-		1.672.766
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	2.555.420	6.815	-	-		2.548.605
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	26.306	3.514	-	-		22.792
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan Retired Employee Credit	74.319	30.557	-	-		43.762
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	4.258.937	619.088	-	-		3.639.849
9	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	19.816.664	8.174.070	-	-		11.642.594
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due	33.548	-	-	-		33.548
11	Aset Lainnya Others Asset	7.045.142	-	-	-		7.045.142
	Total Eksposur Neraca Total Exposure on Balance Sheet	66.449.127	8.872.327	-	-	-	57.576.800
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif Exposure on Commitments/ Contingencies for off Balance Sheet Transactions							
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	-	-	-	-		-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	-	-	-	-		-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-		-



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

No	Kategori Portofolio Portfolio Categories	31 Desember 2023 December 31, 2023					
		Tagihan Bersih Net Claim	Bagian yang Dijamin dengan Portion Secured by				Bagian yang Tidak Dijamin Portion not Secured
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Credit Insurance	Lainnya Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	-	-	-	-		-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	-	-	-	-		-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	-	-	-	-		-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan Retired Employee Credit	-	-	-	-		-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	-	-	-	-		-
9	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	42.358	-	-	-		42.358
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due	-	-	-	-		-
Total Eksposur TRA Total Exposure on Off Balance Transactions		42.358	-	-	-	-	42.358
C Eksposur Neraca Exposure on Balance Sheet							
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	-	-	-	-		-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	-	-	-	-		-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	7.790	-	-	-		7.790
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	-	-	-	-		-
6	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	718	-	-	-		718
Total Eksposur Counterparty Credit Risk Total Exposure on Counterparty Credit Risk		8.507	-	-	-	-	8.507
TOTAL		66.499.993	8.872.327	-	-	-	57.627.666



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

No	Kategori Portofolio Portfolio Categories	31 Desember 2022 December 31, 2022					
		Tagihan Bersih Net Claim	Bagian yang Dijamin dengan Portion Secured by				Bagian yang Tidak Dijamin Portion not Secured
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Credit Insurance	Lainnya Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]
A Eksposur Neraca Exposure on Balance Sheet							
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	27.008.350	-	-	-		27.008.350
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	1.205.578	-	-	-		1.205.578
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	595.687	10.749	-	-		584.938
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	2.767.154	13.583	-	-		2.753.571
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	114.202	9.724	-	-		104.478
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan Retired Employee Credit	61.891	55.762	-	-		6.129
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	4.334.458	752.764	-	-		3.581.694
9	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	18.104.761	8.403.725	-	-		9.701.036
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due	-	-	-	-		-
11	Aset Lainnya Others Asset	6.807.677	-	-	-		6.807.677
Total Eksposur Neraca Total Exposure on Balance Sheet		60.999.758	9.246.307	-	-	-	51.753.451
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif Exposure on Commitments/ Contingencies for off Balance Sheet Transactions							
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	-	-	-	-		-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	-	-	-	-		-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-		-



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

No	Kategori Portofolio Portfolio Categories	31 Desember 2022 December 31, 2022					
		Tagihan Bersih Net Claim	Bagian yang Dijamin dengan Portion Secured by				Bagian yang Tidak Dijamin Portion not Secured
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Credit Insurance	Lainnya Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	-	-	-	-		-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	-	-	-	-		-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	-	-	-	-		-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan Retired Employee Credit	-	-	-	-		-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	200	-	-	-		200
9	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	89.930	-	-	-		89.930
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due	-	-	-	-		-
	Total Eksposur TRA Total Exposure on Off Balance Transactions	90.130	-	-	-	-	90.130
C	Eksposur Neraca Exposure on Balance Sheet						
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	-	-	-	-		-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	-	-	-	-		-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	4.382	-	-	-		4.382
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	-	-	-	-		-
6	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	-	-	-	-		-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk Total Exposure on Counterparty Credit Risk	4.382	-	-	-	-	4.382
	TOTAL	61.094.270	9.246.307	-	-	-	51.847.963



11. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset Disclosure of Securitization Transactions

NoEksposur Sekuritisasi Securitization Exposures		31 Desember 2023 December 31, 2023						
		Nilai Aset yang Disekuritisasi The Value of the Securitized Asset	Nilai Aset yang Disekuritisasi yang Mengalami Penurunan Nilai The Value of Assets that are Securitized which has Decreased Value		Laba/Rugi dari Aktivitas Sekuritisasi Profit/ Loss from Securitization Activities	ATMR	Pengurang Modal Capital Reduction	
			Telah Jatuh Tempo Due	Belum Jatuh Tempo Not Due				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Bank Bertindak sebagai Kreditor Asal The Bank Acts as the Creditor	-			-			
2	Bank Bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung The Bank Acts as a Supporting Credit Provider	-	-	-	-	-	-	
	a. Fasilitas Penanggung Risiko Pertama First Risk Insurer Facility							
	b. Fasilitas Penanggung Risiko Kedua Second Risk Insurer Facility	-	-	-	-	-		
3	Bank Bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas The Bank Acts as a Facility Provider Liquidity	-	-	-	-	-		
4	Bank Bertindak sebagai Penyedia Jasa The Bank Acts as a Service Provider	-						
5	Bank Bertindak sebagai Bank Kustodian The Bank Acts as a Custodian Bank	-						
6	Bank Bertindak sebagai Pemodal The Bank Acts as Capitalist	-	-	-	-	-	-	
	a. Senior Tranche							
	b. Junior Tranche	-	-	-	-	-	-	
	Total	-	-	-	-		-	

12. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Bank Bertindak sebagai Kreditor Awal Disclosure of Summary Securitization Transaction Activity Bank as Creditor

No	Eksposur Sekuritisasi Securitization Exposures	31 Desember 2023 December 31, 2023	
		Nilai Aset yang Disekuritisasi The Value of the Securitized Asset	Keuntungan (Kerugian) Penjualan Sales Profit (Loss)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tagihan kepada Pemerintah Claims to Government	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claims on Public Sector Entities	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Bill on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-
4	Tagihan kepada Bank Claims on Banks	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Housing Backed Financing	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Backed Financing	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Employee/Pension Funding	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small Business, and Retail Portfolios	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi Corporate Bill	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on past due	-	-
11	Aset Lainnya Other Assets	-	-
	Total	-	-



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2022 December 31, 2022					
Nilai Aset yang Disekuritisasi The Value of the Securitized Asset	Nilai Aset yang Disekuritisasi yang Mengalami Penurunan Nilai The Value of Assets that are Securitized which has Decreased Value		Laba/Rugi dari Aktivitas Sekuritisasi Profit/Loss from Securitization Activities	ATMR	Pengurang Modal Capital Reduction
	Telah Jatuh Tempo Due	Belum Jatuh Tempo Not Due			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7.237	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7.237	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2022 December 31, 2022	
Nilai Aset yang Disekuritisasi The Value of the Securitized Asset	Keuntungan (Kerugian) Penjualan Sales Profit (Loss)
(5)	(6)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-



13. Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Disclosure of RWA Calculations for Credit Risk Using a Standardized Approach

a. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca Disclosure of Assets Exposures in Balance Sheet

No	Kategori Portofolio Portfolio Categories	31 Desember 2023 December 31, 2023		
		Tagihan Bersih Claim Net	ATMR sebelum MRK RWA before CRM	ATMR setelah MRK RWA after CRM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah Claims to Government	27.282.719	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claims on Public Sector Entities	3.645.023	937.796	937.796
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Bill on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Claims on Banks	1.711.049	354.787	335.871
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	2.555.420	746.619	744.763
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	26.306	26.306	22.792
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Employee/Pension Funding	74.319	37.160	21.881
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small Business, and Retail Portfolios	4.258.937	3.194.203	2.729.887
9	Tagihan kepada Korporasi Corporate Bill	19.816.664	18.237.744	10.063.674
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on the Past Due	33.548	33.548	33.548
11	Aset Lainnya Other Assets	7.045.142	-	6.324.933
Total		66.449.127	23.568.162	21.215.144

b. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administrasi Disclosure of Commitments/Contingent Exposure Balance Sheet

No	Kategori Portofolio Portfolio Categories	31 Desember 2023 December 31, 2023		
		Tagihan Bersih Claim Net	ATMR sebelum MRK RWA before CRM	ATMR setelah MRK RWA after CRM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah Claims to Government	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claims on Public Sector Entities	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Bill on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Claims on Banks	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Employee/Pension Funding	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small Business, and Retail Portfolios	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi Corporate Bill	42.358	42.358	42.358
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on the Past Due	-	-	-
Total		42.358	42.358	42.358



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2022 December 31, 2022			
Tagihan Bersih Claim Net	ATMR sebelum MRK RWA before CRM	ATMR setelah MRK RWA after CRM	
(3)	(4)	(5)	
27.008.350	-	-	
1.205.578	292.296	292.296	
-	-	-	
595.687	137.132	134.605	
2.767.154	798.441	794.552	
114.202	114.202	104.478	
61.891	30.946	3.065	
4.334.458	3.250.844	2.686.271	
18.104.761	17.521.819	9.118.094	
-	-	-	
6.807.677	-	6.105.498	
60.999.758	22.145.679	19.238.858	

(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2022 December 31, 2022			
Tagihan Bersih Claim Net	ATMR sebelum MRK RWA before CRM	ATMR setelah MRK RWA after CRM	
(6)	(7)	(8)	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
200	150	150	
89.930	89.930	89.930	
-	-	-	
90.130	90.080	90.080	



**c. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan
(Counterparty Credit Risk)**

Disclosure of Potential Credit Risk Exposure due to Failure of Competitor (Counterparty Credit Risk)

No	Kategori Portofolio Portfolio Categories	31 Desember 2023 December 31, 2023		
		Tagihan Bersih Claim Net	ATMR sebelum MRK RWA before CRM	ATMR setelah MRK RWA after CRM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah Claims to Government	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claims on Public Sector Entities	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Bill on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Claims on Banks	7.790	3.263	3.263
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small Business, and Retail Portfolios	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi Corporate Bill	718	718	718
Total		8.507	3.980	3.980

d. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (Settlement Risk)

Disclosure of Potential Credit Risk Exposure Due to Failure of Settlement (Settlement Risk)

No	Kategori Portofolio Portfolio Categories	31 Desember 2023 December 31, 2023		
		Nilai Eksposur Exposure Value	Faktor Pengurang Modal Capital Reduction Factor	ATMR setelah MRK RWA after CRM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<i>Delivery versus payment</i>	-		-
a.	Beban modal 8% (5-15 hari) Capital expenses 8% (5-15 days)	-		-
b.	Beban modal 50% (16-30 hari) Capital expenses 50% (16-30 days)	-		-
c.	Beban modal 75% (31-45 hari) Capital expenses 75% (31-45 days)	-		-
d.	Beban modal 100% (lebih dari 45 hari) Capital expenses 100% (more than 45 days)	-		-
2	<i>Non-delivery versus payment</i>	-	-	-
Total		-	-	-



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2022 December 31, 2022			
Tagihan Bersih Claim Net	ATMR sebelum MRK RWA before CRM	ATMR setelah MRK RWA after CRM	
(6)	(7)	(8)	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
4.382	1.390	1.390	1.390
-	-	-	-
-	-	-	-
4.382	1.390	1.390	1.390

(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2022 December 31, 2022			
Nilai Eksposur Exposure Value	Faktor Pengurang Modal Capital Reduction Factor	ATMR setelah MRK RWA after CRM	
(6)	(7)	(8)	
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



e. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi
Disclosure of Securitization Exposures

(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

No	Jenis Transaksi Type of Transaction	31 Desember 2023 December 31, 2023		31 Desember 2022 December 31, 2022	
		Faktor Pengurang Modal Capital Reduction Factor	ATMR setelah MRK RWA after CRM	Faktor Pengurang Modal Capital Reduction Factor	ATMR setelah MRK RWA after CRM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitas Pembiayaan Pendukung yang memenuhi persyaratan Supporting Financing Facilities that meet the requirements	-	-	-	-
2	Fasilitas Pembiayaan Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan Supporting Financing Facilities that do not meet the requirements	-	-	-	-
3	Fasilitas Pembiayaan yang memenuhi persyaratan Financing Facilities that meet the requirements		-		-
4	Fasilitas Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan Financing Facilities that do not meet the requirements	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan Purchase of Asset Backed Securities that meet the requirements	-	6.998	-	-
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan Purchase of Asset-Backed Securities that do not meet the requirements	-	-	-	-
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum Securitization exposures that are not covered by the Financial Services Authority Regulation on prudential principles in asset securitization activities for commercial banks		-		-
Total		-	6.998	-	-

f. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit
Disclosure of Total Credit Risk Measurement

(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

Eksposur Sekuritisasi	31 Desember 2023 December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	Securitization Exposures
Total ATMR Risiko Kredit	21.268.481	19.330.328	Total of Risk Weighted Assets Credit Risk
Total Faktor Pengurang Modal	-	-	Total of Deduction from Capital Factor



B. Risiko Pasar Market Risk

(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

No	Jenis Risiko Risk Type	31 Desember 2023 December 31, 2023		31 Desember 2022 December 31, 2022	
		Beban Modal Capital Charge	ATMR	Beban Modal Capital Charge	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Risiko <i>Benchmark</i> Suku Bunga Interest Rate Benchmark Risk	1.496	18.699	166	2.075
	a. Risiko Spesifik Specific Risk	-	-	-	-
	b. Risiko Umum General Risk	1.496	18.699	166	2.075
2	Risiko Nilai Tukar Foreign Exchange Risk	4.299	53.733	2.554	31.923
3	Risiko Ekuitas ^{*)} Equity Risk ^{*)}				
4	Risiko Komoditas ^{*)} Commodity Risk ^{*)}				
Total		5.795	72.432	2.720	33.998

^{*)} Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko
For banks that have subsidiary companies that have risk exposure



B. Risiko Likuiditas Liquidity Risk

1. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah Disclosure of Maturity Profile for Rupiah

No	Pos-pos Posts	31 Desember 2023 December 31, 2023					
		Saldo Balance	Jatuh Tempo Due Date				
			≤ 1 Bulan ≤ 1 Month	> 1-3 Bulan > 1-3 Months	> 3-6 Bulan > 3-6 Months	> 6-12 Bulan > 6-12 Months	> 12 Bulan > 12 Months
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENT OF FINANCIAL POSITION							
A Aset Asset		5.493.461	325.907	796.010	171.712	57.575	4.142.257
1. Kas Cash		41.774	41.774	-	-	-	-
2. Penempatan pada Bank Indonesia Placement on Bank of Indonesia		181.334	153.970	-	-	-	27.364
3. Penempatan pada Bank Lain Placements on Other Banks		1.388.198	2.310	-	-	-	1.385.888
4. Surat Berharga Securities		487.562	-	-	-	-	487.562
5. Kredit yang Diberikan Loan							
a. Piutang murabahah (gross) Murabahah receivables (gross)		373.064	-	153.970	-	-	219.094
b. Piutang salam Salam		-	-	-	-	-	-
c. Piutang istishna' Istishna'		-	-	-	-	-	-
d. Piutang qardh Qardh Receivables		155.987	26.770	65.535	63.374	308	-
6. Pembiayaan Bagi Hasil Financing Profit Sharing							
a. Pembiayaan mudharabah Mudharabah Financing		-	-	-	-	-	-
b. Pembiayaan musyarakah Musyarakah Financing		2.757.960	-	570.006	108.338	57.267	2.022.349
7. Pembiayaan sewa Lease Financing		-	-	-	-	-	-
8. Aset Lainnya Other Asset		107.582	101.083	6.499	-	-	-
B Kewajiban Liabilities		5.387.024	5.152.308	161.499	54.983	18.234	-
1. Dana Pihak Ketiga Third Party Funds							
a. Giro Wadiah Wadiah Demand Deposits		1.798.469	1.798.469	-	-	-	-
b. Deposito Mudharabah Mudharabah Time Deposits		2.743.473	2.515.256	155.000	54.983	18.234	-
c. Tabungan Wadiah Wadiah Savings		259.225	259.225	-	-	-	-
d. Tabungan Mudharabah Mudharabah Savings		3.003	3.003	-	-	-	-
e. Lainnya Other		34.172	34.172	-	-	-	-
2. Kewajiban pada Bank Indonesia Liabilities on Bank of Indonesia		-	-	-	-	-	-
3. Kewajiban pada Bank Lain Liabilities on Other Banks		542.183	542.183	-	-	-	-
4. Surat Berharga yang Diterbitkan Securities Issued		-	-	-	-	-	-
5. Pembiayaan yang Diterima Borrowing		-	-	-	-	-	-
6. Kewajiban Lainnya Other Liabilities		6.499	-	6.499	-	-	-
C Laporan Kewajiban Komitmen dan Kontinjensi Commitment and Contingent Liability Report							
1. Kewajiban komitmen Commitment Report		52.578	52.578	-	-	-	-
2. Kewajiban kontinjensi Contingent Report		2.310	-	-	-	2.310	-
D Selisih Difference (A-B)		106.437	(4.826.401)	634.511	116.729	39.341	4.142.257



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2022 December 31, 2022						
	Saldo Balance	Jatuh Tempo Due Date				
		≤ 1 Bulan ≤ 1 Month	> 1-3 Bulan > 1-3 Months	> 3-6 Bulan > 3-6 Months	> 6-12 Bulan > 6-12 Months	> 12 Bulan > 12 Months
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
683.940	683.940	-	-	-	-	-
7.161.935	7.161.935	-	-	-	-	-
64.490	64.490	-	-	-	-	-
27.363.960	750.000	3.876	11.532	3.309	26.595.243	
6.200.326	293.889	365.262	419.681	797.455	4.324.039	
-	-	-	-	-	-	-
1.332	-	-	-	-	1.332	
724.945	93.433	6.454	259.785	9.475	355.798	
564.059	22.402	60.733	15.554	79.833	385.537	
9.842.858	448.429	611.646	467.560	1.079.731	7.235.492	
1.935	1.022	4	241	61	607	
16.625	9.931	2.031	2.939	1.036	688	
32.137	6.229	17.544	4.323	3.935	106	
52.993.615	39.568.860	3.128.866	1.998.583	1.772.212	6.525.094	
2.690.269	2.690.269	-	-	-	-	-
23.882.142	17.488.741	3.126.511	1.996.886	1.270.004	-	-
5.788.412	5.788.412	-	-	-	-	-
10.064.971	10.064.971	-	-	-	-	-
1.696.988	1.696.988	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.831.915	1.831.915	-	-	-	-	-
6.525.094	-	-	-	-	6.525.094	
500.000	-	-	-	500.000	-	-
13.824	7.564	2.355	1.697	2.208	-	-
7.768	4.634	420	2.714	-	-	-
74.625	51.836	2.356	4.400	3.183	12.850	
(367.210)	(30.039.389)	(2.078.860)	(821.291)	198.688	32.373.642	



2. Pengungkapan Profil Maturitas Valas

Disclosure of Maturity Profile for Foreign Currency

No	Pos-pos Posts	31 Desember 2023 December 31, 2023					
		Saldo Balance	Jatuh Tempo Due Date				
			≤ 1 Bulan ≤ 1 Month	> 1-3 Bulan > 1-3 Months	> 3-6 Bulan > 3-6 Months	> 6-12 Bulan > 6-12 Months	> 12 Bulan > 12 Months
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENT OF FINANCIAL POSITION							
A Aset Asset		5.493.461	325.907	796.010	171.712	57.575	4.142.257
1. Kas Cash		41.774	41.774	-	-	-	-
2. Penempatan pada Bank Indonesia Placement on Bank of Indonesia		181.334	153.970	-	-	-	27.364
3. Penempatan pada Bank Lain Placements on Other Banks		1.388.198	2.310	-	-	-	1.385.888
4. Surat Berharga Securities		487.562	-	-	-	-	487.562
5. Kredit yang Diberikan Loan							
a. Piutang murabahah (gross) Murabahah receivables (gross)		373.064	-	153.970	-	-	219.094
b. Piutang salam Salam		-	-	-	-	-	-
c. Piutang istishna' Istishna'		-	-	-	-	-	-
d. Piutang qardh Qardh Receivables		155.987	26.770	65.535	63.374	308	-
6. Pembiayaan Bagi Hasil Financing Profit Sharing							
a. Pembiayaan mudharabah Mudharabah Financing		-	-	-	-	-	-
b. Pembiayaan musyarakah Musyarakah Financing		2.757.960	-	570.006	108.338	57.267	2.022.349
7. Pembiayaan sewa Lease Financing		-	-	-	-	-	-
8. Aset Lainnya Other Asset		107.582	101.083	6.499	-	-	-
B Kewajiban Liabilities		5.387.024	5.152.308	161.499	54.983	18.234	-
1. Dana Pihak Ketiga Third Party Funds							
a. Giro wadiah wadiah demand deposits		1.798.469	1.798.469	-	-	-	-
b. Deposito mudharabah mudharabah time deposits		2.743.473	2.515.256	155.000	54.983	18.234	-
c. Tabungan wadiah Wadiah savings		259.225	259.225	-	-	-	-
d. Tabungan mudharabah Mudharabah savings		3.003	3.003	-	-	-	-
e. Lainnya Other		34.172	34.172	-	-	-	-
2. Kewajiban pada Bank Indonesia Liabilities on Bank of Indonesia		-	-	-	-	-	-
3. Kewajiban pada Bank Lain Liabilities on Other Banks		542.183	542.183	-	-	-	-
4. Surat Berharga yang Diterbitkan Securities Issued		-	-	-	-	-	-
5. Pembiayaan yang Diterima Borrowing		-	-	-	-	-	-
6. Kewajiban Lainnya Other Liabilities		6.499	-	6.499	-	-	-
C Laporan Kewajiban Komitmen dan Kontinjensi Commitment and Contingent Liability Report							
1. Kewajiban komitmen Commitment Report		52.578	52.578	-	-	-	-
2. Kewajiban kontinjensi Contingent Report		2.310	-	-	-	2.310	-
D Selisih Difference (A-B)		106.437	(4.826.401)	634.511	116.729	39.341	4.142.257



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2022 December 31, 2022						
	Saldo Balance	Jatuh Tempo Due Date				
		≤ 1 Bulan ≤ 1 Month	> 1-3 Bulan > 1-3 Months	> 3-6 Bulan > 3-6 Months	> 6-12 Bulan > 6-12 Months	> 12 Bulan > 12 Months
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	18.239	18.239	-	-	-	-
	31.372	31.372	-	-	-	-
	499.620	499.620	-	-	-	-
	496.252	-	-	-	-	496.252
	494.828	88.361	100.332	-	-	306.135
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	140.033	-	96.192	43.841	-	-
	-	-	-	-	-	-
	851.989	4.823	7.927	108.676	115.295	615.268
	-	-	-	-	-	-
	102.659	102.202	457	-	-	-
	95.310	95.310	-	-	-	-
	2.404.153	2.296.823	33.864	22.969	50.497	-
	479.949	479.949	-	-	-	-
	1.260.944	1.154.071	33.407	22.969	50.497	-
	268.500	268.500	-	-	-	-
	73	73	-	-	-	-
	10.868	10.868	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	383.362	383.362	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	457	-	457	-	-	-
	112.228	112.228	-	-	-	-
	10.795	6.616	1.844	-	2.335	-
	230.839	(1.552.206)	171.044	129.548	64.798	1.417.655



D. Risiko Operasional

Operational Risk

(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

No	Pendekatan yang Digunakan Approach Method	31 Desember 2023 December 31, 2023			31 Desember 2022 December 31, 2022		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) Gross Income (Average Last 3 years)	Beban Modal Capital Charge	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) Gross Income (Average Last 3 years)	Beban Modal Capital Charge	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar Basic Indicator Approach	1.291.146	193.672	2.420.899	1.044.510	156.677	1.958.456
Total		1.291.146	193.672	2.420.899	1.044.510	156.677	1.958.456



Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Function



Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

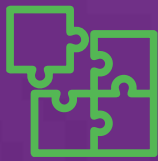


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan 2023
2023 Financial Statements

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	340	Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors	461	Sistem Manajemen Risiko Risk Management System	638
Komitmen dan Kebijakan Penerapan Implementation Commitment and Policy	342	Nominasi dan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Nomination and Remuneration of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, and the Board of Directors	470	Satuan Kerja Kepatuhan Compliance Unit	639
Peningkatan Kualitas Good Corporate Governance Tahun 2024 Improvement of Good Corporate Governance Quality in 2024	349	Rapat Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Meeting of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, and the Board of Directors	475	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Anti Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML & CFT)	644
Penilaian Penerapan Good Corporate Governance Assessment of Good Corporate Governance Implementation	351	Komite Audit Audit Committee	502	Perkara Penting Important Cases	646
Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies	357	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	515	Sanksi Administratif Administrative Sanction	648
Struktur dan Mekanisme Corporate Governance Corporate Governance Structure and Mechanism	375	Komite Pemantau Risiko Risk Oversight Committee	526	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Data and Information	648
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	378	Komite Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Committee	536	Kode Etik Perusahaan Corporate Code of Conduct	652
Informasi Pemegang Saham Utama/Pengendali Information on Majority/Controlling Shareholders	402	Komite di Bawah Direksi Committees under the Board of Directors	543	Kebijakan Antikorupsi/Fraud dan Sosialisasinya Anti-Corruption/Fraud Policy and Its Socialization	654
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	403	Komite Pengarah Teknologi Informasi Information Technology Steering Committee	544	Pengendalian Gratifikasi Gratuity Control	658
Dewan Komisaris Board of Commissioners	415	Asset & Liability Committee (ALCO) Asset & Liability Committee (ALCO)	549	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Perusahaan Transparency of the Company's Financial and Non-Financial Conditions	661
Komisaris Independen Independent Commissioners	431	Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	565	Pembelian Kembali Saham dan Obligasi Bank Muamalat Indonesia Buy Back of Bank Muamalat Indonesia Shares and Bonds	662
Direksi Board of Directors	435	Komite Sumber Daya Manusia Human Capital Committee	572	Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik Provision of Funds for Social and Political Activities	662
Hubungan Afiliasi antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Affiliated Relationships between Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Majority and/or Controlling Shareholders	454	Komite Kebijakan Pembiayaan Financing Policy Committee	577	Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Legal Lending Limit (LLL)	662
Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Policy on Disclosure of Information on Share Ownership	456	Komite Bisnis Business Committee	581	Kebijakan Perlindungan Nasabah Customers' Protection Policy	663
Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi Diversity Policy of the Board of Commissioners and Directors	457	Komite Pembiayaan Financing Committee	586	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	664
		Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	620	Kebijakan Pencegahan Insider Trading Insider Trading Prevention Policy	666
		Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Internal Audit Work Unit (IAU)	624	Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya Non-Halal Income and Its Use	666
		Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	631		
		Audit Eksternal External Audit	637		





Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Komitmen Bank Muamalat dalam menerapkan *Governance, Risk and Compliance* (GRC) selanjutnya diwujudkan dengan diperolehnya penghargaan di ajang *GRC & Performance Excellence Award 2023* pada bulan September 2023. Bank Muamalat berhasil memenangkan sejumlah kategori penghargaan di antaranya adalah *The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2023 (banking industries)*, Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan sebagai *The Best CEO For GRC Excellence 2023*, dan Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Hayunaji sebagai *The Best Corporate Secretary 2023*.

Bank Muamalat's commitment to implementing Governance, Risk and Compliance (GRC) is subsequently proven by the recognition received from the GRC & Performance Excellence Award 2023. Bank Muamalat successfully won a number of award categories, among others, as The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2023 (banking industries), as The Best CEO for GRC Excellence 2023 (President Director of Bank Muamalat, Indra Falatehan), and as The Best Corporate Secretary 2023 (Corporate Secretary of Bank Muamalat, Hayunaji).

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat Indonesia", "BMI", "Bank") sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Regulasi tersebut menegaskan, bank wajib menerapkan GCG dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. Antara lain, termasuk dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi serta Komisaris. Selain itu, BMI juga menyesuaikan penerapan GCG sesuai dengan prinsip syariah dan praktik terbaik di lingkungan industri.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles within PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat Indonesia", "BMI", "Bank") is in line with applicable laws and regulations. Among others, is the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks.

The regulation affirms that banks are obligated to implement GCG in performing their business activities. This include the implementation of duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors as well as the Board of Commissioners. In addition, BMI also conforms its GCG implementation in accordance with sharia principles and best practices within the industry.



Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Function



Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan 2023
2023 Financial Statements



Bank meyakini, penerapan prinsip-prinsip GCG yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Bank Muamalat Indonesia, sekaligus memberikan nilai tambah kepada Bank dan pemegang saham. Karena itu, Bank senantiasa memutakhirkan dan menyesuaikan penerapan prinsip GCG sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perinsip syariah, dan dinamika di industri.

Komitmen Bank Muamalat dalam menerapkan *Governance, Risk and Compliance* (GRC) selanjutnya diwujudkan dengan diperolehnya penghargaan di ajang *GRC & Performance Excellence Award 2023* pada bulan September 2023. Bank Muamalat berhasil memenangkan sejumlah kategori penghargaan di antaranya adalah *The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2023 (banking industries)*, Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan sebagai *The Best CEO For GRC Excellence 2023*, dan Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Hayunaji sebagai *The Best Corporate Secretary 2023*.

The Bank believes, consistent implementation of GCG principles will enhance the trust of the stakeholders towards Bank Muamalat Indonesia, at the same time provides added value to the Bank and the shareholders. For this reason, the Bank always updates and adjusts the implementation of GCG principles in accordance with development in prevailing laws and regulations, sharia principles and dynamics in the industry.

Bank Muamalat's commitment in implementing Governance, Risk and Compliance (GRC) is subsequently proven by the recognition received from the GRC & Performance Excellence Award 2023. Bank Muamalat successfully won a number of award categories, among others, as The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2023 (banking industries), as The Best CEO for GRC Excellence 2023 (President Director of Bank Muamalat, Indra Falatehan), and as The Best Corporate Secretary 2023 (Corporate Secretary of Bank Muamalat, Hayunaji).



Komitmen dan Kebijakan Penerapan

Implementation Commitment and Policy

Penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Bank Muamalat Indonesia diuraikan melalui tabel berikut ini:

Implementation of GCG principles within Bank Muamalat Indonesia is described in table below:

Prinsip Principle	Implementasi di Bank Muamalat Indonesia	Implementation at Bank Muamalat Indonesia
Transparansi "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (hak/ informasi) kepada yang berhak menerimanya" (QS. An-Nisa: 58) Transparency "Indeed, Allah commands you to convey the mandate (rights/ information) to those who are entitled to receive it" (QS. An-Nisa: 58)	Keterbukaan atau transparansi mengandung unsur pengungkapan (<i>disclosure</i>) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat. Bank dan jajaran manajemen selalu berupaya menjamin adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi materiil dan relevan. Begitu juga dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Seluruh Informasi mudah diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Kebijakan BMI dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang berhak memperoleh informasi. Keterbukaan tidak hanya mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting dalam proses pengambilan keputusan sesuai ketentuan syariah, tanpa mengurangi kewajiban Bank memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.	Openness, or transparency, contains elements of disclosure and the provision of information in a timely, adequate, clear, accurate, comparable and easily accessible manner for stakeholders and the public. The Bank and management always strive to ensure transparency in conveying material and relevant information. Likewise in carrying out the decision-making process. All information is easily accessible by stakeholders according to their rights. BMI policies are made in writing and communicated to stakeholders who are entitled to obtain information. Disclosure not only discloses information required by laws and regulations, but is also important in the decision-making process according to sharia provisions, without prejudice to the Bank's obligation to comply with organizational confidentiality provisions in accordance with applicable laws and regulations.
Akuntabilitas "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama (orang-orang yang berilmu pengetahuan)" (QS Fathir: 28) "Adakah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan yang tidak berilmu pengetahuan" (QS Az-Zumar: 9) "Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu lakukan" (QS Al-Mu'adilah: 11) Accountability "Indeed, those who fear Allah among His servants are only scholars (those who are knowledgeable)" (QS Fathir: 28) "Are there people who are knowledgeable and those who are not knowledgeable" (QS Az-Zumar: 9) "Allah elevates those who believe among you and those who have knowledge by degrees. Allah is All-Knowing of what you do" (QS Al-Mu'adilah: 11)	Akuntabilitas merupakan bagian dari kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif. Manajemen Bank Muamalat Indonesia mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, bisnis Bank Muamalat Indonesia harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan para pemangku kepentingan.	Accountability is part of the clarity of functions within the organization and how to account for them so that their management can run effectively. The management of Bank Muamalat Indonesia is accountable for its performance in a transparent and fair manner. For this reason, Bank Muamalat Indonesia's business must be managed properly, measurably and in accordance with the interests of business actors while taking into account the interests of stakeholders.



Prinsip Principle	Implementasi di Bank Muamalat Indonesia	Implementation at Bank Muamalat Indonesia
Responsibilitas "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya" (QS Al-Muddatsir: 38) Responsibility "Each person is responsible for what he has done" (QS Al-Muddatsir: 38)	Pertanggungjawaban atau responsibilitas merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik/<i>good corporate citizen</i>. Jajaran manajemen BMI selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip pengelolaan bank yang sehat dalam setiap tindakannya, dengan tetap menyadari segala risiko dan implikasi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tindakannya. Bank dan jajaran manajemen Bank harus selalu mengingat kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.	Responsibility is a form of compliance toward legislation and internal regulations as well as responsibility towards society and the environment. Responsibility is required to ensure long-term sustainability of the business and recognition as a good corporate citizen. The management of BMI always adheres to the prudence principles in all actions, along with the conformity with applicable legislation and the principles of sound bank management, while taking into account possible risks and negative implications caused by its actions. The Bank and its management must show consideration for the interests of all stakeholders in carrying out its functions, determining policies, or making decisions.
Profesional "Barang siapa meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka" (HR Abu Daud) "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara profesional (itqon)" (HR Abu Ya'la dan dishahihkan oleh Albany) Professional "Whoever imitates a people, then he is among them" (HR Abu Daud) "Indeed, Allah loves someone when doing something work, done professionally (itqon)" (HR Abu Ya'la and authenticated by Albany)	Bank mendefinisikan profesional sebagai kompeten, mampu bertindak objektif, bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak mana pun (independen), terhindar dari benturan kepentingan serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BMI. Bank dan seluruh jajaran manajemen menjamin bahwa Bank Muamalat Indonesia dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan dapat menghindari pengaruh/tekanan dari pihak mana pun (independen) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip profesional dan kemandirian dilaksanakan oleh BMI.	The Bank defines a professional as competent, capable of acting objectively, free from influence/pressure from any party (independent), avoiding conflicts of interest and having a high commitment to developing BMI. The Bank and all levels of management guarantee that Bank Muamalat Indonesia is managed professionally without any conflict of interest and can avoid influence/pressure from any party (independent) that is not in accordance with applicable laws and regulations and sound corporate principles. The implementation of professional principles and independence is carried out by BMI.
Kewajaran dan Kesetaraan "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan" (QS An-Nahl: 90) "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu..." (QS An-Nisa:135) Fairness and Equality "Indeed Allah commands you to act justly and do good" (QS An-Nahl: 90) "O you who believe, be a person who is truly upholding justice, being a witness for Allah even if it is against yourself or your parents and relatives..." (QS An-Nisa: 135)	Kewajaran dan kesetaraan merupakan nilai dari perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai proporsinya dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, sehingga senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran serta kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan antara lain: 1. BMI menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan (<i>equal treatment</i>) di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. BMI menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.	Fairness and equality are the values of fair treatment and equal opportunity in proportion to fulfilling the rights of stakeholders based on agreements and applicable laws and regulations. Equality contains elements of equality of treatment and opportunity, so that it always pays attention to the interests of shareholders, customers and other stakeholders based on the principles of fairness and equality of each of the parties concerned, including: 1. BMI applies the principle of fairness which is implemented as fairness and equality (equal treatment) in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and applicable laws and regulations. 2. BMI guarantees that each stakeholder will receive equal treatment without discrimination in accordance with existing laws and regulations.



Sementara kerangka kebijakan penerapan GCG Bank Muamalat Indonesia seperti diuraikan sebagai berikut:

1. Komitmen Tata Kelola

Tahapan pertama dalam penerapan GCG ialah membangun komitmen dari seluruh jajaran Bank untuk menjadi bagian dalam implementasi tata kelola perusahaan. Bentuk implementasi komitmen diawali dengan membentuk landasan yang menjadi dasar pelaksanaan komitmen implementasi seperti Anggaran Dasar Perusahaan, Visi dan Misi Perusahaan, serta *Code of Conduct*.

2. Struktur Tata Kelola

Bank berkomitmen dalam melengkapi dan menempatkan sumber daya yang tepat pada struktur perusahaan dan menyempurnakan berbagai infrastruktur pendukung untuk memastikan *governance process* dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Mekanisme Tata Kelola

Prinsip-prinsip GCG dibuat melekat dalam kebijakan, pedoman, prosedur kerja, dan aturan internal lainnya guna meyakinkan terlaksananya prinsip-prinsip tersebut dan terpenuhinya *governance process*.

4. Sosialisasi dan Evaluasi

Guna memastikan seluruh jajaran Perseroan dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang telah diinternalisasi dalam sistem perusahaan maka tahapan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran Perseroan. Pelaksanaan sosialisasi ditujukan agar seluruh jajaran perusahaan dapat memahami dan menerapkan GCG pada setiap implementasi tugas dan tanggung jawabnya. Adapun evaluasi dilakukan untuk mengontrol sejauh mana implementasi telah dilakukan dan guna membenahi kelemahan untuk perbaikan penerapan GCG selanjutnya.

Meanwhile, the GCG implementation policy framework of Bank Muamalat Indonesia is as follows:

1. Governance Commitment

The first stage in implementing GCG is to build commitment from all levels of the Bank to be part of the implementation of corporate governance. The form of commitment implementation begins with forming a foundation that forms the basis for implementing implementation commitments such as the Company's Articles of Association, the Company's Vision and Mission, and the Code of Conduct.

2. Governance Structure

The Bank is committed to equipping and placing the right resources in the corporate structure and improving various supporting infrastructures to ensure the governance process can run properly.

3. Governance Mechanism

GCG principles are embedded in policies, guidelines, work procedures, and other internal rules to ensure the implementation of these principles and the fulfillment of the governance process.

4. Socialization and Evaluation

To ensure all levels of the Company can apply the principles of governance that have been internalized in the company system, the next stage is to conduct socialization at all levels of the Company. The implementation of socialization is intended so that all levels of the Company can understand and apply GCG in every implementation of their duties and responsibilities. The evaluation is carried out to control the extent to which the implementation has been carried out and to fix weaknesses for further improvement of GCG implementation.

DASAR PENERAPAN GCG

Penerapan prinsip GCG Bank Muamalat mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, yang antara lain mencakup:

BASIS OF GCG IMPLEMENTATION

Implementation of Bank Muamalat's GCG principles refers to various laws and regulations, among which include the following:

Jenis Peraturan Type of Regulation	Peraturan	Regulation
Undang-Undang Law	- Undang Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan - Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. - Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.	- Law No. 8 of Year 1995 on Capital Markets as amended by Law No. 4 of Year 2023 regarding Development and Strengthening of the Financial Sector. - Law No. 21 of Year 2008 on Sharia Banking as amended by Law No. 4 of Year 2023 regarding Development and Strengthening of the Financial Sector. - Law No. 40 of Year 2007 on Limited Liability Companies as amended by Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) No. 2 of Year 2022 regarding Job Creation.



Jenis Peraturan Type of Regulation	Peraturan	Regulation
Peraturan Bank Indonesia Bank Indonesia Regulation	Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 on the Implementation of <i>Good Corporate Governance</i> for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
Surat Edaran Bank Indonesia Bank Indonesia Circular Letter	- Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. - Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/50/DPbS No. 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/50/DPbS.	- Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS dated April 30, 2010 regarding the Implementation of <i>Good Corporate Governance</i> for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. - Bank Indonesia Circular Letter No. 15/50/DPbS No. 11/9/DPbS dated April 7, 2009 regarding Islamic Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Circular Letter No. 15/50/DPbS.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK) Regulation	- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. - Peraturan OJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 2/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan kepentingan. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.	- Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks. - OJK Regulation No. 16/POJK.03/2022 regarding Sharia Commercial Banks. - Financial Services Authority Regulation 2/POJK.03/2022 concerning Asset Quality Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. - Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. - Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.04/2015 regarding Website for Issuers or Public Companies. - Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 regarding Implementation of Governance Guidelines for Public Companies. - Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies. - Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Changes in Business Activities. - Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions. - Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.03/2021 regarding Amendment of Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.03/2018 regarding Revaluation of Main Parties in Financial Services Institutions. - Financial Services Authority Regulation No. 27/POJK.03/2016 regarding Capability and Conformity Assessment for Main Parties of Financial Services Institutions. - Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.04/2016 regarding Annual Report of Issuers or Public Companies. - Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 regarding Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies. - Financial Services Authority Regulation No. 65/POJK.03/2016 regarding Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. - Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017 regarding Implementation of Compliance Function for Commercial Banks.



Jenis Peraturan Type of Regulation	Peraturan	Regulation
	- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. - Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank.	- Financial Services Authority Regulation No. 59/POJK.03/2017 regarding Governance Implementation in Providing Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. - Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies. - OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies. - Financial Services Authority Regulation No. 37/POJK.03/2019 regarding Transparency and Publication of Bank Report. - Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.04/2021 regarding Implementation of Activities in Capital Market. - Financial Services Authority Regulation No. 5/POJK.03/2016 regarding Business Plan of Banks. - Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.03/2019 regarding Implementation of Internal Audit Function in Banks. - Financial Services Authority Regulation No. 39/POJK.03/2019 regarding Implementation of Anti-Fraud Strategy for Commercial Banks. - Financial Services Authority Regulation No. 26/POJK.03/2021 regarding Maximum Limit for Fund Distribution and Large Fund Distribution for Sharia Commercial Banks. - Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2022 regarding Implementation of Information Technology by Banks.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Circular Letter of the Financial Services Authority (OJK)	- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	- Circular Letter of the Financial Services Authority No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Health Level Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. - Circular Letter of the Financial Services Authority No. 32/SEOJK.04/2015 on Guidelines for the Governance of Public Companies. - Circular Letter of the Financial Services Authority No. 16/SEOJK.04/2021 regarding the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies. - Circular Letter of the Financial Services Authority No. 10/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Reports of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
Lain-lain Others	- Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. - Pedoman Umum <i>Good Governance</i> Bisnis Syariah - Board Manual PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. - Kebijakan <i>Good Corporate Governance</i> PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. - Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pengaduan Nasabah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. - Kode Etik Bankir. - Kode Etik PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. - Ittifaq Muamalat.	- Articles of Association of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. - General Guidelines for Good Governance of Sharia Business - Board Manual of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. - Good Corporate Governance Policy of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. - Guidelines and Procedures for Handling Customer Complaint Reporting PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. - Banker's Code of Ethics. - Code of Ethics of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. - Ittifaq Muamalat.



TUJUAN PENERAPAN GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG di Bank Muamalat bertujuan untuk:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Organ Perusahaan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah), karyawan, nasabah, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan agar seluruh aktivitas Bank dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Meningkatkan citra (*image*) Bank Muamalat Indonesia menjadi semakin baik di tingkat nasional maupun regional.
3. Meningkatkan kinerja Bank Muamalat melalui program efisiensi perusahaan yang tercipta dari penerapan budaya GCG di setiap kegiatan operasional.
4. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank Muamalat.
6. Mempersiapkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan berkelanjutan Bank Muamalat.

REALISASI PENERAPAN GCG TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, Bank Muamalat Indonesia telah melakukan sejumlah inisiatif perbaikan, yang di antaranya adalah:

1. Memperoleh sertifikat ISO 37001:2016 atas komitmennya dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang berlaku selama periode 20 Desember 2023 hingga 28 November 2026. Sertifikat ini merupakan standar internasional yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan pencegahan praktik penyuapan dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk membangun manajemen bisnis yang berintegritas yang didasari oleh nilai-nilai etika dan tata kelola yang profesional.
2. Menyempurnakan ketentuan Anggaran Dasar terkait penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota BOC dan BOD pada RUPS Tahunan Bank tanggal 11 Mei 2023.
3. Memproses permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris hingga yang bersangkutan telah mendapatkan keputusan efektif dari OJK pada tanggal 16 Januari 2023.
4. Memproses permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas 2 (dua) orang anggota Direksi hingga yang bersangkutan telah mendapatkan keputusan efektif dari OJK pada tanggal 18 April 2023.

PURPOSE OF IMPLEMENTING GCG

Implementation of GCG principles in Bank Muamalat is carried out with following objectives:

1. Controlling and directing the relationship between Company Organs (Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board), employees, customers, business partners, as well as the community and the environment so that all Bank activities can be carried out properly in accordance with GCG principles.
2. Improve the image of Bank Muamalat Indonesia to be better at the national and regional levels.
3. Improve the performance of Bank Muamalat through corporate efficiency programs created from the implementation of GCG culture in every operational activity.
4. Increase accountability to stakeholders.
5. Preventing irregularities in the management of Bank Muamalat.
6. Preparing a strong foundation for the sustainable growth of Bank Muamalat.

REALIZATION OF GCG IMPLEMENTATION IN 2023

Throughout the year 2023, Bank Muamalat Indonesia carried out a number of improvement initiatives, among others are as follows:

1. Received ISO 37001:2016 certificate for its commitment to implement Anti-Bribery Management System (SMAP) effective as of 20 December 2023 until 28 November 2026. This certification is an international standard used as control and prevention instrument of bribery practices in an organization which aims to establish business management with integrity based on ethical values and professional governance.
2. Amended provisions of the Articles of Association related to determining the salaries or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the Bank's Annual GMS on 11 May 2023.
3. Processed the request for Fit and Proper Assessment for 2 (two) members of the Board of Commissioners until the concerned members received the effective decision from OJK on 16 January 2023.
4. Processed the request for Fit and Proper Assessment for 2 (two) members of the Board of Directors until the concerned members received the effective decision from OJK on 18 April 2023.



5. Melakukan pengkinian Komite-Komite Tingkat Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. Membentuk Komite Bisnis Tingkat Direksi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam penyelenggaraan bisnis Bank terutama pengembangan produk Bank.
7. Membentuk Komite Kebijakan Pembiayaan yang terpisah dengan Komite Manajemen Risiko dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam penyusunan kebijakan pembiayaan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.
8. Mengikuti pelaksanaan *Joint Audit* dengan OJK dan PPATK dalam rangka pengawasan dan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
9. Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi wajib seperti Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri, Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) dan Pemeliharaan Kompetensi SPPUR kepada pejabat dan pegawai terkait secara berkala.
10. Membangun sosialisasi budaya kepatuhan (*compliance culture*), budaya risiko, budaya anti-fraud dan kode etik Bank Muamalat di lingkungan Bank melalui email blast dan juga sistem Muamalat Human Power (MHP).
11. Mewajibkan setiap karyawan Bank Muamalat untuk membuat persetujuan secara elektronik surat pernyataan kepatuhan, pelaksanaan GCG dan deklarasi *anti-fraud* secara berkala.
12. Memonitor penerbitan produk dan aktivitas Bank oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Compliance Syariah agar tetap sesuai dengan aspek syariah termasuk melakukan uji petik dalam memastikan penerapan kepatuhan syariah di unit bisnis Bank.
5. Updated the Committees at the Board of Commissioners Level in accordance with the Republic of Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks
6. Established the Business Committee at the Board of Directors Level to support the implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities in carrying out the Bank's business, especially the development of Bank products.
7. Established the Financing Policy Committee that is separate from the Risk Management Committee to support the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors in preparing the Bank's financing policy, especially related to the formulation of the principle of prudence in financing.
8. Participated in the implementation of a Joint Audit with OJK and PPATK to supervision and prevention as well as eradication of criminal acts of money laundering and terrorism financing.
9. Organized mandatory training and certification such as implementing Treasury Certification, Competency Based Training Certificate (PBK), Payment System and Rupiah Currency Management Certificate (SPPUR) and Maintaining SPPUR Competency for relevant officials and employees on a regular basis.
10. Established the socialization of compliance culture, risk culture, anti-fraud culture and code of ethics of Bank Muamalat within the Bank through email blasts and also the Muamalat Human Power (MHP) system.
11. Set the requirement for every employee of Bank Muamalat to electronically agree to a statement of compliance, GCG implementation and anti-fraud declarations on periodic basis.
12. Monitored the issuance of Bank products and activities by the Sharia Supervisory Board (DPS) and Sharia Compliance so that they remain in accordance with sharia aspects, including carrying out practical tests to ensure the implementation of sharia compliance in the Bank's business units.



Peningkatan Kualitas *Good Corporate Governance* Tahun 2024

Improvement of Good Corporate Governance Quality in 2024

Bank Muamalat berkomitmen untuk selalu meningkatkan praktik penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik agar mampu meningkatkan daya saing Bank. Penguatan daya saing Bank dilakukan melalui peningkatan praktik tata kelola perusahaan yang terintegrasi sehingga dapat memacu pertumbuhan dan profit yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Action plan untuk perbaikan yang berkelanjutan atas implementasi GCG Bank Muamalat akan didasarkan pada hasil assessment GCG yang dilakukan secara periodik. Adapun *action plan* pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengkinian atas Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan ketentuan pada Board of Manual yang disesuaikan dengan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum (POJK Tata Kelola), POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (POJK Tata Kelola Syariah), dan *best practices*.
- b. *Relaunching* aplikasi Muamalat *Report Reminder* guna meningkatkan kualitas data pelaporan Bank dan memitigasi terjadinya Risiko Kepatuhan dengan menciptakan sistem reminder laporan yang terpusat dan melakukan pemberian reminder berupa notifikasi yang diterima lewat *e-mail* kepada PIC secara periodik.
- c. Mendukung seluruh proses aksi korporasi Bank pada tahun 2024 dan memastikan jalannya aksi korporasi Bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Muamalat is committed to always improve the practice of implementing Good Corporate Governance in order to improve the Bank's competitiveness. Strengthening the Bank's competitiveness is done through improving the practice of implementing integrated corporate governance so that it boosts sustainable growth and profit by continually paying attention to the interests of the shareholders and stakeholders.

The action plan for continued improvement of Bank Muamalat's GCG implementation will be based on GCG assessment results carried out periodically. The action plan for the year 2024 is as follows:

- a. Update the Corporate Governance Policy and provisions of the Board's Manual aligned with POJK No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks (POJK Governance), POJK Number 2 of 2024 concerning Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units (POJK Sharia Governance) and best practices.
- b. Relaunching the Muamalat Report Reminder application in order to improve the quality of the Bank's reporting data and mitigate the occurrence of Compliance Risks by creating a centralized report reminder system and provide reminders in the form of notifications received through email to the person-in-charge (PIC) on periodic basis.
- c. Support all of the Bank's corporate action processes in 2024 and ensure that the Bank's corporate actions are carried out in accordance with sharia principles and the provisions of applicable laws and regulations.



STANDAR KUALITAS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan tata kelola perusahaan pada Bank Muamalat melingkupi seluruh aktivitas kerja di semua organ Perseroan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite Tingkat Dewan Komisaris, Komite-Komite Tingkat Direksi, dan seluruh karyawan Bank, yang berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Selain itu, Bank Muamalat juga menggali praktik terbaik di industri guna memaksimalkan kualitas penerapan GCG.

Dewan Komisaris dalam penerapan GCG menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan pengelolaan Bank dilakukan oleh Direksi sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk dalam memberikan saran/pendapat atas tindakan/kegiatan strategis yang akan dan telah dilaksanakan oleh Direksi.

Adapun, Direksi melaksanakan fungsi kepengurusannya secara amanah dan profesional serta menghindari terjadinya segala potensi benturan kepentingan. Demikian juga dengan Komite-Komite Tingkat Dewan Komisaris dan Komite-Komite Tingkat Direksi serta organ-organ GCG lainnya yang saling bersinergi untuk menciptakan seluruh kegiatan operasional Bank berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

QUALITY STANDARD OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The implementation of corporate governance at Bank Muamalat covers all work activities in all company organs, including the General Meeting of Shareholders, Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, Board of Directors, Board of Commissioners Level Committees, Board of Directors Level Committees, and all Bank employees. All of them are guided by Bank Indonesia Regulations on the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and Financial Services Authority Regulations on the Implementation of Public Company Governance Guidelines. In addition, Bank Muamalat also explores best practices in the industry to maximize the quality of GCG implementation.

The Board of Commissioners, in implementing GCG carries out a supervisory function to ensure that the Board of Directors carries out the management of the Bank in accordance with applicable laws and regulations, including in providing advice/opinions on strategic actions/activities that will and have been carried out by the Board of Directors.

Meanwhile, the Board of Directors carries out its management function in a trustworthy and professional manner and avoids any potential conflict of interest. Likewise, the Board of Commissioners Level Committees, Board of Directors Level Committees, and other GCG organs synergize to create all operational activities of the Bank per applicable laws and regulations.



Penilaian Penerapan *Good Corporate Governance*

Assessment of Good Corporate Governance Implementation

Penilaian penerapan tata kelola perusahaan bertujuan untuk mengukur kedalaman implementasi praktik GCG dan mendapatkan umpan balik perbaikan penerapan GCG selanjutnya. Dari tahun ke tahun, Bank Muamalat melakukan penilaian penerapan GCG secara berkala untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG secara mandiri (*self-assessment*).

Pelaksanaan *self-assessment* mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 Tentang Bank Umum Syariah, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

The assessment of the GCG implementation aims to measure the depth of GCG practices implementation and to obtain feedback for further improvement of GCG implementation. From year to year, Bank Muamalat conducts periodic GCG implementation assessments to improve the quality of GCG implementation independently (*self-assessment*).

The implementation of *self-assessment* refers to Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009, concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units, Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.03/2014 concerning Assessment of Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.03/2022 Concerning Sharia Commercial Banks and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Health Level Assessment of Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units.

PROSEDUR PENILAIAN

Terdapat 3 (tiga) aspek GCG yang dinilai secara terstruktur dan menyeluruh dalam penerapan GCG, yaitu:

- 1. Struktur Tata Kelola**
Pada penilaian ini, Bank Muamalat mengukur kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dimiliki secara menyeluruh, guna menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan Bank.
- 2. Proses Tata Kelola**
Penilaian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas proses implementasi tata kelola yang berjalan.
- 3. Hasil Tata Kelola**
Penilaian tata kelola dilakukan Bank Muamalat guna menilai kualitas hasil tata kelola perusahaan serta meninjau struktur dan proses tata kelola yang dilakukan guna menghasilkan penerapan tata kelola yang berkualitas sesuai harapan seluruh pemangku kepentingan Bank.

ASSESSMENT PROCEDURE

There are 3 (three) GCG aspects to be assessed structurally and thoroughly in GCG implementation, namely as follows:

- 1. Governance Structure**
In this assessment, Bank Muamalat measures the adequacy of its overall governance structure and infrastructure to produce results in accordance with the expectations of all Bank stakeholders.
- 2. Governance Process**
This assessment aims to measure the effectiveness of the ongoing governance implementation process.
- 3. Governance Results**
Bank Muamalat carries out governance assessments to assess the quality of corporate governance results and review the governance structure and processes carried out to produce quality governance implementation according to the expectations of all Bank stakeholders.



Penilaian penerapan GCG Bank Muamalat dilaksanakan secara mandiri atau *self-assessment* secara berkala dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan materi penilaian yang dilakukan dengan mengacu kepada format kertas kerja atau kuisioner yang ditetapkan oleh OJK.
2. Pendistribusian kertas kerja/kuisioner *self-assessment* GCG kepada organ perusahaan dan fungsi terkait.
3. Berdasarkan *feedback* yang diterima dari organ perusahaan dan fungsi terkait, Satuan Kerja Kepatuhan Bank melakukan *review* dan evaluasi atas pengisian kertas kerja/kuisioner. Dalam proses tersebut, dimungkinkan untuk meminta penjelasan atau klarifikasi dari unit terkait atas hasil pengisian kuisioner yang telah disusun.
4. Satuan Kerja Kepatuhan membuat analisis dari hasil pengisian kuisioner dan menuangkannya dalam Laporan *Self-Assessment* GCG.
5. Meminta *review* dan persetujuan kepada jajaran manajemen atas Laporan *Self-Assessment* GCG yang telah disusun.
6. Mengirimkan hasil Laporan *Self-Assessment* GCG yang telah disetujui manajemen Perseroan kepada OJK sesuai dengan batas waktu yang berlaku.
7. Menginformasikan kepada Dewan Komisaris Bank atas hasil pelaksanaan penilaian *self-assessment* GCG, antara lain melalui rapat Komite Tata kelola Perusahaan.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN

Bank Muamalat menggunakan 11 (sebelas) kriteria yang mengacu pada aturan Bank Indonesia, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
6. Penanganan benturan kepentingan.
7. Penerapan fungsi kepatuhan bank.
8. Penerapan fungsi audit internal.
9. Penerapan fungsi audit eksternal.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal.

Assessment of Bank Muamalat's GCG implementation is carried out independently or *self-assessment* on a regular basis with the following stages:

1. Preparation of assessment material carried out by referring to the format of working papers or questionnaires set by OJK.
2. Distribution of GCG *self-assessment* working papers / questionnaires to company organs and related functions.
3. Based on feedback received from corporate organs and related functions, the Bank's Compliance Working Unit reviews and evaluates the completion of the working papers/quizzes. In the process, it is possible to request explanations or clarifications from the relevant units on the results of filling out the questionnaires that have been prepared.
4. The Compliance Working Unit analyzes the results of the questionnaire filling and presents them in the GCG *Self-Assessment* Report.
5. Requesting review and approval from the management on the GCG *Self-Assessment* Report that has been prepared.
6. Sending the GCG *Self-Assessment* Report results that have been approved by the Company's management to OJK in accordance with the applicable time limit.
7. Informing the Bank's Board of Commissioners of the results of the GCG *self-assessment*, among others through the Corporate Governance Committee meeting.

CRITERIA APPLIED

Bank Muamalat applies 11 (eleven) criteria that refer to the rules of Bank Indonesia, namely:

1. Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
2. Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors.
3. Completeness and implementation of the Committee's duties.
4. Implementation of the duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board.
5. Implementation of sharia principles in fund-raising and fund-channeling activities and services.
6. Handling of conflict of interest.
7. Implementation of the bank's compliance function.
8. Implementation of internal audit function.
9. Implementation of external audit function.
10. Maximum Limit of Fund Disbursement (BMPD).
11. Transparency of financial and non-financial conditions, reports on the implementation of *Good Corporate Governance* and internal reporting.



PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Penilaian dilakukan oleh internal Bank Muamalat dengan metode penilaian *self-assessment*. Adapun pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).

HASIL PENILAIAN

Pada tahun 2023, Bank Muamalat Indonesia melalui Satuan Kerja Kepatuhan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) pelaksanaan GCG dengan hasil penilaian pada peringkat 2 (dua) yang mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai, maka secara umum, kelemahan penerapan prinsip GCG yang ada tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Analisis

Berdasarkan kertas kerja *self-assessment* tahun 2023 secara komprehensif dan terstruktur yang mencakup *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, dapat diidentifikasi mengenai permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (*root caused*) dan kekuatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

PARTIES CONDUCTING THE ASSESSMENT

The assessment is carried out internally by Bank Muamalat by self-assessment method. Its implementation is carried out by the Compliance Work Unit (SKK).

ASSESSMENT RESULTS

In the year 2023, Bank Muamalat Indonesia, through the Compliance Work Unit performed self-assessment on GCG implementation with assessment result rating of 2 (two) which reflects the Bank's Good Corporate Governance was generally well implemented by the management. This is manifested from the adequate implementation of Good Corporate Governance principles,, thus in general, weaknesses in the implementation of existing GCG principles were insignificant and can be resolved with normal actions by the Bank's management.

Analysis

Based on the 2023 self-assessment working paper in a comprehensive and structured manner that includes governance structure, governance process, and governance outcome, problems can be identified in the form of weaknesses and their causes (root causes) and the strengths of the implementation of Good Corporate Governance as follows:

No.	Uraian	Description
1	Governance Structure	
	Struktur organisasi Bank Muamalat telah memadai dan terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) telah sesuai dengan ketentuan. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS memperhatikan faktor integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Seluruh anggota DPS dan Direksi telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Dari 4 (empat) jumlah anggota Dewan Komisaris, terdapat 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari OJK.	Bank Muamalat already has established an adequate organizational structure of the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board (DPS), Internal Audit Unit, Risk Management Unit, and Compliance Unit. The number and composition of members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and DPS are in accordance with the provisions. The appointment of members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board has gone through the assessment stage by the Nomination and Remuneration Committee by taking into account the integrity, competence, and financial reputation factors, thus members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board have adequate and relevant competence to their positions to carry out their duties and responsibilities. All members of the Sharia Supervisory Board have passed the Fit and Proper Test (FPT) by FSA.
	Dewan Komisaris, Direksi dan DPS telah memiliki pedoman kerja yang mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk Audit Committee, Risk Oversight Committee (ROC), Good Corporate Governance (GCG) Committee dan Nomination and Remuneration Committee (NRC). Direksi telah membentuk 7 (tujuh) komite yaitu Risk Management Committee, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Pembiayaan, Komite Bisnis, IT Steering Committee, ALCO, dan Human Capital Committee guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.	In implementing their duties and responsibilities, the Board of Commissioners, Board of Directors and, Sharia Supervisory Board have set work guidelines that regulate the implementation of duties and responsibilities of each organ. In order to assist the implementation of supervisory duties, the Board of Commissioners has established the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee and Corporate Governance Committee. The Board of Directors has also established 4 (four) committees, namely the Risk Management Committee, IT Steering Committee, Asset Liability Committee (ALCO), and the Human Capital Committee to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors.



No.	Uraian	Description
	Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Kepatuhan Bank Muamalat dibentuk secara independen terhadap satuan kerja operasional Bank. Infrastruktur tata kelola Bank berupa kebijakan, pedoman, dan prosedur Bank, tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah memadai dan mendukung kegiatan usaha Bank serta telah dikinikan secara berkala. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia, Bank juga telah menyelenggarakan <i>training/workshop</i> , sosialisasi dan sertifikasi yang bekerjasama dengan lembaga berwenang taerkait.	The Internal Audit Work Unit, Risk Management Unit and Compliance Unit of Bank Muamalat were established independently of the Bank's operational work units. The Bank's governance infrastructure in the form of Bank policies and procedures, the main tasks and functions of each organizational structure is adequate and supports the Bank's business activities and has been updated regularly. In order to improve the competence of Human Resources, the Bank has also organized training/workshops, socialization and certification.
2	Governance Process	
	Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan antara lain memberikan arahan kepada Direksi, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategik Bank dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Bank. Dewan Komisaris telah menyesuaikan keanggotaan Komite level Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum. Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris telah menyampaikan rekomendasi proses perbaikan kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Komite level Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sesuai dengan ketentuan. Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat bersama Direksi guna melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris kepada Direksi. Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disusun dan melakukan pengawasan terhadap realisasi RBB serta menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada OJK secara periodik. Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memastikan pemenuhan aspek syariah, DPS melakukan uji petik dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap penerapan aspek syariah di unit bisnis secara sampling antara lain terkait <i>treasury</i>, <i>trade finance</i> dan <i>income smoothing</i>. DPS telah menyelenggarakan rapat rutin bulanan guna membahas dan memberikan opini terhadap usulan produk, aktivitas dan program sesuai dengan prinsip syariah. DPS telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Bank dan menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada OJK dan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) secara semesteran. Direksi bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, GCG dan aspek syariah. Direksi telah menyusun RBB dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Proses pengambilan keputusan Direksi antara lain dilakukan melalui rapat rutin Direksi yang diselenggarakan secara mingguan. Dalam rangka merealisasikan target bisnis dalam RBB dan memperbaiki kinerja Bank, Direksi telah melakukan upaya-upaya antara lain sebagai berikut: - Melakukan perbaikan-perbaikan atas tata kelola pembiayaan antara lain menyempurnakan komposisi dan limit kewenangan memutus pembiayaan, menyusun dan menginikan ketentuan internal, meningkatkan kualitas SDM terkait risiko pembiayaan, menyusun perangkat analisis dan tools terkait pembiayaan dan memantau pengelolaan risiko kredit. - Melakukan inisiatif perbaikan atas tata kelola operasional Bank melalui pengelolaan risiko operasional bank, pendampingan pengelolaan risiko operasional untuk <i>Risk Taking Unit</i> (RTU), baik pada <i>business/support function</i>, penyempurnaan dan penyusunan ketentuan internal terkait operasional, peningkatan kualitas SDM terkait risiko operasional, dan pemantauan pengelolaan risiko operasional. - Mengembangkan budaya manajemen risiko dan kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi, antara lain melalui <i>e-mail blast</i>, video dan pelatihan.	The Board of Commissioners carried out its supervisory duties, among others, in providing directives to the Board of Directors, assessing the implementation of the Bank's strategic policies and supervising the Bank's operational activities. The Board of Commissioners managed to adjust the membership of Committees at the Board of Commissioners Level in accordance with the provisions of POJK No. 17 of Year 2023 regarding Governance for Commercial Banks. The committees established by the Board of Commissioners have submitted recommendations for improvement processes to the Board of Commissioners. The Board of Commissioners and the Board of Commissioners level Committees have held meetings in accordance with the provisions. The Board of Commissioners has held a meeting with the Board of Directors to supervise the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners has approved the Bank's Business Plan (RBB) that has been prepared and supervises the realization of the RBB and submits reports on the results of its supervision to OJK periodically. With regard to the implementation of duties and responsibilities in ensuring compliance with sharia aspects, DPS conducted sampling tests through direct examinations of the implementation of sharia aspects in business units by sampling, including those related to treasury, trade finance and income smoothing. DPS held routine monthly meetings to discuss and extend opinion on product, activity and program proposals in accordance with sharia principles. DPS supervised the Bank's business activities and submitted biannual (per semester) reports to OJK and the National Board of Sharia – Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) on results of its supervision. The Board of Directors is fully responsible for the implementation of the Bank's management based on the principles of prudence, GCG, and sharia. The Board of Directors has prepared a Bank Business (BBP) which has received Board approval Commissioner. The decision-making process for the Board of Directors is carried out, among others, through the Board of Directors meetings, which are held weekly. In order to realize the business targets in the Bank's Business Plan (BBP) and improve the Bank's performance, the Board of Directors has made the following efforts: - Making improvements to the governance of financing, among others, by updating the Circular of the Board of Directors (SE) on the Financing Committee, enhancing and compiling internal regulations, improving the quality of Human Resources related to financing risk, and monitored the management of financing risk. - Initiate improvements to the Bank's operational governance through the management of the Bank's operational risk, operational risk management assistance for Risk Taking Units (RTU), both in business/support functions, improvement and preparation of internal provisions related to operations, improving the quality of human resources related to operational risk, and monitoring operational risk management. - Developed a Risk Management and Compliance culture at all levels of the organization, including through e-mail blasts, podcasts, videos, and training.



No.	Uraian	Description
d.	Melakukan beberapa inisiatif project dan pengembangan produk dan aktivitas Bank. Selama semester II tahun 2023, Bank Muamalat telah menyampaikan 5 (lima) surat penyampaian informasi uji coba produk baru yaitu, Uji Coba Terbatas Implementasi Standard Nasional Open API Pembayaran (SNAP), Perubahan Fitur Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (CiciL Emas), Pengembangan Fitur <i>Customer on Boarding</i> melalui <i>Microsite</i> Bank Muamalat, Implementasi <i>Commodity Murabahah Financing</i> Cabang Kuala Lumpur serta penyampaian Informasi Pengembangan Fitur DPLK Syariah Muamalat pada Mobile Banking Muamalat DIN. Bank Muamalat juga menyampaikan 5 (lima) surat Laporan Realisasi penerbitan produk, yaitu Laporan Realisasi Pengembangan Produk Kartu Shar-e Debit VISA Contactless PayWave, Laporan Realisasi Pembiayaan Salam Trade iB, Laporan Realisasi Penambahan Fitur Verifikasi <i>Liveness Biometric</i> pada <i>Customer on Boarding</i> melalui <i>Mobile Banking</i> , Laporan Realisasi Perluasan Varian Pembiayaan KPR berupa tenor 20 Tahun dan Laporan Realisasi Perluasan Varian Pembiayaan KPR berupa tenor 25 Tahun.	d. A number of project and product development initiatives as well as the Bank's activities were carried out during the year. In semester II of 2023, Bank Muamalat delivered 5 (five) letters conveying information on new product trials, namely the Limited Trial of the National Standard for Open API Payments (SNAP) Implementation, Changes in Gold Ownership Financing Product Features (Gold Installment), Customer on Boarding Feature through Bank Muamalat's Microsite, Implementation of Commodity Murabahah Financing of Kuala Lumpur Branch as well as Information on the Development of DPLK Sharia Muamalat Feature Development on Bank Muamalat DIN Mobile. Bank Muamalat also submitted 5 (five) letters of Realization Report on product launches, namely the Realization Report on Product Development of the Shar-e VISA Contactless PayWave Debit Card, Realization Report on Salam Trade B Financing, Realization Report on the Addition of the Biometric Liveness Verification Feature for Customer on Boarding via Mobile Banking, Realization Report on the Expansion of Mortgage (KPR) Financing Variants in the form of a 20-Year Tenor and Realization Report on the Expansion of Mortgage (KPR) Variant financing in the form of a 25-year tenor.
e.	Melaksanakan <i>training/workshop</i> & sosialisasi, dan sertifikasi profesi, antara lain terkait dengan sertifikasi manajemen risiko beserta <i>refreshment</i> , sertifikasi <i>treasury</i> beserta <i>refreshment</i> , Sertifikasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR), Sertifikasi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Sertifikasi Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), <i>Campaign</i> terkait dengan <i>Anti-Fraud</i> , <i>Mandatory Muamalat Internal Certification</i> (MIC), <i>Muamalat Associate Program</i> (MAP) <i>Wholesale Banking</i> dan <i>Small Medium Enterprise</i> , program <i>Muamalat internal certification</i> yang ditujukan untuk <i>role Teller</i> , <i>CS</i> dan <i>Operation supervisor</i> , <i>Coaching for Performance Retail Collection Leader</i> dan <i>training</i> <i>Dirasah Islamiyah</i> .	e. Training/workshop & socialization, and professional certification, among others related to risk management certification along with refreshment, treasury certification along with refreshment, Payment System Certification and Rupiah Currency Management (SPPUR), Securities Broker Representative Certification (WPPE), Indonesian Sharia Insurance Association (AASI) Certification, Campaign Related to Anti-Fraud, Mandatory Muamalat Internal Certification (MIC), Muamalat Associate Program (MAP) Wholesale Banking and Small Medium Enterprise, Muamalat internal certification program aimed at Teller, CS and Operation supervisor roles, Coaching For Performance Retail Collection Leader and Dirasah Islamiyah Training.
f.	Melaksanakan penerapan strategi pencegahan <i>anti-fraud</i> secara periodik melalui program <i>Anti-Fraud Awareness</i> , identifikasi kerawanan, dan <i>know your employee</i> .	f. Implemented periodic anti-fraud prevention strategies through the Anti-fraud Awareness program, vulnerability identification, and know your employee.
	Bank juga telah melakukan evaluasi dan penguatan terhadap ketentuan internal secara berkala dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan dan kesesuaian ketentuan internal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah. Pengajuan produk dan aktivitas baru telah dikaji/dievaluasi oleh fungsi-fungsi terkait yaitu SKMR, unit kerja kepatuhan dan legal serta telah mendapatkan opini/pendapat dari DPS atas kesesuaian produk dan aktivitas baru sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.	Bank Muamalat has also evaluated and updated internal regulations on a regular basis in order to maintain the effectiveness, adequacy and conformity of internal provisions with applicable laws and regulations and sharia principles. Submission of new products and activities has been reviewed/evaluated by related functions, namely Risk Management, Compliance and Legal, and has received opinion/approval from the Sharia Supervisory Board on the conformity of new products and activities with the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI).



No.	Uraian	Description
3	Governance Outcome	
	Bank telah melaksanakan RUPS tahunan dan pertanggungjawaban manajemen telah diterima oleh Pemegang Saham. Setiap pengambilan keputusan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi dilakukan melalui rapat yang dituangkan dalam risalah rapat dan telah ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan. Rencana Bisnis Bank telah disusun dan dikaji secara komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis, kekuatan yang dimiliki Bank serta kelemahan dan ancaman yang akan dihadapi. Rencana Bisnis Bank juga telah dikomunikasikan kepada seluruh pejabat di internal Bank. Produk dan aktivitas yang diterbitkan oleh Bank sesuai dengan fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI. Setiap produk dan aktivitas yang diterbitkan oleh Bank telah mendapat opini syariah dari DPS. Prosedur pelaksanaan dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank juga telah sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah. Bank telah merealisasikan beberapa produk antara lain Kartu Shar-e Debit VISA Contactless PayWave, Salam Trade iB, Fitur Verifikasi Liveness Biometric pada Customer on Boarding melalui Mobile Banking, Perluasan Varian Pembiayaan KPR berupa tenor 20 Tahun dan Perluasan Varian Pembiayaan KPR berupa Tenor 25 Tahun. Bank telah berhasil meraih sertifikat ISO 37001:2016 atas komitmen Bank dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Bank Muamalat juga meraih penghargaan di ajang GRC & Performance Excellence Award 2023 pada bulan September 2023. Bank Muamalat berhasil memenangkan sejumlah kategori penghargaan di antaranya adalah <i>The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2023 (banking industries)</i>, Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan sebagai <i>The Best CEO For GRC Excellence 2023</i>, dan Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Hayunaji sebagai <i>The Best Corporate Secretary 2023</i>. Secara umum rasio prudensial Bank telah sesuai dengan ketentuan. Bank juga tidak melakukan pelanggaran dan/atau pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Beberapa faktor dalam pelaksanaan GCG yang masih perlu diperbaiki oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, antara lain: - Tindak lanjut atas Komisaris Utama Independen yang belum efektif menjabat. - Kualitas data pelaporan masih terus dipantau dan dijaga konsistensinya. - Penginian Board Manual dan Kebijakan Tata Kelola sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum dan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	The Bank conducted its Annual GMS and the management's accountability was accepted by the Shareholders. Each decision-making of the Board of Commissioners, DPS and the Board of Directors were carried out through the meeting as disclosed in the minutes of meeting and followed-up as efforts of improvement. The Bank's Business Plan was prepared and reviewed comprehensively by taking into account business opportunities, Bank's strengths as well as weaknesses and threats that will be faced. The Bank's Business Plan was also communicated internally to all Bank officials. Products and activities were launched by the Bank in accordance with the fatwa/mandate issued by DSN-MUI. Each product and activity launched by the Bank received sharia opinion from DPS. Implementation procedures in collecting funds, distributing funds and providing Bank services were also in accordance with sharia regulations and principles. The Bank actualized several products, including Shar-e VISA Contactless PayWave Debit Card, Liveness Biometric Verification Feature on Customer on Boarding through Mobile Banking, Expansion of KPR (Mortgage) Financing Variant in the form of 20-Year Tenor and Expansion of KPR (Mortgage) Financing in the form of 25-Year Tenor. The Bank succeeded in obtaining the ISO 37001-2016 certificate for its commitment to implement Anti-Bribery Management (SMAP) System. Bank Muamalat also received recognition from the GRC & Performance Excellence Award 2023 in September 2023. Bank Muamalat received the award for several categories, including The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2023 (banking industries), The Best CEO for GRC Excellence 2023 (President Director of Bank Muamalat, Indra Falatehan), The Best Corporate Secretary 2023 (Corporate Secretary, Hayunaji). In general, the prudential ratio of the Bank was in accordance with applicable provisions. The Bank was also not in violation and/or in exceed of the Maximum Fund Distribution Limit (BMPD). Several factors in GCG implementation that still require improvements by PT Bank Muamalat Indonesia Tbk include the following: - Follow-up on Independent President Commissioner who has not been effective in office. - The quality of reporting data continues to be monitored and its consistency maintained. - Update on the Board Manual and Governance Policy in accordance with POJK No. 17 of Year 2023 regarding Governance for Commercial Banks and POJK Number 2 of 2024 concerning Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.



Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies

Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sebagai standar penerapan GCG, Bank Muamalat mengimplementasikan dasar Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang meliputi 5 (lima) aspek yang diturunkan ke dalam 8 (delapan) prinsip dan 25 rekomendasi. Aspek-aspek dan prinsip-prinsip tersebut, adalah sebagai berikut:

Based on the Circular Letter of the Financial Services Authority No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Corporate Governance of Public Companies as a standard for implementing GCG, Bank Muamalat implements the basic Corporate Governance Guidelines which include 5 (five) aspects which are derived into 8 (eight) principles and 25 recommendations. These aspects and principles are as follows:

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Application at Bank Muamalat
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Aspect 1: Public Company Relations with Shareholders in Guaranteeing Shareholders' Rights			
Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	1.1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi.	Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengumpulan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengumpulan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.	Telah Diterapkan Bank telah memiliki ketentuan tata cara pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara (<i>voting</i>) dalam RUPS, baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Ketentuan tersebut diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Prosedur Pelaksanaan RUPS sebagai berikut: - Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan RUPS adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. - Pemungutan suara mengenai diri orang dan pemungutan suara mengenai hal-hal lain diatur sebagai berikut: - diri orang dilakukan secara tertulis dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani; - mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam RUPS.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Application at Bank Muamalat
Principle 1: Increasing the value of holding a General Meeting of Shareholders (GMS).	1.1. Public companies have technical methods or procedures for voting, both open and closed, which promote independence.	Each share with voting rights issued has one voting right (one share one vote). Shareholders can use their voting rights when making decisions, especially when making decisions by voting. However, the decision-making mechanism by means of open and closed voting has not been regulated in detail. Public companies are recommended to have voting procedures in making decisions on a GMS agenda. The voting procedure must maintain the independence or freedom of the shareholders. For example, in open voting, voting is carried out by raising hands in accordance with the choice instructions offered by the chairman of the GMS. Meanwhile, closed voting is carried out on decisions that require confidentiality or at the request of shareholders, by using a voting card or by use of electronic voting.	Has Been Applied The Bank already has provisions on procedures for making decisions through voting at GMS, both open and closed which prioritizes independence and the interests of shareholders. These provisions are regulated in the Bank's Articles of Association and GMS Implementation Procedures as follows: 1. GMS decisions are taken based on deliberation to reach a consensus. 2. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the GMS decision is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights present at the GMS, except for statutory regulations and/or the Articles of Association. The basis determines that a decision is valid if it is approved by a greater number of affirmative votes. 3. Voting on individuals and voting on other matters is regulated as follows: a. person's self is carried out in writing with a closed vote that is not signed; b. regarding other matters carried out verbally, unless the chairman of the GMS determines otherwise without any objections from 1 (one) or more shareholders present at the GMS.
	1.2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	Telah Diterapkan 1. RUPS Tahunan (RUPST) tanggal 11 Mei 2023 dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah, 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris, dan seluruh anggota Direksi yang telah efektif menjabat. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir. 2. RUPSLB pada tanggal 13 November 2023 dihadiri oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas Syariah, seluruh anggota Dewan Komisaris dan seluruh anggota Direksi yang telah efektif menjabat. 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah berhalangan hadir.
	1.2. All members of the Board of Directors and members of the Public Company's Board of Commissioners attend the Annual GMS.	Members of the Public Company Board of Commissioners aim that each member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners can pay attention, explain and answer directly the problems that occur or questions raised by shareholders regarding the agenda at the GMS.	Has Been Applied 1. The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 11, 2023 was attended by all members of the Sharia Supervisory Board, 4 (four) members of the Board of Commissioners, and all members of the Board of Directors who have effectively served. 1 (one) member of the Board of Commissioners was absent. 2. The EGMS on November 13, 2023 was attended by 2 (two) members of the Sharia Supervisory Board, all members of the Board of Commissioners and all members of the Board of Directors who have effectively served. 1 (one) member of the Sharia Supervisory Board was absent.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Application at Bank Muamalat
	1.3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun 1.3. A summary of the minutes of the GMS is available on the Public Company Website for at least 1 (one) year	Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui situs web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada situs web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di situs web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut. The Public Company is required to make a summary of the minutes of the GMS in Indonesian and foreign languages (at least in English), and to be announced 2 (two) working days after the GMS is held to the public, one of which is through the Public Company's website. The availability of a summary of the minutes of the GMS on the Public Company's website provides an opportunity for shareholders who are not present to obtain important information in holding the GMS easily and quickly. Therefore, the provision regarding the minimum period for the availability of a summary of the minutes of the GMS on the website is intended to provide sufficient time for shareholders to obtain this information.	Telah Diterapkan Bank memiliki ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang telah diselenggarakan, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris dan dapat diakses oleh masyarakat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS, salah satunya adalah melalui Situs Web Bank (www.bankmuamalat.co.id) pada menu hubungan investor-RUPS yang tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun. Has Been Applied The Bank has a summary of the minutes of the GMS, for the GMS that has been held, both in Indonesian and English and can be accessed by the public 2 (two) working days after the GMS is held, one of which is through the Bank's Website (www.bankmuamalat.co.id) on the investor relations-GMS menu available for more than 1 (one) year.
Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	2.1. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Di samping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	Telah Diterapkan Dalam kebijakan GCG diatur bahwa dalam hubungan dengan Pemegang Saham, Bank Muamalat Indonesia senantiasa mendorong penerapannya berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 1. Melindungi hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank; 2. Menyelenggarakan Daftar Pemegang Saham secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank; 3. Menyediakan informasi mengenai Bank secara tepat waktu, benar, dan teratur bagi seluruh Pemegang Saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia; dan 4. Memberikan penjelasan yang lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS. Bank Muamalat Indonesia melakukan komunikasi dengan para pemegang saham melalui media komunikasi antara lain melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), <i>website</i> Bank (www.bankmuamalat.co.id), <i>e-mail helpdesk</i>: investor.relations@bankmuamalat.co.id, akun sosial media Bank Muamalat, SalaMuamalat, dan melalui surat menyurat.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Application at Bank Muamalat
Principle 2: Improving the Quality of Public Company's Communication with Shareholders or Investors.	2.1. The Public Company has a communication policy with shareholders or investors.	Communication between a Public Company and shareholders or investors is intended so that shareholders or investors get a clearer understanding of the information that has been published to the public, such as periodic reports, information disclosure, business and performance conditions or prospects, and Implementation of Public Company Governance. In addition, shareholders or investors can also submit input and opinions to the management of the Public Company. The communication policy with shareholders or investors shows the Public Company's commitment to communicating with shareholders or investors. The policy may include strategies, programs and timing of communications, as well as guidelines that support shareholders or investors to participate in these communications.	Has Been Applied The GCG policy stipulates that in relation to Shareholders, Bank Muamalat Indonesia always encourages its implementation based on the following provisions: 1. Protecting the rights of Shareholders in accordance with laws and regulations and the Articles of Association of the Bank; 2. Organize the Register of Shareholders in an orderly and regular manner in accordance with laws and regulations and the Articles of Association of the Bank; 3. Providing information regarding the Bank in a timely, correct and orderly manner for all Shareholders, except for confidential matters; And 4. Provide a complete explanation and accurate information regarding the implementation of the GMS. Bank Muamalat Indonesia communicates with shareholders through communication media including through the General Meeting of Shareholders (GMS), the Bank's website (www.bankmuamalat.co.id), e-mail helpdesk: investor.relations@bankmuamalat.co.id, Bank Muamalat's social media accounts, SalaMuamalat, and through correspondence.
	2.2. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	Telah Diterapkan Bank telah menyediakan mekanisme komunikasi antara Pemegang Saham dengan Bank sebagaimana dijelaskan pada <i>website</i> Bank.
	2.2. The Public Listed Company discloses its communication policy with shareholders or investors on its Website.	The disclosure of the communication policy is a form of transparency on the commitment of the Public Listed Company in providing equality to all shareholders or investors on the implementation of communication. provide equality to all shareholders or investors on the implementation of communication. The disclosure of such information also aims to increase the participation and role of shareholders or investors in the implementation of the communication program. communication program of the Public Listed Company.	Has Been Applied The Bank has provided a communication mechanism between Shareholders and the Bank as described on the Bank's website.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Application at Bank Muamalat
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect 2: Function and Role of the Board of Commissioners			
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	3.1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda di antara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	Telah Diterapkan Hingga berakhirnya tahun buku 2023, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) orang di mana 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut telah memenuhi regulasi dan mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, ukuran, dan komposisi terhadap Direksi serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis Bank.
Principle 3: Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners.	3.1. Determination of the number of members of the Board of Commissioners considers the condition of the Public Listed Company.	The number of members of the Board of Commissioners may affect the effectiveness of the implementation of the duties of the Board of Commissioners. The determination of the number of members of the Board of Commissioners of a Public Company shall refer to the provisions of the prevailing laws and regulations, which shall consist of at least 2 (two) persons based on the provisions of OJK regulations on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. Commissioners of Issuers or Public Companies. In addition, it is also necessary to consider conditions of the Public Listed Company which include, among others, characteristics, capacity, and size, as well as achievement of objectives and fulfillment of business needs that differ among Public Listed Companies. However, too large a number of members of the Board of Commissioners has the potential to disrupt the effectiveness of the implementation of the Board of Commissioners' functions.	Has Been Applied Until the end of the financial year 2023, the Board of Commissioners consists of 3 (three) members, of which 2 (two) members are Independent Commissioners. The determination of the number of members of the Board of Commissioners has complied with regulations and considered the characteristics, capacity, size, and composition of the Board of Directors as well as the achievement of objectives and fulfillment of the Bank's business needs.
	3.2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	Telah Diterapkan Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan di mana keberagaman tersebut tercermin dari keahlian dan pengalaman yang dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian pada bidang: • Perbankan syariah • Industri keuangan • Manajemen strategis • Tata Kelola Perusahaan • Hukum



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Application at Bank Muamalat
	3.2. Determination of the composition of the Board of Commissioners takes into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required.	The composition of the BOC is a combination of characteristics both in terms of the BOC organ and individual members of the BOC, in accordance with the needs of the Public Listed Company. Such characteristics may be reflected in the determination of expertise, knowledge, and experience required in the implementation of supervisory and advisory duties by the Board of Commissioners of a Public Listed Company. The composition that has taken into account the needs of the Public Listed Company is a positive thing, especially related to decision making in the context of implementing the supervisory function which is carried out by considering a wider range of aspects.	Has been Applied The composition of the Board of Commissioners has taken into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required where such diversity is reflected in the expertise and experience of each member of the Board of Commissioners. Members of the Board of Commissioners have expertise in: • Islamic banking • Financial industry • Strategic management • Corporate Governance • Law
Prinsip 4: Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	4.1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>selfassessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. <i>Self-assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self-assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Telah Diterapkan Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) sebagai mekanisme penilaian kinerja Dewan Komisaris.
Principle 4: Improve quality Implementation Duties and Responsibility Board of Commissioners.	4.1. The BOC has a self-assessment policy to assess the performance of the BOC.	The Board of Commissioners' self-assessment policy is a guideline used as a form of accountability for the assessment of the Board of Commissioners' performance. guidelines used as a form of accountability for the performance assessment of the BOC collegially. Commissioners collegially. Self-assessment is conducted by each member to assess the performance of the Board of Commissioners. by each member to assess the performance of the Board of Commissioners collegially, and not to assess the individual performance of each member of the Board of Commissioners. With this self-assessment It is expected that each member of the Board of Commissioners can contribute to improve the performance of the Board of Commissioners on an ongoing basis. The policy can include the assessment activities carried out along with the purpose and objectives, the time of periodic periodic implementation, and the benchmarks or assessment criteria used in accordance with the recommendations given by the nomination and remuneration function of the Public Company, where the existence of such function has been required in the OJK Regulation on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies. Public Company.	Has been Applied The Board of Commissioners has a self-assessment policy as a mechanism for assessing the performance of the Board of Commissioners.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Application at Bank Muamalat
	4.2. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan <i>self-assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.	Telah Diterapkan Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.
	4.2. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Company's Annual Report.	Disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Commissioners is carried out not only to comply with the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties, but also, to provide confidence, especially to shareholders or investors on the efforts that need to be made in improving the performance of the Board of Commissioners. With this disclosure, shareholders or investors are aware of the check and balance mechanism on the performance of the Board of Commissioners.	Has been Applied The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners has been disclosed in the Bank's Annual Report.
	4.3. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Pengungkapan kebijakan <i>self-assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balances</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.	Telah Diterapkan Dalam <i>Board Manual</i> Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia di bab Etika Berkaitan dengan Penyuapan dan Kejahatan Keuangan diatur bahwa anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam tindak kejahatan keuangan sebagai status terpidana maka harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris.
	4.3. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if involved in financial crimes.	The disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Commissioners is carried out not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties, but also, to provide confidence, especially to shareholders or investors on the efforts that need to be made in the performance of the Board of Commissioners. shareholders or investors on the efforts that need to be made in improving the performance of the Board of Commissioners. improve the performance of the Board of Commissioners. With this disclosure, shareholders or investors are aware of the checks and balances mechanism on the performance of the Board of Commissioners.	Has been Applied In the Board Manual of the Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia in the chapter on Ethics Relating to Bribery and Financial Crimes. Bribery and Financial Crimes stipulates that members of the Board of Commissioners who are involved in financial crimes as convicted status must resign from their position as members of the Board of Commissioners.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Application at Bank Muamalat
	4.4. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi	Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	Telah Diterapkan Bank telah memiliki dan menerapkan <i>program Talent Management</i> dan <i>Succession Plan</i>. Program <i>Talent Management</i> bertujuan untuk mempersiapkan <i>Pool of Talent</i> dari Bank sebagai upaya menyediakan dan penguatan Sumber Daya Insani di Bank. Suksesi diterapkan untuk penyiapan kader-kader terbaik dari <i>Pool of Talent</i> Bank yang siap menduduki posisi-posisi kritikal termasuk posisi Pejabat Eksekutif Bank. Bank telah memiliki <i>database Pool of Talent</i> dan <i>Successor</i> berdasarkan proses identifikasi talent dan suksesor dengan menggunakan metodologi yang disiapkan Bank. Proses validasi dan kalibrasi dilakukan atas <i>talent</i> dan suksesor, baik di tingkat Direktorat maupun di tingkat Direksi untuk posisi-posisi strategis yaitu posisi satu level di bawah Direksi dan <i>Region Head</i>. Database ini diperbarui setiap tahun dan menjadi referensi manajemen dalam melakukan rotasi maupun promosi karyawan serta untuk kebutuhan nominasi jabatan strategis termasuk Direksi.
	4.4. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function prepares a succession policy in the process of nominating members of the Board of Directors.	Based on the provisions of the OJK Regulation on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, the committee that carries out the nomination function has the duty to formulate policies and criteria required in the nomination process of candidates for the Board of Directors. criteria required in the nomination process of candidates for members of the Board of Directors. One of the policies that can support the nomination process as intended is the succession policy for members of the Board of Directors. The policy on succession aims to maintain the continuity of the regeneration process or leadership regeneration in the company in order to maintain business sustainability and long-term goals of the company.	Has been Applied The Bank has established and implemented a Talent Management program and Succession Plan. The Talent Management program aims to prepare the Bank's Pool of Talent as an effort to provide and strengthen the Bank's Human Resources. Succession is implemented to prepare the best cadres from the Bank's Pool of Talent who are ready to occupy critical positions including the position of Executive Officer of the Bank. The Bank has a database of Pool of Talent and Successors based on the talent and successor identification process using a methodology prepared by the Bank. Validation and calibration processes are carried out on talents and successors, both at the Directorate level and at the Board of Directors level for strategic positions, namely positions one level below the Board of Directors and Region Heads. This database is updated annually and serves as a reference for management in conducting employee rotations and promotions as well as for nomination needs for strategic positions including the Board of Directors.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Application at Bank Muamalat
Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi Aspect 3: Function and Role of the Board of Directors			
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	5.1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, di mana berdasarkan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Di samping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka, meliputi karakteristik, kapasitas dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.	Telah Diterapkan Komposisi Direksi telah sesuai dengan regulasi dan telah mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, dan skala usaha Bank. Per Desember 2023, jumlah Direksi sebanyak 5 (lima) orang dengan pembagian tugas sebagai Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, Risiko dan Hukum, Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan, Direktur Keuangan & Strategi, serta Direktur Operasi & Digital. Direksi memiliki keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Principle 5: Strengthen Membership and Composition Board of Directors.	5.1. The determination of the number of members of the Board of Directors takes into account the condition of the Public Listed Company as well as the effectiveness in decision making.	As a corporate organ authorized to manage the company, the determination of the number of members of the Board of Directors greatly affects the performance of the Public Listed Company. Thus, the determination of the number of members of the Board of Directors must be made through careful consideration and must refer to the provisions of the prevailing laws and regulations. Where based on OJK Regulation on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Board of Directors must consist of at least 2 members. or Public Company shall consist of at least 2 (two) persons. In addition, the determination of the number of Directors must be based on the need to achieve the purposes and objectives of the Public Company and adjusted to the conditions of the Public Company, including the characteristics, capacity and capacity of the Public Company. conditions of the Public Listed Company, including the characteristics, capacity and size of the Public Listed Company, as well as how to achieve effective decision-making, as well as how to achieve the effectiveness of the Board of Directors' decision making.	Has been Applied The composition of the Board of Directors is in accordance with the regulations and has considered the characteristics, capacity, and scale of the Bank's business. As of December 2023, the number of Directors as many as 5 (five) people with the division of duties as President Director, Compliance, Risk and Legal Director, Financing Business Risk Director, Finance & Strategy Director, and Operation & Digital Director. The Board of Directors has expertise and experience in accordance with their respective fields of work.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Application at Bank Muamalat
	5.2. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolektif.	Telah Diterapkan Komposisi anggota Direksi telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai pembagian fungsi, tugas dan wewenang Direksi dalam mencapai tujuan Bank.
	5.2. Determination of the composition of the Board of Directors takes into account the diversity of skills, knowledge and experience required.	Similar to the Board of Commissioners, the diversity of the composition of the Board of Directors is a desirable combination of characteristics both in terms of the Board of Directors organ and individual members of the Board of Directors, in accordance with the needs of the Public Listed Company. The combination is determined by taking into account the appropriate expertise, knowledge, and experience in the division of duties and functions of the Board of Directors in achieving the objectives of the Public Listed Company. Thus, consideration of the combination of these characteristics will have an impact on the accuracy of the nomination and appointment process of individual members of the Board of Directors or the Board of Directors as a collegial body.	Has been Applied The composition of members of the Board of Directors has taken into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required in accordance with the division of functions, duties and authorities of the Board of Directors in achieving the objectives of the Bank.
	5.3. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan dan/atau pengalaman kerja terkait.	Telah Diterapkan Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang akuntansi dan keuangan serta meraih gelar Sarjana Ekonomi (Accounting) di Universitas Indonesia (2002) dan Master of Islamic Banking and Finance di Universitas Indonesia (2009). Beliau memiliki pengalaman berkarir sebagai Senior Vice President/Group Head Corporate Transformation Office PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021), Group Head/Senior Vice President, Corporate Transformation PT Bank Syariah Mandiri (2019 - 2021), Group Head/Senior Vice President, Accounting Group PT Bank Syariah Mandiri (November 2014 - Januari 2019) sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan Bank Muamalat yang diangkat melalui RUPS Luar Biasa tanggal 29 November 2022.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Application at Bank Muamalat
	5.3. Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in accounting.	Financial Statements are accountability reports of management's accountability for the management of resources owned by the Public Listed Company, which must be prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards generally accepted in Indonesia as well as relevant OJK regulations, including laws and regulations in the Capital Market sector governing the presentation and disclosure of Public Listed Company Financial Statements. Financial Statements of Public Listed Companies. Based on the laws and regulations in the capital market sector governing the responsibility of the Board of Directors for the Financial Statements, the Board of Directors is jointly and severally responsible for the Financial Statements, signed by the President Director and the member of the Board of Directors in charge of accounting or finance. accounting or finance. As such, the disclosure and preparation of financial information presented in the financial statements will be highly dependent on the expertise, and/or knowledge of the Board of Directors, particularly the member of the Board of Directors in charge of accounting or finance. The existence of qualifications of expertise and/or knowledge in the field of accounting that is at least owned by members of the Board of Directors can provide confidence in the preparation of the Financial Statements, so that the Financial Statements can be relied upon by stakeholders. can be relied upon by stakeholders as the basis for making economic decisions related to the Public Company. economic decisions related to the Public Listed Company. Such expertise and/or knowledge may be evidenced by educational background, training certification and/or related work experience.	Has been Applied The Director in charge of accounting or finance has an educational background and work experience in accounting and finance and holds a Bachelor of Economics (Accounting) at the University of Indonesia (2002) and a Master of Islamic Banking and Finance at the University of Indonesia (2009). He has career experience as Senior Vice President/Group Head Corporate Transformation Office PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021), Group Head/Senior Vice President, Corporate Transformation PT Bank Syariah Mandiri (2019 - 2021), Group Head/Senior Vice President, Accounting Group PT Bank Syariah Mandiri (November 2014 - January 2019) before serving as Finance Director of Bank Muamalat which was appointed through the Extraordinary GMS on November 29, 2022.
Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	6.1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. <i>Self-assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self-assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Telah Diterapkan Direksi memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi secara kolegal. Selain itu <i>self-assessment</i> kinerja Direksi juga dilakukan secara berkala terhadap <i>governance structure, process</i> dan <i>outcome</i> di level Direksi. Berdasarkan hasil <i>self-assessment</i> tersebut telah dilakukan upaya-upaya yang perlu ditingkatkan untuk peningkatan kinerja ke depan.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Application at Bank Muamalat
Principle 6: Improve Quality Implementation Duties and Responsibility Board of Directors.	6.1. The BOD has a self-assessment policy to assess the performance of the BOD.	As with the Board of Commissioners, the Board of Directors' self-assessment policy is a guideline used as a form of accountability for the assessment of the Board of Directors' performance collegially. The self-assessment is conducted by each member of the Board of Directors to assess the performance of the Board of Directors collegially, and not to assess the individual performance of each member of the Board of Directors. With this self-assessment, it is expected that each member of the Board of Directors can contribute to improving the performance of the Board of Directors on an ongoing basis. The policy may include the assessment activities carried out along with the purpose and objectives, the periodic implementation time, and the benchmarks or assessment criteria used in accordance with the recommendations provided by the nomination and remuneration function of the Public Company, where the establishment of such function has been required in the OJK regulation on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.	Has been Applied The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors collegially. In addition, self-assessment of the performance of the BOD is also conducted periodically on governance structure, process and outcome at the BOD level. Outcome at the Board of Directors level. Based on the results of the self-assessment, efforts have been made to improve performance in the future.
	6.2. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan <i>self-assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balances</i> terhadap kinerja Direksi.	Telah Diterapkan Kebijakan <i>self-assessment</i> atas kinerja Direksi diungkapkan dalam bagian Penilaian Kinerja Direksi di Laporan Tahunan.
	6.2. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed in the annual report of the Public Listed Company.	Disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Directors is carried out not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to provide important information on improvement efforts in the management of the Public Listed Company. Such information is very useful to provide confidence to shareholders or investors that there is certainty that the management of the company continues to be carried out in a better direction. With such disclosure, shareholders or investors are aware of the checks and balances mechanism on the performance of the Board of Directors.	Has been Applied The self-assessment policy on the performance of the Board of Directors is disclosed in the Board of Directors Performance Assessment section of the Annual Report.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Application at Bank Muamalat
	6.3. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.	Telah Diterapkan Dalam ketentuan Internal: <i>Board Manual</i> Direksi Bank Muamalat Indonesia dalam bab Etika Berkaitan dengan Penyusutan dan Kejahatan Keuangan bagi Direksi antara lain diatur bahwa: 1. Direksi dilarang melakukan tindakan manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta tindakan pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang. 2. Anggota Direksi yang terlibat dalam tindak kejahatan keuangan sebagai status terpidana, maka harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota Direksi.
	6.3. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes.	Policy on the resignation of members Board of Directors member who is involved in financial crime financial crimes is a policy that can increase the stakeholders' trust in stakeholders' trust in the Public Listed Company, so that the integrity of the company will be maintained. This policy is necessary to help smooth the legal process and so that the legal process does not interfere with the course of business activities. In addition, in terms of morality, this policy will build an ethical culture within the Public Listed Company. The policy may be included in the Guidelines or Code of Ethics applicable to the Board of Directors.	Has been Applied In Internal provisions: The Board Manual of Bank Muamalat Indonesia in the chapter Ethics Relating to Bribery and Financial Crimes for Directors, among others, stipulates Financial Crimes for Directors, among others, stipulates that: 1. The Board of Directors is prohibited from committing acts of manipulation and various forms of embezzlement in financial services activities and money laundering criminal acts as referred to in Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering. 2. Members of the Board of Directors who are involved in financial crimes as convicted status, must resign from their position as members of the Board of Directors.
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect 4: Stakeholder Participation			
Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	7.1. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan informasi yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	Telah Diterapkan Kebijakan GCG Bank mengatur bahwa Bank senantiasa menyediakan informasi yang cukup, akurat, dipercaya dan tepat waktu kepada segenap pemangku kepentingan dengan mengedepankan prinsip <i>equal treatment</i> . Jajaran Bank dilarang untuk membeli atau menjual saham (<i>common stock</i>) atau surat berharga Bank lainnya pada saat yang bersangkutan bertanggung jawab atas informasi penting yang tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik yang dapat mempengaruhi nilai harga saham dan surat berharga Bank. Sebagai informasi bahwa Bank Muamalat Indonesia merupakan perusahaan terbuka, namun tidak memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, sehingga potensi terjadinya <i>insider trading</i> sangat rendah.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Application at Bank Muamalat
Principle 7: Improving Aspects of Corporate Governance through Stakeholder Participation Stakeholders.	7.1. Public Listed Company has a policy to prevent insider trading.	A person who has inside information is prohibited from conducting a securities transaction by using inside information as referred to in the Law on Capital Market. Public Listed Company may minimize the occurrence of insider trading through prevention policy, for example, by strictly separating confidential data and/or information from public information, as well as dividing duties and responsibilities between the two. public, as well as dividing duties and responsibilities for the management of such information proportionally and efficiently.	Has been Applied The Bank's GCG policy stipulates that the Bank always provides sufficient, accurate, reliable and timely information to all stakeholders by prioritizing the principle of equal treatment. treatment principle. The Bank's personnel are prohibited from buying or selling shares (common stock) or other securities of the Bank when they are responsible for important information that is not intended for public consumption that may affect the price value of the Bank's shares and securities. For information, Bank Muamalat Indonesia is a public company, but does not trade its shares on the Indonesia Stock Exchange, so the potential for insider trading is very low.
	7.2. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> .	Kebijakan anti-korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, <i>prudent</i> , dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i> , suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	Telah Diterapkan Ketentuan terkait anti-korupsi dan anti <i>fraud</i> telah diatur dalam <i>Board Manual</i> dan Prosedur. Bank telah menyusun Prosedur Anti <i>Fraud</i> yang secara umum mengatur tugas dan tanggung jawab unit kerja Anti <i>Fraud</i>, wewenang anti-<i>fraud</i>, pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, sanksi, pemantauan, evaluasi tindak lanjut dan <i>whistleblowing system</i>.
	7.2. Public Listed Company has anti-corruption and anti-fraud policies.	Anti-corruption policy is useful to ensure that the Public Listed Company's business activities are conducted legally, prudently, and in accordance with the principles of good governance, principles of good governance. Such policy may be part of the code of ethics, or in a separate form. The policy may include, among others, programs and procedures to address corruption, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities within the Public Listed Company. The scope of the policy must describe the Public Listed Company's prevention of all corrupt practices, whether giving or receiving from other parties. whether giving or receiving from other parties.	Has been Implemented Provisions related to anti-corruption and antifraud have been regulated in the Board Manual and Procedures. Manual and Procedures. The Bank has developed an Anti Fraud Procedure that generally regulates the duties and responsibilities of the Anti Fraud work unit, anti-fraud authority, prevention, detection, investigation, reporting, sanctions, monitoring, follow-up evaluation and whistleblowing system.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Application at Bank Muamalat
	7.3. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas <i>output</i> perusahaan. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan Kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.	Telah Diterapkan Kebijakan GCG mengatur bahwa Bank dalam berinteraksi dengan Penyedia Barang/Jasa antara lain dengan pemasok dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan Bank senantiasa menjalin hubungan baik didasarkan atas dasar profesionalisme kepercayaan, kejujuran, saling menghormati dan memberi kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis dengan Perseroan sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar. Dalam menjalin hubungan antara Bank dengan penyedia barang/jasa, seluruh pihak berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak. Dalam melaksanakan hubungan dengan penyedia barang/jasa, Bank senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut: • Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat dengan memberikan perlakuan yang setara terhadap semua calon mitra bisnis yang telah memenuhi syarat/kriteria tertentu dari perusahaan. • Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi, tata cara evaluasi serta hasil evaluasi disampaikan kepada calon mitra bisnis yang akan melakukan bisnis dengan perusahaan. • Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon mitra bisnis secara proporsional dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara apapun. • Mekanisme seleksi pemasok atau vendor telah diatur secara detil dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Application at Bank Muamalat
	7.3. Public Listed Company has a policy on the selection and upgrading of suppliers or vendors.	Policies on supplier or vendor selection are useful to ensure that the Public Listed Company obtains the necessary goods or services at competitive prices and good quality. Meanwhile, the policy on supplier or vendor capacity building is useful to ensure that the supply chain runs efficiently and effectively. The ability of suppliers or vendors to supply/fulfill the goods or services needed by the company will affect the quality of the company's output. The implementation of these policies can ensure continuity of supply, both in terms of quantity and quality needed by the Company. Open. The scope of This policy includes criteria in the selection of suppliers or vendors, transparent procurement mechanisms, efforts to improve the capabilities of suppliers or vendors, and fulfillment of rights related to suppliers or vendors. related to suppliers or vendors.	Has been Applied The GCG Policy stipulates that in interacting with Goods/Services Providers, among others, suppliers and other parties conducting business transactions with the Bank, the Bank always establishes good relationships based on professionalism, trust, honesty, mutual respect and equal opportunities in obtaining relevant information in accordance with business relationships with the Company so that each party can make decisions based on fair and reasonable considerations. In establishing relationships between the Bank and goods/services providers, all parties are obliged to keep information confidential and protect the interests of each party. In carrying out relationships with goods/ services providers, the Bank always prioritizes the following principles: • Procurement of goods/services must be carried out through selection and fair competition by providing equal treatment to all prospective business partners who have met certain requirements/criteria of the company. • All provisions and information regarding the procurement of goods/services including administrative technical requirements, evaluation procedures and evaluation results are submitted to prospective business partners who will do business with the company. • Providing equal treatment for all prospective business partners proportionally and not leading to give advantages to certain parties in any way. • The supplier or vendor selection mechanism has been regulated in detail in the Goods and Services Procurement Procedure.
	7.4. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	Telah Diterapkan Pemenuhan hak-hak kreditur telah diatur pada prosedur produk Bank serta tercantum dalam perjanjian.
	7.4. Public Listed Companies have a policy on the fulfillment of creditors' rights.	The policy on the fulfillment of creditors' rights is used as a guideline in making loans to creditors. The purpose of the policy is to maintain the fulfillment of rights and to maintain creditors' trust in the Public Listed Company. The policy includes considerations in entering into agreements, as well as follow-up in the fulfillment of the Public Listed Company's obligations to creditors.	Has been Implemented The fulfillment of creditors' rights has been regulated in the Bank's product procedures and stated in the agreement.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Application at Bank Muamalat
	7.5. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan <i>system whistleblowing</i> .	Kebijakan <i>system whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan <i>system whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i> , cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	Telah Diterapkan Bank memiliki kebijakan pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i> sebagaimana diatur dalam Kebijakan GCG dan Prosedur Anti <i>Fraud</i> yang mencakup: • Perlindungan kepada <i>Whistleblower</i>. • Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan <i>Whistleblower</i>. • Pengaduan indikasi <i>fraud</i>. • <i>Contact center whistleblowing system</i>
	7.5. The Public Listed Company has a whistleblowing system policy.	The whistleblowing system policy that has been policy will provide certainty of protection to witnesses or whistleblowers on an indication of violations committed by employees or management of the Public Listed Company. Implementation of the whistleblowing system policy will have an impact on the establishment of a good corporate governance culture. The whistleblowing system policy covers, among others, the types of violations that can be reported through the whistleblowing system, how to file a complaint, protection and guarantee of confidentiality of the whistleblower, complaint handling, the party managing the complaint, and the results of handling and follow-up of the complaint. and follow-up of complaints.	Has been Implemented The Bank has a policy on the implementation of the Whistleblowing System as stipulated in the GCG Policy and Anti Fraud Procedure which includes: • Protection to Whistleblower. • Reporting System and Whistleblower Report Follow-up Mechanism. • Complaints of fraud indications. • Contact center whistleblowing system
	7.6. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup, antara lain: maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, serta kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	Telah Diterapkan <i>Long Term Incentive Plan</i> (LTIP) dikembangkan sebagai bagian dari penerapan konsep <i>Talent Management</i> dan <i>Succession Plan</i> di Bank. <i>Talent</i> dan <i>Successor Pool</i> yang tersedia merupakan karyawan terpilih yang diharapkan menjadi penggerak utama proses bisnis perusahaan. Salah satu upaya untuk mempertahankan mereka adalah melalui program retensi baik yang bersifat finansial maupun non finansial. Program LTIP merupakan salah satu program retensi dari sisi finansial di mana skema yang dibuat mengacu pada pencapaian kinerja atas <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) jangka panjang dengan syarat dan kondisi khusus. Beberapa skema ditetapkan dalam beberapa opsi yaitu <i>upfront payment system</i> dengan <i>bonding period</i> dan mekanisme <i>clawback</i> serta opsi x. Masing-masing terikat dengan syarat dan ketentuan yang relevan.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Application at Bank Muamalat
	7.6. The Public Listed Company has a policy of providing long-term incentives to Directors and employees.	Long-term incentives are incentives based on the achievement of long-term performance. Long-term incentive plan long-term incentive plan is based on the premise that the company's long-term performance is reflected by growth in the value of shares or other long-term targets of the company. Long-term incentives are useful in order to maintain loyalty and motivate the Board of Directors and employees to improve performance, and employees to improve their performance or productivity which will have an impact on improving the company's performance in the long term, long term. The existence of a long-term incentive policy is a real commitment of the Public Listed Company to encourage the implementation of long-term incentives. Public Listed Company to encourage the implementation of long-term incentives to Directors and Employees with terms, procedures and forms tailored to the long-term objectives of the Public Listed Company. Such policy may include, among others: the purpose and objectives of granting long-term incentives, terms and procedures in granting incentives, as well as conditions and risks that must be considered by the Public Listed Company in granting incentives. to be considered by the Public Listed Company in granting incentives. Such policy may also be included in the existing remuneration policy of the Public Listed Company.	Has been Applied The Long Term Incentive Plan (LTIP) was developed as part of the implementation of the Talent Management and Succession Plan concepts in the Bank. The available Talent and Successor Pool are selected employees who are expected to be the main drivers of the company's business processes. One of the efforts to retain them is through retention programs, both financial and non-financial. The LTIP program is one of the retention programs from the financial side where the scheme made refers to the achievement of performance on the long-term Key Performance Indicator (KPI) with special terms and conditions. Some schemes are set in several options, namely upfront payment system with bonding period and clawback mechanism and option x. Each is subject to relevant terms and conditions.
Aspek 5: Keterbukaan Informasi Aspect 5: Information Disclosure			
Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	Telah Diterapkan Bank senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada <i>stakeholders</i> dan <i>shareholders</i> melalui media teknologi informasi selain website Bank. Media teknologi informasi yang digunakan oleh Bank untuk melakukan pelayanan dan <i>update</i> kebutuhan informasi kepada nasabah atau calon nasabah adalah website Bank Muamalat, SalaMuamalat, media sosial, yang terdiri dari Youtube, Facebook, Twitter dan Instagram.
Principle 8: Improving the Implementation of Information Disclosure	8.1. Public Listed Companies make wider use of information technology other than the Website as a medium for information disclosure.	The use of information technology can be useful as a medium for information disclosure. The information disclosure carried out is not only information disclosure that has been regulated in the laws and regulations, but also other information related to the Public Listed Company that is deemed useful to be known by shareholders or investors. By utilizing information technology more widely in addition to the website, it is expected that the company can increase the effectiveness of the dissemination of company information. Nevertheless, the utilization of information technology that is carried out still pays attention to the benefits and costs of the company.	Has been Implemented The Bank always strives to improve the quality of information disclosure to stakeholders and shareholders through information technology media other than the Bank's website. Information technology media used by the Bank to provide services and update information needs to customers or prospective customers are the Bank Muamalat website, SalaMuamalat, social media, consisting of Youtube, Facebook, Twitter and Instagram.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Application at Bank Muamalat
	8.2. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Peraturan perundang-undangan di sector Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	Telah Diterapkan Bank telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki lebih dari 5% (lima) persen atau lebih saham Bank kepada Regulator dan Masyarakat melalui <i>website</i> , publikasi Laporan Keuangan, dan Laporan Tahunan Bank. Pengungkapan informasi tersebut telah diungkapkan pada <i>website</i> Bank menu Hubungan Investor bagian pemegang saham, Laporan Triwulan serta bagian ikhtisar saham dalam Laporan Tahunan ini.
	8.2. The Annual Report of a Public Listed Company discloses the ultimate beneficial owner in the shareholding of the Public Listed Company of at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the ultimate beneficial owner in the shareholding of the Public Listed Company through the ultimate and controlling shareholders.	The laws and regulations in the Capital Market sector governing the submission of annual reports of Public Listed Companies have stipulated the obligation to disclose information regarding shareholders who own 5% (five percent) or more of the shares of a Public Company as well as the obligation to disclose information regarding the major shareholders and controlling shareholders of a Public Company either directly or indirectly up to the ultimate beneficial owner in the ownership of such shares. In the share ownership. In this Corporate Governance Guideline, it is recommended to disclose the ultimate beneficial owner of a Public Listed Company's shareholding of at least 5% (five percent), in addition to disclosing the ultimate beneficial owner of the shareholding by the major and controlling shareholders.	Has been Implemented The Bank has disclosed information regarding shareholders who own more than 5% (five) percent or more of the Bank's shares to Regulators and the Public through the website, publication of Financial Statements, and the Bank's Annual Report. The disclosure of such information has been disclosed on the Bank's website in the Investor Relations section of the shareholders menu, the Quarterly Report and the share overview section of this Annual Report.

Struktur dan Mekanisme Corporate Governance

Corporate Governance Structure and Mechanism

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bank Muamalat memiliki struktur tata kelola perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi serta Komite- komite di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh unsur tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsinya masing-masing.

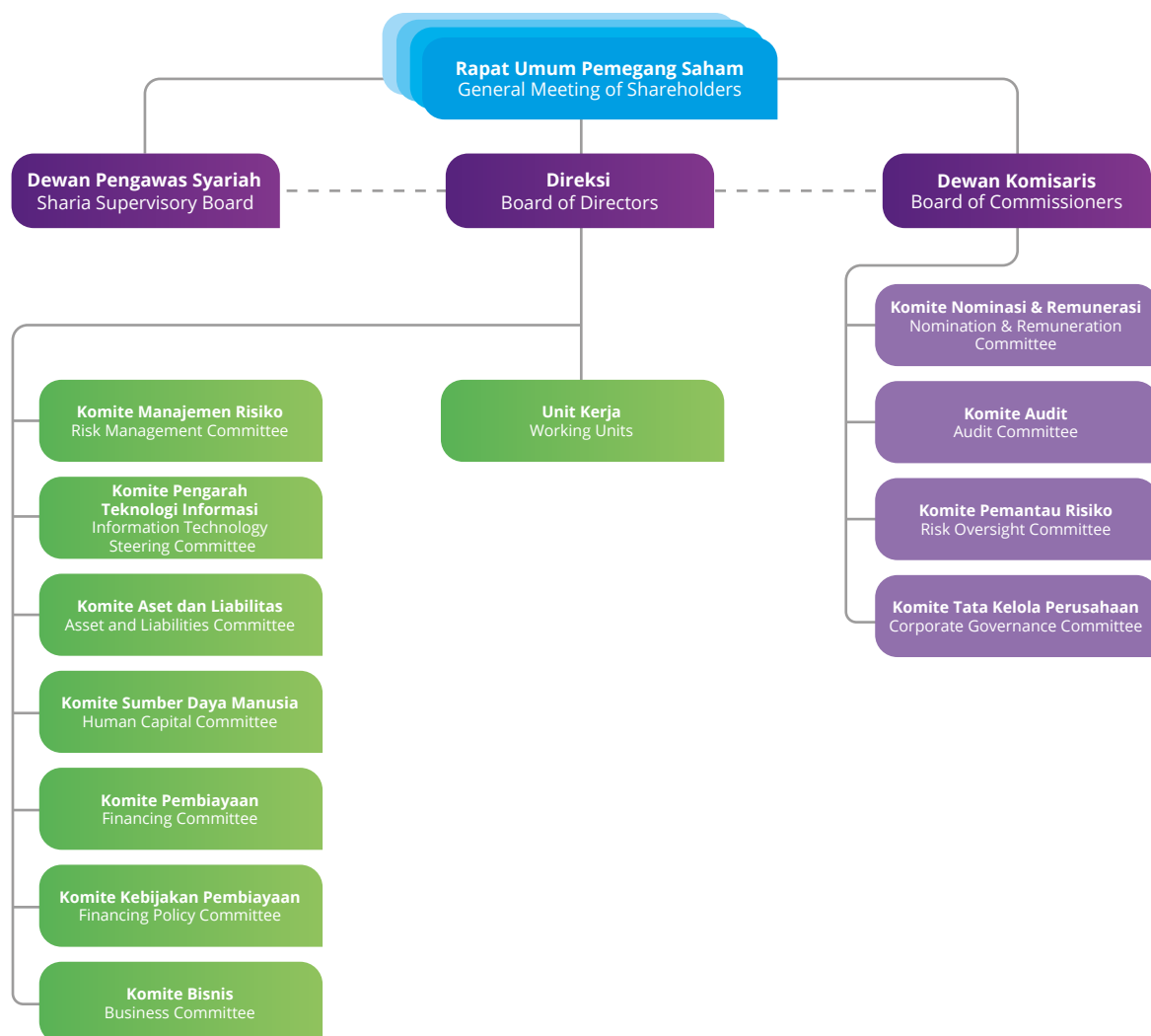
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

The structure for implementing GCG within Bank Muamalat consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors and the Board of Commissioners and Board of Directors Level Committees. All of these elements carry out their duties and responsibilities according to their respective functions.



STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA BANK MUAMALAT INDONESIA

Bank Muamalat Indonesia Governance Organization Structure



INFRASTRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Infrastruktur tata kelola perusahaan pada Bank Muamalat terdiri dari kebijakan dan prosedur sebagai panduan dalam menjalankan fungsi dan tugas organ perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

- Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia
- *Board Manual* Bank Muamalat Indonesia
- Kode Etik Bank Muamalat Indonesia
- Kebijakan GCG Bank Muamalat Indonesia
- Kebijakan Umum Operasional Bank
- Prosedur Pelaksanaan Rapat Direksi
- Prosedur Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
- Piagam Komite Audit
- Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
- Piagam Komite Pemantau Risiko
- Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan
- Piagam Komite Aset dan Liabilitas
- Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi

CORPORATE GOVERNANCE INFRASTRUCTURE

Bank Muamalat has an infrastructure in the form of policies and procedures as a guide in carrying out the functions and duties of the Company's organs, among others:

- Articles of Association of Bank Muamalat Indonesia
- Board Manual of Bank Muamalat Indonesia
- Code of Ethics of Bank Muamalat Indonesia
- GCG Policy of Bank Muamalat Indonesia
- General Policy of Bank Operations
- Board of Directors Meeting Procedure
- General Meeting of Shareholders Procedure
- Audit Committee Charter
- Nomination and Remuneration Committee Charter
- Risk Monitoring Committee Charter
- Corporate Governance Committee Charter
- Asset and Liability Committee Charter
- Information Technology Steering Committee Charter



- Piagam Komite Manajemen Risiko
- Piagam Komite Sumber Daya Manusia
- Piagam Komite Bisnis
- Piagam Komite Kebijakan Pembiayaan
- Pedoman dan Prosedur Anti-Fraud
- Piagam Internal Audit
- Kebijakan dan Prosedur penerapan APU-PPT (Anti Pencucian Uang-Pencegahan Pendanaan Terorisme)
- Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

- Risk Management Committee Charter
- Human Resources Committee Charter
- Business Committee Charter
- Financing Policy Committee Charter
- Anti-Fraud Guidelines and Procedures
- Internal Audit Charter
- APU-PPT (Anti-Money Laundering-Prevention of Financing of Terrorism) Implementation Policy and Procedure
- Program Implementation Policy Anti Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Destruction Bulk

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mekanisme tata kelola di Bank Muamalat berlandaskan kebijakan dan prosedur operasional terkait GCG (*soft structure*). Kebijakan dan prosedur tersebut diimplementasikan dalam kegiatan bisnis Bank sehari-hari dan dikaji secara berkala efektivitasnya. Norma tersebut secara berkelanjutan dikomunikasikan kepada seluruh jajaran karyawan dalam organisasi Bank untuk dapat dijadikan sebagai landasan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Bank.

Organ utama Bank dalam pelaksanaannya dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari komite di tingkat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Satuan Kerja Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko dan Internal Audit.

Berikut adalah komite-komite di tingkat Dewan Komisaris BMI yang bertugas untuk membantu dan meningkatkan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, yaitu:

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Nominasi dan Remunerasi
- Komite Tata Kelola Perusahaan

Adapun komite tingkat Direksi adalah sebagai berikut:

- Komite Aset dan Liabilitas
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Sumber Daya Manusia
- Komite Bisnis
- Komite Kebijakan Pembiayaan
- Komite Pembiayaan

CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

The governance mechanism at Bank Muamalat is based on a soft structure, which is in the form of operational policies and procedures related to GCG. These policies and procedures are always implemented in the Bank's daily business activities and periodically reviewed for effectiveness. The norm is continuously communicated to all employees in the Bank's organization to be used as a basis for implementing GCG principles.

In its implementation, the Bank's main organ is assisted by supporting organs consisting of committees at the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Corporate Secretary, Risk Management, and Internal Audit.

The following are the committees at the BMI Board of Commissioners level that are tasked with assisting and enhancing the supervisory duties and functions of the Board of Commissioners, namely:

- Audit Committee
- Risk Monitoring Committee
- Nomination and Remuneration Committee
- Corporate Governance Committee.

The committees at the Board of Directors level are as follows:

- Asset and Liability Committee
- Information Technology Steering Committee
- Risk Management Committee
- Human Resources Committee
- Business Committee
- Financing Policy Committee
- Financing Committee



Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur organisasi GCG Bank Muamalat Indonesia. Hak dan kewenangan RUPS tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris serta Direksi PBank yang batasannya diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan Anggaran Dasar Bank.

RUPS juga berfungsi sebagai salah satu media komunikasi antara para Pemegang Saham dengan Dewan Komisaris dan Direksi melalui forum tanya jawab. Forum tersebut memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pemegang saham yang hadir pada setiap mata acara RUPS. RUPS selanjutnya juga berfungsi sebagai forum bagi para pemegang saham untuk mengevaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Bank.

Penyelenggaraan RUPS Bank Muamalat berdasarkan pada beberapa ketentuan, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Anggaran Dasar Bank.
6. Prosedur Internal terkait Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

The GMS is the highest organ in BMI's GCG organizational structure, where the rights and authorities of the GMS are not owned by the Board of Commissioners and the Board of Directors, whose limits are regulated by the provisions of the relevant laws and regulations and the Bank's Articles of Association.

The GMS also serves as one of the communication media between the Shareholders and the Board of Commissioners and Directors through a question-and-answer forum. The forum provides equal opportunities to all Shareholders of the Bank who attend each agenda item of the GMS. The GMS also serves as a forum for shareholders to evaluate the performance of the Bank's Board of Directors and Board of Commissioners.

The implementation of the GMS of Bank Muamalat is based on several provisions, including:

1. Law No. 40 of Year 2007 regarding Limited Liability Companies as amended by Government PERPU (Regulation in Lieu of Law) No. 2 of Year 2022 on Job Creation.
2. OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.
3. OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically.
4. Financial Services Authority Regulation (POJK) No 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks.
5. The Bank's Articles of Association.
6. Internal Procedures related to the Implementation of the General Meeting of Shareholders.
7. Other relevant laws and regulations.



JENIS RUPS

Sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, terdapat 2 (dua) jenis RUPS yang mencakup:

1. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan ialah RUPS yang diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku atau batas waktu yang ditentukan oleh OJK. Agenda utama RUPS Tahunan terdiri dari pengajuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan dari Direksi untuk disahkan dan disetujui oleh Pemegang Saham. Agenda lainnya ialah penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku berikutnya, pengesahan penggunaan laba, pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris serta hal-hal lain yang diperlukan.

2. RUPS Luar Biasa atau RUPS Lainnya

RUPS Luar Biasa atau RUPS Lainnya ialah RUPS yang pelaksanaannya tidak terbatas oleh ketentuan waktu, dapat diselenggarakan kapan saja sesuai keperluan perusahaan oleh Dewan Komisaris atau Direksi, atas permintaan dari Pemegang Saham.

WEWENANG RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham memiliki wewenang tertinggi dalam Tata Kelola Perusahaan yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris maupun Direksi, yang batasannya ditentukan dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Anggaran Dasar Bank dan peraturan terkait lainnya. Wewenang RUPS yaitu:

1. Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Melakukan pengesahan perubahan Anggaran Dasar;
3. Memberikan persetujuan atas Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan;
4. Memutuskan alokasi penggunaan laba;
5. Menunjuk dan menetapkan biaya jasa akuntan publik;
6. Memutuskan jumlah dan jenis kompensasi serta fasilitas pengurus;

TYPES OF GMS

In accordance with Law No. 40 of Year 2007 regarding Limited Liability Companies and OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 of Year 2020 regarding Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, there are 2 (two) types of GMS, namely as follows:

1. Annual GMS

Annual GMS is a GMS held no later than 6 (six) months after the end of the financial year or the deadline determined by OJK. The main agenda of the AGM consists of the submission of Financial Statements and Annual Reports from the Board of Directors to be ratified and approved by the Shareholders. Other agendas are the appointment of a Public Accountant Firm for the next financial year, ratification of the use of profit, appointment or dismissal of members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners and other necessary matters.

2. Extraordinary GMS or Other GMS

Extraordinary GMS or Other GMS is a GMS whose implementation is not limited by time provisions, can be held at any time according to the needs of the company by the Board of Commissioners or the Board of Directors, at the request of the Shareholders.

AUTHORITY OF THE GMS

The General Meeting of Shareholders has the highest authority in Corporate Governance that is not vested in the Board of Commissioners or the Board of Directors, the limits of which are determined in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies, Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.04/2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector, the Bank's Articles of Association and other relevant regulations. The authority of the GMS are:

1. Evaluate the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors;
2. To approve amendments to the Articles of Association;
3. To approve the Board of Directors' Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Financial Statements;
4. Decide the allocation of profit utilization;
5. Appoint and determine the public accountant service fee;
6. Deciding on the amount and type of compensation and facilities for the management;



7. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya masing-masing;
8. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menentukan dan membayar dividen final;
9. Mengambil keputusan-keputusan menyangkut struktur organisasi misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi Perseroan;
10. Mengangkat dan/atau mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
11. Menetapkan remunerasi yakni penetapan gaji, tunjangan lain serta honorarium Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan;
12. Memberi persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
13. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;
14. Menetapkan Pihak yang menjadi Pengendali dari Perusahaan Terbuka.

HAK PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank dan peraturan terkait, pemegang saham memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Pemegang saham dapat melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS. Permintaan tersebut dapat dilakukan atas permintaan: 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
2. Menghadiri dan memberikan hak suara di RUPS berdasarkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan tata tertib RUPS.
3. Pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Bank.
4. Menerima dividen saham dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan keputusan RUPS.
5. Menerima informasi mengenai tata tertib RUPS dan prosedur voting di dalam RUPS.
6. Hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

7. To approve the Annual Report, including the Company's Financial Statements and the Board of Commissioners' Supervisory Report, and to release and discharge the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from their respective management and supervisory duties;
8. To authorize the Board of Directors to determine and pay the final dividend;
9. Make decisions regarding the organizational structure such as amendments to the Articles of Association, merger, consolidation, separation, dissolution and liquidation of the Company;
10. Appoint and/or change the composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
11. Determining remuneration, namely determining the salary, other benefits and honorarium of the Sharia Supervisory Board, Board of Directors, and Board of Commissioners of the Company;
12. Give approval to transactions that contain conflicts of interest;
13. Granting power and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm (KAP) by taking into account the recommendations of the Audit Committee;
14. Determining the Party that becomes the Controller of the Public Company.

SHAREHOLDER RIGHTS

Based on the Bank's Articles of Association and relevant regulations, shareholders have the following rights:

1. Shareholders may make a request to hold a GMS. Such request may be made by 1 (one) or more shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights, unless the articles of association specify a smaller number.
2. Attend and vote at the GMS based on the applicable terms and conditions and the GMS rules of procedure.
3. Shareholders are entitled to obtain information on the agenda of the meeting and materials related to the agenda of the meeting as long as it does not conflict with the interests of the Bank.
4. Receive stock dividends with terms and conditions in accordance with the GMS resolution.
5. Receive information regarding the GMS rules and voting procedures in the GMS.
6. Other rights in accordance with the relevant laws and regulations.



PELAKSANAAN RUPS TAHUN BUKU 2023

Sepanjang tahun 2023, Bank Muamalat Indonesia telah melaksanakan 2 (dua) kali RUPS, yang mencakup: 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa.

RUPS Tahunan

RUPS Tahunan (RUPST) diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2023.

DAFTAR PESERTA RUPS TAHUNAN

List of AGM Participants

No.	Nama Name	Jabatan	Position
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board			
1	Sholahudin Al Aiyub	Ketua	Chairman
2	Siti Haniatunnisa	Anggota	Member
3	Agung Danarto	Anggota	Member
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
1	Mardiasmo ^{*)}	Komisaris Utama Independen	Independent President Commissioner
2	Amin Said Husni	Komisaris Independen	Independent Commissioner
3	Sartono	Komisaris Independen	Independent Commissioner
4	Andre Mirza Hartawan	Komisaris	Commissioner
Direksi Board of Directors			
1	Indra Falatehan	Direktur Utama	President Director
2	Karno	Direktur Kepatuhan	Director of Compliance
3	Hery Syafril	Direktur	Director
4	Wahyu Avianto	Direktur	Director
5	Suhendar	Direktur	Director

*) Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.
Effective upon receiving affirmation from OJK on passing the Fit and Proper Test.

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan atau Pendapat pada Rapat

Dalam tiap-tiap Mata Acara RUPS Tahunan telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/usulan terkait mata acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan selalu dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka yang melibatkan pihak independen yang dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

Keterlibatan Pihak Independen dalam Penghitungan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam setiap agenda RUPS Tahunan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Sehingga tidak terdapat pengambilan keputusan dalam agenda RUPS yang dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka yang melibatkan pihak independen.

IMPLEMENTATION OF GMS OF FISCAL YEAR 2023

During the year 2023, Bank Muamalat Indonesia held the GMS 2 (two) times, consisted of 1 (one) Annual GMS and 1 (one) Extraordinary GMS.

Annual GMS

The Annual General Meeting of Shareholders (AGM) was held on May 11, 2023.

Opportunity to Raise Questions and or Opinions at the Meeting

In each Agenda of the Annual GMS, opportunities were given to shareholders and/or their proxies to raise questions and/ or give opinions/suggestions related to the agenda of the Meeting.

Mechanism of Making Meeting Resolutions

Decision-making in the Annual GMS is always carried out through deliberation for consensus. However, if deliberation for consensus is not achieved, the decision making in the meeting is carried out by open voting conducted by PT Datindo Entrycom as the Company's Securities Administration Bureau.

Involvement of Independent Parties in Vote Counting

The decision-making mechanism in each agenda of the Annual GMS is carried out by deliberation for consensus. Therefore, there is no decision making in the agenda of the AGM which is carried out by open voting involving independent parties.



TAHAPAN PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN

Stages of Implementation of Annual GMS

Pemberitahuan Notification	Pengumuman Announcement	Pemanggilan Invitation	Pelaksanaan Implementation	Hasil dan Keputusan Result and Decision
- Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat beserta Mata Acara Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK melalui surat nomor 055/B/PRD-SRT/III/2023 dan kepada Komisiner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah OJK melalui surat nomor 056/B/PRD-SRT/III/2023, keduanya tertanggal 24 Maret 2023 perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bank Muamalat Indonesia ("Perseroan"). - Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan perubahan mata acara Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK nomor 070/B/PRD-SRT/IV/2023 dan Deputi Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah OJK melalui Surat Nomor 073/B/PRD-SRT/IV/2023 keduanya tertanggal 17 April 2023 perihal Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan").	Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat, telah dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" dan melalui <i>website</i> Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.	Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan pada tanggal 18 April 2023 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" dan melalui <i>website</i> Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.	Bank melaksanakan RUPS Tahunan (RUPST) pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 09.41 WIB s.d. 11.18 WIB bertempat di Ballroom BJ Habibie – Muamalat Tower Lantai 2, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia.	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan telah diumumkan pada tanggal 15 Mei 2023 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" dan melalui <i>website</i> Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- The Company submitted notification of the plan to hold the Meeting with Meeting Agenda to the Chief Executive of the Capital Market Supervisory Board, Derivative Finance and the OJK Carbon Exchange via Letter No. 055/B/PRD-SRT/III/2023 and to the Commissioner for Supervision of the Government and Sharia Banks of the OJK via letter No. 056/B/PRD-SRT/III/2023, both dated 24 March 2023 regarding Notification of Plans to Hold the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of Pt Bank Muamalat Indonesia ("Company"). - The Company submitted notification of changes to the Meeting Agenda fo the Chief Executive of the Capital Market Supervisory Board, Derivative Financia and the OJK Carbon Exchange No 070/B/PRD-SRT/IV/2023 and to the Deputy Supervisor of Government and Sharia Banks of the OJK via Letter No. 073/B/PRD-SRT/IV/2023 both dated 17 April 2023 regarding Changes to the Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Company").	Announcement to shareholders on the invitation to the Meeting via 1 (one) Indonesia-language daily newspaper with national circulation, namely "Harian Ekonomi Neraca (Ekonomi Neraca Daily)" and through the Company's Website on March 31, 2023 in Indonesian and English.	Invitation to shareholders on the implementation of the Meeting was published on 18 April, 2023 through 1 (one) Indonesian-language daily newspaper with national circulation, namely the "Harian Ekonomi Neraca (Ekonomi Neraca Daily)" and through the Company's Website in Indonesian and English.	The Bank held the Annual GMS (AGMS) on 11 May 2023 at 09:41 WIB to 11.18 WIB (Western Indonesian Time) at the BJ Habibi Ballroom – Muamalat Tower, 2nd Floor, Jl. Prof. DR Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia.	Summary of the Minutes of Meetingof the Annual GS was announced on May 15, 2023 through 1 (one) Indonesian-language daily newspaper with national circulation, namely the "Harian Ekonomi Neraca (Ekonomi Neraca Daily)" and through the Company's Website in Indonesian and English.



Keputusan dan Realisasi RUPST Tahun 2023

Seluruh Keputusan rapat telah disahkan dalam RUPS Tahunan tanggal 11 Mei 2023.

Resolutions and Realization of AGMS 2023

All resolutions of the meeting have been ratified at the Annual GMS on May 11, 2023.

AGENDA, KEPUTUSAN, DAN REALISASI RUPST TAHUN 2023

Agenda, Resolution, and Realization of AGMS Year 2023

No.	Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan & Pendapat/Usulan Total Shareholders Who Posed Questions and Opinions/ Suggestions	Pengambilan Keputusan Decision Making	Keputusan Decision	Realisasi Realization
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2022 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.	Terdapat 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan tanggapan.	Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat.	1) Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A), afiliasi BKR International, sesuai laporan Nomor 00003/2.0936/AU.4/07/0396-2/1/ II/2023 tanggal 17 Februari 2023 dengan Opini Wajar dalam, tanggal 17 Februari 2023 dengan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material, posisi keuangan PT Bank Muamalat Tbk tanggal 31 Desember 2022, dan kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. / 2) Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	Sudah direalisasikan pada tahun 2023 dan Laporan Tahunan Perseroan telah disampaikan kepada OJK melalui surat No. 078/B/PRD-SRT/IV/2023 dan No. 079/B/PRD-SRT/IV/2023 tanggal 18 April 2023 kepada pihak-pihak terkait dan kepada lembaga-lembaga terkait.



No.	Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan & Pendapat/Usulan Total Shareholders Who Posed Questions and Opinions/ Suggestions	Pengambilan Keputusan Decision Making	Keputusan Decision	Realisasi Realization
	Approval of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2022 including the Report of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for Fiscal Year 2022 as well as the ratification of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2022.	2 (two) shareholders and/or shareholder proxies submitted their responses.	Decision-making was carried out by deliberation to reach unanimous consensus.	1) Approved and accepted the Company's Annual Report including Report of the Supervisory Duties carried out by the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for the Fiscal Year which ended on 31 December 2022 and ratified the Consolidated Financial Statements for Fiscal Year which ended on 31 December 2022 audited by the Public Accounting Firm Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A), an affiliate of BKR International, according to report No. 00003/2.0936/AU.4/07/0396-2/1/II/2023 dated 17 February 2023 with a Fair Opinion in All Material Matters, financial position of PT Bank Muamalat Tbk on 31 December 2022, and financial performance, cash flow, reconciliation of income and profit sharing, sources and distribution of zakat funds as well as sources and use of benevolent funds for the year which ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia. 2) Granted full release and discharge of responsibilities (volledig acquit et decharge) to the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for supervisory and management actions carried out during the financial year which ended on 31 December 2022, as long as these actions do not constitute criminal acts and actions reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for fiscal year which ended on 31 December 2022.	Actualized in 2023 and the Company's Annual Report was submitted to OJK through Letter No. 078/B/PRD-SRT/IV/2023 and No. 079/B/PRD-SRT/IV/2023 dated 18 April 2023 to related parties and related institutions.



No.	Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan & Pendapat/Usulan Total Shareholders Who Posed Questions and Opinions/ Suggestions	Pengambilan Keputusan Decision Making	Keputusan Decision	Realisasi Realization
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.	Terdapat 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan usulan.	Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat.	Menyetujui pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebesar 18,8% (delapan belas koma delapan per seratus) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 atau sebesar Rp5.001.774.144,- (lima miliar satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh empat Rupiah), dengan memperhatikan persetujuan yang diperlukan, dan sisa dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 tersebut secara keseluruhan akan dipergunakan untuk Cadangan Umum Perseroan.	Pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebesar 18,8% (delapan belas koma delapan per seratus) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 atau sebesar Rp5.001.774.144,- telah direalisasikan pada tahun 2023 kepada para pemegang saham yang mengajukan permohonan pembayaran dividen. Adapun untuk keterbukaan informasi mengenai Tata Cara Pembagian Dividen Tunai telah diumumkan kepada pemegang saham pada tanggal 15 Mei 2023 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" dan melalui <i>website</i> Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
	Determining the Use of the Company's Net Profit for the 2022 Fiscal Year.	2 (two) shareholders and/or shareholder proxies submitted their responses	Decision-making was carried out by deliberation to reach unanimous consensus.	Approved the distribution of dividends to Shareholders at the amount of 18.8% (eighteen point eight percent) of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2022 or Rp5,001,774,144,- (five billion one million seven hundred seventy-four thousand one hundred forty-four rupiah), taking into account the necessary approvals, and the remainder of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2022 as a whole to be used for the Company's General Reserves.	Dividend distribution to Shareholders of 18.8% (eighteen point eight percent) of the Company's Net Profit for the 2022 Fiscal Year or Rp5,001,774,144,- was actualized in 2023 to shareholders who submitted applications for dividend payments. The disclosure of information regarding the Procedures for Distribution of Cash Dividends was announced to shareholders on 15 May 2023 through 1 (one) Indonesian-language daily newspaper, namely "Harian Ekonomi Neraca (Harian Neraca Daily)" and through the Company's Website in Indonesian and English.



No.	Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan & Pendapat/Usulan Total Shareholders Who Posed Questions and Opinions/ Suggestions	Pengambilan Keputusan Decision Making	Keputusan Decision	Realisasi Realization
3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2023 and other audits required by the Company.	Terdapat 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan usulan. 2 (two) shareholders and/or shareholder proxies submitted their responses.	Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat. Decision-making was carried out by deliberation to reach unanimous consensus.	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk harus merupakan Kantor Akuntan Publik yang dapat diandalkan dan memiliki reputasi yang baik; 2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan dengan tata kelola yang baik; 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to appoint, terminate and/or replace the Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2023 and/or other audits required by the Company as well as to determine the amount of honorarium and other reasonable appointment requirements for the Public Accounting Firm. For the delegation of authority, the following provisions are applicable: 1. The appointed Public Accounting Firm must be a Public Accounting firm that is reliable with good reputation; 2. The appointment of a Public Accounting Firm is carried out with good governance; 3. The appointment of the Public Accounting Firm does not conflict with applicable laws and regulations.	Sudah direalisasikan pada tahun 2023 dan Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit. Penunjukan berdasarkan surat Dewan Komisaris tanggal 26 Oktober 2023 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No. 113/B/FSD-SRT/XI/2023 tanggal 23 November 2023. Actualized in 2023 and the Board of Commissioners appointed a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2023 based on recommendations from the Audit Committee. The appointment was based on a letter from the Board of Commissioners dated October 26, 2023 and was reported to OJK via letter No. 113/B/FSD-SRT/XI/2023 dated November 23, 2023.
4	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023.	Terdapat 3 (tiga) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan usulan.	Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat.	1. Perseroan menyetujui penetapan Gaji, Uang Jasa dan Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2023 tidak mengalami perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan untuk tahun 2022. 2. Perseroan menyetujui penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun 2023 tidak mengalami perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan untuk tahun 2022. Rapat juga menyetujui penetapan Gaji, Uang Jasa dan Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Honorarium dan Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.	Sudah direalisasikan pada tahun 2023, dimana sesuai dengan amanat RUPS, tidak terdapat perubahan Gaji, Uang Jasa dan Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Honorarium dan Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun 2023.



No.	Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan & Pendapat/Usulan Total Shareholders Who Posed Questions and Opinions/ Suggestions	Pengambilan Keputusan Decision Making	Keputusan Decision	Realisasi Realization
	Determining the salaries or honorarium and allowances for members of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners for the year 2023.	3 (three) shareholders and/or shareholder proxies submitted their responses.	Decision-making was carried out by deliberation to reach unanimous consensus.	- The Company agreed that the salaries, service fees and other allowances for members of the Board of Directors in 2023 remain the same as determined for the year 2022. - The Company agreed to determine the Honorarium and or Allowances for members of the Company's Sharia Supervisory Board for the year 2023 will remain the same as determined for the year 2022. The Meeting also approved on determining the salaries, services fees and other allowances for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as honorarium and allowances for members of the Company's Sharia Supervisory Board to be based on the GMS resolutions.	Realized in 2023, in accordance with the mandate of the GMS, that there will be no changes to the Salaries, Service Fees and other Allowances for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as the Honorarium and Allowances for members of the Sharia Supervisory Board for the year 2023.
5	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Amendments to the Articles of Association.	Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat/usulan. There were no shareholders and/or shareholder proxies who submitted their questions and/or opinions/suggestions.	Tidak dilakukan pengambilan keputusan dalam Rapat karena pembahasan Mata Acara Rapat ditunda. There was no decision-making at the Meeting as discussions on the Meeting Agenda were postponed.	Mata Acara "Perubahan Anggaran Dasar Perseroan" tidak dilakukan pembahasan dalam Rapat dan akan diagendakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terdekat. The agenda on "Amendments to the Company's Articles of Association" was not discussed at the Meeting and will be included in the agenda of the nearest Extraordinary General Meeting of Shareholders or Annual General Meeting of Shareholders.	Tidak terdapat realisasi karena pembahasan Mata Acara Rapat ditunda. There was no realization as discussions of the Meeting Agenda were postponed.
6	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Changes in the Composition of the Company's Management.	Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat/usulan. There were no shareholders and/or shareholder proxies who submitted their questions and/or opinions/suggestions.	Tidak dilakukan pengambilan keputusan dalam Rapat karena pembahasan Mata Acara Rapat ditunda. There was no decision-making at the Meeting as discussions on the Meeting Agenda were postponed.	Mata Acara "Perubahan Susunan Pengurus Perseroan" tidak dilakukan pembahasan dalam Rapat dan akan diagendakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terdekat. The agenda on "Changes in the Composition of the Company's Management" was not discussed at the Meeting and will be included in the agenda of the nearest Extraordinary General Meeting of Shareholders or Annual General Meeting of Shareholders.	Tidak terdapat realisasi karena pembahasan Mata Acara Rapat ditunda. There was no realization as discussions of the Meeting Agenda were postponed.

Alasan Belum Terealisasinya Keputusan

Seluruh hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 11 Mei 2023 telah direalisasikan pada tahun 2023.

Reasons for Unrealized Resolutions

All resolutions of the Annual GMS of 11 May 2023 were realized in 2023.



RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa (RUPSLB) diselenggarakan pada tanggal 13 November 2023.

Extraordinary GMS

The Extraordinary GMS (EGMS) was held on November 13, 2023.

DAFTAR PESERTA RUPS LUAR BIASA

List of the Extraordinary GMS Participants

No.	Nama Name	Jabatan	Position
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board			
1	Sholahudin Al Aiyub	Ketua	Chairman
2	Agung Danarto	Anggota	Member
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
1	Mardiasmo ^{*)}	Komisaris Utama Independen	Independent President Commissioner
2	Amin Said Husni	Komisaris Independen	Independent Commissioner
3	Sartono	Komisaris Independen	Independent Commissioner
4	Andre Mirza Hartawan	Komisaris	Commissioner
Direksi Board of Directors			
1	Indra Falatehan	Direktur Utama	President Director
2	Karno	Direktur Kepatuhan	Director of Compliance
3	Hery Syafil	Direktur	Director
4	Wahyu Avianto	Direktur	Director
5	Suhendar	Direktur	Director

*) Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.
Effective upon receiving affirmation from OJK on passing the Fit and Proper Test.

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan atau Pendapat pada Rapat

Dalam tiap-tiap Mata Acara RUPS Luar Biasa telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/usulan terkait mata acara Rapat

Opportunity to Raise Questions and or Give Opinions at the Meeting

In each Agenda of the First Extraordinary GMS, opportunities were given to the shareholders and/or their proxies to raise questions and/or give opinions/suggestions related to the agenda of the Meeting.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam setiap agenda RUPS Tahunan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Sehingga tidak terdapat pengambilan keputusan dalam agenda RUPS yang dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka yang melibatkan pihak independen.

Mechanism for Making Meeting Resolutions

The mechanism of decision-making in every agenda of the Annual GMS is carried out through deliberation to reach consensus. Thus, there would be no decision-making in GMS agenda conducted by means of open voting that involves an independent party.

Keterlibatan Pihak Independen dalam Penghitungan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam setiap agenda RUPS Tahunan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Sehingga tidak terdapat pengambilan keputusan dalam agenda RUPS yang dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka yang melibatkan pihak independen.

Involvement of Independent Parties in Vote Counting

The decision-making mechanism in the agenda of the First Extraordinary GMS was carried out by deliberation for consensus. Therefore, there is no decision making in the agenda of the GMS which is carried out by open voting involving independent parties.



TAHAPAN PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA

Implementation Stages of Extraordinary GMS

Pemberitahuan Notification	Pengumuman Announcement	Pemanggilan Invitation	Pelaksanaan Implementation	Hasil dan Keputusan Result and Decision
- Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat beserta Mata Acara Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK melalui surat nomor 225/B/PRD-SRT/IX/2023 dan kepada Komisiner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah OJK melalui surat nomor 226/B/PRD-SRT/IX/2023, keduanya tertanggal 27 September 2023 perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Bank Muamalat Indonesia ("Perseroan"). - Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan perubahan mata acara Rapat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK melalui surat nomor 247/B/PRD-SRT/X/2023 dan kepada Komisiner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah OJK melalui surat nomor 248/B/PRD-SRT/X/2023, keduanya tertanggal 19 Oktober 2023 perihal Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.	Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat, telah dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" dan melalui <i>website</i> Perseroan pada tanggal 5 Oktober 2023 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.	Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2023 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" dan melalui <i>website</i> Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.	Bank melaksanakan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 13 November 2023 pukul 10.10 s.d. 10.45 WIB bertempat di Ballroom BJ Habibie – Muamalat Tower Lantai 2, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia.	Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa telah diumumkan pada tanggal 14 November 2023 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" dan melalui <i>Website</i> Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- The Company submitted the notification of the plan to hold the Meeting along with the Meeting Agenda to the Chief Executive of the Capital Market Supervision, Derivative Finance and OJK Carbon Exchange through letter No. 225/B/PRD-SRT/IX/2023 and to the OJK Commissioner for the Supervision of Government and Sharia Banks through letter No. 226/B/PRD-SRT/IX/2023, both dated September 27, 2023 regarding Notification of Plans to Hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Bank Muamalat Indonesia ("Company"). - The Company submitted the notification of changes to the agenda for the Meeting to the Chief Executive of Capital Market Supervision, Derivative Finance, and OJK Carbon Exchange through letter No. 247/B/PRD-SRT/X/2023 and to the ojk Commissioner for the Supervision of Government and Sharia Banks through letter No. 248/B/PRD-SRT/X/2023, both dated October 19, 2023 regarding Changes to the Agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.	Announcement to shareholders regarding plans for the upcoming Invitation to the Meeting through 1 (one) Indonesian-language daily newspaper with national circulation, namely the "Harian Ekonomi Neraca (Ekonomi Neraca Daily)" and through the Company's Website on October 5, 2023 in Indonesian and English.	Invitation to shareholders to the Meeting published on October 20, 2023 through 1 (one) Indonesian-language daily newspaper with national circulation, namely the "Harian Ekonomi Neraca (Ekonomi Neraca Daily)" and through the Company's Website in Indonesian and English.	The Bank held the Extraordinary GMS (EGMS) on November 13, 2023 at 10.10 to 10.45 WIB (Western Indonesian Time) at the BJ Habibie Ballroom – Muamalat Tower, 2nd Floor, Jl. Prof. DR Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia.	The summary of the Minutes of Meeting of the Extraordinary GMS was announced on November 14, 2023 through 1 (one) Indonesian-language daily newspaper with national circulation, namely the "Harian Ekonomi Neraca (Ekonomi Neraca Daily)" and through the Company's Website in Indonesian and English.

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa

Seluruh Keputusan rapat telah disahkan dalam RUPS Luar Biasa tanggal 13 November 2023.

Resolutions and Realization of Extraordinary GMS

All resolutions of the meeting have been ratified at the Extraordinary GMS on November 13, 2023.



No.	Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan & Pendapat/Usulan Total Shareholders Who Posed Questions and Opinions/ Suggestions	Pengambilan Keputusan Decision Making	Keputusan Decision	Realisasi Realization
1	Persetujuan Penggabungan Nilai Nominal Saham (<i>Reverse Stock Split</i>).	Terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan.	Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat.	Menyetujui Penggabungan Saham Perseroan (<i>Reverse Stock Split</i>) dengan Rasio 3:2 (tiga banding dua), sehingga nilai nominal saham: 1. Seri A dari semula Rp200,00 (dua ratus rupiah) per saham menjadi Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per saham; 2. Seri B dari semula Rp100,00 (seratus rupiah) per saham menjadi Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) per saham; dan 3. Seri C dari semula Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per saham menjadi Rp45,00 (empat puluh lima rupiah) per saham.	Keputusan berkenaan dengan Penggabungan Nilai Nominal Saham (<i>Reverse Stock Split</i>) telah dituangkan ke dalam akta Notaris No. 6 tanggal 13 November 2023 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn dan telah memberitahukannya kepada pihak yang berwenang.
	Approval on Merger of Nominal Value of Shares (<i>Reverse Stock Split</i>).	1 (one) shareholder and/or shareholder proxy posed responses.	Decision-making was based on deliberation to reach unanimous consensus.	Approved the Merger of Company Shares (<i>Reverse Stock Split</i>) with Ratio 3:2 (three to two) that shares nominal value are as follows: 1. Series A from Rp200.00 (two hundred rupiah) per share to Rp300.00 (three hundred rupiah) per share; 2. Series B from Rp100.00 (one hundred rupiah) per share to Rp150.00 (one hundred and fifty rupiah) per share; and 3. Series C from Rp30.00 (thirty rupiah) per share to Rp45.00 (fourtyfive rupiah) per share.	The resolution regarding the Merger of of Shres Nominal Value (<i>Reverse Stock Split</i>) was stated in Notarial Deed No. 6 datd 13 November 2023 by Notary Ashoya Ratam, S.H.M.Kn and was notified accordingly to the authorities.
2	Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat/usulan.	Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat.	1. Menyetujui penambahan Modal Dasar sebesar Rp 115,00 (seratus lima belas rupiah) dan penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor sebesar Rp30,00 (tiga puluh rupiah) sebagai akibat dari Penggabungan Saham atau <i>Reverse Stock Split</i> . 2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi sebagai berikut: Pasal 4.1 Modal Dasar dan Nilai Nominal Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp5,600,000,000,115.00 (lima triliun enam ratus miliar seratus lima belas rupiah) yang terbagi atas 55,448,900,551 (lima puluh lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu lima ratus lima puluh satu) lembar saham, yang terdiri dari: a. Sejumlah 551.099.450 (lima ratus lima puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh) lembar saham Seri A masing masing dengan nilai nominal Rp300,00 (tiga ratus rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp165.329.835.000,00 (seratus enam puluh lima miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah); b. Sejumlah 28.231.134.434 (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat) lembar saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp4.234.670.165.100,00 (empat triliun dua ratus tiga puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh lima ribu seratus rupiah);	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah direalisasikan dan dituangkan dalam Akta No. 6 tanggal 13 November 2023 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tertanggal 20 November 2023 No. AHU-0071588. AH.01.02.



No.	Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan & Pendapat/Usulan Total Shareholders Who Posed Questions and Opinions/ Suggestions	Pengambilan Keputusan Decision Making	Keputusan Decision	Realisasi Realization
				c. Sejumlah 26.666.666.667 (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) lembar saham Seri C masing-masing dengan nilai nominal Rp45,00 (empat puluh lima rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp1.200.000.000.015,00 (satu triliun dua ratus miliar lima belas rupiah). Pasal 4.2 Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh 33.345.160.962 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua) lembar saham yang terdiri dari: a. 551.099.450 (lima ratus lima puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh) lembar saham Seri A dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp165.329.835.000,00 (seratus enam puluh lima miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah); b. 6.254.035.440 (enam miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh) lembar saham Seri B dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp938.105.316.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan miliar seratus lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah); c. 26.540.026.072 (dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh dua juta dua puluh enam ribu tujuh puluh dua) lembar saham Seri C dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.194.301.173.240,00 (satu triliun seratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah); d. dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.297.736.324.240,00 (dua triliun duaratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu duaratus empat puluh rupiah). 3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	



No.	Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan & Pendapat/Usulan Total Shareholders Who Posed Questions and Opinions/ Suggestions	Pengambilan Keputusan Decision Making	Keputusan Decision	Realisasi Realization
	Approval on Amendments to the Company's Articles of Association.	There were no shareholders and/or shareholder proxies who posed question and/or opinion/suggestion.	Decision-making was based on deliberation to reach unanimous consensus.	1. Approved the additional Authorized Capital of Rp115.00 (one hundred and fifty rupiah) and additional Issued Capital and Paid-Up Capital of Rp30.00 (thirty rupiah) as a result from the Merger of Shares or Reverse Stock Split. 2. Approved the amendment in Article 4 paragraph 1 and 2 of the Company's Articles of Association as follows: Article 4.1. Company's Authorized Capital and Nominal Value of Authorized Capital amount to Rp5,600,000,000,115.00 (five trillion six hundred billion one hundred and fifteen rupiah) divided into 55,448,900,551 (fifty-five billion four hundred forty-eight million nine hundred thousand five hundred and fifty-one) shares, consisting of the following: a. A total of 551,099,450 (five hundred fifty-one million ninety-nine thousand four hundred and fifty) Series A shares each with a nominal value of Rp300.00 (three hundred rupiah) or a total nominal value of Rp165,329,835,000.00 (one hundred sixty-five billion three hundred twenty-nine million eight hundred thirty-five thousand rupiah); b. A total of 28,231,134,434 Series B shares each with a nominal value of Rp150.00 (one hundred and fifty rupiah) or a total nominal value of Rp4,234,670,165,100.00 (four trillion two hundred thirty-four billion six hundred seventy million one hundred sixty-five thousand one hundred rupiah); c. A total of 26,666,666,667 (twenty-six billion six hundred sixty-six million six hundred sixty-six thousand six hundred sixty-seven) Series C shares each with a nominal value of Rp45.00 (forty-five rupiah) or the total nominal value of Rp1,200,000,000,015.00 (one trillion two hundred billion fifteen rupiah). Article 4.2 Authorized Capital and Paid-Up Capital From the said authorized capital, 33,345,160,962 (thirty-three billion three hundred forty-five million one hundred sixty thousand nine hundred and sixty-two) shares were issued and subscribed and paid-up, consisting of the following: a. 551,099,450 (five hundred fifty-one million ninety-nine thousand four hundred and fifty) Series A shares with a total nominal value of Rp165,329,835,000.00 (one hundred sixty-five billion three hundred twenty-nine million eight hundred thirty-five thousand rupiah); b. 6,254,035,440 (six billion two hundred fifty-four million thirty-five thousand four hundred and forty) Series B shares with a total nominal value of Rp938,105,316,000.00 (nine hundred thirty-eight billion one hundred five million three hundred sixteen thousand rupiah);	Amendments to the Company's Articles of Association were realized and stated in Deed No. 6 dated 13 November 2023 made before Notary Ashoy Ratam, S.H. M. Kn., and obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with his Decree dated November 20, 2023 No. AHU-0071588. AH.01.02.



No.	Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan & Pendapat/Usulan Total Shareholders Who Posed Questions and Opinions/ Suggestions	Pengambilan Keputusan Decision Making	Keputusan Decision	Realisasi Realization
				c. 26,540,026,072 (twenty-six billion five hundred forty million twenty-six thousand seventy-two) Series C shares with a total nominal value of Rp1,194,301,173,240.00 (one trillion one hundred ninety-four billion three hundred one million one hundred seventy-three thousand two hundred and forty rupiah); d. with a total nominal value of Rp2,297,736,324,240.00 (two trillion two hundred ninety-seven billion seven hundred thirty-six million three hundred twenty-four thousand two hundred and forty rupiah) 3. Approved the granting of authority to the Board of Directors with the right to substitution, to restate the decision regarding changes to the Articles of Association into a Notarial deed and notify authorized parties and in connection with this matter, to do everything necessary in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.	
3	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Changes in the Composition of the Company's Management.	Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat/usulan. There were no shareholders and/or shareholder proxies who posed question and/or opinion/suggestion.	Tidak dilakukan pengambilan keputusan dalam Rapat karena pembahasan Mata Acara Rapat ditunda. There was no decision-making as discussions on the Meeting Agenda were postponed.	Mata Acara: "Perubahan Susunan Pengurus Perseroan" tidak dilakukan pembahasan dalam Rapat dan karenanya Rapat tidak mengambil keputusan. Agenda: "Changes in the Composition of the Company's Management" was not discussed, thus, the Meeting did not make any decision on this matter.	Tidak terdapat realisasi karena pembahasan mata acara Rapat tidak dilakukan pembahasan dalam Rapat. There no realization as discussions on the Meeting Agenda were not carried out in the Meeting.

Alasan Belum Terealisasinya Keputusan

Seluruh hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 13 November 2023 telah direalisasikan pada tahun 2023.

Reason for Unrealized Resolutions

All resolutions of the Extraordinary GMS dated November 13, 2023 were realized in the year 2023.



KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS TAHUN SEBELUMNYA

RESOLUTIONS AND REALIZATION OF PREVIOUS GMS

Keputusan RUPS Tahunan 24 Juni 2022

Resolutions of Annual GMS June 24, 2022

No	Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2021 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021. Approval of the Company's Annual Report for the Financial Year 2021, including the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board Oversight Report for the Financial Year 2021, and ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2021.	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2021 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, maka berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Approved the Company's Annual Report for the Financial Year 2021, including the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for the Financial Year 2021 and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year 2021. Furthermore, with the approval of the Company's Annual Report for the 2021 Financial Year including the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for the 2021 Financial Year and the ratification of the Company's Financial Statements for the 2021 Financial Year, it means that the Meeting has given full release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board of the Company for the management and supervision of the Company that has been carried out during the 2021 Financial Year, as long as such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company for the 2021 Financial Year and do not constitute a criminal offense or violation of the provisions of the applicable laws and regulations.	Sudah direalisasikan pada tahun 2022 dan Laporan Tahunan Perseroan telah disampaikan kepada OJK melalui surat No. 140/B/PRD-SRT/IV/2022 dan No. 141/B/PRD-SRT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 kepada pihak-pihak terkait dan kepada lembaga-lembaga terkait It has been realized in 2022 and the Company's Annual Report has been submitted to OJK through letters No. 140/B/PRD-SRT/IV/2022 and No. 141/B/PRD-SRT/IV/2022 dated 28 April 2022 to related parties and to related institutions.
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021. Approval of the Use of the Company's Net Income for the Financial Year 2021.	Menyetujui laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021 setelah Pajak sebesar Rp8.927.050.660 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu enam ratus enam puluh Rupiah) seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak diadakan pembagian dividen atas laba bersih Perseroan Tahun Buku 2021. Approved that the Company's net profit for the Financial Year 2021 after tax amounting to Rp8,927,050,660 (eight billion nine hundred twenty seven million fifty thousand six hundred sixty Rupiah) will be used entirely for the Company's reserves, so that no dividend distribution will be made on the Company's net profit for the Financial Year 2021.	Sudah direalisasikan pada tahun 2022 dan Laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021 tidak dibagikan dan dipergunakan untuk cadangan Perseroan It has been realized in 2022 and the Company's net profit for the Financial Year 2021 is not distributed and used for the Company's reserves.
3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan Appointment of a Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2022 and other audits required by the Company.	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan tersebut diusulkan untuk efektivitas proses penunjukan, pengakhiran, dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang sesuai dengan kondisi Perseroan dan akan dilaksanakan dengan kriteria atau batasan yang dianggap sesuai oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan kondisi Perseroan. Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint, terminate and/or replace the Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2022 and/or other audits required by the Company and to determine the amount of honorarium and other reasonable appointment requirements for the Public Accounting Firm. The granting of authority to the Board of Commissioners of the Company is proposed for the effectiveness of the process of appointment, termination, and/or replacement of the Public Accounting Firm in accordance with the conditions of the Company and will be carried out with criteria or limits deemed appropriate by the Board of Commissioners of the Company with the conditions of the Company.	Sudah direalisasikan pada tahun 2022 dan Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit. Penunjukan berdasarkan audit Dewan Komisaris tanggal 18 November 2022 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No. 163/B/FND-SRT/XI/2022 tanggal 28 November 2022. It has been realized in 2022 and the Board of Commissioners has appointed a Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2022 based on recommendations from the Audit Committee. The appointment is based on the Board of Commissioners' letter dated November 18, 2022 and has been reported to OJK through letter No. 163/B/FND-SRT/XI/2022 dated November 28, 2022.



No	Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
4	Persetujuan tindakan penjaminan aset Perseroan sebagai jaminan utang Perseroan atau pihak lain. Approval of the pledge of the Company's assets as collateral for the Company's debt or other parties.	Menyetujui tindakan penjaminan aset Perseroan sebagai jaminan utang Perseroan atas Transaksi Penerbitan Sukuk/fasilitas pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial, dan atau pihak lain baik dalam satu transaksi penjaminan atau lebih dengan jumlah maksimum sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah). Approved to pledge of the Company's assets as collateral for the Company's debt for the Sukuk Issuance Transaction/financing facility from PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial, and/or other parties either in one or more pledge transactions with a maximum amount of Rp4,000,000,000,000 (four trillion Rupiah).	Transaksi dengan PT Sarana Multigriya Finansial senilai Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) telah direalisasikan pada tahun 2022. The transaction with PT Sarana Multigriya Finansial worth Rp500,000,000,000 (five hundred million Rupiah) has been realized in 2022.
5	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI ("PMHMETD VI") Perseroan Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering through Capital Increase with Pre-emptive Rights VI ("PMHMETD VI") of the Company	Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui PMHMETD VI Perseroan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.4/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. The Company has submitted the Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering through PMHMETD VI of the Company as required by Article 6 Paragraph (1) and Paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.4/2015 regarding the Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering.	Untuk Mata Acara Rapat Kelima bersifat Laporan, oleh karenanya tidak terdapat realisasi lebih lanjut atas laporan tersebut. The Fifth Meeting Agenda was a report, therefore there was no further realization of the report.
6	Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Approval of Amendments to the Company's Articles of Association	- Menyetujui perubahan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan peraturan Badan Pusat Statistik No.2 Tahun - Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. - Approved the amendment to Article 3 paragraph (2) of the Company's Articles of Association regarding Business Activities in order to adjust with the regulation of the Central Bureau of Statistics No.2. - Approved the authorization to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to restate the decision regarding the amendment to the provisions of the Company's Articles of Association into a Notarial deed and submit an application for approval of the amendment to the Articles of Association to the competent authority and in connection with this matter to do everything necessary in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah direalisasikan dan dituangkan dalam Akta No. 48 tanggal 24 Juni 2022 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tertanggal 11 Juli 2022 No. AHU-0047668. AH.01.02. Tahun 2022 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 15 Juli 2022 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 023534. The amendment of the Company's Articles of Association has been realized and set forth in Deed No. 48 dated June 24, 2022 made before Notary Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with his Decree dated July 11, 2022 No. AHU-0047668. AH.01.02. Year 2022 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 56 dated July 15, 2022 Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 023534.

Alasan Belum Terealisasinya Keputusan

Seluruh hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 24 Juni 2022 telah direalisasikan pada tahun 2022.

Reason for Unrealized Resolutions

All resolutions of the meeting have been ratified at the Annual GMS on June 24, 2022.



Keputusan RUPS Luar Biasa 28 Februari 2022

Resolutions of Extraordinary GMS February 28, 2022

No	Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
1	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat yaitu : Anggota Dewan Komisaris - Mohamed Hedi Mejai selaku Komisaris Perseroan; dan - Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan. 2. Menyetujui pengangkatan : Anggota Dewan Komisaris - Sulistyo Budi selaku Komisaris merangkap Wakil Komisaris Utama Perseroan; - Juni Supriyanto selaku Komisaris Perseroan; dan - Andre Mirza Hartawan selaku Komisaris Perseroan; terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan kepengurusan Perseroan saat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan ketentuan pengangkatan tersebut akan berlaku efektif setelah masing-masing memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. Dari dan oleh karenanya hal yang berkaitan dengan honorarium maupun tunjangan masing-masing selaku Pengurus Perseroan yang baru akan mengikuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat Pengurus lainnya yang masih menjabat. 3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi guna mewakili Perseroan untuk menandatangani perjanjian (<i>management contract</i>) dengan masing-masing anggota Dewan Komisaris; dan 4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan anggota Dewan Komisaris tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	Keputusan berkenaan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah dituangkan ke dalam akta Notaris No. 45 tanggal 28 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn dan telah memberitahukannya kepada pihak yang berwenang.
	Approval of Changes in the Company's Management Structure	1. Approved the honorable dismissal of : Member of the Board of Commissioners - Mohamed Hedi Mejai as Commissioner of the Company; and - Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh as Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting along with gratitude and appreciation for their services so far for the progress of the Company. 2. Approved the appointment of : Member of the Board of Commissioners - Sulistyo Budi as Commissioner and concurrently Vice President Commissioner of the Company; - Juni Supriyanto as Commissioner of the Company; and - Andre Mirza Hartawan as Commissioner of the Company; as of the closing of this Meeting until the remaining term of office of the current management of the Company, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2024 (two thousand twenty-four), provided that such appointment will be effective after each of them has obtained the determination of passing the Fit and Proper Assessment from OJK. From and therefore matters relating to honorarium and benefits respectively as the new Management of the Company will follow the results of the decision of the General Meeting of Shareholders which appoints other Management who are still in office. 3. Approved the authorization to the Board of Directors to represent the Company to sign an agreement (management contract) with each member of the Board of Commissioners; and 4. Approved the authorization to the Board of Directors with the right of substitution, to restate the resolution regarding the changes of the members of the Board of Commissioners in a Notarial deed and notify the competent authorities and in connection with this matter to do everything necessary in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.	The decision regarding the appointment of members of the Board of Commissioners of the Company has been set forth in Notarial deed No. 45 dated February 28, 2022 made by Notary Ashoya Ratam, S.H. M.Kn and has been notified to the competent authorities.

Alasan Belum Terealisasinya Keputusan

Seluruh hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 28 Februari 2022 telah direalisasikan pada tahun 2022.

Reason for Unrealized Resolutions

All resolutions of the meeting were ratified at the First Extraordinary GMS on February 28, 2022.



Keputusan RUPS Luar Biasa Kedua 24 Juni 2022

Resolutions of Second Extraordinary GMS June 24, 2022

No	Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
1	Persetujuan Permohonan Pengunduran Diri Pengurus Perseroan Approval of Application for Resignation of the Company's Management.	1. Menerima pengunduran diri Bapak Ilham Akbar Habibie dari jabatannya selaku Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam surat pengunduran dirinya tertanggal 19 Mei 2022. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Bapak Ilham Akbar Habibie tersebut untuk tindakan pengurusan Perseroan yang telah dilakukannya selama tahun 2022, sepanjang laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan Tahun 2022 disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan di tahun 2023, serta sejauh tindakan pengurusan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 1. To accept the resignation of Mr. Ilham Akbar Habibie from his position as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company as stated in his resignation letter dated May 19, 2022. 2. To grant a release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) to Mr. Ilham Akbar Habibie for the management of the Company that he has carried out during 2022, to the extent that the Company's annual report and financial statements for 2022 are approved and ratified at the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2023, and to the extent that such management actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the Financial Year 2022 and do not constitute a criminal offense or violation of the provisions of the prevailing laws and regulations.	Keputusan berkenaan dengan pengunduran diri Bapak Ilham Akbar Habibie dari jabatannya selaku Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan telah dituangkan ke dalam akta Notaris No. 49 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn dan telah memberitahukannya kepada pihak yang berwenang. The decision regarding the of Mr. Ilham Akbar Habibie from his position as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company has been set forth in Notarial Deed No. 49 dated June 24, 2022 made by Notary Ashoya Ratam, S.H. M.Kn and has been notified to the competent authorities.
2	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat: a. Juni Supriyanto selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan. b. Edy Setiadi selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan. c. Andri Donny selaku anggota Direksi Perseroan. terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan. 2. Menyetujui pengangkatan: a. Iggi H.Achsien sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan. b. Sartono sebagai Anggota Dewan Komisaris sekaligus Komisaris Independen Perseroan. c. Amin Said Husni sebagai Anggota Dewan Komisaris sekaligus Komisaris Independen Perseroan. d. KH. Marsudi Syuhud sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. e. Karno sebagai anggota Direksi Perseroan sekaligus Direktur Kepatuhan. terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan kepengurusan Perseroan saat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2024, dengan ketentuan: bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Assessment</i>), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham; dan Dari dan oleh karenanya hal yang berkaitan dengan honorarium maupun tunjangan masing-masing selaku Pengurus Perseroan yang baru akan mengikuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat Pengurus lainnya yang masih menjabat. 3. Pelaksana tugas Direktur Kepatuhan sampai dengan saudara Karno memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK (<i>Fit and Proper Assesment</i>) akan ditetapkan dalam Rapat Direksi Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan ketentuan yang berlaku. 4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi guna mewakili Perseroan untuk menandatangani perjanjian (<i>management contract</i>) dengan masing-masing anggota Dewan Komisaris; 5. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris guna mewakili Perseroan untuk menandatangani perjanjian (<i>management contract</i>) dengan masing-masing anggota Direksi; dan 6. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan anggota pengurus tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	Keputusan berkenaan dengan perubahan susunan Pengurus Perseroan telah dituangkan ke dalam akta Notaris No. 49 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn dan telah memberitahukannya kepada pihak yang berwenang.



No	Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
	Approval of Changes in the Company's Management Structure	- Approved the dismissal with honor: - Juni Supriyanto as a member of the Company's Board of Commissioners. - Edy Setiadi as member of the Board of Commissioners of the Company. - Andri Donny as member of the Board of Directors of the Company, as of the closing of the Meeting along with gratitude and appreciation for their services so far for the progress of the Company. - Approved the appointment of: - Iggi H. Achsien as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company. - Sartono as Member of the Board of Commissioners and Independent Commissioner of the Company. - Amin Said Husni as Member of the Board of Commissioners as well as Independent Commissioner of the Company. - KH Marsudi Syuhud as a member of the Company's Board of Commissioners. - Karno as a member of the Company's Board of Directors as well as Compliance Director. as of the closing of the Meeting until the remaining term of office of the current management of the Company, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2024, provided that: for candidates for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who have not obtained a determination of passing the Fit and Proper Assessment from the OJK, their appointment will be effective after obtaining a determination of passing the Fit and Proper Assessment from the OJK. In the event that the person concerned is declared not to have passed the Fit and Proper Assessment, then the appointment concerned will be canceled, without the need for a decision from the General Meeting of Shareholders; and From and therefore matters relating to honorarium and benefits respectively as the new Management of the Company will follow the results of the decision of the General Meeting of Shareholders appointing other Management who are still in office. - The acting Compliance Director until Mr. Karno obtains a determination of passing the Fit and Proper Assessment from OJK will be determined at the Company's Board of Directors Meeting in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and taking into account applicable regulations. - Approved the authorization to the Board of Directors to represent the Company to sign an agreement (management contract) with each member of the Board of Commissioners; - Approved the authorization to the Board of Commissioners to represent the Company to sign an agreement (management contract) with each member of the Board of Directors; and - Approved the authorization to the Board of Directors with the right of substitution, to restate the decision regarding the changes in the members of the management in a Notarial deed and notify the authorized parties and in connection with this matter to do everything necessary in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.	The decision regarding the changes in the composition of the Company's Management has been set forth in Notarial deed No. 49 dated June 24, 2022 made by Notary Ashoya Ratam, S.H. M.Kn and has been notified to the competent authorities.

Alasan Belum Terealisasinya Keputusan

Seluruh hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 24 Juni 2022 telah direalisasikan pada tahun 2022.

Reason for Unrealized Resolutions

All resolutions of the meeting were ratified at the Second Extraordinary GMS on June 24, 2022.



Keputusan RUPS Luar Biasa Ketiga 29 November 2022

Resolutions of Third Extraordinary GMS November 29, 2022

No	Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah disampaikan menjadi sebagai berikut: - Pasal 13 ayat 8 terkait remunerasi Direksi "Gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan." - Pasal 13 ayat 13 terkait remunerasi Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir "Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.4 huruf a Anggaran Dasar, ditetapkan oleh RUPS." - Pasal 15 ayat 7 terkait remunerasi Komisaris Utama dan Komisaris "Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." - Pasal 15 ayat 16 terkait remunerasi Dewan Komisaris yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir "Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi Dewan Komisaris yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.6 huruf a Anggaran Dasar, ditetapkan oleh RUPS." 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah direalisasikan dan dituangkan dalam Akta No. 21 tanggal 9 Desember 2022 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tertanggal 11 Juli 2022 No. AHU-AH.01.03-0326274 Tahun 2022 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 30 Desember 2022 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 045582.
	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	1. Approved the amendments to the Company's Articles of Association, as submitted as follows: - Article 13 paragraph 8 related to remuneration of the Board of Directors "Salaries, fees, and other benefits (if any) for members of the Board of Directors shall be determined by the GMS and such authority by the GMS may be delegated to the Board of Commissioners with due observance of statutory provisions." - Article 13 paragraph 13 related to the remuneration of Directors who quit or are dismissed before their term ends "Salary, service fees and other benefits (if any) for members of the Board of Directors who quit or are dismissed as referred to in Article 12.4 letter a of the Articles of Association, shall be determined by the GMS." - Article 15 paragraph 7 related to remuneration of President Commissioner and Commissioner "Salary, service fees and other benefits (if any) for the Board of Commissioners shall be determined by the GMS with due observance of the prevailing laws and regulations." - Article 15 paragraph 16 related to the remuneration of the Board of Commissioners who quit or are dismissed before the end of their term of office "Salary, service fees and other benefits (if any) for the Board of Commissioners who quit or are dismissed as referred to in Article 15.6 letter a of the Articles of Association, shall be determined by the GMS." 2. Approved the authorization to the Board of Directors with the right of substitution to restate the resolution relating to the amendment of the Company's Articles of Association into a Notarial deed and notify it to the competent authorities and in connection with this matter to do everything necessary in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.	The amendment to the Company's Articles of Association has been realized and set forth in Deed No. 21 dated 9 December 2022 made before Notary Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with his Decree dated 11 July 2022 No. AHU-AH.01.03-0326274 of 2022 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 104 dated 30 December 2022 Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 045582.



No	Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
2	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	- Menyetujui pengunduran diri : Bapak Purnomo B. Soetadi selaku Direktur Perseroan; terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa beliau selama ini untuk kemajuan Perseroan; - Menyetujui pemberhentian dengan hormat: - Bapak Iggi H. Achsien sebagai Komisaris Utama Perseroan merangkap Komisaris Independen; - Bapak Sulistyio Budi sebagai Komisaris Perseroan; - Bapak KH. Marsudi Syuhud sebagai Komisaris Perseroan; - Bapak Achmad K. Permana sebagai Direktur Utama Perseroan; - Bapak Avianto Istihardjo sebagai Direktur Perseroan; dan - Bapak Awaldi sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa beliau-beliau selama ini untuk kemajuan Perseroan. - Menyetujui pengangkatan : - Bapak Mardiasmo sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan; - Bapak Suwarta sebagai Komisaris Independen Perseroan; - Bapak Indra Falatehan sebagai Direktur Utama Perseroan; - Bapak Suhendar sebagai Direktur Perseroan; dan - Bapak Wahyu Avianto sebagai Direktur Perseroan. terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan kepengurusan Perseroan saat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2024, dengan ketentuan: - bagi calon anggota Direksi Perseroan yang belum memperoleh persetujuan pengunduran diri dari Rapat Umum Pemegang Saham dimana calon anggota Direksi pada saat Rapat ini ditutup masih bekerja dan belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dimana calon Anggota Direksi menjabat serta mendapat penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Assessment</i>), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham; dan - bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Assessment</i>), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham. - Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan susunan Dewan Pengawas Syariah serta perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	Keputusan berkenaan dengan perubahan susunan Pengurus Perseroan telah dituangkan ke dalam akta Notaris No. 22 tanggal 9 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn dan telah memberitahukannya kepada pihak yang berwenang.



No	Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
	Approval of Changes in the Composition of the Company's Management	- Approved the resignation of: Mr. Purnomo B. Soetadi as Director of the Company; effective as of the closing of the Meeting accompanied by gratitude and appreciation for his services so far for the progress of the Company; - Approved the dismissal with honor of: - Mr. Iggi H. Achsien as President Commissioner of the Company and concurrently Independent Commissioner; - Mr. Sulistyo Budi as Commissioner of the Company; - Mr. KH Marsudi Syuhud as Commissioner of the Company; - Mr. Achmad K. Permana as President Director of the Company; - Mr. Avianto Istihardjo as Director of the Company; and - Mr. Awaldi as Director of the Company as of the closing of the Meeting along with gratitude and appreciation for their services so far for the progress of the Company. - Approved the appointment of: - Mr. Mardiasmo as Independent President Commissioner of the Company; - Mr. Suwarta as Independent Commissioner of the Company; - Mr. Indra Falatehan as President Director of the Company; - Mr. Suhendar as Director of the Company; and - Mr. Wahyu Avianto as Director of the Company. as of the closing of the Meeting until the remaining term of office of the current management of the Company, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2024, with the following provisions: - for prospective members of the Board of Directors of the Company who have not obtained approval for their resignation from the General Meeting of Shareholders where the prospective member of the Board of Directors is still working at the time of the closing of this Meeting and have not obtained a determination of passing the Fit and Proper Assessment from the OJK, their appointment will be effective after obtaining approval from the General Meeting of Shareholders of the Company where the prospective member of the Board of Directors serves and obtaining a determination of passing the Fit and Proper Assessment from the OJK. In the event that the person concerned is declared not to have passed the Fit and Proper Assessment, the appointment shall be void without the need for a resolution from the General Meeting of Shareholders; and - for prospective members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who have not obtained a determination of passing the Fit and Proper Assessment from the OJK, their appointment will become effective after obtaining a determination of passing the Fit and Proper Assessment from the OJK. In the event that the person concerned is declared not to have passed the Fit and Proper Assessment, his/her appointment shall become void, without the need for a resolution from the General Meeting of Shareholders. - Approved the authorization to the Board of Directors with the right of substitution, to restate the resolution regarding the composition of the Sharia Supervisory Board and changes in the members of the Board of Commissioners and Board of Directors in a Notarial deed and notify the competent authorities and in connection with this matter to do everything necessary in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.	The decision regarding the changes in the composition of the Company's Management has been set forth in Notarial deed No. 22 dated December 9, 2022 made by Notary Ashoya Ratam, S.H. M.Kn and has been notified to the competent authorities.

Alasan Belum Terealisasinya Keputusan

Seluruh hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 November 2022 telah direalisasikan pada tahun 2022.

Reason for Unrealized Resolutions

All resolutions of the meeting were ratified at the Third Extraordinary GMS on November 29, 2022.

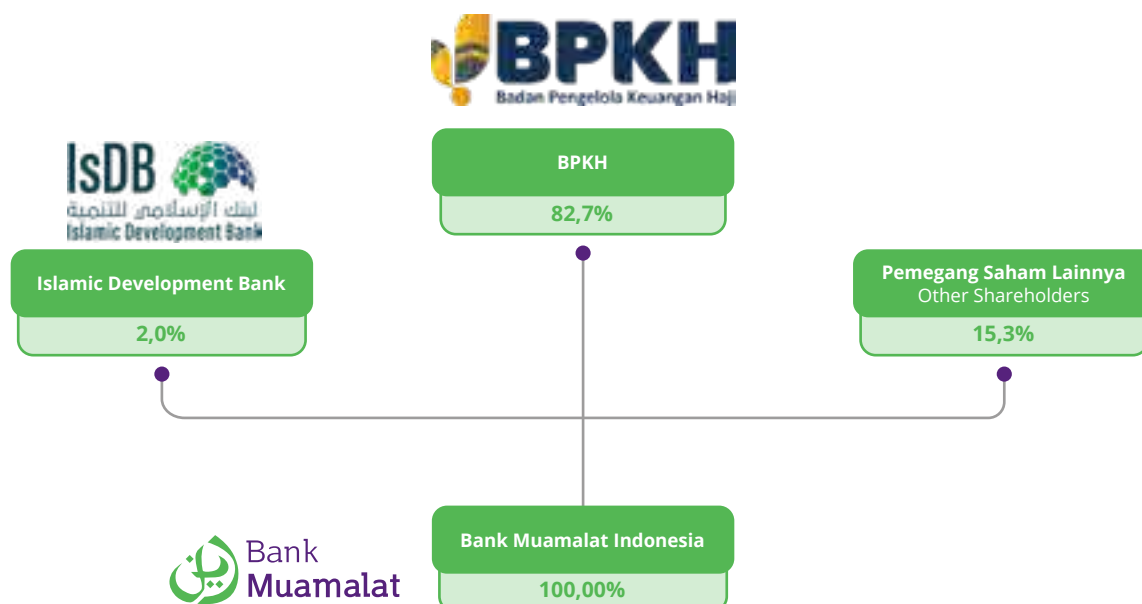


Informasi Pemegang Saham Utama/ Pengendali

Information on Majority/Controlling Shareholders

Pengendali Bank Muamalat Indonesia ialah pihak yang memiliki saham Perseroan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Sampai dengan laporan ini diterbitkan, Pemegang saham utama Bank Muamalat ialah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan kepemilikan saham sebesar 82,7% dari total keseluruhan saham yang ada. Berikut ialah bagan terkait informasi pemegang saham utama Bank:

Bank Muamalat Indonesia's controlling party owns 25% (twenty-five percent) or more of the Company's shares of the total shares issued by the Bank. It has voting rights as referred to in OJK Regulation No. 39/POJK.03/2017 concerning Sole Ownership in Indonesian Banking. As of the issuance of this report, the main shareholder of Bank Muamalat is the Hajj Financial Management Agency (BPKH), with a shared ownership of 82.7% of the total shares available. The following is a chart related to information on the Bank's major shareholders:





Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board

Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

The Sharia Supervisory Board, here onwards referred to as (abbreviated by) DPS, is the party tasked to provide advice and recommendation to the Board of Directors as well as to supervise the Bank's activities so as to comply with Sharia Principles.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah, ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 16/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia.
7. Akta tertanggal 20 Juli 2022 No. 20 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam dan pemberitahuan atas perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 21 Juli 2022 No. AHU-AH.01.09-0035247.

LEGAL BASIS

The legal basis of the establishment and implementation of duties of the Sharia Supervisory Board is as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of Year 2007 regarding Limited Liability Companies
2. Law of the Republic of Indonesia No. 21 of Year 2008 regarding Sharia Banking
3. Financial Services Authority Regulation (POJK) No 16/POJK.03/2022 of Year 2022 regarding Sharia Commercial Banks.
4. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks.
5. Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 regarding Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units
6. Articles of Association of Bank Muamalat Indonesia.
7. Deed dated 20 July 2022 No. 20 made before Notary Ashoya Ratam and notification on changes in company data which has been accepted and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with letter dated 21 July 2022 No. AHU-AH.01.09-0035247.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, agar kegiatan Bank sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
3. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang telah dikeluarkan Bank Muamalat Indonesia.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

The duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board of Bank Muamalat Indonesia are as follows:

1. To supervise in the Bank's interests over policies and management operations by the Board of Directors and be responsible for such supervision so that the Bank's activities comply with Sharia Principles.
2. To provide advice and recommendation to the Board of Directors including sharia opinion related to the Bank's activities so as to comply with Sharia Principles.
3. To assess and ensure the fulfillment of sharia principles on the operational and product guidelines issued by Bank Muamalat Indonesia.



4. Sebagai mediator antara Bank Muamalat Indonesia dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Bank Muamalat Indonesia yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI.
5. Mengawasi proses pengembangan produk baru dan kegiatan Bank Muamalat Indonesia agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
6. Melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk kepentingan Bank dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
7. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.
8. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank Muamalat Indonesia yang belum ada fatwanya.
9. Sebagai perwakilan DSN-MUI yang ditempatkan di Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan atas hasil pengawasannya kepada DSN-MUI dan OJK dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
10. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank Muamalat Indonesia secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank Muamalat Indonesia.
11. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Muamalat Indonesia.
12. Memberikan opini aspek syariah atas temuan/penyimpangan yang dijumpai oleh Unit Kerja Internal Audit.
13. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di Bank Muamalat Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Adapun tugas dan tanggung jawab pengawasan DPS terhadap proses pengembangan produk baru Bank Muamalat ialah sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan dari pejabat Bank Muamalat Indonesia yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
2. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa DSN-MUI
 - a. Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisis atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSNMUI.
 - b. Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari DSN-MUI.

4. As a mediator between Bank Muamalat Indonesia and DSN-MUI, to communicate on recommendations and suggestions concerning product and service developments of Bank Muamalat Indonesia that require review and fatwa (ruling based on Islamic provision) from DSN-MUI.
5. To supervise new product development process and the activities of Bank Muamalat Indonesia so as to comply with fatwa of DSN-MUI.
6. To carry out duties, authorities, and responsibilities in good faith and with the principle of prudence for the interests of the Bank.
7. To supervise follow-up actions by the Board of Directors concerning the audit or inspection findings and recommendations from the Bank's internal audit work unit, external auditor, results of OJK supervision, and/or results of supervision by other authorities and institutions, concerning the implementation of Sharia Principles.
8. To request a fatwa from DSN-MUI for Bank Muamalat Indonesia's new product for which there is no fatwa yet.
9. As representative of DSN-MUI assigned at Bank Muamalat Indonesia, the Sharia Supervisory Board is obligated to report on results of its supervision to DSN-MUI and OJK once within 6 (six) months.
10. To provide opinion from the sharia aspect on the overall operation of Bank Muamalat Indonesia in the Bank Muamalat Indonesia's report publication.
11. To periodically review the fulfillment of sharia principles on the mechanism for fundraising and fund disbursement as well as the services provided by Bank Muamalat Indonesia.
12. To provide opinion on the sharia aspect concerning the findings/deviations found by the Internal Audit Work Unit.
13. To request data and information related to sharia aspects from work units at Bank Muamalat Indonesia in the context of carrying out their duties.

The duties and responsibilities of DPS supervision of Bank Muamalat's new product development process are as follows:

1. Request explanations from authorized Bank Muamalat Indonesia officials regarding the objectives, characteristics, and contracts used in new products to be issued;
2. Checking whether the contract used in the new product has a DSN-MUI fatwa:
 - a. In the event that there is a fatwa, the Sharia Supervisory Board analyzes the suitability of the new product contract with the DSNMUI fatwa.
 - b. In the event that there is no fatwa, the Sharia Supervisory Board proposes to the Bank's Board of Directors to complete the new product contract with a fatwa from DSN-MUI.



3. Review sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
4. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

Tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap kegiatan Bank Muamalat ialah sebagai berikut:

1. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
2. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan.
3. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), di antaranya:
 - a. Ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah.
 - b. Ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.
4. Memeriksa, mengamati, meminta keterangan dan/atau konfirmasi kepada karyawan Bank Muamalat Indonesia dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, apabila diperlukan.
5. Melakukan review terhadap prosedur terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud.
6. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
7. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.03/2022 Tentang Bank Umum Syariah, dan Board Manual Bank Muamalat No. CPL-KBJ.013.2016, yang antara lain meliputi:

3. Review of systems and procedures for new products to be issued related to the fulfillment of sharia principles.
4. Provide sharia opinion on new products to be issued.

The duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board's supervision of Bank Muamalat's activities are as follows:

1. Analyzing reports submitted by and/or requested from the Board of Directors, implementing the internal audit function and/or compliance function to determine the quality of implementation of the fulfillment of sharia principles on the activities of raising funds and channeling funds and services of the Bank.
2. Determining the number of samples of transactions to be examined by taking into account the quality of the implementation of the fulfillment of sharia principles of each activity.
3. Examine transaction documents that are tested (samples) to determine the fulfillment of sharia principles as required in the Standard Operating Procedure (SOP), including:
 - a. The presence or absence of proof of purchase of goods for murabahah contracts is evidence of fulfilling the murabahah sale-purchase requirements.
 - b. The presence or absence of customer business reports, for mudharabah/musarakah contracts, as a basis for calculating profit-sharing distribution.
4. Examine, observe, request information and/or confirmation to Bank Muamalat Indonesia employees and/or customers to strengthen the results of document examination, if necessary.
5. Conduct a review of procedures related to sharia aspects if there are indications of non-compliance with the fulfillment of sharia principles for the activity in question.
6. Provide sharia opinion on the activities of raising funds and channeling funds and services of the Bank.
7. Reporting the results of the supervision of the Sharia Supervisory Board to the Board of Directors and the Board of Commissioners.

SHARIA SUPERVISORY BOARD CHARTER

The guidelines and work rules of the Sharia Supervisory Board of Bank Muamalat refer to the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 16/POJK.03/2022 concerning Islamic Commercial Banks and Bank Muamalat's Board Manual No. CPL.KBJ.013.2016, which includes:



1. Fungsi;
2. Persyaratan;
3. Komposisi;
4. Pengangkatan;
5. Rangkap Jabatan;
6. Masa Jabatan dan Pemberhentian;
7. Program Orientasi Dan Peningkatan Kapabilitas;
8. Standar Etika Dewan Pengawas Syariah;
9. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah;
10. Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah;
11. Pembagian Tugas Dewan Pengawas Syariah;
12. Rapat Dewan Pengawas Syariah;
13. Hubungan Kerja dengan Dewan Komisaris dan Direksi;
14. Pelaporan Dewan Pengawas Syariah;
15. Hak Kompensasi Dewan Pengawas Syariah;
16. Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah.

KRITERIA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Kriteria anggota Dewan Pengawas Syariah Bank merujuk pada ketentuan Pasal 60 POJK Nomor 16/POJK.03/2022 Tentang Bank Umum Syariah dan tertuang pada Board Manual Bank Muamalat No. CPL.KBJ.013.2016 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
3. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*).
4. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
5. Memiliki keahlian di bidang fiqh mu'amalah.
6. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
7. Jika diperlukan anggota DPS dapat pula memiliki keahlian selain fiqh mu'amalah, tetapi harus memiliki pengalaman di bidang perbankan dan atau lembaga keuangan syariah.
8. Tidak termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan macet.
9. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

1. Function;
2. Requirements;
3. Composition;
4. Appointment;
5. Concurrent Position;
6. Term of Office and Dismissal
7. Orientation and Capability Enhancement Program;
8. Ethical Standards of the Sharia Supervisory Board;
9. Duties and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board;
10. Sharia Supervisory Board Work Procedure;
11. Division of Duties of the Sharia Supervisory Board;
12. Sharia Supervisory Board Meeting;
13. Working Relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors;
14. Sharia Supervisory Board Reporting;
15. Compensation Rights of the Sharia Supervisory Board;
16. Performance Evaluation of the Sharia Supervisory Board.

CRITERIA FOR MEMBERS OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

The criteria for members of the Bank's Sharia Supervisory Board refer to the provisions of Article 60 POJK Number 16/POJK.03/2022 concerning Islamic Commercial Banks and are contained in the Bank Muamalat Board Manual No. CPL.KBJ.013.2016 with the following description:

1. Have a good character and morals;
2. Have the commitment to comply with Islamic banking regulations and other applicable laws and regulations.
3. Have a high commitment to developing a sound and resilient (*sustainable*) Bank.
4. Not included in the List of Not Pass the Fit and Proper Test, in accordance with the provisions stipulated by Bank Indonesia and/or the Financial Services Authority;
5. Have expertise in the field of mu'amalah fiqh.
6. Have knowledge and experience in the field of sharia mu'amalah and knowledge in the field of banking and/ or finance in general.
7. If necessary, DPS members may also have expertise other than mu'amalah fiqh, but must have experience in banking and or Islamic financial institutions.
8. Not included in the list of bad debts/financing.
9. Never been declared bankrupt or become a shareholder, member of the Board of Commissioners, or member of the Board of Directors who was found guilty of causing a Company to be declared bankrupt within the last 5 (five) years before nomination.



SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PERIODE PENUGASAN

Bank Muamalat telah memiliki pedoman dalam menentukan susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah yaitu POJK Nomor 16/POJK.03/2022 Tentang Bank Umum Syariah Pasal 59 ayat (2) yang menyebutkan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.

Pada tahun 2023, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah Bank berjumlah 3 (tiga) orang dengan detail sebagai berikut:

COMPOSITION OF MEMBERS OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD AND TERMS OF ASSIGNMENT

The Bank has a reference in determining the composition of the Sharia Supervisory Board membership, namely, POJK Number 16/POJK.03/2022 concerning Islamic Commercial Banks Article 59 paragraph (2), which states that the number of members of the Sharia Supervisory Board is at least 2 (two) people or at most 50% (fifty percent) of the total number of members of the Board of Directors.

In 2023, the number of members of the Bank's Sharia Supervisory Board amounted to 3 (three) people with the following details:

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TAHUN 2023

Composition of the Sharia Supervisory Board in 2023

Nama Name	Jabatan Position	RUPS Pengangkatan Appointment GMS	Persetujuan OJK FSA Approval	Tanggal Efektif Effective Date	Pengangkatan Kembali Reappointment	Periode Penugasan Assignment Period
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	Ketua Chairman	RUPS LB 16 Desember 2019 Extraordinary GMS on December 16, 2019	Surat OJK No. SR-2/ PB.13/2017 tanggal 2 Februari 2017 FSA Letter No. SR-2/ PB.13/2017 dated February 2, 2017	2 Februari 2017 February 2, 2017	16 Desember 2019 (Ketua DPS) December 16, 2019 (Chairman)	2019-2024
Hj. Siti Haniatunnisa,LLB., MH	Anggota Member	RUPS LB 16 Desember 2019 Extraordinary GMS on December 16, 2019	Surat OJK No. S-13/ PB.1/2021 tanggal 22 Januari 2021 FSA Letter No. S-13/ PB.1/2021 dated January 22, 2021	22 Januari 2021 January 22, 2021	-	2019-2024
Dr. H. Agung Danarto, M.Ag	Anggota Member	RUPS LB 30 Agustus 2021 Extraordinary GMS on August 30, 2021	Surat OJK No.SR-8/ PB.1/2022 tanggal 7 Juli 2022 FSA Letter No.SR-8/ PB.1/2022 dated 7 July 2022	7 Juli 2022 July 7, 2022	-	2021-2024

RANGKAP JABATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketentuan mengenai rangkap jabatan DPS mengacu pada POJK Nomor 16/POJK.03/2022 Tentang Bank Umum Syariah Pasal 59 ayat (4) yang menyebutkan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. Bank Muamalat telah mematuhi ketentuan rangkap jabatan tersebut, yang mana DPS Bank Muamalat tidak memiliki rangkap jabatan pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. Berikut detail mengenai rangkap jabatan DPS Bank Muamalat.

CONCURRENT POSITION OF SHARIA SUPERVISORY BOARD

The provisions regarding concurrent positions of DPS refer to POJK Number 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks Article 59 paragraph (4), which states that members of the Sharia Supervisory Board can only concurrently serve as members of the Sharia Supervisory Board at a maximum of 4 (four) other Islamic financial institutions. Bank Muamalat has complied with the provisions of the dual position, whereas DPS Bank Muamalat does not have concurrent positions in more than 4 (four) other Islamic financial institutions. The following are the details of DPS Bank Muamalat's dual positions.



DAFTAR RANGKAP JABATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

List of Concurrent Position of Sharia Supervisory Board

Nama Name	Jabatan Position	Nama Perusahaan Name of Company
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	Indo Mobil Finance Indonesia Syariah
	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	PT Reasuransi Syariah Indonesia (ReINDO Syariah)
	Dewan Penasihat Syariah Sharia Advisor Board	BP TAPERA
	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	Bank Aladin Syariah
Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	PT BNI Life Insurance
	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	DPLK Syariah Muamalat
	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	PT Asuransi Jasindo Syariah
	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	PT Asuransi BRI Life
Dr. H. Agung Danarto, M.Ag	Tidak memiliki rangkap jabatan No concurrent positions	Tidak memiliki rangkap jabatan No concurrent positions

INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, DPS Bank Muamalat berkomitmen untuk selalu mengedepankan kesesuaian dengan prinsip syariah dan mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi dan tidak dipengaruhi oleh pihak mana pun.

Seluruh anggota DPS Bank Muamalat ialah pihak independen yang tidak memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga dengan Perseroan, Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham.

INDEPENDENCE OF SHARIA SUPERVISORY BOARD

In carrying out its supervisory duties, DPS Bank Muamalat is committed to always prioritizing conformity with sharia principles, prioritizing the Bank's interests over personal interests, and not being influenced by any party.

All members of DPS Bank Muamalat are independent parties who have no financial, management, share ownership, and/or relationship with the Company, Board of Commissioners, Directors, or Shareholders.

PERNYATAAN INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Statement of Independence of the Sharia Supervisory Board

Aspek Independensi Independence Aspect	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH	Dr. H. Agung Danarto, M.Ag
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Have no financial relationship with the Boards of Commissioners and Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Have no management relationship in the Company, its subsidiaries, or affiliated companies	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Have no management relationship in the Company, its subsidiaries, or affiliated companies	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Have no any family relations with the Boards of Commissioners or Directors, and/or fellow members of the Nomination, Remuneration and GCG Committees	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah Have not served as a manager of political parties, officials, and government	✓	✓	✓



KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Salah satu wujud independensi DPS Bank Muamalat ialah tidak terdapatnya kepemilikan saham yang bersangkutan pada Bank Muamalat hingga berakhirnya tahun buku 2023. Dengan demikian, tidak terdapat *conflict of interest* dalam proses pengawasan yang dijalankan.

PERNYATAAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Statement of Share Ownership of Sharia Supervisory Board

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham (Lembar Saham) Share Ownership (Number of Shares)			
		Bank Muamalat	Bank Lain Other Banks	LJK-Non Bank Non-Bank Financial Institution	Bank Lain Other Banks
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	Ketua DPS Chairman	-	-	-	-
Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH	Anggota DPS Member	-	-	-	-
Dr. H. Agung Danarto, M.Ag	Anggota DPS Member	-	-	-	-

SHARE OWNERSHIP OF SHARIA SUPERVISORY BOARD

One evidence of the independence of Bank Muamalat's DPS is the absence of DPS members who own Bank Muamalat shares until the end of the 2023 financial year. Thus, there is no conflict of interest in their supervisory process.

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pembagian tugas di antara anggota DPS telah merujuk pada ketentuan dalam *Board Manual* Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia, Anggaran Dasar Bank Muamalat, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun uraian tugas dari masing-masing jabatan DPS ialah sebagai berikut:

Ketua

- Memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas Syariah.
- Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya.
- Memimpin rapat Dewan Pengawas Syariah.
- Menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Pengawas Syariah.

Anggota

- Membantu Ketua Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangan yang telah ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas Syariah.
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah.

DIVISION OF DUTIES OF THE SYARIAH SUPERVISORY BOARD

The division of duties among DPS members has referred to the provisions in the Board Manual of the Sharia Supervisory Board of Bank Muamalat Indonesia, Bank Muamalat's Articles of Association, and applicable laws and regulations. The job description of each DPS position is as follows:

Chairman

- Leads all activities of the members of the Sharia Supervisory Board.
- Developingn work program for the implementation of his/her duties.
- Presiding over meetings of the Sharia Supervisory Board.
- Determining the division of duties of the members of the Sharia Supervisory Board.

Member

- Assisting the Chairman of the Sharia Supervisory Board in carrying out his duties according to the division determined by the Chairman of the Sharia Supervisory Board.
- Performing other duties assigned by the Chairman of the Sharia Supervisory Board.



HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Check and balance hubungan kerja antara Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi yang diciptakan Bank memiliki beberapa tujuan akhir, yakni untuk kemajuan Bank, pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional Bank yang sesuai dengan prinsip syariah, dan pemenuhan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk implementasi GCG di dalamnya.

Merujuk pada fungsinya masing-masing, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan usaha Bank Muamalat dalam jangka panjang, yang tercermin pada:

1. Terpeliharanya kesehatan Bank Muamalat Indonesia sesuai prinsip kehati-hatian dan mematuhi (*comply*) terhadap prinsip syariah Islam serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Terlaksananya dengan baik pengendalian internal (*internal control*) dan manajemen risiko (*risk management*).
3. Terlindunginya kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* secara wajar.
4. Terpenuhinya pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
5. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas Manajemen di semua lini organisasi.

KEBIJAKAN PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Tugas pengawasan DPS pada Bank Muamalat dibantu oleh Sharia Compliance Officer yang berada dalam Unit Kerja Kepatuhan. Sharia Compliance Officer berfungsi sebagai *liaison officer* dan bertugas secara administratif untuk mendokumentasikan rincian kegiatan kerja DPS dengan baik ke dalam kertas kerja pengawasan. Kertas kerja tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan kepada Direksi Bank Muamalat Indonesia, DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketentuan mengenai penyelenggaraan rapat DPS merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta ketentuan Board Manual Bank Muamalat Indonesia, yakni paling kurang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

WORKING RELATIONSHIP BETWEEN SHARIA SUPERVISORY BOARD, BOARD OF COMMISSIONERS, AND BOARD OF DIRECTORS

The check and balance working relationship between the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, and the Board of Directors created by the Bank is carried out for the progress of the Bank, ensuring the implementation of the Bank's business and operational activities in accordance with sharia principles, and the fulfillment of applicable laws and regulations, including the implementation of GCG in it.

Referring to their respective functions, the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, and the Board of Directors are responsible for maintaining Bank Muamalat's long-term business continuity, which is reflected in:

1. The maintenance of the health of Bank Muamalat Indonesia in accordance with the principles of prudence and compliance with the principles of Islamic sharia and applicable laws and regulations.
2. Implementation of good internal control and risk management.
3. Protecting the interests of shareholders and stakeholders in a reasonable manner.
4. Fulfillment of the implementation of Good Corporate Governance.
5. Implementation of leadership succession and Management continuity in all lines of the organization.

SHARIA SUPERVISORY BOARD SUPERVISION POLICY

In carrying out its supervisory duties at Bank Muamalat, the Sharia Supervisory Board is assisted by the Sharia Compliance Officer. Sharia Compliance Officer functions as a liaison officer, one of which is tasked with properly documenting the details of DPS work activities into supervisory work papers. The working paper is then set forth in the Sharia Supervisory Board Supervisory Report submitted to the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia, DSN-MUI, and the Financial Services Authority on a semesterly basis.

SHARIA SUPERVISORY BOARD MEETING

The organization of DPS meeting is at least once a month, in accordance with the provisions of Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and contained in the Board Manual of Bank Muamalat Indonesia.



Materi-materi yang dibahas dalam rapat Dewan Pengawas Syariah telah diatur pada *Board Manual* Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia, di antaranya:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan produk baru dan hasil *review* produk yang telah ada, antara lain mengenai tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengajuan aktivitas baru dan *review* aktivitas Bank yang telah berjalan dari aspek syariah.
3. Permasalahan yang timbul akibat aktivitas Bank yang membutuhkan opini dari DPS.
4. Hasil temuan syariah dari auditor, baik auditor eksternal maupun auditor internal.

Pengambilan keputusan pada rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya. Detail frekuensi dan rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah pada rapat disajikan dalam Sub Bab Rapat Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi.

TATA CARA PEMBERIAN NASIHAT DAN SARAN SERTA PENGAWASAN PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Tata cara pemberian nasihat, saran, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Melakukan rapat rutin setiap bulan.
- b. Memberikan opini atas produk/aktivitas dan program baru yang diterbitkan oleh unit bisnis.
- c. Melakukan uji petik terhadap kegiatan operasional penyaluran dan penghimpunan dana.
- d. Memberikan *sharing knowledge* terkait aspek syariah secara berkala ke semua level.
- e. Memberikan *advise* dalam hal peningkatan akhlaqul karimah.

PELAKSANAAN KEGIATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TAHUN 2023

Penyampaian Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada manajemen Bank Muamalat, DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan Hasil Pengawasan DPS telah disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan semester. Untuk laporan Semester I tahun 2023 telah disampaikan kepada OJK tanggal 31 Agustus 2023 melalui surat No. 152/B/CRD-SRT/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, sedangkan Laporan Pengawasan DPS Semester II tahun 2022 telah disampaikan kepada OJK

The materials in the Sharia Supervisory Board meeting have been regulated in the Board Manual of the Sharia Supervisory Board of Bank Muamalat Indonesia, including:

1. Matters relating to the development of new products and the results of the review of existing products, including the objectives, characteristics, and contracts used in accordance with sharia principles.
2. Submission of new activities and review of Bank activities that have been running from sharia aspects.
3. Problems arising from the Bank's activities that require an opinion from DPS.
4. Sharia findings from auditors, both external and internal auditors.

Decision-making at the Sharia Supervisory Board meeting is based on deliberation for consensus. If there is a difference of opinion, the difference of opinion is included in the minutes of the meeting, along with the reasons. Details of the frequency and recapitulation of attendance of members of the Sharia Supervisory Board at meetings are presented in the Meetings of the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors Subchapter.

PROCEDURES FOR PROVIDING ADVICE AND SUGGESTION AND SUPERVISION OF THE FULFILLMENT OF SHARIA PRINCIPLES IN THE CAPITAL MARKET

The mechanism for providing advice, suggestions, and supervision, the Sharia Supervisory Board is carried out in the following manner:

- a. Conducting regular meetings every month.
- b. Providing opinions on new products/activities and programs issued by business units.
- c. Conducting a petition test on operational activities of distribution and collection of funds.
- d. Providing knowledge sharing related to sharia aspects periodically to all levels.
- e. Providing advice in terms of improving akhlaqul karimah.

IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD IN 2023

Submission of the Sharia Supervisory Board's Supervision Report to the management of Bank Muamalat, DSN-MUI and Financial Services Authority is conducted once every 6 (six) months. Report on the Results of DPS Supervision is submitted to OJK at the latest by 2 (two) months following the semester reporting period. For Semester I of 2023 report was submitted to OJK on August 31, 2023 through letter No. 152/B/CRD-SRT/VIII/2023 dated August 28, 2023, while DPS Supervision Report of Semester II of 2022 was submitted to OJK on February 29, 2023. The form of supervision of the



tanggal 29 Februari 2023. Bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada kegiatan bisnis Bank Muamalat meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Dalam melakukan pengawasannya, Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh 1 (satu) orang *liaison officer* dari Unit Kepatuhan Syariah. Rincian pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa pada tahun 2023 kami uraikan sebagai berikut.

Pengawasan terhadap Penghimpunan Dana pada tahun 2023

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan atas produk penghimpunan dana Bank Muamalat Indonesia dan melakukan kajian atas kesesuaian produk penghimpunan dana dengan fatwa DSN-MUI. Dari pengawasan tersebut, tidak terdapat produk-produk penghimpunan dana yang bertentangan dengan fatwa DSNMUI.

Produk Penghimpunan Dana

Berikut kami uraikan produk penghimpunan dana Bank Muamalat sebagai berikut:

Sharia Supervisory Board on Bank Muamalat's business activities covers supervision on the implementation of sharia principles in fundraising and fund disbursement activities as well as on services carried out. In conducting supervision, the Sharia Supervisory Board is assisted by 1 (one) liaison officer from the Sharia Compliance Unit. Details of the Board's supervision in fundraising and fund disbursement activities as well as services carried out during the year 2023 are as described below.

Supervision on Fundraising in 2023

The Sharia Supervisory Board conducted supervision on Bank Muamalat Indonesia's fundraising products and reviewed the conformity of the fundraising products with DSN-MUI fatwa. From this review, it is concluded that there were no fundraising products not in conformity with DSN-MUI fatwa.

Fundraising Products

The following are Bank Muamalat's fundraising products:

Jenis Produk Type of Product	Nama Produk
Tabungan Savings	• Tabungan iB Hijrah • Tabungan iB Hijrah Haji • Tabungan iB Hijrah Rencana • Tabungan iB Hijrah Haji – Haji Anak Hebat • Tabungan iB Hijrah Valas • Tabungan iB Hijrah Prima • Tabungan iB Hijrah Bisnis • Tabungan iB Hijrah Payroll • Tabungan iB Muamalat Sahabat • TabunganKu iB • Tabungan Simple iB • Tabungan Prima Berhadiah
Giro Current Accounts	• Giro iB Hijrah • Giro iB Hijrah Ultima • Giro Ultima USD Berhadiah • Giro iB Hijrah Saudi Arabian Riyal (SAR) • Giro iB Hijrah Ultima – Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA)
Deposito Deposits	• Deposito iB Hijrah • Deposito Online iB Hijrah • Deposito Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) iB Hijrah
Dana Pensiun Pension Fund	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah Muamalat

Pengawasan terhadap Penyaluran Dana pada tahun 2023

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan atas produk penyaluran dana Bank Muamalat Indonesia dan melakukan kajian atas kesesuaian produk penyaluran dana dengan fatwa DSN-MUI. Dari pengawasan tersebut, tidak terdapat produk-produk penyaluran dana yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI.

Supervision of Fund Disbursement in 2023

The Sharia Supervisory Board conducted supervision on Bank Muamalat Indonesia's fund disbursement and reviewed its conformity with DSN-MUI fatwa. Results of the supervision show that there were no products of fund disbursement in conflict with DSN-MUI fatwa.



Produk Penyaluran Dana

Berikut kami uraikan produk penyaluran dana Bank Muamalat sebagai berikut:

Fund Disbursement Products

The following are products of fund disbursement of Bank Muamalat Indonesia:

Jenis Produk Type of Product	Nama Produk
Produk Pembiayaan Financing Product	- KPR iB Hijrah - Multiguna iB Hijrah - iB Asset Refinance Hijrah - iB Investasi Hijrah - iB Properti Bisnis Hijrah - iB Modal Kerja Hijrah - iB Modal Kerja Konstruksi Developer Hijrah - iB Modal Kerja kepada LKS Hijrah - iB Pembiayaan Rekening Koran Syariah Hijrah - iB Koperasi Segmen Konsumer Hijrah - iB Multifinance Hijrah - iB Pensiun Hijrah

Pengawasan terhadap Layanan pada tahun 2023

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan atas layanan Bank Muamalat Indonesia dan melakukan kajian atas kesesuaian layanan dengan fatwa DSN-MUI. Dari pengawasan tersebut, tidak terdapat layanan-layanan yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI.

Supervision of Services in 2023

The Sharia Supervisory Board carried out supervision on Bank Muamalat Indonesia's services and reviewed on their conformity with DSN-MUI fatwa. From the supervision, there were no services in conflict with DSN-MUI fatwa.

Jenis Produk Type of Product	Nama Produk
Remittance	- Remittance iB Muamalat - Remittance BMI-National Commercial Bank
Trade Finance	- Bank Garansi Bank Guarantee - Trade Finance-Ekspor Trade Finance-Export - Trade Finance-Impor Trade Finance-Import - SBLC (Standby L/C) - Letter of Credit - Produk/Layanan untuk Perdagangan Dalam Negeri SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) Products/Services for Domestic Trade SKBDN (Domestic Letter of Credit) - Vendor Payment iB
Layanan Corporate Corporate Services	- Layanan Muamalat Cash Management-MADINA Muamalat Cash Management-MADINA services - Jasa Layanan Escrow Escrow Services - Layanan Cash Pick-up and Delivery Cash Pick-up and Delivery services
e-Banking	- Mobile Banking Muamalat Muamalat Mobile Banking - Internet Banking Muamalat Muamalat Internet Banking - ATM Muamalat Muamalat ATM - Gerai Muamalat Muamalat Outlet - Layanan Host to Host Web Service Host to Host Web Services - Kartu ATM/Debit Shar-e ATM/Shar-e Debit Cards
Layanan 24 Jam 24 Hour Services	- Salam Muamalat - Virtual Account
Layanan Treasury Treasury Services	- Muamalat Foreign Exchange (FX) - Muamalat Multicurrency - Money Market & Fixed Income - Lindung Nilai Sederhana Simple Hedging - Lindung Nilai Kompleks Complex Hedging
Layanan Investasi dan Wealth Management Investment and Wealth Management Services	- Muamalat Investment Service - Bancassurance - Layanan Muamalat Prioritas Muamalat Priority Services - Safe Deposit Box - Layanan Gerai Online Reksa Dana Syariah Sharia Mutual Fund Online Outlet Service



Pengawasan terhadap Usulan Produk/ Aktivitas Baru

Dewan Pengawas Syariah melalui *Liasion Officer* (Sharia Compliance) telah melakukan kajian dan pembahasan usulan produk/aktivitas baru sepanjang tahun 2023 adalah Layanan Liveness biometric pada MDIN, Penambahan Fitur Term Deposit Harian Commodity Murabaha Cabang Kuala Lumpur dan pembiayaan dengan skema Salam Trade iB.

Uji Petik dan Kunjungan Dewan Pengawas Syariah

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan bisnis Bank, Dewan Pengawas Syariah melakukan kegiatan Uji Petik. Uji petik dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dengan cara berkunjung, mengamati dan/atau melakukan sharing session dengan karyawan di beberapa Kantor Cabang Bank Muamalat Indonesia. Dewan Pengawas Syariah juga memeriksa dokumen-dokumen transaksi untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah telah terlaksana. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan metode uji petik yang dibantu oleh Unit Kepatuhan Syariah sebagai liaison officer Dewan Pengawas Syariah. Melanjutkan metode uji petik tahun sebelumnya, pada tahun 2023, uji petik dilakukan dengan mengkombinasikan pemeriksaan secara fisik dan virtual dalam prosesnya.

KEGIATAN UJI PETIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Random Testing Activities of the Sharia Supervisory Board

Tanggal Date	Cabang/Unit Kerja	Branch/Work Unit
Semester I Tahun 2023 pada tanggal 19 Juni s.d. 23 Agustus 2023 Semester I 2023 on June 19 to August 23, 2023	Kantor Cabang Utama Samarinda	Samarinda Main Branch Office
	Kantor Cabang Utama Karawang	Karawang Main Branch Office
	Kantor Cabang Utama Cilegon	Cilegon Main Branch Office
	Kantor Cabang Pembantu Batu Malang	Batu Malang Sub-Branch Office
	Kantor Cabang Pembantu Ponorogo	Ponorogo Sub-Branch Office
	Kantor Cabang Utama Padang Sidempuan	Padang Sidempuan Main Branch Office
	Kantor Cabang Utama Gorontalo	Gorontalo Main Branch Office
	Kantor Cabang Utama Kramat Raya	Kramat Raya Main Branch Office
Semester II Tahun 2023 pada tanggal 6 November 2023 s.d. 16 Februari 2024 Semester II 2023 on November 6, 2023 to February 16, 2024	Unit Kerja Retail Funding & Transaction (KPNO)	Retail Funding & Transaction Work Unit (KPNO)
	Unit Kerja Global Market (KPNO)	Global Market Work Unit (KPNO)
	Unit Kerja Transactional Banking (KPNO)	Transactional Banking Work Unit (KPNO)

REVIEW, ENDORSEMENT ATAS KEBIJAKAN, DAN STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)

Sepanjang tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan *review* dan/atau *endorsement* terhadap kebijakan dan prosedur Bank Muamalat agar sesuai dengan prinsip syariah, fatwa DSNMUI dan ketentuan terkait yang dibantu oleh Unit Kepatuhan Syariah. Beberapa kebijakan dan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang menjadi perhatian Dewan Pengawas Syariah yakni: Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta beberapa prosedur standar Akad Pembiayaan dan *Refinancing*.

Supervision of Proposed New Products/ Activities

The Sharia Supervisory Board, through the Liaison Officer (Sharia Compliance) conducted reviews and discussions on proposed new products/activities throughout the year 2023, namely Liveness Biometric Service in MDIN, Additional Features of Term Deposit in Murabaha Daily Commodity of Kuala Lumpur Branch; and financing with iB Salam Trade scheme.

Random Checks and Visits by the Sharia Supervisory Board

In the context of carrying out its supervisory function on the Bank's business activities, the Sharia Supervisory Board conducted Random Checks by visiting, observing and/or holding sharing sessions with employees in several Branch Offices of Bank Muamalat Indonesia. The Sharia Supervisory Board also inspects transactional documents to ensure the fulfillment of the sharia principles are carried out. Such inspections are conducted by method of random testing assisted by the Sharia Compliance Unit as liaison officer of the Sharia Supervisory Board. Continuing the random check method in the previous year, in 2023, random checks are carried out by combining physical and virtual examinations in the process.

REVIEW-ENDORSEMENT OF POLICIES AND STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

Throughout the year 2023, the Sharia Supervisory Board conducted review and/or endorsement of policies and procedures of Bank Muamalat so as to comply with sharia principles, fatwa DSNMUI and related provisions, assisted by the Sharia Compliance Unit. Several policies and Standard Operating Procedures (SOP) that are of concern to the Sharia Supervisory Board are namely: Policy on the Implementation of Anti-Money Laundering Program, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Financing for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction as well as several standard procedures on Financing and Refinancing Agreement.



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan baik secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, memberi nasihat kepada Direksi serta bertugas memastikan Bank Muamalat Indonesia telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang Baik. Pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban Dewan Komisaris serta hal-hal lain terkait Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Bank, *Board Manual*, serta ketentuan-ketentuan lain berdasarkan *best practices* tata kelola perusahaan.

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta penetapan masa jabatan anggota Dewan Komisaris BMI ditetapkan melalui RUPS. Adapun untuk hasil pengawasan Dewan Komisaris terkait Perseroan, disampaikan Dewan Komisaris kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan melalui RUPS.

DASAR HUKUM

Bank merujuk pada beberapa ketentuan sebagai dasar hukum untuk pengangkatan Dewan Komisaris yaitu:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

The Board of Commissioners is an organ of the Company that supervises both generally and specifically, in accordance with the Company's Articles of Association. The Board of Commissioners is also in charge of advising the Board of Directors and ensuring that the Bank implements the principles of Good Corporate Governance. The appointment and dismissal policies of the Board of Commissioners, duties and authorities, rights and obligations of the Board of Commissioners, as well as other matters relating to the Board of Commissioners, are regulated in the Bank's Articles of Association, other provisions, and also based on corporate governance best practices.

Furthermore, the appointment and dismissal, and determination of the term of office of the members of the Board of Commissioners of Bank Muamalat are carried out through the GMS. The Board of Commissioners then reports the results of its supervision to shareholders and stakeholders through the GMS.

LEGAL BASIS

The Bank refers to several provisions as the legal basis for the appointment of the Board of Commissioners, namely:

1. Law Number 8 Year 1995 on Capital Market.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
3. Law of the Republic of Indonesia No. 21 of 2008 on Sharia Banking.
4. Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 16/POJK.03/2022 concerning Islamic Commercial Banks.
5. Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
6. Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.
7. Financial Services Authority Regulation No. 27/POJK.03/2016 regarding Capability & Appropriateness Assessment for Main Parties of Financial Services Institutions.



8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan & Keputusan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
9. Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia.
10. Akta tertanggal 26 Januari 2023 No. 22 dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam dan pemberitahuan atas perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 30 Januari 2023 No. AHU-AH.01.09-0062375.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas Komisaris Utama

1. Memimpin semua kegiatan Rapat Dewan Komisaris.
2. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Pada pelaksanaan teknisnya dibantu oleh Sekretaris Perusahaan.
3. Mengkoordinasikan serta memastikan pelaksanaan tugas dan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Komite-komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BMI antara lain mencakup:

1. Melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling kurang mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat.
3. Mengawasi terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank dan keputusan RUPS.
5. Beritikad baik, dengan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha bank, dengan berupaya untuk mengambil tindakan dalam mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian dan/atau terjadinya kepailitan.
6. Mengawasi kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank termasuk pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Memastikan Direksi mematuhi ketentuan internal Bank dan memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank.

8. Financial Services Authority Regulation No. 37/POJK.03/2017 regarding the Utilization of Foreign Workers and Knowledge Transfer Programs in the Banking Sector.
9. Articles of Association of Bank Muamalat Indonesia.
10. Deed dated January 26, 2023 No. 22 made before Notary Ashoya Ratam and notification of changes in company data has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with his letter dated January 30, 2023 No. AHU-AH.01.09-0062375.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Duties of the President Commissioner

1. Lead all Board of Commissioners Meeting activities.
2. Call for Board of Commissioners meeting in writing which is delivered to all members of the Board of Commissioners by stating the agenda, date, time and place of meeting. Technically, the implementation is assisted by the Corporate Secretary.
3. Coordinate and ensure the implementation of duties and meetings of the Board of Commissioners and Committee meetings of the Board of Commissioners in accordance with applicable regulatory provisions.

In general, the duties and responsibilities of the Company's Board of Commissioners are as follows:

1. Perform duties and responsibilities in accordance with GCG principles.
2. Prepare guidelines and work rules that are binding for each member of the Board of Commissioners, which at least include work time and meeting rules.
3. Supervise the implementation of GCG in every business activity of the Bank at all levels of the organization.
4. Comply with the provisions of the prevailing laws and regulations, the Bank's Articles of Association and the resolutions of the GMS.
5. Perform duties for the interests and business of the Bank in good faith, in accordance with prudential principles, and with full responsibility, and endeavor to take action to prevent the incidence, or continuation, of losses and/or the occurrence of bankruptcy.
6. Supervise the policies of the Board of Directors in carrying out the management of the Bank, including the implementation of the Articles of Association, resolutions of the General Meeting of Shareholders and prevailing laws and regulations.
7. Ensure that the Board of Directors complies with the Bank's internal regulations and provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Bank.



8. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan pengurusan Bank.
9. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan penyusunan Visi, Misi serta rencana-rencana strategis Bank Muamalat lainnya seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.
10. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai rencana bisnis Bank yang diusulkan Direksi.
11. Meneliti dan menelaah atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.
12. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari Komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris.
13. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank, baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh manajemen maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.
14. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya.
15. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Bank Muamalat Indonesia.
16. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan.
17. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
18. Memantau efektivitas praktik *Good Corporate Governance* antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*.
19. Membentuk paling kurang Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Audit, Komite Tata Kelola Perusahaan dan memastikan komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
20. Dewan Komisaris wajib independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dalam arti melaksanakan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan serta kepentingan pihak mana pun, termasuk dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan dengan Direksi.
21. Wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
22. Menyetujui kebijakan APU & PPT serta mengawasi pelaksanaan program APU & PPT.
8. Providing opinions and suggestions to the Board of Directors and all its staff related to the management of the Bank.
9. Provide opinions and suggestions to the Board of Directors and all its staff regarding the preparation of the Vision, Mission and other strategic plans of Bank Muamalat as stipulated in the Articles of Association.
10. Providing opinions and suggestions as well as ratifying the Bank's business plan proposed by the Board of Directors.
11. Examining and reviewing reports from the Board of Directors and all its staff, especially those related to specific tasks that have been decided together.
12. Examining and reviewing reports from the Committees under the Board of Commissioners.
13. Following the development of the Bank's activities, both from internal information provided by management and external information from the media and other sources.
14. Attend working/coordination meetings with the Board of Directors and its staff.
15. Ensure that the Board of Directors and its staff have complied with statutory provisions and regulations in managing Bank Muamalat Indonesia.
16. Prepare the Board of Commissioners' work plan for the current year.
17. Monitor and evaluate the implementation of the Bank's strategic policies.
18. Monitor the effectiveness of Good Corporate Governance practices, among others, by holding periodic meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors to discuss the implementation of Good Corporate Governance.
19. Establish at least a Risk Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee, Audit Committee, and Corporate Governance Committee, and ensure that the established committees perform their duties effectively.
20. The Board of Commissioners must be independent in its duties and responsibilities. In the sense of carrying out its duties objectively and free from pressure and the interests of any party, including in relationships with each other and with the Board of Directors.
21. Must actively supervise the implementation of the Compliance Function.
22. Approve AML/CFT policy and supervise the AML/CFT program implementation.



23. Melakukan kajian atas efektivitas sistem pengendalian internal, dengan menilai kompetensi dan jumlah sumber daya, ruang lingkup tugas dan kewenangan serta independensi dari Auditor Intern sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
24. Melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal, dengan menilai kompetensi, independensi serta ruang lingkup tugas Auditor Eksternal.

23. Conduct a review of the effectiveness of the internal control system by assessing the competence and number of resources, the scope of duties and authority, and independence of the Internal Auditor in accordance with the Standards for Implementation of the Internal Audit Function of Commercial Banks (SPFAIB) issued/ issued by Bank Indonesia/Financial Services Authority.
24. Conduct a review of the effectiveness of implementing the External Auditor's duties by assessing the competence, independence, and scope of responsibilities of the External Auditor.

HAK DAN WEWENANG

Hak dan wewenang Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

1. Hak meminta penjelasan dan menanyakan segala hal yang berhubungan dengan tugas-tugas Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi wajib menyampaikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
2. Hak meminta semua keterangan yang berkenaan dengan Bank kepada Direksi dan Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Bank sebagaimana diperlukan para anggota Dewan Komisaris melalui Dewan Komisaris.
3. Pembagian kerja dan keanggotaan Komite di antara para Anggota Komisaris diatur oleh anggota Dewan Komisaris sendiri dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.
4. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya, dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.
5. Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris berwenang memberikan kekuasaan sementara untuk menjalankan tindakan pengurusan Bank dan mewakili Bank terhadap pihak lain kepada seseorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan Dewan Komisaris, jika oleh sebab apa pun jabatan anggota Direksi lowong dan/atau Bank tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi.
6. Tiap anggota Dewan Komisaris memiliki hak untuk menerima honorarium dan tunjangan lain sesuai yang ditetapkan sesuai dengan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

THE RIGHTS AND AUTHORITIES

The rights and authorities of the Company's Board of Commissioners are as follows:

1. The right to request explanations and inquire about all matters related to the duties of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board of Directors shall submit an explanation of all matters inquired by the Board of Commissioners.
2. The right to request all information relating to the Bank from the Board of Directors. The BOD shall provide all information relating to the Bank as required by the members of the BOC through the BOC.
3. The division of labor and membership among the members of the Board of Commissioners is regulated by the members of the Board of Commissioners themselves. For the smooth running of its duties, the BOC may be assisted by a Secretary appointed by the BOC.
4. Based on the resolution of the Board of Commissioners Meeting, at any time the Board of Commissioners may temporarily suspend any member of the Board of Directors from his/her position by stating the reasons, with the provisions as described in the Limited Liability Company Law.
5. Based on the resolution of the Board of Commissioners meeting, the Board of Commissioners has the authority to grant temporary power to one or more Commissioners to carry out the management of the Bank and represent the Bank with other parties at the discretion of the Board of Commissioners if, for whatever reason, the position of the member of the Board of Directors is vacant and/or the Bank does not have a single member of the Board of Directors.
6. Each member of the Board of Commissioners has the right to receive an honorarium and other allowances as determined in accordance with the Articles of Association or the resolution of the General Meeting of Shareholders.



PEDOMAN KERJA/PIAGAM DEWAN KOMISARIS

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris tertuang pada *Board Manual*. Pedoman kerja tersebut bertujuan untuk mempermudah Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Pedoman kerja Dewan Komisaris Bank Muamalat terus dievaluasi dan diperbarui secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat wajib mematuhi pedoman dan tata tertib kerja tersebut untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel. Dasar penyusunan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris Bank Muamalat mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan.
4. Anggaran Dasar Bank.
5. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Berikut ialah isi dari Piagam Dewan Komisaris Bank Muamalat:

1. Fungsi
2. Komposisi dan Persyaratan
3. Pengangkatan dan Masa Jabatan
4. Rangkap Jabatan
5. Pengunduran Diri dan Pemberhentian
6. Komisaris Independen
7. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas
8. Etika Jabatan
9. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
10. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
11. Rapat Dewan Komisaris
12. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi
13. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
14. Komite-komite Dewan Komisaris
15. Sekretaris Dewan Komisaris

KRITERIA DEWAN KOMISARIS

Bank Muamalat telah menetapkan kriteria Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam lima tahun sebelum pengangkatan tidak pernah

WORK GUIDELINES/CHARTER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners of Bank Muamalat already has guidelines and work rules in the Board Manual. The work guidelines are intended to facilitate the Board of Commissioners to carry out its duties and functions. The Board of Commissioners' work guidelines is always evaluated and updated regularly regarding the prevailing laws and regulations in Indonesia.

Each member of the Board of Commissioners is obliged to comply with the guidelines and work rules to carry out the supervisory function efficiently, effectively, transparently, independently, and accountably. The guidelines and work rules of the Board of Commissioners are based on the following:

1. Law Number 8 the Year 1995 on Capital Market.
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
3. OJK Regulations and OJK Circular Letters related to the implementation and organs of Corporate.
4. Articles of Association of the Bank.
5. Other relevant laws and regulations.

The following are the contents of the Bank Muamalat Board of Commissioners Charter:

1. Function
2. Composition and Requirements
3. Appointment and Term of Office
4. Concurrent Position
5. Resignation and Dismissal
6. Independent Commissioner
7. Orientation and Capability Enhancement Program
8. Position Ethics
9. Duties and Obligations of the Board of Commissioners
10. Rights and Authorities of the Board of Commissioners
11. Meeting of the Board of Commissioners
12. Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors
13. Performance Evaluation of the Board of Commissioners
14. Committees of the Board of Commissioners
15. Secretary of the Board of Commissioners

CRITERIA FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Bank Muamalat has set the criteria for the Board of Commissioners as follows:

1. Have good character, morals and integrity.
2. Capable of taking legal actions.
3. In the five years prior to appointment, they were never a



menjadi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan atau Laporan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 5. Mempunyai komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.
 6. Mempunyai komitmen terhadap pengembangan kegiatan usaha Bank Syariah yang sehat.
 7. Tidak sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus dan/atau tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
 8. Menjalani masa tunggu atau *cooling off* dengan ketentuan:
 - a. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.
 - b. Masa tunggu sebagaimana dimaksud berlaku bagi:
 - mantan direktur utama pada Bank yang bersangkutan; dan
 - mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan.
 9. Tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
 10. Memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi (keahlian) yang memadai di bidang yang dibutuhkan dalam pengelolaan Bank dan relevan dengan jabatannya.

member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners during their tenure:

- i. Failed to implement the annual GMS.
 - ii. Had his/her responsibilities as member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners not accepted by the GMS or has never given accountability as member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS.
 - iii. Cause a company that obtained a license, approval, or registration from the Financial Services Authority to fail to meet its obligation to submit an Annual Report and/or Financial Report to the Financial Services Authority.
4. Has never been convicted of committing a crime as stated in Law No. 8 of 2010 on Money Laundering Crime, a crime that causes losses to state finances and/ or is related to the financial sector, within the last 20 (twenty) years prior to being nominated.
 5. Has a commitment to comply with the prevailing laws and regulations including the Bank's rules and regulations and support the policies of the Financial Services Authority.
 6. Has a commitment to the development of sound Shariah Bank operations.
 7. Not currently undergoing consequences from the main party's reassessment with the final result as "not passed" and/or not included in the "not passed" list.
 8. Undergoing a waiting or cooling off period with the following provisions:
 - a. Former member of the Board of Directors or Executive Officer or the party having the relationship with the Bank that can influence the capability of the concerned to act independently is obligated to undergo a waiting period of at least 1 (one) year before becoming an Independent Commissioner at the concerned Bank.
 - b. The waiting period as intended applies to the following:
 - former president director of the concerned Bank; and
 - former member of the Board of Directors responsible for the supervisory function or Executive Officer who carries out the supervisory function at the concerned Bank,
 9. Has never directly or indirectly involved in acts of engineering and deviant practices, breach of contract or other acts that are detrimental to the company where the concerned person works or has worked for.
 10. Has adequate knowledge and/or competency (expertise) in the field required in the management of the Bank and relevant to the concerned person's position.



11. Mempunyai pengetahuan di bidang perbankan dan perbankan syariah yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
12. Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BMI agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah di bidang perbankan syariah.
13. Mempunyai pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko.
14. Tidak mempunyai kredit/pembiayaan macet.
15. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

11. Have sufficient knowledge in the field of banking and Islamic banking that is relevant to his/her position.
12. Has the will and ability to supervise BMI's business activities to comply with the prudential principles and sharia principles in the field of sharia banking.
13. Has the knowledge and understanding in the application of risk management.
14. Has no bad credit/financing.
15. Has never been declared bankrupt or been a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to go bankrupt, within the last 5 (five) years prior to being nominated.

KETENTUAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Bank Muamalat telah menetapkan dalam anggaran dasar mengenai periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris yakni paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS. Ketentuan atas masa jabatan tersebut tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatan berakhir dengan menyebutkan alasan pemberhentian. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi. Adapun untuk pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.

Dewan Komisaris dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya, maka masa jabatan penggantinya ialah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya. Selanjutnya apabila terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris lainnya yang telah ada.

Jabatan anggota Dewan Komisaris dinyatakan berakhir apabila anggota Dewan Komisaris tersebut diberhentikan melalui RUPS, mengundurkan diri, dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meninggal dunia atau masa jabatannya berakhir.

PROVISION ON THE TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Bank Muamalat has determined in its articles of association on the term of office of members of the Board of Commissioners, namely a maximum of 5 (five) years for 1 (one) term of office starting as of the effective date of appointment of members of the Board of Commissioners by the GMS. The provision of this term of office does not reduce the rights of the GMS to dismiss, at anytime, members of the Board of Commissioners before the term of office ends by stating the reasons behind the dismissal. Every proposal of replacement and/or appointment of members of the Board of Commissioners to the GMS is required to pay attention to the recommendations of the committee that carries out the nomination function. For dismissal or replacement of the Independent Commissioner before the end of the term of office is required to obtain prior approval from the Financial Services Authority before it is decided in the GMS.

The Board of Commissioners may serve a maximum of 2 (two) terms of office with 1 (one) term of office of a maximum of 5 (five) years. Suppose a member of the Board of Commissioners resigns or is dismissed before his/her term of office. In that case, the term of office of his/her replacement is the remaining term of office of the member of the Board of Commissioners he/she replaces. In the event there are additional members of the Board of Commissioners, the term of office of the member of the Board of Commissioners will end at the same time as the end of the term of office of the other existing Board of Commissioners.

The position of a member of the Board of Commissioners is declared terminated if the member of the Board of Commissioners is dismissed based on the GMS resolution, resigns, passes away, reaches the end of his/her term, and no longer meets the requirements as a member of the Board of Commissioners based on the provisions of the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.



KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Berikut ini adalah susunan anggota Dewan Komisaris beserta dasar pengangkatannya:

COMPOSITION AND BASIS FOR APPOINTMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Following is the composition of members of the Board of Commissioners and the basis of their appointment:

Nama Name	Jabatan Position	RUPS Pengangkatan Appointment GMS	Persetujuan OJK OJK Approval	Tanggal Efektif Effective Date	Pengangkatan Kembali Reappointment
Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	24 Juni 2022 June 24, 2022	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-8/D.03/2023 tanggal 16 Januari 2023 Copy of Decision of Members of the Board of Commissionrs of the Financial Services Authority No. KEP-8/D.03/2023 dated January 16, 2023	16 Januari 2023 January 16, 2023	-
Amin Said Husni	Komisaris Independen/Plt. Komisaris utama Independent Commissioner/ Acting President Commissioner	24 Juni 2022 June 24, 2022	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-9/D.03/2023 tanggal 16 16 Januari 2023 Copy of Decision of Members of the Board of Commissionrs of the Financial Services Authority No. KEP-9/D.03/2023 dated January 16, 2023	16 Januari 2023 January 16, 2023	-
Andre Mirza Hartawan	Komisaris Commissioner	24 Juni 2022 June 24, 2022	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-114/D.03/2022 tanggal 19 Juli 2022 Copy of Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-114/D.03/2022 dated July 19, 2022	19 Juli 2022 July 19, 2022	-

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Nama Name	Jabatan Position	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	Jumlah Kepemilikan Saham Number of Share Ownership			Jumlah Nominal Saham Total Nominal Shares		
			Seri A Series A	Seri B Series B	Seri C Series C	Seri A Series A	Seri B Series B	Seri C Series C
Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Amin Said Husni	Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/ Acting President Commissioner	-	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Andre Mirza Hartawan	Komisaris Commissioner	5,19%	-	113.000.000	1.618.033.333	-	16.950.000.000	72.811.500.000



KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Kebijakan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia mengacu pada ketentuan POJK Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang mana anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada:

- Lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
- Lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
- Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

POLICY ON CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The policy on concurrent positions of members of the Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia refers to the provisions of POJK No. 17 of Year 2023 regarding Implementation of Governance for Commercial Banks, whereby the members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, member of the Sharia Supervisory Board, or Executive Officer:

- In financial institutions or financial companies both banks and non-banks;
- In more than 1 (one) non-finance institutions or companies, domiciled inland and abroad;
- On financial duties at bank and/or non-bank financial institutions domiciled inland and abroad;
- On other positions that may raise conflict of interest in carrying out the duties as member of the Board of Commissioners; and/or
- On other positions in accordance with prevailing laws and regulations.

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS BANK MUAMALAT INDONESIA

Concurrent Positions of the Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan Lain di Bank Muamalat Indonesia Other Position in Bank Muamalat Indonesia	Jabatan pada Lembaga atau Perusahaan Lain Position in Other Institution or Company	Nama Lembaga atau Perusahaan Lain Name of Other Institution or Company
Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-
Amin Said Husni	Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/Acting President Commissioner	-	-	-
Andre Mirza Hartawan	Komisaris Commissioner	-	Komisaris Utama President Commissioner	PT Wisma Seratus Sejahtera



PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Program orientasi diperuntukan sebagai media pengenalan perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris baru yang dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan, salah satunya adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur Program Orientasi Bank Muamalat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Program Orientasi mengenai BMI wajib diberikan kepada anggota Dewan Komisaris yang baru pertama kali menjabat di BMI setelah pengangkatan Komisaris baru dalam RUPS.
2. Tanggungjawab pelaksanaan Program Orientasi ada pada Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program orientasi berada pada Direktur Utama dan disiapkan oleh Corporate Secretary.
3. Materi yang diberikan pada Program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Gambaran mengenai BMI berkaitan dengan visi, misi, tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, manajemen risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
 - b. Penjelasan mengenai produk dan aktivitas jasa perbankan BMI.
 - c. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh BMI.
 - d. Tanggung jawab hukum anggota Dewan Komisaris.
 - e. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan audit eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
 - f. Penjelasan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi serta aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan terkait.
 - g. *Team building*. Dalam kegiatan ini menyertakan seluruh anggota Dewan Komisaris, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya (jika memungkinkan) dengan tujuan mewujudkan kekompakan dan kerjasama tim sebagai Dewan Komisaris.
4. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas BMI, pengenalan dengan para Karyawan Senior dan para Karyawan BMI serta program lainnya.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW COMMISSIONERS

The orientation program is intended as the company introductory media to new members of the Board of Commissioners, carried out based a number of considerations, among which is the provisions of the laws and regulations. The Orientation Program procedures of Bank Muamalat Indonesia covers on such matters as follows:

1. The Orientation Program on BMI is mandatory to be conducted for members of the Board of Commissioners newly on board after the appointment of new members at the GMS.
2. Responsibility of the implementation of the Orientation Program falls under the President Commissioner. In the event the President Commissioner is not available, the responsibility for implementing the orientation program lies with the President Director and prepared by the Corporate Secretary.
3. Materials provided in the Orientation Program include the following:
 - a. Description of BMI related to the vision, mission, objectives, characteristics, scope of activities, financial and operational performance, strategies, short and long-term business plan, competitive position, risk management and various other strategic issues.
 - b. Explanation on BMI's banking products and services activities.
 - c. Implementation of the principles of Good Corporate Governance by BMI.
 - d. Legal responsibility of the Board of Commissioners.
 - e. Explanation on delegated authorities, internal and external audits, internal control system and policy as well as the duties and roles of the committees established by the Board of Commissioners.
 - f. Explanation on obligations, duties, responsibilities and rights of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as on related regulations and provisions.
 - g. Team building where all members of the Board of Commissioners are involved, newly appointed members and former members (if possible), with the aim to manifest cohesiveness and teamwork as a Board of Commissioners.
4. The Orientation Program conducted can be a form of presentation, meeting or visit to BMI's facilities, introduction to Senior Staffs and BMI Employees as well as other program formats.



PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Bank Muamalat membentuk komite-komite tingkat Dewan Komisaris yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Keanggotaan setiap anggota Dewan Komisaris pada masing-masing komite telah sesuai dengan kompetensi, pengalaman, dan bidang masing-masing anggota. Uraian mengenai komite-komite tingkat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

DIVISION OF SUPERVISORY DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners of Bank Muamalat established committees of the Board of Commissioners level, intended to assist the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners. Membership of each member of the Board of Commissioners in each of the committee is based on the competency, experience and field of expertise of each respective member. Description on the committees of Board of Commissioners level is as follows:

Nama Name	Keanggotaan Komite Level Komisaris Membership of Committees of Board of Commissioners Level	Jabatan Position
Sartono	Komite Audit Audit Committee	Ketua Chairman
	Komite Pemantau Risiko Risk Management Committee	Ketua Chairman
Amin Said Husni	Komite Audit Audit Committee	Anggota Member
	Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	Anggota Member
	Komite Nominasi dan remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Ketua Chairman
	Komite Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Committee	Ketua Chairman
Andre Mirza Hartawan	Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	Anggota Member
	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Anggota Member
	Komite Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Committee	Anggota Member

KEPUTUSAN YANG PERLU MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 49 ayat (6) dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 8 ayat (4), dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank. Ketentuan itu tidak termasuk dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah.

DECISIONS REQUIRING THE APPROVAL BOARD OF COMMISSIONERS

Following up on Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks article 49 paragraph (6) and Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 on the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units article 8 paragraph (4), in conducting supervision, the Board of Commissioners is prohibited from participating in decision-making on the Bank's operational activities. The provision does not include the provision of funds to related parties in accordance with the Financial Services Authority Regulation regarding the maximum limit of lending and provision of large funds for commercial banks and the Financial Services Authority Regulation regarding the maximum limit of distribution of funds and distribution of large funds for Islamic commercial banks.



Ketentuan dimaksud juga mengatur bahwa Dewan Komisaris dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan atas hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas ialah bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris. Sehingga, tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

Furthermore, the PBI stipulates that the Board of Commissioners may participate in decision-making on other matters stipulated in the Bank's Articles of Association or laws and regulations. Decision-making on the Bank's operational activities by the Board of Commissioners, as referred to above, is part of the supervisory duties of the Board of Commissioners. Thus, it does not negate the responsibility of the Board of Directors to implement the Bank's management.

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko merupakan sebuah kebutuhan yang harus dikuasai Dewan Komisaris, sehingga dapat mengawasi pelaksanaan manajemen risiko Bank secara efektif. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2022 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum yang mengatur bahwa Dewan Komisaris dan Direksi wajib memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terkait.

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

Competence and expertise in risk management are the requirements that must be acquired by the Board of Commissioners to effectively oversee the implementation of the Bank's risk management. This is also confirmed by the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 24 of 2022 concerning the Development of the Quality of Human Resources of Commercial Banks, which stipulates that the Board of Commissioners and Directors are required to have Work Competency Certification in the field of risk management issued by the relevant Professional Certification Institution.

KEPEMILIKAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO DEWAN KOMISARIS

Ownership of Risk Management Certification of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Level Sertifikasi Certification Level	Bidang Subject	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi Certifying Agency	Tanggal Dikeluarkan Issuing Date	Tanggal Kadaluarsa Expiration Date	Program Pemeliharaan Maintenance Program
Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	2	Risk Management Certification	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Agency for Certification of Profession (BNSP)	6 September 2022 September 6, 2022	6 September 2026 September 6, 2026	-
Amin Said Husni	Komisaris Independen/ Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/ Acting President Commissioner	2	Risk Management Certification	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Agency for Certification of Profession (BNSP)	6 September 2022 September 6, 2022	6 September 2026 September 6, 2026	-
Andre Mirza Hartawan	Komisaris Commissioner	2	Risk Management Certification	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Agency for Certification of Profession (BNSP)	9 Mei 2019 May 9, 2019	9 Mei 2027 May 9, 2027	-



PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Kebijakan

Bank Muamalat senantiasa memberikan kesempatan yang sama bagi para pegawainya dalam hal pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum. Regulasi tersebut menegaskan, Bank wajib melakukan pengelolaan SDM dan pengembangan kualitas SDM yang dimiliki secara berkelanjutan.

Pengembangan kualitas SDM dimaksud, antara lain melalui kegiatan *training* peningkatan kompetensi kerja SDM. Bank juga diwajibkan menyediakan anggaran sebagai wujud dukungan pada pengembangan kompetensi tersebut.

Realisasi

Realisasi pengembangan kompetensi Dewan Komisaris diuraikan dalam "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Pasal 61 Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank telah memiliki pengaturan atas pengelolaan benturan kepentingan. Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank, calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.

Apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris tidak boleh mengambil tindakan yang berpotensi dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank Umum Syariah (BUS) dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusannya.

Anggota Dewan Komisaris juga diharuskan untuk senantiasa mengutamakan kepentingan Bank dan tidak mengurangi keuangan Bank dalam hal terjadi benturan kepentingan dan menghindarkan diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Policy

Bank Muamalat always provides equal opportunity for all employees in the context of Human Resource (HR) competency development which refers to Financial Services Authority Regulation No 24 of Year 2022 regarding Quality Development of the Human Resources for Commercial Banks. The regulation affirms that Banks are obligated to manage their HR and continually conduct HR quality development.

Development of this HR quality, among others, is carried out through training activities in HR work competency improvement. The Bank is also obligated to provide the budget as manifestation of its support in such competency development efforts.

Realization

Competency development of the Board of Commissioners is actualized as described in the chapter on "Company Profile" contained in this Annual Report.

MANAGEMENT OF CONFLICT OF INTEREST OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with Article 80 paragraph (4) of the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks and Article 61 of Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 on the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the Bank has arrangements for the management of conflicts of interest. In the event that there is a conflict of interest or potential conflict of interest of a candidate for a member of the Board of Commissioners in connection with his/her nomination to the Bank, the candidate shall disclose the conflict of interest in the fit and proper assessment process.

In the event conflict of interest occurs, members of the Board of Commissioners shall not take any action that can potentially reduce assets or profit of Sharia Commercial Banks and therefore required to disclose the conflict of interest in each decision taken.

Members of the Board of Commissioners are also required to always prioritize the interests of the Bank and not reduce the Bank's finances in the event of a conflict of interest and avoid making decisions in situations and conditions of a conflict of interest.



Selanjutnya, Anggota Dewan Komisaris diminta untuk melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan Anggota Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Bank serta melakukan keterbukaan dalam hal pengambilan keputusan diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

KEPUTUSAN, REKOMENDASI, DAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja Bank Muamalat Indonesia diimplementasikan dengan memberikan rekomendasi, saran, dan nasihat kepada Direksi oleh Dewan Komisaris melalui rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Pengawasan dan nasihat Dewan Komisaris juga disampaikan melalui komite-komite tingkat Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Perusahaan yang pembahasannya disampaikan pada rapat Dewan Komisaris.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penilaian

Penilaian kinerja komite tingkat Dewan Komisaris mengacu pada POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, POJK No. 34/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta piagam kerja masing-masing komite. Dewan Komisaris kemudian menilai kinerja komite-komite tingkat Dewan Komisaris dengan metode *self-assessment* secara kolektif dan kolegial yang dilakukan secara berkala.

Furthermore, members of the Board of Commissioners are required to disclose family relationships, financial relationships, management relationships, and ownership relationships with other members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors and/or controlling shareholders of the Bank and/or other parties in the context of the Bank's business as well as conducting transparency in terms of decision making in conditions of conflict of interest.

DECISION, RECOMMENDATION, AND IMPLEMENTATION OF BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES

In supervising the performance of Bank Muamalat Indonesia, the Board of Commissioners provides recommendations, advice, and counsel to the Board of Directors through the Board of Commissioners meeting with the Board of Directors. Supervision and advice of the Board of Commissioners are also conveyed through the Board of Commissioners level committees, namely the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Nomination and Remuneration Committee, and the Corporate Governance Committee, whose discussion is submitted at the Board of Commissioners meeting.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Assessment Procedures

Performance assessment of committees of Board of Commissioners level refers to POJK No. 55/POJK.04/2015 regarding Establishment and Guidelines of Work Implementation of the Audit Committee, POJK No. 34/POJK.04/2014 of Year 2014 concerning Committee of Nomination and Remuneration of Issuers or Public Companies, as well as the charter of each respective committee. The Board of Commissioners then assesses the performance of committees of Board of Commissioners level by method of self-assessment collectively and collegially carried out periodically.



Kriteria Penilaian

Berikut merupakan dasar penilaian atas kinerja anggota komite tingkat Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya:

1. Pemenuhan Struktur Organisasi Komite
2. Ketersediaan Piagam/*Charter* Komite
3. Pelaksanaan Rapat Komite
4. Dokumentasi Hasil Rekomendasi Komite

Hasil Penilaian

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite tingkat Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam membantu fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris. Penilaian tersebut berlandaskan atas kriteria penilaian dan kinerja komite-komite yang telah memberikan masukan dan saran kepada Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tanggung jawabnya.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris Bank Muamalat ialah sebagai berikut:

- a. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir melalui pemberitahuan tertulis kepada Bank.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan pengunduran diri.
- c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
- d. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal disetujuinya pengunduran diri.
- e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - Diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris; dan
 - Hasil penyelenggaraan RUPS.

Assessment Criteria

Following is the basis of performance assessment of members of committees of Board of Commissioners level in carrying out their duties and responsibilities:

1. Fulfillment of Committee's Organizational Structure
2. Availability of Committee Charter
3. Implementation of Committee Meetings
4. Documentation of Committee Recommendation Results

Assessment Results

Throughout the year 2023, the Board of Commissioners assessed that all committees of Board of Commissioners level have performed their duties and responsibilities appropriately in assisting the supervisory function carried out by the Board of Commissioners. The assessment was based on the assessment criteria and the performance of committees that have contributed their feedbacks and suggestions to the Board of Commissioners in accordance with their respective responsibility.

MECHANISM OF RESIGNATION AND DISMISSAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Referring to the provisions of applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association, the mechanism of resignation and dismissal of the Board of Commissioners of Bank Muamalat is as follows:

- a. Member of the Board of Commissioners may resign from his/her position before the term of office ends through a written notification to the Bank.
- b. The Company is obligated to hold a GMS to decide the resignation request from the concerned member of the Board of Commissioners within the maximum period of 90 (ninety) days from the date the resignation request notice is received.
- c. In the event the Company does not hold a GMS within the period mentioned in point b, then with that time period passed the resignation of the concerned member of the Board of Commissioners becomes valid without requiring GMS approval.
- d. Member of the Board of Commissioners who resign shall remain available to be asked for accountability as Board of Commissioners since the concerned was appointed until the date of the resignation is approved.
- e. The Company is obligated to disclose information to the public and inform OJK at the latest in 2 (two) working days after the following:
 - The resignation request of member of the Board of Commissioners is accepted; and
 - The results of GMS implementation.



- f. Perseroan juga wajib menyampaikan ke OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengunduran diri efektif yaitu tanggal setelah pengunduran diri yang bersangkutan mendapat persetujuan dari RUPS, serah terima jabatan, atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- g. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Dewan Komisaris untuk menilai pengunduran diri dilakukan secara sukarela, terdapat unsur paksaan, atau kondisi lain.

- f. The Company is also required to inform OJK at the latest in 10 (ten) days after the resignation is effective, namely on the date after the resignation of the concerned receive approval from the GMS, handover of the position, or other mechanism as stipulated in the Company's Articles of Association.
- g. The Financial Services Authority is authorized to assess the resignation of member of the Board of Commissioners to evaluate whether the resignation is voluntary, or if there may be elements of pressure, or other conditions.



Komisaris Independen

Independent Commissioners

Komisaris Independen ialah anggota Dewan Komisaris Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. Pengangkatan Komisaris Independen Bank Muamalat Indonesia merujuk pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Komisaris Independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. Selain itu, keberadaan Komisaris Independen bertujuan untuk mendorong terwujudnya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan dapat menempatkan kewajaran (*fairness*) serta kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan *stakeholders* dan *shareholders* minoritas.

KRITERIA KOMISARIS INDEPENDEN

Merujuk ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Komisaris Independen ialah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki:

1. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau
2. Hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Adapun berdasarkan POJK No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan telah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan

Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership and/or family relationship with members of the Board of Directors, other Board of Commissioners and/or Controlling Shareholders or relationships with the Company that may affect the ability to act independently. The appointment of the Independent Commissioner of Bank Muamalat refers to OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and POJK No. 17/2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks.

Independent Commissioners are responsible for supervising and also representing the interests of minority shareholders. In addition, the existence of an Independent Commissioner aims to encourage the realization of a climate and work environment that is more objective and can place fairness and equality among various interests, including the interests of stakeholders and minority shareholders.

INDEPENDENT COMMISSIONER CRITERIA

Referring to the provisions of Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 on the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, an Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who does not have:

1. Financial, management, share ownership and/or family relationships with controlling shareholders, members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors; or
2. Financial relationship and/or share ownership relationship with the Bank, which may support his/her ability to act independently.

Based on POJK No. 17/2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, an Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who comes from outside the Issuer or Public Company and has fulfilled the following requirements as an Independent Commissioner:

1. Not a person who is working or having the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise activities of the concerned Issuer or Public Company



Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;

2. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen;
3. Memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan
4. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
5. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
6. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Berkaitan dengan POJK No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Bank Muamalat telah menyusun kriteria Komisaris Independen yang tertuang dalam *Board Manual* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
- b. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen.
- c. Memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- d. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- e. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan.
- f. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- g. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.

within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Issuer or Public Company in the following period;

2. Having adequate knowledge in banking and relevant to the position as Independent Commissioner;
3. Having the experience in banking and/or finance.
4. Not owning shares, directly or indirectly, in the concerned Issuer or Public Company;
5. Not having Affiliation with the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the concerned Issuer or Public Company; and
6. Not having business relationship, direct or indirectly, related to the business activities of the concerned Issuer or Public Company.

In connection with POJK NO. 17/2023 regarding Implementation of Governance for Commercial Banks, Bank Indonesia Regulation No. 11/22/PBI/2009 regarding Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units as well as Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Bank Muamalat established the criteria of Independent Commissioners as contained in the Board Manual with the provisions as follows:

- a. Not a person who is working or having the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise activities of the concerned Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Issuer or Public Company in the following period.
- b. Having adequate knowledge in banking and relevant to the position as Independent Commissioner.
- c. Having the experience in banking and/or finance.
- d. Not owning shares, directly or indirectly, in the Company.
- e. Not having Affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Company.
- f. Not having business relationship, direct or indirectly, related to the business activities of the Company.
- g. Former member of the Board of Directors or Executive Officer or party that has relationship with the Bank that may influence the capability of the concerned to act independently is obligated to follow a waiting period of at least 1 (one) year before serving as Independent Commissioner at the concerned Bank.



h. Masa tunggu sebagaimana dimaksud berlaku bagi:

- Mantan direktur utama pada Bank yang bersangkutan; dan
- Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan.

h. The mentioned waiting period is applicable to:

- Former members of the Board of Directors of the concerned Bank; and
- Former members of the Board of Directors responsible for the supervisory function or Executive Officer who carries out the supervisory function at the concerned Bank.

PEMEMUHAN KRITERIA INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Fulfillment of Independency Criteria of Independent Commissioner

Kriteria Criteria	Komisaris Independen Independent Commissioner	
	Sartono	Amin Said Husni
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya. Not a person who is working or having the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise activities of the concerned Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Issuer or Public Company in the following period.	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Not owning shares, directly or indirectly, in the concerned Issuer or Public Company.	√	√
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Not having Affiliation with the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the concerned Issuer or Public Company.	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Not having business relationship, direct or indirectly, related to the business activities of the concerned Issuer or Public Company.	√	√

JUMLAH KOMISARIS INDEPENDEN

Pada tahun 2023, komposisi anggota Dewan Komisaris Bank berjumlah 3 (tiga) orang dan 2 (dua) di antaranya merupakan Komisaris Independen. Dengan demikian, jumlah Komisaris Independen Bank telah memenuhi POJK No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah yang mengatur paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen dan memenuhi Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang jumlah anggota Dewan Komisaris Bank yang mengatur jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

NUMBER OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

In 2023, the composition of the Bank's Board of Commissioners amounted 3 (three) people and 2 (two) of them were Independent Commissioners. Thus, the number of Independent Commissioners of the Bank has fulfilled POJK No. 17/2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks which stipulates that at least 50% of the total number of members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners and fulfills OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the number of members of the Board of Commissioners of Banks which stipulates that the number of Independent Commissioners must be at least 30% of the total number of members of the Board of Commissioners.



PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Pernyataan Independensi Komisaris Independen Bank dituangkan dalam Surat Pernyataan Independensi yang ditandatangani oleh masing-masing Komisaris Independen yang memuat pernyataan bahwa Komisaris Independen tidak memiliki saham Bank serta tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen, pada saat beliau diangkat menjadi Komisaris Independen Bank.

Pernyataan Independensi yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Komisaris Independen juga mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

INDEPENDENT COMMISSIONER'S STATEMENT OF INDEPENDENCE

The Independence Statement of the Bank's Independent Commissioners has been corroborated by the availability of an Independence Statement Letter by each Independent Commissioner which contains a statement that the Independent Commissioner does not own shares of the Bank and does not have a financial or family relationship with members of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as Major and Controlling Shareholders or a relationship with the bank, which may affect my ability to act independently, at the time he was appointed as Independent Commissioner of the Bank.

The Independence Statement signed by each member of the Independent Commissioner also includes statements regarding the following matters:

1. Having good morals, character, and integrity;
2. Capable of performing legal acts;
3. Within 5 (five) years prior to appointment and during office:
 - a. Has never been declared bankrupt;
 - b. Never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
 - c. Never been convicted of a criminal offense that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector;
 - d. Never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who during his/her tenure:
 - i. Has not held an annual GMS;
 - ii. His/her accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners has not been accepted by the GMS or has not provided accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners to the GMS; and
 - iii. Has caused a company that obtained a license, approval, or registration from the Financial Services Authority to not fulfill the obligation to submit annual reports and/or financial reports to the Financial Services Authority.
 - e. Have a commitment to comply with laws and regulations; and
 - f. Have knowledge and/or expertise in the field required by the Issuer or Public Company.



Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank Muamalat Indonesia untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili BMI, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Anggota Direksi Bank Muamalat Indonesia senantiasa memberikan pikiran, tenaga, perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban, rencana bisnis, dan target serta tujuan Bank sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Anggota Direksi juga senantiasa mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan mengedepankan kepentingan Bank, dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan keberlanjutan usaha Bank.

The Board of Directors is an organ of the Bank that is authorized and fully responsible for the management of Bank Muamalat Indonesia for the benefit of the Bank in accordance with the Bank's goals and objectives and represents BMI, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.

Members of the Board of Directors of Bank Muamalat are required to devote their full thoughts, energy, attention, and services to the Company's duties, obligations, business plans, and targets and objectives. Members of the Board of Directors also always comply with the Company's Articles of Association and laws and regulations and implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, fairness, and prioritize the interests of the Bank to increase added value for stakeholders and the sustainability of the Bank's business.

DASAR HUKUM

Penunjukan dan Pengangkatan Direksi Bank Muamalat Indonesia merujuk pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

LEGAL BASIS

The Assignment and Appointment of the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia refers to several provisions, among others are as follows:

1. Law Number 8 Year 1995 on Capital Market.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company.
3. Law of the Republic of Indonesia No. 21 of 2008 on Sharia Banking.
4. Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 16/POJK.03/2022 concerning Islamic Commercial Banks.
5. Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 17/2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks.
6. Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017 regarding Implementation of Compliance Function in Commercial Banks.
7. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
8. Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.



9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan & Keputusan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
11. Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia.
12. Akta tertanggal 5 Mei 2023 No. 7 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam dan pemberitahuan atas perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 8 Mei 2023 No. AHU-AH.01.09-0116021.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Direksi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan Bank. Pembagian tugas Direksi Bank Muamalat merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, keputusan RUPS atau keputusan rapat Direksi. Anggota Direksi Bank Muamalat bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya sesuai pembagian tugas masing-masing.

Tugas dan kewajiban Direksi, antara lain namun tidak terbatas berkaitan dengan strategi dan rencana kerja, pelaksanaan fungsi kepatuhan, penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, keterbukaan dan kerahasiaan informasi, hubungan dengan para pemangku kepentingan, sistem akuntansi dan pembukuan, pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang/Transaksi Keuangan yang Mencurigakan.

Berikut adalah rincian tugas dan kewajiban Direksi Bank Muamalat Indonesia:

1. Memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
3. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, paling sedikit wajib mencantumkan:
 - a. Pengorganisasian Bank dan pembidangan tugas Direksi;
 - b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
 - c. Pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Direksi;
 - d. Pengaturan etika kerja Direksi;
 - e. Pengaturan rapat Direksi;

9. Financial Services Authority Regulation No. 27/POJK.03/2016 regarding Capability & Appropriateness Assessment for Main Parties of Financial Services Institutions.
10. Financial Services Authority Regulation No. 37/POJK.03/2017 regarding the Utilization of Foreign Workers and Knowledge Transfer Programs in the Banking Sector.
11. Articles of Association of Bank Muamalat Indonesia.
12. Deed dated 5 May 2023 No. 7 made before Notary Ashoya Ratam and notification on the change in company data as received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with letter dated 8 May 2023 No. AHU-AH.01.09-0116021.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Board of Directors is to perform the management of the Bank. The division of duties of the Board of Directors of Bank Muamalat refers to the applicable laws and regulations, Articles of Association, resolutions of the GMS, or the Board of Directors meeting. Members of the Board of Directors of Bank Muamalat are fully responsible for implementing their duties according to the division of their respective duties.

The duties and obligations of the Board of Directors, including but not limited to relating to strategies and work plans, implementation of compliance functions, implementation of risk management, internal control systems, disclosure and confidentiality of information, relationships with stakeholders, accounting and bookkeeping systems, implementation of know your customer principles and Eradication of Money Laundering / Suspicious Financial Transactions.

Following are details of duties and obligations of the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia:

1. Retain clear duties and responsibilities in accordance with respective field.
2. Carry out and be responsible for the Bank's management for the interests of the Bank in accordance with the purposes and objectives of the Bank as set forth in the provisions of applicable laws and regulations, articles of association and GMS resolutions.
3. Retain working guidelines and procedures that are binding for each member of the Board of Directors, at minimum to include on:
 - a. The organization of the Bank and the division of duties of the Board of Directors;
 - b. Duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors;
 - c. Regulation on decision authority and procedures;
 - d. Regulation on work ethics of the Board of Directors;
 - e. Regulation on meetings of the Board of Directors;



- | | |
|---|---|
| <p>f. Larangan terhadap Direksi;
g. Evaluasi kinerja Direksi; dan</p> <p>h. Pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>4. Menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan dan mensosialisasikannya kepada seluruh karyawan/pegawai yang bekerja pada Perseroan serta memuatnya secara lengkap dalam situs <i>web</i> BMI.</p> <p>5. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BMI berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.</p> <p>6. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.</p> <p>7. Mengelola BMI sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BMI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>8. Melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>9. Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang Sekretaris Perusahaan, Audit Intern, Manajemen Risiko dan satuan kerja kepatuhan.</p> <p>10. Direksi wajib membentuk komite yang paling sedikit terdiri atas: komite manajemen risiko; komite kebijakan perkreditan atau pembiayaan; komite kredit atau pembiayaan; dan komite pengarah teknologi informasi. Direksi dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank.</p> <p>11. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BMI.</p> <p>12. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas BMI telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.</p> <p>13. Mematuhi ketentuan internal BMI.</p> <p>14. Melaksanakan pengurusan BMI untuk kepentingan dan tujuan BMI.</p> <p>15. Menetapkan susunan organisasi BMI di tingkat pusat, wilayah maupun cabang lengkap dengan pelaksanaan tugasnya.</p> <p>16. Bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan BMI.</p> <p>17. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BMI yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.</p> <p>18. Memelihara dan mengurus kekayaan BMI.</p> | <p>f. Prohibition for the Board of Directors;
g. Performance assessment of the Board of Directors; and
h. Working relationship patterns of the Board of Directors and the Board of Commissioners.</p> <p>4. Establish the code of ethics applicable to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees/workers, as well as supporting organs in the Company and to socialize the code to all employees/workers who work in the Company and to completely disclose on the BMI's website.</p> <p>5. Fully responsible for the implementation of BMI management based on the principle of prudence and the Sharia Principles.</p> <p>6. The Board of Directors implement Good Governance in the Bank, risk management, and compliance integratedly which is adapted to the latest developments in the banking ecosystem and supported by digitalization and technological innovation.</p> <p>7. Manage BMI in accordance with the authorities and responsibilities as stipulated in BMI's Articles of Association and prevailing laws and regulations.</p> <p>8. Carry out GCG in every BMI's business activity at all levels of the organization.</p> <p>9. In the context of implementing GCG, the Board of Directors are obligated to retain at least the functions of the Corporate Secretary, Internal Audit, Risk Management and compliance work unit.</p> <p>10. The Board of Directors is required to establish committees at least consisting of the following: risk management committee; credit or financing policy committee; credit or financing committee; and information technology steering committee. The Board of Directors may form other committees to adapt to the Bank's needs and/or the Bank's complexity.</p> <p>11. Carry out duties in good faith and full responsibility for the interests and business of BMI.</p> <p>12. Subject to regulatory provisions, the Articles of Association and GMS resolutions as well as to ensure that all of BMI's activities comply with applicable regulatory provisions, Articles of Association and GMS resolutions.</p> <p>13. Comply with BMI's internal provisions.</p> <p>14. Conduct the management of BMI for the interests and objectives of BMI.</p> <p>15. Establish BMI's organizational structure at the central level, regional as well as branch levels complete with their duty implementation.</p> <p>16. Act as the leader in the management of BMI.</p> <p>17. Disclose to the employees BMI's policies that are strategic in the personnel area.</p> <p>18. Maintain and manage BMI's assets.</p> |
|---|---|



19. Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan BMI dalam mencapai maksud dan tujuannya.
20. Mewakili BMI baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
21. Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
22. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengelolaan maupun pemilikan kekayaan BMI serta mengikat BMI dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan BMI, dengan pembatasan tertentu.
23. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
24. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
25. Direksi wajib membuat dan memelihara seluruh daftar pemegang saham, Daftar Khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi serta dokumen-dokumen keuangan dan dokumen perseroan lainnya.
26. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham lebih dari 25% dari modal disetor perusahaan lain.
27. Anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
28. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian BMI apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas.
29. Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan diluar negeri.
30. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
31. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
19. Fully responsible in carrying out the duties for the interests of BMI in achieving its purpose and objectives.
20. Represent BMI both inside and outside of the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.
21. Pay attention to feedbacks provided by the Board of Commissioners.
22. Carry out all actions and deeds, both regarding the management and ownership of BMI's assets as well as binding BMI with other parties and/or other parties with BMI, with certain restrictions.
23. Members of the Board of Directors are prohibited from granting general power of attorney to other parties which result in the transfer of the duties and functions of the Board of Directors.
24. The Board of Directors is compelled to be accountable for the implementation of its duties to the shareholders through the General Meeting of Shareholders.
25. The Board of Directors is compelled to make and maintain all lists of shareholders, Special List, GMS minutes of meeting and minutes of meeting of the Board of Directors meetings as well as financial documents and other company documents.
26. Members of the Board of Directors, both individually and collegially, are prohibited from owning shares of more than 25% from the issued capital of other companies.
27. Members of the Board of Directors are prohibited from having family relationships up to the second level with fellow members of the Board of Directors and/or with members of the Board of Commissioners.
28. Each member of the Board of Directors is personally responsible for BMI's losses if the concerned member is guilty or negligent in carrying out duties.
29. Members of the Board of Directors are obligated to disclose share ownership of 5% (five percent) or more, both in the concerned Bank as well as in other Banks and companies with domicile in land and abroad.
30. The Board of Directors is obligated to provide data and information that are accurate, relevant and on-time to the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board.
31. Each decision of the Board of Directors is binding and is the responsibility of all members of the Board of Directors.



HAK DAN WEWENANG DIREKSI

Direksi Bank Muamalat juga memiliki hak dan wewenang yang mengacu pada peraturan perundangan-undangan serta Anggaran Dasar Perusahaan, yakni sebagai berikut:

1. Memutuskan kebijakan dalam pengurusan Bank, berikut penentuan struktur organisasi Bank.
2. Menolak mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila pemindahan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank.
3. Menjadi wakil Bank di dalam dan di luar pengadilan.
4. Melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan Bank.
5. Mengikat Bank dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank, dengan pembatasan-pembatasan yang sesuai dengan ketentuan yang ada.
6. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Bank baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
7. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian BMI termasuk penetapan gaji, pensiun, jaminan hari tua dan penghasilan bagi Karyawan Bank berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Mengangkat, memberi penghargaan dan sanksi serta memberhentikan karyawan BMI berdasarkan peraturan kepegawaian Bank.
9. Memastikan kompetensi Sumber Daya Insani yang terkait.
10. Menghapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.
11. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
12. Melakukan aktivitas di luar Bank yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan Perseroan seperti kegiatan mengajar, menjadi pengurus asosiasi bisnis dan sejenisnya diperkenankan sebatas menggunakan waktu yang wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau Direktur lainnya.
13. Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Jika diperlukan, mempergunakan saran profesional.

RIGHTS AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors of Bank Muamalat also has rights and authorities that refer to the laws and regulations and the Company's Articles of Association, which are as follows:

1. Deciding policies in the management of the Bank, including the determination of the Bank's organizational structure.
2. Refuse to register the transfer of rights to shares in the Register of Shareholders if the transfer does not meet the provisions in the Bank's Articles of Association.
3. To represent the Bank in and out of court.
4. Perform all actions, both regarding the management and ownership of the Bank.
5. Bind the Bank with other parties and other parties with the Bank, with restrictions in accordance with existing regulations.
6. Regulate the transfer of power of the Board of Directors to represent the Bank inside and outside the Court to a person or several Directors specifically appointed for that purpose or to a person or several employees of the Bank either individually or jointly or to other persons or entities.
7. Regulate the provisions regarding the employment of BMI including the determination of salaries, pensions, old age insurance and income for Bank employees based on applicable regulations.
8. Appoint, reward and sanction and dismiss BMI employees based on the Bank's personnel regulations
9. Ensure the competence of the relevant Human Resources.
10. Write off bad debt books which are then reported and accounted for in the Annual Report.
11. Purchasing part or all of the collateral, either through auction or outside the auction based on voluntary submission by the collateral owner or based on the power to sell outside the auction from the collateral owner in the event that the Debtor does not fulfill its obligations to the Bank, provided that the purchased collateral must be disbursed as soon as possible, with due observance of the prevailing laws and regulations.
12. Conducting activities outside the Bank that are not directly related to the interests of the Company such as teaching activities, being a board member of business associations and the like are permitted to the extent of using reasonable time and to the knowledge of the President Director or other Directors.
13. Obtaining leave in accordance with applicable regulations.
14. If necessary, utilize professional advice.



15. Menerima gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk santunan purnajabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS atau Dewan Komisaris berdasarkan pelimpahan wewenang dari RUPS.
16. Apabila BMI mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima insentif sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.
17. Menggunakan sarana dan fasilitas Bank untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Bank, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bank.
18. Berhak menerima fasilitas yang ditetapkan Bank.
19. Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf r, Direksi juga berhak menerima tantiem yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

15. Receive a salary along with other facilities and benefits including retirement benefits, the amount of which shall be determined by the GMS or the Board of Commissioners based on the delegation of authority from the GMS.
16. If BMI achieves a profit level, the Board of Directors may receive incentives as a reward for their work performance, the amount of which is determined by the GMS.
17. Use the Bank's facilities for activities related to the interests of the Bank, in accordance with laws and regulations and Bank policies.
18. Eligible to receive facilities set by the Bank.
19. Aside from the facilities as mentioned in point r, the Board of Directors is also entitled to receive tantiem of which the amount is determined by the General Meeting of Shareholders.

PEDOMAN KERJA/PIAGAM DIREKSI

Pedoman Kerja Bank Muamalat Indonesia tertuang pada Board Manual Direksi Bank Muamalat No. CPL. KBJ.013.2016 yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Fungsi
2. Komposisi dan Persyaratan
3. Pengangkatan dan Masa Jabatan
4. Pengunduran Diri dan Pemberhentian
5. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas
6. Independensi (Kemandirian) Direksi
7. Etika Jabatan
8. Tugas dan Kewajiban Direksi
9. Hak dan Wewenang Direksi
10. Penetapan Kebijakan Pengurusan Perusahaan oleh Direksi
11. Pendelegasian Wewenang di antara Direktur Perusahaan
12. Pembagian Tugas Direksi
13. Rapat Direksi
14. Komite-komite Direksi
15. Hubungan Kerja
16. Hubungan Dengan Profesi Pasar Modal
17. Penggunaan Saran Profesional.

KRITERIA DIREKSI

Kriteria anggota Direksi Bank Muamalat terdiri dari 3 (tiga) bagian yakni integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Uraian dari masing-masing kriteria tersebut adalah berikut.

BOARD OF DIRECTORS CHARTER/MANUAL

Bank Muamalat's Work Guidelines are contained in the Board Manual of the Board of Directors of Bank Muamalat No. CPL. KBJ.013.2016, which includes the following matters:

1. Function
2. Composition and Requirements
3. Appointment and Term of Office
4. Resignation and Dismissal
5. Orientation and Capability Enhancement Program
6. Independence of the Board of Directors
7. Position Ethics
8. Duties and Obligations of the Board of Directors
9. Rights and Authorities of the Board of Directors
10. Determination of Company Management Policy by the Board of Directors
11. Delegation of Authority among Directors of the Company
12. Division of Duties of the Board of Directors
13. Meeting of the Board of Directors
14. Committees of the Board of Directors
15. Working Relationship
16. Relationship with Capital Market Professionals
17. Use of Professional Advice.

BOARD OF DIRECTORS CRITERIA

The criteria for members of the Board of Directors of Bank Muamalat consist of three parts: integrity, competence, and financial reputation. The description of each of these criteria is as follows.



Integritas

1. Mempunyai akhlak dan moral yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang:
 - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
5. Tidak sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus dan/atau tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
6. Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Syariah yang sehat.
8. Tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
9. Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

Kompetensi

1. Memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi (keahlian) yang memadai di bidang yang dibutuhkan dalam pengelolaan Bank dan relevan dengan jabatannya.
2. Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah paling sedikit 5 (lima) tahun.
3. Melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko.

Integrity

1. Have good morals and morals.
2. Capable of performing legal acts.
3. Within 5 (five) years prior to appointment and during the term of office, has never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who:
 - a. Has not held an annual GMS;
 - b. His/her accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners has not been accepted by the GMS or has not provided accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners to the GMS; and
 - c. Has caused a company that obtained a license, approval, or registration from the Financial Services Authority to not fulfill the obligation to submit annual reports and/or financial reports to the Financial Services Authority.
4. Never been convicted of a criminal offense as referred to in Law No. 8 of 2010 on the Crime of Money Laundering, a criminal offense that harms state finances and/or is related to the financial sector, within the last 20 (twenty) years before nomination.
5. Not currently undergoing the consequences of the final results from the main party's reassessment with not having passed and/or not included in the "not passed" list.
6. Having the commitment to comply with regulatory provisions including the Bank's provisions and regulations as well as to support the policies of the Financial Services Authority.
7. Have a commitment to the development of healthy Syariah Bank operations.
8. Never directly or indirectly involved in engineering and deviant practices, broken promises and other actions that are detrimental to the Company where the person works or has worked.
9. Not listed in the Do Not Pass List (DTL).

Competency

1. Adequate knowledge and/or competency (expertise) in the field that is required in managing the Bank and is relevant to the assigned position.
2. At least 5 (five) years of experience and expertise in banking operations, sharia banking, financial or sharia financial fields.
3. Strategic management experience in the context of developing a sound Bank.
4. Adequate knowledge and comprehension in risk management implementation.



- Memiliki pengetahuan tentang Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia, bagi anggota Direksi yang merupakan tenaga kerja asing sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan.

Reputasi

- Tidak memiliki kredit/pembiayaan macet.
- Tidak pernah dinyatakan pailit.
- Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- Mendukung pelaksanaan pengelolaan Bank yang sehat.
- Menjaga reputasi Bank.

MASA JABATAN DIREKSI

Masa jabatan anggota Direksi mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS, yang antara lain mengatur:

- Direksi Bank Muamalat diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS pengangkatan dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya. Ketentuan tersebut tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan sebelum masa jabatan berakhir dengan menyebutkan alasannya.
- Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara waktu, tidak terbatas oleh waktu dengan menyebutkan alasannya.
- Jabatan Direktur dinyatakan berakhir, apabila anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, mengundurkan diri, dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian meninggal dunia atau masa jabatannya berakhir. Pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.
- Anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS setelah masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan yakni masa jabatan Direktur Utama dibatasi hanya 2 (dua) kali masa jabatan sebagai Direktur Utama serta masa jabatan anggota Direksi (selain Direktur Utama)

- Knowledge on Indonesia, especially concerning the economy, culture, and Indonesian language, for all members of the Board of Directors who are of foreign nationality in accordance with the Financial Services Authority Regulations regarding the use of foreign workers and knowledge-transfer programs in the banking sector.

Reputation

- Not having bad/non-performing credit/financing;
- Never declared bankrupt.
- Never been a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners found guilty of causing the company to be declared bankrupt.
- Never been convicted of committing a criminal act that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector.
- Support the implementation of sound Bank management.
- Maintain the Bank's reputation.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS

The term of office of members of the Board of Directors refers to the Limited Liability Company Law, Articles of Association, and resolutions of the GMS, which among others, stipulate:

- The Board of Directors of Bank Muamalat is appointed for a period commencing from the date of the GMS of appointment and ends at the closing of the 5th (fifth) annual GMS after the date of appointment. This provision does not reduce the right of the GMS to dismiss at any time before the term ends by stating the reasons.
- The Board of Commissioners based on the decision of the Board of Commissioners Meeting may temporarily dismiss a member of the Board of Directors, not limited by time by stating the reasons.
- The position of Director shall be terminated, if the member of the Board of Directors concerned is dismissed based on the resolution of the GMS, resigns, and no longer meets the requirements as a member of the Board of Commissioners based on the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations, then dies or his/her term of office expires. Dismissal or replacement of the Managing Director and/or Director in charge of the compliance function before the term of office ends must obtain prior approval from the Financial Services Authority before being decided in the GMS.
- Members of the Board of Directors may be reappointed by the GMS after their term of office expires, provided that the term of office of the President Director is limited to 2 (two) times the term of office as President Director and the term of office of members of the Board



dibatasi maksimal 2 (dua) kali masa jabatan. Ketentuan tersebut tidak termasuk apabila yang bersangkutan diangkat menjadi Direktur Utama, maka masa jabatannya hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

of Directors (other than the President Director) is limited to a maximum of 2 (two) times the term of office. This provision does not include if the person concerned is appointed as President Director, then his term of office is only 1 (one) term of office.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DIREKSI

Berikut komposisi dan dasar hukum pengangkatan Direksi Bank Muamalat Indonesia per 31 Desember 2023.

COMPOSITION AND BASIS OF APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Following is the composition and legal basis of appointment of the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia as of 31 December 2023.

Nama Name	Jabatan Position	RUPS/LB Pengangkatan Appointment GMS	Persetujuan OJK OJK Approval	Tanggal Efektif Effective Date	Pengangkatan Kembali Reappointment
Indra Faletehan	Direktur Utama President Director	RUPSLB 29 November 2022 EGMS November 29, 2022	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor Kep-21/D.03/2022 tanggal 18 April 2023 Copy of Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. Kep-21/D.03/2022 dated April 18, 2023	18 April 2023 April 18, 2023	-
Karno	Direktur Kepatuhan, Risiko & Hukum Director of Compliance, Risk & Legal	RUPSLB 24 Juni 2022 EGMS June 24, 2022	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor Kep-153/D.03/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Copy of Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. Kep-153/D.03/2022 dated October 3, 2022	3 Oktober 2022 October 3, 2022	-
Hery Safril	Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan Director of Business Financing Risk	RUPSLB 20 September 2015 EGMS September 20, 2015	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor No. Kep-9/D.03/2018 tanggal 21 Maret 2016 Copy of Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. Kep-9/D.03/2018 dated March 21, 2016	21 Maret 2016 March 21, 2016	29 November 2022 November 29, 2022
Wahyu Avianto	Direktur Operasi & Digital Director of Operations & Digital	RUPSLB 29 November 2022 EGMS November 29, 2022	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor No. Kep-154/D.03/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Copy of Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. Kep-154/D.03/2022 dated October 3, 2022	29 November 2022 November 29, 2022	-
Suhendar	Direktur Keuangan dan Strategi Director of Finance and Strategy	RUPSLB 29 November 2022 EGMS November 29, 2022	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor Kep-21/D.03/2022 tanggal 18 April 2023 Copy of Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. Kep-21/D.03/2022 dated April 18, 2023	18 April 2023 April 18, 2023	-



PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING DIREKSI

Pembagian tugas dan wewenang masing-masing Direksi Bank Muamalat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Keputusan RUPS atau Keputusan rapat Direksi. Berdasarkan RUPS, Direksi Bank dapat melakukan pembagian tugas dan wewenang atau *job description* di antara anggota Direksi. Namun apabila RUPS tidak menetapkan, maka penetapan tugas dan wewenang Direksi mengacu pada keputusan rapat Direksi. Rincian pembagian tugas dan wewenang Direksi ialah sebagai berikut:

1. Direktur Utama

- Merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umum perusahaan berdasarkan prinsip kehematan, efektif, dan efisien, sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan.
- Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan perusahaan secara menyeluruh.
- Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur.
- Menyiapkan *corporate plan* dan *business plan*.
- Menetapkan kebijakan umum terkait Internal Audit dan memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh IAD.
- Memimpin kegiatan yang bersifat strategis dalam pengembangan perusahaan.

2. Direktur Kepatuhan, Risiko dan Hukum

- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan perusahaan telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah.

DIVISION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF EACH MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

The division of duties and authorities of each member of the Board of Directors of Bank Muamalat refers to the applicable laws and regulations, Articles of Association, GMS Decisions, or Decisions of the Board of Directors meeting. Based on the GMS, the Bank's Board of Directors can divide the duties and authorities or job descriptions among the members of the Board of Directors. However, suppose the GMS does not determine. In that case, the determination of the duties and authority of the Board of Directors refers to the decision of the Board of Directors meeting. Details of the division of duties and authorities of the Board of Directors are as follows:

1. President Director

- Planning, developing and determining the company's general policies based on the principles of economy, effectiveness and efficiency, in accordance with the company's vision, mission and objectives.
- Directing, developing and determining the overall management strategy of the company.
- Coordinating the activities and duties of all Directors.
- Prepare corporate plan and business plan.
- Establish general policies related to Internal Audit and pay attention and immediately take the necessary steps on everything stated in each inspection report made by IAD
- Lead strategic activities in the development of the company.

2. Compliance, Risk and Legal Director

- Determine the necessary steps to ensure that the company has complied with all regulations of Bank Indonesia, the Financial Services Authority and other applicable laws and regulations in the context of implementing the prudential principle. Formulate strategies to encourage the creation of a culture of compliance.
- Formulate strategies to encourage the creation of a culture of compliance.
- Ensure that all policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities carried out by Bank Muamalat Indonesia are in accordance with the provisions of Bank Indonesia, the Financial Services Authority and applicable laws and regulations, including sharia principles for Sharia Commercial Banks.



- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BMI tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memantau dan menjaga kepatuhan Bank Muamalat Indonesia terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank Muamalat Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.
- Meminimalkan risiko kepatuhan bank
- Mengkoordinir perumusan *framework* risiko terintegrasi di BMI
- Memastikan bahwa konsep risiko terintegrasi terkait ke dalam perencanaan strategis Bank.
- Mengelola dan mengawasi pengukuran risiko Bank dilakukan secara menyeluruh, khususnya risiko pada kegiatan penghimpunan dana dan operasional Bank
- Membangun dan mengembangkan budaya risiko di Bank Muamalat Indonesia.
- Memberlakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi dan menanggulangi berbagai jenis risiko yang dapat dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia dengan berkoordinasi dengan Direksi lainnya.
- Membangun, mengembangkan dan mengawasi aktivitas mitigasi risiko perbankan Bank Muamalat Indonesia menjadi lebih efisien dengan mempertimbangkan *cost efficiency* guna mencapai hasil bisnis yang optimal dari pelaksanaan seluruh aktivitas bisnis perusahaan.
- Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Muamalat Indonesia berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah.
- Melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

3. Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan

- Mengkoordinir perumusan *framework*, target market, dan risk acceptance criteria pembiayaan secara *bank-wide* termasuk pengelolaan dan penanganan pembiayaan bermasalah.
- Memastikan bahwa konsep pembiayaan dan konsep pengelolaan pembiayaan bermasalah terintegrasi kedalam perencanaan strategis Bank.
- Mengelola dan mengawasi portfolio pembiayaan Bank yang dilakukan secara menyeluruh.
- Membangun dan mengembangkan budaya risiko di dalam proses *end-to-end* pembiayaan.
- Memberlakukan langkah-langkah untuk dapat mengelola portofolio pembiayaan dengan baik beserta mitigasi risiko yang terkait dengan berkoordinasi dengan Direksi lainnya.

- Take precautions so that policies and / or decisions taken by the BMI Board of Directors do not deviate from the provisions of Bank Indonesia, the Financial Services Authority and applicable laws and regulations.
- Monitor and maintain Bank Muamalat Indonesia's compliance with commitments made by Bank Muamalat Indonesia to the Financial Services Authority and other authorized supervisory authorities.
- Minimize bank compliance risk
- Coordinate the formulation of an integrated risk framework in BMI.
- Ensure that the concept of risk is integrated into the Bank's strategic planning.
- Manage and supervise the Bank's overall risk measurement, especially the risks in the Bank's fund raising and operational activities.
- Build and develop a risk culture in Bank Muamalat Indonesia.
- Implement measures that can reduce and overcome various types of risks that can be faced by Bank Muamalat Indonesia in coordination with other Directors.
- Build, develop and supervise Bank Muamalat Indonesia's banking risk mitigation activities to be more efficient by considering cost efficiency in order to achieve optimal business results from the implementation of all company business activities.
- Fully responsible for the implementation of the management of Bank Muamalat Indonesia based on prudent principles and Sharia principles.
- Implementing GCG in every business activity of Bank Muamalat Indonesia at all levels or levels of the organization.

3. Director of Financing Business Risk

- Coordinate the formulation of frameworks, target markets, and risk acceptance criteria for bank-wide financing including the management and handling of problematic financing.
- Ensure that the concept of financing and the concept of managing non-performing financing are integrated into the Bank's strategic planning.
- Manage and supervise the Bank's overall financing portfolio.
- Build and develop a risk culture in the end-to-end financing process.
- Implement measures to properly manage the financing portfolio and related risk mitigation in coordination with other Directors.



- Membangun, mengembangkan dan mengawasi aktivitas mitigasi risiko kredit guna mencapai hasil bisnis yang optimal dari pelaksanaan seluruh aktivitas bisnis Bank.
- Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan portofolio pembiayaan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan seluruh ketentuan yang berlaku.
- Melaksanakan GCG termasuk memastikan setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dilakukan secara berintegritas.

4. Direktur Operasi dan Digital

- Mengkoordinir perumusan *Standard Operational Procedure* (SOP) sebagai dasar dalam semua aktivitas operasional perbankan di Bank Muamalat Indonesia.
- Memberlakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi dan menanggulangi berbagai jenis risiko operasional yang dapat dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia dengan berkoordinasi dengan Direksi lainnya.
- Memastikan agar seluruh operasional perbankan di Bank Muamalat Indonesia mematuhi policy dan SOP yang berlaku baik internal maupun eksternal.
- Membangun, mengembangkan dan mengawasi aktivitas operasional perbankan Bank Muamalat Indonesia menjadi lebih efisien dengan mempertimbangkan *cost efficiency* guna mencapai hasil bisnis yang optimal dari pelaksanaan seluruh aktivitas bisnis perusahaan.
- Mengelola dan mengawasi penggunaan aset perusahaan secara baik dan tepat untuk kegiatan bisnis, dengan melakukan koordinasi erat dengan para pimpinan unit usaha.
- Memastikan dan mengawasi kualitas standar pelayanan terhadap nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di semua unit bisnis pelayanan nasabah, guna tercipta tingkat kepuasan nasabah yang baik.
- Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Muamalat Indonesia berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah.
- Melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

5. Direktur Keuangan dan Strategi

- Mengarahkan, mengevaluasi dan mengkoordinir perumusan kebijakan finansial perusahaan yang berorientasi pada optimalisasi pendapatan maupun efisiensi biaya.
- Memastikan penerapan kebijakan akuntansi (PSAK), perpajakan dan kebijakan pengelolaan finansial perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Build, develop and supervise credit risk mitigation activities to achieve optimal business results from the implementation of all business activities of the Bank.
- Fully responsible for the implementation of the Bank's financing portfolio management based on prudent principles, sharia principles, and all applicable regulations.
- Implementing GCG, including ensuring that the Bank's business activities at all levels of the organization are conducted with integrity.

4. Director of Operations and Digital

- Coordinating the formulation of Standard Operational Procedure (SOP) as the basis for all banking operational activities at Bank Muamalat Indonesia.
- Implement measures that can reduce and overcome various types of operational risks that can be faced by Bank Muamalat Indonesia in coordination with other Directors.
- Ensure that all banking operations in Bank Muamalat Indonesia comply with applicable policies and SOPs both internal and external.
- Build, develop and supervise the banking operations of Bank Muamalat Indonesia to be more efficient by considering cost efficiency in order to achieve optimal business results from the implementation of all business activities of the Bank.
- Manage and supervise the proper use of the Bank's assets for business activities, in close coordination with business unit leaders.
- Ensure and supervise the quality of service standards to customers in accordance with applicable regulations in all customer service business units, in order to create a good level of customer satisfaction.
- Fully responsible for the implementation of the management of Bank Muamalat Indonesia based on prudent principles and Sharia principles.
- Implementing GCG in every BMI business activity at all levels of the organization.

5. Director of Finance and Strategy

- Direct, evaluate and coordinate the formulation of the Bank financial policies oriented towards revenue optimization and cost efficiency.
- Ensure the application of accounting policies (PSAK), taxation and company financial management policies in accordance with applicable regulations.



- Mengelola dan mengawasi pengukuran kinerja perusahaan secara menyeluruh.
 - Memastikan dan mengawasi pelaksanaan dan penerbitan laporan keuangan perusahaan.
 - Mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan *business intelligence* dan pengurusan *data warehouse* yang efektif guna mendapatkan informasi yang akurat dalam penentuan strategi bisnis perusahaan.
 - Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan persetujuan atas aktivitas unit kerja di bawah direktorat *finance* agar sesuai dengan ketentuan dan/atau target kerja yang telah ditetapkan.
 - Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Muamalat Indonesia berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
 - Melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Manage and supervise the overall performance measurement of the Bank.
 - Ensure and supervise the implementation and issuance of the Bank's financial statements.
 - Direct and evaluate the implementation of business intelligence and effective data warehouse management to obtain accurate information in determining the Bank's business strategy.
 - Coordinate, supervise and approve the activities of work units under the finance directorate in order to comply with the provisions and/or work targets that have been set.
 - Fully responsible for the implementation of the management of Bank Muamalat Indonesia based on prudent principles and sharia principles.
 - Implementing GCG in every BMI business activity at all levels of the organization.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham (Lembar Saham) Share Ownership (Share Sheet)			
		Bank Muamalat	Bank Lain Other Banks	LJK-Non Bank Non-Bank Financial Institution	Bank Lain Other Banks
Indra Falatehan	Direktur Utama President Director	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Karno	Direktur Kepatuhan, Risiko & Hukum Director of Compliance, Risk & Legal	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Hery Safril	Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan Director of Financing Business Risk	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Wahyu Avianto	Direktur Operasi & Digital Director of Operations & Digital	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Suhendar	Direktur Keuangan dan Strategi Director of Finance and Strategy	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Ketentuan mengenai rangkap jabatan Anggota Direksi Bank Muamalat mengacu pada Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 Tentang Bank Umum Syariah. Anggota Direksi Bank Muamalat tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

CONCURRENT POSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Provisions regarding concurrent positions of members of the Board of Directors of Bank Muamalat refer to Article 50 of the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 16/POJK.03/2022 concerning Islamic Commercial Banks. Members of the Board of Directors of Bank Muamalat do not have concurrent positions as members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or Executive Officers at banks, companies and/or other institutions.



Rangkap jabatan dikecualikan apabila:

1. Direksi bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
2. Direksi bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun, yang dimiliki oleh Bank;
3. Direksi melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti sebagaimana dan/atau menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.

Concurrent positions are allowed if:

1. Directors who are responsible for supervising the Bank's participation in subsidiaries, carry out functional duties as members of the Board of Commissioners of non-bank subsidiaries controlled by the Bank;
2. Directors responsible for the supervision of pension funds, perform duties as the supervisory board of pension funds owned by the Bank; and/or
3. Directors carry out duties as substitute directors as and/or hold positions in non-profit organizations or institutions, as long as it does not result in the person concerned neglecting the implementation of duties and responsibilities as a member of the Board of Directors.

RANGKAP JABATAN DIREKSI PER 31 DESEMBER 2023

Concurrent Positions of the Board of Directors as of 31 December 2023

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada Perusahaan Lain Position at Other Companies	Nama Perusahaan Company Name
Indra Falatehan	Direktur Utama President Director	-	-
Karno	Direktur Kepatuhan, Risiko & Hukum Director of Compliance, Risk & Legal	-	-
Hery Safril	Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan Director of Financing Business Risk	-	-
Wahyu Avianto	Direktur Operasi & Digital Director of Operations & Digital	-	-
Suhendar	Direktur Keuangan dan Strategi Director of Finance and Strategy	-	-

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 80 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Pasal 61 Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, anggota Direksi Bank Muamalat dilarang untuk mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan bank umum syariah dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan, apabila terjadi benturan kepentingan. Dengan demikian, Direksi wajib untuk:

1. Direksi selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan.
2. Direksi melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Bank Muamalat maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

MANAGEMENT OF CONFLICT OF INTEREST OF THE BOARD OF DIRECTORS

Following up on the provisions of Article 80 of the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and Article 61 of Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, members of the Board of Directors of Bank Muamalat are prohibited from taking actions that can reduce assets or reduce profits of Islamic commercial banks and must disclose conflicts of interest in every decision, if a conflict of interest occurs. Thus, the Board of Directors is obliged to:

1. The Board of Directors always avoid conflict of interest.
2. The Board of Directors reports to the Company on his/her or family's shares ownership in Bank Muamalat as well as in other banks and/or companies, domiciled inland and abroad.



3. Direksi tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan atau yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan/aset BMI.
4. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BMI selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas.
6. Direksi wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BMI dan pada perusahaan lain.
7. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan, dan anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan yang berkaitan dengan kasus tersebut.
8. Apabila terjadi benturan kepentingan, Direksi dilarang mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.
9. Apabila benturan kepentingan dan/atau terjadinya perkara tersebut menyangkut seluruh Direktur, maka Perusahaan akan diwakili oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. The Board of Directors shall not take advantage of his/her position for personal interests or for the interests of other persons or parties that conflict with the interests of the Company or that may cause losses or reduce BMI's profits/assets.
4. The Board of Directors does not take and/or receive personal benefits from BMI other than remuneration and other facilities determined by the General Meeting of Shareholders.
5. The Board of Directors avoids any activity that may influence its independency in carrying out its duties.
6. Members of the Board of Directors is obligated to fill out the Special List that contains his/her and/or family's shares ownership in BMI and in other companies.
7. In the event conflict of interest occur, then it must be disclosed, and the concerned members of the Board of Directors may not be involved in the Company's decision-making process related to the concerned case.
8. In the event a conflict of interest occurs, the Board of Directors is prohibited from taking any action that may cause losses or reduce profits of the Bank and is obligated to disclose the concerned conflict of interest in each of the decision taken.
9. In the event a conflict of interest and/or the occurrence of the concerned case is connected with all Directors, then the Company will be represented by all members of the Board of Commissioners by referring to prevailing laws and regulations.

PROGRAM ORIENTASI DIREKSI BARU

Program orientasi Bank Muamalat Indonesia bagi anggota Direksi baru ialah program pengenalan perusahaan yang dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan, yakni ketentuan regulasi, keberagaman latar belakang Direksi, serta media pengenalan antar anggota Direksi. Dengan demikian, program orientasi ini penting untuk menciptakan suatu tim kerja yang solid bagi Direksi.

Prosedur Program Orientasi Bank Muamalat Indonesia mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Anggota Direksi yang baru pertama kali menjabat wajib diberikan Program Orientasi mengenai BMI.
- b. Direktur Utama bertanggungjawab untuk mengadakan program Orientasi. Dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan Program Orientasi berada pada Komisaris Utama atau anggota Direksi yang ada, dimana materi disiapkan oleh Corporate Secretary.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The orientation program of Bank Muamalat Indonesia for new members of the Board of Directors is an introduction of the Company carried out based on several considerations, namely regulatory provisions, diversity in the background of the members of the Board of Directors, as well as an introduction media among the members of the Board of Directors. Thus, the orientation program is important to creating a work team that is solid for the Board of Directors.

The Orientation Program procedures of Bank Muamalat Indonesia covers the following matters:

- a. Members of the Board of Directors who are taking office for the first time must be provided with the Orientation Program on BMI.
- b. The President Director is responsible for implementing the Orientation Program. In the event the President Director is not available, the responsibility for implementing the Orientation Program lies with the President Commissioner or member of the Board of Directors who is present, whereas materials are prepared by the Corporate Secretary.



- c. Program Orientasi anggota Direksi, antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:
- Gambaran mengenai BMI berkaitan dengan visi, misi, tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, manajemen risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
 - Penjelasan mengenai produk dan aktivitas jasa perbankan BMI.
 - Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh BMI.
 - Tanggung jawab hukum anggota Direksi.
 - Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran komite-komite yang dibentuk oleh Direksi.
 - Penjelasan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi serta aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan terkait.
 - Team building*. Dalam kegiatan ini menyertakan seluruh Direksi, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya.
- d. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas BMI, pengenalan dengan para Karyawan Senior dan para Karyawan BMI serta program lainnya.

- c. The Orientation Program of members of the Board of Directors, among others, covers such matters as follows:
- Description of BMI related to the vision, mission, objectives, characteristics, scope of activities, financial and operational performance, strategies, short and long-term business plan, competitive position, risk management and various other strategic issues.
 - Explanation on BMI's banking products and service activities.
 - Implementation of the principles of Good Corporate Governance by BMI.
 - Legal responsibilities of the Board of Directors.
 - Explanation on delegated authorities, internal and external audits, internal control system and policy as well as the duties and roles of the committees established by the Board of Directors.
 - Explanation on obligations, duties, responsibilities and rights of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as on regulations and provisions.
 - Team building where all members of the Board of Directors are involved, newly appointed members and former members (if possible).
- d. The Orientation Program conducted can be a form of presentation, meeting or visit to BMI's facilities, introduction to Senior Staffs and BMI Employees as well as other program formats.

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko merupakan sebuah kebutuhan yang harus dikuasai anggota Direksi Bank Muamalat dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko Bank secara efektif. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum yang mengatur bahwa Dewan Komisaris dan Direksi wajib memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terkait.

KEPEMILIKAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO DIREKSI

Ownership of Risk Management Certification of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Level Sertifikasi Certification Level	Bidang Subject	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi Certifying Agency	Tanggal Dikeluarkan Issuing Date	Tanggal Kadaluarsa Expiration Date	Program Pemeliharaan Maintenance Program
Indra Falatehan	Direktur Utama President Director	5	Risk Management Certification	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Professional Certification Agency (BNSP)	14 September 2021 September 14, 2021	14 September 2025 September 14, 2025	

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

Competence and expertise in the field of risk management are a necessity that must be possessed by members of the Board of Directors of Bank Muamalat to effectively implement the Bank's risk management. This is also confirmed by the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 24 of 2022 concerning the Development of the Quality of Human Resources of Commercial Banks, which stipulates that the Board of Commissioners and Directors are required to have Work Competency Certification in the field of risk management issued by the relevant Professional Certification Institution.



Nama Name	Jabatan Position	Level Sertifikasi Certification Level	Bidang Subject	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi Certifying Agency	Tanggal Dikeluarkan Issuing Date	Tanggal Kadaluarsa Expiration Date	Program Pemeliharaan Maintenance Program
Karno	Direktur Kepatuhan, Risiko & Hukum Director of Compliance, Risk & Legal	5	Risk Management Certification	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) Banking Professional Certification Institute (LSPP)	27 Agustus 2020 August 27, 2020	27 Agustus 2024 August 27, 2024	
Hery Safril	Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan Director of Financing Business Risk	5	Risk Management Certification	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) Banking Professional Certification Institute (LSPP)	22 Maret 2014 March 22, 2014	22 Maret 2024 March 22, 2024	Pakta Integritas & Anti-Fraud Awareness 12 Maret 2023; Sertifikat dalam proses perpanjangan LSPKS Integrity Pact & Anti-Fraud Awareness March 12, 2023; Certificate in process for extension at LSPKS
Wahyu Avianto	Direktur Operasi & Digital Director of Operations & Digital	5	Risk Management Certification	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) Banking Professional Certification Institute (LSPP)	4 Maret 2022 March 4, 2022	10 Maret 2024 March 10, 2024	Upgrading Assessor Kompetensi Manajemen Risiko 11 Jun 2023 Sertifikat dalam proses perpanjangan LSPKS Upgrading of Assessor Competency on Risk Management; Certificate I process of extension at LSPKS
Suhendar	Direktur Keuangan dan Strategi Director of Finance and Strategy	5	Risk Management Certification	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) Banking Professional Certification Institute (LSPP)	15 Desember 2022 December 15, 2022	15 Desember 2024 December 15, 2024	

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Kebijakan

Bank Muamalat senantiasa memberikan kesempatan yang sama bagi para pegawainya dalam hal pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum. Regulasi tersebut menegaskan, Bank wajib melakukan pengelolaan SDM dan pengembangan kualitas SDM yang dimiliki secara berkelanjutan.

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM OF THE BOARD OF DIRECTORS

Policy

Bank Muamalat Indonesia always provides equal opportunity to all employees in Human Resource (HR) competency development which refers to the Financial Services Authority Regulation No. 24 of Year 2022 regarding Quality Development of Human Resources for Commercial Banks. The regulation affirms that the Bank is obligated to manage and develop the quality of its HR continuously.



Pengembangan kualitas SDM dimaksud, antara lain melalui kegiatan training peningkatan kompetensi kerja SDM. Bank juga diwajibkan menyediakan anggaran sebagai wujud dukungan pada pengembangan kompetensi tersebut.

Realisasi

Realisasi pengembangan kompetensi Direksi diuraikan dalam “Profil Perusahaan” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Prosedur Penilaian

Penilaian kinerja komite tingkat Direksi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, POJK No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta piagam kerja masing-masing komite. Bank Muamalat kemudian menilai kinerja komite-komite tingkat Direksi dengan metode *self-assessment* secara kolektif dan kolegial yang dilakukan secara berkala melalui Human Capital Division.

Kriteria Penilaian

Pembentukan komite di bawah Direksi untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pembentukan komite tersebut berdasarkan surat keputusan Direksi disertai tugas dan tanggung jawab masing-masing komite. Adapun tugas dan tanggung jawab komite-komite tersebut secara rinci diatur dalam Piagam (*Charter*) Komite level Direksi Bank Muamalat.

Pada tahun 2023, komite di bawah Direksi yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia yakni Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Kewajiban, Komite Sumber Daya Manusia, Komite Pembiayaan, Komite Bisnis, serta Komite Kebijakan Pembiayaan.

Quality development of HR referred to above is carried out, among others, through training activities in improving HR work quality. The Bank is also obligated to support such competency development.

Realization

Realization of the Board of Directors' competency development is described in the chapter on “Company Profile” contained in this Annual Report.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Assessment Procedures

Performance assessment of committees of Board of Directors level refers to the Financial Services Authority Regulation regarding the implementation of information technology by commercial banks, Financial Services Authority Regulation on the implementation of risk management for sharia commercial banks and sharia business units, POJK No. 17/2023 on Implementation of Governance for Commercial Banks, as well as the charter of each respective committee. Bank Muamalat then assess the performance of committees of Board of Directors level by method of self-assessment collectively and collegially carried out periodically through the Human Capital Division.

Assessment Criteria

The establishment of committees under the Board of Directors is to assist in carrying out the Board's duties and responsibilities. This establishment of the committees is based on the decision letter of the Board of Directors complete with the duties and responsibilities of each respective committee. These duties and responsibilities of the committees are regulated in detail under the Charter of the Committees of the Board of Directors level of Bank Muamalat.

In 2023, the committees under the Board of Director of Bank Muamalat Indonesia, namely the Information Technology Steering Committee, Risk Management Committee, Asset and Obligations Committee, Human Resources Committee, Financing Committee, Business Committee, as well as Financing Policy Committee.



Penilaian atas kinerja komite-komite tersebut dilakukan secara periodik melalui Human Capital Division. Berikut, merupakan kriteria penilaian atas kinerja anggota komite di bawah Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya:

1. Pemenuhan Struktur Organisasi Komite
2. Ketersediaan Piagam/*Charter* Komite
3. Pelaksanaan Rapat Komite
4. Dokumentasi Hasil Rekomendasi Komite

Hasil Penilaian

Berikut adalah hasil penilaian Komite di Bawah Direksi atas kinerja yang telah diberikan sepanjang tahun 2023:

Assessment of the performance of the above committees is carried out periodically through the Human Capital Division. Following is the assessment criteria on the performance of committees under the Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities

1. Fulfillment of Committee's Organizational Structure
2. Availability of Committee Charter
3. Implementation of Committee Meetings
4. Documentation of Committee Recommendation Results

Assessment Results

Below are results of the assessment of the committees under the Board of Directors for their performance during the year 2023:

Indikator Indicator	Penilaian	Assessment
Struktur Organisasi Komite Organizational Structure of Committees	Struktur organisasi dan komposisi keanggotaan komite tingkat Direksi telah lengkap dan sesuai dengan kebutuhan Bank. Proses pengangkatan keanggotaan komite telah mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.	The organizational structure and membership composition of the Board of Directors level committees are complete and in accordance with the needs of the Bank. The appointment process of committee membership has referred to the prevailing laws and regulations.
Ketersediaan Piagam Komite Availability of Committee Charter	Seluruh komite tingkat Direksi telah memiliki piagam komite sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota komite yang dievaluasi dan dikinikan secara berkala.	All committees at the Board of Directors level have a committee charter as a guide in carrying out their duties and responsibilities as committee members. However, in the future, improvement is still needed in order to update the existing committee charters.
Pelaksanaan Rapat Komite Implementation Committee Meetings	Frekuensi rapat komite tingkat Direksi selama tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan dan mengacu kepada jadwal rapat tahunan yang telah ditetapkan.	The frequency of Board of Directors committee meetings during 2023 was in accordance with the provisions and refers to the annual meeting schedule that has been set.
Dokumentasi Hasil Rekomendasi Komite Documentation of Results of Committee Recommendation	Hasil rapat komite tingkat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan <i>dissenting opinions</i> (jika ada) secara jelas.	The results of the Board of Directors level committee meetings have been set forth in the minutes of meetings and have been well documented, including clear disclosure of dissenting opinions (if any).



Hubungan Afiliasi antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Affiliated Relationships between Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Majority and/or Controlling Shareholders

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Pengungkapan hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris mencakup hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun pemegang saham pengendali. Bentuk hubungan keuangan termasuk di antaranya utang-piutang, kerja sama bisnis, dan sebagainya. Adapun, bentuk hubungan keluarga mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dan sebagainya.

AFFILIATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Disclosure of affiliated relationships of members of the Board of Commissioners includes family relationships and financial relationships with other members of the Board of Commissioners, Directors, and controlling shareholders. Forms of financial relationships include debt and credit, business cooperation, and so on. Meanwhile, family relationships include special relationships, especially those caused by blood relations such as husband/wife/children/parents/siblings/in-laws, and so on.

PERNYATAAN HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Statement of Affiliation of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Kepengurusan Management Relationship	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders			
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	√		√		√		√		√		√		√	
Amin Said Husni	Komisaris Independen/ Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/ Acting President Comissioner	√		√		√		√		√		√		√	
Andre Mirza Hartawan	Komisaris Commissioner	√		√		√		√		√		√		√	



HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Bank mengatur pengungkapan hubungan afiliasi Direksi mencakup hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham pengendali. Bentuk hubungan keuangan termasuk di antaranya utang-piutang, kerja sama bisnis, dan sebagainya. Sementara bentuk hubungan keluarga mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dan sebagainya. Pernyataan Hubungan Afiliasi Direksi.

AFFILIATION RELATIONSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Bank regulates the disclosure of affiliated relationships of the Board of Directors, including family relationships and financial relationships with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and controlling shareholders. Forms of financial relationships include debt and credit, business cooperation, and so on. Meanwhile, family relationships include special relationships, especially those caused by blood relations such as husband/wife/children/parents/siblings/in-laws, and so on. Statement of Affiliated Relationship of the Board of Directors.

PERNYATAAN HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Statement of Affiliation of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Kepengurusan Management Relationship	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders			
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Indra Falatehan	Direktur Utama President Director	√		√		√		√		√		√		√	
Karno	Direktur Kepatuhan, Risiko & Hukum Director of Compliance, Risk & Legal	√		√		√		√		√		√		√	
Hery Safril	Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan Director of Financing Business Risk	√		√		√		√		√		√		√	
Wahyu Avianto	Direktur Operasi & Digital Director of Operations & Digital	√		√		√		√		√		√		√	
Suhendar	Direktur Keuangan dan Strategi Director of Finance and Strategy	√		√		√		√		√		√		√	



Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham

Policy on Disclosure of Information on Share Ownership

Sesuai dengan Peraturan OJK nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, penyampaian laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas Perusahaan. Bank Muamalat dan/atau anggota Pengurus Bank Muamalat senantiasa menyampaikan laporan terkait perubahan kepemilikan saham dari seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota Dewan Pengawas Syariah.

Sepanjang tahun 2023, tidak terjadi perubahan kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi. Rinciannya diuraikan melalui tabel di bawah ini.

In accordance with OJK Regulation No. 11/POJK.04/2017 regarding Ownership Reports or Every Change in Ownership of Public Company Shares, submission of ownership report and every change in ownership of shares must be made no later than 3 (three) days from the occurrence of ownership or changes in ownership of the Company. Bank Muamalat and/or members of Bank Muamalat Management always submit reports regarding changes in share ownership of all members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and members of the Sharia Supervisory Board.

Throughout 2023, there were no changes in the share ownership of the Board of Commissioners and Directors. Details of the changes are described in the table below.

Pemegang Saham Shareholders	Jabatan Position	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Amin Said Husni	Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/Acting President Commissioner	-	-
Ir. Andre Mirza Hartawan, MBA	Komisaris Commissioner	1.731.033.333	5,19
Direksi Board of Directors			
Indra Falatehan	Direktur Utama President Director	-	-
Karno	Direktur Kepatuhan, Risiko, dan Hukum Director of Compliance, Risk and Legal Affairs	-	-
Hery Syafril	Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan Director of Financing Business Risk	-	-
Wahyu Avianto	Direktur Operasi dan Digital Director of Operations and Digital	-	-
Suhendar	Direktur Keuangan dan Strategi Director of Finance and Strategy	-	-



Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity Policy of the Board of Commissioners and Directors

Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan sesuai dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Determination of the composition of the Board of Commissioners has taken into account the diversity of expertise, knowledge and experience required in accordance with the objectives and needs of the company in accordance with the recommendations of the Financial Services Authority contained in the Appendix to the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance.

PERNYATAAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Diversity Statement of Board of Commissioners Composition

No	Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Job Experience	Keahlian Expertise
1	Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	62	Laki-laki Male	Sarjana Hukum Bachelor of Law	- Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung pada tahun 2021 - Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung pada tahun 2019. - Functional Prosecutor at the Deputy Attorney General for Development in the Attorney General's Office in 2021 - Secretary to the Deputy Attorney General for Development in the Attorney General's Office in 2019.	Hukum Legal Affairs
2	Amin Said Husni	Komisaris Independen/ Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/ Acting President Commissioner	57	Laki-laki Male	- Magister Studi Antropologi Budaya - Sarjana Syariah - Master of Cultural Anthropology Studies - Bachelor of Sharia	- Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari 2006 hingga 2018 - Anggota Komisi X (Pendidikan) DPR RI dari 2007 hingga 2008 - Vice Chairman of the Budget Committee of the House of Representatives (DPR) of the Republic of Indonesia (RI) from 2006 to 2018 - Member of Commission X (Education) of the House of Representatives from 2007 to 2008	Syariah Sharia



No	Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Job Experience	Keahlian Expertise
3	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Commissioner	54	Laki-laki Male	- Doktor Ilmu ekonomi - Master Administrasi Bisnis - Sarjana Teknik Industri - Doctor of Economics - Master of Business Administration - Bachelor of Industrial Engineering	- Komisaris Independen PT Bank Oke Indonesia Tbk (2019-2022) - Komisaris Utama PT Wisma Seratus Sejahtera (2014-sekarang) - Komisaris Utama PT Syres Power Energy (2004-2019) - Komisaris Utama PT Auto Daya Amara (2014-2019) - Independent Commissioner of PT Bank Oke Indonesia Tbk (2019-2022) - President Commissioner of PT Wisma Seratus Sejahtera (2014-present) - President Commissioner of PT Syres Power Energy (2004-2019) - President Commissioner of PT Auto Daya Amara (2014-2019)	- Ekonomi - Perbankan - Economy - Banking



PERNYATAAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Diversity Statement of Board of Directors Composition

No	Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Job Experience	Keahlian Expertise
1	Indra Falatehan	Direktur Utama President Director	45	Laki-laki Male	- Magister Manajemen Bisnis - Sarjana Gas dan Petrochemical Engineering - Master of Business Management - Bachelor of Gas and Petrochemical Engineering- President Director of PT KB Bukopin Syariah (2022-2023)	- Direktur Utama PT KB Bukopin Syariah (2022) - Direktur Utama Bank BJB Syariah (2018-2022) - Direktur Pembiayaan Bank BJB Syariah (2017-2018) - Direktur Keuangan Bank BJB Syariah (2016) - Group Head of Corporate Banking 2 Bank Syariah Mandiri (2015-2016) - Kepala Divisi Special Financing & Syndication Bank Syariah Mandiri (2012-2015). - President Director of PT KB Bukopin Syariah (2022) - Financing Director of Bank BJB Syariah (2017-2018) - Finance Director of Bank BJB Syariah (2016) - Group Head of Corporate Banking 2 Bank Syariah Mandiri (2015-2016) - Head of Special Financing & Syndication Division of Bank Syariah Mandiri (2012-2015).	- Perbankan Syariah - Keuangan - Syariah Banking - Finance
2	Karno	Direktur Kepatuhan, Risiko & Hukum Director of Compliance, Risk & Legal	51	Laki-laki Male	- Magister Manajemen - Sarjana Ekonomi - Master of Management - Bachelor of Economics	- Deputi bidang Manajemen Risiko di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) (2018-2022) - Kepala Divisi Manajemen Risiko PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (2016-2018) - Kepala Departemen Manajemen Risiko PT Bank BCA Syariah (2013-2016). - Deputy for Risk Management at the Hajj Financial Management Agency (BPKH) (2018-2022) - Head of Risk Management Division of PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (2016-2018). - Head of Risk Management Department of PT Bank BCA Syariah (2013-2016).	- Manajemen Risiko - Perbankan Syariah - Risk Management - Syariah Banking
3	Hery Safril	Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan Director of Financing Business Risk	54	Laki-laki Male	- MBA International Business - S1 Akuntansi - MBA International Business - Bachelor of Accounting	- CFO & Finance Director-PT Bank QNB Kesawan Tbk (2012-2015) - Controller-PT Bank Rabobank International Indonesia (2009-2012) - Chief Financial Officer & Legal Entity Controller-JP Morgan Indonesia (JP Morgan Chase Bank Jakarta Branch & PT JP Morgan Securities Indonesia) pada tahun 2003-2009 - Akuntan Publik, Ernst & Young (1993-2004) - CFO & Finance Director-PT Bank QNB Kesawan Tbk (2012-2015) - Controller-PT Bank Rabobank International Indonesia (2009-2012) - Chief Financial Officer & Legal Entity Controller-JP Morgan Indonesia (JP Morgan Chase Bank Jakarta Branch & PT JP Morgan Securities Indonesia) in 2003-2009 - Public Accountant, Ernst & Young (1993-2004)	- Perbankan - Akuntansi - Keuangan - Banking - Accounting - Finance



No	Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Job Experience	Keahlian Expertise
4	Wahyu Avianto	Direktur Operasi & Digital Director of Operations & Digital	51	Laki-laki Male	• Magister Manajemen Keuangan • Sarjana Teknik Planologi • Master of Financial Management • Bachelor of Planology Engineering	• Senior Executive Vice President Operations PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-2022) • Anggota/Tim Percepatan Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN (2020-2021) • Direktur Keuangan & Operasional PT Bank BNI Syariah (2018-2021). • Senior Executive Vice President Operations PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-2022) • Member/Team for the Acceleration of Integration and Increasing the Value of BUMN Syariah Banks (2020-2021) • Director of Finance & Operations at PT Bank BNI Syariah (2018-2021).	• Perbankan Syariah • Keuangan • Operasional • Syariah banking • Finance • Operational
5	Suhendar	Direktur Keuangan dan Strategi Director of Finance and Strategy	47	Laki-laki Male	• Magister Islamic Banking and Finance • Sarjana Ekonomi • Masters in Islamic Banking and Finance • Bachelor of Economics	• Senior Vice President/Group Head Corporate Transformation Office PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-2022) • Group Head/Senior Vice President, Corporate Transformation PT Bank Syariah Mandiri (2019-2021) • Group Head/Senior Vice President, Accounting Group PT Bank Syariah Mandiri (November 2014-Januari 2019). • Senior Vice President/Group Head Corporate Transformation Office PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-2022) • Group Head/Senior Vice President, Corporate Transformation of PT Bank Syariah Mandiri (2019-2021) • Group Head/Senior Vice President, Accounting Group PT Bank Syariah Mandiri (November 2014-January 2019).	• Keuangan • Ekonomi • Finance • Economy



Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi

Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penilaian

Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap tahunnya (paling sedikit satu tahun sekali) melalui metode *self-assessment*. Proses penilaian kinerja ini diawali dengan pengisian kertas kerja yang berisi kriteria/indikator pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang disusun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku serta atas kompetensi kinerja Dewan Komisaris selama satu semester/tahun.

Hasil penilaian tersebut disampaikan kepada pemegang saham dan dievaluasi melalui RUPS Tahunan. Pada penyerahan laporan, RUPS Tahunan juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengelolaan (pengawasan) yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada akhir tahun, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil evaluasi terhadap kinerja secara keseluruhan dan hasil evaluasi masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual menjadi pertimbangan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif serta menjadi salah satu dasar pertimbangan Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Selain itu, hasil evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris kemudian menjadi sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris secara umum ditetapkan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/pojk.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 Tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang

BOARD OF COMMISSIONERS ASSESSMENT

Assessment Procedure

The implementation of the Board of Commissioners performance assessment is carried out annually (at least once a year) through a self-assessment mechanism. This process begins with filling out a working paper containing criteria/indicators of the implementation of duties and responsibilities in accordance with applicable regulations and on the performance competence of the Board of Commissioners for one semester/year.

The assessment results are then submitted to the shareholders and evaluated through the Annual GMS. At the submission of the report, the GMS also granted full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Commissioners for the management (supervisory) actions carried out in the financial year ended at the end of the year, as long as such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements and do not constitute a criminal offense or violation of the provisions of applicable laws and regulations.

The results of the evaluation of the performance of the Board of Commissioners as a whole and each member of the Board of Commissioners individually are taken into consideration in the compensation and incentive scheme and become one of the bases for consideration by the Shareholders to dismiss and/or reappoint the members of the Board of Commissioners concerned. In addition, the results of the performance evaluation of members of the Board of Commissioners then become a means of assessing and improving the effectiveness of the Board of Commissioners.

Assessment Criteria

The criteria for assessing the performance of the Board of Commissioners are generally established based on the duty obligations contained in the Financial Services Authority Regulation No. 33/pojk.04/2014 of Year 2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Financial Services Authority Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks, Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.03/2022 regarding Shariah Commercial Banks, Bank Indonesia Regulation No 11/33/PBI/2009 regarding Good Corporate Governance Implementation in Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, as well as applicable laws and regulations



Saham. Kriteria evaluasi disampaikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi secara terbuka kepada Dewan Komisaris sejak pengangkatan pertamanya.

Aspek kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris secara *self-assessment* terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu aspek: *Governance Structure* (14 indikator), *Governance Process* (20 indikator) dan *Governance Outcome* (8 indikator).

and the Company's Articles of Association and Shareholders mandate. Assessment criteria are conveyed openly by the Nomination and Remuneration Committee to the Board of Commissioners since the initial appointment.

Aspects of the Board of Commissioners self-assessment criteria are divided into 3 (three), namely aspects: *Governance Structure* (14 indicators), *Governance Process* (20 indicators), and *Governance Outcome* (8 indicators).

Aspek Aspect	Indikator	Indicator
<i>Governance Structure</i>	1. Jumlah Anggota Dewan Komisaris 2. Jumlah Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia 3. Jumlah Komisaris Independen 4. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris 5. Rangkap Jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite di bawah Dewan Komisaris 6. Tidak ada hubungan Keluarga sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 7. Ketersediaan pedoman dan tata tertib kerja 8. Integritas, kompetensi dan reputasi keuangan 9. Masa tunggu (<i>cooling off</i>) bagi anggota yang berasal dari mantan anggota Direksi 10. Tidak ada hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga yang dapat mempengaruhi independensi 11. Pemenuhan kelulusan <i>fit and proper test</i> OJK 12. Kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab 13. Kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan 14. Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik	1. Number of Members of the Board of Commissioners 2. Number of members of the Board of Commissioners domiciled in Indonesia 3. Number of Independent Commissioners 4. Concurrent Positions of Members of the Board of Commissioners 5. Concurrent Positions Independent Commissioner as Chairman of the Committee under the Board of Commissioners 6. There is no family relationship among members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors 7. Availability of work guidelines and rules 8. Integrity, competence and financial reputation 9. Waiting period (<i>cooling off</i>) for members who are former members of the Board of Directors 10. There are no financial, management, share ownership and/or family relationships that may affect independence 11. Fulfillment of OJK fit and proper test 12. Competence that is sufficient and relevant to the position to carry out the duties and responsibilities 13. Willingness and ability to carry out continuous learning 14. The composition of the Board of Commissioners does not meet the requirements due to owner intervention



Aspek Aspect	Indikator	Indicator
<i>Governance Process</i>	- Proses Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris - Telah memastikan penyelenggaraan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha - Melakukan kewajiban dalam pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi - Telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank - Telah menyetujui, mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko - Evaluasi atas pertanggung jawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Manajemen Risiko - Menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan rencana korporasi - Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank - Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank - Melakukan pemberitahuan kepada OJK jika terjadi pelanggaran peraturan - Independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab - Pembentukan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi - Proses pengangkatan Anggota Komite - Memastikan Komite menjalankan tugas dan tanggung jawabnya - Penyediaan waktu yang cukup oleh anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab - Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris - Mekanisme pengambilan keputusan Rapat - Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain - Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank - Intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris	- The process of appointing and/or replacing members of the Board of Commissioners - Has ensured the implementation of the principles of Good Corporate Governance in every business activity - Carry out obligations in supervising the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors - Has directed, monitored and evaluated the implementation of the Bank's strategic policies - Has approved, evaluated Risk Management policies and Risk Management strategies - Evaluation of the responsibility of the Board of Directors and provide direction for improvement of the implementation of Risk Management - Approve and supervise the Bank's Business Plan and corporate plan - Not involved in making decisions on the Bank's operational activities - Ensuring that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Bank's Internal Audit Work Unit (SKAI). - Notify the OJK if there is a violation of regulations - Independence in carrying out duties and responsibilities - Formation of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee - The process of appointment of Committee Members - Ensuring that the Committee carries out its duties and responsibilities - Provision of sufficient time by members in carrying out their duties and responsibilities - Implementation of Board of Commissioners Meetings - Meeting decision-making mechanism - Do not use the Bank for personal, family and/or other party interests - Do not take and/or receive personal benefits from the Bank - Owner intervention in carrying out the duties of the Board of Commissioners
<i>Governance Outcome</i>	- Dokumentasi hasil rapat Dewan Komisaris - Penyampaian hasil rapat kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak terkait - Implementasi hasil rapat Dewan Komisaris - Pengungkapan informasi mandatory pada Laporan GCG Bank - Efektivitas pengawasan aktif Dewan Komisaris - Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Dewan Komisaris - Adanya gangguan/kerugian akibat intervensi pemilik terhadap Dewan Komisaris - Penerapan manajemen risiko	- Documentation of the results of the Board of Commissioners' meeting - Submission of meeting results to all members of the Board of Commissioners and related parties - Implementation of the results of the Board of Commissioners meeting - Disclosure of mandatory information on the Bank's GCG Report - The effectiveness of the Board of Commissioners' active supervision - Increasing the knowledge, skills and abilities of members of the Board of Commissioners - There are disturbances/losses due to the owner's intervention on the Board of Commissioners - Application of risk management



Pihak yang Melakukan Penilaian

Metode penilaian ialah *self-assessment* yang dilakukan oleh Dewan Komisaris sendiri dan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Hasil Penilaian

Hasil penilaian *self-assessment* yang telah dilaksanakan pada semester I dan II tahun 2023 dari aspek *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* pada Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat telah sesuai dengan ketentuan dimana Dewan Komisaris yang telah efektif menjabat berjumlah 3 (tiga) orang dan 2 (dua) di antaranya merupakan Komisaris Independen.
2. Anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Tidak terdapat hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
4. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai fungsinya.
5. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk Komite tingkat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan.
6. Komposisi anggota Komite tingkat Dewan Komisaris juga telah disesuaikan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
7. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
8. Bank telah berhasil meraih sertifikat ISO 37001:2016 atas komitmen Bank dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
9. Bank Muamalat juga meraih penghargaan di ajang *GRC & Performance Excellence Award 2023* pada bulan September 2023. Bank Muamalat berhasil memenangkan sejumlah kategori penghargaan di antaranya adalah *The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2023 (banking industries)*.

Assessor

The assessment method is by means of self-assessment carried out by the Board of Commissioners and assisted by the Nomination and Remuneration Committee.

Assessment Results

Results from the self-assessment carried out in semester I and II in 2023 from such various aspects as Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome on the Board of Commissioners are described below:

1. The number and composition of members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board of Bank Muamalat is in accordance with the provisions where the Board of Commissioners who have effectively served are 3 (three) people and 2 (two) of them are Independent Commissioners.
2. Members of the Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia have competencies that are adequate and relevant with their positions to carry out their assigned duties and responsibilities as well as capable of implementing such competencies in performing their duties and responsibilities.
3. There was no family relationship up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.
4. The Board of Commissioners retains the guidelines for the implementation of duties and responsibilities in accordance with its function.
5. In supporting the implementation of supervisory duties, the Board of Commissioners established Committees at the Board of Commissioners level in accordance with the provisions.
6. The composition of members of the Committees at the Board of Commissioners level was also adjusted in accordance with Financial Services Authority Regulation No 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks.
7. The appointment and/or replacement of members of the Board of Commissioners were in compliance with the provisions and took into account the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
8. The Bank managed to obtain the certification of ISO 37001:2016 for the Bank's commitment to implement the Anti-Bribery Management System (SMAP).
9. Bank Muamalat also received awards at the 2023 GRC & Performance Excellence Award in September 2023. Bank Muamalat succeeded in winning several award categories including the The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2023 (banking industries).



Rekomendasi Hasil Penilaian

Komisaris Utama Independen yang belum efektif menjabat perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perseroan juga perlu melakukan pengkinian atas Anggaran Dasar, Board Manual dan Kebijakan Tata Kelola sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum.

PENILAIAN DIREKSI

Prosedur Penilaian

Penilaian kinerja Direksi Bank Muamalat dilakukan melalui metode *self-assessment* secara berkala setiap tahun (paling sedikit satu tahun sekali). Proses penilaian kinerja ini diawali dengan pengisian kertas kerja yang berisi kriteria/indikator pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang disusun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku serta atas kompetensi kinerja Dewan Komisaris selama satu semester/tahun.

Hasil penilaian tersebut kemudian disampaikan kepada pemegang saham dan dievaluasi melalui RUPS Tahunan. Pada penyerahan laporan, RUPS juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengelolaan (pengawasan) yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada akhir tahun, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil evaluasi terhadap kinerja secara keseluruhan dan hasil evaluasi masing-masing Direksi secara individual menjadi pertimbangan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif serta menjadi salah satu dasar pertimbangan Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali Direksi yang bersangkutan. Selain itu, hasil evaluasi kinerja anggota Direksi kemudian menjadi sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Direksi.

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja Direksi terdiri dari aspek finansial dan non finansial. Pada Aspek non finansial, secara umum ditetapkan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas

Recommendations from Assessment Results

Independent President Commissioner who has not yet effectively served needs to be followed up in accordance with applicable regulations. The Company was also required to update the Articles of Association, the Board Manual and Governance Policies in accordance with POJK No 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Assessment Procedures

Performance assessment of the Board of Directors of Bank Muamalat is carried out through the periodic self-assessment method annually (at minimum once a year). This performance assessment process is initiated with filling-out a working paper that contains the criteria/indicators for the implementation of duties and responsibilities set forth by the Nomination and Remuneration Committee in compliance with applicable provisions as well as for the performance competency of the Board of Commissioners during a semester/year.

Results of such assessment are then presented to the shareholders and evaluated through the Annual GMS. Upon submission of the report, the GMS also extends full repayment and release for responsibilities (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors for its management (supervisory) actions carried out during the financial year that ends at the end of the year, as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements and do not constitute a criminal act or violation of the provisions of applicable laws and regulations.

Results of evaluation on the general performance and evaluation of each individual member of the Board of Directors are used as basis of consideration for providing compensation scheme and incentive as well as one of the basis of consideration for the Shareholders to dismiss and/or reappoint the concerned members of the Board of Directors. Moreover, results of performance evaluation of members of the Board of Directors subsequently serve as means of assessing as well as improving the effectiveness of the Board of Directors.

Assessment Criteria

The criteria for performance assessment of the Board of Directors consist of such aspects as financial and non-financial. On the non-financial aspect, the criteria are generally based on the duties and obligations as contained in the Financial Services Authority Regulation No 33/POJK.04/2014 of Year 2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Financial Services Authority Regulation No 17



Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi disampaikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi secara terbuka kepada Direksi sejak pengangkatan pertamanya.

Kriteria self-assessment Direksi Bank Muamalat terbagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek: *Governance Structure* (15 indikator), *Governance Process* (25 indikator) dan *Governance Outcome* (14 indikator).

of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks, Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia No. 16/POJK.03/2022 regarding Sharia Commercial Banks, Bank Indonesia Regulation No 11/33/PBI/2009 regarding Good Corporate Governance Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, as well as applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association as well as the Shareholders mandate. Assessment criteria are conveyed openly by the Nomination and Remuneration Committee to the Board of Directors since the initial appointment.

The self-assessment criteria of the Board of Directors of Bank Muamalat are divided into 3 (three) aspects, namely aspects: Governance Structure (15 indicators), Governance Process (25 indicators), and Governance Outcome (14 indicators).

Aspek Aspect	Indikator	Indicator
<i>Governance Structure</i>	1. Jumlah Anggota Direksi 2. Jumlah Anggota yang berdomisili di Indonesia 3. Pengalaman/<i>track record</i> anggota Direksi 4. Rangkap Jabatan anggota Direksi 5. Kepemilikan saham pada perusahaan lain 6. Tidak adanya hubungan keluarga sesama anggota Direksi dan/atau dengan Dewan Komisaris 7. Ketersediaan pedoman dan tata tertib kerja 8. Penggunaan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional oleh Direksi 9. Integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan 10. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen 11. Pemenuhan kelulusan <i>fit and proper test</i> OJK 12. Kompetensi Direksi yang memadai dan relevan dengan jabatannya 13. Kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan 14. Budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan 15. Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik	1. Number of Directors 2. Number of Members domiciled in Indonesia 3. Experience/<i>track record</i> of members of the Board of Directors 4. Dual Position of members of the Board of Directors 5. Share ownership in other companies 6. No family relationship among members of the Board of Directors and / or with the Board of Commissioners 7. Availability of guidelines and work rules 8. The use of individual advisors and/or professional services by the Board of Directors 9. Integrity, competence and financial reputation 10. President Director or President Director, coming from an independent party 11. Fulfillment of OJK fit and proper test 12. Competence of the Board of Directors is adequate and relevant to their position 13. Willingness and ability to conduct continuous learning in order to improve knowledge 14. Culture of continuous learning in order to improve knowledge 15. Composition of the Board of Directors does not fulfill the provisions due to owner intervention



Aspek Aspect	Indikator	Indicator
Governance Process	- Proses Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi - Pengangkatan Anggota Komite Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris - Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain - Pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah - Pengelolaan Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan UU - Independensi Direksi terhadap pemegang saham - Pelaksanaan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi - Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan OJK - Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada anggota Dewan Komisaris dan DPS - Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat - Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan - Menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi - Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain - Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank - Intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Direksi - Kebijakan Manajemen Risiko dan strategi kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif - Ketersediaan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko - Evaluasi dan/atau pengkinian kebijakan strategi dan kerangka Manajemen Risiko - Pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko - Mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan - Evaluasi dan keputusan atas transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi - Pengembangan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi - Independensi fungsi manajemen risiko - Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian - Komunikasi atas Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham dan seluruh jenjang organisasi	- Appointment and/or replacement process for members of the Board of Directors; - Appointment of Board of Directors Committee Members based on the decision of the Board of Commissioners meeting; - Not giving general power of attorney to other parties; - Implementation of the Bank's management based on prudential principles and sharia principles; - Management of the Bank in accordance with the authority and responsibilities of the Board of Directors as stipulated in the Articles of Association and the Law; - Independence of the Board of Directors towards shareholders; - Implementation of the principles of Good Corporate Governance in every business activity of the Bank at all levels of the organization; - Follow up on audit findings and recommendations from SKAI, external auditors, and OJK supervision results; - Providing accurate, relevant and timely data and information to members of the Board of Commissioners and DPS; - Decision making of the Board of Directors meeting has been conducted based on deliberation to reach consensus; - Every meeting decision taken by the Board of Directors can be implemented; - Determining strategic policies and decisions through the mechanism of the Board of Directors meeting; - Not utilizing the Bank for personal, family, and/or other parties' interests; - Not taking and/or receiving personal benefits from the Bank; - Owner's intervention in the implementation of the duties of the Board of Directors; - Written and comprehensive Risk Management Policy and Risk Management framework strategy; - Availability of procedures and tools to identify, measure, monitor, and control Risks; - Evaluation and/or updating of Risk Management strategy and framework policies; - Implementation of Risk Management policies and Risk exposures; - Transaction approval mechanism, including those that exceed the limit and authority; - Evaluation and decision on transactions that require the approval of the Board of Directors; - Development of Risk Management culture at all levels of the organization; - Independence of risk management function; - Preparation of a measurable Bank Business Plan with due regard to prudential principles; - Communication of the Bank's Business Plan to Shareholders and all levels of the organization.



Aspek Aspect	Indikator	Indicator
<i>Governance Outcome</i>	1. Pertanggungjawaban tugas Direksi kepada pemegang saham/RUPS 2. Pemegang saham menerima pertanggungjawaban Direksi di RUPS 3. Pengungkapan kebijakan-kebijakan strategis bank di bidang kepegawaian 4. Komunikasi kepada seluruh karyawan mengenai arah bisnis/visi misi Bank 5. Dokumentasi rapat Direksi 6. Pengungkapan informasi penting Direksi pada laporan pelaksanaan GCG 7. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi 8. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank 9. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan 10. Pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko 11. Adanya gangguan/kerugian akibat intervensi pemilik terhadap tugas Direksi 12. Penerapan Manajemen Risiko secara efektif 13. Penyusunan Rencana Bisnis Bank 14. Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan	1. Accountability of the Board of Directors' duties to the shareholders/RUPS 2. Shareholders accept the accountability of the Board of Directors in the GMS 3. Disclosure of the Bank's strategic policies related to employment 4. Communication to all employees regarding the Bank's business direction/vision and mission 5. Documentation of Board of Directors meetings 6. Disclosure of important information of the Board of Directors in the GCG implementation report 7. Improvement of knowledge, expertise, and capabilities of members of the Board of Directors 8. Improvement of knowledge, skills, and abilities of all Bank employees 9. Continuous improvement of learning culture 10. Active monitoring of the implementation of Risk Management policies and strategies 11. Disruption/loss due to owner intervention in the duties of the Board of Directors 12. Effective implementation of Risk Management 13. Preparation of the Bank's Business Plan 14. The Bank's Business Plan has described the Bank's sustainable growth.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Metode penilaian ialah *self-assessment* yang dilakukan oleh Direksi sendiri dan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Hasil Penilaian

Hasil penilaian *self-assessment* yang telah dilaksanakan pada semester I dan II tahun 2023 dari aspek *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* pada Direksi adalah sebagai berikut:

1. Seluruh anggota Direksi Bank Muamalat telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Jumlah dan komposisi anggota Direksi Bank Muamalat telah sesuai dengan ketentuan.
3. Tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki rangkap jabatan.
4. Tidak terdapat hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Direksi.
5. Anggota Direksi Bank Muamalat memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
6. Direksi telah memiliki pedoman (*board manual*) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai fungsinya.
7. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi Bank Muamalat telah sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Assessor

The assessment method is through self-assessment carried out by the Board of Directors and assisted by the Nomination and Remuneration Committee.

Assessment Results

Results of the self-assessment conducted in semester I and II of 2023 of such various aspects as Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome on the Board of Directors are explained below:

1. All members of the Board of Directors of Bank Muamalat have passed the Fit and Proper Assessment (PKK) by the Financial Services Authority.
2. The number and composition of members of the Board of Directors of Bank Muamalat were in compliance with applicable provisions.
3. There were no members of the Board of Directors with concurrent positions.
4. There were no family relationship up to the second degree with fellow members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
5. Members of the Board of Directors of Bank Muamalat have the competencies that were adequate and relevant with their positions to carry out their duties and responsibilities and capable to implement their competencies in performing their duties and responsibilities.
6. The Board of Directors has retained the board manual for carrying out their duties and responsibilities in accordance with its function.
7. The appointment and/or replacement of members of the Board of Directors of Bank Muamalat were in compliance with applicable provisions and took into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.



8. Direksi Bank Muamalat telah menjalankan tugas dan fungsinya tanpa intervensi dari pemegang saham dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
 9. Dalam rangka mendukung tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah membentuk komite tingkat Direksi yaitu Risk Management Committee, IT Steering Committee, ALCO, Human Capital Committee, Komite Bisnis, Komite Kebijakan Pembiayaan, dan Komite Pembiayaan.
 10. Direksi telah menyelenggarakan rapat secara rutin paling kurang setiap minggu sekali yang membahas keputusan yang bersifat strategis.
 11. Direksi telah menetapkan dan mengkinikan prosedur dan tools untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko.
 12. Direksi secara berkesinambungan telah melakukan upaya-upaya dalam memperbaiki kinerja Bank dengan memperhatikan aspek kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
 13. Bank telah berhasil meraih sertifikat ISO 37001:2016 atas komitmen Bank dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
 14. Bank Muamalat juga meraih penghargaan di ajang GRC & Performance Excellence Award 2023 pada bulan September 2023. Bank Muamalat berhasil memenangkan sejumlah kategori penghargaan di antaranya adalah *The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2023 (banking industries)* dan Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan sebagai *The Best CEO For GRC Excellence 2023*.
 15. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank Muamalat yang bersifat strategis di bidang kepegawaian dan mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank.
 16. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 17. Direksi telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, melalui antara lain *e-mail blast*, *podcast*, video, pelatihan, kuis dan nilai budaya perusahaan.
 18. Direksi juga telah mengembangkan budaya kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi, melalui antara lain *e-mail blast* dan *podcast*.
8. The Board of Directors of Bank Muamalat were able to carry out their duties and functions without intervention from the shareholders and were fully responsible for the implementation of the Bank's management based on the principles of prudence and sharia.
 9. In supporting the implementation of duties and responsibilities, the Board of Directors established several committees at the Board of Directors' level, namely the Risk Management Committee, IT Steering Committee, ALCO, Human Capital Committee, Business Committee, Financing Policy Committee and Financing Committee.
 10. The Board of Directors held routine meetings at least once a week to discuss strategic decisions.
 11. The Board of Directors established and updated the procedures and tools to identify, measure, monitor and control Risks.
 12. The Board of Directors continuously took efforts to improve the performance of the Bank by paying close attention to the aspects of prudence and good governance.
 13. The Bank managed to obtain ISO 37001:2016 certification for the Bank's commitment to implement the Anti-Bribery Management System (SMAP).
 14. Bank Muamalat also received awards at the GRC & Performance Excellence Award 2023 in September 2023. Bank Muamalat won a number of award categories, including the Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2023 (banking industries) and the President Director of Bank Muamalat, Indra Falatehan, as the Best CEO for GRC Excellence 2023.
 15. The Board of Directors disclosed Bank Muamalat's policies that are strategic to personnel matters and has communicated to employees on the Bank's business direction in the context of achieving the Bank's mission and vision.
 16. The Board of Directors implemented the principles of Good Corporate Governance in every Bank's business activity at all levels of the organization.
 17. The Board of Directors developed Risk Management culture at all levels of the organization, among others through e-mail blast, podcast, video, training, quiz and company cultural values.
 18. The Board of Directors developed the culture of compliance at all levels of the organization, among others, through e-mail blast and podcast.

Rekomendasi Hasil Penilaian

Sehubungan dengan telah berlakunya POJK No. 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum, Perseroan perlu melakukan pengkinian atas Anggaran Dasar, Board Manual dan Kebijakan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Recommendations from Assessment Results

As POJK No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks was in effect, the Company was required to update its Articles of Association, the Board Manual and Governance Policies in accordance with applicable provisions.



Nominasi dan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi

Nomination and Remuneration of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, and the Board of Directors

PROSEDUR NOMINASI DEWAN KOMISARIS

Kebijakan dan Proses Nominasi

Pengangkatan Dewan Komisaris bank sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Proses Nominasi serta pemilihan Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan Pemegang Saham Pengendali yang disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

PROSEDUR NOMINASI DIREKSI

Kebijakan dan Proses Nominasi

Pengangkatan Direksi bank sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Proses Nominasi serta pemilihan Direksi dilakukan melalui usulan Pemegang Saham Pengendali yang disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris serta Komite Nominasi dan Remunerasi

REMUNERASI

Tata kelola remunerasi Bank Muamalat mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang kemudian diturunkan ke dalam Surat Keputusan No. No. 012/R/DIR-KPTS/I II/2024 tentang Tata Kelola Pemberian Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang ditandatangani bersama oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama pada tanggal 25 Maret 2024.

NOMINATION PROCEDURES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Nomination Policy and Process

The appointment of the Bank's Board of Commissioners is in accordance with applicable laws and regulations and takes into account the principles of Good Corporate Governance. The nomination process as well as selection of the Board of Commissioners are carried out through the recommendation from the Controlling Shareholders as ratified by the General Meeting of Shareholders with considering the recommendation from the Board of Commissioners as well as the Nomination and Remuneration Committee.

NOMINATION PROCEDURES OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nomination Policy and Process

The appointment of the Bank's Board of Directors is in accordance with applicable laws and regulations and takes into account the principles of Good Corporate Governance. The nomination process as well as the selection of the Board of Directors are carried out through the recommendation from the Controlling Shareholder as ratified by the General Meeting of Shareholders and takes into account the recommendations of the Board of Commissioners and the Nomination and Remuneration Committee.

REMUNERATION

The remuneration governance of Bank Muamalat refers to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 59/POJK.03/2017 regarding Governance Implementation in Providing Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units which was subsequently disclosed into the Decree No. No. 012/R/DIR-KPTS/I II/2024 regarding the Governance of Remuneration for Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, jointly signed by the President Commissioner and the President Director on 25 March 2024.



Dalam pemberian remunerasi, Bank juga telah mempertimbangkan ketentuan yang tertuang dalam POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Salah satu klausul dalam regulasi menyebutkan, Bank wajib menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi.

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi yang diimplementasikan oleh Bank bertujuan untuk:

1. Memastikan kesesuaian pemberian remunerasi dengan prinsip syariah.
2. Mengatur proses dan pendekatan guna menentukan remunerasi bagi seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan berdasarkan jenis pekerjaan, prestasi kerja individu, kontribusi kepada Bank, kewajaran dengan *peer group* dalam industri Bank, serta performadan kemampuan Bank.
3. Peningkatan tata kelola yang baik dalam pemberian remunerasi

Dalam menjalankan kebijakan remunerasi, Bank Muamalat senantiasa memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, seperti upah minimum provinsi atau upah minimum kota/kabupaten. Bank Muamalat juga mengkaji ulang kebijakan remunerasi secara berkala dengan memperhatikan hasil analisis *market* dengan *peer group* industri Bank, kontribusi individual kepada Bank, performa serta kemampuan Bank sehingga kelangsungan usaha bank dapat terjaga.

Cakupan Kebijakan dan Implementasinya

Kebijakan pemberian remunerasi pada Bank Muamalat mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas keuangan, kecukupan dan penguatan permodalan, kebutuhan likuiditas dan potensi pendapatan Bank serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Bank Muamalat mengimplementasikan kebijakan remunerasi yang mencakup seluruh jajaran organisasi Bank, termasuk Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan remunerasi Bank Muamalat Indonesia mengacu pada prinsip syariah sebagai berikut:

1. Pemberian remunerasi harus mempertimbangkan kewajaran dalam harga pasar di industri sejenis dan sesuai dengan kompetensi dan kinerja karyawan.
2. Pemberian remunerasi pada awal karyawan bergabung harus disepakati dan tercantum dalam sebuah kontrak kerja yang menganut asas konsensus.
3. Pemberian remunerasi harus didasari kesadaran bersama bahwa bekerja merupakan bagian dari mengejar ridha Allah SWT.
4. Pemberian remunerasi harus mempertimbangkan beban kerja yang diberikan kepada karyawan atau *al ghunmu bil ghurmi*.

In providing remuneration, the Bank also takes into account the provisions contained in POJK No 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks. One of the clauses of the regulation states that the Bank is obligated to implement governance in providing remuneration.

Remuneration Policy

The remuneration policy implemented by the Bank aims to:

1. Ensure the suitability of remuneration with sharia principles.
2. Regulate the process and approach to determine remuneration for all Directors, Board of Commissioners, and employees based on the type of work, individual work performance, contribution to the Bank, fairness with peer groups in the Bank's industry, as well as the Bank's performance and capabilities.
3. Improvement of good governance in terms of remuneration.

In implementing the remuneration policy, Bank Muamalat always pays attention to applicable laws and regulations, such as provincial minimum wage or city/regency minimum wage. Bank Muamalat also reviews remuneration policies periodically by considering the results of market analysis with the Bank's industry peer group, individual contributions to the Bank, performance, and the Bank's ability so that the Bank's business continuity can be maintained.

Policy Scope and Its Implementation

The policy for providing remuneration at Bank Muamalat takes into account the creation of effective risk management, financial stability, adequacy and strengthening of capital, liquidity requirements and potential income of the Bank as well as conformity with sharia principles. Bank Muamalat implements a remuneration policy that covers all levels of the Bank's organization, including the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, Directors and employees in accordance with applicable laws and regulations.

Bank Muamalat Indonesia's remuneration policy refers to sharia principles as follows:

1. Provision of remuneration must consider fairness in market prices in similar industries and in accordance with the competence and performance of employees.
2. The provision of remuneration when employees join must be agreed upon and stated in a work contract that adheres to the principle of consensus.
3. Remuneration must be based on a shared awareness that work is part of pursuing the pleasure of Allah SWT.
4. Remuneration must consider the workload given to employees or *al ghunmu bil ghurmi*.



Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Bank Muamalat menerapkan kebijakan dan strategi pemberian remunerasi dengan mempertimbangkan potensi risiko yang akan timbul dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Bank Muamalat telah mengategorikan pihak-pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT) berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan potensi risiko yang timbul atas suatu jabatan yang dimiliki. Dalam hal terjadi risiko akibat keputusan yang diambil, maka Bank Muamalat berhak untuk menunda pembayaran atau tidak membayarkan remunerasi yang bersifat variable yang belum dibayarkan kepada pihak yang telah ditetapkan sebagai MRT.

Pengukuran Kinerja Terkait Remunerasi

Bank Muamalat memiliki *Performance Management System* (PMS) dalam pengukuran kinerja terkait remunerasi. Metode PMS ialah metode pengukuran kinerja individu dan jenis risiko sesuai skala dan kompleksitas usaha Bank. Adapun Penilaian kinerja individu ditentukan melalui target atau Most Important Goals (MIG) yang telah ditentukan pada awal tahun buku serta peninjauan pencapaian pada akhir tahun buku.

Hasil dari penilaian MIG kemudian dijadikan dasar dalam peninjauan remunerasi yang dilakukan secara berkala setiap tahun dengan memperhatikan kinerja individu karyawan, posisi upah terhadap struktur upah (*salary*) serta kinerja dan kemampuan Bank.

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Prinsip kehati-hatian senantiasa diimplementasikan oleh Bank Muamalat dalam memberikan remunerasi, baik remunerasi yang bersifat tetap maupun yang bersifat variabel. Remunerasi bersifat variabel bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan berdasarkan persetujuan Komite Nominasi dan Remunerasi. Sedangkan penetapan remunerasi bagi karyawan yang bersifat variabel didasarkan pada persetujuan Direksi terkait. Selanjutnya, pengawasan karyawan pada unit kerja dilakukan sesuai dengan kinerja individu dengan tetap memperhatikan objektivitas dan independensi.

Penerapan manajemen risiko remunerasi terwujud pada diberlakukannya ketentuan terkait pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada *Material Risk Takers*.

Konsultan Terkait Remunerasi

Konsultan Willis Tower Watson ialah konsultan yang dipilih oleh Bank Muamalat untuk mendapatkan data *market peer group*. Data tersebut diperoleh melalui survei yang diikuti oleh sebagian besar industri perbankan di Indonesia yang

Remuneration Associated with Risk

Bank Muamalat implements policies and strategies for providing remuneration by considering the potential risks that will arise while taking into account the precautionary principle. Bank Muamalat has categorized parties who become Material Risk Takers (MRT) based on certain considerations in accordance with the potential risks that arise from a position held. In the event of a risk arising from a decision taken, Bank Muamalat has the right to postpone payment or not pay variable remuneration that has not been paid to the party that has been designated as MRT.

Performance Measurement Related to Remuneration

Bank Muamalat has a Performance Management System (PMS) in measuring performance related to remuneration. The PMS method is a method of measuring individual performance and types of risk according to the scale and complexity of the Bank's business. The individual performance assessment is determined through the targets or Most Important Goals (MIG) that have been determined at the beginning of the financial year and review of achievements at the end of the financial year.

The results of the MIG assessment are then used as the basis for a remuneration review which is carried out periodically every year by taking into account the performance of individual employees, the position of wages in relation to the wage structure (*salary*) as well as the performance and capabilities of the Bank.

Remuneration Adjustment Linked to Performance and Risk

The precautionary principle is always implemented by Bank Muamalat in providing remuneration, both fixed and variable remuneration. Variable remuneration for members of the Board of Directors, Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board is determined based on the approval of the Nomination and Remuneration Committee. Meanwhile, the determination of remuneration for employees that is variable is based on the approval of the relevant Directors. Furthermore, supervision of employees in work units is carried out according to individual performance while still paying attention to objectivity and independence.

The implementation of remuneration risk management at was realized in the enactment of provisions related to the granting of variable remuneration to Material Risk Takers.

Consultants on Remuneration

The Willis Tower Watson consultant is the consultant selected by Bank Muamalat to obtain market peer group data. The data was obtained through a survey which was attended by most of the banking industry in Indonesia, which is the



menjadi *market peer group*. Data statistik dari konsultan tersebut kemudian digunakan sebagai referensi peninjauan remunerasi bersifat tetap dan pemberian remunerasi bersifat variabel.

market peer group. Statistical data from the consultant is then used as a reference for reviewing fixed remuneration and variable remuneration.

PAKET REMUNERASI DAN FASILITAS YANG DITERIMA OLEH DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Remuneration Packages and Facilities Received by Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board

Keterangan Description	Jumlah yang Diterima dalam Satu Tahun Amount Received in One Year					
	Direksi Board of Directors		Dewan Komisaris Board of Commissioners		DPS SSB	
	Orang Person	Jutaan Million (Rp)	Orang Person	Jutaan Million (Rp)	Orang Person	Jutaan Million (Rp)
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura Salary, bonuses, routine allowances, tantiem, and other facilities in kind	5	20.549,72	4	7.969,17	3	1.031,25
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; dan/atau b. tidak dapat dimiliki. Other facilities in kind (housing, health insurance, etc.) that: a. can be owned; and/or b. cannot be owned.	-	-	-	-	-	-
Total^{*)}	5	20.549,72	4	7.969,17	3	1.031,25

*) Nilai adalah jumlah total remunerasi yang diterima selama 2023.
Value is the total amount of remuneration received during 2023.

PAKET REMUNERASI YANG DIKELOMPOKKAN DALAM TINGKAT PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM 1 (SATU) TAHUN

Remuneration Package Based on the Income Level Received by Directors, Commissioners, and Sharia Supervisory Board in 1 (One) Year

Jenis Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun Type of Remuneration per Person in 1 (one) Year	Jumlah Anggota Direksi Number of Members of the Board of Directors	Jumlah Anggota Dewan Komisaris Number of Board Members Commissioner	Jumlah Anggota DPS Number of DPS Members
> Rp2 miliar > Rp2 billion	5	1	-
Rp1 miliar-Rp2 miliar Rp1 billion-Rp2 billion	-	3	-
Rp500 juta-Rp1 miliar Rp500 million-Rp1 billion	-	-	-
≤ Rp500 juta ≤ Rp500 million	-	-	3

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Dijadikan Material Risk Taker

Dalam menetapkan posisi/jabatan yang termasuk ke dalam kategori MRT, Bank Muamalat mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah. Adapun yang termasuk dalam MRT adalah:

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Pejabat setingkat SEVP
4. Karyawan yang mendapatkan remunerasi yang bersifat variabel dengan jumlah sama dengan atau lebih besar dari Rp650 juta (Net)

Position and Number of Parties Appointed as Material Risk Taker

In determining the position included in the MRT category, Bank Muamalat refers to the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 59/POJK.03/2020 concerning Requirements and Procedures for Separation of Sharia Business Units. Those included in the MRT are:

1. Board of Commissioners
2. Board of Directors
3. SEVP-level officials
4. Employees who receive variable remuneration with an amount equal to or greater than Rp650 million.



Share Option

Pada tahun 2023, Bank Muamalat Indonesia tidak menerbitkan program share option untuk Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Bank Muamalat.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah sesuai *grade* maksimum masing-masing karyawan di Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

Rasio Gaji Tertinggi : Terendah	26,0	Highest Employee Salary Ratio : Lowest
Rasio Gaji Direksi Tertinggi : Terendah	1,7	Highest Salary Ratio of Directors : Lowest
Rasio Gaji Komisaris Tertinggi : Terendah	1,1	Highest Commissioner Salary Ratio : Lowest
Rasio Gaji Direksi Tertinggi : Karyawan Tertinggi	2,3	Highest Salary Ratio of Directors : Highest Employee

Jumlah Remunerasi Variabel yang Ditangguhkan

Sepanjang tahun 2023, Bank Muamalat tidak memberikan remunerasi yang bersifat variabel yang diberikan dan ditangguhkan.

Remunerasi yang Bersifat Tetap	Keterangan (Rp) Description	Fixed Remuneration
Tunai	130.430.091.182	Cash
Saham/Instrumen yang Berbasis Saham yang Diterbitkan Bank	Nihil Nil	Stock/Instrument based on Shares Issued by the Bank
Remunerasi yang Bersifat Variabel	Nihil Nil	Variable Remuneration
Tunai	Nihil Nil	Cash
Saham/Instrumen yang Berbasis Saham yang Diterbitkan Bank	Nihil Nil	Stock/Instrument based on Shares Issued by the Bank

Informasi Kuantitatif

Informasi kuantitatif untuk MRT adalah sebagai berikut:

1. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan, baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;
2. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan
3. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel Type of Remuneration that is Variable	Sisa yang Masih Ditangguhkan Remaining Deferred	Total Pengurangan Selama Periode Laporan Total Reduction During the Reporting Period		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) Due to Explicit Adjustment (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B) Due to Implicit Adjustment (B)	Total (A)+(B)
Tunai (Rp juta) Cash (Rp million)	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah) yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut. Shares/Share-based instruments issued by the Bank (in shares and nominal million rupiah) which are conversion of shares.	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

Share Option

In 2023, Bank Muamalat Indonesia did not issue a share option program for the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, Board of Directors, and employees of Bank Muamalat.

Highest and Lowest Salary Ratio

The highest and lowest salary ratio according to the maximum grade of each employee in Bank Muamalat Indonesia is as follows:

Total Deferred Variable Remuneration

During the year, Bank Muamalat did not provide any granted or deferred variable remuneration.

Quantitative Information

The quantitative information for MRT is as follows:

1. Total remaining deferred remuneration, both exposed to implicit and explicit adjustments;
2. Total reduction in Remuneration due to explicit adjustments during the reporting period; and
3. Total reduction in Remuneration due to implicit adjustments during the reporting period.



Rapat Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi

Meeting of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, and the Board of Directors

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Kebijakan Rapat

Penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat tahun 2023 masih mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan *Board Manual* Bank Muamalat Indonesia serta Pedoman Kerja Dewan Pengawas Syariah. Rapat Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Selain itu Dewan Pengawas Syariah juga menyelenggarakan rapat bersama Direksi dan rapat bersama Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pengambilan keputusan pada rapat Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut dapat dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya. Adapun, rapat Dewan Pengawas Syariah untuk mengeluarkan opini syariah baik untuk produk maupun aktivitas harus dihadiri dan diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.

Rapat Dewan Pengawas Syariah terbagi menjadi Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah dan Rapat Dewan Pengawas Syariah bersama organ Bank Muamalat Indonesia dan/atau bersama *Sharia Compliance*. Rapat Dewan Pengawas Syariah tersebut diadakan di tempat kedudukan Bank Muamalat Indonesia atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dan pemanggilan rapatnya dilakukan oleh Ketua atau oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas Syariah atau *Sharia Compliance* yang bertindak sebagai *liaison officer*. Risalah rapat yang memuat hasil rapat Dewan Pengawas Syariah wajib didokumentasikan dengan baik. Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah rapat tersebut merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.

MEETING OF SHARIA SUPERVISORY BOARD

Meeting Policy

The organization of the Bank Muamalat Syariah Supervisory Board meeting in 2023 still refers to Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and the Bank Muamalat Indonesia Board Manual and the Sharia Supervisory Board Work Guidelines. Sharia Supervisory Board meetings are held at least 1 (one) time in 1 (one) month. In addition, the Sharia Supervisory Board also holds joint meetings with the Board of Directors and joint meetings with the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 4 (four) months.

Decision-making in the Sharia Supervisory Board meetings is based on deliberation to reach a consensus. In case there is dissent in the decision-making process, it can be stated in the minutes of the meeting along with the reasons. Meetings of the Sharia Supervisory Board that are specifically implemented to issue Sharia opinions for both products and activities must be attended to and decided by all members.

Sharia Supervisory Board Meeting then divides the types of Sharia Supervisory Board Meetings, consisting of Internal Sharia Supervisory Board Meetings and Sharia Supervisory Board Meetings with Bank Muamalat Indonesia organs and/or with Sharia Compliance. The meeting of the Sharia Supervisory Board is held at the domicile of Bank Muamalat Indonesia or elsewhere within the Republic of Indonesia territory. Invitation for Sharia Supervisory Board Meeting is carried out by the Chairman or a member of the Sharia Supervisory Board or Sharia Compliance acting as a liaison officer. The results of the Sharia Supervisory Board meetings must be stated in the minutes of the meeting and properly documented. All decisions of the Sharia Supervisory Board, as outlined in the minutes of the meeting, are joint decisions of all members of the Sharia Supervisory Board.



Materi-materi yang dibahas dalam rapat Dewan Pengawas Syariah sesuai *Board Manual* Bank Muamalat Indonesia antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan produk baru dan hasil *review* produk yang telah ada antara lain mengenai tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengajuan aktivitas baru dan review aktivitas Bank yang telah berjalan dari aspek syariah.
3. Permasalahan yang timbul akibat aktivitas Bank yang membutuhkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
4. Hasil temuan syariah dari auditor, baik auditor eksternal maupun auditor internal.

Pelaksanaan Rapat

Sepanjang tahun buku 2023, Dewan Pengawas Syariah telah menggelar rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian sebagai berikut:

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN

Meeting Frequency and Level of Attendance

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
1	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	Ketua Chairman	12	12	100%
2	Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH	Anggota Member	12	11	92%
3	Dr. H. Agung Danarto, M.Ag	Anggota Member	12	11	92%

AGENDA RAPAT INTERNAL DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Internal Meeting Agenda of Sharia Supervisory Board

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
1.	13 Januari 2023 January 13, 2023	1. Permohonan Opini DPS atas Verifikasi Liveness biometric 2. Permohonan Opini DPS atas Time Deposit MM 3. Permohonan Opini DPS atas Commodity Murabahah	• Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si • Dr. H. Agung Danarto, M.Ag • Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH
2	9 Februari 2023 February 9, 2023	1. Penambahan Fitur Term Deposit Harian Commodity Murabaha Cabang Kuala Lumpur 2. Permohonan Persetujuan Pricing Nisbah 99% plus Bonus 3. Laporan Pengawasan DPS Semester II Tahun 2022	• Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si • Dr. H. Agung Danarto, M.Ag • Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH
3	16 Maret 2023 March 16, 2023	1. Salam Trade iB (Global Market) 2. Pembiayaan Kepemilikan Emas (Consumer Financing Business) 3. Kagum Serela Hotelindo - Dalam Pailit- (Corporate Legal)	• Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si • Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH

Materials discussed in the Sharia Supervisory Board meetings according to the Bank Muamalat Indonesia Board Manual include the following:

1. Matters related to the development of new products and the review results of the existing product, including regarding the objectives, characteristics, and contracts used following the sharia principles.
2. Submission of new activities and review of the existing Bank activities from the sharia aspect
3. Issues arising from the Bank's activities require an opinion from Sharia Supervisory Board.
4. Sharia findings from auditors, both external auditors and internal auditors.

Meeting Implementation

During the 2023 financial year, the Sharia Supervisory Board held 12 (twelve) meetings with the following details:



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
4	3 April 2023 April 3, 2023	1. Permohonan Opini DPS atas Pembiayaan kepada Institusi Pemerintah 2. Permohonan Opini DPS atas realisasi pendapatan yang bersumber dari akad Mudharabah dan pembiayaan Saham 3. Laporan Tri Wulan Opini Sharia Compliance	• Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si • Dr. H. Agung Danarto, M.Ag • Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH
5	24 Mei 2023 May 24, 2023	1. Skema kerjasama Referral Nasabah antara BMI & Indofund 2. Fasilitas TF untuk LK non Syariah - Kuala Lumpur case 3. Rekonfirmasi Opini Emas Digital Sakumas 4. Update Dirasah Islamiyah 5. Update Uji Petik semester I	• Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si • Dr. H. Agung Danarto, M.Ag • Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH
6	19 Juni 2023 June 19, 2023	1. Permohonan Opini DPS Atas Pembiayaan kepada Institusi Pemerintah (INA, SMI, Danareksa) 2. Permohonan Opini atas nama Nashrun 3. Permohonan Opini atas nama PT Hastuka Sarana Karya 4. Pembahasan atas Permohonan Opini Emas Digital 5. Laporan Income Smoothing 6. Permohonan Opini DPS Pemberian hadiah berupa barang untuk Giro dan Tabungan dengan akad Wadiah 7. Permohonan Opini DPS atas Kerjasama Pendaftaran Calon Jamaah Haji Dari Institusi Non Syariah	• Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si • Dr. H. Agung Danarto, M.Ag • Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH
7	24 Juli 2023 July 24, 2023	1. Fasilitas TF untuk LK non Syariah - Kuala Lumpur 2. Temuan Audit terkait Musyarakah 3. Laporan Konsultasi Syariah Periode April-Juni	• Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si • Dr. H. Agung Danarto, M.Ag • Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH
8	28 Agustus 2023 August 28, 2023	1. Diskusi Skema Akad Salam dengan underlying PO dan pembiayaan Post-Shipment 2. Konsultasi Syariah a. Penggunaan Surat Tanda Terima Penguasaan Barang (STTPB) Pada Akad Murabahah b. Mitra Executing (Multifinance Syariah/UUS) Tutup c. Perubahan Angsuran Pada Akad MMQ d. Jadwal Angsuran Nasabah Bermasalah e. Pembiayaan Mmq Dengan Obyek Konsesi Jalan Tol f. Penyaluran Dana TBDSP g. Pengertian Net Revenue Sharing	• Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si • Dr. H. Agung Danarto, M.Ag • Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
9	21 September 2023 September 21, 2023	1. Laporan Income Smoothing 2. Update Laporan Hasil Pengawasan DPS 3. Konsultasi Syariah a. Komitmen pembayaran Nasabah pada usaha yang sudah tidak beroperasi b. Kesalahan penulisan isi dokumen pada akad	• Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si • Dr. H. Agung Danarto, M.Ag • Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH
10	16 Oktober 2023 October 16, 2023	1. Complain keluarga nasabah/ahli waris 2. Laporan Internal Audit 3. Laporan Hasil Konsultasi Syariah 3 bulanan 4. Bonus Saldo di Pembukaan Rekening • Update Dirasah akhir Tahun • Update Uji Petik Semester II 2023	• Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si • Dr. H. Agung Danarto, M.Ag • Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH
11	20 November 2023 November 20, 2023	1. Layanan Host to Host Haji antara BMI dan LKK 2. Penggunaan Asuransi non Syariah 3. Ringkasan Hasil Audit Pengelolaan Implementasi Akad Pembiayaan bagi Hasil 4. Konsultasi Syariah 1. Hajj Host-to-Host Services between BMI and LKK 2. Use of Non-Sharia Insurance 3. Summary of Audit Results on Implementation Management of Profit Sharing Financing Agreement 4. Sharia Consultation	• Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si • Dr. H. Agung Danarto, M.Ag • Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH
12	18 Desember 2023 December 18, 2023	1. Layanan Bank Kustodian 2. Income Smoothing 3. Laporan Audit 4. Pembiayaan Pra Pensiun 5. Konsultasi Syariah 1. Bank Custodian Services 2. Income Smoothing 3. Audit Report 4. Pre-Pension Financing 5. Sharia Consultation	• Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si • Dr. H. Agung Danarto, M.Ag • Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Peraturan OJK Nomor 33/POJK.05/2014, Anggaran Dasar Perseroan dan Board Manual Bank Muamalat, di mana rapat Dewan Komisaris diselenggarakan paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu Dewan Komisaris juga menyelenggarakan rapat bersama Direksi dan rapat bersama Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Meeting Policy

The meeting policy of the Board of Commissioners refers to OJK Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation of Commercial Banks, OJK Regulation No. 33/POJK.05/2014, the Company Articles of Association and the Board Manual of Bank Muamalat, whereby the meeting of the Board of Commissioners is held at least 1 (one) time within 2 (two) months. In addition, the Board of Commissioners also hold meetings jointly with the Board of Directors and meetings with Sharia Supervisory Board at least 1 (one) time within 4 (four) months.



Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris yang bertugas untuk mengatur rapat, menyiapkan agenda dan materi hingga pencatatan risalah rapat. Risalah rapat tersebut berfungsi sebagai bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris apabila terjadi *dissenting opinions* dan sebagai dokumentasi untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat.

The Board of Commissioners has The Secretary to the Board of Commissioners in charge of arranging meetings, starting from preparing agendas and materials to recording minutes of meetings as valid evidence for the Board of Commissioners members in the event of dissenting opinions and as documentation for the third parties regarding decisions taken at the meeting.

Pelaksanaan Rapat

Sepanjang tahun buku 2023, Dewan Komisaris telah menggelar rapat sebanyak 15 (lima belas) kali dengan rincian sebagai berikut:

Meeting Implementation

During the 2023 financial year, the Board of Commissioners held 15 (fifteen) meetings with the following details:

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN

Meeting Frequency and Level of Attendance

No	Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Internal Meeting			RUPS GMS	
			Jumlah Rapat Number of meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran (%) Percentage of Attendance	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance
1	Mardiasmo ^{*)}	Komisaris Utama Independen Independent President Commissioner	15	15	100	2	2
2	Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	15	12	80	2	2
3	Amin Said Husni	Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/ Acting President Commissioner	15	14	93	2	2
4	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Commissioner	15	14	93	2	2
5	Suwarta ^{**)}	Komisaris Independen Independent Commissioner	9	9	100	2	-

^{*)} Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.
Effective after obtaining the determination of passing the Fit and Proper Assessment from OJK.

^{**)} Tidak menjabat sejak Mei 2023.
No longer serving effective since May 2023.

AGENDA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Internal Meeting Agenda of the Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
1	13 Januari 2023 January 13, 2023	Perkenalan Introduction	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan - Suwarta^{**)}
2	20 Januari 2023 January 20, 2023	- Pembukaan dari Komisaris Utama - Laporan Komite Tingkat BOC - Laporan Komite Audit - Laporan Komite Pemantau Risiko - Laporan Komite Tata Kelola Perusahaan - Opening remarks from President Commissioners - Reports of Committees of Board of Commissioners Level - Audit Committee Report - Risk Monitoring Committee Report - Corporate Governance Committee Report	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan - Suwarta^{**)}



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
3	27 Januari 2023 January 27, 2023	- Closing Audit Laporan Keuangan 31 Desember 2022 oleh KAP DBSD&A - Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi - Pembahasan Kunjungan Kerja 7 Region dan Kantor Cabang - Closing on Audit of Financial Reports of 31 December 2022 by KAP DBSD&A - Nomination and Remuneration Committee Report - Discussion on Working Visit to 7 Regions and Branch Offices	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan - Suwarda^{**)}
4	1 Februari 2023 February 1, 2023	Persetujuan BOC terkait Pembiayaan kepada Pihak Terkait Board of Commissioners Approval on Financing to Related Parties	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan - Suwarda^{**)}
5	17 Februari 2023 February 17, 2023	Update Internal BOC Update on Internal Board of Commissioners	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan - Suwarda^{**)}
6	3 Maret 2023 March 3, 2023	Update Internal BOC Update on Internal Board of Commissioners	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan - Suwarda^{**)}
7	14 April 2023 April 14, 2023	Update Internal BOC Update on Internal Board of Commissioners	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan - Suwarda^{**)}
8	19 Mei 2023 May 19, 2023	Tindak Lanjut atas Penunjukan KAP Follow-Up on Appointment of Public Accounting Firm	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan - Suwarda^{**)}
9	23 Juni 2023 June 23, 2023	Pembahasan Internal BOC Discussion on Internal Board of Commissioners	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan - Suwarda^{**)}
10	4 Agustus 2023 August 4, 2023	Update Internal BOC Update on Internal Board of Commissioners	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan
11	25 Agustus 2023 August 25, 2023	Pembahasan Surat Rekomendasi Penunjukan KAP untuk Pelaksanaan Kaji Ulang SKAI Discussion on Recommendation Letter of the Appointment of Public Accounting Firm for the Implementation of SKAI Review	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan
12	1 September 2023 September 1, 2023	- Persiapan Kunjungan BOC ke Region Jabar - Rencana Kegiatan BOC Berikutnya - Update lainnya - Preparation of Board of Commissioners Visit to West Java Region - Board of Commissioners Next Activity Plans - Other updates	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan
13	13 Oktober 2023 October 13, 2023	Pembahasan Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Indonesia Discussion on Articles of Association of PT Bank Muamalat Indonesia	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan
14	27 Oktober 2023 October 27, 2023	Update Internal BOC Update on Internal Board of Commissioners	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan
15	3 November 2023 November 3, 2023	- Rapat koordinasi dengan Anggota Komite BOC - Tindak Lanjut Rapat OJK 30 Oktober 2023 - Coordination meeting with Members of Committees of the Board of Commissioners - Follow-Up on OJK Meeting of 30 October 2023	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan

^{*)} Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.
Effective after obtaining the determination of passing the Fit and Proper Assessment from OJK.

^{**)} Tidak menjabat sejak Mei 2023.
No longer serving effective since May 2023.



RAPAT DIREKSI

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat Direksi Bank Muamalat Indonesia mengacu pada Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, Anggaran Dasar Bank dan Board Manual Bank Muamalat Indonesia, yang mengatur bahwa rapat Direksi diselenggarakan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Selain itu Direksi juga menyelenggarakan rapat bersama Dewan Komisaris dan rapat bersama Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pada rapat Direksi, Direksi memiliki kewenangan secara bersama-sama atau kolektif kolegial untuk mengambil berbagai keputusan bisnis, mengevaluasi kinerja Bank dan menetapkan berbagai kebijakan dalam pengurusan Bank. Prinsip-prinsip pada rapat Direksi adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu, atas permintaan tertulis dari:
 - a. Direksi;
 - b. Anggota Direksi;
 - c. Dewan Komisaris;
 - d. Anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - e. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Yang diajukan kepada Perseroan dengan Surat Tercatat dan/atau surat yang disampaikan langsung kepada Perseroan dengan mendapat tanda-terima disertai alasannya dan tembusannya disampaikan kepada setiap anggota Direksi dan setiap anggota Dewan Komisaris dengan Surat Tercatat dan/atau surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima;

2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain panggilan rapat Direksi dapat dilakukan oleh anggota Direksi lainnya.
3. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau pengambilan suara, akan dianggap sah apabila paling sedikit lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam rapat Direksi.
4. Sekretaris Perusahaan membuat risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir untuk disimpan dan tersedia sewaktu-waktu jika diminta oleh Dewan Komisaris.

MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

Meeting Policy

The meeting policy of the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia refers to OJK Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks, OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014, the Bank's Articles of Association and Board Manual of Bank Muamalat Indonesia, that regulate the meetings of the Board of Directors held periodically at least 1 (one) time every month. In addition, the Board of Directors also hold joint meetings with the Board of Commissioners and with the Sharia Supervisory Board at least 1 (one) time within 4 (four) months.

In the Board of Directors meeting, the Board of Directors has the authority to jointly or collectively make various business decisions, evaluate the Bank's performance and determine various policies in the Bank management. The principles of the Board of Directors meeting are as follows:

1. The Board of Directors Meetings may be held at any time upon written request from:
 - a. Board of Directors;
 - b. Members of the Board of Directors;
 - c. Board of Commissioners;
 - d. Board of Commissioners Members; and/or
 - e. One or more shareholders who jointly represent 1/10 (one-tenth) or more of the total number of shares with voting rights.

Submitted to the Company by Registered Letter and/or letter submitted directly to the Company with receipt along with the reasons and a copy submitted to each member of the Board of Directors and each member of the Board of Commissioners with the Registered Letter and/or letter delivered directly to each member of the Board of Directors and each member of the Board of Commissioners by receiving a receipt;

2. Invitation to the Board of Directors meeting is made by the President Director, and if the President Director is unable to attend, which does not need to be proven to other parties, an invitation for the Board of Directors meeting can be made by other members of the Board of Directors.
3. Decisions are made by deliberation to reach consensus and/or voting, deemed valid if at least more than 2/3 (two-thirds) of the total members of the Board of Directors are present and/or represented at the Board of Directors meeting.
4. The Corporate Secretary prepares the minutes of the meeting and is signed by all members of the Board of Directors present for safekeeping and available at any time if requested by the Board of Commissioners.



5. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat harus dicantumkan didalam risalah rapat beserta alasannya.

5. Dissenting opinions that occurred in the meeting must be stated in the minutes of the meeting, along with the reasons.

Pelaksanaan Rapat

Sepanjang tahun buku 2023, Dewan Komisaris telah menggelar rapat sebanyak 56 (lima puluh enam) kali dengan rincian sebagai berikut:

Meeting Implementation

During the 2023 financial year, the Board of Commissioners held 56 (fifty-six) meetings with the following details:

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN

Meeting Frequency and Level of Attendance

No	Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Internal Meeting			RUPS GMS	
			Jumlah Rapat Number of meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran (%) Percentage of Attendance	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance
1	Indra Falatehan	Direktur Utama President Director	56	55	98	2	2
2	Karno	Direktur Kepatuhan, Risiko, dan Hukum Director of Compliance, Risk and Legal	56	54	96	2	2
3	Hery Syafril	Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan Director of Financing Business Risk	56	48	86	2	2
4	Wahyu Avianto	Direktur Operasi dan Digital Director of Operation and Digital	56	51	91	2	2
5	Suhendar	Direktur Keuangan dan Strategi Director of Finance and Strategy	56	55	98	2	2
6	Riksa Prakoso ^{*)}	SEVP of Human Capital	56	49	88	2	-
7	Irvan Yulian Noor ^{*)}	SEVP of Enterprise Banking	56	52	93	2	-
8	Dedy Suryadi Dharmawar ^{*)}	SEVP of Retail Banking	23	21	91	2	-

^{*)} Pejabat Eksekutif Senior.
Senior Executive Officer.

AGENDA RAPAT INTERNAL DIREKSI

Internal Meeting Agenda of the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
1	3 Januari 2023 January 3, 2023	- CAR & Media Update - Update Nasabah Watchlist WB - Model Bisnis Digital Invoice - Rencana Tindakan lanjut atas Hasil Exit Meeting OJK - KPI Region - Update BOM Lainnya	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor
		- CAR & Media Update - Update on WB Customers Watchlist - Digital Invoice Business Model - Follow-Up Plans on OJK Exit Meeting Results - KPI Region - Update on Other BOM	



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
2	5 January 2023 January 5, 2023	1. Consumer Finance End-to-End Process 2. Pembahasan KPI, Distribusi Target & Insentif 202 3. Update BOM Lainnya	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor
3	10 Januari 2023 January 10, 2023	1. CAR & Media Update 2. Update Kerjasama dengan Muhammadiyah 3. Update Audit Bank Indonesia 4. Update CAPEX IT 5. Perubahan Struktur Organisasi 6. Organisasi Segmentasi Bisnis 7. Usulan Penyempurnaan, Pembentukan Komite Eksekutif Level Direksi 8. Financial Highlights per Desember 2022 9. Update Nasabah Watchlist RB 10. Update BOM Lainnya	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor
4	11 Januari 2023 January 11, 2023	1. CAR & Media Update 2. Update on Cooperation with Muhammadiyah 3. Update on Bank Indonesia Audit 4. Update on IT CAPEX 5. Change in Organizational Structure 6. Organization of Business Segmentation 7. Recommendation on Improvement, Establishment of Executive Committees of Board of Directors Level 8. Financial Highlights as per December 2022 9. Update on RB Customers Watchlist 10. Update on Other BOM	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor
5	17 Januari 2023 January 17, 2023	1. Update Nasabah Watchlist Retail Banking 2. Update on Retail Banking Customers Watchlist	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor
6	24 Januari 2023 January 24, 2023	1. CAR & Media Update 2. Persiapan Rapat BOC: Update Progress Listing 3. Restrukturisasi Nasabah 4. Bad Bank Update 5. Program Taktikal Porsi Haji Tunai 2023 6. Koreksi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2023 dan Update Hasil Meeting RBB 2023 dengan OJK 7. Update BOM Lainnya	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor
7	24 Januari 2023 January 24, 2023	1. CAR & Media Update 2. Persiapan Rapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 3. Reward Umrah RCM, SAM & Bancassurance 4. Closing Audit Laporan Keuangan 31 Desember 2022 oleh KAP DBSD&A 5. Approval Sales Reward 2023 6. Restrukturisasi Nasabah WB	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
7	31 Januari 2023 January 31, 2023	1. CAR & Media Update 2. Renewal Asuransi D&O 3. ALIF (PT AI Ijarah Indonesia Finance) Update 4. Usulan Program Pembiayaan untuk Koperasi dan Muhammadiyah 5. Kasus Pembiayaan Mobil Cabang Ternate 6. Update BOM lainnya	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor
8	7 Februari 2023 February 7, 2023	1. CAR & Media Update 2. Recruitment Progress Update 3. ALIF Update 4. Kajian Jaringan Kantor Cabang 5. Financial Highlights as of Januari 2023 6. Program Efisiensi Direktorat Operation tahun 2023 7. Update BOM lainnya	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor
9	14 Februari 2023 February 14, 2023	1. CAR & Media Update 2. Persiapan Rapat BOC-BOM: a. Update Progress Listing b. BOC Limit/Plafond Pembiayaan & BMPD 3. Restrukturisasi Nasabah 4. Penjelasan Nasabah KCU Pekanbaru 5. Rencana dan Strategi Pemanfaatan Dana Relaksasi GWM RIM 6. Laporan Kinerja 2022 & Strategi DPLK tahun 2023 7. Strategi DPLK tahun 2023 8. Pembahasan Pengurus DPLK 9. Update PP No. 5 tahun 2023 & UU No. 4 tahun 2023 10. Follow up Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Surabaya 11. Revisi RBB 2023	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
10	21 Februari 2023 February 21, 2023	- CAR & Media Update - Bancassurance Program & Ekosistem Haji Umroh - Update Nasabah LQF di Enterprise Banking - Restrukturisasi Nasabah - Update Assesment Konsultan ITY - Update Kegiatan Ramadhan 1444H - Update BOM lainnya	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor
11	28 Februari 2023 February 28, 2023	- CAR & Media Update - Permohonan Persetujuan Pengelolaan Muamalat Tower - MIG Bankwide & BOD - Perkembangan Pelaksanaan Profit Based Project - Perubahan Komite Anti Fraud - Kajian Pemberian Kewenangan Memutus Pembiayaan kepada BM dan RH - Employee Engagement Survey (dibahas di Rapat Komite SDM – 28 Februari 2023) - Update BOM lainnya	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor
12	7 Maret 2023 March 7, 2023	- CAR & Media Update - Update RUPS & Listing - Jam Kerja Ramadhan 2023 - Pemilihan Vendor Business Custody - Program Special Take Over 2023 - Rencana Legal Action - Update Baitulmaal Muamalat - Update BOM lainnya	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor
13	13 Maret 2023 March 13, 2023	- CAR & Media Update - Restrukturisasi Nasabah - Update Program Ramadhan 1444H – Jadwal Acara Kultum & Safari Ramadhan - Bank Penyalur Gaji - Financial Highlights as of February 2023 - Pembiayaan/Gadai Emas - Persiapan Live/Launching CPC Selindo	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
14	24 Maret 2023 March 24, 2023	1. CAR & Media Update 2. Update Rencana Tindak Lanjut atas Dokumen 7 Nasabah yang Hilang 3. Action Plan Nasabah Lama yang Bermasalah sesuai Surat OJK 4. Pengelolaan Nasabah SAM 5. Pemberian Kuasa dari Direksi berdasarkan Anggaran Dasar 6. Legal Update 7. Persetujuan Pemeliharaan Kolektibilitas Nasabah Enterprise Banking 8. Update Nasabah LQF 9. Update ALIF 10. Update BOM lainnya	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor
15	28 Maret 2023 March 28, 2023	1. CAR & Media Update 2. Pembahasan Management Letter Audit Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2022 3. Update Profit Based Project 4. Update & Persetujuan Dana Kebajikan 5. Optimalisasi Pengelolaan Muamalat Tower 6. Update BOM lainnya 1. CAR & Media Update 2. Discussion on Audit Management Letter of Financial Report as of 31 December 2022 position 3. Update on Profit-Based Project 4. Update & Approval of Benevolent Fund 5. Optimization of Muamalat Tower Management 6. Update on Other BOM	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor
16	4 April 2023 April 4, 2023	1. CAR & Media Update 2. Update Annual Report 2022 3. Update Listing & Persetujuan Penunjukan Advisor, Arranger, KJPP, dan Konsultan Hukum 4. Update Project Muscat (agenda tambahan) 5. Hasil Kajian Penyesuaian MIG Bankwide 6. Proses Onboarding Allianz Life Syariah 7. Persiapan Operasional Menjelang Idul Fitri 1444H 8. Update BOM Lainnya 1. CAR & Media Update 2. Update on 2022 Annual Report 3. Update on Listing & Approval for Appointment of Advisor, Arranger, KJPP, and Legal Consultant 4. Update on Muscat Project (additional agenda) 5. Review Results on MIG Bankwide Adjustments 6. Onboarding Process of Sharia Allianz Life 7. Preparation for Operation of Ied Al Fitr 1444H Activities 8. Update on Other BOM	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
17	11 April 2023 April 11, 2023	- CAR & Media Update - Financial Highlights per Maret 2023 - Persiapan Rapat OJK: Realisasi Bisnis Triwulan I 2023 - Update Likuiditas (agenda tambahan) - Kajian Listing dari Pihak Internal - Persiapan Rapat BOC-BOM: - Amandemen Anggaran Dasar - Update IT - Restrukturisasi Nasabah - CAR & Media Update - Financial Highlights as of March 2023 - Preparation for OJK Meeting: Business Realization of Quarter I 2023 - Update on Liquidity (additional agenda) - Review on Listing from Internal Parties - Preparation for Board of Commissioners-BOM Meeting: - Amendment of Articles of Association - Update on IT - Customers Restructuring	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor
18	18 April 2023 April 18, 2023	- CAR & Media Update - Pemeliharaan Kolektabilitas Nasabah EB - Pembiayaan Emas - Akta Van Depot - Persetujuan Logo Milad BMI ke-31 - Pembukaan Rekening di Luar Kantor - BOM Update Lainnya - CAR & Media Update - Collectability Maintenance of EB Customers - Gold Financing - Van Depot Deed - Approval on Logo for BMI 31st Anniversary - Opening Accounts from Outside of Office - Update on Other BOM	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor
19	2 Mei 2023 May 2, 2023	- CAR & Media Update - Persiapan Rapat BOC-BOM: Pembahasan Agenda RUPST - Mekanisme Otorisasi Transaksi Kartu Debit di Luar Negeri - Laporan Hasil Investigasi di KCU Ambon - PKU Muhammadiyah Yogyakarta - Laporan Perkembangan Pelaksanaan Profit Based Project - CAR & Media Update - Preparation for Board of Commissioners-BOM Meeting: Discussion on Annual GMS Agenda - Authorization Mechanism for Debit Card Overseas Transactions - Report on Investigation Results at KCU Ambon - PKU Muhammadiyah Yogyakarta - Report on Development of Profit-Based Project Implementation	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor
20	9 Mei 2023 May 9, 2023	- CAR & Media Update - Restrukturisasi Nasabah - Strategi Akuisisi Porsi Nasabah Haji - Financial Highlights per April 2023 / - CAR & Media Update - Customers Restructuring - Acquisition Strategy of Hajj Customer Portion - Financial Highlights as of April 2023	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
21	16 Mei 2023 May 16, 2023	- CAR & Media Update - Update LQF Nasabah Ritel dan Restrukturisasi Nasabah RCM - RO Project – Produk ASHA - FGD Strategi CASA - Milad BMI ke-31 - Pengadaan Perangkat Area Kerja BPKH - Persiapan Rapat BOC-BOM: - Update ALIF - Tindak Lanjut Surat OJK SR-9 - Financial Highlights per April 2023 - Listing Progress – CROWE - Update IT (Ransomware) - CAR & Media Update - Update on LQF of Retail Customers and Restructuring of RCM Customers - RO Project – ASHA Product - FGD CASA Strategy - BMI 31st Anniversary - Procurement of Devices for BPKH Work Area - Preparation for Board of Commissioners-BOM Meeting: - Update on ALIF - Follow-Up on SR-9 OJK Letter - Financial Highlights as of April 2023 - Listing Progress – CROWE - Update IT (Ransomware)	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor
22	23 Mei 2023 May 23, 2023	- CAR & Media Update - Restrukturisasi Nasabah SAM - Pelaporan Kolektabilitas EB - Contribution Margin - Persetujuan SK Team Project Optimalisasi Aset Muamalat Tower	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor
23	30 Mei 2023 May 30, 2023	- Kick-off Listing - CROWE - CAR & Media Update - Persetujuan Kerjasama BMI dan Baznas - Board Level MIG 2023 - D & O Konsultan Hukum	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor
24	6 Juni 2023 June 6, 2023	- CAR & Media Update - Update Progress ACT Case - Update Program Qurban BMM - TPB dan Giro Berhadiah - Wadzipay - Progress Cicil Emas & Pembiayaan Multiguna - Progress Pembiayaan Pensiun dengan PT Taspen (Persero) - Financial Highlight per Mei 2023	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor
25	13 Juni 2023 June 13, 2023	- CAR, Media & Listing Update - Rekomendasi Komite Disiplin - Penanganan Nasabah SAM - Usulan Draft SE Direksi tentang Pengelolaan dan Kewenangan Limit Biaya - Update Project Profit Based	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
26	20 Juni 2023 June 20, 2023	- CAR & Media Update - Update Proyeksi Kinerja Juni 2023 - Pelaporan Kolektibilitas dan Update LQF Nasabah EB - Usulan Penanganan Recovery Reklass AYDA a.n. Kagum Group - Listing Update - Persetujuan Revisi RBB tahun 2023 - Update ALIF - Recommendation on Additional Floor Leasing for BPKH1. CAR & Media Update	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor
27	23 Juni 2023 June 23, 2023	Restrukturisasi Nasabah EB (Ad Hoc) Restructuring of EB Customers (Ad Hoc)	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor
28	27 Juni 2023 June 27, 2023	- CAR, Media & Listing Update - Draft Laporan Kajian Optimalisasi Muamalat Tower - Persetujuan Biaya: - Pengadaan Infrastruktur Core DC Network - Pengadaan System Bank Custodian - Rencana Pencairan Enterprise Banking - Penanganan Nasabah RCM - Digital Roadmap & IT Strategic Plan 2022-2027	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor
29	4 Juli 2023 July 4, 2023	- CAR, Media & Listing Update - Persetujuan Biaya Pengadaan Sistem Bank Custodian (ditunda) - Update Kantor Cabang Kuala Lumpur: Hasil audit BNM & Rencana Bisnis 2023 - Financial Highlights per Juni 2023 - Rencana Pencairan Enterprise Banking - Update Launching Cici Emas	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor
30	11 Juli 2023 July 11, 2023	- CAR, Media & Listing Update - Restrukturisasi Nasabah SAM - Persetujuan Biaya Pengadaan Sistem Bank Custodian - Penyampaian Laporan dari Konsultan Property - Update Progress Mitraguna ASN & Pembiayaan Pensiun - Kick Off Penyusunan Rencana Korporasi dengan Karim Consulting	Indra Falatehan Karno Wahyu Avianto Suhendar Hery Syafril Riksa Prakoso Irvan Yulian Noor



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
31	18 Juli 2023 July 18, 2023	1. CAR, Media & Listing Update 2. Pengelolaan Nasabah SAM dan RCM 3. Penyampaian Budget Penyelesaian Dokumen Bermasalah 4. Update Proyeksi Kinerja Juli 2023 5. Update ALIF 6. Rekomendasi Komite Disiplin	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor
32	25 Juli 2023 July 25, 2023	1. CAR, Media & Listing Update 2. Pelaporan Kolektabilitas EB 3. Rencana Pencairan Enterprise Banking 4. Restrukturisasi Nasabah EB dan SAM 5. Penyampaian SOP Penanganan Krisis 6. Rencana Kerja RCM dan SAM 7. Update ALIF 8. Update Proyeksi Kinerja Juli 2023 9. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Transformation Project	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor
33	1 Agustus 2023 August 1, 2023	1. CAR & Media Update 2. Listing Update 3. Project Akhir CIF Cleansing (PACE) 4. Penanganan Nasabah Sunlife 5. Update ALIF 6. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Transformation Project (ditunda)	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor
34	8 Agustus 2023 August 8, 2023	1. CAR, Media & Listing Update 2. Financial Highlights per-Juli 2023 3. Update ALIF 4. Update Milestone dan Proses BPG 5. Penanganan Nasabah RCM 6. Persetujuan Program KPR Hijrah Baitullah 7. Penyampaian Hasil Konsultan IT atas Pengadaan Infrastruktur DC dan DRC Network oleh Vendor 8. Kegiatan Employee Engagement dalam Rangka Kemerdekaan	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Dedy Suryadi Dharmawan



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
35	15 Agustus 2023 August 15, 2023	- CAR & Media Update - Persetujuan Proposal Harpelnas - Update Progress Program Cicilan Emas - IT Security Penyampaian hasil ITSC - Update Mitigasi Kegagalan Transaksi PASBI & Approval Pricing PYD SMF - Update Proyeksi Kinerja Agustus – Desember 2023	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor - Dedy Suryadi Dharmawan
36	22 Agustus 2023 August 22, 2023	- CAR & Media Update - Penanganan Nasabah SAM - Pelaporan Kolektabilitas EB - Listing Update - Update ALIF - Update Proyeksi Kinerja Agustus-Desember 2023	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor - Dedy Suryadi Dharmawan
37	29 Agustus 2023 August 29, 2023	- CAR, Listing & Media Update - Update Proyeksi Kinerja Agustus - Desember 2023 - Update Project Profit Based	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor - Dedy Suryadi Dharmawan
38	5 September 2023 September 5, 2023	- CAR dan Media Update - Persetujuan Hasil Valuasi Bank Muamalat - Ekstensifikasi Potensi Recovery RCM - Rencana Pencairan Enterprise Banking - Financial Highlights per Agustus 2023	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor - Dedy Suryadi Dharmawan
39	12 September 2023 September 12, 2023	- CAR & Media Update - Implementasi Frontliner Hybrid - Update Project Neraca Branch Closure - Update Proyeksi Kinerja September – Desember 2023 - Mekanisme Beasiswa BMM untuk Staff - Kajian Proposal Muamalat Marathon	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor - Dedy Suryadi Dharmawan



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
40	19 September 2023 September 19, 2023	1. CAR & Media Update 2. Penanganan Nasabah SAM 3. Update LQF Nasabah Retail 4. Persetujuan Budget CR FLM ATM 5. Update PACE Project 6. Branch Classification 7. Funding Transactions Strategy 8. Persetujuan Penambahan Budget Biaya Verifikasi Liveness Biometric Proses Pembukaan Rekening via Muamalat DIN 9. Update Listing 10. Persiapan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Fraud/ISO 37001	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Dedy Suryadi Dharmawan
41	25 September 2023 September 25, 2023	Persetujuan Proyeksi Laporan Keuangan BMI Tahun 2023-2028 Approval for 2023-2028 BMI Financial Report Projection	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Dedy Suryadi Dharmawan
42	26 September 2023 September 26, 2023	1. Penanganan Nasabah Enterprise Banking (EB) 2. Update ALIF 3. Update Program Cicil Emas 4. Update Consumer	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Dedy Suryadi Dharmawan
43	3 Oktober 2023 October 3, 2023	1. CAR Listing & Media Update 2. Pemenuhan RPIM 2023 3. Relokasi Cabang Solo 4. Financial Highlights per September 2023 5. Permohonan Persetujuan Pemisahan Usaha Tidak Murni (Spin-Off) PT PPA 6. Update Transformation Project Phase-2	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Dedy Suryadi Dharmawan
44	10 Oktober 2023 October 10, 2023	1. CAR & Media Update 2. Rencana Penggabungan Impact Analysis dan Alur Kerja New OPC 3. Pengelolaan Nasabah EB 4. Kick Off RBB	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Dedy Suryadi Dharmawan



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
45	17 Oktober 2023 October 17, 2023	- CAR & Media Update - Listing Update - Progress Penyusunan Rencana Korporasi - Profil Risiko September 2023 - Updating Notary Management - Update Pajak Tahun 2015, 2016, & 2018 - Event Singkarak Hajj Run – BPKH - Progress Pencatatan Collateral & Pemenuhan Kebutuhan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Update Proyeksi Kinerja Oktober-Desember 2023 - Penanganan Nasabah SAM - Update Transformation Project Phase-2	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor - Dedy Suryadi Dharmawan
46	24 Oktober 2023 October 24, 2023	- CAR & Media Update - Listing Update - SE Direksi Multiguna Non-ASN - Update Recovery	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor - Dedy Suryadi Dharmawan
47	31 Oktober 2023 October 31, 2023	- CAR & Media Update - Update Listing & RUPSLB - Tanggapan Surat OJK - Rencana Korporasi & Visi Misi - Agenda Update Proyeksi Kinerja Oktober - Desember 2023 - Update Pelaporan Oleh Nasabah - Rencana Bisnis Bank Tahun 2024	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor - Dedy Suryadi Dharmawan
48	7 November 2023 November 7, 2023	- CAR & Media Update - Listing Update - Penanganan Nasabah SAM - Pending Dokumen Agunan dan Penyelesaian Dokumen Bermasalah - Task Force P&L - Financial Highlights per Oktober 2023 - Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 - Rencana Bisnis DPLK Syariah Muamalat Tahun 2024	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor - Dedy Suryadi Dharmawan



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
49	14 November 2023 November 14, 2023	1. CAR & Media Update 2. Persiapan Prudential Meeting dengan OJK 3. Penanganan Nasabah RCM 4. Kick off Meeting Audit Laporan Keuangan 31 Desember 2023 1. CAR & Media Update 2. Preparation for Prudential Meeting with OJK 3. Handling of RCM Customers 4. Kick-Off Meeting for the Audit of Financial Report 31 December 2023	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Dedy Suryadi Dharmawan
50	21 November 2023 November 21, 2023	1. Penanganan Nasabah RCM dan Update LQF Nasabah Retail 2. Listing Update 1. Handling of RCM Customers and Update LQF of Retail Customers 2. Listing Update	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Dedy Suryadi Dharmawan
51	28 November 2023 November 28, 2023	1. CAR & Media Update 2. Listing Update 3. Update Implementasi AML, CFT, & CFP tahun 2023 4. Pembahasan Bye Laws 5. Update dan Rekomendasi Proses Hukum 6. Proyeksi Kinerja November – Desember 2023 7. Update Skema Promosi/Sponsorship ke Instansi Pemerintah/ BUMN/BUMD 8. Update Project Neraca Branch Closure 9. Update Revamp Cilik Emas 1. CAR & Media Update 2. Listing Update 3. Update on Implementation of AML, CFT, & CFP of 2023 4. Discussion on By-Laws 5. Update and Recommendations on Legal Process 6. Performance Projection for November-December 2023 7. Update on Promotion/Sponsorship Scheme to Government Institutions/ BUMN/ BUMD 8. Update on Neraca Branch Closure Project 9. Update on Gold Instilment Revamp	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Dedy Suryadi Dharmawan
52	5 Desember 2023 December 5, 2023	1. CAR & Media Update 2. Update Project Neraca Branch Closure 3. Update Kasus Pajak 2015, 2016 dan 2018 4. Financial Highlights November 2023 5. Penyusunan TAP (Turn Around Plan) 2.0 (Tindak Lanjut Rapat OJK) 1. CAR & Media Update 2. Update on Neraca Branch Closure Project 3. Update on 2015, 2016 and 2018 Tac Cases 4. Financial Highlights of November 2023 5. Preparation on TAP 2.0 (OJK Follow Up Meeting)	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Dedy Suryadi Dharmawan
53	8 Desember 2023 December 8, 2023	- Penyusunan Finalisasi TAP 2.0 (Tindak Lanjut Rapat OJK) - Preparation for Finalization of TAP 2.0 (OJK Follow-Up Meeting)	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Dedy Suryadi Dharmawan



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
54	12 Desember 2023 December 12, 2023	- CAR & Media Update - Finalisasi TAP 2.0 - Penanganan Nasabah SAM - Penanganan Nasabah RCM - Penyusunan TAP 2.0 (Tindak Lanjut Rapat OJK)	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor - Dedy Suryadi Dharmawan
55	19 Desember 2023 December 19, 2023	- CAR & Media Update - Sosialisasi Surat OJK S-31/D.03/2023 tanggal 13 Desember 2023 sebagai Penegasan atas POJK 17/2023 tentang Tata Kelola Bank Umum - Progres dan Realisasi Efisiensi Beban Operasional - Persiapan Kegiatan Operasional Akhir Tahun 2023 - Persetujuan Perpanjangan Alih Daya Periode Tahun 2024 - Optimalisasi Gedung Muamalat Tower - Persetujuan Budget Renovasi Lt. 19 untuk Ballroom & Ruang Rapat BPKH - Persiapan dan Persetujuan Batik dan Souvenir Haji - Persetujuan Produk Bancassurance - Update Proyeksi Laporan Akhir Tahun 2023 - BOM Update	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor - Dedy Suryadi Dharmawan
56	27 Desember 2023 December 27, 2023	- CAR & Media Update - BOM Update - Persetujuan Penunjukkan Vendor Jasa Pengelolaan ATM, CIT, & CPC Periode Tahun 2024 - Persiapan Rapat Kerja Nasional	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor - Dedy Suryadi Dharmawan



RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Muamalat merujuk pada Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mengatur bahwa rapat diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat gabungan tersebut mencerminkan penyelenggaraan koordinasi dan sinergi fungsi manajemen antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Pelaksanaan Rapat

Sepanjang tahun buku 2023, Dewan Komisaris dan Direksi menggelar rapat gabungan sebanyak 17 (tujuh belas) kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN

Meeting Frequency and Level of Attendance

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran (%) Percentage of Attendance (%)
Dewan Komisaris The Board of Commissioners					
1	Mardiasmo ^{*)}	Komisaris Utama Independen Independent President Commissioner	17	16	94
2	Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	17	17	100
3	Amin Said Husni	Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/Acting President Commissioner	17	16	94
4	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Commissioner	17	17	100
5	Suwarda ^{**)}	Komisaris Independen Independent Commissioner	3	3	100
Direksi The Board of Directors					
6	Indra Falatehan	Direktur Utama President Director	17	16	94
7	Karno	Direktur Kepatuhan, Risiko, dan Hukum Director of Compliance, Risk, and Legal	17	17	100
8	Hery Syafril	Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan Director of Business Risk Financing	17	15	88
9	Wahyu Avianto	Direktur Operasi dan Digital Director of Operation and Digital	17	16	94
10	Suhendar	Direktur Keuangan dan Strategi Director of Finance and Strategy	17	17	100
11	Riska Prakoso ^{***)}	SEVP Human Capital	17	15	88
12	Irvan Yulian Noor ^{***)}	SEVP Enterprise Banking	17	17	100
13	Dedy Suryadi Dharmawan ^{***)}	SEVP Retail Banking	10	8	80

^{*)} Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.
Effective after obtaining the determination of passing the Fit and Proper Assessment from OJK.

^{**)} Tidak menjabat sejak Mei 2023.
No longer serving effective since May 2023.

^{***)} Pejabat Eksekutif Senior.
Senior Executive Officer.

JOINT MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Meeting Policy

The joint meeting policy of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Bank Muamalat refers to OJK Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation of Commercial Banks which regulates that meetings are held at least 1 (one) time in 4 (four) months. The joint meetings reflect the implementation of coordination and synergy of the management function between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Meeting Implementation

During the 2023 financial year, the Board of Commissioners and Board of Directors held 17 (seventeen) joint meetings with the following details:



AGENDA RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Joint Meeting Agenda of the Board of Commissioners and the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Dewan Komisaris Participant of the Board of Commissioners	Peserta Direksi Participant of the Board of Directors
1	17 Februari 2023 February 17, 2023	- Financial Highlights per Januari 2023 Financial Highlights as of January 2023 - BOC Limit/Plafond Pembiayaan dan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Board of Commissioners Financing and BMPD Limit/Ceiling - Penyesuaian RBB tahun 2023 2023 RBB Adjustment - Update Progress Listing Update on Listing Progress - Update ALIF Update on ALIF - Update Lainnya Other Updates	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan - Suwarda^{**)}	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso
2	17 Maret 2023 March 17, 2023	- Update RUPS dan Listing Update on GMS and Listing - Update Lainnya Other Updates - Financial Highlights per Februari 2023 Financial Highlights as of February 2023	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan - Suwarda^{**)}	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor
3	14 April 2023 April 14, 2023	- Amandemen Anggaran Dasar Amendment on the Articles of Association - Update AR 2022 dan Persetujuan Penunjukan Profesi Penunjang terkait Listing Update on AR 2022 and Approval on the Appointment of Supporting Profession related to Listing - Update Project Muscat Update on Muscat Project - Update IT Update on IT - Rencana Optimalisasi Pengelolaan Muamalat Tower Plans on Optimization of Muamalat Tower Management - Persiapan Operasional Menjelang Idul Fitri 1444 H Operational Preparation for Eid Al Fitr 1444H	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan - Suwarda^{**)}	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor
4	5 Mei 2023 May 5, 2023	Persiapan RUPST 11 Mei 2023 – Skenario Preparation for Annual GMS 11 May 2023 – Scenario	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor
5	19 Mei 2023 May 19, 2023	- Financial Highlights per April 2023 Financial Highlights as of April 2023 - Tindak Lanjut Surat Ojk SR 9 Follow-Up on OJK Letter SR 9 - Update Progress Listing Update on Listing Progress	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor
6	23 Juni 2023 June 23, 2023	- Financial Highlights Mei 2023 Financial Highlights of May 2023 - Persetujuan Revisi RBB Tahun 2023 Approval on 2023 RBB Revision - Update Progress Listing Update on Listing Progress - Other Update Other Update	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Dewan Komisaris Participant of the Board of Commissioners	Peserta Direksi Participant of the Board of Directors
7	21 Juli 2023 July 21, 2023	- Tindak Lanjut Rapat OJK hari Senin, 17 Juli 2023 Follow-Up on OJK Meeting on Monday, 17 July 2023 - Kualitas Pembiayaan Debitur dan Jaminan Calon Debitur serta Informasi Pipeline Quality of Debtor Financing and Guarantees of Prospective Debtors and Pipeline Information - Optimalisasi Muamalat Tower Optimization of Muamalat Tower - Laporan KAP untuk Audit Bulan Juni 2023 KAP Report for June 2023 Audit	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor
8	10 Agustus 2023 August 10, 2023	Update RUPST dan RUPSLB ALIF Update on ALIF Annual GMS and Extraordinary GMS	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor - Dedy Suryadi Dharmawan
9	25 Agustus 2023 August 25, 2023	- IT Security Penyampaian Hasil ITSC IT Security on Presenting IT Sterring Committee (ITSC) Results - ALIF Update ALIF Update - Financial Highlights per Juli 2023 Financial Highlights as of July 2023 - Update Progress Listing Update on Listing Progress - Other Update Other Update	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor - Dedy Suryadi Dharmawan
10	22 September 2023 September 22, 2023	- Update Progress Listing Update on Listing Progress - Financial Highlights per Agustus 2023 Financial Highlights as of August 2023 - Other Update Other Update	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor - Dedy Suryadi Dharmawan
11	3 Oktober 2023 October 3, 2023	- Update Laporan Kinerja Keuangan per Agustus 2023 Update on Financial Performance Report as of August 2023 - Persetujuan Listing & RUPSLB: Approval on Listing & Extraordinary GMS: - Valuasi Saham KJPP KJPP Stock Valuation - Agenda RUPSLB: RSRBB dan Perubahan Anggaran Dasar EGMS Agenda: RSS and Change in the Articles of Association - Update Lainnya Other Updates	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor - Dedy Suryadi Dharmawan
12	10 November 2023 November 10, 2023	- Persetujuan RBB 2024 Approval on 2024 RBB - Update Listing dan Persiapan RUPSLB 13 November 2023 Update on Listing and Preparation for Extraordinary GMS 13 November 2023 - Financial Highlight per Oktober 2023 Financial Highlights as of October 2023	- Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Sartono - Andre Mirza Hartawan	- Indra Falatehan - Karno - Wahyu Avianto - Suhendar - Hery Syafril - Riksa Prakoso - Irvan Yulian Noor - Dedy Suryadi Dharmawan



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Dewan Komisaris Participant of the Board of Commissioners	Peserta Direksi Participant of the Board of Directors
13	13 November 2023 November 13, 2023	Tindak Lanjut Rapat BP BPKH dan BOM BMI Follow-Up on BP BPKH and BOM BMI Meetingg	• Mardiasmo^{*)} • Amin Said Husni • Sartono • Andre Mirza Hartawan	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Dedy Suryadi Dharmawan
14	17 November 2023 November 17, 2023	1. Update Listing Update on Listing 2. Update Proyeksi Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 Update on 2023 Year-End Financial Report Projection 3. Finalisasi Pembahasan Rencana Bisnis Bank 2024 Finalization of Discussion on the Bank's 2024 Business Plan	• Mardiasmo^{*)} • Amin Said Husni • Sartono • Andre Mirza Hartawan	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Dedy Suryadi Dharmawan
15	17 November 2023 November 17, 2023	Update Listing Update on Listing	• Mardiasmo^{*)} • Amin Said Husni • Sartono • Andre Mirza Hartawan	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Dedy Suryadi Dharmawan
16	1 Desember 2023 December 1, 2023	Kajian Strategi Anorganik Review on Inorganic Strategy	• Mardiasmo^{*)} • Amin Said Husni • Sartono • Andre Mirza Hartawan	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Dedy Suryadi Dharmawan
17	15 Desember 2023 December 15, 2023	1. Update Implementasi AML, CFT, CFP tahun 2023 Update on Implementation of AML, CFT, CFP in 2023 2. Update Listing Update on Listing 3. Financial Highlight per November 2023, termasuk Proyeksi Akhir Tahun 2023 Financial Highlights as of November 2023, including 2023 Year-End Projection 4. TAP 2.0 TAP 2.0 5. Jadwal Rapat Tahun 2024 2024 Meeting Schedule	• Mardiasmo^{*)} • Amin Said Husni • Sartono • Andre Mirza Hartawan	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Dedy Suryadi Dharmawan

^{*)} Tidak menjabat sejak Desember 2023.
No longer serving effective since December 2023.

^{**)} Tidak menjabat sejak Mei 2023.
No longer serving effective since May 2023.



RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat Dewan Pengawas Syariah bersama Dewan Komisaris dan Direksi tertuang pada Board Manual, yang mengatur bahwa rapat Dewan Pengawas Syariah bersama dengan Direksi dan rapat Dewan Pengawas Syariah bersama dengan Dewan Komisaris diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pelaksanaan Rapat

Sepanjang tahun buku 2023, rapat Dewan Pengawas Syariah bersama Dewan Komisaris dan Direksi digelar sebanyak 4 (empat) kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN

Meeting Frequency and Level of Attendance

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran (%) Percentage of Attendance (%)
Dewan Pengawas Syariah The Sharia Supervisory Board					
1	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	Ketua Chairman	4	2	50
2	Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH	Anggota Member	4	3	75
3	Dr. H. Agung Danarto, M.Ag	Anggota Member	4	4	100
Dewan Komisaris The Board of Commissioners					
4	Mardiasmo ^{*)}	Komisaris Utama Independen Independent President Commissioner	4	4	100
5	Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	4	4	100
6	Amin Said Husni	Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/Acting President Commissioner	4	3	75
7	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Commissioner	4	4	100
8	Suwarda ^{**)}	Komisaris Independen Independent Commissioner	2	2	100
Direksi The Board of Directors					
9	Indra Falatehan	Direktur Utama President Director	4	3	75
10	Karno	Direktur Kepatuhan, Risiko, dan Hukum Director of Compliance, Risk, and Legal	4	4	100
11	Hery Syafril	Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan Director of Business Risk Financing	4	3	75
12	Wahyu Avianto	Direktur Operasi dan Digital Director of Operation and Digital	4	3	75
13	Suhendar	Direktur Keuangan dan Strategi Director of Finance and Strategy	4	4	100

MEETINGS OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD JOINTLY WITH THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Meeting Policy

The policy on the Sharia Supervisory Board joint meetings with the Board of Commissioners and the Board of Directors as stated in the Board Manual regulates that the meetings of the Sharia Supervisory Board jointly with the Board of Directors and the Board of Commissioners are held at least 1 (one) time in 4 (four) months.

Meeting Implementation

During the 2023 financial year, the Sharia Supervisory Board held 4 (four) meetings with the Board of Commissioners and the Board of Directors with the following details:



No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran (%) Percentage of Attendance (%)
14	Riska Prakoso ^{***})	SEVP Human Capital	4	4	100
15	Irvan Yulian Noor ^{***})	SEVP Enterprise Banking	4	2	50

*) Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.
Effective after obtaining the determination of passing the Fit and Proper Assessment from OJK.

***) Tidak menjabat sejak Mei 2023.
No longer serving effective since May 2023.

****) Pejabat Eksekutif Senior.
Senior Executive Officer.

AGENDA RAPAT GABUNGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI

Joint Meeting Agenda of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board Participants	Peserta Dewan Komisaris Board of Commissioners Participants	Peserta Direksi/SEVP Board of Directors/SEVP Participants
1	20 Januari 2023 January 20, 2023	1. <i>Financial Highlights</i> per Desember 2022 2. <i>Update Progress</i> <i>Listing</i> 1. Financial Highlights as of December 2022 2. Update Progress Listing	• Sholahudin Al-Aiyub • Siti Haniatunnisa • Agung Danarto	• Mardiasmo ^{*)} • Amin Said Husni • Sartono • Andre Mirza Hartawan • Suwarta ^{**)}	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso ^{***}) • Irvan Yulian Noor ^{****})
2	14 April 2023 April 14, 2023	1. <i>Financial Highlights</i> per Maret 2023 2. <i>Update Progress</i> <i>Listing</i> 3. <i>Update Lainnya</i> 1. Financial Highlights as of March 2023 2. Update on Listing Progress 3. Other Updates	• Sholahudin Al-Aiyub • Siti Haniatunnisa • Agung Danarto	• Mardiasmo ^{*)} • Amin Said Husni • Sartono • Andre Mirza Hartawan • Suwarta ^{**)}	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso ^{***}) • Irvan Yulian Noor ^{****})
3	14 Juli 2023 July 14, 2023	1. <i>Update Progress</i> <i>Listing</i> 2. <i>Financial Highlights</i> per Juni 2023 1. Update on Listing Progress 2. Financial Highlights as of June 2023	• Sholahudin Al-Aiyub • Siti Haniatunnisa • Agung Danarto	• Mardiasmo ^{*)} • Amin Said Husni • Sartono • Andre Mirza Hartawan	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso ^{***}) • Irvan Yulian Noor ^{****})
4	20 Oktober 2023 October 20, 2023	1. <i>Update Progress</i> <i>Listing</i> 2. <i>Financial Highlights</i> per September 2023 3. <i>Update ALIF</i> 4. <i>Update lainnya</i> 1. Update on Listing Progress 2. Financial Highlights as of September 2023 3. Update on ALIF 4. Other Updates	• Sholahudin Al-Aiyub • Siti Haniatunnisa • Agung Danarto	• Mardiasmo ^{*)} • Amin Said Husni • Sartono • Andre Mirza Hartawan	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Hery Syafril • Riksa Prakoso ^{***}) • Irvan Yulian Noor ^{****})

*) Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.
Effective after obtaining the determination of passing the Fit and Proper Assessment from OJK.

***) Tidak menjabat sejak Mei 2023.
No longer serving effective since May 2023.

****) Pejabat Eksekutif Senior.
Senior Executive Officer.



Komite Audit

Audit Committee

Dewan Komisaris Bank Muamalat membentuk Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit Bank Muamalat Indonesia. Komite tersebut juga bertugas melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit internal dan hasil audit pihak eksternal guna menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan Bank.

The Board of Commissioners of Bank Muamalat formed an Audit Committee chaired by an Independent Commissioner concurrently as a member to monitor and evaluate the planning and implementation of audits and monitor the follow-up of Bank Muamalat Indonesia's audit results. The committee is also tasked with monitoring the follow-up of internal audit results and external party audit results to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the Bank's financial reporting process.

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Audit Bank Muamalat Indonesia mengacu pada peraturan perundangan-undangan, yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPBS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
6. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

LEGAL BASIS

Bank Muamalat Indonesia established Audit Committee by referring to the laws and regulations as follows:

1. Financial Services Authority Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks.
2. Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009, dated December 7, 2009, concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
3. Bank Indonesia Circular No. 12/13/DPBS dated April 30, 2010, concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
4. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015, dated December 29, 2015, concerning the Establishment and Work Implementation Guidelines of the Audit Committee.
5. Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.03/2019, dated January 8, 2019, concerning the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks.
6. The Bank's Articles of Association on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.

PEDOMAN KERJA/PIAGAM KOMITE AUDIT

Komite Audit Bank Muamalat telah memiliki pedoman kerja atau piagam yang di dalamnya mengatur tujuan pembentukan komite, tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite, struktur dan keanggotaan komite, rapat komite, kuorum, pengambilan keputusan, masa tugas anggota komite dari Pihak Independen, mekanisme evaluasi kinerja, serta periode reviu piagam komite secara berkala. Piagam Komite Audit dan susunan anggota Komite Audit

WORK GUIDELINES/CHARTER OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee of Bank Muamalat retains a work guideline or charter of which its content regulates the purpose of establishing the committee, duties, responsibilities, and committee authority, committee structure and membership, committee meeting, quorum, decision-making, term of office of committee members of the Independent Party, performance assessment mechanism, as well as the periodic review of the committee charter. The Audit Committee



terus diperbarui secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

KRITERIA ANGGOTA KOMITE AUDIT

Piagam Komite Audit Bank Muamalat telah mengatur kriteria keanggotaan Komite Audit di mana anggota komite tersebut berasal dari Komisaris Independen dan pihak independen serta memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Komite Audit paling sedikit beranggotakan:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen; dan
 - b. Pihak Independen:
 - 1 (satu) orang yang memiliki keahlian bidang keuangan atau bidang akuntansi; dan
 - 1 (satu) orang yang memiliki keahlian bidang perbankan syariah, bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah.
2. Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah, 1 (satu) orang anggota dewan pengawas syariah dapat menjadi anggota komite audit.
3. Wajib mempunyai integritas, akhlak, moral dan reputasi keuangan yang baik.
4. Wajib mempunyai kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
5. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
6. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan
7. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank.
8. Wajib mempunyai paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
9. Wajib mempunyai paling kurang satu anggota yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
10. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa non-*assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
11. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.

Charter and the membership composition are continually updated periodically, at least 1 (one) time in every 3 (three) years in line with development in applicable regulations as well as current conditions of the Bank.

MEMBERSHIP CRITERIA OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee Charter of Bank Muamalat regulates the criteria of the Audit Committee membership where committee members are from Independent Commissioners and independent parties as well as complying with the requirements as follows:

1. The Audit Committee consists of members at least:
 - a. 1 (one) Independent Commissioner; and
 - b. Independent Party:
 - 1 (one) member with the expertise in finance or accounting; and
 - 1 (one) member with the expertise in sharia banking, for Banks that conduct sharia business activities.
2. For Banks that conduct sharia business activities, 1 (one) sharia supervisory board member may serves as audit committee member.
3. Must have good integrity, character, morals and financial reputation.
4. Must have the capability, knowledge, experience in accordance with the job position, as well as the capability to communicate appropriately.
5. Must understand financial report, company business specifically related to services or Bank business activities, audit process, risk management, and other related laws and regulations.
6. Willing to continuously improve competency through education and training
7. Must comply with the Audit Committee code of ethics setforth by the Bank.
8. Must have at least one member with the educational background and expertise in accounting and finance.
9. Must have at least one member with the expertise in sharia banking.
10. Not a person from a Public Accounting Firm, Legal Consultant Office, Public Appraisal Service Firm or other parties that provide assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to concerned issuers or public companies within the last 6 (six) months period.
11. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Bank's activities within the last 6 (six) months except for Independent Commissioner.



12. Wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen bagi mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
13. Tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung pada Bank.
14. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat Indonesia.
15. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia.

12. Must take on a waiting period of at least 6 (six) months prior to becoming Independent Party for former members of the Board of Directors, Executive Officers, or parties with relationship with the Bank that may influence the capability of the concerned to take independent actions.
13. Not owning shares directly or indirectly at the Bank.
14. Not having affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Major Shareholders of Bank Muamalat Indonesia.
15. Not having business relationship, directly or indirectly, related to the business activities of Bank Muamalat Indonesia.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit pada Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.
3. Melakukan penelaahan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
4. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
5. Dalam melakukan tugas sebagaimana angka 1 di atas, Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit:
 - a. Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern;
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dengan standar audit;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
6. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Komite Audit bertanggung jawab antara lain:
 - a. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
 - b. Mengevaluasi kinerja SKAI Bank;
 - c. Memastikan SKAI berkomunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of Audit Committee according to Audit Committee Charter are as follow:

1. Monitoring and evaluating the planning and implementation of audit as well as monitoring the follow-up to the audit results in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process.
2. Reviewing and advising the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest.
3. Reviewing compliance with laws and regulations related to the Bank's activities.
4. Maintaining the confidentiality of documents, data, and information of the Bank.
5. In carrying out the duties as referred to in item 1, Audit Committee is required to monitor and evaluate the following:
 - a. Duties implementation of internal audit unit;
 - b. Audit conformity by a Public Accountant with auditing standards;
 - c. Conformity of financial statements with financial accounting standards; and
 - d. Implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings by the internal audit work unit, public accountants, and supervision results of the Financial Services Authority in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.
6. In monitoring and evaluating duties implementation of the Internal Audit Unit (IAU), Audit Committee is responsible for the following:
 - a. Monitoring and reviewing the effectiveness of the Bank's internal audit;
 - b. Evaluating the performance of the Bank's IAU;
 - c. Ensuring the IAU communicates with the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, external auditors, and the Financial Services Authority;



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> d. Memastikan SKAI bekerja secara independen serta menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas; e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI; f. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat dan akurat; g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian Remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait persetujuan pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI, penetapan piagam audit intern dan penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI. <p>7. Dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik, Komite Audit bertanggung jawab antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa; b. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya. c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik paling kurang melalui: <ul style="list-style-type: none"> i. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku; ii. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan; iii. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan iv. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP. <p>8. Dalam pemantauan dan evaluasi pelaporan keuangan, Komite Audit bertanggung jawab antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antaran lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank; b. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank. | <ul style="list-style-type: none"> d. Ensuring that the IAU is independent and upholds integrity in performing duties; e. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding audit plan preparation, as well as IAU scope and budget; f. Reviewing audit reports and ensuring that the Board of Directors takes the necessary corrective actions rapidly and accurately; g. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the provision of IAU's overall annual Remuneration and performance awards; and h. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding approval for the appointment and dismissal of the Head of IAU, the establishment of an internal audit charter, and the appointment of an independent quality controller from an external party to review IAU performance. <p>7. In monitoring and evaluating audits by a Public Accounting Firm, Audit Committee is responsible for the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of a Public Accountant based on independence, the scope of the assignment, and fees; b. Providing independent opinion in the event of disagreement between management and the Accountant for the services provided. c. Evaluating the implementation of audit services on annual historical financial information by a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, including: <ul style="list-style-type: none"> i. Conformity of audit implementation by Public Accountant and/or Public Accounting Firm with applicable auditing standards; ii. Sufficient time for field work; iii. Assessment of the scope of services provided and the adequacy of sampling test; and iv. Recommendations for improvement provided by the Public Accountant and/or Public Accounting Firm. <p>8. In monitoring and evaluating financial reporting, Audit Committee is responsible for the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Reviewing financial information to be issued by the Bank to the public and/or authorities, including financial reports, projections, and other reports related to the Bank's financial information; b. Reviewing complaints related to the Bank's accounting and financial reporting processes. |
|---|---|



WEWENANG KOMITE AUDIT

Wewenang yang dimiliki Komite Audit tertuang pada Piagam Komite Audit yang di antaranya adalah:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Menerima tembusan Laporan Hasil Audit Intern yang disampaikan ke Direktur Utama.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

PERAN KOMITE AUDIT DALAM PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PENUNJUKAN DAN PEMBERHENTIAN AUDITOR EKSTERNAL

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 11 Mei 2023, telah disetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

Atas dasar tersebut, Komite Audit berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan menyelenggarakan Rapat Komite Audit yang diselenggarakan melalui 2 (dua) sesi yaitu pada tanggal 22 September 2023 dan 06 Oktober 2023, dan diputuskan bahwa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk akan menggunakan Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (KAP DBSD&A) untuk melakukan Audit Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2023. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam Surat Komite Audit No.07/KA/X/2023 tentang Penunjukkan AP dan/atau KAP yang Memberikan Jasa Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan Dalam Rangka Listing 16 Desember 2023.

AUDIT COMMITTEE AUTHORITIES

Audit Committee has the authorities as contained in the Audit Committee Charter, which include:

1. Accessing the Bank's documents, data, and information regarding the Bank's employees, funds, assets, and resources as needed.
2. Communicating directly with employees, including the Board of Directors and those who function the internal audit, risk management, and accountants related to the duties and responsibilities of the Audit Committee.
3. Involving independent parties outside the Audit Committee members who are needed to assist in running duties.
4. Receiving a copy of the Internal Audit Report submitted to the President Director.
5. Performing other authorities granted by the Board of Commissioners

THE ROLE OF THE AUDIT COMMITTEE IN PROVIDING RECOMMENDATIONS ON THE APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE EXTERNAL AUDITOR

Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated May 11, 2023, it was approved to grant authority to the Board of Commissioners to appoint, terminate and / or replace the Public Accounting Firm to conduct an Audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year 2023 and/ or other audits required by the Company.

On this basis, the Audit Committee plays an active role in providing recommendations to the Board of Commissioners by holding Audit Committee Meetings held through 2 (two) sessions, namely on September 22, 2023 and October 06, 2023, and it was decided that PT Bank Muamalat Indonesia Tbk will use the Public Accounting Firm Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang and Ali (KAP DBSD&A) to audit the Financial Statements as of December 31, 2023. The recommendation is outlined in the Audit Committee Letter No.07/KA/X/2023 concerning the Appointment of AP and / or KAP to Provide Audit Services for the Financial Statements of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk for the Year Ending December 31, 2023 and in the Context of Listing December 16, 2023.



KETENTUAN MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Komite Audit Bank Muamalat telah merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku, yakni masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

TERM OF OFFICE

The term of office for Audit Committee Members of Bank Muamalat refers to the applicable laws and regulations. The term is required to be no longer than the term of office of the Board of Commissioners and can be re-elected only for one subsequent term.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN

Merujuk pasal 64 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, komposisi Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi, dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah. Selain itu, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah juga dapat menjadi anggota komite audit.

COMPOSITION AND BASIS OF APPOINTMENT

Referring to article 64 of the Financial Services Authority Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks, the composition of Members of the Audit Committee at least consists of an Independent Commissioner, an independent party with the expertise in finance or accounting, and an independent party with the expertise in sharia banking. In addition, 1 (one) member of the Sharia Supervisory Board may also serve as member of the audit committee.

Berikut komposisi dan dasar hukum pengangkatan Komite Audit Bank Muamalat Indonesia per 31 Desember 2023:

Following is the composition and legal basis of appointment of the Audit committee of Bank Muamalat Indonesia as of 31 December 2023:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Mardiasmo ^{*)}	Ketua, Komisaris Utama Independen Chairman, Independent President Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 035/B/DIR-KPTS/XII/2022 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 16 Desember 2022. Board of Directors Decree No. 035/B/DIR-KPTS/XII/2022 regarding Audit Committee Muamalat Indonesia Tbk dated 16 December 2022.	2022-2023
Sartono	Anggota, Komisaris Independen Member, Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 035/B/DIR-KPTS/XII/2022 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 16 Desember 2022. Board of Directors Decree No. 035/B/DIR-KPTS/XII/2022 regarding Audit Committee Muamalat Indonesia Tbk dated 16 December 2022.	2022-2023
Suwarda ^{**)}	Anggota, Komisaris Independen Member, Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 035/B/DIR-KPTS/XII/2022 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 16 Desember 2022. Board of Directors Decree No. 035/B/DIR-KPTS/XII/2022 regarding Audit Committee Muamalat Indonesia Tbk dated 16 December 2022.	2022-2023
Dwi Sasongko	Anggota, Pihak Independen Ahli di Bidang Akuntansi Keuangan Member, Independent Party, Expert in Accounting, Finance	Surat Keputusan Direksi No. 035/B/DIR-KPTS/XII/2022 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 16 Desember 2022. Board of Directors Decree No. 035/B/DIR-KPTS/XII/2022 regarding Audit Committee Muamalat Indonesia Tbk dated 16 December 2022.	2022-2023
Tika Arundina	Anggota, Pihak Independen ahli di bidang Perbankan Syariah Member, Independent Party, expert in Sharia Banking	Surat Keputusan Direksi No. 035/B/DIR-KPTS/XII/2022 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 16 Desember 2022. Board of Directors Decree No. 035/B/DIR-KPTS/XII/2022 regarding Audit Committee Muamalat Indonesia Tbk dated 16 December 2022.	2022-2023
Karim Anggar Prianto	Anggota, Pihak Independen Ahli di Bidang Perbankan Syariah Member, Independent Party, expert in Sharia Banking	Surat Keputusan Direksi No. 044/B/DIR-KPTS/VII/2023 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 Agustus 2023. Board of Directors Decree No. 044/B/DIR-KPTS/VII/2023 regarding Audit Committee Muamalat Indonesia Tbk dated 1 August 2023.	2023-2024

^{*)} Tidak menjabat sejak Desember 2023.
No longer serving effective since December 2023.

^{**)} Tidak menjabat sejak Mei 2023.
No longer serving effective since May 2023.



Pada 5 Januari 2024, komposisi dan dasar hukum pengangkatan Komite Audit Bank Muamalat Indonesia mengalami perubahan. Rinciannya seperti pada tabel di bawah ini.

On 5 January 2024, the composition and legal basis of appointment of the Audit Committee of Bank Muamalat Indonesia changed. Details are provided in the table below.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Sartono	Ketua, Komisaris Independen Chairman, Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 003/B/DIR-KPTS/I/2024 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Januari 2024. Board of Directors Decree No. 003/B/DIR-KPTS/I/2024 regarding Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 5 January 2024.	2024
Amin Said Husni	Anggota, Komisaris Independen Member, Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 003/B/DIR-KPTS/I/2024 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Januari 2024. Board of Directors Decree No. 003/B/DIR-KPTS/I/2024 regarding Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 5 January 2024.	2024
Karim Anggar Prianto	Anggota, Pihak Independen Ahli di Bidang Perbankan Syariah Member, Independent Party, expert in Sharia Banking	Surat Keputusan Direksi No. 003/B/DIR-KPTS/I/2024 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Januari 2024. Board of Directors Decree No. 003/B/DIR-KPTS/I/2024 regarding Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 5 January 2024.	2024
Saiful Anwar	Anggota, Pihak Independen Member, Independent Party	Surat Keputusan Direksi No. 003/B/DIR-KPTS/I/2024 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Januari 2024. Board of Directors Decree No. 003/B/DIR-KPTS/I/2024 regarding Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 5 January 2024.	2024

PROFIL KOMITE AUDIT

Berikut adalah profil Komite Audit Bank Muamalat Indonesia.

PROFILE OF THE AUDIT COMMITTEE

Following is profile of the Audit committee of Bank Muamalat Indonesia.



Sartono
Ketua
Chairman

Profil lengkap disajikan pada bab “Profil Perusahaan.”

Complete profile is presented in the chapter on “Company Profile.”



Amin Said Husni

Anggota
Member

Profil lengkap disajikan pada bab "Profil Perusahaan."

Complete profile is presented in the chapter on "Company Profile."



Karim Anggar Prianto

Anggota
Member

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	
Usia Age	54 tahun pada Tahun Buku 2023	54 years as of Financial Year 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 003/B/DIR-KPTS/I/2024 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Januari 2024.	Serving as Member of the Audit committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk based on Board of Directors Decree No. 003/B/DIR-KPTS/I/2024 regarding Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 5 January 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknik Informatika di STMIK Jabar (2011)	Bachelor's degree (Sarjana) in Informatics Engineering at STMIK of West Java (2011)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	- Senior Auditor Financing Audit di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2018-2020) - Branch Manager di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2011- 2016)	- Senior Auditor of Financing Audit at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2018-2020) - Branch Manager at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2011-2016)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	No affiliation with the Board of Directors, the Board of Commissioners, or the Major/Controlling Shareholders.
Kualifikasi Qualification	Pihak independen yang memiliki kualifikasi di bidang akuntansi, audit dan perbankan syariah.	Independent party with the qualifications in the fields of accounting, audit and sharia banking.



Saiful Anwar

Anggota
Member

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	
Usia Age	46 tahun pada Tahun Buku 2023	46 years as of Financial Year 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Anggota Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Surat Keputusan Direksi No. 003/B/DIR-KPTS/I/2024 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Januari 2024.	Appointed as Member of the Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk based on Board of Directors Decree No. 003/B/DIR-KPTS/I/2024 regarding Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 5 January 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Doctor of Information Science, Nagaoka University of Technology (2012) • Master of Islamic Banking & Finance di Universitas Indonesia (2008) • Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia (2001)	• Doctor of Information Science, Nagaoka University of Technology (2012) • Master of Islamic Banking & Finance at Universitas Indonesia (2008) • Bachelor (Sarjana) in Accounting, Universitas Indonesia (2001)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Komite Pemantau Risiko di PT Bank KB Bukopin Syariah dari tahun 2022 hingga sekarang.	Risk Monitoring Committee of PT Bank KB Bukopin Syariah from the year 2022 until present.
Pengalaman Kerja Work Experience	• Komite Pemantau Risiko di PT Bank BRI Syariah (2013-2018) • Komite Pemantau Risiko di PT Bank KB Bukopin Syariah (2022- sekarang). • Komite Audit di PT Bank BRI Syariah (2018-2021) • Komite Pemantau Risiko di PT Bank BRI Syariah (2013- 2018) • Section Head of Quality Assurance di PT Bank Syariah Mandiri (2005-2008) • Junior Auditor di Ernst & Young Indonesia (2004-2005)	• Risk Monitoring Committee at PT Bank BRI Syariah (2013-2018) • Risk Monitoring Committee at PT Bank KB Bukopin Syariah (2022-present) • Audit Committee at PT Bank BRI Syariah (2018-2021) • Risk Monitoring Committee at PT Bank BRI Syariah (2013-2018) • Section Head of Quality Assurance at PT Bank Syariah Mandiri (2005-2008) • Junior Auditor at Ernst & Young Indonesia (2004-2005)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama/ Pengendali.	No affiliation with the Board of Directors, the Board of Commissioners, or the Major/Controlling Shareholders.
Kualifikasi Qualification	Pihak independen yang memiliki kualifikasi di bidang akuntansi, audit dan perbankan syariah.	Independent party with the qualifications in the fields of accounting, audit and sharia banking.

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite Audit dituntut untuk dapat profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Penjelasan independensi anggota komite diurai melalui tabel di bawah ini.

INDEPENDENCY OF THE AUDIT COMMITTEE

In carrying out its duties and function, the Audit Committee is demanded to be professional and independent without any intervention from any party that is not in accordance with the laws and regulations. Explanation on the independency of members of the committee is outlined in the table below.



Aspek Independensi Independence Aspect	Sartono	Amin Said Husni	Karim Anggar Prianto	Saiful Anwar
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Having no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Having no management relationship in the Company, subsidiaries, or affiliated companies	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Having no family relations with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Nomination, Remuneration Committee and GCG Committee	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as a manager of political parties, officials, and government	✓	✓	✓	✓

Dalam hal pembuktian independensi, anggota Komite Audit BMI tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

In terms of proving independence, the Bank's Audit Committee members have no family or financial relationship, either directly or indirectly, relating to the Bank's business activities.

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Kepengurusan Management Relationship	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Sartono	Ketua Chairman		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Amin Said Husni	Anggota Member		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Karim Anggar Prianto	Anggota Member		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Saiful Anwar	Anggota Member		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

RAPAT KOMITE AUDIT

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Komite Audit Bank Muamalat mengatur bahwa rapat Komite Audit wajib diselenggarakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sejak diundangkannya POJK 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum pada 14 September 2023. Rapat dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan anggota yang berasal dari pihak independen. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta diatur dalam Piagam Komite Audit.

MEETINGS OF THE AUDIT COMMITTEE

Meeting Policy

The meeting policy of the Audit Committee of Bank Muamalat regulates that meetings of the Audit Committee are mandatory to be held at least 1 (one) time within a month as of the effective date of POJK 17 of year 2023 regarding Governance of Commercial Banks on 14 September 2023. Each of the meeting is regarded as legitimate if attended by at least 51% (fifty one percent) of the members including an Independent Commissioner and a member from an independent party. The policy refers to Financial Services Authority Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation in Commercial Banks and Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 55/POJK.04/2015 regarding Establishment and Guidelines of Work Implementation of the Audit Committee as well as regulated in the Audit Committee Charter.



Selain itu, hasil rapat Komite Audit juga harus dituangkan ke dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat

Hingga akhir tahun buku 2023, Komite Audit menggelar rapat sebanyak 9 (sembilan) kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

Furthermore, the Audit Committee meeting resolution must be recorded in the minutes of the meeting and properly documented, including in the event of a dissenting opinion, which is signed by the entire Audit Committee members present and submitted to the Board of Commissioners.

Meeting Implementation

Until the end of 2023 financial year, Audit Committee held 9 (nine) meetings with the following details.

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN

Meeting Frequency and Level of Attendance

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran (%) Percentage of Attendance (%)
1	Mardiasmo ^{*)}	Ketua Chairman	9	9	100
2	Sartono	Ketua Chairman	9	9	100
3	Suwarda ^{**)}	Anggota Member	5	5	100
4	Dwi Sasongko	Anggota Member	9	9	100
5	Tika Arundina ^{**)}	Anggota Member	3	3	100
6	Karim Anggar Prianto ^{***)}	Anggota Member	4	4	100

- ^{*)} Tidak menjabat sejak 5 Januari 2024.
No longer serving effective since 5 January 2024.
- ^{**)} Tidak menjabat sejak 1 Agustus 2023.
No longer serving effective since 1 August 2023.
- ^{***)} Menjabat sejak 1 Agustus 2023.
Effective serving in office since 1 August 2023.

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Meeting Agenda of the Audit Committee

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
1	13 Januari 2023 January 13, 2023	1. <i>Update</i> Internal Audit 2. <i>Financial Highlights</i> per Desember 2022 (<i>unaudited</i>) 1. Update Internal Audit 2. Financial Highlights as of December 2022 (<i>unaudited</i>)	• Mardiasmo^{*)} • Suwarda^{**)} • Sartono • Dwi Sasongko • Tika Arundina
2	24 Februari 2023 February 24, 2023	1. <i>Update</i> Internal Audit 2. <i>Pembahasan Management Letter</i> 1. Update Internal Audit 2. Discussion on Management Letter	• Mardiasmo^{*)} • Suwarda^{**)} • Sartono • Dwi Sasongko • Tika Arundina
3	31 Maret 2023 March 31, 2023	1. <i>Management Letter</i> Audit KAP DBSDA 2. Laporan KA atas Kinerja KAP tahun 2022 dan Usulan Rekomendasi KAP tahun 2023 3. <i>Update</i> Dokumen 7 Nasabah yang belum ditemukan 1. Management Letter on KAP DBSDA Audit 2. KA Report on KAP performance in 2022 and Proposed KAP Recommendation in 2023 3. Update on Missing Documents of 7 Customers	• Mardiasmo^{*)} • Suwarda^{**)} • Sartono • Dwi Sasongko • Tika Arundina
4	19 Mei 2023 May 19, 2023	Pembahasan Rekomendasi KAP sebagai Tindak Lanjut RUPST dan Keperluan <i>Listing</i> Discussion on KAP Recommendation as Follow-Up of Annual GMS and Listing Requirements	• Mardiasmo^{*)} • Suwarda^{**)} • Sartono • Dwi Sasongko



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
5	14 Juli 2023 July 14, 2023	Rekomendasi Penetapan Pejabat Head of Internal Audit Recommendation on Determining the Head of Internal Audit	- Mardiasmo^{*)} - Suwarda^{**)} - Sartono - Dwi Sasongko
6	Sesi Session 1: 22 September 2023 September 22, 2023 Sesi Session 2: 6 Oktober 2023 October 6, 2023	1. Kinerja Bank Muamalat atas Laporan Keuangan per Juni 2023 2. Internal Audit <i>Update</i> 1. Performance of Bank Muamalat on Financial Report as of June 2023 2. Internal Audit Update	- Mardiasmo^{*)} - Sartono - Dwi Sasongko - Karim Anggar Prianto
7	13 Oktober 2023 October 13, 2023	1. Temuan Internal Audit 2. Rekomendasi <i>Management Letter</i> KAP DBSDA mengenai Laporan Keuangan Posisi Juni 2023 1. Internal Audit Findings 2. Recommendation on Management Letter of KAP DBSDA concerning Financial Statements of June 2023 Position	- Mardiasmo^{*)} - Sartono - Dwi Sasongko - Karim Anggar Prianto
8	17 November 2023 November 17, 2023	<i>Kick off Meeting</i> KAP DBSDA Kick off Meeting KAP DBSDA	- Mardiasmo^{*)} - Sartono - Dwi Sasongko - Karim Anggar Prianto
9	22 Desember 2023 December 22, 2023	1. Pemaparan Hasil Audit Kaji Ulang 3 Tahunan KAP atas IAT 2. RKAT 2024 1. Presentation of Audit Results of KAP's 3-Year Review of IAT 2. 2024 RKAT	- Mardiasmo^{*)} - Sartono - Dwi Sasongko - Karim Anggar Prianto

*) Tidak menjabat sejak Desember 2023.
No longer serving effective since December 2023.
 **) Tidak menjabat sejak Mei 2023.
No longer serving effective since May 2023.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Bank Muamalat senantiasa mendorong Komite Audit untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan pada tahun 2023. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan dalam bab "Profil Perusahaan".

COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE AUDIT COMMITTEE

Bank Muamalat continuously encourages the Audit Committee to carry out competency development through training during the year 2023. Complete information on this matter is presented in the chapter on "Company Profile".

SERTIFIKASI PROFESI

Certification of Profession

No.	Sertifikasi Profesi Certification of Profession	Nama Name	Lembaga Penerbit Issuing Institution
1	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	1. Sartono 2. Amin Said Husni 3. Saiful Anwar 4. Karim Anggar Prianto	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Agency for Certification of Profession (BNSP)
2	Sertifikasi Register Negara Akuntan (RNA) Certification of the State Registry of Accountants	Saiful Anwar	Menteri Keuangan Ministry of Finance
3	Sertifikasi Chartered Accountant (CA) Chartered Accountant (CA) Certification	Saiful Anwar	Ikatan Akuntan Indonesia Indonesia Accountant Association



PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan dan/atau hal-hal lain yang disampaikan Direksi, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris baik pada area Laporan Keuangan, Pengendalian Intern, maupun Kepatuhan. Adapun aktivitas Komite Audit Bank Muamalat selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 9 (sembilan) kali rapat Komite Audit, termasuk menyusun risalah rapat.
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
3. Melakukan penelaahan bersama Manajemen, SKAI dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas hasil audit internal maupun eksternal termasuk kesulitan yang dihadapi.
4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas jasa yang diberikannya.
5. Melakukan penelaahan atas laporan tahunan untuk meyakinkan kecukupan, konsistensi dan keakuratan informasi.
6. Mengkaji Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Bank Muamalat Tahun Buku 2023 oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali.
7. Memonitor efektivitas kebijakan dan melakukan penelaahan serta rekomendasi perbaikan atas laporan fraud yang terkait dengan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting risk*) yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh Direksi.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI maupun pihak eksternal.
10. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Perseroan
11. Seluruh anggota Komite telah mengikuti minimal 1 (satu) kali kegiatan pengembangan kompetensi terkait dengan Perbankan/Audit.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is tasked with duties and responsibilities to provide opinion to the Board of Commissioners on report and/or other matters presented by the Board of Directors, as well as to identify matters that require the attention of the Board of Commissioners, on areas concerning Financial Report, Internal Control, and Compliance. Activities of the Audit Committee of Bank Muamalat during the year 2023 are as follows:

1. Held 9 (nine) Audit Committee meetings,, including composing the minutes of meeting.
2. Reviewed financial information to be published by the Company to the public and/or authorities including financial statements, projections, and other reports related to the Company's financial information.
3. Reviewed jointly with the Management, SKAI and Public Accountant, KAP or Audit Team from KAP on internal as well as external audit results, including on difficulties faced.
4. Provided independent opinion in the event of a difference in opinion between the management and the Public Accountant, KAP or Audit Team from KAP regarding the services provided.
5. Reviewed the annual report to assure its adequacy, consistency and accurate information.
6. Reviewed the Evaluation Results Report on the implementation of Providing Audit Services on Bank Muamalat's Annual Historical Financial Information for the 2023 Financial Year by KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali.
7. Monitored the effectiveness of policies and reviewed as well as recommended improvements of fraud report related to financial reporting (*fraudulent financial reporting risk*) prepared and implemented by the Board of Directors.
8. Reviewed and provided recommendations to the Board of Commissioners related to potential conflict of interest of the Company.
9. Reviewed the audit report and ensured the Board of Directors to take actions for immediate improvement necessary to overcome control weaknesses, fraud, compliance issues on policies, laws and regulations, or other issues identified and reported by SKAI as well as by external parties.
10. Monitored and reviewed the effectiveness of the Company's internal audit implementation.
11. All members of the Committee have participated at least 1 (one) time in competency development activity related to Banking/Audit.



Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Muamalat Indonesia berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

PEDOMAN KERJA/PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Muamalat Indonesia telah memiliki piagam sebagai pedoman komite dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Fungsi dari Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain, mengatur struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik, program kerja, dan pelaporan komite.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk pada tahun 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 037/DIR/KPTS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi yang berlaku hingga 5 Januari 2024. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan susunan keanggotaan komite telah diperbarui sesuai dengan POJK 17 Tahun 2023 dan akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

LEGAL BASIS

The establishment of the Nomination and Remuneration Committee of Bank Muamalat Indonesia is based on the following provisions:

1. POJK No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks.
2. Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 as of December 7, 2009, regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
3. FSA Regulation No. 34/POJK.04/2014 regarding the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.
4. Bank Indonesia Circular No. 12/13/DPbS on April 30, 2010, regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
5. The Bank's Articles of Association regarding duties and authorities of the Board of Commissioners.

WORK GUIDELINES/CHARTER FOR NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Bank Muamalat established a charter for the Nomination and Remuneration Committee as a guideline for performing duties and functions. The Nomination and Remuneration Committee regulates the structure and membership, membership requirements, duties and responsibilities, authority, code of ethics, work program, and committee reporting.

Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk in 2023, in accordance with the Board of Directors Decree No. 037/DIR/KPTS/XII/2022 dated 12 December 2022 regarding Nomination and Remuneration Committee, were effective until 5 January 2024. The Nomination and Remuneration Committee Charter and the composition of the committee membership have been updated in accordance with POJK 17 Year 2023 and will continue to be updated in accordance with the development of applicable regulations and the current conditions of the Bank.



KRITERIA ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Komite remunerasi dan nominasi wajib beranggotakan paling sedikit:
 - 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - 1 (satu) orang Komisaris Non Independen; dan
 - 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank
- Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah, 1 (satu) orang anggota dewan pengawas syariah dapat menjadi anggota komite nominasi dan remunerasi.
- Mempunyai keseimbangan antara keahlian dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai proses bisnis Bank Muamalat Indonesia secara umum.
- Berkewajiban memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
- Memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup di bidang:
 - Peraturan Perundang-undangan (pemahaman mendalam mengenai konsep dan praktik peraturan perundangan, perbankan, *Good Corporate Governance*).
 - Proses bisnis perbankan syariah.
- Berkewajiban memiliki sikap yang independen, objektif dan profesional.
- Berkewajiban memiliki dedikasi, pemahaman yang baik tentang organisasi, lingkungan bisnis, risiko maupun pengendalian.
- Berkewajiban memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
- Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen dalam anggota komite Bank.
- Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Bank Muamalat Indonesia, seperti:
 - Mempunyai ikatan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan staf dan pegawai atau Jajaran Manajemen Bank Muamalat Indonesia.

CRITERIA OF MEMBERS OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Members of the Nomination and Remuneration Committee are obligated to fulfill the requirements as follows:

- The Nomination and Remuneration Committee is required to consist of members at least as follows:
 - 1 (one) member of Independent Commissioner;
 - 1 (one) member of Non-Independent Commissioner; and
 - 1 (one) member of Executive Officer who supervises the function of human resources or 1 (one) member representing the Bank's employees
- For Banks that carry out sharia business activities, 1 (one) member of the sharia supervisory board may serve as member of the nomination and remuneration committee.
- Having the balance between expertise and experience with vast background knowledge on the general business process in Bank Muamalat Indonesia.
- Must have good integrity, moral and attitude.
- Having adequate competency and experience in the following fields:
 - Laws and Regulations (in-depth knowledge on the concept and practices of the laws and regulations, banking, Good Corporate Governance).
 - Sharia banking business process.
- Obligated to have an attitude of independency, objectivity and professionalism.
- Obligated to have dedication, good knowledge of the organization, business environment, risk and control.
- Obligated to have the capability to communicate appropriately.
- Former members of the Board of Directors responsible for supervisory function or Executive Officer who carries out the supervisory function at the concerned Bank or parties with relationship with Bank that can influence the capability of the concerned officer to act independently, is required to take on a waiting period of at least 6 (six) months before taking on the position of Independent Party within the membership of the Bank's committee.
- Not having the interest/personal ties that may cause negative impact and conflict of interest towards Bank Muamalat Indonesia, such as the following:
 - Having blood-family relationship up to the second degree, either in straight or sideways line, with staffs and employees or the management Board of Bank Muamalat Indonesia.



- b. Mempunyai ikatan dengan rekanan Bank Muamalat Indonesia, pihak-pihak lain yang dilarang menurut ketentuan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berlaku.
- 11. Anggota komite yang berasal dari pihak independen wajib memenuhi syarat:
 - a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank Muamalat Indonesia, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat Indonesia.
 - b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.
 - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai pedoman bagi anggota dalam menjalankan fungsinya.

Terkait dengan kebijakan nominasi:

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Pengawas Syariah dan calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit, anggota komite pemantau risiko, dan anggota komite lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan Bank.
4. Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan anggota Dewan Komisaris.

Terkait dengan kebijakan remunerasi:

1. Melaksanakan kebijakan remunerasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.

- b. Having relationship with Bank Muamalat Indonesia partners, other parties which prohibited according to the provisions of the laws or other applicable regulations.
- 11. Members of the committee coming from independent parties are required to fulfill the following requirements:
 - a. Not having affiliation with Bank Muamalat Indonesia, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Major Shareholders of Bank Muamalat Indonesia.
 - b. Having the experience related to Nomination and/or Remuneration.
 - c. Not having concurrent positions as members of other committees within Bank Muamalat Indonesia.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Following are the duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee as guidelines for members to carry out its function.

In connection with nomination policies:

1. To prepare and provide recommendations on system as well as procedures of selecting and/or replacing members of the Board of Directors, members of the Sharia Supervisory Board, and members of the Board of Commissioners to be presented to the GMS.
2. To Identify and provide recommendations on candidate members of the Board of Directors, candidate members of the Sharia Supervisory Board and candidate members of the Board of Commissioners to be presented to the GMS.
3. To provide recommendations to the Board of Commissioners on Independent Parties who will member of the audit committee, member of the risk monitoring committee, and member of other committees by taking into account the regulatory provisions and the needs of the Bank.
4. To prepare and assess the performance of the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board and the Board of Commissioners.
5. To provide recommendations to the Board of Commissioners on competency development programs for members of the Board of Directors, members of the Sharia Supervisory Board and members of the Board of Commissioners.

In connection with remuneration policies:

1. To implement remuneration policies in accordance with Financial Services Authority Regulations on governance implementation in providing remuneration in sharia commercial banks and sharia business units.
2. To assess remuneration policies.



3. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan.

Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas terkait dengan remunerasi, setidaknya perlu memperhatikan:

1. Kinerja keuangan;
2. Pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset;
3. Kewajaran dengan *peer group*; dan
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

WEWENANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Selain wewenang yang diatur pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite juga berwenang untuk mengakses dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dari Bank Muamalat Indonesia. Komite Nominasi dan Remunerasi juga dapat melibatkan pihak independen di luar anggota komite untuk membantu pelaksanaan tugasnya serta melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, apabila dianggap perlu.

KETENTUAN MASA JABATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Ketentuan Bank Muamalat atas masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat diangkat kembali.
2. Bagi anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris, pergantiannya paling lambat dilakukan 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

3. To assess the suitability between remuneration policies and implementation of these policies.
4. To provide recommendations to the Board of Commissioners on remuneration policies for the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board, Executive Officers and employees in general.

The Nominatin and Remuneratin Committee, in carrying out its duties related to remuneration, must at least take into account of the following:

1. Financial performance;
2. Fulfillment in establishing Asset Losses Allowance;
3. Fairness with peer groups; and
4. Consideration of the Bank's long-term targets and strategies.

AUTHORITIES FOR NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Apart from the authority in the Nomination and Remuneration Committee Charter, the Committee is also authorized to access the necessary documents, data, and information from Bank Muamalat Indonesia. The Nomination and Remuneration Committee may involve independent parties outside the committee members to assist in duties implementation and carry out other authorities assigned by the Board of Commissioners, if necessary.

TERM OF OFFICE FOR NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Bank Muamalat provisions on the term of office for Nomination and Remuneration Committee members are as follows:

1. The term of office of the Nomination and Remuneration Committee members shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners and may be reappointed.
2. For Committee members who are not from the Board of Commissioners, the replacement shall be carried out no later than 60 (sixty) days since the Nomination and Remuneration Committee member can no longer carry out his/her functions.



KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Merujuk pada Pasal 66 POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, komposisi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Non Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank.

Berikut komposisi dan dasar hukum pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Muamalat Indonesia:

COMPOSITION AND BASIS OF APPOINTMENT OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Referring to Article 66 POJK No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks, the composition of members of the Nomination and Remuneration Committee consists at least 1 (one) member of Independent Commissioner, 1 (one) member of Non-Independent Commissioner and 1 (one) member of Executive Officer responsible for the human resource function or 1 (one) member representing the Bank's employees.

Following is the composition and legal basis of appointment of the Nomination and Remuneration Committee of Bank Muamalat Indonesia:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Amin Said Husni	Ketua, Komisaris Independen Chairman, Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 037/DIR/KPTS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi. Diperbarui melalui Surat Keputusan Direksi No. 005/B/DIR-KPTS/I/2024 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Januari 2024. The Board of Directors Decree No. 037/DIR/KPTS/XII/2022 dated 12 December 2022 regarding Nomination and Remuneration Committee. Amended through the Board of Directors Decree No. 005/B/DIR-KPTS/I/2024 regarding Nomination and Remuneration Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 5 January 2024.	2022-2023; 2024
Andre Mirza Hartawan	Anggota, Komisaris Member, Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 037/DIR/KPTS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi. Diperbarui melalui Surat Keputusan Direksi No. 005/B/DIR-KPTS/I/2024 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Januari 2024. The Board of Directors Decree No. 037/DIR/KPTS/XII/2022 dated 12 December 2022 regarding Nomination and Remuneration Committee. Amended through the Board of Directors Decree No. 005/B/DIR-KPTS/I/2024 regarding Nomination and Remuneration Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 5 January 2024.	2022-2023; 2024
Riksa Prakoso	Anggota, Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia Member, Executive Officer responsible for human resource function	Surat Keputusan Direksi No. 037/DIR/KPTS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi. Diperbarui melalui Surat Keputusan Direksi No. 005/B/DIR-KPTS/I/2024 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Januari 2024. The Board of Directors Decree No. 037/DIR/KPTS/XII/2022 dated 12 December 2022 regarding Nomination and Remuneration Committee. Amended through the Board of Directors Decree No. 005/B/DIR-KPTS/I/2024 regarding Nomination and Remuneration Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 5 January 2024.	2022-2023; 2024



PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berikut adalah profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Muamalat Indonesia.



Amin Said Husni

Ketua
Chairman

Profil lengkap disajikan pada bab “Profil Perusahaan.”

PROFILE OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Following is profile of members of the Nomination and Remuneration Committee of Bank Muamalat Indonesia.

Complete profile is presented in the chapter on “Company Profile.”



Andre Mirza Hartawan

Anggota
Member

Profil lengkap disajikan pada bab “Profil Perusahaan.”

Complete profile is presented in the chapter on “Company Profile.”



Riksa Prakoso

Anggota
Member

Profil lengkap disajikan pada bab “Profil Perusahaan.”

Complete profile is presented in the chapter on “Company Profile.”



INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak independen dituntut untuk dapat bekerja secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penjelasan independensi anggota komite diurai melalui tabel di bawah ini.

INDEPENDENCY OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Members of the Nomination and Remuneration Committee coming from independent parties are demanded to be able to work professionally and independently without the intervention of any party that is not in accordance with the laws and regulation in carrying out their duties and functions. Explanation on the independency of members of the committee is described in the table below.

Aspek Independensi Independence Aspect	Amin Said Husni	Andre Mirza Hartawan	Riksa Prakoso
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Having no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Having no management relationship in the Company, subsidiaries, or affiliated companies	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Having no family relations with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Nomination, Remuneration Committee and GCG Committee	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as a manager of political parties, officials, and government	✓	✓	✓

Dalam hal pembuktian independensi, anggota Komite Audit BMI tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

In the context of proving independency, members of BMI Audit Committee do not have family relationship nor financial relationship, with directly or indirectly, related to the Bank's business activities.

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Kepengurusan Management Relationship	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Amin Said Husni	Ketua Chairman	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Andre Mirza Hartawan	Anggota Member	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Riksa Prakoso	Anggota Member	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	



RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Kebijakan Rapat

Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Muamalat wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat dimaksud dinyatakan sah apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Hal tersebut sesuai dengan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Hasil rapat Komite harus dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion). Risalah tersebut harus ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat

Hingga akhir tahun buku 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi menggelar rapat sebanyak 8 (delapan) kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN

Meeting Frequency and Level of Attendance

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran (%) Percentage of Attendance (%)
1	Amin Said Husni	Ketua Chairman	8	8	100
2	Andre Mirza Hartawan	Ketua Chairman	8	8	100
3	Riksa Prakoso	Anggota Member	8	8	100

MEETING OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Meeting Policy

The Nomination and Remuneration Committee of Bank Muamalat is required to hold at least 1 (one) meeting within 3 (three) months. The concerned meeting is only legitimate if attended by the majority members of the Nomination and Remuneration Committee and one of the attending majority members of the Nomination and Remuneration Committee is the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee. This is in accordance with POJK No. 17 of Yr 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks as well as with the Charter of the Nomination and Remuneration Committee.

Results of the Committee meetings are recorded in the minutes of meetings, including if there occurred dissenting opinions. The minutes of meetings are signed by all members of the Nomination and Remuneration Committee who attended and submitted to the Board of Commissioners.

Meeting Implementation

Until the end of 2023 financial year, Nomination and Remuneration Committee held 8 (eight) meetings with the following details.



AGENDA RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Meeting Agenda of the Nomination and Remuneration Committee

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
1	13 Januari 2023 January 13, 2023	<i>Confidential</i> Confidential	- Amin Said Husni - Suwarda^{*)} - Andre Mirza Hartawan - Riksa Prakoso
2	24 Februari 2023 February 24, 2023	1. <i>Update Organisasi baru</i> 2. <i>Update Director dan Officer Liabilities</i> 1. Update on New Organization 2. Update on Directors and Officers Liabilities	- Amin Said Husni - Suwarda^{*)} - Andre Mirza Hartawan - Riksa Prakoso
3	10 Maret 2023 March 10, 2023	Presentasi 2 Calon Kandidat SEVP Retail Banking Presentation of 2 Prospective Candidates for Retail Banking SEVP	- Amin Said Husni - Suwarda^{*)} - Andre Mirza Hartawan - Riksa Prakoso
4	5 Mei 2023 May 5, 2023	<i>Confidential</i> Confidential	- Amin Said Husni - Andre Mirza Hartawan - Riksa Prakoso
5	14 Juli 2023 July 14, 2023	Persetujuan Grade dan Remunerasi Kandidat Head of IAT Approval on Grade and Remuneration for Candidate Head of IAT	- Amin Said Husni - Andre Mirza Hartawan - Riksa Prakoso
6	13 Oktober 2023 October 13, 2023	1. Penetapan Calon Kandidat Anggota Komite Pemantau Risiko 2. Pembahasan Remunerasi 1. Determining Prospective Candidate Members of Risk Monitorin Committee 2. Discussion on Remuneration	- Amin Said Husni - Andre Mirza Hartawan - Riksa Prakoso
7	21 November 2023 November 21, 2023	Interview Kandidat Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Interview Member Candidates of Integrated Governance Committee	- Amin Said Husni - Andre Mirza Hartawan - Riksa Prakoso
8	20 December 2023 December 20, 2023	Interview Kandidat Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Interview Member Candidates of Audit Committee and Risk Monitoring Committee	- Amin Said Husni - Andre Mirza Hartawan - Riksa Prakoso

*) Tidak menjabat sejak Mei 2023.
No longer serving effective since May 2023.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Bank senantiasa mendorong Komite Nominasi dan Remunerasi untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan pada tahun 2023. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan dalam bab “Profil Perusahaan”.

COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Bank continuously encouraged the Nomination and Remuneration Committee to develop competence through trainings in 2023. Complete information regarding this matter is presented in the chapter “Company Profile”.

SERTIFIKASI PROFESI

Certification of Profession

No.	Sertifikasi Profesi Certification of Profession	Nama Name	Lembaga Penerbit Issuing Institution
1	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	1. Amin Said Husni 2. Andre Mirza Hartawan 3. Riksa Prakoso	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Agency for Certification of Profession (BNSP)
2	Sertifikasi Human Resources Manager's Certification Human Resources Manager Certification	Riksa Prakoso	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Agency for Certification of Profession (BNSP)



PELAKSANAAN TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pada tahun 2023, sebagaimana tugas dan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi yang tercantum dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Muamalat, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan kegiatan komite sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi/usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Bank Muamalat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Usulan tersebut diperoleh melalui serangkaian proses yang dilakukan Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi penyusunan kebijakan, kriteria, dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam rangka proses nominasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan rencana strategis Perseroan.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisis dan mengidentifikasi data bakal calon Direksi, calon Dewan Komisaris, calon Dewan Pengawas Syariah serta calon pihak independen anggota komite Dewan Komisaris yang memenuhi syarat.
3. Selain sistem nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank Muamalat berupa sistem penggajian/honorarium, fasilitas/tunjangan, dan tantiem untuk tahun 2023.
4. Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

During the year 2023, as the duties and function of the Nomination and Remuneration Committee stated in the Charter of the Nomination and Remuneration Committee of Bank kMuamalat, the Nomination and Remuneration Committee implemented the following tasks:

1. Provided recommendations/ suggestions on candidates who fulfilled the requirements as members of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors of Bank Muamalat to the Board of Commissioners for further presentation to the GMS. The recommendations were attained through a series of processes conducted by the Remuneration and Nomination Committee which covered the establishment of policies, criteria, and qualifications needed in the nomination process of member candidates of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors that are in line with the Company's strategic plans.
2. The Nomination and Remuneration Committee assisted the Board of Commissioners to obtain and analyze and identify data of prospective candidates for the Board of Directors, candidates for the Board of Commissioners, candidates for the Sharia Supervisory Board as well as candidates for independent members of the Board of Commissioners committees who fulfill he requirements.
3. Aside from the nomination system, the Remuneration and Nomination Committee also assisted the Board of Commissioners in proposing the appropriate remuneration system for the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board and the Board of commissioners of Bank Muamalat in the form of salary/honorarium system, facilities/allowances and bonuses for the year 2023.
4. Set up the mechanism and assessed the performance of the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Commissioners.



KEBIJAKAN MENGENAI SUKSESI DIREKSI

Bank Muamalat Indonesia telah memiliki kebijakan mengenai suksesi manajemen, termasuk Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang mengacu pada Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Komite yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi di BMI memiliki tugas untuk menyusun suatu sistem nominasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan menjadi bagian dari Kebijakan *Good Corporate Governance* dari Perseroan serta menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi dan nominasi anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi.

Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota manajemen Bank. Kebijakan suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang Bank.

Kebijakan suksesi manajemen diimplementasikan melalui beragam program, salah satunya ialah *Talent Management* dan *Succession Plan*. Fungsi dari *talent management* adalah mempersiapkan *pool of talent* dari Bank sebagai upaya penyediaan dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bank. Suksesi diterapkan dalam rangka menyiapkan kader-kader terbaik dari *pool of talent* yang siap menduduki posisi-posisi kritis, termasuk posisi pejabat eksekutif Bank.

Bank telah memiliki *database pool of talent* dan *successor* berdasarkan proses identifikasi *talent* dan suksesor dengan menggunakan metodologi yang disiapkan oleh Bank. Proses validasi dan kalibrasi dilakukan atas *talent* dan suksesor, baik di tingkat Direktorat maupun di tingkat Direksi untuk posisi-posisi strategis yaitu posisi satu level di bawah Direksi dan Region Head. *Database* ini diperbarui setiap tahun dan menjadi referensi Manajemen dalam melakukan rotasi maupun promosi karyawan serta untuk kebutuhan nominasi jabatan strategis pada Bank Muamalat Indonesia.

POLICIES ON THE SUCCESSION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Bank Muamalat Indonesia has retained the policies on management succession, including for the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors that refer to OJK Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks and OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 regarding Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies. The committee that carries out the functions of nomination and remuneration in BMI has the duties to establish a nomination system for members of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company that will be part of the Company's Good Corporate Governance Policy as well as the guidelines for the Board of Commissioners and the GMS to determine the remuneration and nomination of members of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors.

One of the policies that support the nomination process as referred to, is the succession policy for members of the Bank's management. The succession policy is intended to maintain continuity of the regeneration process or leadership cadre formation in the company in the context of maintaining the Bank's business continuity and long-term objectives.

The management succession policy is implemented through various programs, among which is the Talent Management and Succession Plan. The function of the talent management is to prepare the pool of talents from the Bank as an effort to supply and strengthen the Human Resources in the Bank. Succession is applied in the effort to prepare the best cadres from the pool of talents who are prepared to take on critical positions, including the position of the Bank's executive officers.

The Bank has the database pool of talents and successors based on talent and successor identification process by use of the methodology prepared by the Bank. The validation and calibration processes are carried out on the talents and successors, both at the Directorate as well as the Board of Directors levels for strategic positions, namely the position at one level below the Board of Directors and Regional Head. This database is updated yearly and serves as reference for the Management in conducting rotation as well as promotion of employees and for nomination purposes of strategic positions at Bank Muamalat Indonesia.



Komite Pemantau Risiko

Risk Oversight Committee

Pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko serta pelaksanaannya agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Komite juga melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko.

The establishment of Risk Monitoring Committee is intended to assist the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities to supervise and provide advices to the Board of Directors in order to attain adequate confidence that the Bank's risk management implementation continues to meet the elements of adequacy of risk management procedures and methodology as well as its implementation in accordance with the principle of prudence. The committee also evaluates the implementation of duties of the Risk Monitoring Committee and Risk Management Work Unit.

DASAR HUKUM

Dalam membentuk Komite Pemantau Risiko, Bank Muamalat Indonesia mengacu pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
2. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

LEGAL BASIS

In establishing the Risk Oversight Committee, Bank Muamalat Indonesia refers to the following laws and regulations:

1. OJK Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks.
2. Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009, dated December 7, 2009, concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
3. Bank Indonesia Circular No. 12/13/DPbS dated April 30, 2010, concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
4. Bank's Articles of Association regarding the duties and authorities of the Board of Commissioners.

PEDOMAN KERJA/PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat Indonesia telah memiliki piagam atau pedoman kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Piagam tersebut mengatur struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, masa tugas, tugas dan tanggung jawab, wewenang, tata cara dan prosedur penyelenggaraan rapat serta pelaporan kepada Dewan Komisaris.

Piagam Komite Pemantau Risiko dan susunan keanggotaan komite telah diperbarui sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER

Bank Muamalat Indonesia Risk Monitoring Committee has a charter or work guidelines in carrying out its duties and functions. The charter regulates the structure and membership, membership requirements, term of office, duties and responsibilities, authority, procedures and procedures for holding meetings and reporting to the Board of Commissioners.

The Risk Monitoring Committee Charter and the composition of the committee membership have been updated in accordance with the provisions of OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and will continue to be updated in accordance with the development of applicable regulations and the current conditions of the Bank.



KRITERIA ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Kriteria keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah diatur oleh Bank, yang juga telah dituangkan ke dalam Piagam Komite Pemantau Risiko Kriteria tersebut di antaranya:

1. Komite pemantau risiko wajib beranggotakan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang manajemen risiko; dan
 - c. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian perbankan syariah.
2. 1 (satu) orang anggota dewan pengawas syariah dapat menjadi anggota komite pemantau risiko.
3. Komite pemantau risiko diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota
4. Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b dan huruf c dibuktikan dengan:
 - a. wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi; dan
 - b. memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.
5. Memiliki integritas, reputasi keuangan, akhlak dan moral yang baik.
6. Memiliki latar belakang pendidikan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang keuangan dan perbankan.
7. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
8. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko secara umum.
9. Memahami peraturan perbankan dan peraturan lain terkait perbankan.
10. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
11. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa nonassurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank Muamalat Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
12. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank Muamalat Indonesia.
13. Tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terhadap Bank Muamalat Indonesia.
14. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat Indonesia.

CRITERIA OF MEMBERS OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The membership criteria of the Risk Monitoring Committee is regulated by the Bank, and is contained in the Charter of the Risk Monitoring Committee, among others, as follows:

1. Risk Monitoring Committee's membership is required to consist at least:
 - a. 1 (one) member of Independent Commissioner;
 - b. 1 (one) member of Independent Party with the expertise in risk management; and
 - c. 1 (one) member representing an Independent Party with the expertise in sharia banking.
2. 1 (one) member of the sharia supervisory board may serve as member of risk monitoring committee.
3. Risk Monitoring Committee is chaired by an Independent Commissioner concurrently as member.
4. Expertise of the Independent Party as mentioned in point (1) letter b and letter c is proven in the following manner:
 - a. must have risk management certification as also applies to the Board of Directors; and
 - b. having competency certification that supports the implementation of function and responsibilities of the committee.
5. Having good integrity, financial, attitude and morality.
6. Having adequate educational background, capability, knowledge and experience in the fields of finance and banking.
7. Capable of cooperating and having the ability to communicate appropriately well and provide sufficient time to carry out duties.
8. Having adequate knowledge on Good Corporate Governance and risk management in general.
9. Understand banking regulations and other regulations related to banking.
10. Willing to continuously develop competency through education and training.
11. Not a person from Public Accounting Firm, Legal Consultant Office, Public Appraisal Services Firm or other parties that provide assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to Bank Muamalat Indonesia within the last 6 (six) months.
12. Having no share directly or indirectly at Bank Muamalat Indonesia.
13. Not having personal interests that may cause conflict of interest with Bank Muamalat Indonesia.
14. Not having affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Controlling Shareholders of Bank Muamalat Indonesia.



15. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia.
16. Bukan merupakan pihak yang berasal dari karyawan Bank Muamalat Indonesia.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko ialah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen.
2. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko.
4. Melakukan evaluasi atas langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko.
5. Melakukan evaluasi atas permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan.
6. Melakukan evaluasi atas struktur organisasi manajemen risiko.
7. Melakukan evaluasi atas laporan profil risiko dan laporan Bank baik internal maupun eksternal agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Memastikan bahwa unit kerja manajemen risiko memenuhi kriteria independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

WEWENANG KOMITE PEMANTAU RISIKO

Wewenang yang dimiliki oleh Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat Indonesia tertuang pada Piagam Komite Pemantau Risiko, antara lain:

1. Diperbolehkan mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Bank yang diperlukan.
2. Diperbolehkan berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.

15. Not having business relationship directly or indirectly related to business activities of Bank Muamalat Indonesia.
16. Not a party that originates from the employees of Bank Muamalat Indonesia.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

Duties and responsibilities of the Risk Oversight Committee are as follows:

1. Evaluating the risk management policies and strategies prepared by the Management.
2. Evaluating the conformity of the risk management policy with the implementation.
3. Evaluating duties implementation of the Risk Management Committee and Risk Management Unit.
4. Evaluating the measures taken by the Board of Directors to comply with the Financial Services Authority and other applicable laws and regulations in implementing prudential principles, particularly those relating to risk management.
5. Evaluating the requests from the Board of Directors proposal relating to transactions or business activities that exceed the authority of the Board of Directors to be used by the Board of Commissioners as a basis for decision making.
6. Evaluating the risk management organizational structure.
7. Evaluating the risk profile report and the Bank's report, both internal and external, to be in line with the applicable regulations.
8. Ensuring the risk management unit meets the independence criteria in performing duties and responsibilities.

THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE AUTHORITIES

The Risk Oversight Committee of Bank Muamalat Indonesia has authorities as contained in the Risk Monitoring Committee Charter, among others:

1. Access to bank documents, data, and information about employees, funds, assets, and company resources is needed.
2. Being able to communicate directly with the employees, including the Board of Directors as well as parties performing the risk management functions and other parties related to the duties and responsibilities of the Risk Oversight Committee.



3. Diperbolehkan melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Pemantau Risiko yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3. Being able to involve independent parties outside the Risk Oversight Committee members to assist in running duties.
4. Performing other authorities assigned by the Board of Commissioners

KETENTUAN MASA JABATAN

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

TERM OF OFFICE

The term of office for the Risk Oversight Committee members must not be longer than the term of office of the Board of Commissioners. Committee members can be re-elected for only one term.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Berikut komposisi dan dasar hukum pengangkatan Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat Indonesia per 31 Desember 2023:

COMPOSITION AND BASIS OF APPOINTMENT OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

Following is the composition and legal basis of appointment of the Risk Oversight Committee of Bank Muamalat Indonesia as of 31 December 2023:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Sartono	Ketua, Komisaris Independen Chairman, Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 November 2023. Board of Directors Decree No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 regarding Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 1 November 2023.	2023-2024
Andre Mirza Hartawan	Anggota, Komisaris Member, Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 November 2023. Board of Directors Decree No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 regarding Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 1 November 2023.	2023-2024
Amin Said Husni	Anggota, Komisaris Independen Member, Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 November 2023. Board of Directors Decree No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 regarding Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 1 November 2023.	2023-2024
Dedi Sopyan	Anggota, Pihak Independen Ahli di Bidang Manajemen Risiko Member, Independent Party, Expert in Risk Management	Surat Keputusan Direksi No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 November 2023. Board of Directors Decree No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 regarding Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 1 November 2023.	2023-2024
Ani Murdiati	Anggota, Pihak Independen Ahli di Bidang Perbankan Syariah Member, Independent Party, Expert in Sharia Banking	Surat Keputusan Direksi No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 November 2023. Board of Directors Decree No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 regarding Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 1 November 2023.	2023-2024



PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO

PROFILE OF THE RISK MONITORING COMMITTEE



Sartono

Ketua
Chairman

Profil lengkap disajikan pada bab “Profil Perusahaan.”

Complete profile is presented in the chapter on “Company Profile.”



Andre Mirza Hartawan

Anggota
Member

Profil lengkap disajikan pada bab “Profil Perusahaan.”

Complete profile is presented in the chapter on “Company Profile.”



Amin Said Husni

Anggota
Member

Profil lengkap disajikan pada bab “Profil Perusahaan.”

Complete profile is presented in the chapter on “Company Profile.”



Dedi Sopyan

Anggota
Member

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	
Usia Age	44 tahun pada Tahun Buku 2023	44 years as of Financial Year 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 November 2023.	Appointed as Member of Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk based on Board of Directors Decree No. No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 regarding Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 1 November 2023.
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Doktor Manajemen Bisnis – Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (2016-2023) - Magister Manajemen Strategis dan Manajemen Keuangan Universitas Gajah Mada (2013) - Sarjana Teknik Industri Universitas Indonesia (2003)	- Doctorate (Doktor) in Business Management – Business School of Institut Pertanian (Agriculture) Bogor (2016-2023) - Master (Magister) in Strategic Management and Financial Management at Universitas Gajah Mada (2013) - Bachelor (Sarjana) in Industrial Engineering at Universitas Indonesia (2003)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Kepala Divisi Audit dan Kepatuhan PT Kliring Berjangka Indonesia.	Head of Audit and Compliance Division of PT Kliring Berjangka Indonesia.
Pengalaman Kerja Work Experience	- Anggota Komite Audit di PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (2017-2023) - Sekretaris Dewan Pengawas BPKH (Jan-Dec 2018) - Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Pengawas di BPJS Kesehatan (2014-2017) - Anggota Komite Audit-Dewan Komisaris di PT Bio Farma (Persero) (2013-2014) - Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bio Farma (Persero) (2009-2013)	- Member of Audit Committee at PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (2017-2023) - Secretary to BPKH Supervisory Board (Jan-Dec 2018) - Member of Risk Monitoring Committee of the Supervisory Board at BPJS Health (2014-2017) - Member of Audit Committee-Bboard of Commissioners at PT Bio Farma (Persero) (2013-2014) - Member of Risk Monitoring Committee at PT Bio Farma (Persero) (2009-2013)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali.	No affiliation in financial or family relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders.
Kualifikasi Qualification	Pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang manajemen risiko dan audit.	Independent Party with the expertise in the fields of risk management and audit.



Ani Murdiati

Anggota
Member

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	
Usia Age	61 tahun pada Tahun Buku 2023	61 years as of Financial Year 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 November 2023.	Appointed as Member of Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk based on Board of Directors Decree No. No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 regarding Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 1 November 2023.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana biologi Universitas Gadjah Mada (UGM) (1988)	Bachelor (Sarjana) in iology at Universita Gadjah Mada (UGM) (1988)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Chairman Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (LSP-KS) (2017-sekarang)	Chairman of the Institute of Sharia Finance Certification of Profession (LPS-KS) (2017-present)
Pengalaman Kerja Work Experience	- Chairman Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (LSP-KS) (2017-sekarang) - Direktur Utama PT Bank Victoria Syariah (2013-2015) - Direktur Ritel Bank Mega Syariah (2007-2012) - Direktur Bisnis Bank Mega Syariah (2004-2007) - President Director PT Bank Victoria Syariah (2013-2015)	- Chairman of the Institute of Sharia Finance Certification of Profession (LSP-KS) (2017-present) - President Director of PT Bank Victoria Syariah (2013-2015) - Director of Retail of Bank Mega Syariah (2007-2012) - Director of Business of Bank Mega Syariah (2004-2007) - President Director of PT Bank Victoria Syariah (2013-2015)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali.	No affiliation in financial or family relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders.
Kualifikasi Qualification	Pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang manajemen risiko dan perbankan syariah.	Independent Party with the expertise in the fields of risk management and sharia banking.

INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat Indonesia dituntut untuk dapat bekerja secara profesional dan independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Hal itu memiliki arti pelaksanaan tugasnya tanpa campur tangan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

INDEPENDENCE OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The Risk Oversight Committee Members who are independent parties are required to be professional and independent in carrying out functions and duties. It means, carrying out their duties without interference from any party that is not in accordance with the laws and regulations.



Aspek Independensi Independence Aspect	Sartono	Andre Mirza Hartawan	Amin Said Husni	Dedi Sopyan	Ani Murdiati
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Having no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Having no management relationship in the Company, subsidiaries, or affiliated companies	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Having no family relations with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Nomination, Remuneration Committee and GCG Committee	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as a manager of political parties, officials, and government	✓	✓	✓	✓	✓

Dalam hal pembuktian independensi, anggota Komite Pemantau Risiko Bank tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

In terms of proving independence, the Bank's Risk Oversight Committee members do not have family or financial relations, either directly or indirectly, relating to the Bank's business activities.

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Kepengurusan Management Relationship	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Sartono	Ketua Chairman		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Andre Mirza Hartawan	Anggota Member		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Amin Said Husni	Anggota Member		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Dedi Sopyan	Anggota Member		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ani Murdiati	Anggota Member		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Kebijakan Rapat

Rapat Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat Indonesia wajib diselenggarakan sedikitnya sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Sebagaimana Piagam Komite Pemantau Risiko, rapat dapat dinyatakan sah jika dihadiri mayoritas anggota komite.

Hasil rapat Komite Pemantau Risiko wajib dituangkan ke dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

MEETINGS OF RISK OVERSIGHT COMMITTEE

Meeting Policy

Meetings of the Risk Monitoring Committee of Bank Muamalat Indonesia must be held at least 1 (one) time in 1 (one) month. As stipulated in the Charter of the Risk Monitoring Committee, a meeting is stated as legitimate if attended by the majority members of the committee.

The meeting resolution of the Risk Oversight Committee must be written in the minutes of the meeting and well documented, including any dissenting opinions, which are signed by all members of the Risk Oversight Committee who are present and submitted to the Board of Commissioners.



Pelaksanaan Rapat

Hingga akhir tahun buku 2023, Komite Pemantau Risiko menggelar rapat sebanyak 7 (tujuh) kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

Meeting Implementation

Until the end of 2023 financial year, Risk Oversight Committee held 7 (seven) meetings with the following details:

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN

Meeting Frequency and Level of Attendance

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran (%) Percentage of Attendance (%)
1	Sartono	Ketua Chairman	7	7	100
2	Andre Mirza Hartawan	Ketua Chairman	7	7	100
3	Amin Said Husni	Anggota Member	7	6	86
4	Dedi Sopyan	Anggota Member	7	6	86
5	Ani Murdiati	Anggota Member	2	2	100

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Meeting Agenda of the Risk Oversight Committee

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
1	13 Januari 2023 January 13, 2023	- Pembahasan Profil Risiko per September 2022 - Pembahasan Piagam <i>Risk Oversight Committee</i> (ROC) - Discussion on Risk Profile as of September 2022 - Discussion on ROC Charter	- Suwarda^{*)} - Andre Mirza Hartawan - Sartono - Amin Said Husni - Dedi Sopyan
2	24 Februari 2023 February 24, 2023	- Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) per Desember 2023 - RBBR 2023 dan Realisasi RBB 2022 - Informasi <i>Pipeline</i> dan Pembiayaan yg dicairkan sampai Februari 2023 - Kajian atas Pemberian Kewenangan Memutus Pembiayaan Kepada Region/Cabang - Bank's Soundness Level (RBBR) as of December 2023 2023 RBBR and Realization of 2022 RBB - Pipeline Information and Financing disbursed up until February 2023 - Review of Provision of Authority to Excise Financing to Regional Office/Branch	- Suwarda^{*)} - Andre Mirza Hartawan - Sartono - Amin Said Husni - Dedi Sopyan
3	10 Maret 2023 March 10, 2023	- Potensi Nasabah Bermasalah dan Informasi Pipeline Calon Nasabah - Hasil Kajian atas Kompetensi RH dan BM - Kebijakan Umum Pembiayaan - Potential Problematic Customers and Pipeline Information on Prospective Customers - Review Results of RH and BM Competency - General Financing Policy	- Suwarda^{*)} - Andre Mirza Hartawan - Sartono - Amin Said Husni - Dedi Sopyan
4	25 Agustus 2023 August 25, 2023	- Tindak Lanjut Rapat ROC Bulan Maret 2023 - Laporan Tingkat Kesehatan Bank per Juni 2023 - Risiko Konsentrasi dan Kinerja Pembiayaan 25 Debitur Inti - Follow-Up on ROC Meeting of March 2023 - Report on the Bank's Level of Soundness as of June 2023 - Concentration Risk and Financing Performance of 25 Core Debtors - Portfolio Analysis of Good Bank and Bad Bank Financing	- Andre Mirza Hartawan - Sartono - Amin Said Husni - Dedi Sopyan
5	6 Oktober 2023 October 6, 2023	- Kinerja Portfolio Pembiayaan sampai Agustus 2023 - Nasabah EB: NTB dan Pipeline sampai Desember 2023 - Performance of Financing Portfolio until August 2023 - EB Customers: NTB and Pipeline until December 2023	- Andre Mirza Hartawan - Sartono - Amin Said Husni - Dedi Sopyan



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
6	16 November 2023 November 16, 2023	Pembahasan RBB 2024 Discussion on 2024 RBB	• Andre Mirza Hartawan • Sartono
7	15 December 2023 December 15, 2023	1. Laporan Hasil Rapat ALCO 2. Perkembangan Realisasi dan Rencana Dropping Pembiayaan Segmen Enterprise Banking 3. Perkembangan Penyelesaian Bad Bank dan Rencana Sampai Desember 2023 1. Report on ALCO Meeting Results 2. Progress of Realization and Plans on Financing Dropping for Enterprise Banking Segment 3. Progress on Resolving Bad Bank and Plans Until December 2023	• Andre Mirza Hartawan • Sartono • Amin Said Husni • Dedi Sopyan • Ani Murdiati

*) Tidak menjabat sejak Mei 2023.
No longer serving effective since May 2023.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Bank senantiasa mendorong Komite Pemantau Risiko untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan pada tahun 2023. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan dalam bab "Profil Perusahaan".

COMPETENCY DEVELOPMENT RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The Bank continuously encouraged the Risk Oversight Committee to develop competency through training in 2023. Complete information regarding competency development is available in the chapter "Company Profile."

SERTIFIKASI PROFESI

Certification of Profession

No.	Sertifikasi Profesi Certification of Profession	Nama Name	Lembaga Penerbit Issuing Institution
1	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	1. Sartono 2. Andre Mirza Hartawan 3. Amin Said Husni 4. Dedi Sopyan 5. Ani Murdiati (Asesor)	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Agency for Certification of Profession (BNSP)
2	Sertifikasi Internal Auditor Internal Auditor Certification	Dedi Sopyan	Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor Qualified Internal Auditor Certification Board
3	Sertifikasi Profesional Pengawas Tata Kelola Bersertifikasi Certified Governance Professional Supervisor Certification	Dedi Sopyan	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan PPA&K National Certification of Profession Agency (BNSP) and PPA&K

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dengan senantiasa menerapkan prinsip GCG sesuai peraturan yang berlaku. Adapun aktivitas Komite Pemantau Risiko selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 7 kali Rapat Komite Pemantau Risiko, termasuk menyusun dan mendokumentasikan Risalah Rapat.
2. Menelaah Usulan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait, Usulan Aksi Korporasi, Tingkat Kesehatan Bank (RBBR), dan Rencana Bisnis Bank (RBB) beserta revisinya, Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB), serta Analisis Portfolio Pembiayaan Good Bank dan Bad Bank.
3. Seluruh anggota Komite telah mengikuti minimal 1 (satu) kali kegiatan pengembangan kompetensi terkait dengan Perbankan/Manajemen Risiko.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The Risk Oversight Committee has carried out its duties and function as regulated in the Risk Oversight Committee Charter by continuously implementing GCG principles according to applicable regulations. Activities of Risk Monitoring Committee during the year 2023 are as follows:

1. Held 7 Risk Oversight Committee meetings, including on the preparation and documentation of Minutes of Meetings.
2. Reviewed the Proposed Provision of Funds to Related Parties, Proposed Corporate Actions, RBBR, and the Bank Business Plan (RBB) and its revisions, Proposed Sustainable Financial Action Plan (RKAB), as well as Analysis of Good Bank and Bad Bank Financing Portfolio.
3. All Committee members have joined competency development activities related to Banking/Risk Management at least 1 (one) time.



Komite Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Committee

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Tata Kelola Perusahaan untuk membantu pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Dewan Komisaris terhadap penyelenggaraan Tata Kelola yang baik dalam setiap aktivitas usaha Bank pada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi.

The Board of Commissioners established the Corporate Governance Committee to assist in the implementation of supervision and evaluation on the implementation of Governance in each of the Bank's business activities at all ranks or levels of the organization.

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Tata Kelola Perusahaan oleh Bank mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
2. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPBS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

LEGAL BASIS

The Bank established Corporate Governance Committee by referring to the following laws and regulations:

1. OJK Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks
2. Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
3. Bank Indonesia Circular No. 12/13/DPBS dated April 30, 2010 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
4. The Bank's Articles of Association regarding the duties and authorities of the Board of Commissioners.

PEDOMAN KERJA/PIAGAM KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat Indonesia telah memiliki pedoman kerja atau piagam sebagai panduan dalam menjalankan perannya, yang mengatur prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, masa tugas, tugas dan tanggung jawab, wewenang, tata cara dan prosedur penyelenggaraan rapat serta pelaporan kepada Dewan Komisaris. Piagam dan susunan keanggotaan komite telah diperbarui sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER

The Bank Muamalat Indonesia Corporate Governance Committee has a working guideline or charter as a guide in carrying out its role, which regulates the principles of Good Corporate Governance, structure and membership, membership requirements, term of office, duties and responsibilities, authority, procedures and procedures for holding meetings and reporting to the Board of Commissioners. The charter and membership composition of the committee have been updated in accordance with the provisions of OJK Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks and will continue to be updated in accordance with the development of applicable regulations and the current conditions of the Bank.



KRITERIA ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kriteria keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan telah diatur oleh Bank, yang juga telah dituangkan ke dalam Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan Kriteria tersebut di antaranya:

1. Wajib berintegritas dan memiliki reputasi keuangan yang baik.
2. Wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
3. Wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Bank.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
7. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank Muamalat Indonesia.
8. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat Indonesia.
9. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Perusahaan yang telah diatur oleh Bank:

1. Melakukan evaluasi atas struktur, kerangka tata kelola dan kebijakan *Good Corporate Governance* Bank Muamalat Indonesia.
2. Memastikan pelaksanaan kebijakan *Good Corporate Governance* dalam kegiatan Bank Muamalat Indonesia.
3. Melakukan kajian dan menilai prinsip-prinsip pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Muamalat Indonesia secara berkala dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris kegiatan Bank yang tidak sesuai dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

MEMBERSHIP CRITERIA FOR CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

The Bank regulates membership criteria for Corporate Governance Committee. The regulation is stated in the Corporate Governance Committee Charter, including:

1. Required to have integrity and a good financial reputation.
2. Required to have the ability, knowledge, and experience based on the field of work and being able to communicate well.
3. Required to comply with the code of conduct established by the Bank.
4. Willing to improve competence continuously through education and training.
5. Not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Service Firm, or any other party that provides assurance, non-assurance services, appraisal services, and/or other consulting services to the Issuer or Public Company within 6 (six) times last month.
6. Unless for the Independent Commissioner, there is no one who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Bank's activities within the last 6 (six) months.
7. Having no direct or indirect shares in Bank Muamalat Indonesia.
8. Having no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or Major Shareholders of Bank Muamalat Indonesia.
9. Having no business relationship, directly or indirectly, related to the business activities of Bank Muamalat Indonesia.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The following are the duties and responsibilities of the Corporate Governance Committee regulated by the Bank.

1. Evaluating the structure, governance framework, and Good Corporate Governance policies of Bank Muamalat Indonesia.
2. Ensuring the implementation of Good Corporate Governance policies in the activities of Bank Muamalat Indonesia.
3. Reviewing and assessing the principles of Good Corporate Governance implementation of Bank Muamalat Indonesia on a regular basis and submitting recommendations for improvements to the Board of Commissioners.
4. Submitting reports to the Board of Commissioners on Bank activities that are not in line with the implementation of Good Corporate Governance.



5. Melakukan kajian atas laporan *Self-Assessment Good Corporate Governance* dan laporan tahunan *Good Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia guna memastikan transparansi dan akurasi laporan serta merekomendasikan perbaikan kepada Direksi.
6. Menyampaikan rekomendasi dalam rangka pemberian endorsement Dewan Komisaris atas laporan *Good Corporate Governance* dan kebijakan *Good Corporate Governance* Bank Muamalat Indonesia.
7. Menyusun dan memutakhirkan piagam Komite Tata Kelola secara berkala.
8. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank Muamalat Indonesia.

WEWENANG KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat Indonesia juga memiliki wewenang di samping tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan, yakni:

1. Diperbolehkan mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan.
2. Diperbolehkan berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Perusahaan.
3. Diperbolehkan melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Tata Kelola Perusahaan yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

KETENTUAN MASA JABATAN

Berikut beberapa ketentuan atas masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Perusahaan:

1. Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Perusahaan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berikut komposisi dan dasar hukum pengangkatan Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat Indonesia hingga 31 Desember 2023:

5. Reviewing the Good Corporate Governance Self-Assessment report and the Good Corporate Governance annual report published by Bank Muamalat Indonesia to ensure the transparency and accuracy of the report and recommend improvements to the Board of Directors.
6. Delivering recommendations in the context of endorsing the Board of Commissioners on the Good Corporate Governance reports and Good Corporate Governance policies of Bank Muamalat Indonesia.
7. Periodically preparing and updating the Governance Committee charter.
8. Maintaining the confidentiality of all documents, data, and information of Bank Muamalat Indonesia.

CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE AUTHORITIES

The Corporate Governance Committee of Bank Muamalat Indonesia also has the authority apart from its duties and responsibilities, as stipulated in the Corporate Governance Committee Charter, namely:

1. Being allowed to access the Bank documents, data and information regarding the Bank employees, funds, assets, and required resources.
2. Being allowed to communicate directly with employees, including the Board of Directors and other parties related to duties and responsibilities of Corporate Governance Committee.
3. Being allowed to involve independent parties other than the Corporate Governance Committee members who are needed to assist in running duties.
4. Exercising other authorities delegated by the Board of Commissioners.

TERM OF OFFICE

The following are provisions in the term of office for Corporate Governance Committee members:

1. The term of office for Corporate Governance Committee members shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners.
2. Committee members may be reelected only for one subsequent period.

COMPOSITION AND BASIS OF APPOINTMENT OF CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

Following are details on the composition and legal basis of appointment of the Corporate Governance Committee of Bank Muamalat Indonesia until 31 December 2023:



Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Sartono	Ketua, Komisaris Independen Chairman, Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 038/B/DIR-KPTS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 dan No. 001/B/DIR-KPTS/I/2023 tanggal 9 Januari 2023. Board of Directors Decree No. 038/B/DIR-KPTS/XII/2022 dated 12 December 2022 and No. 001/B/DIR-KPTS/I/2023 dated 9 January 2023.	2023-2023
Mardiasmo ^{*)}	Anggota, Komisaris Independen Member, Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 038/B/DIR-KPTS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 dan No. 001/B/DIR-KPTS/I/2023 tanggal 9 Januari 2023. Board of Directors Decree No. 038/B/DIR-KPTS/XII/2022 dated 12 December 2022 and No. 001/B/DIR-KPTS/I/2023 dated 9 January 2023.	2023-2023
Amin Said Husni	Anggota, Komisaris Independen Member, Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 038/B/DIR-KPTS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 dan No. 001/B/DIR-KPTS/I/2023 tanggal 9 Januari 2023. Board of Directors Decree No. 038/B/DIR-KPTS/XII/2022 dated 12 December 2022 and No. 001/B/DIR-KPTS/I/2023 dated 9 January 2023.	2023-2023
Andre Mirza Hartawan	Anggota, Komisaris Member, Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 038/B/DIR-KPTS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 dan No. 001/B/DIR-KPTS/I/2023 tanggal 9 Januari 2023. Board of Directors Decree No. 038/B/DIR-KPTS/XII/2022 dated 12 December 2022 and No. 001/B/DIR-KPTS/I/2023 dated 9 January 2023.	2023-2023
Dedi Sopyan	Anggota, Pihak Independen Member, Independent Party	Surat Keputusan Direksi No. 038/B/DIR-KPTS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 dan No. 001/B/DIR-KPTS/I/2023 tanggal 9 Januari 2023. Board of Directors Decree No. 038/B/DIR-KPTS/XII/2022 dated 12 December 2022 and No. 001/B/DIR-KPTS/I/2023 dated 9 January 2023.	2023-2023

*) Tidak menjabat sejak Desember 2023.
No longer serving effective since December 2023.

Komposisi dan dasar hukum pengangkatan Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat Indonesia yang telah dimutakhirkan pada tahun 2024:

Composition and legal basis of appointment of the Corporate Governance Committee of Bank Muamalat Indonesia, updated in 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Amin Said Husni	Ketua, Komisaris Independen Chairman, Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 006/B/DIR-KPTS/I/2024 tentang Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Januari 2024. Board of Directors Decree No. 006/B/DIR-KPTS/I/2024 regarding Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 5 January 2024.	2024
Andre Mirza Hartawan	Anggota, Komisaris Member, Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 006/B/DIR-KPTS/I/2024 tentang Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Januari 2024. Board of Directors Decree No. 006/B/DIR-KPTS/I/2024 regarding Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 5 January 2024.	2024
Dinan Supendi RAE	Anggota, Pihak Independen Member, Independent Party	Surat Keputusan Direksi No. 006/B/DIR-KPTS/I/2024 tentang Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Januari 2024. Board of Directors Decree No. 006/B/DIR-KPTS/I/2024 regarding Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 5 January 2024.	2024



PROFIL KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berikut adalah profil Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat Indonesia.



Amin Said Husni

Ketua
Chairman

Profil lengkap disajikan pada bab “Profil Perusahaan.”

PROFILE OF CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

Following is profile of the Corporate Governance Committee of Bank Muamalat Indonesia.

Complete profile is presented in the chapter on “Company Profile.”



Andre Mirza Hartawan

Anggota
Member

Profil lengkap disajikan pada bab “Profil Perusahaan.”

Complete profile is presented in the chapter on “Company Profile.”



Dinan Supendi RAE

Anggota
Member



Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	
Usia Age	59 tahun pada Tahun Buku 2023	59 years as of Financial Year 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi No. 006/B/DIR-KPTS/I/2024 tentang Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Januari 2024.	Board of Directors Decree No. 006/B/DIR-KPTS/I/2024 regarding Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 5 January 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Magister Hukum Bisnis Internasional, Sekolah Tinggi Hukum Bandung (2017) - Magister Manajemen, STMB Telkom Bandung (1996) - Sarjana Hukum Bisnis Internasional, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung (1990) - Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung (1988)	- Master (Magister) in International Business Law, Sekolah Tinggi Hukum (College of Law) Bandung (2017) - Master (Magister) in Management, STMB Telkom Bandung (1996) - Bachelor (Sarjana) of International Business Law, Faculty of Law of Universitas Padjadjaran Bandung (1990) - Bachelor (Sarjana) in International Relations, Faculty of Social Science and Political Science of Universitas Padjadjaran Bandung (1988)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Advisor/SVP di Bank BJB - Advisor/SEVP di PT Anugrah Sentra Persada - Permanent Lecturer bidang Business Law, Risk Management, dan Financial Institution di STIE Ekuitas	- Advisor/SVP at Bank BJB - Advisor/SEVP at PT Anugrah Sentra Persada - Permanent Lecturer on Business Law, Risk Management, and Financial Institution at STIE Ekuitas
Pengalaman Kerja Work Experience	- Advisor/SVP di Bank BJB (2022-sekarang) - Advisor/SEVP di PT Anugrah Sentra Persada (2021-sekarang) - Permanent Lecturer bidang Business Law, Risk Management, dan Financial Institution di STIE Ekuitas (2021-sekarang) - Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi di Bank BJB (2020-2022)	- Advisor/SVP at Bank BJB (2022-present) - Advisor/SEVP at PT Anugrah Sentra Persada (2021-present) - Permanent Lecturer on Business Law, Risk Management, and Financial Institution at STIE Ekuitas (2021-present) - Member of Integrated Governance committee at Bank BJB (2020-2022)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali.	No affiliation in Financial or family relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Major Shareholders and Controlling Shareholders.
Kualifikasi Qualification	Pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang hukum dan bisnis.	Independent party with expertise in the fields of law and business.

RAPAT KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kebijakan Rapat

Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat Indonesia diselenggarakan paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Tata Kelola Perusahaan, yang diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan. Hasil rapat Komite Tata Kelola Perusahaan wajib dituangkan ke dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Tata Kelola Perusahaan yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat

Sepanjang tahun buku 2023, Komite Tata Kelola Perusahaan menggelar rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut.

CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE MEETING

Meeting Policy

The Corporate Governance Committee of Bank Muamalat Indonesia holds meetings at least 1 (one) time in 6 (six) months. Meetings can be declared valid if attended by more than ½ (one-half) of the total members of the Corporate Governance Committee, which is regulated in the Corporate Governance Committee Charter. The results of the Corporate Governance Committee meeting must be written into the minutes of the meeting and well documented, including any dissenting opinions, which are signed by all members of the Corporate Governance Committee who are present and submitted to the Board of Commissioners.

Meeting Implementation

During the 2023 financial year, the Corporate Governance Committee held 3 (three) meetings with the following details.



FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN

Meeting Frequency and Level of Attendance

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran (%) Percentage of Attendance (%)
1	Sartono	Ketua Chairman	3	3	100
2	Mardiasmo ^{*)}	Anggota Member	3	3	100
3	Amin Said Husni	Ketua Chairman	3	3	100
4	Andre Mirza Hartawan	Anggota Member	3	3	100
5	Dedi Sopyan	Anggota Member	3	3	100

^{*)} Tidak menjabat sejak Desember 2023.
No longer serving effective since December 2023..

AGENDA RAPAT KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Meeting Agenda of the Corporate Governance Committee

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
1	13 Januari 2023 January 13, 2023	- SK Komite GCG - Charter Komite GCG - Usulan Sdr. Tika Arundina sebagai anggota Komite Pemantau Risiko - Update Proses SMAP atau ISO 370001 - Update Komite Level Direksi	- Sartono - Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Andre Mirza Hartawan - Dedi Sopyan
2	20 Januari 2023 January 20, 2023	- Update Notulen Rapat Komite GCG - Update Progress Charter Komite GCG - Update Komite Eksekutif Level Direksi - Update Penerapan Sistem Management Anti Penyuapan atau ISO 370001 - Update Progress PKK Dewan Komisaris dan Direksi	- Sartono - Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Andre Mirza Hartawan - Dedi Sopyan
3	6 Oktober 2023 October 6, 2023	- Informasi GRC Awards - Governance Structure Komite Level Komisaris - Update POJK 17: Penerapan Tata Kelola Bank Umum	- Sartono - Mardiasmo^{*)} - Amin Said Husni - Andre Mirza Hartawan - Dedi Sopyan

^{*)} Tidak menjabat sejak Desember 2023.
No longer serving effective since December 2023.



PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bank senantiasa mendorong Komite Tata Kelola Perusahaan untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan pada tahun 2023. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan dalam bab “Profil Perusahaan”.

SERTIFIKASI PROFESI

Certification of Profession

No.	Sertifikasi Profesi Certification of Profession	Nama Name	Lembaga Penerbit Issuing Institution
1	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	1. Sartono 2. Andre Mirza Hartawan 3. Amin Said Husni 4. Dedi Sopyan 5. Dinan Supandi RAE	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Agency for Certification of Profession (BNSP)
2	Sertifikasi Profesional Pengawas Tata Kelola Bersertifikasi Certified Governance Professional Supervisor Certification	Dedi Sopyan	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan PPA&K National Certification of Profession Agency (BNSP) and PPA&K

COMPETENCY DEVELOPMENT CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

The Bank continuously encouraged the Corporate Governance Committee to carry out competency development through trainings in 2023. Detailed information regarding this matter is available in the “Company Profile” chapter.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Untuk tahun 2023, Komite Tata Kelola menjalankan aktivitas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 3 (tiga) kali Rapat Komite Tata Kelola, termasuk menyusun Risalah Rapat.
2. Mengevaluasi kecukupan pelaksanaan kepatuhan dan manajemen risiko serta memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan tata kelola ke depannya.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

For the year 2023, the Governance Committee carried out the following activities:

1. Held 3 (three) Governance Committee meetings, including on preparation of the Minutes of Meetings.
2. Assessed the adequacy in the implementation of compliance and risk management as well as in providing improvement recommendations on future governance implementation.

Komite di Bawah Direksi

Committees under the Board of Directors

Pada tahun 2023, Direksi Bank Muamalat Indonesia membentuk 7 (tujuh) Komite Tingkat Direksi yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama dan/atau Direktur terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi
2. Komite Aset dan Liabilitas
3. Komite Manajemen Risiko
4. Komite Sumber Daya Manusia
5. Komite Kebijakan Pembiayaan
6. Komite Bisnis
7. Komite Pembiayaan

In the year 2023, the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia established 7 (seven) Committees of the Board of Directors Level, led directly by the President Director and/or relevant Director, namely as follows:

1. Information Technology Steering Committee
2. Asset and Liability Committee
3. Risk Management Committee
4. Human Capital Committee
5. Financing Policy Committee
6. Business Committee
7. Financing Committee



Komite Pengarah Teknologi Informasi

Information Technology Steering Committee

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat Indonesia merujuk pada ketentuan Pasal 62 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum serta Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat Indonesia.

LEGAL BASIS

The establishment of the Information Technology Steering Committee of Bank Muamalat Indonesia refers to the provisions in Article 62 paragraph 2 of Financial Services Authority Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks and Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2022 regarding Implementation of Information Technology by Commercial Banks as well as the Charter of the Information Technology Steering Committee of Bank Muamalat Indonesia.

PIAGAM KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Bank Muamalat telah memiliki Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi sebagai pedoman anggota komite dalam menjalankan perannya, yang mengatur mengenai tujuan pembentukan komite; tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite; struktur dan keanggotaan komite; rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan; masa tugas anggota komite dari Pihak Independen; mekanisme evaluasi kinerja; dan periode revidi pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala. Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi mengalami pembaruan terakhir pada tanggal 27 Februari 2023 dan akan dilakukan pembaharuan susunan keanggotaan dan piagam komite mengikuti perubahan susunan pengurus serta struktur organisasi terkini Bank.

CHARTER OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Bank Muamalat retains the Charter of the Information Technology Steering Committee as guidelines for members to perform the committee's role, which regulates the purpose of establishing the committee; duties, responsibilities and authorities of the committee; the structure and membership of the committee; committee meeting, quorum, and decision-making; term of office of members of the committee from Independent Party; performance assessment mechanism; and review period of the committee's work guidelines and procedures on periodically. The Charter of the Information Technology Steering Committee was last updated on 27 February 2023 and will be updated on its membership composition, and the committee's charter follows changes in the management composition as well as the latest organizational structure of the Bank.

STRUKTUR, KOMPOSISI, DAN DASAR PENGANGKATAN

Bank mengatur struktur keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat Indonesia yang terdiri dari Direktur yang membawahi satuan kerja teknologi informasi, Direktur yang membawahi satuan kerja manajemen risiko, pejabat tertinggi yang membawahi satuan kerja penyelenggara teknologi informasi, dan pejabat tertinggi yang membawahi satuan kerja pengguna teknologi informasi. Komite dimaksud diketuai oleh direktur yang membawahi satuan kerja teknologi informasi merangkap sebagai anggota.

STRUCTURE, COMPOSITION, AND BASIS OF APPOINTMENT

The Bank regulates the membership structure of the Information Technology Steering Committee of Bank Muamalat Indonesia that consists of a Director who supervises the risk management work unit, the highest officer who supervises the work unit responsible for information technology implementation, and the highest officer who supervises the work unit of information technology user. The committee is chaired by the director who supervises the information technology work unit concurrently as member.



Per 31 Desember 2023, komposisi Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2023, the composition of the Information Technology Steering Committee is as follows:

Fungsi/Jabatan dalam Komite Function/Position in Committee	Pelaksanaan/Pejabat dalam Organisasi Implementation/Official in the Organization	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Ketua merangkap anggota tetap dengan hak suara Chairman concurrently as permanent member with voting rights	Direktur Operasi dan Digital Director of Operation and Digital	Surat Keputusan No. 049/B/DIR-KPTS/IX/2023 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Decree No. 049/B/DIR-KPTS/IX/2023 regarding Information Technology Steering Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Wakil Ketua I merangkap anggota tetap dengan hak suara Vice Chairman I concurrently as permanent member with voting rights	Direktur Kepatuhan, Risiko dan Hukum Director of Compliance, Risk and Legal	Surat Keputusan No. 049/B/DIR-KPTS/IX/2023 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Decree No. 049/B/DIR-KPTS/IX/2023 regarding Information Technology Steering Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Wakil Ketua II merangkap anggota tetap dengan hak suara Vice Chairman II concurrently as permanent member with voting rights	Direktur Keuangan & Strategi Director of Finance & Strategy	Surat Keputusan No. 049/B/DIR-KPTS/IX/2023 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Decree No. 049/B/DIR-KPTS/IX/2023 regarding Information Technology Steering Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Sekretaris merangkap anggota tetap tanpa hak suara Secretary concurrently as permanent member without voting rights	Head of Information Technology	Surat Keputusan No. 049/B/DIR-KPTS/IX/2023 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Decree No. 049/B/DIR-KPTS/IX/2023 regarding Information Technology Steering Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Anggota tetap dengan hak suara Permanent member with voting rights	SEVP of Retail Banking	Surat Keputusan No. 049/B/DIR-KPTS/IX/2023 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Decree No. 049/B/DIR-KPTS/IX/2023 regarding Information Technology Steering Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Anggota tetap tanpa hak suara Permanent member without voting rights	- Head of SOE & Corporate Banking - Head of SME & Commercial Banking - Head of Retail Funding & Transaction - Head of Operation Strategy & Control - Head of Compliance - Head of Integrated Risk Management - Head of Business Finance & Performance - Head of Financial Control	Surat Keputusan No. 049/B/DIR-KPTS/IX/2023 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Decree No. 049/B/DIR-KPTS/IX/2023 regarding Information Technology Steering Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi, yaitu sebagai berikut:

Ketua dan Wakil Ketua

1. Mengusulkan agenda untuk setiap rapat dengan masukan dari anggota komite.
2. Memastikan bahwa agenda rapat dan bahan pembahasan yang relevan didistribusikan kepada semua anggota komite setidaknya satu hari kerja sebelum rapat.
3. Menjaga fokus topik pembahasan dalam rapat.
4. Memastikan rapat dimulai dan diakhiri tepat waktu.
5. Berperan sebagai penghubung antara satuan kerja Teknologi Informasi (TI) dengan satuan kerja pengguna TI dengan Direksi.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Information Technology Steering Committee has the duties and responsibilities set out in the Information Technology Steering Committee Charter, including:

Chairman and Deputy Chairman

1. Proposing agenda for each meeting with input from committee members.
2. Ensuring that the meeting agenda and relevant discussion material is distributed to all committee members at least one working day prior to the meeting.
3. Maintaining the focus of the discussion topics in the meeting.
4. Ensuring the meetings to start and end on time.
5. Acting as a liaison between Information Technology (IT) work unit with IT user work unit and the Board of Directors.



Sekretaris

1. Menyelenggarakan rapat sesuai jadwal yang telah ditetapkan, termasuk menyiapkan daftar hadir peserta rapat.
2. Menyiapkan materi rapat kepada peserta rapat yang diundang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.
3. Mengundang peserta rapat termasuk melakukan koordinasi untuk persiapan materi yang akan dibahas dalam rapat.
4. Menyiapkan risalah rapat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah rapat diselenggarakan dan mengirimkan risalah kepada seluruh anggota komite dan seluruh peserta rapat yang hadir berdasarkan kepentingannya untuk ditindaklanjuti.
5. Memantau tindaklanjut atas hasil rapat Komite.

Anggota

1. Menghadiri rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi tepat waktu.
2. Menjaga kerahasiaan atas pembahasan topik yang sensitif yang dibahas dalam rapat komite.
3. Menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia yang dibahas dalam rapat.
4. Menindaklanjuti keputusan rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi.
5. Anggota Komite diharapkan untuk menghadiri setiap pertemuan dan menginformasikan apabila tidak dapat hadir dalam rapat komite.

PROFIL KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Profil ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi disajikan pada bab "Profil Perusahaan".

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Sepanjang tahun 2023, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Menetapkan Rencana Strategis IT untuk tahun 2023-2024.

Secretary

1. Hold meetings according to set schedule, including the preparation of the meetings' participant attendance list.
2. Prepare meeting materials for the invited meeting participants at the latest by 1 (one) working day prior to the meeting schedule.
3. Invite meeting participant including coordination for preparing meeting materials to be discussed in the meeting.
4. Prepare the minutes of meeting at the latest by 5 (five) working days following the meeting and send the minutes of meeting to all committee members and all meeting participants who attended the meeting based on priority for follow-ups.
5. Monitor follow-ups of Committee meeting results.

Members

1. Attending Information Technology Steering Committee meetings on time.
2. Maintaining confidentiality of the discussion of sensitive topics discussed in committee meetings.
3. Maintaining the confidentiality of information discussed in meetings.
4. Following up the decisions of Information Technology Steering Committee meeting.
5. Committee members are expected to attend every meeting and inform the organizer in case they are unable to attend the Committee meetings.

PROFILE OF INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Profile of the Chairman of Information Technology Steering Committee is available in the "Company Profile" chapter.

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE IN 2023

Information on training and/or competency development can be found in the section on Training and/or Competency Development of the Board of Directors of this Annual Report.

IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Throughout the year 2023, the Information Technology Steering Committee carried out its duties and responsibilities with details as follows:

1. Established the IT Strategic Plan for the period of 2023-2024.



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Menetapkan proyek-proyek TI tahun anggaran 2023. 3. Menetapkan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (RPTI). 4. Melakukan perumusan implementasi ketentuan Undang – Undang No. 27 Tahun 2022 sesuai kebutuhan Bank. 5. Mitigasi <i>Cyber Attack</i> & Peningkatan <i>Security</i>. 6. Melakukan pembahasan mengenai Maturitas Keamanan Siber Periode Juni 2023. 7. Bank Memantau dan memberikan arahan terhadap masalah-masalah TI. 8. Melakukan monitoring status teknologi <i>existing</i>. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Established IT projects for the 2023 budget year. 3. Established the Information Technology Development Plan (RPTI). 4. Formulated the implementation of the provisions of Law No. 27 of Year 2022 according to the Bank's needs. 5. Mitigated Cyber Attack & Improvement of Security. 6. Discussed Maturity of Cyber Security for June 2023 Period. 7. The Bank monitored and provided directives on IT problems/issues. 8. Monitored on status of existing technology. |
|---|---|

RAPAT KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Kebijakan

Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat Indonesia mengatur rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi yang wajib diselenggarakan paling kurang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Realisasi

Sepanjang tahun 2023, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat dengan agenda sebagai berikut.

MEETING OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Policy

The Charter of the Information Technology Steering Committee of Bank Muamalat Indonesia regulates the meetings of the Information Technology Steering Committee which are required to be held at least 4 (four) times within 1 (one) year.

Realization

Throughout the year 2023, the Information Technology Steering Committee held 4 (four) meetings with the agenda as described below:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
1	9 Maret 2023 March 9, 2023	1. <i>Update Project</i> selama tahun 2022 2. Proyek tahun 2022 yang belum selesai, carry forward di tahun 2023 3. Rencana Kerja 2023 4. Rencana Pengembangan yang telah disampaikan oleh Direktorat Bisnis, Direktorat Operation, dan Direktorat Finance 5. Rencana Pengembangan Infrastruktur & Aplikasi IT tahun 2023 1. Project Update 2022 2. 2022 Projects which were not completed, to be carried forward to 2023 3. 2023 Work Plan 4. Development Plans submitted by the Business Directorate, Operation Directorate, and Finance Directorate 5. Development Plan for IT Infrastructure & Application in 2023	• Bpk. Wahyu Avianto • Bpk. Karno • Bpk. Suhendar • Bpk. Shandy Sofian • Bpk. Zefri Ananta • Ibu Wita Hanayori • Ibu Dyah Ekowati • Ibu Vinny Rika Anwar • Bpk. Demmy Rizkiadhy • Bpk. M. Syaekhan Thamrin • Bpk. Dicky Zakiudin • Ibu Astri Piesca Rini • Bpk. Aryo Seno • Bpk. Andi Suryawan • Bpk. Soegeng Triwalodjo • Bpk. Haryo Baskoro • Bpk. Affandi • Bpk. Adi Sutrisna
2	18 Juli 2023 July 18, 2023	1. Kejadian <i>Cyber Security</i> 2. Pengukuran Maturitas Keamanan Siber Periode Juni 2023 3. Mitigasi & Peningkatan Security 4. Security Operation Center (SOC) Report 5. Update Progress IT Initiatives 6. Rekomendasi Dan Permohonan Persetujuan 1. Cyber Security Incidents 2. Maturity Measurement of Cyber Security for June 2023 Period 3. Mitigation & Security Improvement 4. Security Operation Center (SOC) Report 5. Update Progress of IT Initiatives 6. Recommendation and Request for Approval	• Bpk. Wahyu Avianto • Bpk. Suhendar • Bpk. Karno • Bpk. Irvan Yulian Noor • Bpk. Sandhy Sofian • Bpk. Zefri Ananta • Bpk. Wang Wardhana • Ibu Elisa Ratnawardani • Bpk. Nanang Basuki • Ibu Wita Hanayori • Bpk. Dadang Rohadi • Bpk. M. Imam Mashudi • Bpk. Affandi • Bpk. Nunu Nurjaman • Bpk. Amien • Bpk. Satya Pratama • Bpk. Adrianto Hendraputra • Bpk. Adi Sutrisna



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
3	2 Oktober 2023 October 2, 2023	- SK No.049/B/DIR-KPTS/IX/2023 Update Perubahan Susunan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi - Rekomendasi BOD – ITSC Sebelumnya Informasi status/progress yang sudah dilakukan oleh ITY atas rekomendasi dan persetujuan BOD pada hasil meeting IT Steering Committee sebelumnya (ITSC 1 & 2) - Project IT & Non IT Informasi progress atas proyek inisiatif ITY, Bisnis dan Operation yang telah di setujui untuk dijalankan di tahun 2023 atas Rekomendasi dan Persetujuan BOD pada hasil meeting IT Steering Committee sebelumnya (ITSC 1 & 2) - Undang – Undang No. 27 Tahun 2022 Ringkasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan tanggal 17 Oktober 2022 - Review Data Protection Operation (DPO) - Rekomendasi & Permohonan Persetujuan Rekomendasi dan Permohonan persetujuan atas usulan yang disampaikan pada Meeting IT Steering Committee ke tiga ini	- Bpk. Wahyu Avianto - Bpk. Karno - Bpk. Suhendar - Bpk. Dedy Suryadi Dharmawan - Bpk. Sandhy Sofian - Bpk. Zefri Ananta - Bpk. Agus Amir - Bpk. Aznovri Kurniawan - Ibu Dyah Ekawati - Ibu Catur Andayani - Ibu Wita Hanayori - Bpk. Dadang Rohadi - Bpk. Nanang Basuki - Bpk. Ibnu Umar - Bpk. Khusnudhon - Ibu Egdiawara Hari Niek - Bpk. Moh. Madina Hendrick Soe'oad - Bpk. Afrid Wibisono - Bpk. Satya Pratama - Bpk. Adi Sutrisna
4	6 November 2023 November 6, 2023	- IT Roadmap 2024, disesuaikan dengan rencana kerja korporasi - Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2023 - Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (RPTI) - Rekomendasi Permohonan Persetujuan 2024 IT Roadmap, aligned with corporate work plans - Realization on the Use of 2023 Budget - Information Technology Development Plan (RPTI) - Recommendation & Request for Approval	- Bpk. Wahyu Avianto - Bpk. Karno - Bpk. Suhendar - Bpk. Dedy Suryadi Dharmawan - Bpk. Sandhy Sofian - Bpk. Zefri Ananta - Bpk. Agus Amir - Bpk. Aznovri Kurniawan - Ibu Dyah Ekawati - Ibu Catur Andayani - Bpk. Demmy Rizkiadhy - Ibu Wita Hanayori - Ibu Esti Budiarti - Ibu Citra Kurniawati - Ibu Annisa Rosalina Sylvia - Ibu Nunu Nurjaman - Ibu Marissa Widyanti - Bpk. Nanang Basuki - Bpk. Ibnu Umar - Bpk. Afrid Wibisono - Bpk. Aljufri Alparisi - Bpk. Aznil Rahmat - Bpk. Ellend Kusuma - Bpk. Dicky Zakiudin - Bpk. Agung Bayu Sulistiono - Bpk. Muhammad Aldy Sadikin - Bpk. Ahmad Fathi - Bpk. Heri Sugiri - Bpk. Bambang Rudi Hariyanto - Bpk. Andi Suryawan - Bpk. Prasetyo Utomo - Bpk. Muh. Syaekhan Thamrin - Bpk. Syah Wafi Muhammad - Bpk. Tri Wahyu Fajar Kumala - Bpk. Tegar Sangga Barkah - Bpk. Herindra Nurbuana - Bpk. Satya Pratama - Bpk. Adi Sutrisna - Bpk. Andres Eko Haryanto - Ibu Ummi Makhallina



Asset & Liability Committee (ALCO)

Asset & Liability Committee (ALCO)

DASAR HUKUM

Bank Muamalat Indonesia membentuk Aset & Liability Committee (ALCO) dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Piagam ALCO Bank Muamalat Indonesia.
4. Ketentuan perundang-undangan lainnya.

PIAGAM KOMITE ALCO

Komite ALCO telah memiliki Piagam sebagai pedoman dalam menjalankan perannya, yang mengatur mengenai tujuan pembentukan komite; tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite; struktur dan keanggotaan komite; rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan; masa tugas anggota komite dari Pihak Independen; mekanisme evaluasi kinerja; dan periode revidi pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala. Piagam Komite ALCO mengalami pembaruan terakhir pada tanggal 8 Maret 2023 dan akan dilakukan pembaharuan susunan keanggotaan dan piagam komite mengikuti perubahan susunan pengurus serta struktur organisasi terkini Bank.

LEGAL BASIS

Bank Muamalat Indonesia established the Asset & Liability Committee (ALCO) by referring to the laws and regulations as follows:

1. Financial Services Authority Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks.
2. Financial Services Authority Regulation No. 65/POJK.03/2016 regarding Risk Management Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
3. ALCO Charter of Bank Muamalat Indonesia.
4. Other regulatory provisions.

ALCO COMMITTEE CHARTER

ALCO Committee retains its Charter as guidelines to carry out its role, which regulates on the purpose of its establishment; duties, responsibilities, and authorities of the committee; structure and membership of the committee; committee meetings, quorum, and decision-making; term of office of members of the committee from Independent Party; performance assessment mechanism; and review period of the work guidelines and procedures of the committee on periodic basis. The ALCO Committee's Charter was last updated on 8 March 2023 and will be updated on the membership composition, and the committee charter follows changes that occur in the management composition as well as in the latest organizational structure of the Bank.



STRUKTUR, KOMPOSISI, DAN DASAR PENGANGKATAN

Berikut adalah komposisi keanggotaan Komite ALCO per 31 Desember 2023.

STRUCTURE, COMPOSITION, AND BASIS OF APPOINTMENT

Following is the composition of ALCO Committee's membership as of 31 December 2023.

Fungsi/Jabatan dalam Komite Function/Position in Committee	Pelaksanaan/Pejabat dalam Organisasi Implementation/Official in the Organization	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Ketua Chairman	Direktur Utama President Director	Surat Keputusan Direksi No. 065/B/DIR-KPTS/XI/2023 tentang Asset & Liability Committee (ALCO) dan ALCO Support Group (ASG) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Board of Directors Decree No. 065/B/DIR-KPTS/XI/2023 regarding Asset & Liability Committee (ALCO) and ALCO Support Group (ASG) of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Wakil Ketua Vice Chairman	Direktur Keuangan & Strategi Director of Finance & Strategy	Surat Keputusan Direksi No. 065/B/DIR-KPTS/XI/2023 tentang Asset & Liability Committee (ALCO) dan ALCO Support Group (ASG) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Board of Directors Decree No. 065/B/DIR-KPTS/XI/2023 regarding Asset & Liability Committee (ALCO) and ALCO Support Group (ASG) of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Sekretaris Secretary	Head of Treasury	Surat Keputusan Direksi No. 065/B/DIR-KPTS/XI/2023 tentang Asset & Liability Committee (ALCO) dan ALCO Support Group (ASG) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Board of Directors Decree No. 065/B/DIR-KPTS/XI/2023 regarding Asset & Liability Committee (ALCO) and ALCO Support Group (ASG) of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Anggota Tetap dengan Hak Suara Permanent Member with Voting Rights	- SEVP Retail Banking - Compliance, Risk & Legal Director - Financing Business Risk Director - SEVP Enterprise Banking - SEVP Human Capital	Surat Keputusan Direksi No. 065/B/DIR-KPTS/XI/2023 tentang Asset & Liability Committee (ALCO) dan ALCO Support Group (ASG) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Board of Directors Decree No. 065/B/DIR-KPTS/XI/2023 regarding Asset & Liability Committee (ALCO) and ALCO Support Group (ASG) of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara Permanent Member Without Voting Rights	- Head of Global Market - Head of Integrated Risk Management - Head of Consumer Financing Business - Head of Special Asset Management - Head of Distrution Distribution - Network Management - Head of Business Finance & Performance - Head of Strategy & Transformation - Head of Treasury (merangkap sekretaris Komite ALCO) (concurrently as ALCO Committee Secretary) - Head of SOE & Corporate Banking - Head of SME & Commercial Banking - Head of Transactional Banking - Head of Retail Collection Management - Head of Retail Funding & Transaction - Head of Hajj & Umroh Solution - Head of Enterprise Banking Business Development	Surat Keputusan Direksi No. 065/B/DIR-KPTS/XI/2023 tentang Asset & Liability Committee (ALCO) dan ALCO Support Group (ASG) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Board of Directors Decree No. 065/B/DIR-KPTS/XI/2023 regarding Asset & Liability Committee (ALCO) and ALCO Support Group (ASG) of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Anggota Tidak Tetap Tanpa Hak Suara Non-Permanent Member Without Voting Rights	- Kepala Unit Bisnis yang terkait dengan materi pembahasan dalam Rapat ALCO - Region CEO atau Branch Manager yang terkait dengan materi pembahasan dalam rapat ALCO - Head of Business Unit related to materials discussed in ALCO meetings - Region CEO or Branch Manager related to materials discussed in ALCO meetings	Surat Keputusan Direksi No. 065/B/DIR-KPTS/XI/2023 tentang Asset & Liability Committee (ALCO) dan ALCO Support Group (ASG) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Board of Directors Decree No. 065/B/DIR-KPTS/XI/2023 regarding Asset & Liability Committee (ALCO) and ALCO Support Group (ASG) of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE ALCO

ALCO memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Piagam ALCO, yang mencakup:

1. Bertanggung jawab atas pencapaian rentabilitas bank sesuai dengan target keuntungan (laba), pertumbuhan neraca dan beberapa ukuran rentabilitas yang telah ditetapkan dalam anggaran.
2. Melakukan evaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan liabilitas.
3. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen aset dan liabilitas dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Melakukan evaluasi kinerja Komite Aset dan Liabilitas.
5. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Komite Aset dan Liabilitas dalam rangka memenuhi peraturan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip.
6. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan liabilitas.

PROFIL KOMITE ALCO

Profil ketua Komite ALCO disajikan pada bab "Profil Perusahaan".

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE ALCO TAHUN 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE ALCO

Sepanjang tahun 2023, Komite ALCO telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat dalam satu (1) tahun dan membuat seluruh risalah rapat komite.
2. Melakukan optimisasi neraca melalui penyesuaian biaya dana dan pinjaman serta melakukan penempatan aset alternatif pada surat berharga dengan tingkat likuidasi baik dan risiko yang dapat diterima.
3. Memastikan tingkat likuiditas Bank Muamalat selalu berada pada level yang optimum.
4. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Bank Muamalat terkait pengelolaan aset dan liabilitas, serta pengambilan keputusan yang terkait melalui perumusan

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF ALCO COMMITTEE

ALCO is tasked with the duties and responsibilities as contained in ALCO Charter which covers the following:

1. Responsible for achieving the bank's profitability in accordance with the set targets, balance sheet growth and several profitability measures set forth in the budget.
2. Conduct assessment on asset and liability management policies and management strategies.
3. Conduct assessment on the suitability between asset and liability management policies and implementation of the policies.
4. Conduct assessment on the performance of the Asset and Liability Committee.
5. Evaluate steps taken by the Asset and Liability Committee in the context of complying with BI/OJK regulations and other applicable laws and regulations within the implementation of the principle.
6. Provide recommendations to the Board of Directors related to asset and liability management policies and strategies.

PROFILE OF ALCO COMMITTEE

The profile of the Chairman of ALCO Committee is presented in the chapter on "Company Profile".

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT OF ALCO COMMITTEE IN 2023

Information on training and/or competency development can be found in the section on Training and/or Competency Development of the Board of Directors in this Annual Report.

IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES OF ALCO COMMITTEE

Throughout the year 2023, ALCO Committee carried out its duties and responsibilities with details as follows:

1. Held 12 (twelve) meetings in 1 (one) year and completed all the minutes of meetings.
2. Optimized the balance sheet through adjustments in the cost of funds and loans as well as through placements of alternative assets in securities with good liquidation levels and acceptable risks.
3. Ensured Bank Muamalat's liquidity level is always within optimum level.
4. Provided recommendations to the Board of Directors of Bank Muamalat related to asset and liability management, as well as related decision-making



kebijakan, strategi dan sasaran untuk mengelola aset dan liabilitas Bank secara terintegrasi.

5. Mengkaji dan memastikan bahwa kerangka kerja *Fund Transfer Pricing* (FTP) sesuai dan berfungsi sebagai pen jembatan antara lini bisnis dan mengedepankan konsistensi dalam kinerja Bank.
6. Memastikan bahwa *Early Warning Indicators* relevan dengan kondisi terkini.

through formulation of policies, strategies and targets to integratedly manage the Bank's assets and liabilities.

5. Reviewed and ensured that Fund Transfer Pricing (FTP) framework is in accordance with and functional in bridging between business lines and prioritizing on consistency in the Bank's performance.
6. Ensured that Early Warning Indicators are relevant with the latest conditions.

RAPAT KOMITE ALCO

Kebijakan

Mengacu pada Piagam ALCO Bank Muamalat Indonesia, rapat ALCO wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali rapat dalam 1 (satu) bulan dengan jadwal dan agenda yang telah ditetapkan. Adapun ketentuan mengenai rapat ALCO adalah sebagai berikut:

1. Keputusan dalam Rapat Komite Aset dan Liabilitas diupayakan secara musyawarah untuk mufakat. Namun Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah ($\frac{1}{2}n + 1$) Direksi dan Senior Executive Vice President (SEVP) yang menjadi anggota tetap Komite Aset dan Liabilitas dan memiliki hak suara, yang hadir dan atau diwakili dalam rapat tersebut dan disetujui oleh Ketua Komite atau Wakil Ketua Komite atau penggantinya.
2. Rapat ALCO dilaksanakan paling sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan pada jadwal dan agenda yang telah ditetapkan oleh sekretaris ALCO.
3. Rapat ALCO didahului oleh rapat ASG. Namun, dalam keadaan tertentu Rapat ALCO dapat langsung dilaksanakan tanpa didahului oleh rapat ASG dan dapat pula dilaksanakan di luar jadwal rapat ALCO yang telah ditetapkan dengan menyesuaikan jadwal Direksi.
4. Setiap anggota ALCO diwajibkan untuk menghadiri rapat ALCO. Apabila anggota ALCO berhalangan untuk menghadiri Rapat ALCO, maka harus diwakili oleh Senior Officer dalam subordinatnya.
5. Rapat ALCO hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah ($\frac{1}{2}n + 1$) Direksi dan Senior Executive Vice President (SEVP) yang menjadi anggota tetap dan memiliki hak suara. Selain itu Rapat juga harus dihadiri oleh Ketua atau Wakil Ketua Komite Aset dan Liabilitas atau penggantinya.
6. Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua ALCO atau Wakil Ketua ALCO apabila Ketua ALCO berhalangan untuk menghadiri rapat.
7. Materi rapat ALCO disiapkan oleh Sekretaris ALCO.
8. Setiap rapat ALCO dan hasil keputusannya dituangkan ke dalam risalah rapat ALCO yang dibuat dan disampaikan oleh Sekretaris ALCO kepada Ketua ALCO dan Wakil Ketua ALCO untuk ditandatangani oleh

MEETING OF ALCO COMMITTEE

Policy

Referring to ALCO Charter of Bank Muamalat Indonesia, ALCO meetings are required to be held at least 1 (one) time within 1 (one) month with predetermined schedule and agenda. Provisions on ALCO meetings are as follows:

1. Decisions made in Asset and Liability Committee Meetings are sought by deliberation to reach consensus. However, in the event deliberation to reach consensus is not reached, then decisions are legitimate if agreed by more than half ($\frac{1}{2}n + 1$) of the Board of Directors and Senior Executive Vice President (SEVP) who are permanent members of the Asset and Liability Committee and holding voting rights, attended and/or represented in the concerned meeting and approved by the Committee Chairman or Committee Vice Chairman or the replacement.
2. ALCO meetings are held at least 1 (one) time in 1 (one) month according to predetermined schedule and agenda set forth by the secretary of ALCO.
3. ALCO meeting is preceded by the ASG meeting. However, under certain circumstances, ALCO meeting can be held immediately without being preceded by ASG meeting and can also be held outside of ALCO meeting schedule that has been determined by adjusting the schedule of the Board of Directors.
4. Each ALCO member is required to attend the ALCO meeting. If ALCO members are unable to attend the ALCO Meeting, they must be represented by a Senior Officer in their subordinates.
5. ALCO meetings can only be held if attended by more than half ($\frac{1}{2}n + 1$) of the Directors and Senior Executive Vice President (SEVP) who are permanent members and have voting rights. In addition, the meeting must also be attended by the Chairman or Vice Chairman of the Asset and Liability Committee or his/her alternate.
6. The ALCO meeting is chaired by the Chairman of ALCO or Deputy Chairman of ALCO if the Chairman of ALCO is unable to attend the meeting.
7. The Secretary of ALCO prepares ALCO materials.
8. Each ALCO meeting and the results of its decisions are written into the minutes of the ALCO meeting, which is prepared and submitted by the Secretary of ALCO to the Chairman of ALCO and the Deputy Chairman of ALCO to



Ketua ALCO, Wakil Ketua ALCO dan Sekretaris ALCO untuk selanjutnya didistribusikan oleh Sekretaris ALCO kepada unit kerja terkait.

9. Sekretaris ALCO mendokumentasikan seluruh dokumen rapat ALCO.
10. Hasil keputusan rapat ALCO yang terkait dengan seluruh unit bisnis ditindaklanjuti oleh ALCO dengan menyampaikan memorandum kepada seluruh unit bisnis, Region CEO, Branch Manager, dan Operation Manager serta diketahui oleh Direksi. Sementara hasil keputusan rapat ALCO yang harus ditindaklanjuti oleh unit bisnis terkait disampaikan melalui memorandum khusus.

be signed by the Chairman of ALCO, Deputy Chairman of ALCO and the Secretary of ALCO for further distribution by the Secretary of ALCO to related work units.

9. Secretary of ALCO documents all ALCO meeting documents.
10. The results of ALCO meeting decisions related to all business units are followed up by ALCO by submitting a memorandum to all business units, Region Heads, Branch Managers and Operations Manager and are acknowledged by the Board of Directors. Meanwhile, the decision of the ALCO meeting which must be followed up by the related business unit is conveyed through a special memorandum.

Realisasi

Sepanjang tahun 2023, Komite ALCO telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat dengan agenda sebagai berikut.

Realization

During the year 2023, ALCO Committee held 12 (twelve) meetings with the following agenda:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
1	25 Januari 2023 January 25, 2023	1. Materi ERM ERM Material - Funding Trend - Current Liquidity Risk Monitoring - Liquidity Stress Test - Proyeksi LKRI LKRI Projection 2. Market Update - Forex & Bonds Update - Global Market Update - Local Market Update 3. ALM Performance - Bankwide Overview - Funding Structure - Financing Structure - FDR & RIM - COF & Yield Financing - Treasury Business - COF & Yield Projection 4. Liquidity Update Liquidity Update - Cash Flow IDR & USD IDR & USD Cash Flow - Business Projection - Borrowing, SWAP & REPO Capacity 5. Program Pembiayaan beragun Tunai Consumer dan SME Consumer and SME Cash-Backed Financing Program 6. Ketentuan Spesial Nisbah IDR & USD Special Provision on IDR & USD Special Ratio 7. Ketentuan Pricing Counter Deposito breakable dan bulanan Provision on breakable and monthly Deposit Pricing Counter 8. Ketentuan Pricing Counter Bulanan IDR & USD Provision of Monthly IDR & USD Pricing Counter 9. Ketentuan Pricing Commodity Murabahah KL Provision on Murabahah KL Commodity Pricing 10. Ketentuan spesial nisbah CASA retail & wholesale - IDR & USD Provision on retail & wholesale CASS special ratio - IDR & USD 11. Financing Performance 12. Pricing Pembiayaan dan FTP Financing Pricing and FTP 13. Kebijakan Required Yield Financing Policy on Required Yield Financing 14. Pricing Negosiasi wesel export, Usance LC/TR/UPAS Pricing Negotiation on export money orders, Usance LC/TR/UPAS 15. Ketentuan back to back Retail & Wholesale Provision on back-to-back Retail & Wholesale 16. Mekanisme persetujuan disburse dan dana keluar IDR Approval mechanism on IDR disbursement and outgoing funds 17. Mekanisme persetujuan disburse USD Approval mechanism on USD disbursement	• Indra Falatehan • Hery Syafril • Karno • Irvan Yulian Noor • Wahyu Avianto • Catur Andayani • Moh. Madina Hendrik Soe'loed • Wang Wardhana • Demmy Rizkiadhy • Agus Andipratama Amir • Elisa Ratnawardani • Agung Prambudi • Muhammad Lutfi • Aria Pratama • Marissa Widyanti • Fatrika Rusdi • Hafni Marfu'ah Muhidin • Gunarko • Nurman Purnomo • Niken Yurivika • Mawaddatun • Anas Zainuddin • Pratsiyara Puspa Widitha • Narindra Mahisi



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
2	17 Februari 2023 February 17, 2023	- Materi ERM ERM Material - Funding Trend - Current Liquidity Risk Monitoring - Liquidity Stress Test - Proyeksi LKRI LKRI Projection - Market Update - Forex & Bonds Update - Global Market Update - Local Market Update - ALM Performance - Bankwide Overview - Funding Structure - Financing Structure - FDR & RIM - COF dan Yield Financing - Treasury Business - COF dan Yield Projection - Liquidity Update - Cash Flow IDR & USD IDR & USD Cash Flow - Business Projection - Borrowing, SWAP & REPO Capacity - Review Pricing KPR Consumer - Ketentuan Spesial Nisbah IDR & USD Special Provision on IDR & USD Special Ratio - Ketentuan Pricing Counter Deposito breakable dan bulanan Provision on breakable and monthly Deposit Counter Pricing - Ketentuan Pricing Counter Bulanan IDR & USD Provision of Monthly IDR & USD Pricing Counter - Ketentuan Pricing Commodity Murabahah KL Provision on Murabahah KL Commodity Pricing - Ketentuan spesial nisbah CASA retail & wholesale - IDR & USD Provision on retail & wholesale CASS special ratio - IDR & USD - Financing Performance - Pricing Pembiayaan dan FTP Financing Pricing and FTP - Kebijakan Required Yield Financing Policy on Required Yield Financing - Pricing Negosiasi wesel export, Usance LC/TR/UPAS Pricing Negotiation on export money orders, Usance LC/TR/UPAS - Ketentuan back to back Retail & Wholesale Provision on back-to-back Retail & Wholesale - Mekanisme persetujuan disburse dan dana keluar IDR Approval mechanism on IDR disbursement and outgoing funds - Mekanisme persetujuan disburse USD Approval mechanism on USD disbursement - Masa berlaku ALCO ALCO validity period	- Indra Falatehan - Suhendar - Hery Syafril - Karno - Irvan Yulian Noor - Wahyu Avianto - Moh. Madina Hendrik Soe'oed - Catur Andayani - Citra Kurniawati - Agung Prambudi - Demmy Rizkiadhy - Hari C Damanik - Prima Ekalisanti - Muhammad Lutfi - Aria Pratama - Marissa Widyanti - Fatrika Rusdi - Hafni Marfu'ah Muhidin - Prasetyo - Priyono - Anas Zainuddin



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
3	17 Maret 2023 March 17, 2023	- Materi ERM ERM Material - Funding Trend - Analisa Pergerakan Funding Ramadhan-Lebaran Analysis of Ramadhan-Eid Funding Movements - Liquidity Stress Test - Market Update - Forex & Bonds Update - Global Market Update - Local Market Update - ALM Performance - Bankwide Overview - Funding Structure - Financing Structure - FDR & RIM - COF dan Yield Financing - Treasury Business - Posisi NIM NIM Position - COF dan Yield Projection COF and Yield Projection - Liquidity Update - Cash Flow IDR & USD IDR & USD Cash Flow - Business Projection - Pipeline Retail and Enterprise Banking - COF and Yield Projection - Penyampaian Program KPR untuk Karyawan BPKH Submission of House Ownership Credit (KPR) Program for BPKH Employees - Ketentuan Spesial Nisbah IDR & USD Provision on IDR & USD Special Ratio - Ketentuan Pricing Counter Deposito breakable dan bulanan Provision on breakable and monthly Deposit Counter Pricing - Ketentuan Pricing Counter Bulanan IDR & USD Provision of Monthly IDR & USD Pricing Counter - Ketentuan Pricing Commodity Murabahah KL Provision on Murabahah KL Commodity Pricing - Ketentuan spesial nisbah CASA retail & wholesale - IDR & USD Provision on retail & wholesale CASS special ratio - IDR & USD - Financing Performance - Pricing Pembiayaan dan FTP Financing Pricing and FTP - Kebijakan Required Yield Financing Policy on Required Yield Financing - Pricing Negosiasi wesel export, Usance LC/TR/UPAS Pricing Negotiation on export money orders, Usance LC/TR/UPAS - Ketentuan back to back Retail & Wholesale Provision on back-to-back Retail & Wholesale - Mekanisme persetujuan disburse dan dana keluar IDR Approval mechanism on IDR disbursement and outgoing funds - Mekanisme persetujuan disburse USD Approval mechanism on USD disbursement - Penjaminan Aset BMI BMI Asset Guarantee	- Suhendar - Hery Syafril - Karno - Irvan Yulian Noor - Wahyu Avianto - Moh. Madina Hendrik Soe'oed - Catur Andayani - Citra Kurniawati - Astri Piesca Rini - Demmy Rizkiadhy - Elisa Ratnawardani - Agus Andipratama Amir - Wang Wardhana - Prima Ekalisanti - Aria Pratama - Marissa Widyanti - Muhammad Lutfi - Abdiel Varian - Marissa Widyanti - Priyono - Hari C Damanik - Anas Zainuddin



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
4	17 April 2023 April 17, 2023	- Materi ERM ERM Material - Funding and Financing Trend - Monitoring Liquidity and Key Risks Indicator - Liquidity Stress Test- May - Market Update - Local Economic Update Resiliensi Rupiah BI-7DRR, dan Proyeksi BI-7DRR Local Economic Update on BI-7DRR Rupiah Resilience, and BI-7DRR Projection - Global Update & Fed Fund Rate - ALM Performance - Bankwide Overview - Funding Structure - Financing Structure - FDR IDR, Valas dan penggunaan RIM - IDR FDR, Foreign Exchange and RIM utilization - COF and Yield Financing - COF & Yield Projection - Yield and COF Treasury - Liquidity Update - Cash Flow IDR dan USD Projection IDR and USD Cash Flow Projection - Borrowing capacity and Nostro - Penjaminan Aset Asset Guarantee - Pipeline Enterprise Banking - Pipeline Retail Banking - COF yield projection - Estimasi NIM April 2023 April 2023 NIM Estimate - Disbursement Utama Karya dan Pelindo Utama Karya and Pelindo Disbursement - Ketentuan Spesial Nisbah IDR & USD Provision on IDR & USD Special Ratio - Ketentuan Pricing Counter Deposito breakable dan bulanan Provision on breakable and monthly Pricing Counter Deposit - Ketentuan Pricing Counter Bulanan IDR & USD Provision on Monthly IDR & USD Pricing Counter - Ketentuan Pricing Commodity Murabahah KL Provision on Murabahah KL Commodity Pricing - Ketentuan spesial nisbah CASA retail & wholesale - IDR & USD Provision on retail & wholesale CASS special ratio - IDR & USD - Financing Performance - Pricing Pembiayaan dan FTP Financing Pricing and FTP - Kebijakan Required Yield Financing Policy on Required Yield Financing - Pricing Negosiasi wesel export, Usance LC/TR/UPAS Pricing Negotiation on export money orders, Usance LC/TR/UPAS - Ketentuan back to back Retail & Wholesale Provision on back-to-back Retail & Wholesale - Mekanisme persetujuan disburse dan dana keluar IDR Approval mechanism on IDR disbursement and outgoing funds - Pembelian EBA-SP Purchase of EBA-SP	- Indra Falatehan - Suhendar - Hery Syafril - Karno - Irvan Yulian Noor - Wahyu Avianto - Moh. Madina Hendrik Soe'oed - Catur Andayani - Citra Kurniawati - Demmy Rizkiadhy - Elisa Ratnawardani - Agus Andipratama Amir - Bambang Rudi Hariyanto - Khusnudhon - Agung Pambudi - Agung Bayu Sulistiono - Wang Wardhana - Prima Ekalisanti - Aria Pratama - Marissa Widyanti - Muhammad Lutfi - Siti Nurhidayah - Marissa Widyanti - Hari Damanik - Aljufri Alparisi - Hafni Marfuah - Anas Zainuddin



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
5	22 Mei 2023 May 22, 2023	- Materi ERM ERM Material - Funding and Financing Trend - Monitoring Liquidity and Key Risks Indicator - Liquidity Stress Test- June 2023 - Market Update - Local Economic Update Resiliensi Rupiah BI-7DRR, dan Proyeksi BI-7DRR Local Economic Update BI-7DRR Rupiah Resilience and BI-7DRR Projection - Global Update & Fed Fund Rate - ALM Performance - Bankwide Overview - NIM Highlights - Funding Structure - Financing Structure - FDR IDR, Valas dan penggunaan RIM FDR IDR, Foreign Exchange and utilization of RIM - COF & Yield Financing - COF & Yield Projection - Yield and COF Treasury - Liquidity Update - Cash Flow IDR & USD Projection - Borrowing capacity and Nostro - Pipeline Enterprise Banking - Pipeline Retail Banking - COF yield projection - Ketentuan Spesial Nisbah IDR & USD Provision on IDR & USD Special Ratio - Ketentuan Pricing Counter Deposito breakable dan bulanan Provision on breakable and monthly Pricing Counter Deposit - Ketentuan Pricing Counter Bulanan IDR & USD Provision on Monthly IDR & USD Pricing Counter - Ketentuan spesial nisbah CASA retail & wholesale - IDR & USD Provision on retail & wholesale CASA special ratio - IDR & USD - Ketentuan Pricing Commodity Murabahah KL Provision on Murabahah KL Commodity Pricing - Pricing Pembiayaan dan FTP Funding and Financing (per tenor) Financing Pricing and FTP Funding and Financing (per tenure) - Kebijakan Required Yield Financing (FTP Pertenor) Policy on Required Yield Financing (FTP per tenure) - Pricing Negosiasi wesel export, Usance LC/TR/UPAS Pricing Negotiation on export money orders, Usance LC/TR/UPAS - Ketentuan back to back Retail & Wholesale Provision on back-to-back Retail & Wholesale - Mekanisme persetujuan disburse dan dana keluar IDR Approval mechanism on IDR disbursement and outgoing funds - Mekanisme persetujuan disburse USD Approval mechanism on USD disbursement - Penyampaian Realisasi Program KPR Submission of Housing Ownership Credit (KPR) Program Realization	- Indra Falatehan - Suhendar - Irvan Yulian Noor - Wahyu Avianto - Moh. Madina Hendrik Soe'oed - Citra Kurniawati - Demmy Rizkiadhy - Aruddy - Agung Bayu Sulistiono - Aria Pratama - Marissa Widyanti - Muhammad Lutfi - Siti Nurhidayah - Septiana Silva - Angga Furi - Hari Damanik - Hafni Marfuah - Anas Zainuddin



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
6	23 Juni 2023 June 23, 2023	- Materi ERM ERM Material - Funding and Financing Trend - Monitoring Liquidity and Key Risk Indicators - Konsentrasi Pendanaan Funding Concentration - Liquidity Stress Test- July 2023 - Market Update - Local Economic Update Resiliensi Rupiah BI-7DRR, dan Proyeksi BI-7DRR Local Economic Update on BI-7DRR Rupiah Resilience, and BI-7DRR Projection - Global Update, US, Europe and China - ALM Performance - Bankwide Overview - NIM Highlights - Strategi Perbaikan NIM Strategy on NIM Improvement - Simulasi Kebijakan FTP untuk Segmen Bisnis Simulation on FTP Policy for Business Segment - Funding Structure - Financing Structure - FDR IDR, Valas dan penggunaan RIM IDR FDR, Foreign Exchange and use of RIM - COF dan Yield Financing COF and Yild Financing - COF & Yield Projection - Yield and COF Treasury - Liquidity Update - Cash Flow IDR dan USD Projection IDR and USD Projection Cash Flow - Borrowing capacity and Nostro - Pipeline Enterprise Banking - Pipeline Retail Banking - COF yield projection - Ketentuan Spesial Nisbah IDR & USD Provision on IDR & USD Special Ratio - Ketentuan Pricing Counter Deposito Breakable dan bulanan Provision on Breakable and monthly Deposit Counter Pricing - Ketentuan Pricing Counter Bulanan IDR & USD Provision on Monthly IDR & USD Counter Pricing - Ketentuan spesial nisbah CASA retail & wholesale - IDR & USD Provision on retail & wholesale CASA special ratio - IDR & USD - Ketentuan Pricing Commodity Murabahah KL Provision on Murabahah KL Commodity Pricing - Pricing Pembiayaan dan FTP Funding and Financing (per tenor) Financing Pricing and FTP Funding and Financing (per tenure) - Kebijakan Required Yield Financing (FTP Pertenor) Policy on Required Yield Financing (FTP per tenure) - Pricing Negosiasi wesel export, Usance LC/TR/UPAS Pricing Negotiation on export mondey orders, Usance LC/TR/UPAS - Ketentuan back to back Retail & Wholesale Provision on back-to-back Retail & Wholesale - Mekanisme persetujuan disburse dan dana keluar IDR Approval mechanism on disbursement and outgoing IDR funds - Mekanisme persetujuan disburse USD Approval mechanism on USD disbursement - Penyampaian Realisasi Program KPR dan Multiguna Submission of Housing Ownership Credit (KPR) and Multipurpose Program - Perpanjangan Program KPR dan Multiguna Extension of KPR and Multipurpose Program - Penambahan Kuota Funding Lewat Juni 2023 Additional Funding Quota Pass June 2023	- Indra Falatehan - Suhendar - Herry Syafril - Karno - Irvan Yulian Noor - Riksa Prakoso - Elisa Ratnawardani - Wang Wardhana - Catur Andayani - Moh. Madina Hendrik Soe'oed - Citra Kurniawati - Demmy Rizkiadhy - Agung Pambudi - Dicky Zakiudin - Aria Pratama - Marissa Widyanti - Muhammad Lutfi - Siti Nurhidayah - Priyo Wibowo - Aljufri Alparisi - Hari Damanik - Hafni Marfuah - Anas Zainuddin - Melani - Nia Anidiawati



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
7	24 Juli 2023 July 24, 2023	- Materi IRM ERM Material - Funding and Financing Trend - Monitoring Liquidity and Key Risks Indicator - Konsentrasi Pendanaan Funding Concentration - Liquidity Stress Test- Aug 2023 - Market Update - Global Update, US and emerging countries - Local Economic Update, PDB dan Inflasi Local Economic Update, PDB and Inflation - ALM Performance - Bankwide Overview - Funding Structure - Financing Structure - FDR IDR, Valas dan penggunaan RIM IDR FDR, Foreign Exchange and use of RIM - COF & Yield Financing - COF & Yield Projection - Yield and COF Treasury - NIM Performance Update - Liquidity Update - Cash Flow IDR dan USD Projection IDR and USD Cash Flow Projection - Borrowing capacity and Nostro - Pipeline Enterprise Banking - Pipeline Retail Banking - COF yield projection - Ketentuan Spesial Nisbah IDR & USD Provision on IDR & USD Special Ratio - Ketentuan Pricing Counter Deposito Breakable dan bulanan Provision on Breakable and monthly Deposit Counter Pricing - Ketentuan Pricing Counter Bulanan IDR & USD Provision on Monthly IDR & USD Counter Pricing - Ketentuan spesial nisbah CASA retail & wholesale - IDR & USD Provision on retail & wholesale CASA special ratio - IDR & USD - Ketentuan Pricing Non-Mudharabah KL Provision on Non-Mudharabah KL Pricing - Pricing Pembiayaan dan FTP Funding and Financing (per tenor) Financing Pricing and FTP Funding and Financing (per tenure) - Kebijakan Required Yield Financing (FTP Pertenor) Policy on Required Yield Financing (FTP per tenure) - Pricing Negosiasi wesel export, Usance LC/TR/UPAS Pricing Negotiation on export money orders, Usance LC/TR/UPAS - Ketentuan back to back Retail & Wholesale Provision on back-to-back Retail & Wholesale - Mekanisme persetujuan disburse dan dana keluar IDR Approval mechanism on IDR disbursement and outgoing funds - Mekanisme persetujuan disburse USD Approval mechanism on USD disbursement - Support CASA Valas - Remittance Transaction Program (RTP) 2023 CASA Foreign Exchange Support - Remittance Transaction Program (RTP) 2023 - KPR Hijrah Tenor Maksimal 25 Tahun KPR Hijrah of Maximum Tenure 25 Years	- Indra Falatehan - Suhendar - Herry Syafril - Karno - Irvan Yulian Noor - Catur Andayani - Moh. Madina Hendrik Soe'oad - Citra Kurniawati - Demmy Rizkiadhy - Agung Bayu S - Agus Andipratama Amir - Prima Ekalisanti - Aria Pratama - Marissa Widyanti - Muhammad Lutfi - Septiliana Silvia - Moch Irfan Muhazir - Aljufri Alparisi - Hari Damanik - Hafni Marfuah - Muhammad Alviza - Melani Yulinar



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
8	24 Agustus 2023 August 24, 2023	- Materi IRM ERM Material - Funding and Financing Trend - Monitoring Liquidity and Key Risks Indicator - Konsentrasi Pendanaan Funding Concentration - Liquidity Stress Test-September 2023 - Market Update - Global Update, US and emerging countries - Local Economic Update, PDB dan Inflasi Local Economic Update, PDB and Inflation - ALM Performance - Bankwide Overview - Funding Structure - Financing Structure - FDR IDR, Valas dan penggunaan RIM IDR FDR, Foreign Exchange and use of RIM - COF & Yield Financing - COF & Yield Projection - Yield and COF Treasury - NIM Performance Update - Liquidity Update - Cash Flow IDR dan USD Projection IDR and USD Cash Flow Projection - Borrowing capacity and Nostro - Pipeline Enterprise Banking - Pipeline Retail Banking - COF yield projection - Ketentuan Spesial Nisbah IDR & USD Provision on IDR & USD Special Ratio - Ketentuan Pricing Counter Deposito Breakable dan bulanan Provision on Breakable and monthly Deposit Counter Pricing - Ketentuan Pricing Counter Bulanan IDR & USD Provision on Monthly IDR & USD Monthly Counter Pricing - Ketentuan spesial nisbah CASA retail & wholesale - IDR & USD Provision on retail & wholesale CASA special ratio - IDR & USD - Ketentuan Pricing Non-Mudharabah KL Provision on Non-Mudharabah KL Pricing - Pricing Pembiayaan dan FTP Funding and Financing (per tenor) Financing Pricing and FTP Funding and Financing (per tenure) - Kebijakan Required Yield Financing (FTP Pertenor) Provisison on Required Yield Financing (FTP per tenure) - Pricing Negosiasi wesel export, Usance LC/TR/UPAS Pricing Negotiation on export money orders, Usance LC/TR/UPAS - Pricing Nego LC/SKBDN LC/SKBDN Pricing Negotiation - Ketentuan back to back Retail & Wholesale Provision on back-to-back Retail & Wholesale - Mekanisme persetujuan disburse dan dana keluar IDR Approval mechanism on IDR disbursement and outgoing funds - Mekanisme persetujuan disburse USD Approval mechanism on NUSD disbursement - Cash Income Smoothing HI-1000 HI-1000 Cash Income Smoothing - Program Hadiah Komitmen CASATD Valas CASATD Foreign Exchange Prize Program - Special Nisbah Rekening Valas Mudharabah Mudharabah Foreign Exchange Account Special Ratio	- Indra Falatehan - Suhendar - Herry Syafril - Karno - Irvan Yulian Noor - Riksa Prakoso - Dedy suryadi Dharmawan - Moh. Madina Hendrik Soe'oed - Citra Kurniawati - Demmy Rizkiadhy - Agung Bayu S - Agus Andipratama Amir - Prima Ekalisanti - Marissa Widyanti - Muhammad Lutfi - Amien - Hari Damanik - Hafni Marfuah - Muhammad Alviza - Melani Yulinar



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
9	25 September 2023 September 25, 2023	1. Materi IRM ERM Material a. Funding and Financing Trend b. Monitoring Liquidity and Key Risks Indicator c. Konsentrasi Pendanaan Funding Concentration d. Liquidity Stress Test-Oktober 2023 Liquidity Stress Test-October 2023 e. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial BI Policy on BI Macroprudential Liquidity Incentive 2. Market Update a. Global Update, US and emerging countries b. Local Economic Update, PDB dan Inflasi Local Economic Update, PDB and Inflation 3. ALM Performance a. Bankwide Overview b. Funding Structure c. Financing Structure d. FDR IDR, Valas dan penggunaan RIM IDR FDR, Foreign Exchange and use of RIM e. COF & Yield Financing f. COF & Yield Projection g. Yield and COF Treasury h. Insentif GWM GWM Incentive i. NIM Performance Update 4. Liquidity Update a. Cash Flow IDR dan USD Projection IDR & USD Cash Flow Projection b. Borrowing capacity and Nostro c. Pipeline Enterprise Banking d. Pipeline Retail Banking e. COF yield projection 5. Ketentuan Spesial Nisbah IDR & USD Provision on IDR & USD Special Ratio 6. Ketentuan Pricing Counter Deposito Breakable dan bulanan Provision on Breakable and monthly Deposit Counter Pricing 7. Ketentuan Pricing Counter Bulanan IDR & USD Provision on Monthly IDR & USD Counter Pricing 8. Ketentuan spesial nisbah CASA retail & wholesale - IDR & USD Provision on retail & wholesale CASA special ratio - IDR & USD 9. Ketentuan Pricing Non-Mudharabah KL Provision on Non-Mudharabah KL Pricing 10. Pricing Pembiayaan dan FTP Funding and Financing (per tenor) Financing Pricing and FTP Funding and Financing (per tenure) 11. Kebijakan Required Yield Financing (FTP Pertenor) Provision on Required Yield Financing (FTP per Tenure) 12. Pricing Negosiasi wesel export, Usance LC/TR/UPAS Pricing Negotiation on export money orders, Usance LC/TR/UPAS 13. Pricing Nego LC/SKBDN LC/SKBDN Pricing Negotiation 14. Ketentuan back to back Retail & Enterprise Provision on back-to-back Retail & Enterprise 15. Mekanisme persetujuan disburse dan dana keluar IDR Approval mechanism on IDR disbursement and outgoing funds 16. Mekanisme persetujuan disburse USD Approval mechanism on USD disbursement	• Indra Falatehan • Suhendar • Herry Syafril • Karno • Irvan Yulian Noor • Riksa Prakoso • Dedy suryadi Dharmawan • Moh. Madina Hendrik Soe'oad • Citra Kurniawati • Aznovri Kurniawan • Agung Bayu S • Elisa Ratnawardani • Agus Andipratama Amir • Teguh Nugroho • Prima Ekalisanti • Affandi • Marissa Widyanti • Muhammad Lutfi • Amien • Hari Damanik • Hafni Marfuah • Eko Dermawan • Heri Sugiri • Muhammad Aria Pratama • Anas Zainuddin • Muhammad Alviza • Melani Yulinar



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
10	23 Oktober 2023 October 23, 2023	1. Materi IRM ERM Material a. Funding and Financing Trend b. Monitoring Liquidity and Key Risks Indicator c. Konsentrasi Pendanaan Funding Concentration d. Liquidity Stress Test-Oktober 2023 Liquidity Stress Test-October 2023 2. Market Update a. Global Update, US and China b. Local Economic Update, Interest Rate, Inflasi, dan Neraca Dagang Indonesia Local Economic Update, Interest Rate, Inflation and Indonesia Trade Balance c. Pasar Obligasi Bonds Market 3. ALM Performance a. Bankwide Overview b. Funding Structure c. Financing Structure d. FDR IDR, Valas dan penggunaan RIM IDR FDR, Foreign Exchange and use of RIM e. COF & Yield Financing f. COF & Yield Projection g. Yield and COF Treasury h. Repricing Gap i. NIM Performance Update 4. Liquidity Update a. Cash Flow IDR dan USD Projection IDR and USD Cash Flow Projection b. Borrowing capacity and Nostro c. PYD SMF d. Pipeline Enterprise Banking e. Pipeline Retail Banking f. COF yield projection 5. Ketentuan Spesial Nisbah IDR & USD Provision on IDR & USD Special Ratio 6. Ketentuan Pricing Counter Deposito Breakable dan bulanan Provision on Breakable and monthly Deposit Counter Pricing 7. Ketentuan Pricing Counter Bulanan IDR & USD Provision on Monthly IDR & USD Counter Pricing 8. Ketentuan spesial nisbah CASA retail & wholesale - IDR & USD Provision on retail & wholesale CASA special ratio - IDR & USD 9. Ketentuan Pricing Non-Mudharabah KL Provision on Non-Mudharabah KL Pricing 10. Ketentuan Income Smoothing Provision on Income Smoothing 11. Ketentuan FTP FTP Provision 12. Kebijakan Required Yield Financing Policy on Required Yield Financing 13. Pricing Negosiasi wesel export, Usance LC/TR/UPAS Pricing Negotiation on export money orders, Usance LC/TR/UPAS 14. Pricing Nego LC/SKBDN LC/SKBDN Pricing Negotiation 15. Ketentuan back to back Retail & Enterprise Provision on back-to-back Retail & Enterprise 16. Mekanisme persetujuan disburse dan dana keluar IDR Approval mechanism on IDR disbursement and outgoing funds 17. Mekanisme persetujuan disburse USD Approval mechanism on US disbursement 18. Program Special Pricing Consumer Financing Consumer Financing Special Pricing Program	• Indra Falatehan • Suhendar • Herry Syafril • Karno • Irvan Yulian Noor • Riksa Prakoso • Dedy suryadi Dharmawan • Wahyu Avianto • Moh. Madina Hendrik Soe'oed • Citra Kurniawati • Aznovri Kurniawan • Agung Bayu S • Catur Andayani • Agus Andipratama Amir • Demmy Rizkiadhy • Prima Ekalisanti • Afrid Wibisono • Marissa Widyanti • Muhammad Lutfi • Agung Prambudi • Dicky Zakiudin • Hari Damanik • Hafni Marfuah • Eko Dermawan • Mustaqim • Muhammad Aria Pratama • Moch Irfan Muhazir • Muhammad Alviza • Melani Yulinar



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
11	16 November 2023 November 16, 2023	- Materi IRM ERM Material - Funding and Financing Trend - Monitoring Liquidity and Key Risks Indicator - Konsentrasi Pendanaan Funding Concentration - Liquidity Stress Test-Oktober 2023 Liquidity Stress Test-October 2023 - Market Update - Global Update - Geopolitics Tension - Local Economic Update - Pasar Obligasi Indonesia Indonesian Bonds Market - ALM Performance - Bankwide Overview - Funding Structure - Financing Structure - FDR IDR, Valas dan penggunaan RIM IDR FDR, Foreign Exchange - COF & Yield Financing - Repricing Gap - COF & Yield Projection - COF & Yield Treasury - NIM Performance Update - Liquidity Update - Cash Flow IDR dan USD Projection IDR and USD Cash Flow Projection - Borrowing capacity and Nostro - Pipeline Enterprise Banking - Pipeline Retail Banking - COF yield projection - Penempatan BPKH di BMI BPKH placement in BMI - Ketentuan Spesial Nisbah IDR & USD Provision on IDR & USD Special Ratio - Ketentuan Pricing Counter Deposito Breakable dan bulanan Provision on Breakable and monthly Deposit Counter Pricing - Ketentuan Pricing Counter Bulanan IDR & USD Provision on Monthly IDR & USD Counter Pricing - Ketentuan spesial nisbah CASA retail & wholesale - IDR & USD Provision on retail & wholesale CASA special ratio - IDR & USD - Ketentuan Pricing Non-Mudharabah KL Provision on Non-Mudharabah KL Pricing - Ketentuan Income Smoothing Provision on Income Smoothing - Ketentuan FTP FTP Provision - Kebijakan Required Yield Financing Policy on Required Yield Financing - Pricing Negosiasi wesel export, Usance LC/TR/UPAS Pricing Negotiation on export money orders, Usance LC/TR/UPAS - Pricing Nego LC/SKBDN LC/SKBDN Pricing Negotiation - Ketentuan Back to Back dalam Produk Pembiayaan Beragunan Tunai Provision on Back-to-Back in Cash-Backed Financing Products - Mekanisme persetujuan disburse dan dana keluar IDR Approval mechanism on IDR disbursement and outgoing funds - Mekanisme persetujuan disburse USD Approval mechanism on USD disbursement	- Indra Falatehan - Suhendar - Irvan Yulian Noor - Dedy suryadi Dharmawan - Riksa Prakoso - Moh. Madina Hendrik Soe'oed - Citra Kurniawati - Agung Bayu S - Agung Prambudi - Aznovri Kurniawan - Catur Andayani - Elisa Ratnawardani - Muhammad Fachry Maulana - Agus Andipratama Amir - Afrid Wibisono - Eko Dermawan - Prima Ekalisanti - Amien - Muhammad Lutfi - Tjipta Maulana - Hari Damanik - Hafni Marfuah - Muhammad Alviza



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
12	11 Desember 2023 December 11, 2023	1. Materi IRM ERM Material a. Funding and Financing Trend b. Indikator Risiko Likuiditas Liquidity Risk Indicators 2. ALM Performance a. Bankwide Overview b. Funding & Financing Trend c. DPK Growth d. Forecast Balance Sheet EOY 2023 3. Liquidity Update a. Pipeline Enterprise Banking b. Pipeline Retail Banking c. Cashflow Projection 4. Recommendation a. Ketentuan Spesial Nisbah IDR Provision on IDR Special Ratio b. Ketentuan Spesial Nisbah USD Provision on USD Special Ratio c. Ketentuan Spesial Price USD Cabang KL dengan Akad Non Mudharabah Provision on KL Branch USD Special Price with Non-Mudharabah Agreement d. Ketentuan Income Smoothing Provision on Income Smoothing e. Pricing Counter Deposito DOC (Deposito bulanan breakable) Breakable Monthly Deposit (DOC) Counter Pricing f. Pricing Counter Deposito Bulanan IDR dan USD Monthly IDR and USD Deposit Counter Pricing g. Spesial Nisbah CASA Retail & Enterprise Retail & Enterprise CASA Special Ratio h. Ketentuan FTP FTP Provision i. Pricing Pembiayaan Financing Pricing j. Pricing Trade Finance Trade Finance Pricing k. Pricing Nego LC/SKBDN LC/SKBDN Pricing Negotiation l. Ketentuan Back to Back dalam Produk Pembiayaan Beragunan Tunai Provision on Back-to-Back in Cash-Backed Financingg Products m. Mekanisme persetujuan disburse dan dana keluar Approval mechanism on disbursement and outgoing funds n. Mekanisme persetujuan disburse USD Approval mechanism on USD disbursement	• Indra Falatehan • Suhendar • Hery Syafril • Karno • Irvan Yulian Noor • Riksa Prakoso • Dedy suryadi Dharmawan • Moh. Madina Hendrik Soe'oed • Citra Kurniawati • Aznovri Kurniawan • Agung Bayu S • Agus Andipratama Amir • Agung Prambudi • Prima Ekalisanti • Marissa Widyanti • Muhammad Lutfi • Amien • Hari Damanik • Hafni Marfuah • Eko Dermawan • Putri Kumara Ratri • Muhammad Alviza • Melani Yulinar



Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Manajemen Risiko, Bank Muamalat Indonesia didasari pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
7. Piagam Komite Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

PIAGAM KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko telah memiliki Piagam sebagai pedoman dalam menjalankan perannya, yang mengatur mengenai tujuan pembentukan komite; tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite; struktur dan keanggotaan komite; rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan; masa tugas anggota komite dari Pihak Independen; mekanisme evaluasi kinerja; dan periode revidi pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala. Piagam Komite Manajemen Risiko mengalami pembaruan terakhir pada tanggal 15 Februari 2023 dan akan dilakukan pembaruan susunan keanggotaan dan piagam komite mengikuti perubahan susunan pengurus serta struktur organisasi terkini Bank.

LEGAL BASIS

The establishment of the Risk Management Committee of Bank Muamalat Indonesia is based on the following laws and regulations:

1. Financial Services Authority Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks.
2. Financial Services Authority Regulation No. 65/POJK.03/2016 dated 23 December 2016 on Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
3. Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 on Requirement to Prepare and Implement Bank Credit or Financing Policies for Commercial Banks.
4. Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated 7 December 2009 on Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
5. Circular Letter of Financial Services Authority No. 12/13/DPbS dated 30 April 2010 on Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
6. General Risk Management Policy of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
7. The Charter of the Risk Management of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE CHARTER

The Risk Management Committee retains the Charter as guidelines to perform its role, which regulates the purpose of establishing the committee; duties, responsibilities, and authorities of the committee; structure and membership of the committee; committee meetings, quorum, and decision making; term of office of committee members from Independent Party; performance assessment mechanism; and review period on the work guidelines and procedures of the committee periodically. The Risk Management Committee Charter was last updated on 15 February 2023 and will be updated on the membership composition, and the committee charter follows occurring changes in the management structure as well as the Bank's latest organizational structure.



STRUKTUR, KOMPOSISI, DAN DASAR PENGANGKATAN

Berikut adalah komposisi keanggotaan Komite Manajemen Risiko per 31 Desember 2023.

STRUCTURE, COMPOSITION, AND BASIS OF APPOINTMENT

Following is the membership composition of Risk Management Committee as of 31 December 2023.

Fungsi/Jabatan dalam Komite Function/Position in Committee	Pelaksanaan/Pejabat dalam Organisasi Implementation/Official in the Organization	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Ketua merangkap anggota tetap dengan hak suara Chairman concurrently as permanent member with voting rights	Direktur Kepatuhan, Risiko & Hukum Director of Compliance, Risk & Legal	Surat Keputusan Direksi No. 011/B/DIR-KPTS/II/2023 tentang Komite Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Board of Director Decree No. 011/B/DIR-KPTS/II/2023 regarding Risk Management Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Wakil Ketua merangkap anggota tetap dengan hak suara Vice Chairman concurrently as permanent member with voting rights	Direktur Keuangan & Strategi Director of Finance & Strategy	Surat Keputusan Direksi No. 011/B/DIR-KPTS/II/2023 tentang Komite Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Board of Director Decree No. 011/B/DIR-KPTS/II/2023 regarding Risk Management Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Anggota Tetap dengan Hak Suara Permanent Member with voting rights	- Direktur Utama - Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan - Direktur Operasi & Digital - SEVP Enterprise Banking - SEVP Human Capital - President Director - Director of Financing Business Risk - Director of Operation & Digital - SEVP Enterprise Banking - SEVP Human Capital	Surat Keputusan Direksi No. 011/B/DIR-KPTS/II/2023 tentang Komite Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Board of Director Decree No. 011/B/DIR-KPTS/II/2023 regarding Risk Management Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Sekretaris merangkap anggota tetap tanpa hak suara Secretary concurrently as permanent member without voting rights	Head of Integrated Risk Management	Surat Keputusan Direksi No. 011/B/DIR-KPTS/II/2023 tentang Komite Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Board of Director Decree No. 011/B/DIR-KPTS/II/2023 regarding Risk Management Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Anggota tetap tanpa hak suara Permanent member without voting rights	- Head of Internal Audit - Head of Compliance	Surat Keputusan Direksi No. 011/B/DIR-KPTS/II/2023 tentang Komite Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Board of Director Decree No. 011/B/DIR-KPTS/II/2023 regarding Risk Management Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Anggota tidak tetap tanpa hak suara Non-permanent member without voting rights	Kepala Unit Kerja (Head of Level 1) sesuai agenda pembahasan, yang mewakili fungsi operasional, bisnis dan financing risk Head of Work Unit (Head of Level 1) in accordance with discussion agenda, representing operational, business and financing risk functions	Surat Keputusan Direksi No. 011/B/DIR-KPTS/II/2023 tentang Komite Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Board of Director Decree No. 011/B/DIR-KPTS/II/2023 regarding Risk Management Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko dalam menjalankan fungsinya memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Manajemen Risiko, sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat berkala Komite Manajemen Risiko, termasuk menetapkan agenda pembahasan rapat dan peserta rapat khusus yang perlu menghadiri rapat dimaksud.

AUTHORITIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee in carrying out its functions has the authority and responsibilities as stated in the Risk Management Committee Charter, as follows:

- Holding the Risk Management Committee periodic meetings, including determining the meeting agenda as well as special meeting participants who need to attend the meeting.



2. Melaksanakan wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan seluruh Jajaran Direksi yaitu:
 - a. Melaksanakan kewenangan Komite Kebijakan Pembiayaan serta penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko Bank Muamalat antara lain:
 - (1) Melakukan penyusunan kebijakan, strategi dan ketentuan terkait penerapan Manajemen Risiko dan tata kelola perusahaan.
 - (2) Melakukan pemantauan dan perbaikan dan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi antara lain atas:
 - Penilaian atas perkembangan profil risiko bank dan tingkat kesehatan bank.
 - Penetapan strategi dan limit risiko sebagai bagian dari *risk appetite* Bank.
 - Pemantauan dan kajian risiko Bank terhadap *risk appetite* dan strategi pengelolaan risiko.
 - Ketaatan terhadap ketentuan limit-limit risiko yang dihadapi Bank secara umum.
 - Implementasi budaya manajemen risiko pada seluruh level organisasi Bank.
 - (3) Memastikan komitmen seluruh jajaran manajemen dan karyawan, dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan Bank.
 - (4) Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal (*irregularities*) termasuk dalam keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis Bank dan pengambilan posisi atau eksposur risiko yang tidak sesuai dengan limit yang telah ditetapkan.
 - (5) Melakukan pemantauan, perbaikan dan/atau penyempurnaan terkait proses tata kelola, analisis risiko, Kepatuhan dan evaluasi dalam kerangka *Governance, Compliance & Risk* (GRC).
 3. Memberikan saran dan Langkah perbaikan kepada Direksi terkait dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan butir 2 di atas.
 4. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bank Muamalat terkait dengan pemenuhan prinsip syariah, maka laporan disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah.
2. Carry out its authorities and responsibilities to provide recommendations to the President Director and all levels of the Board of Directors, namely as follows:
 - a. Carry out the authority of the Financing Policy Committee as well as prepare policies, strategies and guidelines for implementing Bank Muamalat Risk Management, including the following
 - (1) Prepare policies, strategies and provisions related to the implementation of Risk Management and corporate governance.
 - (2) Monitor and improve and/or refine the implementation of Risk Management based on assessment results including:
 - Assessment on the development of the Bank's risk profile and the Bank's sound level.
 - Determining risk strategies and limits as part of the Bank's risk appetite.
 - Monitoring and review of the Bank's risks on risk appetite and risk management strategy
 - Compliance with the provisions on risk limits generally faced by the Bank.
 - Implementation of risk management culture at all levels of the Bank's organization.
 - (3) Ensure the commitment of all levels of the management and employees in implementing the principles of transparency, accountability, responsibility, independency and fairness in managing the Bank.
 - (4) Determine (*justification*) matters related to business decisions that are not in line with normal procedures (*irregularities*), among others, the possibility of significant business expansion compared to the Bank's business plan and taking the positions or risk exposures that do not comply with set limits.
 - (5) Carry out monitoring, improvement and/or enhancement related to governance processes, risk analysis, compliance and assessment within the *Governance, Compliance & Risk* (GRC) framework.
 3. Providing suggestions and corrective measures to the Board of Directors related to a copy to the Board of Commissioners regarding matters related to point 2 above.
 4. In the event of deviations in the implementation of Bank Muamalat's Financing Policy related to the fulfillment of sharia principles, the report is submitted to the Sharia Supervisory Board.



PROFIL KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Profil ketua Komite Manajemen Risiko disajikan pada bab “Profil Perusahaan”.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Sepanjang tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 8 (delapan) kali rapat dalam satu (1) tahun dan membuat seluruh risalah rapat komite.
2. Menetapkan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank untuk Periode Semester I dan Semester II tahun 2023.
3. Menetapkan *Risk Appetite & Risk Tolerance* Risiko Operasional Tahun 2023.
4. Membahas mengenai Hasil *Assesment* Penilaian Profil Risiko Keamanan Siber.
5. Melakukan pembahasan mengenai kebijakan Bank Indonesia terkait insentif keringanan besaran giro wajib minimum.
6. Melakukan pembahasan mengenai laporan profil risiko dan RBBR
7. Membahas mengenai skenario dan hasil dari beberapa *stress test*.

SEKRETARIS KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko memiliki sekretaris yang ditunjuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi. Adapun tanggung jawab dari Sekretaris Komite antara lain:

1. Menyelenggarakan rapat Komite Manajemen Risiko sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya atau berdasarkan *calendar of events* Bank Muamalat Indonesia, termasuk menyiapkan daftar hadir peserta rapat Komite Manajemen Risiko.
2. Menyampaikan materi rapat Komite Manajemen Risiko kepada peserta rapat yang diundang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE PROFILE

The profile of the chairman of the Risk Management Committee is presented in the “Company Profile” chapter.

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE IN 2023

Details on training and/or competency development can be found in the section on Training and/or Competency Development of the Board of Directors in this Annual Report.

IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Throughout the year 2023, the Risk Management Committee carried out its duties and responsibilities with details as describe below:

1. Held 8 (eight) meetings within 1 (one) year and completed all of the concerned minutes of meetings.
2. Established the Bank’s Soundness Level Assessment Results for Semester I and II Periods of 2023.
3. Established the Risk Appetite & Risk Tolerance in Operational Risks of 2023.
4. Discussed Assessment Results of Cyber Security Risk Profile.
5. Discussed Bank Indonesia’s policies related to incentives for reducing the amount of minimum statutory reserves.
6. Discussed the report on risk profile and RBBR
7. Discussed the scenario and results of several stress tests.

SECRETARIAT OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee has a secretary who is appointed and determined by a Decree of the Board of Directors. The responsibilities of the Committee Secretary include the following:

1. Holding Risk Management Committee meeting according to a predetermined schedule or based on the calendar of events of Bank Muamalat Indonesia, including preparing a list of attendees for the Risk Management Committee meeting.
2. Submitting materials for the Risk Management Committee meeting to the invited meeting participants no later than 1 (one) working day before the meeting is held.



3. Mengundang peserta rapat Komite Manajemen Risiko termasuk melakukan koordinasi untuk persiapan materi yang akan dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko.
4. Menyusun risalah rapat Komite Manajemen Risiko selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah rapat diselenggarakan untuk ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua Manajemen Risiko, atau penggantinya.
5. Mengirimkan risalah rapat kepada seluruh anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan seluruh peserta yang hadir berdasarkan kepentingannya untuk ditindaklanjuti.
6. Melaporkan penyelenggaraan rapat Komite Manajemen Risiko kepada Direksi dan/atau untuk kepentingan lainnya.
7. Memantau tindak lanjut atas hasil rapat Komite Manajemen Risiko.

3. Inviting participants to the Risk Management Committee meeting, including coordinating the preparation of material to be discussed in the Risk Management Committee meeting.
4. Preparing minutes of the Risk Management Committee meeting no later than 5 (five) working days after the meeting is held to be signed by the Chairman or Deputy Chairman of Risk Management Committee.
5. Distributing the minutes of meetings to all permanent members of the Risk Management Committee and all attendees based on their interests to be followed up.
6. Reporting the implementation of the Risk Management Committee meeting to the Board of Directors and/or for other purposes.
7. Monitoring follow-up to the Risk Management Committee meeting resolution.

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan

Mengacu pada Piagam Komite Manajemen Risiko Bank Muamalat Indonesia, rapat komite wajib diselenggarakan sedikitnya 6 (enam) kali dalam setahun. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah dari Direksi yang menjadi anggota tetap dan memiliki hak suara.

Direksi yang menjadi anggota tetap dan memiliki hak suara yang berhalangan hadir dapat mewakilkan suaranya kepada Direktur lain yang menjadi anggota tetap dan memiliki hak suara, serta disampaikan kepada Sekretaris Komite Manajemen Risiko minimal 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat. Direktur yang menjadi anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan memiliki hak suara hanya dapat mewakili 1 (satu) suara anggota tetap dan memiliki hak suara lainnya, yang berhalangan hadir.

Selain itu, Komite Manajemen Risiko juga wajib dihadiri oleh Ketua atau Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko atau penggantinya. Komite Manajemen Risiko dapat mengambil keputusan atas kebijakan, metodologi, limit dan strategi terkait dengan manajemen risiko.

MEETINGS OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Policy

Referring to the Risk Management Committee Charter of Bank Muamalat Indonesia, committee meetings are required to be held at least 6 (six) times within 1 (one) year. Meetings may be held if attended by more than half of the Board of Directors who are permanent members and holding the rights to vote.

Members of the Board of Directors who are permanent members and holding voting rights are unable to attend can represent their votes to their Directors who are permanent members and have voting rights, and submit to the Secretary of the Risk Management Committee at least 1 (one) working day prior to the meeting implementation. Directors who are permanent members of the Risk Management Committee and have voting rights can only represent 1 (one) permanent member's vote and have other voting rights who are unable to attend.

Moreover, the Risk Management Committee must also be attended by the Chairman or Vice Chairman of the Risk Management Committee or the replacement. The risk Management Committee may make decisions on policies, methodologies, limits and strategies related to risk management.



Keputusan yang diambil menjadi rekomendasi yang perlu memperoleh keputusan lebih lanjut dari Direksi. Pengambilan keputusan dalam rapat komite diambil berdasarkan mufakat. Apabila tidak terjadi mufakat, maka keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan memiliki hak suara, yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat tersebut dan disetujui oleh Ketua Komite atau Wakil Ketua Komite.

Realisasi

Sepanjang tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 8 (delapan) kali rapat dengan agenda sebagai berikut.

Decisions taken may serve as recommendations that require further decisions from the Board of Directors. Decision-making in the committee meetings may be carried out based on deliberation to reach consensus. In the event consensus is not reached, then decisions are regarded as legitimate if approved by more than half of the members of the Risk Management Committee holding voting rights, attendant and/or represented in the meetings and approved by the Committee Chairman or Vice Chairman.

Realization

During the year 2023, Risk Management Committee held 8 (eight) meetings with the agenda listed below.

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
1	19 Januari 2023 January 19, 2023	1. Penilaian Risk Based Bank Rating (RBBR) Triwulan IV 2022 Assessment on Risk-Based Bank Rating (RBBR) of Quarter IV 2022 2. Target Market dan Risk Acceptance Criteria (TMRAC) Wholesale Wholesale Target Market and Risk Acceptance Criteria (TMRAC) 3. TMRAC Pembiayaan Kepada Koperasi dan Muhammadiyah TMRAC Financing to Cooperatives and Muhammadiyah	• Karno • Wahyu Avianto • Irvan Yulian Noor
2	2 Februari 2023 February 2, 2023	1. Action Plan Penyelesaian Dokumen TBO dan ER Nasabah Pembiayaan Inti – Plasma Sawit Action Plan on Completion of TBO and ER Customer Core Financing – Palm Plasma 2. Komite Pembiayaan Level Direksi Selama Masa Transisi Financing Committee of the Board of Directors Level During Transition Period	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Irvan Yulian Noor • Riksa Prakoso
3	20 Maret 2023 March 20, 2023	1. GWM Insentif GWM Incentive 2. Usulan Risk Appetite & Risk Tolerance Risiko Operasional Tahun 2023 Recommendation on Risk Appetite & Risk Tolerance for Operational Risks in 2023 3. Hasil Simulasi Email Phishing Email Phishing Simulation Results	• Karno • Hery Syafril • Irvan Yulian Noor • Riksa Prakoso
4	13 April 2023 April 13, 2023	1. Rencana Penilaian Profil Risiko TW I 2023 Plans for Risk Profile Assessment of TW I 2023 2. Risiko Konsentrasi 50 Depositor Inti dan 25 Debitur Inti Concentration Risk of 50 Core Depositors and 25 Core Debtors	• Indra Falatehan • Karno • Hery Syafril • Wahyu Avianto • Riksa Prakoso
5	21 Juni 2023 June 21, 2023	1. Hasil Assesment Penilaian Profil Risiko Keamanan Siber Results of Risk Profile Assessment on Cyber Security 2. Usulan Penginian Parameter Key Risk Indicator (KRI) atau Profil Risiko Operasional Recommendation on Update of Key Risk Indicator (KRI) Parameter or Operational Risk Profile 3. Profil Risiko DPLK DPLK Risk Profile	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Irvan Yulian Noor
6	13 Juli 2023 July 13, 2023	Pelaporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank untuk Periode Semester I 2023 Reporting on Assessment Results of the Bank's Soundness Level for Semester I 2023 Period	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Irvan Yulian Noor
7	2 Oktober 2023 October 2, 2023	1. GWM Insentif GWM Incentive 2. Denda Regulator Regulatory Fines	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Suhendar • Irvan Yulian Noor
8	21 Desember 2023 December 21, 2023	Update Kinerja dan Proforma Penilaian Profil Risiko DPLK Syariah Muamalat Update on Performance and Risk Profile Assessment Pro-Forma of Muamalat Sharia DPLK	• Indra Falatehan • Karno • Wahyu Avianto • Irvan Yulian Noor • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Deddy Suryadi Dharmawan



KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Selain di dalam rapat, keputusan dalam Komite Manajemen Risiko juga bisa terjadi di luar rapat, yakni secara sirkuler kepada seluruh anggota tetap dan memiliki hak suara, berdasarkan persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Komite Manajemen Risiko. Keputusan Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara sirkuler mengikat semua anggota atau unit kerja di Bank Muamalat Indonesia terkait dengan risiko. Keputusan di luar rapat Komite Manajemen Risiko berlaku apabila telah disetujui oleh seluruh anggota tetap Komite dan memiliki hak suara, secara bulat atas usulan yang diajukan.

TINDAK LANJUT KEPUTUSAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Apabila Komite Manajemen Risiko memberikan masukan dan rekomendasi yang perlu memperoleh keputusan lebih lanjut dari Direksi, maka masukan dan rekomendasi Komite Manajemen Risiko harus ditindaklanjuti dengan memo usulan yang ditujukan kepada Direksi untuk memperoleh keputusan lebih lanjut. Memo usulan disusun oleh unit kerja yang menyampaikan usulan tersebut dalam rapat Komite Manajemen Risiko. Jika terdapat Unit Kerja yang melakukan presentasi dalam Rapat Komite Manajemen Risiko, maka rapat wajib dihadiri oleh Kepala Unit Kerja Level 1 (L1) atau pejabat yang setingkat.

DECISIONS OUTSIDE THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING

Decisions in the Risk Management Committee can also take place outside the meeting, namely in a circular manner, to all permanent members with voting rights to the Risk Management Committee, based on prior approval from the Chairman of the Risk Management Committee. The Risk Management Committee's decision, carried out in a circular manner, binds all members or work units at Bank Muamalat Indonesia regarding risks. Decisions outside the Risk Management Committee meeting shall be effective if all permanent committee members with voting rights have approved unanimously on the submitted proposal.

FOLLOW-UP TO THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING RESOLUTION

In the event that the Risk Management Committee provides input and recommendations that require further decisions from the Board of Directors, the input and recommendations of the Risk Management Committee must be followed up with a proposal memo addressed to the Board of Directors to obtain further decisions. The proposal memo is prepared by the work unit that submits the proposal at the Risk Management Committee meeting. In the event that there is a Work Unit that makes the presentation at the Risk Management Committee Meeting, the meeting must be attended by the Head of the Level 1 Work Unit (L1) or an official at the same level.



Komite Sumber Daya Manusia

Human Capital Committee

DASAR HUKUM

Komite Sumber Daya Manusia Bank Muamalat Indonesia dibentuk dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Piagam Komite Sumber Daya Manusia.

LEGAL BASIS

The Human Capital Committee of Bank Muamalat Indonesia is established with reference to laws and regulations, namely Financial Services Authority Regulation No 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks and the Human Capital Committee Charter.

PIAGAM KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Komite Sumber Daya Manusia telah memiliki Piagam sebagai pedoman dalam menjalankan perannya, yang mengatur mengenai tujuan pembentukan komite; tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite; struktur dan keanggotaan komite; rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan; masa tugas anggota komite dari Pihak Independen; mekanisme evaluasi kinerja; dan periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala. Piagam Komite Sumber Daya Manusia mengalami pembaruan terakhir pada Maret 2024 dan akan dilakukan pembaruan susunan keanggotaan dan piagam komite mengikuti perubahan susunan pengurus serta struktur organisasi terkini Bank.

HUMAN CAPITAL COMMITTEE CHARTER

The Human Capital Committee retains its Charter as guidelines to perform its role, that regulates the purpose of establishing the committee; duties, responsibilities, and authorities of the committee; structure and membership of the committee; committee meetings, quorum, and decision-making; term of office of committee members from Independent Party; performance assessment mechanism; and review period on the work guidelines and procedures of the committee periodically. The Human Capital Committee Charter was last updated in March 2024 and will be updated on the membership composition, and the committee charter follows occurring changes in the management structure as well as the Bank's latest organizational structure.

STRUKTUR, KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN

Berikut adalah komposisi keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2023.

STRUCTURE, COMPOSITION AND BASIS OF APPOINTMENT

Following is membership composition of the Human Capital Committee as of 31 December 2023.

Fungsi/Jabatan dalam Komite Function/Position in Committee	Pelaksanaan/Pejabat dalam Organisasi Implementation/Official in the Organization	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Ketua merangkap Anggota Chairman, concurrently as Member	Direktur Utama President Director	Surat Keputusan No. 041/B/DIR-KPTS/VII/2023 tentang Komite Sumber Daya Manusia PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Decree No. 041/B/DIR-KPTS/VII/2023 regarding Human Capital Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Sekretaris merangkap Anggota Secretary, concurrently as Member	Head of HC Strategy	Surat Keputusan No. 041/B/DIR-KPTS/VII/2023 tentang Komite Sumber Daya Manusia PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Decree No. 041/B/DIR-KPTS/VII/2023 regarding Human Capital Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk



Fungsi/Jabatan dalam Komite Function/Position in Committee	Pelaksanaan/Pejabat dalam Organisasi Implementation/Official in the Organization	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Anggota Member	- Direktur Kepatuhan, Risiko & Hukum - Direktur Keuangan & Strategi - Direktur Operasi & Digital - Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan - SEVP Retail Banking - SEVP Human Capital - SEVP Enterprise Banking - Director of Compliance, Risk & Legal - Director of Finance & Strategy - Director of Operation & Digital - Director of Financing Business Risk - SEVP of Retail Banking - SEVP of Human Capital - SEVP of Enterprise Banking	Surat Keputusan No. 041/B/DIR-KPTS/VII/2023 tentang Komite Sumber Daya Manusia PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Decree No. 041/B/DIR-KPTS/VII/2023 regarding Human Capital Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Mengacu pada Piagam Komite Sumber Daya Manusia, berikut adalah tugas dan tanggung jawab komite:

- Memberikan arahan atas strategi dan kebijakan dalam bidang sumber daya manusia, menyetujui pelaksanaan program remunerasi sumber daya manusia.
- Memberikan persetujuan atas proposal penempatan sumber daya manusia untuk posisi-posisi atau jabatan pada unit *business*, *region* dan *functional head* sesuai hirarki yang berlaku.
- Memberikan persetujuan atas promosi karyawan ke level *senior management team* dan/atau yang lebih tinggi.
- Memberikan persetujuan atas usulan khusus di bidang sumber daya manusia yang melebihi kewenangan *Head of* dan/atau kewenangan Direktur yang membidangi sumber daya manusia.

PROFIL KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Profil ketua Komite Sumber Daya Manusia disajikan pada bab "Profil Perusahaan".

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Sepanjang tahun 2023, Komite Sumber Daya Manusia telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan rincian sebagai berikut:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Pursuant to the Human Capital Committee Charter, the following are the duties and responsibilities of the committee:

- Providing direction on strategies and policies in the field of human capital, approving the implementation of the human capital remuneration program
- Providing approval to proposals for the placement of human capital for positions in the business unit, region and functional head according to the prevailing hierarchy.
- Providing approval for the promotion of employees to the senior management team level and/or higher.
- Providing approval to special proposals in the field of human capital that exceed the authority of the Head of and/or the authority of the Director in charge of human capital.

HUMAN CAPITAL COMMITTEE PROFILE

Profile of the chairman of the Human Capital Committee is available in the "Company Profile" chapter.

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL COMMITTEE IN 2023

Information on training and/or competency development can be found in the section on Training and/or Competency Development of the Board of Directors in this Annual Report.

IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES OF HUMAN CAPITAL COMMITTEE

Throughout the year 2023, the Human Capital Committee conducted its duties and responsibilities with details as follows:



1. Menyelenggarakan 10 (sepuluh) kali rapat dalam 1 (satu) tahun dan membuat seluruh risalah rapat komite.
2. Melakukan pembahasan mengenai *Performance Management Scheme*, *Talent Management*, dan *Performance Improvement Plan* (PIP).
3. Memberikan rekomendasi terkait struktur organisasi Perseroan yang sesuai dengan kebutuhan Bank, dan kajian terkait *Job Evaluation* serta *Employee Engagement*.
4. Melaporkan pelaksanaan atas program-program terkait Human Capital yang dijalankan.

RAPAT KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Kebijakan

Sesuai dengan Piagam Komite Sumber Daya Manusia Bank Muamalat Indonesia, rapat komite harus dilakukan setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh minimal separuh lebih anggota Komite yang memiliki hak suara.

Rapat dipimpin oleh ketua komite dan apabila berhalangan hadir dapat dipimpin oleh salah satu anggota komite. Pelaksanaan rapat dilakukan secara tatap muka atau melalui video konferensi.

Ketua dapat menggelar rapat apabila terdapat permasalahan yang mendesak yang harus didiskusikan dan diputuskan oleh komite. Komite juga memiliki kewenangan untuk mengundang pimpinan unit kerja terkait untuk memberikan informasi dan klarifikasi yang diperlukan serta dapat memberikan usulan dan rekomendasi namun tidak memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan.

Terkait dengan pengambilan keputusan dalam rapat, komite senantiasa mengupayakan secara musyawarah mufakat tanpa melakukan voting dan dianggap sah apabila dihadiri Ketua Komite dan setengah lebih anggota komite. Apabila tidak terdapat kebutuhan penyelesaian masalah/keputusan dalam rapat maka dapat disirkulasikan menggunakan memorandum sebagai pendukung oleh anggota komite.

Apabila terdapat pembahasan yang tidak dapat diputuskan oleh komite pada suatu level dapat diajukan oleh Ketua Komite untuk dibahas dan diputuskan dalam Rapat Komite pada level komite yang lebih tinggi. Hasil dan keputusan dalam setiap Rapat Komite wajib disampaikan kepada Sekretaris Komite pada level Komite yang lebih tinggi dan kepada Head of HC Strategy.

1. Held 10 (ten) meetings in 1 (one) year and completed all of the committee's minutes of meetings.
2. Discussed the Performance of the Management Scheme, Talent Management, and Performance Improvement Plan (PIP).
3. Provided recommendations related to the Company's organizational structure in line with the Bank's needs, and reviews on Job Evaluation as well as on Employee Engagement.
4. Reported the implementation of programs related to Human Capital carried out.

HUMAN CAPITAL COMMITTEE MEETING

Policy

In accordance with the Bank Muamalat Indonesia Human Resources Committee Charter, committee meetings must be held at least 1 (one) time in 4 (four) months or at any time as needed. Meetings are considered valid if attended by at least half of the Committee members who have voting rights.

The meeting is chaired by the chairman of the committee and if absent, it can be chaired by one of the committee members. Meetings are conducted face-to-face or via video conference.

The Chairman may call a meeting if there are urgent issues that must be discussed and decided by the committee. The committee also has the authority to invite the head of the relevant work unit to provide the necessary information and clarification and can provide suggestions and recommendations but does not have voting rights in the decision-making process.

Regarding decision-making in meetings, the committee always seeks consensus without voting and is considered valid if attended by the Chairman of the Committee and more than half of the committee members. If there is no need for problem solving / decision making in the meeting, it can be circulated using memoranda as support by committee members.

If there is a discussion that cannot be decided by the committee at a level, it can be submitted by the Chairman of the Committee to be discussed and decided in the Committee Meeting at a higher committee level. The results and decisions in each Committee Meeting must be submitted to the Secretary of the Committee at a higher Committee level and to the Head of HC Strategy.



Realisasi

Sepanjang tahun 2023, Komite Sumber Daya Manusia telah menyelenggarakan 10 (sepuluh) kali rapat yang diselenggarakan sebagai berikut:

Realization

During the year 2023, the Human Capital Committee held 10 (ten) meetings with details as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
1	28 Februari 2023 February 28, 2023	1. Performance Management Scheme 2. Talent Management 3. Employee Engagement Survey	• Indra Falatehan • Karno • Hery Syafril • Wahyu Avianto • Suhendar • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Anton Hendrianto • Vino Y. Lamantu • Esti Budiarti • M. Dinar Prasetya • Diennul Chayra Cahyaningtyas • Irma Kurniawati • Demmy Rizkiadhy
2	30 Maret 2023 March 30, 2023	1. HC Efficiency 2. Successor of Head of Financing Operation	• Indra Falatehan • Karno • Hery Syafril • Wahyu Avianto • Suhendar • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Anton Hendrianto • Vino Y. Lamantu • Esti Budiarti • M. Dinar Prasetya
3	8 Mei 2023 May 8, 2023	1. Year-End Rating 2022 2. Employee Engagement Survey (EES) 3. Muamalat Associate Program (MAP) Consumer	• Indra Falatehan • Karno • Hery Syafril • Wahyu Avianto • Suhendar • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Anton Hendrianto • Vino Y. Lamantu • Esti Budiarti • M. Dinar Prasetya • Irma Kurniawati • Diennul Chayra Cahyaningtyas • Agung Prambudi (Invitee agenda ke-3) • Agung Bayu Sulistiono (Invitee agenda ke-3)
4	5 Juni 2023 June 5, 2023	1. Confidential 2. Confidential 3. Confidential	• Indra Falatehan • Karno • Hery Syafril • Wahyu Avianto • Suhendar • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Anton Hendrianto • Vino Y. Lamantu • Esti Budiarti • M. Dinar Prasetya • Rima Rizki Amelia • Diennul Chayra Cahyaningtyas



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
5	26 Juni 2023 June 26, 2023	1. Confidential 2. Confidential	• Indra Falatehan • Karno • Hery Syafril • Wahyu Avianto • Suhendar • Riksa Prakoso • Anton Hendrianto • Vino Y. Lamantu • M. Dinar Prasetya • Rima Rizki Amelia
6	27 Juni 2023 June 27, 2023	ESA - MESA Scheme	• Indra Falatehan • Karno • Hery Syafril • Suhendar • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Anton Hendrianto • M. Dinar Prasetya • Hayunaji (invitee agenda ke-3) • Meliawati (invitee agenda ke-3)
7	7 September 2023 September 7, 2023	1. Confidential 2. Confidential 3. Confidential	• Indra Falatehan • Karno • Hery Syafril • Suhendar • Wahyu Avianto • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Dedy Suryadi Dharmawan • Anton Hendrianto • Vino Y. Lamantu • Esti Budiarti • M. Dinar Prasetya • Diennul Chayra Cahyaningtyas
8	14 November 2023 November 14, 2023	1. Confidential 2. Performance Improvement Plan (PIP)	• Indra Falatehan • Karno • Hery Syafril • Suhendar • Wahyu Avianto • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Dedy Suryadi Dharmawan • Anton Hendrianto • Vino Y. Lamantu • Esti Budiarti • M. Dinar Prasetya • Diennul Chayra Cahyaningtyas
9	18 Desember 2023 December 18, 2023	1. MPP 2024 2. Job Evaluation	• Indra Falatehan • Karno • Hery Syafril • Suhendar • Wahyu Avianto • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Dedy Suryadi Dharmawan • Anton Hendrianto • Vino Y. Lamantu • Esti Budiarti • M. Dinar Prasetya
10	27 Desember 2023 December 27, 2023	Confidential	• Indra Falatehan • Karno • Hery Syafril • Suhendar • Wahyu Avianto • Riksa Prakoso • Irvan Yulian Noor • Dedy Suryadi Dharmawan • Vino Y. Lamantu • M. Dinar Prasetya



Komite Kebijakan Pembiayaan

Financing Policy Committee

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia merujuk pada ketentuan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
4. Piagam Komite Kebijakan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia.

PIAGAM KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Bank Muamalat telah memiliki Piagam Komite Kebijakan Pembiayaan sebagai pedoman anggota komite dalam menjalankan perannya, yang mengatur mengenai tujuan pembentukan komite; tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite; struktur dan keanggotaan komite; rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan; masa tugas anggota komite dari Pihak Independen; mekanisme evaluasi kinerja; dan periode revidi pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala. Piagam Komite Kebijakan Pembiayaan mengalami pembaruan terakhir pada tanggal 20 Februari 2023 dan akan dilakukan pembaharuan susunan keanggotaan dan piagam komite mengikuti perubahan susunan pengurus serta struktur organisasi terkini Bank.

LEGAL BASIS

The establishment of the Financing Policy Committee of Bank Muamalat Indonesia refers to the following provisions:

1. Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.03/2022 regarding Sharia Commercial Banks.
2. Financial Services Authority Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks.
3. Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.03/2017 regarding Obligation for the Preparation and Implementation of Bank Credit or Financing Policies for Commercial Banks.
4. Charter of the Financing Policy Committee of Bank Muamalat Indonesia.

FINANCING POLICY COMMITTEE CHARTER

Bank Muamalat retains the Charter of the Financing Policy Committee as guidelines for committee members to carry out committee's role, which regulates the purpose of establishing the committee; duties, responsibilities, and authorities of the committee; structure and membership of the committee; committee meetings, quorum, and decision making; term of office of committee members from Independent Party; performance assessment mechanism; and review period on the work guidelines and procedures of the committee periodically. The Financing Policy Committee Charter was last updated on February 20, 2023 and will be updated on the membership composition, and the committee charter follows occurring changes in the management structure as well as the Bank's latest organizational structure.



STRUKTUR, KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN

Per 31 Desember 2023, komposisi Komite Kebijakan Pembiayaan adalah sebagai berikut.

STRUCTURE, COMPOSITION AND BASIS OF APPOINTMENT

As of 31 December 2023, the composition of the Financing Policy Committee is as follows:

Fungsi/Jabatan dalam Komite Function/Position in Committee	Pelaksanaan/Pejabat dalam Organisasi Implementation/Official in the Organization	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Ketua merangkap anggota tetap dengan hak suara Chairman concurrently as permanent member with voting rights	Direktur Utama President Director	Surat Keputusan No. 012/B/DIR-KPTS/II/2023 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Decree No. 012/B/DIR-KPTS/II/2023 regarding Financing Policy committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Wakil Ketua merangkap anggota tetap dengan hak suara Vice Chairman concurrently as permanent member with voting rights	Direktur Kepatuhan, Risiko dan Hukum Director of Compliance, Risk and Legal	Surat Keputusan No. 012/B/DIR-KPTS/II/2023 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Decree No. 012/B/DIR-KPTS/II/2023 regarding Financing Policy committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Sekretaris merangkap anggota tetap tanpa hak suara Secretary concurrently as permanent member without voting rights	Head of Integrated Risk Management	Surat Keputusan No. 012/B/DIR-KPTS/II/2023 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Decree No. 012/B/DIR-KPTS/II/2023 regarding Financing Policy committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Anggota Tetap dengan Hak Suara Permanent Member with voting rights	- Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan - Direktur Operasi dan Digital - SEVP Enterprise Banking - SEVP Human Capital - SEVP Retail Banking - Director of Financing Business Risk - Director of Operation and Digital - SEVP of Enterprise Banking - SEVP of Human Capital - SEVP of Retail Banking	Surat Keputusan No. 012/B/DIR-KPTS/II/2023 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Decree No. 012/B/DIR-KPTS/II/2023 regarding Financing Policy committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Anggota tetap tanpa hak suara Permanent member without voting rights	- Head of Internal Audit - Head of Compliance	Surat Keputusan No. 012/B/DIR-KPTS/II/2023 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Decree No. 012/B/DIR-KPTS/II/2023 regarding Financing Policy committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Anggota tidak tetap tanpa hak suara Non-permanent member without voting rights	Kepala unit kerja (head of level 1) sesuai dengan agenda pembahasan, yang mewakili fungsi operasional, bisnis, dan financing risk Head of work unit (head of level 1) in accordance with discussion agenda, representing operational, business and financing risk functions	Surat Keputusan No. 012/B/DIR-KPTS/II/2023 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Decree No. 012/B/DIR-KPTS/II/2023 regarding Financing Policy committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Kebijakan Pembiayaan memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Piagam Komite Kebijakan Pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada direksi dalam penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB), terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.
- Mengawasi agar KPB dapat diterapkan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPB. Selanjutnya Komite juga melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan dan perbaikan.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Financing Policy Committee is tasked with the duties and responsibilities as contained in the Charter of the Financing Policy Committee, namely as follows:

- To provide feedback to the Board of Directors in formulating the Bank's Financing Policies (KPB), especially which relate to the formulation of the prudence principle in financing.
- To oversee to ensure that KPB is applicable consequently and consistently as well as to formulate solutions in the event there are obstacles or constraints in implementing KPB. Subsequently, the Committee also periodically reviews KPB and provides recommendations to the Board of Directors when changes and improvements are required.



- | | |
|--|--|
| <p>3. Memantau dan mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus pembiayaan. Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank Muamalat Indonesia dan nasabah pembiayaan besar tertentu. Kebenaran pelaksanaan BMPD (Batas Maksimum Penyaluran Dana). Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan KPB. Upaya Bank Muamalat Indonesia dalam memenuhi kecukupan jumlah pencadangan pembiayaan. | <p>3. To monitor and evaluate:</p> <ol style="list-style-type: none"> Development quality of the overall financing portfolio. Appropriate implementation of authority to decline/excise financing. Appropriate process of providing, developing, , and quality financing extended to parties related to Bank Muamalat Indonesia and to certain large financing customers. Appropriate implementation of BMPD (Maximum Fund Distribution Limit). Compliance with the provisions of laws and other regulations in the implementation of providing financing. Settlement of problematic financing as determined by KPB. Bank Muamalat Indonesia's efforts to ensure adequate financing reserves. |
|--|--|

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN TAHUN 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT OF FINANCING POLICY COMMITTEE IN 2023

Information on training and/or competency development can be found in the section on Training and/or Competency Development of the Board of Directors in this Annual Report.

PROFIL KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Profil ketua Komite Kebijakan Pembiayaan disajikan pada bab "Profil Perusahaan".

PROFILE OF FINANCING POLICY COMMITTEE

The profile of the Financing Policy Committee is presented in the chapter on "Company Profile".

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Sepanjang tahun 2023, Komite Kebijakan Pembiayaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan rincian sebagai berikut:

- Menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat dalam satu (1) tahun dan membuat seluruh risalah rapat komite.
- Melakukan pembahasan mengenai Limit Kewenangan Pembiayaan dan Penyesuaian Klasifikasi Target Market dan menetapkan *Financing Allocation Limit* untuk Sektor Transportasi & Jasa Keuangan.
- Menetapkan Limit Kewenangan Pembiayaan *Bad Bank*.
- Melakukan perumusan Kewenangan Memutus Pembiayaan dan perumusan Mitigasi Risiko Konsentrasi Pembiayaan.
- Melakukan pembahasan mengenai Prosedur Pembiayaan Segmentasi *Corporate* dan *Commercial*.

IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES OF FINANCING POLICY COMMITTEE

Throughout the year 2023, the Financing Policy Committee carried out its duties and responsibilities with details as follows:

- Held 6 (six) meetings in 1 (one) year and completed all of the committee's minutes of meetings.
- Conducted discussions on Financing Authority Limits and Adjustments in Target Market Classification and determined Financing Allocation Limits for the Transportation & Financial Services Sectors.
- Determined Bad Bank Financing Authority Limits.
- Formulated the Authority to Decide Financing and formulated Financing Concentration Risk Mitigation.
- Conducted discussions on Corporate and Commercial Segmentation Financing Procedures.



RAPAT KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Kebijakan

Piagam Komite Kebijakan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia mengatur rapat Komite Kebijakan Pembiayaan yang wajib diselenggarakan paling kurang 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.

Realisasi

Sepanjang tahun 2023, Komite Kebijakan Pembiayaan telah menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

MEETING OF THE FINANCING POLICY COMMITTEE

Policy

The Charter of the Financing Policy Committee of Bank Muamalat Indonesia regulates the Financing Policy Committee meetings, required to be held at least 6 (six) times in 1 (one) year.

Realization

During the year 2023, the Financing Policy Committee held 6 (six) meetings with the following agenda:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
1	13 April 2023 April 13, 2023	- Usulan Limit Kewenangan Pembiayaan Recommendation on Financing Authority Limits - Usulan Penyesuaian Klasifikasi Target Market dan Financing Allocation Limit untuk Sektor Transportasi & Jasa Keuangan Recommendation on Adjustments in Target Market Classification and Financing Allocation Limit for the Transportation & Financial Services Sectors	- Indra Falatehan - Karno - Hery Syafril - Wahyu Avianto - Riksa Prakoso
2	8 Mei 2023 May 8, 2023	- Usulan Penyempurnaan RAC Kuala Lumpur (KL) Branch Recommendation on the Improvement of RAC of Kuala Lumpur (KL) Branch - Usulan Limit Kewenangan Pembiayaan Bad Bank Recommendation of Bad Bank Financing Authority Limits	- Indra Falatehan - Karno - Hery Syafril - Suhendar - Irvan Yulian Noor - Riksa Prakoso
3	29 Agustus 2023 August 29, 2023	- Credit Risk Update - Kewenangan Memutus Pembiayaan Authority to Excise Financing - Retail Portfolio Performance (Ditunda Next Meeting) Retail Portfolio Performance (postponed to next meeting)	- Indra Falatehan - Karno - Hery Syafril - Suhendar - Irvan Yulian Noor - Riksa Prakoso
4	18 September 2023 September 18, 2023	- Retail Portfolio Performance - Tindak Lanjut LQF 25 Debitur Inti Follow-Up on LQF of 25 Core Debtors - Commodity Murabahah (Disampaikan pada Komite Bisnis) Murabahah Commodity (presented to Business Committee)	- Indra Falatehan - Karno - Hery Syafril - Suhendar - Irvan Yulian Noor - Riksa Prakoso
5	26 Oktober 2023 October 26, 2023	- Penyempurnaan Prosedur Pembiayaan Segmentasi Corporate dan Commercial Improvement of Corporate and Commercial Segmentation Financing Procedures - Usulan Penyempurnaan Fungsi Sekertaris Komite Pembiayaan Enterprise Recommendation on Improvement of the Secretary's Function of the Enterprise Financing Committee	- Indra Falatehan - Karno - Hery Syafril - Suhendar - Irvan Yulian Noor - Riksa Prakoso - Wahyu Avianto - Deddy Suryadi Dharmawan
5	22 November 2023 November 22, 2023	- Retail Portfolio Management - Usulan Target Market & Financing Allocation Limit (FAL) Tahun 2024 Recommendation on Target Market & Financing Allocation Limit (FAL) for the Year 2024 - Usulan Mitigasi Risiko Konsentrasi Pembiayaan Recommendation on Mitigation of Financing Concentration Risk	- Indra Falatehan - Karno - Suhendar - Irvan Yulian Noor - Riksa Prakoso - Wahyu Avianto - Deddy Suryadi Dharmawan
6	21 Desember 2023 December 21, 2023	- Kewenangan Memutus Pembiayaan Segmen Retail Authority to Excise Retail Segment Financing - Mekanisme Permintaan Opini kepada Dewan Komisaris Mechanism to Request for Opinion to the Board of Commissioners	- Indra Falatehan - Karno - Suhendar - Irvan Yulian Noor - Riksa Prakoso - Wahyu Avianto - Deddy Suryadi Dharmawan



Komite Bisnis

Business Committee

DASAR HUKUM

Komite Bisnis dibentuk untuk membantu Direksi dalam pengelolaan dan pengembangan produk, baik yang sudah ada maupun produk baru. Pembentukan Komite Bisnis Bank Muamalat Indonesia merujuk pada ketentuan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/OJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
4. Piagam Komite Bisnis Bank Muamalat Indonesia.

PIAGAM KOMITE BISNIS

Bank Muamalat telah memiliki Piagam Komite Bisnis sebagai pedoman anggota komite dalam menjalankan perannya, yang mengatur mengenai tujuan pembentukan komite; tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite; struktur dan keanggotaan komite; rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan; masa tugas anggota komite dari Pihak Independen; mekanisme evaluasi kinerja; dan periode revaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala. Piagam Komite Bisnis mengalami pembaruan terakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan akan dilakukan pembaharuan susunan keanggotaan dan piagam komite mengikuti perubahan susunan pengurus serta struktur organisasi terkini Bank.

LEGAL BASIS

The Business Committee is established to assist the Board of Directors in the management and development of products, both existing and new products. The establishment of the Business Committee of Bank Muamalat Indonesia refers to the following provisions:

1. Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.03/20 regarding Sharia Commercial Banks.
2. Financial Services Authority Regulation No. 13/OJK.03/2021 dated 30 July 2021 regarding Implementation of Commercial Banks' Products.
3. Financial Services Authority Regulation 01/POJK.07/2013 dated 26 July 2013 regarding Consumer Protection in Financial Services Sector.
4. Charter of the Business Committee of Bank Muamalat Indonesia.

BUSINESS COMMITTEE CHARTER

Bank Muamalat retains the Business Committee Charter as guidelines for committee members to carry out the committee's role, which regulates the purpose of establishing the committee; duties, responsibilities, and authorities of the committee; structure and membership of the committee; committee meetings, quorum, and decision-making; term of office of committee members from Independent Party; performance assessment mechanism; and review period on the work guidelines and procedures of the committee periodically. The Business Committee Charter was last updated on 28 February 2023 and will be updated on the membership composition, and the committee charter follows occurring changes in the management structure as well as the Bank's latest organizational structure.



STRUKTUR, KOMPOSISI, DAN DASAR PENGANGKATAN

Per 31 Desember 2023, komposisi Komite Bisnis adalah sebagai berikut.

STRUCTURE, COMPOSITION, AND BASIS OF APPOINTMENT

As of 31 December 2023, the composition of the Business Committee is as follows:

Fungsi/Jabatan dalam Komite Function/Position in Committee	Pelaksanaan/Pejabat dalam Organisasi Implementation/Official in the Organization	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Ketua merangkap anggota tetap dengan hak suara Chairman concurrently as permanent member with voting rights	Direktur Utama President Director	Surat Keputusan No. 032/B/DIR-KPTS/VI/2023 tentang Komite Bisnis PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Decree No. 031/B/DIR-KPTS/VI/2023 regarding Business Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Wakil Ketua merangkap anggota tetap dengan hak suara Vice Chairman concurrently as permanent member with voting rights	- SEVP Retail Banking - SEVP Enterprise Banking	Surat Keputusan No. 032/B/DIR-KPTS/VI/2023 tentang Komite Bisnis PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Decree No. 031/B/DIR-KPTS/VI/2023 regarding Business Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Sekretaris merangkap anggota tetap tanpa hak suara Secretary concurrently as permanent member without voting rights	Head of Business Finance & Planning	Surat Keputusan No. 032/B/DIR-KPTS/VI/2023 tentang Komite Bisnis PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Decree No. 031/B/DIR-KPTS/VI/2023 regarding Business Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Anggota Tetap dengan Hak Suara Permanent Member with voting rights	- Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan - Direktur Keuangan dan Strategi - Direktur Operasi dan Digital - SEVP Human Capital - Director of Financing Business Risk - Director of Finance and Strategy - Director of Operation and Digital - SEVP of Human Capital	Surat Keputusan No. 032/B/DIR-KPTS/VI/2023 tentang Komite Bisnis PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Decree No. 031/B/DIR-KPTS/VI/2023 regarding Business Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Anggota tetap tanpa hak suara Permanent member without voting rights	- Head of Internal Audit - Head of Compliance - Head of Integrated Risk Management	Surat Keputusan No. 032/B/DIR-KPTS/VI/2023 tentang Komite Bisnis PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Decree No. 031/B/DIR-KPTS/VI/2023 regarding Business Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Anggota tidak tetap tanpa hak suara Non-permanent member without voting rights	Kepala unit kerja (head of level 1) sesuai dengan agenda pembahasan, yang mewakili fungsi operasional, bisnis, dan financing risk Head of work unit (head of level 1) in accordance with discussion agenda, representing the operational, business and financing risk functions	Surat Keputusan No. 032/B/DIR-KPTS/VI/2023 tentang Komite Bisnis PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Decree No. 031/B/DIR-KPTS/VI/2023 regarding Business Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Bisnis memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Piagam Komite Bisnis, yaitu sebagai berikut:

- Menyelenggarakan rapat Komite Bisnis sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun, termasuk menyiapkan risalah rapat.
- Melakukan *review* dan menetapkan produk yang diajukan oleh *product owner*/inisiator untuk dicantumkan di Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (RPPB).
- Menentukan kategori suatu produk/aktivitas, yaitu:
 - Produk Bank Dasar Baru, diantaranya: Produk Bank Dasar Baru atau Produk Bank Lanjutan Baru.
 - Bukan termasuk Produk Bank Baru

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Business Committee is tasked with the duties and responsibilities as contained in the Business Committee Charter, namely as follows:

- Held 4 (four) Business Committee meetings within a year, including the completion of the minutes of meetings.
- Reviewed and determined products proposed by product owners/ initiators to be included in the Bank's Product Implementation Plan (RPPB).
- Determined the categories for products/activities, namely as follows:
 - Bank's New Basic Products, including: Bank's New Basic Products or Bank's New Advanced Products.
 - Not included as Bank's New Products



4. Menentukan wajib atau tidaknya mengajukan izin produk ke OJK termasuk perlu atau tidaknya dilakukan uji coba terbatas.
5. Mengkaji dan memutuskan keberlanjutan atau penghentian suatu produk berdasarkan hasil evaluasi produk berkala.
6. Memastikan mitigasi risiko telah disiapkan untuk setiap risiko yang muncul dari usulan produk dan aktivitas baru.
7. Mengawasi dan memantau tindak lanjut dari masukan Komite Bisnis Bank atas suatu produk yang diajukan.
8. Meminta laporan hasil pengembangan atau evaluasi produk dari fungsi bisnis atau pemilik produk.

4. Determined if it is mandatory or not to apply for a product permit to OJK, including if a limited trial is needed or not.
5. Reviewed and decided on the continuation or discontinuation of a product based on results of periodic product evaluation.
6. Ensured that risk mitigation is prepared for any risks that arise from proposed new products and activities.
7. Supervised and monitored follow-ups on feedbacks from the Bank's Business Committee regarding a proposed product.
8. Requested a report on product development or evaluation results from the business function or product owner.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE BISNIS TAHUN 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT OF BUSINESS COMMITTEE IN 2023

Information on training and/or competency development can be found in the section on Training and/or Competency Development of the Board of Directors in this Annual Report.

PROFIL KOMITE BISNIS

Profil ketua Komite Bisnis disajikan pada bab "Profil Perusahaan".

PROFILE OF BUSINESS COMMITTEE

The profile of the Business Committee is presented in the chapter on "Company Profile".

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE BISNIS

Sepanjang tahun 2023, Komite Bisnis telah memberikan rekomendasi dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat dalam satu (1) tahun dan membuat seluruh risalah rapat komite.
2. Melakukan pembahasan Rencana Penyelenggaraan Produk Bank Tahun 2023
3. Memantau perkembangan dan dokumen Rencana Penyelenggaraan Produk Bank Tahun 2023
4. Menetapkan pembahasan Rencana Penyelenggaraan Produk Bank Tahun 2024.

IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES OF BUSINESS COMMITTEE

Throughout the year 2023, the Business Committee provided recommendations in the context of fulfilling its duties and responsibilities, with details as follows:

1. Held 3 (three) meetings in 1 (one) year and completed all of the committee's minutes of meetings.
2. Conducted discussions on Bank Product Implementation Plan for 2023
3. Monitored development and document of Bank Product Implementation Plan for 2023
4. Determined the discussions on Bank Product Implementation Plan for 2024.



RAPAT KOMITE BISNIS

Kebijakan

Piagam Komite Bisnis Bank Muamalat Indonesia mengatur rapat Komite Bisnis yang wajib diselenggarakan paling kurang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Realisasi

Sepanjang tahun 2023, Komite Bisnis baru menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat, mengingat Komite Bisnis ini baru dibentuk pada Februari 2023. Berikut rincian agenda rapat dimaksud:

BUSINESS COMMITTEE MEETING

Policy

The Charter of the Business Committee of Bank Muamalat Indonesia regulates the Business Committee meetings which are required to be held at least 4 (four) times in 1 (one) year.

Realization

During the year 2023, the Business Committee held 3 (three) meetings, considering Business Committee is newly established in February 2023. Following are details of meeting agenda:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
1	12 Juli 2023 July 12, 2023	- Pembahasan Rencana Penyelenggaraan Produk Bank Tahun 2023 Discussion on Bank Product Implementation Plan for 2023 - Pembahasan Produk Layanan Emas Online Discussion on Online Gold Services Product - Pembahasan Rencana Perluasan Varian KPR dengan Tenor 25 Tahun Discussion on Plans to Expand House Ownership Credit (KPR) Variants with 25-Year Tenure	- PRD dan Plt. RBD : Indra Falatehan - FSD : Suhendar - FBD : Hery Syafril - ODD : Wahyu Avianto - EBD : Irvan Yulian Noor - HCD : Riksa Prakoso - CRD : Karno - CPL : Dyah Ekowati - BFP : Demmy Rizkiadhy, Rizki Sabilly Firdaus, Mulya Azhari, Yasmin Alija Haqi - IAT dan AFD: Riva Yan Abdillah - IRM: Muhammad Lutfi, Tri Wahyudi Umar Abdillah - CFB : Agung Bayu Sulistiono, Muhammad Aria Pratama - GLM : Moh. Madina Hendrik Soe'oad, Citra Kurniawati - RFT : Agus Andipratama Amir, Muhammad Yusuf Bayuaji - DIB : Dadang Rohandi - EBB : Ilham Wahyudin - ITY : Sandhy Sofian - OSR : Zefri Ananta



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
2	20 September 2023 September 20, 2023	1. Pembahasan Perkembangan dan Dokumen Rencana Penyelenggaraan Produk Bank Tahun 2023 Discussion on Development and Document of Bank Product Implementation Plan for 2023 2. Pembahasan Implementasi Cash Recycle Machine (CRM) Discussion on Implementation of Cash Recycle Machine (CRM) 3. Pembahasan Review Tahunan Supply Chain Financing (SCF) BPJS Discussion on Annual Review of BPJS Supply Chain Financing (SCF) 4. Pembahasan Pengajuan Produk Baru Commodity Murabahah Discussion on Murabahah Commodity New Product Proposal	• PRD : Indra Falatehan • FSD : Suhendar • FBD : Hery Syafril • ODD : Wahyu Avianto • EBD : Irvan Yulian Noor • HCD : Riksa Prakoso • CRD : Karno • CPL : Dyah Ekowati • TSM : Demmy Rizkiadhy, Rizki Sabilly Firdaus, Yasmin Alija Haqi • IAT : Tegar Sangga Barkah • IRM: Catur Andayani, Affandi • CFB : Agung Bayu Sulistiono, Moch Irfan Muhazir • GLM : Moh. Madina Hendrik Soe'oad, Lia Damayanti, Arief Budianto, Herlina • RFT : Agus Andipratama Amir, Muhammad Yusuf Bayuaji, Marissa Widyanti • DIB : Dadang Rohandi, Syaekhan Thamrin • EBB : Ilham Wahyudin, Nurman Purnomo • ITY : Sandhy Sofian • BFP : Aznovri Kurniawan
3	30 Oktober 2023 October 30, 2023	1. Pembahasan RPPB Unit Retail Funding and Transaction Discussion on RPPB of Retail Funding and Transaction Unit 2. Pembahasan RPPB Unit Transaction Banking Discussion on RPPB of Transaction Banking Unit 3. Pembahasan RPPB Unit Global Market Discussion on RPPB of Global Market Unit 4. Pembahasan RPPB Unit Consumer Financing Business Discussion on RPPB of Consumer Financing Business Unit 5. Pembahasan RPPB Unit Digital Banking Discussion on RPPB of Digital Banking Unit	• PRD : Indra Falatehan • FSD : Suhendar • FBD : Hery Syafril • ODD : Wahyu Avianto • EBD : Irvan Yulian Noor • RBD: Dedy Suryadi Dharmawan • HCD : Riksa Prakoso • CRD : Karno • CPL : Dyah Ekowati • TSM : Rizki Sabilly Firdaus, Yasmin Alija Haqi • IAT : Tegar Sangga Barkah • IRM: Catur Andayani • CFB : Agung Bayu Sulistiono • GLM : Moh. Madina Hendrik Soe'oad, Annisa Rosalina S • TBG: Afrid Wibisono, Aznil Rahmat • RFT : Agus Andipratama Amir, Marissa Widyanti • DIB : Dadang Rohandi • EBB : Ilham Wahyudin, Nurman Purnomo, Prima Ekalisanti • ITY : Sandhy Sofian, Adi Sutrisna, Umni Makhallina • BFP : Aznovri Kurniawan



Komite Pembiayaan

Financing Committee

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia merujuk pada ketentuan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
4. Piagam Komite Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia.

PIAGAM KOMITE PEMBIAYAAN

Bank Muamalat telah memiliki tata tertib kerja mengenai Komite Pembiayaan, yang mengatur mengenai tujuan pembentukan komite; tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite; struktur dan keanggotaan komite; rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan; masa tugas anggota komite dari Pihak Independen; mekanisme evaluasi kinerja; dan periode revidi pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala. Prosedur Komite Pembiayaan mengalami pembaruan terakhir pada tanggal 11 Januari 2024 dan akan dilakukan pembaharuan susunan keanggotaan dan piagam komite mengikuti perubahan susunan pengurus serta struktur organisasi terkini Bank.

LEGAL BASIS

The establishment of the Financing Committee of Bank Muamalat Indonesia refers to the following provisions:

1. Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.03/20 regarding Sharia Commercial Banks.
2. Financial Services Authority Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks.
3. Financial Services Authority Regulation 42/POJK.03/2017 regarding Obligations for the Preparation and Implementation of Credit or Bank Financing Policies for Commercial Banks.
4. Charter of the Financing Committee of Bank Muamalat Indonesia.

FINANCING COMMITTEE CHARTER

Bank Muamalat retains the work procedures of the Financing Committee which regulate the purpose of establishing the committee; duties, responsibilities, and authorities of the committee; structure and membership of the committee; committee meetings, quorum, and decision-making; term of office of committee members from Independent Party; performance assessment mechanism; and review period on the work guidelines and procedures of the committee periodically. The procedures of the Financing Committee were last updated on 11 January 2024 and will be updated on the membership composition, and the committee charter follows occurring changes in the management structure as well as the Bank's latest organizational structure.



STRUKTUR, KOMPOSISI, DAN DASAR PENGANGKATAN

Per 31 Desember 2023, komposisi Komite Pembiayaan segmen enterprise banking berdasarkan Surat Edaran Direksi No. IRM/P/II/275 tentang Komite Pembiayaan Segmen Enterprise Banking adalah sebagai berikut:

STRUCTURE, COMPOSITION, AND BASIS OF APPOINTMENT

As of 31 December 2023, the composition of the Financing Committee of enterprise banking segment based on Board of Directors Circulate Letter No. IRM/P/II/275 regarding Financing Committee of Enterprise Banking Segment is as follows:

ANGGOTA KOMITE PEMBIAYAAN SEGMENT ENTERPRISE BANKING

Members of the Financing Committee of Enterprise Banking Segment

No	Pelaksanaan/Pejabat dalam Organisasi	Implementation/Official in the Organization
1	Direktur Utama	President Director
2	Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan	Director of Financing Business Risk
3	Direktur Operasi & Digital	Director of Operation & Digital
4	Direktur Keuangan & Strategi	Director of Finance & Strategy
5	SEVP Retail Banking	SEVP of Retail Banking
6	SEVP Enterprise Banking	SEVP of Enterprise Banking
7	SEVP Human Capital	SEVP of Human Capital
8	Head of L1 Global Market, Head of L1 SOE & Corporate Banking, Head of L1 SME & Commercial, Head of L1 Enterprise Financing Risk, Head of L1 Retail Financing Risk, Financing Risk Manager, Head of L2 SME RFR, Head of L2 SOE & Corporate Banking 1, 2 & 3, Head of L2 Global Markets Financial Institution, Head of L2 Global Markets General Manager KL, Head of L2 Islamic & SME Alliance, dan Region Head SME & Commercial.	Head of L1 Global Market, Head of L1 SOE & Corporate Banking, Head of L1 SME & Commercial, Head of L1 Enterprise Financing Risk, Head of L1 Retail Financing Risk, Financing Risk Manager, Head of L2 SME RFR, Head of L2 SOE & Corporate Banking 1, 2 & 3, Head of L2 Global Markets Financial Institution, Head of L2 Global Markets General Manager KL, Head of L2 Islamic & SME Alliance, dan Region Head SME & Commercial.

ANGGOTA KOMITE PEMBIAYAAN BERMASALAH SEGMENT ENTERPRISE BANKING (SOE, CORPORATE & COMMERCIAL)

Members of the Problematic Financing Committee of Enterprise Banking Segment (SOE, Corporate & Commercial)

No	Pelaksanaan/Pejabat dalam Organisasi	Implementation/Official in the Organization
1	Direktur Utama	President Director
2	Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan	Director of Financing Business Risk
3	Direktur Operasi & Digital	Director of Operation & Digital
4	Direktur Keuangan & Strategi	Director of Finance & Strategy
5	SEVP Retail Banking	SEVP of Retail Banking
6	SEVP Enterprise Banking	SEVP of Enterprise Banking
7	SEVP Human Capital	SEVP of Human Capital
8	Head of L1 Special Asset Management	Head of L1 Special Asset Management

ANGGOTA KOMITE PEMBIAYAAN BERMASALAH SME

Members of the Financing Committee of Enterprise Banking Segment

No	Pelaksanaan/Pejabat dalam Organisasi	Implementation/Official in the Organization
1	Direktur Utama	President Director
2	Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan	Director of Financing Business Risk
3	Direktur Operasi & Digital	Director of Operation & Digital
4	Direktur Keuangan & Strategi	Director of Finance & Strategy
5	SEVP Retail Banking	SEVP of Retail Banking
6	SEVP Enterprise Banking	SEVP of Enterprise Banking
7	SEVP Human Capital	SEVP of Human Capital
8	Head of L1 Retail Collection Management, Head of Retail Network Collection, Head of Tale Calling, Asset Liquidation & Big Balance, Head of Collection Strategy & Support, Region Collection Manager Jakarta 1 & 2, Region Collection Manager Jakarta 3 & Jabar, Region Collection Manager Jateng DIY & Kalimantan, Region Collection Manager Jatim, Bali & Nusra, Region Collection Manager Sulawesi, Papua & Maluku, dan Region Collection Manager Sumatera.	Head of L1 Retail Collection Management, Head of Retail Network Collection, Head of Tale Calling, Asset Liquidation & Big Balance, Head of Collection Strategy & Support, Region Collection Manager Jakarta 1 & 2, Region Collection Manager Jakarta 3 & Jabar, Region Collection Manager Jateng DIY & Kalimantan, Region Collection Manager Jatim, Bali & Nusra, Region Collection Manager Sulawesi, Papua & Maluku, dan Region Collection Manager Sumatera.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Pembiayaan memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Piagam Komite Pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas proposal pembiayaan yang diajukan sesuai dengan batas kewenangan memutus pembiayaan yang telah ditetapkan.
2. Mengevaluasi pengelolaan portofolio pembiayaan yang diberikan dan kecukupan agunan atau jaminan bagi setiap debitur, termasuk tetapi tidak terbatas terhadap hal-hal berikut: pertumbuhan dan kualitas portofolio kredit yang diberikan secara keseluruhan maupun per jenis kredit dan target market; efektivitas pelaksanaan kewenangan memutus kredit; serta kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) dan Penilaian Kualitas Aset.
3. Mengevaluasi *watch list* atau *early alert* dan menetapkan langkah penanganan atas pembiayaan dalam *watch list* tersebut agar kualitas pembiayaan tidak memburuk.
4. Menetapkan kualitas pembiayaan (kolektibilitas) dari setiap debitur yang diajukan oleh unit bisnis.
5. Mengevaluasi dan menetapkan debitur yang harus direstrukturasasi.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE PEMBIAYAAN TAHUN 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

PROFIL KOMITE PEMBIAYAAN

Profil ketua Komite Pembiayaan disajikan pada bab "Profil Perusahaan".

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE PEMBIAYAAN

Sepanjang tahun 2023, Komite Pembiayaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 82 (delapan puluh dua) kali rapat dalam satu (1) tahun dan membuat seluruh risalah rapat komite.
2. Melakukan pembahasan mengenai proposal pembiayaan yang diajukan unit sesuai dengan batas kewenangan memutus pembiayaan yang telah ditetapkan. Sekaligus menetapkan kualitas pembiayaan

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Financing Committee retains the duties and responsibilities as contained in the Financing Committee Charter, namely as follows:

1. To evaluate and provide approval on financing proposals submitted in accordance with the limits of authority to decide/excise predetermined financing.
2. To evaluate the management of the financing portfolio provided and the adequacy of collateral or guarantees for each debtor, including but not limited to the following: growth and quality of the credit portfolio provided as a whole and as per type of credit and target market, effectiveness of the implementation of credit decision authority, as well as compliance with the implementation of applicable laws and regulations, including BMPK (Maximum Lending Limit) regulation and Asset Quality Assessment.
3. To evaluate the watchlist or early alert and determine the steps to handle financing in the watchlist so that the quality of financing will not get worse.
4. To determine financing quality (collectability) from each debtor proposed by business unit.
5. To evaluate and determine debtors requiring restructuring.

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT OF BUSINESS COMMITTEE IN 2023

Information on training and/or competency development can be found in the section on Training and/or Competency Development of the Board of Directors in this Annual Report.

PROFILE OF FINANCING COMMITTEE

The profile of the Financing Committee is presented in the chapter on "Company Profile".

IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES OF FINANCING COMMITTEE

Throughout the year 2023, the Financing Committee conducted its duties and responsibilities, with details as follows:

1. Held 82 (eighty two) meetings in 1 (one) year and completed all of the committee's minutes of meetings.
2. Conducted discussions on financing proposals submitted by units in accordance with the limits of authority to decide/excise on the predetermined financing. And at the same, determined the quality of



(kolektibilitas) dari setiap debitur yang diajukan oleh unit bisnis.

3. Melakukan pembahasan terkait *watch list* atau *early alert* beberapa nasabah dan menetapkan langkah penanganan atas pembiayaan dalam watch list tersebut agar kualitas pembiayaan tidak memburuk.
4. Menetapkan debitur yang harus direstrukturisasi.
5. Melakukan tindak lanjut atas temuan audit baik internal maupun eksternal.

financing (collecatibility) of each debtor proposed by business units.

3. Discussed the watchlist or early alert of several customers and determined the steps for handling financing on the watchlist so that the quality of financing would not get worse.
4. Determined debtors that require restructuring.
5. Followed-up on audit findings both internal and external.

RAPAT KOMITE PEMBIAYAAN

Kebijakan

Rapat Komite Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia diselenggarakan secara ad hoc atau sesuai dengan kebutuhan Bank Muamalat.

Realisasi

Sepanjang tahun 2023, Komite Pembiayaan telah menyelenggarakan 24 (dua puluh empat) kali rapat Komite Pembiayaan Bad Bank dan 58 (lima puluh delapan) kali rapat Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME.

MEETING OF FINANCING COMMITTEE

Policy

Meetings of the Financing Committee of Bank Muamalat Indonesia are held on ad-hoc basis or as required by Bank Muamalat.

Realization

Throughout 2023, the Financing Committee held 24 (twenty-four) Bad Bank Financing Committee meetings and 58 (fifty-eight) SOE and SME Segment Financing Committee meetings.

KOMITE PEMBIAYAAN NASABAH BAD BANK

Financing Committee for Bad Bank Customers

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
1	17 Januari 2023 January 17, 2023	1. Pengelolaan Nasabah SAM Management of SAM Customers 2. Bad Bank Update	• Direktur Utama • Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan • Direktur Operasi & Digital • Direktur Keuangan & Strategi • SEVP Retail Banking • SEVP Enterprise Banking • SEVP Human Capital • Head of Level 1 terkait • President Director • Director of Financing Business Risk • Director of Operation & Digital • Director of Finance & Strategy • SEVP of Retail Banking • SEVP of Enterprise Banking • SEVP of Human Capital • Related Head of Level 1
2	14 Februari 2023 February 14, 2023	Pengelolaan Nasabah SAM Management of SAM Customers	• Direktur Utama • Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan • Direktur Operasi & Digital • Direktur Keuangan & Strategi • SEVP Retail Banking • SEVP Enterprise Banking • SEVP Human Capital • Head of Level 1 terkait • President Director • Director of Financing Business Risk • Director of Operation & Digital • Director of Finance & Strategy • SEVP of Retail Banking • SEVP of Enterprise Banking • SEVP of Human Capital • Related Head of Level 1



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
3	15 Februari 2023 February 15, 2023	Pengajuan Persetujuan Lelang dan Pembayaran Service Charge dari hasil Submission of Auction Approval and Payment of Service Charge from the proceeds	• Direktur Utama • Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan • Direktur Operasi & Digital • Direktur Keuangan & Strategi • SEVP Retail Banking • SEVP Enterprise Banking • President Director • Director of Financing Business Risk • Director of Operation & Digital • Director of Finance & Strategy • SEVP of Retail Banking • SEVP of Enterprise Banking
4	13 Maret 2023 March 13, 2023	Pengajuan Restrukturisasi Nasabah RCM Proposal for Restructuring of RCM Customers	• Direktur Utama • Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan • Direktur Operasi & Digital • Direktur Keuangan & Strategi • Direktur Kepatuhan, Risiko & Hukum • SEVP Enterprise Banking • SEVP Human Capital • President Director • Director of Financing Business Risk • Director of Operation & Digital • Director of Finance & Strategy • Director of Compliance, Risk & Legal • SEVP of Enterprise Banking • SEVP of Human Capital
5	24 Maret 2023 March 24, 2023	Pengelolaan Nasabah SAM Management of SAM Customers	• Direktur Utama • Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan • Direktur Operasi & Digital • Direktur Keuangan & Strategi • SEVP Retail Banking • SEVP Enterprise Banking • SEVP Human Capital • Head of Level 1 terkait • President Director • Director of Financing Business Risk • Director of Operation & Digital • Director of Finance & Strategy • SEVP of Retail Banking • SEVP of Enterprise Banking • SEVP of Human Capital • Related Head of Level 1
6	11 April 2023 April 11, 2023	Pengelolaan Nasabah SAM Management of SAM Customers	• Direktur Utama • Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan • Direktur Operasi & Digital • Direktur Keuangan & Strategi • SEVP Retail Banking • SEVP Enterprise Banking • SEVP Human Capital • Head of Level 1 terkait • President Director • Director of Financing Business Risk • Director of Operation & Digital • Director of Finance & Strategy • SEVP of Retail Banking • SEVP of Enterprise Banking • SEVP of Human Capital • Related Head of Level 1



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
7	9 Mei 2023 May 9, 2023	Pengelolaan Nasabah SAM Management of SAM Customers	• Direktur Utama • Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan • Direktur Operasi & Digital • Direktur Keuangan & Strategi • SEVP Retail Banking • SEVP Enterprise Banking • SEVP Human Capital • Head of Level 1 terkait • President Director • Director of Financing Business Risk • Director of Operation & Digital • Director of Finance & Strategy • SEVP of Retail Banking • SEVP of Enterprise Banking • SEVP of Human Capital • Related Head of Level 1
8	16 Mei 2023 May 16, 2023	Pengajuan Restrukturisasi Nasabah RCM Proposal for Restructuring of RCM Customers	• Direktur Utama • Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan • Direktur Kepatuhan, Risiko & Hukum • Direktur Keuangan & Strategi • SEVP Enterprise Banking • SEVP Human Capital • President Director • Director of Financing Business Risk • Director of Compliance, Risk & Legal • Director of Finance & Strategy • SEVP of Enterprise Banking • SEVP of Human Capital
9	23 Mei 2023 May 23, 2023	Pengelolaan Nasabah SAM Management of SAM Customers	• Direktur Utama • Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan • Direktur Operasi & Digital • Direktur Keuangan & Strategi • SEVP Retail Banking • SEVP Enterprise Banking • SEVP Human Capital • Head of Level 1 terkait • President Director • Director of Financing Business Risk • Director of Operation & Digital • Director of Finance & Strategy • SEVP of Retail Banking • SEVP of Enterprise Banking • SEVP of Human Capital • Related Head of Level 1
10	6 Juni 2023 June 6, 2023	Pengajuan Persetujuan Penjualan Nasabah RCM Proposal for Approval of Sales of RCM Customers	• Direktur Utama • Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan • Direktur Kepatuhan, Risiko & Hukum • Direktur Operasi & Digital • Direktur Keuangan & Strategi • SEVP Enterprise Banking • SEVP Human Capital • President Director • Director of Financing Business Risk • Director of Compliance, Risk & Legal • Director of Operation & Digital • Director of Finance & Strategy • SEVP of Enterprise Banking • SEVP of Human Capital



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
11	13 Juni 2023 June 13, 2023	Pengelolaan Nasabah SAM Management of SAM Customers	• Direktur Utama • Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan • Direktur Operasi & Digital • Direktur Keuangan & Strategi • SEVP Retail Banking • SEVP Enterprise Banking • SEVP Human Capital • Head of Level 1 terkait • President Director • Director of Financing Business Risk • Director of Operation & Digital • Director of Finance & Strategy • SEVP of Retail Banking • SEVP of Enterprise Banking • SEVP of Human Capital • Related Head of Level 1
12	20 Juni 2023 June 20, 2023	Pengelolaan Nasabah SAM Management of SAM Customers	• Direktur Utama • Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan • Direktur Operasi & Digital • Direktur Keuangan & Strategi • SEVP Retail Banking • SEVP Enterprise Banking • SEVP Human Capital • Head of Level 1 terkait • President Director • Director of Financing Business Risk • Director of Operation & Digital • Director of Finance & Strategy • SEVP of Retail Banking • SEVP of Enterprise Banking • SEVP of Human Capital • Related Head of Level 1
13	11 Juli 2023 July 11, 2023	Pengelolaan Nasabah SAM Management of SAM Customers	• Direktur Utama • Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan • Direktur Operasi & Digital • Direktur Keuangan & Strategi • SEVP Retail Banking • SEVP Enterprise Banking • SEVP Human Capital • Head of Level 1 terkait • President Director • Director of Financing Business Risk • Director of Operation & Digital • Director of Finance & Strategy • SEVP of Retail Banking • SEVP of Enterprise Banking • SEVP of Human Capital • Related Head of Level 1
14	18 Juli 2023 July 18, 2023	Pengelolaan Nasabah SAM dan Nasabah RCM Management of SAM Customers and RCM Customers	• Direktur Utama • Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan • Direktur Operasi & Digital • Direktur Keuangan & Strategi • SEVP Retail Banking • SEVP Enterprise Banking • SEVP Human Capital • Head of Level 1 terkait • President Director • Director of Financing Business Risk • Director of Operation & Digital • Director of Finance & Strategy • SEVP of Retail Banking • SEVP of Enterprise Banking • SEVP of Human Capital • Related Head of Level 1



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
15	25 Juli 2023 July 25, 2023	Pengelolaan Nasabah SAM Management of SAM Customers	- Direktur Utama - Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan - Direktur Operasi & Digital - Direktur Keuangan & Strategi - SEVP Retail Banking - SEVP Enterprise Banking - SEVP Human Capital - Head of Level 1 terkait - President Director - Director of Financing Business Risk - Director of Operation & Digital - Director of Finance & Strategy - SEVP of Retail Banking - SEVP of Enterprise Banking - SEVP of Human Capital - Related Head of Level 1
16	22 Agustus 2023 August 22, 2023	Pengelolaan Nasabah SAM Management of SAM Customers	- Direktur Utama - Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan - Direktur Operasi & Digital - Direktur Keuangan & Strategi - SEVP Retail Banking - SEVP Enterprise Banking - SEVP Human Capital - Head of Level 1 terkait - President Director - Director of Financing Business Risk - Director of Operation & Digital - Director of Finance & Strategy - SEVP of Retail Banking - SEVP of Enterprise Banking - SEVP of Human Capital - Related Head of Level 1
17	19 September 2023 September 19, 2023	Pengelolaan Nasabah SAM Management of SAM Customers	- Direktur Utama - Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan - Direktur Operasi & Digital - Direktur Keuangan & Strategi - SEVP Retail Banking - SEVP Enterprise Banking - SEVP Human Capital - Head of Level 1 terkait - President Director - Director of Financing Business Risk - Director of Operation & Digital - Director of Finance & Strategy - SEVP of Retail Banking - SEVP of Enterprise Banking - SEVP of Human Capital - Related Head of Level 1
18	17 Oktober 2023 October 17, 2023	- Pengelolaan Nasabah SAM Management of SAM Customers - Follow Up Rekomendasi AUDIT Follow-Up on AUDIT Recommendations	- Direktur Utama - Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan - Direktur Operasi & Digital - Direktur Keuangan & Strategi - SEVP Retail Banking - SEVP Enterprise Banking - SEVP Human Capital - Head of Level 1 terkait - President Director - Director of Financing Business Risk - Director of Operation & Digital - Director of Finance & Strategy - SEVP of Retail Banking - SEVP of Enterprise Banking - SEVP of Human Capital - Related Head of Level 1



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
19	24 Oktober 2023 October 24, 2023	1. Pengelolaan Nasabah SAM Management of SAM Customers 2. Recovery Asset Sale Recovery of Asset Sale	• Direktur Utama • Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan • Direktur Operasi & Digital • Direktur Keuangan & Strategi • SEVP Retail Banking • SEVP Enterprise Banking • SEVP Human Capital • Head of Level 1 terkait • President Director • Director of Financing Business Risk • Director of Operation & Digital • Director of Finance & Strategy • SEVP of Retail Banking • SEVP of Enterprise Banking • SEVP of Human Capital • Related Head of Level 1
20	7 November 2023 November 7, 2023	Pengelolaan Nasabah SAM Management of SAM Customers	• Direktur Utama • Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan • Direktur Operasi & Digital • Direktur Keuangan & Strategi • SEVP Retail Banking • SEVP Enterprise Banking • SEVP Human Capital • Head of Level 1 terkait • President Director • Director of Financing Business Risk • Director of Operation & Digital • Director of Finance & Strategy • SEVP of Retail Banking • SEVP of Enterprise Banking • SEVP of Human Capital • Related Head of Level 1
21	14 November 2023 November 14, 2023	1. Pengajuan Restrukturisasi Nasabah RCM Proposed Restructuring of RCM Customers 2. Pengajuan Perseujuan pembayaran Service Charge Gedung nasabah Proposed for Approval of Customers' Building Service Charge payments	• Direktur Utama • Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan • Direktur Kepatuhan, Risiko & Hukum • Direktur Operasi & Digital • Direktur Keuangan & Strategi • SEVP Retail Banking • SEVP Enterprise Banking • SEVP Human Capital • President Director • Director of Financing Business Risk • Director of compliance, Risk & Legal • Director of Operation & Digital • Director of Finance & Strategy • SEVP of Retail Banking • SEVP of Enterprise Banking • SEVP of Human Capital



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
22	21 November 2023 November 21, 2023	Pengelolaan Nasabah SAM Management of SAM Customers	• Direktur Utama • Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan • Direktur Kepatuhan, Risiko & Hukum • Direktur Operasi & Digital • Direktur Keuangan & Strategi • SEVP Retail Banking • SEVP Enterprise Banking • SEVP Human Capital • President Director • Director of Financing Business Risk • Director of Compliance, Risk & Legal • Director of Operation & Digital • Director of Finance & Strategy • SEVP of Retail Banking • SEVP of Enterprise Banking • SEVP of Human Capital
23	28 November 2023 November 28, 2023	Pengelolaan Nasabah SAM Management of SAM Customers	• Direktur Utama • Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan • Direktur Operasi & Digital • Direktur Keuangan & Strategi • SEVP Retail Banking • SEVP Enterprise Banking • SEVP Human Capital • Head of Level 1 terkait • President Director • Director of Financing Business Risk • Director of Operation & Digital • Director of Finance & Strategy • SEVP of Retail Banking • SEVP of Enterprise Banking • SEVP of Human Capital • Related Head of Level 1
24	12 Desember 2023 December 12, 2023	Pengelolaan Nasabah SAM dan RCM Management of SAM and RCM Customers	• Direktur Utama • Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan • Direktur Operasi & Digital • Direktur Keuangan & Strategi • SEVP Retail Banking • SEVP Enterprise Banking • SEVP Human Capital • Head of Level 1 terkait • President Director • Director of Financing Business Risk • Director of Operation & Digital • Director of Finance & Strategy • SEVP of Retail Banking • SEVP of Enterprise Banking • SEVP of Human Capital • Related Head of Level 1



KOMITE PEMBIAYAAN SEGMENT SOE DAN SME

Financing Committee for SOE and SME Segment

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
1	11 Januari 2023 January 11, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Aruddy - Head of Enterprise Banking Business Development • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Financing Risk • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Vinny Rika Anwar - Head of FOP • Heri Sugiri - Regional Commercial Head Jkt 1 • Mardhiah Eka Citra - EFR • Yana Adriana - EFR • Irfan B. Barus - RM • Sylvano Berlian - WB 4
2	18 Januari 2023 January 18, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Aruddy - Head of Enterprise Banking Business Development • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Financing Risk • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Eko Dermawan - Head of WB Portfolio • Robi Agung - RM • Tantan Mardhiansya - RM • Hilman basuki - Region Head • Yana Adiana - EFR • Mardhiah Eka Citra - EFR • Heri Sugiri - Region Head
3	18 Januari 2023 January 18, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Aruddy - Head of Enterprise Banking Business Development • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Financing Risk • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Eko Dermawan - Head of WB Portfolio • Robi Agung - RM • Tantan Mardhiansya - RM • Hilman basuki - Region Head • Yana Adiana - EFR • Mardhiah Eka Citra - EFR • Heri Sugiri - Region Head
4	18 Januari 2023 January 18, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Aruddy - Head of Enterprise Banking Business Development • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Financing Risk • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Eko Dermawan - Head of WB Portfolio • Robi Agung - RM • Tantan Mardhiansya - RM • Hilman basuki - Region Head • Yana Adiana - EFR • Mardhiah Eka Citra - EFR • Heri Sugiri - Region Head



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
5	26 Januari 2023 January 26, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	- Hery Syafril - Financing Business Risk Director - Wahyu Avianto - Operation & Digital Director - Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking - Aruddy - Head of Enterprise Banking Business Development - Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking - Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market - Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Financing Risk - Dyah Ekowati - Head of Compliance - Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management - Khusnudhon - Head of Corporate Legal - Eko Dermawan - Head of WB Portfolio - Faisal Fernanda - FOP - Eko Tama - RM - Sylvano Berlian - WB 4 - Mardhiah Eka Citra - EFR
6	22 Februari 2023 February 22, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	- Hery Syafril - Financing Business Risk Director - Wahyu Avianto - Operation & Digital Director - Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking - Aruddy - Head of Enterprise Banking Business Development - Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking - Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market - Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Financing Risk - Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking - Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management - Khusnudhon - Head of Corporate Legal - Vinny Rika Anwar - Head of FOP - Rieza Prawira - RM - Candra Kusumo - Head Soe&Corp 4 - Faisal Fernanda - FOP - Yulia Aisha - EFR - Aries Purwanto - CPL
7	1 Maret 2023 March 1, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	- Hery Syafril - Financing Business Risk Director - Wahyu Avianto - Operation & Digital Director - Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking - Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market - Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Financing Risk - Dyah Ekowati - Head of Compliance - Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management - Khusnudhon - Head of Corporate Legal - Vinny Rika Anwar - Head of FOP - Eko Dermawan - EBBB - Yulia Aisha - EFR
8	16 Maret 2023 March 16, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	- Hery Syafril - Financing Business Risk Director - Wahyu Avianto - Operation & Digital Director - Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking - Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking - Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market - Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Financing Risk - Agus A. Amir - Head of IE & SME - Dyah Ekowati - Head of Compliance - Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management - Vinny Rika Anwar - Head of FOP - Eko Dermawan - EBBB - Yulia Aisha - EFR - Bambang Rudi H - RFR - Kumari Utami - RFR - Yana Adriana - EFR - Aries purwanto - CPL - Amien - CPL - Mahmud - CLG - Ary Parikesit - IES - Mahendi - SCB 1 - Yudhantara - SCB 1



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
9	16 Maret 2023 March 16, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Financing Risk • Agus A. Amir - Head of IE & SME • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Vinny Rika Anwar - Head of FOP • Eko Dermawan - EBBB • Yulia Aisha - EFR • Bambang Rudi H - RFR • Kumari Utami - RFR • Yana Adriana - EFR • Aries purwanto - CPL • Amien - CPL • Mahmud - CLG • Ary Parikesit - IES • Mahendi - SCB 1 • Yudhantara - SCB 1
10	21 Maret 2023 March 21, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Financing Risk • Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market • Aruddy - Head of Enterprise Banking Business Development • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Vinny Rika Anwar - Head of FOP • Eko Dermawan - EBBB • R. Nurman - EBBB • Imam H - IES • Hasrul Zain - IES • Faisal Fernanda - FOP • Anwar - EBBB • Lia Damayanti - Head of TSCF • M Rieza P - RM • Andika Perdana - RM • Yana Adriana - EFR
11	21 Maret 2023 March 21, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Financing Risk • Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market • Aruddy - Head of Enterprise Banking Business Development • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Vinny Rika Anwar - Head of FOP • Eko Dermawan - EBBB • R. Nurman - EBBB • Imam H - IES • Hasrul Zain - IES • Faisal Fernanda - FOP • Anwar - EBBB • Lia Damayanti - Head of TSCF • M Rieza P - RM • Andika Perdana - RM • Yana Adriana - EFR



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
12	12 April 2023 April 12, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	- Hery Syafril - Financing Business Risk Director - Wahyu Avianto - Operation & Digital Director - Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking - Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Financing Risk - Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking - Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market - Aruddy - Head of Enterprise Banking Business Development - Dyah Ekowati - Head of Compliance - Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management - Khusnudhon - Head of Corporate Legal - Vinny Rika Anwar - Head of FOP - Eko Dermawan - EBBB - Susviarto - IRM - Faisal Fernanda - FOP - Yulia Aisha - EFR - Yana Adriana - EFR - Anwar - EBBB - Lia Damayanti - TSCF GLM - Amien - CPL - Nurman Purwanto - EBBB
13	18 April 2023 April 18, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	- Wahyu Avianto - Operation & Digital Director (Online) - Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking - Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market - Aruddy - Head of Enterprise Banking Business Development - Dyah Ekowati - Head of Compliance - Khusnudhon - Head of Corporate Legal - Faisal Fernanda - FOP - R Nurman Purnomo - EBBB - Mardhiah Eka Citra - EFR - Bambang Rudi - RFR - Zefri Ananta - Head of FOP - Bayu Ari - IRM - Susviarto - IRM - Arfina Ratna - FTSCF - Delviani - FTSCF - Candra Kusumo - SCB - Anwar - EBBB
14	10 Mei 2023 May 10, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	- Indra Falatehan - President Director - Hery Syafril - Financing Business Risk Director - Wahyu Avianto - Operation & Digital Director - Suhendar - Finance & Strategy Director - Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking - Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Financing Risk - Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking - Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market - Aruddy - Head of Enterprise Banking Business Development - Dyah Ekowati - Head of Compliance - Eko Dermawan - EBBB - Susviarto - IRM - Mahmud - CLG - Hari Chaerul Darmanik - CEO Office - Yulia Aisha - EFR - Mardhiah Eka Citra - EFR - Hamdy Tamam - EFR - Amien - CPL - Anwar - EBBB - Lia D - TSCF - Bayu Ari - IRM - Yudhantara - RM - Mahendy - SCB



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
15	10 Mei 2023 May 10, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oad - Head of Global Market • Aruddy - Head of Enterprise Banking Business Development • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Eko Dermawan - EBBB • Susviarto - IRM • Mahmud - CLG • Hari Chaerul Darmanik - CEO Office • Yulia Aisha - EFR • Mardhiah Eka Citra - EFR • Hamdy Tamam - EFR • Amien - CPL • Anwar - EBBB • Lia D - TSCF • Bayu Ari - IRM • Yudhantara - RM • Mahendy - SCB
16	10 Mei 2023 May 10, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oad - Head of Global Market • Aruddy - Head of Enterprise Banking Business Development • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Eko Dermawan - EBBB • Susviarto - IRM • Mahmud - CLG • Hari Chaerul Darmanik - CEO Office • Yulia Aisha - EFR • Mardhiah Eka Citra - EFR • Hamdy Tamam - EFR • Amien - CPL • Anwar - EBBB • Lia D - TSCF • Bayu Ari - IRM • Yudhantara - RM • Mahendy - SCB
17	10 Mei 2023 May 10, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oad - Head of Global Market • Aruddy - Head of Enterprise Banking Business Development • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Eko Dermawan - EBBB • Susviarto - IRM • Mahmud - CLG • Hari Chaerul Darmanik - CEO Office • Yulia Aisha - EFR • Mardhiah Eka Citra - EFR • Hamdy Tamam - EFR • Amien - CPL • Anwar - EBBB • Lia D - TSCF • Bayu Ari - IRM • Yudhantara - RM • Mahendy - SCB



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
18	23 Mei 2023 May 23, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Financing Risk • Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market • Aruddy - Head of Enterprise Banking Business Development • Zefri Ananta - Head of FOP • Catur Andyani - IRM • Eko Dermawan - EBBB • R Nurman - EBBB • Kumari Utami - RFR • Indah Fitra Erlina - RFR • Nur Sadat - BDM SME • Mahmud - CLG • Yulia Aisha - EFR • Bambang Rudi - RFR • Amien - CPL • Aries P - CPL • Anwar - EBBB • Citra - TSY • Lia D - TSCF • Bayu Ari - IRM • Yudhantara - RM • Mahendy - SCB • Faisal Fernanda - FOP • Arief Budiman - GLM
19	15 Juni 2023 June 15, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market • Aruddy - Head of Enterprise Banking Business Development • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khushnudhon - Head of Corporate Legal • Zefri Ananta - Head of FOP • Awar - EBBB • Eko Dermawan - EBBB • Hamdy Tamam - EFR • Amien - CPL • Ismi - EBBB • Candra Kusumo - SCB • Rieza Prawira - SCB • R Nurman - EBBB • Faisal Fernanda - FOP



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
20	22 Juni 2023 June 22, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oad - Head of Global Market • Aruddy - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Zefri Ananta - Head of FOP • Andika Pratama - RM • Sylvano Berlian - SCB • Anwar - EBBB • Rudiman - SCB • Faisal Fernanda - FOP • Yana Adriana - EFR • Dimas Handoyo - SCB • Hamdy Tamam - EFR • M Fatan - SCB • Arfina - TSCF • Khalisah Ayuningtyas - SCB • Amien - CPL • Sri Sulastini - EFR • Rieza Prawira - SCB • Yosky Hervan - CMB
21	22 Juni 2023 June 22, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oad - Head of Global Market • Aruddy - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Zefri Ananta - Head of FOP • Andika Pratama - RM • Sylvano Berlian - SCB • Anwar - EBBB • Rudiman - SCB • Faisal Fernanda - FOP • Yana Adriana - EFR • Dimas Handoyo - SCB • Hamdy Tamam - EFR • M Fatan - SCB • Arfina - TSCF • Khalisah Ayuningtyas - SCB • Amien - CPL • Sri Sulastini - EFR • Rieza Prawira - SCB • Yosky Hervan - CMB



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
22	6 Juli 2023 July 6, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market • Aruddy - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Zefri Ananta - Head of FOP • Yudhantara - SCB • Riski Rizal - SCB • Mahendi - SCB • Amien - CPL • Susviarto - IRM • Mardhiah Eka - EFR • Herlina - TSCF • Yulia Aisha- EFR • Hamdy Tamam - EFR • Hayati - GLM KL - Online • Mahmud - GLM KL - Online • Suhaeni - EBBB - Online
23	6 Juli 2023 July 6, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market • Aruddy - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Zefri Ananta - Head of FOP • Yudhantara - SCB • Riski Rizal - SCB • Mahendi - SCB • Amien - CPL • Susviarto - IRM • Mardhiah Eka - EFR • Herlina - TSCF • Yulia Aisha- EFR • Hamdy Tamam - EFR • Hayati - GLM KL - Online • Mahmud - GLM KL - Online • Suhaeni - EBBB - Online
24	6 Juli 2023 July 6, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market • Aruddy - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Zefri Ananta - Head of FOP • Yudhantara - SCB • Riski Rizal - SCB • Mahendi - SCB • Amien - CPL • Susviarto - IRM • Mardhiah Eka - EFR • Herlina - TSCF • Yulia Aisha- EFR • Hamdy Tamam - EFR • Hayati - GLM KL - Online • Mahmud - GLM KL - Online • Suhaeni - EBBB - Online



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
25	13 Juli 2023 July 13, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oad - Head of Global Market • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Ibnu Umar - Head of FOP • M Rieza Prawira - SCB • Yosky Hervan - SCM • Anwar - EBBB • Mardhiah Eka - EFR • Eri Teguh - CLG • Mahmud - CLG • Faisal Fernanda - FOP • Susviarto - IRM • Galih - EBBB • Bayu Ari - IRM • Amien - CPL • Yulia Aisha - EFR • Dwi Rudiman - SCB Syndikasi • Sri Sulastini - EFR - Online • Yudhantara - SCB • Mahendi - SCB • Syafarial Akbar - SCB
26	13 Juli 2023 July 13, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oad - Head of Global Market • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Ibnu Umar - Head of FOP • M Rieza Prawira - SCB • Yosky Hervan - SCM • Anwar - EBBB • Mardhiah Eka - EFR • Eri Teguh - CLG • Mahmud - CLG • Faisal Fernanda - FOP • Susviarto - IRM • Galih - EBBB • Bayu Ari - IRM • Amien - CPL • Yulia Aisha - EFR • Dwi Rudiman - SCB Syndikasi • Sri Sulastini - EFR - Online • Yudhantara - SCB • Mahendi - SCB • Syafarial Akbar - SCB



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
27	20 Juli 2023 July 20, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Ibnu Umar - Head of FOP • Adelia - RM SCB • Sulvano Berlian - SCB • Aries Purwanto - CPL • Amien - CPL • Anwar - FA • Faisal Fernanda - FOP • Mahmud - CLG • Anahita - FA • Nurman P - EBBB • Hari Chaerul D - CEO Office • Mahendi - SCB • Riski Rizal - SCB • Yudhantara - SCB • Heri Sugiri - SCM • Tantan - SCM
28	20 Juli 2023 July 20, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Ibnu Umar - Head of FOP • Adelia - RM SCB • Sulvano Berlian - SCB • Aries Purwanto - CPL • Amien - CPL • Anwar - FA • Faisal Fernanda - FOP • Mahmud - CLG • Anahita - FA • Nurman P - EBBB • Hari Chaerul D - CEO Office • Mahendi - SCB • Riski Rizal - SCB • Yudhantara - SCB • Heri Sugiri - SCM • Tantan - SCM



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
29	20 Juli 2023 July 20, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oad - Head of Global Market • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Ibnu Umar - Head of FOP • Adelia - RM SCB • Sulvano Berlian - SCB • Aries Purwanto - CPL • Amien - CPL • Anwar - FA • Faisal Fernanda - FOP • Mahmud - CLG • Anahita - FA • Nurman P - EBBB • Hari Chaerul D - CEO Office • Mahendi - SCB • Riski Rizal - SCB • Yudhantara - SCB • Heri Sugiri - SCM • Tantan - SCM
30	27 Juli 2023 July 27, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Bambang Rudi - Head of Retail Financing Risk • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of CPL • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Ibnu Umar - Head of FOP • Nurman P - EBBB • Susviarto - IRM • Amien - CPL • Syahwafi - IES • Wangsa - FOP • Danie Maulana - SME - Online • Hendri Saputra - SME - Online • Sholikhatin - SME - Online • Iit Hadi - SME - Online • Fauz Astabik - SME - Online



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
31	2 Agustus 2023 August 2, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oad - Head of Global Market • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Ibnu Umar - Head of FOP • Yulia Aisha - EFR • Dwi Rudiman - SCB Syndikasi • Sylvano Berlian - SCB • Faisal Fernanda - FOP • Hamdy Tamam - EFR • Mardhiah Eka - EFR • Anwar - FA • Candra - SCB • Andika - SCB • Amien - CPL • Lia Damayanti - TSCF • Eka Sukada - GLM • Eko Tama - SCM • M Rieza Prawira - SCB • Ajeng A - FA • Andi W- FA
32	2 Agustus 2023 August 2, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oad - Head of Global Market • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Ibnu Umar - Head of FOP • Yulia Aisha - EFR • Dwi Rudiman - SCB Syndikasi • Sylvano Berlian - SCB • Faisal Fernanda - FOP • Hamdy Tamam - EFR • Mardhiah Eka - EFR • Anwar - FA • Candra - SCB • Andika - SCB • Amien - CPL • Lia Damayanti - TSCF • Eka Sukada - GLM • Eko Tama - SCM • M Rieza Prawira - SCB • Ajeng A - FA • Andi W- FA



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
33	2 Agustus 2023 August 2, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oad - Head of Global Market • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Ibnu Umar - Head of FOP • Yulia Aisha - EFR • Dwi Rudiman - SCB Syndikasi • Sylvano Berlian - SCB • Faisal Fernanda - FOP • Hamdy Tamam - EFR • Mardhiah Eka - EFR • Anwar - FA • Candra - SCB • Andika - SCB • Amien - CPL • Lia Damayanti - TSCF • Eka Sukada - GLM • Eko Tama - SCM • M Rieza Prawira - SCB • Ajeng A - FA • Andi W- FA
34	7 September 2023 September 7, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Riksa Prakoso - SEVP Human Capital • Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oad - Head of Global Market • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Ibnu Umar - Head of FOP • Anwar - FA • Yulia Aisha - EFR • Herlina - TSCF • Amien - CPL • Candra Kusumo - SCB • Anindita - SCB • Faisal Fernanda - FOP • Lia Damayanti - TSCF • Mardhiah Eka - EFR • R Nurman P - EBBB



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
35	7 September 2023 September 7, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Riksa Prakoso - SEVP Human Capital • Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Ibnu Umar - Head of FOP • Anwar - FA • Yulia Aisha - EFR • Herlina - TSCF • Amien - CPL • Candra Kusumo - SCB • Anindita - SCB • Faisal Fernanda - FOP • Lia Damayanti - TSCF • Mardhiah Eka - EFR • R Nurman P - EBBD
36	7 September 2023 September 7, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Riksa Prakoso - SEVP Human Capital • Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Ibnu Umar - Head of FOP • Anwar - FA • Yulia Aisha - EFR • Herlina - TSCF • Amien - CPL • Candra Kusumo - SCB • Anindita - SCB • Faisal Fernanda - FOP • Lia Damayanti - TSCF • Mardhiah Eka - EFR • R Nurman P - EBBD



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
37	7 September 2023 September 7, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Riksa Prakoso - SEVP Human Capital • Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oad - Head of Global Market • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Ibnu Umar - Head of FOP • Anwar - FA • Yulia Aisha - EFR • Herlina - TSCF • Amien - CPL • Candra Kusumo - SCB • Anindita - SCB • Faisal Fernanda - FOP • Lia Damayanti - TSCF • Mardhiah Eka - EFR • R Nurman P - EBBB
38	7 September 2023 September 7, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Riksa Prakoso - SEVP Human Capital • Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oad - Head of Global Market • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Ibnu Umar - Head of FOP • Anwar - FA • Yulia Aisha - EFR • Herlina - TSCF • Amien - CPL • Candra Kusumo - SCB • Anindita - SCB • Faisal Fernanda - FOP • Lia Damayanti - TSCF • Mardhiah Eka - EFR • R Nurman P - EBBB



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
39	14 September 2023 September 14, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Riksa Prakoso - SEVP Human Capital • Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Ibnu Umar - Head of FOP • Tantan Mardiansya - SCM • Yulia Aisha - FRM • Ajeng A - FA • Hari Chaerul - COE Office • M Rieza Prawira - SCB • Eko Tama - SCM • Rama Yulianto - GLM • Eka Sukada - GLM • Faisal Fernanda - FOP
40	14 September 2023 September 14, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Riksa Prakoso - SEVP Human Capital • Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Ibnu Umar - Head of FOP • Tantan Mardiansya - SCM • Yulia Aisha - FRM • Ajeng A - FA • Hari Chaerul - COE Office • M Rieza Prawira - SCB • Eko Tama - SCM • Rama Yulianto - GLM • Eka Sukada - GLM • Faisal Fernanda - FOP



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
41	14 September 2023 September 14, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Riksa Prakoso - SEVP Human Capital • Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Ibnu Umar - Head of FOP • Tantan Mardiansya - SCM • Yulia Aisha - FRM • Ajeng A - FA • Hari Chaerul - COE Office • M Rieza Prawira - SCB • Eko Tama - SCM • Rama Yulianto - GLM • Eka Sukada - GLM • Faisal Fernanda - FOP
42	20 September 2023 September 20, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking - Online • Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Anwar _ FA • R Nurman - EBBB • Mahmud - CLG • Dimas Handoyo - SCB Syndikasi • Mardhia Eka Citra - EFR • Faisal Fernanda - FOP • Amien - CPL • Dwi Rudiman - SCB Syndikasi



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
43	5 Oktober 2023 October 5, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director - Online • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Moh Madina Hendrik Soe'oad - Head of Global Market • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking - Online • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Bambang Rudi Haryanto - Head of RFR • Fajar Kurniawan - SCM • Ajeng A - FA • Anwar - FA • Amien - CPL • Mahmud - CLG • Hari Chaerul D - CEO Office • Lia Damayanti - TSCF • Alfina - TSCF • Dwi Rudiman - SCB Syndikasi • Heri Sugiri - SCM • Indah Fitrah - RFR • Kumari Utami - RFR • Astuti Aryanti - EFR - Online • Danie Maulana - SME - Online • Destandra - FA - Online • Ertina Natarini - SME - Online • Faisal Fernanda - FOP - Online • Hamdy Tamam - EFR - Online • Iit Hadi - SME - Online • Muhammad In'amullah - EFR - Online • Muhdar Renameme - EFR - Online • R Nurman - EBBB - Online • Rio Tri - SME - Online • Sholikhatin - RFR - Online
44	5 Oktober 2023 October 5, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director - Online • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Moh Madina Hendrik Soe'oad - Head of Global Market • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking - Online • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Bambang Rudi Haryanto - Head of RFR • Fajar Kurniawan - SCM • Ajeng A - FA • Anwar - FA • Amien - CPL • Mahmud - CLG • Hari Chaerul D - CEO Office • Lia Damayanti - TSCF • Alfina - TSCF • Dwi Rudiman - SCB Syndikasi • Heri Sugiri - SCM • Indah Fitrah - RFR • Kumari Utami - RFR • Astuti Aryanti - EFR - Online • Danie Maulana - SME - Online • Destandra - FA - Online • Ertina Natarini - SME - Online • Faisal Fernanda - FOP - Online • Hamdy Tamam - EFR - Online • Iit Hadi - SME - Online • Muhammad In'amullah - EFR - Online • Muhdar Renameme - EFR - Online • R Nurman - EBBB - Online • Rio Tri - SME - Online • Sholikhatin - RFR - Online



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
45	5 Oktober 2023 October 5, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director - Online • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Moh Madina Hendrik Soe'oad - Head of Global Market • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking - Online • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Bambang Rudi Haryanto - Head of RFR • Fajar Kurniawan - SCM • Ajeng A - FA • Anwar - FA • Amien - CPL • Mahmud - CLG • Hari Chaerul D - CEO Office • Lia Damayanti - TSCF • Alfina - TSCF • Dwi Rudiman - SCB Syndikasi • Heri Sugiri - SCM • Indah Fitrah - RFR • Kumari Utami - RFR • Astuti Aryanti - EFR - Online • Danie Maulana - SME - Online • Destandra - FA - Online • Ertina Natarini - SME - Online • Faisal Fernanda - FOP - Online • Hamdy Tamam - EFR - Online • Iit Hadi - SME - Online • Muhammad In'amullah - EFR - Online • Muhdar Renameme - EFR - Online • R Nurman - EBBB - Online • Rio Tri - SME - Online • Sholikhatin - RFR - Online
46	5 Oktober 2023 October 5, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director - Online • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Moh Madina Hendrik Soe'oad - Head of Global Market • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking - Online • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Bambang Rudi Haryanto - Head of RFR • Fajar Kurniawan - SCM • Ajeng A - FA • Anwar - FA • Amien - CPL • Mahmud - CLG • Hari Chaerul D - CEO Office • Lia Damayanti - TSCF • Alfina - TSCF • Dwi Rudiman - SCB Syndikasi • Heri Sugiri - SCM • Indah Fitrah - RFR • Kumari Utami - RFR • Astuti Aryanti - EFR - Online • Danie Maulana - SME - Online • Destandra - FA - Online • Ertina Natarini - SME - Online • Faisal Fernanda - FOP - Online • Hamdy Tamam - EFR - Online • Iit Hadi - SME - Online • Muhammad In'amullah - EFR - Online • Muhdar Renameme - EFR - Online • R Nurman - EBBB - Online • Rio Tri - SME - Online • Sholikhatin - RFR - Online



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
47	5 Oktober 2023 October 5, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director - Online • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking - Online • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Bambang Rudi Haryanto - Head of RFR • Fajar Kurniawan - SCM • Ajeng A - FA • Anwar - FA • Amien - CPL • Mahmud - CLG • Hari Chaerul D - CEO Office • Lia Damayanti - TSCF • Alfina - TSCF • Dwi Rudiman - SCB Syndikasi • Heri Sugiri - SCM • Indah Fitrah - RFR • Kumari Utami - RFR • Astuti Aryanti - EFR - Online • Danie Maulana - SME - Online • Destandra - FA - Online • Ertina Natarini - SME - Online • Faisal Fernanda - FOP - Online • Hamdy Tamam - EFR - Online • Iit Hadi - SME - Online • Muhammad In'amullah - EFR - Online • Muhdar Renameme - EFR - Online • R Nurman - EBBB - Online • Rio Tri - SME - Online • Sholikhatin - RFR - Online
48	26 Oktober 2023 October 26, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Faisal Fernanda - FOP • Mahmud - CLG • Anwar - FA • Yulia Aisha - EFR • Hayati Bin Ahmad - GLM - Online • Nova Berniadi - FA - Online • Sri Sulastini - EFR - Online • Lia Damayanti - TSCF • Hidayatullah - RM Commercial • M. Rieza Prawira - SCB • Eko Tama - SCM • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & CORP • Dwi Rudiman - SCB Syndikasi • Dimas Handoyo - SCB Syndikasi • Hamdy Tama - EFR - Online • Arfina - TSCF - Online • Muhammad In'manullah - EFR - Online • Khalishah Ayunityas - SCB • Adelia Primardani - SCB • Sylvano Berlian - SCB



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
49	26 Oktober 2023 October 26, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oad - Head of Global Market • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Faisal Fernanda - FOP • Mahmud - CLG • Anwar - FA • Yulia Aisha - EFR • Hayati Bin Ahmad - GLM - Online • Nova Berniadi - FA - Online • Sri Sulastini - EFR - Online • Lia Damayanti - TSCF • Hidayatullah - RM Commercial • M. Rieza Prawira - SCB • Eko Tama - SCM • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & CORP • Dwi Rudiman - SCB Syndikasi • Dimas Handoyo - SCB Syndikasi • Hamdy Tama - EFR - Online • Arfina - TSCF - Online • Muhammad In'manullah - EFR - Online • Khalishah Ayunityas - SCB • Adelia Primardani - SCB • Sylvano Berlian - SCB
50	26 Oktober 2023 October 26, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oad - Head of Global Market • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Faisal Fernanda - FOP • Mahmud - CLG • Anwar - FA • Yulia Aisha - EFR • Hayati Bin Ahmad - GLM - Online • Nova Berniadi - FA - Online • Sri Sulastini - EFR - Online • Lia Damayanti - TSCF • Hidayatullah - RM Commercial • M. Rieza Prawira - SCB • Eko Tama - SCM • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & CORP • Dwi Rudiman - SCB Syndikasi • Dimas Handoyo - SCB Syndikasi • Hamdy Tama - EFR - Online • Arfina - TSCF - Online • Muhammad In'manullah - EFR - Online • Khalishah Ayunityas - SCB • Adelia Primardani - SCB • Sylvano Berlian - SCB



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
51	26 Oktober 2023 October 26, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Faisal Fernanda - FOP • Mahmud - CLG • Anwar - FA • Yulia Aisha - EFR • Hayati Bin Ahmad - GLM - Online • Nova Berniadi - FA - Online • Sri Sulastini - EFR - Online • Lia Damayanti - TSCF • Hidayatullah - RM Commercial • M. Rieza Prawira - SCB • Eko Tama - SCM • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & CORP • Dwi Rudiman - SCB Syndikasi • Dimas Handoyo - SCB Syndikasi • Hamdy Tama - EFR - Online • Arfina - TSCF - Online • Muhammad In'manullah - EFR - Online • Khalishah Ayunityas - SCB • Adelia Primardani - SCB • Sylvano Berlian - SCB
52	26 Oktober 2023 October 26, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Moh Madina Hendrik Soe'oed - Head of Global Market • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Faisal Fernanda - FOP • Mahmud - CLG • Anwar - FA • Yulia Aisha - EFR • Hayati Bin Ahmad - GLM - Online • Nova Berniadi - FA - Online • Sri Sulastini - EFR - Online • Lia Damayanti - TSCF • Hidayatullah - RM Commercial • M. Rieza Prawira - SCB • Eko Tama - SCM • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & CORP • Dwi Rudiman - SCB Syndikasi • Dimas Handoyo - SCB Syndikasi • Hamdy Tama - EFR - Online • Arfina - TSCF - Online • Muhammad In'manullah - EFR - Online • Khalishah Ayunityas - SCB • Adelia Primardani - SCB • Sylvano Berlian - SCB



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
53	8 November 2023 November 8, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking - Online • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Ibnu Umar - Head of FOP • Faisal Fernanda - FOP • Mahmud - CLG • Susviarto - IRM • Astuti Aryani - EFR • Ajeng A - FA • Yosky Hervan - SCM - Online
54	30 November 2023 November 30, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Ibnu Umar - Head of FOP • Fajar Kurniawan - SCM • Robi Agung - SCM • Faisal Fernanda - FOP • Affandi - IRM • Mahmud - CLG • Amylila - EFR • Ajeng A - FA • Anwar - FA • Nurman R - EBBB • Ismi Rayani - FA • Galih M - FA • Felicia A - SCB • Yudahrtara - SCB • Dimas Handoyo - SCB Syndikasi
55	30 November 2023 November 30, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Ibnu Umar - Head of FOP • Fajar Kurniawan - SCM • Robi Agung - SCM • Faisal Fernanda - FOP • Affandi - IRM • Mahmud - CLG • Amylila - EFR • Ajeng A - FA • Anwar - FA • Nurman R - EBBB • Ismi Rayani - FA • Galih M - FA • Felicia A - SCB • Yudahrtara - SCB • Dimas Handoyo - SCB Syndikasi



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
56	30 November 2023 November 30, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Ibnu Umar - Head of FOP • Fajar Kurniawan - SCM • Robi Agung - SCM • Faisal Fernanda - FOP • Affandi - IRM • Mahmud - CLG • Amylila - EFR • Ajeng A - FA • Anwar - FA • Nurman R - EBB • Ismi Rayani - FA • Galih M - FA • Felicia A - SCB • Yudahntara - SCB • Dimas Handoyo - SCB Syndikasi
57	21 Desember 2023 December 21, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Aruddy - Head of Enterprise Financing Risk • Elisa Ratnawardani - Head of SOE & Corporate Banking • Ilham Wahyudin - Head of Enterprise Banking Business Development • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Ibnu Umar - Head of FOP • Nindya - FA • Nurman Purnama - EBB • Hari Chairul Damanik - CEO Office • Faisal Fernanda - FOP • Heri Sugiri - SCM • Anwar - FA • Dwi Rudiman - SCM Syndikasi • Amien - CPL • Mahmud - CLG • Rio Tri Nurhadi - SME - Online • Ricky Finaldy - SME - Online
58	28 Desember 2023 December 28, 2023	Komite Pembiayaan Segmen SOE dan SME Financing Committee for SOE and SME Segment	• Indra Falatehan - President Director • Hery Syafril - Financing Business Risk Director • Wahyu Avianto - Operation & Digital Director • Suhendar - Finance & Strategy Director • Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking • Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking • Bambang Rudi H - Head of RFR • Muhammad Fachry Maulana - Head of SME & Commercial Banking • Dyah Ekowati - Head of Compliance • Catur Andayani - Head of Integrated Risk Management • Khusnudhon - Head of Corporate Legal • Ibnu Umar - Head of FOP • Syah Wafi - IES • Ismi R - FA • Ajeng Adisti - FA • Amien - CPL • Iit Hadi Winarno - SME



Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

DASAR HUKUM

Dasar hukum pembentukan Sekretaris Perusahaan ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan No. I-A: tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat serta Surat Keputusan No. 010/HCE/KEP/XII/2018 dan efektif sejak tanggal 14 Desember 2018.

LEGAL BASIS

The legal basis for the establishment of the Corporate Secretary is the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep00001/BEI/01-2014 regarding Amendments to Regulation No. I-A: concerning the Listing of Shares and Equity Securities Other than Shares Issued by Listed Companies as well as Decree No. 010/HCE/KEP/XII/2018 and effective since December 14, 2018.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY PROFILE



Hayunaji
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	
Usia Age	52 tahun pada Tahun Buku 2023	52 years as of Financial Year 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan No. 010/HCE/KEP/XII/2018 dan efektif sejak tanggal 14 Desember 2018	Decree No. 010/HCE/KEP/XII/2018 effective since December 14, 2018
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (1996)	Bachelor in Economics, Faculty of Economics University of Indonesia, 1996
Rangkap Jabatan Concurrent Position	-	-



Pengalaman Kerja Work Experience	- Head of Corporate Affairs PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Desember 2018-sekarang) - Vice President, Board Office Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (April 2015-Desember 2018) - Vice President, CEO Office Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (Januari 2015-April 2015) - Vice President, Strategy & Performance Management Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (Maret 2014-Januari 2015) - Vice President, Investor Relations & Reporting Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (September 2006-Maret 2014) - Senior Manager, Investor Relations Development PT Bank Permata Tbk (Januari 2003-Agustus 2006) - Change Management, Merger Integration Office, 5 Banks Merger (Indonesian Bank Restructuring Agency and Accenture) (September 2002-Januari 2003) - Senior Assistant Manager, Investor Relations Development PT Bank Universal Tbk (Desember 1999-Agustus 2002) - Assistant Manager, Priority Banking PT Bank Duta Tbk (Maret 1998-Desember 1999)	- Head of Corporate Affairs PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (December 2018-Present) - Vice President, Board Office Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (April 2015-December 2018) - Vice President, CEO Office Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (January 2015-April 2015) - Vice President, Strategy & Performance Management Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (March 2014-January 2015) - Vice President, Investor Relations & Reporting Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (September 2006-March 2014) - Senior Manager, Investor Relations Development PT Bank Permata Tbk (January 2003-August 2006) - Change Management, Merger Integration Office, 5 Banks Merger (Indonesian Bank Restructuring Agency and Accenture) (September 2002-January 2003) - Senior Assistant Manager, Investor Relations Development PT Bank Universal Tbk (December 1999-August 2002) - Assistant Manager, Priority Banking PT Bank Duta Tbk (March 1998-December 1999)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali	Has no affiliation, either in terms of financial or kinship, with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Major Shareholders or Controlling Shareholders

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mewakili Direksi dalam hubungannya dengan lembaga/institusi baik pemerintah maupun swasta.
2. Bekerja sama dengan Divisi Kepatuhan memantau kepatuhan Bank Muamalat Indonesia terhadap ketentuan dan peraturan tentang perbankan.
3. Memastikan penerapan dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Muamalat Indonesia.
4. Menyusun daftar pemegang saham termasuk kepemilikan saham 5% atau lebih.
5. Mengawasi berbagai kegiatan kesekretariatan korporasi dan protokoler, korespondensi, dan kerumahtanggaan yang terkait dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Mengimplementasikan dan mengawasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aksi korporasi, GCG, dan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal.
7. Menggelar RUPS Tahunan, Luar Biasa dan aksi korporasi.
8. Berkoordinasi dengan unit kerja internal terkait dan pihak eksternal dalam upaya meluncurkan kegiatan korporasi dan meningkatkan efektivitas tata kerja yang terkait dengan kegiatan Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Mengkoordinasikan/memonitor kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyampaian informasi korporasi serta pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary of Bank Muamalat Indonesia has the following duties and responsibilities:

1. Representing the Board of Directors in its relations with institutions/agencies, both government and private.
2. Cooperating with the Compliance Division to monitor the compliance of Bank Muamalat Indonesia with banking provisions and regulations.
3. Ensuring the implementation and application of Good Corporate Governance (GCG) at Bank Muamalat Indonesia.
4. Compiling a list of shareholders with ownership of 5% or more shares.
5. Overseeing various corporate secretarial activities and protocols, correspondence, and administrative affairs related to the Board of Directors and the Board of Commissioners.
6. Implementing and supervising regulations relating to corporate actions, GCG, and compliance with capital market regulations.
7. Holding Annual and Extraordinary GMS and corporate actions.
8. Coordinating with the related internal work units and external parties to streamline corporate activities and improve the effectiveness of work procedures related to the activities of the Board of Directors and Board of Commissioners.
9. Coordinating/monitoring activities related to delivering and accepting corporate information and holding meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

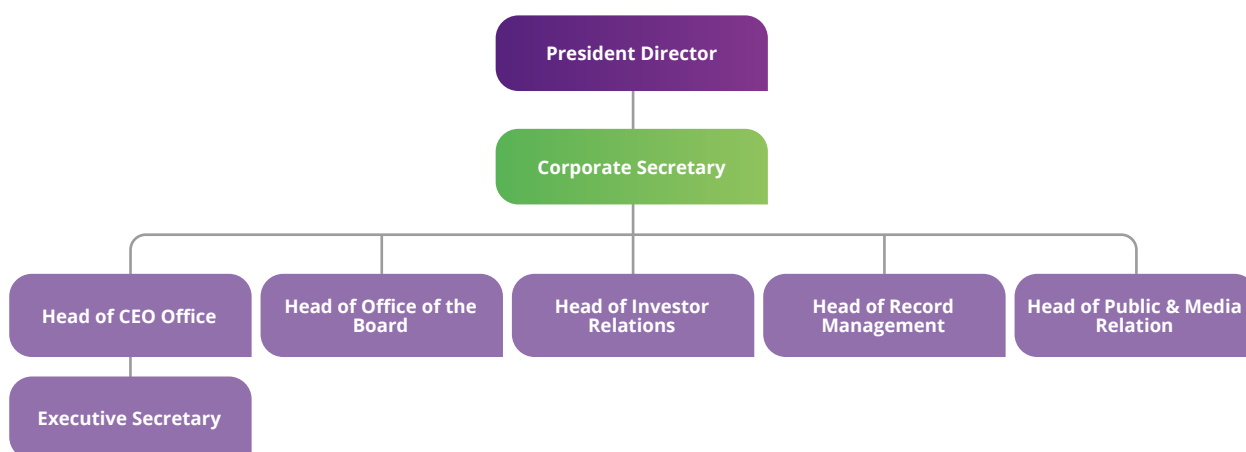


10. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas setiap informasi yang dibutuhkan terkait dengan kondisi Bank Muamalat Indonesia.
11. Menjadi penghubung atau *contact person* antara Bank Muamalat Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, otoritas pasar modal lainnya, dan masyarakat.
12. Melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan terutama menyangkut kinerja Bank Muamalat Indonesia melalui komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
13. Mengelola penyimpanan dokumen aktif dan inaktif Perusahaan.

10. Providing services to the stakeholders for any information needed related to the condition of Bank Muamalat Indonesia.
11. Become a liaison or contact person between Bank Muamalat Indonesia and the Financial Services Authority, Indonesia Stock Exchange, other capital market authorities, and the public.
12. Carrying out activities that support the implementation of the principle of transparency, especially regarding the performance of Bank Muamalat Indonesia, through communication with interested parties.
13. Managing the storage of active and inactive documents of the Company

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Indonesia membawahi beberapa unit kerja yang dijelaskan dalam bagan berikut ini.



ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary of Bank Muamalat Indonesia oversees several work units which are described in the following chart.

PELAKSANAAN TUGAS 2023

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan bersama seluruh unit kerja di bawahnya telah merealisasikan tugas dan fungsinya. Di antaranya adalah:

1. Menyelenggarakan dan menghadiri pelaksanaan Rapat Direksi serta membuat risalah hasil Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris serta Direksi.
2. Membantu Direksi dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya (RUPS Luar Biasa) Bank yang telah diselenggarakan secara fisik pada tanggal 11 Mei 2023 dan 13 November 2023 di Muamalat Tower, Jakarta.

DUTIES IMPLEMENTATION IN 2023

Throughout 2023, the Corporate Secretary and all work units under it have realized their duties and functions. Among others are:

1. Organizing and attending the Board of Directors Meetings and preparing minutes of the results of the Board of Directors Meetings, Board of Commissioners Meetings, and Joint Meetings between the Board of Commissioners and Board of Directors.
2. Assisting the Board of Directors in organizing the Bank's Annual GMS and Other GMS (Extraordinary GMS), held physically on May 11, 2023 and November 13, 2023, at Muamalat Tower, Jakarta.



3. Mengembangkan strategi komunikasi dan menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan seperti regulator, para pemegang saham institusi dan individu, lembaga dan profesi penunjang pasar modal.
4. Melaksanakan penyampaian pelaporan yang menjadi kewajiban Bank sebagai perusahaan terbuka kepada regulator.
5. Menyusun Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan memastikan seluruh informasi yang disampaikan adalah akurat dan *disclosure* informasi terpenuhi sesuai regulasi.
6. Melaksanakan aksi korporasi Penggabungan Saham (*Reverse Stock Split*) bersama dengan unit kerja terkait.
7. Berkoordinasi dengan unit kerja lain dalam melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR).
8. Melakukan kewajiban publikasi Bank dalam bentuk materi keterbukaan informasi, iklan korporasi dan promosi selama tahun 2023 melalui media cetak dan *website* Perseroan.
9. Menerbitkan siaran pers, memberikan hak jawab, dan berkomunikasi dengan para wartawan media cetak dan elektronik.
10. Melakukan reminder terhadap kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan Otoritas Pengawas lainnya terutama kewajiban sebagai perusahaan terbuka.
11. Melakukan *training* dan *sharing knowledge* dengan materi dan regulasi terkait pasar modal
12. Melakukan self-assesment pelaksanaan GCG Semester I dan II tahun 2023 terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
13. Melakukan pengaturan protokoler untuk mendampingi dan memenuhi kebutuhan dari Direksi dan Dewan Komisaris.
14. Mengelola penyimpanan dokumen aktif dan inaktif Perusahaan.
3. Developing a communication strategy and maintaining good relations with regulators, institutional and individual shareholders, as well as capital market supporting institutions.
4. Carrying out the submission of reporting becomes an obligation of the Bank as a public company to the regulator.
5. Preparing the annual report and ensuring all information presented is accurate and the information disclosure meets the regulations.
6. Executing PMHMETD Corporate Action, Subordinated Sukuk issuance and other corporate actions together with related work units.
7. Coordinating with Marketing & Customer Management in carrying out Corporate Social Responsibility (CSR) activities.
8. Carrying out the Bank's publication obligations in the form of information disclosure materials, corporate advertisements, and promotions during 2023 through print media and the Company's website.
9. Issuing press releases, providing rights of reply, and communicating with journalists of print and electronic media.
10. Conducting reminders on reporting obligations to the Financial Services Authority/Bank Indonesia and other Supervisory Authorities, especially on the obligations as a public company.
11. Conducting training and knowledge sharing with materials and regulations related to the capital market
12. Conducting the self-assessment on GCG implementation in Semesters I and II of 2023 related to the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors.
13. Arranging protocols to assist and fulfill the needs of the Board of Directors and Board of Commissioners.
14. Managing the storage of active and inactive documents of the Company.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bank senantiasa mendorong Sekretaris Perusahaan untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan pada tahun 2023. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan dalam bab "Profil Perusahaan."

COMPETENCY DEVELOPMENT

The Bank continues to encourage the Corporate Secretary to develop competencies through trainings in 2023. Detailed information regarding this matter is presented in the "Company Profile" chapter.



Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Internal Audit Work Unit (IAU)

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) adalah unit kerja dalam Bank yang menjalankan fungsi audit intern, yakni suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.

Dalam melaksanakan aktivitas audit, SKAI Bank Muamalat menggunakan pendekatan Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), yaitu melalui analisa risiko berdasarkan kondisi Bank dalam 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun terakhir. Penggunaan penilaian risiko dilakukan untuk menentukan obyek dan frekuensi pemeriksaan khususnya frekuensi pemeriksaan terhadap kantor-kantor cabang Bank Muamalat.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Menindaklanjuti kewajiban terhadap regulasi OJK, pelaksanaan audit di Bank Muamalat Indonesia telah dilengkapi dengan Piagam Audit Intern yang menjadi dasar pelaksanaan audit Bank yang berisi pernyataan formal dan penegasan atas visi dan misi, struktur dan kedudukan, ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, kualifikasi serta kode etik auditor, independensi dan obyektifitas, pembatasan aktivitas auditor internal, penggunaan jasa pihak ekstern, kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, kebijakan masa tunggu, hubungan audit internal dengan pihak internal/eksternal serta program asurans dan peningkatan kualitas.

Piagam Audit Intern Bank Muamalat senantiasa dilakukan kaji ulang dan diperbaharui secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan regulasi OJK dan International Professional Practices Framework (IPPF) 2017. Pemutakhiran terakhir Piagam Audit Intern dilakukan pada bulan November tahun 2023 dan telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris berdasarkan pertimbangan rekomendasi dari Komite Audit.

The Internal Audit Work Unit (IAU) is a work unit within the Bank that performs the internal audit function, which is namely an activity to provide confidence and consultation independently and objectively, with the aim to increase and improve the value of the company's operations, through a systematic approach, by evaluating and improving the effectiveness of risk management, control and corporate governance processes.

In performing audit activities, IAU of Bank Muamalat uses a Risk-Based Audit approach, namely through risk analysis based on the Bank's condition in the last 1 (one) to 3 (three) years. The use of risk assessment is carried out to determine the object and frequency of inspection, especially the frequency of inspection on Bank Muamalat branch offices.

THE INTERNAL AUDIT CHARTER

Following up on the obligations towards OJK regulations, the audit implementation at Bank Muamalat Indonesia is equipped with an Internal Audit Charter which is the foundation to carry out the Bank audits containing formal statements and confirmation of vision and mission, structure and position, scope, duties and responsibilities, authorities, qualifications as well as the auditor's code of ethics, independency and objectivity, restrictions on internal auditor activities, use of external party services, reporting obligations to the Financial Services Authority, waiting period policy, internal audit relationship with internal/external parties as well as quality assurance and improvement programs.

The Bank Muamalat Internal Audit Charter is constantly reviewed and updated periodically to keep its compliance to OJK regulations and the 2017 International Professional Practices Framework (IPPF). The latest update of the Internal Audit Charter was carried out in November 2023 and was approved by the President Director and Board of Commissioners based on the consideration of recommendations from the Audit Committee.



PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SKAI

Merujuk kepada Peraturan OJK No. 01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, Kepala SKAI Bank Muamalat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit. Berdasarkan SK Direksi No. 0336/HSE/KEP/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dan Persetujuan Dewan Komisaris yang tertuang dalam Surat No. 016/R/BOC-SRT/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, terhitung efektif sejak tanggal 01 September 2023, Tegar Sangga Barkah menjabat sebagai Kepala SKAI Bank Muamalat dan pengangkatannya telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan surat Bank Muamalat No. 202/B/PRD-SRT/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Laporan Penggantian Head of internal Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

THE APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE HEAD OF IAU

Referring to OJK Regulation No. 01/POJK.03/2019 regarding the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks, the Head of IAU of Bank Muamalat is appointed and dismissed by the President Director after receiving the approval from the Board of Commissioners based on consideration of the recommendations from the Audit Committee. Based on the Board of Directors Decree No. 0336/HSE/KEP/VIII/2023 dated 29 August 2023 and approval from the Board of Commissioners as stated in Letter No. 016/R/BOC-SRT/VII/2023 dated 18 July 2023, effective as of 1 September 2023, Tegar Sangga Barkah served as Head of SKAI of Bank Muamalat and his appointment was reported to OJK based on Bank Muamalat letter No. 202/B/PRD-SRT/VIII/2023 dated 31 August 2023 concerning Report on the Replacement of Head of the Internal Audit of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

STRUKTUR ORGANISASI SKAI

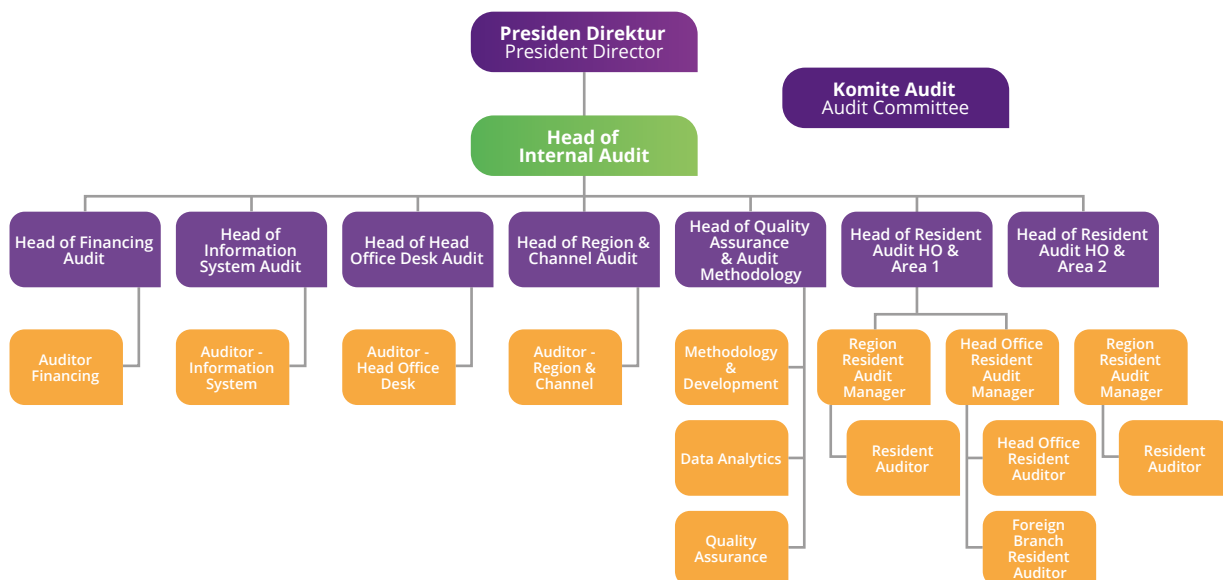
Untuk mencapai tingkat independensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tanggung jawab aktivitas audit internal, Kepala Audit Internal secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Namun dalam melaksanakan tanggung jawab pada level organisasi, Kepala Audit Internal bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

Berdasarkan keputusan Manajemen per tanggal 1 November 2023, terdapat perubahan Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern dimana dilakukan penggabungan fungsi Operation Control ke dalam fungsi Audit Intern sehingga struktur organisasi SKAI ditetapkan sebagai berikut:

THE IAU ORGANIZATIONAL STRUCTURE

To reach the level of independence required in carrying out the responsibilities of the internal audit activities, the Head of Internal Audit is functionally responsible to the Board of Commissioners through the Audit Committee. However, in carrying out responsibilities at the organizational level, the Head of Internal Audit is directly responsible to the President Director.

Based on Management's decision as of 1 November 2023, there was a change in the Organizational Structure of the Internal Audit Work Unit where the Operation Control function was merged into the Internal Audit function so that the IAU organizational structure was set out as follows:





JUMLAH PEGAWAI DAN SERTIFIKASI PROFESI

Dengan bergabungnya fungsi Operation Control ke dalam fungsi SKAI maka Auditor SKAI pada posisi 31 Desember 2023 berjumlah 96 orang. Berbagai kompetensi dan sertifikasi yang dimiliki Auditor SKAI Bank Muamalat yaitu sertifikasi audit dan sertifikasi manajemen risiko pada berbagai jenjang (level 1-5) dan sertifikasi kompetensi profesional lainnya seperti Certified Risk Management Professional, Credit Skill Assessment Certification, Certified Fraud Investigator Professional, Certified Bank Internal Audit, Internal Audit Practitioner, Certified IT Auditor Professional, Certified Information System Auditor, Qualified Internal Auditor, Certified Forensic Auditor, Certificate of Competence "Treasury Dealer" dan sertifikasi profesi audit internal level auditor dan supervisor.

NUMBER OF EMPLOYEES AND PROFESSIONAL CERTIFICATION

With the integration of the Operation Control function into the IAU function, as of 31 December 2023 there were 96 IAU Auditors. Various competencies and certifications retained by Bank Muamalat IAU Auditors, namely audit certification and risk management certification at various levels (level 1-5) and other professional competency certifications such as Certified Risk Management Professional, Credit Skill Assessment Certification, Certified Fraud Investigator Professional, Certified Bank Internal Audit, Internal Audit Practitioner, Certified IT Auditor Professional, Certified Information System Auditor, Qualified Internal Auditor, Certified Forensic Auditor, Certificate of Competence "Treasury Dealer" and internal audit professional certification at auditor and supervisor level.

PROFIL KEPALA SKAI



PROFILE OF HEAD OF IAU

Riva Yan Abdillah¹⁾

Kepala Satuan Kerja Audit Internal
Head of Internal Audit Work Unit

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	
Usia Age	51 tahun pada Tahun Buku 2023	51 years as of Financial Year 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat sebagai Kepala SKAI PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berdasarkan Surat Keputusan No. 003/B/DIR-KPTS/1/2021 tanggal 26 Januari 2021	Appointed as the Head of IAU of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk based on Decree No. 003/B/ DIR-KPTS/1/2021 dated 26 January 2021
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi	Bachelor (Sarjana) in Economics
Rangkap Jabatan Concurrent Position	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	- Internal Audit Group Head, PT Bank MNC International Tbk (2017-2021) - Assistant Head of Internal Audit, PT Bank ICBC Indonesia (2009-2017) - Internal Audit Team Leader, PT Bank Commonwealth (2006-2009) - Internal Auditor, PT Bank Mega Tbk (2003-2006) - Internal Auditor, PT Bank Panin Tbk (1997-2003)	- Internal Audit Group Head, PT Bank MNC International Tbk (2017-2021) - Assistant Head of Internal Audit, PT Bank ICBC Indonesia (2009-2017) - Internal Audit Team Leader, PT Bank Commonwealth (2006-2009) - Internal Auditor, PT Bank Mega Tbk (2003-2006) - Internal Auditor, PT Bank Panin Tbk (1997-2003)



Sertifikasi Certification	- Certified Risk Management Professional (CRMP) - Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	- Credit Skill Assessment Certification (CSAC) - Risk Management Level 4 Certification
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali	Has no affiliation, either in terms of financial or kinship, with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Major Shareholders or Controlling Shareholders

*) Tidak menjabat per 31 Agustus 2023.
No longer served in office as of August 31, 2023.



Tegar Sangga Barkah^{*)}
Kepala Satuan Kerja Audit Internal
Head of Internal Audit Work Unit

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Bandung	
Usia Age	46 tahun pada Tahun Buku 2023	46 years as of Financial Year 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat sebagai Kepala SKAI PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berdasarkan Surat Keputusan No. 0336/HSE/KEP/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023	Appointed as the Head of SKAI of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk based on the Decree No. 0336/HSE/KEP/VIII/2023 dated 29 August 2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Akuntansi	Bachelor (Sarjana) in Accounting
Rangkap Jabatan Concurrent Position	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	- Internal Audit Group Head, PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk (Feb 2018-Aug 2023) - Accounting Group Head, PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk (Nov 2016-Feb 2018) - Audit Committee, PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk (Nov 2015-Nov 2016) - Risk Management Committee, PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk (Mei-Nov 2015) - Department Head of Accounting Policy, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (Apr 2011-Aug 2015) - Department Head of Special Audit, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (Feb 2010-Apr 2011) - Team Leader of Auditor Investigator, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (Jan 2009-Jan 2010) - Operation Manager, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (May 2007-Oct 2008) - Team Leader of Internal Audit, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (Jul 2003 – May 2007)	- Internal Audit Group Head, PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk (Feb 2018-Aug 2023) - Accounting Group Head, PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk (Nov 2016-Feb 2018) - Audit Committee, PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk (Nov 2015-Nov 2016) - Risk Management Committee, PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk (Mei-Nov 2015) - Department Head of Accounting Policy, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (Apr 2011-Aug 2015) - Department Head of Special Audit, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (Feb 2010-Apr 2011) - Team Leader of Auditor Investigator, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (Jan 2009-Jan 2010) - Operation Manager, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (May 2007-Oct 2008) - Team Leader of Internal Audit, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (Jul 2003 – May 2007)



Sertifikasi Certification	- Chartered Accountant from IAI - Internal Audit Practitioner (IAP) from Institute of Internal Auditors IIA - Certified Fraud Investigator Professional (CFIP) - Certified Information Technology Auditor Professional (CITAP) - Sertifikasi Audit Internal Bank - Level 5 certification of risk management from BSMR & LSPP - Management System (ISMS) Audit Course implementation - Manager Certification for 4DX (4 Disciplines of Execution) from FranklinCovey - Signature of 7 Habits for Highly Effective People from FranklinCovey - Certified TS (Targeted Selection) Interviewer	- Chartered Accountant from IAI - Internal Audit Practitioner (IAP) from Institute of Internal Auditors IIA - Certified Fraud Investigator Professional (CFIP) - Certified Information Technology Auditor Professional (CITAP) - Certified Bank Internal Audit (CBIA) Level Supervisor - Level 5 certification of risk management from BSMR & LSPP - Management System (ISMS) Audit Course implementation - Manager Certification for 4DX (4 Disciplines of Execution) from FranklinCovey - Signature of 7 Habits for Highly Effective People from FranklinCovey - Certified TS (Targeted Selection) Interviewer
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali	Has no affiliation, either in terms of financial or kinship, with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Major Shareholders or Controlling Shareholders

*) Efektif menjabat per 1 September 2023.
Effective serving in office as of September 1, 2023.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKAI

Tugas Pokok

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui audit;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Tanggung Jawab

Kepala SKAI memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern;
2. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan fungsi Internal Audit;
3. Memastikan seluruh karyawan unit kerja Internal Audit mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank sesuai Standar Profesi Audit Intern;
4. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Intern secara periodik;
5. Menyusun rencana audit tahunan untuk pelaksanaan fungsi audit intern;

IAU DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Main Duties

1. Assisting the President Director, and the Board of Commissioners in carrying out supervision by operationally describing the planning, implementation, and monitoring of audit results;
2. Assessing and evaluating the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;
3. Identifying all possibilities to improve and increase the efficiency in leveraging resources and funds;
4. Providing improvement suggestions and objective information on activities audited at the entire management level.

Responsibilities

The Head of IAU has the following responsibilities:

1. Ensure that the implementation of the internal audit function is in accordance with the Internal Audit Professional Standards and the Internal Audit Code of Ethics;
2. Select competent human resources according to the needs in implementing the Internal Audit function;
3. Ensure that all employees of the Internal Audit work unit participate in continuous professional development and other training in accordance with developments in the complexity and business activities of the Bank in accordance with the Internal Audit Professional Standards;
4. Prepare and review the Internal Audit Charter periodically;
5. Prepare the annual audit plan for the implementation of the internal audit function;



- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 6. Memastikan pelaksanaan rencana audit tahunan sesuai dengan rencana audit intern; 7. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat; 8. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan; 9. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan tembuskan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan; 10. Menyampaikan temuan audit terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah; | <ol style="list-style-type: none"> 6. Ensure that the implementation of the annual audit plan is in accordance with the internal audit plan; 7. Report significant findings to the Board of Directors for immediate corrective action; 8. Monitor corrective actions for significant findings; 9. Report results of monitoring follow-up improvements on significant findings to the Board of Directors and the Board of Commissioners with a copy to the Audit Committee and Compliance Director; 10. Submit audit findings related to the implementation of compliance with sharia principles to the Sharia Supervisory Board; |
|--|---|

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

Hingga posisi 31 Desember 2023, realisasi penugasan audit berdasarkan Rencana Kerja Audit Tahun 2023 telah mencapai 112,12% atau sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) penugasan audit dari total 35 (tiga puluh lima) penugasan audit yang diusulkan pada Rencana Kerja Tahun 2023. Pencapaian melebihi 100% disebabkan adanya tambahan/*replacement* penugasan audit sejumlah 6 (enam) penugasan audit.

Sebagai upaya tindak lanjut perbaikan proses internal dalam rangka meningkatkan kualitas hasil audit, beberapa inisiatif lainnya yang dilakukan antara lain yaitu pelaksanaan kaji ulang Piagam Audit Intern yang diterbitkan pada bulan Oktober 2023 dan penyesuaian ruang lingkup audit dan aktivitas yang menyertai penggabungan fungsi Internal Control ke dalam fungsi SKAI.

IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES IN 2023

As of 31 December 2023, the realization of audit assignments based on the 2023 Audit Work Plan reached 112.12% or a total of 37 (thirty-seven) audit assignments out of a total of 35 (thirty-five) audit assignments proposed in the 2023 Work Plan. The exceeding achievement of over 100% was due to the additional/*replacement* of 6 (six) audit assignments.

As a follow-up effort to improve internal processes in order to enhance the quality of audit results, several other initiatives undertaken included the implementation of a review of the Internal Audit Charter which was issued in October 2023 and adjustments to the audit scope and activities accompanying the integration of the Internal Control function into the IAU function.

PELAKSANAAN RAPAT

REALISASI Realization

Keterangan Description	Rapat dengan Meetings with		
	Direksi Board of Directors	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Komite Audit Audit Committee
Jumlah Rapat Number of Meeting	-	-	9

MEETING IMPLEMENTATION



RENCANA KERJA AUDIT TAHUN 2024

Rencana Kerja Audit Tahun 2024 disusun melalui pendekatan berbasis risiko yang terdiri beberapa parameter risiko seperti strategi bisnis bank, profil risiko bank, aktivitas kritical di kantor cabang, arahan Manajemen dan pemenuhan permintaan atau kewajiban dari regulator. Parameter tersebut digunakan baik dalam menentukan ruang lingkup audit maupun frekuensi pemeriksaan.

Berdasarkan hasil penilaian risiko maka rencana pemeriksaan audit untuk tahun 2024 terbagi ke dalam beberapa cakupan yaitu:

- Aktivitas pembiayaan baik segmen retail maupun korporasi termasuk aktivitas penyelamatan pembiayaan.
- Penggunaan teknologi dan sistem informasi baik yang bersifat *mandatory* berdasarkan regulasi maupun aplikasi kritical dan pengembangannya.
- Pengelolaan dan pengendalian transaksi, biaya, SDM, pemasaran, anak Perusahaan dan Laporan keuangan.
- Pelaksanaan aktivitas operasional di kantor cabang.

Termasuk menjadi bagian dari Rencana Kerja Audit Tahun 2024 yaitu penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan auditor dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan kompetensi yang dilakukan melalui koordinasi dengan unit kerja yang menangani pelatihan SDM.

AUDIT WORK PLAN FOR 2024

The 2024 Audit Work Plan is set using a risk-based approach which consists of several risk parameters such as the bank's business strategy, bank's risk profile, critical activities at branch offices, management directives and fulfillment of requests or obligations from regulators. These parameters are used both to establish the scope of the audit and the frequency of inspections.

Based on results of risk assessment, the audit inspection plan for 2024 is divided into several scopes, namely as follows:

- Financing activities for both retail and corporate segments including financing rescue activities.
- Use of technology and information systems, both mandatory based on regulations and critical applications and development.
- Management and control of transactions, costs, HR, marketing, subsidiaries and financial reports.
- Implementation of operational activities at branch offices.

Included as part of the 2024 Audit Work Plan is the implementation of training and development of auditors in the context of increasing and maintaining competency carried out through coordination with the work unit that handles HR training.



Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Penerapan mekanisme pengendalian di lingkungan Bank Muamalat Indonesia ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*) untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko agar tetap berada dalam batas toleransi (*risk appetite*) serta memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan usaha Bank. Penerapan pengendalian berpedoman pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Bank Muamalat has implemented a control mechanism established by management on an ongoing basis to identify and manage risks to remain within the risk appetite and to provide adequate assurance in order to achieve the objectives of the Bank's business activities. The control is guided by Financial Services Authority Circular No. 35/SEOJK.03/2017 concerning Standard Guidelines on Internal Control Systems for Commercial Banks.

TUJUAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan sistem pengendalian internal di Bank Muamalat bertujuan untuk memastikan:

1. Kepatuhan terhadap ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu.
3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Bank.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh.

PURPOSE OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION

The implementation of the internal control system at Bank Muamalat is intended to ensure the following:

1. Compliance with internal provisions and laws and regulations.
2. Availability of complete, accurate, appropriate and timely financial and management information.
3. Effectiveness and efficiency in the Bank's business activities.
4. Improvement in the effectiveness of risk culture in the Bank's organization as a whole.

KERANGKA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan Sistem Pengendalian Intern menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat di dalam organisasi Bank Muamalat, antara lain:

1. Dewan Komisaris
2. Dewan Pengawas Syariah
3. Komite Audit
4. Direksi
5. Kepala Unit Kerja dan Pegawai terkait
6. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan unit kerja kepatuhan
7. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

INTERNAL CONTROL SYSTEM FRAMEWORK

The Implementation of the Internal Control System is the responsibility of all parties involved in Bank Muamalat organization, including the following:

1. Board of Commissioners
2. Sharia Supervisory Board
3. Audit Committee
4. Board of Directors
5. Head of Work Units and related Employees
6. Risk Management Work Unit (SKMR) and Compliance Work Unit
7. Internal Audit Work Unit (IAU)



PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Bank Muamalat meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
2. *Objective Setting*
3. *Event Identification*
4. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
5. *Risk Response*
6. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
7. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*)
8. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Kesesuaian dengan *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*.

Komponen Pengendalian Internal Bank Muamalat yang sejalan dengan *COSO Internal Control Integrated Framework*:

1. Lingkungan Pengendalian
Merupakan dasar dari semua komponen pengendalian internal mencakup pembentukan dan pemeliharaan sistem pengendalian internal yang efektif serta kegiatan untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan.

Direksi menciptakan sistem pengendalian internal, antara lain melalui penetapan kebijakan pengendalian intern dan prosedur operasional. Dewan Komisaris melalui komite di bawah koordinasinya antara lain Komite Audit melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal.

2. Penilaian Risiko
Merupakan suatu rangkaian tindakan yang dimulai dari identifikasi, analisis dan pengukuran risiko Bank untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Penilaian risiko dilakukan terhadap seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap proses/aktivitas yang berpotensi merugikan Bank. Pelaksanaan identifikasi dan penilaian risiko, antara lain melalui penetapan kebijakan manajemen risiko dan pembentukan SKMR yang bertujuan untuk meyakinkan Bank Muamalat melakukan mitigasi risiko dengan benar melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan risiko sesuai kerangka kerja manajemen risiko, serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha Bank.
3. Aktivitas Pengendalian
Merupakan kegiatan pengendalian yang direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi, serta penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian termasuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi. Bank

IMPLEMENTATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

Implementation of Bank Muamalat's Internal Control System covers the following:

1. Control Environment
2. Objective Setting
3. Event Identification
4. Risk Assessment
5. Risk Response
6. Control Activities
7. Accountancy, Information and Communication
8. Monitoring Activities

Compliance with The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Bank Muamalat's Internal Control Components are in line with the COSO Internal Control Integrated Framework:

1. Environmental Control
The basis of overall internal control components includes establishing and maintaining effective internal control systems and activities to ensure that the system operates safely and reliably following the objectives.

The Board of Directors established the Internal Control System, including the internal control policy and operational procedures. The Board of Commissioners, through committees under their coordination, including the Audit Committee, assessed the adequacy of internal control.

2. Risk Assessment
Risk assessment is a set of actions starting from identifying, analyzing and measuring the Bank's risks to achieve the established goals. Risk assessment is carried out on all types of risks associated with each process/activity that has the potential to impact the Bank. Implementation of risk identification and assessment, including the establishment of risk management policy and SKMR aimed at ensuring that Bank Muamalat mitigates risks properly through identification, measurement, monitoring, control, and reporting of risks according to the risk management framework and is able to deal with emergencies that threaten business continuity of the Bank.
3. Control Activities
The activities include the planned and implemented control activities to the identified control risk as well as the establishment of control policy and procedures, including ensuring that the Policy and Procedure consistently adhered to the Bank Muamalat developed



Muamalat mengembangkan kebijakan dan prosedur operasional sebagai pedoman pelaksanaan kerja pada masing-masing unit kerja. Kebijakan serta prosedur operasional senantiasa dikaji secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan aktivitas pengendalian oleh unit kerja dipantau dan diuji oleh SKMR dan SKAI sebagai unit kerja independen. SKAI menyampaikan hasil audit dan pengujian penerapan aktivitas pengendalian kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi. Pemisahan fungsi diterapkan pada seluruh jenjang organisasi dan kegiatan operasional agar setiap orang di dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi
Merupakan sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing Penerapan sistem akuntansi, informasi dan komunikasi, antara lain melalui penetapan kebijakan akuntansi yang didukung dengan tersedianya sistem informasi yang dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Aktivitas Pemantauan
Merupakan kegiatan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, serta proses pelaporan atas kelemahan dalam pengendalian internal dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan. SKAI memantau secara berkala kecukupan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit oleh unit kerja dan melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi memantau serta memastikan temuan dan rekomendasi dari SKAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERNAL

Berdasarkan kerangka dan komponen pengendalian internal yang disusun, Bank Muamalat melaksanakan pengendalian internal untuk memastikan kecukupan pengendalian keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

operational policy and procedures as guidelines for the work in each work unit. Operational policy and procedures are reviewed periodically based on the applicable regulations. The control is monitored and tested by RMU and IAU as independent work units. IAU reports the audit and testing results of the implementation of control activities to the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Board of Directors. Separation of functions is applied at all organizational levels and operational activities so that every person in their position has no opportunities to commit and hide errors or irregularities in running duties.

4. System of Accounting, Information, and Communication
The system includes an accounting, information, and communication system that can identify issues that may arise and is used as a facility for exchanging information in the context of carrying out duties according to their respective responsibilities. The application of accounting, information, and communication systems, including the establishment of accounting policy supported by the availability of information systems that can report the business activities, financial condition, implementation of risk management, and fulfillment of provisions that support the implementation of the duties of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
5. Monitoring Activities
Continuous monitoring of the overall effectiveness of internal control implementation, reporting the weaknesses in internal control, and the corrective measures taken. IAU periodically monitors the adequacy of the implementation of follow-up audit results by work units and reports the results of follow-up monitoring to the Board of Directors and Board of Commissioners. The Board of Directors monitors and ensures that findings and recommendations from IAU, External Auditors, supervisory results of the Financial Services Authority (FSA), and supervisory results of other authorities are followed up by the relevant work units.

IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL

Based on internal control structure and components, Bank Muamalat implements internal control to ensure the adequacy of financial control, operational effectiveness, efficiency, compliance with applicable laws and regulations.



A. Pengendalian Keuangan

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang mendukung perkembangan Bank Muamalat Indonesia, Bank menerapkan hal-hal berikut:

1. Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana strategis Bank yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).
2. Penetapan strategi telah mempertimbangkan risiko strategis.
3. Direksi secara aktif melakukan diskusi/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi strategi bisnis Bank Muamalat.
4. Direksi telah melaksanakan proses pengendalian keuangan guna memantau pencapaian kinerja secara berkala.
5. Direksi telah memastikan seluruh kebijakan dan standar akuntansi diperbaharui secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

B. Pengendalian Operasional

Untuk mendukung pengendalian risiko operasional, Bank Muamalat Indonesia telah menerapkan hal-hal berikut:

1. Pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest*.
2. Supervisor berfungsi melakukan pengawasan pelaksanaan pengendalian internal di Kantor Cabang dan Kantor Pusat setiap hari.
3. Pengawasan oleh unit kerja internal kontrol terhadap Kantor Cabang dan Kantor Pusat.
4. SKAI secara independen terhadap risk taking unit melakukan pengawasan serta penilaian kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
5. SKMR dan unit kerja kepatuhan yang independen terhadap *risk taking* unit.
6. Unit kerja Anti *Fraud* berperan meningkatkan efektivitas penerapan strategi anti *Fraud*.

C. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Untuk memastikan kepatuhan Bank Muamalat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank Muamalat menerapkan hal-hal berikut:

1. Direksi telah membentuk unit kerja kepatuhan yang independen terhadap risk taking unit dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Unit kerja kepatuhan melakukan pemantauan kepatuhan pelaporan kepada BI/OJK/regulator lainnya.

A. Financial Control

To ensure successful implementation of strategic plans that support the development, Bank Muamalat implements the following:

1. The Board of Directors prepared and received approval from the Board of Commissioners on the Bank's strategic plan as outlined in the Bank's Business Plan (BBP).
2. Strategy setting has considered strategic risks.
3. The Board of Directors actively discusses/provides input and monitors internal conditions and the development of external factors that directly or indirectly affected business strategy of Bank Muamalat.
4. The Board of Directors has implemented financial control process to monitor performance achievement on a regular basis.
5. The Board of Directors has ensured that all accounting policy and standards are updated regularly following the rules and regulations.

B. Operational Control

To support operational risk control, Bank Muamalat has implemented the following:

1. Function division to avoid conflict of interests.
2. Supervisor provides supervised implementation of internal controls at Branch Offices and Head Office every day.
3. Supervision by internal control unit to the Branch Office and Head Office.
4. IAU independently supervises the risk taking units and assesses the adequacy and effectiveness of governance, risk management and internal control processes.
5. RMU and compliance unit are independent of the risk taking unit.
6. Anti Fraud work unit takes in role in improving the effectiveness of anti fraud strategy implementation.

C. Compliance with Applicable Laws and Regulations

To ensure Bank Muamalat compliance with applicable laws and regulations, Bank Muamalat implements the following:

1. The Board of Directors established compliance unit that is independent towards risk taking unit and is in charge of monitoring compliance with applicable laws and regulations.
2. The compliance work unit monitors reporting compliance to BI/FSA/other regulators.



EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi bertanggung jawab memastikan atas efektivitas penerapan sistem pengendalian internal untuk mencapai tujuan Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan Dewan Komisaris melalui komite di bawah koordinasinya, antara lain Komite Audit melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh SKAI mencakup kecukupan desain pengendalian atas potensi risiko yang melekat pada suatu aktivitas/proses dan efektivitas atas pelaksanaan desain pengendalian yang telah ditetapkan serta kualitas hasil kinerja dari suatu aktivitas/proses.

Sebagai dasar bagi Manajemen dalam melakukan evaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian risiko yang berjalan pada lingkungan internal Bank serta untuk memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan komitmen perbaikan atas hasil audit sesuai tingkat risiko yang melekat pada hasil audit, SKAI telah mengimplementasikan *internal audit rating* yang efektif berlaku mulai pelaporan hasil penugasan audit intern yang diterbitkan tahun 2023.

KAJIAN ULANG (REVIEW) ATAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Hasil Review Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal oleh SKAI

Pelaksanaan kegiatan audit dalam rangka evaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal selama tahun 2023 difokuskan terhadap beberapa ruang lingkup di antaranya:

1. Pembiayaan: Pembiayaan Wholesale Banking (*Multifinance*) dan Konsep Pembiayaan *Channeling, Recovery*, Implementasi Akad Pembiayaan Bagi Hasil, Validasi *Stock Opname* Fisik Dokumen Jaminan Berpotensi Bermasalah Berstatus *Closed*;
2. Teknologi/Sistem Informasi: Pengembangan dan Pengadaan Serta Penggunaan Pihak Penyedia Jasa TI, Sistem Pembayaran Bank Indonesia & Pengelolaan Daftar Hitam Nasional (SPBI & KPDHN), Pengamanan Informasi, Penyelenggaraan BI-FAST, Manajemen Teknologi Informasi;
3. Penerapan APU-PPT & Aktivitas Operasional Cabang;
4. Proses dan Pengelolaan Aktivitas Kerjasama Pemasaran antara Bank dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance)
5. Pengelolaan Nisbah Spesial;
6. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Directors is responsible for ensuring the effectiveness of the implementation of the internal control system to achieve Bank Muamalat Indonesia's objectives. Meanwhile, the Board of Commissioners, through committees under its coordination, including the Audit Committee, assesses the adequacy of internal control.

Inspections carried out by IAU include the adequacy of control designs for potential risks inherent in an activity/process and the effectiveness of the implementation of predetermined control designs as well as the quality of performance results from an activity/process.

As basis for Management in evaluating the adequacy and effectiveness of risk control operating in the Bank's internal environment and to pay special attention to fulfilling commitments to improve audit results according to the level of risk inherent in audit results, IAU has implemented an internal audit rating which is effective starting from the reporting of results of internal audit assignments published in 2023.

REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

Review Results of the Internal Control System Implementation by IAU

The implementation of audit activities in the context of evaluating the adequacy and effectiveness of the internal control system during the year 2023 was focused on several scopes including the following:

1. Financing: Wholesale Banking Financing (*Multifinance*) and Channeling Financing Concept, Recovery, Implementation of Profit Sharing Financing Agreements, Validation of Physical Stock Taking Potentially Problematic Guarantee Documents with Closed Status;
2. Technology/Information Systems: Development and Procurement and Use of IT Service Providers, Bank Indonesia Payment System & National Black List Management (SPBI & KPDHN), Information Security, BI-FAST Implementation, Information Technology Management;
3. Implementation of APU-PPT & Branch Operational Activities;
4. Process and Management of Marketing Collaboration Activities between Banks and Insurance Companies (Bancassurance)
5. Management of Special Ratio;
6. Anti-Bribery Management System (SMAP);



7. Simpanan Berbasis Nasabah (SCV), dan audit khusus permintaan dari Manajemen/regulator/permintaan unit kerja terkait untuk pemenuhan implementasi penerapan ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal pada Bank Muamalat Indonesia dibangun dengan mengacu pada standar pengendalian internal yang berlaku umum dan sesuai dengan best practices di industri. Sistem tersebut dibentuk untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya risiko dalam usaha yang dijalankan oleh Bank.

Terkait sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh BMI, Dewan Komisaris dan Direksi memandang bahwa implementasi sistem pengendalian internal yang dilakukan sepanjang tahun 2023 sudah cukup baik. Kendati demikian, manajemen menilai, hasil evaluasi tersebut tetap menjadi dasar perbaikan dan pengembangan sistem pengendalian internal agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien, serta diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan keberlangsungan usaha Bank.

7. Customer Based Savings (SCV), and special audit requests from management/regulators/requests from related work units to fulfill the implementation of the ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System.

Statement by the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of Internal Control System

The internal control system at Bank Muamalat was developed with reference to generally accepted internal control standards and in line with industry best practices. The system is formed to control and prevent risks in the business run by the Company.

Regarding the internal control system implemented by the Company, the Board of Commissioners and the Board of Directors consider that the implementation carried out throughout 2023 was fairly good. However, the Bank still uses the evaluation result of the internal control system as a basis for Management to improve and develop the internal control system. Thus, the implementation can run effectively and efficiently and is expected to encourage business growth and sustainability of the Company.



Audit Eksternal

External Audit

Bank Muamalat Indonesia menunjuk Kantor Akuntan Publik sebagai bagian dari penerapan pengawasan independen serta audit terhadap pelaporan Laporan Keuangan Bank. Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal berfungsi untuk memastikan pencatatan akuntansi Bank telah disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) dengan opini yang wajar.

Pada tahun 2023, Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Muamalat Indonesia telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, & Ali (DBSD&A) yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan biaya audit sebesar 1.100.000.000 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dan diluar OPE.

Penunjukan KAP tersebut dilakukan oleh Dewan Komisaris. Akuntan Publik dan KAP dimaksud telah menyelesaikan tugas secara independen sesuai dengan pedoman standar profesi akuntan publik serta sesuai dengan persyaratan kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan.

Bank Muamalat appointed an external audit as part of independent supervision and audit of the Company's Financial Statement reporting. As part of GCG implementation, the Bank appointed Public Accounting Firm. Public Accounting Firm as an external auditor function to ensure that the Bank's accounting records have been prepared following the provisions of the Statement of Accounting and Financial Standards (SAFS) with a fair opinion.

In 2023, the Consolidated Financial Statements of Bank Muamalat Indonesia have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, & Ali (DBSD&A) which has been registered with the Financial Services Authority, with an audit fee of 1,100,000,000 including 11% Value Added Tax (VAT) and excluding OPE.

The referred Public Accountant and PAF had completed their duties independently according to the guidelines of public accountant professional standards and in accordance with the stipulated work requirements and audit.

AKUNTAN PUBLIK BANK MUAMALAT INDONESIA TAHUN BUKU 2023

Bank Muamalat Indonesia Public Accountant for 2023 Fiscal Year

Nama Name	Doli Diapary Siregar, CPA
Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan AP Registration Number from the Minister of Finance	AP.0396
Nomor Surat Tanda Terdaftar AP AP Registered Certificate Number	Perbankan Banking STTD.AP-194/PB.122/2018 Perbankan Syariah Islamic Bank STTD.APS-53/PB.122/2018 Pasar Modal Capital Market STTD.AP-314/PM.22/2018
Tahun Penugasan Year of Assignment	2023



Berikut adalah KAP yang telah mengaudit Laporan Keuangan Bank Muamalat dalam 5 (lima) tahun terakhir:

The following are PAF that audited Bank Muamalat's Financial Statements in the latest 5 (five) years:

Tahun Pemeriksaan Audit Year	Signing Partner Signing Partner	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Kantor Akuntan Asing Foreign Accounting Office	Biaya (Rp) Fee (Rp)
2023	Doli Diapary Siregar, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a)	BKR Internasional	1.100.000.000
2022	Doli Diapary Siregar, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a)	BKR Internasional	1.250.000.000
2021	Doli Diapary Siregar, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a)	BKR Internasional	1.100.000.000
2020	Bambang Sulistiyanto, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a)	BKR Internasional	1.300.000.000
2019	Bambang Sulistiyanto, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a)	BKR Internasional	800.000.000

JASA LAIN YANG DIBERIKAN

Tidak terdapat jasa lain yang diberikan, selain audit atas laporan keuangan.

OTHER SERVICES PROVIDED

There were no other services provided, other than the audit on the financial statements.

Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

Penjelasan mengenai Manajemen Risiko disajikan pada Bab Fungsi Penunjang Bisnis pada sub bab Manajemen Risiko.

Description of Risk Management is presented in the Business Support Functions Chapter in the Risk Management sub-chapter.



Satuan Kerja Kepatuhan

Compliance Unit

Bank Muamalat Indonesia membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dengan merujuk pada peraturan terkait fungsi kepatuhan yang terkini, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk prinsip syariah.

Berdasarkan tujuannya tersebut, Satuan Kerja Kepatuhan bersama Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, wajib selalu berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Direktur Kepatuhan Bank Muamalat Indonesia telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan telah efektif lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK tanggal 24 Juni 2022. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017:

1. Menyusun strategi untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
5. Meminimalisasi dan menekan risiko kepatuhan Bank.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

The establishment of the Compliance Unit of Bank Muamalat has referred to the latest regulations related to the compliance function, namely Regulations the Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 on the Implementation of Commercial Bank Compliance Functions. The compliance function is a series of preventive actions or measures to ensure that the policies, provisions, systems, and procedures, as well as business activities carried out by the Bank, are in line with the provisions of the Financial Services Authority and the provisions of other laws and regulations, including sharia principles.

Based on these objectives, the Compliance Unit and the Director in charge of the compliance function are required to always coordinate with the Sharia Supervisory Board in implementing the compliance function with sharia principles.

The Compliance Director of Bank Muamalat Indonesia has met the requirements based on applicable laws and regulations and effectively passed the Fit and Proper Test from the FSA dated 24 June 2022. The followings are the duties and responsibilities of the Director in charge of the Compliance Function following the Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017:

1. Developing a strategy to encourage the creation of the Bank Compliance Culture.
2. Proposing compliance policies or principles to be approved by the Board of Directors.
3. Establishing compliance systems and procedures that are used to formulate internal provisions and guidelines of the Bank.
4. Ensuring that all policies, regulations, systems, procedures, and business activities conducted by the Bank comply with the provisions of the Financial Services Authority and laws and regulations, including sharia principles for sharia commercial banks and sharia business units.
5. Minimizing and depressing the Bank's compliance risk.
6. Taking preventive measures to ensure that policies and/or decisions taken by the Bank's Directors or the head of the branch office domiciled overseas do not deviate from the provisions of the Financial Services Authority and the provisions of laws and regulations.
7. Performing other duties related to the compliance function.



Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan Bank Muamalat Indonesia yang dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya. Satuan Kerja tersebut memiliki akses langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Bank Muamalat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh regulasi, antara lain persyaratan independensi, menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melaksanakan tugas lainnya di luar fungsi kepatuhan.

In running duties, the Compliance Director is assisted by the Compliance Unit of Bank Muamalat Indonesia, which is established separately and free from other work units' influence. The Compliance Unit has direct access to the Director in charge of the compliance function.

The Head of the Compliance Unit has met the criteria set by the regulations, including the independence requirements, mastering the provisions of the Financial Services Authority (FSA)/ Bank Indonesia and the prevailing laws and regulations, as well as not carrying out other duties outside the compliance function.

PROFIL KEPALA SATUAN KERJA KEPATUHAN

PROFILE OF THE HEAD OF THE COMPLIANCE UNIT



Dyah Ekowati

Kepala Satuan Kerja Kepatuhan
Head of the Compliance Unit

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	
Usia Age	52 tahun pada Tahun Buku 2023	52 years as of Financial Year 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 080/DIR/KPTS/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Mutasi dan Penyempurnaan Penetapan Pejabat Compliance Division Head	Decree of the Board of Directors of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 080/DIR/KPTS/VIII/2009 dated August 25, 2009 on the Transfer and Improvement of the Appointment of Compliance Division Head Officer
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Sarjana Pertanian Institut Pertanian Bogor (1996) - Muamalat Officer Development Program (1997) - Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4, Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan - Sertifikasi Manajemen Kepatuhan Level 2, Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	- Bachelor in Agriculture Science, Institut Pertanian Bogor (1996) - Muamalat Officer Development Program (1997) - Certification of Risk Management Level 4, Banking Professional Certification Institute - Certification of Compliance Management Level 2, Banking Professional Certification Institute
Rangkap Jabatan Concurrent Position	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	- Kepala Satuan Kerja Kepatuhan (2009-sekarang) - Compliance & Risk Management Group Head (2009) - Kebijakan dan Produk Pembiayaan Divisi Pembiayaan (2003-2009) - Account Manager Cabang Bumi Serpong Damai (1997-2002)	- Head of Compliance Unit (2009-present) - Compliance & Risk Management Group Head (2009) - Financing Policy and Products of the Financing Division (2003-2009) - Account Manager at Bumi Serpong Damai Branch (1997-2002)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali	Has no affiliation, either in terms of financial or kinship, with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Major Shareholders or Controlling Shareholders



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan, yang mencakup:

1. Membantu menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan Bank dalam memenuhi seluruh peraturan internal dan eksternal serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka prinsip kehati-hatian.
2. Membantu memantau dan menjaga kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
3. Menyusun langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi,
4. Mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Memantau dan mengevaluasi secara berkala terhadap perkembangan risiko-risiko kepatuhan dan pengendalian internal untuk kepentingan Bank sesuai dengan perkembangan bisnis.
6. Menilai dan mengevaluasi atas efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan.
7. Mengkaji ulang dan/atau merekomendasikan pemutakhiran dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah.
8. Mengupayakan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
9. Memastikan Bank telah patuh terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
10. Melakukan sosialisasi hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku kepada seluruh karyawan Bank.
11. Menjalankan peran konsultatif sebagai strategic business partner guna pencegahan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan serta peningkatan efektivitas kepatuhan, pengendalian internal dan GCG.
12. Menjalankan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

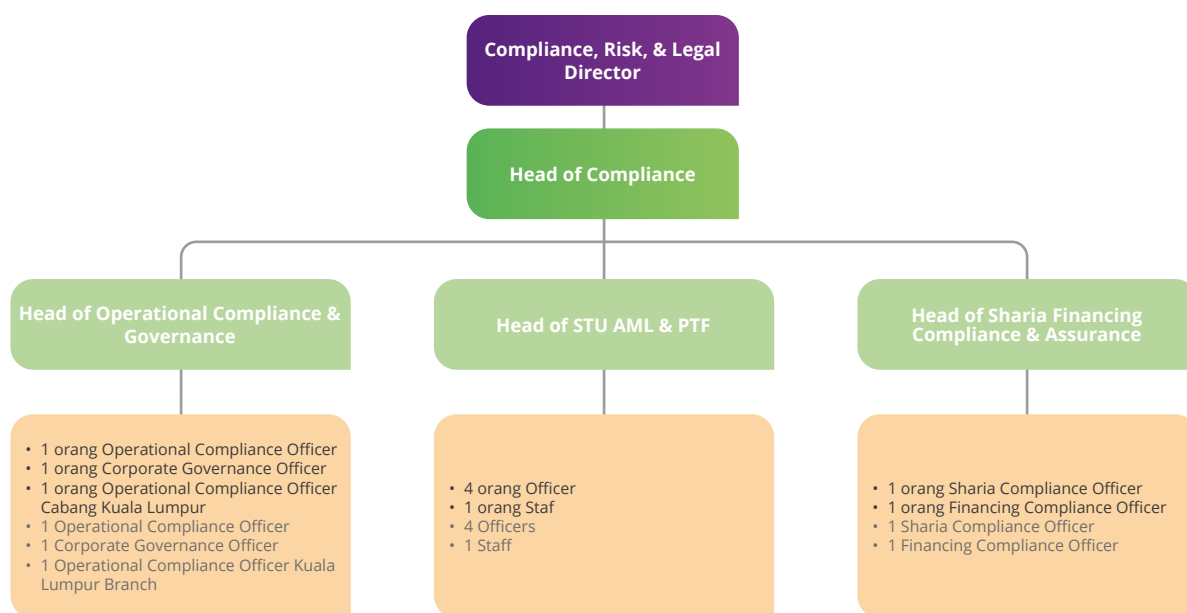
The following are the duties and responsibilities of the Compliance Unit:

1. Assisting in determining the necessary measures to ensure the Bank's compliance in fulfilling the overall internal and external regulations as well as other applicable laws and regulations in the context of the prudence principle.
2. Providing assistance in monitoring and maintaining the Bank's business activities to not deviate from the applicable regulations.
3. Formulating steps in order to support the creation of Compliance Culture in the entire Bank business activities at every organizational level
4. Identifying, measuring, monitoring, and controlling Compliance Risk by referring to the Financial Services Authority regulations on the Risk Management Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
5. Periodically monitoring and evaluating the development of compliance risks and internal control for the Bank's interests based on business development.
6. Assessing and evaluating the effectiveness, adequacy, and conformity of the Bank's policies, regulations, systems, and procedures with the laws and regulations.
7. Reviewing and/or recommending updates and refinement of policies, regulations, systems, and procedures currently applied by the Bank to comply with the provisions of the Financial Services Authority and laws and regulations, including sharia principles.
8. Striving to ensure that the Bank's policies, regulations, systems, and procedures, as well as business activities, are in line with the rules of the Financial Services Authority as well as the laws and regulations.
9. Ensuring the Bank has complied with the commitments to the Financial Services Authority and/or other competent supervisory authorities.
10. Disseminating matters related to the Compliance Function, especially regarding the applicable regulations to all Bank employees.
11. Carrying out a consultative role as a strategic business partner for prevention to mitigate compliance risk and providing recommendations for improving and enhancing compliance effectiveness, internal control, and GCG.
12. Carrying out other duties related to the compliance function.



STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA KEPATUHAN

Per 31 Desember 2022, organisasi Satuan Kerja Kepatuhan Bank Muamalat Indonesia terdiri 15 (lima belas) karyawan. Adapun struktur organisasinya digambarkan dalam bagan berikut ini.



ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF COMPLIANCE WORK UNIT

As of 31 December 2022, Bank Muamalat Indonesia's Compliance Unit consists of 15 (fifteen) employees. The organizational structure is described in the following chart.

KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI

Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Kerja Kepatuhan BMI memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Terutama, kompetensi pada bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

QUALIFICATION AND CERTIFICATION

Human Resources (HR) of the BMI Compliance Work Unit have adequate competency and are in accordance with their duties and responsibilities. Especially, competency in areas of Compliance and Risk Management.

PENGELOLAAN DAN MITIGASI RISIKO KEPATUHAN

Bank Muamalat Indonesia sebagai entitas yang bergerak pada industri perbankan sarat dengan pemenuhan peraturan perundang-undangan, sehingga kepatuhan menjadi salah satu risiko penting yang harus diantisipasi oleh Bank. Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

COMPLIANCE RISK MANAGEMENT AND MITIGATION

Bank Muamalat Indonesia as an entity operating in the banking industry that is full of statutory regulations on compliance that compliance is one of the important risks that must be anticipated by the Bank. Compliance risk can originate from, among others, legal behavior, namely Bank behavior or activities that deviate or violate statutory provisions and/or regulations and organizational behavior, namely Bank behavior or activities that deviate or conflict with generally accepted standards.



Dalam rangka mengantisipasi dan menyikapi pembaharuan dan perubahan peraturan-peraturan tersebut, pihak manajemen dituntut untuk dapat melakukan penyesuaian. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian berdampak pada kegiatan usaha dan kinerja Bank.

Memperhatikan kondisi tersebut, Bank Muamalat Indonesia senantiasa berupaya untuk memaksimalkan upaya untuk dapat melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan baik. Bank juga secara terus menerus melakukan langkah-langkah perbaikan dalam kualitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional bank.

Dalam menilai risiko kepatuhan, salah satu parameter yang ditetapkan adalah denda yang berasal dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta denda dari otoritas lain (non BI dan OJK). Adapaun untuk upaya mitigasi risiko, Bank Muamalat menyelenggarakan rapat Risk Management Committee (RMC) secara berkala untuk membahas pengelolaan risiko kepatuhan dan pembahasannya disajikan dalam Laporan Profil Risiko Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan maupun Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran. Sebagai upaya pengelolaan risiko kepatuhan, sepanjang tahun 2023, Bank telah melakukan mitigasi risiko kepatuhan di antaranya:

1. Membangun *compliance awareness* melalui *email blast*.
2. Melakukan *sharing information* terhadap semua ketentuan baru kepada Unit Bisnis dan/atau Unit Kerja terkait baik secara tertulis maupun meeting koordinasi.
3. Memberikan opini terhadap kegiatan operasional Bank baik dari aspek kepatuhan umum maupun kepatuhan Syariah sehingga diharapkan kegiatan usaha Bank *comply* dengan regulasi dan prinsip syariah.
4. Melakukan *review* terhadap ketentuan internal baik Kebijakan Umum, Prosedur/Panduan Produk dan Petunjuk Teknis serta Surat Edaran Direksi yang sedang disusun dan/atau dikinikan oleh fungsi terkait.
5. Melakukan *compliance checklist* dan memberikan *support* kepada fungsi terkait dalam rangka pengajuan produk dan aktivitas baru, jaringan kantor termasuk melakukan *follow up* atas pengajuan izin ke OJK/BI agar persetujuan produk dan aktivitas baru serta jaringan kantor segera diterbitkan oleh OJK/BI.
6. Menyampaikan data debitur group kepada Unit Kerja terkait secara rutin bulanan sebagai acuan dalam pemberian pembiayaan kepada Nasabah group.
7. Menyampaikan laporan kepatuhan kepada Manajemen secara triwulanan.

In order to anticipate and respond to updates and changes to these regulations, management is required to make adjustments. Failure to make adjustments causes impact on the Bank's business activities and performance.

Taking into consideration to these conditions, Bank Muamalat Indonesia always strives to maximize efforts to be able to implement applicable rules and regulations properly. The Bank also continuously takes steps to improve the quality of risk management, internal control systems and implementation of good governance as well as paying attention to the principle of prudence as well as sharia principles in carrying out bank operational activities.

In assessing compliance risk, one of the determined parameters is the fines from Bank Indonesia and the Financial Services Authority as well as fines from other authorities (non-BI and OJK). As for risk mitigation efforts, Bank Muamalat holds regular Risk Management Committee (RMC) meetings to discuss compliance risk management and the discussion is presented in the Bank Risk Profile Report which is submitted to the Financial Services Authority on a quarterly basis and in the Bank Health/Soundness Level Report on a semi-annual basis. As an effort to manage compliance risk, throughout 2023, the Bank mitigated compliance risk which among others are as follows:

1. Established compliance awareness through email blasts.
2. Shared information on all new provisions with the relevant Business Units and/or Work Units, either in writing or at coordination meetings.
3. Provided opinion on the Bank's operational activities both from the aspects of general compliance and Sharia compliance so that it is hoped that the Bank's business activities comply with Sharia regulations and principles.
4. Reviewed internal provisions including General Policies, Procedures/Product Guidelines and Technical Instructions as well as Directors' Circulars being prepared and/or updated by the relevant functions.
5. Carried out compliance checklist and provided support to related functions in the context of submitting new products and activities, office networks including following up on permit applications to OJK/BI so that approval for new products and activities as well as office networks are immediately issued by OJK/BI.
6. Submitted data on group debtors to the relevant Work Unit on a monthly basis as reference in providing financing to group customers.
7. Submitted compliance reports to the Management on a quarterly basis.



Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

Anti Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML & CFT)

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Bank Muamalat Indonesia senantiasa memantui peraturan perundang-undangan terkait Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT). Bank Muamalat Indonesia juga telah membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT. Dalam hal ini, penanggung jawab APU & PPT di Bank ialah Unit Kerja APUPPT yang berada di bawah Kepala Satuan Kerja Kepatuhan/Compliance.

Implementasi APU & PPT pada Bank Muamalat mendapat perhatian khusus dan peran aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris. Peran Direksi dan Dewan Komisaris bertujuan untuk memotivasi karyawan dan unit kerja dalam mendorong terbentuknya budaya kepatuhan di seluruh jajaran organisasi.

Bank Muamalat Indonesia telah memiliki beragam program yang sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penerapan Program APU & PPT Bank dilakukan secara efektif dan efisien mengacu pada Kebijakan Penerapan APU & PPT yang paling kurang mencakup 5 (lima) pilar penerapan Program APU & PPT, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kebijakan dan Prosedur
3. Pengendalian Intern
4. Sistem Informasi Manajemen
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Bank Muamalat Indonesia juga melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) yang sebelumnya dikenal dengan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*). CDD adalah kegiatan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, *walk in customer*, atau pun nasabah. Dengan begitu, diharapkan mampu mencegah diadakannya Bank Muamalat Indonesia sebagai sarana transaksi uang kejahatan dan pendukung kegiatan pemberantas serta pencegahan terjadinya tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Bank Muamalat senantiasa melakukan pengkinian data nasabah. Untuk tahun 2023, target pengkinian data nasabah adalah sebesar 3.455 Nasabah yang terdiri dari 2.560 nasabah individu dan 895 nasabah non individu. Progress realisasi pengkinian yang telah dilakukan oleh seluruh Cabang sampai dengan posisi bulan Desember 2023

Bank Muamalat always complies with the laws and regulations and other regulations related to the Principles of AntiMoney Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML & CFT). As a form of compliance, Bank Muamalat established a Special Work Unit or appointed Bank Officers to implement the AML & CFT programs. In this case, the person in charge of AML & CFT at the Bank is the AML & CFT Work Unit, under the Head of the Compliance Unit.

Bank Muamalat applies AML & CFT through special attention and an active role from the Board of Directors and Board of Commissioners. The main role of the Board of Directors and the Board of Commissioners is to motivate employees and work units to encourage a culture of compliance at all organizational levels.

Bank Muamalat already has various programs in line with applicable laws and regulations. Bank Muamalat applies for the AML & CFT Program effectively and efficiently, referring to the AML & CFT Implementation Policy, which includes at least 5 (five) pillars of the implementation of the AML & CFT Program, namely:

1. Active Supervision by the Board of Commissioners and Directors
2. Policies and Procedures
3. Internal Control
4. Management Information System
5. Human Resources and Training

Bank Muamalat Indonesia also implements Customer Due Diligence (CDD), previously known as the Know Your Customer Principle. CDD is identification, verification, and monitoring by the Bank to ensure that the transaction is based on a profile of the prospective customer, walk-in customer, or bank customer. Therefore, it is expected to be able to prevent the establishment of Bank Muamalat Indonesia's facility of criminal money transactions and to support eradication as well as prevention of money laundering and terrorism financing.

Bank Muamalat continuously updates its customer data. For 2023, the target for updating customer data was 3,455 customers consisting of 2,560 individual customers and 895 non-individual customers. Progress in update realization carried out by all branches up to December 2023 reached 3,455 customers (100%). The Compliance Work Unit also



mencapai 3.455 nasabah (100%). Secara rutin Unit Kerja Compliance juga melaporkan hasil monitoring terkait APU PPT & PPPSPM kepada BOD dan BOC sebagai salah satu bentuk pengawasan aktif BOD dan BOC.

Sepanjang 2023, Bank telah melakukan kegiatan terkait penerapan program APU & PTT antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengimplementasikan Kebijakan Umum Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
2. Melakukan sharing informasi atau reminder terkait dengan penerapan Program APU & PPT kepada seluruh unit kerja terkait.
3. Menyusun dan penyampaian laporan (LTKM, LTKT, LTKL, SIPESAT) serta melakukan kegiatan pengkinian dan pemantauan data nasabah.
4. Melakukan Pemeliharaan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
5. Memantau implementasi penggolongan risiko nasabah menggunakan metode Risk Based Approach (RBA), indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (alert TKM), dan orang/badan usaha yang ditetapkan sebagai Tersangka atau terdakwa kasus korupsi/pencucian uang.
6. Melakukan *review* Kebijakan, Pedoman, Prosedur Pelaksanaan, Produk atau Aktivitas Baru yang terkait dengan penerapan program APU & PPT.
7. Pemenuhan permintaan data/informasi/dokumen dari pihak eksternal terutama Aparat Penegak Hukum (Apgakum) atau Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP).
8. Pemenuhan permintaan data/informasi/dokumen dari (PPATK) dalam rangka FIR.
9. Melakukan *review* dan/atau memberikan opini APU & PPT terkait dengan produk, operasional maupun aktivitas Bank.
10. Menyampaikan proses kegiatan pengkinian data nasabah dengan skala prioritas antara lain untuk nasabah dengan kategori high risk, aktif bermutasi dan bersaldo cukup besar.
11. Pengisian KYC/AML Questionnaire yang merupakan bagian dari kegiatan koresponden banking guna memastikan penerapan AML/KYC dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Penyampaian Informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dan Laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
12. Melakukan *monitoring* CIF dalam rangka memastikan Bank memelihara profil Nasabah secara terpadu (Single CIF) untuk mengurangi data-data CIF yang *duplicate*. Pelatihan/sosialisasi/*coaching* terkait penerapan Program APU & PPT kepada karyawan terkait.

routinely reports monitoring results related to APU PPT & PPPSPM to the Board of Directors and the Board of Commissioners as a form of active supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Throughout the year 2023, the Bank carried out activities related to the implementation of the APU & PTT program, which included the following:

1. Developed and implemented General Policies on Anti-Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction.
2. Shared information or reminders related to the implementation of the APU & PPT Program with all related work units.
3. Compiled and submitted reports (LTKM, LTKT, LTKL, SIPESAT) and carried out customer data update and monitored activities.
4. Maintained the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) as well as the List of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction.
5. Monitored the implementation of customer risk classification using the Risk Based Approach (RBA) method, indications of Suspicious Financial Transactions (TKM alerts), and people/business entities designated as suspects or defendants in corruption/money laundering cases.
6. Reviewed policies, guidelines, implementation procedures, new products or activities related to the implementation of the APU & CFT program.
7. Fulfilled the requests for data/information/documents from external parties, especially Law Enforcement Officials (Apgakum) or Supervisory and Regulatory Institutions (LPP).
8. Fulfilled the requests for data/information/documents from (PPATK) in the context of FIR.
9. Reviewed and/or provided APU & PPT opinions related to the Bank's products, operations and activities.
10. Delivered the process of updating customer data on a priority scale, including for customers in the high risk category, actively changing and with quite large balances.
11. Filled out the KYC/AML Questionnaire which is part of correspondent banking activities to ensure that AML/ KYC is implemented in accordance with regulations. Submission of information to the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK-RI) and reports to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).
12. Conducted monitoring of CIF to ensure the Bank maintains an integrated customer profile (Single CIF) to reduce duplicate CIF data. Training/socialization/ coaching related to the implementation of the APU & PPT Program to related employees.



13. Mengikuti pelatihan/workshop terkait APU & PPT dari PPATK, OJK dan FKDKP.
14. Menyelenggarakan program sertifikasi APU & PPT yang dilaksanakan secara internal bekerja sama dengan Learning & Talent Management dalam rangka meningkatkan pemahaman seluruh karyawan terhadap penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).
15. Pelaksanaan MHP Survei Kepuasan Pelayanan APU PPT 2023.

13. Attended training/workshops related to APU & PPT from PPATK, OJK and FKDKP.
14. Organized APU & PPT certification program which is implemented internally in collaboration with Learning & Talent Management in order to increase all employees' understanding of the implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing (APU & PPT).
15. Implementation of the 2023 MHP APU PPT Service Satisfaction Survey.

Perkara Penting

Important Cases

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DIREKSI

Sebagai perusahaan yang aktif menjalankan aktivitas bisnisnya, Bank Muamalat Indonesia memiliki risiko menghadapi permasalahan hukum, baik di bidang perdata maupun pidana. Hingga akhir 2023, berikut permasalahan hukum Bank Muamalat Indonesia sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

IMPORTANT CASES FACED BY THE COMPANY, SUBSIDIARIES, MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, AND MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

As a company that actively carries out its business activities, Bank Muamalat Indonesia is at risk of facing legal problems, both in the civil and criminal fields. Until the end of 2023, the following are Bank Muamalat Indonesia's legal problems as depicted in the following table:

Jenis Sanksi	Jumlah Total		Type of Sanction
	Perdata Civil	Pidana Crime	
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	47	1	Has been completed (has permanent legal force)
Dalam proses penyelesaian	98	22	In the process of being completed



Adapun perkara perdata dengan nominal tuntutan < Rp.10 miliar adalah sebagai berikut:

Civil cases with nominal claims of < Rp. 10 billion are as follows:

No	Nomor Register Perkara Case Registration Number	Nilai Tuntutan Claim Value (Rp)	Status Terakhir Latest Status
1.	1244/Pdt.G/2023/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang 1244/Pdt.G/2023/PN.Tng at Tangerang District Court	110.000.000.000,-	Proses pemeriksaan di PN Tangerang Examination process at Tangerang District Court
2.	2486/Pdt.G/2021/PA.JB di Pengadilan Agama Jakarta Barat 2486/Pdt.G/2021/PA.JB at West Jakarta Religious Court	51.045.989.251,-	Perkara sudah diputus di tingkat banding dengan putusan yang memenangkan bank, saat ini monitoring upaya hukum kasasi The case was decided at the appeal level with a verdict in favor of the bank, currently being monitored for the cassation legal action
3.	95/Pdt.G/2023/PN.Mpw di Pengadilan Negeri Mempawah 95/Pdt.G/2023/PN.Mpw at Mempawah District Court	47.772.500.000,-	Proses pemeriksaan di PN Mempawah Examination process at Mempawah District Court
4.	518/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat 518/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt at West Jakarta District Court	30.000.000.000,-	Proses pemeriksaan di PN Jakarta Barat Examination process at West Jakarta District Court
5.	519/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat 519/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt at the West Jakarta District Court	30.000.000.000,-	Perkara sudah diputus di tingkat PN dengan putusan yang memenangkan bank, saat ini monitoring upaya hukum banding The case was decided at the District Court level with the verdict in favor of the bank, currently being monitored for legal appeals
6.	5971/Pdt.G/2022/PA.Bdg di Pengadilan Agama Bandung 5971/Pdt.G/2022/PA.Bdg at Bandung Religious Court	22.560.350.000,-	Perkara sudah diputus di tingkat banding dengan putusan yang memenangkan bank, saat ini monitoring upaya hukum kasasi The case was decided at the appeal level with the verdict in favor of the bank, currently being monitored for the cassation legal action
7.	980/P67/Pdt.G/2021/PN.Jkt-Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 980/P67/Pdt.G/2021/PN.Jkt-Sel at South Jakarta District Court	14.110.000.000,-	Perkara sudah diputus di tingkat PN dengan putusan yang memenangkan bank, dan Penggugat mengajukan upaya hukum banding The case was decided at the District Court level with the verdict in favor of the bank, and the Plaintiff filed an appeal
8.	36/Pdt.G/2019/PN Tmg. di Pengadilan Negeri Temanggung 36/Pdt.G/2019/PN Tmg. at Temanggung District Court	13.500.000.000,-	Sesuai SIPP perkara telah diputus di tingkat kasasi dengan amar putusan menolak permohonan kasasi sehingga putusan dimenangkan oleh bank. Saat ini menunggu relaas pemberitahuan putusan kasasi dan selanjutnya monitoring upaya hukum PK In accordance with the SIPP, the case was decided at the cassation level with the verdict rejecting the cassation application so that the case was won by the bank. Currently waiting for notification of the cassation decision and subsequent monitoring of the PK's legal efforts
9.	633/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 633/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST at Central Jakarta District Court	10.000.000.000,-	Perkara sudah diputus di tingkat banding dengan putusan yang memenangkan bank. Pihak Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi The case was decided at the appeal level with the verdict in favor of the bank. The Plaintiff filed a cassation lawsuit
10.	634/Pdt.G/2022/PN JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 634/Pdt.G/2022/PN JKT.PST at Central Jakarta District Court	10.000.000.000,-	Perkara sudah diputus di tingkat banding dengan putusan yang memenangkan bank. Pihak Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi The case was decided at the appeal level with the verdict in favor of the bank. The Plaintiff filed a cassation lawsuit



Sanksi Administratif

Administrative Sanction

Hingga berakhirnya tahun buku 2023, baik Bank Muamalat Indonesia, anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi tidak mendapatkan sanksi administratif dari Otoritas Perbankan yang berpengaruh signifikan terhadap operasional Bank.

As of the end of the 2023 financial year, Bank Muamalat Indonesia, members of the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors never received administrative sanctions from the Banking Authority which has a significant effect on the Bank's operations.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Data and Information

Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, yang salah satunya diwujudkan melalui penyediaan akses informasi bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan. BMI berkomitmen untuk senantiasa memberikan informasi yang aktual dan bermanfaat dengan memperhatikan ketentuan terkait data perusahaan yang tidak dapat dipublikasikan/rahasia.

Bank Muamalat is committed to actualizing GCG principles, including transparency, which is manifested by providing access to information for the stakeholders. Bank Muamalat strives to provide actual and useful information by considering the provisions regarding company data that cannot be published/confidential.

Transparansi informasi secara internal dan eksternal diharapkan dapat membantu, menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan persepsi positif dari para pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan kegiatan Bank. Untuk menyediakan informasi terkini bagi seluruh pemangku kepentingan, Bank Muamalat Indonesia menyediakan sarana portal informasi melalui situs website Bank pada alamat www.bankmuamalat.co.id dan media social resmi milik Bank Muamalat.

The manifestation of internal and external transparency principles in the information is expected to assist, maintain and increase the stakeholders' knowledge, understanding, and positive perception toward the Bank's policies and activities. To provide the latest information for all stakeholders, Bank Muamalat Indonesia provides an information portal facility through the Bank's website at www.bankmuamalat.co.id and official social media by Bank Muamalat.

Bank juga menyediakan informasi lebih lanjut bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan yang dapat diakses melalui:

The Bank also provides further information for the shareholders and stakeholders, which can be accessed through the following:

a. Media Elektronik

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Information & Communication Technology/ICT) yang andal sangat dibutuhkan untuk mendukung penyampaian informasi kepada publik baik internal maupun eksternal sehubungan dengan perkembangan teknologi dan arah penyajian informasi yang cepat serta singkat namun jelas.

a. Electronic Media

The use of reliable Information & Communication Technology (ICT) is highly required to support information delivery to the public, both internally and externally in connection with technological developments and the direction of presenting information in a quick and brief but clear manner.



Akses *database* elektronik menjadi salah satu alternatif yang penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi sehingga penggunaan TI berbasis digital menjadi sebuah keharusan belakangan ini. Oleh karena itu, Teknologi Informasi (TI) menjadi tuntutan mutlak dan penting dalam pengembangan media komunikasi Bank Muamalat Indonesia saat ini dan di masa mendatang.

Bank menyediakan beberapa saluran media elektronik yang dapat diakses yaitu:

Telepon : (021) 80666000
Faksimile : (021) 80666001
E-mail : corporate.affairs@bankmuamalat.co.id
Website : www.bankmuamalat.co.id
Facebook : Bank Muamalat
X : @BankMuamalat
Instagram : @bankmuamalat
Youtube : Bank Muamalat

b. Siaran Pers

Bank Muamalat secara aktif mempublikasikan siaran pers melalui berita dan informasi terkini yang tersedia di situs Bank sebagai upaya penyebarluasan informasi dari setiap aksi korporasi dan kegiatan penting Bank lainnya.

c. Salamuamalat

Bank Muamalat memiliki layanan phone banking 24 jam melalui nomor 1500016 yang dinamakan Salamuamalat. Salamuamalat juga menjangkau nasabah yang berada di luar negeri melalui nomor +6221 8066 8000. Salamuamalat memberikan kemudahan kepada nasabah setiap saat dan di mana pun nasabah berada.

Dengan menghubungi Salamuamalat, nasabah dapat melakukan pengecekan informasi saldo, cek mutasi, pemindahbukuan, transfer antar rekening Bank Muamalat hingga Rp50 juta. Nasabah juga bisa membayar Zakat Infak Sedekah, mendapatkan informasi produk pendanaan, informasi produk pembiayaan, layanan pengaduan dan kehilangan kartu, layanan virtual account dan layanan untuk berbicara dengan Salamuamalat officer.

Access to electronic databases is an important alternative in meeting the public's needs for information, thus the use of digital-based IT has become a necessity these days. Therefore, Information Technology (IT) is an absolute and important demand in the development of communication media for Bank Muamalat Indonesia today and in the future.

The Bank provides several electronic media channels that can be accessed, namely:

Phone : (021) 80666000
Facsimile : (021) 80666001
E-mail : corporate.affairs@bankmuamalat.co.id
Website : www.bankmuamalat.co.id
Facebook : Bank Muamalat
X : @BankMuamalat
Instagram : @bankmuamalat
YouTube : Bank Muamalat

b. Press Releases

Bank Muamalat actively publishes press releases through the latest news and information available on the Bank's website as the effort to disseminate information on every corporate action and other important Bank activities.

c. Salamuamalat

Bank Muamalat has 24-hour phone banking service through the number 1500016 called Salamuamalat. Salamuamalat also reaches overseas customers via the number +6221 8066 8000. Salamuamalat provides convenience to customers whenever and wherever they are.

By contacting Salamuamalat, the customers may check balance information, check transactions, book transfers, transfer between Bank Muamalat accounts up to Rp50 million. Customers can also pay Zakat Infaq Alms, obtain information on funding products, information on financing products, complaint services and lost cards, virtual account services, and services to talk to Salamuamalat officers.



d. Sekretaris Perusahaan

Untuk dapat mengakses informasi mengenai Bank, masyarakat dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan dengan alamat Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 18 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan 12940 di nomor telepon 021-80666000 ext. 117023 dan e-mail corporate.affairs@bankmuamalat.co.id atau investor.relations@bankmuamalat.co.id di samping sarana-sarana yang telah diurai sebelumnya.

Bank Muamalat Indonesia juga senantiasa membagikan informasi mengenai aktivitas bisnis yang dilakukan kepada publik melalui keterbukaan informasi. Berikut adalah keterbukaan informasi yang dirilis Bank sepanjang tahun 2023.

d. Corporate Secretary

To be able to access information on the Bank, the public can contact the Corporate Secretary at the address Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 18 Kuningan Timur, Setiabudi South Jakarta 12940 at telephone number 021-80666000 ext. 117023 and e-mail corporate.affairs@bankmuamalat.co.id or investor.relations@bankmuamalat.co.id apart from the previously described facilities

Bank Muamalat Indonesia also continues to share information regarding its business activities to the public through information disclosure. The following is information disclosure released by the Bank during 2023.

Aktivitas Activities	Tanggal Date	Media Pelaporan Reporting Media
Melakukan pembaruan profil Dewan Komisaris di website Bank Muamalat - Pak Amin Said Husni dan Pak Sartono Updated the profile of the Board of Commissioners on Bank Muamalat's website - Mr. Amin Said Husni and Mr. Sartono	18 Januari 2023 January 18, 2023	WEBSITE BMI BMI WEBSITE
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) via Koran Neraca Announcement on the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) through Neraca Newspaper	31 Maret 2023 March 31, 2023	MEDIA MASSA MASS MEDIA
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) via Website BMI Announcement on the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) through BMI Website	31 Maret 2023 March 31, 2023	WEBSITE BMI BMI WEBSITE
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) at the Neraca newspaper Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) through Neraca Newspaper	18 April 2023 April 18, 2023	MEDIA MASSA MASS MEDIA
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) via Website BMI Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) through BMI Website	18 April 2023 April 18, 2023	WEBSITE BMI BMI WEBSITE
Publikasi Laporan Tahunan 2022 via Website Publication of the 2022 Annual Report via Website	18 April 2023 April 18, 2023	WEBSITE BMI BMI WEBSITE
Publikasi Laporan Keberlanjutan 2022 via Website Publication of the 2022 Sustainability Report on the Website	18 April 2023 April 18, 2023	WEBSITE BMI BMI WEBSITE
Melakukan pembaruan profil Bapak Indra Falatehan dan Bapak Suhendar di website Bank Muamalat Updated the profiles of Mr. Indra Falatehan and Mr. Suhendar through Bank Muamalat website	26 April 2023 April 26, 2023	WEBSITE BMI BMI WEBSITE
Publikasi Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) via Media Massa Publication of the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) through Mass Media	15 Mei 2023 May 15, 2023	MEDIA MASSA MASS MEDIA
Publikasi Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) via Website Publication of the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on the Website	15 Mei 2023 May 15, 2023	WEBSITE BMI BMI WEBSITE
Website - Laporan Pengangkatan Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Website - Report of the Appointment of the PT Bank Muamalat Indonesia Audit Committee	2 Agustus 2023 August 2, 2023	WEBSITE BMI BMI WEBSITE
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) via Media Massa Announcement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) through Mass Media	5 Oktober 2023 October 5, 2023	MEDIA MASSA MASS MEDIA
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) via Website BMI Announcement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on BMI Website	5 Oktober 2023 October 5, 2023	WEBSITE BMI BMI WEBSITE
Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham dalam Rencana Penggabungan Saham (Reverse Stock Split) via Media Massa Disclosure of Information to the Shareholders related to the Stock Merger Plan (Reverse Stock Split) through the Mass Media	5 Oktober 2023 October 5, 2023	MEDIA MASSA MASS MEDIA



Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Function



Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan 2023
2023 Financial Statements

Aktivitas Activities	Tanggal Date	Media Pelaporan Reporting Media
Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham dalam Rangka Rencana Penggabungan Saham (<i>Reverse Stock Split</i>) via <i>Website</i> Disclosure of Information to Shareholders in the Context of a Stock Merger Plan (Reverse Stock Split) on the Website	5 Oktober 2023 October 5, 2023	WEBSITE BMI BMI WEBSITE
Pemanggilan RUPST via Media Massa Invitation to the AGMS via Mass Media	20 Oktober 2023 October 20, 2023	MEDIA MASSA MASS MEDIA
Pemanggilan RUPST via Website BMI Invitation to the AGMS via BMI Website	20 Oktober 2023 October 20, 2023	WEBSITE BMI BMI WEBSITE
Tata Tertib, Surat Kuasa, dan Lembar Pertanyaan RUPSLB Procedures, Power of Attorney, and EGMS Questionnaire Sheet	20 Oktober 2023 October 20, 2023	WEBSITE BMI BMI WEBSITE
Publikasi Ringkasan Risalah RUPSLB via Media Massa Publication of Summary of EGMS Minutes via Mass Media	14 November 2023 November 14, 2023	MEDIA MASSA MASS MEDIA
Publikasi Ringkasan Risalah RUPSLB via Website BMI Publication of Summary of EGMS Minutes on BMI Website	14 November 2023 November 14, 2023	WEBSITE BMI BMI WEBSITE
Pengumuman kepada Para Pemegang Saham dalam Rangka Rencana Penggabungan Saham (<i>Reverse Stock Split</i>) via Media Massa Announcement to Shareholders regarding the Reverse Stock Split Plan through the Mass Media	14 November 2023 November 14, 2023	MEDIA MASSA MASS MEDIA
Pengumuman kepada Para Pemegang Saham dalam Rangka Rencana Penggabungan Saham (<i>Reverse Stock Split</i>) via Website Announcement to Shareholders regarding the Reverse Stock Split Plan on the Website	14 November 2023 November 14, 2023	WEBSITE BMI BMI WEBSITE



Kode Etik Perusahaan

Corporate Code of Conduct

Kode Etik (*Code of Conduct*) Bank Muamalat Indonesia menjadi nilai dasar dan pedoman bagi seluruh insan sekaligus merupakan wujud dari komitmen Bank untuk menjalankan fungsi kepatuhan. Kode Etik tersebut menjadi dasar dalam bersikap dan beretika seluruh Insan Muamalat di setiap kegiatan usahanya.

Penyusunan Kode Etik Bank Muamalat mengacu pada Kode Etik Bankir Indonesia, *Core Values* Bank Muamalat Indonesia dan Ittifaq serta berdasarkan pada *best practice* penerapan *Good Corporate Governance*. Kode Etik Bank Muamalat mengatur mengenai standar perilaku, sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, dan penegakan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan.

The Code of Conduct of Bank Muamalat Indonesia is the basic value and guideline for all people as well as a manifestation of the Bank's commitment to carry out the compliance function. The Code of Conduct is the basis for the behavior and ethics of all Muamalat personnel in every business activity.

The preparation of the Bank Muamalat Code of Ethics refers to the Indonesian Bankers Code of Ethics, the Core Values of Bank Muamalat Indonesia and Ittifaq and is based on the best practice of implementing Good Corporate Governance. Bank Muamalat Code of Ethics regulates the standards of behavior, value system, business ethics, work ethics, commitment, and enforcement of applicable regulations for members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees.

POKOK-POKOK KODE ETIK BANK

Bank Muamalat Indonesia telah mengatur pokok-pokok Kode Etik di lingkungan Bank yaitu:

1. Kepatuhan terhadap ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memastikan kehalalan sumber, proses dan hasil dari pekerjaan, yaitu mencakup pengaturan benturan kepentingan, hubungan dengan *stakeholder*, kegiatan politik karyawan.
3. Menunjukkan perilaku disiplin dalam bekerja dan menjalankan ibadah.
4. Menjunjung tinggi etika moral dan sopan santun.
5. Menjaga amanah yang diberikan, termasuk pengaturan perilaku untuk menjaga nama baik Bank, menjaga fasilitas Bank, melayani nasabah dengan baik, dan mencegah tindakan pelanggaran.
6. Menjaga kerahasiaan Informasi nasabah dan Bank.

PRINCIPLED OF THE BANK'S CODE OF CONDUCT

Bank Muamalat regulated the main principles of the Code of Conducts within the Bank, including:

1. Compliance with Islamic teachings as well as applicable laws and regulations.
2. Ensuring halal sources, processes, and results of work, including regulation of conflicts of interest, relationships with the stakeholders, and employees' political activities.
3. Demonstrating discipline behavior in working and practicing worship.
4. Upholding moral ethics and courtesy.
5. Maintaining the delegated mandate, including regulating behavior to maintain the Bank's good reputation, care for Bank facilities, serve customers well, and prevent violations.
6. Maintain the confidentiality of customer and bank information.

SOSIALISASI KODE ETIK DAN UPAYA PENEGAKAN

Bank Muamalat Indonesia melakukan sosialisasi Kode Etik secara berkala, melalui serangkaian pelatihan, penayangan materi Kode Etik melalui media Muamalat Human Power yang dapat diakses oleh seluruh karyawan serta melalui HC News. Seluruh karyawan Bank wajib memberikan

DISSEMINATION OF THE CODE OF CONDUCTS AND ENFORCEMENT EFFORTS

The Bank constantly carries out periodical socialization from year to year through a series of training and display of Code of Conducts material through the Muamalat Human Power media, which can be accessed by all employees, as well as socialization via HC News. The entire Bank employees



pernyataan kesanggupan menjalankan Kode Etik secara online melalui aplikasi Muamalat Human Power sebagai bentuk implementasi *Good Corporate Governance*.

are required to provide an online statement of ability to implement the Code of Ethics through the Muamalat Human Power application as a manifestation of Good Corporate Governance implementation.

PERNYATAAN KODE ETIK BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Kode etik yang dimiliki oleh Bank Muamalat berlaku bagi seluruh karyawan. Khusus untuk karyawan, Bank telah memiliki surat pernyataan kode etik yang menegaskan bahwa karyawan Bank Muamalat telah membaca, mempelajari dan memahami keseluruhan isi Kode Etik Bank Muamalat dan bersedia untuk selalu menaati dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dalam pernyataan tersebut juga terdapat kesediaan untuk dikenakan sanksi apabila dikemudian hari karyawan melakukan pelanggaran atas Kode Etik Bank Muamalat.

STATEMENT OF CODE OF CONDUCTS APPLICABLE TO ALL ORGANIZATION LEVELS

Bank Muamalat's code of conduct applies to all employees. For employees in particular, the Bank has a statement of code of conduct, which confirms that Bank Muamalat employees have read, studied, and understood the entire contents of Bank Muamalat Code of Conduct and are always willing to comply and implement it as well as possible. In the statement, there is also a willingness to be subject to sanctions if the employee violates the Bank Muamalat Code of Conduct in the future.

SANKSI PELANGGARAN

Pemberian sanksi dilakukan sebagai suatu tindakan korektif, pembinaan dan memberikan arahan kepada karyawan agar dapat memperbaiki diri, mengubah sikap dan tingkah laku serta berbuat sesuatu secara benar sesuai aturan yang berlaku atau meningkatkan motivasi dan kinerja. Bank dapat memberikan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan karyawan terhadap Kode Etik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS

Sanctions are imposed as a corrective and coaching measure, as well as providing direction to employees to ensure that they can improve themselves, change attitudes and behavior, and do things correctly according to applicable rules or increase motivation and performance. The Bank may impose sanctions due to violations committed by employees against the Code of Conduct as long as they do not conflict with the applicable laws and regulations.

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

Berikut adalah jumlah pelanggaran dan sanksi yang diberikan oleh Bank hingga berakhirnya tahun buku 2023.

Total Violations and Sanctions Imposed

The following are total violations and sanctions imposed by the Bank until the end of the 2023 fiscal year.

No	Jenis Sanksi Type of Sanction	Jumlah Sanksi Number of Sanctions	Status Karyawan Saat Ini Current Status of Employee	
			Aktif Active	Non Aktif Non-Active
1	Surat Teguran Reprimand Letter	29	28	1
2	SP1 Warning Letter 1	14	13	1
3	SP2 Warning Letter 2	6	5	1
4	SP3 Warning Letter 3	16	14	2
5	Pemutusan Hubungan Kerja Termination of Employment	11	0	11
Total		76	60	16



Kebijakan Antikorupsi/*Fraud* dan Sosialisasinya

Anti-Corruption/*Fraud* Policy and Its Socialization

Bank Muamalat Indonesia berkomitmen penuh untuk mencegah terjadinya tindakan penyimpangan (*fraud*) termasuk di dalamnya korupsi (gratifikasi) dengan menerapkan aturan yang ketat. Sebagai bukti komitmen ini pada tanggal 20 Maret 2023 telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas yang dihadiri dan ditandatangani oleh Jajaran Komisaris, Jajaran Board of Management, Senior Management Team, seluruh karyawan serta Pimpinan Perusahaan Mitra Kerja Bank Muamalat. Sebagai kelanjutannya pada bulan November 2023, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berhasil meraih sertifikat ISO 37001:2016 atas komitmennya dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Bank (SMAP). Bank menerapkan kebijakan yang secara tegas menyatakan bahwa Insan Muamalat tidak diperbolehkan mendorong terjadinya korupsi (gratifikasi) termasuk di dalamnya tindakan untuk memberi dan atau menerima gratifikasi.

Bank mengatur kebijakan mengenai anti fraud yang dituangkan dalam Prosedur Pelaksanaan Anti Fraud dan Kode Etik & Perilaku Kepegawaian. Dalam rangka mendukung penerapan kebijakan anti fraud, Bank juga memiliki layanan pelaporan (*Whistleblowing System*) atas adanya indikasi fraud, kejadian penyalahgunaan wewenang/jabatan, pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan internal lainnya.

FUNGSI DAN PROSEDUR ANTIKORUPSI/*FRAUD*

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 039/POJK.03/2019 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum dan POJK No 17 Tahun 2023 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank Muamalat Indonesia telah menyusun Prosedur Penerapan Anti Fraud yang secara umum mengatur antara lain tugas dan tanggung jawab Divisi Anti Fraud, wewenang Divisi Anti Fraud, pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, sanksi, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Bank Muamalat Indonesia is fully committed to prevent fraud, including corruption (gratification), by implementing strict rules. As proof of this commitment, on 20 March 2023, the signing of the Integrity Pact was attended and signed by the Board of Commissioners, Board of Management, Senior Management Team, all employees and Heads of Bank Muamalat Partner Companies. Subsequently as follow-up, in November 2023, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk succeeded in achieving ISO 37001:2016 certification for its commitment to implementing the Bank Anti-Bribery Management System (SMAP). The Bank implements a policy which explicitly states that Bank Muamalat personnel are not permitted to encourage corruption (gratuity) including actions to give and/or receive gratuity.

The Bank regulates anti-fraud policies as outlined in the Anti-Fraud Implementation Procedures and the Personnel Code of Ethics & Behavior. In order to support the implementation of anti-fraud policies, the Bank also has a reporting service (*Whistleblowing System*) for indications of fraud, incidents of abuse of authority/position, violations of statutory provisions and other internal regulations.

ANTI-CORRUPTION/*FRAUD* FUNCTIONS AND PROCEDURES

Referring to the Financial Services Authority Regulation No. 039/POJK.03/2019 regarding the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Commercial Banks and POJK No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks, Bank Muamalat Indonesia has prepared Anti-Fraud Implementation Procedures which generally regulate, among others, the duties and responsibilities of the Anti-Fraud Division, authority of the Anti-Fraud Division, prevention, detection, investigation, reporting, sanctions, monitoring, evaluation and follow-up.



Bank Muamalat Indonesia mematuhi Peraturan OJK No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum dan sebagai wujud penyempurnaan Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Bank. Untuk itu, melalui upaya pemantauan dan mitigasi risiko fraud, Bank Muamalat Indonesia telah menyusun Strategi Anti Fraud yang berlandaskan pada empat pilar, yakni: (1) Pencegahan, (2) Deteksi, (3) Investigasi Pelaporan dan Sanksi, (4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, dengan melibatkan seluruh jajaran karyawan (*line of defense*).

Bank Muamalat Indonesia complies with OJK Regulation No.39/POJK.03/2019 dated 19 December 2019 regarding the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Commercial Banks and as a form of improvement in the Bank's Internal Control System Policy. Therefore, through monitoring and mitigation of fraud risks, Bank Muamalat Indonesia developed an Anti-Fraud Strategy based on four pillars, namely: (1) Prevention, (2) Detection, (3) Investigation, Reporting and Sanctions, (4) Monitoring, Evaluation and Follow-up, involving all levels of employees (*line of defense*).

Pilar 1 Pencegahan Pillar 1 Prevention

Melakukan langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*, antara lain *anti-fraud awereness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*. Taking measures in order to reduce the potential risk of fraud, including anti-fraud awareness, identification of vulnerabilities, and know your employee.

Anti-fraud Awereness

Upaya untuk menumbuhkan *anti-fraud awereness* dilakukan dengan cara:

1. Penyampaian Deklarasi Anti-fraud

Deklarasi *Anti-fraud* wajib untuk diketahui, dipahami dan ditandatangani/disetujui oleh seluruh karyawan Bank Muamalat Indonesia sebanyak dua kali setahun melalui "Muamalat Human Power (MHP)" atau sistem/aplikasi SDM yang diperbaharui setiap tahunnya.

2. Program Employee Awareness

Secara konsisten melaksanakan program kampanye/sosialisasi *anti-fraud* serta *e-mail blast* melalui *employee relations* ke seluruh karyawan di kantor kas, kantor capem dan kantor cabang. Selain itu juga dikirim melalui *news letter* yang di-*e-mail* kepada seluruh pejabat internal Bank Muamalat Indonesia untuk diteruskan kepada sub ordinat masing-masing. Program kampanye tersebut juga dilaksanakan bekerja sama dengan HC Learning pada saat pelaksanaan program *training* reguler di unit kerja/bisnis seperti Program Mulia, MODP Future Leader, dan RFC Managers Program.

3. Program Customer Awareness

- Menyampaikan informasi *anti-fraud* di media elektronik Bank: ATM, *mobile banking*, *internet banking*, dan juga melalui media sosial (Twitter, Facebook).
- Imbauan tertulis di area *banking hall*.

4. Pelaksanaan Training

Mengikutsertakan karyawan dalam eksternal *training/workshop*.

5. Sosialisasi Anti-fraud

Dilakukannya *Training of Trainer (ToT) Anti-fraud* yang diikuti oleh Region Head, Region Operation Manager, Branch Manager, dan Branch Operation Manager di seluruh area dan cabang se-Indonesia yang kemudian disebut *Anti-fraud Ambassador (Ambassador)*. Ambassador diberi sertifikat dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan kampanye di area dan cabang masing-masing.

Identifikasi Kerawanan

Mengacu pada pengalaman kasus-kasus *fraud* yang telah terjadi, aktivitas yang memiliki tingkat kerawanan *fraud* yang tinggi antara lain bidang operasional, bidang pembiayaan, dan bidang teknologi informasi. Hasil identifikasi kerawanan telah tertuang dalam rekomendasi perbaikan masing-masing kasus dan telah disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Know Your Employee

Dalam hal proses seleksi atau rekrutmen calon karyawan, divisi terkait atau kantor cabang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk yang terkait dengan *screening*.

Anti-fraud Awereness

Efforts to foster anti-fraud awareness are carried out by:

1. Submission of the Anti-fraud Declaration

The Anti-fraud Declaration must be known, understood and signed/approved by all Bank Muamalat Indonesia employees twice a year via the "Muamalat Human Power (MHP)" or HR system/application which is updated annually

2. Employee Awareness Program

Consistently implementing anti-fraud campaign/socialization programs as well as email blasts through employee relations to all employees at cash offices, sub-branch offices and branch offices. In addition, it was also sent via a news letter which was emailed to all internal officials of Bank Muamalat Indonesia to be forwarded to their respective subordinates. The campaign program was also carried out in collaboration with HC Learning during regular training programs in work/business units such as the Mulia Program, MODP Future Leader, and RFC Managers Program

3. Customer Awareness Program

- Conveying anti-fraud information on the Bank's electronic media: ATMs, mobile banking, internet banking, and also through social media (Twitter, Facebook)
- Written appeal in the banking hall area.

4. Training Implementation

Engaging employees in external training/workshops.

5. Anti-fraud Socialization

Anti-fraud Training of Trainers (ToT) was carried out which was attended by Region Heads, Region Operation Managers, Branch Managers, and Branch Operation Managers in all areas and branches throughout Indonesia which were later called Anti-fraud Ambassadors (Ambassadors). The Ambassadors received the certification and have the obligation to deliver campaigns in their respective areas and branches

Identification of Vulnerability

Referring to the past fraud cases, activities that have a high level of fraud vulnerability include operational sector, financing sector, and information technology sector. The results of the identification of vulnerabilities have been stated in the recommendations for improvement in each case and have been submitted to related parties for follow-up

Know Your Employee

In terms of the selection or recruitment process for prospective employees in related divisions or branch offices, it is carried out in accordance with applicable procedures, including those related to screening



Pilar 2 Deteksi Pillar 2 Detection

Melakukan langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank, antara lain kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*.
Taking steps to identify and find fraud in bank business activities, including policies and mechanisms for whistleblowing, surprise audits, and surveillance systems

Kebijakan dan Mekanisme Whistleblowing
Kebijakan *whistleblowing* telah tercantum dalam ketentuan internal, yakni terkait perlindungan kepada *whistleblower*, pengaduan *fraud* dan sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan dengan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di mana Bank menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporan yang disampaikan dengan format bebas.

Whistleblowing Policy and Mechanism
The whistleblowing policy has been stated in the internal regulations, which are related to the protection of whistleblowers, fraud complaints, reporting systems and report follow-up mechanisms with reference to the prevailing laws and regulations where the Bank guarantees the confidentiality of the whistleblower's identity and the report he/she submits in a free format

Surprise Audit
Pemeriksaan mendadak untuk meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka pencegahan *fraud* di Bank Muamalat Indonesia.

Surprise Audit
Unannounced audits to increase employee vigilance in carrying out their duties and responsibilities in order to prevent fraud at Bank Muamalat Indonesia

Surveillance System
Pemeriksaan secara diam-diam untuk meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka pencegahan *fraud* di Bank Muamalat Indonesia.

Surveillance System
Secret inspection to increase employee vigilance in carrying out their duties and responsibilities in order to prevent fraud at Bank Muamalat Indonesia

Pilar 3 Investigasi, Pelaporan dan Sanksi Pillar 3 Investigation, Reporting, and Sanctions

Melakukan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha Bank.
Taking steps in order to gather information (investigation), a reporting system and impose sanctions for fraud in the Bank's business activities.

Investigasi
Investigasi dilakukan dengan tujuan:

- Mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *fraud* sehingga (jika diperlukan) dapat digunakan untuk melakukan tuntutan hukum ke pengadilan.
- Mengetahui bagaimana *fraud* dapat terjadi.
- Mengetahui dampak atas *fraud*, pihak yang terlibat dan kelemahan dari sistem/proses yang menyebabkan terjadinya *fraud* sehingga dapat ditemukan langkah perbaikan yang efektif.
- Pemberian sanksi kepada pelaku *fraud*.

Investigation
Investigations are carried out with the following goals:

- Collecting evidence related to events that can reasonably be suspected of being an act of fraud so that (if needed) can be used to bring legal proceedings to court.
- Determine how fraud can occur.
- Determine the impact of fraud, the parties involved and the weaknesses of the systems/ processes that lead to fraud so that effective corrective measures can be formulated.
- Imposing sanctions for fraud perpetrators

Pelaporan
Sistem pelaporan mencakup pelaporan secara internal kepada pihak Manajemen Bank maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Reporting
The reporting system includes internal reporting to the Bank Management as well as to the Financial Services Authority and Bank Indonesia.

Sanksi
Direksi merupakan pihak yang berwenang memutuskan pengenaan sanksi yang dikategorikan sebagai tindakan *fraud* berdasarkan hasil rekomendasi Komite Disiplin. Pengenaan jenis dan kadar berat ringannya sanksi kepada pelaku mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Sanction
The Board of Directors is the party authorized to decide the imposition of sanctions for fraud based on the recommendations of the Disciplinary Committee. The imposition of the type and severity of sanctions on the perpetrator refers to the applicable provisions.

Pilar 4 Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Pillar 4 Monitoring, Evaluation, and Follow-up

Melakukan langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud*, serta mekanisme tindak lanjut.
Taking steps to monitor and evaluate fraud, as well as follow-up mechanisms

Pemantauan
Melakukan pemantauan terhadap tindakan perbaikan dalam upaya menghindari berulangnya kasus *fraud* yang sama dan memastikan bahwa rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan secara memadai oleh unit kerja terkait.

Monitoring
Monitor corrective measures in an effort to avoid recurring cases of the same fraud and ensure that recommendations for improvements have been implemented adequately by the relevant work unit.

Evaluasi
Mengevaluasi akar penyebab dari setiap kejadian *fraud* untuk menentukan langkah perbaikan (*corrective action*) yang perlu dilakukan, mencakup evaluasi terhadap kecukupan kontrol (sistem pengendalian) dan pelaksanaan pedoman dan prosedur kerja, proses pengelolaan risiko dan proses tata kelola di unit kerja terkait tempat terjadinya *fraud*.

Evaluation
Evaluating the root causes of each fraud incident to determine corrective action that needs to be taken, including evaluation of the adequacy of controls (control systems) and implementation of work guidelines and procedures, risk management processes and governance processes in work units related to where the fraud occurred.

Tindak Lanjut
Memperbaiki penyebab terjadinya *fraud* dengan memperkuat sistem pengendalian internal, proses pengelolaan risiko dan proses tata kelola yang lebih baik.

Follow-up
Rectify the causes of fraud by strengthening internal control systems, risk management processes and better governance processes.



Di samping perannya untuk menerapkan strategi pengendalian *Fraud*, Divisi Anti *Fraud* juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang mencakup:

1. Menyusun dan melakukan kajian ulang secara berkala atas Prosedur Pelaksanaan Anti *Fraud*.
2. Memberikan sosialisasi, training, ataupun kampanye dan pembinaan kepada seluruh jenjang organisasi dalam rangka antisipasi dan pencegahan terjadinya *Fraud*.
3. Mengkaji efektivitas Bank dalam mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan memperbaiki dampak *Fraud* yang terjadi.
4. Menyelenggarakan rapat rutin terkait tindak lanjut penanganan *Fraud* dan membuat laporan periodik kepada Direktur Supervisi.
5. Berkoordinasi dengan instansi dan aparaturnya Negara terkait untuk menindaklanjuti kasus *Fraud*, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal.
6. Berkoordinasi dengan unit kerja yang terkait dalam pelaporan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan guna menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* setiap semester yang dilakukan pada bulan Januari dan Juli setiap tahunnya.
7. Melapor kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kejadian *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui hal tersebut.
8. Berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi.
9. Berkewajiban menyampaikan laporan hasil pemeriksaan investigatif kepada Direktur Supervisi dan pihak terkait lainnya.
10. Berkewajiban menyerahkan seluruh dokumen dan data termasuk keterangan dari pihak-pihak terkait kepada Komite Disiplin untuk selanjutnya dieskalasi ke Direksi untuk pengambilan Keputusan dan tindak lanjut penyelesaiannya.

Aside from its role to implement Fraud control strategies, the Anti-Fraud Division also has the duties and responsibilities which include the following:

1. Develop and conduct regular reviews of Anti-Fraud Implementation Procedures.
2. Provide outreach, training, or campaigns and guidance to all levels of the organization in order to anticipate and prevent fraud.
3. Review the Bank's effectiveness in preventing, detecting, investigating and correcting the impact of fraud that occurs.
4. Hold regular meetings regarding follow-up on fraud handling and make periodic reports to the Supervisory Director.
5. Coordinate with relevant state agencies and apparatus to follow up on fraud cases, whether carried out by internal or external parties.
6. Coordinate with related work units in reporting to Bank Indonesia and/or the Financial Services Authority to submit Anti-Fraud Strategy Implementation Reports every semester which are carried out in January and July each year.
7. Report to the Financial Services Authority any Fraud incident which is expected to have significant negative impact on the Bank, no later than 3 (three) working days after the Bank becomes aware of this matter.
8. Obligated to maintain the confidentiality of information.
9. Obligated to submit reports on the results of investigative examinations to the Supervisory Director and other related parties.
10. Obligated to submit all documents and data including information from related parties to the Disciplinary Committee for further escalation to the Board of Directors for decision-making and follow-up to completion.

KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN ANTI KORUPSI/FRAUD TAHUN 2023

Socialization Activities on Anti-Corruption/Fraud Policy in 2023

Periode Sosialisasi Socialization Period	Jumlah Cabang Number of Branches	Jumlah Peserta Number of Participants
Semester I 2023	80	2.285
Semester II 2023	80	2.284



Pengendalian Gratifikasi

Gratuity Control

Penerapan prosedur pengendalian gratifikasi Bank Muamalat Indonesia bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Bank yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Melalui prosedur pengendalian gratifikasi, seluruh Insan Bank Muamalat Indonesia diharapkan memiliki pemahaman yang setara tentang perlakuan terhadap gratifikasi serta terhindar dari praktik gratifikasi yang termasuk tindak pidana penyuapan.

Bank Muamalat Indonesia mendefinisikan gratifikasi sebagai semua bentuk penerimaan atau pemberian, baik langsung maupun tidak langsung. Gratifikasi dapat berupa uang, barang atau sesuatu penerimaan atau pemberian berupa apa pun (termasuk hiburan dan pelayanan) atau keuntungan lain yang tidak sepatutnya yang diketahui atau patut diduga bahwa penerimaan atau pemberian itu dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan pejabat perusahaan dan/atau pihak lain atau hadiah tersebut diberikan sebagai akibat karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bank Muamalat Indonesia melarang seluruh jajaran insan Bank Muamalat Indonesia menerima atau memberi hadiah dari dan/atau kepada pihak lain yang dimaksudkan untuk atau diduga dapat mempengaruhi keputusan pejabat Bank dan/ atau pihak lain. Bank Muamalat Indonesia mengizinkan pemberian bantuan (donasi) untuk kepentingan amal atau sosial dalam jumlah yang wajar sepanjang sesuai peraturan perundang-undangan serta ketentuan dan kaidah syariah yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Bank Muamalat serta melakukan tindakan pencegahan, pendeksian, penanganan tindak Gratifikasi maka ditetapkan pembentukan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) dan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berdasarkan Surat Keputusan No. 053/B/DIR-KPTS/IX/2023 tentang Penunjukan Anggota Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) dan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) PT bank Muamalat Indonesia Tbk.

The implementation of Bank Muamalat Indonesia's gratification control procedure aims to realize the management of the Bank which is free from all forms of corruption, collusion and nepotism (KKN). Through the gratification control procedure, all Bank Muamalat Indonesia personnel are expected to have an equal understanding of the treatment of gratuities and avoid the practice of gratuities that include bribery.

Bank Muamalat Indonesia defines gratification as all forms of receipt or gift, either directly or indirectly. Gratification can be in the form of money, goods or any receipt or gift in any form (including entertainment and services) or other improper benefits that are known or reasonably suspected that the receipt or gift is intended to influence the decision of company officials and / or other parties or the gift is given as a result of having done something or not doing something in his position that is contrary to his obligations.

Bank Muamalat Indonesia prohibits all levels of Bank Muamalat Indonesia personnel from receiving or giving gifts from and / or to other parties that are intended to or are suspected of influencing the decisions of Bank officials and / or other parties. Bank Muamalat Indonesia allows the provision of assistance (donations) for charitable or social purposes in reasonable amounts as long as in accordance with applicable laws and regulations and sharia rules and regulations.

In order to achieve the Vision and Mission of Bank Muamalat as well as to carry out measures to prevent, predict and handle acts of Gratuity, the establishment of an Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) and a Gratuity Control Unit (UPG) of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk was established based on Decree No. 053/B/DIR-KPTS/IX/2023 concerning Appointment of Members of the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) and Gratuity Control Unit (UPG) of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.



SOSIALISASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI 2023

Socialization on Gratuity Control 2023

Cabang Utama Main Branch Office	Nama Kantor Name of Office	Tanggal Date	Peserta Participants
PEKALONGAN	PEKALONGAN	18-Sep-23	28
	KC PEMALANG		
	KK PEKAJANGAN		
	KC BATANG		
TEGAL	TEGAL	19-Sep-23	11
KH. MAS MANSYUR	KH. MAS MANSYUR		35
	KK SEPANJANG		
	KC SUMENEP		
	KC LAMONGAN		
MALANG	MALANG	22-Sep-23	64
	KC PASURUAN		
	KC PROBOLINGGO		
	KC KEPANJEN		
	KC BATU		
SURABAYA DARMO	SURABAYA DARMO	20-Sep-23	75
	KC JOMBANG		
	KC MOJOKERTO		
	KC RUNGKUT		
SURABAYA SUNGKONO	SBY SUNGKONO	21-Sep-23	42
	KK GRESIK		
	KC SIDOARJO		
BENGKULU	BENGKULU	29-Nov-23	19
	KC CURUP		8
	KC ARGA MAKMUR		8
	KC MANNA		8
JAMBI	JAMBI	27-Nov-23	15
	KC MUARA BUNGO		10
LAMPUNG	LAMPUNG	09-Dec-23	47
	KC BANDAR JAYA		
	KC METRO		
	KC ZA PAGAR ALAM		
	KC KOTABUMI		
	KC ANTASARI		
PADANG	PADANG	24-Nov-23	20
	KC BUKITTINGGI		10
	KC PAYAKUMBUH		9
	KC SOLOK		8
PALEMBANG	PALEMBANG	07-Dec-23	43
	KC PLAJU		
	KC BATURAJA		
	KC ENIM		
PANGKAL PINANG	PANGKAL PINANG	06-Dec-23	25
	KC SUNGAILIAT		
	KC KOBA		
	KC TJ PANDAN		



Cabang Utama Main Branch Office	Nama Kantor Name of Office	Tanggal Date	Peserta Participants
BANDA ACEH	BANDA ACEH	12-Dec-23	19
BATAM	BATAM	22-Nov-23	18
LANGSA	LANGSA	13-Dec-23	24
	KC LHKSEUMAWE		
MEDAN - BALAIKOTA	MEDAN - BALAIKOTA	14-Dec-23	82
	KC SUKARAMAI		
	KC SERDANG		
MEDAN BARU	MEDAN BARU	14-Dec-23	
	KC STABAT		
	KC BINJAI		
PADANG SIDEMPUAN	PADANG SIDEMPUAN	15-Dec-23	15
	KC PANYABUNGAN		
PEKANBARU	PEKANBARU	21-Nov-23	26
	KC KAMPAR		
PEMATANG SIANTAR	PEMATANG SIANTAR	15-Dec-23	8
	KC KISARAN		7
TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG	23-Nov-23	10
TOTAL			716



Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Perusahaan

Transparency of the Company's Financial and Non-Financial Conditions

Bank Muamalat Indonesia telah memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan nonkeuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui penyampaian dan publikasi informasi, baik melalui media cetak maupun situs web Bank yang mencakup:

Bank Muamalat Indonesia has fulfilled the obligations of transparency and publication of financial and nonfinancial conditions according to the prevailing laws and regulations through the delivery and publication of information, either through print media or the Bank's website, including:

Jenis Publikasi Type of Publication	Media Publikasi Publication Media
Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator Monthly Financial Reports to regulators	Situs web OJK dan Bank Website of the FSA and the Bank
Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator Quarterly Financial Reports to regulators	Media cetak dan situs web Bank. Print media and the Bank's website
Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia yang disusun dan disajikan sesuai ketentuan dan disampaikan kepada regulator, <i>rating agency</i> , lembaga pengembangan perbankan, lembaga/institusi riset dan majalah keuangan The Annual Report of Bank Muamalat Indonesia, which is prepared and presented based on provisions and submitted wto regulators, rating agencies, banking development institutions, research institutions/ agencies and financial magazines	Situs web Bank The Bank's website
Informasi Tata Kelola Perusahaan, di antaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola antara lain Piagam Komite-komite Corporate Governance Information, including the Annual Report on Corporate Governance, Vision, Mission, Corporate Values, Composition and Profile of the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners and Board of Directors, as well as internal regulations related to governance, including the Articles of Association to the Committees Charter	Situs web Bank The Bank's website
Informasi Produk dan Layanan Bank, termasuk jaringan kantor Information on the Bank Products and Services, including office networks	Situs web Bank The Bank's website
Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan, Kebijakan Keamanan Informasi dan tips bagi Nasabah dalam menggunakan layanan perbankan sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen Information on Complaint Submission Procedures, Information Security Policies and Tips for Customers in using banking services published on the Bank's website for the implementation of consumer protection regulations	Situs web Bank The Bank's website
Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat Other information that aims at supporting information disclosure, financial education and services to the public	Situs web Bank The Bank's website



Pembelian Kembali Saham dan Obligasi Bank Muamalat Indonesia

Buy Back of Bank Muamalat Indonesia Shares and Bonds

Selama tahun 2023, Bank tidak melaksanakan aksi korporasi berupa *buyback* saham maupun *buyback* obligasi yang telah beredar.

During the year 2023, the Bank did not carry out corporate action in the form of share buybacks or outstanding bond buybacks.

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Provision of Funds for Social and Political Activities

Bank Muamalat tidak menoleransi keterlibatan Bank dan seluruh insan Bank Muamalat Indonesia tanpa terkecuali dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Kebijakan ini bertujuan menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan pekerja.

Bank Muamalat does not tolerate the involvement of the Bank and all Bank Muamalat Indonesia personnel, without exception, in political activities, including providing funds for political purposes. This policy aims to maintain the independency and professionalism of the Bank and its employees.

Merujuk ketentuan Pasal 123 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank senantiasa memperkenankan Insan Bank Muamalat Indonesia terlibat dalam kegiatan sosial dan lingkungan karena Bank meyakini bahwa kegiatan sosial dan lingkungan memberi dampak positif kepada khalayak yang lebih luas untuk jangka panjang serta mendukung visi misi Bank dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Bank terus berupaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosial dan lingkungan yang diwujudkan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang secara detail dijelaskan pada Bab Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Laporan Tahunan ini atau pada Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*).

Referring to the provisions of Article 123 of the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 regarding the Governance Implementation for Commercial Banks, the Bank always allows Bank Muamalat Indonesia Personnel to be involved in social and environmental activities because the Bank believes that social and environmental activities have positive impact on a wider audience for long run and supports the Bank's vision and mission in implementing sustainable finance. The Bank continues to strive to support the implementation of social and environmental activities realized through the Social and Environmental Responsibility program which is explained in detail in the Social and Environmental Responsibility Chapter in this Annual Report or in the Sustainability Report.

Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

Legal Lending Limit (LLL)

Sepanjang tahun 2023, Bank Muamalat Indonesia tidak melanggar dan/atau melampaui Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait dengan Bank.

Throughout 2023, Bank Muamalat Indonesia did not violate and/ or exceed the Legal Lending Limit (LLL) for related parties and unrelated parties to the Bank.



Kebijakan Perlindungan Nasabah

Customers' Protection Policy

Bagi Bank Muamalat Indonesia, nasabah merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran penting bagi peningkatan kinerja dan keberlanjutan usaha Bank. Oleh karena itu, Bank berkomitmen dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan prima dan perlindungan bagi para nasabah yang diwujudkan dengan adanya layanan pengaduan nasabah melalui website Bank Muamalat, SalaMuamalat, serta media social Bank, yang terdiri dari Facebook, Twitter dan Instagram.

Nasabah dapat langsung menghubungi dan melaporkan bila mendapatkan kendala dalam proses perbankan/transaksi keuangan di Bank Muamalat Indonesia. Bank juga senantiasa berupaya secara maksimal dalam melindungi kepentingan seluruh nasabah dan memberikan yang terbaik, sebagai bentuk pemenuhan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Informasi lebih rinci terkait dengan mekanisme prosedur dan pelaksanaan penyelesaian pengaduan nasabah dijelaskan dalam Bab Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Laporan Tahunan ini atau pada Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*).

PERLINDUNGAN HAK KREDITUR

Dalam rangka perlindungan hak-hak kreditur, Bank Muamalat Indonesia melakukan keterbukaan informasi secara jujur dan transparan serta persamaan perlakuan (equal treatment) kepada seluruh kreditur tanpa adanya diskriminasi. Melalui keterbukaan informasi, seluruh kreditur, pemangku kepentingan, maupun mitra usaha memperoleh informasi yang relevan sesuai kebutuhannya sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan yang objektif atas dasar pertimbangan yang adil, wajar dan akurat.

For Bank Muamalat Indonesia, customers are one of the stakeholders who have an important role in improving the performance and sustainability of the Bank's business. Therefore, the Bank is committed and continues to strive to provide excellent services and protection for customers, which is realized by providing customer complaint services through the Bank Muamalat website, SalaMuamalat, as well as the Bank's social media, such as Facebook, Twitter and Instagram.

Customers can immediately contact and report if they encounter problems in the banking/financial transaction process at Bank Muamalat Indonesia. The Bank also always strive with maximum efforts to protect the interests of all customers and provide the best, as a form of compliance with Law No. 27 of Year 2022 concerning Protection of Personal Data and OJK Regulation (POJK) Number 22 of 2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.

More detailed information regarding the procedures and implementation mechanisms for resolving customer complaints is explained in the Social and Environmental Responsibility Chapter of this Annual Report or in the Sustainability Report.

PROTECTION OF CREDITORS' RIGHTS

In order to protect creditors' rights, Bank Muamalat Indonesia provides honest and transparent information disclosure as well as equal treatment to all creditors without any discrimination. Through information disclosure, all creditors, stakeholders and business partners obtain relevant information according to their needs so that each party can make objective decisions based on fair, reasonable and accurate considerations.



Hal tersebut juga sejalan dengan implementasi GCG. Melalui kebijakan tersebut, Bank berharap hak-hak kreditur dapat terpenuhi sekaligus mampu menjaga kepercayaan kreditur terhadap Bank.

Bank menjamin hak-hak kreditur dilaksanakan dengan baik, yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai bagian dari pelaksanaan dari hak-hak kreditur, Bank menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dengan tepat waktu dan berupaya untuk menghindari keterlambatan maupun kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian kedua belah pihak.

This is also in line with the implementation of GCG. Through this policy, the Bank hopes that creditors' rights can be fulfilled while being able to maintain creditors' trust in the Bank.

The bank guarantees that creditors' rights are implemented properly, which is stated in the agreement agreed by both parties. As part of the implementation of creditors' rights, the Bank carries out its obligations as agreed in a timely manner and strives to avoid delays or negligence that have the potential to cause losses to both parties.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Pedoman Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) merupakan mekanisme pengendalian internal yang didesain untuk menjaga transparansi dan kepatuhan karyawan serta manajemen Bank Muamalat Indonesia. WBS memastikan adanya sarana komunikasi yang dipercaya oleh seluruh pihak untuk melaporkan adanya indikasi atau kejadian penyalahgunaan wewenang/jabatan atau pelanggaran terhadap aturan kedisiplinan, kode etik atau peraturan internal lainnya, *fraud* atau Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Penerapan WBS bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Bank serta dalam rangka mencegah terjadinya tindak penyimpangan/pembiaran (*fraud*) yang dapat menimbulkan kerugian material ataupun immaterial bagi Bank di kemudian hari.

The Violation Reporting Guidelines or Whistleblowing System (WBS) is an internal control mechanism designed to keep transparency and compliance of employees and management of Bank Muamalat Indonesia. WBS ensures that there is a communication facility that is trusted by all parties to report indications or incidents of abuse of authority/position or violations of disciplinary rules, codes of ethics or other internal regulations, fraud or money laundering crimes (TPPU) or terrorist financing crimes (TPPT).

The implementation of WBS aims to create a transparent and accountable environment to support the creation of *Good Corporate Governance* (GCG) within the Bank and to prevent acts of deviation/omission (fraud) which can cause material or immaterial losses for the Bank in the future.



MEKANISME PELAPORAN

Bank berkomitmen dan memastikan kerahasiaan identitas pelapor dan laporannya serta memberikan perlindungan penuh bagi pelapor. Pelapor dapat menyampaikan dugaannya secara pribadi, baik melalui surat, telepon, e-mail serta media lainnya. Laporan dugaan pelanggaran bisa disampaikan kepada Contact Center WBS Bank Muamalat Indonesia, yakni:

Contact Center WBS PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Muamalat Tower Lantai 9
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18
Jakarta 12940
UP. Anti Fraud
e-mail: antifraud@bankmuamalat.co.id
Telpon/SMS/WA : 0811-1310-6000

Perlindungan Bagi Pelapor

Bank juga akan memberikan bantuan perlindungan hukum kepada pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman atau tindakan yang tidak menyenangkan dari pihak manapun. Perlindungan juga diberikan kepada karyawan yang melakukan penyelidikan dan bagi yang memberikan informasi terkait dengan penyelidikan pelanggaran. Apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksi yang diberikan merujuk kepada ketentuan internal yang berlaku, maupun sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Pengelola Pengaduan

Whistleblowing System dikelola oleh Divisi Anti-fraud dan difungsikan sebagai turunan dari Strategi Anti-Fraud (SAF) yang mencakup: Perlindungan kepada Whistleblower, Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan *Whistleblower*, Pengaduan Indikasi Fraud serta Contact Center WBS.

JENIS SANKSI BAGI PELANGGAR

Apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksi yang diberikan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank, maupun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pelaku yang terbukti, Bank menerapkan sanksi tegas dengan mengacu pada *Ittifaq* (Perjanjian Kerjasama).

PENANGANAN PENGADUAN DAN TINDAK LANJUT KASUS YANG MASUK DALAM WBS

Handling complaints and following up cases included in the WBS

Tahun Pelaporan Reporting Year	Jumlah Pelaporan Number of Report	Status Pelaporan Reporting Status
2023	7	Selesai 100% 100% Completed

REPORTING MECHANISM

The Bank is committed and ensures the confidentiality of the identity of the reporter and the report and provides full protection for the reporter. The reporter may convey his/her allegations personally, either by letter, telephone, e-mail or other media. Reports of suspected violations can be submitted to the WBS Bank Muamalat Indonesia Contact Center, namely as follows:

WBS Contact Center PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Muamalat Tower 9th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18
Jakarta 12940
Attn. Anti Fraud
e-mail: antifraud@bankmuamalat.co.id
Phone/SMS/WA : 0811-1310-6000

Protection for Whistleblowers

The Bank will also provide legal protection assistance to the reporter from all forms of threats, intimidation, punishment or unpleasant actions from any party. Protection is also provided to employees who conduct investigations and to those who provide information related to violations investigations. If the reported party is proven to have committed a violation, the sanctions given refer to the applicable internal provisions, as well as in accordance with the applicable statutory provisions.

Complaints Management

The Whistleblowing System is managed by the Anti-Fraud Division and functions as a derivative of the Anti-Fraud Strategy (SAF) which includes: Protection for Whistleblowers, Reporting System and Follow-up Mechanism for Whistleblower Reports, Fraud Indication Complaints and WBS Contact Center.

TYPES OF SANCTION FOR VIOLATORS

If the reported party is proven to have committed a violation, the sanctions given refer to the provisions in force at the Bank, as well as in accordance with applicable laws. For proven perpetrators, the Bank applies strict sanctions by referring to the *Ittifaq* (Cooperation Agreement).



Kebijakan Pencegahan *Insider Trading*

Insider Trading Prevention Policy

Kebijakan GCG Bank Muamalat mengatur bahwa Bank senantiasa menyediakan informasi yang cukup, akurat, dipercaya dan tepat waktu kepada segenap pemangku kepentingan dengan mengedepankan prinsip *equal/treatment*. Jajaran Bank dilarang untuk membeli atau menjual saham (*common stock*) atau surat berharga Bank lainnya pada saat yang bersangkutan bertanggung jawab atas informasi penting yang tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik yang dapat mempengaruhi nilai harga saham dan surat berharga Bank. Sebagai informasi bahwa Bank Muamalat Indonesia merupakan perusahaan terbuka, namun tidak memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, sehingga potensi terjadinya *insider trading* sangat rendah.

Bank Muamalat's GCG policy stipulates that the Bank always provides sufficient, accurate, reliable and timely information to all stakeholders by prioritizing the principle of equal/treatment. Bank officials are prohibited from buying or selling shares (*common stock*) or other Bank securities when they are responsible for important information that is not intended for public consumption which may affect the price value of the Bank's shares and securities. For your information, Bank Muamalat Indonesia is a public company, but does not trade its shares on the Indonesian Stock Exchange, so the potential for insider trading to occur is very low.

Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Non-Halal Income and Its Use

Berikut adalah rincian pendapatan non halal Bank sepanjang 2023 dan penggunaannya.

The following are details of the Bank's non-halal income throughout 2023 and its use.

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No	Sumber Pendapatan Non Halal Non-Halal Income Source	Nilai Pendapatan Non Halal Value of Non-Halal Income
1	Denda Penalties	1.019.500
2	Penerimaan Non Halal Non-Halal Revenue	1.357.334
Total Penerimaan Total Revenue		2.376.834



Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Function



Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan 2023
2023 Financial Statements

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menyajikan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk Laporan Keberlanjutan pada buku terpisah. Laporan tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu mengacu Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Silahkan merujuk pada Laporan Keberlanjutan 2023 Bank Muamalat untuk informasi lebih lengkap. Adapun yang disajikan pada halaman ini hanya "Ikhtisar Keberlanjutan".

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk presents information on social and environmental responsibility in the form of a Sustainability Report in a separate book. The report, in accordance with the Circular Letter of the Financial Services Authority (OJK) No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies, which refers to OJK Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies.

Please refer to the Bank Muamalat 2023 Sustainability Report for more detailed information. What is presented on this page is only "Sustainability Overview".





Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

Sustainability Performance Highlights

Aspek Ekonomi Economic Aspect

9,11%

Kenaikan total aset dari Rp61,36 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp66,95 triliun

Increase in total assets from Rp61.36 trillion in the previous year to Rp66.95 trillion

22,05%

Kenaikan pendapatan pengelolaan dana pada tahun pelaporan sebesar Rp2,15 triliun, naik 22,05% dari sebesar Rp1,76 triliun.

Increase in fund management revenue in the reporting year to Rp2.15 trillion, an increase of 22.05% from Rp1.76 trillion.

8,9%

Kontribusi Bank kepada negara melalui pembayaran pajak tahun 2023 sebesar Rp262,2 miliar, lebih tinggi 8,9% dari tahun sebelumnya.

Contribution of the Bank to the state through tax payments in 2023 amounted to Rp262.2 billion, 8.9% higher compared to the previous year.

Rp282

Miliar | Billion

Realisasi pengadaan barang dan jasa yang seluruhnya merupakan pemasok lokal

Realization of procurement of goods and services which are all local suppliers





Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Function



Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan 2023
2023 Financial Statements

Aspek Lingkungan Environmental Aspect

21.249 GJ

Total konsumsi energi
Total energy consumption

23.035 m³

Total penggunaan air dari PDAM
Total water consumption from PDAM



4.749,95 Ton CO₂eq

Total emisi cakupan 1 dan cakupan 2 yang dihasilkan
Total scope 1 and scope 2 emissions generated

Rp453,2 Juta | Million

Biaya pemeliharaan lingkungan selama 2023, naik 1,2% dari tahun sebelumnya
Environmental maintenance costs during 2023, an increase of 1.2% compared to the previous year

Aspek Sosial Social Aspect



39,5%

Komposisi karyawan perempuan tahun 2023, naik dari komposisi tahun sebelumnya sebesar 38,7%
Composition of female employees in 2023, an increase compared to the composition in the previous year of 38.7%



82 Jam | Hours

Rata-rata jam pelatihan per karyawan, naik dari tahun sebelumnya sebesar 81,4 jam
Average training hours per employee, an increase compared to 81.4 hours in the previous year



26.238 orang | People

Total penerima manfaat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dakwah, dan ekonomi
Total beneficiaries in the fields of education, health, social da'wah and economics



Rp7,18 Miliar | Billion

Total investasi sosial yang direalisasikan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program CSR Pengembangan Sosial Kemasyarakatan.
Total social investment realized to support the implementation of various CSR programs for Social Community Development.



Laporan Keuangan 2023

2023 Financial Statements



Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen

The Financial Statement
As of December 31, 2023
And For The Year Then Ended
With Independent Auditor's Report

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

**Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2023
Dan Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
Beserta
Laporan Auditor Independen**

***The Financial Statement
As of December 31, 2023
And For The Year
Then Ended
With
Independent Auditors' Report***



Bank Muamalat

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini/ *We the undersigned:*

- | | |
|--|--|
| 1. Nama/ <i>Name</i> | : Indra Falatehan |
| Alamat kantor/ <i>Office address</i> | : Muamalat Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18 Jakarta |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ <i>Domicile as stated in ID card</i> | : Jalan Anggrek Nelyimurni Raya B.77 RT.016 RW.001 |
| Nomor telepon/ <i>Phone number</i> | : +62 (21) 80666000 |
| Jabatan/ <i>Position</i> | : Direktur Utama / <i>President Director</i> |
| 2. Nama/ <i>Name</i> | : Suhendar |
| Alamat kantor/ <i>Office address</i> | : Muamalat Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18 Jakarta |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ <i>Domicile as stated in ID card</i> | : Jalan Percetakan Negara VI No.11 RT.005/003 Rawasari |
| Nomor telepon/ <i>Phone number</i> | : +62 (21) 80666000 |
| Jabatan/ <i>Position</i> | : Direktur / <i>Director</i> |

menyatakan bahwa:

state that:

- | | |
|--|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank); | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank);</i> |
| 2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah diungkapkan secara lengkap dan benar; | 3. a. <i>All information contained in the Bank's financial statements has been fully and correctly disclosed;</i> |
| b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar; dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The Bank's financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Bank. | 4. <i>We are responsible for the Bank's internal control system.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 26 Maret 2024 / March 26, 2024
Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*

	
Indra Falatehan	Suhendar
Direktur Utama / <i>President Director</i>	Direktur / <i>Director</i>

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

Halaman/ Page

1. SURAT PERNYATAAN DIREKSI		1. DIRECTOR'S STATEMENTS LETTER
2. DAFTAR ISI		2. TABLE OF CONTENTS
3. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		3. INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
4. LAPORAN KEUANGAN - Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang terdiri dari:		4. FINANCIAL STATEMENT - As of December 31, 2023 and for the year then ended, are as follow:
- Laporan Posisi Keuangan	i - iv	- Statement of Financial Position
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kprehensif Lain	v	- Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
- Laporan Perubahan Ekuitas	vi	- Statement of Changes in Equity
- Laporan Arus Kas	vii	- Statement of Cash Flows
- Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	viii	- Statement of Reconciliation of Income and Revenue Sharing
- Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	ix	- Statement of Sources and Distribution of Zakat Funds
- Laporan Sumber Dana dan Penggunaan Dana Kebajikan	x	- Statement of Sources and Uses of Qordhul Hasan Funds
- Catatan atas Laporan Keuangan	1 - 153	- Notes to The Financial Statements

Nomor/Number : 00007/2.0936/AU.4/07/0396-3/1/III/2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDENPemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi material dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2023, dan kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORTShareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**Opinion**

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and a summary of material accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk as of December 31, 2023, and their financial performance, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis For Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Penekanan Suatu Hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 52 atas laporan keuangan terlampir yang menjelaskan tentang kondisi perekonomian Indonesia yang terkena dampak dari pandemi global dan di Indonesia karena virus corona. Resolusi kondisi ekonomi ini tergantung pada tindakan Pemerintah dan Otoritas yang berada diluar kendali Bank. Oleh karena itu, pada saat ini dampak masa depan terhadap Bank belum dapat diperkirakan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan.

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 52 to the accompanying financial statements which explains the condition of the Indonesian economy affected by the global and local pandemic due to the corona virus. The resolution of this economic conditions depends on the actions of the Government and the Authority which are beyond the Bank's controls. Therefore, the future impact on the Bank cannot be estimated at this time. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statement does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion there on.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, tetapi bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi atas kelangsungan usaha pengelolaan dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatement can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.*

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Bank untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan Bank. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Bank to express an opinion on the financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of audit of the Bank's financial statement. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI

Izin Usaha / Firm License No. 42/KM.1/2013



Doli Diapary Siregar, CPA

Nomor Registrasi Akuntan Publik /
Public Accountant Registration Number
AP. 0396

Jakarta, 26 Maret 2024 / March 26, 2024



PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2023
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31 2023	31 Desember / December 31 2022	
ASET				ASSET
KAS	2.a, 3	720.209.073	702.179.266	CASH
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	2.d, 4	5.010.479.824	7.191.470.623	CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA
GIRO PADA BANK LAIN				CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
Pihak ketiga	2.e, 5	1.463.838.902	520.954.333	Third Parties
Cadangan Kerugian penurunan nilai		--	--	Allowance for impairment losses
Neto		1.463.838.902	520.954.333	Net
PENEMPATAN PADA BANK LAIN	2.f, 6			PLACEMENTS WITH OTHER BANKS
Pihak ketiga		3.760.782	43.155.448	Third Parties
Cadangan Kerugian penurunan nilai		--	(418.830)	Allowance for impairment losses
Neto		3.760.782	42.736.618	Net
INVESTASI PADA SURAT BERTAGIH	2.g, 7			INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES
Pihak ketiga		30.524.748.886	27.855.377.312	Third Parties
Cadangan Kerugian penurunan nilai		--	--	Allowance for impairment losses
Neto		30.524.748.886	27.855.377.312	Net
PIUTANG	2.h, 8			RECEIVABLES
Piutang <i>murabahah</i> - setelah dikurangi margin ditangguhkan sebesar Rp 1.547.819.473 tahun 2023 dan Rp 1.715.335.147 tahun 2022, Pihak ketiga		5.843.977.869	6.692.218.277	Murabahah receivables - net of deferred margin income amounting to Rp 1,547,819,473 in 2023 and Rp 1,715,335,147 in 2022, Third parties
Pihak berelasi		7.636.329	2.934.438	Related parties
Jumlah		5.851.614.198	6.695.152.715	Total
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(226.045.419)	(310.980.496)	Allowance for impairment losses
Bersih		5.625.568.779	6.384.172.219	Net
Piutang <i>Istishna</i> - setelah dikurangi margin ditangguhkan sebesar Rp 942.911 tahun 2023, Rp 1.030.523 tahun 2022, Pihak ketiga		1.241.639	1.331.762	Istishna receivables - net of deferred margin income amounting to Rp 942,911 in 2023 and Rp 1,030,523 in 2022, Third parties
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(12.420)	(16.392)	Allowance for impairment losses
Bersih		1.229.219	1.315.370	Net
Piutang <i>Ijarah</i>				Ijarah receivables
Pihak ketiga		1.069.847	1.064.955	Third parties
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(1.048.119)	(1.064.955)	Allowance for impairment losses
Bersih		21.728	--	Net
JUMLAH PIUTANG		5.853.925.684	6.697.549.432	TOTAL RECEIVABLES
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(227.105.958)	(312.061.843)	Allowance for impairment losses
Bersih		5.626.819.726	6.385.487.589	Net
PINJAMAN QARDH	2.i, 9			FUNDS OF QARDH
Pihak ketiga		633.255.814	864.606.057	Third parties
Pihak berelasi		348.607	372.214	Related parties
Jumlah		633.604.421	864.978.271	Total
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(62.110.112)	(31.729.654)	Allowance for impairment losses
Bersih		571.494.309	833.248.617	Net

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements
are an integral part of financial statements

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31 2023	31 Desember / December 31 2022	
PEMBIAYAAN MUDHARABAH	2.j, 10			MUDHARABAH FINANCING
Pihak ketiga		593.853.169	564.058.967	Third parties
Pihak berelasi		--	--	Related parties
Jumlah		593.853.169	564.058.967	Total
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(8.117.780)	(7.015.074)	Allowance for impairment losses
Bersih		585.735.389	557.043.893	Net
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	2.j, 11			MUSYARAKAH FINANCING
Pihak ketiga		15.370.264.074	10.694.076.631	Third parties
Pihak berelasi		11.256.269	769.504	Related parties
Jumlah		15.381.520.343	10.694.846.135	Total
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(225.318.307)	(278.732.187)	Allowance for impairment losses
Bersih		15.156.202.036	10.416.113.948	Net
PENYERTAAN SAHAM	2.m, 12			INVESTMENT IN SHARES
Cadangan Kerugian penurunan nilai		407.711.237	407.711.237	Allowance for impairment losses
Bersih		(85.242.400)	(60.242.400)	Net
		322.468.837	347.468.837	
TAGIHAN AKSEPTASI	2.k, 13.a			ACCEPTANCES RECEIVABLE
Pihak ketiga		153.615.400	119.284.582	Third parties
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(71.869.517)	(73.060.862)	Allowance for impairment losses
Jumlah		81.745.883	46.223.720	Total
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH	2.n, 14			ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH
Pihak ketiga		4.401.099	3.161.824	Third parties
Pihak berelasi		--	14.563	Related parties
Akumulasi penyusutan		(2.496.015)	(2.306.482)	Accumulated depreciation
Jumlah		1.905.084	869.905	Total
Cadangan Kerugian penurunan nilai		--	--	Allowance for impairment losses
Nilai buku - neto		1.905.084	869.905	Book value - net
ASET TETAP	2.p, 15			PREMISES AND EQUIPMENT
setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.345.451.127 tahun 2023 dan Rp1.735.771.100 tahun 2022		2.791.497.162	2.709.131.723	net of accumulated depreciation of Rp1,345,451,127 in 2023 and Rp1,735,771,100 in 2022,
ASET PAJAK TANGGUHAN - NETO	2.ae, 23.d	138.192.371	139.908.777	DEFERRED TAX ASSETS - NET
ASET LAIN-LAIN - NETO	16	3.953.960.548	3.615.369.048	OTHER ASSETS - NET
JUMLAH ASET		66.953.058.812	61.363.584.209	TOTAL ASSETS

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31 2023	31 Desember / December 31 2022	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND STOCKHOLDERS' EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS SEGERA	2.u, 17	164.382.213	116.395.779	LIABILITIES DUE IMMEDIATELY
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	18	82.574.510	68.302.948	UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING
SIMPANAN	2.v, 19			DEPOSITS
Giro wadiah				Wadiah demand deposits
Pihak ketiga		3.935.171.308	3.141.707.694	Third parties
Pihak berelasi		29.371.748	28.510.414	Related parties
Jumlah Giro wadiah		3.964.543.056	3.170.218.108	Total Wadiah demand deposits
Tabungan wadiah				Wadiah saving deposits
Pihak ketiga		7.042.955.324	6.052.642.669	Third parties
Pihak berelasi		14.750.304	4.268.876	Related parties
Jumlah Tabungan wadiah		7.057.705.628	6.056.911.545	Total Wadiah saving deposits
Jumlah Simpanan		11.022.248.684	9.227.129.653	Total Deposits
LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA	2.z, 21	2.169.678.250	--	LIABILITIES TO BANK INDONESIA
SIMPANAN DARI BANK LAIN	2.w, 20	46.293.395	59.392.525	DEPOSITS FROM OTHER BANKS
LIABILITAS AKSEPTASI	2.k, 13.e	8.184.473	14.280.969	ACCEPTANCES PAYABLE
PINJAMAN YANG DITERIMA	22	1.000.000.000	500.000.000	FUND BORROWINGS
UTANG PAJAK	23	20.090.991	21.564.574	TAXES PAYABLE
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	2.ah, 24	853.478	854.210	ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
ESTIMASI LIABILITAS IMBALAN KERJA	2.ad, 25	127.431.279	125.465.511	ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYMENT BENEFIT
LIABILITAS LAIN-LAIN	26	406.501.759	431.284.270	OTHER LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS		15.048.239.032	10.564.670.439	TOTAL LIABILITIES
DANA SYIRKAH TEMPORER				TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Bukan bank	2x, 27			Non-banks
Giro mudharabah				Mudharabah demand deposits
Pihak ketiga		2.127.075.777	1.705.087.626	Third parties
Pihak berelasi		3.961.233	2.769.061	Related parties
Jumlah giro mudharabah		2.131.037.010	1.707.856.687	Total mudharabah demand deposits
Tabungan mudharabah				Mudharabah savings deposits
Pihak ketiga		9.571.696.547	10.053.322.897	Third parties
Pihak berelasi		12.318.121	11.721.267	Related parties
Jumlah tabungan mudharabah		9.584.014.668	10.065.044.164	Total mudharabah savings deposits
Deposito mudharabah				Mudharabah time deposits
Pihak ketiga		15.637.717.185	14.516.528.579	Third parties
Pihak berelasi		9.184.172.522	10.626.556.541	Related parties
Jumlah deposito		24.821.889.707	25.143.085.120	Total mudharabah time deposits
Jumlah dana syirkah temporer dari bukan bank		36.536.941.385	36.915.985.971	Total temporary syirkah funds from non-banks
Bank				Banks
Giro mudharabah		165.866.424	153.681.358	Mudharabah demand deposits
Tabungan mudharabah		747.921.339	644.558.375	Mudharabah savings deposits
Deposito mudharabah		1.754.879.725	1.357.644.867	Mudharabah time deposits
Jumlah dana syirkah temporer dari bank		2.668.667.488	2.155.884.600	Total temporary syirkah funds from banks
Surat Berharga Yang Diterbitkan				Securities Issued
Sukuk mudharabah		4.657.824.621	4.525.093.625	Mudharabah sukuk
Sukuk mudharabah subordinasi		2.000.000.000	2.000.000.000	Subordinated mudharabah sukuk
Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank (SIMA)		475.000.000	--	Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)
Sertifikat Berdasarkan Prinsip Syariah (SIPA)		350.000.000	--	Sharia Based Certificate (SIPA)
Jumlah Surat Berharga yang diterbitkan		7.482.824.621	6.525.093.625	Total of Securities Issued
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		46.688.433.494	45.596.964.196	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements
are an integral part of financial statements

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
AS OF DECEMBER 31, 2023
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31 2023	31 Desember / December 31 2022	
EKUITAS				STOCKHOLDERS' EQUITY
Modal saham - nilai nominal				Capital Stock - par value of
Rp 300 per saham seri A,				Rp 300 for series A shares,
Rp 150 per saham seri B,				Rp 150 for series B shares
Rp 45 per saham seri C tahun 2023 dan				Rp 45 for series C shares in 2023 and
Rp 200 per saham seri A,				Rp 200 for series A shares,
Rp 100 per saham seri B dan				Rp 100 for series B shares and
Rp 30 per saham seri C tahun 2022				Rp 30 for series C shares in 2022
Modal dasar - 551.099.450 saham				Authorized - 551,099,450 series
seri A, 28.231.134.433 saham seri B dan				A shares, 28,231,134,433 series B shares
26.666.666.666 saham seri C tahun 2023 dan				and 26,666,666,666 series C shares in 2023 and
826.649.175 saham seri A, 42.346.701.650				826,649,175 series A shares, 42,346,701,650
saham seri B dan 40.000.000.000 saham seri C				series B shares and 40,000,000,000 series C shares
tahun 2022				in 2022
Modal ditempatkan dan disetor penuh				Issued and fully paid -
551.099.450 saham seri A,				551,099,450 series A shares,
6.254.035.440 saham seri B dan				6,254,035,440 series B shares and
26.540.026.071 saham seri C tahun 2023				26,540,026,071 series C shares in 2023 and
serta 826.649.175 saham seri A,				826,649,175 series A shares,
9.381.053.160 saham seri B dan				9,381,053,160 series B shares and
39.810.039.107 saham seri C tahun 2022	1.c, 28	2.297.736.324	2.297.736.324	39,810,039,107 series C shares in 2022
Tambahan modal disetor - bersih	29	1.571.133.406	1.571.133.406	Additional paid-in capital-net
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program				Gain (loss) from remeasurement
imbangan pasti - setelah pajak	25	86.345.476	81.665.794	of defined benefit plan - net of tax
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi dari				Unrealized gain (loss) from changes
perubahan harga pasar efek tersedia				in fair value of available
untuk dijual (AFS)	7	--	(1.464.552)	for sale securities (AFS)
Surplus revaluasi atas aset tetap -				Revaluation surplus on premises
setelah pajak	15	558.557.131	564.272.409	and equipment - net of tax
Saldo laba	30	702.613.949	688.606.193	Retained earnings
Jumlah Ekuitas		<u>5.216.386.286</u>	<u>5.201.949.574</u>	Total Stockholders' Equity
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		<u>66.953.058.812</u>	<u>61.363.584.209</u>	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements
are an integral part of financial statements

	Catatan / Notes	31 Desember / December 31 2023	31 Desember / December 31 2022	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB	31			REVENUE FROM FUND MANAGEMENT AS MUDHARIB
Pendapatan dari penjualan		403.461.018	469.298.171	Income from sales
Pendapatan dari bagi hasil		877.808.952	722.285.259	Income from revenue sharing
Pendapatan dari <i>ijarah</i> - bersih		142.674	43.668	Income from revenue from <i>Ijarah</i> - net
Pendapatan usaha utama lainnya		871.974.916	572.777.481	Other main operating income
Jumlah pendapatan bank sebagai <i>mudharib</i>		2.153.387.560	1.764.404.579	Total revenue from fund management as mudharib
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	32	(1.948.548.274)	(1.434.714.676)	THIRD PARTIES' SHARE ON RETURNS OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
HAK BAGI HASIL MILIK BANK		204.839.286	329.689.903	BANK'S SHARE IN REVENUE SHARING
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	33	904.545.750	1.097.740.499	OTHER OPERATING INCOME
BEBAN OPERASIONAL				OPERATING EXPENSES
Umum dan administrasi	35	(475.703.758)	(510.980.315)	General and administrative
Karyawan	34	(634.958.440)	(635.187.554)	Employee
Bonus giro <i>wadiah</i>		(12.089.509)	(12.577.960)	Bonus on <i>wadiah</i> demand deposits
Lain-lain	37	(85.531.410)	(71.578.448)	Others
Jumlah beban usaha		(1.208.283.117)	(1.230.324.277)	Total other operating expenses
(BEBAN)/ PEMBALIKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF	36	94.154.488	(129.527.754)	(PROVISION)/ REVERSAL FOR IMPAIRMENT LOSSES ON EARNING AND NON-EARNING ASSETS
KEUNTUNGAN SELISIH KURS		22.818.601	30.289.012	GAIN ON FOREIGN EXCHANGES
LABA USAHA		18.075.008	97.867.383	INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL				NON-OPERATING INCOME (EXPENSE)
Pendapatan Non Operasional	38	39.386.680	14.451.384	Non-Operating Revenue
Beban Non Operasional	39	(43.355.658)	(60.317.890)	Non-Operating Expense
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL- NETO		(3.968.978)	(45.866.506)	NON-OPERATING (EXPENSE) - NET
LABA SEBELUM PAJAK		14.106.030	52.000.877	INCOME BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	23			INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Pajak Kini		(415.282)	(24.896.684)	Current Tax
Pajak Tangguhan		(396.496)	(523.125)	Deferred Tax
		(811.778)	(25.419.809)	
LABA BERSIH		13.294.252	26.581.068	NET INCOME
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHERS COMPREHENSIVE INCOME
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	25	5.999.592	4.595.096	Remeasurement on defined benefit plan
Pajak penghasilan terkait		(1.319.910)	(1.010.921)	Related income tax
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will be reclassified to profit or loss
Kenaikan nilai aset keuangan atas efek-efek yang tersedia dijual yang belum direalisasi	7	1.877.631	(4.445.800)	Unrealized gain in value of available-for-sale mutual fund
Pajak penghasilan terkait		(413.079)	978.076	Related income tax
Jumlah laba komprehensif lain bersih setelah pajak		6.144.234	116.451	Total other comprehensive income net of tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		19.438.486	26.697.519	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (dalam nilai penuh)	40	0,40	0,80	BASIC EARNINGS PER SHARE (In full amount)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements
are an integral part of financial statements

Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income									
Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and Fully paid capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak bersih/ Remeasurement of defined benefit plan - net of tax	Surplus revaluasi atas aset tetap - setelah pajak bersih/ Surplus revaluation on premises and equipment - net of tax	Revaluasi efek tersedia untuk dijual setelah pajak bersih/ AFS investment revaluation - net of tax	Saldo laba / Retained earnings		Jumlah Ekuitas/ Total equity	
						Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo per 31 Desember 2021	1.103.435.151	1.578.925.257	78.081.619	576.915.177	2.003.172	--	646.988.173	3.986.348.549	Balance as of December 31, 2021
Dana setoran modal	1.194.301.173	--	--	--	--	--	--	1.194.301.173	Paid in capital
Biaya emisi saham	--	(7.791.851)	--	--	--	--	--	(7.791.851)	Share issuance cost
Laba belum direalisasi atas surat berharga yang tersedia untuk dijual	--	--	--	--	(3.467.724)	--	--	(3.467.724)	Unrealized gain on marketable securities of available for sale
Pemindahan penyusutan aset tetap	--	--	--	(12.642.768)	--	--	12.642.768	--	Depreciation transfer for premises and equipment
Surplus Revaluasi	--	--	--	--	--	--	2.394.184	2.394.184	Surplus Revaluation
Pengukuran kembali program imbalan pasti	--	--	3.584.175	--	--	--	--	3.584.175	Remeasurement of defined benefit plan
Laba bersih tahun berjalan	--	--	--	--	--	--	26.581.068	26.581.068	Net income for the year
Saldo per 31 Desember 2022	2.297.736.324	1.571.133.406	81.665.794	564.272.409	(1.464.552)	--	688.606.193	5.201.949.574	Balance as of December 31, 2022
Laba belum direalisasi atas surat berharga yang tersedia untuk dijual	--	--	--	--	1.464.552	--	--	1.464.552	Unrealized gain on marketable securities of available for sale
Pemindahan penyusutan aset tetap	--	--	--	(5.715.278)	--	--	5.715.278	--	Depreciation transfer for premises and equipment
Pembayaran Dividen	--	--	--	--	--	--	(5.001.774)	(5.001.774)	Dividend Payout
Pengukuran kembali program imbalan pasti	--	--	4.679.682	--	--	--	--	4.679.682	Remeasurement of defined benefit plan
Laba bersih tahun berjalan	--	--	--	--	--	--	13.294.252	13.294.252	Net income for the year
Saldo per 31 Desember 2023	2.297.736.324	1.571.133.406	86.345.476	558.557.131	--	--	702.613.949	5.216.386.286	Balance as of December 31, 2023

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
 tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements
 are an integral part of financial statements

	Catatan / Notes	31 Desember / December 31 2023	31 Desember / December 31 2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib		2.106.051.177	1.752.638.248	Revenue receipt from fund management as mudharib
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer		(1.905.685.309)	(1.406.123.273)	Payment of temporary syirkah funds
Penerimaan pendapatan operasional lainnya		912.325.529	1.024.476.193	Receipt from other operating revenue
Penerimaan kembali piutang dan pembiayaan yang telah dihapusbukukan		10.770.587	16.953.257	Receipt from receivables and and financing already written-off
Pembayaran beban kepegawaian		(684.188.101)	(671.630.212)	Payments for employee expenses
Pembayaran beban operasional lainnya		(494.379.954)	(598.507.473)	Payments for other operating expenses
Pembayaran pajak penghasilan		(28.488.711)	(25.419.808)	Payments of income taxes
Penerimaan pendapatan non operasional		39.386.680	14.451.384	Receipts from non operating income
Pembayaran beban non operasional		(43.355.658)	(60.317.890)	Payments for non operating expenses
Arus kas dari operasi sebelum perubahan aktiva dari kewajiban operasi		(87.563.760)	46.520.426	Cash flows from operating activities before changes in operating assets and liabilities
Penurunan (kenaikan) aktiva operasi :				Decrease (increase) in operating assets:
Penempatan Bank Lain		39.394.666	(39.067.510)	Placements with Bank Indonesia & other banks
Piutang		758.667.864	1.094.561.110	Receivables
Pinjaman Qardh		261.754.308	(161.083.556)	Fund of Qardh
Pembiayaan Mudharabah		(28.691.496)	(40.009.376)	Mudharabah financing
Pembiayaan Musyarakah		(4.740.088.087)	(1.584.450.395)	Musyarakah financing
Aktiva yang diperoleh untuk Ijarah - bersih		(1.035.179)	(602.246)	Assets acquired for Ijarah - net
Aktiva lain-lain		27.789.946	219.603.232	Other assets
Kenaikan (penurunan) kewajiban operasi :				Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera		47.986.434	(966.711.535)	liabilities due immediately
Simpanan		1.795.119.032	(449.298.748)	Deposits
Simpanan dari bank lain		(13.099.130)	(18.757.646)	Deposits from other banks
Utang pajak		(1.473.583)	3.100.254	Taxes payable
Liabilitas lain-lain		(1.780.394.328)	769.851.798	Other liabilities
Kenaikan Dana Syirkah Temporer		133.738.302	2.238.784.522	Increase of Temporary Syirkah Funds
Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Operasi		(3.587.895.011)	1.112.440.330	Net Cash Provide (Used) in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan investasi pada surat berharga		(3.608.820.200)	(3.292.054.750)	Acquisition of securities
Hasil penjualan investasi pada surat berharga		2.502.468.000	711.650.326	Proceeds from sale of securities
Hasil penjualan aset tetap		3.611.540	1.106.367	Proceeds from sale of premises and equipment
Pembelian aset tetap		(58.182.143)	(24.322.467)	Acquisition of premises and equipment
Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Investasi		(1.160.922.803)	(2.603.620.524)	Net Cash Provide (Used) in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pencairan sertifikat investasi mudharabah		825.000.000	--	Proceed from interbank mudharabah investment
Penerimaan Liabilitas Pada Bank Indonesia		2.169.678.250	--	Receipt from Bank Indonesia Liabilities
Penerimaan pinjaman diterima		1.000.000.000	500.000.000	Receipt from fund borrowing
Pembayaran pinjaman diterima		(500.000.000)	(100.000.000)	Payment of fund borrowing
Pembayaran utang dividen		(5.331.525)	(79.655)	Payments of dividend liabilities
Penerbitan sukuk subordinasi mudharabah		--	2.000.000.000	Issuance of subordinate mudharabah sukuk
Pembayaran medium term notes subordinasi		--	(100.000.000)	Payment of subordinated medium term notes
Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Pendanaan		3.489.346.725	2.299.920.345	Net Cash Provided (Used) by Financing Activities
KENAikan BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(1.259.471.089)	808.740.151	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		8.457.759.670	7.649.019.519	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		7.198.288.581	8.457.759.670	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun				Cash and Cash Equivalents at end of year
terdiri dari:				consist of:
Kas	3	720.209.073	702.179.266	Cash
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	4	5.010.479.824	7.191.470.623	Current Accounts and Placements with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	5	1.463.838.902	520.954.333	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Lain	6	3.760.782	43.155.448	Placements with other banks
Jumlah		7.198.288.581	8.457.759.670	Total
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS				ACTIVITIES NOT EFFECTING CASHFLOW
Surplus/ (Defisit) Revaluasi Aset Tetap		-	(17.766.144)	Surplus/ (Deficit) Revaluation on Premises and Equipment

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of the consolidated financial statements

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2023
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31 2023	31 Desember / December 31 2022	
ASET				ASSET
KAS	2.a, 3	720.209.073	702.179.266	CASH
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	2.d, 4	5.010.479.824	7.191.470.623	CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA
GIRO PADA BANK LAIN				CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
Pihak ketiga	2.e, 5	1.463.838.902	520.954.333	Third Parties
Cadangan Kerugian penurunan nilai		--	--	Allowance for impairment losses
Neto		1.463.838.902	520.954.333	Net
PENEMPATAN PADA BANK LAIN	2.f, 6			PLACEMENTS WITH OTHER BANKS
Pihak ketiga		3.760.782	43.155.448	Third Parties
Cadangan Kerugian penurunan nilai		--	(418.830)	Allowance for impairment losses
Neto		3.760.782	42.736.618	Net
INVESTASI PADA SURAT BERTAGIH	2.g, 7			INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES
Pihak ketiga		30.524.748.886	27.855.377.312	Third Parties
Cadangan Kerugian penurunan nilai		--	--	Allowance for impairment losses
Neto		30.524.748.886	27.855.377.312	Net
PIUTANG	2.h, 8			RECEIVABLES
Piutang <i>murabahah</i> - setelah dikurangi margin ditangguhkan sebesar Rp 1.547.819.473 tahun 2023 dan Rp 1.715.335.147 tahun 2022, Pihak ketiga		5.843.977.869	6.692.218.277	Murabahah receivables - net of deferred margin income amounting to Rp 1,547,819,473 in 2023 and Rp 1,715,335,147 in 2022, Third parties
Pihak berelasi		7.636.329	2.934.438	Related parties
Jumlah		5.851.614.198	6.695.152.715	Total
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(226.045.419)	(310.980.496)	Allowance for impairment losses
Bersih		5.625.568.779	6.384.172.219	Net
Piutang <i>Istishna</i> - setelah dikurangi margin ditangguhkan sebesar Rp 942.911 tahun 2023, Rp 1.030.523 tahun 2022, Pihak ketiga		1.241.639	1.331.762	Istishna receivables - net of deferred margin income amounting to Rp 942,911 in 2023 and Rp 1,030,523 in 2022, Third parties
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(12.420)	(16.392)	Allowance for impairment losses
Bersih		1.229.219	1.315.370	Net
Piutang <i>Ijarah</i>				Ijarah receivables
Pihak ketiga		1.069.847	1.064.955	Third parties
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(1.048.119)	(1.064.955)	Allowance for impairment losses
Bersih		21.728	--	Net
JUMLAH PIUTANG		5.853.925.684	6.697.549.432	TOTAL RECEIVABLES
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(227.105.958)	(312.061.843)	Allowance for impairment losses
Bersih		5.626.819.726	6.385.487.589	Net
PINJAMAN QARDH	2.i, 9			FUNDS OF QARDH
Pihak ketiga		633.255.814	864.606.057	Third parties
Pihak berelasi		348.607	372.214	Related parties
Jumlah		633.604.421	864.978.271	Total
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(62.110.112)	(31.729.654)	Allowance for impairment losses
Bersih		571.494.309	833.248.617	Net

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements
are an integral part of financial statements

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31 2023	31 Desember / December 31 2022	
PEMBIAYAAN MUDHARABAH	2.j, 10			MUDHARABAH FINANCING
Pihak ketiga		593.853.169	564.058.967	Third parties
Pihak berelasi		--	--	Related parties
Jumlah		593.853.169	564.058.967	Total
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(8.117.780)	(7.015.074)	Allowance for impairment losses
Bersih		585.735.389	557.043.893	Net
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	2.j, 11			MUSYARAKAH FINANCING
Pihak ketiga		15.370.264.074	10.694.076.631	Third parties
Pihak berelasi		11.256.269	769.504	Related parties
Jumlah		15.381.520.343	10.694.846.135	Total
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(225.318.307)	(278.732.187)	Allowance for impairment losses
Bersih		15.156.202.036	10.416.113.948	Net
PENYERTAAN SAHAM	2.m, 12			INVESTMENT IN SHARES
Cadangan Kerugian penurunan nilai		407.711.237	407.711.237	Allowance for impairment losses
Bersih		(85.242.400)	(60.242.400)	Net
		322.468.837	347.468.837	
TAGIHAN AKSEPTASI	2.k, 13.a			ACCEPTANCES RECEIVABLE
Pihak ketiga		153.615.400	119.284.582	Third parties
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(71.869.517)	(73.060.862)	Allowance for impairment losses
Jumlah		81.745.883	46.223.720	Total
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH	2.n, 14			ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH
Pihak ketiga		4.401.099	3.161.824	Third parties
Pihak berelasi		--	14.563	Related parties
Akumulasi penyusutan		(2.496.015)	(2.306.482)	Accumulated depreciation
Jumlah		1.905.084	869.905	Total
Cadangan Kerugian penurunan nilai		--	--	Allowance for impairment losses
Nilai buku - neto		1.905.084	869.905	Book value - net
ASET TETAP	2.p, 15			PREMISES AND EQUIPMENT
setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.345.451.127 tahun 2023 dan Rp1.735.771.100 tahun 2022		2.791.497.162	2.709.131.723	net of accumulated depreciation of Rp1,345,451,127 in 2023 and Rp1,735,771,100 in 2022,
ASET PAJAK TANGGUHAN - NETO	2.ae, 23.d	138.192.371	139.908.777	DEFERRED TAX ASSETS - NET
ASET LAIN-LAIN - NETO	16	3.953.960.548	3.615.369.048	OTHER ASSETS - NET
JUMLAH ASET		66.953.058.812	61.363.584.209	TOTAL ASSETS

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements
are an integral part of financial statements

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31 2023	31 Desember / December 31 2022	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND STOCKHOLDERS' EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS SEGERA	2.u, 17	164.382.213	116.395.779	LIABILITIES DUE IMMEDIATELY
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	18	82.574.510	68.302.948	UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING
SIMPANAN	2.v, 19			DEPOSITS
Giro wadiah				Wadiah demand deposits
Pihak ketiga		3.935.171.308	3.141.707.694	Third parties
Pihak berelasi		29.371.748	28.510.414	Related parties
Jumlah Giro wadiah		3.964.543.056	3.170.218.108	Total Wadiah demand deposits
Tabungan wadiah				Wadiah saving deposits
Pihak ketiga		7.042.955.324	6.052.642.669	Third parties
Pihak berelasi		14.750.304	4.268.876	Related parties
Jumlah Tabungan wadiah		7.057.705.628	6.056.911.545	Total Wadiah saving deposits
Jumlah Simpanan		11.022.248.684	9.227.129.653	Total Deposits
LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA	2.z, 21	2.169.678.250	--	LIABILITIES TO BANK INDONESIA
SIMPANAN DARI BANK LAIN	2.w, 20	46.293.395	59.392.525	DEPOSITS FROM OTHER BANKS
LIABILITAS AKSEPTASI	2.k, 13.e	8.184.473	14.280.969	ACCEPTANCES PAYABLE
PINJAMAN YANG DITERIMA	22	1.000.000.000	500.000.000	FUND BORROWINGS
UTANG PAJAK	23	20.090.991	21.564.574	TAXES PAYABLE
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	2.ah, 24	853.478	854.210	ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
ESTIMASI LIABILITAS IMBALAN KERJA	2.ad, 25	127.431.279	125.465.511	ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYMENT BENEFIT
LIABILITAS LAIN-LAIN	26	406.501.759	431.284.270	OTHER LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS		15.048.239.032	10.564.670.439	TOTAL LIABILITIES
DANA SYIRKAH TEMPORER				TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Bukan bank	2x, 27			Non-banks
Giro mudharabah				Mudharabah demand deposits
Pihak ketiga		2.127.075.777	1.705.087.626	Third parties
Pihak berelasi		3.961.233	2.769.061	Related parties
Jumlah giro mudharabah		2.131.037.010	1.707.856.687	Total mudharabah demand deposits
Tabungan mudharabah				Mudharabah savings deposits
Pihak ketiga		9.571.696.547	10.053.322.897	Third parties
Pihak berelasi		12.318.121	11.721.267	Related parties
Jumlah tabungan mudharabah		9.584.014.668	10.065.044.164	Total mudharabah savings deposits
Deposito mudharabah				Mudharabah time deposits
Pihak ketiga		15.637.717.185	14.516.528.579	Third parties
Pihak berelasi		9.184.172.522	10.626.556.541	Related parties
Jumlah deposito		24.821.889.707	25.143.085.120	Total mudharabah time deposits
Jumlah dana syirkah temporer dari bukan bank		36.536.941.385	36.915.985.971	Total temporary syirkah funds from non-banks
Bank				Banks
Giro mudharabah		165.866.424	153.681.358	Mudharabah demand deposits
Tabungan mudharabah		747.921.339	644.558.375	Mudharabah savings deposits
Deposito mudharabah		1.754.879.725	1.357.644.867	Mudharabah time deposits
Jumlah dana syirkah temporer dari bank		2.668.667.488	2.155.884.600	Total temporary syirkah funds from banks
Surat Berharga Yang Diterbitkan				Securities Issued
Sukuk mudharabah		4.657.824.621	4.525.093.625	Mudharabah sukuk
Sukuk mudharabah subordinasi		2.000.000.000	2.000.000.000	Subordinated mudharabah sukuk
Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank (SIMA)		475.000.000	--	Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)
Sertifikat Berdasarkan Prinsip Syariah (SIPA)		350.000.000	--	Sharia Based Certificate (SIPA)
Jumlah Surat Berharga yang diterbitkan		7.482.824.621	6.525.093.625	Total of Securities Issued
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		46.688.433.494	45.596.964.196	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements
are an integral part of financial statements

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
AS OF DECEMBER 31, 2023
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31 2023	31 Desember / December 31 2022	
EKUITAS				STOCKHOLDERS' EQUITY
Modal saham - nilai nominal				Capital Stock - par value of
Rp 300 per saham seri A,				Rp 300 for series A shares,
Rp 150 per saham seri B,				Rp 150 for series B shares
Rp 45 per saham seri C tahun 2023 dan				Rp 45 for series C shares in 2023 and
Rp 200 per saham seri A,				Rp 200 for series A shares,
Rp 100 per saham seri B dan				Rp 100 for series B shares and
Rp 30 per saham seri C tahun 2022				Rp 30 for series C shares in 2022
Modal dasar - 551.099.450 saham				Authorized - 551,099,450 series
seri A, 28.231.134.433 saham seri B dan				A shares, 28,231,134,433 series B shares
26.666.666.666 saham seri C tahun 2023 dan				and 26,666,666,666 series C shares in 2023 and
826.649.175 saham seri A, 42.346.701.650				826,649,175 series A shares, 42,346,701,650
saham seri B dan 40.000.000.000 saham seri C				series B shares and 40,000,000,000 series C shares
tahun 2022				in 2022
Modal ditempatkan dan disetor penuh				Issued and fully paid -
551.099.450 saham seri A,				551,099,450 series A shares,
6.254.035.440 saham seri B dan				6,254,035,440 series B shares and
26.540.026.071 saham seri C tahun 2023				26,540,026,071 series C shares in 2023 and
serta 826.649.175 saham seri A,				826,649,175 series A shares,
9.381.053.160 saham seri B dan				9,381,053,160 series B shares and
39.810.039.107 saham seri C tahun 2022	1.c, 28	2.297.736.324	2.297.736.324	39,810,039,107 series C shares in 2022
Tambahan modal disetor - bersih	29	1.571.133.406	1.571.133.406	Additional paid-in capital-net
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program				Gain (loss) from remeasurement
imbangan pasti - setelah pajak	25	86.345.476	81.665.794	of defined benefit plan - net of tax
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi dari				Unrealized gain (loss) from changes
perubahan harga pasar efek tersedia				in fair value of available
untuk dijual (AFS)	7	--	(1.464.552)	for sale securities (AFS)
Surplus revaluasi atas aset tetap -				Revaluation surplus on premises
setelah pajak	15	558.557.131	564.272.409	and equipment - net of tax
Saldo laba	30	702.613.949	688.606.193	Retained earnings
Jumlah Ekuitas		<u>5.216.386.286</u>	<u>5.201.949.574</u>	Total Stockholders' Equity
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		<u>66.953.058.812</u>	<u>61.363.584.209</u>	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements
are an integral part of financial statements

	Catatan / Notes	31 Desember / December 31 2023	31 Desember / December 31 2022	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB	31			REVENUE FROM FUND MANAGEMENT AS MUDHARIB
Pendapatan dari penjualan		403.461.018	469.298.171	Income from sales
Pendapatan dari bagi hasil		877.808.952	722.285.259	Income from revenue sharing
Pendapatan dari <i>ijarah</i> - bersih		142.674	43.668	Income from revenue from <i>Ijarah</i> - net
Pendapatan usaha utama lainnya		871.974.916	572.777.481	Other main operating income
Jumlah pendapatan bank sebagai <i>mudharib</i>		2.153.387.560	1.764.404.579	Total revenue from fund management as mudharib
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	32	(1.948.548.274)	(1.434.714.676)	THIRD PARTIES' SHARE ON RETURNS OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
HAK BAGI HASIL MILIK BANK		204.839.286	329.689.903	BANK'S SHARE IN REVENUE SHARING
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	33	904.545.750	1.097.740.499	OTHER OPERATING INCOME
BEBAN OPERASIONAL				OPERATING EXPENSES
Umum dan administrasi	35	(475.703.758)	(510.980.315)	General and administrative
Karyawan	34	(634.958.440)	(635.187.554)	Employee
Bonus giro <i>wadiah</i>		(12.089.509)	(12.577.960)	Bonus on <i>wadiah</i> demand deposits
Lain-lain	37	(85.531.410)	(71.578.448)	Others
Jumlah beban usaha		(1.208.283.117)	(1.230.324.277)	Total other operating expenses
(BEBAN)/ PEMBALIKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF	36	94.154.488	(129.527.754)	(PROVISION)/ REVERSAL FOR IMPAIRMENT LOSSES ON EARNING AND NON-EARNING ASSETS
KEUNTUNGAN SELISIH KURS		22.818.601	30.289.012	GAIN ON FOREIGN EXCHANGES
LABA USAHA		18.075.008	97.867.383	INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL				NON-OPERATING INCOME (EXPENSE)
Pendapatan Non Operasional	38	39.386.680	14.451.384	Non-Operating Revenue
Beban Non Operasional	39	(43.355.658)	(60.317.890)	Non-Operating Expense
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL- NETO		(3.968.978)	(45.866.506)	NON-OPERATING (EXPENSE) - NET
LABA SEBELUM PAJAK		14.106.030	52.000.877	INCOME BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	23			INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Pajak Kini		(415.282)	(24.896.684)	Current Tax
Pajak Tangguhan		(396.496)	(523.125)	Deferred Tax
		(811.778)	(25.419.809)	
LABA BERSIH		13.294.252	26.581.068	NET INCOME
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHERS COMPREHENSIVE INCOME
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali atas program imbangan pasti	25	5.999.592	4.595.096	Remeasurement on defined benefit plan
Pajak penghasilan terkait		(1.319.910)	(1.010.921)	Related income tax
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will be reclassified to profit or loss
Kenaikan nilai aset keuangan atas efek-efek yang tersedia dijual yang belum direalisasi	7	1.877.631	(4.445.800)	Unrealized gain in value of available-for-sale mutual fund
Pajak penghasilan terkait		(413.079)	978.076	Related income tax
Jumlah laba komprehensif lain bersih setelah pajak		6.144.234	116.451	Total other comprehensive income net of tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		19.438.486	26.697.519	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (dalam nilai penuh)	40	0,40	0,80	BASIC EARNINGS PER SHARE (In full amount)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements
are an integral part of financial statements

Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income									
Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and Fully paid capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak bersih/ Remeasurement of defined benefit plan - net of tax	Surplus revaluasi atas aset tetap - setelah pajak bersih/ Surplus revaluation on premises and equipment - net of tax	Revaluasi efek tersedia untuk dijual setelah pajak bersih/ AFS investment revaluation - net of tax	Saldo laba / Retained earnings		Jumlah Ekuitas/ Total equity	
						Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo per 31 Desember 2021	1.103.435.151	1.578.925.257	78.081.619	576.915.177	2.003.172	--	646.988.173	3.986.348.549	Balance as of December 31, 2021
Dana setoran modal	1.194.301.173	--	--	--	--	--	--	1.194.301.173	Paid in capital
Biaya emisi saham	--	(7.791.851)	--	--	--	--	--	(7.791.851)	Share issuance cost
Laba belum direalisasi atas surat berharga yang tersedia untuk dijual	--	--	--	--	(3.467.724)	--	--	(3.467.724)	Unrealized gain on marketable securities of available for sale
Pemindahan penyusutan aset tetap	--	--	--	(12.642.768)	--	--	12.642.768	--	Depreciation transfer for premises and equipment
Surplus Revaluasi	--	--	--	--	--	--	2.394.184	2.394.184	Surplus Revaluation
Pengukuran kembali program imbalan pasti	--	--	3.584.175	--	--	--	--	3.584.175	Remeasurement of defined benefit plan
Laba bersih tahun berjalan	--	--	--	--	--	--	26.581.068	26.581.068	Net income for the year
Saldo per 31 Desember 2022	2.297.736.324	1.571.133.406	81.665.794	564.272.409	(1.464.552)	--	688.606.193	5.201.949.574	Balance as of December 31, 2022
Laba belum direalisasi atas surat berharga yang tersedia untuk dijual	--	--	--	--	1.464.552	--	--	1.464.552	Unrealized gain on marketable securities of available for sale
Pemindahan penyusutan aset tetap	--	--	--	(5.715.278)	--	--	5.715.278	--	Depreciation transfer for premises and equipment
Pembayaran Dividen	--	--	--	--	--	--	(5.001.774)	(5.001.774)	Dividend Payout
Pengukuran kembali program imbalan pasti	--	--	4.679.682	--	--	--	--	4.679.682	Remeasurement of defined benefit plan
Laba bersih tahun berjalan	--	--	--	--	--	--	13.294.252	13.294.252	Net income for the year
Saldo per 31 Desember 2023	2.297.736.324	1.571.133.406	86.345.476	558.557.131	--	--	702.613.949	5.216.386.286	Balance as of December 31, 2023

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements
are an integral part of financial statements

	Catatan / Notes	31 Desember / December 31 2023	31 Desember / December 31 2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib		2.106.051.177	1.752.638.248	Revenue receipt from fund management as mudharib
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer		(1.905.685.309)	(1.406.123.273)	Payment of temporary syirkah funds
Penerimaan pendapatan operasional lainnya		912.325.529	1.024.476.193	Receipt from other operating revenue
Penerimaan kembali piutang dan pembiayaan yang telah dihapusbukukan		10.770.587	16.953.257	Receipt from receivables and and financing already written-off
Pembayaran beban kepegawaian		(684.188.101)	(671.630.212)	Payments for employee expenses
Pembayaran beban operasional lainnya		(494.379.954)	(598.507.473)	Payments for other operating expenses
Pembayaran pajak penghasilan		(28.488.711)	(25.419.808)	Payments of income taxes
Penerimaan pendapatan non operasional		39.386.680	14.451.384	Receipts from non operating income
Pembayaran beban non operasional		(43.355.658)	(60.317.890)	Payments for non operating expenses
Arus kas dari operasi sebelum perubahan aktiva dari kewajiban operasi		(87.563.760)	46.520.426	Cash flows from operating activities before changes in operating assets and liabilities
Penurunan (kenaikan) aktiva operasi :				Decrease (increase) in operating assets:
Penempatan Bank Lain		39.394.666	(39.067.510)	Placements with Bank Indonesia & other banks
Piutang		758.667.864	1.094.561.110	Receivables
Pinjaman Qardh		261.754.308	(161.083.556)	Fund of Qardh
Pembiayaan Mudharabah		(28.691.496)	(40.009.376)	Mudharabah financing
Pembiayaan Musyarakah		(4.740.088.087)	(1.584.450.395)	Musyarakah financing
Aktiva yang diperoleh untuk Ijarah - bersih		(1.035.179)	(602.246)	Assets acquired for Ijarah - net
Aktiva lain-lain		27.789.946	219.603.232	Other assets
Kenaikan (penurunan) kewajiban operasi :				Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera		47.986.434	(966.711.535)	liabilities due immediately
Simpanan		1.795.119.032	(449.298.748)	Deposits
Simpanan dari bank lain		(13.099.130)	(18.757.646)	Deposits from other banks
Utang pajak		(1.473.583)	3.100.254	Taxes payable
Liabilitas lain-lain		(1.780.394.328)	769.851.798	Other liabilities
Kenaikan Dana Syirkah Temporer		133.738.302	2.238.784.522	Increase of Temporary Syirkah Funds
Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Operasi		(3.587.895.011)	1.112.440.330	Net Cash Provide (Used) in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan investasi pada surat berharga		(3.608.820.200)	(3.292.054.750)	Acquisition of securities
Hasil penjualan investasi pada surat berharga		2.502.468.000	711.650.326	Proceeds from sale of securities
Hasil penjualan aset tetap		3.611.540	1.106.367	Proceeds from sale of premises and equipment
Pembelian aset tetap		(58.182.143)	(24.322.467)	Acquisition of premises and equipment
Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Investasi		(1.160.922.803)	(2.603.620.524)	Net Cash Provide (Used) in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pencairan sertifikat investasi mudharabah		825.000.000	--	Proceed from interbank mudharabah investment
Penerimaan Liabilitas Pada Bank Indonesia		2.169.678.250	--	Receipt from Bank Indonesia Liabilities
Penerimaan pinjaman diterima		1.000.000.000	500.000.000	Receipt from fund borrowing
Pembayaran pinjaman diterima		(500.000.000)	(100.000.000)	Payment of fund borrowing
Pembayaran utang dividen		(5.331.525)	(79.655)	Payments of dividend liabilities
Penerbitan sukuk subordinasi mudharabah		--	2.000.000.000	Issuance of subordinate mudharabah sukuk
Pembayaran medium term notes subordinasi		--	(100.000.000)	Payment of subordinated medium term notes
Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Pendanaan		3.489.346.725	2.299.920.345	Net Cash Provided (Used) by Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(1.259.471.089)	808.740.151	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		8.457.759.670	7.649.019.519	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		7.198.288.581	8.457.759.670	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun terdiri dari:				Cash and Cash Equivalents at end of year consist of:
Kas	3	720.209.073	702.179.266	Cash
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	4	5.010.479.824	7.191.470.623	Current Accounts and Placements with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	5	1.463.838.902	520.954.333	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Lain	6	3.760.782	43.155.448	Placements with other banks
Jumlah		7.198.288.581	8.457.759.670	Total
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS				ACTIVITIES NOT EFFECTING CASHFLOW
Surplus/ (Defisit) Revaluasi Aset Tetap		-	(17.766.144)	Surplus/ (Deficit) Revaluation on Premises and Equipment

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of the consolidated financial statements

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN
DAN BAGI HASIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam ribuan Rupiah)
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF RECONCILIATION
OF INCOME AND REVENUE SHARING
FOR THE YEAR ENDED
AS OF DECEMBER 31, 2023
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah)
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31 2023	31 Desember / December 31 2022	
PENDAPATAN USAHA				MAIN OPERATING INCOME (ACCRUAL)
UTAMA (AKRUAL)		2.165.742.827	1.764.404.579	
PENGURANG				DEDUCTION
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima dari:				Income during the year in which cash or cash equivalents have not been received from:
Piutang <i>murabahah</i>		(14.281.342)	(25.076.811)	Murabahah receivables
Piutang <i>istishna</i>		(332)	(1.093)	Istishna receivables
Piutang <i>ijarah</i>		11.989	(153)	Ijarah receivables
Piutang salam		7.362.765	-	Salam receivables
Pembiayaan <i>mudharabah</i>		5.815.774	(2.018.521)	Mudharabah financing
Pembiayaan <i>musyarakah</i>		47.901.501	55.052.220	Musyarakah financing
Pendapatan Surat Berharga Bank Indonesia		939.514	(43.340)	Income from Marketable Securities Bank Indonesia
Surat berharga		17.298.956	11.817.635	Marketable securities
Jumlah		65.048.825	39.729.937	
PENAMBAH				ADDITION
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan dari:				Income from previous year in which cash have been received in current year from:
Piutang <i>murabahah</i>		(25.076.811)	173.687.043	Murabahah receivables
Piutang <i>istishna</i>		(1.093)	21.482	Istishna receivables
Piutang <i>ijarah</i>		(153)	2.676.630	Ijarah receivables
Pembiayaan <i>mudharabah</i>		(2.018.521)	5.484	Mudharabah financing
Pembiayaan <i>musyarakah</i>		55.052.220	292.263.837	Musyarakah financing
Pendapatan Surat Berharga Bank Indonesia		(43.340)	--	Income from Marketable Securities Bank Indonesia
Surat berharga		11.817.635	3.922.023	Income from Sukuk
Jumlah		39.729.937	472.576.499	Total
Laba operasi yang tersedia untuk bagi hasil		2.140.423.939	2.197.251.141	Available operating income for profit sharing
PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL				AVAILABLE INCOME FOR PROFIT SHARING
Bagi hasil yang menjadi hak Bank Syariah		259.246.340	830.839.413	Profit sharing attributable to Sharia Bank
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	31	1.881.177.599	1.366.411.728	Profit sharing attributable to depositors
Dirinci atas:				The details are as follow:
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		1.798.603.089	1.298.108.780	Distributed profit sharing attributable to depositors
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	18	82.574.510	68.302.948	Undistributed revenue sharing attributable to depositors

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of the consolidated financial statements

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN
DANA ZAKAT
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
INTERIM STATEMENTS OF SOURCES AND
DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS
AS OF DECEMBER 31, 2023
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31 2023	31 Desember / December 31 2022	
Sumber Dana Zakat				Sources of Zakat Funds
Internal Bank		664.527	223.176	Internal Bank
Eksternal Bank		5.106.833	7.122.293	External Bank
		5.771.360	7.345.469	
Sumber Dana Wakaf				Sources of Waqf Funds
Internal Bank		171.060	342.110	Internal Bank
Eksternal Bank		168.457	9.944	External Bank
		339.517	352.054	
Penyaluran Dana Zakat				Distribution of Zakat Funds
Baitul Maal Muamalat (BMM)		1.693.245	2.476.281	Baitul Maal Muamalat (BMM)
Dompot Dhuafa		--	--	Dompot Dhuafa
BAZNAS		4.481.474	4.465.829	BAZNAS
		6.174.719	6.942.110	
Penyaluran Dana Wakaf				Distribution of Zakat Funds
Baitul Maal Muamalat (BMM)		333.836	352.054	Baitul Maal Muamalat (BMM)
Wakaf Saham ITB		5.681	-	ITB Shares waqf
		339.517	352.054	
Surplus/ (Defisit)		(403.359)	403.359	Surplus/ (Deficit)
Saldo Dana Zakat dan Wakaf pada Awal Tahun		403.359	--	Zakat and Waqf Funds at Beginning of the Year
Saldo Dana Zakat dan Wakaf pada Akhir Tahun		-	--	of Zakat and Waqf Funds at End of the Year

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of financial statements

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
LAPORAN SUMBER DANA DAN
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF SOURCES AND
USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
AS OF DECEMBER 31, 2023
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Sumber Dana Kebajikan				Sources of Qardhul Hasan Funds
Infak		2.352.610	--	Infak
Denda		1.019.500	327.417	Penalty
Pendapatan non-halal	5b	1.357.334	1.274.937	Non-halal income
Lainnya		169.894	--	Others
		4.899.338	1.602.354	
Penggunaan Dana Kebajikan				Uses of Qardhul Hasan Funds
Sumbangan		4.729.444	1.601.212	Donation
Surplus/ (Defisit)		169.894	1.142	Surplus/ (Deficit)
Dana Kebajikan pada Awal Tahun	2a	1.142	--	Qardhul Hasan Funds at Beginning of the Year
Dana Kebajikan pada Akhir Tahun	2a	171.036	--	Qardhul Hasan Funds at End of the Year

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of financial statements

1. UMUM

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank") didirikan berdasarkan akta No. 1 tanggal 1 November 1991 dari Notaris Yudo Paripurno, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2.2413.HT.01.01.Th.92 tanggal 21 Maret 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1919A Tahun 1992, tambahan Berita Negara No. 34 tanggal 28 April 1992.

Bank telah mengalami perubahan nama yang semula PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk menjadi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan akta No. 104 tanggal 12 November 2008 dari notaris Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta. Akta pernyataan keputusan rapat itu telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No.AHU-98507.AH.01.02.Th.08 tanggal 22 Desember 2008 dan telah dicatat dalam tata usaha pengawasan Bank Indonesia sejak 1 September 2009.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 6 tanggal 13 November 2023 notaris di Jakarta mengenai kenaikan Modal Dasar menjadi Rp5.600.000.000.115 (dalam angka penuh) dan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor menjadi Rp2.297.736.324.240 (dalam angka penuh) sebagai akibat dari *Reverse Stock Split*. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0071588.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 20 November 2023.

Kantor pusat Bank berlokasi di Muamalat Tower, Jln. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 Bank memiliki jaringan unit kerja dengan rincian sebagai berikut: (tidak diaudit)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Kantor Cabang	80	80	Branch Offices
Kantor Cabang Pembantu	155	128	Sub-Branch Offices
Kantor Kas	--	27	Cash Offices

1. GENERAL

a. Bank's Establishment and General Information

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (the "Bank") was established based on notarial deed No.1 dated November 1, 1991 of Yudo Paripurno, S.H., notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice in his Decree No.C2.2413.HT.01.01.Th.92 dated March 21, 1992 and was published in State Gazette No.1919A, Supplement No. 34, dated April 28, 1992.

The Bank changed its name from PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk to PT Bank Muamalat Indonesia Tbk based on notarial deed No. 104 dated November 12, 2008 of Arry Supratno, S.H., notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No.AHU-98507.AH.01.02.Th.08 dated December 22, 2008 and has been recorded in the administration of Bank Indonesia Supervisory since September 1, 2009.

The Bank's articles of association have been amended several times, the latest was based on the deed No. 51 dated November 13, 2023 of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, concerning the increase of the Company's Authorized Capital to become Rp5,600,000,000,115 (in full amount) and Issued Capital and Paid-up Capital to Rp2,297,736,324,240 (in full amount) as a result of the Reverse Stock Split. The latest amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No.AHU-0071588.AH.01.02.Tahun 2023 dated November 20, 2023.

The Bank's head office is located at Muamalat Tower, Jln. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta.

As of December 31, 2023 and December 31, 2022, Bank has business unit network with details as follows: (unaudited)

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum (lanjutan)

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Bank yang terakhir, maksud dan tujuan kegiatan Bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah.

Bank telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada Bank untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah. Sesuai Surat Keputusan Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1994, status Bank meningkat menjadi bank devisa.

Pemegang saham mayoritas Bank adalah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia.

Bank mendirikan Yayasan Baitul Maal Muamalat yang pendiriannya diaktakan dalam akta Notaris Atrino Leswara, S.H., No. 76 tanggal 22 Desember 2000. Salah satu unit usaha yayasan tersebut adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tanggal 7 November 2001. Tujuan pendirian Baitul Maal Muamalat ini adalah untuk mendorong terwujudnya manajemen zakat, *infaq* dan *shadaqah* yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial. Bank menyalurkan penerimaan zakat dan dana kebajikan (*Qardhul Hasan*) kepada Lembaga Amil Zakat tersebut, sehingga Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* dan dana *qardhul hasan*.

1. GENERAL (Continued)

a. Bank's Establishment and General Information (continued)

In accordance with article 3 of the Bank's latest articles of association, the scope of its activities is to engage in banking activities based on Islamic Sharia principles.

The Bank has obtained a license to operate as a commercial bank based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.430/KMK.013/1992 concerning the Granting of the Company's Business Permit in Jakarta on April 24, 1992, as amended by the Decree of the Minister of Finance No. 131/KMK.017/1995 concerning Amendment to Decree of the Minister of Finance No.430/KMK.013/1992 concerning the Granting of the Company's Business Permit dated March 30, 1995 which in its decision gave permission to the Bank to be able to conduct business as a commercial bank based on sharia principles. In accordance with the Decree of Bank Indonesia No.27/76/KEP/DIR dated October 27, 1994, the status of the Bank was upgraded to foreign exchange bank.

The majority shareholder of the Bank is Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia.

*The Bank established Baitul Maal Muamalat Foundation based on notarial deed No. 76 dated December 22, 2000 of Atrino Leswara, S.H. One of the business units under this foundation is the Zakat Management Board (Lembaga Amil Zakat), which was approved to operate as a National Zakat Management Board (Badan Amil Zakat Nasional) on November 7, 2001. The objective of the establishment of Baitul Maal Muamalat is to accelerate the effective management of zakat, infaq, and shadaqah. The zakat and charity funds (*Qardhul Hasan* funds) received by the Bank are channeled to the Zakat Management Board, therefore, the Bank is not directly involved in the management of zakat, infaq, shadaqah and qardhul hasan funds.*

1. UMUM (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 22 tanggal 9 Desember 2022, Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Seluruh Dewan Komisaris telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan POJK No.27/POJK.03/2016. Rincian Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama (Independen)	--
Komisaris (Independen)	Sartono
Komisaris (Independen)	Amin Said Husni
Komisaris (Independen)	--
Komisaris	Andre Mirza Hartawan

*) Efektif setelah mendapat persetujuan *Fit and Proper Test* dari Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Dewan Direksi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 ditetapkan berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 22 tanggal 9 Desember 2022, Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Seluruh Dewan Direksi telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan POJK No.27/POJK.03/2016. Rincian Susunan Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023
Dewan Direksi	
Direktur Utama	Indra Falatehan
Direktur Kepatuhan	Karno
Direktur	Hery Syafril
Direktur	Suhendar
Direktur	Wahyu Avianto

*) Efektif setelah mendapat persetujuan *Fit and Proper Test* dari Otoritas Jasa Keuangan.

1. GENERAL (Continued)

b. Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees

The composition of the Bank's Board of Commissioners as of December 31, 2023 and December 31, 2022 was determined based on Deed of Resolution of the Bank's Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 22 dated December 9, 2022, of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. The entire Board of Commissioners has passed fit and proper test in accordance with POJK No.27/POJK.03/2016. Details of the Composition of the Board of Commissioners are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	Board of Commissioners
	Mardiasmo*	President Commissioner (Independent)
	Sartono	Commissioner (Independent)
	Amin Said Husni	Commissioner (Independent)
	Suwarda*	Commissioner (Independent)
	Andre Mirza Hartawan	Commissioner

*) Effective after passing the *Fit and Proper Test* by the Financial Services Authority.

The composition of the Bank's Board of Directors as of December 31, 2023 and 2022 was determined based on Deed of Resolution of the Bank's Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 22 dated December 9, 2022, of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. The entire Board of Directors has passed fit and proper test in accordance with POJK No.27/POJK.03/2016. Details of the Composition of the Board of Directors are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	Board of Directors
	Indra Falatehan*	President Director
	Karno	Compliance Director
	Hery Syafril	Director
	Suhendar*	Director
	Wahyu Avianto	Director

*) Effective after passing the *Fit and Proper Test* by the Financial Services Authority.

1. UMUM (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No.51 tanggal 30 Agustus 2021, Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Rincian Susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2023
Dewan Pengawas Syariah	
Ketua	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si.
Anggota	Hj. Siti Haniatunnisa LLB., M.H.
Anggota	Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2023 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No.044/B/DIR-KPTS/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 dan pada tanggal 31 Desember 2022 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No.035/B/DIR-KPTS/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2023
Ketua	--
Anggota	Sartono
Anggota	Dwi Sasongko
Anggota	Karim Anggar Prianto
Anggota	--

*) Efektif setelah mendapat persetujuan *Fit and Proper Test* dari Otoritas Jasa Keuangan.

Kepala Divisi Internal Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Tegar Sangga Barkah sesuai Surat Keputusan No.0336/HSE/KEP/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Riva Yan Abdillah sesuai Surat Keputusan Direksi Bank No.003/B/DIR/KPTS/I/2021 tanggal 26 Januari 2021.

1. GENERAL (Continued)

b. Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board as of December 31, 2023 and 2022 was determined based on Deed of Resolution of the Bank's Extraordinary General Meeting of Shareholders No.51 dated August 30, 2021, of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Details of the Composition of the Sharia Supervisory Board are as follows:

	31 Desember / December 31, 2022	Sharia Supervisory Board
		Chairman
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si.		Member
Hj. Siti Haniatunnisa LLB., M.H.		Member
Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.		

The composition of the Bank's Audit Committee as of December 31, 2023 based on Decision Letter No.044/B/DIR-KPTS/VIII/2023 dated August 1, 2023 and for December 31, 2022 based on Decision Letter No.035/B/DIR-KPTS/XII/2022 dated December 16, 2022 are as follows:

	31 Desember / December 31, 2022	
		Chairman
Mardiasmo *		Member
Sartono		Member
Suwarda *		Member
Dwi Sasongko		Member
Tika Arundina		

*) Effective after passing the *Fit and Proper Test* by the Financial Services Authority.

The Bank's Head of Internal Audit Division as of December 31, 2023 is Tegar Sangga Barkah, in accordance with the Decision Letter of No.0336/HSE/KEP/VIII/2023 dated August 29, 2023 and as of December 31, 2022 is Riva Yan Abdillah, in accordance with the Decision Letter of the Directors of the Bank No.003/B/DIR/KPTS/I/2021 dated January 26, 2021.

1. UMUM (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Hayunaji sesuai Surat Keputusan Direksi No. 218/HCE/PKWTT/IX/2018 tanggal 6 September 2018.

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan pada catatan 34.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank masing-masing memiliki 3.851 orang karyawan (2.487 karyawan tetap, 110 karyawan kontrak dan 1.254 tenaga kerja borongan) dan 3.751 orang karyawan (2.426 karyawan tetap, 54 karyawan kontrak dan 1.271 tenaga kerja borongan) (tidak diaudit).

c. Penawaran Umum Saham dan Sukuk Subordinasi Mudharabah

Penawaran Umum Saham

Pada tahun 1993, Bank melakukan Penawaran Umum saham sejumlah 2.489.090 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (dalam nilai penuh) per saham. Bank telah mendapatkan surat pernyataan efektif sebagai perusahaan publik melalui surat ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan No.S-1860/PM/1993 tanggal 28 Oktober 1993.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank yang tercantum dalam akta Notaris Yudo Paripurno, S.H., No. 45, tanggal 22 September 1998, para pemegang saham telah menyetujui untuk menerbitkan saham baru Seri B sebanyak 172.504.936 saham dengan harga penawaran Rp1.025 (dalam nilai penuh) per saham, melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Rights Issue*). Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak memesan Efek Terlebih Dahulu ini telah dinyatakan efektif oleh Ketua BAPEPAM dengan suratnya No.S-1265/PM/98 pada tanggal 19 September 1998.

1. GENERAL (Continued)

b. Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

The Bank's Corporate Secretary as of December 31, 2023 and 2022 is Hayunaji, in accordance with the Decision Letter of the Directors of the Bank No. 218/HCE/PKWTT/IX/2018 dated September 6, 2018.

Salaries and other compensation paid to the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board and Audit Committee for the years ended December 31, 2023 and 2022 are described in note 34.

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank has 3,851 employees (2,487 permanent employees, 110 contract employees and 1,254 temporary workers) and 3,751 employees (2,426 permanent employees, 54 contract employees and 1,271 temporary workers), respectively (unaudited).

c. Bank's Public Offering of Shares and Subordinated Mudharabah Sukuk

Bank's Public Offering of Shares

In 1993, the Bank conducted an initial public offering of 2,489,090 shares with a par value of Rp1,000 (in full amount) per share. The Bank obtained the notice of effectivity for the initial public offering from the chairman of the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) under his letter No.S-1860/PM/1993 dated October 28, 1993.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders as stated in notarial deed No. 45 of Yudo Paripurno, S.H., dated September 22, 1998, the shareholders approved the issuance of 172,504,936 B Series shares at an offering price of Rp1,025 (in full amount) per share through Rights Issue I with preemptive rights. The Bank obtained the notice of effectivity for the rights issue from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) under his letter No.S-1265/PM/98 dated September 19, 1998.

1. UMUM (Lanjutan)

c. Penawaran Umum Saham dan Sukuk Subordinasi *Mudharabah* (lanjutan)

Penawaran Umum Saham (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tercantum dalam akta Notaris Yudo Paripurno, S.H., No. 28 tanggal 29 Oktober 2002, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) II saham Seri C sebanyak-banyaknya 276.975.502 saham, senilai Rp138.487.781 melalui proses Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Rights Issue*) II.

Jumlah saham Seri C yang terjual melalui PUT II ini sebesar 208.727.863 lembar saham dengan harga saham Rp500 (dalam nilai penuh).

Sehubungan dengan peningkatan modal disetor tersebut, anggaran dasar pasal 4 telah diubah seperti dinyatakan dalam akta Notaris Yudo Paripurno, S.H., No. 19 tanggal 21 Mei 2003. Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah dinyatakan efektif oleh Ketua BAPEPAM dengan suratnya No. S-24668/PM/2002 tanggal 15 November 2002.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tercantum dalam akta notaris Arry Supratno, S.H., No. 237 tanggal 28 April 2005, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Saham Seri C dengan nilai nominal Rp500 (dalam Rupiah penuh) per lembar saham dan dengan harga penawaran Rp800 (dalam nilai penuh) per lembar saham serta dengan jumlah sebanyak banyaknya 498.743.597 lembar saham. Sehubungan dengan penambahan Saham Seri C ini, pemegang saham menyetujui perubahan ayat 4 dari anggaran dasar Bank yang berkaitan dengan peningkatan jumlah modal dasar dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp2.000.000.000 yang kemudian diperbaiki menjadi Rp1.950.000.000 berdasarkan akta notaris Arry Supratno S.H., No.150 tanggal 27 September 2005. Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah dinyatakan efektif oleh Ketua BAPEPAM dengan suratnya No.S-863/PM/2005 tanggal 26 April 2005.

1. GENERAL (Continued)

c. Bank's Public Offering of Shares and Subordinated *Mudharabah* Sukuk (continued)

Bank's Public Offering of Shares (continued)

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders as stated in notarial deed No. 28 of Yudo Paripurno, S.H., dated October 29, 2002, the shareholders approved the increase of issued and paid-in capital through the issuance of up to a maximum of 276,975,502 C Series shares amounting to Rp138,487,781 through Limited Public Offering with pre-emptive rights (Rights Issue) II.

The shareholders exercised their rights to acquire additional 208,727,863 C Series shares with par value of Rp500 (in full amount) per share during the Rights Issue II.

As a result of the increase in the paid-in capital, article 4 of the articles of association was amended, as stated in notarial deed No. 19 dated May 21, 2003 of Yudo Paripurno, S.H. The Bank obtained the notice of effectivity for the Limited Public Offering with pre-emptive rights (Rights Issue) II from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) under his letter No. S-24668/PM/2002 dated November 15, 2002.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders as stated in notarial deed No. 237 dated April 28, 2005 of Arry Supratno, S.H., the shareholders approved the increase of issued and paid-in capital through the issuance of C Series shares through Limited Public Offering III with pre-emptive rights (Rights Issue III) up to a maximum of 498,743,597 shares with par value of Rp500 (in full amount) per share and offering price of Rp800 (in full amount) per share. Consequently, the shareholders agreed to amend article 4 of the Bank's articles of Association, concerning authorized share capital from Rp1,000,000,000 to Rp2,000,000,000, which was subsequently revised to Rp1,950,000,000 under notarial deed No.150 dated September 27, 2005 of Arry Supratno, S.H. Limited Public Offering(Right Issue) III with pre-emptive rights has been declared effective by the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) under his letter No.S-863/PM/2005 dated April 26, 2005.

1. UMUM (Lanjutan)

c. Penawaran Umum Saham dan Sukuk Subordinasi *Mudharabah* (lanjutan)

Penawaran Umum Saham (lanjutan)

Jumlah Saham Seri C yang terjual melalui PUT III tersebut berjumlah 446.194.051 lembar saham dengan rincian 97.093.489 lembar saham kepada pemegang saham lama dan 349.100.562 lembar saham kepada pembeli siaga. Penambahan modal yang diperoleh melalui PUT III tersebut berjumlah Rp223.097.025 serta tambahan modal disetor sejumlah Rp133.858.215.

Melalui Surat Bapepam-LK No. S-5807/BL/2010 tanggal 28 September 2010, Bank telah memperoleh pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 820.251.749 saham. Setiap pemegang saham yang memiliki saham biasa Seri C mendapatkan 1 (satu) hak untuk membeli 1 (satu) saham biasa Seri C dengan nilai nominal Rp500 per saham (dalam nilai penuh) dengan harga pelaksanaan Rp1.161 per saham (dalam nilai penuh). Penambahan modal yang diperoleh dari PUT IV tersebut berjumlah Rp673.093.004 serta tambahan modal disetor saham berjumlah Rp383.216.603.

Pada tanggal 7 November 2013, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No.S-358/D.04/2013 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT V) Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 2.815.917.885 saham. Setiap pemegang saham yang memiliki 4 (empat) saham biasa seri B mendapatkan 1 (satu) hak untuk membeli 1 (satu) saham biasa seri B dengan nilai nominal Rp100 per saham (dalam nilai penuh) dengan harga pelaksanaan Rp480 per saham (dalam nilai penuh). Penambah modal yang diperoleh dari PUT V tersebut berjumlah Rp281.591.788 serta tambahan modal disetorkan berjumlah Rp1.065.194.096.

1. GENERAL (Continued)

c. Bank's Public Offering of Shares and Subordinated *Mudharabah* Sukuk (continued)

Bank's Public Offering of Shares (continued)

The total amount of C Series shares issued in Rights Issue III was 446,194,051 shares, of which 97,093,489 shares were purchased by existing shareholders and 349,100,562 shares were purchased by standby buyers. The total additional share capital gained from Rights Issue III amounted to Rp223,097,025 and additional paid-in capital amounted to Rp133,858,215.

Under Letter No. S-5807/BL/2010 dated September 28, 2010 of Bapepam-LK, the Bank obtained the notice of effectivity for the Limited Offering of 820,251,749 shares with pre-emptive rights, through Rights Issue IV. Every holder of C series shares shall receive 1 (one) right to purchase 1 (one) new C Series share with par value of Rp500 per share (in full amount) at the exercise price of Rp1,161 per share (in full amount). Additional share capital gained from Rights Issue IV amounted to Rp673,093,004 and additional paid in capital amounted to Rp383,216,603.

On November 7, 2013, the Bank obtained the notice of effectivity from the Board of Commissioner of Financial Services Authority in their letter No. S-358/D.04/2013 for its Limited Public Offering (Rights Issue V) of 2,815,917,885 shares with pre-emptive rights to shareholders. Every holder of 4 (four) B series shares shall receive 1 (one) right to purchase 1 (one) new B series share with par value of Rp100 per share (in full amount) at the exercise price of Rp480 per share (in full amount). Additional share capital gained from Rights Issue V amounted to Rp281,591,788 and additional paid in capital amounted to Rp1,065,194,096.

1. UMUM (Lanjutan)

c. Penawaran Umum Saham dan Sukuk Subordinasi *Mudharabah* (lanjutan)

Penawaran Umum Saham (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tercantum dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, No. 51 tanggal 30 Agustus 2021, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Saham Seri C dengan nilai nominal Rp30 (dalam Rupiah penuh) per lembar saham serta dengan jumlah sebanyak banyaknya 40.000.000.000 lembar saham. Sehubungan dengan penambahan Saham Seri C ini, pemegang saham menyetujui perubahan ayat 4 dari anggaran dasar Bank yang berkaitan dengan peningkatan jumlah modal dasar menjadi Rp5.600.000.000.

Pada tanggal 16 Desember 2021, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No.S-237/D.04/2021 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT VI) Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak banyaknya 39.810.039.107 (dalam nilai penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp30. Pencatatan atas penambahan modal yang diperoleh dari PUT VI tersebut berjumlah Rp1.194.301.173.

Sukuk Subordinasi *Mudharabah* Jangka Panjang Yang Diterbitkan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Muamalat Indonesia Tahun 2022

Pada Maret 2022, Bank telah menerbitkan sukuk subordinasi *mudharabah* jangka panjang tanpa melalui penawaran umum dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000.000. Pembayaran pendapatan bagi hasil pertama kali dilakukan pada tanggal 15 Juni 2022, sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil terakhir akan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2032. Pokok sukuk akan jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 15 Maret 2032.

1. GENERAL (Continued)

c. Bank's Public Offering of Shares and Subordinated *Mudharabah* Sukuk (continued)

Bank's Public Offering of Shares (continued)

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders as stated in notarial deed No. 51 dated August 30, 2021 of Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, the shareholders approved the increase of issued and paid-in capital through the issuance of C Series shares through Limited Public Offering VI (Rights Issue VI) with pre-emptive rights up to a maximum of 40,000,000,000 shares with par value of Rp30 (in full amount) per share. Consequently, the shareholders agreed to amend article 4 of the Bank's articles of Association, concerning authorized share capital to Rp5,600,000,000.

On December 16, 2021, the Bank obtained the notice of effectivity from the Board of Commissioner of Financial Services Authority in their letter No.S-237/D.04/2021 for its Limited Public Offering (Rights Issue VI) of 39,810,039,107 (in full amount) shares with par value of Rp30. Additional share capital gained from Rights Issue VI amounted to Rp1,194,301,173.

Long Term Subordinated *Mudharabah* Sukuk Without Public Offering of Bank Muamalat 2022

In March 2022, the Bank issued long term subordinated *mudharabah* sukuk without public offering with total par value of Rp2,000,000,000. The initial profit-sharing payment was made on June 15, 2022, and the last profit sharing will be paid on March 15, 2032. Sukuk principal will mature and be repaid on March 15, 2032.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2016), laporan keuangan bank syariah terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- (i) Laporan posisi keuangan;
- (ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
- (iii) Laporan perubahan ekuitas;
- (iv) Laporan arus kas;
- (v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
- (vi) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
- (vii) Laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan; dan
- (viii) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai dengan prinsip syariah.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan penempatan pada Bank lain yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal laporan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Bank yang menggunakan dasar akrual dan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

Laporan sumber dan penyaluran zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana dan penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Financial Statements Presentation

Statement of Compliance

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for some accounts that were assessed using another measurement basis as explained in the accounting policies of the account. The financial statements have been prepared on accrual basis, except for statement of cash flows and statement of reconciliation of income and revenue sharing.

Based on SFAS No. 101 (Revised 2016), sharia banks' financial statements consist of the following components:

- (i) Statement of financial position;*
- (ii) Statement of profit or loss and other comprehensive income;*
- (iii) Statement of changes in equity;*
- (iv) Statement of cash flows;*
- (v) Statement of reconciliation of income and revenue sharing;*
- (vi) Statement of sources and distribution of zakat funds;*
- (vii) Statement of sources and uses of qardhul hasan funds; and*
- (viii) Notes to the financial statements.*

Statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows are the financial statements reflecting the commercial bank activities based on sharia principles.

The statement of cash flows was prepared based on the direct method with cash flows classified into cash flows from operating, investing and financing activities. For the purpose of cash flows statement, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and placements with other banks with maturity within 3 (three) months since the date of the report which are not pledged as collateral and not restricted.

The statement of reconciliation of income and revenue sharing shows reconciliation between the Bank's income which is prepared under accrual basis and revenue sharing to fund owner which is prepared under cash basis.

Statement of sources and distribution of zakat represents a statement showing the sources and the uses of zakat funds in a certain period and the undistributed funds on specific dates.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu dan saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* dan dana kebajikan. Penyaluran dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* dan dana kebajikan dikelola oleh Yayasan Baitul Maal Muamalat.

Mata uang penyajian dan fungsional yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan kecuali, bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam ribuan Rupiah.

Pembukuan Bank, diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Bank beroperasi. Transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu kurs *Reuters* pada pukul 16:00 WIB (Waktu Indonesia Barat). Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi tahun yang bersangkutan.

Transaksi valuta asing pada bank Syariah (di luar jual beli bank *notes*) hanya dapat dilakukan untuk kepentingan nasabah dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif. Bank melakukan transaksi lindung nilai syariah baik transaksi lindung nilai syariah sederhana (*'Aqd al Tahawwuth al-Basith*) yaitu transaksi lindung nilai dengan skema *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi *spot* pada saat jatuh tempo, serta transaksi Lindung Nilai Kompleks (*'Aqd al Tahawwuth al-Murakkab*) yaitu transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi *spot* dan *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi *spot* pada saat jatuh tempo.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Basis of Financial Statements Presentation (continued)

Statement of Compliance (continued)

Statement of sources and uses of qardhul hasan funds represents a statement indicating the sources and uses of qardhul hasan funds for a period of time and qardhul hasan funds balance on specific dates.

The Bank is not directly involved in the management of zakat, infaq and shadaqah funds and qardhul hasan funds. The distribution of zakat, infaq and shadaqah funds and qardhul hasan funds is managed by Yayasan Baitul Maal Muamalat.

The presentation and functional currency used in the preparation of financial statements is the Indonesian Rupiah (IDR). The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are rounded in thousands of Rupiah.

The books of accounts of the Bank are maintained in Indonesian Rupiah, the currency of the primary economic environment in which the Bank operates. Transactions during the year involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Indonesia Rupiah using exchange rate set by Bank Indonesia (Central Bank), that is Reuters rate at 16:00 WIB (Western Indonesia Time). The resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

The Sharia Bank is not allowed to enter into foreign currency transactions for speculative purposes except for foreign currency transactions for its customers. The Bank conducts both simple sharia hedging transaction ('Aqd al Tahawwuth al-Basith*), which is hedging transaction with a forward agreement scheme followed by spot transaction at maturity, and Complex Hedging transaction (*'Aqd al Tahawwuth al-Murakkab*), which is a hedging transaction with a scheme in the form of a series of spot transactions and forward agreement followed by spot transactions when they are due.*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Lindung nilai syariah hanya meliputi lindung nilai tukar atas risiko nilai tukar dengan menggunakan mekanisme yang sesuai ketentuan syariah. Item yang di lindung nilai (*hedge item*) atas nilai tukar dapat berupa aset atau liabilitas yang diakui, komitmen pasti yang belum diakui, prakiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi, atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri.

b. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

- (1) langsung atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki kepentingan dalam Bank yang memberikan pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
- (2) suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
- (3) suatu pihak adalah ventura bersama dimana Bank sebagai *venturer*;
- (4) suatu pihak adalah anggota dari personil dari manajemen kunci Bank;
- (5) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
- (6) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
- (7) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Basis of Financial Statements Presentation (continued)

Statement of Compliance (continued)

Sharia hedges only cover exchange rate hedges against exchange rate risks using a mechanism that complies with sharia principles. Hedge items can be in the form of assets or liabilities that are recognized, certain commitments that have not yet been recognized, forecasts of transactions that are likely to occur, or net investment in foreign business activities.

b. Transactions with Related Parties

Bank entered into transactions with parties which are defined as related parties in accordance with SFAS No.7 (Revised 2015) regarding "Related Party Disclosure".

A party is considered as a related party of the Bank if:

- (1) *a party directly or indirectly through one or more intermediaries, (i) controls, or is controlled by, or under common control with the Bank; (ii) has substantial importance in the Bank that gives significant influence to the Bank; or (iii) has joint control over the Bank;*
- (2) *a party is a member of the same group as the Bank;*
- (3) *a party is a joint venture in which the Bank acts as a venturer;*
- (4) *a party is a member of the key management personnel of the Bank;*
- (5) *a party is a close family member of an individual as described in point (1) or (4);*
- (6) *a party is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or have significant voting rights in several entities, directly or indirectly, which are individuals described in point (4) or (5); and*
- (7) *a party is a post-employment benefit plan program for the employee benefit of either the Bank or its related party.*

The transaction is carried out based on terms agreed by both parties, whereby such requirements may differ from other transactions undertaken with non-related parties.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

b. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.42/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan" per 1 Juli 2020, pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif

Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang *murabahah*, piutang *ijarah*, piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi dan *letter of credit* (LC) yang tidak dapat dibatalkan dan *standby letter of credit*.

Aset non-produktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk rekening antar kantor, agunan yang diambil alih dan *suspense accounts*.

Aset produktif atas piutang *Murabahah* mengacu pada PSAK No. 102 (Revisi 2016) "Akuntansi *Murabahah*", piutang *Istishna* mengacu pada PSAK No. 104 (Revisi 2016) "Akuntansi *Istishna*", Piutang *Ijarah* mengacu pada PSAK No.107 (Amandemen 2022) "Akuntansi *Ijarah*", Pembiayaan *Mudharabah* mengacu pada PSAK No.105 : "Akuntansi *Mudharabah*", Pembiayaan *Musyarakah* mengacu pada PSAK No. 106 : "Akuntansi *Musyarakah*" dan Investasi pada surat berharga mengacu pada PSAK 110 (Revisi 2020) "Akuntansi Sukuk", PSAK 111 "Akuntansi Wa'd" dan aset produktif atas giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain dan investasi pada surat berharga mengacu pada PAPI 2013.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Transactions with Related Parties (continued)

Transactions with related parties are conducted under terms and conditions that are similar to third party transactions. These transactions are in accordance with the regulation of Financial Services Authority (FSA) No.42/POJK.04/2020 regarding "Transaction with Affiliation and Certain Conflict of Interests" per July 1, 2020 when the transactions are conducted.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the details are presented in Note 42 to the financial statements.

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets

Earning assets consist of current accounts and placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS) and Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), Securities purchased under agreement to resell, current accounts with other banks, placements with other banks, investments in marketable securities, *murabahah* receivables, *ijarah* receivables, *istishna* receivables, funds of *qardh*, *mudharabah* financing, *musyarakah* financing, assets acquired for *ijarah*, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees, irrevocable letter of credit and standby letter of credit.

Non-earning assets are the Bank's assets other than the earning assets which have potential loss, consisting of inter-office accounts, foreclosed assets and suspense accounts.

Earning assets for *Murabahah* receivables are in accordance with SFAS No. 102 (Revised 2016) "Accounting for *Murabahah*", *Istishna* receivables are in accordance with SFAS No. 104 (Revised 2016) "Accounting for *Istishna*", *Ijarah* receivables are in accordance with SFAS No. 107 (Amendment 2022) "Accounting for *Ijarah*", *Mudharabah* financing are in accordance with SFAS No. 105 "Accounting for *Mudharabah*", *Musyarakah* financing are in accordance with SFAS No.106 "Accounting for *Musyarakah*" and Investment in securities are in accordance with SFAS No.110 (Revised 2020) "Accounting for Sukuk", SFAS No.111 "Accounting for Wa'd" and earning assets for current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other banks and investment in marketable securities are in accordance with PAPI 2013.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- (1) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (2) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin;
- (3) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- (4) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (5) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- (6) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - a. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 - b. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

The Bank assesses whether there is any objective evidence that a financial asset is impaired on each date of statement of financial position.

Financial assets are impaired when an objective evidence indicates that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset and that the loss event has an impact on the future cash flows of the financial asset that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows:

- (1) significant financial difficulty of the issuer or obligor;
- (2) any breach of contract, such as a default or delinquency in margin or principal payments;
- (3) the lender, for economic or legal reasons relating to the debtor's financial difficulty, grants the debtor a concession that the lender would not otherwise consider;
- (4) it becomes probable that the debtor will enter into bankruptcy or other financial reorganization;
- (5) the disappearance of an active market of financial assets due to financial difficulties; or
- (6) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified individually in the portfolio, including:
 - a. adverse changes in the payment status of debtors in the portfolio; and
 - b. national or local economic conditions that correlate with breach of contract of the assets in the portfolio.

The estimated period between the occurrence of an event and loss identification is determined by the management for each identified portfolio. In general, the period varies from 3 (three) months to 12 (twelve) months, in exceptional cases, longer periods are necessary.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti objektif penurunan nilai;
2. Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk piutang *murabahah* dengan plafond lebih besar atau sama dengan Rp25.000.000 dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti objektif penurunan nilai;
2. Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
3. Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko piutang yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi piutang berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (*probability of default*).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

The Bank first determines whether there is an objective evidence of impairment on financial assets that are individually significant and individually or collectively on financial assets that are not individually significant.

If the Bank determines that there is no objective evidence of impairment for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar financing risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment, and for which an impairment loss is or continues to be recognized, are excluded in the collective assessment of impairment.

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria exists:

1. *Murabahah receivables which individually have significant value with objective evidence of impairment;*
2. *Restructured murabahah receivables which individually have significant value.*

Based on the above criteria, the Bank performs individual assessment for murabahah receivables with limit greater than or equal to Rp25,000,000 with collectibility classification of substandard, doubtful and loss as of December 31, 2023 and 2022.

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria exists:

1. *Murabahah receivables which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment;*
2. *Murabahah receivables which individually have non significant value;*
3. *Restructured murabahah receivables which individually have non significant value.*

The calculation of allowance for impairment losses on financial assets which are evaluated collectively is grouped based on similar receivable risk characteristics and by taking into account the receivable segmentation on the basis of historical loss experience (probability of default).

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

Bank menggunakan metode *net flow rate* dan *migration analysis* yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang diberikan secara kolektif. Bank menggunakan data historis minimal 3 (tiga) tahun dalam menghitung *Probability of Default* (PD) dan *Loss of Given Default* (LGD).

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Piutang dan pembiayaan bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan pembiayaan hanya bersumber dari agunan;
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan tingkat margin efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain margin.

Terhadap aset produktif atas piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi dan *Letter of Credit* (LC), Bank menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.2/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2022, sebelumnya Bank menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

The Bank uses *net flow rate* method and *migration analysis* which is a statistical analysis method to assess allowance for impairment losses on collective receivables. The Bank uses at least 3 (three) years historical data to compute the *Probability of Default* (PD) and *Loss of Given Default* (LGD).

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:

1. Claim and account receivables are *collateral dependent*, i.e. if the source of loans repayment is only from the collateral;
2. Takeover of collateral is most likely to occur and be supported by legally binding collateral agreement.

Impairment losses on financial assets carried at amortized cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets original effective margin rate.

Losses are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income and reflected in an allowance for impairment losses account against financial assets carried at amortized cost.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as operating income other than margin income.

Against earning assets for *istishna* receivables, funds of *qardh*, *mudharabah* financing, *musyarakah* financing, assets acquired for *ijarah*, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees and *Letter of Credit* (LC), the Bank implements Regulation of the Financial Services Authority (FSAR) No.2/POJK.03/2022 dated January 31, 2022 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit" which became effective on January 1, 2022, previously the Bank implements Regulation of the Financial Services Authority No.16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit".

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) adalah sebagai berikut:

- 1) Cadangan umum, sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar, diluar giro dan penempatan pada Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai.
- 2) Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
 - a) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
 - b) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
 - c) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - d) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Kewajiban untuk membentuk penyisihan kerugian aset produktif untuk akad *Ijarah* maupun *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah terhadap piutang *Ijarah* atas kewajiban pokok sewa yang tertunggak. Selain itu wajib dibentuk penyusutan/amortisasi atas aset *Ijarah* maupun *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

Khusus untuk kualitas surat berharga dan penempatan pada bank ditetapkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu lancar, kurang lancar, dan macet. Sedangkan untuk kualitas penyertaan modal kualitasnya ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Cadangan penyisihan penghapusan untuk komitmen dan kontinjensi yang dibentuk disajikan sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan pada akun "Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi".

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

The minimum allowance to be provided in compliance with Financial Services Authority Regulation is as follows:

- 1) General reserves shall be no less than 1% of total earning assets classified as current, excluding current accounts and placements with Bank Indonesia, and securities issued by the government based on sharia principles and part of earning assets guaranteed with cash collateral.
- 2) Special reserves, shall be at least:
 - a) 5% of earning assets classified as Special Mention after deducting the collateral value;
 - b) 15% of earning assets classified as Substandard after deducting the collateral value;
 - c) 50% of earning assets classified as Doubtful after deducting the collateral value; and
 - d) 100% of earning assets classified as Loss after deducting the collateral value.

The criteria for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on Financial Services Authority Regulations.

It is required to establish allowance for impairment losses for *Ijarah* and *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* contracts against *Ijarah* receivable on the principal obligation for overdue lease. Furthermore, it is required to depreciate/amortize the assets of *Ijarah* and *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

For marketable securities and placements with other banks, the quality rating is classified into 3 (three) classifications: current, substandard, and loss. Quality rating of equity investment is determined into 4 (four) categories: current, substandard, doubtful and loss.

The allowance for impairment losses on commitments and contingencies is presented as a liability in the statement of financial position under "Estimated Losses on Commitments and Contingencies account".

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

Apabila manajemen berpendapat bahwa suatu aset produktif sudah tidak dapat ditagih kembali, maka aset tersebut harus dihapusbukukan dengan cara saldo aset produktif dikurangkan dari penyisihan kerugian. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan penyisihan kerugian tahun berjalan.

Aset non-produktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk rekening antar kantor, agunan yang diambil alih dan *suspense accounts*.

AYDA adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank (catatan 2.r).

Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen atau penilai internal Bank.

AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian, ditetapkan memiliki kualitas:

- a) Lancar, apabila dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
- b) Kurang lancar, apabila dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
- c) Diragukan, apabila dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
- d) Macet, apabila dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

Rekening Antar Kantor adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Suspense account adalah akun yang digunakan untuk menampung transaksi yang tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumen pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat diklasifikasikan dalam akun yang seharusnya.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian rekening antar kantor dan *suspense account*.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

If management believes that certain earning assets are not recoverable then those assets should be written off by deducting the balance of earning assets from their respective allowances. Recoveries of earning assets that have been written off are recorded as additional allowance for impairment losses in the current year.

Non-earning assets are the Bank's assets other than the earning assets which have potential loss, consisting of inter-office accounts, foreclosed assets and suspense accounts.

Foreclosed asset is an asset acquired through auction or over the counter based on voluntary submission by collateral owner or based on the power of attorney to sell over the counter from collateral owner in the event of customer's failure in meeting his liabilities to the Bank (note 2.r).

The Bank is required to use the lowest price if there are several values proposed by the independent or internal appraiser.

The quality of foreclosed assets in settlement process is determined as follows:

- a) *Current, if acquired within 1 (one) year;*
- b) *Substandard, if acquired ranging within more than 1 (one) year until 3 (three) years.*
- c) *Doubtful, if acquired ranging within more than 3 (three) years until 5 (three) years.*
- d) *Loss, if acquired more than 5 (five) years.*

Inter-office account is the claims arising from inter-office transactions that are unsettled after a certain period of time.

Suspense account is an account containing unidentified transactions or transactions which are unable to be classified to the proper account due to the lack of adequate supporting documents.

The Bank is required to settle its inter-office account and suspense account.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

Kualitas rekening antar kantor dan *suspense account* ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Lancar, apabila tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
- 2) Macet, apabila tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

d. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro *wadiah* pada Bank Indonesia dan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

FASBIS dan SBIS merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip masing-masing adalah *wadiah* dan *jualah*. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan.

e. Giro pada Bank Lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*). Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tersebut sebelum disalurkan dicatat sebagai liabilitas Bank

f. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana Bank pada bank lainnya yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah berupa deposito berjangka *mudharabah* dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

The quality of inter-office account and suspense account is determined as follows:

- 1) Current, if the transaction has been recorded in the Bank's book up to 180 (one hundred and eighty) days.
- 2) Loss, if the transaction has been recorded in the Bank's book over 180 (one hundred and eighty) days.

d. Current Accounts and Placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia consist of *wadiah* current accounts with Bank Indonesia and placements of funds with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS) and Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS).

FASBIS and SBIS are certificates issued by Bank Indonesia as a proof of short term fund deposits under *wadiah* and *jualah* principles, respectively. Current accounts and placements with Bank Indonesia are stated at their outstanding balances of placements.

e. Current Accounts with Other Banks

Current accounts with other banks are stated at their outstanding balances net of allowance for impairment losses. Bonuses received by the Bank from commercial banks based on sharia principles are recognized as other operating income. Proceeds of interest on current accounts from non-sharia banks are not recognized as the Bank's income but are recorded as part of the *qardhul hasan* fund. The proceeds of interest on current accounts from non-sharia banks will be recorded as the Bank's liabilities before distributed to the fund.

f. Placement with Other Banks

Placements with other banks represent placements in the form of *Mudharabah* time deposits and/ or other forms of placement based on sharia principles.

Placements with other banks are stated at their outstanding balance net of allowance for impairment losses.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

f. Penempatan Pada Bank Lain (lanjutan)

Investasi *wakalah* merupakan perjanjian investasi berbasis *wakalah* dimana Bank akan mendapatkan tingkat keuntungan berupa laba diantisipasi. Dana yang diberikan Bank kemudian diinvestasikan pada produk yang halal. Hasil diberikan kepada Bank sebesar laba aktual jika hasil investasi berupa laba aktual lebih kecil dari laba diantisipasi. Jika hasil investasi berupa laba aktual lebih besar dari laba diantisipasi maka yang diterima Bank adalah sebesar laba diantisipasi dan selisihnya akan menjadi pendapatan Bank.

g. Investasi pada Surat Berharga

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah, antara lain obligasi syariah (*sukuk*), *sukuk trust certificate* (STC) dan sertifikat reksadana syariah.

Pada saat pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada *sukuk* sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar.

Investasi pada surat berharga, kecuali Reksadana, diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No.110 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi *Sukuk*" sebagai berikut:

- 1) Diukur pada biaya perolehan. Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika: (a) investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan (b) biaya perolehan *sukuk* termasuk biaya transaksi; (c) selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu *sukuk*; (d) rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai penurunan nilai di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Placement with Other Banks (continued)

Wakalah investment is placed fund based on wakalah that the Bank will receive return in the form of anticipated profit. Funds given by the Bank will be invested in sharia products. Return distributed to the Bank is based on actual profit if the return from investment was lower than the anticipated profit. If return from investment were higher than the anticipated profit, the investee will receive an amount based on anticipated profit whilst the difference will be recognized as income of the Bank.

g. Investments in Marketable Securities

Sharia marketable securities are proof of investments under sharia principles commonly traded in sharia money market and/or sharia stock exchange, such as sharia bonds (sukuk), sukuk trust certificate (STC) and sharia mutual funds certificates.

At initial recognition, the entity determines the classification of investments in sukuk as measured at cost or measured at fair value.

Investment in securities, except for mutual fund, is classified by business model which is determined by the Bank based on SFAS No. 110 (revised 2020) regarding "Accounting for Sukuk" as follows:

- 1) *Measured at acquisition cost. Investments are classified as measured at cost if: (a) the investment is held within a business model with the primary objective of obtaining contractual cash flows; and (b) the cost of sukuk includes transaction costs; (c) the difference between its acquisition cost and the nominal value is amortized using straight line method over the sukuk time period; (d) an impairment loss is recognized if the recoverable amount is less than the carrying amount and is presented as impairment in the statements of profit or loss and other comprehensive income.*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

g. Investasi pada Surat Berharga (lanjutan)

2) Diukur pada nilai wajar

2.a. Investasi diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI), jika:

2.a.1. investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk;

2.a.2. persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya;

2.a.3. biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi;

2.a.4 selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk, dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;

2.a.5. Keuntungan dan kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya; dan

2.a.6. Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai penurunan nilai di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Investments in Marketable Securities (continued)

2) Measured at fair value.

2.a. Investments are measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI), if:

2.a.1. the investment is held within a business model with the primary objective of obtaining contractual cash flows and selling sukuk;

2.a.2. contractual terms specify a specific date of principal and/or result payments;

2.a.3. the cost of sukuk includes transaction costs;

2.a.4. the difference between its acquisition cost and the nominal value is amortized using straight line method over the sukuk time period, and is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income;

2.a.5. Gain and loss from changes in fair value is recognized in other comprehensive income net of unamortized balance of acquisition cost and nominal value and the balance of accumulated fair value of profit or loss recognized in the previous other comprehensive income; and

2.a.6. An impairment loss is recognized if the recoverable amount is less than the carrying amount and is presented as impairment in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

g. Investasi pada Surat Berharga (lanjutan)

2) Diukur pada nilai wajar (lanjutan)

2.b. Investasi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), jika:

- 2.b.1. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh keuntungan penjualan;
- 2.b.2. Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi;
- 2.b.3. Selisih nilai antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
- 2.b.4. Perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; dan
- 2.b.5. Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai penurunan nilai di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Investasi dalam unit penyertaan reksadana syariah dinyatakan sebesar nilai pasar sesuai nilai aset bersih dari reksadana pada tanggal laporan posisi keuangan.

Wesel ekspor merupakan transaksi yang timbul karena adanya pembayaran dimuka kepada pihak lain sehubungan dengan transaksi ekspor impor nasabah. Wesel ekspor dinyatakan sebesar saldonya.

h. Piutang

Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah* dan *istishna* serta tagihan pokok sewa yang tertunggak atas transaksi dengan akad *ijarah*.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Investments in Marketable Securities (continued)

2) Measured at fair value (continued)

2.b. Investments are measured at fair value through profit or loss (FVTPL), if:

- 2.b.1. The investment is held within a business model with the primary objective of gaining sales profit;
- 2.b.2. The cost of sukuk excludes transaction costs;
- 2.b.3. The difference between its fair value and carrying value is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income;
- 2.b.4. The changes of fair value are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income; and
- 2.b.5. An impairment loss is recognized if the recoverable amount is less than the carrying amount and is presented as impairment in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Investments in sharia mutual funds are stated at market value based on net asset value of mutual funds on the date of the statement of financial position.

Export bills are transactions that occur due to advance payments to other parties in connection with export and import transactions of customers. Export bills are stated at their outstanding balance.

h. Receivables

Receivables represent claims arising from the sale and purchase transactions based on *murabahah* and *istishna* contract as well as overdue principal lease claims of transactions under *ijarah* contract.

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and Bank, whereby Bank finances the consumption, investment and working capital needs of the customer, sold at a principal price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

h. Piutang (lanjutan)

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah/dikurangkan dengan pendapatan dan/atau biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan pendapatan dan/atau biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Margin *istishna* yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *istishna*.

Piutang *ijarah* (porsi pokok sewa) merupakan akrual piutang sewa atas porsi pokok yang belum direalisasikan oleh nasabah dan; piutang pendapatan *ijarah* merupakan akrual piutang sewa atas bagian keuntungan (*ujroh*) transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* dari angsuran nasabah pada bulan berikutnya yang diakui secara proporsional.

Piutang pendapatan *ijarah* diakui pada saat jatuh tempo sebesar sewa porsi *ujroh* dan piutang *ijarah* sebesar sewa porsi pokok yang belum diterima dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu sebesar saldo piutang.

i. Pinjaman *Qardh*

Pinjaman *qardh* adalah penyaluran dana dengan akad *qardh*.

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

h. Receivables (continued)

Murabahah receivables are initially measured at fair value plus/minus directly attributable transaction cost and/or income that are additional income and/or cost to obtain the respected financial assets, and after the initial recognition *murabahah* receivables are measured at amortized cost using the effective margin method less any allowance for impairment losses.

Istishna is a sale and purchase contract between *al-mustashni* (buyer) and *al-shani* (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to produce or to supply *al-mashnu* (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at agreed price.

Istishna receivables are stated at the amount billed to final customer less allowance for impairment losses. Deferred *istishna* margin is presented as a contra account of *istishna* receivables.

Ijarah receivables are based on unrealized accrual rent income from principal portion and; *Ijarah* receivable represents portion of accrual rent income (*ujroh*) from the following month's installment of *ijarah muntahiyah bittamlik* which is recognized proportionally.

Ijarah income receivables are recognized at maturity in the amount of *ujroh* portion of rent and *ijarah* receivables are recognized at accrued principal portion of rent and presented at the net realizable value, which is equal to the balance of the receivables.

i. Funds of *Qardh*

Funds of *qardh* represent a distribution of funds under *qardh* agreement.

Qardh agreement is a borrowing agreement with the condition that the borrower should repay the financing at a specified period of time.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

i. Pinjaman Qardh (lanjutan)

Pinjaman *qardh* meliputi pembiayaan dengan akad *hawalah*. Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada pihak lain (Bank) yang wajib menanggung atau membayar. Atas transaksi ini Bank mendapatkan imbalan (*ujroh*) dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan/*ujroh* pada saat terjadinya. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil penilaian oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

j. Pembiayaan

Mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan *nisbah* (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil penilaian oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Musarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil penilaian oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

i. Funds of Qardh (continued)

Funds of qardh include hawalah financing agreement. Hawalah is transfer of debts from debtors (customer) to another party (Bank) which is obligated to assume the liability or to pay. The Bank will obtain a fee (ujroh) from this transaction, which is recognized as income when received.

Funds of Qardh are recognized at the same amount of funds lent when incurred. Any excess amount paid by the borrower in repaying a qardh is recognized as revenue/ujroh when incurred. On the date of the statement of financial position, fund of qardh is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

j. Financing

Mudharabah financing is a joint financing made between Bank as the owner of the funds (shahibul maal) and the customer as a business executor (mudharib) during a certain period. The profit sharing from the project or the business is determined in accordance with the mutually agreed nisbah (pre-determined ratio). On the date of the statement of financial position, mudharabah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

Musarakah is a partnership contract among funds owners to contribute funds and conduct a business on a joint venture basis in a partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the date of the statement of financial position, Musarakah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the financing quality.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

k. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi *Letter of Credit* (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diaksepsi oleh bank pengakseptasi (*accepting bank*).

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar nilai *Letter of Credit* (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

l. Surat-surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali dan Surat-surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Transaksi Repo dengan Bank Indonesia menggunakan akad *Rahn* dan *Qardh* serta *Al Ba'i Al Wa'd*. Surat-surat berharga yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali pada pengakuan awal disajikan sebagai surat berharga Repo dengan mereverse surat berharga, dan menyajikan kewajiban Repo pada liabilitas sejumlah nilai yang disepakati atau harga pasar sebagai kewajiban sebesar harga beli kembali surat berharga tersebut. Surat berharga yang dijual dicatat sebagai surat berharga repo dalam laporan keuangan. Dengan mekanisme repo ini secara substansi risiko dan manfaat surat-surat berharga tetap berada pada pihak penjual.

Transaksi *Reverse Repo* dengan Bank Indonesia menggunakan akad yang sama dengan transaksi Repo. Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali pada pengakuan awalnya disajikan sebagai tagihan *Reverse Repo* sejumlah nilai transaksi yang disepakati atau harga pasar.

Transaksi Repo antar bank menggunakan akad *Al Ba'i* disertai dengan *Wa'd* dimana surat-surat berharga dijual secara *Al Ba'i Al Haqiqi* atau jual beli putus sebesar harga beli kembali yang disepakati atau harga pasar dan disertai dengan janji membeli kembali (*Al Wa'd*), disajikan dengan mereverse surat berharga dan mencatat janji membeli kembali (*Al Wa'd*) pada *off balance sheet* sejumlah nilai transaksi Repo. Secara substansi risiko dan manfaat surat-surat berharga beralih ke pihak pembeli. Begitu juga halnya dengan transaksi *Reverse Repo* antar bank menggunakan mekanisme yang sama dengan transaksi Repo.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

k. Acceptance Receivables and Payables

Acceptance receivables and payables represent Letters of Credit and Domestic Letters of Credit transactions that have been accepted by the accepting bank.

Acceptance receivables and payables are stated at value of Letters of Credit and Domestic Letters of Credit. Acceptance receivables are stated net of allowance for impairment losses.

Acceptance receivables are classified as amortized costs. Acceptances payables are classified as financial liabilities at amortized cost.

l. Securities purchased/sold under resale/repurchase agreements

Repo transactions with Bank Indonesia use *Rahn* and *Qardh* contracts, as well as *Al Ba'i Al Wa'd*. Marketable securities sold under repurchase agreement at initial recognition are presented as Repo securities by reversing securities, and presenting Repo liabilities to an agreed amount of liability or market price as liabilities at the purchase price of the securities. Marketable securities sold are recorded as repo securities in the financial statements. With this repo mechanism the risks and benefits of securities substantially remain with the seller.

Reverse Repo Transactions with Bank Indonesia use the same contract as Repo transactions. Marketable securities purchased with a promise to resell on initial recognition are presented as Reverse Repo bills at an agreed transaction value or market price.

Repo transactions between banks use the *Al Ba'i* contract accompanied with *Wa'd* where securities are sold in *Al Ba'i Al Haqiqi* transaction or an outright sale and purchase and accompanied with a repurchase agreement (*Al Wa'd*) at the agreed repurchase price or market price, presented by reversing the securities and recording the repurchase agreement (*Al Wa'd*) on the off balance sheet. Substantially, the risks and benefits of securities are transferred to the buyer. Reverse Repo transactions between banks use the same mechanism as Repo transactions.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

m. Penyertaan Saham

Penyertaan saham terutama merupakan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal untuk tujuan investasi jangka panjang.

Investasi Bank pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Bank mempunyai pengaruh signifikan atau kepemilikan saham lebih dari 20% hak suara. Pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurangkan untuk mengakui bagian Bank atas laba rugi entitas asosiasi setelah tanggal perolehan. Bagian Bank atas laba rugi entitas asosiasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penerimaan distribusi dari entitas anak mengurangi nilai tercatat investasi.

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal oleh Bank dalam perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan OJK yang berlaku.

Dividen kas yang diterima atas penyertaan saham diakui sebagai pendapatan.

n. Aset yang Diperoleh untuk Ijarah

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa (*ijarah*) dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Objek sewa dalam transaksi *ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

m. Investment in Shares

Investment in shares of stocks represents investment of funds in the form of shares of non public companies engaged in financing activities for long-term investment purposes.

Bank's investments in its associates are measured using the equity method. An associate is an entity in which Bank has significant influence or share ownership of more than 20% of the voting rights. The initial recognition of investments in associates are recognized at cost and the carrying amount is added or subtracted to recognize the Bank's portion of profit or loss of associates after the acquisition date. Bank's portion of profit or loss of associates are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income. Receipt of distributions from subsidiaries reduce the carrying amount of the investment.

Temporary equity participation is capital participation by the Bank in a debtor company to overcome the consequences of financing failure as referred to in applicable FSA regulations.

Cash dividends received from investment in shares of stocks are recognized as income.

n. Assets Acquired for Ijarah

Assets acquired for ijarah represent object of leased assets and are recorded in the statement of financial position at the acquisition cost, net of accumulated depreciation.

Leased object in ijarah transaction is depreciated based on the depreciation policy for similar assets, while leased object in ijarah muntahiyah bittamlik transaction is depreciated based on lease term.

Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the object leased with the option of transferring the title through purchase or grant at a certain time in accordance with the lease agreement.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

n. Aset yang Diperoleh untuk Ijarah (lanjutan)

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan cara:

- (i) hibah;
- (ii) penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
- (iii) penjualan pada akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
- (iv) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

o. Pinjaman yang diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar biaya perolehan.

p. Aset Tetap

Bank menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2015), "Aset Tetap" dan ISAK No. 25, "Hak atas Tanah".

ISAK 25 menetapkan bahwa biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi.

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Efektif sejak tanggal 1 November 2014, Bank merubah kebijakan akuntansinya dari metode harga perolehan menjadi metode revaluasi. Bank melakukan penilaian kembali atas seluruh aset tetap yang dimiliki Bank dengan menggunakan jasa dari penilai independen eksternal yang telah terdaftar di OJK.

Metodologi penilaian yang digunakan Bank dalam metode revaluasi yaitu pendekatan data pasar (*market data approach*).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

n. Assets Acquired for Ijarah (continued)

The transfer of title of the leased object to the lessee in *ijarah muntahiyah bittamlik* can be conducted through:

- (i) a grant;
- (ii) sale prior to the end of agreement for an amount equivalent to the remaining lease installments;
- (iii) sale prior to the end of the agreement at a specified amount as agreed at the inception of the agreement; and
- (iv) installment sales at a specific price as agreed in the agreement.

o. Fund borrowings

Fund borrowings are funds received from other party with payment based on borrowings agreement.

Fund borrowings are recognized at cost.

p. Premises and Equipment

The Bank adopts SFAS No. 16 (Revised 2015), "Premises and Equipment" and IFAS No. 25, "Land Rights".

IFAS 25 prescribes that the legal costs of land rights in the form of Rights on Land for Commercial Use ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Rights on Land for Building (Hak Guna Bangunan or "HGB") and Rights to Use ("Hak Pakai" or "HP") when the land was initially acquired are recognized as part of the cost of the land under the "Premises and Equipment" account and are not amortized.

Premises and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management.

Effective November 1, 2014, the Bank changed its accounting policy from cost method to revaluation method. The Bank revalued all of its existing premises and equipment using the services of external independent appraisal which is registered at FSA.

Valuation method used is Market Data Approach.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

p. Aset Tetap (lanjutan)

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap dikreditkan pada "surplus revaluasi atas aset tetap" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lainnya. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "surplus revaluasi atas aset tetap" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif; penurunan lainnya dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penyajian revaluasi aset tetap dilakukan melalui akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset dan nettanya disajikan kembali sebesar jumlah revaluasi aset. Nilai akumulasi depresiasi dan harga perolehan dinaikkan secara proporsional sehingga nilai bersih aset sama dengan nilai revaluasi.

Setiap periode pelaporan, selisih antara penyusutan berdasarkan nilai revaluasi aset yang diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan penyusutan harga perolehan awal aset di *transfer* dari "surplus revaluasi atas aset tetap" ke dalam "saldo laba".

Revaluasi aset tetap dilakukan setiap tiga tahun atau memiliki keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan, dan jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama direvaluasi.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan non moneter diukur pada nilai wajar, kecuali:

- (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau
- (ii) nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

p. Premises and Equipment (continued)

Increases in the carrying amount arising from revaluation of premises and equipment are credited to "revaluation surplus on premises and equipment" as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against "revaluation surplus on premises and equipment" as part of other comprehensive income; all other decreases are charged to statement of profit or loss and other comprehensive income.

Presentation of revaluation of premises and equipment through accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying value of premises and equipment, and the net is restated at the amount of revaluation of premises and equipment. The value of accumulated depreciation and acquisition price is increased proportionally so that the net value of premises and equipment is equal to the revaluation value.

In each reporting period, the difference between depreciation based on the revalued carrying amount of the asset is charged to statement of profit or loss and other comprehensive income and depreciation based on the asset's original cost is transferred from "revaluation surplus on premises and equipment" to "retained earnings".

The revaluation of premises and equipment is carried out every three year or has periodic regularity to ensure that the carrying amount is not different in material respect from the amount determined at fair value at the end of the reporting period, and in the event that premises and equipment is revaluated, all premises and equipment in the same class are revaluated.

Premises and equipment acquired in exchange for a non-monetary asset or for a combination of monetary and non-monetary assets are measured at fair values, unless:

- (i) the exchange transaction lacks commercial substance, or*
- (ii) the fair value of neither the assets received nor the assets given up can be measured reliably.*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

p. Aset Tetap (lanjutan)

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

	<u>Tahun/ Years</u>
Bangunan	20
Kendaraan bermotor	5
Inventaris kantor	5
Komputer	5
Perbaikan sarana dan prasarana	5

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan dianalisa setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Konstruksi dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset, jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

p. Premises and Equipment (continued)

Depreciation of premises and equipment starts when it is available for its intended use and is computed using the straight line method based on the estimated economic useful lives of the assets as follows:

<u>Tarif Penyusutan/ Depreciation Rate</u>	
5%	<i>Buildings</i>
20%	<i>Vehicles</i>
20%	<i>Office equipments</i>
20%	<i>Computers</i>
20%	<i>Leasehold improvement</i>

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at the end of each year, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Land is stated at its amortized cost and is not depreciated.

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Premises and Equipment" account when the construction is completed.

The costs of maintenance and repairs are charged to statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of premises and equipment are recognized as cost of assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation and any impairment loss are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

q. Aset Sewa Pembiayaan

Aset sewa pembiayaan disajikan di laporan posisi keuangan tergabung dalam aset tetap. Penyusutan aset sewa pembiayaan sesuai dengan tarif penyusutan aset tetap.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. *Rental* kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Aset sewa pembiayaan dan aset hak guna sewa disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa

Bank telah menerapkan PSAK No. 73 "Sewa" sejak tanggal 1 Januari 2020.

PSAK No. 73 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi *lessee* dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali:

- Sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- Sewa atas aset dengan nilai rendah.

Berbeda dengan akuntansi *lessee*, persyaratan untuk akuntansi *lessor* sebagian besar tidak berubah. Dampak dari adopsi PSAK No. 73 pada laporan keuangan dijelaskan di bawah ini.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

q. Assets under Finance Lease

Assets under finance lease are presented in the statement of financial position as premises and equipment. The depreciation of assets under finance lease are adjusted to the rate of depreciation of premises and equipment.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rentals are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Assets under finance leases and right of use assets are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or, whenever shorter, the term of the relevant lease and its useful lives.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately to profit or loss.

Right of Use Assets and Lease Liabilities

The Bank has applied SFAS No. 73 "Lease" since January 1, 2020.

SFAS No. 73 introduces new or amended requirements with respect to lease accounting. This standard introduces significant changes to lessee accounting by removing the distinction between operating and financing lease, and requiring the recognition of a right-of-use asset and a lease liability at commencement for all leases, except for:

- Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option;*
- Leases of low value assets.*

In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting have remained largely unchanged. The impact of the adoption of SFAS No. 73 on the financial statements is described below.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

q. Aset Sewa Pembiayaan (lanjutan)

Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

Tanggal penerapan awal PSAK No. 73 untuk Bank adalah 1 Januari 2020. Bank telah menerapkan PSAK No.73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui dampak kumulatif dari awal penerapan PSAK No.73.

a. Dampak definisi baru dari sewa

Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep pengendalian. PSAK No. 73 menentukan apakah kontrak mengandung sewa atas dasar jika terdapat aset identifikasi dan lessee memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal tersebut merupakan perbedaan penentuan kontrak merupakan, atau mengandung sewa berdasarkan PSAK No. 30 yaitu dengan konsep risiko dan manfaat.

b. Dampak pada akuntansi lessee

Bank menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Bank mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Bank mengakui liabilitas sewa sebesar jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Sedangkan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

q. Assets under Finance Lease (continued)

Right of Use Assets and Lease Liabilities (continued)

The date of initial application of SFAS No. 73 for the Bank is January 1, 2020. The Bank has applied SFAS No. 73 using the modified retrospective approach by recognizing the cumulative impact of the initial application of SFAS No. 73.

a. Impact of the new definition of a lease

The major change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. SFAS No. 73 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether identified asset and lessee has the right to control the use of an asset for a period of time in exchange for consideration. This is in contrast to the focus on 'risks and rewards' in SFAS No.30.

b. Impact on lessee accounting

The Bank applies a single recognition and measurement approach to all leases, except for short-term leases and low-value asset leases. The Bank recognized a lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets that represent the right to use the underlying asset.

The Bank recognized lease liabilities at the amount of lease payments accrued to the end of the lease term which is discounted using the incremental borrowing rate. While, the right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, restoration costs and lease payments on or before the start date of the lease, less lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

q. Aset Sewa Pembiayaan (lanjutan)

Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

b. Dampak pada akuntansi lessee (lanjutan)

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Bank pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK No.48 Penurunan Nilai Aset.

Pada tanggal dimulainya sewa, Bank mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dibayarkan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Bank dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Bank mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya sewa, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

q. Assets under Finance Lease (continued)

Right of Use Assets and Lease Liabilities (continued)

b. Impact on lessee accounting (continued)

If the ownership of lease asset is transferred to the Bank at the end of the lease term or the lease payments reflect the exercise of the purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the assets. Right-of-use assets are tested for impairment in accordance with SFAS No.48 Asset Impairment.

On the initial lease date, the Bank recognized lease liabilities measured at the present value of future lease payments that will be paid over the lease term. Lease payments include fixed payments (including substantially fixed payments), less lease incentive receivables, variable lease payments that depends on index or interest rate, and the expected amount to be paid in a residual value guarantee. Lease payments also include the reasonable exercise price for the purchase option if it is determined to be made by the Bank and the payment of a penalty to terminate the lease, if the lease term reflects the Bank exercising the lease termination option. Variable lease payments that do not depend on an index or interest rate are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Bank uses the lessee incremental borrowing rate at the inception date of the lease since the interest rate implicit in the lease cannot be determined. After the inception date of the lease, the amount of the lease liability is increased to reflect the interest increase and less lease payments made. Furthermore, the lease liabilities carrying amount is remeasured if there are modifications, changes in term of the lease, lease payments, or the valuation of the option to purchase the underlying asset.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

q. Aset Sewa Pembiayaan (lanjutan)

Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

b. Dampak pada akuntansi lessee (lanjutan)

Sewa jangka pendek (dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan) dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK No. 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK No. 30. Bank akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Beban ini dicatat pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

Penerapan pencatatan PSAK No. 73 berlaku untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelumnya), yaitu sebagai berikut:

- Menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa disajikan sebagai bagian dari liabilitas lain-lain dalam laporan posisi keuangan, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;
- Mencatat penyusutan aset hak - guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif; dan
- Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas.

r. Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan disajikan dalam akun aset lain-lain dan diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan.

Nilai Agunan yang diambil alih, baik melalui lelang maupun penyerahan secara sukarela dicatat pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya yaitu maksimum sebesar kewajiban nasabah. Bank tidak dapat mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset.

Agunan akan diambil alih ketika tidak ada lagi sumber pengembalian yang bisa diharapkan dari nasabah. Indikasi atas tidak adanya sumber pengembalian adalah buruknya kondisi keuangan nasabah selama beberapa periode dan terdapat tunggakan angsuran lebih dari 1 (satu) tahun dan termasuk dalam kolektibilitas macet.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

q. Assets under Finance Lease (continued)

Right of Use Assets and Lease Liabilities (continued)

b. Impact on lessee accounting (continued)

Short-term leases (with term of less or equal to 12 months) and leases of low-value assets, and elements of those leases, partially or entirely not applying the recognition principles stipulated in SFAS No. 73 will be treated the same as operating leases in SFAS No. 30. The Bank will recognize these lease payments on a straight-line basis during the lease period in the statement of profit or loss and other comprehensive income. This expense is recorded under general and administrative expenses in profit or loss.

The recording implementation of SFAS No. 73 is applied for all leases (except as stated earlier), as follows:

- Presenting right-of-use assets as part of fixed assets and lease liabilities presented as part of other liabilities in the statement of financial position, measured at the present value of the future lease payments;
- Recording depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities in the statement of profit or loss and other comprehensive income; and
- Separating the total amount of cash paid into a principal portion (within financing activities) and interest (within operating activities) in the statement of cash flows.

r. Foreclosed Assets

Foreclosed assets in settlement of financing facilities are included as part of other assets and are recognized at their net realizable values. Net realizable value is the fair value of an asset after deducting estimated settlement expenses.

The value of a foreclosed assets whether acquired from auction or from voluntary conveyance is recorded at fair value less selling price, which is a maximum amount of customer liabilities. Bank cannot recognize gain at asset acquisition.

Foreclosed assets will be acquired when there are no more sources of return that could be expected from the customer. Indication of no source of return is the poor financial condition of customers during several periods and arrears of installments for more than 1 (one) year and categorized as loss.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

r. Agunan yang Diambil Alih (lanjutan)

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih dibentuk atas penurunan nilai yang terjadi disajikan sebagai pengurangan dari akun agunan yang diambil alih.

Beban perbaikan (*reconditioning cost*) yang timbul setelah pengambilalihan agunan dikapitalisasi dalam akun agunan yang diambil alih tersebut.

Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

s. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka disajikan dalam akun aset lain-lain dan diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

t. Aset Tak Berwujud

Aset takberwujud adalah aset yang tidak mempunyai wujud fisik yang dibeli oleh Bank dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 5 (lima) tahun.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode amortisasi ditelaah kembali setiap akhir periode.

u. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada pemberi amanat.

v. Simpanan

Simpanan merupakan titipan pihak lain berdasarkan prinsip *wadiah yad-adhdhamanah* dalam bentuk giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan deposito *wakalah*.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

r. Foreclosed Assets (continued)

Management evaluates the value of foreclosed assets regularly. An allowance for impairment losses on foreclosed asset is provided based on the decline in value of foreclosed asset.

Reconditioning costs arising after foreclosure are capitalized in the accounts of the foreclosed collaterals.

The difference between the value of the foreclosed assets and the proceeds from sale of such assets is recorded as gain or loss at the time of sale.

s. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are included as part of other assets and are amortized over their useful life using the straight line method.

t. Intangible Assets

Intangible assets are assets that have no physical form which was acquired by the Bank and stated at cost less accumulated amortization.

Amortization is recognized in profit or loss and other comprehensive income using the straight line method based on its estimated useful lives of 5 (five) years.

The estimated useful lives, residual values and amortization method are reviewed at the end of each period.

u. Liabilities Due Immediately

Liabilities due immediately represent obligation to third parties, based on contract or order by those having authority, that should be settled immediately. Liabilities due immediately are stated at the amount of the Bank's liabilities to the trustee.

v. Deposits

Deposits represent third party funds placed based on *wadiah yad-adhdhamanah* principle in the form of *wadiah demand deposits*, *wadiah saving deposits* and *wakalah deposit*.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

v. Simpanan (lanjutan)

Giro *wadiah* digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta dapat mendapatkan bonus sesuai kebijakan Bank. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan *wadiah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik sesuai dengan kondisi tertentu yang disepakati. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar nilai simpanan pemegang tabungan di Bank.

w. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas Bank kepada bank lain dalam bentuk giro *wadiah*. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada bank lain.

Giro *wadiah* digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

Giro *wadiah* dapat menerima bonus sesuai kebijakan Bank.

x. Dana Syirkah Temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib* / Bank) dalam pengelolaan investasinya dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. Dana *syirkah* temporer terdiri dari tabungan *mudharabah*, deposito berjangka *mudharabah*, sertifikat investasi *mudharabah* antar bank dan sukuk *mudharabah* subordinasi.

Tabungan *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka *mudharabah* dengan Bank. Deposito berjangka *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

v. Deposits (continued)

Wadiah demand deposits are used as payment instruments and available for withdrawal at any time using cheque and demand deposit slips, and may earn bonus based on the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors.

Wadiah savings deposits represent third party funds that can be withdrawn under certain condition. Wadiah savings deposits are stated at the amounts deposited by the holder.

w. Deposits from Other Banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks in the form of wadiah demand deposits. Deposits from other banks are stated at the amount payable to the other banks.

Wadiah demand deposits are used as payment instruments and available for withdrawal at any time using cheque and demand deposit slips, and receive bonuses according to the Bank's policies. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors.

Wadiah demand deposits may receive bonus based on the Bank's policy.

x. Temporary Syirkah Funds

Temporary syirkah funds represent investments under mudharabah mutlaqah contract in which the owners (shahibul maal) entrust the funds to the fund manager (mudharib/ Bank) in managing the investment, and will receive profit share based on the agreed predetermined ratio (nisbah). Temporary syirkah funds consist of mudharabah saving deposits, mudharabah time deposits, mudharabah interbank investment certificates and subordinated mudharabah sukuk.

Mudharabah saving deposits represent third party funds that can be withdrawn under certain conditions. Mudharabah saving deposits are stated at the amount deposited by depositors.

Mudharabah time deposits represent third party funds that can be withdrawn at specific maturity dates based on the agreement between depositors and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal values set forth in the agreement between the holder of time deposit and the Bank.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

x. Dana Syirkah Temporer (lanjutan)

Sukuk *mudharabah* subordinasi merupakan surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan akad *mudharabah*. Sukuk *mudharabah* dikelompokkan dalam dana *syirkah* temporer karena bersifat investasi. Sukuk *mudharabah* subordinasi disajikan sebesar nilai nominal. Biaya-biaya yang timbul dari penerbitan sukuk *mudharabah* diamortisasi selama masa periode sukuk.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak mempunyai liabilitas, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Bank. Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi.

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer berdasarkan konsep bagi hasil.

y. Biaya Emisi/ Biaya Transaksi

Biaya transaksi penerbitan sukuk *mudharabah* dicatat secara terpisah dan disajikan dalam aset sebagai beban tangguhan, yang diamortisasi selama umur sukuk dengan metode garis lurus.

z. Liabilitas Kepada Bank Indonesia

Transaksi PaSBI dilakukan dengan menggunakan akad *wakalah bi al-istismar* di mana hasil pengelolaan (*istismar*) diperhitungkan pada tanggal pengembalian dana (*settlement second leg*) sesuai dengan jangka waktu dan tingkat imbalan yang disepakati.

Jangka waktu Transaksi PaSBI OPT Syariah paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal setlemen sampai dengan tanggal jatuh waktu.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

x. Temporary Syirkah Funds (continued)

Subordinated mudharabah sukuk represents long-term bonds issued under a Mudharabah contract. Mudharabah sukuk are classified as temporary syirkah fund due to its nature as investment. Subordinated mudharabah sukuk are stated at their nominal value. The issuance costs for mudharabah sukuk are amortized based on the term of sharia bonds.

Temporary syirkah funds cannot be classified as liability because the Bank has no obligation to return the fund to the owner when loss incurred, unless there is negligence or default by the Bank. Temporary syirkah funds cannot be classified as equity since they have maturity and the owner of the funds do not have ownership rights as common shareholders, such as voting rights and right of the profit derived from current assets and non-investment assets.

Temporary syirkah fund is an element of statement of financial position where it is in line with sharia principles, which entitles the Bank to manage and invest funds, including to manage as one portfolio with other type of funds.

The owners of temporary syirkah funds earn profit in accordance with the agreement and receive loss based on the amount of funds from each party. The return of temporary syirkah funds are based on revenue sharing concept.

y. Issuance Cost/ Transaction Cost

Issuance cost of subordinated mudharabah sukuk are recognized separately and stated in assets as a deferred expense, that is amortized using the straight line method which is the term of the bonds.

z. Liabilities To Bank Indonesia

PaSBI transactions are carried out using a wakalah bi al-istismar contract where management results (istismar) are calculated on the date of refund (second leg settlement) in accordance with the agreed time period and rate of return.

The period for a Sharia PaSBI OPT Transaction is a minimum of 1 (one) week and a maximum of 12 (twelve) months expressed in calendar days, which is calculated from 1 (one) calendar day after the settlement date until the maturity date.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

aa. Pendapatan Pengelolaan oleh Bank sebagai Mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib* terdiri dari pendapatan dari transaksi penjualan dari transaksi *murabahah* dan *istishna*, pendapatan bagi hasil dari *mudharabah* dan *musyarakah*, pendapatan sewa dari *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Bank melakukan penghentian amortisasi keuntungan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai *non-performing*. Pendapatan Bank dari transaksi usaha yang diklasifikasikan sebagai *non-performing* dicatat sebagai margin dalam penyelesaian pada laporan komitmen dan kontinjensi.

Pendapatan *istishna* diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad dinyatakan selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli.

Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad secara merata.

Pendapatan usaha *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib* dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.

Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *musyarakah*, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

aa. Revenue from Fund Management by the Bank as Mudharib

Revenue from fund management as *mudharib* consists of revenue from sales in *murabahah* and *istishna* transaction, income from profit sharing of *mudharabah* and *musyarakah* financing, income from *ijarah* and *ijarah muntahiyah bittamlik* and other main operating income.

Income from *murabahah* receivables uses the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the *murabahah* receivables. When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

The Bank terminates the amortization of deferred income when the financing are classified as *non-performing*. The Bank's income from business transactions that are classified as *non-performing* is recorded as margin of *non-performing* receivables in the statement of commitments and contingencies.

Revenue from *istishna* is recognized using percentage of completion or contract completion method. The contract is defined as completed if the process of production is completed and the goods are delivered to the customer.

Revenue from *ijarah* is recognized equally during period of the contract.

Revenue from *mudharabah* is recognized during the period of profit sharing in accordance with the agreed revenue sharing ratio. Loss incurred due to negligence of *mudharib* is charged to *mudharib* and will not reduce the *mudharabah* investment.

Revenue from *musyarakah* distributed to an active partner is recognized in accordance with the agreement on *musyarakah* revenue, whereas revenue distributed to passive partner is recognized as the right of the passive partner in revenue sharing and liability.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

aa. Pendapatan Pengelolaan oleh Bank sebagai Mudharib (lanjutan)

Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pinjaman *qardh*, pendapatan dari penempatan pada Bank Indonesia, pendapatan dari giro dan penempatan pada bank syariah lain, pendapatan bagi hasil surat berharga syariah, pendapatan *fee* wesel ekspor, dan pendapatan *fee* akseptasi.

ab. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima (*cash basis*).

Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan. Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut dibagikan ke nasabah penabung dan deponan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Bagi hasil sukuk *mudharabah* subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, dihitung berdasarkan perkalian antara *nisbah* pemegang sukuk dengan pendapatan yang diterima Bank dalam triwulan terakhir sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan triwulanan Bank yang belum diaudit yang dipublikasikan oleh Bank.

Pembayaran pendapatan bagi hasil kepada masing-masing pemegang sukuk akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah pokok sukuk *mudharabah* yang belum dibayar kembali.

Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari transaksi Bank berbasis imbalan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

aa. Revenue from Fund Management by the Bank as Mudharib (continued)

Other operating revenue consists of income derived from funds of *qardh*, placement with Bank Indonesia, current account and placements with other sharia banks, revenue sharing from sharia securities, export bill fee, and acceptance fee revenue.

ab. Third Parties Share on Returns of Temporary Syirkah Funds

The share of third parties on the return of temporary *syirkah* funds represents portion of income derived by Bank from managing funds under *mudharabah mutlaqah* principles. The profit sharing is distributed on the cash basis.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets for distribution to fund owners and the Bank are computed proportionally based on the allocation of funds from owners and the Bank used in financing facilities and other earning assets distributed. The total available margin income and profit sharing are distributed to customers and depositors as *shahibul maal* and to the Bank as *mudharib* in accordance with a predetermined ratio.

Subordinated *Mudharabah* sukuk is paid every 3 (three) months, and calculated based on multiplication between the sukuk holder's ratios and revenue received by the Bank in the last quarter as contained in the unaudited quarterly financial statements of the Bank Publication.

The payment of revenue sharing to the respective sukuk holders will be proportionated in accordance with the portion of ownership compared to the unpaid principal amount of the *Mudharabah* sukuk.

Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets distributed using the Bank's funds entirely become the right of the Bank including income from the Bank's fee-based transactions.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

ac. Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan

Pendapatan imbalan jasa perbankan pada umumnya diakui pada saat kas diterima.

ad. Imbalan Kerja

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang menghapuskan mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjensi untuk menyederhanakan klasifikasi dan pengungkapan.

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek dan tunjangan hari raya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank. Iuran dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut dan pembayarannya dikurangkan dari utang iuran. Iuran terhutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti

Imbalan pasca kerja diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi syarat. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan persyaratan minimum Undang-undang Tenaga Kerja No.13/2003.

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:

- (i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.
- (ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
- (iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ac. Fee Based Income from Banking Services

Fee based income from banking services is generally recognized when cash is received.

ad. Employee Benefits

Effective January 1, 2015, the Bank implements SFAS No. 24 (Revised 2013), "Employee Benefits", which removes the corridor mechanism and the contingent liabilities disclosures to simplify the classifications and disclosures.

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as salaries, social security contributions, short-term leaves and allowance of feast day are recognized during the period when services are rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined contribution plan

Contribution payable to the pension fund is equivalent to a certain percentage of salaries for eligible employees under the Bank's defined contribution plan. The contribution is accrued and recognized as expense when services have been rendered by eligible employees and actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

Defined benefit plan

The post-employment benefits are recognized as expense when services have been rendered by eligible employees. The benefits are determined based on Bank regulations and the minimum requirements of Labor Law No.13/2003.

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the *Projected Unit Credit Method*.

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income, consist of:

- (i) Actuarial gain and losses.
- (ii) Return on plan assets, excluding an amount that is included in net interest on liabilities (assets).
- (iii) The effect of the asset ceiling, excluding any amount that is included in the net interest of liabilities (assets).

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

ad. Imbalan Kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

ae. Perpajakan

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No 46 (revisi 2013) "Pajak Penghasilan". Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Perubahan terhadap liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ad. Employee Benefits (continued)

Defined benefit plan (continued)

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

Past service costs are recognized as expense at the earlier date between the amendments or occurrence of curtailment program, and when the costs of restructuring or severance is recognized, therefore, unvested past service cost can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.

ae. Taxation

Effective January 1, 2015, the Bank adopts SFAS No. 46 (Revised 2013), "Income Taxes". The adoption of the SFAS has no significant impact on the financial reporting and disclosures in the financial statements.

Current tax expense is provided based on the taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to the extent that it is probable for temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to be utilized in deducting future taxable profit.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and is reduced when it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to compensate part or all of the benefit of the deferred tax assets.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

ae. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyesuaian untuk dan/ atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan ke laba komprehensif lainnya dan dilaporkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

af. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Bank dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

ag. Informasi Segmen Operasi

Informasi segmen operasi diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana Bank terlibat dalam lingkungan ekonomi dimana Bank beroperasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ae. Taxation (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statement of financial position reporting date. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Income Tax Benefit (Expense)" and included in the net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged to other comprehensive income and reported to equity.

Assets and liabilities on deferred tax and current tax are offset if there is a legal enforceable right to offset.

af. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Bank by the weighted average number of shares outstanding during the year.

ag. Operating Segment Information

Operating Segment information is disclosed to enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the Bank is involved in and the economic environment where the Bank operates.

An operating segment is a component of an entity:

- a) that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);*
- b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and*
- c) for which discrete financial information is available.*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

ag. Informasi Segmen Operasi (lanjutan)

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

ah. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian yang melekat dalam melakukan estimasi, dapat menyebabkan jumlah sesungguhnya yang dilaporkan pada periode yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasikan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuannya untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Nilai wajar instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

Level 1: harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ag. Operating Segment Information (continued)

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each product.

ah. Use of Significant Accounting Judgment and Estimates

The preparation of the Bank's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods might be based on amounts which differ from those estimates.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in Bank's financial statements as follows:

Going concern

The Bank's management has made an assessment of its ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

Fair value of financial instruments

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

Level 1: quoted prices (without adjustments) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

ah. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

Level 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.

Level 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Kontinjensi

Bank sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial.

Manajemen tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Bank berdasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul diluar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ah. Use of Significant Accounting Judgment and Estimates (continued)

Fair value of financial instruments (continued)

Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.

Level 3: inputs that are not observable for the assets and liabilities.

Contingency

The Bank is currently involved in legal proceedings. The estimate of the probable cost for the resolution of claims has been developed in consultation with the aid of the external legal counsel handling the Bank's defense in this matter and is based upon an analysis of potential results.

Management does not believe that the outcome of this matter will affect the results of operations. It is probable, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to these proceedings.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

ah. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai dari piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan

Manajemen Bank menelaah portofolio piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan setiap periode untuk menilai penurunan nilai dengan memperbaharui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas.

Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul diluar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Penurunan nilai investasi pada surat berharga

Manajemen Bank menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Umur ekonomis aset tetap

Manajemen Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut. Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ah. Use of Significant Accounting Judgment and Estimates (continued)

Allowance for impairment losses on receivables, funds of *qardh* and financing

The Bank's management reviews its receivables, funds of *qardh* and financing portfolio to assess impairment in each period by updating the required allowance for impairment losses made during the period based on the continuing analysis and monitoring of individual accounts by the officers.

Such estimates are based on assumptions of several factors and actual results may differ, resulting in future changes in the amount of allowance for losses.

Existing circumstances and assumptions with regard to future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Impairment of investment in marketable securities

The Bank's management determines that the impairment of marketable securities are based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost.

Useful lives of premises and equipment

The Bank's management estimates the useful lives of premises and equipment based on the period over which the assets are expected to be available for use. The estimated useful lives of premises and equipment are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets. In addition, estimate of the useful lives of premises and equipment is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

ah. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

Umur ekonomis aset tetap (lanjutan)

Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan dari taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban usaha.

Revaluasi pada aset tetap

Bank mengukur aset tetap berdasarkan nilai revaluasi dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan dalam ekuitas. Pada tahun 2022, Bank menggunakan jasa penilai independen untuk menentukan nilai wajar aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022. Lihat Catatan 15 untuk nilai tercatat aset tetap.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Manajemen Bank mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali.

Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- b) perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- c) industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ah. Use of Significant Accounting Judgment and Estimates (continued)

Useful lives of premises and equipment (continued)

It is possible, however, that future results of operations be materially affected by changes in estimates brought about by changes in the aforementioned factors. The amounts and timing of recorded expenses for any period are affected by changes of those factors and circumstances during recording. A reduction in the estimated useful lives of premises and equipment increases the recorded operating expenses.

Revaluation of premises and equipment

The Bank measures the premises and equipment at revalued amounts with changes in fair value being recognized in other comprehensive income and reported in the equity. In 2022, the Bank engaged independent appraisal to determine the fair value of premises and equipment as of December 31, 2022. Refer to Note 15 for the carrying values of premises and equipment.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from deductible temporary difference. Management's judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with strategic future tax planning.

Impairment of non-financial assets

The Bank's management assesses impairment of non-financial assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of non-financial asset may not be recoverable.

The factors that the Bank considers important which may lead to impairment assessment are the following:

- a) significant under-performance related to historical expectation or projected future operating results;
- b) significant changes in the manner of use of the assets or the overall business strategy; and
- c) significant negative industry or economic trends.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

ah. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya pelepasan dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Estimasi liabilitas imbalan kerja

Estimasi liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain.

Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

ai. Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing

Bank menyelenggarakan catatan akuntansi-nya dalam Rupiah. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs *Reuters* pada pukul 16:00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ah. Use of Significant Accounting Judgment and Estimates (continued)

Impairment of non-financial assets (continued)

The Bank recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher amount between fair value less costs of disposal using the asset (or cash generating unit) value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if not possible, for the cash-generating unit to which the asset belongs.

Estimated liabilities for employee benefits

Estimated liabilities for employee benefits are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate, expected rate of returns on investments, future salary increase, mortality rate, resignation rate and others.

Due to the long-term nature of this plan, such estimates are subject to significant uncertainty.

ai. Transaction and Balance in Foreign Currency

The Bank maintains its accounting records in Indonesian Rupiah. Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rates in effect on the date of the transactions.

On the date of the statement of financial position, all monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the Reuters spot rates at 16:00 WIB (Western Indonesian Time) issued by Bank Indonesia.

The resulting gains or losses from the translation of monetary assets and liabilities in foreign currencies are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

ai. Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kurs mata uang asing yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (dalam nilai penuh):

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
1 Dinar Kuwait	50.111	50.874
1 Euro	17.038	16.582
1 Dolar Amerika Serikat	15.397	15.568
1 Dolar Australia	10.521	10.558
1 Dolar Singapura	11.676	11.593
1 Ringgit Malaysia	3.355	3.534
1 Riyal Arab Saudi	4.106	4.139
10 Yen Jepang	1.089	1.178

aj. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 yang berdampak terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian laporan keuangan";
- Amendemen PSAK 16: "Aset Tetap";
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan akuntansi, Perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan"; dan
- Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan".
- Revisi PSAK 107 : "Akuntansi Ijarah"

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi dan tidak memiliki dampak terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Beberapa standar akuntansi baru dan interpretasi dari standar akuntansi telah diterbitkan dan belum berlaku efektif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan belum diterapkan pada penyusunan laporan keuangan ini.

PSAK dibawah ini akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 dan penerapan dini diperbolehkan:

- Amendemen PSAK 73: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewabalik.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ai. Transaction and Balance in Foreign Currency (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, the exchange rates used in translating foreign currency amounts into Rupiah are as follows (in full amount):

1 Kuwait Dinar
1 Euro
1 United States Dollar
1 Australian Dollar
1 Singapore Dollar
1 Malaysian Ringgit
1 Saudi Arabian Riyal
10 Japanese Yen

aj. Changes in accounting policies and disclosures

The latest standards, revisions and interpretations that become effective on or after January 1, 2023, which affect the Bank's report, are as follows:

- Amendment to SFAS 1: "Presentation of financial statement"
- Amendment to SFAS 16: "Fixed Assets";
- Amendment to SFAS 25: "Accounting policies, changes in accounting estimates, and errors"; and
- Amendment to SFAS 46: "Income Tax".
- Revision to SFAS 107 : "Accounting for Ijarah"

Implementation of these standards does not change the accounting policies and has no effect on the amounts reported in the current period or the previous year.

Certain new accounting standards and interpretations have been issued that are not yet effective for the year ended December 31, 2023 and have not been applied in preparing these financial statements.

The following SFAS will become effective for reporting periods beginning on or after 1 January 2024 and early adoption is permitted :

- Amendment to SFAS 73: "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back transactions.

3. KAS

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember / December 31, 2023	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Setara dengan/ Equivalent to Rupiah
Rupiah		678.435.358
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	2.551.340	39.282.982
Riyal Saudi Arabia	571.966	2.348.418
Dolar Singapura	4.788	55.909
Ringgit Malaysia	25.753	86.406
	<u>41.773.715</u>	
Jumlah		720.209.073

Saldo kas termasuk uang yang ada pada mesin ATM (Automated Teller Machines) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sejumlah Rp60.075.350 dan Rp63.677.700.

3. CASH

This account consists of:

	31 Desember / December 31, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Setara dengan/ Equivalent to Rupiah	
Rupiah		683.939.851	Rupiah
Foreign Currencies			
United States Dollar	1.112.534	17.319.373	
Saudi Arabian Riyal	106.522	440.915	
Singapore Dollar	29.197	338.476	
Malaysian Ringgit	39.803	140.651	
	<u>18.239.415</u>		
Total		702.179.266	Total

Cash including cash in ATMs (Automated Teller Machines) as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp60,075,350 and Rp63,677,700.

4. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

a. Berdasarkan jenis dan mata uang:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022
Pihak ketiga		
Rupiah		
Giro pada Bank Indonesia	2.214.114.365	6.782.527.680
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	2.330.000.000	250.000.000
Giro BI FAST	284.092.784	127.035.586
Transaksi Kliring Esok Hari (TOM)	938.742	535.342
	<u>4.829.145.891</u>	<u>7.160.098.608</u>
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat		
Giro pada Bank Indonesia (2023 : USD11.777.225 dan 2022 : USD2.015.225)	27.363.933	31.372.015
Deposito Berjangka BI (2023: USD10.000.000 dan 2022: Nihil)	153.970.000	--
	<u>181.333.933</u>	<u>31.372.015</u>
Jumlah	5.010.479.824	7.191.470.623

4. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA

a. By type and currencies:

Third Party	
Rupiah	
Current accounts with Bank Indonesia	
Bank Indonesia Sharia Deposit Facility (FASBIS)	
BI Fast Current accounts	
Tomorrow Clearing Transaction (TOM)	
Foreign currency	
United States Dollar	
Current Account with Bank Indonesia (2023 : USD11,777,225 and 2022: USD 2,015,225)	
BI Term Deposit (2023 : USD10,000,000 and 2022: Nil)	
Total	

4. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (Lanjutan)

4. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA (Continued)

b. Berdasarkan jangka waktu:

b. By time period:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak Ketiga Rupiah			Third parties Rupiah
≤ 1 bulan	4.829.145.891	7.160.098.608	≤ 1 month
	4.829.145.891	7.160.098.608	
Mata uang asing Dolar Amerika Serikat			Foreign currency United States Dollar
≤ 1 bulan			≤ 1 month
(2023 : USD11.777.225 dan 2022: USD2.015.225)	181.333.933	31.372.015	(2023 : USD11,777,225 and 2022 : USD2,015,225)
Jumlah	5.010.479.824	7.191.470.623	Total

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

c. By remaining period to maturity:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak Ketiga Rupiah			Third parties Rupiah
≤ 1 bulan	4.829.145.891	7.160.098.608	≤ 1 month
	4.829.145.891	7.160.098.608	
Mata uang asing Dolar Amerika Serikat			Foreign currency United States Dollar
≤ 1 bulan			≤ 1 month
(2023: USD11.777.225 dan 2022: USD2.015.225)	181.333.933	31.372.015	(2023 : USD11,777,225 and 2022 : USD2,015,225)
Jumlah	5.010.479.824	7.191.470.623	Total

d. Rata-rata tingkat bonus tahunan dan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) adalah sebagai berikut:

d. The annual average bonus rate and Minimum Statutory Reserves (GWM) ratio are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	5,25%	4,75%	Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS)
Rasio rata-rata GWM (tidak diaudit) :			Average Minimum Statutory Reserves Ratio (unaudited):
Rupiah	7,50%	7,50%	Rupiah
Mata uang asing	1,18%	1,84%	Foreign currencies

Rasio GWM pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/10/PADG/2020 tanggal 30 April 2020 tentang "Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Syariah" yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 yang mana mewajibkan setiap Bank untuk memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 3,5% dan 1% dari dana pihak ketiga (DPK) dalam Rupiah dan valuta asing.

The Minimum Statutory Reserves ratio as of December 31, 2023 and 2022 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 22/10/PADG/2020 dated April 30, 2020 concerning "Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units" came into force on May 1, 2020, and regulates that each Bank is required to maintain a Minimum Statutory Reserves in Rupiah and foreign exchange, the amount of which is set at 3.5% and 1% of third party funds (DPK) in Rupiah and foreign exchange.

4. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (Lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.22/4/PADG/2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No. 22/4/PBI/2020 Tentang Insentif Bagi Bank Yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona, besaran insentif kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah yang wajib dipenuhi secara harian ditetapkan sebesar 0,5%.

Selain ketentuan di atas, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/07/PADG/2021 yang berlaku sejak 1 Mei 2021, terdapat perubahan perhitungan GWM dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). Bank harus memelihara tambahan GWM jika RIM Bank kurang dari batas bawah 84% atau melebihi batas atas target BI sebesar 94%.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari OJK.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi Giro Wajib Minimum sesuai dengan ketentuan OJK.

4. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA (Continued)

Based on regulation of Members of the Board of Governors No.22/4/PADG/2020 Regarding the Implementation of Bank Indonesia Regulation No.22/4/PBI/2020 Regarding Incentives for Banks Providing Funds for Certain Economic Activities to Support the Handling of the Economic Impacts of the Corona Virus Outbreak, the amount of allowance incentives for the fulfillment of Statutory Reserves in Rupiah which must be fulfilled daily is set at 0.5%.

In addition, based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.23/07/PADG/2021 which has been effective since May 1, 2021, there are changes in the calculation of the Minimum Statutory Reserves from Financing to Deposit Ratios (FDR) to the Macroprudential Intermediation Ratio (RIM). Banks must pay additional Minimum Statutory Reserves if the Bank's Macroprudential Intermediation Ratio is less than the lower limit of 84% or exceeds the upper limit of the BI target of 94%.

The balance of current accounts with Bank Indonesia is maintained to meet the Minimum Statutory Reserves Requirement of the Financial Services Authority.

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank has complied with the Minimum Statutory Reserves Requirement under the regulation of the Financial Services Authority.

5. GIRO PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan mata uang:

	31 Desember / December 31, 2023	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent to Rupiah
Pihak ketiga Rupiah		77.951.246
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	85.702.457	1.319.560.728
Dolar Singapura	389.247	4.544.977
Ringgit Malaysia	16.738.457	56.160.872
Euro	148.386	2.528.244
Riyal Arab Saudi	444.875	1.826.600
Dinar Kuwait	10.000	501.107
Yen Jepang	7.027.256	765.128
		<u>1.385.887.656</u>
Jumlah		1.463.838.902
Cadangan kerugian penurunan nilai		--
Bersih		1.463.838.902

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

a. By currencies:

	31 Desember / December 31, 2022		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent to Rupiah	
Third parties Rupiah		62.540.081	
Foreign currencies			
United States Dollar	21.492.161	334.579.213	
Singapore Dollar	411.153	4.766.449	
Malaysian Ringgit	31.713.364	112.064.247	
Euro	198.723	3.295.166	
Saudi Arabian Riyal	676.985	2.802.171	
Kuwaiti Dinar	10.000	508.742	
Japanese Yen	3.380.566	398.264	
		<u>458.414.252</u>	
Total		520.954.333	
Allowance for impairment losses		--	
Net		520.954.333	

**5. GIRO PADA BANK LAIN
(Lanjutan)**

**5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
(Continued)**

b. Berdasarkan jenis dan bank:

b. By type and bank:

	31 Desember / December, 31 2023		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent to Rupiah	
Pihak ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
Bank Syariah			Sharia Bank
PT BPD Jatim - UUS		2.423.137	PT BPD Jatim - SBU
PT BPD Sulselbar - UUS		2.083.630	PT BPD Sulselbar - SBU
PT BPD Jateng - UUS		197.265	PT BPD Jateng - SBU
PT Bank Syariah Indonesia		4.072.740	PT Bank Syariah Indonesia
PT Bank Aceh Syariah		3.002.880	PT Bank Aceh Syariah
Bank Umum Konvensional			Conventional Bank
PT Bank Central Asia Tbk		51.177.629	PT Bank Central Asia Tbk
PT BPD Papua		8.949	PT BPD Papua
PT BPD Sumbar		11.620	PT BPD Sumbar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		11.135.807	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		356.077	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Standard Chartered Bank Indonesia		1.416.687	Standard Chartered Bank Indonesia
PT BPD Bengkulu		101.070	PT BPD Bengkulu
PT BPD Lampung		1.758.385	PT BPD Lampung
PT BPD Jambi		8.767	PT BPD Jambi
Lain-lain (di bawah Rp10.000)		196.603	Others (below Rp10,000)
		77.951.246	
Mata uang asing			Foreign currencies
Bank Syariah			Sharia Bank
Malayan Banking Berhad	2.229.862	7.481.634	Malayan Banking Berhad
Bank Islam Malaysia Berhad	144.925	486.253	Bank Islam Malaysia Berhad
Bank Muamalat Malaysia Berhad	18.075	60.644	Bank Muamalat Malaysia Berhad
Giro pada UUS	1.057.261	16.278.655	Current accounts with SBU
		24.307.186	
Bank Umum Konvensional			Conventional Bank
Citibank NA, cabang New York	81.488.250	1.254.674.592	Citibank NA, New York Branch
PT Bank BRI, cabang New York	107.460	1.654.562	PT Bank BRI, New York Branch
PT Bank Central Asia Tbk	808.464	12.447.924	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.152.088	33.135.691	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Standard Chartered Bank Indonesia	148.386	2.528.244	Standard Chartered Bank Indonesia
The Development Bank of Singapore Limited	389.247	4.544.977	The Development Bank of Singapore Limited
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad	14.342.210	48.120.982	Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
The National Commercial Bank	234.147	961.378	The National Commercial Bank
Al-Rajhi Banking & Investment (SAR)	210.728	865.222	Al-Rajhi Banking & Investment (SAR)
Bank Boubayan, Kuwait	10.000	501.107	Boubayan Bank, Kuwait
Citibank NA, Cabang Indonesia	91	1.395	Citibank NA, Indonesia Branch
Al-Rajhi Banking & Investment (MYR)	3.386	11.360	Al-Rajhi Banking & Investment (MYR)
PT Bank Negara Indonesia Tokyo (Persero) Tbk	7.027.256	765.128	PT Bank Negara Indonesia Tokyo (Persero) Tbk
PT Kookmin Bank	88.843	1.367.908	PT Kookmin Bank
		1.361.580.470	
Jumlah		1.463.838.902	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai		--	Allowance for impairment losses
Bersih		1.463.838.902	Net

5. GIRO PADA BANK LAIN
(Lanjutan)

b. Berdasarkan jenis dan bank:

	31 Desember / December 31, 2022	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent to Rupiah
Pihak ketiga		
Rupiah		
Bank Syariah		
PT BPD Jatim - UUS		2.307.683
PT BPD Sulselbar - UUS		2.800
PT BPD Jateng - UUS		794.839
PT Bank Syariah Indonesia		4.070.315
PT Bank Aceh Syariah		3.498.384
Bank Umum Konvensional		
PT Bank Central Asia Tbk		50.263.382
PT BPD Papua		9.665
PT BPD Sumbar		32.186
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		417.057
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		160.175
Standard Chartered Bank Indonesia		657.515
PT BPD Bengkulu		100.974
PT BPD Lampung		35.709
PT BPD Jambi		5.257
Lain-lain (di bawah Rp10.000)		184.140
		<u>62.540.081</u>
Mata uang asing		
Bank Syariah		
Malayan Banking Berhad	866.754	3.062.814
Bank Islam Malaysia Berhad	212.603	751.266
Bank Muamalat Malaysia Berhad	18.057	63.809
Giro pada UUS	489.270	7.616.708
		<u>11.494.597</u>
Bank Umum Konvensional		
Citibank NA, cabang New York	19.143.789	298.020.942
PT Bank BRI, cabang New York	108.300	1.685.960
PT Bank Central Asia Tbk	390.058	6.072.224
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.325.121	20.628.823
Standard Chartered Bank Indonesia	198.723	3.295.166
The Development Bank of Singapore Limited	411.153	4.766.449
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad	30.612.014	108.172.450
The National Commercial Bank Al-Rajhi Banking & Investment (SAR)	478.879	1.982.170
Bank Boubyan, Kuwait	198.107	820.001
Citibank NA, Cabang Indonesia	10.000	508.742
Al-Rajhi Banking & Investment (MYR)	91	1.410
PT Bank Negara Indonesia Tokyo (Persero) Tbk	3.936	13.908
PT Kookmin Bank	3.380.566	398.264
	35.532	553.146
		<u>446.919.655</u>
Jumlah		520.954.333
Cadangan kerugian penurunan nilai		--
Bersih		520.954.333

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
(Continued)

b. By type and bank:

Third Parties
Rupiah
Sharia Bank
PT BPD Jatim - SBU
PT BPD Sulselbar - SBU
PT BPD Jateng - SBU
PT Bank Syariah Indonesia
PT Bank Aceh Syariah
Conventional Bank
PT Bank Central Asia Tbk
PT BPD Papua
PT BPD Sumbar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Standard Chartered Bank Indonesia
PT BPD Bengkulu
PT BPD Lampung
PT BPD Jambi
Others (below Rp10,000)
Foreign currencies
Sharia Bank
Malayan Banking Berhad
Bank Islam Malaysia Berhad
Bank Muamalat Malaysia Berhad
Current accounts with SBU
Conventional Bank
Citibank NA, New York Branch
PT Bank BRI, New York Agency
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Standard Chartered Bank Indonesia
The Development Bank of Singapore Limited
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
The National Commercial Bank Al-Rajhi Banking & Investment (SAR)
Boubyan Bank, Kuwait
Citibank NA, Indonesia Branch
Al-Rajhi Banking & Investment (MYR)
PT Bank Negara Indonesia Tokyo (Persero) Tbk
PT Kookmin Bank
Total
Allowance for impairment losses
Net

5. GIRO PADA BANK LAIN (Lanjutan)

b. Berdasarkan jenis dan bank: (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tingkat pengembalian (bonus dan bunga) rata-rata dari giro pada bank lain adalah sebesar 0,02% dan 0,07%.

Bank melakukan penilaian terhadap giro pada bank lain secara individual dengan mempertimbangkan adanya bukti objektif penurunan nilai.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 seluruh giro pada bank lain diklasifikasikan "Lancar".

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Pendapatan jasa giro yang diterima dari giro pada bank umum konvensional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.357.334 dan Rp1.274.937 yang dijadikan dana kebajikan yang disalurkan melalui Baitul Maal Muamalat.

Tidak terdapat giro pada bank lain yang dijadikan jaminan pada 31 Desember 2023 dan 2022.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (Continued)

b. By type and bank: (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, the average return (bonus and interest) of current accounts with other banks is 0.02% and 0.07%.

The Bank assessed current accounts with other banks individually for impairment based on whether an objective evidence of impairment exists.

As of December 31, 2023 and 2022, all current accounts with other banks are classified as "Current".

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary as of December 31, 2023 and 2022.

Interest income received from current accounts with conventional banks for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp1,357,334 dan Rp1,274,937, respectively, which is treated as social charitable funds which are distributed through Baitul Maal Muamalat.

No current accounts with other banks is used as collateral as of December 31, 2023 and 2022.

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan jenis:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pihak ketiga Rupiah		
Deposito berjangka <i>mudharabah</i>		
BPRS Wakalumi	1.451.232	1.451.233
BPRS Dana Cipaganti	--	418.830
BPRS PNM Mentari	--	50.000
BPRS Harum Hikmanugraha	--	30.000
	<u>1.451.232</u>	<u>1.950.063</u>
Mata uang asing Dolar Amerika Serikat		
Deposito Jaminan		
Citibank N.A New York (2023: USD150.000; 2022: USD150.000)	2.309.550	2.335.125
Investasi wakalah		
BIMB Malaysia (2023: Nihil; 2022: MYR11.000.000)	--	38.870.260
	<u>2.309.550</u>	<u>41.205.385</u>
Jumlah	3.760.782	43.155.448
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	(418.830)
Bersih	3.760.782	42.736.618

6. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS

a. By type:

Third Parties Rupiah
<i>Mudharabah Time Deposits</i>
BPRS Wakalumi
BPRS Dana Cipaganti
BPRS PNM Mentari
BPRS Harum Hikmanugraha
Foreign Currencies United States Dollar
<i>Pledge Deposit</i>
Citibank N.A New York (2023: USD150,000; 2022: USD150,000)
<i>Wakalah investment</i>
BIMB Malaysia (2023: Nil 2022: MYR11,000,000)
Total
<i>Allowance for impairment losses</i>
Net

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

b. Berdasarkan jangka waktu:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pihak ketiga Rupiah		
≥ 1 - ≤ 3 bulan	--	468.830
> 3 - ≤ 12 bulan	1.451.232	1.481.233
	<u>1.451.232</u>	<u>1.950.063</u>
Mata uang asing Dolar Amerika Serikat		
≥ 1 - ≤ 3 bulan	--	38.870.260
> 3 - ≤ 12 bulan	2.309.550	2.335.125
	<u>2.309.550</u>	<u>41.205.385</u>
Jumlah	3.760.782	43.155.448
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	(418.830)
Bersih	3.760.782	42.736.618

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pihak Ketiga Rupiah		
≤ 1 bulan	1.451.232	1.531.233
> 3 - ≤ 12 bulan	--	418.830
	<u>1.451.232</u>	<u>1.950.063</u>
Mata uang asing Dolar Amerika Serikat		
≤ 1 - ≤ 3 bulan	--	38.870.260
> 3 - ≤ 12 bulan	2.309.550	2.335.125
	<u>2.309.550</u>	<u>41.205.385</u>
Jumlah	3.760.782	43.155.448
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	(418.830)
Bersih	3.760.782	42.736.618

d. Berdasarkan kolektibilitas:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pihak ketiga		
Lancar	3.760.782	42.736.618
Macet	--	418.830
Jumlah	3.760.782	43.155.448
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	(418.830)
Bersih	3.760.782	42.736.618

6. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (Continued)

b. By maturity:

Third parties Rupiah	
≥ 1 - ≤ 3 months	468.830
> 3 - ≤ 12 months	1.481.233
	<u>1.950.063</u>
Foreign currency United States Dollar	
≥ 1 - ≤ 3 months	38.870.260
> 3 - ≤ 12 months	2.335.125
	<u>41.205.385</u>
Total	43.155.448
Allowance for impairment losses	(418.830)
Net	42.736.618

c. By remaining period to maturity

Third parties Rupiah	
≤ 1 month	1.531.233
> 3 - ≤ 12 months	418.830
	<u>1.950.063</u>
Foreign currencies United States Dollar	
≤ 1 - ≤ 3 month	38.870.260
> 3 - ≤ 12 months	2.335.125
	<u>41.205.385</u>
Total	43.155.448
Allowance for impairment losses	(418.830)
Net	42.736.618

d. By collectibility:

Third parties Current Loss	
Lancar	42.736.618
Macet	418.830
Total	43.155.448
Allowance for impairment losses	(418.830)
Net	42.736.618

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

- e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal tahun	418.830
Pembalikan selama tahun berjalan (Catatan 36)	(418.830)
Saldo akhir tahun	--

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah memadai.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai agunan.

Rata-rata tingkat imbal hasil adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023
Deposito berjangka <i>mudharabah</i> IDR	7,34%
Deposito berjangka <i>mudharabah</i> USD	3,43%

6. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (Continued)

- e. Changes in allowance for impairment losses on placements with other banks are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	
	418.830	<i>Balance at the beginning of the year</i>
	--	<i>Reversal during the year (Note 36)</i>
	418.830	<i>Balance at the end of the year</i>

Management believes that the allowance for impairment losses of placements with other banks as of December 31, 2023 and 2022 is adequate.

As of December 31, 2023 and 2022, there are no placements with other banks used as collateral.

The annual average return ratio is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	
	5,55%	<i>IDR Mudharabah time deposit</i>
	0,66%	<i>USD Mudharabah time deposit</i>

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA

- a. Berdasarkan tujuan, mata uang dan jenis:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Pihak Ketiga Rupiah		
Sukuk Pemerintah	143.376.121	15.597.629
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya Pihak Ketiga Rupiah		
Sukuk Pemerintah	--	95.060.000
Diukur pada biaya perolehan Pihak ketiga Rupiah		
Sukuk korporasi	21.110.908.564	21.081.069.000
Sukuk pemerintah	8.782.902.547	6.167.389.608
	29.893.811.111	27.248.458.608
Mata uang asing Dolar Amerika Serikat		
Sukuk pemerintah	487.561.654	496.261.075
	487.561.654	496.261.075
Jumlah	30.524.748.886	27.855.377.312
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	--
Bersih	30.524.748.886	27.855.377.312

7. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES

- a. By purpose, currency and type:

Fair value through profit or loss Third Parties Rupiah
<i>Government Sukuk</i>
Fair value through other comprehensive income Third Parties Rupiah
<i>Government Sukuk</i>
Measured at acquisition cost Third parties Rupiah
<i>Corporate sukuk</i>
<i>Government sukuk</i>
Foreign currency United States Dollar
<i>Government sukuk</i>
Total
<i>Allowance for impairment losses</i>
Net

**7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA
(Lanjutan)**

b. Berdasarkan kolektibilitas

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai surat berharga secara individual dengan adanya bukti objektif penurunan nilai.

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

Klasifikasi jangka waktu surat berharga berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pihak ketiga		
Rupiah		
≤ 2 tahun	1.215.389.761	804.921.307
≥ 2 - ≤ 5 tahun	237.889.730	623.537.655
> 5 tahun	29.071.469.395	26.426.918.350
Jumlah	30.524.748.886	27.855.377.312
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	--
Bersih	30.524.748.886	27.855.377.312

d. Berdasarkan jenis dan penerbit

1) Sukuk Pemerintah

Sukuk Pemerintah merupakan sukuk yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam rangka pengelolaan portofolio surat utang negara.

**7. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES
(Continued)**

b. By collectibility

The Bank assessed the marketable securities individually for impairment based on whether an objective evidence of impairment exists.

c. By remaining period to maturity

The classification of marketable securities by the remaining period to maturity is as follows:

Third parties
Rupiah
≤ 2 years
≥ 2 - ≤ 5 years
> 5 years
Total
Allowance for impairment
losses
Net

d. By type and issuer

1) Government Sukuk

Government Sukuk represents sukuk issued by the Republic of Indonesia in connection with the management of Government bonds portfolio.

Seri/ Series	Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun/ Average annual revenue sharing rate	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Fair value through profit or loss Rupiah				
Seri SR 012	6,30	10 Maret 2023/ March 10, 2023	--	3.883.674
Seri SR 013	6,05	10 September 2023/ September 10, 2023	--	2.891.983
Seri SR 014	5,47	10 September 2023/ September 10, 2023	538.493	3.102.850
Seri SR 015	5,10	10 September 2024/ September 10, 2024	2.074.884	3.092.927
Seri SR 016	5,10	10 September 2024/ September 10, 2024	391.876	1.509.250
Seri SR 017	5,10	10 September 2025/ September 10, 2025	1.411.132	19.865
Seri SR 018	6,25	10 Maret 2028/ March 10, 2028	1.382.909	--
SPNS14022024	6,45	14 Februari 2024/ February 14, 2024	99.238.000	--
PBS 004	6,10	15 Februari 2037/ February 15, 2037	279.561	21.714
PBS012	8,88	15 November 2031/ November 15, 2031	3.284.337	--
PBS017	6,13	15 Oktober 2025/ October 15, 2025	5.465.429	--
PBS 019	8,25	15 September 2023/ September 15, 2023	--	417.688
PBS 029	8,25	15 Maret 2034/ March 15, 2034	13.661.940	--
PBS033	6,50	15 Juni 2037/ June 15, 2037	--	468.625
PBS034	6,50	15 Juni 2039/ June 15, 2039	4.855.950	189.053
PBS036	5,38	15 Agustus 2025/ August 15, 2025	9.795.400	--
PBS037	5,38	15 Maret 2036/ March 15, 2036	996.210	--
			143.376.121	15.597.629

**7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA
(Lanjutan)**

**7. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES
(Continued)**

d. Berdasarkan jenis dan penerbit (lanjutan)

d. By type and issuer (continue)

1) Sukuk Pemerintah (lanjutan)

1) Government Sukuk (continue)

Sukuk Pemerintah merupakan sukuk yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam rangka pengelolaan portofolio surat utang negara.

Government Sukuk represents sukuk issued by the Republic of Indonesia in connection with the management of Government bonds portfolio.

	Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun/ Average annual revenue sharing rate	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	31 Desember/ December 31,	31 Desember / December 31,
Seri/ Series			2023	2022
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya/ Fair value through other comprehensive income				
Rupiah				
Seri PBS 004	6,10%	15 Pebruari 2037/ February 15, 2037	--	95.060.000
			--	95.060.000
Diukur pada biaya perolehan/ Measured at acquisition cost				
Rupiah				
Seri IFR 006	10,25%	15 Maret 2030/ March 15, 2030	340.127.934	346.627.987
Seri IFR 007	10,25%	15 Januari 2030/ January 15, 2030	19.478.075	19.938.537
Seri IFR 0010	10,00%	15 Februari 2036/ February 15, 2036	403.378.550	408.980.015
Seri PBS 003	6,00%	15 Januari 2027/ January 15, 2027	19.647.888	237.843.205
Seri PBS 004	6,10%	15 Februari 2037/ February 15, 2037	1.244.990.165	987.224.381
Seri PBS 005	6,75%	15 April 2043/ April 15, 2043	255.575.661	261.228.571
Seri PBS 012	8,88%	15 November 2031/ November 15, 2031	1.110.537.764	1.174.982.991
Seri PBS 015	8,00%	15 Juli 2047/ July 15, 2047	--	21.996.056
Seri PBS 017	6,13%	15 Oktober 2025/ October 15, 2025	--	11.386.953
Seri PBS 021	8,50%	15 November 2026/ November 15, 2026	93.247.069	94.093.883
Seri PBS 022	8,62%	15 April 2034/ April 15, 2034	172.163.531	118.040.665
Seri PBS 025	8,38%	15 Mei 2033/ May 15, 2033	631.849.512	637.913.035
Seri PBS 027	6,50%	15 Mei 2023/ May 15, 2023	--	11.532.186
Seri PBS 029	6,38%	15 Maret 2034/ March 15, 2034	638.929.989	995.796.310
Seri PBS 033	6,75%	15 Juni 2047/ June 15, 2047	161.214.709	84.304.833
Seri PBS 034	6,50%	15 Juni 2047/ June 15, 2047	672.824.116	--
Seri PBS 037	6,50%	15 Juni 2047/ June 15, 2047	2.095.104.584	--
Seri SR 016	4,95%	10 Maret 2025/ March 10, 2025	5.000.000	5.000.000
Seri SR 017	5,90%	10 September 2025/ September 10, 2025	500.000	500.000
SIPA03092723	5,90%	2 Oktober 2023/ October 2, 2023	200.000.000	--
SUKBI011124364	6,16%	1 Oktober 2023/ October 1, 2023	48.780.000	--
SUKBI020224182	6,32%	2 Februari 2024/ February 2, 2024	50.000.000	--
SUKBI020824273	6,16%	2 Agustus 2024/ August 8, 2024	50.000.000	--
SUKBI020824364	6,42%	3 Mei 2024/ May 3, 2024	39.682.000	--
SUKBI030124091	6,16%	4 Oktober 2023/ October 4, 2023	50.000.000	--
SUKBI030524273	6,40%	4 Oktober 2023/ October 4, 2023	34.246.000	--
SUKBI050124182	6,31%	5 Januari 2024/ January 5, 2024	50.000.000	--
SUKBI050424273	6,40%	5 April 2024/ April 5, 2024	38.759.000	--
SUKBI050724364	6,41%	5 Juli 2024/ July 5, 2024	41.666.000	--
SUKBI130924364	6,40%	6 Oktober 2023/ October 6, 2023	123.456.000	--
SUKBI140624273	6,39%	6 Oktober 2023/ October 6, 2023	65.359.000	--
SUKBI150224092	6,16%	6 Desember 2023/ December 6, 2023	26.385.000	--
SUKBI150324182	6,30%	8 November 2023/ November 8, 2023	100.000.000	--
SUKBI040123007	5,50%	4 Januari 2023/ January 4, 2023	--	200.000.000
SUKBI110123014	5,76%	11 Januari 2023/ January 11, 2023	--	100.000.000
SUKBI060123007	5,50%	6 Januari 2023/ January 6, 2023	--	250.000.000
SUKBI130123014	5,76%	13 Januari 2023/ January 13, 2023	--	200.000.000
			8.782.902.547	6.167.389.608
Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar				
Seri INDOIS 25	4,33%	28 Mei 2025/ 28 May, 2025	123.163.472	127.294.955
Seri INDOIS 27	4,15%	29 Maret 2027/ 29 March, 2027	123.332.302	125.951.006
Seri INDOIS 31	2,55%	9 Juni 2031/ June 9, 2031	241.065.880	243.015.114
			487.561.654	496.261.075

**7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA
(Lanjutan)**

**7. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES
(Continued)**

d. Berdasarkan jenis dan penerbit (lanjutan)

d. By type and issuer (continued)

2) Sukuk Korporasi

2) Corporate Sukuk

	Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun/ Average annual revenue sharing rate			31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,
Seri / Series		Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat/ Rating	2023	2022
Diukur pada biaya perolehan/ Measured at acquisition cost					
Sukuk PT PPA	1,00%	15 November 2041/ November 15, 2041	idAA	13.051.069.000	13.051.069.000
Sukuk Trust Certificate	--	29 Juni 2038/ June 29, 2038	--	8.000.000.000	8.000.000.000
Efek Beragun Syariah (EBAS) PT SMF	7,00%	30 Oktober 2041/ October 30, 2041	idAAA(sy)	29.839.564	--
Sukuk Samporna Agro Tbk Tahun 2021	8,63%	17 Maret 2024/ March 17, 2024	idA-(sy)	30.000.000	30.000.000
				21.110.908.564	21.081.069.000
Surat Berharga Repo/ Marketable Repo Securities				--	--
Jumlah / Total				30.524.748.886	27.855.377.312

e) Mutasi perubahan cadangan kerugian penurunan nilai investasi pada surat berharga adalah sebagai berikut:

e) Changes in allowance for impairment losses of investment in marketable securities are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal	--	9.975.000	Beginning balance
Pembalikan dalam tahun berjalan (Catatan 36)	--	(9.975.000)	Reversal during the year (Note 36)
Penghapusbukuan	--	--	Write off
Saldo akhir	--	--	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai investasi pada surat berharga adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya investasi pada surat berharga.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that might arise from uncollectible securities held to maturity.

f) Mutasi perubahan laba yang belum direalisasi atas pemilikan investasi pada surat berharga tersedia untuk dijual - bersih:

f) Changes in unrealized gain on increase in value of investments in securities available for sale - net:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo Awal	(1.464.552)	2.003.172	Beginning balance
Perubahan nilai investasi pada surat berharga - neto	1.464.552	(3.467.724)	Change in value of investments in securities - net
Saldo Akhir	--	(1.464.552)	Ending balance

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan)

g) Informasi penting lainnya:

Pada tanggal 9 September 2021, Bank telah melakukan perjanjian untuk melakukan aksi korporasi dalam rangka memperkuat permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan yang dituangkan dalam *Master Restructuring Agreement* ("MRA"). Bank melakukan transaksi pengelolaan aset/*asset sale* dengan PT Perusahaan Pengelola Aset ("PPA") dan penguatan struktur permodalan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji ("BPKH"). MRA tersebut dilanjutkan dengan transaksi penyelesaian aset berkualitas rendah dengan aset produktif (*asset sale*) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021. Transaksi tersebut terdiri dari:

1. Penjualan Piutang dan Pembiayaan;
2. Pembelian Sukuk yang diterbitkan oleh PPA; dan
3. Penerbitan Sukuk oleh Bank Muamalat.

Bank melakukan penjualan terhadap sekumpulan tagihan Piutang & Pembiayaan yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria pemilihan untuk dijual oleh Bank sebagai Kreditur Awal kepada PT AMC Indonesia Sukses ("AMC") selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 15 November 2021. Nilai Penjualan Piutang dan Pembiayaan yang dialihkan kepada AMC adalah sebesar Rp10.000.000.000, dengan harga sebesar nilai pokok kumpulan tagihan portofolio pada tanggal *cut off* final 15 November 2021.

Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kepada pembeli, risiko atas kumpulan tagihan portofolio telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul dari kumpulan tagihan portofolio tersebut.

Pada tanggal 15 November 2021, Bank melakukan pembelian surat berharga dari Cinda International Asset Management Limited berdomisili di Hongkong dengan nilai perolehan sebesar Rp13.051.069.000. Surat berharga yang dibeli tersebut merupakan sukuk yang diterbitkan oleh PT PPA dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pada tanggal 15 November 2021, Bank menerbitkan Sertifikat *Sukuk Mudharabah* sebesar Rp2.440.856.000 kepada PT PPA (lihat catatan 27). *Sukuk Mudharabah* yang diterbitkan oleh Bank tidak melalui penawaran umum (*public offering*) tetapi dilakukan dengan mekanisme penawaran terbatas (*private placement*).

7. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES (Continued)

g) Other significant information is as follows:

On September 9, 2021, the Bank entered into an agreement to take corporate actions in order to strengthen capital and support the Company's business growth as outlined in the Master Restructuring Agreement ("MRA"). The Bank conducted asset management transactions/ *asset sale* with PT Perusahaan Pengelola Aset ("PPA") and strengthening the capital structure by the Haji Financial Management Agency ("BPKH"). The MRA was followed by a settlement transaction of low quality assets with productive assets (*asset sale*) which was carried out on November 15, 2021. The transaction consists of:

1. Sales of Receivables and Financing;
2. Purchase of Sukuk securities which is issued by PPA; and
3. Issuance of Sukuk securities by Bank Muamalat.

The Bank sold certain Receivables & Financing receivables which represent the claims of verified portfolio that meet the eligibility criteria for sale and transfer by the Bank as Initial Creditor to PT AMC Indonesia Sukses ("AMC") as the buyer as stated in the Portfolio Transfer Agreement dated November 15, 2021. Sales value of receivables and financing transferred to AMC is amounting to Rp10,000,000,000 at the face value of the claims of portfolio on the final cut off date November 15, 2021.

Upon the sale and transfer to the buyer, the risk of claims of portfolio is transferred from the Bank to the buyer including any profits and losses that will arise from the claims of portfolio.

On November 15, 2021, the Bank purchased marketable securities from Cinda International Asset Management Limited, domiciled in Hongkong at cost amounting to Rp13,051,069,000. The securities purchased, which were issued by PT PPA, are sukuk with a period of 20 (twenty) years.

On November 15, 2021, Bank issued Certificate of Mudharabah Sukuk amounting to Rp2,440,856,000 to PT PPA (see note 27). The Mudharabah Sukuk was not issued through public offering. It was issued through private placement.

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan)

g) Informasi penting lainnya: (lanjutan)

Pada tanggal 29 Juni 2018, Bank telah melakukan perjanjian pengalihan portofolio atas piutang *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pinjaman *qardh*, Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan aktiva lainnya atas margin piutang *murabahah* serta pendapatan yang akan diterima bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* ("kumpulan tagihan portofolio") yang dimilikinya. Dalam rangka penyehatan Bank, selanjutnya atas kumpulan tagihan portofolio yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria pemilihan untuk dijual dan dialihkan oleh Bank sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke Tameer Sukuk SPC Limited selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 29 Juni 2018.

Nilai pokok kumpulan tagihan portofolio yang dijual dan dialihkan tersebut yang merupakan kumpulan tagihan portofolio yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria pemilihan untuk dijual dan dialihkan dalam mata uang US Dolar sebesar USD423.639.060 (dalam angka penuh) atau senilai Rp6.000.000.000 (1 Dolar AS = Rp14.163) dengan harga sebesar nilai pokok kumpulan tagihan portofolio pada tanggal *cut off* final (29 Juni 2018).

Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kepada pembeli, risiko atas kumpulan tagihan portofolio telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul dari kumpulan tagihan portofolio tersebut.

Pada tanggal 29 Juni 2018, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menerbitkan Sertifikat *Sukuk Mudharabah* sebesar Rp1.600.000.000 kepada Mawthiq SPC Limited (lihat catatan 27). *Sukuk Mudharabah* yang diterbitkan oleh Bank tidak melalui penawaran umum (*public offering*) tetapi dilakukan dengan mekanisme penawaran terbatas (*private placement*).

Pada tanggal 29 Juni 2018, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk melakukan pembelian Sukuk Trust Certificate yang diterbitkan oleh Najah Sukuk SPC limited berdomisili di Uni Emirat Arab dalam mata uang US Dollar sebesar USD564.852.079 (dalam angka penuh) senilai Rp8.000.000.000 (1 Dolar AS = Rp14.163). Surat berharga tersebut dengan nama Najah Sukuk 2018-001 Trust Certificate. Portofolio dari Najah Sukuk 2018-001 Trust Certificate terdiri dari Surat Berharga Negara Indonesia dengan jangka waktu rata-rata 20 (dua puluh) tahun.

Seluruh investasi pada surat berharga pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dikelompokkan lancar.

7. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES (Continued)

g) Other significant information is as follows: (continued)

On June 29, 2018, the Bank entered into a portfolio transfer agreement for *murabahah* receivables, *mudharabah* financing, *musyarakah* financing, funds of *qardh*, foreclosed assets and other assets on the *murabahah* receivable margin and the revenue to be received for *mudharabah* and *musyarakah* ("claims of portfolio") held. Subsequently, for the purpose of Bank restructuring, the claims of verified portfolio meeting the eligibility criteria for sale and transfer by the Bank as the Original Creditor have been sold and transferred to Tameer Sukuk SPC Limited as the buyer as stipulated in the Portfolio Transfer Agreement dated June 29, 2018.

The principal amount of the claims of portfolio sold and transferred, which represent the claims of verified portfolio that meet the eligibility criteria for sale and transfer, is USD423,639,060 (in full amount) or equivalent to Rp6,000,000,000 (1 US Dollar = Rp14,163) at the face value of the claims of portfolio on the final cut off date (June 29, 2018).

Upon the sale and transfer to the buyer, the risk of claims of portfolio is transferred from the Bank to the buyer including any profits and losses that will arise from the claims of portfolio.

On June 29, 2018, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk issued Certificate of *Mudharabah Sukuk* amounting to Rp1,600,000,000 to Mawthiq SPC Limited (see note 27). The *Mudharabah Sukuk* was not issued through public offering. It was issued through private placement.

On June 29, 2018, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk purchased Sukuk Trust Certificate issued by Najah Sukuk SPC limited, domiciled in the United Arab Emirates amounting to USD564,852,079 (in full amount) or equivalent to Rp8,000,000,000 (1 US Dollar = Rp14,163). The securities are under the name Najah Sukuk 2018-001 Trust Certificate. The securities are in the form of sukuk consisting of Government Securities with an average period of 20 (twenty) years.

All investments in securities as of December 31, 2023 and 2022 are classified as current.

8. PIUTANG

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Murabahah Rupiah		
Lancar	3.790.096.209	4.586.524.672
Dalam perhatian khusus	1.428.615.852	1.329.100.606
Kurang lancar	6.215.869	9.753.044
Diragukan	4.467.493	12.453.534
Macet	249.155.416	262.493.285
	<u>5.478.550.839</u>	<u>6.200.325.141</u>
Mata uang asing		
Lancar	--	272.529.450
Dalam perhatian khusus	373.063.359	222.298.124
	<u>373.063.359</u>	<u>494.827.574</u>
Jumlah	5.851.614.198	6.695.152.715
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(226.045.419)</u>	<u>(310.980.496)</u>
Bersih - Murahabah	<u>5.625.568.779</u>	<u>6.384.172.219</u>
Istishna Rupiah		
Lancar	1.241.639	1.331.762
Mata uang asing		
Lancar	--	--
Jumlah	<u>1.241.639</u>	<u>1.331.762</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(12.420)</u>	<u>(16.392)</u>
Bersih - Istishna	<u>1.229.219</u>	<u>1.315.370</u>
Piutang Ijarah Rupiah		
Dalam perhatian khusus	--	--
Kurang lancar	--	--
Macet	1.069.847	1.064.955
Mata uang asing		
Macet	--	--
Jumlah	<u>1.069.847</u>	<u>1.064.955</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(1.048.119)</u>	<u>(1.064.955)</u>
Bersih - Ijarah	<u>21.728</u>	<u>--</u>
Jumlah	<u>5.853.925.684</u>	<u>6.697.549.432</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(227.105.958)</u>	<u>(312.061.843)</u>
Bersih	<u>5.626.819.726</u>	<u>6.385.487.589</u>

8. RECEIVABLES

a. By type, currencies and collectibility:

Murabahah Rupiah	
Current	
Special Mention	
Substandard	
Doubtful	
Loss	
Foreign currency	
Current	
Special Mention	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net - Murahabah	
Istishna Rupiah	
Current	
Foreign currency	
Current	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net - Istishna	
Ijarah Receivables Rupiah	
Special Mention	
Substandard	
Loss	
Foreign currency	
Loss	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net - Ijarah	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net	

8. PIUTANG (Lanjutan)

8. RECEIVABLES (Continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi:

b. By economic sector:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pihak ketiga		
Industri	1.154.850.729	1.278.696.469
Sosial/masyarakat	984.781.495	1.160.461.674
Perdagangan	696.698.454	742.843.810
Pengangkutan	315.652.673	454.719.603
Listrik, gas dan air	325.706.943	417.270.698
Pertanian	201.426.713	321.097.277
Konstruksi	293.808.526	274.604.179
Jasa usaha	139.446.189	187.507.291
Pertambangan	35.876.828	39.619.183
Lainnya	1.698.040.805	1.817.794.810
	<u>5.846.289.355</u>	<u>6.694.614.994</u>
Pihak berelasi (Catatan 41)		
Lainnya	7.636.329	2.934.438
	<u>7.636.329</u>	<u>2.934.438</u>
Jumlah	5.853.925.684	6.697.549.432
Cadangan kerugian penurunan nilai	(227.105.958)	(312.061.843)
Bersih	5.626.819.726	6.385.487.589

Third parties
Manufacturing
Social/public
Trading
Transportation
Electricity, gas and water
Agriculture
Construction
Business services
Mining
Others

Related parties (Note 41)
Others

Total
Allowance for impairment
losses

Net

c. Berdasarkan jangka waktu:

c. By maturity:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pihak ketiga		
Rupiah		
≤ 1 tahun	1.473.349.746	1.782.310.351
≥ 1 - ≤ 2 tahun	396.854.025	404.140.499
> 2 - ≤ 5 tahun	1.041.556.260	1.044.457.112
> 5 tahun	2.934.529.324	3.463.707.032
	<u>5.846.289.355</u>	<u>6.694.614.994</u>
Pihak berelasi (Catatan 41)		
≤ 1 tahun	418.174	--
≥ 1 - ≤ 2 tahun	891.921	29.883
> 2 - ≤ 5 tahun	2.798.970	795.912
> 5 tahun	3.527.264	2.108.643
	<u>7.636.329</u>	<u>2.934.438</u>
Jumlah	5.853.925.684	6.697.549.432
Cadangan kerugian penurunan nilai	(227.105.958)	(312.061.843)
Bersih	5.626.819.726	6.385.487.589

Third parties
Rupiah
≤ 1 year
≥ 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 years
> 5 years

Related parties (Note 41)

≥ 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 years
> 5 years

Total
Allowance for impairment
losses

Net

8. PIUTANG (Lanjutan)

8. RECEIVABLES (Continued)

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

d. By remaining period to maturity:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak ketiga Rupiah			Third parties Rupiah
≤ 1 tahun	2.097.725.535	2.485.012.809	≤ 1 year
≥ 1 - ≤ 2 tahun	520.566.456	427.164.967	≥ 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 tahun	1.457.685.861	1.848.964.815	> 2 - ≤ 5 years
> 5 tahun	1.770.311.503	1.933.472.403	> 5 years
	<u>5.846.289.355</u>	<u>6.694.614.994</u>	
Pihak berelasi (Catatan 41) Rupiah			Related parties (Note 41) Rupiah
≤ 1 tahun	467.487	72.274	≤ 1 year
≥ 1 - ≤ 2 tahun	1.286.291	198.852	≥ 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 tahun	2.958.090	2.545.202	> 2 - ≤ 5 years
> 5 tahun	2.924.461	118.110	> 5 years
	<u>7.636.329</u>	<u>2.934.438</u>	
Jumlah	5.853.925.684	6.697.549.432	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(227.105.958)</u>	<u>(312.061.843)</u>	Total Allowance for impairment losses
Bersih	5.626.819.726	6.385.487.589	Net

e. Berdasarkan keterkaitan:

e. By relationship:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak ketiga	5.846.289.355	6.694.614.994	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 41)			Related parties (Note 41)
Karyawan Kunci	<u>7.636.329</u>	<u>2.934.438</u>	Key Employees
	<u>7.636.329</u>	<u>2.934.438</u>	
Jumlah	5.853.925.684	6.697.549.432	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(227.105.958)</u>	<u>(312.061.843)</u>	Total Allowance for impairment losses
Bersih	5.626.819.726	6.385.487.589	Net

f. Tingkat margin rata-rata per tahun:

f. Average profit margin rates per annum:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah	11,04%	11,09%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	7,22%	6,03%	United States Dollar

8. PIUTANG (Lanjutan)

g. Rincian piutang bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pengangkutan	198.220.517	226.192.000
Industri	17.887.507	17.887.507
Sosial/masyarakat	5.880.555	1.378.615
Pertanian	7.204.368	6.977.122
Perdagangan	902.672	323.004
Jasa Usaha	--	9.440.000
Pertambangan	1.767.778	--
Lainnya	27.987.580	23.582.355
Jumlah	259.850.977	285.780.603
Cadangan kerugian penurunan nilai	(175.500.216)	(196.797.718)
Bersih	84.350.761	88.982.885

h. Informasi penting lainnya:

Pada tanggal 15 November 2021, Bank telah melakukan transaksi penyelesaian aset berkualitas rendah dengan aset produktif (*asset sale*). Transaksi *asset sale* telah dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 salah satunya berupa penjualan piutang dan pembiayaan. Dalam rangka penyehatan Bank, selanjutnya atas kumpulan tagihan portofolio yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria pemilihan untuk dijual dan dialihkan oleh Bank sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke PT AMC Indonesia Sukses selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 15 November 2021.

Nilai pokok piutang *murabahah* yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp3.884.897.030 yang terdiri dari 1.500 nasabah dengan harga sebesar nilai pokok piutang *murabahah* pada tanggal *cut off* final (15 November 2021). Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan piutang *murabahah* tersebut, risiko telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul.

Pada tanggal 29 Juni 2018, Bank telah melakukan perjanjian pengalihan portofolio atas piutang *murabahah* (lihat catatan 7). Selanjutnya atas piutang *murabahah* dan margin *murabahah* yang telah memenuhi kriteria pemilihan dijual dan dialihkan oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, ke Tameer Sukuk SPC Limited selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 29 Juni 2018.

8. RECEIVABLES (Continued)

g. Non-performing receivables by economic sector are as follows:

Transportation
Manufacturing
Social/public
Agriculture
Trading
Business Services
Construction
Others
Total
Allowance for impairment losses
Net

h. Other significant information is as follows:

On November 15, 2021, the Bank entered into a settlement transaction for low quality assets with earning assets (*asset sale*). The *asset sale* transactions were carried out on November 15, 2021, and one of which was in the form of sale of receivables and financing. In the context of restructuring the Bank, the collection of portfolio claims that have been verified and meeting the eligibility criteria to be sold and transferred by the Bank as the Initial Creditor were then sold and transferred to PT AMC Indonesia Sukses as the buyer as stated in the Portfolio Transfer Agreement dated November 15, 2021.

The principal amount of the *murabahah* receivables sold and transferred is Rp3,884,897,030, consisting of 1,500 debtors at a price equal to the principal amount of the *murabahah* receivables on the final cut off date (November 15, 2021). Upon the sale and transfer of such *murabahah* receivables, the risk is transferred from the Bank to the buyer, including any profits and losses that will arise.

On June 29, 2018, the Bank entered into a portfolio transfer agreement on *murabahah* receivables (see note 7). Subsequently, the *murabahah* receivables and *murabahah* margin meeting the eligibility criteria are sold and transferred by the Bank, as the Original Creditor, to Tameer Sukuk SPC Limited as the buyer as stated in the Portfolio Transfer Agreement dated June 29, 2018.

8. PIUTANG (Lanjutan)

h. Informasi penting lainnya: (lanjutan)

Nilai pokok piutang *murabahah* dan margin *murabahah* yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp1.550.228.145 yang terdiri dari 2.997 nasabah dengan harga sebesar nilai pokok piutang *murabahah* pada tanggal *cut off* final (29 Juni 2018). Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan piutang *murabahah* tersebut, risiko telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul.

Jumlah piutang yang direstrukturisasi Bank sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp93.800.669 dan Rp2.247.186.256. Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan piutang dan penjadwalan kembali pembayaran yang tertunggak.

Piutang sindikasi merupakan piutang yang diberikan kepada debitur dibawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Jumlah piutang sindikasi yang diberikan Bank adalah sebesar Rp172.991.053 dan Rp173.079.872. masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Keikutsertaan Bank sebagai pimpinan sindikasi sebesar 63,33% pada tanggal 31 Desember 2023 dan sebesar 0,80% sampai dengan 63,33% pada tanggal 31 Desember 2022.

Dalam laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) per tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 kepada OJK, Bank tidak memiliki debitur, baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPD.

Piutang dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (catatan 27) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

Tabel *Non-Performing Financing (NPF)* bruto dan neto atas jumlah piutang adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023
NPF - bruto	259.850.977
Persentase NPF - bruto	4,44%
NPF - neto	84.350.761
Persentase NPF - neto	1,44%

8. RECEIVABLES (Continued)

h. Other significant information is as follows: (continued)

The principal amount of the *murabahah* receivables and *murabahah* margin sold and transferred is Rp1,550,228,145, consisting of 2,997 debtors at a price equal to the principal amount of the *murabahah* receivables on the final cut off date (June 29, 2018). Upon the sale and transfer of such *murabahah* receivables, the risk is transferred from the Bank to the buyer, including any profits and losses that will arise.

Receivables that have been restructured by the Bank as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp93.800.669 and Rp2,247,186,256, respectively. Restructuring scheme generally involves extension of the receivables maturity date and rescheduling of overdue payment.

Syndicated receivables represent financing provided to debtors under syndication agreements with other banks. The total amount of syndicated receivables provided by the Bank amounted to Rp172,991,053 and Rp173,079,872 as of December 31, 2023 and December 31, 2022, respectively. The Bank's participation as a leader in the syndicated receivables is 63.33% as of December 31, 2023 and 0.80% to 63.33% as of December 31, 2022.

In its report on Legal Lending Limit (LLL) to FSA as of December 31, 2023 and 2022, the Bank indicated that there is no debtor, either related party or third party, who did not comply with or who has exceeded the LLL.

Receivables are guaranteed with registered mortgages or power of attorney to mortgage and sell, *mudharabah* time deposits (note 27) or other collaterals generally accepted by the Bank.

The table of total gross and net *Non-Performing Financing (NPF)* on receivables is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	
NPF - bruto	285.780.603	NPF - gross
Persentase NPF - bruto	4,27%	Percentage of NPF - gross
NPF - neto	88.982.885	NPF - net
Persentase NPF - neto	1,33%	Percentage of NPF - net

8. PIUTANG (Lanjutan)

h. Informasi penting lainnya: (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal tahun	312.061.843
Penyisihan (pembalikan) tahun berjalan (Catatan 36)	(91.808.252)
Penerimaan piutang yang telah dihapusbukukan	6.593.377
Selisih kurs penjabaran	258.990
Saldo akhir tahun	227.105.958

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang tersebut.

8. RECEIVABLES (Continued)

h. Other significant information is as follows: (continued)

Changes in allowance for impairment losses on receivables are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	
	223.395.760	Balance at the beginning of the year
	78.856.065	Provision (reversal) during the year (Note 36)
	11.637.717	Recovery of written-off receivables
	(1.827.699)	Exchange rate differences
312.061.843		Balance at the end of the year

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses that might arise from uncollectible receivables.

9. PINJAMAN QARDH

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas:

	31 Desember/ December 31, 2023
Rupiah	
Lancar	336.070.847
Dalam perhatian khusus	59.751.975
Kurang lancar	1.657.219
Diragukan	900.971
Macet	79.236.174
	477.617.186
Mata uang asing	
Lancar	155.987.235
	140.032.780
Jumlah	633.604.421
Cadangan kerugian penurunan nilai	(62.110.112)
Bersih	571.494.309

9. FUNDS OF QARDH

a. By type and collectibility:

	31 Desember/ December 31, 2022	
	584.017.195	Rupiah
	61.655.296	Current
	1.554.888	Special Mention
	187.958	Substandard
	77.530.154	Doubtful
	724.945.491	Loss
		Foreign Currency
	140.032.780	Current
864.978.271		Total
833.248.617		Allowance for impairment losses
		Net

9. PINJAMAN QARDH (Lanjutan)

9. FUNDS OF QARDH (Continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi:

b. By economic sector:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak ketiga			Third parties
Jasa usaha	43.553.727	263.707.079	Business services
Perdagangan	259.084.149	282.405.339	Trading
Industri	53.769.861	54.426.763	Manufacturing
Sosial/masyarakat	2.851.110	--	Social/public
Lainnya	273.996.967	264.066.876	Others
	<u>633.255.814</u>	<u>864.606.057</u>	
Pihak berelasi (Catatan 41)			Related parties (Note 41)
Lainnya	348.607	372.214	Others
	<u>348.607</u>	<u>372.214</u>	
Jumlah	633.604.421	864.978.271	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(62.110.112)	(31.729.654)	Allowance for impairment losses
Bersih	571.494.309	833.248.617	Net

c. Berdasarkan jangka waktu:

c. By maturity:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak ketiga Rupiah			Third parties Rupiah
≤ 1 tahun	257.859.041	503.326.883	≤ 1 year
≥ 1 - ≤ 2 tahun	59.845.298	44.708.150	≥ 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 tahun	268.141.207	268.760.200	> 2 - ≤ 5 years
> 5 tahun	47.410.268	47.810.824	> 5 years
	<u>633.255.814</u>	<u>864.606.057</u>	
Pihak berelasi (Catatan 41)			Related parties (Note 41)
≤ 1 tahun	--	--	≤ 1 year
≥ 2 - ≤ 5 tahun	9.117	105.511	≥ 2 - ≤ 5 years
> 5 tahun	339.490	266.703	> 5 year
	<u>348.607</u>	<u>372.214</u>	
Jumlah	633.604.421	864.978.271	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(62.110.112)	(31.729.654)	Allowance for impairment losses
Bersih	571.494.309	833.248.617	Net

9. PINJAMAN QARDH (Lanjutan)

9. FUNDS OF QARDH (Continued)

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

d. By remaining period to maturity:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pihak ketiga Rupiah		
≤ 1 tahun	349.666.655	557.093.332
≥ 1 - ≤ 2 tahun	97.044.292	43.534.180
> 2 - ≤ 5 tahun	182.275.005	215.901.017
> 5 tahun	4.269.862	48.077.528
	633.255.814	864.606.057
Pihak berelasi (Catatan 41)		
≤ 1 tahun	32.504	8.609
≥ 1 - ≤ 2 tahun	9.995	34.542
> 2 - ≤ 5 tahun	306.108	329.063
	348.607	372.214
Jumlah	633.604.421	864.978.271
Cadangan kerugian penurunan nilai	(62.110.112)	(31.729.654)
Bersih	571.494.309	833.248.617

**Third parties
Rupiah**
≤ 1 year
≥ 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 years
> 5 years

Related parties (Note 41)
≤ 1 Year
≥ 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 years

Total
Allowance for impairment
losses
Net

e. Berdasarkan keterkaitan:

e. By relationship:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pihak ketiga	633.255.814	864.606.057
Pihak berelasi (Catatan 41)		
Karyawan kunci	348.607	372.214
Jumlah	633.604.421	864.978.271
Cadangan kerugian penurunan nilai	(62.110.112)	(31.729.654)
Bersih	571.494.309	833.248.617

Third parties

Related parties (Note 41)
Key employees
Total
Allowance for impairment
losses
Net

f. Rincian pinjaman *qardh* bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

f. Non-performing funds of *qardh* by economic sector are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Perdagangan	77.447.500	77.447.500
Lainnya	4.308.549	1.825.500
Jumlah	81.756.049	79.273.000
Cadangan kerugian penurunan nilai	(56.803.250)	(20.469.528)
Bersih	24.952.799	58.803.472

Trading
Others
Total
Allowance for impairment
losses
Net

9. PINJAMAN QARDH (Lanjutan)

g. Informasi penting lainnya:

Tabel *Non-Performing Financing* (NPF) bruto dan neto atas jumlah pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023
NPF - bruto	81.756.049
Persentase NPF - bruto	12,90%
NPF - netto	24.952.799
Persentase NPF - netto	3,94%

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal tahun	31.729.654
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 36)	30.300.008
Penerimaan pinjaman yang telah dihapusbukukan	106.870
Penghapusbukuan	--
Selisih Kurs Penjabaran	(26.420)
Saldo akhir tahun	62.110.112

Pada tanggal 15 November 2021, Bank telah melakukan transaksi penyelesaian aset berkualitas rendah dengan aset produktif (*asset sale*). Transaksi *asset sale* telah dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 salah satunya berupa penjualan pinjaman *qardh*. Dalam rangka penyehatan Bank, selanjutnya atas kumpulan tagihan portofolio yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria pemilihan untuk dijual dan dialihkan oleh Bank sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke PT AMC Indonesia Sukses selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 15 November 2021.

Nilai pokok pinjaman *qardh* yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp354.979.768 yang terdiri dari 12 nasabah dengan harga sebesar nilai pokok pinjaman *qardh* pada tanggal *cut off final* (15 November 2021). Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan pinjaman *qardh* tersebut, risiko telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul.

9. FUNDS OF QARDH (Continued)

g. Others significant information is as follows:

The table of total gross and net *Non-Performing Financing* (NPF) on funds of *qardh* is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	
NPF - bruto	79.273.000	NPF - gross
Persentase NPF - bruto	9,16%	Percentage of NPF - gross
NPF - netto	58.803.472	NPF - net
Persentase NPF - netto	6,80%	Percentage of NPF - net

Changes in allowance for impairment losses on funds of *qardh* are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal tahun	17.004.265	Balance at the beginning of the year
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 36)	14.420.869	Provision during the year (Note 36)
Penerimaan pinjaman yang telah dihapusbukukan	100.468	Recovery of written-off
Penghapusbukuan	--	Written-off
Selisih Kurs Penjabaran	204.052	Exchange rate differences
Saldo akhir tahun	31.729.654	Balance at the end of the year

On November 15, 2021, the Bank entered into a settlement transaction for low quality assets with earning assets (*asset sale*). The *asset sale* transactions were carried out on November 15, 2021, and one of which was in the form of sale of funds of *qardh*. In the context of restructuring the Bank, the collection of portfolio claims that have been verified and meeting the eligibility criteria to be sold and transferred by the Bank as the Initial Creditor were then sold and transferred to PT AMC Indonesia Sukses as the buyer as stated in the Portfolio Transfer Agreement dated November 15, 2021.

The principal amount of the funds of *qardh* sold and transferred is Rp354,979,768 consisting of 12 debtors at a price equal to the principal amount of funds of *qardh* on the final cut off date (November 15, 2021). Upon the sale and transfer of the funds of *qardh*, the risk is transferred from the Bank to the buyer, including any profits and losses that will arise.

9. PINJAMAN QARDH (Lanjutan)

g. Informasi penting lainnya: (lanjutan)

Pada tanggal 29 Juni 2018, Bank telah melakukan perjanjian pengalihan portofolio atas pinjaman *qardh* (lihat catatan 7). Selanjutnya atas pinjaman *qardh* yang telah memenuhi kriteria pemilihan dijual dan dialihkan oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, ke Tameer Sukuk SPC Limited selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 29 Juni 2018.

Nilai pokok pinjaman *qardh* yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp74.234.774 yang terdiri dari 719 nasabah dengan harga sebesar nilai pokok pinjaman *qardh* pada tanggal *cut off* final (29 Juni 2018). Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan pinjaman *qardh* tersebut, risiko telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul.

Dalam laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 kepada Bank Indonesia, Bank tidak memiliki debitur, baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPD.

Jumlah pinjaman *qardh* yang direstrukturisasi Bank sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Nihil dan Rp99.000.000. Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan pinjaman dan penjadwalan kembali pembayaran yang tertunggak.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pinjaman *qardh* tersebut.

9. FUNDS OF QARDH (Continued)

g. Other significant information is as follows: (continued)

On June 29, 2018, the Bank entered into a portfolio transfer agreement on funds of *qardh* (see note 7). Subsequently, funds of *qardh* meeting the eligibility criteria are sold and transferred by the Bank, as the Original Creditor, to Tameer Sukuk SPC Limited as the buyer as stated in the Portfolio Transfer Agreement dated June 29, 2018.

The principal amount of the funds of *qardh* sold and transferred is Rp74,234,774 consisting of 719 debtors at a price equal to the principal amount of funds of *qardh* on the final cut off date (June 29, 2018). Upon the sale and transfer of the funds of *qardh*, the risk is transferred from the Bank to the buyer, including any profits and losses that will arise.

In its report on Legal Lending Limit (LLL) to Bank Indonesia as of December 31, 2023 and 2022, the Bank indicated that there is no debtor, either related party or third party, who did not comply with or who has exceeded the LLL.

Funds of *Qardh* that have been restructured by the Bank as of December 31, 2023 and 2022, amounted to Nil and Rp99,000,000, respectively. Restructuring scheme generally involves extension of the funds maturity date and rescheduling of overdue payment.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses that might arise from uncollectible funds of *qardh*.

10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH

a. Berdasarkan jenis kolektibilitas dan mata uang:

	31 Desember/ December 31, 2023
Rupiah	
Lancar	591.521.381
Dalam perhatian khusus	--
Kurang Lancar	153.994
Macet	2.177.794
Jumlah	593.853.169
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.117.780)
Bersih	585.735.389

10. MUDHARABAH FINANCING

a. By collectibility and currencies:

	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah		
Current	560.830.002	
Special mention	1.051.170	
Substandard	--	
Loss	2.177.795	
Total	564.058.967	
Allowance for impairment losses	(7.015.074)	
Net	557.043.893	

10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Lanjutan)

10. MUDHARABAH FINANCING (Continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi:

b. By economic sector:

	31 Desember/ December 31, 2023
Pihak ketiga	
Jasa usaha	588.406.199
Sosial/masyarakat	1.251.706
Pertambangan	--
Konstruksi	--
Lainnya	4.195.264
Jumlah	593.853.169
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.117.780)
Bersih	585.735.389

	31 Desember/ December 31, 2022
	528.686.809
	336.018
	1.966.171
	201.624
	32.868.345
Jumlah	564.058.967
	(7.015.074)
Bersih	557.043.893

Third parties
Business services
Social/public
Mining
Construction
Others
Total
Allowance for impairment losses
Net

c. Berdasarkan jangka waktu:

c. By maturity:

	31 Desember/ December 31, 2023
Pihak ketiga	
Rupiah	
≤ 1 tahun	84.522.250
≥ 1 - ≤ 2 tahun	149.200.735
> 2 - ≤ 5 tahun	216.181.731
> 5 tahun	143.948.453
Jumlah	593.853.169
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.117.780)
Bersih	585.735.389

	31 Desember/ December 31, 2022
	92.178.707
	240.433.383
	131.238.686
	100.208.191
Jumlah	564.058.967
	(7.015.074)
Bersih	557.043.893

Third parties
Rupiah
≤ 1 year
≥ 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 years
> 5 years
Total
Allowance for impairment losses
Net

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

d. By remaining period to maturity:

	31 Desember/ December 31, 2023
Pihak ketiga	
≤ 1 tahun	275.580.521
≥ 1 - ≤ 2 tahun	23.799.155
> 2 - ≤ 5 tahun	181.970.206
> 5 tahun	112.503.287
Jumlah	593.853.169
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.117.780)
Bersih	585.735.389

	31 Desember/ December 31, 2022
	346.516.507
	74.794.152
	82.628.541
	60.119.767
Jumlah	564.058.967
	(7.015.074)
Bersih	557.043.893

Third parties
≤ 1 year
≥ 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 years
> 5 years
Total
Allowance for impairment losses
Net

e. Berdasarkan keterkaitan:

e. By relationship:

	31 Desember/ December 31, 2023
Pihak ketiga	593.853.169
Pihak berelasi (Catatan 41)	--
Jumlah	593.853.169
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.117.780)
Bersih	585.735.389

	31 Desember/ December 31, 2022
	564.058.967
	--
Jumlah	564.058.967
	(7.015.074)
Bersih	557.043.893

Third parties
Related parties (Note 41)
Total
Allowance for impairment losses
Net

10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Lanjutan)

- f. Rincian pembiayaan *mudharabah* bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023
Jasa usaha	2.177.795
Sosial/Masyarakat	153.994
Jumlah	2.331.789
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.200.894)
Bersih	130.895

- g. Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun:

	31 Desember/ December 31, 2023
Rupiah	9,95%

- h. Informasi penting lainnya:

Jumlah pembiayaan yang telah direstrukturisasi Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Nihil.

Pembiayaan sindikasi merupakan pembiayaan yang diberikan kepada debitur dibawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank bank lain. Tidak terdapat pembiayaan *mudharabah* sindikasi kepada debitur masing masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Pada tanggal 15 November 2021, Bank telah melakukan transaksi penyelesaian aset berkualitas rendah dengan aset produktif (*asset sale*). Transaksi *asset sale* telah dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 salah satunya berupa penjualan pembiayaan *mudharabah*. Dalam rangka penyehatan Bank, selanjutnya atas kumpulan tagihan portofolio yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria pemilihan untuk dijual dan dialihkan oleh Bank sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke PT AMC Indonesia Sukses selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 15 November 2021.

10. MUDHARABAH FINANCING (Continued)

- f. Non-performing *mudharabah* financing by economic sector is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	
	2.177.795	<i>Business services</i>
	--	<i>Social/public</i>
Total	2.177.795	Total
	(710.288)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Net	1.467.507	Net

- g. Average revenue sharing rates per annum:

	31 Desember/ December 31, 2022	
	10,21%	<i>Rupiah</i>

- h. Other significant information is as follows:

Financing that has been restructured by the Bank as of December 31, 2023 and 2022, is amounting to nil, respectively.

Syndicated financing represents financing provided to debtors under syndication agreements with other banks. There was no syndicated *mudharabah* financing to debtors as of December 31, 2023 and December 31, 2022.

On November 15, 2021, the Bank entered into a settlement transaction for low quality assets with earning assets (*asset sale*). The *asset sale* transactions were carried out on November 15, 2021, and one of which was in the form of sale of *mudharabah* financing. In the context of restructuring the Bank, the collection of portfolio claims that have been verified and meeting the eligibility criteria to be sold and transferred by the Bank as the Initial Creditor were then sold and transferred to PT AMC Indonesia Sukses as the buyer as stated in the Portfolio Transfer Agreement dated November 15, 2021.

10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Lanjutan)

10. MUDHARABAH FINANCING (Continued)

h. Informasi penting lainnya: (lanjutan)

Nilai pokok pembiayaan *mudharabah* yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp10.392.436 yang terdiri dari 9 nasabah dengan harga sebesar nilai pokok pembiayaan *mudharabah* pada tanggal *cut off* final (15 November 2021). Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan pembiayaan *mudharabah* tersebut, risiko telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul.

Pada tanggal 29 Juni 2018, Bank telah melakukan perjanjian pengalihan portofolio atas pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan yang akan diterima bagi hasil *mudharabah* (lihat catatan 7). Selanjutnya atas pembiayaan *mudharabah* yang telah memenuhi kriteria pemilihan untuk dijual dan dialihkan oleh Bank, sebagai Kreditur Awal ke Tameer Sukuk SPC Limited selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 29 Juni 2018.

Nilai pokok pembiayaan *mudharabah* yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp184.556.210 yang terdiri dari 121 nasabah dengan harga sebesar nilai pokok pembiayaan *mudharabah* pada tanggal *cut off* final (29 Juni 2018). Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan pembiayaan *mudharabah* tersebut, risiko telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul.

Dalam laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) per tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 kepada OJK/Bank Indonesia, Bank tidak memiliki debitur baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPD.

Tabel *Non-Performing Financing* (NPF) bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023
NPF - bruto	2.331.789
Persentase NPF - bruto	0,39%
NPF - neto	2.200.894
Persentase NPF - neto	0,02%

h. Other significant information is as follows: (continued)

The principal amount of the *mudharabah* financing sold and transferred is Rp10,392,436, consisting of 9 debtors at a price equal to the principal amount of *mudharabah* financing on the final cut off date (November 15, 2021). Upon the sale and transfer of such *mudharabah* financing, the risk is transferred from the Bank to the buyer, including any profits and losses that will arise.

On June 29, 2018, the Bank entered into a portfolio transfer agreement on *mudharabah* financing and revenue to be received for *mudharabah* revenue sharing (see note 7). Subsequently, the *mudharabah* financing meeting the eligibility criteria is sold and transferred by the Bank, as the Original Creditor, to Tameer Sukuk SPC Limited as the buyer as stated in the Portfolio Transfer Agreement dated June 29, 2018.

The principal amount of the *mudharabah* financing sold and transferred is Rp184,556,210, consisting of 121 debtors at a price equal to the principal amount of *mudharabah* financing on the final cut off date (June 29, 2018). Upon the sale and transfer of such *mudharabah* financing, the risk is transferred from the Bank to the buyer, including any profits and losses that will arise.

In its report on Legal Lending Limit (LLL) to the Financial Services Authority/ Bank Indonesia as of December 31, 2023 and 2022, the Bank indicated that there is no debtor, either related party or not related party, who did not comply with or who has exceeded the Legal Lending Limit (LLL).

The table of total gross and net *Non-Performing Financing* (NPF) on *mudharabah* financing is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	
NPF - gross	2.177.795	NPF - gross
Percentage of NPF - gross	0,39%	Percentage of NPF - gross
NPF - net	1.467.507	NPF - net
Percentage of NPF - net	0,39%	Percentage of NPF - net

10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Lanjutan)

h. Informasi penting lainnya: (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal tahun	7.015.074
Penyisihan (pembalikan) tahun berjalan (Catatan 36)	978.448
Penerimaan pinjaman yang telah dihapusbukukan	124.258
Saldo akhir tahun	8.117.780

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan tersebut.

10. MUDHARABAH FINANCING (Continued)

h. Other significant information is as follows: (continued)

Changes in allowance for impairment losses on *mudharabah* financing are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	
	9.105.453	Balance at the beginning of the year
	(2.664.280)	Provision (reversal) during the year (Note 36)
	573.901	Recovery of written-off loans
	7.015.074	Balance at the end of the year

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that might arise from uncollectible financing.

11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

a. Berdasarkan jenis kolektibilitas dan mata uang:

	31 Desember/ December 31, 2023
Rupiah	
Lancar	10.882.106.604
Dalam perhatian khusus	1.623.779.851
Kurang lancar	3.832.943
Diragukan	8.902.547
Macet	104.937.638
	<u>12.623.559.583</u>
Mata uang asing	
Lancar	2.697.696.700
Dalam perhatian khusus	60.264.060
	<u>2.757.960.760</u>
Jumlah	15.381.520.343
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(225.318.307)</u>
Bersih	15.156.202.036

11. MUSYARAKAH FINANCING

a. By collectibility and currencies:

	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah		Rupiah
	8.779.244.023	Current
	909.370.739	Special mention
	2.089.463	Substandard
	40.469.785	Doubtful
	111.683.583	Loss
	<u>9.842.857.593</u>	
Foreign currencies		Foreign currencies
	707.160.665	Current
	144.827.877	Special mention
	<u>851.988.542</u>	
Total	10.694.846.135	Total
Allowance for impairment losses	<u>(278.732.187)</u>	Allowance for impairment losses
Net	10.416.113.948	Net

11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Lanjutan)

11. MUSYARAKAH FINANCING (Continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi:

b. By economic sector:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak ketiga			Third parties
Pengangkutan	2.923.317.944	920.649.324	Transportation
Jasa usaha	2.349.804.493	2.348.992.591	Business services
Industri	1.861.686.132	1.291.734.536	Manufacturing
Perdagangan	1.513.086.979	1.204.070.125	Trading
Sosial/masyarakat	1.302.175.194	1.096.879.315	Social/public
Listrik, gas dan air	1.758.781.959	1.003.580.696	Electricity, gas and water
Pertambangan	1.311.160.545	584.955.907	Mining
Konstruksi	668.809.596	582.779.331	Construction
Pertanian	231.026.319	182.209.640	Agriculture
Lainnya	1.450.414.913	1.478.225.166	Others
	<u>15.370.264.074</u>	<u>10.694.076.631</u>	
Pihak berelasi (Catatan 41)			Related parties (Note 41)
Lainnya	11.256.269	769.504	Others
	<u>11.256.269</u>	<u>769.504</u>	
Jumlah	15.381.520.343	10.694.846.135	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(225.318.307)	(278.732.187)	Allowance for impairment losses
Bersih	15.156.202.036	10.416.113.948	Net

c. Berdasarkan jangka waktu:

c. By maturity:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak ketiga Rupiah			Third parties Rupiah
≤ 1 tahun	2.965.051.534	2.248.512.455	≤ 1 year
≥ 1 - ≤ 2 tahun	497.914.904	867.526.243	≥ 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 tahun	4.435.392.546	2.585.779.710	> 2 - ≤ 5 years
> 5 tahun	7.471.905.090	4.992.258.223	≥ 5 years
	<u>15.370.264.074</u>	<u>10.694.076.631</u>	
Pihak berelasi (Catatan 41)			Related parties (Note 41)
≥ 2 - ≤ 5 tahun	3.070.634	454.788	≥ 2 - ≤ 5 years
> 5 tahun	8.185.635	314.716	> 5 years
	<u>11.256.269</u>	<u>769.504</u>	
Jumlah	15.381.520.343	10.694.846.135	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(225.318.307)	(278.732.187)	Allowance for impairment losses
Bersih	15.156.202.036	10.416.113.948	Net

11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Lanjutan)

11. MUSYARAKAH FINANCING (Continued)

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

d. By remaining period to maturity:

	31 Desember/ December 31, 2023
Pihak ketiga	
≤ 1 tahun	3.951.247.252
≥ 1 - ≤ 2 tahun	1.281.917.694
> 2 - ≤ 5 tahun	6.349.698.716
> 5 tahun	3.787.400.412
	<u>15.370.264.074</u>
Pihak berelasi (Catatan 41)	
≥ 1 - ≤ 2 tahun	500.645
> 2 - ≤ 5 tahun	2.569.990
> 5 tahun	8.185.634
	<u>11.256.269</u>
Jumlah	15.381.520.343
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(225.318.307)</u>
Bersih	15.156.202.036

	31 Desember/ December 31, 2022
	3.486.391.014
	1.126.525.677
	2.683.230.239
	3.397.929.701
	<u>10.694.076.631</u>
	--
	769.504
	--
	<u>769.504</u>
	10.694.846.135
	<u>(278.732.187)</u>
	10.416.113.948

Third parties
≤ 1 year
≥ 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 years
> 5 years

Related parties (Note 41)
≥ 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 years
> 5 years

Total
Allowance for impairment
losses
Net

e. Berdasarkan keterkaitan:

e. By relationship:

	31 Desember/ December 31, 2023
Pihak ketiga	15.370.264.074
Pihak berelasi (Catatan 41)	
Karyawan kunci	11.256.269
	<u>11.256.269</u>
Jumlah	15.381.520.343
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(225.318.307)</u>
Bersih	15.156.202.036

	31 Desember/ December 31, 2022
	10.694.076.631
	769.504
	<u>769.504</u>
	10.694.846.135
	<u>(278.732.187)</u>
	10.416.113.948

Third parties
Related parties (Note 41)
Key employees

Total
Allowance for impairment
losses
Net

f. Rincian pembiayaan *musyarakah* bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

f. Non-performing *musyarakah* financing by economic sector is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023
Industri	41.853.027
Sosial/masyarakat	4.906.118
Pengangkutan	--
Jasa usaha	18.850.022
Pertanian	9.031.259
Perdagangan	4.926.634
Konstruksi	6.725.891
Lainnya	31.081.648
Jumlah	117.374.599
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(79.542.304)</u>
Bersih	37.832.295

	31 Desember/ December 31, 2022
	41.853.027
	36.653.235
	30.841.329
	16.674.847
	9.031.259
	4.639.034
	--
	14.550.101
	<u>154.242.832</u>
	<u>(142.163.537)</u>
	12.079.295

Manufacturing
Social/public
Transportation
Business services
Agriculture
Trading
Construction
Others
Total
Allowance for impairment
losses
Net

11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Lanjutan)

g. Tingkat margin rata-rata per tahun:

	31 Desember/ December 31, 2023
Rupiah	11,75%
Dolar Amerika Serikat	7,67%

h. Informasi penting lainnya:

Pembiayaan sindikasi merupakan piutang yang diberikan kepada debitur di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Jumlah pembiayaan sindikasi yang diberikan Bank adalah sebesar Rp4.043.794.951 dan Rp1.247.644.104 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Keikutsertaan Bank sebagai pimpinan sindikasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar 3,00% sampai dengan 83,33%, sedangkan sebagai anggota sindikasi berkisar 1,25% sampai dengan 44,00% pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Jumlah pembiayaan *musyarakah* yang telah direstrukturisasi Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp111.801.489 dan Rp1.760.446.438. Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan pembiayaan dan penjadwalan kembali pembayaran yang tertunggak.

Pada tanggal 15 November 2021, Bank telah melakukan transaksi penyelesaian aset berkualitas rendah dengan aset produktif (*asset sale*). Transaksi *asset sale* telah dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 salah satunya berupa penjualan pembiayaan *musyarakah*. Dalam rangka penyehatan Bank, selanjutnya atas kumpulan tagihan portofolio yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria pemilihan untuk dijual dan dialihkan oleh Bank sebagai Kreditor Awal, telah dijual dan dialihkan ke PT AMC Indonesia Sukses selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 15 November 2021.

Nilai pokok pembiayaan *musyarakah* yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp5.749.730.766 yang terdiri dari 1.936 nasabah dengan harga sebesar nilai pokok pembiayaan *musyarakah* pada tanggal *cut off* final (15 November 2021). Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan pembiayaan *musyarakah* tersebut, risiko telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul.

Pada tanggal 29 Juni 2018, Bank telah melakukan perjanjian pengalihan portofolio atas pembiayaan *musyarakah* dan pendapatan yang akan diterima bagi hasil *musyarakah* (lihat catatan 7). Selanjutnya atas pembiayaan *musyarakah* yang telah memenuhi kriteria pemilihan untuk dijual dan dialihkan oleh Bank, sebagai Kreditor Awal ke Tameer Sukuk SPC Limited selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 29 Juni 2018.

11. MUSYARAKAH FINANCING (Continued)

g. Average profit margin rates per annum:

	31 Desember/ December 31, 2022	
	12,05%	Rupiah
	7,57%	United States Dollar

h. Other significant information is as follows:

Syndicated financing represents financing provided to debtors under syndication agreements with other banks. As of December 31, 2023 and 2022, total syndicated financing amounted to Rp4,043,794,951 and Rp1,247,644,104, respectively. Bank's participation as leader in the syndicated financing as of December 31, 2023 and 2022 is ranging from 3.00% to 83.33%. Bank's participation as member in the syndicated financing is ranging from 1.25% to 44.00% as of December 31, 2023 and 2022.

Musyarakah Financing that has been restructured by the Bank as of December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp111,801,489 and Rp1,760,446,438, respectively. Restructuring scheme generally involves extension of the financing maturity date and rescheduling of overdue payment.

On November 15, 2021, the Bank entered into a settlement transaction for low quality assets with earning assets (asset sale). The asset sale transactions were carried out on November 15, 2021, and one of which was in the form of sale of musyarakah financing. In the context of restructuring the Bank, the collection of portfolio claims that have been verified and meeting the eligibility criteria to be sold and transferred by the Bank as the Initial Creditor were then sold and transferred to PT AMC Indonesia Sukses as the buyer as stated in the Portfolio Transfer Agreement dated November 15, 2021.

The principal amount of the musyarakah financing sold and transferred is Rp5,749,730,766, consisting of 1,936 debtors at a principal amount of musyarakah financing at the final cut off date (November 15, 2021). Upon the sale and transfer of such musyarakah financing, the risk is transferred from the Bank to the buyer, including any profits and losses that will arise.

On June 29, 2018, the Bank entered into a portfolio transfer agreement on musyarakah financing and revenue to be received for musyarakah revenue sharing (see note 7). Subsequently, musyarakah financing meeting the eligibility criteria is sold and transferred by the Bank, as the Original Creditor, to Tameer Sukuk SPC Limited as the buyer as stated in the Portfolio Transfer Agreement dated June 29, 2018.

11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Lanjutan)

h. Informasi penting lainnya: (lanjutan)

Nilai pokok pembiayaan *musyarakah* yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp2.242.643.282 yang terdiri dari 1.877 nasabah dengan harga sebesar nilai pokok pembiayaan *musyarakah* pada tanggal *cut off final* (29 Juni 2018). Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan pembiayaan *musyarakah* tersebut, risiko telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul.

Dalam laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 kepada Bank Indonesia, Bank tidak memiliki debitur baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPD.

Tabel *Non-Performing Financing* (NPF) bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023
NPF - bruto	117.374.599
Persentase NPF - bruto	0,76%
NPF - neto	37.832.295
Persentase NPF - neto	0,25%

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal tahun	278.732.187
Penyisihan (pembalikan) tahun berjalan (Catatan 36)	(57.538.155)
Penerimaan pinjaman yang telah dihapusbukukan	4.537.535
Penghapusbukukan	--
Selisih kurs penjabaran	(413.260)
Saldo akhir tahun	225.318.307

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan tersebut.

11. MUSYARAKAH FINANCING (Continued)

h. Other significant information is as follows: (continued)

The principal amount of the *musyarakah* financing sold and transferred is Rp2,242,643,282, consisting of 1,877 debtors at the principal amount of *musyarakah* financing at the final cut off date (June 29, 2018). Upon the sale and transfer of such *musyarakah* financing, the risk is transferred from the Bank to the buyer, including any profits and losses that will arise.

In its report on Legal Lending Limit (LLL) to Bank Indonesia as of December 31, 2023 and 2022, Bank indicated that there is no debtor, either related party or not related party, who did not comply with or who has exceeded the Legal Lending Limit (LLL).

The table of total gross and net *Non-Performing Financing* (NPF) on *musyarakah* financing is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	
NPF - bruto	154.242.832	NPF - gross
Persentase NPF - bruto	1,44%	Percentage of NPF - gross
NPF - neto	12.079.295	NPF - net
Persentase NPF - neto	0,11%	Percentage of NPF - net

Changes in allowance for impairment losses on *musyarakah* financing are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal tahun	290.730.567	Balance at the beginning of the year
Penyisihan (pembalikan) tahun berjalan (Catatan 36)	(18.048.287)	Provision (reversal) during the year (Note 36)
Penerimaan pinjaman yang telah dihapusbukukan	4.641.171	Recovery of written-off loans
Penghapusbukukan	--	Written-off
Selisih kurs penjabaran	1.408.736	Exchange rate differences
Saldo akhir tahun	278.732.187	Balance at the end of the year

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that might arise from uncollectible financing.

12. PENYERTAAN SAHAM

	Tempat kedudukan/ <i>Domicile</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pihak berelasi (Catatan 41)				
Penyertaan Modal				
Sementara				
PT Al Ijarah				
Indonesia Finance	Jakarta	47,86%	401.616.000	401.616.000
Tersedia untuk dijual				
PT Syarikat Takaful				
Indonesia	Jakarta	5,91%	6.095.237	6.095.237
Jumlah			407.711.237	407.711.237
Cadangan kerugian penurunan nilai			(85.242.400)	(60.242.400)
Bersih			322.468.837	347.468.837

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai Penyertaan Saham adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal tahun	60.242.400
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 36)	25.000.000
Saldo akhir tahun	85.242.400

Berdasarkan Akta Perjanjian Penyertaan Modal Sementara No.47 tanggal 30 Desember 2019 dihadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., PT Al Ijarah Indonesia Finance telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menghasilkan keputusan bahwa berlaku efektif pengalihan saham oleh para kreditur yang akan dijadikan sebagai Penyertaan Modal Sementara. Penyertaan saham sementara pada PT Al Ijarah Indonesia Finance sejak 31 Desember 2019 dengan total persentase kepemilikan saham Perseroan pada PT Al Ijarah Indonesia Finance setelah dilakukan penyertaan sementara sebesar 47,86%. Penyertaan modal sementara dilakukan untuk memperbaiki kinerja keuangan dari PT Al Ijarah Indonesia Finance.

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir No. 49 tanggal 30 Desember 2019 dihadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., bahwa penyertaan Bank atas saham seri A yang semula senilai Rp35.000.000 dengan persentase kepemilikan sebesar 33,33% menjadi sebesar 3,88%. Penurunan nilai kepemilikan dikarenakan Perseroan harus memperkuat struktur permodalan yang ditetapkan regulator dengan demikian diperlukan penambahan modal yang berdampak kepemilikan Bank di ALIF terdilusi. Setelah perubahan tersebut, Bank mencatat kepemilikan dengan metode *cost/* Biaya dan telah mencadangkan keseluruhan dikarenakan terdapat penurunan nilai secara permanen atas investasi penyertaan tersebut.

12. INVESTMENTS IN SHARES

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Related parties (Note 41)			
Temporary Equity			
Participation			
PT Al Ijarah Indonesia			
Finance			
Available for sale			
PT Syarikat Takaful			
Indonesia			
Total			
Allowance for impairment losses			
Net			

The changes in allowance for impairment losses of Investments In Shares are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal tahun	60.242.400	60.242.400	Balance at the beginning of the year
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 36)	25.000.000	--	Provision during the year (Note 36)
Saldo akhir tahun	85.242.400	60.242.400	Balance at the end of the year

Based on the Deed of Temporary Equity Participation Agreement No.47 dated December 30, 2019 of Notary Aulia Taufani, S.H., PT Al Ijarah Indonesia Finance has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) which resulted in a decision that an effective transfer of shares by creditors would be used as Temporary Equity Participation. Temporary equity participation in PT Al Ijarah Indonesia Finance since December 31, 2019 with a total percentage of the Company's share ownership in PT Al Ijarah Indonesia Finance after a temporary participation is 47.86%. Temporary equity participation is carried out to improve the financial performance of PT Al Ijarah Indonesia Finance.

Based on the latest Amendment to the Articles of Association No. 49 dated December 30, 2019 of Notary Aulia Taufani, S.H., the Bank's investment in Series A shares which was originally valued at Rp35,000,000 with an ownership percentage of 33.33% becomes 3.88%. The decrease in the value of ownership is due to the Company having to strengthen the capital structure set by the regulator, thus it is necessary to increase capital which resulted in diluted ownership of the Bank in Al Ijarah. After the change, the Bank records its ownership using the cost method and has provided a full allowance due to a permanent decline in the value of the investment.

12. PENYERTAAN SAHAM (Lanjutan)

Pada tanggal 24 Oktober 2023 PT Al Ijarah Indonesia Finance telah menghentikan kegiatan usaha berdasarkan salinan keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-20/D.06/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah PT Al Ijarah Indonesia Finance dimana ALIF wajib menghentikan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Syariah dan dilarang menggunakan kata *finance*.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul.

12. INVESTMENTS IN SHARES (Continued)

As of October 24, 2023 PT Al Ijarah Indonesia Finance has stopped business activities based on a copy of the decision of the OJK Board of Commissioners Number: KEP-20/D.06/2023 concerning Revocation of the Business License of the Sharia Financing Company PT Al Ijarah Indonesia Finance where ALIF is obliged to stop business activities as Sharia financing companies and are prohibited from using the word *finance*.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that might arise.

13. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI

13. ACCEPTANCE RECEIVABLE AND PAYABLE

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. By type and currency

		31 Desember / December 31, 2023		
		Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Setara dengan/ Equivalent to Rupiah	
Pihak ketiga				Third parties
Rupiah				Rupiah
Impor L/C dan Surat Kredit				Import L/C and Domestic
Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)			42.696.067	Letters of Credit
Spot dan Forward			3.337.115	Spot and Forward
			<u>46.033.182</u>	
Mata uang asing				Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat				US Dollar
Impor L/C dan Surat Kredit				Import L/C and Domestic
Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)				Letters of Credit
Dollar Amerika Serikat	6.585.073		101.390.369	United States Dollar
Euro	363.407		6.191.849	Euro
			<u>107.582.218</u>	
Jumlah			153.615.400	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai			(71.869.517)	Allowance for impairment losses
Bersih			81.745.883	Net

**13. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI
 (Lanjutan)**

**13. ACCEPTANCE RECEIVABLE AND PAYABLE
 (Continued)**

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

a. By type and currency (continue)

	31 Desember / December 31, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing / Notional amount in foreign currencies (Dalam nilai penuh / In full amount)	Setara dengan / Equivalent to Rupiah	
Pihak ketiga Rupiah			Third parties Rupiah
Impor L/C dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		15.762.986	Import L/C and Domestic Letters of Credit
Spot dan Forward		862.191	Spot and Forward
		<u>16.625.177</u>	
Mata uang asing Dolar Amerika Serikat			Foreign currencies US Dollar
Impor L/C dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)			Import L/C and Domestic Letters of Credit
Dolar Amerika Serikat	6.594.470	102.659.405	United States Dollar
		<u>102.659.405</u>	
Jumlah		119.284.582	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai		(73.060.862)	Allowance for impairment losses
Bersih		46.223.720	Net

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

b. By remaining period to maturity:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Pihak ketiga			Third parties
≤ 1 bulan	111.491.635	112.132.663	≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 bulan	40.737.891	2.488.611	> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 6 bulan	1.169.185	2.939.191	> 3 - ≤ 6 months
> 12 bulan	216.689	1.724.117	> 12 months
Jumlah	153.615.400	119.284.582	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(71.869.517)	(73.060.862)	Allowance for impairment losses
Bersih	81.745.883	46.223.720	Net

c. Berdasarkan kolektibilitas:

c. By collectibility:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Lancar	49.195.359	17.082.306	Current
Macet	104.420.041	102.202.276	Loss
Jumlah	153.615.400	119.284.582	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(71.869.517)	(73.060.862)	Allowance for impairment losses
Bersih	81.745.883	46.223.720	Net

13. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI
(Lanjutan)

d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal tahun	73.060.862
Penyisihan (pembalikan) tahun berjalan (Catatan 36)	(441.212)
Selisih Kurs	(750.133)
Saldo akhir tahun	71.869.517

e. Jumlah liabilitas akseptasi adalah sebesar jumlah akseptasi kepada nasabah (sebelum dikurangi cadangan kerugian).

13. ACCEPTANCE RECEIVABLE AND PAYABLE
(Continued)

d. Changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	
	64.353.735	Balance at the beginning of the year
	2.919.447	Provision (reversal) during the year (Note 36)
	5.787.680	Exchange rate differences
	73.060.862	Balance at the end of the year

e. Acceptance payables represents the same amount as acceptance receivables from customers (before allowance for impairment losses).

	31 Desember / December 31, 2023	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Setara dengan/ Equivalent to Rupiah
Pihak ketiga		
Rupiah		
Impor L/C dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		1.130.408
Spot dan Forward		554.773
		<u>1.685.181</u>
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat		
Impor L/C dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		19.968
Dollar Amerika Serikat	363.407	307.443
Euro		6.191.849
		<u>6.499.292</u>
Jumlah		8.184.473

Third parties
Rupiah
Import L/C and Domestic Letters of Credit
Spot and Forward
Foreign currencies
US Dollar
Import L/C and Domestic Letters of Credit
United States Dollar
Euro
Total

	31 Desember / December 31, 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Setara dengan/ Equivalent to Rupiah
Pihak ketiga		
Rupiah		
Impor L/C dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		7.966.634
Spot dan Forward		5.857.206
		<u>13.823.840</u>
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat		
Impor L/C dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		29.364
Dollar Amerika Serikat		457.129
		<u>457.129</u>
Jumlah		14.280.969

Third parties
Rupiah
Import L/C and Domestic Letters of Credit
Spot and Forward
Foreign currencies
US Dollar
Import L/C and Domestic Letters of Credit
United States Dollar
Total

**13. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI
(Lanjutan)**

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai tagihan akseptasi secara individual dengan adanya bukti objektif penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tagihan akseptasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah memadai.

**13. ACCEPTANCE RECEIVABLE AND PAYABLE
(Continued)**

The Bank assessed acceptance receivable individually for impairment based on whether an objective evidence of impairment exists.

Management believes that allowance for impairment losses of acceptance receivables as of December 31, 2023 and 2022 is adequate.

14. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH

Akun ini merupakan objek sewa dari transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa dengan hibah.

14. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH

This account represents lease objects of an *ijarah muntahiyah bittamlik* transaction which includes an option to transfer the title of ownership over the assets through a grant.

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Multijasa	4.401.099	3.176.387	Multiservices
Jumlah	4.401.099	3.176.387	Total
Akumulasi penyusutan	(2.496.015)	(2.306.482)	Accumulated depreciation
Bersih	1.905.084	869.905	Net

Penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebesar Rp789.247 dan Rp343.583 untuk posisi 31 Desember 2023 dan 2022.

Depreciation charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income is amounting to Rp789,247 and Rp343,583 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.2/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022, kewajiban membentuk cadangan umum penyisihan aset produktif tidak berlaku bagi aset produktif dalam bentuk pembiayaan *ijarah* atau pembiayaan *ijarah muntahiyah bittamlik* dan pembentukan cadangan khusus *ijarah*.

Based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.2/POJK.03/2022 dated January 31, 2022, the obligation to provide allowance for impairment losses on earning assets do not apply to earning assets under *ijarah* or *ijarah muntahiyah bittamlik* financing and the provision of *ijarah* special allowance.

Perubahan akumulasi penyusutan aset yang diperoleh untuk *ijarah* adalah sebagai berikut:

The changes in accumulated depreciation of assets acquired for *ijarah* are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal tahun	2.306.482	2.372.439	Balance at the beginning of the year
Penyusutan tahun berjalan	789.247	343.583	Depreciation during the year
Pelunasan	(599.714)	(409.540)	Repayment
Saldo akhir tahun	2.496.015	2.306.482	Balance at the end of the year

15. ASET TETAP

15. PREMISES AND EQUIPMENT

Aset tetap terdiri dari:

Premises and equipment consist of:

31 Desember 2023 / December 31, 2023							
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Surplus revaluasi/ Revaluation Surplus	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
Nilai Wajar:							Fair Value :
Pemilikan langsung							Direct acquisitions
Tanah	1.895.621.154	--	(17.955.830)	132.680.510	2.010.345.834		Land rights
Bangunan	1.104.297.490	947.337	(337.677.429)	--	767.567.398		Buildings
Kendaraan bermotor	52.906.160	5.173.000	(38.111.959)	--	19.967.201		Vehicles
Inventaris kantor	431.447.252	2.665.950	(14.078.803)	--	420.034.399		Office equipments
Komputer	753.385.108	30.269.043	(33.892.023)	--	749.762.128		Computers
Perbaikan sarana dan prasarana	187.948.093	17.521.813	(36.508.798)	--	168.961.108		Leasehold improvement
Aset sewa pembiayaan	4.425.605.257	56.577.143	(478.224.842)	132.680.510	4.136.638.068		Vehicles under finance lease
kendaraan bermotor	19.297.566	1.605.000	(20.592.345)	--	310.221		
	4.444.902.823	58.182.143	(498.817.187)	--	4.136.948.289		
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Bangunan	399.579.222	37.381.297	(351.050.424)	--	85.910.095		Buildings
Kendaraan bermotor	32.930.663	3.659.192	(31.846.511)	--	4.743.344		Vehicles
Inventaris kantor	409.337.245	5.568.160	(11.183.529)	--	403.721.877		Office equipments
Komputer	700.217.466	26.251.757	(31.967.396)	--	694.501.827		Computers
Perbaikan sarana dan prasarana	174.408.937	1.289.309	(19.381.984)	--	156.316.262		Leasehold improvement
	1.716.473.533	74.149.715	(445.429.844)	--	1.345.193.405		
Aset sewa pembiayaan							Vehicles under finance lease
kendaraan bermotor	19.297.567	212.833	(19.252.678)	--	257.722		
	1.735.771.100	74.362.548	(464.682.522)	--	1.345.451.127		
Nilai buku	2.709.131.723				2.791.497.162		Book value
31 Desember 2022 / December 31, 2022							
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Surplus revaluasi/ Revaluation Surplus	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
Nilai Wajar:							Fair Value :
Pemilikan langsung							Direct acquisitions
Tanah	1.774.511.385	--	(24.827.643)	--	1.895.621.154		Land rights
Bangunan	1.300.153.880	--	(1.061.015)	--	1.104.297.490		Buildings
Kendaraan bermotor	49.454.690	6.541.900	(13.804.276)	--	52.906.160		Vehicles
Inventaris kantor	414.950.145	1.550.436	(1.658.040)	--	431.447.252		Office equipments
Komputer	743.027.244	16.230.131	(9.645.499)	--	753.385.108		Computers
Perbaikan sarana dan prasarana	212.723.147	--	(24.775.054)	--	187.948.093		Leasehold improvement
	4.494.820.491	24.322.467	(75.771.527)	--	4.425.605.257		
Aset sewa pembiayaan							Vehicles under finance lease
kendaraan bermotor	20.099.991	--	(802.425)	--	19.297.566		
	4.514.920.482	24.322.467	(76.573.952)	--	4.444.902.823		
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Bangunan	336.589.747	64.050.490	(1.061.015)	--	399.579.222		Buildings
Kendaraan bermotor	42.030.172	3.753.241	(12.852.750)	--	32.930.663		Vehicles
Inventaris kantor	392.406.020	18.483.487	(1.552.262)	--	409.337.245		Office equipments
Komputer	682.410.391	27.398.314	(9.591.239)	--	700.217.466		Computers
Perbaikan sarana dan prasarana	197.793.312	1.390.680	(24.775.055)	--	174.408.937		Leasehold improvement
	1.651.229.642	115.076.212	(49.832.321)	--	1.716.473.533		
Aset sewa pembiayaan							Vehicles under finance lease
kendaraan bermotor	19.842.025	253.041	(797.499)	--	19.297.567		
	1.671.071.667	115.329.253	(50.629.820)	--	1.735.771.100		
Nilai buku	2.843.848.815				2.709.131.723		Book value

15. ASET TETAP (Lanjutan)

Aset tetap terdiri dari:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 penjualan aset tetap Bank adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Harga jual	3.611.540	1.106.367
Jumlah tercatat - neto	<u>(1.837.918)</u>	<u>(90.354)</u>
Laba penjualan aset tetap (Catatan 38)	<u>1.773.622</u>	<u>1.016.013</u>

Pada tahun 2022, Bank melakukan revaluasi aset tetap dengan bertujuan akuntansi. Atas hasil revaluasi aset tersebut, Bank mengalami penurunan nilai atas penilaian aset tetap secara bersih senilai Rp17.766.174.

Penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah masing-masing sebesar Rp74.362.548 dan Rp115.329.253 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 35).

Pada tanggal 31 Desember 2023, aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan kepada Asuransi Zurich dan Asuransi Takaful Umum terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp863.464.880. Pada tanggal 31 Desember 2022, aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan kepada Asuransi Zurich dan Asuransi Takaful Umum terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp1.043.998.992.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Tidak terdapat aset tetap milik Bank yang dijadikan sebagai jaminan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Pada 31 Desember 2023 dan 2022 tidak ada komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap dan aset tetap yang mengalami penurunan nilai. Selain itu, tidak terdapat aset tetap dalam pembangunan serta tidak terdapat dalam aset yang tidak dipakai untuk sementara.

15. PREMISES AND EQUIPMENT (Continued)

Premises and equipment consist of:

As of December 31, 2023 and 2022, the sales of premises and equipment are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
	3.611.540	1.106.367	Selling price
	<u>(1.837.918)</u>	<u>(90.354)</u>	Net carrying value
Gain on sales of premises and equipment (Note 38)	<u>1.773.622</u>	<u>1.016.013</u>	

In 2022, the Bank revaluated its premises and equipment for accounting purposes. Based on the results of the revaluation, the Bank experienced an impairment of premises and equipment on a net basis of Rp17,766,174.

Depreciation charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income is amounting to Rp74,362,548 and Rp115,329,253 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively (Note 35).

As of December 31, 2023, premises and equipment, except land, were insured with Zurich Insurance, and Takaful General Insurance against losses from fire and other risks with coverage of Rp863,464,880. As of December 31, 2022, premises and equipment, except land, were insured with Zurich Insurance, and Takaful General Insurance against losses from fire and other risks with coverage of Rp1,043,998,992.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses of the premises and equipment insured.

There are no premises and equipment owned by Bank that are pledged as collateral as of December 31, 2023 and 2022.

As of December 31, 2023 and 2022, there is no contractual commitment in acquisition of premises and equipment and impaired premises and equipment. Furthermore, no assets are under construction and no assets are temporarily unused or idle.

16. ASET LAIN-LAIN - NETO

Aset lain-lain terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2023
Pendapatan yang masih akan diterima	2.079.809.978
Tagihan <i>Trade</i> - Salam	588.940.878
Aset terbengkalai - bersih	375.496.400
Biaya dibayar dimuka	333.601.027
Uang muka operasi	214.853.878
Tagihan kepada pihak ketiga - bersih	128.531.399
Tagihan ATM	56.287.880
Uang muka pajak	71.512.147
Agunan yang diambil alih - bersih	49.128.620
Kelebihan pembayaran pajak (Catatan 23.c)	14.084.695
Persediaan alat tulis kantor	11.945.325
Aset hak guna - bersih	10.604.943
Tagihan <i>Usance Payable At Usance (UPAU)</i>	6.154.390
Setoran jaminan	4.204.119
Investasi pada DPLK Muamalat	2.940.458
Lainnya	5.864.411
Jumlah	3.953.960.548

Uang muka operasi merupakan uang muka yang digunakan untuk renovasi gedung, operasional Bank, dan program aplikasi yang belum terselesaikan sampai 31 Desember 2023 dan 2022.

Piutang *Salam* merupakan tagihan Bank kepada pemasok yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang, bukan penerimaan dalam bentuk uang tunai. Piutang *Salam* timbul dari penyerahan uang kepada pemasok senilai barang yang dipesan.

Tagihan ATM merupakan tagihan kepada bank lain sehubungan dengan transaksi antar bank anggota ATM Bersama berupa transfer dan penarikan tunai.

Tagihan *Usance Payable at Usance (UPAU)* merupakan tagihan kepada debitur atas transaksi dengan pihak ketiga, dimana Bank membayarkan terlebih dahulu L/C kepada pihak ketiga setelah tanggal *invoice date* dan saat jatuh tempo debitur baru melunasinya kepada Bank. Atas transaksi ini Bank memperoleh *fee*.

Manajemen Bank telah melakukan reklasifikasi aset dengan melakukan verifikasi dari masing-masing AYDA berdasarkan manfaat ekonomi masa depan suatu aset tersebut berdasarkan penggunaannya.

16. OTHER ASSETS – NET

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2022	
	2.284.101.188	<i>Accrued income</i>
	--	<i>Trade Receivable - Salam</i>
	488.274.833	<i>Abandoned assets - net</i>
	371.878.574	<i>Prepaid expenses</i>
	191.272.164	<i>Advances</i>
		<i>Receivables from third parties - net</i>
	44.180.116	<i>ATM receivables</i>
	65.783.533	<i>Prepaid Tax</i>
	62.387.866	<i>Foreclosed assets - net</i>
	54.285.502	<i>Estimated claims for tax refund (Note 23.c)</i>
		<i>Office supplies</i>
		<i>Right of use assets - net</i>
		<i>Usance Payable At Usance (UPAU) receivable</i>
	140.000	<i>Security deposits</i>
	4.391.629	<i>Investment in DPLK Muamalat</i>
	--	<i>Others</i>
	18.421.636	
	3.615.369.048	Total

Advance of operational funds represents term of payment for building renovation, operational activity of the Bank, and application program in progress as of December 31, 2023 and 2022.

Salam Receivables are the Bank's claims to suppliers which must be settled in the form of delivery of goods, not receipts in the form of cash. Salam's receivables arise from the transfer of money to the supplier for the value of the goods ordered.

ATM receivables represent receivables from other banks related to inter-bank transactions using ATM Bersama, such as transfer and withdrawal.

Usance Payable at Usance (UPAU) receivable represents a transaction with third parties where Bank pays in advance the amount of L/C to the third parties after the invoice date, and the applicant will make the payment settlement at the end of the usance term. Bank will receive fees from this transaction.

The Bank's management has made reclassification of assets by verifying each of the foreclosed assets based on the future economic benefits of an assets based on its use.

16. ASET LAIN-LAIN - NETO (Lanjutan)

16. OTHER ASSETS – NET (Continued)

Mutasi agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut:

The changes in foreclosed assets are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal tahun	54.285.502	29.821.330	Balance at the beginning of the year
Penambahan tahun berjalan	--	24.464.172	Depreciation during the year
Penyelesaian:			Settlement:
Recovery	--	--	Recovery
Reklasifikasi:			Reclassification:
Aset Tetap	--	--	Premises and Equipment
Saldo akhir tahun	54.285.502	54.285.502	Balance at the end of the year
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.156.882)	--	Allowance for impairment losses
Bersih	49.128.620	54.285.502	Net

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai aset terbengkalai adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses of abandoned assets are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal tahun	86.166.147	86.166.147	Balance at the beginning of the year
Pembentukan (Pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 36)	(19.902.077)	--	Provision (Reversal) during the year (Note 36)
Saldo akhir tahun	66.264.070	86.166.147	Balance at the end of the year

Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah cadangan yang tersedia cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian penurunan atas nilai agunan yang diambil alih.

The Bank's management believes that the allowance provided for impairment in value of the foreclosed assets is adequate.

Aset hak guna per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Right of use assets as of December 31, 2023 and 2022, are as follows:

31 Desember 2023/ December 31, 2023				
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga Perolehan				At cost
Komputer	11.925.877	11.524.044	(431.192)	23.018.729
	11.925.877	11.524.044	(431.192)	23.018.729
Akumulasi Penyusutan				Accumulated depreciation
Komputer	7.831.610	4.582.176	--	12.413.786
	7.831.610	4.582.176	--	12.413.786
Nilai buku	4.094.267		10.604.943	Book Value

31 Desember 2022/ December 31, 2022				
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga Perolehan				At cost
Komputer	12.038.874	7.693.907	(7.806.904)	11.925.877
	12.038.874	7.693.907	(7.806.904)	11.925.877
Akumulasi Penyusutan				Accumulated depreciation
Komputer	6.239.447	3.686.400	(2.094.237)	7.831.610
	6.239.447	3.686.400	(2.094.237)	7.831.610
Nilai buku	5.799.427		4.094.267	Book Value

17. LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera kepada pihak ketiga terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2023
Titipan ATM Bersama	91.042.010
Titipan kewajiban BI-Fast	35.241.388
Titipan dana nasabah	21.396.771
Titipan <i>remittance</i>	9.273.729
Titipan setoran elektronik <i>banking</i>	5.696.043
Titipan premi asuransi tabungan	314.738
Titipan ZIS	28.938
Titipan lainnya	1.388.596
Jumlah	164.382.213

Titipan dana nasabah merupakan titipan atas transaksi pengiriman uang melalui lembaga keuangan bank lain.

Titipan ATM Bersama merupakan liabilitas yang timbul karena nasabah Bank melakukan transaksi ATM dengan menggunakan jaringan ATM Prima dan jaringan ATM Bersama.

Sebagian besar saldo pada titipan lainnya merupakan titipan dana pelaksanaan Penambahan Modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dari pemegang saham yang akan melaksanakan HMETD-nya.

17. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY

Liabilities due immediately to third parties consist of:

31 Desember/ December 31, 2022	
72.617.557	ATM Bersama funds
9.523.016	BI-Fast liability funds
26.919.639	Customers funds
904.503	Remittance funds
2.815.324	Deposit electronic banking funds
2.556.331	Premium insurance saving funds
25.395	ZIS funds
1.034.014	Other funds
116.395.779	Total

Customer funds represent funds generated through remittances from other financial institutions.

The ATM Bersama funds represent liabilities arising from the Bank's customers using ATM Prima and ATM Bersama network.

The balance in other deposits mostly consist of funds deposited for the implementation of Capital Increase through Pre-emptive Rights from shareholders who will exercise their Pre-emptive Rights.

18. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada *shahibul maal* atas keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana nasabah.

	31 Desember/ December 31, 2023
Deposito <i>mudharabah</i> berjangka	54.022.357
Pinjaman yang diterima	15.095.460
Tabungan <i>mudharabah</i>	685.308
Lain-lain	12.771.385
Jumlah	82.574.510

18. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING

This account represents undistributed share of customers (shahibul maal) on income generated by the Bank from managing customers funds.

31 Desember/ December 31, 2022	
	<i>Mudharabah time deposits</i>
44.282.774	
15.560.401	<i>Fund borrowings</i>
664.600	<i>Mudharabah saving deposits</i>
7.795.173	<i>Others</i>
68.302.948	Total

19. SIMPANAN

	31 Desember/ December 31, 2023
Giro wadiah Pihak ketiga Rupiah	2.141.631.492
Mata uang asing	
Dolar Amerika Serikat (2023: USD116.773.122 2022: USD30.823.076)	1.793.002.262
Dolar Singapura (2023: SIN46.083 2022: SIN44.247)	537.554
	<u>3.935.171.308</u>
Pihak berelasi (Catatan 41) Rupiah	24.442.495
Mata uang asing	
Dolar Amerika Serikat (2023: USD320.144 2022: USD247.173)	4.929.253
	<u>29.371.748</u>
	3.964.543.056
Tabungan wadiah Pihak ketiga Rupiah	6.784.038.693
Mata uang asing	
Dolar Amerika Serikat (2023: USD16.738.001 2022: USD17.167.159)	257.426.686
Dolar Singapura (2023: SIN127.603 2022: SIN104.883)	1.489.945
	<u>7.042.955.324</u>
Pihak berelasi (Catatan 41) Rupiah	14.750.304
	<u>7.057.705.628</u>
Jumlah	11.022.248.684

Giro *wadiah* merupakan simpanan *wadiah yad-dhamanah* dimana nasabah dapat memperoleh bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Bonus per tahun untuk simpanan wadiah rupiah adalah berkisaran antara 0,00% sampai dengan 0,02% untuk tahun 2023 dan antara 0,00% sampai dengan 0,02% untuk tahun 2022. Bank tidak memberikan bonus untuk simpanan wadiah dalam mata uang asing.

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan Haji Arafah dalam mata uang Rupiah dan tidak mendapatkan bonus.

Tidak terdapat Giro dan Tabungan *wadiah* yang diblokir yang dijadikan sebagai agunan pembiayaan yang diberikan pada 31 Desember 2023 dan 2022.

19. DEPOSITS

	31 Desember/ December 31, 2022
Wadiah demand deposits Third parties Rupiah	2.665.981.861
Foreign currencies	
United States Dollar (2023 : USD116,773,122 2022 : USD30,823,076)	475.212.887
Singapore Dollar (2023: SIN46,083 2022 : SIN44,247)	512.946
	<u>3.141.707.694</u>
Related parties (Note 41) Rupiah	24.286.784
Foreign currency	
United States Dollar (2023 : USD320,144 2022: USD247,173)	4.223.630
	<u>28.510.414</u>
	3.170.218.108
Wadiah savings Third parties Rupiah	5.784.142.847
Foreign currencies	
United States Dollar (2023 : USD16,738,001 2022 : USD17,167,159)	267.283.924
Singapore Dollar (2023 : SIN127,603 2022 : SIN104,883)	1.215.898
	<u>6.052.642.669</u>
Related parties (Note 41) Rupiah	4.268.876
	<u>6.056.911.545</u>
Total	9.227.129.653

Wadiah demand deposits represent *yad-dhamanah wadiah demand deposits*, in which costumers are entitled to receive bonuses in accordance with the Bank's policy.

The annual bonus rates range from 0.00% to 0.02% in December 31, 2023 and 0.00% to 0.02% in 2022 for Rupiah wadiah demand deposits. Wadiah demand deposits in foreign currency are not entitled to bonus.

Wadiah savings represent Arafah Hajj savings in Rupiah and are not entitled to bonus.

No Wadiah demand deposits or Wadiah savings are blocked and pledged as collateral for loans extended as of December 31, 2023 and 2022.

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

Tanggal 31 Desember 2023

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2023

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

20. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Giro wadiah			Wadiah Demand Deposits
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	46.094.866	58.980.516	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	136.191	293.374	United States Dollar
Tabungan wadiah			Wadiah savings
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	62.338	118.635	Rupiah
Jumlah	46.293.395	59.392.525	Total

No deposits from other banks is blocked and pledged as collateral for loans extended as of December 31, 2023 and 2022.

21. LIABILITIES TO BANK INDONESIA

Liabilities to Bank Indonesia as of December 31, 2022 is Nil, meanwhile as of December 31, 2023 is are follows:

31 Desember 2023 / December 31, 2023

Nama Pihak Penjual / <i>Counterparty</i>	Jenis Efek / <i>Type of Security</i>	Nilai Nominal / <i>Nominal Amount</i>	Tarif / <i>Rate (%)</i>	Tanggal Mulai / <i>Value Date</i>	Tanggal Jatuh Tempo / <i>Maturity Date</i>	Nilai Jual / <i>Selling Price</i>
Bank Indonesia	IFR 006	299.000.000	6,25	27/12/2023	03/01/2024	330.771.740
Bank Indonesia	IFR 010	335.000.000	6,25	27/12/2023	03/01/2024	398.110.650
Bank Indonesia	PBS 025	366.000.000	6,25	27/12/2023	03/01/2024	378.337.860
Bank Indonesia	PBS 012	500.000.000	6,85	28/12/2023	28/03/2024	531.760.000
Bank Indonesia	PBS 012	400.000.000	6,25	29/12/2023	05/01/2024	426.328.000
Bank Indonesia	PBS 025	<u>100.000.000</u>	6,25	29/12/2023	05/01/2024	<u>104.370.000</u>
Jumlah / Total		2.000.000.000				2.169.678.250

PaSBI transactions are transactions providing funds to Sharia OPT Participants for liquidity management with collateral in the form of securities that comply with sharia principles.

*Until the date of the issuance of the financial statements,
Bank has paid Rp1,637,918,250.*

Under the applicable Bank Indonesia regulations, all securities guaranteed as of December 31, 2023 and as of December 31, 2022 are Nil.

22. PINJAMAN YANG DITERIMA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2023
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	1.000.000.000
Jumlah	1.000.000.000

Berdasarkan akad perjanjian *uncommitted facility line* pembiayaan *mudharabah muqayadah* antara Bank dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.22 tanggal 26 Juli 2023, dan berdasarkan surat pernyataan pencairan *Uncommitted Facility Line batch* ke 1 No.338/S/GLM/VII/2023 Bank telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp350.000.000 berjangka waktu 1 (satu) tahun dan porsi nisbah yang disepakati adalah masing-masing sebesar 51,00% untuk Bank dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar 49,00%.

Berdasarkan akad perjanjian *uncommitted facility line* pembiayaan *mudharabah muqayadah* antara Bank dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.22 tanggal 26 Juli 2023, dan berdasarkan surat pernyataan pencairan *Uncommitted Facility Line batch* ke 1 No.338/S/GLM/VII/2023 Bank telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp150.000.000 berjangka waktu 1 (satu) tahun dan porsi nisbah yang disepakati adalah masing-masing sebesar 51,00% untuk Bank dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar 49,00%.

Berdasarkan akad perjanjian *uncommitted facility line* pembiayaan *mudharabah muqayadah* antara Bank dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.22 tanggal 26 Juli 2023, dan berdasarkan surat penegasan pencairan *Uncommitted Facility Line batch* ke 2 No.S-1689/DIR/SMF/VIII/2023 Bank telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp500.000.000 berjangka waktu 1 (satu) tahun dan porsi nisbah yang disepakati adalah masing-masing sebesar 51,00% untuk Bank dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar 49,00%.

Berdasarkan akad pembiayaan *mudharabah muqayadah* antara Bank dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.197/AKAD/SMF-BMI/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, Bank telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp200.000.000 berjangka waktu 1 (satu) tahun dan porsi nisbah yang disepakati adalah masing-masing sebesar 56,00% untuk Bank dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar 44,00%. Bank telah melakukan pelunasan pinjaman tersebut pada tanggal 16 Agustus 2023.

22. FUND BORROWINGS

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2022	
	500.000.000	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
	500.000.000	Total

Based on the *uncommitted facility line Mudharabah Muqayadah financing agreement* between the Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.22 dated July 26, 2022, and based on *Uncommitted Facility Line batch 1 statement letter* No.338/S/GLM/VII/2023 the Bank obtained financing facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) amounting to Rp350,000,000, with a period of 1 (one) year and the agreed nisbah portion for the Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) is 51.00% and 49.00%, respectively.

Based on the *uncommitted facility line Mudharabah Muqayadah financing agreement* between the Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.22 dated July 26, 2023, and based on *Uncommitted Facility Line batch 1 statement letter* No.338/S/GLM/VII/2023 the Bank obtained financing facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) amounting to Rp150,000,000, with a period of 1 (one) year and the agreed nisbah portion for the Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) is 51.00% and 49.00%, respectively.

Based on the *uncommitted facility line Mudharabah Muqayadah financing agreement* between the Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.22 dated July 26, 2023, and based on *Uncommitted Facility Line batch 2 affirmation letter* No.S-1689/DIR/SMF/VIII/2023 the Bank obtained financing facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) amounting to Rp500,000,000, with a period of 1 (one) year and the agreed nisbah portion for the Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) is 51.00% and 49.00%, respectively.

Based on the *Mudharabah Muqayadah financing agreement* between the Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.197/AKAD/SMF-BMI/VIII/2022 dated August 15, 2022, the Bank obtained financing facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) amounting to Rp200,000,000, with a period of 1 (one) year and the agreed nisbah portion for the Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) is 56.00% and 44.00%, respectively. The Bank paid off this borrowing on August 16, 2023.

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

Berdasarkan akad pembiayaan *mudharabah muqayadah* antara Bank dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.272/AKAD/SMF-BMI/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022, Bank telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp300.000.000 berjangka waktu 1 (satu) tahun dan porsi nisbah yang disepakati adalah masing-masing sebesar 56,00% untuk Bank dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar 44,00%. Bank telah melakukan pelunasan pinjaman tersebut pada tanggal 31 Oktober 2023.

Seluruh fasilitas pinjaman yang diterima Bank dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dijamin dengan fidusia tagihan. Bank telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah disepakati dalam akad perjanjian pembiayaan *mudharabah* tersebut diatas.

22. FUND BORROWINGS (Continued)

Based on the *Mudharabah Muqayadah* financing agreement between the Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.272/AKAD/SMF-BMI/X/2022 dated October 28, 2022, the Bank obtained financing facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) amounting to Rp300,000,000, with a period of 1 (one) year and the agreed nisbah portion for the Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) is 56.00% and 44.00%, respectively. The Bank paid off this borrowing on October 31, 2023.

All fund borrowings received from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) are guaranteed with fiduciary collateral. The Bank has complied with all agreed covenants stipulated in the above stated *mudharabah* financing agreements

23. UTANG PAJAK

a. Utang Pajak

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pajak penghasilan:		
Pasal 4 (2)	13.364.362	11.041.883
Pasal 21	5.126.893	8.496.207
Pasal 23	253.962	302.064
Pasal 26	115.656	74.308
Pasal 29	--	76.203
Pajak Pertambahan Nilai	1.230.118	1.573.909
Jumlah	20.090.991	21.564.574

b. Beban pajak penghasilan badan

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
(Beban) manfaat pajak:		
Kini	(415.282)	(11.982.845)
Kini - Cabang Kuala Lumpur	--	(12.913.839)
Tangguhan	(396.496)	(523.125)
Jumlah	(811.778)	(25.419.809)

23. TAX PAYABLES

a. Tax Payable

Income tax:
Article 4 (2)
Article 21
Article 23
Article 26
Article 29
Value Added Tax
Total

b. Corporate income tax expense

Tax (expense) benefit:
Current
Current - Kuala Lumpur Branch
Deferred
Total

23. UTANG PAJAK (Lanjutan)

23. TAX PAYABLES (Continued)

b. Beban pajak penghasilan badan (lanjutan)

b. Corporate income tax expense (continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax as stated in the statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	14.106.030	52.000.877	Income before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan temporer			Temporary differences
Penyusutan aset tetap	(14.153.366)	28.300.008	Depreciation of premises and equipment
Bonus	(2.614.424)	5.711.689	Bonuses
Imbalan pasca kerja karyawan	7.965.361	(23.682.643)	Provision for post employment benefit
Beban Pesangon	6.587.909	--	Severance payment
Lainnya	412.266	(12.706.893)	Others
Jumlah perbedaan temporer	(1.802.254)	(2.377.839)	Total temporary differences
Perbedaan permanen			Permanent differences
Hadiah dan sumbangan	146.089	284.249	Rewards and donations
Pemeliharaan dan perbaikan	--	253.023	Maintenance and repairs
Kenikmatan karyawan dan Direksi	1.348	199.288	Employees and Directors benefits
Lain-lain	(10.563.569)	4.107.878	Others
Jumlah perbedaan permanen	(10.416.132)	4.844.438	Total permanent differences
Penghasilan fiskal kena pajak	1.887.644	54.467.476	Taxable income
Beban pajak penghasilan-kini	415.282	11.982.845	Corporate Income tax expense - current
Dikurangi pembayaran pajak dimuka			Less prepaid income tax for
Pajak Penghasilan Pasal 25	(14.499.976)	(11.906.642)	Income Tax Article 25
Utang (Kelebihan) Pajak Kini	(14.084.694)	76.203	Current Tax Payables (Prepaid)

23. UTANG PAJAK (Lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan badan (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain - Kuala Lumpur	--	45.595.084
Penyesuaian fiskal	--	8.212.579
Penghasilan fiskal kena pajak	--	53.807.663
Beban pajak penghasilan-kini Cabang Kuala Lumpur	--	12.913.839

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal 19 Juni 2020. Aturan tersebut menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020, 2021, 2022 dan 2023, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah dihitung menggunakan tarif pajak 22% serta akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

Beban pajak kini cabang Kuala Lumpur merupakan pajak badan Bank untuk cabang Kuala Lumpur pada periode 31 Desember 2022, sedangkan pada 31 Desember 2023 perhitungan pajak kini cabang Kuala Lumpur belum dilakukan.

c. Kelebihan pembayaran pajak

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Tahun 2023	14.084.695	--
Tahun 2018	--	12.069.027
Jumlah (Catatan 16)	14.084.695	12.069.027

23. TAX PAYABLES (Continued)

b. Corporate income tax expense (continued)

<i>Income before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income - Kuala Lumpur</i>	<i>Fiscal adjustment</i>
<i>Taxable income</i>	<i>Corporate Income tax expense - current Kuala Lumpur Branch</i>

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 which has become Law No.2 of 2020, and stipulated Government Regulation No. 30 of 2020 concerning Reduction of Income Tax Rate for Domestic Public Companies Taxpayers, which became effective June 19, 2020. The regulation has stipulated the reduction in the income tax rates for domestic corporate taxpayers and business establishments from 25% to 22% for Fiscal Years 2020, 2021, 2022 and 2023 and a further reduction of the tax rate by 3% for domestic taxpayers who meet certain requirements.

The income tax calculation for the years ended December 31, 2023 and 2022 has been calculated using 22% tax rate, and shall be the basis in filling the Annual Corporate Income Tax Return.

Current tax expense of Kuala Lumpur branch is the Bank's corporate tax for the Kuala Lumpur branch as of December 31, 2022. However, the current tax expense of Kuala Lumpur branch as of December 31, 2023 has not been calculated.

c. Corporate estimated claim for tax refund

<i>Year 2023</i>
<i>Year 2018</i>
<i>Total (Note 16)</i>

23. UTANG PAJAK (Lanjutan)

c. Kelebihan pembayaran pajak (lanjutan)

Atas kelebihan pembayaran pajak tahun 2018 tersebut, Bank telah mengajukan Keberatan dan telah mendapatkan Keputusan keberatan No.00576/KEB/WPJ.04/2021 dengan pajak diterima kembali Rp5.440.722, Keputusan Pengembalian Imbalan Bunga No. KEP 00004/PPH.IB/KPP.0411/2023 dengan pajak diterima kembali Rp 566.264, dan Keputusan Pengembalian Imbalan Bunga No.KEP-00003/PPH.IB/KPP.0411/2023 dengan pajak diterima kembali sebesar Rp4.874.458.

Kelebihan pembayaran pajak tahun 2023 dilaporkan dalam SPT PPh Badan tahun 2023 yang akan disampaikan ke kantor pajak paling lambat tanggal 30 April 2024 dengan permintaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

d. Aset pajak tangguhan

	31 Desember / December 31, 2022	Mutasi di laporan laba rugi/ Changes in the statements of income	Penyesuaian pajak tangguhan/ Deferred tax adjustment	31 Desember / December 31, 2022	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					Deferred tax assets (liabilities)
Imbalan pasca kerja karyawan	27.602.413	1.752.379	(1.319.910)	28.034.882	Provisions for post employment benefit
Bonus Karyawan	(2.190.075)	(575.173)	--	(2.765.248)	Employee bonuses
Penyusutan aset tetap	30.458.753	(3.113.740)	--	27.345.013	Premises and equipment depreciations
Beban Pesangon	(3.604.361)	1.449.340	5.249.075	3.094.054	Severance payment
Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan	74.006.842	90.698	--	74.097.540	Allowance for impairment losses other than financing
Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi dari surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laporan keuangan	9.592	--	--	9.592	Unrealized gain (loss) from securities measured at fair value through financial report
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari surat berharga yang tersedia untuk dijual	6.305.382	--	(6.305.382)	--	Unrealized gain (loss) in value of available-for-sale marketable securities
Surplus revaluasi aset tetap	10.798.402	--	--	10.798.402	Revaluation Surplus on Premises and equipment
Penyesuaian setelah penyajian kembali	(3.478.171)	--	1.056.307	(2.421.864)	Adjustment after restatement
Aset pajak tangguhan - bersih	139.908.777	(396.496)	(1.319.910)	138.192.371	Deferred tax assets - Net

	31 Desember / December 31, 2021	Mutasi di laporan laba rugi/ Changes in the statements of income	Penyesuaian pajak tangguhan/ Deferred tax adjustment	31 Desember / December 31, 2022	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					Deferred tax assets (liabilities)
Imbalan pasca kerja karyawan	33.823.516	(5.210.182)	(1.010.921)	27.602.413	Provisions for post employment benefit
Bonus Karyawan	(3.446.647)	1.256.572	--	(2.190.075)	Employee bonuses
Penyusutan aset tetap	24.232.751	6.226.002	--	30.458.753	Premises and equipment depreciations
Beban Pesangon	1.306.456	(4.910.817)	--	(3.604.361)	Severance payment
Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan	71.869.849	2.136.993	--	74.006.842	Allowance for impairment losses other than financing
Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi dari surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laporan keuangan	31.285	(21.693)	--	9.592	Unrealized gain (loss) from securities measured at fair value through financial report
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari surat berharga yang tersedia untuk dijual	5.327.306	--	978.076	6.305.382	Unrealized gain (loss) in value of available-for-sale marketable securities
Surplus revaluasi aset tetap	10.798.402	--	--	10.798.402	Revaluation Surplus on Premises and equipment
Penyesuaian setelah penyajian kembali	(3.478.171)	--	--	(3.478.171)	Adjustment after restatement
Aset pajak tangguhan - bersih	140.464.747	(523.125)	(32.845)	139.908.777	Deferred tax assets - Net

23. TAX PAYABLES (Continued)

c. Corporate estimated claim for tax refund (continued)

Regarding the 2018 tax overpayment, the Bank has submitted an objection and has received objection decision No. 00576/KEB/WPJ.04/2021 resulting in tax refund of Rp5,440,722, decision on the refund of interest No.KEP 00004/PPH.IB/KPP.0411/2023 resulting in tax refund of Rp566,264, and Decision on Refund of Interest No.KEP-00003/PPH.IB/KPP.0411/2023 resulting in tax refund of Rp4,874,458.

The 2023 tax overpayment is reported in the 2023 Corporate Income Tax SPT which will be submitted to the tax office no later than April, 30 2024 with a request for a refund of the tax overpayment.

d. Deferred tax assets

23. UTANG PAJAK (Lanjutan)

- e. Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif pajak efektif yang berlaku adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Laba sebelum pajak Bank menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	14.106.030	52.000.877
Beban pajak berdasarkan tarif pajak yang berlaku	415.282	24.896.684
Pengaruh pajak atas penghasilan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Imbalan pasca kerja	(1.752.379)	5.210.182
Kenikmatan karyawan dan Direksi	575.173	3.654.246
Penyusutan	3.113.740	(6.226.002)
Lain-lain	(1.540.038)	(2.115.301)
Jumlah	396.496	523.125
Penyesuaian pajak tangguhan	--	--
Jumlah beban (manfaat) pajak	811.778	25.419.809

23. TAX PAYABLES (Continued)

- e. Reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before tax is as follows:

Bank's Income before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income
Tax expense at effective tax rates
Tax effect of non deductible expenses - net:
Post Employment benefit Employees and Directors benefits
Depreciation
Others
Total
Deferred tax adjustment
Total tax expenses (benefits)

24. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

- a. Estimasi kerugian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko pembiayaan:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Rupiah		
Bank garansi	488.207	746.255
Mata uang asing		
Bank garansi	365.271	107.955
Jumlah	853.478	854.210

24. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

- a. Estimated loss on commitments and contingencies by its credit risk are as follows:

Rupiah
Bank guarantees
Foreign currencies
Bank guarantees
Total

24. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (Lanjutan)

24. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (Continued)

b. Komitmen dan kontinjensi berdasarkan kolektibilitas sebagai berikut:

b. Commitments and contingencies by collectibility are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Rupiah		
Bank garansi		
Lancar	46.511.225	74.625.502
	46.511.225	74.625.502
Penerbitan SKBDN dan L/C yang tidak dapat dibatalkan		
Lancar	2.589.074	7.767.693
	49.100.299	82.393.195
Mata uang asing		
Bank garansi		
Lancar	2.309.550	10.795.485
Penerbitan SKBDN dan L/C yang tidak dapat dibatalkan		
Lancar	52.578.291	112.227.913
	52.578.291	112.227.913
	54.887.841	123.023.398
Jumlah	103.988.140	205.416.593
Cadangan kerugian penurunan nilai	(853.478)	(854.210)
Bersih	103.134.662	204.562.383

Rupiah
Bank guarantees
Current
Irrevocable domestic letters of credit and L/C issued
Current
Foreign currencies
Bank guarantees
Current
Irrevocable domestic letters of credit and L/C issued
Current
Total
Allowance for impairment losses
Net

c. Ikhtisar perubahan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

c. The changes in estimated losses on commitments and contingencies are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal tahun	854.210	815.650	Balance at the beginning of the year
Penyisihan (Pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 36)	(732)	461.649	Provision (Reversal) during the year (Note 36)
Selisih kurs penjabaran	--	(423.089)	Exchange rate
Saldo akhir tahun	853.478	854.210	Balance at the end of the year

Manajemen berpendapat bahwa jumlah estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah memadai.

Management believes that estimated losses on commitments and contingencies as of December 31, 2023 and 2022 is adequate.

25. ESTIMASI LIABILITAS IMBALAN KERJA

Bank telah mencatat estimasi liabilitas dan beban imbalan kerja (*employment benefit*) masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 menurut Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 berdasarkan perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria V Agus Basuki, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing pada tanggal 31 Januari 2024 dan 20 Januari 2023.

Perhitungan aktuaris tersebut menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023
Tingkat diskonto per tahun	6,33% - 6,81%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	3,00%
Tabel mortalita	TMI-IV 2019
Usia pensiun	55 tahun/ <i>years old</i>

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja:

	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo pada awal tahun	104.699.736
(Keuntungan)/kerugian aktuaria	5.999.592
Saldo pada akhir tahun	110.699.328
Pajak - pajak terkait	(24.353.852)
Saldo pada akhir tahun - bersih	86.345.476

Beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023
Biaya jasa kini	13.188.394
Biaya bunga	6.504.615
Jumlah (Catatan 34)	19.693.009

25. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYMENT BENEFITS

The Bank has recorded estimated liabilities and expenses for employment benefits for the years ended December 31, 2023 and 2022, in compliance with Labor Law No. 13/2003, based on actuarial calculation performed by Actuarial Consulting Firm V Agus Basuki, an independent actuary, as stipulated in their reports dated January 31, 2024 and January 20, 2023, respectively.

The actuarial calculations used the "Projected Unit Credit" method with underlying assumptions as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	
4,51% - 7,23%		Annual discount rate
3,00%		Annual salary increase rate
TMI-IV 2019		Mortality table
55 tahun/ <i>years old</i>		Retirement age

Remeasurement of employee benefit liabilities:

	31 Desember/ December 31, 2022	
100.104.640		Balance at the beginning of the year
4.595.096		Actuarial (gain)/loss
104.699.736		Balance at the end of the year
(23.033.942)		Related Tax
81.665.794		Balance at the end of the year-net

Expenses recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	
16.842.782		Current service cost
7.792.038		Interest cost
24.634.820		Total (Note 34)

25. ESTIMASI LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Mutasi atas nilai kini kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo pada awal tahun	125.465.511
Biaya bunga	6.504.615
Biaya jasa kini	13.188.394
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(5.999.592)
Pembayaran imbalan kerja tahun berjalan	(11.167.392)
Biaya jasa lalu karena perubahan program	(560.257)
Saldo pada akhir tahun	127.431.279

Rincian nilai kini liabilitas imbalan kerja selama tahun berjalan dan 5 (lima) tahun sebelumnya:

	2023	2022	2021	2020	2019
Nilai kini kewajiban imbalan	127.431.279	125.465.511	153.743.250	162.441.725	174.521.826

Imbalan Pasca Kerja

Bank menyelenggarakan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 2.597 dan 2.431 karyawan masing-masing untuk 31 Desember 2023 dan 2022.

Program Pensiun Iuran Pasti

Bank menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang memiliki masa kerja minimum 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi karyawan tetap dan berusia di bawah 55 (lima puluh lima) tahun. Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.S-438/LK/1997 tanggal 19 Desember 1997. Pendiri DPLK Muamalat adalah Bank.

Bank mengikutsertakan karyawannya dalam program DPLK dengan iuran DPLK 10% dari gaji pokok, dimana Bank mensubsidi sebesar 5% dan sisanya sebesar 5% lagi menjadi beban karyawan. Iuran dana pensiun yang disetor pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp21.409.517 dan Rp19.966.788. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 jumlah akumulasi dana pensiun yang merupakan kontribusi Bank masing-masing sebesar Rp9.583.905 dan Rp9.030.239.

Seluruh karyawan tetap Bank adalah peserta Program Pensiun Iuran Pasti.

25. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

Changes in present value of estimated liabilities for post employment benefits are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	
153.743.250	153.743.250	Balance at the beginning of the year
7.792.038	7.792.038	Interest cost
16.842.782	16.842.782	Current service cost
(4.595.096)	(4.595.096)	Actuarial Loss (Gain)
(40.766.955)	(40.766.955)	Current year benefit payments
(7.550.508)	(7.550.508)	Past service costs due to program changes
125.465.511	125.465.511	Balance at the end of the year

Details of present value of post employment benefit liabilities during the year and previous 5 (five) years:

Post-employment Benefit

The Bank established defined post-employment benefits for its employees in accordance with Labor Law No. 13/2003. The number of employees entitled to the benefits is 2,597 and 2,431 employees as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

Defined Contribution Pension Plan

The Bank established a defined contribution pension plan covering all of its permanent employees under 55 (fifty five) years of age with working period of at least 1 (one) year. The pension fund is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat, the deed of establishment of which was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in his decree No. S-438/LK/1997 dated December 19, 1997. DPLK Muamalat was established by the Bank.

The Bank has registered its employees into a pension fund with a contribution of 10% of the basic salary, of which the Bank subsidizes 5% whilst the remaining 5% is paid by the employee. The contribution to the pension fund as of December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp21,409,517 and Rp19,966,788, respectively. As of December 31, 2023 and 2022 Bank's contribution to the total accumulated pension fund is amounting to Rp9,583,905 and Rp9,030,239, respectively.

All permanent employees of the Bank are members of the defined contribution pension plan.

26. LIABILITAS LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31, 2023
Titipan operasional pembiayaan	310.206.999
Biaya yang masih harus dibayar	26.134.469
Utang dividen	19.805.905
Titipan <i>unclaim</i>	13.271.308
Liabilitas hak guna usaha	12.621.886
Setoran jaminan	415.029
Lainnya	24.046.163
Jumlah	406.501.759

Titipan operasional pembiayaan merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang harus segera dipenuhi sesuai dengan kesepakatan terkait dengan *collection*, proses pembiayaan, biaya notaris, asuransi atas jaminan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses penyitaan agunan.

Biaya masih harus dibayar merupakan cadangan berkaitan dengan operasional Bank seperti beban listrik, air dan telepon, zakat perusahaan, jasa konsultan dan cadangan untuk personalia seperti cadangan bonus, kinerja, promosi, pelatihan dan biaya seragam untuk karyawan.

Utang dividen merupakan dividen kepada para pemegang saham yang belum terealisasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Titipan *unclaim* merupakan kewajiban Bank yang akan dibayarkan ke nasabah terkait dengan dengan proses pembiayaan seperti biaya notaris, asuransi atas jaminan, dan biaya lainnya yang telah berumur lebih dari 1 (satu) tahun (365 hari).

26. OTHER LIABILITIES

	31 Desember/ December 31, 2022	
300.146.476		<i>Operational financing funds</i>
54.077.434		<i>Accrued expenses</i>
20.464.448		<i>Dividends payable</i>
13.853.556		<i>Unclaimed funds</i>
5.842.526		<i>Obligation under capital lease</i>
379.779		<i>Security deposits</i>
36.520.051		<i>Others</i>
431.284.270		Total

Operational financing funds represents Bank's obligation to third party to be immediately fulfilled as agreed which is related to collection, financing process, cost of notary, insurance of collateral, and other costs incurred due to confiscation of collateral.

Accrued Expense represents reserve related to the Bank's operational activities, such as electricity, water, and telephone expenses, corporate zakat, consulting service, and reserve for personnel, such as rewards, performance bonuses, promotion, training and uniform for staff.

Dividends payables represents dividends from previous years which have not been claimed by the shareholders as of December 31, 2023 and 2022.

Unclaimed funds represents Bank's obligation that will be paid to costumers related to financing process, such as cost of notary, insurance for collateral, and other costs exceeding the period of 1 (one) year (365 days).

27. DANA SYIRKAH TEMPORER

(i) *Giro Mudharabah*

	31 Desember/ December 31, 2023
Giro mudharabah	
Rupiah	
Bukan Bank	
Pihak ketiga	2.127.075.777
Pihak berelasi (Catatan 41)	3.961.233
	2.131.037.010
Bank	
Pihak ketiga	165.866.424
Jumlah	2.296.903.434

27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

(i) *Mudharabah Demand Deposits*

	31 Desember/ December 31, 2022	
1.705.087.626		Mudharabah demand deposits
2.769.061		Rupiah
1.707.856.687		<i>Non Bank</i>
		<i>Third parties</i>
		<i>Related parties (Note 41)</i>
		<i>Bank</i>
153.681.358		<i>Third parties</i>
1.861.538.045		Total

27. DANA SYIRKAH TEMPORER (Lanjutan)

(i) Giro *Mudharabah* (lanjutan)

Giro *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Nisbah dan tingkat bagi hasil untuk giro *mudharabah* adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	Nisbah	Tingkat Bagi Hasil/ Profit Sharing Rate
Giro <i>mudharabah</i>	32,00%	0,73%

(ii) Tabungan *Mudharabah*

a. Berdasarkan jenis produk:

	31 Desember/ December 31, 2023
Bukan Bank	
Tabungan Hijrah Prima	8.634.699.794
Tabungan Hijrah Bisnis	696.810.796
Tabungan Hijrah Rencana	188.545.873
Tabungan Hijrah Haji	51.518.697
Tabungan Hijrah Simpel	12.439.508
	<u>9.584.014.668</u>
Bank	
Tabungan Hijrah Prima	306.799.176
Tabungan Hijrah Bisnis	441.122.163
	<u>747.921.339</u>
Jumlah	10.331.936.007

b. Berdasarkan keterkaitan:

	31 Desember/ December 31, 2023
Bukan Bank	
Pihak ketiga	9.571.696.547
Pihak berelasi (Catatan 41)	12.318.121
	<u>9.584.014.668</u>
Bank	
Pihak ketiga	747.921.339
Jumlah	10.331.936.007

27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (Continued)

(i) *Mudharabah Demand Deposits* (continued)

Mudharabah demand deposits represents deposits from third parties which are entitled to receive a share in profit derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined nisbah.

The rates of nisbah and profit sharing for mudharabah demand deposits are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	
	Nisbah	Tingkat Bagi Hasil/ Profit Sharing Rate
32,00%	0,89%	<i>Mudharabah demand deposits</i>

(ii) *Mudharabah Saving Deposits*

a. By type:

	31 Desember/ December 31, 2022	
Non Bank		
Hijrah Prima savings	9.067.519.266	
Hijrah Bisnis savings	722.443.753	
Hijrah Rencana savings	212.880.228	
Hijrah Haji savings	51.196.610	
Hijrah Simpel savings	11.004.307	
	<u>10.065.044.164</u>	
Bank		
Hijrah Prima savings	638.960.004	
Hijrah Bisnis savings	5.598.371	
	<u>644.558.375</u>	
Total	10.709.602.539	

b. By relationship:

	31 Desember/ December 31, 2022	
Non Bank		
Third parties	10.053.322.897	
Related parties (Note 41)	11.721.267	
	<u>10.065.044.164</u>	
Bank		
Third parties	644.558.375	
Total	10.709.602.539	

27. DANA SYIRKAH TEMPORER (Lanjutan)

b. Berdasarkan keterkaitan: (lanjutan)

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

	31 Desember/ December 31, 2023	
	Nisbah	Tingkat Bagi Hasil/ Profit Sharing Rate
Tabungan Hijrah Haji	1 : 99	0,05%
Tabungan Hijrah Simpel	2 : 98	0,10%
Tabungan Hijrah Bisnis	15 : 85	0,07%
Tabungan Hijrah Prima	10 : 90	0,25%
Tabungan Hijrah Rencana	30 : 70	1,15%

27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (Continued)

b. By relationship: (continued)

Mudharabah savings deposits are entitled to receive a share in profit derived by Bank from the use of funds received based on predetermined ratio.

	31 Desember/ December 31, 2022		
	Nisbah	Tingkat Bagi Hasil/ Profit Sharing Rate	
	1 : 99	0,04%	<i>Hijrah Haji savings</i>
	2 : 98	0,08%	<i>Hijrah Simpel savings</i>
	15 : 85	0,15%	<i>Hijrah Bisnis savings</i>
	10 : 90	0,22%	<i>Hijrah Prima savings</i>
	30 : 70	2,91%	<i>Hijrah Rencana savings</i>

(iii) Deposito Berjangka *Mudharabah*

(iii) *Mudharabah Time Deposits*

a. Berdasarkan keterkaitan:

a. By relationship:

	31 Desember/ December 31, 2023
Bukan Bank Rupiah	
Pihak ketiga	14.534.898.803
Pihak berelasi (Catatan 41)	7.543.517.947
	22.078.416.750
Mata uang asing	
Pihak ketiga	1.102.818.382
Pihak berelasi (Catatan 41)	1.640.654.575
	2.743.472.957
	24.821.889.707
Bank Rupiah	
Pihak ketiga	1.215.984.725
Mata uang asing	
Pihak ketiga	538.895.000
	1.754.879.725
Jumlah	26.576.769.432

	31 Desember/ December 31, 2022
	14.099.697.500
	9.782.443.520
	23.882.141.020
	416.831.079
	844.113.021
	1.260.944.100
	25.143.085.120
	984.024.867
	373.620.000
	1.357.644.867
Jumlah	26.500.729.987

Non Bank Rupiah
<i>Third parties</i>
<i>Related parties (Note 41)</i>
Foreign currencies
<i>Third parties</i>
<i>Related parties (Note 41)</i>
Bank Rupiah
<i>Third parties</i>
Foreign currencies
<i>Third parties</i>
Total

27. DANA SYIRKAH TEMPORER (Lanjutan)

27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (Continued)

(iii) Deposito Berjangka *Mudharabah* (lanjutan)

(iii) *Mudharabah Time Deposits* (continued)

b. Berdasarkan jangka waktu:

b. By period:

	31 Desember/ December 31, 2023
Rupiah	
1 bulan	14.611.978.638
3 bulan	3.889.124.867
4 bulan	50.350.000
6 bulan	2.381.071.175
12 bulan	2.361.876.795
	<u>23.294.401.475</u>
Mata uang asing	
Dolar Amerika Serikat	
1 bulan	3.139.770.338
3 bulan	46.538.949
6 bulan	71.404.438
12 bulan	24.654.232
	<u>3.282.367.957</u>
Jumlah	26.576.769.432

	31 Desember/ December 31, 2022
16.107.796.113	
3.197.318.645	
102.515.074	
2.540.043.552	
2.918.492.503	
<u>24.866.165.887</u>	
1.502.189.767	
28.810.129	
41.692.203	
61.872.001	
<u>1.634.564.100</u>	
26.500.729.987	

Rupiah
1 month
3 months
4 months
6 months
12 months
Foreign currencies
US Dollar
1 month
3 months
6 months
12 months
Total

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

c. By remaining period to maturity:

	31 Desember/ December 31, 2023
Rupiah	
≤ 1 bulan	16.715.264.895
> 1 - ≤ 3 bulan	3.782.692.236
> 3 - ≤ 6 bulan	1.621.276.652
> 6 - 12 bulan	1.175.167.692
	<u>23.294.401.475</u>
Mata uang asing	
Dolar Amerika Serikat	
≤ 1 bulan	3.054.151.086
> 1 - ≤ 3 bulan	154.999.806
> 3 - ≤ 6 bulan	54.982.615
> 6 - 12 bulan	18.234.450
	<u>3.282.367.957</u>
Jumlah	26.576.769.432

	31 Desember/ December 31, 2022
18.472.765.580	
3.126.511.248	
1.996.885.506	
1.270.003.553	
<u>24.866.165.887</u>	
1.527.691.212	
33.407.101	
22.968.575	
50.497.212	
<u>1.634.564.100</u>	
26.500.729.987	

Rupiah
≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 6 months
> 6 - 12 months
Foreign currencies
US Dollar
≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 6 months
> 6 - 12 months
Total

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Mudharabah time deposits are entitled to receive a share in profit derived by the Bank from the use of funds received based on predetermined ratio.

27. DANA SYIRKAH TEMPORER (Lanjutan)

(iv) Sukuk Mudharabah

	31 Desember/ December 31, 2023
Pihak ketiga	
Sukuk Mudharabah BMI	2.440.856.000
Sukuk Mudharabah Trust Certificate	1.600.000.000
Beban Bagi Hasil Sukuk	616.968.621
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	475.000.000
Sertifikat Berdasarkan Prinsip Syariah (SIPA)	350.000.000
Pihak berelasi (Catatan 41)	
Sukuk Mudharabah Subordinasi	2.000.000.000
Jumlah	7.482.824.621

Sukuk Mudharabah Subordinasi

Berdasarkan akta Perjanjian Penerbitan Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, No.9 tanggal 9 Maret 2022, Bank menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah jangka panjang yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum dengan jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerbitan sejumlah Rp2.000.000.000 dengan nisbah pemegang sukuk sebesar 58,04%.

Sukuk Mudharabah BMI

Sukuk Mudharabah BMI Merupakan surat berharga yang diterbitkan Bank dalam bentuk Sukuk Mudharabah dengan jumlah pokok sebesar Rp2.440.856.000 kepada PT PPA. Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh Bank tidak melalui penawaran umum (*public offering*) tetapi dilakukan dengan mekanisme penawaran terbatas (*private placement*).

Berdasarkan akta Perjanjian Penerbitan Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, No.20 tanggal 15 November 2021, Bank menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerbitan sejumlah Rp2.440.856.000 dengan Nisbah pemegang sukuk sebesar 50,72%.

Pada akhir periode penerbitan Sukuk Mudharabah, saldo kewajiban Bank atas Sukuk tersebut akan menjadi pokok Sukuk Mudharabah. Hingga pada akhir periode, saldo kewajiban Bank Muamalat atas Sukuk Mudharabah BMI sebesar Rp13.051.069.000 kepada PT PPA.

27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (Continued)

(iv) Mudharabah Sukuk

	31 Desember/ December 31, 2022	
Third parties		
BMI Mudharabah Sukuk Trust Certificate	2.440.856.000	
Mudharabah Sukuk Sukuk Profit Sharing	1.600.000.000	
Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)	484.237.625	
Sharia Based Certificate (SIPA)	--	
Related parties (Note 41)		
Subordinated Mudharabah Sukuk	2.000.000.000	
Total	6.525.093.625	

Subordinated Mudharabah Sukuk

Based on the Mudharabah Sukuk Issuance Agreement listed in the Notarial Deed of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, No. 9 dated March 9, 2022, the Bank issued long term subordinated mudharabah sukuk without public offering for a period of 10 years from the date of issue amounting to Rp2,000,000,000 with a sukuk holder ratio of 58.04%.

BMI Mudharabah Sukuk

It represents securities issued by the Bank in the form of Mudharabah Sukuk with total principal amount of Rp2,440,856,000 to PT PPA. The Mudharabah Sukuk was not issued through public offering, instead it was issued through private placement.

Based on the Mudharabah Sukuk Issuance Agreement listed in the Notarial Deed of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, No. 20 dated November 15, 2021, the Bank issued Mudharabah Sukuk for a period of 20 years from the date of issue amounting to Rp2,440,856,000 with a sukuk holder ratio of 50.72%.

At the end of each issuance period of the Mudharabah Sukuk, the total of Bank investment plan will become the principal of the Mudharabah Sukuk. Ultimately, at the end, the total investment plan will amount to Rp13,051,069,000 on the account of PT PPA.

27. DANA SYIRKAH TEMPORER (Lanjutan)

(iv) *Sukuk Mudharabah* (lanjutan)

Sukuk Mudharabah Trust Certificate:

Merupakan surat berharga yang diterbitkan Bank dalam bentuk Sukuk *Mudharabah* dengan jumlah pokok sebesar Rp1.600.000.000 kepada Mawthiq SPC Limited. Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan oleh Bank tidak melalui penawaran umum (*public offering*) tetapi dilakukan dengan mekanisme penawaran terbatas (*private placement*). Sukuk ini terdiri dari tiga tahap penerbitan dengan jangka waktu total 20 (dua puluh) tahun.

Adapun tiga tahap penerbitan Sukuk *Mudharabah* adalah:

1. Tahap ke-1: terhitung sejak tanggal 29 Juni 2018 hingga 29 Juni 2028.
2. Tahap ke-2: terhitung sejak tanggal 29 Juni 2028 hingga 29 Juni 2033.
3. Tahap ke-3: terhitung sejak tanggal 29 Juni 2033 hingga 29 Juni 2038.

Pada setiap akhir periode penerbitan Sukuk *Mudharabah*, saldo kewajiban Bank Muamalat atas Sukuk tersebut akan menjadi pokok Sukuk *Mudharabah* periode selanjutnya. Hingga pada akhir Tahap ke-3, saldo kewajiban Bank Muamalat atas Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp8.000.000.000 kepada Mawthiq SPC Limited.

Jumlah kewajiban Bank Muamalat kepada Mawthiq SPC Limited atas Sukuk *Mudharabah* pada setiap tahap, adalah sebagai berikut:

	Akhir Periode/ End of Period			
	Tahap/ Phase 1	Tahap/ Phase 2	Tahap/ Phase 3	
Pokok Sukuk <i>Mudharabah</i>	1.600.000.000	4.262.643.256	5.978.098.409	<i>Sukuk Initial Amount</i>
Kewajiban bagi hasil Sukuk	1.265.356.314	1.441.734.977	2.021.901.591	<i>Sukuk profit sharing</i>
<i>Commitment fee</i>	1.397.286.942	273.720.176	--	<i>Commitment fee</i>
Jumlah Kewajiban	4.262.643.256	5.978.098.409	8.000.000.000	<i>Total Liabilities</i>

(vi) Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (SIMA)

(iv) *Mudharabah Sukuk* (continued)

Trust Certificate Mudharabah Sukuk:

It represents securities issued by the Bank in the form of Mudharabah Sukuk with total principal amount of Rp1,600,000,000 to Mawthiq SPC Limited. The Mudharabah Sukuk was not issued through public offering, instead it was issued through private placement. This Sukuk has a period of 20 (twenty) years with three-phases period of issuance.

The three phases of issuance of Mudharabah Sukuk are:

1. *Phase I: from June 29, 2018 until June 29, 2028.*
2. *Phase II: from June 29, 2028 until June 29, 2033.*
3. *Phase III: from June 29, 2033 until June 29, 2038.*

At the end of each period, the total of Bank investment plan will become the principal amount of the next phase. Ultimately, at the end of phase III, the total investment plan will amount to Rp8,000,000,000 on the account of Mawthiq SPC Limited.

The total liabilities of Bank to Mawthiq SPC Limited for Mudharabah Sukuk in each phase are as follows:

(vi) *Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)*

	31 Desember/ December 31, 2023		31 Desember/ December 31, 2022		
	Tingkat bagi hasil/ Revenue sharing rate	Jumlah/ Total	Tingkat bagi hasil/ Revenue sharing rate	Jumlah/ Total	
Bank Sumselbabel	6,45%	100.000.000	--	--	<i>Bank Sumselbabel</i>
Bank Amar	6,45%	35.000.000	--	--	<i>Bank Amar</i>
Bank Sulselbar UUS	6,45%	40.000.000	--	--	<i>Bank Sulselbar SBU</i>
Bank Sulselbar UUS	6,31%	100.000.000	--	--	<i>Bank Sulselbar SBU</i>
Bank Jatim UUS	6,30%	100.000.000	--	--	<i>Bank Jatim SBU</i>
BTPN Syariah	6,26%	100.000.000	--	--	<i>BTPN Syariah</i>
Jumlah		475.000.000		--	<i>Total</i>

27. DANA SYIRKAH TEMPORER (Lanjutan)

(vii) Sertifikat Berdasarkan Prinsip Syariah (SiPA)

SiPA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah sebagai pernyataan penerimaan pengelolaan dana di PUAS dengan akad *wakalah bi al-istitsmar*.

	31 Desember/ December 31, 2023	
	Tingkat bagi hasil/ Revenue sharing rate	Jumlah/ Total
BPD Kalimantan UUS	6,25%	50.000.000
Bank NTB Syariah	6,30%	100.000.000
Bank Jabar Banten Syariah	6,15%	200.000.000
Jumlah		350.000.000

27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (Continued)

(vii) Sharia Based Certificate (SiPA)

SiPA is a certificate issued by Sharia Bank or Sharia Business Unit as a statement of receipt of fund management in PUAS based on *wakalah bi al-istitsmar*.

	31 Desember/ December 31, 2022	
	Tingkat bagi hasil/ Revenue sharing rate	Jumlah/ Total
BPD Kalimantan SBU	--	--
Bank NTB Syariah	--	--
Bank Jabar Banten Syariah	--	--
Total		--

28. MODAL SAHAM

Pada tahun 2023, Bank melakukan *Reverse Stock Split*, sehingga terdapat perubahan jumlah lembar saham dan nilai nominal saham. *Reverse Stock Split* dilakukan dengan rasio 3:2 (tiga saham digabung menjadi dua saham). Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

28. SHARE CAPITAL

In 2023, the Bank will carry out a *Reverse Stock Split*, so that there will be changes in the number of shares and nominal value of shares. *Reverse Stock Split* is carried out with a ratio of 3:2 (three shares are combined into two shares). The composition of shareholders as of December 31 2023 is as follows

Nama pemegang saham	31 Desember 2023/ December 31, 2023			Name of shareholders
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital	
Saham Seri A				A Series Shares
Nilai nominal Rp300 (dalam nilai penuh)				Nominal value of Rp300 (in full amount)
Badan Pengelola Keuangan Haji	154.938.730	0,46%	46.481.619	Badan Pengelola Keuangan Haji
Koperasi Perkayuan Apkindo MPI	88.757.653	0,27%	26.627.296	Koperasi Perkayuan Apkindo MPI
Masyarakat (masing-masing kepemilikan dibawah 0,20%)	307.403.067	0,92%	92.220.920	Public (each below 0.20%)
Jumlah Saham Seri A	551.099.450	1,65%	165.329.835	Total A Series Shares
Saham Seri B				B Series Shares
Nilai nominal Rp150 (dalam nilai penuh)				Nominal value of Rp150 (in full amount)
Badan Pengelola Keuangan Haji	5.184.211.944	15,55%	777.631.792	Badan Pengelola Keuangan Haji
Islamic Development Bank	680.513.489	2,04%	102.077.023	Islamic Development Bank
Reza Rhenaldi Syaiful	113.510.473	0,34%	17.026.571	Reza Rhenaldi Syaiful
Dewi Monita	113.500.000	0,34%	17.025.000	Dewi Monita
Andre Mirza Hartawan, MBA, Ir.	113.000.000	0,34%	16.950.000	Andre Mirza Hartawan, MBA, Ir.
Masyarakat (masing-masing kepemilikan dibawah 0,20%)	49.299.534	0,15%	7.394.930	Public (each below 0.20%)
Jumlah Saham Seri B	6.254.035.440	18,76%	938.105.316	Total B Series Shares

28. MODAL SAHAM (Lanjutan)

28. SHARE CAPITAL (Continued)

Nama pemegang saham	31 Desember 2023/ December 31, 2023			Name of shareholders
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital	
Saham Seri C				C Series Shares
Nilai nominal Rp45 (dalam nilai penuh)				Nominal value of Rp45 (in full amount)
Badan Pengelola Keuangan Haji	22.222.222.223	66,64%	1.000.000.000	Badan Pengelola Keuangan Haji
Andre Mirza Hartawan, MBA, Ir.	1.618.033.333	4,85%	72.811.500	Andre Mirza Hartawan, MBA, Ir.
Apliani	826.844.008	2,48%	37.207.980	Apliani
Reza Rhenaldi Syaiful	615.371.734	1,85%	27.691.728	Reza Rhenaldi Syaiful
Dewi Monita	614.650.000	1,84%	27.659.250	Dewi Monita
Andre Latidjah	311.121.535	0,93%	18.671.469	Andre Latidjah
Syaiful Amir	113.373.295	0,34%	5.101.798	Syaiful Amir
Siti Farida Syaiful	108.000.000	0,32%	4.860.000	Siti Farida Syaiful
Masyarakat (masing-masing kepemilikan dibawah 0,20%)	110.409.943	0,34%	297.448	Public (each below 0.20%)
Jumlah Saham Seri C	26.540.026.071	79,59%	1.194.301.173	Total C Series Shares
Jumlah	33.345.160.961	100,00%	2.297.736.324	Total

Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of shareholders as of December 31, 2022, is as follows:

Nama pemegang saham	31 Desember 2022/ December 31, 2022			Name of shareholders
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital	
Saham Seri A				A Series Shares
Nilai nominal Rp200 (dalam nilai penuh)				Nominal value of Rp200 (in full amount)
Badan Pengelola Keuangan Haji	232.408.095	0,46%	46.481.619	Badan Pengelola Keuangan Haji
Koperasi Perkayuan Apkindo MPI	133.136.480	0,27%	26.627.296	Koperasi Perkayuan Apkindo MPI
Masyarakat (masing-masing kepemilikan dibawah 0,20%)	461.104.600	0,92%	92.220.920	Public (each below 0.20%)
Jumlah Saham Seri A	826.649.175	1,65%	165.329.835	Total A Series Shares
Saham Seri B				B Series Shares
Nilai nominal Rp100 (dalam nilai penuh)				Nominal value of Rp100 (in full amount)
Badan Pengelola Keuangan Haji	7.776.317.916	15,55%	777.631.792	Badan Pengelola Keuangan Haji
Islamic Development Bank	1.020.770.234	2,04%	102.077.023	Islamic Development Bank
Reza Rhenaldi Syaiful	170.265.710	0,34%	17.026.571	Reza Rhenaldi Syaiful
Dewi Monita	170.250.000	0,34%	17.025.000	Dewi Monita
Andre Mirza Hartawan, MBA, Ir.	169.500.000	0,34%	16.950.000	Andre Mirza Hartawan, MBA, Ir.
Masyarakat (masing-masing kepemilikan dibawah 0,20%)	73.949.300	0,15%	7.394.930	Public (each below 0.20%)
Jumlah Saham Seri B	9.381.053.160	18,76%	938.105.316	Total B Series Shares

28. MODAL SAHAM (Lanjutan)

28. SHARE CAPITAL (Continued)

31 Desember 2022/ December 31, 2022				
		Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital	
Nama pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares			Name of shareholders
Saham Seri C				C Series Shares
Nilai nominal Rp30 (dalam nilai penuh)				Nominal value of Rp30 (in full amount)
Badan Pengelola Keuangan Haji	33.333.333.334	66,64%	1.000.000.000	Badan Pengelola Keuangan Haji
Andre Mirza Hartawan, MBA,Ir.	2.427.050.000	4,85%	72.811.500	Andre Mirza Hartawan, MBA, Ir.
Apliani	1.240.266.012	2,48%	37.207.980	Apliani
Reza Rhenaldi Syaiful	923.057.601	1,85%	27.691.728	Reza Rhenaldi Syaiful
Dewi Monita	921.975.000	1,84%	27.659.250	Dewi Monita
Andre Latidjah	466.682.303	0,93%	18.671.469	Andre Latidjah
Syaiful Amir	170.059.943	0,34%	5.101.798	Syaiful Amir
Siti Farida Syaiful	162.000.000	0,32%	4.860.000	Siti Farida Syaiful
Masyarakat (masing-masing kepemilikan dibawah 0,20%)	165.614.914	0,34%	297.448	Public (each below 0.20%)
Jumlah Saham Seri C	39.810.039.107	79,59%	1.194.301.173	Total C Series Shares
Jumlah	50.017.741.442	100,00%	2.297.736.324	Total

Saham Bank terdiri dari saham Seri A, B dan C dengan hak suara dan hak dividen yang sama. Saham seri A adalah saham pendiri yang hanya dapat dimiliki atau dipindahkan haknya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang didirikan menurut perundang-undangan Indonesia dan para pengurus nya mayoritas mutlak adalah warga negara Indonesia. Saham Seri B dan C adalah saham biasa yang dikeluarkan kemudian yang dapat dimiliki baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing.

The Bank's shares consist of A, B and C Series shares, which have the same voting and dividend rights. A series shares are founder shares which can only be owned or transferred to Indonesian citizens, or a corporation established under Indonesian laws and regulations, wherein the members of management should all be Indonesian citizens. B and C series shares can be owned by either Indonesian or foreign citizens or an Indonesian or foreign corporation.

Sesuai dengan Akta Hibah No. 37, 38 dan 39 tanggal 21 Juni 2021, Akta Hibah No. 22, 23 dan 24 tanggal 15 November 2021 serta Addendum Akta Hibah No.27 tanggal 16 November 2021 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menerima pengalihan saham melalui hibah dari para pemegang saham pengendali (PSP) Bank Muamalat, yakni Islamic Development Bank (IsDB), Boubyan Bank, Atwill Holdings Limited, National Bank of Kuwait, IDF Investment Foundation dan BMF Holdings Limited sebanyak 7.903.112.181 saham atau setara dengan 77,42%. Dengan demikian, total kepemilikan saham BPKH di Bank Muamalat per tanggal 16 November 2021 naik menjadi 78,45%.

In accordance with the Deeds of Grant No. 37, 38 and 39 dated June 21, 2021, Deeds of Grant No. 22, 23 and 24 dated November 15, 2021 and Addendum to the Deed of Grant No. 27 dated November 16, 2021 of Notary Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Master of Notary, Notary in South Jakarta Administrative City, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) has received a share transfer through a grant from the controlling shareholders (PSP) of Bank Muamalat, namely Islamic Development Bank (IsDB), Boubyan Bank, Atwill Holdings Limited, National Bank of Kuwait, IDF Investment Foundation and BMF Holdings Limited with total amount of 7,903,112,181 shares or equivalent to 77.42%. Thus, the total share ownership of BPKH in Bank Muamalat as of November 16, 2021 increased to 78.45%.

- Boubyan Bank K.S.C.P telah menghibahkan sejumlah 2.245.694.513 (dua miliar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga belas) saham seri B kepada BPKH.
- National Bank of Kuwait S.A.K.P telah menghibahkan sejumlah 862.755.656 (delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam) saham seri B kepada BPKH.

- Boubyan Bank K.S.C.P has granted a total of 2,245,694,513 (two billion two hundred forty five million six hundred ninety four thousand five hundred and thirteen) B Series shares to BPKH.
- National Bank of Kuwait S.A.K.P has granted a total of 862,755,656 (eight hundred sixty two million seven hundred fifty five thousand six hundred and fifty six) B Series shares to BPKH.

28. MODAL SAHAM (Lanjutan)

- c. Atwill Holdings Limited telah menghibahkan sejumlah 1.828.090.034 (satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta Sembilan puluh ribu tiga puluh empat) saham Seri B kepada BPKH.
- d. BMF Holdings Limited telah menghibahkan sejumlah 289.985.977 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh) Saham Seri B kepada BPKH.
- e. IDF Investment Foundation telah menghibahkan sejumlah 355.461.941 (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh satu) Saham Seri B kepada BPKH.
- f. IsDB telah menghibahkan sejumlah 2.321.124.060 (dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu enam puluh) Saham, yaitu setara dengan 22,74%, yang terdiri dari 132.458.095 Saham Seri A dan 2.188.665.965 Saham Seri B kepada BPKH.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 2023, para pemegang saham telah memutuskan:

- a. Persetujuan Penggabungan Nilai Nominal Saham (*Reverse Stock Split* (RSS));
- b. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2023, para pemegang saham telah memutuskan:

- a. Persetujuan Laporan Tahunan Bank Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan Bank Untuk Tahun Buku 2022;
- b. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Bank Tahun Buku 2022;
- c. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2022, para pemegang saham telah memutuskan:

- a. Persetujuan Laporan Tahunan Bank Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2021 serta Pengesahan Laporan Keuangan Bank Untuk Tahun Buku 2021;
- b. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Bank Tahun Buku 2021;
- c. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Bank Tahun Buku 2022 dan Audit Lain yang Dibutuhkan Bank;
- d. Persetujuan tindakan penjaminan aset Bank sebagai jaminan utang Bank atau pihak lain atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial dan/atau pihak lain.

28. SHARE CAPITAL (Continued)

- c. Atwill Holdings Limited has granted a total of 1,828,090,034 (one billion eight hundred twenty eight million ninety thousand and thirty four) B Series shares to BPKH.
- d. BMF Holdings Limited has granted a total of 289,985,977 (two hundred eighty nine million nine hundred eighty five thousand nine hundred and seventy seven) B Series Shares to BPKH.
- e. IDF Investment Foundation has granted a total of 355,461,941 (three hundred fifty five million four hundred sixty one thousand nine hundred and forty one) B Series shares to BPKH.
- f. IsDB has granted a total of 2,321,124,060 (two billion three hundred twenty one million one hundred twenty four thousand and sixty) shares, which is equivalent to 22.74% shares, consisting of 132,458,095 A Series Shares and 2,188,665,965 B Series Shares to BPKH.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on November 13, 2023, the shareholders have decided the:

- a. Approval of the Merger of Nominal Value of Shares (*Reverse Stock Split* (RSS));
- b. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association

Based on the Annual General Meeting of Shareholders held on May 11, 2023, the shareholders have decided the:

- a. Approval of the Bank's 2022 Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for Fiscal Year 2022 and Ratification of the Bank's Financial Statements for Fiscal Year 2022;
- b. Approval of the Use of Net Profit for Fiscal Year 2022;
- c. Granting of authority to the Board of Commissioners to appoint public accounting firm to audit the financial statements for fiscal year 2023.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders held on June 24, 2022, the shareholders have decided the:

- a. Approval of the Bank's 2021 Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for Fiscal Year 2021 and Ratification of the Bank's Financial Statements for Fiscal Year 2021;
- b. Approval of the Use of Net Profit for Fiscal Year 2021;
- c. Appointment of Public Accounting Firm to Audit the Bank's Financial Statements for Fiscal Year 2022 and Conduct Other Audits Required by the Bank;
- d. Approval of pledging the Bank's assets as collateral for funds borrowing of the Bank or other parties with regard to financing facilities provided by PT Sarana Multigriya Finansial and/or other parties.

28. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Pemegang saham mayoritas Bank adalah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdapat Dewan Komisaris yang menjadi pemegang saham Bank, yaitu Bapak Andre Mirza Hartawan, MBA, Ir.

28. SHARE CAPITAL (Continued)

As of December 31, 2023 and 2022 the majority shareholder of the Bank is Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia.

As of December 31, 2023 and 2022, one member of the Board of Commissioner is a shareholder of the Bank, namely Mr. Andre Mirza Hartawan, MBA, Ir.

29. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor terdiri dari :

	31 Desember/ December 31, 2023
Jumlah yang diterima dari:	
Penawaran Umum Terbatas V, 2013	1.070.048.797
Penawaran Umum Terbatas IV, 2010	383.216.603
Penawaran Umum Terbatas III, 2005	133.858.215
Penawaran Umum Terbatas II, 2002	662.290
Penawaran Umum Perdana 1993	143.553
Biaya emisi saham yang berasal dari:	
Penawaran Umum Terbatas VI, 2022	(7.791.851)
Penawaran Umum Terbatas V, 2013	(4.854.701)
Penawaran Umum Terbatas IV, 2010	(1.983.700)
Penawaran Umum Terbatas III, 2005	(493.727)
Penawaran Umum Terbatas II, 2002	(1.672.073)
Jumlah	1.571.133.406

29. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Additional paid in capital consists of :

	31 Desember/ December 31, 2022	
Proceeds from issuance of:		
Limited Public Offering V, 2013	1.070.048.797	
Limited Public Offering IV, 2010	383.216.603	
Limited Public Offering III, 2005	133.858.215	
Limited Public Offering II, 2002	662.290	
Initial Public Offering 1993	143.553	
Share issuance cost from:		
Limited Public Offering VI, 2022	(7.791.851)	
Limited Public Offering V, 2013	(4.854.701)	
Limited Public Offering IV, 2010	(1.983.700)	
Limited Public Offering III, 2005	(493.727)	
Limited Public Offering II, 2002	(1.672.073)	
Total	1.571.133.406	

30. PENGGUNAAN LABA NETO

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2023, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebesar 18,8% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 atau sebesar Rp5.001.774.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2022, para pemegang saham telah memutuskan untuk melakukan penyisihan seluruh laba neto tahun 2021 sebesar Rp8.927.051 ke akun cadangan umum tahun 2021.

30. APPROPRIATION OF NET INCOME

Based on the Annual General Meeting of Shareholders held on May 11, 2023, the shareholders approve the distribution of 18.8% of Bank's net profit for the 2022 Fiscal Year or equal to Rp5,001,774 as dividends to the Shareholders.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders held on June 24, 2022, the shareholders have decided to establish provision for all net income in 2021 amounting to Rp8,927,051 to the 2021 general reserve account.

31. PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB

31. REVENUE FROM FUND MANAGEMENT BY BANK AS MUDHARIB

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Rupiah		
Pendapatan dari bagi hasil		
Musarakah	746.769.654	638.357.550
Mudharabah	62.669.495	60.220.589
Jumlah	809.439.149	698.578.139
Pendapatan dari penjualan		
Murabahah	388.608.232	433.650.340
Istishna	110.334	151.056
Jumlah	388.718.566	433.801.396
Pendapatan dari ijarah -neto	142.674	43.668
Pendapatan usaha utama lainnya		
Pendapatan piutang salam	20.104.731	--
Pendapatan bonus FASBIS	44.401.511	35.550.448
Pendapatan bagi hasil surat berharga - reksadana	521.794	13.571.501
Pendapatan bagi hasil surat berharga	201.198.573	161.398.664
Pendapatan fee wesel ekspor	493.089	849.717
Pendapatan bagi hasil penempatan pada bank lain	4.118.649	382.233
Pendapatan bonus Giro Bank	58.327	76.051
Keuntungan penjualan surat berharga	8.743.983	--
Jumlah	279.640.657	211.828.614
Mata uang asing		
Pendapatan dari bagi hasil		
Musarakah	68.369.803	23.707.120
Mudharabah	--	--
Jumlah	68.369.803	23.707.120
Pendapatan dari penjualan		
Murabahah	14.742.452	35.496.775
Istishna	--	--
Jumlah	14.742.452	35.496.775
Pendapatan usaha utama lainnya		
Pendapatan bagi hasil surat berharga	547.407.842	330.852.408
Keuntungan penjualan surat berharga	41.448.861	24.477.888
Keuntungan MTM surat berharga FVTPL	2.003.622	2.269.610
Pendapatan bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah	--	3.301.756
Pendapatan Bonus Giro Bank	511.499	47.205
Pendapatan term deposit BI	962.435	--
Jumlah	592.334.259	360.948.867
Jumlah	2.153.387.560	1.764.404.579

Rupiah	
Income from revenue sharing	
Musarakah	
Mudharabah	
Total	
Income from sales	
Murabahah	
Istishna	
Total	
Income from ijarah-net	
Other main operating income	
Salam receivable income	
Bonus from FASBIS	
Income from revenue sharing - mutual fund	
Income from revenue sharing from marketable securities	
Export bill fee	
Income from revenue sharing from placements with other banks	
Income from CA Placement	
Gain on sale from marketable securities	
Total	
Foreign currencies	
Income from revenue sharing	
Musarakah	
Mudharabah	
Total	
Income from sales	
Murabahah	
Istishna	
Total	
Other main operating income	
Income from revenue sharing from marketable securities	
Gain on sale from marketable securities	
MTM Gain on FVTPL marketable securities	
Bonus from Bank Indonesia Sharia Certificate	
Income from CA placement	
Income from Term Deposit in BI	
Total	
Total	

32. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER

Akun ini merupakan distribusi *bonus, margin* dan bagi hasil untuk nasabah:

	31 Desember/ December 31, 2023
Deposito berjangka <i>mudharabah</i>	1.150.782.111
Tabungan <i>mudharabah</i>	152.185.089
Sukuk <i>mudharabah</i> dan MTN subordinasi	489.388.424
Giro <i>mudharabah</i>	42.375.366
Beban bagi hasil pinjaman yang diterima	113.817.284
Jumlah	1.948.548.274

32. THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

This account represents distribution of *bonus, margin* and profit sharing to the customers:

	31 Desember/ December 31, 2022	
	832.720.155	<i>Mudharabah time deposits</i>
	159.081.859	<i>Mudharabah saving deposits</i>
	396.557.088	<i>Subordinated mudharabah Sukuk and MTN</i>
	37.832.435	<i>Mudharabah demand deposit</i>
	8.523.139	<i>Fund borrowing profit sharing</i>
Total	1.434.714.676	Total

33. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	31 Desember/ December 31, 2023
Jasa administrasi	690.538.795
Jasa layanan	146.570.618
Jasa transaksi ATM	37.273.003
Jasa transaksi L/C	13.807.421
Lainnya	16.355.913
Jumlah	904.545.750

Jasa administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp690.538.795 dan Rp948.244.294 dimana masing-masing sebesar Rp563.836.435 dan Rp846.937.847 merupakan penerimaan pembayaran atas debitur yang masuk dalam program pengalihan dan penjualan portofolio.

33. OTHER OPERATING INCOME

	31 Desember/ December 31, 2022	
	948.244.294	<i>Administration fees</i>
	96.959.015	<i>Service fee</i>
	49.206.088	<i>ATM transaction income</i>
	921.131	<i>L/C transaction income</i>
	2.409.971	<i>Others</i>
Total	1.097.740.499	Total

Administration fees for the years ended December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp690,538,795 and Rp948,244,294, respectively, of which Rp563,836,435 and Rp846,937,847, respectively, represents receipt of payment for debtors included in the portfolio transfer and sale program.

34. BEBAN KARYAWAN

	31 Desember/ December 31, 2023
Gaji, upah, tunjangan dan kesejahteraan karyawan tetap	574.316.057
Pendidikan dan pelatihan	40.949.374
Beban imbalan kerja (Catatan 25)	19.693.009
Jumlah	634.958.440

34. EMPLOYEE EXPENSES

	31 Desember/ December 31, 2022	
	569.698.669	<i>Salaries, wages, allowance and benefits for permanent employees</i>
	40.854.065	<i>Education and training</i>
	24.634.820	<i>Employee benefit expense (Note 25)</i>
Total	635.187.554	Total

34. BEBAN KARYAWAN (Lanjutan)

Rincian gaji dan tunjangan atas kelompok Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

34. EMPLOYEE EXPENSES (Continued)

The details of salaries and allowance of the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Sharia Supervisory Board and Executive Officers are as follows (unaudited):

31 Desember / December 31, 2023					
	Jumlah Pegawai/ Number of employee	Gaji/ Salaries	Tunjangan/ Allowance	Jumlah/ Total	
Dewan Komisaris/ Komite Audit	5	4.760.000	4.393.996	9.153.996	Board of Commissioners/Audit Committee
Direksi	5	8.297.274	12.252.446	20.549.720	Board of Directors
Dewan Pengawas Syariah	3	840.000	241.255	1.081.255	Sharia Supervisory Board
Pejabat Eksekutif	121	43.649.564	55.995.557	99.645.121	Executive officers
Jumlah	134	57.546.838	72.883.254	130.430.092	Total

31 Desember / December 31, 2022					
	Jumlah Pegawai/ Number of employee	Gaji/ Salaries	Tunjangan/ Allowance	Jumlah/ Total	
Dewan Komisaris/ Komite Audit	7	5.772.666	4.093.771	9.866.437	Board of Commissioners/Audit Committee
Direksi	5	10.098.800	15.084.065	25.182.865	Board of Directors
Dewan Pengawas Syariah	3	840.000	215.336	1.055.336	Sharia Supervisory Board
Pejabat Eksekutif	115	41.176.040	54.104.901	95.280.941	Executive officers
Jumlah	130	57.887.506	73.498.073	131.385.579	Total

35. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

35. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Asuransi penjaminan pihak ketiga (Catatan 44)	90.223.044	89.608.694	Insurance for third parties fund guarantee (Note 44)
Gaji, upah, tunjangan karyawan <i>outsourcing</i>	78.020.714	83.842.463	Salaries, wages and benefits for outsourced employees
Penyusutan aset tetap (Catatan 15)	74.362.548	115.329.253	Depreciation of premises and equipment (Note 15)
Sewa	60.583.015	57.327.383	Rent
Perbaikan dan pemeliharaan	56.196.626	56.981.702	Repair and maintenance
Listrik, air dan telekomunikasi	41.860.914	44.817.250	Electricity, water and telecommunication
Beban kantor	24.736.568	15.478.239	Office expenses
Promosi	16.398.829	20.102.071	Promotion
Transportasi	10.157.151	8.895.229	Transportation
Biaya ATM	8.668.221	8.073.020	ATM expenses
Penyusutan aset hak guna (Catatan 16)	4.582.176	1.592.164	Depreciation of right of use assets (Note 16)
Perjalanan dinas	3.887.106	2.916.287	Business trip
Perlengkapan kantor	3.548.761	3.003.051	Office supplies
Asuransi aset tetap	2.478.085	3.013.509	Insurance for premises and equipment
Jumlah	475.703.758	510.980.315	Total

**36. BEBAN (PEMBALIKAN) CADANGAN KERUGIAN
PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NON
PRODUKTIF**

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2023
Penempatan pada Bank lain	(418.830)
Investasi Pada Surat Berharga	--
Piutang	(91.808.252)
Pembiayaan <i>Musarakah</i>	(57.538.155)
Pinjaman <i>Qardh</i>	30.300.008
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	978.448
Tagihan akseptasi	(441.212)
Aset terbengkalai	(19.902.077)
Aset lain-lain	14.519.432
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	(732)
Penyertaan Modal Sementara	25.000.000
	(99.311.370)
Aset Non Produktif	
Agunan pembiayaan yang diambil alih	5.156.882
	5.156.882
Jumlah	(94.154.488)

**36. PROVISION FOR (REVERSAL OF) IMPAIRMENT
LOSSES OF EARNING AND NON EARNING ASSETS**

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2022	
	--	Placement with other Banks
	(9.975.000)	Investment In Marketable Securities
	78.856.065	Receivables
	(18.048.287)	Musarakah financing
	14.420.869	Funds of qardh
	(2.664.280)	Mudharabah financing
	2.919.447	Acceptance receivables
	--	Abandoned assets
	63.557.291	Other assets
	461.649	Estimated losses on commitments and contingencies
	--	Temporary equity participation
	129.527.754	
	--	Non - Earning Assets
	--	Foreclosed assets
Jumlah	129.527.754	Total

37. BEBAN OPERASIONAL LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2023
Beban <i>fee collection</i> , dana tabungan giro dan deposito <i>mudharabah</i>	42.323.275
Jasa konsultan	26.703.222
Keperluan umum dan kegiatan kantoor	9.710.873
Beban premi asuransi	4.984.758
Iuran keanggotaan	1.315.434
Lain-lain	493.848
Jumlah	85.531.410

37. OTHER OPERATING EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2022	
	31.473.983	Collection fee, saving deposit, demand deposits and mudharabah time deposits fee
	19.987.099	Consultant fees
	10.382.644	General expenses for office activities
	6.417.273	Insurance premiums
	1.116.002	Membership fees
	2.201.447	Others
Jumlah	71.578.448	Total

38. PENDAPATAN NON OPERASIONAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2023
Pendapatan <i>fee DPLK</i>	15.713.666
Pendapatan non usaha	21.899.392
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 15)	1.773.622
Jumlah	39.386.680

38. NON OPERATING INCOME

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2022	
	10.130.746	Fee from DPLK
	3.304.625	Non operating income
	1.016.013	Gain on sale of premises and equipment (Note 15)
Jumlah	14.451.384	Total

39. BEBAN NON OPERASIONAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2023
Beban pungutan wajib OJK	27.613.613
Beban pajak	9.330.312
Beban penghapusan inventaris	1.153.848
Sumbangan dan hadiah	573.554
Lain-lain	4.684.331
Jumlah	43.355.658

Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp22.687.617 dimana sebesar Rp20.160.358 merupakan kerugian atas hasil revaluasi aset tetap yang dilakukan pada tahun 2022.

39. NON OPERATING EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2022	
	26.504.628	OJK mandatory levy expense
	9.593.402	Tax expense
	173.842	Loss on sale of equipments
	1.358.401	Donation and gifts
	22.687.617	Others
Total	60.317.890	

Others for the years ended December 31, 2022 is amounting to Rp22,687,617, of which Rp20,160,358 represents a loss from the revaluation of premises and equipment carried out in 2022.

40. LABA PER SAHAM

a. Laba per Saham Dasar

Berikut ini data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:

	31 Desember/ December 31, 2023
Laba bersih	
Laba bersih untuk perhitungan laba per saham dasar	13.294.252

	Lembar / Shares
Jumlah saham	
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba per saham dasar (dalam nilai penuh)	33.345.160.961

Laba Per Saham	0,40
-----------------------	------

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 2023, para pemegang saham telah memutuskan melakukan *Reverse Stock Split*, sehingga terdapat perubahan jumlah lembar saham dan nilai nominal saham. *Reverse Stock Split* dilakukan dengan rasio 3:2 (tiga saham digabung menjadi dua saham).

40. EARNINGS PER SHARE

a. Basic Earnings per Share

The following data is used to compute the basic earnings per share:

	31 Desember/ December 31, 2022 (Sesudah Reverse Stock Split)	31 Desember/ December 31, 2022 (Sebelum Reverse Stock Split)	
	26.581.068	26.581.068	Net income
			Net income for computation of basic earnings per share

	Lembar / Shares	Lembar / Shares	
	33.345.160.961	50.017.741.442	Number of shares
			Weighted average number of outstanding ordinary shares for computing basic earnings per share (in full amount)

	0,80	0,53	Earnings Per Share
--	------	------	---------------------------

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on November 13, 2023, the shareholders have decided the Bank will carry out a *Reverse Stock Split*, so that there will be changes in the number of shares and nominal value of shares. *Reverse Stock Split* is carried out with a ratio of 3:2 (three shares are combined into two shares).

40. LABA PER SAHAM (Lanjutan)

b. Laba per Saham Dilusian

Tidak terdapat laba per saham dilusian karena Bank tidak memiliki efek berpotensi saham dilusian.

40. EARNINGS PER SHARE (Continued)

b. Diluted Earnings per Share

There are no diluted earnings per share since there are no potential diluted shares.

41. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Pihak-pihak berelasi terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan kunci, pemegang saham, komisaris PT Syarikat Takaful Indonesia, Pengurus utama Baitul Maal Muamalat dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat, PT Al Ijarah Indonesia Finance berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi berelasi

Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat dari hubungan / Nature of relationship
Badan Pengelola Keuangan Haji	Entitas Induk/ Parent entity
PT Al Ijarah Indonesia Finance	Entitas asosiasi/ Associate
PT Syarikat Takaful Indonesia	Entitas asosiasi/ Associate

b. Transaksi pihak-pihak berelasi

Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat dari hubungan / Nature of relationship
Direksi, Karyawan kunci/ Director, Key Employees	Hubungan pengendalian kegiatan Bank / Significant influence on Bank's activities
Komisaris, Dewan pengawas syariah/ Commissioner, Sharia supervisory board	Hubungan pengendalian kegiatan Bank/ Significant influence on Bank's activities
Baitul Maal Muamalat	Hubungan pengendalian melalui karyawan kunci/ Significant influence through key employees

41. INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Related parties consist of Board of Commissioners, Board of Directors and key employees, Shareholders, Commissioner of PT Syarikat Takaful Indonesia, management of Baitul Maal Muamalat and Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat, PT Al Ijarah Indonesia Finance (subsidiary) based on SFAS No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures".

a. Type of relationships and transactions of related parties

Sifat dari transaksi / Nature of Transaction
Giro wadiah, deposito mudharabah dan sukuk Mudharabah subordinasi/ Wadiah demand deposit, mudharabah time deposits and Subordinated mudharabah sukuk
Piutang murabahah, pembiayaan mudharabah dan musyarakah, penyertaan saham/ Murabahah receivables, mudharabah and musyarakah financing investment in shares
Giro mudharabah, deposito mudharabah, penyertaan saham/ Murabahah receivables, mudharabah financing, investment in shares

b. Transaction with related parties

Sifat dari transaksi / Nature of Transaction
Piutang murabahah, pinjaman qardh, pembiayaan musyarakah, giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah / Murabahah receivables, funds of qardh, musyarakah financing, wadiah demand deposits, mudharabah saving deposit, and mudharabah time deposits
Giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah/ Wadiah demand deposit, mudharabah saving deposit, and mudharabah time deposits
Giro wadiah dan deposito mudharabah / Wadiah demand deposit and mudharabah time deposits

41. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

41. INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

For banking activities, the Bank has performed the following significant transactions with related parties:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Aset		
Piutang <i>murabahah</i> (Catatan 8)		
Karyawan kunci	7.636.329	2.934.438
	<u>7.636.329</u>	<u>2.934.438</u>
Pinjaman <i>qardh</i> (Catatan 9)		
Karyawan kunci	348.607	372.214
Pembiayaan <i>musyarakah</i> (Catatan 11)		
Karyawan kunci	11.256.269	769.504
	<u>11.256.269</u>	<u>769.504</u>
Aset <i>Ijarah</i>		
Karyawan kunci	--	14.563
Penyertaan Saham (Catatan 12)		
PT Al Ijarah Indonesia Finance	401.616.000	401.616.000
PT Syarikat Takaful Indonesia	6.095.237	6.095.237
	<u>407.711.237</u>	<u>407.711.237</u>
Investasi pada DPLK Muamalat (Catatan 16)	2.940.458	--
Jumlah aset dari pihak berelasi	<u>429.892.900</u>	<u>411.787.393</u>
Jumlah aset	<u>66.953.058.812</u>	<u>61.363.584.209</u>
Persentase jumlah aset dari pihak berelasi terhadap jumlah aset	<u>0,64%</u>	<u>0,67%</u>
Liabilitas		
Giro wadiah (Catatan 19)		
Asuransi Takaful/Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun Lembaga Keuangan	15.095.763	14.882.820
Entitas asosiasi	684.189	1.380.007
Entitas induk	13.591.759	12.183.558
Komisaris	--	--
Karyawan kunci	37	64.029
	<u>29.371.748</u>	<u>28.510.414</u>
Tabungan wadiah		
Asuransi Takaful/Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun Lembaga Keuangan	11.585.427	2.616.009
Karyawan kunci	3.164.877	1.652.867
	<u>14.750.304</u>	<u>4.268.876</u>
Jumlah	<u>44.122.052</u>	<u>32.779.290</u>

Assets
<i>Murabahah</i> receivables (Note 8)
Key Employees
<i>Funds of qardh</i> (Note 9)
Key employees
<i>Musyarakah</i> financing (Note 11)
Key employees
<i>Ijarah</i> Asset
Key employees
Investments in shares (Note 12)
PT Al Ijarah Indonesia Finance
PT Syarikat Takaful Indonesia
Investment at DPLK Muamalat (Note 16)
Total assets from related parties
Total assets
Percentage of total assets from related parties to total assets
Liabilities
Wadiah demand deposits (Note 19)
Asuransi Takaful/ Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Associates
Parent entities
Commissioner
Key employees
Wadiah saving deposits
Asuransi Takaful/ Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Key employees
Total

41. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

41. INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Dana syirkah temporer (Catatan 27)			Temporary syirkah fund (Note 27)
Surat Berharga yang Diterbitkan Entitas induk	<u>2.000.000.000</u> 2.000.000.000	<u>2.000.000.000</u> 2.000.000.000	Securities Issued
Deposito <i>mudharabah</i>			Mudharabah time deposits
Entitas induk	8.765.255.013	10.414.273.710	Parent entities
Karyawan kunci	9.266.407	7.972.831	Key employees
Entitas asosiasi	10.500.000	5.500.000	Associates
Dewan Pengawas Syariah	1.503.550	--	Sharia Supervisory Board
PT Syarikat Takaful/Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun			PT Syarikat Takaful/Baitul Maal Muamalat/ Dana Pensiun
Lembaga Keuangan/Muamalat Institute	<u>397.647.552</u> 9.184.172.522	<u>198.810.000</u> 10.626.556.541	Lembaga Keuangan/ Muamalat Institute
Tabungan <i>mudharabah</i>			Mudharabah saving deposits
Asuransi Takaful/Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun			Asuransi Takaful/Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun
Lembaga keuangan	1.375.806	1.341.599	Lembaga keuangan
Karyawan kunci	<u>10.942.315</u> 12.318.121	<u>10.379.668</u> 11.721.267	Key employees
Giro <i>mudharabah</i>			Mudharabah demand deposits
Asuransi Takaful/Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun			Asuransi Takaful/Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun
Lembaga keuangan	<u>3.961.233</u> 11.200.451.876	<u>2.769.061</u> 12.641.046.869	Lembaga keuangan
Estimasi liabilitas imbalan kerja (Catatan 25)			Estimated liabilities for employee benefit (Note 25)
Karyawan kunci	<u>38.397.539</u>	<u>31.429.258</u>	Key employees
Jumlah liabilitas dan dana <i>syirkah</i> temporer dari pihak berelasi	<u>11.282.971.467</u>	<u>12.705.255.417</u>	Total liabilities and temporary syirkah fund from related parties
Jumlah liabilitas dan dana <i>syirkah</i> temporer	<u>61.736.672.526</u>	<u>56.161.634.635</u>	Total liabilities and temporary syirkah fund
Persentase jumlah liabilitas dan dana syirkah temporer pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas dan dana syirkah temporer	<u>18,28%</u>	<u>22,62%</u>	Percentage of total liabilities and temporary syirkah fund from related parties to total liabilities and temporary syirkah fund

42. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Berikut adalah komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
KOMITMEN		
Liabilitas komitmen		
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	239.900.358	327.981.573
Fasilitas L/C yang masih berjalan	52.578.291	112.227.913
Penerbitan SKBDN	2.589.074	7.767.693
Jumlah liabilitas komitmen	295.067.723	447.977.179
KONTINJENSI		
Tagihan kontinjensi		
Piutang dan pembiayaan hapus buku	1.535.674.167	1.559.566.876
Margin dalam penyelesaian	35.485.280	47.442.893
Jumlah tagihan kontinjensi	1.571.159.447	1.607.009.769
Liabilitas kontinjensi bank garansi	(48.820.775)	(85.420.987)
Tagihan kontinjensi - neto	1.522.338.672	1.521.588.782

Selain liabilitas komitmen dan kontinjensi di atas tidak terdapat liabilitas komitmen dan kontinjensi lainnya.

42. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The commitments and contingencies as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

COMMITMENTS
Commitment liabilities
Unused financing facilities
Outstanding irrevocable letters of credit
Issuance of Domestic Letters of Credit
Total commitment liabilities
CONTINGENCIES
Contingency receivables
Written-off receivables and financing
Margin on non-performing receivables
Total contingency receivables
Contingency liabilities on bank guarantees
Receivables liabilities - net

Other than the above commitment and contingency liabilities, there were no other commitment and contingency liabilities.

43. INFORMASI SEGMENT

a. Segmen Geografis

Berikut ini adalah informasi wilayah geografis (tidak diaudit):

	31 Desember/ December 31, 2023					Jumlah/ Total
	Jabodetabek/ Jabodetabek	Jawa/ Java	Sumatera/ Sumatra	Kalimantan/ Borneo	Lainnya/ Others	
ASET						
Kas	198.390.952	240.466.119	135.529.545	42.203.993	103.618.464	720.209.073
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5.010.446.074	33.750	--	--	--	5.010.479.824
Giro pada bank lain - neto	1.386.930.271	2.634.225	16.017.984	--	58.256.422	1.463.838.902
Penempatan pada bank lain - neto	3.760.782	--	--	--	--	3.760.782
Investasi pada surat berharga - neto	30.524.748.886	--	--	--	--	30.524.748.886
Piutang - neto	3.194.624.472	1.230.692.711	387.739.799	154.344.345	659.418.399	5.626.819.726
Pinjaman qardh - neto	204.409.854	96.318.225	39.935.793	13.977.988	216.852.449	571.494.309
Pembayaran mudharabah - bersih	399.361.832	178.727.599	5.808.145	--	1.837.813	585.735.389
Pembiayaan musyarakah - bersih	11.415.906.015	2.569.947.132	357.429.304	232.389.416	580.530.169	15.156.202.036
Penyertaan saham - neto	322.468.837	--	--	--	--	322.468.837
Tagihan akseptasi - neto	49.607.354	29.018.102	--	--	3.120.427	81.745.883
Aset yang diperoleh untuk ijarah - neto	758.309	892.929	191.714	--	62.132	1.905.084
Aset tetap - neto	2.109.582.924	414.319.006	120.474.011	40.709.643	106.411.578	2.791.497.162
Aset pajak tangguhan - neto	138.192.371	--	--	--	--	138.192.371
Aset lain-lain - neto	3.391.802.861	384.382.648	104.698.861	23.450.844	49.625.334	3.953.960.548
Jumlah aset	58.350.991.794	5.147.432.446	1.167.825.156	507.076.229	1.779.733.187	66.953.058.812

43. SEGMENT INFORMATION

a. Geographical Segment

The geographical segment information is as follows (unaudited):

ASSETS
Cash
Current accounts and placements with Bank Indonesia
Current accounts with other banks - net
Placements with other banks - net
Investment in marketable securities - net
Receivables - net
Funds of Qardh - net
Mudharabah Financing - net
Musyarakah Financing - net
Investments in shares - net
Acceptance receivables - net
Assets acquired for ijarah - net
Premises and equipment - net
Deferred tax assets - net
Other assets - net
Total assets

43. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

43. SEGMENT INFORMATION (Continued)

a. Segment Geografis (lanjutan)

a. Geographical Segment (continued)

	31 Desember / December 31, 2023					
	Jabodetabek/ Jabodetabek	Jawa/ Java	Sumatera/ Sumatra	Kalimantan/ Borneo	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total
LIABILITAS						
Liabilitas segera	158.040.185	2.303.696	1.204.531	711.816	2.121.985	164.382.213
Simpanan	3.297.838.347	3.249.234.123	1.008.016.846	602.339.278	2.864.820.090	11.022.248.684
Simpanan dari bank lain	14.794.875	26.774.289	1.376.187	308.606	3.039.438	46.293.395
Bagi hasil yang belum dibagikan	62.251.331	10.197.265	3.341.329	1.643.265	5.141.320	82.574.510
Liabilitas kepada Bank Indonesia	2.169.678.250	--	--	--	--	2.169.678.250
Liabilitas akseptasi	1.529.851	6.191.849	--	--	462.773	8.184.473
Utang pajak	12.539.361	4.117.092	1.158.584	576.893	1.699.061	20.090.991
Pinjaman yang diterima	1.000.000.000	--	--	--	--	1.000.000.000
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	324.309	60.613	195.530	168.305	104.721	853.478
Estimasi liabilitas imbalan kerja	127.431.279	--	--	--	--	127.431.279
Liabilitas lain-lain	296.591.727	71.745.240	16.429.027	7.038.312	14.697.453	406.501.759
Jumlah liabilitas	7.141.019.515	3.370.624.167	1.031.722.034	612.786.475	2.892.086.841	15.048.239.032
DANA SYIRKAH TEMPORER						
Bukan bank						
Giro mudharabah	1.003.175.043	594.826.491	223.977.733	43.093.134	265.964.609	2.131.037.010
Tabungan mudharabah	2.980.057.498	3.177.807.865	1.323.993.181	762.385.948	1.339.770.176	9.584.014.668
Deposito mudharabah	17.257.648.453	3.602.871.621	1.480.008.898	675.588.889	1.805.771.846	24.821.889.707
Bank						
Giro mudharabah	21.204.867	70.887.265	24.795.458	21.979.418	26.999.416	165.866.424
Tabungan mudharabah	42.127.477	534.496.595	107.913.974	9.036.287	54.347.006	747.921.339
Deposito mudharabah	156.279.200	770.280.345	93.625.180	91.850.000	642.845.000	1.754.879.725
Surat Berharga Yang Diterbitkan						
Sukuk mudharabah	4.657.824.621	--	--	--	--	4.657.824.621
Sukuk mudharabah subordinasi	2.000.000.000	--	--	--	--	2.000.000.000
Sertifikat investasi mudharabah antar bank (SIMA)	475.000.000	--	--	--	--	475.000.000
SiPA	350.000.000	--	--	--	--	350.000.000
Jumlah dana syirkah temporer	28.943.317.159	8.751.170.182	3.254.314.424	1.603.933.676	4.135.698.053	46.688.433.494
PENDAPATAN SEGMENT						
Pendapatan dari penjualan	190.307.858	101.292.806	32.878.106	18.513.730	60.468.518	403.461.018
Pendapatan bagi hasil	568.073.952	233.332.728	38.497.018	19.528.554	18.376.700	877.808.952
Pendapatan ijarah - neto	59.166	53.213	279	--	30.016	142.674
Pendapatan usaha utama lainnya	867.060.313	474.141	27.044	--	4.413.418	871.974.916
Pendapatan operasional lainnya	873.382.429	51.798.660	27.847.504	9.731.804	58.758.442	1.021.518.839
Pendapatan non operasional	37.868.326	430.706	449.581	243.257	394.810	39.386.680
Jumlah pendapatan segmen	2.536.752.044	387.382.254	99.699.532	48.017.345	142.441.904	3.214.293.079
BEBAN SEGMENT						
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	1.494.257.729	241.309.005	82.127.661	49.121.820	81.732.059	1.948.548.274
Beban operasional	1.018.090.641	62.765.233	20.610.379	23.521.458	83.295.406	1.208.283.117
Beban non operasional	877.533.934	(316.325.392)	(146.332.182)	(90.325.362)	(281.195.340)	43.355.658
Beban pajak	811.778	--	--	--	--	811.778
Jumlah beban segmen	3.390.694.082	(12.251.154)	(43.594.142)	(17.682.084)	(116.167.875)	3.200.998.827
LABA (RUGI) BERSIH	(853.942.038)	399.633.408	143.293.674	65.699.429	258.609.779	13.294.252

	31 Desember / December 31, 2022					
	Jabodetabek/ Jabodetabek	Jawa/ Java	Sumatera/ Sumatra	Kalimantan/ Borneo	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total
ASET						
Kas	227.358.774	191.816.155	121.443.507	44.059.342	117.501.488	702.179.266
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	7.191.455.982	14.641	--	--	--	7.191.470.623
Giro pada bank lain - neto	401.633.389	3.154.666	4.088.542	--	112.077.736	520.954.333
Penempatan pada bank lain - neto	3.787.158	79.200	--	--	38.870.260	42.736.618
Investasi pada surat berharga - neto	27.855.377.312	--	--	--	--	27.855.377.312
Pinjaman - neto	3.556.495.252	1.421.672.979	411.593.603	196.961.207	798.764.548	6.385.487.589
Pembayaran qardh - neto	416.902.237	166.617.768	50.822.904	13.328.753	185.576.955	833.248.617
Pembayaran mudharabah - bersih	341.548.128	202.268.827	7.995.524	--	5.231.414	557.043.893
Pembayaran musyarakah - bersih	7.647.611.092	1.936.051.411	379.818.849	225.178.682	227.453.914	10.416.113.948
Penyertaan saham - neto	347.468.837	--	--	--	--	347.468.837
Tagihan akseptasi - neto	34.454.845	11.578.475	--	--	190.400	46.223.720
Aset yang diperoleh untuk ijarah - neto	588.348	261.890	19.513	--	154	869.905
Aset tetap - neto	2.079.396.653	372.587.194	118.413.985	38.600.032	100.133.859	2.709.131.723
Aset pajak tangguhan - neto	139.908.777	--	--	--	--	139.908.777
Aset lain-lain - neto	3.031.550.853	369.596.388	107.109.567	24.513.886	82.598.354	3.615.369.048
Jumlah aset	53.275.537.637	4.675.699.594	1.201.305.994	542.641.902	1.668.399.082	61.363.584.209

LIABILITIES	
Liabilities due immediately	
Deposits	
Deposits from other banks	
Undistributed revenue sharing	
Liabilities to central bank	
Acceptance payables	
Tax payables	
Fund borrowings	
Estimated losses on commitments and contingencies	
Estimated liabilities for employment benefit	
Other liabilities	
Total liabilities	
TEMPORARY SYIRKAH FUNDS	
Non Bank	
Mudharabah demand deposits	
Mudharabah savings deposits	
Mudharabah time deposits	
Bank	
Mudharabah demand deposits	
Mudharabah savings deposits	
Mudharabah time deposits	
Securities Issued	
Mudharabah sukuk	
Subordinated mudharabah sukuk	
Certificate of interbank mudharabah investment (SIMA)	
Shariah based Certificate (SiPA)	
Total temporary syirkah funds	
SEGMENT INCOME	
Income from sales	
Income from revenue sharing	
Income from ijarah - net	
Other main operating income	
Other operating income	
Non operating income	
Total segment income	
SEGMENT EXPENSES	
Third parties' share on return of temporary syirkah funds	
Operating expenses	
Non operating expenses	
Tax expenses	
Total segment expenses	
NET INCOME (LOSS)	

43. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

43. SEGMENT INFORMATION (Continued)

a. Segmen Geografis (lanjutan)

a. Geographical Segment (continued)

31 Desember/December 31, 2022							
Jabodetabek/ Jabodetabek	Jawa/ Java	Sumatera/ Sumatra	Kalimantan/ Borneo	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total		
LIABILITAS							LIABILITIES
Liabilitas segera	104.725.369	4.041.027	4.146.835	720.268	2.762.280	116.395.779	Liabilities due immediately
Simpanan	3.298.800.029	2.797.447.211	986.153.158	558.319.567	1.586.409.688	9.227.129.653	Deposits
Simpanan dari bank lain	13.864.985	24.021.894	2.257.799	307.336	18.940.511	59.392.525	Deposits from other banks
Bagi hasil yang belum dibagikan	52.057.968	9.169.503	3.148.859	1.610.196	2.316.422	68.302.948	Undistributed revenue sharing
Liabilitas akseptasi	3.328.680	5.361.583	--	--	5.590.706	14.280.969	Acceptance payables
Utang pajak	16.115.821	3.030.924	1.180.226	500.166	737.437	21.564.574	Tax payables
Pinjaman yang diterima	500.000.000	--	--	--	--	500.000.000	Fund borrowings
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	325.042	60.611	195.530	168.305	104.722	854.210	Estimated losses on commitments and contingencies
Estimasi liabilitas imbalan kerja	125.465.511	--	--	--	--	125.465.511	Estimated liabilities for employment benefit
Liabilitas lain-lain	292.895.911	81.170.352	26.677.417	8.643.792	21.896.798	431.284.270	Other liabilities
Jumlah liabilitas	4.407.579.316	2.924.303.105	1.023.759.824	570.269.630	1.638.758.564	10.564.670.439	Total liabilities
DANA SYIRKAH TEMPORER							TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Bukan bank							Non Bank
Giro mudharabah	868.126.361	530.737.417	153.907.006	44.738.509	110.347.394	1.707.856.687	Mudharabah demand deposits
Tabungan mudharabah	3.075.991.897	3.355.468.403	1.435.674.673	783.937.411	1.413.971.780	10.065.044.164	Mudharabah savings deposits
Deposito mudharabah	18.202.942.125	3.876.661.220	1.413.913.788	657.590.399	991.977.588	25.143.085.120	Mudharabah time deposits
Bank							Bank
Giro mudharabah	34.020.036	91.275.851	18.186.596	1.035.225	9.163.650	153.681.358	Mudharabah demand deposits
Tabungan mudharabah	67.685.338	397.039.633	105.139.252	7.183.131	67.511.021	644.558.375	Mudharabah savings deposits
Deposito mudharabah	108.136.737	518.127.130	157.761.000	136.950.000	436.670.000	1.357.644.867	Mudharabah time deposits
Surat Berharga Yang Diterbitkan							Securities Issued
Sukuk mudharabah	4.525.093.625	--	--	--	--	4.525.093.625	Mudharabah sukuk
Sukuk mudharabah subordinasi	2.000.000.000	--	--	--	--	2.000.000.000	Subordinated mudharabah sukuk
MTN Syariah Subordinasi	--	--	--	--	--	--	Subordinated Sharia MTN
Jumlah dana syirkah temporer	28.881.996.119	8.769.309.654	3.284.582.315	1.631.434.675	3.029.641.433	45.596.964.196	Total temporary syirkah funds
PENDAPATAN SEGMENT							SEGMENT INCOME
Pendapatan dari penjualan	215.655.104	127.946.326	40.024.068	26.182.371	59.490.302	469.298.171	Income from sales
Pendapatan bagi hasil	463.935.853	165.251.281	47.211.877	19.426.306	26.459.942	722.285.259	Income from revenue sharing
Pendapatan ijarah - neto	11.831	17.195	99	12.168	2.375	43.668	Income from ijarah - net
Pendapatan usaha utama lainnya	571.639.057	817.185	--	--	321.239	572.777.481	Other main operating income
Pendapatan operasional lainnya	974.148.549	52.296.455	36.528.043	9.546.601	55.509.863	1.128.029.511	Other operating income
Pendapatan non operasional	11.982.890	1.003.463	520.975	288.251	655.805	14.451.384	Non operating income
Jumlah pendapatan segmen	2.237.373.284	347.331.905	124.285.062	55.455.697	142.439.526	2.906.885.474	Total segment income
BEBAN SEGMENT							SEGMENT EXPENSES
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	1.028.232.784	209.760.862	82.748.622	40.557.316	73.415.092	1.434.714.676	Third parties' share on return of temporary syirkah funds
Beban operasional	1.173.290.580	3.108.321	82.788.442	26.604.787	74.059.901	1.359.852.031	Operating expenses
Beban non operasional	609.994.283	(248.377.395)	(114.010.701)	(59.309.585)	(127.978.712)	60.317.890	Non operating expenses
Beban pajak	25.419.809	--	--	--	--	25.419.809	Tax expenses
Jumlah beban segmen	2.836.937.456	(35.508.212)	51.526.363	7.852.518	19.496.281	2.880.304.406	Total segment expenses
LABA (RUGI) BERSIH	(599.564.172)	382.840.117	72.758.699	47.603.179	122.943.245	26.581.068	NET INCOME (LOSS)

b. Segmen Operasi

b. Operating Segment

Berikut ini adalah informasi segmen operasi: (tidak diaudit)

The operating segment information is as follows: (unaudited)

Untuk kepentingan manajemen, Bank mengelompokkan ke dalam 4 (empat) segmen operasional berdasarkan produk sebagai berikut:

For management purposes, Bank organizes 4 (four) operating segments based on products, as follows:

- Segmen Konsumer
- Segmen SME
- Segmen Korporasi
- Segmen Lainnya

- Consumer Segment
- SME Segment
- Corporate Segment
- Others Segment

31 Desember / December 31, 2023						
Konsumer/ Consumer	SME/ SME	Korporasi/ Corporate	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total		
ASET						ASSETS
Piutang dan Pembiayaan CKPN	3.360.535.386	2.973.996.207	16.128.372.024	--	22.462.903.617	Receivable and financing
	(28.921.589)	(56.602.500)	(437.128.068)	--	(522.652.157)	Allowance for Impairment losses
Non piutang dan Non pembiayaan	--	--	--	45.012.807.352	45.012.807.352	Non receivable and non financing
Jumlah Aset	3.331.613.797	2.917.393.707	15.691.243.956	45.012.807.352	66.953.058.812	Total Assets
LIABILITAS						LIABILITIES
Pendanaan	32.575.542.368	--	17.698.608.584	--	50.274.150.952	Funding
Non pendanaan	--	--	8.184.473	16.670.723.387	16.678.907.860	Non funding
Jumlah Liabilitas	32.575.542.368	--	17.706.793.057	16.670.723.387	66.953.058.812	Total Liabilities

43. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

43. SEGMENT INFORMATION (Continued)

a. Segmen Geografis (lanjutan)

a. Geographical Segment (continued)

31 Desember / December 31, 2023						
	Konsumer/ Consumer	SME/ SME	Korporasi/ Corporate	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
PENDAPATAN						INCOME
Pendapatan pengelolaan dana	388.712.031	263.982.407	825.854.940	674.838.181	2.153.387.559	Revenue from fund management
Pendapatan usaha lainnya	337.291.177	65.996.284	461.347.743	39.910.546	904.545.750	Other operating income
Jumlah pendapatan segmen	726.003.208	329.978.691	1.287.202.683	714.748.727	3.057.933.309	Total segment income
BEBAN						EXPENSE
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(690.856.938)	--	(947.160.494)	(310.530.842)	(1.948.548.274)	Third parties' share on return
(Beban)/ Pendapatan CKPN	14.713.776	13.021.352	66.419.361	--	94.154.489	Allowance for Impairment losses
Beban Usaha Lainnya	(724.579.718)	(159.772.579)	(280.220.201)	(20.892.018)	(1.185.464.516)	Other operating expenses
Jumlah beban segmen	(1.400.722.880)	(146.751.227)	(1.160.961.334)	(331.422.860)	(3.039.858.301)	Total segment expense
Pendapatan (beban) non operasional-neto	--	--	--	(3.968.978)	(3.968.978)	Non operating income (expense) - net
Laba sebelum pajak penghasilan	(674.719.672)	183.227.464	126.241.349	379.356.889	14.106.030	Income before tax
Beban pajak	--	--	--	(811.778)	(811.778)	Tax expenses
Laba Neto	(674.719.672)	183.227.464	126.241.349	378.545.111	13.294.252	Net Income

31 Desember / December 31, 2022						
	Konsumer/ Consumer	SME/ SME	Korporasi/ Corporate	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
ASET						ASSETS
Piutang dan Pembiayaan CKPN	3.807.679.515	2.826.296.735	12.187.456.555	--	18.821.432.805	Receivable and financing
(92.397.488)	(45.575.441)	(491.565.829)	--	--	(629.538.758)	Allowance for Impairment losses
Non piutang dan Non pembiayaan	--	--	--	43.171.690.162	43.171.690.162	Non receivable and non financing
Jumlah Aset	3.715.282.027	2.780.721.294	11.695.890.726	43.171.690.162	61.363.584.209	Total Assets
LIABILITAS						LIABILITIES
Pendanaan	41.292.327.730	--	7.066.065.019	--	48.358.392.749	Funding
Non pendanaan	--	--	14.280.969	12.990.910.491	13.005.191.460	Non funding
Jumlah Liabilitas	41.292.327.730	--	7.080.345.988	12.990.910.491	61.363.584.209	Total Liabilities
PENDAPATAN						INCOME
Pendapatan pengelolaan dana	477.775.496	243.342.690	628.045.777	415.240.616	1.764.404.579	Revenue from fund management
Pendapatan usaha lainnya	581.680.256	4.364.342	541.984.913	--	1.128.029.511	Other operating income
Jumlah pendapatan segmen	1.059.455.752	247.707.032	1.170.030.690	415.240.616	2.892.434.090	Total segment income
BEBAN						EXPENSE
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(982.348.968)	--	(323.287.160)	(129.078.548)	(1.434.714.676)	Third parties' share on return
Beban CKPN	(26.363.634)	(19.568.730)	(83.595.390)	--	(129.527.754)	Allowance for Impairment losses
Beban Usaha Lainnya	(769.758.458)	(132.975.624)	(308.306.072)	(19.284.123)	(1.230.324.277)	Other operating expenses
Jumlah beban segmen	(1.778.471.060)	(152.544.354)	(715.188.622)	(148.362.671)	(2.794.566.707)	Total segment expense
Pendapatan (beban) non operasional-neto	--	--	--	(45.866.506)	(45.866.506)	Non operating income (expense) - net
Laba sebelum pajak penghasilan	(719.015.308)	95.162.678	454.842.068	221.011.439	52.000.877	Income before tax
Beban pajak	--	--	--	(25.419.809)	(25.419.809)	Tax expenses
Laba Neto	(719.015.308)	95.162.678	454.842.068	195.591.630	26.581.068	Net Income

Bank tidak menyajikan informasi segmen berdasarkan segmen usaha, karena Bank menjalankan usaha sebagai bank umum syariah dan tidak memiliki kegiatan usaha diluar sektor perbankan.

The Bank does not present business segment information other than banking segment, since the Bank engages mainly in sharia banking activities and has no other significant activities other than banking.

44. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan LPS No. 2 tanggal 25 November 2010, simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan simpanan dari bank lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, tentang "Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan", maka pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 (dalam nilai penuh) untuk per nasabah per bank. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Beban penjaminan dana pihak ketiga yang dijamin kepada Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) adalah Rp90.223.044 dan Rp89.608.694 masing masing pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 35).

45. MANAJEMEN RISIKO

Bank dalam menjalankan usahanya senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko. Seiring dengan berkembangnya bisnis Bank, risiko yang dihadapi Bank menjadi semakin kompleks. Bank dituntut untuk mampu menerapkan manajemen risiko yang handal agar dapat beradaptasi dengan kompleksitas kegiatan usaha tersebut. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan harus dapat mendukung Bank untuk lebih berhati-hati seiring dengan perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang sangat pesat.

Penerapan manajemen risiko di Bank berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Ruang lingkup manajemen risiko di Bank meliputi:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, termasuk Dewan Pengawas Syariah sebagai bagian dari tata kelola risiko;

44. GOVERNMENT GUARANTEES ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Pursuant to Law No. 24, dated September 22, 2004, effective September 22, 2005, as amended with Regulation of the Government of the Republic of Indonesia in Lieu of Law No. 3 dated October 13, 2008, the Government established the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) to guarantee certain liabilities of commercial banks based on the prevailing guarantee programs, in which the guaranteed amount may change if they meet certain specified criteria.

Based on LPS Regulation No. 2 dated November 25, 2010, the deposits guaranteed shall include demand deposits, time deposits, certificates of deposits, savings deposits and deposits from other banks.

Pursuant to Regulation of the Government of the Republic of Indonesia No. 66 of 2008, dated October 13, 2008, regarding "the Amount of Public Savings Guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation", as of December 31, 2023 and December 31, 2022, the amount of savings guaranteed by LPS is amounting to Rp2,000,000,000 (in full amount) for each customer, each bank. As of December 31, 2023 and 2022, the Bank is a participant of the government guarantee program.

Insurance premium related to third party funds paid to the Deposit Insurance Institution (LPS) is amounted to Rp90,223,044 and Rp89,608,694 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively (Note 35).

45. RISK MANAGEMENT

The Bank's business is constantly exposed to various risks. At the course of the development of the Bank's business, risks encountered by the Bank become increasingly complex. Bank is required to implement a reliable risk management in order to adapt to the complexity of the business. The principles of risk management practices should be implemented to support the Bank to be more prudent in the rapid development of business activities and banking operations.

Bank's risk management implementation is based on the Regulation of the Financial Services Authority (FSA) about Implementation of risk management in Sharia Bank & Sharia Business Unit.

Scope of risk management of the Bank covers:

1. *Active supervisory of Board of Commissioners and Board of Directors, including Sharia Supervisory Boards as part of risk governance;*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Ruang lingkup manajemen risiko di Bank meliputi: (Lanjutan)

2. Kecukupan kebijakan, pedoman dan penetapan *limit* risiko;
3. Kecukupan proses manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; kecukupan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas, serta kecukupan sistem informasi manajemen risiko; dan
4. Kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup pengendalian internal oleh unit internal audit.

Penerapan manajemen risiko tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kesadaran risiko pada seluruh lapisan manajemen dan karyawan Bank. Kampanye sadar risiko dimulai dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang berperan aktif menjadi motor penggerak bagi kualitas penerapan manajemen risiko Bank. Peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam manajemen risiko dilakukan antara lain melalui Komite Pemantau Risiko (komite *level* Dewan Komisaris) dan Komite Manajemen Risiko (komite *level* Direksi). Komite-komite tersebut secara rutin melaksanakan rapat untuk membahas mengenai profil risiko dan manajemen risiko yang harus dilakukan oleh Bank.

Pelaksanaan manajemen risiko melibatkan seluruh unsur dalam organisasi mulai dari Manajemen hingga karyawan pelaksana. Seluruh unsur tersebut berperan aktif dalam konteks 'tiga lini pertahanan' manajemen risiko seperti di bawah ini:

1. Lini pertahanan pertama. Garis pertahanan pertama berisi unit kerja pengambil dan pemilik risiko yang melaksanakan fungsi bisnis dan unit kerja pendukung. Unit kerja tersebut dalam melaksanakan aktivitas hariannya berhadapan langsung dengan berbagai jenis dan kemungkinan risiko yang dihadapi Bank. Seluruh fungsi pada garis pertahanan pertama bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang melekat pada setiap produk, kegiatan, proses dan sistem yang dijalankan;
2. Lini pertahanan kedua. Garis pertahanan kedua terdiri dari unit kerja manajemen risiko, kepatuhan dan hukum. Unit kerja manajemen risiko bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan strategi manajemen risiko, pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan dari kerangka pengelolaan risiko dan memberikan masukan serta arahan kepada unit kerja bisnis dan unit kerja pendukung mengenai proses pengelolaan risiko, pengukuran risiko dan sistem pelaporan bank; dan
3. Lini pertahanan ketiga. Pada garis ketiga pertahanan berisi unit internal audit. Internal audit berfungsi sebagai unit independen yang bertugas melakukan *risk-based* audit yang memberikan nilai tambah kepada lini pertahanan pertama dan lini pertahanan kedua, untuk memastikan bahwa seluruh elemen Bank telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik termasuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan manajemen Bank Muamalat dan regulasi yang berlaku.

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

Scope of risk management of the Bank covers: (Continued)

2. *Adequacy of policy, procedure and determination of risk limit;*
3. *Adequacy of risk management process that includes identification, measurement, monitoring and control of risk; adequacy of human resources in both quantity and quality, as well as adequacy of risk management information system; and*
4. *Adequacy of risk control system that includes internal control by the internal audit unit.*

Risk management implementation cannot be carried out without the risk awareness at every level of Management and employees of the Bank. Risk awareness campaign is initiated by the Board of Commissioners and the Board of Directors who participate actively in driving employees engagement in implementing the Bank's quality risk management. The active role of the Boards of Commissioners and Directors is conducted through the Risk Oversight Committee (committee at the level of the Board of Commissioners) and the Risk Management Committee (committee at the level of the Board of Directors). These Committees regularly hold meetings to discuss the Bank's risk profile and risk management.

The implementation of risk management engages every element at every level of the organization, starting from the Management to executive employees. All elements are active in the context of the "three lines of defense" of risk management, as follows:

1. *First line of defense. The first line of defense includes the business units and supporting units as risk taker or risk owner, which in daily activities, deal directly with various types and possible risk faced by the Bank. All functions in the first line of defense are responsible for identifying and mitigating the risk inherent in each product, activity, process, and system;*
2. *Second line of defense. In the second line of defense, there are risk management, compliance and legal units. The risk management work unit is responsible for the development and implementation of risk management strategies, the maintenance and continuous development of risk management framework, and to provide input and direction to business units and supporting units regarding Bank's processes for risk management, risk measurement and reporting systems; and*
3. *Third line of defense. In the third line of defense there is the internal audit unit, which functions as an independent unit that performs risk-based audit activities and provides added value to the first and second lines of defense, in order to ensure that all elements at the Bank have carried out their functions and responsibilities properly, including ensuring the compliance with Bank Muamalat's management policy and applicable regulation.*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Ketiga lini pertahanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk terciptanya penerapan manajemen risiko yang berkualitas, berjalan dengan efektif dan optimal. Ketiga lini melakukan koordinasi secara rutin untuk memastikan manajemen risiko diterapkan pada seluruh jajaran di internal Bank.

Untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan serta memberikan nilai tambah secara jangka panjang kepada pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya, Bank menerapkan pendekatan yang menyeluruh terhadap sepuluh jenis risiko sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

a. Risiko Kredit (Pembiayaan)

Risiko kredit dalam pembiayaan terkait dengan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan antara Bank dan nasabah.

Dalam melakukan pengelolaan risiko kredit Bank telah melakukan beberapa perbaikan, baik dalam hal percepatan penyelesaian *bad bank*, penjagaan kualitas *good bank* dan pertumbuhan *new bank*. Beberapa di antara perbaikan yang telah dilakukan oleh Bank meliputi:

1. Melakukan perbaikan kerangka manajemen risiko kredit antara lain:
 - a. Menyusun dan mengimplementasikan ketentuan pembiayaan baik pada segmen *Enterprise* maupun *Retail* serta melakukan penyempurnaan ketentuan terkait pembiayaan;
 - b. Melakukan kajian, review dan mengimplementasikan target market dan *Financing Allocation Limit* (FAL) secara *bankwide* sebagai arah untuk melakukan pembiayaan pada sektor ekonomi yang memiliki kinerja baik.
 - c. Melaksanakan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 34/KDK.03/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penetapan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Sektor Tekstil dan Produk Tekstil serta Alas Kaki, Segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Provinsi Bali sebagai Sektor dan Daerah yang memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank (KDK Perlakuan Khusus) yang mengatur mengenai sektor usaha dan daerah yang masih bisa mendapatkan perlakuan khusus terkait dampak COVID-19;

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

Those lines of defense are an integral and inseparable part for quality improvement of risk management, working effectively and optimally. The three lines coordinate regularly to ensure that risk management is applied to all levels within the Bank.

To ensure sustainable business growth, as well as provide added value to stockholder and shareholders, the Bank implements risk management that consists of ten types of risks as referred to in the Regulation of Financial Services Authority No. 65/POJK.03/2016, dated December 28, 2016 concerning the Implementation of risk management in Sharia Commercial Bank and Sharia Business Units.

a. Credit (Financing) Risk

Credit risk may arise related to the ability of the debtor to repay the funds borrowed in accordance to the contract that has been agreed by Bank and debtor.

In managing credit risk (financing) the Bank has sought several improvements, both in terms of accelerating the settlement of bad banks, safeguarding the quality of good banks and the growth of new banks. Some of the improvements that have been made by the Bank include:

1. *Improving the credit risk management framework, among others:*
 - a. *Developing and implementing financing provisions in both the Enterprise and Retail segments and making improvements to provisions related to financing;*
 - b. *Reviewing, establishing and implementing target markets and Financing Allocation Limits (FAL) on a bankwide basis as a direction to finance sectors of the economy that have good performance.*
 - c. *Implementing the FSA Board of Commissioners Decree No. 34/KDK.03/2022 dated November 25, 2022 concerning the Determination of the Accommodation Provision and Food and Drink Provision Sector, the Textile Sector and Textile Products and Footwear, the Micro, Small and Medium Enterprises Segment, and Bali Province as a Sector and Region that requires Special Treatment for Bank Credit or Financing (KDK Special Treatment) which regulates the business sectors and regions that can still get special treatment related to the impact of COVID-19;*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

2. Melakukan perbaikan proses manajemen risiko kredit antara lain:
 - a. Melakukan pembiayaan untuk nasabah segmen *Enterprise* dengan fokus antara lain pada:
 - 1) Perusahaan segmen *Corporate, Commercial, SME* dan *Financial Institution* yang memiliki kinerja baik dan atau memiliki peringkat (*rating*) yang baik sebagai *Enterprise Business Solution*;
 - 2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan dengan peringkat (*rating*) yang baik;
 - b. Mengembangkan strategi untuk memperluas pemasaran beberapa produk/ program pembiayaan segmen *Retail*, antara lain:
 - 1) *ProHaji Plus*;
 - 2) *KPR Hijrah*;
 - 3) *Multiguna* termasuk cicilan emas;
 - c. Melakukan kajian *stress test* risiko kredit berdasarkan simulasi yang diminta OJK dan asumsi internal Bank;
 - d. Melakukan pemantauan pada nasabah *good bank* antara lain melalui pelaksanaan analisis *watchlist, post disbursement review, annual review* dan *covenant monitoring*;
 - e. Menetapkan target market dan *risk acceptance criteria* yang spesifik untuk segmen *Enterprise*, sementara target market dan *risk acceptance criteria* pada segmen *Retail* melekat pada produk pembiayaan masing-masing;
 - f. Melakukan pemantauan portofolio pembiayaan per segmen bisnis dan sektor ekonomi secara berkala;
 - g. Meninjau kolektibilitas nasabah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) nasabah secara berkala termasuk meninjau penerapan *Uniform Classification System (UCS)*;
 - h. Melakukan pemantauan utilisasi limit Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) berdasarkan ketentuan regulator yang berlaku dan mengimplementasikan BMPD internal sebagai *soft limit*;
 - i. Mengimplementasikan pelatihan terkait risiko kredit untuk meningkatkan kompetensi karyawan, antara lain:
 - 1) Sosialisasi produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di cabang sesuai dengan perluasan wilayah pemasaran;
 - 2) Pelatihan terkait skema bisnis dan analisis pembiayaan batu bara;
 - 3) *Workshop* pengelolaan e-Dapem dan kesiapan sistem untuk kerjasama penyaluran pensiun ASN.

a. Credit (Financing) Risk (continued)

2. Monitoring non-performing financing consistently by:
 - a. Financing for Enterprise segment customers with a focus, among others, on:
 - 1) Companies in the Corporate, Commercial, SME and Financial Institution segments that have good performance and / or have a good rating as Enterprise Business Solution;
 - 2) State-Owned Enterprises (BUMN) and companies with good ratings;
 - b. Developing strategies to expand the marketing of several products / financing programs for the Retail Consumer segment, including:
 - 1) *ProHaji Plus*;
 - 2) *KPR Hijrah (Mortgage)*;
 - 3) *Multipurpose including Gold Installments*;
 - c. Conducting a credit risk stress test based on simulations requested by FSA and the Bank's internal assumptions;
 - d. Monitoring good bank customers, among others, through the implementation of watchlist analysis, post disbursement reviews, annual reviews and covenant monitoring;
 - e. Establishing target market and risk acceptance criteria specific to the Enterprise segment, while target market and risk acceptance criteria in the Retail segment are attached to their respective financing products;
 - f. Monitoring the financing portfolio per business segment and economic sector on a regular basis;
 - g. Reviewing customer collectibility in the customer's Financial Information Service System (SLIK) periodically and Uniform Classification System (UCS) implementation;
 - h. Monitoring the utilization of the Legal Lending Limit based on applicable regulatory provisions and implement the internal Legal Lending Limit as soft limit;
 - I. Implementing training related to credit risk to improve employee competence, including:
 - 1) Training on of gold ownership products in branches along with widening area of marketing;
 - 2) Training related to business scheme and analysis of coal financing;
 - 3) Workshop on e-Dapem management and system readiness on Civil Servant pension payment.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

(i) Kualitas aset keuangan

(i) Financial assets quality

Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko pembiayaan (diluar cadangan kerugian penurunan nilai) (tidak diaudit):

The table below shows financial assets quality per classification of assets for all financial assets exposed to financing risk (gross of allowance for impairment losses) (unaudited):

31 Desember 2023 / December 31, 2023						
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past-due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>				
ASET						
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5.010.479.824	--	--	--	5.010.479.824	<i>Current accounts and placements with Bank Indonesia</i>
Giro dan penempatan pada bank lain	1.467.599.684	--	--	--	1.467.599.684	<i>Current accounts and placements with other banks</i>
Investasi pada surat berharga	30.524.748.886	--	--	--	30.524.748.886	<i>Investments in marketable securities</i>
Piutang <i>murabahah</i>	2.810.694.971	1.801.679.211	990.084.600	249.155.416	5.851.614.198	<i>Murahabah receivable</i>
Piutang <i>istishna</i>	1.241.639	--	--	--	1.241.639	<i>Istishna receivable</i>
Piutang <i>ijarah</i>	--	--	--	1.069.847	1.069.847	<i>Ijarah receivable</i>
Pinjaman <i>qardh</i>	431.085.079	59.751.975	63.531.193	79.236.174	633.604.421	<i>Funds of qardh</i>
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	590.635.481	--	1.039.893	2.177.795	593.853.169	<i>Mudharabah financing</i>
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	10.446.073.021	1.684.043.912	3.146.465.772	104.937.638	15.381.520.343	<i>Musyarakah financing</i>
Penyertaan saham	--	6.095.237	401.616.000	--	407.711.237	<i>Investment in shares</i>
Tagihan akseptasi	--	49.195.359	104.420.041	--	153.615.400	<i>Acceptance receivables</i>
Aset lain-lain *)	253.206.247	137.976.581	--	--	391.182.828	<i>Other assets*)</i>
Jumlah	51.535.764.832	3.738.742.275	4.707.157.499	436.576.870	60.418.241.476	Total

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima, setoran jaminan dan tagihan lain-lain.

*) Other assets consist of income receivables, security deposits and other receivables.

31 Desember 2022 / December 31, 2022						
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past-due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
ASET						
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	7.191.470.623	--	--	--	7.191.470.623	<i>Current accounts and placements with Bank Indonesia</i>
Giro dan penempatan pada bank lain	563.690.951	--	--	418.830	564.109.781	<i>Current accounts and placements with other banks</i>
Investasi pada surat berharga	27.755.362.247	100.015.065	--	--	27.855.377.312	<i>Investments in marketable securities</i>
Piutang <i>murabahah</i>	3.397.482.090	1.551.398.730	1.483.778.610	262.493.285	6.695.152.715	<i>Murahabah receivable</i>
Piutang <i>istishna</i>	1.331.762	--	--	--	1.331.762	<i>Istishna receivable</i>
Piutang <i>ijarah</i>	--	--	--	1.064.955	1.064.955	<i>Ijarah receivable</i>
Pinjaman <i>qardh</i>	662.265.369	61.655.296	63.527.452	77.530.154	864.978.271	<i>Funds of qardh</i>
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	558.863.830	1.051.171	1.966.171	2.177.795	564.058.967	<i>Mudharabah financing</i>
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	6.058.156.936	1.054.198.616	3.470.807.000	111.683.583	10.694.846.135	<i>Musyarakah financing</i>
Penyertaan saham	--	407.711.237	--	--	407.711.237	<i>Investment in shares</i>
Tagihan akseptasi	--	17.082.306	--	102.202.276	119.284.582	<i>Acceptance receivables</i>
Aset lain-lain *)	--	140.778.682	--	--	140.778.682	<i>Other assets*)</i>
Jumlah	46.188.623.808	3.333.891.103	5.020.079.233	557.570.878	55.100.165.022	Total

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima, setoran jaminan dan tagihan lain-lain.

*) Other assets consist of income receivables, security deposits and other receivables.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

Kualitas pembiayaan didefinisikan sebagai berikut:

Tingkat tinggi

- (a) Pembiayaan, piutang dan pinjaman yaitu pembiayaan, piutang dan pinjaman kepada debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu pembiayaan; debitur dengan riwayat tidak pernah direstrukturisasi, debitur dengan tingkat stabilitas dan keragaman yang tinggi; memiliki akses setiap saat untuk memperoleh pendanaan dalam jumlah besar dari pasar terbuka; memiliki kemampuan membayar yang kuat dan rasio-rasio neraca yang konservatif.
- (b) Giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, institusi Pemerintah Daerah, bank yang terdaftar di bursa serta transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.
- (c) Investasi pada surat berharga yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan *rating* minimal idBBB (Pefindo), BBB+ (S&P), Baa1 (Moody's) atau BBB+ (Fitch).
- (d) Tagihan akseptasi yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan memiliki kapasitas finansial yang kuat dalam hal pembayaran kembali seluruh kewajibannya secara tepat waktu.
- (e) Aset lain-lain yaitu piutang kepada Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) atau Pemerintah Daerah seperti piutang pendapatan yang masih akan diterima.

Tingkat standar

- (a) Giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank yang tidak terdaftar di bursa.
- (b) Penyertaan saham yaitu penyertaan pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.
- (c) Investasi pada surat berharga yaitu surat berharga yang termasuk dalam *non-investment grade* dengan *rating* minimal idBB (Pefindo), BBB- (S&P), Baa3 (Moody's) atau BBB- (Fitch).

a. Credit (Financing) Risk (continued)

Financing quality is defined as follows:

High grade

- (a) Financing, receivables, and funds are financing, receivables and funds to borrowers with very satisfactory track record of financing repayment and whose accounts did not turn as due during the term of the financing; borrowers whose accounts have never been restructured; borrowers with high degree of stability and diversity; has access to raise substantial amounts of funds through public market at any time; very strong debt service capacity and has conservative balance sheet ratios.
- (b) Current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other banks are current accounts or placements with the Sovereign, local government institutions, banks listed in the stock exchange and transaction with reputable banks with low probability of insolvency.
- (c) Investments in marketable securities are securities issued by Government and investment grade securities and bonds with a rating of at least idBBB (Pefindo), BBB+ (S&P), Baa1 (Moody's) or BBB+ (Fitch).
- (d) Acceptances receivable are receivables from third parties that have not yet matured and has a strong financial capacity in terms of repayment of all obligations in time.
- (e) Other assets are receivables from Sovereign (including Bank Indonesia) or local government such as income receivables.

Standard grade

- (a) Current accounts and placements with other banks represent current accounts or placements with non-listed banks.
- (b) Investment in shares are investment in companies that are listed on the Stock Exchange and has good performance as a whole.
- (c) Investments in marketable securities represent non-investment grade securities with a rating of at least idBB (Pefindo), BBB- (S&P), Baa3 (Moody's) or BBB- (Fitch).

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

Tingkat standar (lanjutan)

Standard grade (continued)

- (d) Pembiayaan, piutang dan pinjaman yaitu pembiayaan, piutang dan pinjaman kepada debitur dengan riwayat pembayaran yang baik; debitur dengan riwayat pernah direstrukturisasi, akses terbatas untuk memperoleh pendanaan dalam jumlah besar dari pasar terbuka, tingkat pendapatan dan kinerja keseluruhan tidak stabil, memiliki kemampuan membayar yang cukup.
- (e) Penyertaan saham yaitu penyertaan pada perusahaan yang tidak terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.
- (f) Tagihan akseptasi yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan memiliki kapasitas finansial yang memadai.
- (g) Aset lain-lain yaitu aset keuangan lainnya selain piutang pendapatan yang masih akan diterima kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah seperti tagihan rupa-rupa kepada pihak ketiga lainnya.

- (d) Financing, receivables and loans represent financing, receivables and loans to debtors with an average track record of financing repayment; debtors whose accounts have been restructured, having limited access to raise substantial amounts of funds through public market, having volatility of earnings and overall performance, having adequate debt service capacity.
- (e) Investments in shares represent investments in companies that are not listed in the Stock Exchange and that have good performance as a whole.
- (f) Acceptance receivables are receivables from third parties that have not yet matured and have adequate financial capacity.
- (g) Other assets are financial assets other than income receivables from Sovereign or local government such as other receivables to third parties.

Berdasarkan PSAK 60, aset keuangan yang telah jatuh tempo ditentukan ketika debitur gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal. Tabel di bawah menunjukkan *aging analysis* terhadap pembiayaan, piutang dan pinjaman yang diberikan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai (tidak diaudit):

In accordance with SFAS 60, financial asset is due when the repayment is default. The table below shows aging analysis of financing, receivables and loans that are past-due but not impaired (unaudited):

31 Desember / December 31, 2023					
	≤ 30 hari / days	31 - 60 hari/ days	61 - 90 hari/ days	Jumlah/ Total	
Piutang <i>murabahah</i>	15.393.252	6.427.978	968.263.370	990.084.600	<i>Murabahah receivables</i>
Piutang <i>istishna</i>	--	--	--	--	<i>Istishna receivables</i>
Piutang <i>ijarah</i>	--	--	--	--	<i>Ijarah receivables</i>
Pinjaman <i>qardh</i>	46.553	--	63.484.640	63.531.193	<i>Funds of qardh</i>
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	--	--	1.039.893	1.039.893	<i>Mudharabah financing</i>
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	69.947.618	36.887.099	3.039.631.055	3.146.465.772	<i>Musyarakah financing</i>
Jumlah	85.387.423	43.315.077	4.072.418.958	4.201.121.458	Total

31 Desember / December 31, 2022					
	≤ 30 hari / days	31 - 60 hari/ days	61 - 90 hari/ days	Jumlah/ Total	
Piutang <i>murabahah</i>	873.717	91.085	1.482.813.808	1.483.778.610	<i>Murabahah receivables</i>
Piutang <i>istishna</i>	--	--	--	--	<i>Istishna receivables</i>
Piutang <i>ijarah</i>	--	--	--	--	<i>Ijarah receivables</i>
Pinjaman <i>qardh</i>	3.645	--	63.523.808	63.527.453	<i>Funds of qardh</i>
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	--	--	1.966.171	1.966.171	<i>Mudharabah financing</i>
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	7.451.712	38.415.918	3.424.939.369	3.470.806.999	<i>Musyarakah financing</i>
Jumlah	8.329.074	38.507.003	4.973.243.156	5.020.079.233	Total

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

Tingkat standar (lanjutan)

(ii) Analisa konsentrasi risiko

(a) Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur pembiayaan yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Pengelompokan wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis Bank yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing (tidak diaudit):

31 Desember / December 31, 2023						
	Jabodetabek/ Jabodetabek	Jawa/ Java	Sumatera/ Sumatra	Kalimantan/ Borneo	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total
ASET						
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5.010.446.074	33.750	--	--	--	5.010.479.824
Giro dan penempatan pada bank lain	1.390.693.478	2.634.225	16.017.984	--	58.253.997	1.467.599.684
Investasi pada surat berharga	30.524.748.886	--	--	--	--	30.524.748.886
Piutang murabahah	3.385.329.365	1.243.760.625	392.736.361	159.319.377	670.468.470	5.851.614.198
Piutang istishna	--	796.513	--	--	445.126	1.241.639
Piutang ijarah	213.843	595.262	61.287	--	199.455	1.069.847
Piutang qardh	207.127.185	151.555.692	41.007.349	14.205.739	219.708.456	633.604.421
Pembiayaan mudharabah	404.472.084	182.344.575	5.866.814	--	1.169.696	593.853.169
Pembiayaan musyarakah	11.588.374.036	2.602.871.562	365.684.650	236.414.422	588.175.673	15.381.520.343
Penyertaan saham	407.711.237	--	--	--	--	407.711.237
Tagihan akseptasi	121.022.235	29.472.738	--	--	3.120.427	153.615.400
Aset lain-lain *)	390.036.053	892.929	191.714	--	62.132	391.182.828
Jumlah	53.430.174.476	4.214.957.871	821.566.159	409.939.538	1.541.603.432	60.418.241.476
Cadangan kerugian penurunan nilai						(679.764.074)
Bersih						59.738.477.402
Rekening Administratif						
LIABILITAS						
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	239.900.358	--	--	--	--	239.900.358
SKBDN yang diterbitkan	2.589.074	--	--	--	--	2.589.074
Fasilitas L/C yang masih berjalan	52.578.291	--	--	--	--	52.578.291
Bank garansi yang diterbitkan	8.642.607	30.058.836	4.700.000	350.000	5.069.332	48.820.775
Jumlah	303.710.330	30.058.836	4.700.000	350.000	5.069.332	343.888.498
31 Desember / December 31, 2022						
	Jabodetabek/ Jabodetabek	Jawa/ Java	Sumatera/ Sumatra	Kalimantan/ Borneo	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total
ASET						
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	7.191.455.982	14.641	--	--	--	7.191.470.623
Giro dan penempatan pada bank lain	405.419.745	3.653.497	4.088.542	--	150.947.997	564.109.781
Investasi pada surat berharga	27.855.377.312	--	--	--	--	27.855.377.312
Piutang murabahah	2.137.552.417	2.331.306.545	557.837.338	465.016.010	1.203.440.405	6.695.152.715
Piutang istishna	--	866.256	--	--	465.506	1.331.762
Piutang ijarah	82.218	704.887	61.287	--	216.563	1.064.955
Piutang qardh	317.025.269	246.021.728	56.825.620	13.515.215	231.590.439	864.978.271
Pembiayaan mudharabah	285.677.097	265.021.327	8.076.287	--	5.284.256	564.058.967
Pembiayaan musyarakah	4.850.400.914	3.140.597.999	853.981.562	965.325.138	884.540.522	10.694.846.135
Penyertaan saham	407.711.237	--	--	--	--	407.711.237
Tagihan akseptasi	106.636.471	12.474.323	--	--	173.788	119.284.582
Aset lain-lain *)	140.497.125	261.890	19.513	--	154	140.778.682
Jumlah	43.697.835.787	6.000.923.093	1.480.890.149	1.443.856.363	2.476.659.630	55.100.165.022
Cadangan kerugian penurunan nilai						(763.260.850)
Bersih						54.336.904.172
Rekening Administratif						
LIABILITAS						
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	323.168.504	--	--	--	--	323.168.504
SKBDN yang diterbitkan	5.605.611	2.162.082	--	--	--	7.767.693
Fasilitas L/C yang masih berjalan	53.801	--	--	--	112.174.112	112.227.913
Bank garansi yang diterbitkan	22.745.127	31.994.380	5.216.000	17.252.627	8.212.853	85.420.987
Jumlah	351.573.043	34.156.462	5.216.000	17.252.627	120.386.965	528.585.097

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

Standard grade (continued)

(ii) Risk concentration analysis

(a) Geographical sectors

The following table shows the details of financing exposures categorized by geographic area as of December 31, 2023 and 2022. Geographic grouping is based on the Bank's business operations which also illustrates the business potential of each region (unaudited):

ASSETS
Current accounts and placements with Bank Indonesia
Current accounts and placements with other banks
Investments in marketable securities
Murabahah receivable
Istishna receivable
Ijarah receivable
Funds of qardh
Mudharabah financing
Musyarakah financing
Investment in shares
Acceptance receivables
Other assets*)
Total
Allowance for impairment losses
Net
Administrative Accounts
LIABILITIES
Unused financing facility
Domestic Letters of Credit issued
Outstanding L/C
Bank guarantees issued
Total

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

(ii) Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

(ii) Risk concentration analysis (continued)

(b) Sektor industri

(b) Industrial sectors

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur pembiayaan pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (tidak diaudit):

The following table provides the details of the financing exposure at the carrying amounts categorized by industrial sector as of December 31, 2023 and 2022 (unaudited):

31 Desember / December 31, 2023					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank dan lembaga keuangan lainnya/ Banks and other financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Jumlah/ Total
ASET					
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5.010.479.824	--	--	--	5.010.479.824
Giro dan penempatan pada bank lain	--	1.467.599.684	--	--	1.467.599.684
Investasi pada surat berharga	9.213.840.322	8.200.000.000	13.110.908.564	--	30.524.748.886
Piutang murabahah	98.991.501	6.232.061	3.698.001.542	2.048.389.094	5.851.614.198
Piutang istishna	--	--	--	1.241.639	1.241.639
Piutang ijarah	--	--	--	1.069.844	1.069.844
Piutang qardh	--	--	349.411.705	284.192.716	633.604.421
Pembiayaan mudharabah	--	34.626.019	559.227.150	--	593.853.169
Pembiayaan musyarakah	3.524.805.418	4.295.630	10.324.064.445	1.528.354.850	15.381.520.343
Penyertaan saham	--	--	407.711.237	--	407.711.237
Tagihan akseptasi	--	--	153.615.400	--	153.615.400
Aset lain-lain *)	--	--	391.182.828	--	391.182.828
Jumlah	17.848.117.065	9.712.753.394	28.994.122.871	3.863.248.143	60.418.241.473
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	--	--	--	(679.764.074)
Bersih	--	--	--	--	59.738.477.399
Rekening Administratif					
LIABILITAS					
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	--	--	239.900.358	--	239.900.358
Penerbitan SKBDN	--	--	2.589.074	--	2.589.074
Fasilitas L/C yang masih berjalan	--	--	52.578.291	--	52.578.291
Bank garansi yang diterbitkan	--	--	48.820.775	--	48.820.775
Jumlah	--	--	343.888.498	--	343.888.498

ASSETS	
Current accounts and placements with Bank Indonesia	
Current accounts and placements with other banks	
Investments in marketable securities	
Murabahah receivable	
Istishna receivable	
Ijarah receivable	
Funds of qardh	
Mudharabah financing	
Musyarakah financing	
Investment in shares	
Acceptance receivables	
Other assets*)	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net	
Administrative Accounts	
LIABILITIES	
Unused financing facility	
Domestic Letters of Credit issued	
Outstanding L/C	
Bank guarantees issued	
Total	

31 Desember / December 31, 2022					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank dan lembaga keuangan lainnya/ Banks and other financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Jumlah/ Total
ASET					
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	7.191.470.623	--	--	--	7.191.470.623
Giro dan penempatan pada bank lain	--	564.109.781	--	--	564.109.781
Investasi pada surat berharga	6.674.293.247	8.000.000.000	13.181.084.065	--	27.855.377.312
Piutang murabahah	102.991.501	7.884.882	4.328.012.270	2.256.264.062	6.695.152.715
Piutang istishna	--	--	--	1.331.762	1.331.762
Piutang ijarah	--	--	--	1.064.955	1.064.955
Piutang qardh	--	--	590.732.020	274.246.251	864.978.271
Pembiayaan mudharabah	14.085.546	58.912.122	489.095.128	1.966.171	564.058.967
Pembiayaan musyarakah	1.085.774.236	7.312.919	8.212.770.554	1.388.988.426	10.694.846.135
Penyertaan saham	--	--	407.711.237	--	407.711.237
Tagihan akseptasi	--	--	119.284.582	--	119.284.582
Aset lain-lain *)	139.908.777	--	--	869.905	140.778.682
Jumlah	15.208.523.930	8.638.219.704	27.328.689.856	3.924.731.532	55.100.165.022
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	--	--	--	(763.260.850)
Bersih	--	--	--	--	54.336.904.172
Rekening Administratif					
LIABILITAS					
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	--	--	323.168.504	--	323.168.504
Penerbitan SKBDN	--	--	7.767.693	--	7.767.693
Fasilitas L/C yang masih berjalan	--	--	112.227.913	--	112.227.913
Bank garansi yang diterbitkan	--	--	85.420.987	--	85.420.987
Jumlah	--	--	528.585.097	--	528.585.097

ASSETS	
Current accounts and placements with Bank Indonesia	
Current accounts and placements with other banks	
Investments in marketable securities	
Murabahah receivable	
Istishna receivable	
Ijarah receivable	
Funds of qardh	
Mudharabah financing	
Musyarakah financing	
Investment in shares	
Acceptance receivables	
Other assets*)	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net	
Administrative Accounts	
LIABILITIES	
Unused financing facility	
Domestic Letters of Credit issued	
Outstanding L/C	
Bank guarantees issued	
Total	

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

(iii) Penurunan nilai aset keuangan:

(iii) Impairment of financial assets:

(a) Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

(a) Current accounts and placements with Bank Indonesia

Per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

As of December 31, 2023 and 2022, these financial assets are not individually or collectively impaired.

(b) Giro dan penempatan pada bank lain

(b) Current accounts and placements with other banks

Per tanggal 31 Desember 2023, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif. Per tanggal 31 Desember 2022, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif kecuali penempatan pada bank lain pada BPRS Dana Cipaganti, dikelompokkan macet.

As of December 31, 2023, these financial assets are not individually or collectively impaired. As of December 31, 2022, these financial assets are not individually or collectively impaired except placement with other banks with BPRS Dana Cipaganti, classified as loss.

(c) Investasi pada surat berharga
Seluruh investasi pada surat berharga pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dikelompokkan lancar.

(c) Investment in securities
All investment in securities as of December 31, 2023 and 2022 are classified as current.

(d) Pembiayaan, piutang dan pinjaman
Per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rincian pembiayaan, piutang dan pinjaman yang tidak mengalami penurunan nilai dan yang mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

(d) Financing, receivables and loans
As of December 31, 2023 and 2022, the breakdown of not impaired and impaired financing, receivables and funds are as follow:

31 Desember / December 31, 2023						
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai / Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ Past-due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Jumlah/ Total		
	Tingkat tinggi/ High grade	Tingkat standar/ Standard grade				
Jasa-Jasa Dunia Usaha	1.738.027.958	793.961.417	569.164.189	20.057.044	3.121.210.608	Business services
Perdagangan, Restoran, dan Hotel	932.587.841	355.028.637	1.098.314.011	82.939.094	2.468.869.583	Trading, restaurants and hotels
Industri Pengolahan	1.416.271.474	1.348.392.237	245.902.478	59.740.534	3.070.306.723	Manufacturing
Konstruksi	468.734.956	6.579.857	487.154.762	148.546	962.618.121	Construction
Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi	2.633.886.574	213.664.178	193.199.349	198.220.517	3.238.970.618	Transport, cargo storage and communication
Jasa-Jasa Sosial/Masyarakat	2.074.494.552	66.809.215	139.158.447	10.597.291	2.291.059.505	Social/public services
Pertambangan	664.702.774	131.484.397	550.850.201	--	1.347.037.372	Mining
Listrik, Gas, dan Air	1.158.738.110	391.721.941	534.028.852	--	2.084.488.903	Water, gas and electricity
Pertanian, Kehutanan dan Sarana Pertanian	316.900.717	418.924	98.897.763	16.235.626	432.453.030	Agriculture, forestry and agricultural facilities
Lain-Lain	2.875.385.234	237.414.295	284.451.406	48.638.219	3.445.889.154	Others
Jumlah	14.279.730.190	3.545.475.098	4.201.121.458	436.576.871	22.462.903.617	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai					(522.652.157)	Allowance for impairment losses
Bersih					21.940.251.460	Net

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

(iii) Penurunan nilai aset keuangan: (lanjutan)

(iii) Impairment of financial assets: (continued)

(d) Pembiayaan, piutang dan pinjaman
(lanjutan)

(d) Financing, receivables and loans (continued)

31 Desember/ December 31, 2022						
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai / Neither past due nor impaired		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ Past-due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Jumlah/ Total	
	Tingkat tinggi/ High grade	Tingkat standar/ Standard grade				
Jasa-Jasa Dunia Usaha	2.472.960.546	93.330.343	743.750.239	18.852.641	3.328.893.769	Business services
Perdagangan, Restoran, dan Hotel	620.319.813	387.574.326	1.139.338.601	82.086.534	2.229.319.274	Trading, restaurants and hotels
Industri Pengolahan	1.092.708.616	1.036.648.081	435.760.538	59.740.534	2.624.857.769	Manufacturing
Konstruksi	355.836.458	14.021.246	487.727.429	--	857.585.133	Construction
Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi	724.763.437	213.761.511	179.810.650	257.033.329	1.375.368.927	Transport, cargo storage and communication
Jasa-Jasa Sosial/Masyarakat	1.898.953.409	50.952.553	305.113.784	2.657.261	2.257.677.007	Social/public services
Pertambangan	5.310.133	9.954.576	611.276.551	--	626.541.260	Mining
Listrik, Gas, dan Air	328.099.398	475.687.313	617.064.683	--	1.420.851.394	Water, gas and electricity
Pertanian, Kehutanan dan Sarana Pertanian	313.453.102	1.125.739	172.858.527	15.869.548	503.306.916	Agriculture, forestry and agricultural facilities
Lain-Lain	2.865.695.075	385.248.124	327.378.230	18.709.924	3.597.031.353	Others
Jumlah	10.678.099.987	2.668.303.812	5.020.079.232	454.949.771	18.821.432.802	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai					(629.538.758)	Allowance for impairment losses
Bersih					18.191.894.044	Net

(iv) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko pembiayaan setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko pembiayaan lainnya

(iv) Analysis of maximum exposure to financing risk is made after considering the effect of collateral and other financing enhancements

Nilai tercatat dari aset keuangan Bank selain pembiayaan yang diberikan menggambarkan eksposur maksimum atas risiko pembiayaan.

The carrying value of the Bank's financial assets other than financing best represents the maximum exposure to financing risk.

Untuk pembiayaan yang diberikan, Bank menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko pembiayaan.

With regard to financing, Bank uses collateral to minimize financing risk.

Berdasarkan klasifikasi, pembiayaan Bank dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

Financing are classified into two major categories, namely:

1. Secured financing;
2. Partially secured financing.

1. Secured financing;
2. Partially secured financing.

Secured financing, Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminan sesuai skema pembiayaan. Jenis dari agunan terdiri dari:

Secured financing, the Bank determines the type and value of collateral in accordance with the financing scheme. The types of collateral are as follows:

- a. Physical collateral, berupa tanah dan bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan properti;
- b. Financial collateral, berupa simpanan (tabungan, giro, deposito), surat berharga, dan emas.

- a. Physical collateral, such as land and buildings, proof of vehicle ownership, and property;
- b. Financial collateral, such as time deposit (savings, demand deposit, time deposit) securities, and gold.

Apabila terjadi default (gagal bayar), Bank akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban counterparty.

In the event of a default, Bank will use the collateral as the last resort in recovering its investment.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

- (iv) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko pembiayaan setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko pembiayaan lainnya (lanjutan)

Partially secured financing terdiri dari pembiayaan untuk golongan berpenghasilan tetap, pembiayaan untuk para pensiunan dan pembiayaan konsumen lainnya. Dalam pembayaran kewajibannya, *partially secured financing* umumnya dilakukan melalui pemotongan penghasilan secara otomatis. Dengan demikian, tingkat risiko dari *partially secured financing* tidak sebesar nilai tercatat pembiayaannya.

Mitigasi risiko pembiayaan untuk *partially secured financing* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar terdiri dari risiko nilai tukar dan risiko *benchmark* suku bunga (*on reporting* maupun *off reporting*), akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Tujuan utama Bank mengelola risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan modalan Bank.

Sebagai bank devisa, Bank memiliki aset dan liabilitas dalam valuta asing, sehingga nilai dari aset dan liabilitas tersebut selalu terkait dengan perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Bank menghadapi risiko nilai tukar, apabila terjadi fluktuasi atas nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

Aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank dalam mengelola dan meningkatkan kualitas profil risiko pasar adalah:

1. Melakukan pemantauan dan pengukuran risiko pasar termasuk pemantauan *limit dealer* (*limit utilisasi* dan *batas kerugian transaksi*) yang dijalankan oleh unit kerja *treasury* baik transaksi *foreign exchange*, *money market*, dan *fixed income*.
2. Meningkatkan fungsi *middle office* yaitu unit manajemen risiko sebagai unit pelaksana yang independen dalam menyajikan data pasar yang berkaitan dengan proses *marked to market* untuk setiap aktivitas perdagangan dan mengusulkan penetapan *limit dealer* secara berjenjang sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh unit *Treasury*;

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

- (iv) Analysis of maximum exposure to financing risk is made after considering the effect of collateral and other financing enhancements (continued)

Partially secured financing are financing for fixed income employees, financing for retirees, and financing for other consumers. In their payment obligations, *partially secured financing* are generally made through automatic payroll deduction. Hence, maximum exposure to financing risk is lower than the carrying value.

Financing risk mitigation for *partially secured financing* consists of employee recruitment letter and certificate of retirement.

b. Market Risk

Market risk includes exchange rate risk, interest rate risk *benchmark* (on and off reporting), as the result of overall changes in market conditions.

Bank's main objective in managing market risk is to minimize the possibility of negative impact due to changes in market conditions on Bank's assets and capital.

As a foreign exchange bank, Bank has assets and liabilities in foreign currencies, which are vulnerable to foreign exchange rate changes. Bank may face exchange rate risk, if there is a fluctuation of foreign exchange rate against Rupiah.

Risk management activities carried out by the Bank in managing and improving the quality of market risk profiles include:

1. Monitoring and measuring market risk including *dealer limit* monitoring (*utilization limit* and *transaction loss limit*) carried out by treasury work units for all foreign exchange, money market, and fixed income transactions.
2. Improving the middle office function, namely the risk management unit as an independent implementing unit in presenting market data relating to the marked to market process for each trading activity and proposing the determination of the dealer's limit on a level in accordance with qualifications established by Treasury units;

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

3. Mengembangkan *end to end treasury system* yang dilakukan melalui beberapa fase sebagai berikut:
 - a. Fase 1 terkait produk *foreign exchange* dengan melakukan *fixing* hasil *User Acceptance Test (UAT)*;
 - b. Fase 2 terkait produk *fixed income* dengan melakukan diskusi awal terkait lingkup produk yang saat ini diimplementasikan.
4. Memantau rasio Posisi Devisa Neto (PDN) agar tidak melanggar ketentuan internal dan *regulator*;
5. Menyampaikan hasil *stress test* risiko pasar ke direktur dan unit kerja terkait;
6. Melaksanakan kaji ulang atas metode, asumsi, dan variabel atas batasan *limit dealer* secara berkala, besaran *risk factor* untuk transaksi *foreign exchange* dan emas, serta paramater risiko pasar untuk penilaian profil risiko pasar.

c. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Dalam mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank adalah:

1. Melaksanakan fungsi *Asset and Liability Committee (ALCO)* untuk membahas manajemen likuiditas dan menetapkan strategi pengelolaan risiko;
2. Melakukan pemantauan likuiditas secara harian melalui pemantauan *cash flow* Bank dan rasio-rasio kunci untuk pemantauan risiko likuiditas (*Liquidity Key Risk Indicator*), termasuk kajian atas konsentrasi 50 deposan inti;
3. Memantau pemenuhan ketentuan *regulator* yang berkaitan dengan likuiditas, seperti Giro Wajib Minimum (GWM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), dan lain-lain;
4. Meningkatkan likuiditas Bank, antara lain dengan:
 - a. Mengoptimalkan *funding* di segmen Retail melalui:
 - 1) Implementasi Bank Penyalur Gaji (BPG) untuk ASN;

b. Market Risk (continued)

3. Conducting several initiative projects to support treasury activities with related units, including:
 - a. Phase 1 related to foreign exchange products by fixing the results of the User Acceptance Test (UAT);
 - b. Phase 2 related to fixed income products by conducting initial discussions related to the scope of products currently implemented.
4. Monitoring the Net Open Position (NOP) ratio so as not to violate internal and regulatory regulations;
5. Conveying the results of market risk stress tests to directors and related work units;
6. Reviewing the methods, assumptions, and variables of dealer limit periodically, risk factors for foreign exchange transactions and gold, and market risk parameters for the assessment of market risk profiles.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk due to the Bank's inability to fulfill its obligations as they mature from cash flow and/or high-quality liquid assets without affecting the Bank's operations and financial condition.

To anticipate the liquidity risk, the Bank undertakes the following risk management actions:

1. Implementing the functions of the Asset and Liability Committee (ALCO) to discuss liquidity management and setting the related risk management strategy;
2. Conducting daily liquidity monitoring through Bank's monitoring of cash flow and Liquidity Key Risk Indicators (LKRI), including a review on the concentration of top 50 depositors;
3. Monitoring fulfillment of regulatory regulations related to liquidity matters, such as Minimum Statutory Reserves, Macropprudential Liquidity Buffer, Macropprudential Intermediation Ratio and others;
4. Improving the Bank's liquidity, among others by:
 - a. Optimizing funding in the Retail segment through:
 - 1) Implementing Salary Distribution Bank (BPG) for Civil Servants;

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

4. Meningkatkan likuiditas Bank, antara lain dengan: (lanjutan)
 - a. Mengoptimalkan *funding* di segmen Retail melalui: (lanjutan)
 - 2) Meningkatkan akuisisi porsi haji antara lain dengan:
 - a) Kampanye #HajiAnakHebat dengan Tabungan Hijrah Haji;
 - b) Program haji untuk diaspora.
 - 3) Meluncurkan beberapa promosi guna menunjang optimalisasi *funding*.
 - b. Memperkuat layanan perbankan elektronik dan meningkatkan aktivasi transaksi nasabah, antara lain melalui:
 - 1) Meluncurkan *mobile cash*;
 - 2) Implementasi layanan tarik tunai setor menggunakan QRIS di *merchant* dan ATM.
 - c. Meningkatkan transaksi *cash management* melalui program:
 - 1) MADINA Activation Program (MAP);
 - 2) Virtual Account Intensity Program (VIP).
 - 3) Remittance Transaction Program (RTP)
 - 4) MADINA Class Training
5. Melakukan kajian atas risiko likuiditas Bank melalui antara lain perhitungan *stress test* dan kajian atas ambang batas (*threshold*) profil risiko likuiditas.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*), sebagai berikut:

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Liquidity Risk (continued)

4. Improving the Bank's liquidity, among others by: (continued)
 - a. Optimizing funding in the Retail segment through: (Continued)
 - 2) Increasing the acquisition of Hajj portions, among others, by:
 - a) #HajiAnakHebat Campaign with Hijrah Hajj Savings;
 - b) Hajj program for diaspora.
 - 3) Launching several promotions to support funding optimization.
 - b. Strengthening electronic banking services and increasing customer transaction activation, among others by:
 - 1) Launching mobile cash;
 - 2) Implementing cash withdrawal using QRIS in merchant and ATM.
 - c. Developing Muamalat Digital Integrated Access (MADINA) through:
 - 1) MADINA Activation Program (MAP);
 - 2) Virtual Account Intensity Program (VIP).
 - 3) Remittance Transaction Program (RTP)
 - 4) MADINA Class Training.
5. Conducting a review of the Bank's liquidity risk through, among others, stress test calculations and studies of the threshold of liquidity risk profile.

The tables below present information about the mapping of financial assets and liabilities within a certain time scale (*maturity buckets*) based on their remaining maturity, as follows:

31 Desember / December 31, 2023						
	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ More than 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ Others without maturity	Jumlah/ Total
ASET						ASSETS
Kas					720.209.073	720.209.073
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.483.970.000	--	--	--	2.526.509.824	5.010.479.824
Giro dan penempatan pada bank lain	3.563.518	--	--	1.464.036.166	--	1.467.599.684
Investasi pada surat berharga	300.000.000	306.161.493	444.022.884	29.474.564.509	--	30.524.748.886
Piutang <i>murabahah</i>	398.494.665	239.068.155	979.256.170	4.234.795.208	--	5.851.614.198
Piutang <i>istishna</i>	--	--	--	1.241.639	--	1.241.639
Piutang <i>ijarah</i>	1.069.847	--	--	--	--	1.069.847
Piutang <i>qardh</i>	121.369.114	66.191.509	93.845.459	352.198.339	--	633.604.421
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	3.429.669	1.597.329	125.413.015	463.413.156	--	593.853.169
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	355.567.478	1.366.986.772	1.237.445.657	12.421.520.436	--	15.381.520.343
Penyertaan saham	--	--	--	--	407.711.237	407.711.237
Tagihan akseptasi	111.491.635	40.737.891	1.169.185	216.689	153.615.400	153.615.400
Aset lain-lain *)	1.026.432	252.158.492	229.686	1.696.716	136.071.492	391.182.828
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	(527.849.622)	(106.693.199)	(14.443.419)	(9.227.789)	(21.550.045)	(679.764.074)
Jumlah aset	3.252.132.741	2.166.208.442	2.866.938.637	48.404.455.069	3.768.951.586	60.458.686.475
LIABILITAS						LIABILITIES
Liabilitas segera	164.382.213	--	--	--	--	164.382.213
Simpanan	11.022.248.684	--	--	--	--	11.022.248.684
Simpanan dari bank lain	46.293.395	--	--	--	--	46.293.395
Bagi hasil yang belum dibagikan	82.574.510	--	--	--	--	82.574.510
Liabilitas Kepada Bank Indonesia	2.169.678.250	--	--	--	--	2.169.678.250
Liabilitas akseptasi	1.685.181	6.499.292	--	--	--	8.184.473
Pinjaman yang diterima	--	--	1.000.000.000	--	--	1.000.000.000
Liabilitas lain-lain	427.966.061	--	--	--	126.911.446	554.877.507
Jumlah liabilitas	13.914.828.294	6.499.292	1.000.000.000	--	126.911.446	15.048.239.032

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*), sebagai berikut: (lanjutan)

The tables below present information about the mapping of financial assets and liabilities within a certain time scale (*maturity buckets*) based on their remaining maturity, as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2023							
Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ More than 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ Others without maturity	Jumlah/ Total		
DANA SYIRKAH TEMPORER							TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Giro <i>mudharabah</i>	2.296.903.434	--	--	--	2.296.903.434		Mudharabah demand deposits
Tabungan <i>mudharabah</i>	10.331.936.007	--	--	--	10.331.936.007		Mudharabah savings deposits
Deposito <i>mudharabah</i>	19.190.438.135	4.321.542.042	3.064.789.255	--	26.576.769.432		Mudharabah time deposits
Surat Berharga Yang Diterbitkan	825.000.000	--	--	6.657.824.621	7.482.824.621		Securities Issued
Jumlah dana syirkah temporer	32.644.277.576	4.321.542.042	3.064.789.255	6.657.824.621	46.688.433.494		Total temporary syirkah funds
Jumlah Liabilitas dan dana syirkah temporer	32.644.277.576	4.321.542.042	3.064.789.255	6.657.824.621	46.688.433.494	0	Total liabilities and temporary syirkah funds
Perbedaan Jatuh Tempo	(32.644.277.576)	(4.321.542.042)	(3.064.789.255)	(6.657.824.621)	0	(46.688.433.494)	Maturity gap

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima, setoran jaminan dan tagihan lain-lain.

*) Other assets consist of income receivables, security deposits and other receivables.

**) Liabilitas lain-lain terdiri atas setoran jaminan yang diterima.

**) Other liabilities consist of security deposits received.

31 Desember/December 31, 2022							
Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ More than 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ Others without maturity	Jumlah/ Total		
ASET							ASSETS
Kas	--	--	--	702.179.266	702.179.266		Cash
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	7.191.470.623	--	--	--	7.191.470.623		Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada bank lain	560.293.423	3.816.358	--	--	564.109.781		Current accounts and placements with other banks
Investasi pada surat berharga	750.000.000	15.408.164	3.308.852	27.086.660.296	27.855.377.312		Investments in marketable securities
Piutang <i>murabahah</i>	382.249.412	465.594.370	1.217.135.673	4.630.173.260	6.695.152.715		Murabahah receivable
Piutang <i>istishna</i>	--	--	--	1.331.762	1.331.762		Istishna receivable
Piutang <i>ijarah</i>	1.064.955	--	--	--	1.064.955		Ijarah receivable
Piutang <i>qardh</i>	93.433.462	102.646.339	313.100.600	355.797.870	864.978.271		Funds of qardh
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	22.401.504	60.732.763	95.387.893	385.536.807	564.058.967		Mudharabah financing
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	453.251.482	619.572.922	1.771.261.650	7.850.760.081	10.694.846.135		Musyarakah financing
Penyertaan saham	--	--	--	407.711.237	407.711.237		Investment in shares
Tagihan akseptasi	112.132.663	2.488.611	3.974.905	688.403	119.284.582		Acceptance receivables
Aset lain-lain *)	--	--	--	869.905	139.908.777		Other assets*)
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	(383.033.524)	(50.827.799)	(48.717.103)	(220.440.024)	(60.242.400)	(763.260.850)	Allowance for impairment losses
Jumlah aset	9.183.264.000	1.219.431.728	3.355.452.470	40.091.378.360	1.189.556.880	55.039.083.438	Total assets
LIABILITAS							LIABILITIES
Liabilitas segera	116.395.779	--	--	--	116.395.779		Liabilities due immediately
Simpanan	9.227.129.653	--	--	--	9.227.129.653		Deposits
Simpanan dari bank lain	59.392.525	--	--	--	59.392.525		Deposits from other banks
Bagi hasil yang belum dibagikan	68.302.948	--	--	--	68.302.948		Undistributed revenue sharing
Liabilitas akseptasi	7.563.562	2.812.401	3.905.006	--	14.280.969		Acceptance payables
Pinjaman yang diterima	--	--	500.000.000	--	500.000.000		Fund borrowings
Liabilitas lain-lain	452.848.844	--	--	126.319.721	579.168.565		Other liabilities
Jumlah liabilitas	9.931.633.311	2.812.401	503.905.006	126.319.721	10.564.670.439		Total liabilities
DANA SYIRKAH TEMPORER							TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Giro <i>mudharabah</i>	1.861.538.045	--	--	--	1.861.538.045		Mudharabah demand deposits
Tabungan <i>mudharabah</i>	10.709.602.539	--	--	--	10.709.602.539		Mudharabah savings deposits
Deposito <i>mudharabah</i>	20.000.456.791	3.159.918.349	3.340.354.847	--	26.500.729.987		Mudharabah time deposits
Surat Berharga Yang Diterbitkan	--	--	--	6.525.093.625	6.525.093.625		Securities Issued
Jumlah dana syirkah temporer	32.571.597.375	3.159.918.349	3.340.354.847	6.525.093.625	45.596.964.196		Total temporary syirkah funds
Jumlah Liabilitas dan dana syirkah temporer	42.503.230.686	3.162.730.750	3.844.259.853	6.525.093.625	126.319.721	56.161.634.635	Total liabilities and temporary syirkah funds
Perbedaan Jatuh Tempo	(33.319.966.686)	(1.943.299.022)	(488.807.383)	33.566.284.735	1.063.237.159	(1.122.551.197)	Maturity gap

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima, setoran jaminan dan tagihan lain-lain.

*) Other assets consist of income receivables, security deposits and other receivables.

**) Liabilitas lain-lain terdiri atas setoran jaminan yang diterima.

**) Other liabilities consist of security deposits received.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Bank secara berkelanjutan melakukan pengendalian dan perbaikan terhadap profil risiko operasional, dengan cara:

1. Mengembangkan dan memelihara kerangka kerja, kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko operasional secara berkala;
2. Melakukan pengembangan dan penerapan aplikasi *Loss Event Database*, *Key Risk Indicator* dan *Risk Control Self-Assessment* yang digunakan oleh Bank sebagai alat bantu untuk melakukan pemantauan risiko;
3. Secara kontinu, meningkatkan kualitas dan kelengkapan dokumen pembiayaan melalui pelaksanaan validasi dan sinkronisasi data untuk kepentingan pelaporan kepada regulator;
4. Melakukan perbaikan stabilitas sistem, antara lain:
 - a. *System monitoring network* untuk mendukung bisnis dan operasional Bank terkait pengelolaan *network* dan kebutuhan audit;
 - b. *Data Center (DC) co-location*, melakukan relokasi DC dengan mekanisme *collection/managed service*.
5. Melakukan perbaikan risiko keamanan siber dan ketahanan siber, antara lain melalui :
 - a. Penggunaan sistem pendeteksi dan pencegahan gangguan atau *Intrusion Detection and Prevention System (IDPS)*;
 - b. Penyusunan *risk appetite* dan *risk tolerance* atas risiko siber;
 - c. Analisis lanjutan terkait gap infrastruktur IT *security* dan pengajuan *budget* implementasi.
 - d. Review dan pemantauan berkala atas pelaksanaan pengamanan siber oleh unit Internal Audit dan SKMR.
6. Mengimplementasikan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) Bank Indonesia untuk kemudahan transaksi nasabah;
7. Melaksanakan *operational risk assessment* terhadap produk/aktivitas baru, kebijakan dan prosedur operasional Bank;
8. Melakukan kaji ulang atas ambang batas (*threshold*) risiko operasional dan melakukan simulasi atas beberapa skenario kejadian risiko operasional.

d. Operational Risk

Operational risk is a risk caused by insufficiency or malfunction of internal processes, human error, system failure, or the presence of external problems that affect the Bank's operations.

The Bank continuously controls and improves operational risk profile, by means of:

1. *Developing and maintaining operational risk management framework, policies and procedures regularly;*
2. *Enhancing and implementing Loss Event Database, Key Risk Indicator and Risk Control Self-Assessment application used as operational risk monitoring tools.*
3. *Continuously improving the quality and completeness of financing documents through the implementation of data validation and synchronization for the purposes of reporting to regulators;*
4. *Improving system stability, among others:*
 - a. *System monitoring network to support the Bank's business and operations related to network management and audit needs;*
 - b. *Data Center (DC) co-location, relocating DC with collection/managed service mechanism.*
5. *Improving cybersecurity risks and cyber resilience, among others, through:*
 - a. *Use of an Intrusion Detection and Prevention System (IDPS);*
 - b. *Preparation of risk appetite and risk tolerance for cyber risk;*
 - c. *Further analysis related to IT security infrastructure gaps and implementation budget submission.*
 - d. *Regular review and monitoring of the implementation of cyber security by the Internal Audit unit and SKMR.*
6. *Implementing Bank Indonesia's National Open API Payment Standard (SNAP) to facilitate customer;*
7. *Performing Operational Risk Assessment for the new product/activity, Bank's operational policies & procedures.*
8. *Reviewing operational risk thresholds and simulating several operational risk event scenarios.*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

d. Risiko Operasional (lanjutan)

9. Melaksanakan inisiatif untuk peningkatan budaya sadar risiko kepada seluruh karyawan melalui:
 - a. Penyampaian materi *operational risk awareness* melalui *email blast*;
 - b. Pelaksanaan pelatihan/ sosialisasi *basic risk awareness*;
 - c. Penyampaian *anti-fraud campaign* melalui *email blast*.
10. Melakukan perbaikan proses *Business Continuity Management (BCM)* melalui, antara lain :
 - a. Pelaksanaan *Business Impact Analysis (BIA)* - termin 2;
 - b. Pelaksanaan Simulasi Tanggap Darurat berupa simulasi kebakaran (*fire drill*);
 - c. Pelaksanaan *Cyber Range Exercise* Insiden Keamanan Siber.
11. Melaksanakan perbaikan program anti-fraud melalui beberapa perbaikan, antara lain:
 - a. Menerapkan ISO 37001 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
 - b. Melakukan sosialisasi implementasi ISO 37001:2016 terkait SMAP di 5 (lima) cabang secara *offline*;
 - c. Mengimplementasikan *Fraud Detection System (FDS)* untuk mendeteksi transaksi mencurigakan; dan
 - d. Melakukan *surprise visit* ke cabang yang berisiko *fraud* tinggi.
12. Mengimplementasikan sertifikasi ISO 27001 terkait Sistem Keamanan Manajemen Informasi di mana Bank telah menerima sertifikat tersebut.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Dalam mengelola risiko hukum, Bank melakukan tindakan diantaranya:

1. Melakukan pengelolaan mitra notaris melalui, antara lain:
 - a. Menyediakan kemitraan notaris untuk kebutuhan transaksi pembiayaan dan melakukan pengujian daftar notaris berdasarkan hasil pemantauan kemitraan notaris apabila terjadi kondisi tertentu;
 - b. Menyampaikan informasi kepada unit kerja terkait atas komitmen dan integritas notaris mitra dalam memenuhi kewajibannya;
 - c. Unit operasional pembiayaan memantau kinerja notaris yang telah diberikan order pengikatan pembiayaan.

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Operational Risk (continued)

9. *Implementing initiatives for the enhancement of risk awareness culture to all employees by:*
 - a. *Delivering operational risk awareness material via email blast;*
 - b. *Implementing training/ socialization of basic risk awareness;*
 - c. *Submitting anti-fraud campaign via email blast.*
10. *Improving the Business Continuity Management (BCM) process through, among others:*
 - a. *Implementation of Business Impact Analysis (BIA) - term 2;*
 - b. *Implementation of Emergency Response Simulation in the form of fire simulation (fire drill);*
 - c. *Implementation of Cyber Range Exercise on Cybersecurity Incidents.*
11. *Implementing anti-fraud program improvements through several improvements, including:*
 - a. *Implementing ISO 37001 related to Anti-Bribery Management System;*
 - b. *Socializing the implementation of ISO 37001:2016 related to SMAP in 5 (five) branches offline;*
 - c. *Implementing a Fraud Detection System (FDS) to detect suspicious transactions; and*
 - d. *Conducting surprise visit to a branch that is at high risk of fraud.*
12. *Implementing ISO 27001 certification related to Information Management Security System where Bank has received that certificate.*

e. Legal Risk

Legal risk is the risk due to lawsuits and/or weaknesses of juridical aspects.

In managing legal risk, the Bank performs actions such as:

1. *Managing notary partners by, among others:*
 - a. *Providing notary partnerships for financing transaction needs and updating notary lists based on the results of notary partnership monitoring in case of certain conditions;*
 - b. *Conveying information to related work units on the commitment and integrity of partner notaries in fulfilling their obligations;*
 - c. *The financing operational unit monitoring the performance of notaries who have been given financing binding orders;*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

e. Risiko Hukum (lanjutan)

- Memberikan tinjauan risiko hukum atas perjanjian kerja sama dengan pihak lain, ketentuan internal, opini legal, dan dokumen lainnya untuk memitigasi adanya potensi hukum bagi Bank;
- Melaporkan secara berkala kepada Direksi mengenai kasus hukum yang terjadi sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin untuk penyelesaiannya;
- Menyusun ketentuan internal terkait petunjuk teknis pelaksanaan review perjanjian kerjasama (PKS) dan melakukan penyesuaian atas standar akad pembiayaan pada prosedur pelaksanaan penggunaan standar akad pembiayaan;
- Membentuk pencadangan atas kasus hukum yang dilakukan oleh cabang atau unit kerja yang berperkara setelah memperoleh persetujuan Direksi, yang dimohonkan oleh unit *corporate legal*;
- Apabila dibutuhkan, unit legal melakukan pendampingan atas proses litigasi yang dihadapi unit kerja di Bank.
- Melakukan review atas pengajuan calon advokat rekanan Bank oleh SKMR.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Dalam memitigasi risiko reputasi, Bank telah melakukan:

- Menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui *website* Bank dan surat kabar dengan berkoordinasi bersama antar unit kerja;
- Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal, antara lain dengan:
 - Melaksanakan kunjungan (media visit) ke sejumlah media bersama direksi;
 - Melakukan kolaborasi dengan Baitul Maal Muamalat dalam publikasi kegiatan tertentu;
 - Berpartisipasi sebagai sponsor dalam beberapa acara media;
 - Menerbitkan publikasi positif untuk membangun dan menyebarkan isu positif Bank;
 - Mengadakan sesi foto tematik dalam rangka meningkatkan jumlah publikasi dan *engagement* kepada wartawan.
- Melaksanakan inisiasi peningkatan kualitas layanan kepada nasabah, antara lain dengan:
 - Melakukan pengembangan fitur layanan digital secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan kemudahan transaksi bagi nasabah, antara lain meliputi:
 - Manajemen kartu;
 - Fitur informasi pembiayaan dan pensiun hijrah;
 - Penambahan beberapa lembaga/institusi terkait menu pembayaran/pembelian.

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

e. Legal Risk (continued)

- Providing a review of legal risks to cooperation agreements with other parties, internal provisions, legal opinions, and other documents to mitigate the existence of legal potential for the Bank;
- Reporting regularly to the board of directors the legal cases that are occurring so the action can be taken as early as possible for its settlement;
- Preparing internal provisions related to technical guidelines for the implementation of the cooperation agreement review and make adjustments to the standards of financing contracts in the procedures for implementing the use of financing contract standards;
- Establishing a reserve for legal cases carried out by branches or work units in litigation after obtaining approval from the Board of Directors, which is requested by the corporate legal unit;
- If required, the legal unit providing guidance on the process of litigation faced by business units of the Bank.
- Reviewing the submission of prospective Bank partner advocates by SKMR.

f. Reputation Risk

Reputation risk is a risk due to the decrease at the stakeholders trust level resulting from negative perception to the Bank.

In order to mitigate reputation risk, the Bank has taken the following actions:

- Conveying information openly to the public through the Bank's website and newspapers with close coordination between work units;
- Coordinating with external parties, among others by:
 - Conducting media visits to a number of media with the board of directors;
 - Collaborating with Baitul Maal Muamalat in the publication of certain activities;
 - Participating as a sponsor in several media events;
 - Publishing positive publications to build and disseminate positive issues of the Bank;
 - Holding thematic photo sessions in order to increase the number of publications and engagement with journalists.
- Carrying out initiation to improve service quality to customers, among others by:
 - Developing digital service features on an ongoing basis to meet the needs and ease of transactions for customers, including:
 - Card Management;
 - Features of hijra financing and pension information;
 - The addition of several institutions/institution related to the payment/purchase menu.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

f. Risiko Reputasi (lanjutan)

3. Melaksanakan inisiasi peningkatan kualitas layanan kepada nasabah, antara lain dengan : (lanjutan)
 - b. Menyesuaikan panduan layanan *frontliners* dengan fokus pengalihan ke layanan digital;
 - c. Melakukan *service measurement* secara bulanan untuk memastikan implementasi parameter layanan dilakukan dengan baik dan konsisten;
 - d. Melaksanakan program sosialisasi dan *branch mentoring* oleh *unit service quality*.
4. Melakukan pengendalian internal melalui proses kaji ulang terhadap ketentuan internal terkait layanan kepada nasabah;
5. Melakukan kajian ulang atas metode, asumsi, dan variabel atas prosedur dan petunjuk teknis terkait pelayanan kepada nasabah, serta laporan pengaduan nasabah.

g. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Bank menetapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang dalam bentuk rencana strategis dan rencana bisnis.

Dalam memitigasi risiko strategi, Bank telah melakukan:

1. Menetapkan tema strategis di tahun 2023, yaitu "Pertumbuhan Bisnis yang Sehat dan *Profit* yang Berkelanjutan" dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
 - a. *Business Refocusing*;
 - b. *Fixing the Fundamental*;
 - c. *Strengthen Enablers*.
2. Menetapkan 8 (delapan) langkah strategis yang terdiri dari 5 (lima) fokus dan 3 (tiga) strategi utama, yakni:
 - a. Fokus - *Low Cost Fund*;
 - b. Fokus - *Fee Based Income*;
 - c. Fokus - *Healthy Growth and Financial Quality*;
 - d. Fokus - *Collection and Recovery*;
 - e. Fokus - *Efficiency*;
 - f. Strategi - *Customer Centric*;
 - g. Strategi - *Contribution Margin*;
 - h. Strategi - *Union Strategy*.
3. Memantau terciptanya efisiensi biaya dan pertumbuhan bisnis yang lebih *profitable* dan *sustainable* dalam laporan *Turn Around Plan* yang disampaikan kepada Direksi secara berkala;

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

f. Reputation Risk (continued)

3. Carrying out initiation to improve service quality to customers, among others by: (continued)
 - b. Tailor frontliners service guidance with a focus on shifting to digital services;
 - c. Conduct service measurement on a monthly basis to ensure the implementation of service parameters is carried out properly and consistently;
 - d. Carry out socialization and branch mentoring programs by service quality units.
4. Conducting internal control through a review process of internal policies related to services to customers;
5. Reviewing the methods, assumptions, and variables for technical procedures and guidelines regarding customer service, as well as customer complaints reports.

g. Strategic Risk

Strategic risk is a risk due to inaccuracy in decision making of strategic decision and failure in anticipating business environment changes. The Bank established short-period and long-period strategy in the form of strategic plan and business plan.

In order to mitigate strategic risk, the Bank has taken the following actions:

1. Setting a strategic theme in 2023, namely "Healthy Business Growth and Sustainable Profit" with the following strategic steps:
 - a. *Business Refocusing*;
 - b. *Fixing the Fundamental*;
 - c. *Strengthen Enablers*.
2. Establishing 8 (eight) strategic steps consisting of 5 (five) focuses and 3 (three) main strategies, namely:
 - a. Focus - *Low Cost Fund*;
 - b. Focus - *Fee Based Income*;
 - c. Focus - *Healthy Growth and Financial Quality*;
 - d. Focus - *Collection and Recovery*;
 - e. Focus - *Efficiency*;
 - f. Strategy - *Customer Centric*;
 - g. Strategy - *Contribution Margin*;
 - h. Strategy - *Union Strategy*.
3. Monitoring the creation of cost efficiency and more profitable and sustainable business growth in the Turn Around Plan which is submitted to the Board of Directors on a regular basis;

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

g. Risiko Strategik (lanjutan)

4. Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 13 November 2023 dengan beberapa mata acara rapat, yaitu :
 - a. Persetujuan Penggabungan Nilai Nominal Saham (*Reverse Stock Split* (RSS));
 - b. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - c. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Melakukan pemantauan *Transformation Project* yang terdiri dari beberapa *phase*. Periode ini, sedang dilaksanakan *phase 2* yang dikembangkan melalui 4 (empat) *workstream*, yaitu:
 - a. *Consumer Business Acceleration*;
 - b. *Retail Business Solution*;
 - c. *Enterprise Business Solution*;
 - d. *Digital Banking Capabilities*.
 Pemantauan atas pencapaian proyek ini disampaikan secara berkala kepada Direksi.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul ketika Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Bank senantiasa berupaya maksimal agar segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik (*comply with regulation*) dan secara terus menerus melakukan langkah-langkah perbaikan dalam kualitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional Bank.

Dalam memitigasi risiko kepatuhan, Bank telah melakukan:

1. Melakukan kampanye budaya kepatuhan antara lain melalui *sharing* informasi regulasi dan fatwa, memberikan opini terhadap penerapan regulasi dan aspek syariah, reminder kepada unit kerja terkait mengenai pemenuhan regulasi serta melakukan *training* dan *sharing knowledge*;
2. Mengelola, memantau, dan menatausahakan *database* peraturan OJK, BI, dan Fatwa DSN-MUI;
3. Memantau aspek *prudential banking* dengan membuat *dashboard* rasio *prudential banking* dan menyampaikannya kepada Direksi;
4. Mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, dan ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki Bank dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syariah yang berlaku, salah satunya dengan melaksanakan rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai salah satu kerangka manajemen risiko kepatuhan;

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

g. Strategic Risk (continued)

4. Holding an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on November 13, 2023 with several meeting agendas, namely:
 - a. Approval of Reverse Stock Split (RSS);
 - b. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association;
 - c. Changes in the composition of the Company's management.
5. Monitoring the Transformation Project which consists of several phases. This period, phase 2 is being developed through 4 (four) workstreams, namely:
 - a. Consumer Business Acceleration;
 - b. Retail Business Solution;
 - c. Enterprise Business Solution;
 - d. Digital Banking Capabilities.
 Monitoring of the achievement of this project is regularly submitted to the Board of Directors.

h. Compliance Risk

Compliance risk arises when the Bank does not comply with or fails to enforce the rules of the Financial Services Authority and/or Bank Indonesia, as well as other applicable laws and regulations.

Bank constantly strives to comply with applicable rules and regulations and continuously improves the quality of risk management, internal control system and the implementation of good governance. Bank also maintains prudential banking principles and sharia principles in Bank's operational activities.

In order to mitigate compliance risk, the Bank has taken the following actions:

1. Conducting compliance cultural campaigns, among others through the sharing of regulations and fatwas, giving opinions on the implementation of regulations and sharia aspects, giving reminder to the relevant work units regarding compliance with regulations and conducting training and knowledge sharing;
2. Managing, monitoring and maintaining a database of OJK, BI, and Fatwa DSN-MUI regulations;
3. Monitoring prudential banking aspects by creating a prudential banking ratio dashboard and delivering it to the Board of Directors;
4. Evaluating the effectiveness, adequacy, and suitability of policies, provisions, systems, and procedures owned by the Bank with the applicable provisions of legislation and sharia provisions, one of them is by conducting a meeting of the Sharia Supervisory Board (SSB) as one of the compliance risk management frameworks;

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

h. Risiko Kepatuhan (lanjutan)

5. Menyampaikan laporan-laporan secara periodik kepada regulator dan pihak terkait lain sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Melakukan perbaikan atas ketidaklengkapan pelaporan kepada *regulator* berkoordinasi dengan unit lain;
7. Mengimplementasikan *report reminder tools* yang dimiliki Bank dalam upaya melakukan *reminder* rutin bulanan kepada seluruh unit kerja yang memiliki kewajiban pelaporan menyampaikan laporan secara akurat dan tepat waktu;
8. Melakukan supervisi dan pendampingan kepada unit kerja dan/atau unit bisnis dalam melakukan penerbitan produk, program, operasional, sosialisasi dan/ atau pendekatan terhadap nasabah dan calon nasabah serta melakukan pelatihan/ *sharing* kepada karyawan baru maupun kepada pihak internal bank;
9. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas setiap proses bisnis Bank agar sesuai dengan regulasi yang berlaku serta aspek syariah;
10. Melakukan *Compliance Assurance* dan *Anti Money Laundering (AML) testing*;
11. Memberikan tinjauan aspek kepatuhan terhadap ketentuan internal yang sedang disusun atau dikaji ulang, serta memberikan opini/saran terhadap pengembangan produk/program/ aktivitas operasional termasuk permasalahan kepatuhan yang dihadapi dari sisi syariah dan *general compliance*;
12. Mengembangkan *Compliance Checklist* untuk memastikan kesiapan operasional terhadap perizinan produk/aktivitas dan jaringan kantor;
13. Memantau pelaksanaan GCG secara periodik dan menyampaikannya pada manajemen;
14. Melakukan penguatan atas penerapan Program APU dan PPT yang efektif dan efisien mengacu pada Kebijakan Penerapan APU dan PPT yang paling kurang mencakup 5 (lima) pilar, yaitu:
 - a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. Kebijakan dan Prosedur;
 - c. Pengendalian Internal;
 - d. Sistem Informasi Manajemen;
 - e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

i. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

h. Compliance Risk (continued)

5. Submitting reports periodically to the regulators and other relevant parties in accordance with applicable regulations;
6. Making improvements to the incompleteness of reporting to be submitted to regulator by coordinating with related units;
7. Implementing report reminder tools owned by the Bank in an effort to make monthly routine reminder to all work units that have reporting obligations to deliver accurate and timely reports;
8. Supervising and assisting the working units and/or business units in issuing products, programs, operations, socialization and/ or approaches to customers and prospective customers as well as training or sharing to new employees and/or to the internal bank;
9. Conducting improvements to every business process of the Bank in order to comply with applicable regulations and sharia aspect;
10. Conducting compliance Assurance and AML testing;
11. Providing a review of the aspects of compliance with internal policies that are being prepared or reviewed, and providing opinions/suggestions on the development of products/programs/operational activities including compliance issues faced from the sharia and general compliance side;
12. Developing Compliance Checklist to ensure the operational readiness of product/activity licensing and office network;
13. Monitoring the GCG implementation periodically and communicating it to the management;
14. Strengthening the implementation of effective and efficient APU and PPT Program referring to the Implementation of APU and PPT Policies that cover at least 5 (five) pillars:
 - a. Active supervisory of BOC and BOD;
 - b. Policy and Procedure;
 - c. Internal control;
 - d. Information System Management;
 - e. Human Resources and Training.

i. Rate of Return Risk

Rate of return risk is the risk due to changes in the rate of return paid by the Bank to customers, due to changes in the rate of return received by the Bank from the allocation of funds, which can affect the behavior of third party fund customers.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

i. Risiko Imbal Hasil (lanjutan)

Dalam memitigasi risiko imbal hasil, Bank telah melakukan:

1. Menetapkan *pricing* dana dan pembiayaan pada *level* tertentu yang dibahas dalam rapat ALCO;
2. Meningkatkan komposisi funding nasabah sesuai target pendanaan yang berfokus pada peningkatan dana murah (*low cost*);
3. Menurunkan konsentrasi pada nasabah besar dengan *pricing* yang mahal untuk mengoptimalkan profitabilitas sesuai dengan *bankwide strategy*;
4. Mengontrol dan mengevaluasi *cost of funds* (COF) dan *Net Income Margin* (NIM) melalui kajian atas *overhead cost* (OHC) per segmen bisnis;
5. Melakukan evaluasi secara berkala atas *income smoothing* dengan menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS).

j. Risiko Investasi

Risiko investasi (*investment risk*) adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

Dalam melakukan pengelolaan risiko investasi dalam pembiayaan beberapa hal yang telah dilakukan Bank adalah:

1. Melakukan pemantauan dan perbaikan pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan dan juga memperbaiki pencatatan pembiayaan berbasis bagi hasil secara terus menerus;
2. Menetapkan *target market* dan FAL secara *bankwide* sebagai arah pembiayaan yang juga berdampak pada risiko investasi;
3. Melakukan kajian atas kinerja pembiayaan termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan jual beli, dan melakukan kajian untuk mengembangkan ketentuan produk pembiayaan berdasarkan akad dengan mitigasi yang memadai sehingga mengurangi risiko bagi Bank.
4. Melakukan perbaikan sistem untuk mendukung pembiayaan dengan akad bagi hasil.
5. Melakukan pemeriksaan implementasi akad pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh internal audit.

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

i. Rate of Return Risk (continued)

In order to mitigate rate of return risk, the Bank has taken the following actions:

1. Establishing the pricing of funds and financing at a certain level discussed in the ALCO meeting;
2. Increasing the composition of customer funding according to business target that focus on increasing on low cost funds;
3. Lowering the concentration on large customers with expensive pricing to optimize profitability in accordance with bankwide strategy;
4. Controlling and evaluating the cost of funds (COF) and Net Income Margin (NIM) through reviewing overhead costs (OHC) per business segment;;
5. Conducting periodic evaluation of income smoothing by submitting reports to the Sharia Supervisory Board (DPS).

j. Investment Risk

Investment risk is a risk due to losses that Bank's bear due to its customer's losses in the term of financing that is based on profit and loss sharing.

In managing investment risk in financing activity, the Bank has taken actions as follows:

1. Monitoring and improving the financing based on contract and also continuously improving the recording of profit and loss sharing financing;
2. Setting target markets and FAL bankwide as financing directions that also have an impact on investment risk;
3. Continuously reviewing the financing performance, including profit sharing financing and cost-plus financing, and also conducting studies to develop the provision of financing products based on contract with adequate mitigation to reduce the risk for Bank.
4. Improving the system to support financing with a revenue sharing contract.
5. Implementing profit sharing inspection based financing by internal audit.

46. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal tersebut.

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The table below presents a comparison between the carrying value and fair value of financial assets and liabilities. The fair value is disclosed based on relevant available information as of December 31, 2023 and 2022 and it is not updated to reflect changes in market condition occurring after that date.

31 Desember 2023 / December 31, 2023			
	Nilai Tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	
ASET			ASSETS
Kas	720.209.073	720.209.073	Cash
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5.010.479.824	5.010.479.824	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1.463.838.902	1.463.838.902	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank lain	3.760.782	3.760.782	Placement with other banks
Investasi pada surat berharga	30.524.748.886	30.524.748.886	Investments in marketable securities
Piutang	5.853.925.684	5.853.925.684	Receivable
Piutang <i>qardh</i>	633.604.421	633.604.421	Funds of qardh
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	593.853.169	593.853.169	Mudharabah financing
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	15.381.520.343	15.381.520.343	Musyarakah financing
Penyertaan saham	407.711.237	407.711.237	Investment in share
Tagihan akseptasi	153.615.400	153.615.400	Acceptance receivables
Piutang Salam	253.206.247	253.206.247	Salaam Receivables
Aset pajak tangguhan	138.192.371	138.192.371	Deferred tax assets
Aset lain-lain	3.954.368.605	3.954.368.605	Other assets
Jumlah aset	65.093.034.944	65.093.034.944	Total assets
LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER			LIABILITIES AND TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Liabilitas segera	164.382.213	164.382.213	Liabilities due immediately
Simpanan	11.022.248.684	11.022.248.684	Deposits
Simpanan dari bank lain	46.293.395	46.293.395	Deposits from other banks
Bagi hasil yang belum dibagikan	82.574.510	82.574.510	Undistributed revenue sharing
Liabilitas akseptasi	8.184.473	8.184.473	Acceptance payables
Pinjaman yang diterima	1.000.000.000	1.000.000.000	Fund borrowings
Dana syirkah temporer	46.688.433.494	46.688.433.494	Temporary syirkah funds
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	59.012.116.769	59.012.116.769	Total liabilities and temporary syirkah funds

**46. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN
(lanjutan)**

**46. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND
LIABILITIES (continue)**

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal tersebut. (lanjutan)

The table below presents a comparison between the carrying value and fair value of financial assets and liabilities. The fair value is disclosed based on relevant available information as of December 31, 2023 and 2022 and it is not updated to reflect changes in market condition occurring after that date. (Continue)

	31 Desember 2022/ December 31, 2022		
	Nilai Tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	
ASET			ASSETS
Kas	702.179.266	702.179.266	Cash
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	7.191.470.623	7.191.470.623	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	520.954.333	520.954.333	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank lain	43.155.448	43.155.448	Placement with other banks
Investasi pada surat berharga	27.855.377.312	27.853.499.681	Investments in marketable securities
Piutang	6.697.549.432	6.697.549.432	Receivable
Piutang <i>qardh</i>	864.978.271	864.978.271	Funds of qardh
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	564.058.967	564.058.967	Mudharabah financing
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	10.694.846.135	10.694.846.135	Musyarakah financing
Penyertaan saham	407.711.237	407.711.237	Investment in shares
Tagihan akseptasi	119.284.582	119.284.582	Acceptance receivables
Aset pajak tangguhan	139.908.777	139.908.777	Deferred tax assets
Aset lain-lain	3.615.369.048	3.615.369.048	Other assets
Jumlah aset	59.416.843.431	59.414.965.800	Total assets
LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER			LIABILITIES AND TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Liabilitas segera	116.395.779	116.395.779	Liabilities due immediately
Simpanan	9.227.129.653	9.227.129.653	Deposits
Simpanan dari bank lain	59.392.525	59.392.525	Deposits from other banks
Bagi hasil yang belum dibagikan	68.302.948	68.302.948	Undistributed revenue sharing
Liabilitas akseptasi	14.280.969	14.280.969	Acceptance payables
Pinjaman yang diterima	500.000.000	500.000.000	Fund borrowings
Dana syirkah temporer	45.596.964.196	45.596.964.196	Temporary syirkah funds
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	55.582.466.070	55.582.466.070	Total liabilities and temporary syirkah funds

47. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang kewajiban penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, yang mencabut peraturan sebelumnya; dan berdasarkan Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015. Rasio KPMM tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
MODAL INTI		
Modal disetor	2.297.736.324	2.297.736.324
Komponen Modal Lainnya	2.503.853.928	2.498.451.142
Jumlah modal inti	<u>4.801.590.252</u>	<u>4.796.187.466</u>
MODAL PELENGKAP		
Pinjaman subordinasi	2.000.000.000	2.000.000.000
Cadangan umum penyisihan kerugian aset produktif (maksimum 1,25% dari ATMR)	188.883.020	176.309.869
Jumlah modal pelengkap	<u>2.188.883.020</u>	<u>2.176.309.869</u>
Total Modal	<u>6.990.473.272</u>	<u>6.972.497.335</u>
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		
ATMR Risiko Kredit	21.268.481.150	19.330.326.830
ATMR Risiko Pasar	72.431.880	33.998.130
ATMR Risiko Operasional	2.420.899.375	1.958.456.250
Total Aset Tertimbang Menurut Risiko	<u>23.761.812.405</u>	<u>21.322.781.210</u>
RASIO KPMM		
Rasio CET 1	20,21%	22,49%
Rasio Tier 1	20,21%	22,49%
Rasio Tier 2	9,21%	10,21%
Total Rasio	<u>29,42%</u>	<u>32,70%</u>
Rasio KPMM yang diwajibkan	<u>10,00 - 11,00%</u>	<u>10,00 - 11,00%</u>

47. CAPITAL ADEQUACY RATIO

As of December 31, 2023 and 2022, the Minimum Required Capital Adequacy Ratio (CAR) is calculated based on Regulation of Financial Services Authority (OJK) No.21/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 regarding Sharia Bank Minimum Required Capital, which revokes the previous regulation; and based on OJK circular Letter No. 12/SEOJK.03/2015 dated April 27, 2015. The CARs are as follows:

PRIMARY CAPITAL
Paid-in capital
Other Equity Component
Total primary capital
SECONDARY CAPITAL
Subordinated financing
General reserve of allowance for impairment losses of earning assets (maximum at 1.25% of RWA)
Total secondary capital
Total Capital
Risk Weighted assets (RWA)
RWA For Financing Risk
RWA For Market Risk
RWA For Operational Risk
Total Risk Weighted Assets
Capital Adequacy Ratio
CET 1 ratio
Tier 1 Ratio
Tier 2 Ratio
Total Ratio
Required CAR

48. POSISI DEvisa NETO

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya selisih posisi valuta asing yang dimiliki Bank yang tercermin dalam Posisi Devisa Neto (PDN) baik secara individual maupun secara keseluruhan. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi *banking book* dalam rangka pengendalian PDN.

48. NET OPEN POSITION

Exchange rate risk is the risk due to the differences of foreign exchange positions held by the Bank which is reflected in the Net Open Position (NOP) either individually or as a whole. Included in the foreign exchange position is the position of the trading book which is carried out either to gain foreign exchange transaction income in the short-term period or banking book positions in order to control NOP.

48. POSISI DEVISA NETO (Lanjutan)

48. NET OPEN POSITION (Continued)

Berikut adalah PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

The Bank's NOP as of December 31, 2023 and 2022 is as follows:

Mata uang	31 Desember 2023 / December 31, 2023			Currencies
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position	
Laporan Posisi Keuangan*)				Statement of Financial Position*)
Dolar Amerika Serikat	4.952.503.253	5.167.461.754	214.958.501	United States Dollar
Euro	13.425.410	6.191.173	7.234.237	Euro
Ringgit Malaysia	83.174.518	1.513.631	81.660.887	Malaysian Ringgit
Dolar Singapura	4.076.602	1.915.312	2.161.290	Singapore Dollar
Riyal Arab Saudi	3.416.874		3.416.874	Saudi Arabian Riyal
Yen Jepang	757.623		757.623	Japanese Yen
Dinar Kuwait	501.952		501.952	Kuwaiti Dinar
Jumlah	5.057.856.232	5.177.081.870	310.691.364	Total
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif*)				Statement of Financial Position and Administrative Accounts*)
Dolar Amerika Serikat	5.280.163.183	5.278.284.903	1.878.280	United States Dollar
Euro	13.425.410	11.302.054	2.123.356	Euro
Ringgit Malaysia	108.151.190	102.615.637	5.535.553	Malaysian Ringgit
Dolar Singapura	4.076.602	1.915.312	2.161.290	Singapore Dollar
Riyal Arab Saudi	3.416.874		3.416.874	Saudi Arabian Riyal
Yen Jepang	757.623		757.623	Japanese Yen
Dinar Kuwait	501.952		501.952	Kuwaiti Dinar
Jumlah	5.410.492.834	5.394.117.906	16.374.928	Total
Modal (Catatan 47)			6.990.473.272	Capital (Note 47)
Rasio PDN (Laporan Posisi Keuangan)			4,45%	NOP Ratio (Statement of Financial Position)
Rasio PDN (Keseluruhan)			0,23%	NOP Ratio (Overall)
Mata uang	31 Desember 2022/ December 31, 2022			Currencies
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position	
Laporan Posisi Keuangan*)				Statement of Financial Position*)
Dolar Amerika Serikat	2.433.840.450	2.493.871.196	60.030.746	United States Dollar
Euro	3.294.886	67	3.294.819	Euro
Ringgit Malaysia	162.615.084	1.108.118	161.506.966	Malaysian Ringgit
Dolar Singapura	4.800.630	1.729.358	3.071.272	Singapore Dollar
Riyal Arab Saudi	2.702.727	--	2.702.727	Saudi Arabian Riyal
Yen Jepang	398.410	--	398.410	Japanese Yen
Dinar Kuwait	508.742	--	508.742	Kuwaiti Dinar
Jumlah	2.608.160.929	2.496.708.739	231.513.682	Total
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif*)				Statement of Financial Position and Administrative Accounts*)
Dolar Amerika Serikat	2.644.506.008	2.654.135.993	9.629.985	United States Dollar
Euro	3.294.886	67	3.294.819	Euro
Ringgit Malaysia	181.382.211	193.699.066	12.316.855	Malaysian Ringgit
Dolar Singapura	4.800.630	1.729.358	3.071.272	Singapore Dollar
Riyal Arab Saudi	2.702.727	--	2.702.727	Saudi Arabian Riyal
Yen Jepang	398.410	--	398.410	Japanese Yen
Dinar Kuwait	508.742	--	508.742	Kuwaiti Dinar
Jumlah	2.837.593.614	2.849.564.484	31.922.810	Total
Modal (Catatan 47)			6.972.497.335	Capital (Note 47)
Rasio PDN (Laporan Posisi Keuangan)			3,32%	NOP Ratio (Statement of Financial Position)
Rasio PDN (Keseluruhan)			0,46%	NOP Ratio (Overall)

*) Merupakan penjumlahan absolut dari selisih aset dan liabilitas.

*) Total absolute differences between Assets and Liabilities.

49. PERJANJIAN PENTING

Bank menandatangani beberapa perjanjian penting seperti yang tersebut dibawah:

- a. Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Implementasi dan Pemeliharaan Aplikasi BI-SNAP untuk Bank Muamalat antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Fan Integrasi Teknologi dengan nilai kontrak sebesar Rp1.483.515. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 23 Juni 2023 dan akan berakhir 24 Mei 2028.
- b. Perjanjian Penyediaan dan Pemanfaatan *Talend Data Services Platform* antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT NTT Indonesia Technology dengan nilai kontrak sebesar Rp1.153.463. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 19 Juni 2023 dan akan berakhir 27 Februari 2024.
- c. Addendum Pertama Perjanjian Kerja Sama Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin ATM Merek Wincor Nixdorf antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Diebold Nixdorf Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp2.266.821. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 15 Juni 2023 dan akan berakhir 31 Desember 2023.
- d. Addendum Kedua Perjanjian Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin ATM Merek Wincor Nixdorf antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Intikom Berlian Mustika dengan nilai kontrak sebesar Rp1.965.366. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 15 Juni 2023 dan akan berakhir 31 Desember 2023.
- e. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Layanan Asuransi Syariah Kesehatan Bagi Karyawan Bank Muamalat dan Anggota Keluarganya Antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Multiniaga Intermedia Proteksi dan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk dengan nilai kontrak sebesar Rp53.939.158. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 2 Juni 2023 dan akan berakhir 31 Mei 2024.
- f. Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Implementasi dan Pemeliharaan Aplikasi OBS *Settlement and Trading System* (OSTS) untuk Bank Muamalat antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan PT OBS Solusi Teknologi Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp3.730.000. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 11 Mei 2023 dan akan berakhir 4 Juni 2025.
- g. Perjanjian Penunjukan Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Renovasi Lantai 16 dan 17 Gedung Muamalat Tower antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Perintis Dinamika Sekatama dengan nilai kontrak sebesar Rp17.126.813. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 13 April 2023 dan akan berakhir 14 Mei 2023.

49. SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Bank has signed several important agreements as described below:

- a. Agreement regarding Procurement of Implementation and Maintenance of BI-SNAP application for Bank Muamalat between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Fan Integrasi Teknologi, with the value of Rp1,483,515. This agreement came into effect on June 23, 2023 and will expire on May 24, 2028.
- b. Agreement regarding provision and utilization of Talend Data Services Platform between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT NTT Indonesia Technology, with the value of Rp1,153,463. This agreement came into effect on June 19, 2023 and will expire on February 27, 2024.
- c. First Addendum to Agreement regarding Maintenance and Repair of Wincor Nixdorf ATM machine between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Diebold Nixdorf Indonesia, with the value of Rp2,266,821. This agreement came into effect on June 15, 2023 and expired on December 31, 2023.
- d. Second Addendum to Agreement regarding Maintenance and Repair of Wincor Nixdorf ATM machine between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Intikom Berlian Mustika, with the value of Rp1,965,366. This agreement came into effect on June 15, 2023 and expired on December 31, 2023.
- e. Agreement regarding Sharia Health Insurance Facility for employees of Bank Muamalat and their family members between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Multiniaga Intermedia Proteksi and PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, with the value of Rp53,939,158. This agreement came into effect on June 2, 2023 and will expire on May 31, 2024.
- f. Agreement regarding Procurement of Implementation and Maintenance of OBS *Settlement and Trading System* (OSTS) application for Bank Muamalat, between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT OBS Solusi Teknologi Indonesia, with the value of Rp3,730,000. This agreement came into effect on May 11, 2023 and will expire on June 4, 2025.
- g. Agreement regarding the Appointment of Renovation of Floors 16 and 17 of Muamalat Tower Building, between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Perintis Dinamika Sekatama, with the value of Rp17,126,813. This agreement came into effect on April 13, 2023 and expired on May 14, 2023.

49. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

Bank menandatangani beberapa perjanjian penting seperti yang tersebut dibawah: (lanjutan)

- h. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Lisensi *Annual Technical Support* (ATS) pada aplikasi *My Oracle Support* (MOS) *flexcube* Bank Muamalat antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Midas Daya Teknologi dengan nilai kontrak sebesar Rp3.559.500. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 13 April 2023 dan akan berakhir 31 Desember 2023.
- i. Addendum IV Perjanjian Kerjasama *Maintenance Aplikasi Switching Way4 Production* Bank Muamalat antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Matajari Mitra Solusi dengan nilai kontrak sebesar Rp3.990.000. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 12 April 2023 dan akan berakhir 31 Desember 2023.
- j. Perjanjian Kerja Sama Pemeliharaan Perangkat *Storage* untuk *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) *Application* dengan nilai kontrak sebesar Rp1.245.000. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 5 April 2023 dan akan berakhir 27 Februari 2024.
- k. Perjanjian kerjasama pemanfaatan layanan *Payroll* Madina Bank Muamalat bagi karyawan antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan Yayasan Zad Al Insaniyah Cipanas dengan nilai kontrak sebesar Rp6.125.261. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 13 Maret 2023 dan akan berakhir 13 Maret 2024.
- l. Addendum Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelola Keuangan Haji Dengan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan nilai kontrak sebesar Rp10.000.000.000. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 28 Februari 2023 dan akan berakhir 30 Juni 2024.
- m. Surat perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa dan Sewa Kantor Untuk Ruang Perkantoran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Muamalat Tower dengan nilai kontrak sebesar Rp23.801.331. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 28 Februari 2023 dan akan berakhir 31 Januari 2028.
- n. Addendum kelima perjanjian kerjasama penyediaan tenaga kerja *driver* dan pelayanan kebersihan antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Maksima Cakrawala Insani dengan nilai kontrak sebesar Rp2.787.120. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023 dan akan berakhir 31 Desember 2023.

49. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

The Bank has signed several important agreements as described below: (continued)

- h. Agreement regarding Procurement of Annual Technical Support (ATS) License on the application of My Oracle Support (MOS) of flexcube in Bank Muamalat, between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Midas Daya Teknologi, with the value of Rp3,559,500. This agreement came into effect on April 13, 2023 and expired on December 31, 2023.
- i. Fourth Addendum to agreement regarding Maintenance of Switching Way4 Production application in Bank Muamalat, between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Matajari Mitra Solusi, with the value of Rp3,990,000. This agreement came into effect on April 12, 2023 and expired on December 31, 2023.
- j. Agreement regarding the Maintenance of Storage Device for Data Center (DC) and Disaster Recovery Center (DRC) Application, with the value of Rp1,245,000. This agreement came into effect on April 5, 2023 and will expire on February 27, 2024.
- k. Agreement regarding Bank Muamalat Madina Payroll facility for employee, between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and Yayasan Zad Al Insaniyah Cipanas, with the value of Rp6,125,261. This agreement came into effect on March 13, 2023 and will expire on March 13, 2024.
- l. Addendum to agreement between Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) and Recipient Bank for Hajj Pilgrimage Organizing Fees, with the value of Rp10,000,000,000. This agreement came into effect on February 28, 2023 and will expire on June 30, 2024.
- m. Letter of agreement regarding Procurement of Office Rent and Services for Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Office Space at Muamalat Tower, with the value of Rp23,801,331. This agreement came into effect on February 28, 2023 and will expire on January 31, 2028.
- n. Fifth Addendum to agreement regarding Procurement of driver and cleaning service, between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Maksima Cakrawala Insani, with the value of Rp2,787,120. This agreement came into effect on January 2, 2023 and expired on December 31, 2023.

49. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

Bank menandatangani beberapa perjanjian penting seperti yang tersebut dibawah: (lanjutan)

- o. Addendum VI perjanjian kerjasama penyediaan tenaga kerja *cleaning services* antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT ISS Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp1.148.400. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023 dan akan berakhir 31 Desember 2023.
- p. Perjanjian kerjasama sewa kendaraan antara PT Pusaka Prima Transport (Blue Bird) dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan nilai kontrak sebesar Rp1.025.440. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023 dan akan berakhir 31 Desember 2025.
- q. Perjanjian Kerjasama dengan PT Karlin Mastrindo tentang Pengadaan *Seat Management* Perangkat *Desktop* dan *Notebook* dengan nilai kontrak sebesar Rp13.550.400. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 23 November 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2031.
- r. Perjanjian Kerjasama dengan PT Citra Sentosa Solusindo tentang Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat *Storage* dan *Backup* untuk *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) *Core Banking* Bank Muamalat dengan nilai sebesar Rp11.400.000. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 04 Oktober 2022 dan akan berakhir pada tanggal 03 Juli 2025.
- s. Perjanjian Kerjasama dengan PT Nomina Teknograsi Indodata tentang Pemeliharaan *Firewall Fortinet*, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.900.000. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 04 Oktober 2022 dan akan berakhir pada tanggal 02 Februari 2023.
- t. Perjanjian Kerjasama dengan PT Nomina Teknograsi Indodata tentang Pengadaan dan Pemeliharaan *Server VMware* untuk Pemenuhan *Gap* DC-DRC dengan nilai sebesar Rp1.324.640. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 26 September 2022 dan akan berakhir pada tanggal 30 September 2025.
- u. Perjanjian Layanan Sistem *Web Application Firewall* (WAF) dengan PT Prima Integrasi Solusindo, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.159.950. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 05 Desember 2022 dan akan berakhir pada tanggal 06 Oktober 2023.

49. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

The Bank has signed several important agreements as described below: (continued)

- o. Sixth Addendum to agreement regarding Procurement of cleaning service between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT ISS Indonesia, with the value of Rp1,148,400. This agreement came into effect on January 2, 2023 and expired on December 31, 2023.
- p. Agreement regarding vehicle rent between PT Pusaka Prima Transport (Blue Bird) and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, with the value of Rp1,025,440. This agreement came into effect on January 2, 2023 and will expire on December 31, 2025.
- q. Agreement with PT Karlin Mastrindo regarding the Procurement of Seat Management of Desktop and Notebook, with a value of Rp13,550,400. This agreement came into effect on November 23, 2022 and will expire on December 31, 2031.
- r. Agreement with PT Citra Sentosa Solusindo regarding the Procurement and Maintenance of Storage Devices and Backup for Data Center (DC) and Disaster Recovery Center (DRC) of Core Banking of Bank Muamalat with a value of Rp11,400,000. This agreement came into effect on October 04, 2022, and will expire on July 03, 2025.
- s. Agreement with PT Nomina Teknograsi Indodata regarding the Maintenance of Firewall Fortinet, with a value of Rp1,900,000. This agreement came into effect on October 04, 2022 and expired on February 02, 2023.
- t. Agreement with PT Nomina Teknograsi Indodata regarding the Procurement and Maintenance of VMware Server for Fulfillment of DC-DRC Gap, with a value of Rp1,324,640. This agreement came into effect on September 26, 2022, and will expire on September 30, 2025.
- u. Agreement of Web Application Firewall (WAF) System Service with PT Prima Integrasi Solusindo, with a value of Rp1,159,950. This agreement came into effect on December 5, 2022 and expired on October 06, 2023.

49. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

Bank menandatangani beberapa perjanjian penting seperti yang tersebut dibawah: (lanjutan)

- v. Perjanjian Kerjasama dengan PT Defender Nusa Semesta tentang Pengadaan dan Pengelolaan *Security Operation Center (SOC)* dan *Security Device Management (SDM)* dengan nilai kontrak sebesar Rp1.015.650. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 25 Oktober 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.
- w. Perjanjian Layanan *payroll* Bank Muamalat bagi Karyawan Nasabah dengan NPCI Provinsi Papua, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.000.000. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 01 November 2022 dan akan berakhir pada tanggal 01 November 2027.
- x. Perjanjian Kerjasama dengan PT Simian Solutions tentang Jasa Implementasi Aplikasi *Medallion Sales*, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.650.000. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 22 Desember 2020 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- y. Perjanjian Kerjasama dengan PT Mastersystem Infotama tentang Pengadaan Lisensi *Microsoft Office 365*, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.845.000. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 16 Maret 2020 dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.
- z. Perjanjian Layanan IMS dengan PT Infinitium Solutions, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.005.000. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 1 April 2020 dan akan berakhir pada tanggal 26 Februari 2023.
- aa. Perjanjian Kerjasama dengan PT Bumi Amaritha Teknologi Mandiri tentang Pengadaan dan *Maintenance Aplikasi Regulatory Report ANTASENA* dan *SLIK*, dengan nilai kontrak sebesar Rp5.359.000. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 22 Juli 2020 dan akan berakhir pada tanggal 15 Mei 2023.

50. INFORMASI TAMBAHAN

- a. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 Bank memiliki rasio aset produktif yang diklasifikasikan *non-performing* bruto terhadap total aset produktif masing masing sebesar 1,75% dan 2,15%.
- b. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 Bank memiliki piutang, pinjaman dan pembiayaan yang *non-performing (NPF)* bruto terhadap total piutang, pinjaman dan pembiayaan masing masing sebesar 2,06% dan 2,78%.

49. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

The Bank has signed several important agreements as described below: (continued)

- v. Agreement with PT Defender Nusa Semesta regarding the Procurement and Management of Security Operation Center (SOC) and Security Device Management (SDM), with a value of Rp1,015,650. This agreement came into effect on October 25, 2022 and expired on July 31, 2023.
- w. Bank Muamalat Payroll Service Agreement for Customer Employees with NPCI Papua Province, with a value of Rp1,000,000. This agreement came into effect on November 01, 2022 and will expire on November 01, 2027.
- x. Agreement with PT Simian Solutions regarding Medallion Sales Application Implementation Services, with a value of Rp2,650,000. This agreement came into effect on December 22, 2020 and will expire on December 31, 2026.
- y. Agreement with PT Mastersystem Infotama regarding Procurement of Microsoft Office 365 Licence, with a value of Rp2,845,000. This agreement came into effect on March 16, 2020 and expired on December 31, 2023.
- z. Agreement of IMS Service with PT Infinitium Solutions, with a value of Rp1,005,000. This agreement came into effect on April 1, 2020 and expired on February 26, 2023.
- aa. Agreement with PT Bumi Amaritha Teknologi Mandiri regarding the Procurement and Maintenance of Regulatory Report ANTASENA dan SLIK Application, with a value of Rp5,359,000. This agreement came into effect on July 22, 2020 and expired on May 15, 2023.

50. ADDITIONAL INFORMATION

- a. As of December 31, 2023 and 2022, the Bank's non-performing earning assets (gross) to total earning assets ratios are 1.75% and 2.15%, respectively.
- b. As of December 31, 2023 and 2022, the Bank's non-performing financing (NPF) gross to total receivables, funds and financing ratios are 2.06% and 2.78%, respectively.

50. INFORMASI TAMBAHAN (Lanjutan)

- c. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 Bank memiliki piutang, pinjaman dan pembiayaan yang *non-performing* (NPF) neto terhadap total piutang, pinjaman dan pembiayaan masing masing sebesar 0,66% dan 0,86%.
- d. Rasio piutang dan pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga masing masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar 47,14% dan 40,63%.
- e. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Bank masih menjalankan strategi jangka panjang yang telah dicanangkan dalam program *Turnaround Plan* tahun 2021 dan menyesuaikan dengan perkembangan yang berjalan. Bank sedang menyusun rencana dan strategi bisnis baru yang lebih baik, dimana rencana tersebut masih dalam proses persetujuan dari *stakeholders*.

51. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No.001/R/SSB-SRT/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dan No.044/B/CPD-SRT/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta opini syariah dari DPS.

52. PERKEMBANGAN KONDISI EKONOMI DI INDONESIA

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan berlakunya "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona". Wabah virus corona menjadi pandemi global yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia dan dunia, antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal.

Resolusi dari dampak ekonomi Indonesia ini, banyak tergantung dari kebijakan fiskal dan moneter yang akan ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia dan otoritas, yang merupakan suatu tindakan yang berada diluar kendali Bank. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Bank dan realisasi dari aset, termasuk pengaruh dari nasabah, kreditur, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

50. ADDITIONAL INFORMATION (Continued)

- c. As of December 31, 2023 and 2022, the Bank's *non-performing financing* (NPF) net to total receivables, funds and financing ratios are 0.66% and 0.86%, respectively.
- d. The ratios of receivables and financing to total deposits as of December 31, 2023 and 2022 are 47.14% and 40.63%, respectively.
- e. As of December 31 2023, the Bank is still implementing the long-term strategy that was announced in the 2021 *Turnaround Plan* program and adapting to ongoing developments. The Bank is currently preparing a new, better business plan and strategy, where the plan is still in the process of being approved by the stakeholders.

51. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Based on letters No.001/R/SSB-SRT/II/2024 dated February 22, 2024 and No.044/B/CPD-SRT/II/2023 dated February 24, 2023, for the years ended December 31, 2023 and December 31, 2022, respectively, the Sharia Supervisory Board expresses an opinion that the operations and products of PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk have complied with fatwa and sharia regulations issued by the National Sharia Board of Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) and sharia opinion of DPS.

52. INDONESIA'S ECONOMIC CONDITION

In early 2020, National Agency for Disaster Management of the Republic of Indonesia announced the enactment of "Status of the Certain Disaster Emergency Conditions Due to Corona Virus Pandemic". The corona pandemic, that become global pandemic, had impacted domestic economy, which was characterized by weakening of the rupiah exchange rate and decline in the prices of securities on the capital market.

The resolution of the economic impact in Indonesia in large degree is dependent on any fiscal and monetary measures that may be taken by the Government of the Republic of Indonesia and the authority, an action that is beyond the Bank's control. Therefore, it is not possible to determine the impact of future economics condition to the Bank liquidity and earnings, asset realization, effect from customers, debtors, shareholders, and other stakeholders.

52. PERKEMBANGAN KONDISI EKONOMI DI INDONESIA (Lanjutan)

Pengaruh dari ketidakpastian yang ada pada aset dan liabilitas yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada saat ini tidak dapat diperkirakan jumlahnya. Pengaruh tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan pada saat diketahui dan dapat diperkirakan jumlahnya.

52. INDONESIA'S ECONOMIC CONDITION (continued)

The effects of this uncertainty on the assets and liabilities reported in the statement of financial position cannot be presently determined. Such effects will be reported in the financial statements when they are known and can be estimated.

53. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.003/B/DIRKPTS/I/2024 Tanggal 5 Januari 2024, bahwa telah terjadi perubahan susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

53. SUBSEQUENT EVENTS

Based on the Decision Letter of the Board of Directors No.003/B/DIR-KPTS/I/2024 dated January 5, 2024, there has been a change in the composition of the Audit Committee:

20 Januari 2024 / January 20, 2024

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota

Sartono
Amin Said Husni
Karim Anggar Prianto
Saiful Anwar

Chairman
Member
Member
Member

54. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 26 Maret 2024.

54. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS

The Bank's management is responsible for the preparation of the financial statements that were completed and authorized for issue by the Board of Directors on March 26, 2024.



LAMPIRAN

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

ATTACHMENT

Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Reports for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units

Keterangan	Halaman Page	Description
PERIODE TAHUNAN		ANNUAL PERIOD
1. Ruang Lingkup		1. Scope
a. Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan BUS tahunan meliputi:	✓	a. Annual report of published financial statements and information on financial performance of Sharia Commercial Banks (BUS) covers:
1) informasi umum;	✓	1) general information;
2) informasi kinerja keuangan;	✓	2) information on financial performance;
3) eksposur risiko dan permodalan;	✓	3) risk exposure and capital;
4) tata kelola;	✓	4) governance;
5) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	✓	5) audited financial statements; and
6) informasi terkait dengan kelompok usaha BUS.	✓	6) related information on BUS business group.
b. Uraian masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:		b. Description of the respective scope of discussions are as follow:
1) Informasi Umum		1) General Information
Informasi umum dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan BUS paling sedikit meliputi:		General information in the annual report of published financial statements and information on financial performance of BUS cover at the very least:
a) Ikhtisar Data Keuangan Penting		a) Financial Highlights
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) Tahun Buku atau sejak BUS melakukan kegiatan usaha, bagi BUS yang melakukan kegiatan usaha kurang dari 2 (dua) tahun. Ikhtisar data keuangan penting paling sedikit meliputi:		The Financial Highlights section presents financial information in a comparative format for 2 (two) financial years, or since the BUS began its business for BUS that has been in business for less than 2 (two) years. At the very least, financial highlights covers:
(1) net pendapatan setelah distribusi bagi hasil, imbalan, dan bonus;	8	(1) net revenues after distribution of profit sharing, fees and bonuses;
(2) laba/rugi operasional;	8	(2) operating profit/loss;
(3) laba/rugi sebelum pajak;	8	(3) profit/loss before taxes;
(4) laba/rugi bersih;	9	(4) net profit/loss;
(5) total laba/rugi komprehensif;	9	(5) total comprehensive profit/loss;
(6) laba bersih per saham;	9	(6) net income per share;
(7) jumlah aset;	8	(7) total assets;
(8) jumlah liabilitas;	8	(8) total liabilities;
(9) jumlah ekuitas;	8	(9) total equity;
(10) aset produktif;	8; 197-198	(10) earning assets;
(11) dana pihak ketiga;	8	(11) third party funds;
(12) pembiayaan yang diterima;		(12) borrowings;
(13) rasio keuangan, paling sedikit meliputi:		(13) financial ratios, at least of:



Keterangan	Halaman Page	Description
i. rasio KPMM;	9	i. CAR;
ii. rasio ROA;	9	ii. ROA;
iii. rasio ROE;	9	iii. ROE;
iv. rasio BOPO;	9	iv. BOPO;
v. rasio CIR;	9	v. CIR;
vi. persentase pelanggaran dan pelampauan BMPD;	9	vi. percentage of LLL violation and exceedance;
vii. GWM;	9	vii. mandatory minimum reserves;
viii. rasio PDN;	9	viii. net open position;
ix. rasio NPF gross dan net; dan	9	ix. NPF gross and NPF net; and
x. rasio laba/rugi terhadap pendapatan; dan	9	x. profit/loss to revenue ratio; and
(14) informasi lain yang relevan	-	(14) other relevant information.
b) Profil BUS		
Profil BUS paling sedikit meliputi:		The profile of BUS covers at least:
(1) nama BUS termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada Tahun Buku;	70; 74	(1) the name of BUS, including if there has been a change of name, the reason for the change, and effective date of name in the Fiscal Year;
(2) informasi mengenai kantor pusat BUS yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai BUS meliputi:	71	(2) information on the head office of BUS where the general public may obtain information about the BUS, covering:
i. alamat;	71	i. address;
ii. nomor telepon;	71	ii. telephone number;
iii. nomor faksimile;	71	iii. fax number;
iv. alamat surat elektronik; dan	71	iv. e-mail address; and
v. alamat situs web;	71	v. web site address;
(3) riwayat singkat BUS;	72-75	(3) brief profile of BUS;
(4) visi dan misi BUS;	78-79	(4) vision and mission of BUS;
(5) kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada Tahun Buku, serta jenis produk dan aktivitas;	80-96	(5) line(s) of business according to the latest articles of association, business activities performed in the Fiscal Year, and types of products and activities;
(6) struktur organisasi BUS, paling sedikit sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah direksi yang disertai dengan nama dan jabatan;	112	(6) organization structure of BUS, at the very least to 1 (one) level below the Directors, with name and position;
(7) susunan dan komposisi pemegang saham, yaitu nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham, termasuk:		(7) shareholding structure and composition, that is, names of shareholders and percentage of share-ownership, including:
i. pemegang saham yang memiliki paling sedikit 5% (lima persen) saham BUS;	158	i. shareholders with a minimum of 5% (five percent) of shares of the BUS;
ii. anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang memiliki saham BUS;	158-159	ii. members of the board of directors and board of commissioners that hold shares of the BUS;
iii. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham BUS (jika ada); dan	158	iii. public shareholders, that is, shareholders that each held less than 5% (five percent) of shares of the BUS (if any); and



Keterangan	Halaman Page	Description
iv. informasi mengenai pemegang saham pengendali BUS sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	157	iv. information on the controlling shareholder(s) of the BUS, up to the individual ultimate shareholders, presented in a schematic diagram or chart;
(8) profil Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, paling sedikit meliputi:	116-140	(8) profiles of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the DPS (Sharia Supervisory Board), covering at least:
i. susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, serta jabatan dan ringkasan riwayat hidup.	116-140	i. structure of the Board of Directors, Board of Commissioners and DPS, as well as position and curriculum vitae.
Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS yang terjadi setelah Tahun Buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, susunan yang dicantumkan yaitu susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sebelum dan setelah perubahan;	116-140	In the event of changes in the membership composition of the Board of Directors, Board of Commissioners and/ or DPS occurring subsequent to the end of the Fiscal Year and up to the deadline for submission of the annual report of published financial statements and information on financial performance, membership composition of the Board of Directors, Board of Commissioners and DPS shall be presented both prior and after the change;
ii. foto terbaru;	116-140	ii. latest photograph;
iii. usia;	116-140	iii. age;
iv. kewarganegaraan;	116-140	iv. citizenship;
v. riwayat pendidikan;	116-140	v. education;
vi. riwayat jabatan, meliputi informasi:		vi. work history, with information on:
(i) nomor dan tanggal akta pengesahan, persetujuan, dan/atau pencatatan dari instansi yang berwenang atas penunjukan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS;	116-140	(i) number and date of deed of ratification, letter of approval and/or record from the relevant authority regarding the appointment as member of the Board of Directors, Board of Commissioners or DPS;
(ii) rangkap jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS (jika ada); dan	116-140	(ii) concurrent position(s) of members of the Board of Directors, Board of Commissioners and DPS (if any); and
(iii) pengalaman dan periode kerja, baik di dalam maupun di luar BUS;	116-140	(iii) prior work experience and period of service, in or outside the BUS;
vii. pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS selama Tahun Buku (jika ada); dan	148-150	vii. education and/or training attended by members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and DPS during the Fiscal Year (if any); and
viii. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali (jika ada) dan nama anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali tersebut;	128-137; 455	viii. financial, management and share ownership relations, and/or family relationship with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or controlling shareholders (if any) and names of the members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or the controlling shareholder;



Keterangan	Halaman Page	Description
(9) profil singkat pejabat eksekutif, yang meliputi susunan, jabatan, dan ringkasan riwayat hidup;	141-145	(9) brief profiles of executive officers, with structure, position and summary curriculum vitae;
(10) jumlah pegawai dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia pegawai dalam Tahun Buku;	146-147	(10) number of employees and employee grouping by education and age in the Fiscal Year;
(11) nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.	167-169	(11) names and address of supporting professionals/institutions.
Dalam hal terdapat lembaga dan/atau profesi penunjang yang memberikan jasa secara berkala kepada BUS, misalnya kantor akuntan publik dan notaris, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan; dan	167-169	In the event of supporting professionals/institutions that provide regular services to the BUS, such as a public accountant firm or notary, should be disclosed information on services provided, commission (fee) paid, and period of assignment; and
(12) penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima BUS, baik yang berskala nasional maupun internasional dalam Tahun Buku terakhir (jika ada), yang meliputi:	14	(12) award and/or certification received by the BUS, at the national and international level, in the last Fiscal Year (if any), that covers:
i. nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	14-16	i. name of award and/or certification;
ii. badan atau lembaga yang memberikan penghargaan dan/atau sertifikasi; dan	14-16	ii. organization/institution that issued the award and/or certification; and
iii. masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (jika ada).	14-16	iii. validity period of award and/or certification (if any).
c) Laporan Direksi	46	c) Report of the Board of Directors
Laporan Direksi paling sedikit meliputi uraian singkat mengenai kinerja BUS yang terdiri atas:		The report of the Board of Directors should at least present brief information on the performance of the BUS, comprising of:
(1) strategi dan kebijakan yang ditetapkan;	51-52	(1) strategy and policies taken;
(2) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan;	53-55	(2) comparison between achievements and targets;
(3) kendala yang dihadapi BUS;	50-51	(3) constraints faced by the BUS;
(4) gambaran tentang prospek usaha;	55-57	(4) overview of business prospects;
(5) penerapan tata kelola BUS;	57-58	(5) implementation of governance at the BUS;
(6) perubahan komposisi anggota direksi dan alasan perubahannya (jika ada);	61	(6) changes in membership composition of the Board of Directors and the reason for such changes (if any);
(7) aktivitas utama;	96	(7) primary activities;
(8) teknologi informasi;	58-59	(8) information technology;
(9) penyaluran pembiayaan kepada nasabah UMKM;	55	(9) financing to customers in the MSME segment;
(10) persentase imbalan penghimpunan dan penyaluran dana;	-	(10) percentage of fees in funding and financing;
(11) perkembangan perekonomian dan target pasar;	48-49	(11) economic development and market target;
(12) jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri;	97-111	(12) business partners and networks, domestic and/or overseas;
(13) jumlah, jenis, dan lokasi jaringan kantor BUS;	97-111	(13) number, type and location of branch offices of BUS;
(14) kepemilikan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha BUS;	158-159	(14) ownership by the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders in the business group of BUS;



Keterangan	Halaman Page	Description
(15) perubahan penting yang terjadi pada BUS dan kelompok usaha BUS dalam tahun yang bersangkutan;	-	(15) significant changes occurring at the BUS and business group of BUS in the current year;
(16) hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan	55-57	(16) prediction of significant future issues; and
(17) sumber daya manusia, meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	146-156	(17) information on human resources, covering number, education level, training and competence development programs attended.
d) Laporan Dewan Komisaris	34	d) Report of the Board of Commissioners
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit meliputi:		The report of the Board of Commissioners should at least covers:
(1) penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan BUS;	36-38	(1) assessment of the performance of the Board of Directors in the management of the BUS;
(2) hasil pengawasan terhadap implementasi strategi BUS;	38-40	(2) supervision on the implementation of strategies of the BUS;
(3) tanggapan atas prospek usaha BUS yang disusun oleh direksi;	41	(3) opinion on the business prospects of BUS as prepared by the Board of Directors;
(4) tanggapan atas penerapan tata kelola BUS;	41-42	(4) opinion on the implementation of governance at the BUS;
(5) perubahan komposisi anggota dewan komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	43	(5) changes in the membership composition of the Board of Commissioners and the reason for such changes (if any); and
(6) frekuensi dan mekanisme pemberian nasihat kepada anggota Direksi.	40	(6) frequency and mechanism for advising the members of the Board of Directors.
2) Informasi Kinerja Keuangan		2) Information on Financial Performance
Informasi kinerja keuangan meliputi analisis dan pembahasan manajemen yang memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lain dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam Tahun Buku, yang paling sedikit meliputi:	179-190	Information on financial performance includes a management discussion and analysis presenting an analysis and discussion of financial statements accounts and other important information with an emphasis on material changes that occurred during the Fiscal Year, which at least includes:
a) tinjauan kinerja per segmen usaha antara lain segmen konsumen, segmen ritel, atau segmen korporasi paling sedikit mengenai:	179-190	a) review of performance by business segments, such as consumer, retail or corporate segments, at least covering:
(1) pendapatan; dan	179-190	(1) revenues; and
(2) profitabilitas;	179-190	(2) profitability;
b) tinjauan kinerja keuangan yang mencakup perbandingan kinerja keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, penjelasan mengenai penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, yang paling sedikit meliputi:		b) review of financial performance, comparing current year financial performance with those in the preceding year, as well as explanation for changes in the accounts and the impact of such changes, covering at least:
(1) penyaluran dana (investasi dan pembiayaan) dan total aset;	191-192	(1) fund disbursement (investment and financing) and total assets;
(2) dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain;	8; 181-190; 193; 203	(2) third party funds and other sources of funding;
(3) ekuitas;	194	(3) equity;
(4) pendapatan, beban, laba/rugi, penghasilan komprehensif lain, dan total laba/rugi komprehensif; dan	194-196	(4) revenues, expenses, profit/loss, other comprehensive income, and total comprehensive profit/loss; and
(5) arus kas;	196-197	(5) cash flows;



Keterangan	Halaman Page	Description
c) analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan;	197-198	c) analysis of earning asset quality and financial ratios;
d) struktur permodalan;	205	d) capital structure;
e) informasi atau fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan publik (jika ada);	206	e) material information or fact subsequent to the date of public accountant report (if any);
f) aspek pemasaran produk dan aktivitas BUS, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	210-211	f) marketing aspects of products and activities of the BUS, containing at least information on marketing strategy and market share;
g) uraian mengenai dividen selama 2 (dua) Tahun Buku terakhir (jika ada), paling sedikit:		g) description of dividend distribution during the last 2 (two) Fiscal Years (if any), disclosing at least:
(1) kebijakan dividen;	212	(1) dividend policy;
(2) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen nonkas;	212	(2) date of payment of cash dividend and/or date of distribution of non-cash dividend;
(3) jumlah dividen per saham, baik berupa kas maupun nonkas;	212	(3) earning per share, cash or non-cash;
(4) jumlah pembayaran dividen per tahun;	212	(4) amount of dividend payment in the year;
(5) perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap BUS dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	217-224	(5) changes in laws and regulations with significant impact to the BUS and the impact thereof to the financial statements (if any); and
(6) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	225	(6) changes in accounting policies, reason for such changes, and the impact thereof to the financial statements (if any);
h) laporan distribusi bagi hasil;	202	h) report of distribution of profit sharing;
i) laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; dan	202	i) report of sources and utilization of zakat and wakaf funds; and
j) laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan.	203	j) report of sources and utilization of social donation funds.
3) Eksposur Risiko dan Permodalan	296	3) Risk exposure and capital
Ruang lingkup eksposur risiko dan permodalan mengacu pada Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	296	The scope of discussions on risk exposure and capital shall refers to the Attachment to this OJK Circular Letter.
4) Tata Kelola	338	4) Governance
a) Informasi tata kelola	338-667	a) Information on governance
Dalam hal BUS mengungkapkan informasi tata kelola sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, ruang lingkup informasi tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.	338-667	In the event that BUS discloses information on governance as an inseparable part of the annual report of published financial statements and information on financial performance, the scope of governance information is in accordance with the provisions of laws and regulations regarding the implementation of good corporate governance for sharia commercial banks and sharia business units as well as regulations of the Financial Services Authority concerning the implementation of governance in providing remuneration for sharia commercial banks and sharia business units.



Keterangan	Halaman Page	Description
b) Laporan Keberlanjutan	668	b) Sustainability Report
(1) Laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.	√	(1) The sustainability report should conform with relevant regulations from OJK on the implementation of sustainable finance for financial services institutions, issuers, and public companies.
Dalam hal BUS menyusun laporan keberlanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, ruang lingkup laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.		In the event that BUS prepares the sustainability report as an inseparable part of the annual report of published financial statements and information on financial performance, the scope of such sustainability report should conform with relevant regulations from OJK on the implementation of sustainable finance for financial services institutions, issuers, and public companies.
(2) Laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan BUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.	668	(2) Social and environmental responsibility report of the BUS in accordance with laws and regulations on social and environmental responsibility for limited liability companies.
Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:		Information on social and environmental responsibility covers management policies, types of programs, and costs expended, among other things in aspects of:
(a) lingkungan hidup;	-	(a) environment;
(b) praktik ketenagakerjaan;	-	(b) labor practices;
(c) praktik kegiatan institusi yang sehat;	-	(c) sound institutional practices;
(d) konsumen; dan	-	(d) consumer; and
(e) pengembangan masyarakat.	-	(e) community development.
Dalam hal BUS menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (sustainability report), BUS dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.	√	In the event that BUS presents information on social and environmental responsibility in a separate report such as in a social and environmental responsibility report or a sustainability report, the BUS is exempted from disclosing information regarding social and environmental responsibility in the annual report of published financial statements and information on financial performance.
5) Laporan Keuangan yang Telah Diaudit	672	5) Audited Financial Statements
Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi:	672	The financial statements that have been audited by a public accountant and public accountant firm registered with the OJK, which covers:
a) laporan posisi keuangan;	√	a) statement of financial position;
b) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;	√	b) statement of profit or loss and other comprehensive income;
c) laporan perubahan ekuitas;	√	c) statement of changes in equity;
d) laporan arus kas; dan	√	d) statement of cash flows; and
e) catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi.	√	e) notes to the financial statements, including information on commitments and contingencies.



Keterangan	Halaman Page	Description
6) Informasi Terkait dengan Kelompok Usaha BUS		6) Information related to the business group of BUS
Bagi BUS yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, menambahkan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan dengan:	163-166	For BUS that is part of a business group and/or that have a Subsidiary Entity, the following information should be included in the annual report of published financial statements and information on financial performance:
a) struktur kelompok usaha BUS yang meliputi:		a) structure of BUS business group, covering:
(1) struktur kelompok usaha BUS, yang antara lain terdiri dari BUS, Entitas Anak, perusahaan terelasi, Entitas Induk sampai dengan <i>ultimate shareholder</i> ;	162-166	(1) structure of BUS business group, comprising the BUS, Subsidiary Entity, Related Entity, Parent Entity, and up to the ultimate shareholder;
(2) struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha BUS; dan	-	(2) management relationship among companies in the BUS business group; and
(3) pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (<i>shareholders acting in concert</i>).	-	(3) shareholders acting in concert
Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan BUS, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian;	-	Shareholders acting in concert refer to individual or institutional shareholders with a common objective of controlling the BUS, with or without a formal agreement;
b) transaksi antara BUS dengan pihak berelasi dalam kelompok usaha BUS, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:	213-216	b) transactions between the BUS and related parties in the BUS business group, with consideration of the followings:
(1) informasi transaksi dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan BUS maupun yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha BUS di bidang keuangan;	213-216	(1) information on transactions with related parties, whether conducted by BUS or by any entity in the BUS business group in the financial sector;
(2) pihak berelasi adalah pihak-pihak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan;	213-216	(2) related parties are parties defined as such in relevant financial accounting standards;
(3) jenis transaksi dengan pihak berelasi, antara lain:	213-216	(3) types of transaction with related parties, including:
(a) kepemilikan silang (<i>cross shareholding</i>);	√	(a) cross shareholding;
(b) transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha lain;	√	(b) transactions by a business group performed in the interest of another business group;
(c) pengelolaan likuiditas jangka pendek dalam kelompok usaha;	√	(c) short-term liquidity management in the business group;
(d) penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh entitas lain dalam satu kelompok usaha;	√	(d) funding provided to, or received by, another entity in a business group;
(e) eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen, dan kontinjensi; dan	√	(e) exposure to a majority shareholder in the form of, among others, loans, commitments and contingencies; and
(f) pembelian, penjualan, dan/atau penyewaan aset dengan entitas lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan <i>repurchase agreement</i> (<i>repo</i>);	√	(f) transactions for the purchase, sale and/or rental of assets with another entity in the business group, including transactions with repurchase agreement (<i>repo</i>);



Keterangan	Halaman Page	Description
c) transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan oleh setiap entitas dalam kelompok usaha BUS di bidang keuangan;	213-216	c) transactions with related parties conducted by each entity in the BUS business group in the financial sector;
d) penyediaan dana, komitmen, atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan BUS kepada nasabah dan/atau pihak yang telah memperoleh penyaluran dana dari BUS;	213-216	d) the provision of funding, commitments or equivalent facilities from an entity in the BUS business group to the customers and/or parties that already received financing from the BUS;
e) adanya larangan, batasan, dan/atau hambatan signifikan lain untuk melakukan transfer dana atau untuk pemenuhan modal yang dipersyaratkan oleh otoritas (<i>regulatory capital</i>) antara BUS dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha; dan	-	e) existence of a prohibition, restriction, and/or other significant constraint to transfer funds or to fulfil the required regulatory capital between BUS and other entities in a business group; and
f) nama dan alamat Entitas Anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana BUS memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi BUS tersebut (jika ada).	162-166	f) name and address of Subsidiary Entity, associated entities and joint venture entities where the BUS have a common control with the entity, along with the percentage of share-ownership, line of business, total assets and operational status of the BUS (if any).
c. BUS yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik menambahkan ruang lingkup informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.	√	c. The BUS that is an Issuer and/or a Public Company should include in addition the scope of information in accordance with the provisions of OJK Regulation regarding the annual report of issuer or public company.



Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

SEOJK Reference No. 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Description
I. Ketentuan Umum		I. General Provision
1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	✓	1. In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:
a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik.	✓	a. The Annual Report is a report on the Board of Directors and Board of Commissioners accountability in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) fiscal year to the general meeting of shareholders prepared based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Annual Report of issuers or public companies
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.	✓	b. Issuers are parties who make public offerings
c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	✓	c. A Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority
d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.	✓	d. A Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Publically- listed Company
e. Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.	✓	e. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business
f. Direksi:	✓	f. Board of Directors:
1) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	✓	1) For an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and
2) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai badan hukum tersebut.	✓	2) For an Issuer or a Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that carries out the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.
g. Dewan Komisaris:	✓	g. Board of Commissioners:



Keterangan		Halaman Page	Description
1)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	√	1) For an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and
2)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut.	√	2) For the Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.
h.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS:	√	h. General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:
1)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan	√	1) For an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and
2)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut.	√	2) For an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that has authority that is not given to any other body that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the legislation and/or articles of association governing the legal entity.
2.	Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	√	2. The Annual Report of Issuers or Public Companies is an important source of information for investors or shareholders as one of the basic considerations in making investment decisions and a means of supervision of Issuers or Public Companies.
3.	Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.	√	3. Along with the development of the capital market and the increasing need for information disclosure by investors or shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to present quality, accurate, and accountable information through the Annual Reports of Issuers or Public Companies.
4.	Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.	√	4. Annual Reports that are prepared regularly and informatively can provide convenience for investors or shareholders and stakeholders in obtaining the required information.
5	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.	√	5 This Financial Services Authority Circular is a guideline for Issuers or Public Companies that must be applied in preparing Annual Reports and Sustainability Reports.
II.	Bentuk Laporan Tahunan		II. Format of Annual Report
1.	Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.	√	1. Annual Report should be presented in the printed format and in electronic document copy..



Keterangan	Halaman Page	Description
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	√	2. The printed version of the Annual Report should be printed on light-colored paper of fine quality, in A4 size, bound and can be reproduced in good quality.
3. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.	√	3. The Annual Report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand.
4. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf.	√	4. The Annual Report presented in electronic document format is the Annual Report converted into pdf format.
III. Isi Laporan Tahunan		III. Content Of Annual Report
1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:		1. Annual Report should contain at least the following information:
a. Ikhtisar data keuangan penting;	√	a. Summary of key financial information;
b. Informasi saham (jika ada);	√	b. Stock information (if any);
c. Laporan Direksi;	√	c. The Board of Directors report;
d. Laporan Dewan Komisaris;	√	d. The Board of Commissioners report;
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik;	√	e. Profile of Issuer or Public Company;
f. Analisis dan pembahasan manajemen;	√	f. Management discussion and analysis;
g. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	√	g. Corporate governance applied by the Issuer or Public Company;
h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	Buku terpisah Separate book	h. Corporate social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;
i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	√	i. Audited annual report; and
j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan;	√	j. Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the Annual Report;
2. Uraian Isi Laporan Tahunan		2. Description of Content of Annual Report
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	8	a. Summary of Key Financial Information Summary of Key Financial Information contains financial information presented in comparison with previous 3 (three) fiscal years or since commencement of business if the Issuers or the Public Company commencing the business less than 3 (three) years, at least contain:
1) pendapatan/penjualan;	8	1) income/sales;
2) laba bruto;	8	2) gross profit;
3) laba (rugi);	8	3) profit (loss);
4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	8	4) total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest;
5) total laba (rugi) komprehensif;	9	5) total comprehensive profit (loss);
6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	9	6) total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non controlling interest;
7) laba (rugi) per saham;	9	7) earning (loss) per share;
8) jumlah aset;	8	8) total assets;
9) jumlah liabilitas;	8	9) total liabilities;
10) jumlah ekuitas;	8	10) total equities;



Keterangan		Halaman Page	Description	
11)	rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	9	11)	profit (loss) to total assets ratio;
12)	rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	9	12)	profit (loss) to equities ratio;
13)	rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan;	9	13)	profit (loss) to income ratio;
14)	rasio lancar;	9	14)	current ratio;
15)	rasio liabilitas terhadap ekuitas;	9	15)	liabilities to equities ratio;
16)	rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	9	16)	liabilities to total assets ratio; and
17)	informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya;	9	17)	other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and type of industry;
b.	Informasi Saham Informasi Saham (jika ada) paling sedikit memuat:	11	b.	Stock Information Stock Information (if any) at least contains:
1)	saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	-	1)	shares issued for each three-month period in the last 2 (two) fiscal years (if any), at least covering:
a)	jumlah saham yang beredar;		a)	number of outstanding shares;
b)	kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	-	b)	market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares listed on;
c)	harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	-	c)	highest share price, lowest share price, closing share price at the Stock Exchange where the shares listed on; and
d)	volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	-	d)	share volume at the Stock Exchange where the shares listed on;
Informasi pada huruf a) diungkap oleh Emiten yang merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;		-	Information in point a) should be disclosed by the Issuer, the public company whose shares is listed or not listed in the Stock Exchange;	
Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek;		-	Information in point b), point c), and point d) only be disclosed if the Issuer is a public company whose shares is listed in the Stock Exchange;	
2)	dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	12	2)	in the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, then the share price referred to in point 1), should be added with explanation on:
a)	tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	12	a)	date of corporate action;
b)	rasio pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham	12	b)	stock split ratio, reverse stock, dividend, bonus shares, and change in par value of shares;
c)	jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan	12	c)	number of outstanding shares prior to and after corporate action; and
d)	jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan	12	d)	The number of convertible securities exercised (if any); and
e)	harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	12	e)	share price prior to and after corporate action;



Keterangan		Halaman Page	Description
3)	dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>), dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut; dan	-	3) in the event that the company's shares were suspended and/or delisted from trading during the year under review, then the Issuers or Public Company should provide explanation on the reason for the suspension and/or delisting; and
4)	dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut;	-	4) in the event that the suspension and/or delisting as referred to in point 3) was still in effect until the date of the Annual Report, then the Issuer or the Public Company should also explain the corporate actions taken by the company in resolving the suspension and/or delisting;
c.	Laporan Direksi Laporan Direksi paling sedikit memuat:	46	c. The Board of Directors Report The Board of Directors Report should at least contain the following items:
1)	uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi:	50	1) the performance of the Issuer or Public Company, at least covering:
a)	strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	51-52	a) strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;
b)	peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	53	b) Role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;
c)	proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	53	c) Process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;
d)	perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	53-55	d) comparison between achievement of results and targets; and
e)	kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	50-51	e) challenges faced by the Issuer or Public Company;
2)	gambaran tentang prospek usaha;	55-57	2) description on business prospects;
3)	penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan	57-58	3) implementation of good corporate governance by Issuer or Public Company; and
4)	perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada);	61	4) changes in the composition of the Board of Directors and the reason behind (if any);
d.	Laporan Dewan Komisaris Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:	34	d. The Board of Commissioners Report The Board of Commissioners Report should at least contain the following items:
1)	Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik;	36-38	1) Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the Issuer or the Public Company;
2)	Pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	38-40	2) Supervision on the implementation of the strategy of the Issuer or Public Company;



Keterangan		Halaman Page	Description	
3)	Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi;	41	3)	View on the business prospects of the Issuer or Public Company as established by the Board of Directors;
4)	Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	41-42	4)	View on the implementation of the corporate governance by the Issuer or Public Company;
5)	Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	43	5)	Changes in the composition of the Board of Commissioners and the reason behind (if any); and
6)	Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi;	40	6)	Frequency and manner of providing advice to members of the Board of Directors;
e.	Profil Emiten atau Perusahaan Publik Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:	68	e.	Profile of the Issuer or Public Company Profile of the Issuer or Public Company should cover at least:
1)	Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	70; 74	1)	Name of Issuer or Public Company, including change of name, reason of change, and the effective date of the change of name during the year under review;
2)	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	71	2)	access to Issuer or Public Company, including branch office or representative office, where public can have access of information of the Issuer or Public Company, which include:
a)	Alamat;	71	a)	Address;
b)	Nomor telepon;	71	b)	Telephone number;
c)	Nomor faksimile;	71	c)	Facsimile number;
d)	Alamat surat elektronik; dan	71	d)	E-mail address; and
e)	Alamat Situs Web;	71	e)	Website address;
3)	Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	72-75	3)	Brief history of the Issuer or Public Company;
4)	Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;	78-79	4)	Vision and mission of the Issuer or Public Company;
5)	Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	80-96	5)	Line of business according to the latest Articles of Association, and types of products and/or services produced;
6)	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik;	97-111	6)	Operational area of the Issuer or Public Company
7)	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;	112	7)	Structure of organization of the Issuer or Public Company in chart form, at least 1 (one) level below the Board of Directors, with the names and titles;
8)	daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan	169	8)	List of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;
9)	Profil Direksi, paling sedikit memuat:	128-137	9)	The Board of Directors profiles include:
a)	Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	128-137	a)	Name and short description of duties and functions;
b)	Foto terbaru;	128-137	b)	Latest photograph;
c)	Usia;	128-137	c)	Age;



Keterangan		Halaman Page	Description
d)	Kewarganegaraan;	128-137	d) Citizenship;
e)	Riwayat pendidikan;	128-137	e) Education;
f)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:		f) history position, covering information on:
(1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	128-137	(1) Legal basis for appointment as member of the Board of Directors to the said Issuer or Public Company;
(2)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	128-137; 447-448	(2) Dual position, as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committee, and other position (if any); and
(3)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	128-137	(3) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
g)	hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi;	128-137; 455	g) Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and
h)	Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	61	h) Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;
10)	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	122	10) The Board of Commissioners profiles, at least include:
a)	Nama;	122-127	a) Name;
b)	Foto terbaru;	122-127	b) Latest photograph;
c)	Usia;	122-127	c) Age;
d)	Kewarganegaraan;	122-127	d) Citizenship;
e)	Riwayat pendidikan;	122-127	e) Education;
f)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:		f) History position, covering information on:
(1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	122-127	(1) Legal basis for the appointment as member of the Board of Commissioners who is not Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;
(2)	Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	122-127	(2) Legal bases for the first appointment as member of the Board of Commissioners who also Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;



Keterangan		Halaman Page	Description
(3)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	122-127	(3) Dual position; as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committee and other position (if any); and
(4)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	122-127	(4) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
g)	Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafilias	122-127; 454	g) Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter;
h)	Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada);	433; 434	h) Statement of independence of Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has been appointed more than 2 (two) periods (if any);
i)	Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	43	i) Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;
11)	Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	-	11) In the event that there were changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors occurring between the period after year-end until the date the Annual Report submitted, then the last and the previous composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall be stated in the Annual Report;
12)	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku;	146-148	12) Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form.
13)	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:	158	13) Names of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, including:
a)	Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	158	a) Shareholders having 5% (five percent) or more shares of Issuer or Public Company;
b)	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan	158-159	b) Commissioners and Directors who own shares of the Issuers or Public Company; and



Keterangan		Halaman Page	Description	
c)	Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham emiten atau perusahaan publik;	158	c)	Groups of public shareholders, or groups of shareholders, each with less than 5% (five percent) ownership shares of the Issuers or Public Company;
14)	Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	158-159	14)	The percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
15)	Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	159	15)	Number of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, based on:
a)	Kepemilikan institusi lokal;	159	a)	Ownership of local institutions;
b)	Kepemilikan institusi asing;	159	b)	Ownership of foreign institutions;
c)	Kepemilikan individu lokal; dan	159	c)	Ownership of local individual; and
d)	Kepemilikan individu asing;	159	d)	Ownership of foreign individual;
16)	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	157	16)	Information on major shareholders and controlling shareholders the Issuers of Public Company, directly or indirectly, and also individual shareholder, presented in the form of scheme or diagram;
17)	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada);	163-166	17)	Name of subsidiaries, associated companies, joint venture controlled by Issuers or Public Company, with entity, percentage of stock ownership, line of business, total assets and operating status of the Issuers of Public Company (if any);
	Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut;			For subsidiaries, include the addresses of the said subsidiaries;
18)	Kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada);	160	18)	Chronology of share listing, number of shares, par value, and bid price from the beginning of listing up to the end of the financial year, and name of Stock Exchange where the Issuers of Public Company shares are listed;
19)	Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	161	19)	Other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);
20)	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya meliputi:	167	20)	Information on the use of a Public Accountant (AP) and a Public Accounting firm (KAP) services and their networks/associations/alliances include:



Keterangan		Halaman Page	Description
a)	nama dan alamat;	167	a) name and address;
b)	periode penugasan;	167	b) period of assignment;
c)	informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;	167	c) informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;
d)	biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan	167	d) Audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and
e)	dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan	167	e) In the event that AP and KAP and their network/association/ alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and
21)	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP;	167-169	21) Name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP
f.	Analisis dan Pembahasan Manajemen Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	172	f. Management Discussion and Analysis Management Analysis and Discussion Annual should contain discussion and analysis on financial statements and other material information emphasizing material changes that occurred during the year under review, at least including:
1)	Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	179-190	1) Operational review per business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company including:
a)	Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	179-190	a) Production, including process, capacity, and growth;
b)	Pendapatan/penjualan; dan	179-190	b) Income/sales; and
c)	Profitabilitas;	179-190	c) Profitability;
2)	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	191	2) comprehensive financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) fiscal years, and explanation on the causes and effects of such changes, among others concerning:
a)	Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	191-192	a) Current assets, non-current assets, and total assets;
b)	Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	192-194	b) Short term liabilities, long term liabilities, total liabilities;
c)	Ekuitas;	194	c) Equities;
d)	Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	194-196	d) Sales/operating revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive revenues, and total comprehensive profit (loss); and
e)	Arus kas	196-197	e) Cash flows
3)	Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	203-204	3) The capacity to pay debts by including the computation of relevant ratios;
4)	Tingkat kolektibilitas piutang emiten atau perusahaan publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	204	4) Accounts receivable collectability of the Issuer or Public Company, including the computation of the relevant ratios;



Keterangan		Halaman Page	Description
5)	Struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure</i>) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	205	5) Capital structure and management policies concerning capital structure, including the basis for determining the said policy;
6)	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	205	6) discussion on material ties for the investment of capital goods, including the explanation on at least:
a)	Tujuan dari ikatan tersebut;	-	a) The purpose of such ties;
b)	Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	-	b) Source of funds expected to fulfill the said ties;
c)	Mata uang yang menjadi denominasi; dan	-	c) Currency of denomination; and
d)	Langkah yang direncanakan emiten atau perusahaan publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	-	d) Steps taken by the Issuer of Public Company to protect the position of a related foreign currency against risks;
7)	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	205-206	7) Discussion on investment of capital goods which was realized in the last fiscal year, at least include:
a)	Jenis investasi barang modal;	205-206	a) Type of investment of capital goods;
b)	Tujuan investasi barang modal; dan	205-206	b) Objective of the investment of capital goods; and
c)	Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	205-206	c) Value of the investment of capital goods;
8)	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	206	8) Material Information and facts that occurring after the date of the accountant's report (if any);
9)	Prospek usaha dari emiten atau perusahaan publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	206-207	9) Information on the prospects of the Issuer or the Company in connection with industry, economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source;
10)	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	208-209	10) Comparison between target/projection at beginning of year and result (realization), concerning:
a)	Pendapatan/penjualan;	209	a) Income/sales;
b)	Laba (rugi);	209	b) Profit (loss);
c)	Struktur modal (<i>capital structure</i>);	209	c) Capital structure; or
d)	Kebijakan dividen; atau	209	d) Dividend policy; or
e)	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	209	e) Others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
11)	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	209	11) Target/projection at most for the next one year of the Issuer or Public Company, concerning:
a)	Pendapatan/penjualan;	209	a) Income/sales;
b)	Laba (rugi);	209	b) Profit (loss);
c)	Struktur modal (<i>capital structure</i>);	209	c) Capital structure; or
d)	Kebijakan dividen; atau	209	d) Dividend policy;



Keterangan		Halaman Page	Description
e)	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	209	e) Or others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
12)	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	210-211	12) Marketing aspects of the company's products and/or services the Issuer or Public Company, among others marketing strategy and market share;
13)	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	212	13) Description regarding the dividend policy during the last 2 (two) fiscal years, at least:
a)	Kebijakan dividen;	212	a) Dividend policy;
b)	Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	212	b) The date of the payment of cash dividend and/or date of distribution of non-cash dividend;
c)	Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	212	c) Amount of cash per share (cash and/or non cash); and
d)	Jumlah dividen per tahun yang dibayar;	212	d) Amount of dividend per year paid;
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	212	Disclosure of information can be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.
14)	Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	216	14) Use of proceeds from Public Offerings, under the condition of:
a)	Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	216	a) during the year under review, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year end should be disclosed; and
b)	Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	-	b) In the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority on the Report of the Utilization of Proceeds from Public Offering, then Issuer should explain the said changes;
15)	Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	213-214	15) Material information (if any), among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring, transactions with related parties and transactions with conflict of interest that occurred during the year under review, among others include:
a)	Tanggal, nilai, dan objek transaksi;	213-214	a) Transaction date, value, and object;
b)	Nama pihak yang melakukan transaksi;	215	b) Name of transacting parties;
c)	Sifat hubungan Afiliasi (jika ada);	215	c) Nature of related parties (if any);
d)	Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan	215	d) Description of the fairness of the transaction; and
e)	Pemenuhan ketentuan terkait;	215	e) Compliance with related rules and regulations;



Keterangan	Halaman Page	Description
f) dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:		f) In the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:
1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arms-length principle</i>); dan	216	1) A statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and
2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arms-length principle</i>);	214	2) The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle;
g) Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	-	g) For affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out to generate operating income, and run regularly, repeatedly, and/or continuously;
h) Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;	-	h) For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;
i) Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	-	i) In the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this shall be disclosed;
16) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	217-224	16) Changes in regulation which have a significant effect on the Issuer or Public Company and impacts on the company (if any); and



Keterangan		Halaman Page	Description
17)	Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	225	17) Changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement (if any);
g.	Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	338	g. Corporate Governance of the Issuer or Public Company Corporate Governance of the Issuer or Public Company contains at least:
1)	RUPS, paling sedikit memuat:	378	1) GMS, at least contains:
a)	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	383	a) Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include:
1)	keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan	383-401	1) Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year realized in the fiscal year; and
2)	keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;	-	2) Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized and the reasons for not realizing them;
b)	dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	381	b) In the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;
2)	Direksi, mencakup antara lain:	434	2) The Board of Directors, covering:
a)	Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	436-438; 444-447	a) The tasks and responsibilities of each member of the Board of Directors;
b)	Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Direksi;	440	b) Statement that the Board of Directors has already have board manual or charter;
c)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk tingkat kehadiran dalam RUPS;	481-495; 496-499	c) Policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;
d)	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:		d) Training and/or competency development of members of the Board of Directors:
(1)	kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan	451; 449	(1) Policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and



Keterangan		Halaman Page	Description
(2)	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);	149-150	(2) Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);
e)	penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	452	e) The Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain:
(1)	prosedur penilaian kinerja; dan	452	(1) Performance appraisal procedures; and
(2)	kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	452-453	(2) The criteria used are performance achievements during the fiscal year, are competence and attendance at meetings; and
f)	dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	-	f) In the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.
3)	Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	415	3) The Board of Commissioners, among others include:
a)	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	416-418	a) Duties and responsibilities of the Board of Commissioners;
b)	Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris;	419	b) Statement that the Board of Commissioner has already have the board manual or charter;
c)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk tingkat kehadiran dalam RUPS;;	478-480; 496-499	c) Policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS;
d)	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:		d) Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:
(1)	kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan	427; 424	(1) Policy on competency training and/or development of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and
(2)	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);	149	(2) Competency training and/or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);
e)	penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit memuat:	461	e) The assessment on the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners and the implementation, at least covering:



Keterangan		Halaman Page	Description
(1)	Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	461; 465	(1) procedure for the implementation of performance assessment;
(2)	Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	461-463; 465-468	(2) Criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; and
(3)	Pihak yang melakukan penilaian;	464; 468	(3) Assessor;
f)	penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	428	f) Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:
(1)	prosedur penilaian kinerja; dan	428	(1) Performance appraisal procedures; and
(2)	kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	429	(2) The criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings;
4)	Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	470	4) The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:
a)	prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan	470	a) Nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
b)	prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	470	b) Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:
(1)	prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;	471-472	(1) Procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;
(2)	struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan	472	(2) The remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and
(3)	besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	472	(3) The amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners
5)	Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	116; 402	5) Sharia Supervisory Board, for Issuer or Public Company that conduct business based on sharia law, as stipulated in the articles of association, at least containing:



Keterangan		Halaman Page	Description
a)	nama;	116-121; 406	a) name;
b)	dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah;	116-121; 406	b) Legal basis for the appointment of the sharia supervisory board;
c)	periode penugasan dewan pengawas syariah;	406	c) Period of assignment of the sharia supervisory board;
d)	tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan	403-405	d) duty and responsibility of Sharia Supervisory Board; and
e)	frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	28-29; 410-411	e) frequency and procedure in providing advice and suggestion, as well as the compliance of Sharia Principles by the Issuer or Public Company in the Capital Market;
6)	Komite Audit, mencakup antara lain:	502	6) Audit Committee, among others covering:
a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	508-510	a) Name and position in the committee;
b)	Usia;	508-510	b) Age;
c)	Kewarganegaraan;	508-510	c) Citizenship;
d)	Riwayat pendidikan;	508-510	d) Education background;
e)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:		e) History of position; including:
(1)	Dasar hukum untuk pengangkatan sebagai anggota komite;	506-507; 508-510	(1) Legal basis for appointment as committee member;
(2)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	508-510	(2) Dual position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and
(3)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	508-510	(3) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f)	Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;	507-508	f) Period and terms of office of the member of Audit Committee;
g)	Pernyataan independensi Komite Audit;	510-511	g) statement of independence of the Audit Committee;
h)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	150; 513	h) Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);
i)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;	511-513	i) Policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings; and
j)	Pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Komite Audit;	514	j) the activities of the Audit Committee in the year under review, in accordance with the Audit Committee Charter;
7)	Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	515	7) The nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing:
a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	519-520	a) Name and position in committee membership;
b)	Usia;	519-520	b) Age;



Keterangan		Halaman Page	Description
c)	Kewarganegaraan;	519-520	c) Nationality;
d)	Riwayat pendidikan;	519-520	d) Educational history;
e)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:		e) Position history, including information on:
(1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	519-520	(1) Legal basis for appointment as committee member;
(2)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	519-520	(2) Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and
(3)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	519-520	(3) Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;
f)	Periode dan masa jabatan anggota komite;	518-519	f) Period and term of office of the committee members;
g)	Pernyataan independensi komite;	521	g) Statement of committee independence;
h)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	523; 151	h) Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);
i)	Uraian tugas dan tanggung jawab;	517-518	i) Description of duties and responsibilities;
j)	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite;	517	j) A statement that it has a guideline or charter;
k)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	522-523	k) Policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;
l)	uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	524	l) Brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and
m)	dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:	-	m) In the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:
(1)	alasan tidak dibentuknya komite; dan	-	(1) Reasons for not forming the committee; and
(2)	pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	-	(2) The party carrying out the nomination and remuneration function;
8)	Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	536-619	8) Other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and tasks of the Board of Directors (if any) and / or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, the least contains:
a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	530-532	a) Name and position in the Committee;
b)	Usia;	530-532	b) Age;



Keterangan		Halaman Page	Description
c)	Kewarganegaraan;	530-532	c) Citizenship;
d)	Riwayat pendidikan;	530-532	d) Education background;
e)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:		e) History of position, including:
(1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	530-532	(1) Legal basis for the appointment as member of the committee;
(2)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	530-532	(2) Dual position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and
(3)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	530-532	(3) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f)	Periode dan masa jabatan anggota komite;	529	f) Period and terms of office of the member of Audit Committee;
g)	Pernyataan independensi komite;	532-533	g) Statement of committee independence;
h)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	535; 152	h) Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); and
i)	Uraian tugas dan tanggung jawab;	528	i) Description of duties and responsibilities;
j)	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite;	526	j) A statement that the committee has had guidelines or charters;
k)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	533-535	k) Policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and
l)	uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	535	l) A brief description of the committee's activities for the fiscal year;
9)	Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:	620	9) Corporate Secretary, including:
a)	nama;	620	a) name;
b)	domisili;	620	b) domicile;
c)	riwayat jabatan, meliputi informasi:		c) history of position, including:
(1)	dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan	620	(1) legal basis for the appointment as Corporate Secretary; and
(2)	pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	620	(2) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
d)	riwayat pendidikan;	620	d) education background;
e)	pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan	153	e) education and/or training during the year under review; and



Keterangan		Halaman Page	Description	
f)	uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;	622-623	f)	brief description on the implementation of duties of the Corporate Secretary in the year under review;
10)	Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	624	10)	Internal Audit Unit, among others including:
a)	Nama kepala Unit Audit Internal;	626-627	a)	Name of Head of Internal Audit Unit;
b)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:		b)	History of position, including:
(1)	Dasar hukum penunjukan sebagai Kepala Audit Internal; dan	626-627	(1)	Legal basis for the appointment as Head of Internal Audit Unit; and
(2)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	626-627	(2)	Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
c)	Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	626	c)	Qualification or certification as internal auditor (if any);
d)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku;	153-154	d)	Education and/or training during the year under review;
e)	Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;	625	e)	Structure and position of Internal Audit Unit;
f)	Uraian tugas dan tanggung jawab;	628-629	f)	Description of duties and responsibilities;
g)	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Unit Audit Internal; dan	624	g)	Statement that the Internal Audit Unit has already have Internal Audit Unit charter; and
h)	Uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku;	629	h)	Brief description on the implementation of duty of Internal Audit Unit during the year under review;
11)	Uraian mengenai sistem pengendalian internal (<i>internal control</i>) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	631	11)	Description on internal control system adopted by the Issuer or Public Company, at least covering:
a)	Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan	633-534	a)	Financial and operational control, and compliance to the other prevailing rules; and
b)	Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;	635	b)	Review on the effectiveness of internal control systems;
c)	Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	636	c)	Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;
12)	Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	259	12)	Risk management system implemented by the company, at least includes:
a)	Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	258-262	a)	General description about the company's risk management system the Issuer or Public Company;
b)	Jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan	278-336	b)	Types of risk and the management; and



Keterangan		Halaman Page	Description
c)	Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	274-275	c) Review the effectiveness of the risk management system applied by the Issuer or Public Company;
d)	Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	276	d) Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;
13)	Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:	646	13) Legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:
a)	Pokok perkara/gugatan;	646-647	a) Substance of the case/claim;
b)	Status penyelesaian perkara/gugatan; dan	646-647	b) Status of settlement of case/claim; and
c)	Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	646-647	c) Potential impacts on the condition of the Issuer or Public Company;
14)	Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	648	14) information about administrative sanctions imposed to Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the Capital Market Authority and other authorities during the last fiscal year (if any);
15)	Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	652	15) information about codes of conduct of the Issuer or Public Company, includes:
a)	Pokok-pokok kode etik;	652	a) Key points of the code of conduct;
b)	Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	652-653	b) Socialization of the code of conduct and enforcement; and
c)	Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	653	c) Statement that the code of conduct is applicable for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the Issuer of Public Company;
16)	Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ESOP</i>); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ESOP</i>), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:	213	16) A brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program employee stock ownership (ESOP);
a)	jumlah saham dan/atau opsi;	-	a) Number of shares and/or options;
b)	jangka waktu pelaksanaan;	-	b) Implementation period;



Keterangan		Halaman Page	Description
c)	persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	-	c) Requirements for eligible employees and/or management; and
d)	harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;	-	d) Exercise price or determination of exercise price;
17)	Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:	456	17) A brief description of the information disclosure policy regarding:
a)	Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan	456	a) Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and
b)	Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	456	b) Implementation of the policy;
18)	Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:	664	18) Description of whistleblowing system at the Issuer or Public Company (if any), among others include:
a)	Cara penyampaian laporan pelanggaran;	665	a) Mechanism for violation reporting;
b)	Perlindungan bagi pelapor;	655	b) Protection for the whistleblower;
c)	Penanganan pengaduan;	655	c) Handling of violation reports;
d)	Pihak yang mengelola pengaduan; dan	655	d) Unit responsible for handling of violation report; and
e)	Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:		e) Results from violation report handling, at least includes:
(1)	Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	655	(1) Number of complaints received and processed during the fiscal year; and
(2)	Tindak lanjut pengaduan;	655	(2) Follow up of complaints;
19)	Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	654	19) A description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:
a)	program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i> , suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan	654-667	a) Programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Issuers or Public Companies; and
b)	pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	657	b) Anti-corruption training/ socialization to employees of Issuers or Public Companies;
20)	Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	355-375	20) Implementation of the Guidelines of Corporate Governance for Public Companies for Issuer issuing Equity-based Securities or Public Company, including:
a)	pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	355-375	a) statement regarding recommendation that have been implemented; and/or
b)	penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);	-	b) description of recommendation that have not been implemented, along with the reason and alternatives of implementation (if any);



Keterangan		Halaman Page	Description
h.	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	668-671	h. Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company
1)	Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	Buku Terpisah Separate Books	1) The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at least includes:
a)	penjelasan strategi keberlanjutan;	-	a) Explanation of the sustainability strategy;
b)	ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);	-	b) Overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental);
c)	profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	-	c) Brief profile of the Issuer or Public Company;
d)	penjelasan Direksi;	-	d) Explanation of the Board of Directors;
e)	tata kelola keberlanjutan;	-	e) Sustainability governance;
f)	kinerja keberlanjutan;	-	f) Sustainability performance;
g)	verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;	-	g) Written verification from an independent party, if any;
h)	lembar umpan balik (<i>feedback</i>) untuk pembaca, jika ada; dan	-	h) Feedback sheet for readers, if any; and
i)	anggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya;	-	i) The response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback;
2)	Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	√	2) The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;
3)	Informasi Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) pada angka 1) dapat:	√	3) Information on the Sustainability Report in number 1) can:
a)	diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau	√	a) Disclosed in other relevant sections outside the Social and Environmental Responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report; and/or



Keterangan		Halaman Page	Description
b)	merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik;	√	b) Refers to other sections outside the Social and Environmental Responsibility section by still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company;
4)	Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan;	√	4) The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report;
5)	Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:	√	5) In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:
a)	memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan	√	a) Contains all the information as referred to in number 1); and
b)	disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	√	b) Prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;
6)	Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan	√	6) In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the Social and Environmental Responsibility section contains information that information on Social and Environmental Responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report; and
7)	Penyampaian Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.	√	7) Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the Annual Report.



Keterangan		Halaman Page	Description	
i	Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit	672	i	Audited Annual Financial Statement
	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek; dan	672		Financial Statements included in Annual Report should be prepared in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia and audited by an Accountant. The said financial statement should be included with statement of responsibility for financial report as stipulated in the legislations in the Capital Markets sector governing the responsibility of the Board of Directors on the financial report or the legislations in the Capital Markets sector governing the periodic reports of securities company in the event the Issuer is a Securities Company; and
j	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan	66-67	j	Letter of Statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the Responsibility for Annual Reporting
	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	66-67		Letter of statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting should be prepared according to the format of letter of statement of member of Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting as attached in the Attachment, which is an integral part of this Circulation Letter of the Financial Services Authority.

Creating New Growth Landscape for Sustainable Profitability

 **Bank Muamalat**
Pertama Murni Syariah

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Muamalat Tower
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940

T: (+62 21) 8066 6000
F: (+62 21) 8066 6001

www.bankmuamalat.co.id